Danantara Indonesia

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Inovasi Untuk Solusi

2025

ANNUAL REPORT

LAPORAN TAHUNAN 2024

Inovasi Untuk Solusi

Bergerak, Berlari, Melesat Hadirkan Karya Terbaik

Leap Forward, Sprint Ahead, Shine: Presenting Our Best



Laporan Tahunan **2024** Annual Report

Penjelasan Tema
Theme Explanation

Kegigihan Hutama Karya dalam mengatasi setiap tantangan melalui penajaman strategi serta konsistensi di bidang penerapan prinsip ESG, berhasil mengantarkan Hutama Karya pada peningkatan pencapaian kinerja, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun tata kelola. Melalui implementasi strategi yang adaptif dan fokus pada efisiensi operasional, Perseroan berhasil mencatat sejumlah pencapaian penting yang menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Kinerja pemasaran menunjukan posisi yang kokoh dengan perolehan kontrak baru sebesar Rp34,84 triliun yang didominasi oleh portofolio jalan dan jembatan, hal ini selaras dengan *champion segment* Perseroan. Selain itu, secara konsolidasi keuangan Perseroan menunjukan kinerja yang solid dengan pencatatan pendapatan sebesar Rp30,25 triliun atau tumbuh 12,35% yoy.

Hutama Karya's determination to overcome challenges through strategic refinement and consistent adherence to ESG principles has led to significant performance improvements across economic, social, and governance aspects. Through the implementation of an adaptive strategy and a focus on operational efficiency, the Company has successfully achieved several key milestones that serve as the foundation for sustainable growth. Marketing performance remained strong, with the acquisition of new contracts amounting to Rp34.84 trillion, predominantly from the road and bridge portfolio, in line with the Company's champion segment. Furthermore, on a consolidated basis, the Company's financial performance remained solid, recording revenue of Rp30.25 trillion, reflecting a year-on-year growth of 12.35%.

Bergerak, Berlari, Melesat Hadirkan Karya Terbaik
Leap Forward, Sprint Ahead, Shine:
Presenting Our Best



Kesinambungan Tema
Theme Continuity



23 HADIRKAN KARYA TERBAIK MEMBANGUN NEGERI

Deliver Masterpiece to Shape the Nation

Kondisi internal dan lingkungan bisnis eksternal yang sangat dinamis, mendorong semangat transformasi Perseroan untuk melakukan langkah-langkah strategis berbasis keberlanjutan yang mampu meningkatkan kinerja kerja. Upaya tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan memperluas cakupan usaha di berbagai bidang infrastruktur yang menjanjikan.

Dipimpin oleh manajemen yang berpengalaman dan didukung oleh sumber daya manusia yang berdedikasi dan profesional, Perseroan dengan cerdas menjawab ragam tantangan dan hadir dengan berbagai alternatif sumber pertumbuhan yang potensial. Upaya ini menjadi kekuatan tersendiri yang membawa Perseroan untuk menutup tahun 2023 dengan performa yang baik dan terjaga.

Di masa depan, melalui strategi terintegrasi yang berfokus pada peningkatan operasional yang unggul, Perseroan bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan konsistensi dalam memberikan pelayanan kelas dunia kepada seluruh pemangku kepentingan demi menggapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

The Company's dynamic internal conditions and external business environment foster a spirit of transformation, prompting the implementation of sustainability-focused strategic measures to enhance work performance. The Company undertook this endeavour by diversifying its business scope into several prospective infrastructure sectors.

Under the guidance of seasoned leadership and with the assistance of committed and skilled personnel, the Company adeptly addresses diverse difficulties and devises multiple prospective avenues for expansion. This endeavour is an inherent asset that will enable the Company to conclude 2023 with commendable and sustained performance.

In the future, the Company plans to enhance operational excellence by implementing an integrated strategy. This will ensure stability and consistency in delivering topnotch services to all stakeholders, ultimately contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals.



22 BEKERJA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Work Resilient and Sustainable

Penanganan pandemi yang semakin baik didukung dengan kebijakan strategis pemerintah yang akomodatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berhasil mendongkrak aktivitas usaha dan mendorong iklim investasi yang inklusif dan berkualitas. Perseroan sebagai representatif/agen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia berkomitmen kuat merealisasikan program pembangunan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Di sisi lain, sebagai sebuah entitas bisnis, Perseroan juga mengedepankan pengembangan bisnis diluar dari penugasan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, seiring dengan momentum perbaikan ekonomi Indonesia, Perseroan mengembangkan multi-bisnis berbasis infrastruktur melalui usaha investasi, jasa konstruksi, dan manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah premium pada korporasi. Langkah transformasi ini terbukti efektif untuk bangkit bersama-sama menggerakan roda perekonomian disamping untuk pengembangan bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

The improved management of the pandemic, supported by the government's strategic policies that are accommodating, effective and relevant to the needs of the community, has succeeded in boosting business activities and promoting an inclusive and quality investment climate. As the government's representative in infrastructure development in Indonesia, the company is firmly committed to the implementation of the government's development programs as stated in the Government Work Plan (RKP) and the National Medium Term Development Plan (RPJMN).

On the other hand, as a business entity, the Company is also prioritizing the development of its business outside of government contracts. In this respect, in line with the momentum of Indonesia's economic recovery, the Company is developing infrastructure-based multibusinesses through investment, construction services and manufacturing businesses that can provide high value-added to companies. This transformation step has proven to be effective in standing up together to move the wheels of the economy. In addition, the company's business is being developed in a sustainable manner.



21 SEMANGAT TAK TERBATAS UNTUK BERINOVASI DAN MEMBANGUN BANGSA

Infinite Spirit To Innovate and Build the Nation

Jalan Tol merupakan salah satu infrastruktur yang terus dikembangkan pemerintah untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Jalan tol mengemban peran strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat aktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor infrastruktur di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan infrastruktur jalan yang mamadai karena dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga konektivitas tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Kepercayaan Pemerintah kepada Hutama Karya melalui penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sebagai Jalan Tol terpanjang di Indonesia yang menghubungan Provinsi Aceh hingga Lampung di Sumatera mengharuskan Hutama Karya bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi dan investasi yang sebelumnya hanya fokus pada bidang konstruksi. Hutama Karya berkomitmen mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengoperasional ruas tol yang dikelola.

Toll roads are one of the infrastructure that the government continues to develop to strengthen connectivity between regions. Toll roads play a strategic role in improving the quality of infrastructure and accelerating activities to support economic growth in the infrastructure sector in Indonesia. Indonesia as an archipelagic country requires adequate road infrastructure because it can connect one region to another so that this connectivity will spur economic growth.

The government's trust in Hutama Karya through the assignment of the Trans Sumatra Toll Road construction as the longest toll road in Indonesia connecting Aceh Province to Lampung in Sumatra requires Hutama Karya to transform into a construction and investment company that previously only focused on the construction sector. Hutama Karya is committed to supporting the acceleration of national economic growth. For this reason, the Company will continue to strive to improve the quality of infrastructure development and operation of managed toll roads.



20 MENGHUBUNGKAN KEBAIKAN UNTUK INDONESIA MAJU

Connecting Goodness for Onward Indonesia

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi.

Jalan Tol merupakan salah satu infrastruktur yang terus dikembangkan pemerintah untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Jalan tol mengemban peran strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat aktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor infrastruktur di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan infrastruktur jalan yang mamadai karena dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga konektivitas tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Perjalanan Perseroan sebagai pengembang infrastruktur akan terus berlanjut dengan menuntaskan penugasan pembangunan ruas - ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Hutama Karya berkontribusi terhadap penguatan konektivitas antar wilayah sekaligus mengembangkan pertumbuhan bisnis Perseroan.

Infrastructure is the driving force of economic growth which is seen as the locomotive of national and regional development. Infrastructure also has an important effect on improving the quality of life and welfare of the community through increasing the value of consumption, increasing productivity, as well as increasing real prosperity and the realization of macroeconomic stabilization.

Toll roads are one of the infrastructure that the government continues to develop to strengthen connectivity between regions. Toll roads play a strategic role in improving the quality of infrastructure and accelerating activities to support economic growth in the infrastructure sector in Indonesia. Indonesia as an archipelagic country requires adequate road infrastructure because it can connect one region to another so that this connectivity will spur economic growth.

The Company's journey as an infrastructure developer will continue by completing the assignment for the construction of the Trans Sumatra Toll Road sections. Hutama Karya contributes to strengthening connectivity between regions as well as developing the Company's business growth.

Daftar Isi
Table of Contents

Penjelasan Tema Theme Explanation	3
Kesinambungan Tema Theme Continuity	4
Daftar Isi Table of Contents	6
Sekilas Tentang Perseroan Company Overview	9
Jejak Langkah Milestones	10
Kontribusi Terbaik Kami Our Best Contribution	12



Ikhtisar Kinerja 2024 Performance Highlights 2024	15
Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2024 Key Performance Achievements in 2024	16
Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlight	17
Informasi Saham Stock Information	26
Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information of Bonds, Sukuk and/or Conversion Bonds	28
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Other Funding Sources Information	30
Peringkat Perusahaan Company Rating	30
Peristiwa Penting Important Events	32



Laporan Manajemen Management Report	37
Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	38
Laporan Direksi Report of the Board of Directors	52
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Statement of Members of Board of Commissioners	64
Surat Pernyataan Anggota Direksi Statement of Members of Board of Directors	65



Profil Perusahaan Company Profile	67
Identitas Perusahaan Company Identity	68
Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Names and Locations of Regional Office and Branch Office	70
Brand Perusahaan Company Brand	70
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of The Company	71
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	72
Kegiatan Usaha Business Fields	75
Daftar Keanggotaan Asosiasi List of Association Membership	81
Wilayah Operasional Operational Area	82
Struktur Organisasi Organization Structure	84
Profil Direksi Profile of The Board of Directors	86
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profiles	98
Profil Pejabat Eksekutif Executive Officer Profile	110
Profil Pegawai Employee Profile	118
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	121
Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholders	122
Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama List of Subsidiaries, Associates, and Joint Venture Companies	123
Struktur Grup Perusahaan Company's Groups Structure	133
Kronologi Penerbitan Saham Shares Issuance Chronology	133
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Share Issuance and/or on Other Securities Listing	134
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Information on The Use of Services from Public Accountant (AP) and Public Accountant Firm (KAP)	138
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professions	139
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification	144
Informasi yang Tersedia Pada Website Information Available on Website	152



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis 155

Tinjauan Perekonomian
Economic Review 156

- Analisis Perekonomian Global
  Global Economic Analysis 156
- Analisis Perekonomian Nasional
  National Economic Analysis 158
- Analisis Industri Infrastruktur
  Infrastructure Industry Analysis 159

Tinjauan Operasional
Operational Review 161

- Strategi Perusahaan
  Corporate Strategy 161
- Aspek Pemasaran
  Marketing Aspects 164
- Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
  Review of Operations by Business Segmen 166
- Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Penugasan Lain
  National Strategic Project (PSN) or Other Assignments 189

Tinjauan Keuangan
Financial Review 193

- Kinerja Keuangan
  Financial Performance 193
  - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
    Consolidated Statement of Financial Position 194
  - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
    Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 206
  - Laporan Arus Kas Konsolidasian
    Consolidated Statement of Cash Flows 210
- Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
  Debt Payment Ability and Receivables Collectibility 213
- Struktur Modal
  Capital Structure 217
- Ikatan Material Investasi Barang Modal
  Material Commitment for Capital Goods Investment 218
- Investasi Barang Modal
  Capital Goods Investment 219
- Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
  Information and Material Facts after Balance Sheet Date 220
- Prospek Usaha dan Strategi ke Depan Tahun 2025
  Business Outlook And Future Strategy In 2025 221
- Pencapaian Target dan Target ke Depan
  Target Achievements and Future Target 225
- Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)
  Evaluation of Long-Term Plans (RJP) 231
- Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
  Policy, Announcement, and Payment of Dividends 232
- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
  Realization of The Use of The Proceeds From The Public Offering 234
- Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
  Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Merger, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring 236
- Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
  Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties 238
- Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Dewan Komisaris/Direksi
  The Role of The Board of Commissioners and Audit Committee Related to Related Party Transactions 245
- Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya
  Changes in Legislation and Its Impact 246
- Perubahan Kebijakan Akuntansi
  Changes in Accounting Policy 251
- Tingkat Kesehatan Perseroan
  Company Soundness Level 252
- Informasi Kelangsungan Usaha
  Business Continuity Information 252
- Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan
  Disclosure of Governance Framework, Management and Control of Taxation Aspects 255
- Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)
  Report on Additional Use of State Capital Inclusion (PMN) 257



Tinjauan Penunjang Bisnis
Business Support Review 267

Human Capital 268

- Strategi Manajemen Human Capital
  Human Capital Management Strategy 268
- Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Human Capital
  Human Capital Management Policies and Implementation 270

Human Capital Information System	298
Internalisasi Budaya Cultural Internalization	298
Keterbukaan Informasi kepada Karyawan Transparency of Information to Employees	299
Struktur Pengelola Human Capital Human Capital Management Structure	300
Rencana Kerja Human Capital 2025 Human Capital Work Plan for 2025	301
Teknologi Informasi Information Technology	305
Rencana Strategis Teknologi Informasi Strategic Information Technology Plan	305
Inovasi Teknologi Informasi Information Technology Innovation	306
Infrastruktur Teknologi Informasi Information Technology Infrastructure	306
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	306
Struktur Pengelola Teknologi Informasi Information Technology Management Structure	307
Rencana Kerja Teknologi Informasi 2025 Information Technology Work Plan for 2025	307



Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	309
Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan Achievement in Corporate Governance Implementation	310
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Foundations of Corporate Governance Implementation	311
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure and Mechanism	312
Struktur Organ Perusahaan Company Organ Structure	312
Governance Soft Structure	312
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Mechanism	313
Pemegang Saham Shareholders	313
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	313
Direksi Board of Directors	330
Dewan Komisaris Board of Commissioners	374
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and Remuneration of The Board of Directors and Board of Commissioners	436
Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Diversity Policy	441
Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Organs and Committees Under The Board of Commissioners	446
Organ dan Komite di Bawah Direksi Corporate Organs and Committees Under The Board of Directors	534
Akuntan Publik Public Accountant	580
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	581
Manajemen Risiko Risk Management	593
Perkara Hukum Legal Cases	617
Sanksi Administratif yang Dikenakan kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya Administrative Sanctions Imposed on The Company, Board of Commissioners, and Directors by Capital Market Authorities and Other Regulators	620
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	621
Kode Etik Code of Conduct	629
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Long-Term Performance-Based Compensation Policy	633
Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaannya Disclosure Policy on Share Ownership of The Board of Commissioners and Directors and Its Implementation	633
Whistleblowing System	634
Program Anti Korupsi Anti Corruption Program	647
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Management of State Officials' Wealth Report (LHKPN)	648
Insider Trading	650
Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance	650
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of The Guidelines for Open Corporate Governance	656
Good Corporate Governance Assessment	671

Sekilas Tentang Perseroan
Company Overview

Entitas Anak | Subsidiary:
Kepemilikan Langsung
Direct Ownership

PT HK Realtindo ("HKR")
PT Hakaaston ("HKA")
PT HK Infrastruktur ("HKI")
EPC Energy Singapore, PTE. LTD
PT Hutama Marga Waskita
PT Terbanggi Besar Kayu Agung Toll
PT Hutama Mambelim Trans Papua
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik

Entitas Cucu | Second-tier Subsidiary:
Kepemilikan Tidak Langsung
Indirect Subsidiary

PT Bhirawa Steel
PT Nusa Pratama Properti
PT Petronesia Benimel
PT Semen Indogreen Sentosa

Entitas Asosiasi:
Associated Entities:

PT Indonesia Internasional Automotive Proving Ground
PT Hutama Prima
PT Takenaka Indonesia
PT Jasa Marga Bali Tol
PT Gorontalo Energy
PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal
PT Karya Logistik Nusantara

Kepemilikan Saham:
Share Ownership:

Pemerintah Indonesia
Government of Indonesia
100%

Inovasi Untuk Solusi

Hutama Karya

Total Aset:
Total Assets:

Rp196,04
triliun | trillion

Produk dan Jasa:
Products and Services

Jasa Kontruksi
Construction Services

Investasi
Investment

Tanggal Berdiri:
Date of Establishment:

29 Maret
March 29
1961

Jejak Langkah
Milestones

Mengantisipasi tantangan bisnis konstruksi yang semakin kompetitif Hutama Karya kembali melakukan inovasi melalui diversifikasi usaha dengan mendirikan Unit Bisnis Haka Pole yang merupakan pabrik penghasil tiang penerangan jalan umum sebagai tipe dari baja bersegi delapan (oktagonal), serta melakukan ekspansi usaha di luar negeri yang menjadi awal inovasi teknologi konstruktif dengan diciptakannya LPBH (Landasan Putar Bebas Hambatan)-80 'SOSROBAHU' oleh Dr. Ir. Tjokorda Raka Sukawati.

Anticipating the challenges of an increasingly competitive construction business, Hutama Karya re-innovates through business diversification by establishing the Haka Pole Business Unit, which is a factory producing public street lighting poles as octagonal steel types, as well as expanding business overseas which is the beginning of innovation. Constructive technology with the creation of Effortless Turnaround 'SOSROBAHU' by Dr. Ir. Tjokorda Raka Sukawati.

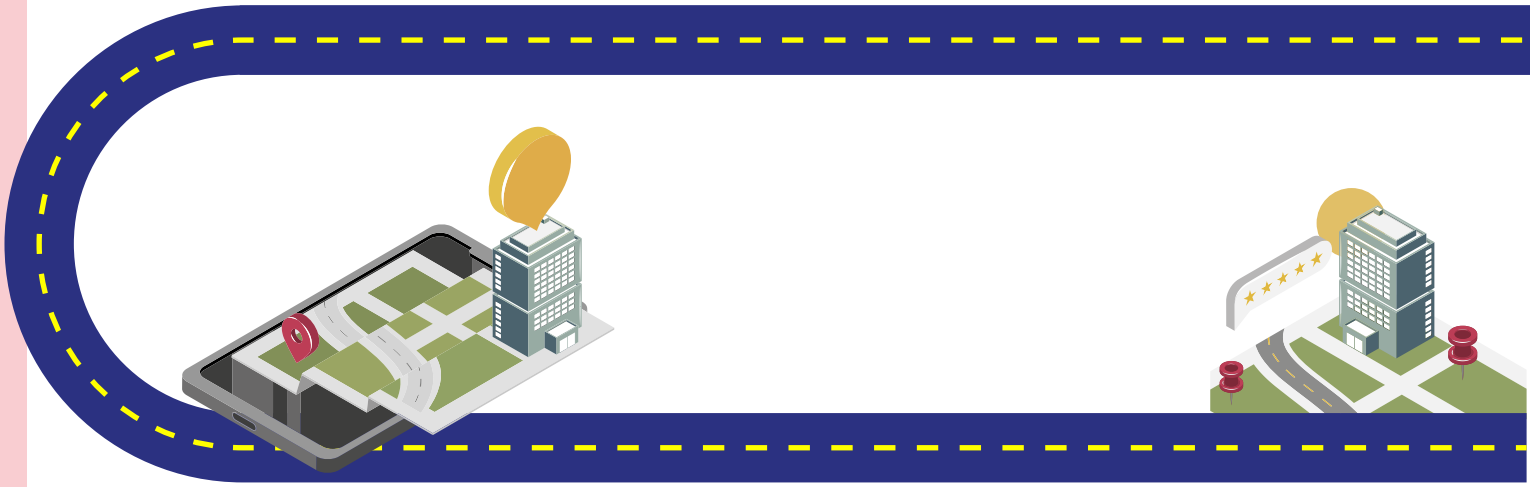
Sejalan dengan pengembangan inovasi yang terus ditingkatkan, juga seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi konstruksi, Hutama Karya telah mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi berupa Jembatan Bentang Panjang *(Suspension Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Bridge, Cable Stayed)*. Kala itu, Hutama Karya juga sukses memenuhi standar internasional dalam hal kualitas, keselamatan kerja dan lingkungan dengan diraihnya sertifikat ISO 9002:1999.

In line with the development of innovation that continues to be improved, also in line with the rapid development and progress of construction technology, Hutama Karya has been able to produce high-tech products in the form of a Long Spans Bridge (Suspension Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Badge, Cable-Stayed). At that time, Hutama Karya also successfully met international standards in terms of quality, work safety, and the environment with the achievement of ISO 9002:1999 certificate.

Memasuki era milenial dimana dinamika perekonomian semakin pesat, Hutama Karya merevitalisaasi diri dengan melakukan pengembangan usaha untuk sektor-sektor swasta melalui pembangunan *High Rise Building* (Bakrie Tower dan Apartemen-Apartemen) maupun infrastruktur lainnya seperti jalan tol. Seiring dengan perkembangan tersebut, kualitas dan mutu tetap menjadi perhatian, yang dibuktikan dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007.

Entering the millennia era where the dynamics of the economy are increasing rapidly, Hutama Karya is revitalizing itself by developing business for the private sectors through the construction of High Rise Buildings and other infrastructure, such as toll roads. Along with these developments, quality remains a concern, as evidenced by the achievement of ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007 certificates.

1980 **1990** **2000**



1970

Menandai dimulainya teknologi Beton pra-tekan di Indonesia, dimana PN Hutama Karya menjadi yang pertama kali mengenalkan sistem prategang BBRV dari Swiss. Sebagai wujud eksistensi terhadap teknologi ini PN Hutama Karya membentuk Divisi khusus prategang. Pada dekade ini pula, Hutama Karya berubah status menjadi PT Hutama Karya (Persero).

Mark the start of pre-press concrete technology in Indonesia, where PN. Hutama Karya was the first to introduce the BBRV prestige system from Switzerland. As a form of existence of this technology, PN. Hutama Karya formed a special prestress division. Also in this decade, Hutama Karya changed its status to PT. Hutama Karya (Persero).

1960

Tahun 1960 merupakan tonggak transfromasi Hutama Karya dari perusahaan swasta *'Holladsche Beton Maatshappij'* menjadi PN Hutama Karya. Sejak fase transformasi, PN Hutama Karya telah menghasilkan karya konstruksi yang bernilai sejarah dan monumental seperti Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, dan Monumen Patung Dirgantara di Pancoran, Jakarta.

1960 was the milestone of Hutama Karya's transformation from the private company 'Hollandsche Beton Maatschappij' to PN. HUTAMA KARYA. Since the transformation phase, PN. Hutama Karya has produced construction works that have historical and monumental value, such as the Republic of Indonesia DPR / MPR Building in Senayan, Jakarta, and the Dirgantara Statue Monument in Pancoran, Jakarta.

Lepas satu dekade di era milenia, Hutama Karya semakin menguatkan eksistensinya di industri konstruksi nasional. Hal ini ditandai dengan diversifikasi usaha melalui pendirian anak perusahaan di bidang pengembangan properti dan manufaktur aspal serta baja.

After a decade in the millennia era, Hutama Karya has strengthened its existence in the national construction industry. This is marked by business diversification through the establishment of a subsidiary in the field of property development and manufacturing of asphalt and steel.

2010

- Bertransformasi menjadi Pengembangan Infrastruktur dan akan menjadi Operator Jalan Tol terbesar di Indonesia.
- Pada 2014, Hutama Karya resmi menerima penugasan Pemerintah untuk mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015, Hutama Karya diberi amanah mengembangkan 2.770 kilometer jalan tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama.
- Penerbitan Global Medium Term Notes pertama senilai US$600 juta yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia pada bulan Mei 2020.
- Penerbitan obligasi di pasar modal Indonesia yakni Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 (Rp1 trilliun); Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 (Rp1,97 triliun); Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya III Tahun 2017 (Rp3,53 triliun); Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahun 2021 (Rp1 triliun) ; dan Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II tahun 2022 (Rp1 triliun).
- Penerbitan sukuk korporasi di pasar modal Indonesia yaitu: Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 (Rp500 miliar); Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II tahun 2022 (Rp313 miliar).
- Melakukan Asset Recycling atas PT Medan Binjai Toll (PTMB) dan PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (PTBTB) yang saham keduanya dimiliki oleh *Indonesia Investment Authority* (INA) dengan nilai transaksi Rp12,4 triliun di tahun 2023.
- Hingga tahun 2024 Hutama Karya berhasil mensukseskan penugasan pemerintah dengan mengoperasikan 798 Km JTTS. Jalan Tol Trans Sumatera akan terus dibangun untuk menghubungkan konektivitas Lampung hingga Aceh demi menunjang keberlanjutan Infrastruktur untuk Indonesia Maju.

2010-Sekarang



2010-Now

- Transformed into an infrastructure Developer and will become the largest Toll Road Operator in Indonesia.
- In 2014, Hutama Karya officially received a Government assignment to develop the Trans-Sumatra Toll Road. Through Presidential Regulation (Perpres) Number 100 of 2014 which was later updated to Perpres Number 117 of 2015, Hutama Karya was given the mandate to develop 2,770 kilometers of toll roads in Sumatra with priority for the first 8 sections.
- Issued the first Global Medium-Term Notes worth US$600,00 million guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in May 2020.
- Issued corporate bond Indonesian capital market comprising of Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase I 2016 (Rp1 Trillion); Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase II 2017(Rp1.97 trillion); Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase III 2017 (Rp3.53 trillion); Hutama Karya Bonds II Phase I 2021(Rp1 trillion); and Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 (Rp1 trillion).
- Issued Sukuk in the Indonesian capital market comprising of Hutama Karya Sustainable Mudharabah Bonds I Phase I 2021 (Rp500 billion; and Hutama Karya Sustainable Mudharabah Bonds I Phase II 2022 (Rp313 billion).
- Conducting Asset Recycling of PT Medan Binjai Toll (PTMB) and PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (PTBTB) whose shares are both owned by the Indonesia Investment Authority (INA) with a transaction value of Rp12.4 trillion in 2023.
- Until 2024 Hutama Karya succeeded in succeeding the government assignment by operating 798 Km JTTS. The Trans Sumatra Toll Road will continue to be built to connect Lampung to Aceh connectivity to support the sustainability of Infrastructure for Advanced Indonesia.

Kontribusi Terbaik Kami
Our Best Contribution

Sebagai Perseroan yang berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi negara, proyek utama yang sedang dijalankan saat ini adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Proyek ini tidak hanya sebagai simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Berdasarkan kajian dari Core Indonesia (2024), pembangunan JTTS diprediksi akan menciptakan hingga 4,46 juta lapangan pekerjaan selama masa konstruksi. Hal ini membuktikan bahwa proyek infrastruktur besar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik secara langsung di proyek konstruksi maupun dalam sektor-sektor terkait lainnya.

As a company committed to making a positive impact on the nation, our primary ongoing project is the construction of the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS). This project is not only a symbol of infrastructure progress but also has significant social and economic impacts. According to a study by Core Indonesia (2024), the construction of JTTS is projected to create up to 4.46 million jobs during the construction phase. This demonstrates that large-scale infrastructure projects can provide direct benefits to society, both within the construction sector itself and in related industries.

Selain itu, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan *output* ekonomi Pulau Sumatra sebesar Rp924 triliun. Dengan adanya jalan tol ini, efisiensi transportasi darat juga akan meningkat, mengurangi waktu perjalanan dan jarak tempuh, yang tentunya akan berkontribusi besar pada kelancaran distribusi barang dan orang di wilayah tersebut. Ini akan membuka peluang bagi berbagai sektor bisnis, meningkatkan daya saing daerah, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Furthermore, this project is expected to boost Sumatra's economic output by Rp924 trillion. The presence of this toll road will enhance land transportation efficiency by reducing travel time and distance, significantly contributing to the smooth distribution of goods and people in the region. This, in turn, will create opportunities for various business sectors, enhance regional competitiveness, and ultimately support more equitable economic growth.



Lebih lanjut, proyek ini juga memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor lain secara tidak langsung. Aktivitas baru yang muncul di sekitar pembangunan tol, seperti peningkatan sektor perdagangan, pariwisata, dan industri, turut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian atau usaha kecil kini memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur ini.

Melalui proyek Jalan Tol Trans Sumatera dan proyek lainnya yang tengah dikerjakan, perseroan berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan negeri ini. Setiap langkah yang diambil diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa perubahan positif yang nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka lebih banyak peluang bagi generasi mendatang.

Moreover, this project also has a positive indirect impact on various other sectors. The emergence of new economic activities around the toll road construction, such as growth in trade, tourism, and industry, has contributed to the creation of new job opportunities for local communities. People who previously relied on agriculture or small businesses now have the chance to engage in sectors directly influenced by this infrastructure development.

Through the Trans-Sumatra Toll Road project and other ongoing initiatives, the company remains committed to making a significant contribution to national development. Every step taken is expected not only to generate economic benefits but also to bring tangible positive changes to society, improve the quality of life, and create more opportunities for future generations.







Ikhtisar Kinerja 2024

Performance Highlights 2024

Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2024
Key Performance Achievements in 2024

Aset tahun 2024 | Total assets in 2024

Rp196,04 triliun / trillion

meningkat 15,50% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp169,74 triliun.
an increase of 15.50% compared to Rp169.74 trillion in 2023.



Ekuitas tahun 2024 | Equity in 2024



Rp138,00 triliun / trillion

meningkat 18,33% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp116,63 triliun.
reflecting an 18.33% growth from Rp116.63 trillion in 2023.

Laba tahun berjalan tahun 2024 | Profit for the year in 2024

Rp2,77 triliun / trillion

meningkat 27,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,87 triliun.
marking a 27.74% increase from Rp1.87 trillion in 2023.



Total perolehan kontrak konstruksi tahun 2024
The total value of construction contracts secured in 2024



Rp34,84 triliun / trillion

meningkat 12,84% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp30,88 triliun.
growing by 12.84% from Rp30.88 trillion in 2023.

Panjang Tol Terbangun 2024
Toll Road Length Constructed

91,0 km

meningkat 5,21% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sepanjang 86,49 km
up by 5.2% compared to 86,49 km in 2023.



Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlight

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Overview and Financial Ratios

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023**	**2022***	**2021**	**2020**
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian **Consolidated Statement of Financial Position**					
ASET Assets					
Aset lancar **Current assets**					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	36,769,029	39,059,927	33,656,186	21,205,226	11,130,641
Piutang usaha Trade receivables					
Pihak ketiga Third parties	366,567	414,910	118,205	185,450	211,557
Pihak berelasi Related parties	690,303	714,461	444,453	395,263	868,208
Piutang ventura bersama Receivables from joint ventures	130,206	86,348	80,564	141,076	173,005
Piutang retensi Retention receivables					
Pihak ketiga Third parties	93,623	61,981	43,943	44,462	42,779
Pihak berelasi Related parties	85,199	129,785	165,614	219,455	256,414
Tagihan bruto kepada pemberi kerja Gross amounts due from customers					
Pihak ketiga Third parties	523,881	674,124	466,042	318,004	426,820
Pihak berelasi Related parties	2,890,180	1,867,030	2,007,772	1,605,503	1,260,154
Piutang lain-lain Other receivables					
Pihak ketiga Third parties	5,368,107	76,807	162,869	269,493	3,388,646
Pihak berelasi Related parties	132,726	64,305	176,830	28,648	54,179
Persediaan Inventories	360,019	495,274	767,063	939,536	826,548
Aset real estat Real estate assets	622,367	670,525	665,791	582,001	1,582,709
Uang muka dan beban dibayar dimuka Advances and prepayments	438,616	350,128	361,998	365,457	333,032
Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes					
Pajak penghasilan Corporate income taxes	-	16,057	65,795	56,497	48,763
Pajak lain-lain Other taxes	694,479	1,565,098	1,601,439	1,841,872	1,875,423

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	2022*	2021	2020
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	7,292,670	3,364,613	250,000	-	-
Aset keuangan lain-lain Other financial assets	-	2,962	648	8,961	5,865
Jumlah aset lancar **Total current assets**	**56,457,972**	**49,614,335**	**41,035,212**	**28,206,904**	**22,484,743**
Aset tidak lancar **Non-current assets**					
Piutang lain-lain Other receivables					
Pihak ketiga Third parties	662,506	5,545,128	1,126,660	1,179,614	-
Pihak berelasi Related parties	3,642	-	-	17,630	25,230
Piutang retensi Retention receivables					
Pihak ketiga Third parties	47,856	49,196	3,731	43,152	-
Pihak berelasi Related parties	136,604	47,458	26,775	72,498	-
Uang muka dan beban dibayar dimuka Advances and prepayments	984,944	780,065	651,101	655,590	778,126
Pajak dibayar dimuka jangka panjang Long-term prepaid taxes					
Pajak penghasilan Corporate income taxes	78,289	82,155	-	-	-
Pajak lain-lain Other taxes	2,010,539	643,060	-	-	-
Bagian tidak lancar dari aset *real estate* Non-current portion of real estate assets	1,067,899	953,928	1,506,689	1,705,570	1,300,340
Properti investasi Investment properties	259,554	229,367	247,077	247,077	334,148
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	45,893	45,893	77,083	81,933	78,353
Investasi pada ventura bersama Investment in joint ventures	632,713	259,885	151,936	242,137	333,317
Aset tetap Fixed assets	3,319,839	3,460,096	3,549,370	3,740,219	4,001,528
Aset tak berwujud Intangible assets					
- Hak pengusahaan jalan tol Toll road concession rights	127,111,601	107,731,985	107,613,447	96,245,998	84,293,649
- Lain-lain Others	29,718	25,001	22,615	23,749	22,645
Aset keuangan - Hak konsesi financial assets - Concession Rights	2,865,228	-	-	-	-
Goodwill	116,743	116,743	116,743	116,743	116,743
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	43,492	17,291	18,449	15,764	45,674
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	37,025	25,839	25,196	-	-
Aset keuangan lain-lain Other financial assets	73,422	65,225	35,785	218,514	238,068
Aset tidak lancar lain-lain Other non-current assets	56,984	46,837	111,549	104,411	58,915
Jumlah aset tidak lancar **Total non-current assets**	**139,584,491**	**120,125,152**	**115,284,206**	**104,710,599**	**91,626,736**

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023**	**2022***	**2021**	**2020**
Jumlah aset **Total assets**	**196,042,463**	**169,739,487**	**156,319,418**	**132,917,503**	**114,111,479**
LIABILITAS Liabilities					
Liabilitas jangka pendek **Current liabilities**					
Utang usaha Trade payables					
Pihak ketiga Third parties	10,105,074	8,943,727	11,334,072	10,501,246	10,166,062
Pihak berelasi Related parties	1,316,922	2,249,416	3,073,241	7,917,864	9,769,038
Pinjaman jangka pendek Short-term loans					
Bank	5,921,908	3,454,956	926,387	499,009	2,036,218
Non-bank	-	-	-	90,817	1,066,387
Utang lain-lain Other payables					
Pihak ketiga Third parties	311,542	212,142	180,219	213,676	124,676
Pihak berelasi Related parties	2,719,537	18	62,783	73,971	319,158
Utang retensi Retention payables					
Pihak ketiga Third parties	218,960	113,404	82,626	113,615	-
Pihak berelasi Related parties	149,051	181,475	34,630	780,973	692,947
Utang pajak Taxes payable					
Pajak penghasilan Corporate income taxes	88,113	24,344	11,443	13,198	2,438
Pajak lain-lain Other taxes	600,929	427,210	431,391	447,866	491,805
Uang muka kontrak jangka pendek Short-term contract advances	405,123	680,818	255,678	278,229	782,029
Akrual dan provisi Accruals and provision	3,865,774	3,027,446	2,447,961	1,989,111	1,795,004
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang: Current maturities of long-term loans:					
Bank	-	-	71,521	163,439	5,498,909
Non-bank	40,000	40,000	20,000	-	978,184
Medium Term Notes	-	1,475,000	-	1,893,999	399,500
Utang obligasi Bonds payables	81,000	33,445	-	1,164,301	6,494,150
Sukuk Mudharabah	138,250	16,474	-	-	-
Liabilitas sewa Lease liabilities	54,566	46,786	57,678	155,128	186,029
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefit obligations	389,420	317,517	35,650	25,418	-
Bagian lancar atas pendapatan ditangguhkan Current portion of deferred revenue	-	575,843	1,023,703	387,093	217,777
Jumlah liabilitas jangka pendek **Total current liabilities**	**26,406,169**	**21,820,021**	**20,048,983**	**26,708,953**	**41,020,311**

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023**	**2022***	**2021**	**2020**
Liabilitas jangka panjang **Non-current liabilities**					
Utang usaha Trade payables					
Pihak berelasi Related parties	-	-	20,425	1,456,261	2,440,314
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Long-term loans - net of current maturities:					
Bank	11,106,392	11,083,452	27,369,620	28,640,565	23,005,514
Non-bank	686,326	908,184	1,417,075	1,487,075	450,868
Medium Term Notes	9,649,315	9,195,353	10,845,223	8,495,336	10,282,144
Utang obligasi Bonds payables	7,213,920	7,292,677	7,323,798	6,325,566	-
Sukuk Mudharabah	656,214	793,627	809,225	496,676	-
Liabilitas sewa Lease liabilities	116,494	141,272	160,914	244,870	368,566
Uang muka kontrak jangka panjang Long-term contract advances	121,136	109,238	160,838	23,535	79,847
Akrual dan provisi Accruals and provision	449,415	478,435	515,160	295,614	147,062
Pendapatan ditangguhkan Deferred revenues	-	-	353,116	2,964,871	3,484,464
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefit obligations	164,523	71,551	30,166	172,756	195,481
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	698,646	532,644	490,145	345,628	191,085
Utang tidak lancar lain-lain Other non-current payables					
Pihak ketiga Third parties	12,456	13,198	65,467	-	87,270
Pihak berelasi Related parties	1,027	1,027	-	-	-
Utang retensi Retention payables					
Pihak ketiga Third parties	478,613	433,470	342,802	210,857	243,242
Pihak berelasi Related parties	281,366	240,825	584,787	240,190	120,486
Jumlah liabilitas jangka panjang Total non-current liabilities	31,635,843	31,294,953	50,488,761	51,399,800	41,096,343
JUMLAH LIABILITAS **Total liabilities**	**58,042,012**	**53,114,974**	**70,537,744**	**78,108,753**	**82,116,654**
EKUITAS Equity					
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, modal dasar - 250.000.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh - 131.646.000 lembar saham (31 Desember 2023: 113.042.000 lembar saham) Share capital - Rp1,000,000 par value per share, authorised share - 250.000.000 shares share issued and fully paid-131.646.000 shares (31 December 2023: 113.042.000 shares)	131,646,000	113,042,000	52,808,000	33,808,000	20,100,000

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023**	**2022***	**2021**	**2020**
Penyertaan modal negara Government capital investment	-	-	31,350,000	19,000,000	7,500,000
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	44,037	44,037	44,037	44,037	-
Cadangan revaluasi aset tetap Fixed assets revaluation reserve	740,784	740,784	636,255	636,255	636,255
Saldo laba/(akumulasi rugi) Retained earnings/(accumulated deficit)					
Dicadangkan Appropriated	5,619,215	5,619,215	5,619,215	5,619,215	5,619,215
Belum dicadangkan Unappropriated	(995,205)	(3,731,874)	(5,541,519)	(5,165,208)	(2,731,996)
Ekuitas *merging entity* merging entity		-	-	-	154,534
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent	137,054,831	115,714,162	84,915,988	53,942,299	31,278,008
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	945,620	910,351	865,686	866,451	716,817
Jumlah Ekuitas **Total equity**	**138,000,451**	**116,624,513**	**85,781,674**	**54,808,750**	**31,994,825**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total liabilities and equity**	**196,042,463**	**169,739,487**	**156,319,418**	**132,917,503**	**114,111,479**
Laporan Posisi Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian **Consolidated Statements of Profit or Loss And Other Comprehensive Income**					
Pendapatan **Revenue**	**30,252,293**	**26,926,321**	**24,082,441**	**20,484,998**	**23,401,032**
Beban pokok pendapatan **Cost of revenue**	**(25,978,271)**	**(24,568,527)**	**(20,470,541)**	**(18,133,606)**	**(21,485,042)**
Laba bruto **Gross profit**	**4,274,022**	**2,357,794**	**3,611,900**	**2,351,392**	**1,915,990**
Beban penjualan Selling expenses	(39,940)	(11,995)	(17,358)	(14,058)	(33,998)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(1,221,718)	(929,515)	(698,052)	(672,214)	(1,164,676)
Beban penurunan nilai piutang Impairment of receivables	(142,147)	(1,167,263)	(119,223)	-	-
Beban pajak penghasilan final Final tax expense	(662,452)	(482,744)	(430,494)	(407,757)	(513,745)
Beban penurunan nilai aset real estat Impairment of real estate assets	-	(180,000)	-	-	-
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in net profit of associates and joint ventures	452,433	175,118	144,315	170,220	66,030
Keuntungan dari akuisisi entitas asosiasi Benefits of Acquisition of Associated Entities	-	-	-	-	14,690
Provisi terkait klaim asuransi Provisions related to insurance claims	-	-	-	(183,000)	-
Keuntungan dari penjualan hak pengusahaan jalan tol Gain on sale of toll road concession rights	-	3,643,245	-	-	-
Beban lain-lain, bersih Other expenses, net	(176,955)	(178,007)	(160,514)	(484,675)	(276,922)
Laba usaha **Operating income**	**2,483,243**	**3,226,633**	**2,330,574**	**759,908**	**7,369**

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023**	**2022***	**2021**	**2020**
Penghasilan keuangan Finance income	2,168,801	807,635	260,053	202,827	662,154
Biaya keuangan Finance costs	(1,643,551)	(2,039,715)	(2,497,867)	(3,085,212)	(2,554,192)
Keuntungan/(kerugian) dari selisih kurs, bersih Gain/(loss) of foreign exchanges, net	(22,714)	149,650	(348,829)	(81,897)	-
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan **Profit/(loss) before income tax**	**2,985,779**	**2,144,203**	**(256,069)**	**(2,204,374)**	**(1,884,669)**
Beban pajak penghasilan Income tax expenses	(219,257)	(271,647)	(189,163)	(203,922)	(149,977)
Laba/(rugi) tahun berjalan **Profit/(loss) for the year**	**2,766,522**	**1,872,556**	**(445,232)**	**(2,408,296)**	**(2,034,646)**
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: **Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:**					
Keuntungan revaluasi tanah Gain on revaluation of land	-	104,529	-	-	168,761
Pengukuran kembali imbalan pascakerja Remeasurement of post employment benefits	5,416	(18,246)	68,156	18,153	76,422
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan **Total comprehensive income/(loss) for the year**	**2,771,938**	**1,958,839**	**(377,076)**	**(2,390,143)**	**(1,789,463)**
Laba/(rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: **Profit/(loss) for the year attributable to:**					
Pemilik entitas induk Owners of the parent	2,731,253	1,827,891	(444,467)	(2,449,897)	(2,071,986)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	35,269	44,665	(765)	41,601	37,340
	2,766,522	1,872,556	(445,232)	(2,408,296)	(2,034,646)
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: **Total comprehensive income/(loss) for the year attributable to:**					
Pemilik entitas induk Owners of the parent	2,736,669	1,914,174	(376,311)	(2,431,744)	(1,826,803)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	35,269	44,665	(765)	41,601	37,340
	2,771,938	1,958,839	(377,076)	(2,390,143)	(1,789,463)
Laba/(rugi) per saham - Dasar dan Dilusian (Rupiah penuh) Profit/(loss) per share - Basic and Diluted (full Rupiah)	22,062	21,787	(8,753)	(88,022)	(120,034)
Laporan Arus Kas Konsolidasian **Consolidated Statements of Cash Flows**					
Arus kas dari aktivitas operasi **Cash flows from operating activities**					
Penerimaan dari pelanggan Cash receipts from customers	12,202,085	9,449,914	11,316,501	8,065,181	4,957,098
Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain Cash paid to suppliers and others	(14,017,777)	(9,678,673)	(8,863,436)	(5,034,126)	(4,226,752)
Pembayaran kepada karyawan Cash paid to employees	(692,092)	(565,278)	(787,303)	(437,832)	(612,437)
Kas yang dihasilkan dari operasi Cash generated from operations	(2,507,784)	(794,037)	1,665,762	2,593,223	117,909
Penerimaan bunga Receipts of interest	1,738,402	807,635	260,053	196,722	227,411

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	2022*	2021	2020
Pembayaran beban keuangan Payment of finance costs	(1,651,654)	(1,934,480)	(2,232,823)	(3,132,052)	(2,528,298)
Pembayaran pajak penghasilan Payment of income taxes	(64,275)	(77,535)	(49,086)	(29,784)	(144,166)
Pembayaran pajak final Payment of final taxes	(554,851)	(515,370)	(669,392)	(528,383)	(289,135)
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan badan Received of Corporate income taxes refund	20,203	-	-	-	-
Penerimaan pengembalian pajak Received of tax refund	1,063,849	257,711	1,012,748	648,025	742,434
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi **Net cash flows used in operating activities**	**(1,956,110)**	**(2,256,076)**	**(12,738)**	**(252,249)**	**(1,873,845)**
Arus kas dari aktivitas investasi **Cash flow from investing activities**					
Perolehan aset hak pengusahaan jalan tol Additions to toll road concession rights	(15,761,081)	(18,567,711)	(17,338,422)	(14,311,568)	(15,483,238)
Pembayaran biaya fasilitas Payment of facility fees	-	-	-	-	(75,101)
Perolehan aset tak berwujud lainnya Acquisition of other intangible assets	(10,551)	(6,110)	(11,787)	(10,927)	(15,216)
Penambahan dana talangan pembebasan lahan Addition of bridging fund for land acquisition	(120,768)	(118,474)	(297,330)	-	-
Perolehan dana talangan pembebasan lahan Acquisition fund for land acquisition	189,218	92,510	264,782	636,465	1,146,235
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets	(62,894)	(57,210)	(24,067)	(82,757)	(182,340)
Penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi Addition of ownership in the association entity	-	-	-	-	(17,770)
Penambahan investasi jangka panjang Addition of long-term investment	-	-	-	-	(89,834)
Akuisisi entitas anak baru, setelah dikurangi kas yang diperoleh Acquisition of new subsidiary, net of cash obtained	-	-	-	-	(246,306)
Pinjaman kepada pihak berelasi Loans to related parties	-	-	-	-	(25,230)
Penerimaan atas pelepasan investasi lainnya Receipts on disposal of other investments	-	40,000	187,954	-	-
Penerimaan atas penjualan hak konsesi jalan tol Proceeds from sale of toll road concession rights	-	6,832,200	-	-	-
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya Placement of restricted cash	(3,740,306)	(3,114,613)	(250,000)	-	-
Penambahan atas investasi ventura bersama Additional in investment in joint venture	(212,064)	-	-	-	-
Penambahan atas investasi lainnya Addition of investment advances	(8,197)	(15,000)	(1,750)	-	-
Penambahan dari uang muka investasi Return of investment advances	-	-	-	(34,871)	-
Pengembalian dari uang muka investasi Refund of Investment Advances	-	-	-	-	304,375

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	2022*	2021	2020
Penerimaan dividen dari ventura bersama Dividends received from joint venture	288,904	132,848	262,123	222,124	75,190
Hasil penjualan aset tetap Proceeds from sale of fixed assets	-	-	-	-	4,271
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi **Net cash flows used in investing activities**	**(19,437,739)**	**(14,781,560)**	**(17,208,497)**	**(13,581,534)**	**(14,604,964)**
Arus kas dari aktivitas pendanaan **Cash flow from financing activities**					
Investasi modal pemerintah Government capital investment	18,604,000	28,884,000	31,350,000	25,208,000	11,000,000
Penerimaan pinjaman jangka pendek Receipts of short-term loans	7,558,258	6,893,960	2,752,521	3,577,010	8,192,862
Pembayaran pinjaman jangka pendek Repayments of short-term loans	(5,184,921)	(4,638,749)	(2,461,745)	(5,963,423)	(11,533,796)
Penerimaan pinjaman jangka panjang Receipts of long-term loans	-	168,849	1,636,593	2,610,442	12,633,195
Pembayaran pinjaman jangka panjang Repayments of long-term loans	(1,746,858)	(8,928,041)	(3,578,649)	(1,288,403)	(810,084)
Pembayaran dividen Dividend payment	-	-	-	(3,932)	(1,032)
Pembayaran liabilitas sewa Repayment of lease liabilities	(161,017)	(14,648)	(196,236)	(230,618)	(182,711)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan **Net cash provided by financing activities**	**19,069,462**	**22,365,371**	**29,502,484**	**23,909,076**	**19,298,434**
Penurunan bersih kas dan setara kas **Net decrease in cash and cash equivalents**	**(2,324,388)**	**5,327,735**	**12,281,249**	**10,075,293**	**2,819,625**
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at beginning of the year	39,059,927	33,656,186	21,205,226	11,130,641	8,310,767
Pengaruh selisih kurs Effect of foreign exchange rate	33,490	76,006	169,711	(708)	249
Kas dan setara kas pada akhir tahun **Cash and cash equivalents at end of year**	**36,769,029**	**39,059,927**	**33,656,186**	**21,205,226**	**11,130,641**
Rasio Keuangan **Financial Ratios**					
Rasio Profitabilitas **Profitability Ratio**					
Imbalan terhadap Total Aset (%) Return on Total Asset (%)	1.41	1.10	(0.28)	(1.81)	(1.78)
Imbalan kepada Pemegang Saham (%) Return to Shareholders (%)	1.95	1.56	(0.52)	(4.35)	(6.22)
Imbalan Investasi (%) Return on Investment (%)	2.54	4.11	3.29	2.26	1.60
Rasio Pertumbuhan Penjualan (%) Sales Growth Ratio (%)	12.35	11.81	17.56	(12.46)	(11.33)
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	9.14	6.95	(1.85)	(11.76)	(8.69)
Margin Operasi (%) Operating Margin (%)	8.21	11.98	9.68	3.71	0.03
Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	14.13	8.76	15.00	11.48	8.19
Rasio Likuiditas **Liquidity Ratio**					
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	139.24	183.86	176.90	81.30	39.48

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Financial Overview and Financial Ratios (In million Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	2022*	2021	2020
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	144.42	190.49	181.38	85.08	44.99
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	213.81	233.54	215.70	108.15	79.77
Rasio Solvabilitas **Solvency Ratio**					
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas (%) Loan to Equity Ratio (%)	6.41	6.78	6.39	10.88	24.24
Rasio Pinjaman terhadap Aset (%) Loan to asset ratio (%)	4.51	4.66	3.50	4.49	6.80
Rasio Total Kewajiban terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	22.63	22.27	29.89	56.68	110.66
Rasio Modal terhadap Total Aset (%) Equity to Total Asset Ratio (%)	70.06	68.86	16.40	23.37	31.03
Kemampuan Membayar Beban Bunga (%) Times Interest Earned Ratio (%)	219.09	197.07	55.89	42.81	29.11
Rasio Aktivitas **Activity Ratio**					
Periode Penagihan (hari) Collection Period (days)	40	53	26	40	96
Perputaran Aset (kali) Asset Turnover (times)	0.04	0.08	0.10	0.17	0.29

*Disajikan kembali

Ikhtisar Operasional
Operational Overview

Tabel Ikhtisar Operasional
Table of Operational Overview

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Penyelenggaraan Jalan Tol **Toll Road Operations**					
Panjang jalan tol beroperasi (km) Operational Toll Road Length (km)	640	722	603	555	390
Volume Lalu Lintas Transaksi (jutaan kendaraan) Transaction Traffic Volume (million vehicles)	88	79	83	84	72
Volume Lalu Lintas Transaksi Harian Rata-Rata (ribuan kendaraan) Average Daily Transaction Traffic Volume (thousand vehicles)	242	294	291	230	208
Konstruksi **Construction**					
Order Book (Rp Miliar) Order Book (Billion Rupiah)	70,032	59,858	42,544	31,859	49,497
Kontrak Baru (Rp Miliar) New Contracts (Billion Rupiah)	34,839	30,876	19,854	11,471	12,917
Building	1,379	3,775	1,268	893	481
EPC	476	1,276	3,295	2,933	429
Property & Realty	138	99	188	211	294
Toll, Road & Bridges	29,557	24,103	13,993	4,160	10,134
Prasarana Perhubungan Transportation Infrastructure	560	77	571	1,913	500
Water Resources	2,728	1,545	537	1,361	1,078

Informasi Saham
Stock Information

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Namun demikian, untuk informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the Company has not yet listed its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information available regarding share prices, market capitalization, or trading volume. However, information on share capital for the past two years is presented as follows:

Tabel Harga Saham (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Share Prices (in millions rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, modal dasar - 250.000.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh - 131.646.000 lembar saham (31 Desember 2023: 113.042.000 lembar saham) Share capital - Rp1,000,000 par value per share, authorised share - 250.000.000 shares share issued and fully paid - 131,646,000 shares (31 December 2023: 113,042,000 shares	131,646,000	113,042,000

Aksi Korporasi

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan aksi korporasi terkait perubahan modal atas Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan informasi sebagai berikut:

Corporate Action

In 2024, the Company has carried out corporate actions related to capital changes for the State Capital Injection (PMN) with the following information:

No	Pemegang Saham Shareholders	Tanggal Penyetoran Date of Deposit	Modal Sebelum Aksi Korporasi (Rp) Capital Before Corporate Action (Rp)	Setoran Modal (Rp) Capital Deposit (Rp)	Modal Setelah Aksi Korporasi (Rp) Capital after Corporate Action (Rp)
1.	Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic Indonesia	30 April 2024 April 30, 2024	113,042,000,000,000	18,604,000,000,000	131,646,000,000,000

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham *(Suspension)* dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham *(Delisting)*

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham *(Suspension)* dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham *(Delisting).*

The Action of Provisional Suspension of Share Trading (Suspension) and/or Delisting of Share

As of December 31 2024, The Company has not yet become a company that has listed its shares on the stock exchange. Thus, there is no Action to Temporarily Stop Trading Shares (Suspension) and/or Delisting of Shares.


GERBANG TOL MINAS
NOVASI UNTUK SOLUSI
4,2m
2,5 m
TINGGI MAKS 4.200 mm
TARIF TOL (Rp)
GERBANG TOL
Tempel Kartu

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi
Information of Bonds, Sukuk and/or Conversion Bonds

Informasi Obligasi
Information of Bonds

Tabel Informasi Obligasi Yang Masih Beredar
Table of Outstanding Bond Information

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Issuance date	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (jutaan) Number of Bonds (Million)
1	Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase I 2016	21 Desember 2016 December 21, 2016	10 Tahun 10 Years	Rp	1,000,000
2	Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase II 2017	7 Juni 2017 June 7, 2017	10 Tahun 10 Years	Rp	1,968,000
3	Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase III 2017 Series B	26 September 2017 September 26, 2017	10 Tahun 10 Years	Rp	2,367,000
4	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 Series B	7 September 2021 September 7, 2021	5 Tahun 5 Years	Rp	185,550
5	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 Series C	7 September 2021 September 7, 2021	7 Tahun 7 Years	Rp	780,950
6	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 Series A	12 Januari 2022 January 12, 2022	3 Tahun 3 Years	Rp	81,000
7	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 Series B	12 Januari 2022 January 12, 2022	5 Tahun 5 Years	Rp	176,500
8	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 Series C	12 Januari 2022 January 12, 2022	7 Tahun 7 Years	Rp	742,500

Informasi Sukuk
Sukuk Information

Tabel Informasi Sukuk Yang Masih Beredar
Table of Outstanding Sukuk Information

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Issuance date	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Sukuk (jutaan) Number of Bonds (Million)
1	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series C	7 September 2021 September 7, 2021	7 Tahun 7 Years	Rp	419,050

	Harga Penawaran Bid Price	**Tanggal Jatuh Tempo** Maturity Date	**Tingkat Suku Bunga** Interest Rates	**Status Pembayaran** Payment Status	**Peringkat** Rating		**Wali Amanat** Trustee
					2024	**2023**	
	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the bond principal amount	21 Desember 2026 December 21, 2026	8.55%	Belum Lunas Not yet paid off	idAAA (gg)	idAAA (gg)	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the bond principal amount	7 Juni 2027 June 7, 2027	8.07%	Belum Lunas Not yet paid off	idAAA (gg)	idAAA (gg)	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the bond principal amount	26 September 2027 September 26, 2027	8.40%	Belum Lunas Not yet paid off	idAAA (gg)	idAAA (gg)	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the bond principal amount	7 September 2026 September 7, 2026	8.55%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the bond principal amount	7 September 2028 September 7, 2028	9.30%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the bond principal amount	12 Januari 2025 January 12, 2025	6.50%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the bond principal amount	12 Januari 2027 January 12, 2027	7.75%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the bond principal amount	12 Januari 2029 January 12, 2029	8.25%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB

	Harga Penawaran Bid Price	**Tanggal Jatuh Tempo** Maturity Date	**Tingkat Suku Bunga** Interest Rates	**Status Pembayaran** Payment Status	**Peringkat** Rating		**Wali Amanat** Trustee
					2024	**2023**	
	100% dari jumlah pokok Sukuk 100% of the sukuk principal amount	7 September 2028 September 7, 2028	9.30%	Belum Lunas Active	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB

Tabel Informasi Sukuk Yang Masih Beredar
Table of Outstanding Sukuk Information

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Issuance date	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Sukuk (jutaan) Number of Bonds (Million)
2	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series B	7 September 2021 September 7, 2021	5 Tahun 5 Years	Rp	64,450
3	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series C	12 Januari 2022 January 12, 2022	7 Tahun 7 Years	Rp	69,490
4	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series B	12 Januari 2022 January 12, 2022	5 Tahun 5 Years	Rp	105,260
5	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series A	12 Januari 2022 January 12, 2022	3 Tahun 3 Years	Rp	138,250

Obligasi Konversi
Convertible Bonds

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan belum menerbitkan obligasi konversi.

As of December 31, 2024, the Company has not issued any convertible bonds.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
Other Funding Sources Information

Tabel Informasi *Medium Term Notes*
Table of Medium Term Notes Information

No.	Nama Name	Mata Uang Currency	Nominal (Juta) Nominal (Million)	Tingkat Suku Bunga Interest Rate
1	Global Medium Term Notes Hutama Karya	USD	600	3,75%

Peringkat Perusahaan
Company Rating

Sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024, Perseroan telah mendapatkan peringkat kredit dari beberapa lembaga pemeringkat yang berskala domestik maupun berskala internasional sebagai berikut:

As of the periods ending on December 31, 2023, and December 31, 2024, the Company has received credit ratings from several rating agencies, both domestic and international, as follows:

No.	Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Peringkat | Rating		Outlook
		2024	2023	
	Domestik Domestic			
1	Pefindo (*Corporate Rating*)	idAA-	idAA-	*Stable*
	Shelf-Registered Bond I	IdAAA (gg)	IdAAA (gg)	
	Shelf-Registered Bond II	IdAAA (gg)	IdAAA (gg)	
	Shelf-Registered Sukuk I	idAA-(sy)	idAA-(sy)	

Harga Penawaran Bid Price	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rates	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
				2024	2023	
100% dari jumlah pokok Sukuk 100% of the sukuk principal amount	7 September 2026 September 7, 2026	8.55%	Belum Lunas Active	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB
100% dari jumlah pokok Sukuk 100% of the sukuk principal amount	12 Januari 2029 January 12, 2029	8.25%	Belum Lunas Active	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB
100% dari jumlah pokok Sukuk 100% of the sukuk principal amount	12 Januari 2027 January 12, 2027	7.75%	Belum Lunas Active	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB
100% dari jumlah pokok Sukuk 100% of the sukuk principal amount	12 Januari 2025 January 12, 2025	6.50%	Belum Lunas Active	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB

Tenor	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Moody's Rating		Fitch Rating	
			2024	2023	2024	2023
10 Tahun 10 Years	11 Mei 2020 May 11, 2020	11 Mei 2030 May 11, 2020	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-

No.	Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Peringkat | Rating		Outlook
		2024	2023	
	Internasional International			
2	**Moody's**	**Baa3**	Baa3	*Stable*
3	Fitch Ratings	BBB-	BBB-	*Stable*

Peristiwa Penting
Important Events

17 Januari 2024
January 17, 2024



Groundbreaking Masjid IKN

Groundbreaking of IKN Mosque

25 Januari 2024
January 25, 2024



Penandatanganan Amandemen PPJT JTTS Tahap I

Signing of Amendment PPJT JTTS Phase I

30 Januari 2024
January 30, 2024



Rapat Umum Pemegang Saham: Pengesahan RKAP 2024

Annual General Meeting: Approval of RKAP 2024

7 Februari 2024
February 7, 2024



Peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Indrapura – Kisaran seksi Indrapura – Lima Puluh dan Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat seksi Tebing Tinggi – Indrapura

Inauguration of Trans Sumatra Toll Road Section Indrapura – Kisaran, Indrapura – Lima Puluh and Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Section Tebing Tinggi – Indrapura

28 Februari 2024
February 28, 2024



Hutama Karya Kembali Meraih Golden Flag Untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan

Hutama Karya Wins Golden Flag for Security Management System Certification

29 Februari 2024
February 29, 2024



Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan Proyek Bandar Udara VVIP IKN

Minister of Transportation Visit to VVIP IKN Airport Project

7 Maret 2024
March 7, 2024



Hutama Karya Peroleh Peringkat Bronze Hutama Karya di BCOMSS 2024

Hutama Karya Receives Bronze Ranking at BCOMSS 2024

28 Maret 2024
March 28, 2024



Apel Siaga Serentak Hutama Karya, Menyambut Arus Mudik Lebaran 2024 di Trans Sumatera

Hutama Karya Holds Simultaneous Alert Rally to Welcome the 2024 Lebaran Homecoming Flow on the Trans Sumatra Toll Road

18 April 2024
April 18, 2024



Kunjungan Kerja Menteri PUPR ke Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Ministry of Public Works and Public Housing Working Visit to the Trans Sumatra Toll Road Project

22 April 2024
April 22, 2024



Kunjungan Kerja Presiden RI ke Bendungan Bulango Ulu

Working Visit to the Bulango Ulu Dam

3 Mei 2024
May 3, 2024



Pertama di Indonesia, Hutama Karya Raih Predikat Konstruksi Berkelanjutan dari Kementerian PUPR

For the First Time in Indonesia, Hutama Karya Receives the Sustainable Construction Award from the Ministry of Public Works and Public Housing

14 Mei 2024
May 14, 2024



Peresmian Bendungan Ameroro Paket II

Inauguration of Ameroro Dam Package II

22 & 24 Juni 2024
June 22 & 24, 2024



Kunjungan Dewan Komisaris ke Proyek Hutama Karya Bali

Visit of the Board of Commissioners to Hutama Karya Bali Project

26 Juni 2024
June 26, 2024



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Hutama Karya (Persero) Tahun Buku 2023

Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PT Hutama Karya (Persero) for the 2023 Financial Year

3 Juli 2024
July 3, 2024



Penandatanganan Perjanjian KPBU Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim

Signing of the PPP Agreement for the Trans Papua Road, Jayapura-Wamena Section, Mamberamo-Elelim Segment

4 Juli 2024
July 4, 2024



Kunjungan Manajemen Hutama Karya ke Proyek PLTGU Tambak Lorok

Hutama Karya Management Visit to the Tambak Lorok Power Plant Project

8 Juli 2024
July 8, 2024



Penyerahan Sertifikat "Gold Reward" Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

Awarding of the "Gold Reward" Certificate for National Vital Object and Specific Object Security Management System

26 Juli 2024
July 26, 2024



Hutama Karya Raih Penghargaan di Bidang Environmental, Social, and Governance (ESG)

Hutama Karya Receives Award in the Field of Environmental, Social, and Governance (ESG)

28 Juli 2024
July 28, 2024



Peresmian Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur oleh Presiden RI

Inauguration of the Pulau Balang Bridge in East Kalimantan by the President of the Republic of Indonesia

28 Agustus 2024
August 28, 2024



Peresmian RSUP Dr. Sardjito, Hutama Karya Wujudkan Fasilitas Kesehatan Modern

Inauguration of RSUP Dr. Sardjito, Hutama Karya Realizes Modern Healthcare Facility

29 Agustus 2024
August 29, 2024



Peresmian Bendungan Leuwikeris

Inauguration of Leuwikeris Dam

4-6 September 2024
September 4-6, 2024



Hutama Karya Rayakan Hari Pelanggan Nasional di Sejumlah Ruas Tol

Hutama Karya Celebrates National Customer Day at Several Toll Roads

11 September 2024
September 11, 2024



Hutama Karya Raih Dua Penghargaan MURI pada Proyek Rusun ASN 2 IKN

Hutama Karya Wins Two MURI Awards for the ASN 2 IKN Housing Project

24 September 2024
September 24, 2024



Sambut Pendaratan Perdana di IKN, Presiden Joko Widodo Apresiasi Bangunan Gedung Bandara Nusantara

Welcoming the First Landing at IKN, President Joko Widodo Appreciates the Construction of Nusantara Airport Building

16 Oktober 2024
October 16, 2024



Peresmian Dua Ruas Jalan Tol Trans Sumatera di Sumatra Utara dan Jambi

Inauguration Two Sections of the Trans Sumatra Toll Road in North Sumatra and Jambi

31 Oktober 2024
October 31, 2024



Site Visit Menteri PU ke Kantor Tol Prabumulih

Minister of Public Works Site Visit to Prabumulih Toll Office

2 November 2024
November 2, 2024



Site Visit Wakil Presiden Republik Indonesia ke Proyek Pembangunan Underpass Joglo

Vice President of the Republic of Indonesia Site Visit to the Joglo Underpass Construction Project

7 November 2024
November 7, 2024



Hutama Karya Raih Penghargaan di Konstruksi Indonesia 2024

Hutama Karya Wins Award at Construction Indonesia 2024

24 Desember 2024
December 24, 2024



Site Visit Wakil Presiden Republik Indonesia ke Ruas Tol JTTS di Provinsi Sumatra Utara

Site Visit by Vice President of the Republic of Indonesia to JTTS Section in North Sumatra

24 Desember 2024
December 24, 2024



HK Peduli Bencana Alam Salurkan Ratusan Bantuan untuk Anak Korban Bencana Jakarta Pusat

HK Peduli Natural Disaster Distributes Hundreds of Aid Packages for Children Affected by the Jakarta Central Disaster





Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Hutama Karya dapat menyelesaikan tahun 2024 dengan pencapaian yang baik. Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi Hutama Karya dalam menjaga kesinambungan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi sebagai BUMN yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2024. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola perusahaan, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perusahaan untuk tahun buku 2024.

Dear Shareholders and Stakeholders,
We extend Praise and gratitude to God Almighty, for by His grace and blessings, Hutama Karya was able to conclude the year 2024 with commendable achievements. The year 2024 was filled with challenges and opportunities for Hutama Karya in maintaining business continuity, enhancing efficiency, and strengthening its position as a State-Owned Enterprise (SOE) with a strategic role in national infrastructure development.

On this occasion, the Board of Commissioners would like to present its supervisory report and advisory duties to the Board of Directors throughout 2024. This report includes our assessment of the performance of the Board of Directors, views on the business prospects formulated by the Board of Directors, perspectives on corporate governance practices, and the composition and changes in the membership of the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal. Pemberian nasihat secara formal dilaksanakan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan pemberian nasihat secara informal dilaksanakan melalui kunjungan kerja ke wilayah kerja Perseroan. Sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali dan 7 (tujuh) kali Rapat Terbatas.

Performance Assessment of The Board of Directors

The Board of Commissioners continuously performs its supervisory and advisory functions toward the Board of Directors. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the management policies and the overall management of the Company's affairs, including monitoring the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), the provisions of the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations, all in the interest of the Company and line with its vision and mission.

Advisory duties are carried out both formally and informally. Formal advice is provided through Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Informal advice is given through working visits to the Company's operational areas. Throughout 2024, the Board of Commissioners held 9 (nine) times and 7 (seven) times Limited Meetings.



Yudo Margono

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris terlibat aktif dalam penyusunan strategi Perseroan dan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan. Pengawasan terhadap perumusan strategi Perseroan dilakukan dengan memberikan arahan dalam perumusan RJPP dan RKAP. Sedangkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi strategi dilakukan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RJPP dan RKAP serta kebijakan strategis secara berkala sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Perekonomian global di awal tahun 2024 dipengaruhi oleh ketegangan politik dunia masih tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan geopolitik kembali meningkat, dipicu oleh serangan Israel ke Palestina. Menjelang penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* diperkirakan akan membawa perubahan besar dalam lanskap geopolitik dan perekonomian dunia. Asesmen awal menunjukkan bahwa pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump kemungkinan akan menerapkan tarif tinggi terhadap negara-negara dengan surplus perdagangan besar dengan AS, seperti Eropa, Inggris, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Sebagai contoh, tarif tinggi dapat dikenakan terhadap seluruh produk impor dari Tiongkok, serta terhadap impor besi baja, aluminium, logam dasar, dan kendaraan dari Eropa dan Inggris, yang berpotensi memicu retaliasi dari ketiga negara tersebut. Selain itu, kebijakan imigrasi yang sangat ketat diperkirakan akan diterapkan terhadap tenaga kerja asing ilegal, sementara kebijakan politik luar negeri terhadap NATO, Rusia-Ukraina, dan Timur Tengah dapat mengubah peta geopolitik dunia.

Meskipun perekonomian global menghadapi berbagai tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengatasi dinamika global dengan kebijakan yang tepat dan sumber daya yang kuat. Pada Triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02% (yoy), meningkat dari

In carrying out its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners is actively involved in the formulation of the Company's strategies and in overseeing their implementation. The Board of Commissioners supervises the strategy formulation process by guiding the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Meanwhile, the oversight of strategy implementation is carried out through direction, monitoring, and evaluation of the execution of the RJPP, RKAP, and other strategic policies regularly as part of the Board of Commissioners' supervisory duties.

In assessing the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners considers several key aspects as the basis for its evaluation. These aspects include the macroeconomic conditions, performance achievements, such as operational performance, financial performance, and the Company's soundness level. The Board of Commissioners' assessment of the Board of Directors' performance is presented as follows.

At the beginning of 2024, the global economy was affected by heightened political tensions, particularly due to the ongoing conflict between Russia and Ukraine. After a brief period of de-escalation, geopolitical tensions flared up again, triggered by Israel's attack on Palestine. Toward the end of 2024, the re-election of President Trump in the United States (US), along with the revival of the America First policy, is expected to bring significant changes to the geopolitical and economic landscape. Preliminary assessments suggest that the US government under Trump's leadership is likely to impose high tariffs on countries with large trade surpluses with the US, such as Europe, the United Kingdom, China, Mexico, Canada, Japan, South Korea, and Vietnam. For instance, high tariffs may be imposed on all imports from China, as well as on imports of steel, aluminum, base metals, and vehicles from Europe and the UK. These measures are likely to provoke retaliatory actions from the affected countries. In addition, strict immigration policies are expected to be enforced against undocumented foreign workers, while foreign policy directions regarding NATO, the Russia- Ukraine conflict, and the Middle East may reshape the global geopolitical map.

Despite the global economy facing numerous challenges, Indonesia's economic growth continued to show positive performance. This indicates that Indonesia has been able to navigate global dynamics through sound policies and strong resources. In the fourth quarter of 2024, Indonesia's economic growth was recorded at 5,02% (yoy), up from 4,95% (yoy) in the previous

4,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan tahun 2024 mencapai 5,03% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh permintaan domestik, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap baik. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik, sejalan dengan permintaan domestik yang terjaga. Secara spasial, kinerja pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

quarter, bringing the full-year 2024 growth to 5,03% (yoy). This growth was mainly driven by domestic demand, along with sustained household consumption and stable investment. From the business field perspective, the Manufacturing and Trade sectors, as the main contributors to growth, also performed well, supported by stable domestic demand. Spatially, the highest growth performance was recorded in the Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) region.

Dari sisi industri infrastruktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif juga tercermin dalam sektor konstruksi, yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap infrastruktur, sektor konstruksi menjadi salah satu pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor konstruksi berkontribusi 10,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan I tahun 2024, menempatkannya sebagai sektor dengan kontribusi terbesar keempat dalam perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, yang terlihat dari berbagai proyek besar yang sedang berlangsung. Salah satu contohnya adalah jalan tol Trans-Sumatra dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang menjadi contoh konkret dari upaya ini. Progres pembangunan IKN Nusantara juga terus berjalan, dengan melibatkan investasi sebesar Rp58,41 triliun dari investor lokal dan asing, menunjukkan komitmen besar terhadap pengembangan infrastruktur yang strategis. Secara keseluruhan, tahun 2024 merupakan periode penting bagi sektor infrastruktur Indonesia, dengan investasi besar dan proyek-proyek strategis yang semakin mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

From the infrastructure industry perspective, Indonesia's positive economic growth is also reflected in the construction sector, which continues to contribute significantly to the national economy. With the increasing demand for infrastructure, the construction sector has become one of the main drivers in achieving stable economic growth. According to the Central Statistics Agency (BPS), the construction sector contributed 10,23% to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) in the first quarter of 2024, making it the fourth-largest contributing sector to the national economy. Infrastructure development plays a vital role in enhancing national competitiveness and further boosting economic growth, as evidenced by several major ongoing projects. One such example is the Trans-Sumatra toll road and the development of the new Capital City (IKN) Nusantara, which serves as a concrete example of this effort. The development of IKN Nusantara continues to progress, involving an investment of Rp58,41 trillion from both local and foreign investors, demonstrating a strong commitment to strategic infrastructure development. Overall, 2024 marked an important period for Indonesia's infrastructure sector, with substantial investments and strategic projects increasingly supporting national economic growth.

Di tengah kondisi perekonomian dan industri infrastruktur tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2024. Pada tahun 2024, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang baik. Total perolehan kontrak konstruksi pada tahun 2024 mencapai Rp34,84 triliun, meningkat 12,84% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp30,88 triliun. Meskipun di tahun 2024 panjang jalan tol yang beroperasi mengalami penurunan, namun volume lalu lintas transaksi pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan. Volume lalu lintas transaksi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 87,88 juta kendaraan,

Amid the prevailing economic conditions and developments in the infrastructure industry, the Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors successfully navigated the challenges and opportunities in 2024 by recording solid performance. In 2024, the Company achieved strong operational performance. Total construction contract acquisition in 2024 reached Rp34,84 trillion, an increase of 12,84% compared to Rp30,88 trillion in 2023. Although the total length of toll roads in operation decreased in 2024, traffic volume experienced growth. In 2024, the traffic volume reached 87,88 million vehicles, an increase of 10,90% compared to 79.24 million vehicles in 2023. In the property development segment, recurring

meningkat sebesar 10,90% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 79,24 juta kendaraan. Pada pengembangan properti, *recurring income* yang berfokus pada manajemen properti mengalami kenaikan pendapatan sebesar 37,63% untuk pendapatan sewa dan jasa, dari Rp97.212 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp133.791 miliar pada tahun 2024. Serta, pada pendapatan Hotel meningkat 4,01% dari Rp105.151 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp109.364 miliar pada tahun 2024.

income that focuses on property management increased by 37.63% in rental and service revenue, from Rp97,212 billion in 2023 to Rp133,791 billion in 2024. Hotel revenue increased by 4.01% from Rp105,51 billion in 2023 to Rp109,364 billion in 2024.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga mencatatkan kinerja yang baik pada sisi keuangan. Pendapatan tahun 2024 sebesar Rp30,25 triliun, meningkat 12,35% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp26,93 triliun. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, laba tahun berjalan Perseroan juga mengalami pertumbuhan di tahun 2024. Laba tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp2,77 triliun, meningkat 47,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,87 triliun. Aset tahun 2024 sebesar Rp196,04 triliun, meningkat 15,50% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp169,74 triliun. Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp138,00 triliun, meningkat 18,33% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp116,63 triliun.

In addition to operational performance, the Company also recorded strong financial performance. Revenue in 2024 amounted to Rp30.25 trillion, an increase of 12.35% compared to Rp26.93 trillion in 2023. In line with the increase in revenue, the Company's profit for the year also grew in 2024. Profit for the year in 2024 reached Rp2.77 trillion, an increase of 47.74% compared to Rp1.87 trillion in 2023. Total assets in 2024 amounted to Rp196.04 trillion, an increase of 15.50% compared to Rp169.74 trillion in 2023. Meanwhile, equity in 2024 stood at Rp138.00 trillion, an increase of 18.33% compared to Rp116.63 trillion in 2023.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan Perseroan juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Penilaian tingkat kesehatan Perseroan dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia dengan hasil, Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): BB (idn) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*): AA+(idn)/*Outlook Stabil*.

In addition to operational and financial performance, the Company's financial soundness is also one of the key considerations by the Board of Commissioners in evaluating the performance of the Board of Directors. The assessment of the Company's financial soundness was carried out by PT Fitch Ratings Indonesia, resulting in a Standalone Rating of BB (idn) and a Final Rating of AA+ (idn)/Stable Outlook.

Adapun hasil tersebut menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama. Risiko gagal bayar inheren hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut. Fitch Ratings mengevaluasi risiko kredit perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti kemampuan membayar hutang, struktur permodalan, stabilitas pendapatan serta kondisi makroekonomi dan industri yang sedang berlangsung.

These results indicate a very low expectation of default risk compared to other issuers or bonds in the same country or monetary union. The inherent default risk is only slightly higher than that of the highest-rated issuers or bonds in the country. Fitch Ratings evaluates a company's credit risk by taking into account several key factors, such as debt repayment ability, capital structure, income stability, and prevailing macroeconomic and industry conditions.

Pandangan atas Prospek Usaha Yang Disusun Direksi

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% di tahun 2025. Ekonomi pada negara maju seperti Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2024, sedangkan ekonomi Tiongkok pada tahun 2025 juga diperkirakan akan melambat.

Outlook on Business Prospects Prepared by The Board Of Directors

The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth at 3.3% in 2025. Economies in developed countries such as the United States are expected to grow at a slower pace compared to 2024, while China's economy is also anticipated to decelerate in 2025.

Pertumbuhan ekonomi nasional tetap tumbuh positif pada 2024 di tengah perlambatan ekonomi global, Pemerintah Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2025. Pemerintah senantiasa merancang berbagai mekanisme kebijakan untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis guna memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan sektor infrastruktur Indonesia pada tahun 2025 sangat optimis, dengan berbagai proyek besar yang direncanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang terus mendukung pembangunan infrastruktur, ditambah dengan kemitraan publik-swasta dan penggunaan teknologi modern, akan mendorong sektor ini untuk terus berkembang. Namun, tantangan dari ketidakpastian ekonomi global dan isu keberlanjutan akan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan prediksi kondisi perekonomian dan industri infrastruktur serta kekuatan internal Perseroan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah pertumbuhan pasar konstruksi menunjukan kinerja positif, proyek infrastruktur konektivitas menjadi agenda pembangunan pemerintah, implementasi teknologi terdepan dalam meningkatkan akurasi perencanaan dan *engineering design* proyek konstruksi serta peluang adanya Kerjasama JO/Ventura dengan Perusahaan lain.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan elemen krusial dalam memastikan keberlangsungan dan kinerja jangka panjang perusahaan. Sebagai perusahaan BUMN yang memegang peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional, Hutama Karya dituntut untuk menjalankan bisnisnya secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Despite the global economic slowdown, Indonesia's national economy continued to grow positively in 2024. The Government of Indonesia forecasts economic growth of 5.2% in 2025. The government consistently designs various policy mechanisms to strengthen the fundamentals of the Indonesian economy. The transition period of government leadership holds strategic value to ensure continuity and reinforcement of development agendas, strengthen fiscal policy functions, and maintain the momentum of reforms toward economic transformation. These efforts are aimed at achieving high, inclusive, and sustainable economic growth in support of the Golden Indonesia 2045 vision.

Overall, the growth projection for Indonesia's infrastructure sector in 2025 is very optimistic, with various major projects planned to support sustainable economic growth. Government policies that continuously promote infrastructure development, coupled with public-private partnerships and the use of modern technology, are expected to drive further growth in the sector. However, challenges stemming from global economic uncertainty and sustainability issues will remain important factors to consider in the planning and implementation of infrastructure projects in Indonesia.

Based on the projected economic conditions, the outlook of the infrastructure industry, and the Company's internal strengths, the Board of Commissioners believes that the business prospects prepared by the Board of Directors are appropriate. The Board is confident that the Company will be able to seize existing opportunities, including the continued positive performance of the construction market, the prioritization of connectivity infrastructure projects in the government's development agenda, the implementation of advanced technologies to enhance planning accuracy and engineering design in construction projects and the potential for Joint Operations (JO) or ventures with other companies.

Outlook on The Implementation of Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is a crucial element in ensuring the company's long-term sustainability and performance. As a State-Owned Enterprise (SOE) that plays a strategic role in national infrastructure development, Hutama Karya is expected to run its business professionally, transparently, accountably, and responsibly.

Dewan Komisaris menilai bahwa Hutama Karya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip GCG secara konsisten dan menyeluruh. Dalam menilai penerapan GCG di Perseroan, Dewan Komisaris memberikan penilaian terhadap sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *Sustainabillity Governance.*

Sistem Manajemen Risiko

Manajemen risiko Hutama Karya bertujuan untuk membantu Perseroan dalam mengelola risiko secara efektif di berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu di Perseroan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. *Enterprise Risk Management* (ERM) Perseroan mengacu kepada ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines* dan diterapkan ke dalam seluruh proses bisnis Perseroan. ISO 31000:2018 memberi standar penerapan ERM Perseroan mencakup prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko.

Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang merujuk kepada Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023. Pada tahun 2024 dilakukan penilaian atas kinerja tahun 2023 dengan hasil sebesar 3.44 (Fase Praktik yang Baik).

Arahan Dewan Komisaris atas kinerja Divisi Pengelolaan Risiko disampaikan setiap Triwulanan setelah penyampaian Laporan Manajemen Risiko yang disampaikan tiap Triwulan kepada Dewan Komisaris. Berikut ini arahan dari Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko di Hutama Karya pada tahun 2024 dimana Dewan Komisaris menilai:

1. Tingginya capaian kepatuhan penerapan manajemen risiko hanya terbatas pada aspek administratif kepatuhan dan pelaporan manajemen risiko, belum mencerminkan efektivitas penerapan manajemen risiko di PT Hutama Karya (Persero).
2. Tidak semua mitigasi risiko yang telah dijalankan oleh risk owner (unit kerja/anak perusahaan) efektif dalam meminimalisir tingkat risiko. Hal tersebut terlihat dari tingkat risiko residual beberapa peristiwa risiko di tingkat korporasi maupun per segmen bisnis/anak usaha masih lebih tinggi dibandingkan target risiko residual maupun risiko inheren.

The Board of Commissioners believes that Hutama Karya has demonstrated a strong commitment to consistently and comprehensively applying GCG principles. In evaluating the implementation of GCG in the Company, the Board of Commissioners assesses key areas, including the risk management system, internal control system, whistleblowing system, and sustainability governance.

Risk Management System

Hutama Karya's risk management aims to assist the Company in effectively managing risks at various levels and in specific contexts within the organization, serving as the basis for decision-making. The Company's Enterprise Risk Management (ERM) refers to ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines and is applied across all business processes of the Company. ISO 31000:2018 provides the standard for ERM implementation, covering the principles of risk management, the risk management framework, and the risk management process.

The implementation of risk management is evaluated through an assessment of the maturity level of risk management practices, referring to the Technical Guidelines for Risk Maturity Index Assessment in State-Owned Enterprises as stipulated in Decree No. SK-8/DKU.MBU/12/2023. In 2024, the assessment of 2023 performance resulted in a score of 3.44, indicating the "Good Practice" phase.

Board of Commissioners' Directives on the Performance of the Risk Management Division
The Board of Commissioners provides directives quarterly following the submission of the Risk Management Report, which is delivered to the Board. The following are the Board of Commissioners' directives on the implementation of risk management at Hutama Karya in 2024, in which the Board assessed:

1. The high compliance rate in risk management implementation was mainly limited to administrative aspects and reporting and has not yet reflected the overall effectiveness of risk management implementation at PT Hutama Karya (Persero).
2. Not all risk mitigation efforts carried out by risk owners (business units/subsidiaries) were effective in reducing risk levels. This was evidenced by the residual risk level of certain corporate-level or business segment/subsidiary-level risk events that remained higher than the targeted residual or inherent risk levels.

3. Divisi Pengelolaan Risiko sebagai lini kedua agar mendorong unit kerja/anak perusahaan sebagai lini pertama untuk menyusun langkah mitigasi risiko yang lebih baik dan efektif dalam memitigasi seluruh risiko yang ada di PT Hutama Karya (Persero). Selain itu, Divisi Pengelolaan Risiko sebagai lini kedua agar lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko oleh lini pertama.
4. Penerapan manajemen risiko agar dilakukan secara efektif dengan memasukkan *evidence* atas setiap perlakuan risiko yang telah dilakukan sehingga mitigasi risiko yang dilakukan merupakan *action plan* yang dapat memberikan dampak nyata bagi perusahaan.
5. Penyampaian data dan informasi dari unit kerja/anak perusahaan sebagai lini pertama harus menyeluruh, lengkap, dan transaparan, serta disampaikan kepada Divisi Pengelolaan Risiko pada kesempatan pertama agar tidak terjadi misinformasi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan strategi mitigasi dan perlakuan risiko.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris mengharapkan penguatan pada fungsi lini kedua dalam hal ini Divisi Pengelolaan Risiko agar manajemen risiko dapat berjalan sesuai prinsipnya yaitu menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan dan diharapkan keterbukaan dari *risk owner*/pemilik risiko dalam menyampaikan data pendukung dalam setiap kajian risiko serta diharapkan setiap rencana perlakuan risiko yang disampaikan merupakan sebuah action plan yang dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengendalikan risiko di lingkup Hutama Karya.

Sistem Pengendalian Internal

Hutama Karya telah memiliki kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang telah diperbaharui dan disahkan Direksi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DU/SPI.5197.6/KPTS/113/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024. Kebijakan sistem pengendalian internal tersebut sebagai respons dari:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. COSO *(Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commission)* Edisi 2013

3. The Risk Management Division, as the second line of defense, should encourage business units/subsidiaries, as the first line of defense, to develop more effective and comprehensive risk mitigation strategies. Additionally, the Risk Management Division should take a more active role in monitoring and evaluating the implementation of mitigation measures carried out by the first line.
4. Risk management implementation should be conducted effectively by including clear evidence for each risk treatment performed, ensuring that risk mitigation actions serve as actionable plans that deliver tangible impact to the Company.
5. Data and information provided by business units/subsidiaries, as the first line of defense, must be comprehensive, complete, and transparent and submitted to the Risk Management Division promptly to prevent misinformation that may lead to inaccurate risk mitigation strategies and treatments.

In conclusion, the Board of Commissioners expects a strengthening of the second line of defense—in this case, the Risk Management Division—so that risk management can operate under its core principle, namely, to create and protect the Company's value. It is also expected that risk owners provide transparency in submitting supporting data for each risk assessment and that every proposed risk treatment plan constitutes an actionable and executable plan that delivers a significant impact in mitigating risks across Hutama Karya.

Internal Control System

Hutama Karya has established an Internal Control System (ICS) policy, which has been updated and ratified by the Board of Directors through the Decree of the Board of Directors Number DU/SPI.5197.6/KPTS/113/XII/2024 dated December 18, 2024. This internal control system policy was developed in response to:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. COSO (Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commission) 2013 Edition

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan seluruh personel Perseroan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan Perseroan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap prosedur/kebijakan serta peraturan perundangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional.

The Internal Control System is a continuous process carried out by the Board of Commissioners, the Board of Directors, management, and all personnel of the Company to provide reasonable assurance in achieving the Company's vision, mission, goals, and objectives through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, safeguarding of company assets, and compliance with applicable procedures/policies and laws and regulations. The internal control system includes, among others, financial and operational controls.

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal keuangan dan operasional. Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Melalui laporan hasil audit, Satuan Pengawasan Intern menyajikan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya, menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit dan melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. Kemudian berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI tahun 2024, SPI telah melakukan evaluasi pengendalian internal. Hasil evaluasi selama tahun 2024 diperoleh bahwa manajemen telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan Standar yang ditetapkan Perseroan.

The Company periodically evaluates the effectiveness of its financial and operational internal control systems. The Internal Audit Unit is responsible for evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, control, and governance processes under applicable laws and company policies. Through audit reports, the Internal Audit Unit provides recommendations for improvements to be followed up and monitored for implementation. The audit findings are submitted to the President Director and the Board of Commissioners, c.q. the Audit Committee, and significant findings are reported to the President Director and the Board of Commissioners for prompt corrective action. Furthermore, based on the 2024 Annual Supervision Work Program (PKPT) of the Internal Audit Unit, an evaluation of internal controls was carried out. The results of the evaluation throughout 2024 indicated that management has implemented an adequate internal control system under the standards established by the Company.

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit melakukan telaah secara tahunan atas penerapan sistem pengendalian internal Perseroan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah berjalan dengan efektif dan memadai. Perseroan terus menerapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan, transparansi, serta kepatuhan dalam setiap aspek operasionalnya.

The Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee conduct an annual review of the implementation of the Company's internal control system. The evaluation results indicate that the Company's internal control system has been operating effectively and adequately. The Company continues to implement strategic measures to ensure security, transparency, and compliance in every aspect of its operations.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) merupakan acuan mekanisme bagi pelaporan pelanggaran sehingga apabila ada pelanggaran yang terjadi, Perseroan memiliki penanganan secara internal terlebih dahulu sebelum menjadi pelanggaran yang bersifat publik. WBS juga ditujukan agar terdapat mekanisme deteksi dini untuk masalah pelanggaran. WBS juga diperlukan sebagai langkah antisipatif dari ketidakjelasan mekanisme

Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) serves as a guideline for reporting violations, enabling the Company to handle infractions internally before they escalate into public matters. WBS is also intended to provide an early detection mechanism for potential violations. It acts as a preventive measure against the lack of clarity in reporting mechanisms, which could result in unmanaged violations within the Company. Furthermore,

pelaporan sehingga pelanggaran tidak dapat diatasi dengan tepat dan akan berujung pada pelanggaran di Perseroan menjadi tidak terkendali. Selain itu, WBS juga menjadi langkah antisipasi dari buruknya citra Perseroan karena pelanggaran tidak dikelola secara internal.

WBS helps protect the Company's reputation by ensuring that violations are addressed internally.

Perseroan telah mengatur cara penyampaian laporan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak, tidak terbatas pada pihak internal saja akan tetapi juga untuk pihak eksternal. Dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, pelaporan wajib melengkapi dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Meskipun Perseroan mewajibkan pelapor untuk menyertakan identitas lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi akan tetapi kerahasiaan pelapor akan dijaga oleh Hutama Karya. Perseroan memandang pelindungan pelapor akan menumbuhkan rasa aman bagi pejabat/karyawan Perseroan dan pelapor lainnya. Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikad baik dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pelindungan pelapor.

The Company has established procedures for reporting violations that are accessible to all parties, including both internal and external stakeholders. When submitting a report of alleged violations, the reporter is required to provide complete identification, including address and a reachable phone number. Although the Company requires complete identification, Hutama Karya ensures the confidentiality of the whistleblower. The Company believes that protecting whistleblowers fosters a sense of security for employees and other reporters. The Company is committed to protecting whistleblowers acting in good faith and will comply with all applicable laws and best practices related to whistleblower protection systems.

Terkait implementasi *Whistleblowing System* (WBS), Dewan Komisaris memiliki peran dalam menelaah hasil laporan audit khusus dari laporan WBS. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di Perseroan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan agar ke depannya penerapan WBS lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya.

Regarding the implementation of the Whistleblowing System (WBS), the Board of Commissioners plays a role in reviewing the results of special audit reports arising from WBS cases. The Board of Commissioners views that the implementation of WBS in the Company has been running well. Nevertheless, the Board advises that the effectiveness of WBS implementation should be further enhanced in the future.

Tata Kelola Keberlanjutan

Penerapan tata kelola keberlanjutan di Hutama Karya tidak hanya menjadi alat kendali dan pengawasan, tetapi juga menjadi strategi inti dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan, baik bagi Perseroan, masyarakat, maupun lingkungan. Dengan tata kelola yang kuat, Perseroan siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bagi Perseroan bergantung pada pertimbangan investasi dan keputusan yang dibangun untuk tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan. Hal ini termasuk mengelola faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) serta penciptaan nilai langsung dan tidak langsung yang positif di seluruh keputusan investasi strategis untuk meningkatkan nilai tambah pemegang saham.

Sustainability Governance

The implementation of sustainability governance at Hutama Karya is not only a tool for control and oversight but also serves as a core strategy in creating long-term added value for the Company, society, and the environment. With strong governance, the Company is well-prepared to face future challenges and make meaningful contributions to inclusive and sustainable national development.

Sustainable business growth for the Company depends on investment considerations and decision-making that focus on preparing a future-ready workforce. This includes managing Environmental, Social, and Governance (ESG) factors and creating both direct and indirect positive value through every strategic investment decision aimed at enhancing shareholder value.

Perseroan berusaha untuk mengintegrasikan keberlanjutan di seluruh lapisan Perseroan dengan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, terlepas dari tantangan untuk beroperasi di industri yang kompleks, saling berhubungan, dan terus berkembang. Perseroan terus meningkatkan proses internal untuk memastikan keunggulan operasional sekaligus melampaui kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Perseroan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui tindakan nyata, dengan harapan dapat menghasilkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan keuangan yang lebih positif bagi generasi mendatang.

The Company strives to integrate sustainability across all levels by conducting its business responsibly, despite the challenges of operating in a complex, interconnected, and constantly evolving industry. The Company continuously improves its internal processes to ensure operational excellence while going beyond mere regulatory compliance. It aims to create value for stakeholders through concrete actions, with the hope of generating more positive environmental, social, economic, and financial impacts for future generations.

Dalam menerapkan keberlanjutan, Perseroan menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan landasan utama yang digunakan untuk mengatur mekanisme keberlanjutan di Perseroan. RJPP ini diikuti dengan penyusunan target setiap tahun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) guna mencapai kinerja yang positif dan diharapkan. RJPP mencakup arah, strategi, dan aksi korporasi yang dipertimbangkan dengan memperhitungkan potensi pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan ekonomi domestik yang menjanjikan, terutama melalui mandat penugasan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera.

In implementing sustainability, the Company has developed a Long-Term Corporate Plan (RJPP), which serves as the primary foundation for managing sustainability mechanisms within the organization. This RJPP is followed by the formulation of annual targets in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) to achieve the expected positive performance. The RJPP outlines the direction, strategies, and corporate actions, carefully considering the promising potential for infrastructure development and domestic economic growth, particularly through the mandated development of the Trans-Sumatra Toll Road.

Tata Kelola Terintegrasi

PT Hutama Karya (Persero) sebagai salah satu BUMN Konglomerasi sehingga diwajibkan menerapkan *Three Lines Model* dan Tata Kelola Terintegrasi. Sehingga Dewan Komisaris perlu untuk membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana merujuk pada Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 disebutkan bahwa komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari Komisaris Utama menjabat sebagai Ketua merangkap anggota, anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris Induk dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, dan anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen dari Direksi dalam menjalankan tata kelola terintegrasi di konglomerasi PT Hutama Karya (Persero) maka disusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan.

Integrated Governance

PT Hutama Karya (Persero), as one of Indonesia's conglomerate State-Owned Enterprises (SOE), is required to implement the Three Lines Model and Integrated Governance. Accordingly, the Board of Commissioners is required to establish an Integrated Governance Committee. Referring to the Technical Guidelines for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs (Decree No. SK-3/DKU.MBU/05/2023), the composition of the Integrated Governance Committee consists of the President Commissioner acting as Chairperson and member, members of the committee from the Board of Commissioners of the Parent Company and Subsidiaries, while other committee members who are not part of the Board of Commissioners are not considered members of the Integrated Governance Committee but are assigned to support the Committee's tasks. Furthermore, as a form of commitment from the Board of Directors in implementing integrated governance within the PT Hutama Karya (Persero) conglomerate, the Integrated Governance Guidelines for the Corporate Conglomerate have been developed.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko dan GCG, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Masing-masing kegiatan/aktivitas dalam Program Kerja Komite di bawah Dewan Komisaris dirumuskan kuantitasnya. Kuantitas tersebut yang menjadi tolok ukur capaian kinerja Komite Komite di bawah Dewan Komisaris. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris secara keseluruhan dalam dilakukan pada satu periode penugasan, masing-masing aktivitas/kegiatan diberikan bobot. Dengan adanya bobot tersebut, penilaian atas capaian masing-masing aktivitas/kegiatan dapat dihitung secara proporsional dan apabila dijumlahkan akan diperoleh penilaian atas capaian kinerja Komite secara keseluruhan. Sepanjang Tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management and GCG Committee, and the Integrated Governance Committee. Each activity within the Committees' Work Program under the Board of Commissioners is quantified, and these quantities serve as the performance indicators for each Committee. The performance evaluation procedure of the Committees is conducted over a single assignment period, with each activity assigned a specific weight. These weights allow for a proportional assessment of each activity, and the total score reflects the overall performance of the respective Committee. Throughout 2024, the Board of Commissioners concluded that the Committees under its supervision had carried out their duties effectively.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2024 – 31 Januari 2024

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2024, there were changes in the composition of the Board of Commissioners. These changes were made under the needs of the Company. The changes in the composition of the Board of Commissioners are as follows:

Composition of The Board of Commissioners Period of January 1, 2024 – January 31, 2024

Composition of the Board of Commissioners for the Period of January 1, 2024 to January 31, 2024 was composed of 7 (seven) members, consisting of 1 (one) President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners, as follows:

Budiman	:	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Muhamad Lukman Edy	:	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Agung Sabar Santoso	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wahyu Muryadi	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Chairiah	:	Komisaris Commissioner
Susdiyarto Agus Praptono	:	Komisaris Commissioner
Iwan Suprijanto	:	Komisaris Commissioner

Komposisi Dewan Komisaris Periode 31 Januari 2024 – 29 Mei 2024

Pada tanggal 31 Januari 2024, RUPS Luar Biasa memutuskan memberhentikan dengan hormat Budiman sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan mengangkat Yudo Margono sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 31 Januari 2024 sampai dengan 29 Mei 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. sebagai berikut:

Composition of The Board of Commissioners Period of January 31, 2024 – May 29, 2024

On January 31, 2024, the EGMS resolved to honorably discharge Budiman from his position as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner and appointed Yudo Margono as the new President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner. Thus, the composition of the Board of Commissioners the period from January 31, 2024 to May 29, 2024 consisted of seven (7) members, comprising one (1) President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners, as follows:

Yudo Margono	:	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Muhamad Lukman Edy	:	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Agung Sabar Santoso	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wahyu Muryadi	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Chairiah	:	Komisaris Commissioner
Susdiyarto Agus Praptono	:	Komisaris Commissioner
Iwan Suprijanto	:	Komisaris Commissioner

Komposisi Dewan Komisaris Periode 29 Mei 2024 – 31 Desember 2024

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Nomor SK-121/MBU/05/2024 telah mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Chairiah sebagai Komisaris dan Wahyu Muryadi sebagai Komisaris Independen. Kemudian, mengangkat kembali Chairiah sebagai Komisaris dan Wahyu Muryadi sebagai Komisaris Independen. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 29 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

Composition of The Board of Commissioners for The Period of May 29, 2024 – December 31, 2024

The Decision of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Hutama Karya (Persero) Number SK-121/MBU/05/2024 has formally confirmed the respectful dismissal of Chairiah as Commissioner and Wahyu Muryadi as Independent Commissioner. Subsequently, Chairiah has been reappointed as Commissioner, and Wahyu Muryadi as Independent Commissioner. As such, the composition of the Board of Commissioners for the period from 29 May 2024 to 31 December 2024 consists of seven (7) members, comprising one (1) President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners, as follows:

Yudo Margono	:	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Muhamad Lukman Edy	:	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Agung Sabar Santoso	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wahyu Muryadi	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Chairiah	:	Komisaris Commissioner
Susdiyarto Agus Praptono	:	Komisaris Commissioner
Iwan Suprijanto	:	Komisaris Commissioner

Penutup

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas upaya dan kerja keras yang telah dilakukan dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan eksternal selama tahun berjalan. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada Hutama Karya. Semoga Perseroan terus berkembang, memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, dan meraih keberhasilan di masa yang akan datang.

Closing

The Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors and all levels of management and employees for their dedication and hard work in facing various external dynamics and challenges throughout the year. The Board of Commissioners also expresses its gratitude to all stakeholders for the trust and support given to Hutama Karya. May the Company continue to grow, deliver its best contributions to the nation, and achieve continued success in the years to come.

Jakarta, 30 April 2025

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



Yudo Margono
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, melalui implementasi strategi yang adaptif dan fokus pada efisiensi operasional, Perseroan berhasil mencatat sejumlah pencapaian penting yang menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2024 Perseroan terus berupaya mencapai target strategis yang telah ditetapkan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Berbagai strategi dan kebijakan telah diterapkan khususnya dalam pelaksanaan mandat Proyek Strategis Nasional dan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Bersama ini izinkan kami melaporkan analisis kinerja Perseroan, analisis prospek Perseroan, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi sepanjang tahun 2024.

Dear Shareholders and Stakeholders,
We extend our highest praise and gratitude to God Almighty for His blessings and grace. The Company successfully recorded several significant achievements that have laid the foundation for sustainable growth through the implementation of adaptive strategies and a strong emphasis on operational efficiency. Throughout 2024, the Company remained committed to achieving its strategic targets despite facing various challenges. A range of strategies and policies were implemented, particularly in the execution of the National Strategic Projects mandate and the development of infrastructure in Indonesia.

Allow us to present the Company's performance analysis, business outlook, developments in the implementation of good corporate governance, the performance evaluation of Committees under the Board of Directors, and changes in the composition of the Board of Directors throughout 2024.

Analisis atas Kinerja Perseroan

Tahun 2024 merupakan periode dinamis bagi perekonomian global dan nasional akibat ketidakpastian geopolitik, moderasi inflasi global, dan langkah pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju yang membentuk lanskap ekonomi. Dalam konteks global, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 2,9%, dengan kawasan ASEAN tetap menjadi motor pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan mencapai 4,4%. Salah satu utamanya didorong melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar ASEAN, mencatat pertumbuhan ekonomi stabil tahun 2024 sebesar 5,03% (c-to-c) yang didorong oleh konsumsi domestik serta peningkatan investasi. Kebijakan makroekonomi yang stabil turut memberikan fondasi kokoh bagi sektor konstruksi. Bank Indonesia berhasil mempertahankan kebijakan moneter yang ketat sepanjang tahun 2024 dengan suku bunga acuan sebesar 6,0% sehingga stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga dan inflasi tetap terkendali pada level 1,8%, jauh di bawah asumsi APBN. Di sisi fiskal, pemerintah mencatatkan defisit anggaran sebesar 2,2% dari PDB dengan prioritas belanja pada pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas wilayah terpencil.

Analysis of The Company's Performance

The year 2024 was a dynamic period for both the global and national economies, shaped by geopolitical uncertainties, moderated global inflation, and the monetary tightening policies adopted by advanced economies, all of which influenced the economic landscape. On a global scale, economic growth was projected at 2,9%, with the ASEAN region continuing to serve as a key driver of recovery, recording growth of 4,4%, primarily driven by accelerated infrastructure development.

Indonesia, as the largest economy in the ASEAN region, recorded a stable economic growth of 5,03% (c-to-c) in 2024, supported by strong domestic consumption and increased investment. A stable macroeconomic policy framework also provided a solid foundation for the construction sector. Bank Indonesia maintained a tight monetary policy throughout the year, with the benchmark interest rate at 6,0%, contributing to the stability of the Rupiah exchange rate and keeping inflation well-controlled at 1,8%, significantly below the State Budget (APBN) assumption. On the fiscal side, the government recorded a budget deficit of 2,2% of GDP, with spending prioritized for strategic infrastructure development and connectivity in remote areas.



Budi Harto

Direktur Utama
President Director

Dalam lanskap ekonomi nasional yang tumbuh stabil, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan 7,02% pada tahun 2024 (c-to-c) yang memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Meskipun demikian, sektor konstruksi terus menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Tahun 2024 ditandai sebagai periode transisi bagi para pelaku industri sejalan dengan perubahan prioritas kebijakan pembangunan nasional di bawah pemerintahan baru. Pergeseran fokus pemerintah dari pembangunan infrastruktur tradisional ke sektor strategis lain seperti ketahanan pangan, industrialisasi, dan pertahanan, memaksa pelaku sektor konstruksi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Adapun beberapa tantangan utama pada tahun 2024 di antaranya keterbatasan anggaran pemerintah akibat pergeseran alokasi ke sektor non infrastruktur sehingga mempengaruhi *pipeline* proyek konstruksi seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tekanan keuangan (*financial distress*) akibat tingginya beban utang dan penundaan pembayaran dari proyek dijalankan, persaingan antar BUMN Karya yang seringkali mendorong praktik *predatory pricing*, serta fluktuasi harga bahan baku akibat gejolak global maupun nilai tukar Rupiah.

Within the context of stable national economic growth, the construction sector recorded a year-on-year growth of 7.02% in 2024 (c-to-c), reinforcing its role as one of the key pillars of the national economy. Nevertheless, the construction sector continued to face various structural and operational challenges. The year 2024 marked a transitional period for industry players, in line with the shift in national development priorities under the new administration. The government's reorientation from traditional infrastructure development towards other strategic sectors—such as food security, industrialization, and defense—compelled construction sector players to adopt more flexible and adaptive approaches. Several key challenges faced in 2024 included limited government budget allocations resulting from the shift toward non-infrastructure sectors, which affected the construction project pipeline such as the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS), financial distress due to high debt burdens and delayed project payments; intense competition among BUMN Karya often resulting in predatory pricing practices; and fluctuations in raw material prices triggered by global market volatility and Rupiah exchange rate movements.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri infrastruktur tersebut, Perseroan telah menetapkan berbagai strategi usaha yang diperlukan. Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, Direksi telah memimpin penyusunan strategi dan kebijakan strategis tersebut yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024. Selanjutnya, Direksi memastikan implementasi strategi dengan melakukan evaluasi efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan melalui evaluasi laporan-laporan yang dilakukan secara berkala, khususnya Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan. *Monitoring* implementasi strategi yang telah dilakukan oleh Direksi telah berhasil mendorong pencapaian target kinerja Perseroan.

In response to the prevailing economic conditions and the dynamics of the infrastructure industry, the Company established a range of necessary business strategies. In formulating the Company's strategic direction and policies, the Board of Directors led the preparation of these strategies, which were outlined in the Company's 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The Board of Directors also ensured the implementation of the strategies by regularly evaluating their effectiveness through periodic reports, particularly the Quarterly and Annual Management Reports. The strategic implementation monitoring carried out by the Board of Directors successfully supported the achievement of the Company's performance targets.

Pada tahun 2024, Perseroan terus berkomitmen untuk memperbaiki dan menyehatkan kinerja Perseroan. Beberapa poin kunci yang menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran strategis Hutama Karya di antaranya adalah:

1. Penyelesaian 100% proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I pada tahun 2024.
2. Penyerapan proyek JTTS Tahap II oleh Divisi Sipil Umum dan PT HKI, yang mencakup ruas Betung-Jambi, Lingkar Pekanbaru, dan ruas Kapal Betung.
3. Perolehan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp18,60 triliun pada awal tahun 2024.

In 2024, the Company remained committed to improving and restoring its financial and operational performance. Several key areas were prioritized in the pursuit of Hutama Karya's strategic objectives, including:

1. Completion of 100% of Phase I of the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS) Project in 2024.
2. Absorption of Phase II JTTS projects by the Infrastructure Division and PT HKI, covering the Betung–Jambi segment, Pekanbaru Ring Road, and Kapal Betung segment.
3. Receipt of State Capital Injection (PMN) amounting to Rp18,60 trillion at the beginning of 2024.

4. Akselerasi proses penyesuaian tarif jalan tol dan kolaborasi dengan anak usaha dalam pengoperasian jalan tol untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
5. Pembayaran jatuh tempo PT HKR melalui setoran modal sebesar Rp1,50 triliun.
6. Efisiensi beban usaha mengingat keterbatasan kapasitas kapitalisasi yang ada.
7. Akselerasi klaim pada Divisi Sipil Umum, PT HKI, dan Divisi EPC.
8. Penguatan dan pengendalian biaya, mutu, waktu, serta *governance* dalam seluruh aspek operasional perusahaan.

Dengan menerapkan strategi bisnis tersebut, pada tahun 2024 Perseroan telah menghasilkan kinerja yang baik. Pencapaian tersebut terlihat dari terpenuhinya target pada tahun 2024. Pendapatan Hutama Karya tercatat sebesar Rp30,25 triliun, atau 113,88% dari target RKAP 2024. Laba bersih Hutama Karya tercatat sebesar Rp2,77 triliun, atau 1.109,76% dari target RKAP 2024. Sementara itu, ekuitas Hutama Karya pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp138,00 triliun, atau 102,90% dari RKAP. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham yang signifikan akibat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada April 2024 sebesar Rp18,60 triliun, serta peningkatan *retained earnings* yang berasal dari laba bersih tahun 2023 sebesar Rp1,87 triliun dan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp2,77 triliun.

Berbagai pencapaian target tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja operasional dan keuangan di tahun 2024. Pada tahun 2024, Hutama Karya mencatat kinerja solid di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika industri domestik. Perseroan berhasil memperoleh kontrak baru senilai Rp34,8 triliun, yang 84,84% didominasi oleh kontrak baru portofolio Jalan dan Jembatan. Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp30,25 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini didukung oleh kontribusi positif dari seluruh segmen bisnis, baik dari bisnis Jasa Konstruksi hingga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), sejalan dengan penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) serta peningkatan pendapatan dari operasional tol.

Laba bersih perusahaan mencapai Rp2,77 triliun, tumbuh 47,74% yoy. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja kuat segmen Jasa Konstruksi, khususnya HKI dan Divisi Sipil Umum, serta efisiensi operasional yang diperkuat untuk meningkatkan profitabilitas. Di sisi neraca, total aset perusahaan pada akhir 2024 mencapai Rp196,04 triliun, tumbuh 15,50% yoy. Hal ini sejalan dengan investasi

4. Acceleration of toll tariff adjustment processes and collaboration with subsidiaries in toll road operations to enhance operational effectiveness and efficiency.
5. Fulfillment of PT HKR's maturing obligations through a capital injection of Rp1,50 trillion.
6. Optimization of operating cost efficiency in response to limited capitalization capacity.
7. Acceleration of claims processing within the Infrastructure Division, PT HKI, and the EPC Division.
8. Strengthening and control of cost, quality, timeline, and governance across all operational aspects of the Company.

By implementing these business strategies, the Company delivered solid performance in 2024. This achievement is reflected in the successful attainment of key targets for the year. Hutama Karya recorded a revenue of Rp30,25 trillion, equivalent to 113.88% of the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) target. Net profit was recorded at Rp2.77 trillion, reaching 1.109,76% of the RKAP 2024 target. Meanwhile, the Company's equity stood at Rp138.00 trillion in 2024, or 102.90% of the RKAP projection. This strong performance was primarily driven by a significant increase in share capital through the receipt of State Capital Injection (PMN) in April 2024, amounting to Rp18.60 trillion, as well as an increase in retained earnings resulting from the 2023 net profit of Rp1.87 trillion and the 2024 net profit of Rp2.77 trillion.

These target achievements were aligned with improvements in both operational and financial performance in 2024. During the year, Hutama Karya demonstrated solid performance amidst global economic challenges and dynamic domestic industry conditions. The Company successfully secured new contracts valued at Rp34.8 trillion, with 84.84% of the total dominated by new contracts in the Road and Bridge portfolio. Operating revenue reached Rp30.25 trillion, reflecting a 12.35% increase compared to the previous year. This achievement was supported by positive contributions across all business segments, from Construction Services to the Toll Road Business Entity (BUJT), in line with the completion of the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS) projects and increased revenue from toll road operations.

The Company's net profit reached Rp2.77 trillion, reflecting a year-on-year growth of 47.74%. This increase was driven by the strong performance of the Construction Services segment, particularly through PT HKI and the Infrastructure Division, as well as enhanced operational efficiency aimed at improving overall profitability. On the balance sheet side, the Company's total assets at the end

berkelanjutan dalam proyek strategis, khususnya JTTS yang menjadi prioritas utama perusahaan. Di samping itu, Hutama Karya juga mencatat peningkatan ekuitas atas saldo laba tahun berjalan dan perolehan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 sebesar Rp18,6 triliun.

of 2024 stood at Rp196.04 trillion, marking a year-on-year growth of 15.50%. This growth was in line with continued investment in strategic projects, particularly the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS), which remains the Company's top priority. In addition, Hutama Karya recorded an increase in equity supported by retained earnings from the current year and the State Capital Injection (PMN) received in the 2024 fiscal year, amounting to Rp18.6 trillion.

Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Perseroan

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2024 tidak lepas dari kemampuan Perseroan dalam menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, kondisi global yang semakin tidak menentu, perkembangan pertumbuhan ekonomi domestik, dan adanya perubahan regulasi yang berlaku, dapat memberikan dampak pada kinerja Hutama Karya di masa mendatang. Isu strategis seperti kelanjutan proyek mandat Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), kekuatan *brand power* Hutama Karya, keberlanjutan bisnis EPC dan properti, implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, serta persebaran talenta unggul yang belum merata menjadi tantangan tersendiri bagi Hutama Karya. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat menjadi aspek krusial dalam mengatasi kompleksitas tantangan eksternal dan internal, terutama risiko terkait penugasan JTTS. Selain itu, optimalisasi operasional bisnis juga perlu mendapat perhatian khusus guna meningkatkan profitabilitas Hutama Karya.

Challenges Faced by The Company

The various positive achievements in 2024 were closely linked to the Company's ability to navigate multiple challenges. These challenges included increasing global uncertainty, developments in domestic economic growth, and regulatory changes that may impact Hutama Karya's future performance. Strategic issues such as the continuation of the mandated Trans-Sumatra Toll Road (JTTS) project, the strength of Hutama Karya's brand power, the sustainability of its EPC and property businesses, the comprehensive implementation of risk management, and the uneven distribution of top talent remain key challenges for the Company. Accordingly, selecting the right strategies is crucial to addressing the complexity of both external and internal challenges, particularly those associated with the JTTS assignment. Furthermore, operational optimization must be given special attention to enhance Hutama Karya's profitability.

Analisis Prospek Usaha

Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,3% pada tahun 2025, sedikit meningkat dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,2%. Meskipun ada penyesuaian positif untuk Amerika Serikat, proyeksi ini masih di bawah rata-rata historis pertumbuhan global antara tahun 2000 hingga 2019 yang mencapai 3,7%. Proyeksi ini mencerminkan ketidakpastian yang masih tinggi di pasar global, dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan fluktuasi harga komoditas. IMF juga memperingatkan bahwa ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis bisa menghambat pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Namun, beberapa negara maju diperkirakan akan menunjukkan pemulihan yang lebih baik, berkat kebijakan fiskal yang lebih efektif dan sektor-sektor tertentu yang mengalami pemulihan.

Business Outlook Analysis

According to the World Economic Outlook (WEO) released by the International Monetary Fund (IMF) in January 2025, global economic growth is projected to reach 3.3% in 2025, slightly higher than the previous projection of 3.2%. While the outlook for the United States has been revised upward, this projection remains below the historical average global growth rate of 3.7% observed between 2000 and 2019. This forecast reflects the continued high level of uncertainty in global markets, driven by various influencing factors such as geopolitical tensions, rising protectionism, and fluctuations in commodity prices. The IMF also cautioned that ongoing geopolitical conflicts and increasingly protectionist trade policies could hinder a stronger economic recovery. Nonetheless, several advanced economies are expected to demonstrate improved recovery, supported by more effective fiscal policies and the rebound of specific economic sectors.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia memiliki proyeksi yang lebih optimis. Pemerintah Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2025. Dengan memperhatikan proyeksi tersebut, Pemerintah senantiasa merancang berbagai mekanisme kebijakan untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis guna memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pondasi utama yang tidak dapat dipisahkan.

On the other hand, Indonesia's economic outlook is more optimistic. The Government of Indonesia projects national economic growth at 5.2% in 2025. In line with this projection, the Government continues to formulate various policy mechanisms to strengthen the country's economic fundamentals. The current political transition period holds strategic value in ensuring the continuity and reinforcement of development agendas, strengthening fiscal policy functions, and maintaining the momentum of economic reforms aimed at achieving high, inclusive, and sustainable growth, supporting the vision of Golden Indonesia 2045. To achieve these goals, infrastructure development remains a fundamental pillar that cannot be separated from the national development strategy.

Sejalan dengan hal ini, bidang infrastruktur ke depan diarahkan untuk melanjutkan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kebijakan anggaran infrastruktur tahun 2025 yang disusun Pemerintah di antaranya mencakup, pembangunan jaringan irigasi dan bendungan, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah, pembangunan rumah sakit berkualitas, pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi, pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan, pelabuhan penunjang distribusi pangan, pemerataan infrastruktur digital dan teknologi serta penyediaan/ renovasi rumah bersanitasi baik.

In line with this, the infrastructure sector is expected to continue progressing as a key driver of economic growth and equitable regional development. The Government's infrastructure budget policy for 2025 includes several priority programs, such as the construction of irrigation networks and dams; development and renovation of integrated model schools; establishment of quality hospitals; expansion of road network infrastructure; enhancement of port and airport facilities; railway connectivity to support downstream industrialization; development of regional roads to stimulate growth centers; supporting ports for food distribution; equitable development of digital and technological infrastructure; as well as the provision and renovation of adequate, sanitary housing.

Berbagai perkiraan kondisi perekonomian global dan nasional serta industri infrastruktur tersebut, Perseroan memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pasar konstruksi menunjukan kinerja positif.
2. Proyek infrastruktur konektivitas menjadi agenda pembangunan pemerintah.
3. Implementasi teknologi terdepan dalam meningkatkan akurasi perencanaan dan *engineering* design proyek konstruksi.
4. Peluang adanya Kerjasama JO/Ventura dengan Perusahaan lain.

Given the various projections regarding global and national economic conditions, as well as developments within the infrastructure sector, the Company sees promising growth opportunities. These opportunities include the following:

1. Positive performance and continued growth of the construction market.
2. Connectivity infrastructure projects remain a key priority on the Government's development agenda.
3. Implementation of advanced technologies to enhance accuracy in project planning and engineering design.
4. Opportunities for joint operations (JO) or ventures with other companies to expand capabilities and market reach.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki serta berbagai peluang tersebut, maka Perseroan optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Hutama Karya telah menyusun sasaran dan strategi korporasi untuk tahun 2025, dengan mengacu pada rancangan RJPP Tahun

By leveraging its internal strengths and capitalizing on these opportunities, the Company remains optimistic about its prospects. Hutama Karya has developed its corporate objectives and strategies for 2025 concerning the 2025–2029 Long-Term Corporate Plan (RJPP). To enhance

2025-2029. Dalam rangka memperkuat daya saing dan menghadapi masa depan, Hutama Karya mengusung tema strategis jangka panjang yaitu *Business Resilience, Realigned Portfolio, Accelerated Growth*, dan *Value Enhancement* (BRAVE). Tema ini mencakup profitabilitas positif pada seluruh segmen bisnis, efisiensi struktur *holding* dan optimasi bisnis, pengembangan *revenue engine* untuk peningkatan profitabilitas, serta menciptakan manfaat maksimal dari hasil sinergi dalam mendukung Rencana Pembangunan Pemerintah Indonesia.

Dengan strategi tersebut, Hutama Karya berkomitmen untuk menghadapi masa depan dengan lebih tangguh dan terstruktur. Untuk mewujudkan hal tersebut, Hutama Karya telah merumuskan sasaran strategis jangka panjang yang akan dijalankan dalam periode 2025-2029. Sasaran-sasaran ini bertujuan untuk memperkuat posisi Hutama Karya dan memastikan keberlanjutan pertumbuhannya dalam menghadapi dinamika industri. Adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Business Resilience*
   Tema ini bertujuan untuk memastikan Perseroan mencapai profitabilitas positif di seluruh segmen bisnis dengan fokus utama pada jasa konstruksi dan meningkatkan efisiensi seluruh segmen bisnis.
2. *Realigned Portfolio*
   Tema ini bertujuan bagi Perseroan untuk meningkatkan efisiensi struktur holding dan efisiensi bisnis untuk memperkuat integrasi antar unit bisnis dan meningkatkan efektivitas perusahaan secara menyeluruh.
3. *Accelerated Growth*
   Tema ini berkaitan dengan arah pengembangan revenue engine untuk mendorong pemaksimalan potensi pendapatan dan peningkatan profitabilitas.
4. *Value Enhancement*
   Tema ini berkaitan dengan menciptakan manfaat dari hasil rencana sinergi yang dibentuk Perseroan di masa mendatang.

Tata Kelola Perusahaan

Sebagai BUMN yang menjalankan mandat strategis nasional, Hutama Karya senantiasa berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dalam seluruh aspek kegiatan usaha. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta berdaya saing tinggi. Penerapan GCG di Hutama Karya mengacu pada keempat pilar GCG yaitu ETAK (Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan).

competitiveness and prepare for future challenges, Hutama Karya has adopted a long-term strategic theme: Business Resilience, Realigned Portfolio, Accelerated Growth, and Value Enhancement (BRAVE). This theme encompasses achieving positive profitability across all business segments, streamlining the holding structure and optimizing business operations, developing revenue engines to enhance profitability, and generating maximum value through synergy—ultimately supporting the Government of Indonesia's development agenda.

With this strategy, Hutama Karya is committed to facing the future with greater resilience and a more structured approach. To realize this vision, the Company has formulated a set of long-term strategic objectives to be implemented during the 2025–2029 period. These objectives are aimed at strengthening Hutama Karya's market position and ensuring sustainable growth amid evolving industry dynamics. The strategic objectives are as follows:

1. Business Resilience
   This theme aims to ensure that the Company achieves positive profitability across all business segments, with a primary focus on construction services, while also enhancing efficiency across all areas of operation.
2. Realigned Portfolio
   This theme focuses on improving the efficiency of the Company's holding structure and business operations to strengthen integration across business units and enhance overall corporate effectiveness.
3. Accelerated Growth
   This theme relates to the development of revenue engines to optimize income potential and drive increased profitability.

4. Value Enhancement
   This theme is centered on generating value from future synergy initiatives planned by the Company.

Corporate Governance

As a State-Owned Enterprise entrusted with a national strategic mandate, Hutama Karya remains fully committed to consistently and sustainably implementing Good Corporate Governance (GCG) principles across all areas of its operations. This commitment forms a critical foundation for building a transparent, accountable, and high-integrity organization with strong competitiveness. The implementation of GCG at Hutama Karya is guided by the four pillars of GCG, namely ETAK: Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan GCG secara menyeluruh, Hutama Karya secara konsisten menegakkan standar perilaku etika dalam seluruh kegiatan usaha dan interaksi kerja, baik secara internal maupun eksternal. Penerapan perilaku beretika merupakan bagian integral dari budaya perusahaan yang mengacu pada Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*), yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan perusahaan, mulai dari jajaran Direksi, Dewan Komisaris, hingga karyawan di seluruh unit kerja.

Hutama Karya telah menyusun dan mengimplementasikan Kode Etik Perusahaan sebagai pedoman perilaku profesional dan etis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kode Etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran dan integritas dalam bekerja, anti-korupsi dan anti-gratifikasi, keadilan dan anti-diskriminasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta menjaga kerahasiaan dan informasi perusahaan. Kode Etik tersebut disosialisasikan secara berkala melalui pelatihan, internalisasi budaya perusahaan, dan media komunikasi internal.

Terkait dengan transparansi, Hutama Karya secara rutin mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan ini mencakup laporan laba rugi, neraca, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja finansial Perseroan. Hutama Karya juga menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi tentang kinerja operasional, finansial, serta strategi Perseroan yang telah dilaksanakan selama setahun. Laporan ini juga mengandung informasi mengenai tantangan yang dihadapi, kebijakan yang diterapkan, dan pencapaian yang diraih. Selain itu, Perseroan juga menyusun Laporan Keberlanjutan yang memaparkan komitmen dan implementasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta langkah-langkah yang diambil dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Informasi ini dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, melalui situs web resmi Perseroan di www.hutamakarya.com.

Terkait Akuntabilitas Perseroan telah menyampaikan pencapaian target dan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memiliki kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh komite Dewan Komisaris berdasarkan KPI Korporasi yang termuat di dalam Kontrak

As part of its commitment to comprehensive GCG implementation, Hutama Karya consistently upholds ethical standards in all aspects of its business operations and professional interactions, both internal and external. Ethical conduct is an integral component of the Company's corporate culture and is based on the Code of Conduct, which must be observed by all members of the Company, ranging from the Board of Directors and the Board of Commissioners to employees at every level and unit.

Hutama Karya has developed and implemented a Corporate Code of Conduct as a guideline for professional and ethical conduct in carrying out duties and responsibilities. This Code of Ethics outlines key principles, including honesty and integrity in the workplace, anti-corruption and anti-gratification practices, fairness and non-discrimination, compliance with applicable laws and regulations, and the safeguarding of confidential company information. The Code is regularly socialized through training programs, internalization of corporate culture, and internal communication channels.

Regarding transparency, Hutama Karya consistently discloses audited financial statements that have received an unqualified opinion on all material aspects. These reports include the income statement, balance sheet, cash flow statement, and notes to the financial statements, all of which provide a clear picture of the Company's financial performance. In addition, the Company publishes an Annual Report that presents comprehensive information on its operational and financial performance, as well as the strategic initiatives carried out throughout the year. This report also includes details on challenges encountered, policies implemented, and achievements attained. Furthermore, the Company prepares a Sustainability Report outlining its commitment to and implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs, along with efforts undertaken to uphold environmental and social sustainability. All of this information is made publicly accessible to stakeholders through the Company's official website at www.hutamakarya.com.

In terms of accountability, the Company has disclosed the achievement of targets and performance of both the Board of Directors and the Board of Commissioners. To enhance the quality of the execution of duties and responsibilities execution, the Board of Commissioners and the Board of Directors are committed to establishing policies and conducting performance evaluations for both governing bodies. The performance evaluation of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners, supported by its committees, and

Manajemen antara Direksi dengan Pemegang Saham. Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan individual dilaporkan dalam laporan berkala kepada Dewan Komisaris. Di sisi lain, perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN. Kemudian, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

based on the Corporate Key Performance Indicators (KPIs) stipulated in the Management Contract between the Board of Directors and the Shareholders. The achievement of these KPIs, both collectively and individually, is reported regularly to the Board of Commissioners. Furthermore, the calculation of KPI achievements, both collegial and individual, is reviewed by a Public Accounting Firm (PAF) that audits the Company's financial statements. The results of this review are then submitted to the Shareholders, in this case, the Ministry of State-Owned Enterprises. Meanwhile, the performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted through a self-assessment method and reported to the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

Terkait dengan keberlanjutan, Hutama Karya percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang berkelanjutan. Dengan semangat keberlanjutan, Perseroan berkomitmen untuk terus tumbuh secara inklusif dan bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan global. Hutama Karya berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui integrasi prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam setiap lini bisnis perusahaan, terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional.

Hutama Karya firmly believes that the Company's success is not solely measured by financial performance but also by its contributions to environmental stewardship, social development, and sustainable governance. With a spirit of sustainability, the Company is committed to fostering inclusive and responsible growth in line with both national and global development goals. Hutama Karya is devoted to conducting its business activities sustainably as part of its corporate responsibility to generate long-term value for all stakeholders. This commitment is manifested through the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into all lines of the Company's business operations, particularly in the execution of national strategic infrastructure projects.

Dalam aspek *Environmental*, Hutama Karya mendukung pelestarian lingkungan hidup dengan menjalankan operasional yang ramah lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan Perseroan antara lain dengan efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di proyek konstruksi dan operasional, pengelolaan limbah (padat dan cair) secara sistematis sesuai regulasi lingkungan dan rehabilitasi lingkungan dan penghijauan kawasan terdampak proyek. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan menggunakan material konstruksi yang berkelanjutan dan bersertifikasi dan senantiasa berkomitmen dalam kepatuhan terhadap AMDAL dan *monitoring* berkala atas dampak lingkungan proyek.

In the Environmental aspect, Hutama Karya supports environmental preservation by implementing environmentally responsible operations. The Company's environmental initiatives include energy efficiency measures and carbon emission reduction in both construction projects and operational activities, systematic management of solid and liquid waste in compliance with environmental regulations, as well as site rehabilitation and reforestation in areas affected by projects. In carrying out its operations, the Company utilizes sustainable and certified construction materials and remains firmly committed to complying with Environmental Impact Assessments (AMDAL) and conducting regular monitoring of environmental impacts associated with its projects.

Dalam aspek Social, Hutama Karya berperan aktif dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar proyek, termasuk penyerapan tenaga kerja serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang fokus pada pendidikan,

In the Social aspect, Hutama Karya actively contributes to the advancement of social and economic development within communities. This commitment is realized through the empowerment of local communities surrounding project areas, including workforce absorption and the implementation of Corporate Social and

kesehatan, lingkungan, dan pengembangan UMKM. Kepada karyawan, Perseroan memberikan kesetaraan kesempatan kerja, inklusivitas, dan pelindungan hak-hak tenaga kerja, memberikan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, pengembangan karier, dan sertifikasi teknis serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.

Environmental Responsibility (CSR) programs. These programs focus on key areas such as education, healthcare, environmental stewardship, and the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). For its employees, the Company upholds equal employment opportunities, inclusivity, and the protection of labor rights. Hutama Karya is committed to enhancing human capital by providing training, career development opportunities, and technical certifications. Additionally, the Company strictly enforces Occupational Health and Safety (OHS) standards to ensure a safe and healthy working environment for all personnel.

Dalam aspek *Governance*, Hutama Karya menerapkan prinsip GCG sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berintegritas dan bertanggung jawab. Implementasi tata kelola keberlanjutan dilakukan melalui, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang kuat, sistem *Whistleblowing* dan kebijakan *anti-fraud* untuk mencegah pelanggaran, penilaian dan pemetaan risiko keberlanjutan dalam setiap aktivitas proyek serta integrasi nilai-nilai AKHLAK sebagai budaya perusahaan yang mendukung etika dan keberlanjutan.

In the Governance aspect, Hutama Karya upholds the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the foundation for making decisions with integrity and accountability. The implementation of sustainability governance is carried out through strong pillars of transparency, accountability, and robust internal controls. This includes a Whistleblowing System and anti-fraud policies aimed at preventing misconduct, as well as sustainability risk assessments and mapping embedded into every project activity. Moreover, the Company integrates the core values of AKHLAK as part of its corporate culture to promote ethics and sustainability across all levels of the organization.

Penilaian Komite Di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi sebanyak 8 (delapan) Komite, yaitu:
1. Komite Risiko Investasi
2. Komite Risiko Konstruksi
3. Komite KPI
4. Komite TJSL
5. Komite Sanksi
6. Komite Talenta
7. Komite Pelindungan Data Pribadi
8. Komite Pengarah TI

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan secara tahunan oleh Direksi dengan kriteria penilaian yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite di bawah Direksi. Secara umum, Direksi menilai masing-masing komite telah bekerja secara baik selama 2024 yang tercermin melalui dukungan dan peran komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dukungan yang telah diberikan mencakup dalam pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan batasan kewenangannya.

Assessment of Committees Under the Board of Directors

In carrying out its management duties, the Board of Directors is supported by 8 (eight)Committees operating under its supervision, namely:
1. Committee of Investment Risk
2. Committee of Construction Risk
3. Committee of KPI
4. Committee of CSER
5. Committee of Sanctions
6. Committee of Talent
7. Committee of Personal Data Protection
8. Committee of IT Steering

The performance evaluation procedure for the Committees under the Board of Directors is conducted annually by the Board of Directors, with assessment criteria based on the execution of duties and responsibilities assigned to each Committee. In general, the Board of Directors assessed that each committee performed well throughout 2024, as reflected in their support and roles in assisting the implementation of the Board's duties and responsibilities. The support provided included decision-making and the provision of recommendations under their respective scopes of authority.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2024 – 15 Maret 2024

Komposisi Direksi sebelum periode 1 Januari 2024 sampai dengan 15 Maret 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, 5 (lima) orang Direktur sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Directors

During 2024, there were changes in the composition of the Board of Directors. These changes were made based on the needs of the Company. The changes in the composition of the Board of Directors are as follows:

Composition of the Board of Directors January 1, 2024 – March 15, 2024

Composition of the Board of Directors Prior to the Period of January 1, 2024 to March 15, 2024, consisted of 7 (seven) members, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 5 (five) Directors, as follows:

Budi Harto	:	Direktur Utama | President Director
Aloysius Kiik Ro	:	Wakil Direktur Utama | Vice President Director
Eka Setya Adrianto	:	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko | Director of Finance & Risk Management
Muhammad Fauzan	:	Direktur Human Capital & Legal | Director of Human Capital & Legal
Agung Fajarwanto	:	Direktur Operasi I | Director of Operations I
Gunadi	:	Direktur Operasi II | Director of Operations II
Koentjoro	:	Direktur Operasi III | Director of Operations III

Komposisi Direksi Periode 15 Maret 2024 – 18 November 2024

Pada tanggal 15 Maret 2024, RUPS Luar Biasa memutuskan:

1. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko.
2. Mengalihkan penugasan Eka Setya Adrianto semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan.
3. Mengangkat Sugiarti sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Sehingga komposisi Direksi periode 15 Maret 2024 sampai dengan 18 November 2024 yaitu sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 6 (enam) orang Direktur sebagai berikut:

Composition of the Board of Directors Period of March 15, 2024 – November 18, 2024

On March 15, 2024, the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolved the following:

1. To change the nomenclature of the Board of Directors' positions, specifically by separating the position of Director of Finance and Risk Management into two distinct roles: Director of Finance and Director of Risk Management.
2. To reassign Eka Setya Adrianto from his previous role as Director of Finance and Risk Management to the newly defined position of Director of Finance.
3. To appoint Sugiarti as Director of Risk Management.

Thus, the composition of the Board of Directors period of March 15, 2024 to November 18, 2024, consists of eight (8) members, comprising one (1) President Director, one (1) Vice President Director, and six (6) Directors, as follows:

Budi Harto	:	Direktur Utama | President Director
Aloysius Kiik Ro	:	Wakil Direktur Utama | Vice President Director
Eka Setya Adrianto	:	Direktur Keuangan | Director of Finance
Muhammad Fauzan	:	Direktur Human Capital & Legal | Director of Human Capital & Legal
Agung Fajarwanto	:	Direktur Operasi I | Director of Operations I
Gunadi	:	Direktur Operasi II | Director of Operations II
Koentjoro	:	Direktur Operasi III | Director of Operations III
Sugiarti	:	Direktur Manajemen Risiko | Director of Risk Management

Komposisi Direksi Periode 18 November 2024 – 31 Desember 2024

Bahwa sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan Aloysius Kiik Ro per 17 November 2024, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) Nomor: SK-14.XI/DK/PTHK/2024 tanggal 18 November 2024, telah ditetapkan Budi Harto sebagai Pelaksana Tugas Wakil Direktur Utama untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatan Wakil Direktur Utama sampai dengan adanya penetapan pejabat definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga komposisi Direksi periode 18 November 2024 sampai 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama merangkap Plt. Wakil Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur sebagai berikut:

Composition Of The Board Of Directors For The Period Of November 18, 2024 – December 31, 2024

That in connection with the expiration of Aloysius Kiik Ro's term of office as of November 17, 2024, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) Number: SK-14.XI/DK/PTHK/2024 dated November 18, 2024, Budi Harto has been appointed as Acting Deputy President Director to carry out the duties and functions of the position of Deputy President Director until the appointment of a definitive official by the General Meeting of Shareholders. As such, the composition of the Board of Directors for the period from 18 November 2024 to Decmber 31, 2024 consists of seven (7) members, comprising one (1) President Director concurrently serving as Acting Vice President Director, and six (6) Directors, as follows:

Budi Harto	:	Direktur Utama merangkap Plt. Wakil Direktur Utama President Director concurrently serving as Acting Vice President Director
Eka Setya Adrianto	:	Direktur Keuangan | Director of Finance
Muhammad Fauzan	:	Direktur Human Capital & Legal | Director of Human Capital & Legal
Agung Fajarwanto	:	Direktur Operasi I | Director of Operations I
Gunadi	:	Direktur Operasi II | Director of Operations II
Koentjoro	:	Direktur Operasi III | Director of Operations III
Sugiarti	:	Direktur Manajemen Risiko | Director of Risk Management

Penutup

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, Dewan Komisaris, mitra kerja, dan seluruh insan Hutama Karya atas dukungan dan kontribusinya dalam pencapaian kinerja perusahaan selama tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan informatif mengenai kondisi serta arah strategis Perseroan ke depan.

Closing

We would like to express our highest appreciation to all stakeholders, including the Government, the Board of Commissioners, business partners, and all members of Hutama Karya for their support and contributions to the Company's performance achievements throughout 2024. We hope this report provides a clear, transparent, and informative overview of the Company's current condition and strategic direction in the future.

Jakarta, 30 April 2025

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Budi Harto
Direktur Utama merangkap Plt. Wakil Direktur Utama
President Director concurrently Acting Vice President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Hutama Karya (Persero)

Statement of Members of Board of Commissioners on the Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Hutama Karya (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Hutama Karya (Persero) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT Hutama Karya (Persero) for 2024 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 30 April 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Yudo Margono
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner



Muhamad Lukman Edy
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner



Agung Sabar Santoso
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Chairiah
Komisaris
Commissioner



Iwan Suprijanto
Komisaris
Commissioner



Wahyu Muryadi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Hutama Karya (Persero)

Statement of Members of Board of Directors on the Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Hutama Karya (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Hutama Karya (Persero) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT Hutama Karya (Persero) for 2024 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 30 April 2025

Direksi
Board of Directors



Budi Harto
Direktur Utama
President Director



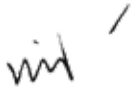
Budi Harto
Plt. Wakil Direktur Utama
Acting Vice President Director



Eka Setya Adrianto
Direktur Keuangan
Director of Finance



Sugiarti
Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management



Agung Fajarwanto
Direktur Operasi I
Director of Operation I



Gunadi
Direktur Operasi II
Director of Operation II



Koentjoro
Direktur Operasi III
Director of Operation III



Muhammad Fauzan
Direktur *Human Capital dan Legal*
Director of Human Capital and Legal





Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan
Company Identity



Nama Panggilan **Referred as**	Perseroan Company
Status Perusahaan **Status**	Perseroan Terbatas Limited Liability Company
Bidang Usaha **Business Activities**	Industri konstruksi, pengusahaan jalan tol, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, pengembangan properti, real estate, penyewaan ruangan dan hotel, dan manufaktur. Construction industry, toll road concessions, capacity building services in the field of construction services, property developer, real estate, rent of space and hotel and manufacture.
Tanggal Pendirian **Date of Establishment**	29 Maret 1961 March 29, 1961
Dasar Hukum Pendirian **Legal Basis of Establishment**	• Penetapan Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971 menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Hutama Karya. • Perubahan Hutama Karya menjadi PT Hutama Karya (Persero) dengan akta No. 74 tanggal 15 Maret 1973 dari notaris Kartini Muljadi, S.H. yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 54 tanggal 1 Februari 1974, Tambahan No.10. • Akta notaris No. 01 tanggal 1 Oktober 2021 dan akta notaris No. 11 tanggal 8 Februari 2022 dari notaris Ashoya Ratam, S.H, M.kn., tentang penambahan modal dari Negara Republik Indonesia. Perubahan ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU AH.01.03- 0455708 tanggal 1 Oktober 2021 dan No. AHU-AH.01.03-0088020 tanggal 9 Februari 2022. • Akta Notaris No. 07 tanggal 16 Januari 2023 dari notaris Yumna Shabrina, S.H, M.Kn tentang perubahan anggaran dasar. Perubahan ini telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU AH.01.03- 0008478 tanggal 19 Januari 2023. • Akta Notaris No. 50 tanggal 19 Desember 2023 dari notaris Ashoya Ratam, S.H, M.Kn tentang penambahan modal dari Negara Republik Indonesia. Perubahan ini telah termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 2024 nomor I, Tambahan nomor 43/2024. • Government stipulation in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 14 of 1971 became a State Company and changed its name to Hutama Karya State Company. • The change of Hutama Karya to PT Hutama Karya (Persero) with deed No. 74 dated March 15, 1973 from notary Kartini Muljadi, S.H. which was authorized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. Y.A.5/300/4 dated August 20, 1973, and announced in the State Gazette No. 54 dated February 1, 1974, Supplement No.10. • Notarial deed No. 01 dated October 1, 2021 and notarial deed No. 11 dated February 8, 2022 from notary Ashoya Ratam, S.H, M.kn., concerning additional capital from the Republic of Indonesia. These amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU AH.01.03- 0455708 dated October 1, 2021 and No. AHU-AH.01.03-0088020 dated February 9, 2022. • Notarial Deed No. 07 dated January 16, 2023 from notary Yumna Shabrina, S.H, M.Kn regarding amendments to the articles of association. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU AH.01.03- 0008478 dated January 19, 2023. • Notarial Deed No. 50 dated December 19, 2023 from notary Ashoya Ratam, S.H, M.Kn regarding additional capital from the Republic of Indonesia. This amendment has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated January 2, 2024 number I, Supplement number 43/2024.

Kepemilikan Ownership	Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan saham 100,00% The Government of the Republic of Indonesia owning 100.00 percent of the shares.
Modal Dasar Authorized Capital	Rp250.000.000.000.000
Kode Obligasi Bond Ticker	PTHK
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and fully paid shares	Rp131.646.000.000.000
Data Jaringan Kantor Office Network Data	1 Kantor Pusat — Parent Company 7 entitas Anak — Subsidiary companies 4 entitas Cucu/Afiliasi — Affiliations
Jumlah Karyawan Total Employees	2.141 Orang per 31 Desember 2024. 2,141 people as of December 31, 2024.

Akses Informasi
Information Access

Kantor Pusat
Head Office

HK Tower
Jl. Letjend. Haryono M.T. Kav. 8, Cawang,
Jakarta 13340 Indonesia
Telp | Phone : (021) 8193708
Faks | Fax : (021) 819 6107
E-mail : pthk@hutamakarya.com
Website : www.hutamakarya.com

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Adjib Al Hakim
Telp | Phone : (021) 8193708
E-mail : pthk@hutamakarya.com

Hubungan Investor
Investor Relations

E-mail : investor.relations@hutamakarya.com

Media Sosial
Social media

@HutamaKarya
Hutamakarya
Hutama Karya



Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Names and Locations of Regional Office and Branch Office

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan belum memiliki Kantor Cabang.

As of December 31 2024, the company had no branch office yet.

Brand Perusahaan
Company Brand

Inovasi Untuk Solusi

Filosofi Logo

Hutama Karya memiliki makna karya luhur dan bermutu. Dari awal berdiri hingga kini Hutama Karya telah mempersembahkan beragam karya bagi ibu pertiwi, untuk kesejahteraan bangsa Huruf H dan K Kapital yang dirangkai menyiratkan kekuatan untuk maju melampaui batas negeri, melebarkan sayap membangun karya-karya lain untuk mengharumkan Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat Hutama Karya dalam membangun karya-karya dalam pengolahan aktivitas dan penyelesaian permasalahan.

Logo Philosophy

Hutama Karya means noble and quality work. From its inception until now, Hutama Karya has presented various works for the motherland, for the welfare of the nation. The letters H and K of the Capital are strung together, implying strength to advance beyond the borders of the country, expanding to build other works to make Indonesia proud. The red color symbolizes the courage and enthusiasm of Hutama Karya in developing works in managing activities and solving problems.

Filosofi *Tagline* - Inovasi untuk Solusi

Insan Hutama Karya mengutamakan profesionalisme, dedikasi, pengetahuan, dan ketekunan dalam setiap karya yang dibangun.

The Philosophy of Tagline - Innovation through Solutions

Employees of Hutama Karya prioritize professionalism, dedication, knowledge, and persistence in every work they build.

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of The Company

PT Hutama Karya (Persero) ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang pada awalnya merupakan perusahaan swasta bernama Hollandsche Beton Maatschappij yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. PP 61/1961 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971 menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Hutama Karya. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 29 Maret 1961.

Sejalan dengan dipenuhinya persyaratan untuk menjadi Perseroan Terbatas, maka status Hutama Karya berubah menjadi PT Hutama Karya (Persero) dengan akta No. 74 tanggal 15 Maret 1973 dari notaris Kartini Muljadi, S.H.. Perubahan status Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 54 tanggal 1 Februari 1974, Tambahan No. 10.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 25 tanggal 10 Juni 2024 dari notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn tentang penambahan modal dari Negara Republik Indonesia.

PT Hutama Karya (Persero) ("Company") is a State-Owned Enterprise ("SOE") which was initially a private company named Hollandsche Beton Maatschappij that accordance with Government Regulation No. 61/1961, which was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 14 of 1971, Hollandsche Beton Maatschappij became a state-owned company and changed its name to Hutama Karya State Company. The company started its commercial business activities on March 29, 1961.

In conjunction with the fulfilment of all necessary requirements to become a limited liability company, the Company's status had changed into PT Hutama Karya (Persero) under the notarial deed No. 74 dated March 15, 1973 of the Kartini Muljadi, S.H.. The change in the Company's status was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Decree No. Y.A.5/300/4 dated 20 August 1973, and announced in the State Gazette No. 54 dated 1 February 1974, Supplement No. 10.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by notarial deed No. 25 dated June 10, 2024 from notary Ashoya Ratam, SH, Mkn concerning additional capital from the Republic of Indonesia.

Keterangan Perubahan Nama

Sejak pertama kali didirikan, Hutama Karya mengalami perubahan nama sebagaimana penjelasan berikut:

Name Change Description

Since its establishment, Hutama Karya has undergone name changes as explained below:

29 Maret 1961
March 29, 1961

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61/1961 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971, Hollandsche Beton Maatschappij menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Hutama Karya.

In accordance with Government Regulation No. 61/1961, which was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 14 of 1971, Hollandsche Beton Maatschappij became a state-owned company and changed its name to Hutama Karya State Company.

15 Maret 1973
March 15, 1973

Sejalan dengan dipenuhinya persyaratan untuk menjadi Perseroan Terbatas, maka status Hutama Karya berubah menjadi PT Hutama Karya (Persero) dengan akta No. 74 tanggal 15 Maret 1973 dari notaris Kartini Muljadi, S.H.

In conjunction with the fulfilment of all necessary requirements to become a limited liability company, the Company's status had changed into PT Hutama Karya (Persero) under the notarial deed No. 74 dated March 15, 1973 of the Kartini Muljadi, S.H.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

VISI

Pengembang Infrastruktur Terkemuka Indonesia #IMVID

Indonesia's Most Valuable Infrastructure Developer #IMVID

Vision

MISI

- **Menyukseskan mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans-Sumatra.**
- **Mengembangkan multi-bisnis berbasis infrastruktur melalui usaha investasi jasa konstruksi dan manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah premium pada korporasi dan dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia.**
- **Membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi yang berkesinambungan melalui pemantapan human capital dan financial capital, serta menciptakan safety culture di lingkungan perusahaan.**

- Succeeding the government's mandate to build and operate the Trans-Sumatra Toll Road.
- Developing infrastructure-based multi-businesses through service investment, construction, and manufacturing businesses that can provide premium value-added to corporations and in the context of accelerating Indonesia's economic growth.
- Building sustainable corporate capacity and capability through strengthening human capital and financial capital, and creating a safety culture within the Company.

Mission

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam proses penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 5 (lima) tahun ke depan, di tahun 2024 PT Hutama Karya (Persero) telah mengadakan *visioning* dan *workshop* untuk menyelaraskan Visi dan Misi Perusahaan. Kegiatan ini dihadiri oleh Direksi, Executive Vice President dan perwakilan dari setiap Divisi Kantor Pusat, Divisi Operasi, Direksi Anak Perusahaan, serta perwakilan dari BUMN Muda. Hasil penyelarasan Visi dan Misi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Review of Vision and Mission by The Board of Commissioners and Board of Directors

In the process of the Company's Long Term Plans drafting for the next 5 (five) years, in 2024 PT Hutama Karya conducted visioning and workshop to synchronize the Vision and Mision of the company. It was attended by the Board of Directors, Executive Vice President, and representatives from the Head Office Division, Operational Division, Board of Directors of The Subsidiaries, and SOE Youth. The output of the visioning and workshop was written in the Company's Long Term Plan document, which the Board of Commissioners approved.

BUDAYA PERUSAHAAN /CORPORATE VALUES

Corporate Culture/ Corporate Values

Hutama Karya sebagai salah satu BUMN di Indonesia telah mengadopsi Tata Nilai "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang diperkenalkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai *Core Values* BUMN sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung visi Perseroan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di Perusahaan BUMN, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi. *Core Values* BUMN "AKHLAK" telah ditetapkan sebagai Tata Nilai Perseroan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan karakter Insan Hutama yang Tangguh dalam mewujudkan *Employee Value Proposition* (EVP) PT Hutama Karya (Persero) yaitu Belajar, Bertumbuh, Berinovasi, dan Menghubungkan Kebaikan untuk Indonesia.

Hutama Karya, as one of the Indonesian State-Owned Enterprises (SOE), has adopted the AKHLAK (Mandate, Competence, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) values, introduced by the Ministry of State Enterprises as the core values of SOEs, as an identity and work culture glue that supports the corporate vision and continuous performance improvement of SOEs, its subsidiaries and affiliates. The core values of SOEs "AKHLAK" have been established as the corporate values. It is to shape the character of resilient to the human resources in imprinting PT Hutama Karya (the Company)'s Employee Value Proposition (EVP) which are to Learn, Grow, Innovate and Connecting Virtueness for Indonesia.

Employee Value Proposition (EVP) PT Hutama Karya (Persero):

Employee Value Proposition (EVP) of PT Hutama Karya (Persero):

Belajar
To learn

Memperoleh/ menguatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan atau nilai baru atau berbeda.
Gain knowledge, attitude, skill, and breakthrough new or different values.

Bertumbuh
To grow

Kesempatan berkembang secara personal maupun profesional.
The opportunity to grow both personally and professionally.

Berinovasi
To innovate

Melakukan pembaharuan dan/ atau terobosan yang bermanfaat atau memberikan nilai yang berarti untuk Indonesia
Upgrading things and/ or inventing something impactful and valuable for Indonesia

Meng-hubungkan Kebaikan Untuk Indonesia
Connecting Virtueness for Indonesia

Memberikan kontribusi dan andil, serta memberikan makna dan manfaat untuk Indonesia.
Contributing and take part, as well as providing meaning and benefits to Indonesia.

Sejak tahun 2020, setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menerapkan nilai-nilai utama yang disebut AKHLAK, sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE 7/MB/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Since 2020, every State-Owned Enterprise (SOE) must apply the main values AKHLAK, as written in Circular Letter of the Minister of SOE No. SE-7/MB/07/2020 dated July 1, 2020, about the Core Values of SOE human resources.

AKHLAK

A — Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan perilaku nilai "Amanah":
- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etik.

Mandate

Uphold the trust given.
"Amanah" value behavior guide:
- Fulfilling promises and commitment
- Responsible for duty, decision, and actions done
- Firmly hold on to moral and ethics values

K — Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan perilaku nilai "Kompeten":
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Competence

Continue to learn and develop capabilities.
"Kompeten" value behavior guide:
- Improving self competency to face the everchanging challenge
- Help others to learn
- Finishing duty with best quality

H — Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan perilaku nilai "Harmonis":
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Harmonious

Mutual care and respect for difference.
"Harmoni" value behavior guide:
- Respect people regardless of background
- Like to help others
- Building a conducive work environment

L — Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Panduan perilaku nilai "Loyal":
- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Loyal

Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.
"Loyal" value behavior guide:
- Keeping good names of fellow employees, leaders, State Owned Enterprises, and Nation
- Willing to sacrifice for bigger purposes
- Obey the leaders as long as not going against law and ethics

A — Adaptif

Terus berinovasi & antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Panduan perilaku nilai "Adaptif":
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

Adaptive

Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change.
- "Adaptif" value behavior guide:
- Quickly adaptive to become better
- Continue to keep up with technology development
- Act proactively

K — Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis.
Panduan perilaku nilai "Kolaboratif":
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Collaborative

Build synergistic cooperation.
"Kolaboratif" value behavior guide:
- Give opportunities to various parties to contribute
- Openness for partnership to create additional value
- Mobilizing the use of various resources for common goals

Kegiatan Usaha
Business Fields

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Berdasarkan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 10 Juni 2024, Hutama Karya melakukan usaha di bidang industri konstruksi, pengusahaan jalan tol, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, pengembang properti, real estat, penyewaaan ruangan dan hotel, dan manufaktur. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan menyelenggarakan usaha utama dan usaha lainnya sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi
   a. Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan).
   b. Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal termasuk jaringannya.
   c. Radio, Telekomunikasi dan Instrumentasi.
   d. Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi Bangunan.
2. Pengusahaan Jalan Tol
   a. Pendanaan
   b. Perencanaan Teknis
   c. Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol.
   d. Pengoperasian dan/atau Pemeliharaan Jalan Tol.
3. Pengusahaan lahan di ruang milik jalan tol dan lahan yang berbatasan dengan lahan di ruang milik jalan tol, meliputi namun tidak terbatas pada tempat istirahat (*rest area*), stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yang mencakup aktivitas jalan tol.
4. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil dan pekerjaan mekanikal, elektrikal termasuk jaringannya.
5. Layanan Jasa Konsultasi (konsultan) Manajemen dan Rekayasa Komputer (kecuali konsultan hukum)
6. *Building Management*
7. Pabrikasi Bahan dan Komponen Bangunan
8. Pabrikasi Komponen dan Peralatan Konstruksi
9. Pabrikasi Barang Logam, Kayu, Karet dan komputer.
10. Penyewaan Peralatan Konstruksi.
11. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi.

Business Activities Based on The Articles of Association and are Conducted

Based on the Articles of Association No. 25 dated June 10, 2024, Hutama Karya conducts business in the construction industry, toll road concessions, capacity building services in the field of construction services, property developers, real estate, rent of space and hotel, and manufacture. To achieve these purposes and objectives, the Company organizes the main business and other businesses as follows:

1. Construction Work
   a. Civil Works (all development sectors).
   b. Mechanical-Electrical Work, including the network.
   c. Radio, Telecommunications and Instrumentation.
   d. Repair/Maintenance/Renovation of Buildings.
2. Toll Road Concession
   a. Funding
   b. Technical Planning
   c. Toll Road Construction.
   d. Toll Road Operation and/or Maintenance.
3. Utilization of land in toll road area and lands adjacent to the land of toll road, but not limited to the rest areas and gas stations.
4. Plan and supervisory of the implementation of construction work that includes civil works and works, electrical and its network.
5. Consulting, Management and Computer Engineering Services (except legal consultants)
6. Building Management
7. Fabrication of Building Materials and Components
8. Manufacturing of Construction Components and Equipment
9. Fabrication of Metal, Wood, Rubber and Plastic Goods.
10. Construction Equipment Rental.
11. Agency Services for Building Materials and Components and Construction Equipment.

12. Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang:
    a. Prasarana dan Sarana Dasar (infrastruktur)
    b. Industri
    c. Energi
    d. Aktivitas Perusahaan Holding
    e. Modal Ventura
13. Melakukan usaha di bidang agro industri.
14. Ekspor Impor
15. Perdagangan Umum
16. Pengelolaan Kawasan
17. *System Development*
18. Layanan Jasa Bidang Teknologi Informasi.
19. Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Jasa Konstruksi.
20. Pengembang
    a. Properti
    b. Realti
    c. Real estate
    d. Hotel
21. Pengelolaan Perusahaan
22. Jasa pertambangan
23. Pekerjaan terintegrasi (EPC)

Seluruh Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Perusahaan.

Produk dan Jasa

Jasa Konstruksi

Infrastruktur Jembatan

- Jembatan Semanggi (Jakarta)
- Jembatan Ampera (Palembang)
- Jembatan Suramadu (Madura)
- Jembatan Kabel Tengku Agung Sultanah Latifah (Riau)
- Jembatan Barelang (Batam)
- Jembatan Kabel Siak (Riau)
- Jembatan Landak (Kalimantan Barat)
- Jembatan Kapuas Murung (Kalimantan Tengah)
- Jembatan Mahakam I (Kalimantan Timur)
- Jembatan Batanghari II (Jambi)
- Jembatan Martadipura (Kalimantan Timur)
- Jembatan Rumpiang (Kalimantan Selatan)
- Jembatan Tukad Bangkung (Bali)
- Fender Jembatan Pulau Balang
- Jembatan Kretek

Infrastruktur Jalan

- Tol Cawang-Tanjung Priok (Jakarta)
- Tol Cipularang (Jawa Barat)
- Tol Surabaya-Gempol (JawaTimur)
- Tol Jakarta Outer Ring Road 1
- Jalan Lingkar Nagrek (Jawa Barat)
- Fly Over non-Tol Antasari (Jakarta)
- Jalan Tol Tanjung Benoa (Bali)
- Jalan Kelok 9 (Sumatera Barat)
- Jalan Cimanggis Nagrag (Jawa Barat)

12. Investment and/or Business Management in the Field of:
    a. Basic Infrastructure and facilities (infrastructure)
    b. Industry
    c. Energy
    d. Holding Company Activities
    e. Venture Capital
13. Conducting Agroindustry Business.
14. Export and Import
15. General Trading
16. Estate Management
17. System Development
18. Information Technology Services.
19. Services of Capacity Improvement in the Field of Construction Services.
20. Developers
    a. Property
    b. Realty
    c. Real estate
    d. Hotel
21. Management of the Company
22. Mining Services
23. Engineering-Procurement-Construction (EPC)

All business activities according to the Articles of Association have been carried out by the Company.

Products and Services

Construction Services

Bridge Infrastructures

- Semanggi Bridge (Jakarta)
- Ampera Bridge (Palembang)
- Suramadu Bridge (Madura)
- Tengku Agung Sultanah Latifah Cable Bridge (Riau)
- Barelang Bridge (Batam)
- Siak Cable Bridge (Riau)
- Landak Bridge (West Kalimantan)
- Kapuas Murung Bridge (Central Kalimantan)
- Mahakam I Bridge (East Kalimantan)
- Batanghari II Bridge (Jambi)
- Martadipura Bridge (East Kalimantan)
- Rumpiang Bridge (South Kalimantan)
- Tukad Bangkung Bridge (Bali)
- Pulau Balang Bridge fender
- Kretek Bridge

Road Infrastructures

- Cawang-Tanjung PriokToll Road (Jakarta)
- Cipularang Toll Road (West Java)
- Surabaya-GempolToll Road (East Java)
- Jakarta Outer Ring Road 1 Toll Road
- Nagrek Ring Road (West Java)
- Non-Toll Road, Antasari Fly Over (Jakarta)
- Tanjung BenoaToll Road (Bali)
- Kelok 9 Road (West Sumatera)
- Cimanggis Nagrag Road (West Java)

- Metro Manila Sky Way Project (Filipina)
- Jalan Tol Anyer Hitam (Johor, Malaysia)
- Tol Tebing Tinggi Indrapura
- Tol Serbelawan Siantar
- Tol Kuala Tanjung Indrapura (Seksi 2)
- Tol Tebing Tinggi Serbelawan (Seksi 3)
- Tol IKN Karangjoang – KKT Kariangau Seksi 3A

- Jalan Kamp Muri – Kwatisore (BTS Papua)
- Perbaikan Geometrik Jalan Soreang – Rancabali – Cidaun
- Y-Junction Tebing Tinggi Hamawas
- TTD Semeru PKP Infrastruktur
- Oecussie Timor Leste (PBM)
- ITDC Mandalika
- Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jemb. Pulau Balang – SP Riko
- Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 3
- Tol IKN Karangjoang – KKT Kariangau Seksi 3A-2
- Tol Serang Panimbang Seksi III
- Jalan Akses Patimban Paket 3
- Jalan Sumatera Maintenance Operation (SMO) dan Peningkatan Well Pad
- Jalan Maliana (Timor Leste)
- Jalan Brumbun – P Sine 1 (LOT)

Infrastruktur Bendungan

- Bendungan Pelaperado (Nusa Tenggara Barat)
- Bendungan Salamenko (Sulawesi)
- Bendungan Tanggari (Sulawesi)
- Bendungan Sombe (Sulawesi Tengah)
- Bendungan Gondang (Jawa Tengah)
- Bendungan Colo (Jawa Tengah)
- Bendungan Klampis (Madura)
- Bendungan Cijurey Paket II

Infrastruktur Pelabuhan dan Dermaga

- Dermaga Pelindo II (Lampung)
- Dermaga Sinabang
- Dermaga Suralaya (Jawa Barat)
- Jakarta Fishing Port (Jakarta)
- Dermaga Reo (NTT)
- Dermaga Armabar (Jakarta)
- Dermaga 113-115 Tanjung Priok (Jakarta)
- Heavy Skidway McDermott (Batam)
- Dermaga Packing Plant Semen Gresik (Sorong)
- Dermaga Petrokimia Gresik (JawaTimur)
- Dermaga Panjang (Lampung)
- Dermaga Sanur

Bandar Udara (Perhubungan)

- Bandara Internasional Lombok
- Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali)
- Bandara Syamsudin Noor (Kalimantan Selatan)
- Bandara Internasional Kualanamu (Sumatra Utara)
- Bandara Internasional ElTari (Kupang)
- MRT CP – 203
- Elevated KA Medan Paket-2

- Metro Manila Sky Way Project (Filipina)
- Anyer Hitam Toll Road (Johor, Malaysia)
- Tebing Tinggi Indrapura Toll Road
- Siantar Serbelawan Toll Road
- Kuala Tanjung Indrapura Toll Road (Section 2)
- Tebing Tinggi Serbelawan Toll Road (Section 3)
- IKN Karangjoang - KKT Kariangau Toll Road Section 3A
- Muri Camp– Kwatisore Road (BTS Papua)
- Geometric Improvement of the Soreang – Rancabali – Cidaun Road
- Y-Junction Tebing Tinggi Hamawas
- TTD Semeru PKP Infrastructure
- Oecussie Timor Leste (PBM)
- ITDC Mandalika
- IKN Freeway Segment Pulau Balang Bridge – SP Riko
- Bayung Lencir – Tempino Section 3 Toll Road
- IKN Karangjoang - KKT Kariangau Toll Road Section 3A-2
- Serang Panimbang Section III Toll Road
- Patimban Package 3 Access Non Toll Road
- Sumatera Maintenance Operation (SMO) Road and Well Pad Improvement
- Maliana Timor Leste Non Toll-Road
- Brumbun – P Sine 1 (LOT) Non Toll-Road

Dam Infrastructures

- Pelaperado Dam (West NusaTenggara)
- Salamenko Dam (Sulawesi)
- Tanggari Dam (Sulawesi)
- Sombe Dam (Sulawesi Tengah)
- Gondang Dam (Central Java)
- Colo Dam (Central Java)
- Klampis Dam (Madura)
- Cijurey Package II Dam

Harbors and Port Infrastructures

- Pelindo II Harbor (Lampung)
- Sinabang Harbor
- Suralaya Harbor (West Java)
- Jakarta Fishing Port (Jakarta)
- Reo Harbor (NTT)
- Armabar Harbor (Jakarta)
- 113-115 Harbor Tanjung Priok (Jakarta)
- Heavy Skidway McDermott (Batam)
- Packing Plant Semen Gresik Harbor (Sorong)
- Petrokimia Gresik Harbor (East Java)
- Panjang Harbor (Lampung)
- Sanur Harbor

International Airports

- Lombok International Airport
- Ngurah Rai International Airport (Bali)
- Syamsudin Noor Airport (South Kalimantan)
- Kualanamu International Airport (North Sumatra)
- ElTari International Airport (Kupang)
- MRT CP – 203
- Elevated KA Medan Paket-2

- TTD RR (Rehabilitasi & Rekonstruksi) Pasca Gempa Mamuju

- Pembangkit Listrik
- Cerobong PLTU Suralaya (Jawa Barat)
- PLTU Paiton I dan II (JawaTimur)
- PLTU Cilegon (Jawa Barat)
- PLTU Kramasan (Jawa Barat)
- PLTU Tanjung Priok (Jakarta)
- PLTP Drajat, Garut (Jawa Barat)
- PLTU Jeneponto (Sulawesi Selatan)
- Pekerjaan Sipil PLTU 2 Puser (Kupang, Nusa Tenggara Timur)

Pabrik

- Pabrik Semen Gresik (JawaTimur)
- Pabrik Ban (JawaTimur)
- Pabrik Gondorukem (Trenggalek, JawaTimur)
- Packing Plant Semen Gresik (Sorong)
- Cement Mill Bosowa (Maros, Sulawesi Selatan)

Gedung Bertingkat Tinggi

- Gedung MPR/DPR RI (Jakarta)
- Hotel Nusa Dua Beach (Bali)
- Gedung Departemen Keuangan (Jakarta)
- Hotel Panghegar (Bandung)
- Apartemen City Resort (Jakarta)
- Bakrie Tower (Jakarta)
- Epicentrum Lifestyle Centre (Jakarta)
- Apartemen The “H” Tower (Jakarta)
- Apartemen The Groove (Jakarta)
- Apartemen Senopati Suite (Jakarta)
- Apartemen Niffaro (Jakarta)
- Antam Tower (Jakarta)
- Gedung KBRI (Brunei Darussalam)
- Apartemen Aspena
- Politeknik STAN
- RS Pendidikan UNHAS
- LIPI Kebumen
- Universitas Malikul Saleh (CWM-01)
- Kampus UPI Bandung (CWP-02)
- Struktur Parkir Elevated TMII
- RS Sanglah – Denpasar
- RS Vertikal Kupang
- Masjid Raya Jabar
- Menara Turyapada – Bali
- KSPN Danau Toba
- Gedung OJK Surabaya dan Palembang
- GD RSUP I.G.N.G Ngoerah Bali
- TTD Semeru Huntap
- Rumah Susun ASN 2
- Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 2
- Gedung Terminal Bandar Udara VVIP IKN
- Masjid Negara IKN
- Sarana Prasarana Pemerintahan IKN
- RS Vertikal IKN

- TTD RR (Rehabilitasi & Rekonstruksi) Post Mamuju Earthquake

- Power Plants
- PLTU Suralaya Chimney (West Java)
- PLTU Paiton I and II (East Java)
- PLTU Cilegon (West Java)
- PLTU Kramasan (West Java)
- PLTU Tanjung Priok (Jakarta)
- PLTP Drajat, Garut (West Java)
- PLTU Jeneponto (South Sulawes)
- Civil Work PLTU 2 Puser (Kupang, East Nusa Tenggara)

Factories

- Gresik Cement Factory (East Java)
- Tire Factory (East Java)
- Gondorukem Factory (Trenggalek, East Java)
- Gresik Cement Packing Plant (Sorong)
- Bosowa Cement Mill (Maros, South Sulawesi)

High-Rise Buildings

- MPR/DPR RI Building (Jakarta)
- Nusa Dua Beach Hotel (Bali)
- Minister of Finance Building (Jakarta)
- Panghegar Hotel (Bandung)
- City Resort Apartment (Jakarta)
- Bakrie Tower (Jakarta)
- Epicentrum Lifestyle Centre (Jakarta)
- The “H” Tower Apartment (Jakarta)
- The Groove Apartment (Jakarta)
- Senopati Suite Apartment (Jakarta)
- Niffaro Apartment (Jakarta)
- Antam Tower (Jakarta)
- KBRI Building (Brunei Darussalam)
- Aspena Apartment
- STAN Polytechnic
- UNHAS Educational Hospital
- Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Kebumen
- Malikul Saleh University (CWM-01)
- UPI Bandung Campus (CWP-02)
- TMII Elevated Parking Structure
- Sanglah – Denpasar Hospital
- Vertikal Kupang Hospital
- Great Mosque of West Java
- Turyapada Tower – Bali
- KSPN Lake Toba
- OJK Surabaya and Palembang Office Building
- I.G.N.G Ngoerah Bali Central General Hospital
- TTD Semeru Huntap
- ASN 2 Flats
- Coordinating Ministry 2 Building and Area

- Airport Terminal VVIP IKN Building
- IKN State Mosque
- IKN Government Infrastructure Facilities
- Vertical IKN Hospital

Villa dan Resor

- Resort Alila Pecatu (Bali)
- Villa & Spa Royal Kamuela (Bali)
- Villa & Spa Begawan Giri (Ubud, Bali)
- Villa Jimbaran Four Season (Bali)
- Hotel Santika Beach (Kuta Bali)
- Hotel Novotel (Lombok, NTB)
- Legian Nirwana (Kuta Bali)
- Hotel Amanjiwa (Borobudur, JawaTengah)
- Chedi Ubud (Bali)
- Amanusa Villa Hotel (Bali)
- Apartemen Bali Dewa (Bali)
- Bali Serai Karangasem (Bali)
- Villa Alila (Bintan)

Engineering Procurement & Construction (EPC)

- Beberapa proyek ikonik Perseroan adalah sebagai berikut:
- PLTU Paiton I dan II-JawaTimur
- PLTM Simalungun-Sumatera Selatan
- Trunk Line Pipe-Sumatera Utara
- PPC Distribution Branch Line Package 18, PLTGU Indralaya
- Combine Cycle 2 X 24 MW-Palembang
- Dermaga Petro Kimia Gresik
- Pabrik kelapa sawit di Sumatera Utara
- Packing Plant Semen Gresik-Sorong'
- Cement Mill Bosowa di Maros Sulawesi
- PLTU Kendari
- PLTU Ampana
- PLTM Harjosari & Lambur
- PLTM Lambur
- PLTM Harjosari
- PLTGU Tambak Lorok
- PLTGU Muara Tawar Add On
- PLTGU Riau
- PLTGU Suralaya
- Lawe-Lawe facilities
- Dermaga TBBM Tanjung Batu
- EPC Tuban Jetty
- Pabrik Gula Djatiroto
- Pipa Gas Tanjung Batu Kaltimra
- Pipa CB-III Lomanis-Tasik
- Open Access Sorong
- LPG Jatim
- Jargas Rumah Tangga Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang
- Jargas Rumah Tangga Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan

Villa dan Resorts

- Alila Pecatu Resort (Bali)
- Royal Kamuela Villa & Spa (Bali)
- Begawan Giri Villa & Spa (Ubud, Bali)
- Jimbaran Villa Four Season (Bali)
- Santika Beach Hotel (Kuta Bali)
- Novotel Hotel (Lombok, NTB)
- Legian Nirwana (Kuta Bali)
- Amanjiwa Hotel (Borobudur, Central Java)
- Chedi Ubud (Bali)
- Amanusa Villa Hotel (Bali)
- Bali Dewa Apartment (Bali)
- Bali Serai Karangasem (Bali)
- Alila Villa (Bintan)

Engineering Procurement & Construction (EPC)

- Some of the Company's iconic projects are as follows:
- PLTU Paiton I and and II-East Java
- PLTM Simalungun- South Sumatera
- Trunk Line Pipe- North Sumatera
- PPC Distribution Branch Line Package 18, PLTGU Indralaya
- Combine Cycle 2 X 24 MW-Palembang
- Petro Kimia Gresik Jetty
- Palm Oil Plant in North Sumatera
- Packing Plant Semen Gresik
- Cement Mill Bosowa, Maros Sulawesi
- PLTU Kendari
- PLTU Ampana
- PLTM Harjosari & Lambur
- PLTM Lambur
- PLTM Harjosari
- PLTGU Tambak Lorok
- PLTGU Muara Tawar Add On
- PLTGU Riau
- PLTGU Suralaya
- Lawe-Lawe facilities
- TBBM Tanjung Batu Harbor
- EPC Tuban Jetty
- Djatiroto Sugar Mill
- Tanjung Batu Kaltimra Gas Pipe
- CB-III Lomanis-Tasik Pipe
- Open Access Sorong
- East Java LPG
- Household gas network for Mojokerto City, Mojokerto Regency, and Jombang Regency
- Household gas network for Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan

Investasi

Perseroan melakukan penyertaan modal (kegiatan investasi) pada proyek-proyek KPBU antara lain:

- Investasi pada PT Anggrek Gorontalo International Terminal sesuai dengan porsi Hutama Karya dalam konsorsium tersebut.
- Investasi pada PT Indonesia International Automotive Proving Ground sesuai dengan porsi Hutama Karya dalam konsorsium tersebut.

Selain itu Perseroan juga melakukan penyertaan modal/investasi lain yaitu:

- Pembentukan PT Karya Logistik Nusantara
  Pemerintah saat ini sedang berfokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, mulai dari infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan Negara hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melihat rencana anggaran IKN yang sangat besar, terdapat potensi pasar pada industri konstruksi di IKN, salah satunya adalah penyediaan material konstruksi termasuk beton, di mana untuk memastikan ketersediaan secara berkesinambungan maka Hutama Karya bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) mendirikan PT Karya Logistik Nusantara yang bergerak di bisnis produksi beton dan logistik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan IKN.
- Setoran modal kepada PT Hutama Marga Waskita Pemerintah memberikan penugasan kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Aceh termasuk Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat di Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita selaku Anak Perusahaan Hutama Karya. Dalam rangka mensukseskan penugasan tersebut, Hutama Karya melakukan penambahan setoran modal di tahun 2023 untuk memenuhi pendanaan pembangunan jalan tol tersebut.

Investment

The Company carries out equity participation (investment activities) in infrastructure Public Private Partnership (PPP) projects, including:

- Investment in PT Anggrek Gorontalo International Terminal in accordance with Hutama Karya's share in the Consortium.
- Investment in PT Indonesia International Automotive Prove Ground, according to its share in the consortium.

In addition, the Company also invests in other investments, namely:

- Establishment of PT Karya Logistik Nusantara
  The government is currently focusing on the development of the Capital City of the Archipelago (IKN) in East Kalimantan, starting from basic infrastructure, the State government area to housing the State Civil Apparatus (ASN). Seeing the very large IKN budget plan, there is market potential in the construction industry in IKN, one of which is the provision of construction materials including concrete, which to ensure continuous availability, Hutama Karya together with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero) and PT Nindya Karya (Persero) established PT Karya Logistik Nusantara which is engaged in the concrete production and logistics business to support the implementation of IKN development.

- Capital deposit to PT Hutama Marga Waskita
  The government gave an assignment to Hutama Karya to build and operate the Trans Sumatra Toll Road from Lampung Province to Aceh Province including the Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Toll Road in North Sumatra Province which is managed by PT Hutama Marga Waskita as a subsidiary of Hutama Karya. In order to succeed the assignment, Hutama Karya made an additional capital deposit in 2023 to fulfill the funding for the construction of the toll road.

Daftar Keanggotaan Asosiasi
List of Association Membership

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan memperkuat bisnis dengan menjadi anggota di berbagai organisasi sebagai berikut:

As of the end of 2024, the Company strengthened the business by being a member of some organisation as follows:

Nama Organisasi Organization Name	**Lingkup (Nasional/ Internasional)** **Scope (National/ International)**	**Peran dan Kontribusi** **Role and Contribution**
Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA) Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)	Nasional National	Anggota Member
Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) Indonesian Association of Construction Safety Experts (PAKKI)	Nasional National	Anggota Member
Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Indonesia Toll Road Association (ATI)	Nasional National	Anggota Member
Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Indonesia Contractor Association (AKI)	Nasional National	Anggota Member
Persatuan Insinyur Indonesia (PII) The Institution of Engineers Indonesia (PII)	Nasional National	Anggota Member
Perkumpulan Tenaga Profesional dan Ahli Konstruksi Mandiri (PERPAKOM) Independent Constructor Professionals and Experts Association(PERPAKOM)	Nasional National	Anggota Member
Himpunan Pengembang Jalan Indonesia Indonesian Road Development Association	Nasional National	Anggota Member
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Construction Services Development Agency	Nasional National	Anggota Member
Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia Indonesian Asphalt and Concrete Association	Nasional National	Anggota Member
Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia Association of National Engineering and Development Companies of Indonesia	Nasional National	Anggota Member
Asosiasi Kontraktor Air Indonesia Indonesian Water Contructor Association	Nasional National	Anggota Member
Kamar Dagang dan Industri Chamber of Commerce and Industry	Nasional National	Anggota Member
Perkumpulan Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia Association of Indonesian Contruction and installation Affiliates	Nasional National	Anggota Member

Wilayah Operasional
Operational Area

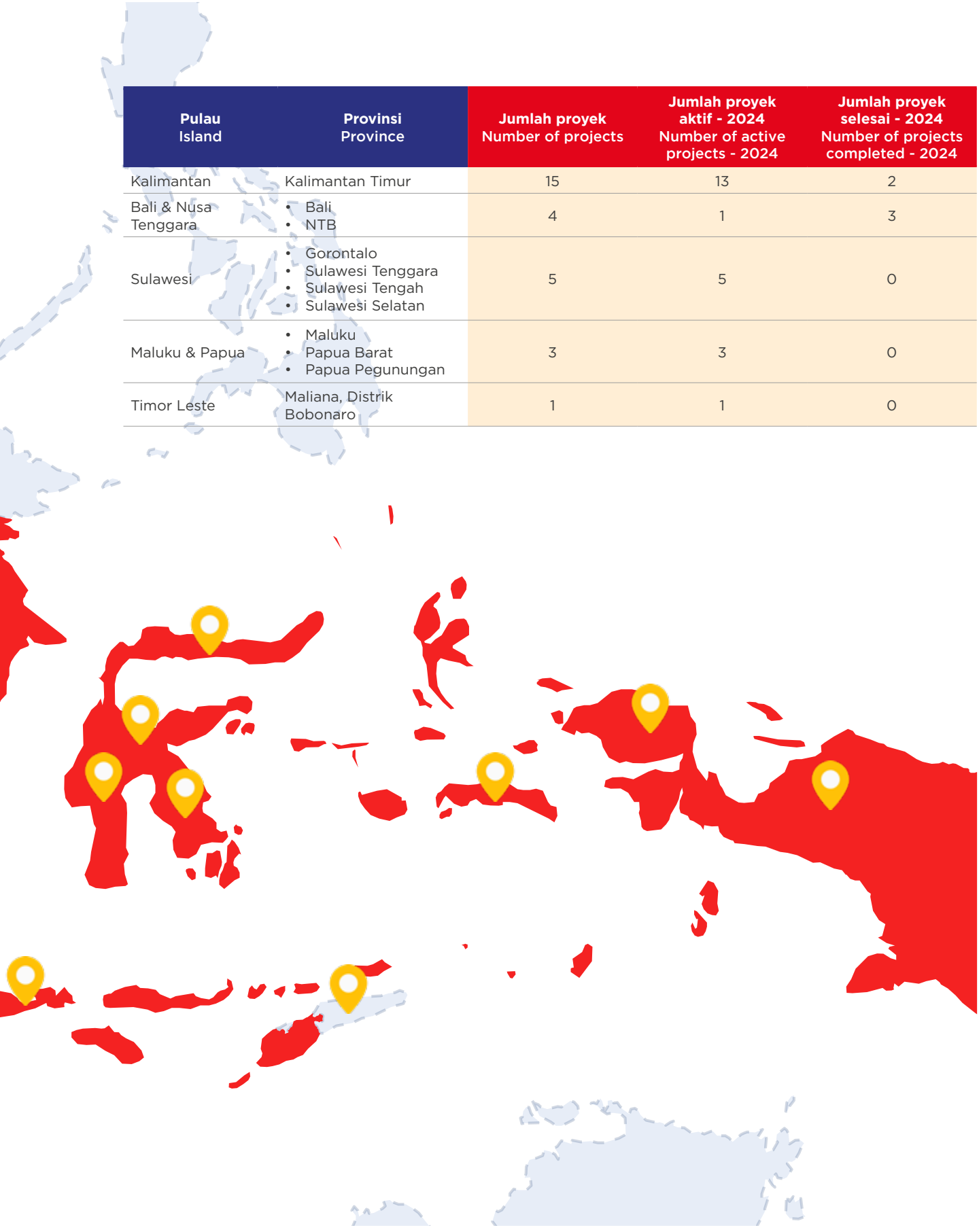
Operasional Perseroan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai berikut:

The Company's operations are spread throughout Indonesia as follows:

Pulau Island	Provinsi Province	Jumlah proyek Number of projects	Jumlah proyek aktif - 2024 Number of active projects - 2024	Jumlah proyek selesai - 2024 Number of projects completed - 2024
Sumatera	• Aceh • Sumatera Barat • Riau • Sumatera Utara • Bengkulu • Sumatera Selatan • Jambi • Lampung	22	16	6
Jawa	• Jawa Timur • Jawa Tengah • Jawa Barat • Yogyakarta • Banten • DKI Jakarta	29	22	7

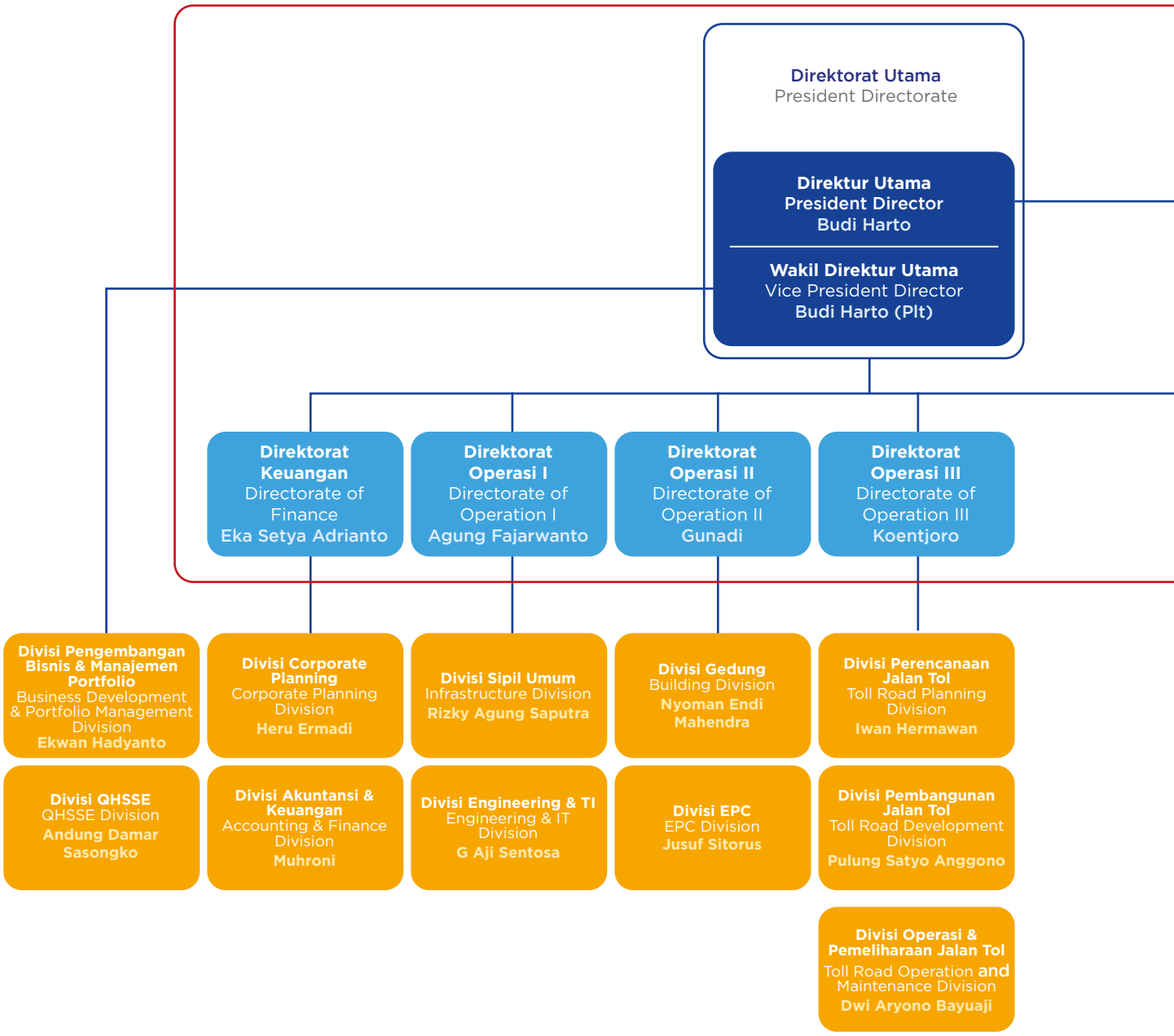


Pulau Island	Provinsi Province	Jumlah proyek Number of projects	Jumlah proyek aktif - 2024 Number of active projects - 2024	Jumlah proyek selesai - 2024 Number of projects completed - 2024
Kalimantan	Kalimantan Timur	15	13	2
Bali & Nusa Tenggara	• Bali • NTB	4	1	3
Sulawesi	• Gorontalo • Sulawesi Tenggara • Sulawesi Tengah • Sulawesi Selatan	5	5	0
Maluku & Papua	• Maluku • Papua Barat • Papua Pegunungan	3	3	0
Timor Leste	Maliana, Distrik Bobonaro	1	1	0



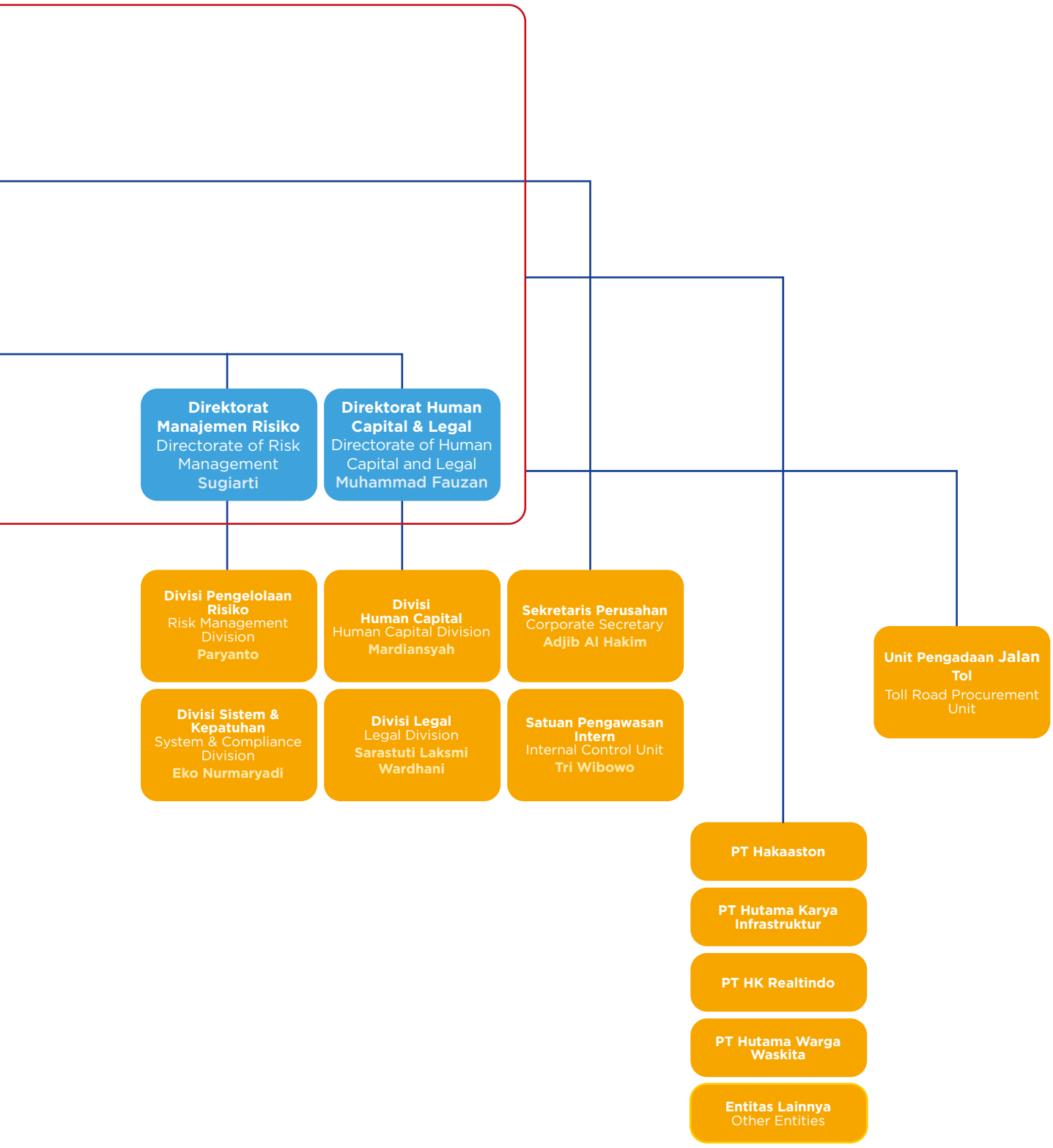
Struktur Organisasi
Organization Structure

Dengan mempertimbangkan peningkatan daya saing Perseroan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat diperlukan suatu model dan cara kerja yang lebih adaptif dan lincah guna menunjang implementasi strategi dalam pencapaian visi dan misi Hutama Karya. Terkait dengan hal ini, Direksi Perseroan telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor OT.04.01/SK-19/DU/2025 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Hutama Karya (Persero) tanggal 3 Maret 2025. Berdasarkan keputusan Direksi tersebut, struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan: Dalam struktur organ Perseroan terdapat Dewan Komisaris yang berada di luar struktur organisasi Perseroan.
Nama Anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dan nama Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.
Note: The Board of Commissioner is not written inside the Company's organizational structure. The names of the Board of Commissioner members can be found in the Profile of The Board of Commissioners section, and the Committee Members' names can be seen in the Corporate Governance chapter.

By considering increasing the competitiveness of the Company in the face of increasingly fierce competition, a model and way of working that is more adaptive and agile is needed to support the implementation of strategies in achieving the vision and mission of Hutama Karya. Hence the Company's Board of Directors issued the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number OT.04.01/SK-19/DU/2025 concerning Changes in the Organizational Structure of PT Hutama Karya (Persero) dated March 3, 2025. According to the decree, the Company's organizational structure is as follows:



Profil Direksi
Profile of The Board of Directors



Budi Harto
Direktur Utama merangkap Plt. Wakil Direktur Utama
President Director Concurrently Acting Vice President Director

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Boyolali, pada tahun 1959 | Was born in Boyolali in 1959.
Usia 65 tahun Per Desember 2024.
65 years old as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983). • Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997). • Magister Psikologi Industri dari Universitas 17 Agustus, Surabaya (2002). • Bachelor of Civil Engineering from Sebelas Maret University, Surakarta (1983). • Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1997). • Master of Industrial Psychology from 17 Agustus University, Surabaya (2002).
Sertifikasi Certification	-
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Operasi I di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2008-2015). • Wakil Direktur Utama di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015-2016). • Direktur Utama di PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2016-2020). • Direktur Utama di PT Hutama Karya (Persero) (2020-sekarang). • Plt. Wakil Direktur Utama di PT Hutama Karya (Persero) (2024-sekarang). • Operations Director I at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2008-2015). • Vice President Director at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015-2016). • President Director at PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2016-2020). • President Director at PT Hutama Karya (Persero) (2020-present). • Appointed as Acting Vice President Director of PT Hutama Karya (Persero) (2024–present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Utama untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-182/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya pada tanggal 6 Juni 2020. Kemudian ditetapkan sebagai pelaksana tugas Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) Nomor: SK-14. XI/DK/PTHK/2024. Appointed as the President Director according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-182/MBU/06/2020 about the Termination and Appointing of PT Hutama Karya Company's Board of Directors dated June 6, 2020. Then appointed as acting Vice President Director based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) Number: SK-14.XI/DK/PTHK/2024.
Periode Menjabat Term of Office	2020 – 2025, Periode Pertama. 2020 – 2025, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Does not hold concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a committee member, as well as other positions, inside or outside both Issuers or Public Companies.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Aloysius Kiik Ro*

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Kupang, pada tahun 1961 | Was born in Kupang in 1961.
Usia 63 tahun Per Desember 2024.
63 years old as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986). • Master of Business Administration Finance di University of Illionis Urbana Champaign Illinois (1994). • Doctor Finance di University of Kentucky at Lexington (1998). • Bachelor of Accounting at Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986). • Master of Business Administration Finance at University of Illinois Urbana Champaign Illinois (1994). • Doctor of Finance at University of Kentucky at Lexington (1998).
Sertifikasi Certification	-
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Keuangan di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (2015-2015). • Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha di Kementerian BUMN (2015-2019). • Komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2015-2019). • Direktur Executive di PT Danareksa (Persero) (2005-2015). • Wakil Direktur Utama di PT Hutama Karya (Persero) (2019-2024). • Finance Director at PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (2015-2015). • Deputy for Restructuring and Business Development at the Ministry of SOEs (2015-2019). • Commissioner at PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2015-2019). • Executive Director at PT Danareksa (Persero) (2005-2015). • Vice President Director in Hutama Karya (2019-2024).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Wakil Direktur Utama untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-279/MBU/11/2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya pada tanggal 18 November 2019. Appointed as the President Director according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-279/MBU/11/2019 concerning the Appointment of Vice President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Hutama Karya on November 18, 2019.
Periode Menjabat Term of Office	2019 - 2024, Periode Pertama. 2019 - 2024, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Does not hold concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a committee member, as well as other positions, inside or outside both Issuers or Public Companies.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

*Menyelesaikan masa jabatannya pada 17 November 2024
*Completes term of office on November 17, 2024



Eka Setya Adrianto

Direktur Keuangan
Finance Director

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Bandung, pada tahun 1984 | Was born in Bandung in 1984.
Usia 40 tahun Per Desember 2024.
40 years old as of December 2024.

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008) • Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2024). • Bachelor of Accounting from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2008) • Master of Management from University of Indonesia (2024).
Sertifikasi Certification	• GRC Manajemen Resiko • Chartered Accountant • GRC Risk Management • Chartered Accountant
Pengalaman Kerja Employment History	• Business Strategy Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2012-2015) • Assistant Vice President Strategic Planning, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2016- 2017). • Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2017-2022) • Direktur Keuangan & Manajemen Risiko di PT Hutama Karya (Persero) (2022-2024). • Direktur Keuangan di PT Hutama Karya (Persero) (2024-sekarang). • Business Strategy Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2012-2015) • Assistant Vice President Strategic Planning, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2016-2017). • Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2017-2022). • Finance and Risk Management Director PT Hutama Karya (Persero) (2022-2024). • Finance Director PT Hutama Karya (Persero) (2024-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Keuangan & Manajemen Risiko untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-92/MBU/04/2022 tanggal 4 April 2022. Kemudian terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-66/MBU/03/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya tanggal 15 Maret 2024. Appointed as the Finance and Risk Management Director according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-92/MBU/04/2022 dated April 4, 2022. Then there was a change in nomenclature to Director of Finance based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-66/MBU/03/2024 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Hutama Karya dated March 15, 2024.
Periode Menjabat Term of Office	2022 – 2027, Periode Pertama. 2022 – 2027, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Komisaris PT Hutama Karya Infrastruktur. • Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Hutama Karya. Perusahaan Terbuka Lainnya: - • Commissioner of PT Hutama Karya Infrastruktur. • Chairman of the Supervisory Board of Hutama Karya Pension Fund. Other Public Company: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-



Muhammad Fauzan

Direktur Human Capital & Legal
Human Capital & Legal Director

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Bengkalis, pada tahun 1973 | Was born in Bengkalis in 1973.
Usia 51 tahun Per Desember 2024.
51 years old as of December 2024.

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1998). • Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Riau (2009). • Doktor Manajemen Teknologi, Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh November (2024). • Bachelor of Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1998). • Master of Financial Management from Universitas Riau (2009). • Doctor of Technology Management, Interdisciplinary School of Management and Technology, Institut Teknologi Sepuluh November (2024).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Manajemen Kontrak Utama Jenjang 9 • Sertifikasi Penilai Ahli Kegagalan Bangunan, Bidang Manajemen Pelaksana • Sertifikasi Kompetensi BNSP: Direktur SDM • Sertifikasi Ahli Kontrak Kerja Konstruksi: Hukum Kontrak Konstruksi Jenjang 9 • Certification in Major Contract Management Level 9 • Certification as an Expert Assessor of Building Failures in the Field of Implementation Management BNSP Competency Certification: HR Director • Construction Contract Expert Certification: Construction Contract Law Level 9
Pengalaman Kerja Employment History	• Berbagai posisi dari Project Manager hingga Vice Direktur Pemasaran Divisi Pengembangan Bisnis Konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) (1999 – 2011). • General Manager Divisi Pemasaran Kantor Pusat PT Hutama Karya (Persero) di Jakarta (2012-2013). • General Manager Divisi Gedung pada Direktorat Operasi I PT Hutama Karya (Persero) (2013-2014). • Direksi PT HK Realtindo, entitas anak dari PT Hutama Karya (Persero) (2014-2016). • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Kantor Pusat pada Direktorat Pengembangan, PT Hutama Karya (Persero) (2016-2018). • Executive Vice President Divisi Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (2018-2021). • Direktur Human Capital & Legal di PT Hutama Karya (Persero) (2021-sekarang). • Various positions from Project Manager to Vice Director of Marketing of Construction Business Development Division, PT Hutama Karya (Persero) (1999 – 2011). • General Manager of Marketing Division of PT Hutama Karya (Persero) Head Office in Jakarta (2012-2013). • General Manager of Building Division at Operations Directorate I PT Hutama Karya (Persero) (2013-2014). • Board of Directors of PT HK Realtindo, a subsidiary of PT Hutama Karya (Persero) (2014-2016). • Head of Business Development and Investment Division of Head Office at Development Directorate, PT Hutama Karya (Persero) (2016-2018). • Executive Vice President of Corporate Secretary Division of PT Hutama Karya (Persero) (2018-2021). • Human Capital & Legal Director at Hutama Karya (2021-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Human Capital & Legal untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-51/MBU/02/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya pada tanggal 25 Februari 2021. Appointed as the Human Capital Director & Legal according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises SK-51/MBU/02/2021 about the Termination and Appointing of PT Hutama Karya Company's Board of Directors dated February 25, 2021.
Periode Menjabat Term of Office	2021 – 2026, Periode Pertama. 2021 – 2026, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris PT HK Realtindo. Commissioner of PT HK Realtindo.
Kepemilikan Saham Shareholding	-



Agung Fajarwanto

Direktur Operasi I
Operations Director I

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Surabaya, pada tahun 1973 | Was born in Surabaya in 1973.
Usia 51 tahun Per Desember 2024.
51 years old as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang (1996). • Magister Administrasi Bisnis Institut Teknologi Bandung (2022). • Bachelor of Civil Engineering from Diponegoro University, Semarang (1996). • Master of Business Administration Bandung Institute of Technology (2022).
Sertifikasi Certification	• Pelatihan The Spirit of Leadership Angkatan I, PT Hutama Karya (Persero) (2012). • Pelatihan & Sertifikasi Asosiasi Ahli K3 Konstruksi (A2K4), PT Hutama Karya (Persero) (2013). • Workshop Penyusunan WIG, PT Hutama Karya (Persero) (2013). • Pelatihan Pembekalan Materi Jalan Tol, PT Hutama Karya (Persero) (2013). • Inhouse Training Marketing Management, PT Hutama Karya (Persero) – Markplus Institute (2013). • Corporate Strategy for Investment Company – Director Program, Prasetya Mulya (2015). • Inhouse Training Influencer, Dunamis Human Capital (2016). • Pelatihan Intrapreneurship, Kampus Prasetya Mulya Business School (2016). • Executive Leadership Dev. Program, PT Hutama Karya (Persero) – DDI (2017). • Directorship Program, Pertamina Training Consulting (2018). • Executive Workshop Corporate Governance, PPA Universitas Indonesia (2021). • Chief Business Development Officer Innovation School, The Business School for The World (INSEAD) (2023). • Sustainability for Organizational Resilience and Competitive Advantage, LSPMR (2024). • Certified Risk Governance Professional (CRGP), LSPMR (2024). • The Spirit of Leadership Training Batch I, PT Hutama Karya (Persero) (2012) • Training & Certification by the K3 Construction Safety Expert Association (A2K4), PT Hutama Karya (Persero) (2013) • Workshop on Developing WIG, PT Hutama Karya (Persero) (2013) • Toll Road Material Briefing Training, PT Hutama Karya (Persero) (2013)
Pengalaman Kerja Employment History	• Senior Manager II Bagian Teknik pada Div. Jalan & Jembatan, PT Hutama Karya (Persero) (2009-2013). • Senior Manager II Bagian Pemasaran pada Div. Jalan & Jembatan, PT Hutama Karya (Persero) (2013-2014). • Kepala Wilayah V PT Hutama Karya (Persero) (2014-2017) • Kepala Wilayah IV PT Hutama Karya (Persero) (2017-2018) • Kepala atau SEVP Divisi Pengembangan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero) (2018-2020) • Kepala atau EVP Divisi Pembangunan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero) (2020-2022) • Direktur Operasi I di PT Hutama Karya (Persero) (2022-sekarang). • Senior Manager II of Engineering Division at Road & Bridge Division, PT Hutama Karya (Persero) (2009-2013). • Senior Manager II of Marketing Division at Road & Bridge Division, PT Hutama Karya (Persero) (2013-2014). • Head of Region V PT Hutama Karya (Persero) (2014-2017) • Head of Region IV PT Hutama Karya (Persero) (2017-2018) • Head or SEVP of Toll Road Development Division PT Hutama Karya (Persero) (2018-2020) • Head or EVP of PT Hutama Karya (Persero) Toll Road Development Division (2020-2022) • Operational Director I in PT Hutama Karya (Persero) (2022-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Operasi I untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-224/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya pada tanggal 30 September 2022. Appointed as the Operational Director I according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises SK-224/MBU/09/2022 about the Termination and Appointing of PT Hutama Karya Company's Board of Directors dated September 30, 2022.
Periode Menjabat Term of Office	2022 – 2027, Periode Pertama. 2022 – 2027, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Does not hold concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company.
Kepemilikan Saham Shareholding	-



Gunadi

Direktur Operasi II
Operations Director II

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Purworejo, pada tahun 1968 | Was born in Purworejo in 1968.
Usia 56 tahun Per Desember 2024.
56 years old as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1993). • Magister Manajemen dari Institut Bisnis Nusantara Jakarta Timur (2019). • Bachelor of Civil Engineering from Sebelas Maret University, Surakarta (1993). • Master of Management from Nusantara Business Institute, East Jakarta (2019).
Sertifikasi Certification	• - • -
Pengalaman Kerja Employment History	• Berbagai posisi dari Staf Adkon hingga Kepala Divisi dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi VI (1995-2018). • Senior Vice President - Division VI, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2018-2019). • Direktur Utama PT Waskita Karya Infrastruktur (2019-2019). • Direktur Operasi III, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2019-2022). • Direktur Operasi I, PT Hutama Karya (Persero) (2022-2022). • Direktur Operasi II PT Hutama Karya (Persero) (2022-sekarang). • Various positions from Adkon Staff to Division Head of PT Waskita Karya (Persero) Tbk Division VI (1995-2018). • Senior Vice President - Division VI, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2018-2019). • President Director of PT Waskita Karya Infrastruktur (2019-2019). • Operation Director III, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2019-2022). • Operation Director I, PT Hutama Karya (Persero) (2022-2022). • Operation Director II, PT Hutama Karya (Persero) (2022-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Diangkat pertama kali menjadi Direktur Operasi I berdasarkan SK-145/MBU/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 • Pengalihan tugas dari semula DO I menjadi DO II berdasarkan SK-224/MBU/09/2022 tanggal 30 September 2022. • First appointed as Operations Director I based on SK-145/MBU/07/2022 dated July 11, 2022 • Transfer of duties from Operations Director I to Operations Director II based on SK-224/MBU/09/2022 dated September 30, 2022.
Periode Menjabat Term of Office	2022 – 2027, Periode Pertama. 2022 – 2027, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris PT HK Hakaaston. Perusahaan Terbuka Lainnya: - Commissioner of PT HK Hakaaston. Other Public Company: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-



Koentjoro

Direktur Operasi III
Operations Director III

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Grobogan, pada tahun 1970 | Was born in Grobogan in 1970.
Usia 54 tahun Per Desember 2024.
54 years old as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang (1993) • Magister Manajemen Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (2020). • Bachelor of Civil Engineering from Diponegoro University, Semarang (1993) • Master of Business Management from Bandung Institute of Technology (2020).
Sertifikasi Certification	• - • -
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Konstruksi PT Hutama Karya (Persero) (2018-2019) • Kepala Divisi Pengendalian Operasi & Anak Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) (2019-2020). • Executive Vice President Divisi Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero) (2020-2021). • Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) (2022-sekarang). • Head of Construction Business Development Division, PT Hutama Karya (Persero) (2018-2019) • Head of Operations Control & Subsidiaries Division, PT Hutama Karya (Persero) (2019-2020). • Executive Vice President of Risk Management Division, PT Hutama Karya (Persero) (2020-2021). • Operational Director III, PT Hutama Karya (Persero) (2022- present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Operasi III untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-51/MBU/02/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya pada tanggal 25 Februari 2021. Appointed as Operational Director III according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No SK-51/MBU/02/2021 about the Termination and Appointing of PT Hutama Karya Company's Board of Directors dated February 25, 2021.
Periode Menjabat Term of Office	2021 – 2026, Periode Pertama. 2021 – 2026, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Dewan Pengawas Dana Pensiun HK. Perusahaan Terbuka Lainnya: - HK Pension Fund Supervisory Board. Other Public Companies: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Sugiarti

Direktur Manajemen Risiko
Risk Management Director

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Semarang, pada tahun 1964 | Was born in Semarang in 1964.
Usia 60 tahun Per Desember 2024.
60 years old as of December 2024



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang (1987). • Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro (2021). • Bachelor of Economics from Diponegoro University Semarang (1987). • Master of Management from Diponegoro University (2021).
Sertifikasi Certification	• Qualified Risk Governance Professional (QRGP) (2024). • Qualified Risk Governance Professional (QRGP) (2024).
Pengalaman Kerja Employment History	• EVP Mass Banking Division di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016). • Direktur Keuangan Perum Perhutani (2016-2019). • Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero) (2019-2020). • Direktur Utama PT HK Realtindo (2020-2024). • Direktur Manajemen Risiko di PT Hutama Karya (Persero) (2024-sekarang). • EVP Mass Banking Division at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016). • Finance Director of Perum Perhutani (2016-2019). • Finance Director of PT Hutama Karya (Persero) (2019-2020). • President Director of PT HK Realtindo (2020-2024). • Risk Management Director at PT Hutama Karya (Persero) (2024-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-66/MBU/03/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya tanggal 15 Maret 2024. Appointed as Risk Management Director according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Np. SK-66/MBU/03/2024 about the Termination and Appointing of PT Hutama Karya Company's Board of Directors dated March 15, 2024.
Periode Menjabat Term of Office	2024-2029, Periode Pertama. 2024-2029, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Does not hold concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a committee member, as well as other positions, inside or outside both Issuers or Public Companies.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Affiliation of Board of Directors

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Table of the affiliation relationship of directors

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi
Financial, Familial, and Management Relationships of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship						Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship							
		Dewan Komisaris Board of Commisioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali* Controlling Shareholder*		Dewan Komisaris Board of Commisioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali* Controlling Shareholder*		Hubungan Kepengurusan Management Relations	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Budi Harto	Direktur Utama merangkap Plt. Wakil Direktur Utama President Director concurrently serving as Acting Vice President Director.		√		√		√		√		√		√		√
Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan Finance Director		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Human Capital & Legal Director		√		√		√		√		√		√		√
Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Operational Director I		√		√		√		√		√		√		√
Gunadi	Direktur Operasi II Operational Director II		√		√		√		√		√		√		√
Koentjoro	Direktur Operasi III Operational Director III		√		√		√		√		√		√		√
Sugiarti	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung dan Tidak Langsung | Direct and Indirect

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2024 – 15 Maret 2024

Komposisi Direksi sebelum periode 1 Januari 2024 sampai dengan 15 Maret 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, 5 (lima) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Changes in The Composition of The Board of Directors and The Reasons

During 2024, there have been changes in the composition of the board of directors. This change was made in accordance with the Company's needs. The changes in the composition of the Board of Directors are as follows:

Board of Directors' Composition Period of January 1 – March 15, 2024

The board of directors' composition before the period of January 1, 2024 to March 15, 2024: 7 (seven) people consists of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 5 (five) directors. The composition and the basis for the appointment of the Board of Directors can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 1 Januari 2024 – 15 Maret 2024
Table of Composition and Basis of Appoinment Period of January 1, 2024 – March 15, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Budi Harto	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN No. SK-182/ MBU/06/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-182/MBU/06/2020	5 Juni 2020 June 5, 2020
Aloysius Kiik Ro	Wakil Direktur Utama Vice President Director	SK Menteri BUMN No. SK-279/ MBU/11/2019 Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/ MBU/11/2019	18 November 2019 November 18, 2019
Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management Director	SK Menteri BUMN No. SK-92/ MBU/04/2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK-92/MBU/04/2022	4 April 2022 April 4, 2022
Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Human Capital & Legal Director	SK Menteri BUMN No. SK-51/ MBU/02/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-51/MBU/02/2021	25 Februari 2021 February 25, 2021
Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Operations Director I	SK Menteri BUMN No. SK-224/ MBU/09/2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK-224/MBU/09/2022	30 September 2022 September 30, 2022
Gunadi	Direktur Operasi II Operations Director II	SK Menteri BUMN No. SK-145/ MBU/07/2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK-145/MBU/07/2022	11 Juli 2022 July 11, 2022
Koentjoro	Direktur Operasi III Operations Director III	SK Menteri BUMN No. SK-51/ MBU/02/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-51/MBU/02/2021	25 Februari 2021 February 25, 2021

Komposisi Direksi Periode 15 Maret 2024 – 18 November 2024

Pada tanggal 15 Maret 2024, RUPS Luar Biasa memutuskan:

1. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi sebagai berikut:

Semula Before	Menjadi After
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Direktur Keuangan Finance Director
	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director

2. Mengalihkan penugasan Eka Setya Adrianto semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan.
3. Mengangkat Sugiarti sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Sehingga komposisi Direksi periode 15 Maret 2024 sampai dengan 18 November 2024 yaitu sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, and 6 (enam) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Board of Directors' Composition Period of March 15 – November 18, 2024

On March 15, 2024, the GMS enacted the following:

1. Change in the nomenclature of Directors as follows:

2. Reassigned Eka Setya Adrianto from Finance and Risk Management Director to Finance Director.
3. Appointed Sugiarti as Risk Management Director.

The composition of the board of directors period of March 15, 2024 to November 18, 2024, becomes 8 people: 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 6 (enam) Directors. The composition and the basis of appointment can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 15 Maret 2024 – 18 November 2024
Table of Composition and Basis of Appointment Period of March 15, 2024 – November 18, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Efective Date
Budi Harto	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN No. SK-182/MBU/06/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-182/MBU/06/2020	5 Juni 2020 June 5, 2020
Aloysius Kiik Ro	Wakil Direktur Utama Vice President Director	SK Menteri BUMN No. SK-279/MBU/11/2019 Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/ MBU/11/2019	18 November 2019 November 18, 2019
Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan Finance Director	SK Menteri BUMN No. SK-92/MBU/04/2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK-92/MBU/04/2022	4 April 2022 April 4, 2022
Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Human Capital & Legal Director	SK Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-51/MBU/02/2021	25 Februari 2021 February 25, 2021
Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Operational Director I	SK Menteri BUMN No. SK-224/MBU/09/2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK-224/MBU/09/2022	30 September 2022 September 30, 2022
Gunadi	Direktur Operasi II Operational Director II	SK Menteri BUMN No. SK-145/MBU/07/2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK-145/MBU/07/2022	11 Juli 2022 July 11, 2022
Koentjoro	Direktur Operasi III Operational Director III	SK Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-51/MBU/02/2021	25 Februari 2021 February 25, 2021

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 15 Maret 2024 – 18 November 2024
Table of Composition and Basis of Appoinment Period of March 15, 2024 – November 18, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appoinment	Tanggal Efektif Efective Date
Sugiarti	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	SK Menteri BUMN No. SK-66/MBU/03/2024 Decree of the Minister of SOEs No. SK-66/MBU/03/2024	15 Maret 2024 March 15, 2024

Komposisi Direksi Periode 18 November 2024 – 31 Desember 2024

Bahwa sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan Aloysius Kiik Ro per 17 November 2024, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) Nomor: SK-14.XI/DK/PTHK/2024 tanggal 18 November 2024, telah ditetapkan Budi Harto sebagai Pelaksana Tugas Wakil Direktur Utama untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatan Wakil Direktur Utama sampai dengan adanya penetapan pejabat definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga komposisi Direksi periode 18 November 2024 sampai 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama merangkap Plt. Wakil Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Board of Directors Composition for The Period of November 18, 2024 – December 31, 2024

That in connection with the expiration of Aloysius Kiik Ro's term of office as of November 17, 2024, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) Number: SK-14.XI/DK/PTHK/2024 dated November 18, 2024, Budi Harto has been appointed as Acting Deputy President Director to carry out the duties and functions of the position of Deputy President Director until the appointment of a definitive official by the General Meeting of Shareholders. So that the composition of the Board of Directors for the period of November 18, 2024 until December 31, 2024 is 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Director concurrently serving as Acting Deputy President Director and 6 (six) Directors. The composition and basis for the appointment of the Board of Directors can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 18 November 2024 – 31 Desember 2024
Table of Composition and Basis for Appointment of Board of Directors for the Period of November 18, 2024 – December 31, 2024

Nama Name	Jabatan position	Dasar Pengangkatan Basis of Appoinment	Tanggal Efektif Efective Date
Budi Harto	Direktur Utama merangkap Plt. Wakil Direktur Utama President Director concurrently serving as Acting Vice President Director	SK Menteri BUMN No. SK-182/MBU/06/2020 Decree of the Minister of SOE No. SK-182/MBU/06/2020	5 Juni 2020 June 5, 2020
Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan Finance Director	SK Menteri BUMN No. SK-92/MBU/04/2022 Decree of the Minister of SOE No. SK-92/MBU/04/2022	4 April 2022 April 4, 2022
Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Human Capital & Legal Director	SK Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-51/MBU/02/2021	25 Februari 2021 February 25, 2021
Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Operations Director I	SK Menteri BUMN No. SK-224/MBU/09/2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK- 224/MBU/09/2022	30 September 2022 September 30, 2022
Gunadi	Direktur Operasi II Operations Director II	SK Menteri BUMN No. SK-145/MBU/07/2022 Decree of the Minister of SOE No. SK-145/ MBU/07/2022	11 Juli 2022 July 11, 2022
Koentjoro	Direktur Operasi III Operations Director III	SK Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-51/MBU/02/2021	25 Februari 2021 February 25, 2021
Sugiarti	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	SK Menteri BUMN No. SK-66/MBU/03/2024 Decree of the Minister of SOE No. SK-66/MBU/03/2024	15 Maret 2024 March 15, 2024

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profiles



Yudo Margono

Komisaris Utama Merangkap Sebagai Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently as Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Madiun, pada tahun 1965 | Was born in Madiun in 1965.
Usia 59 tahun Per Desember 2024.
59 years old as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Manajemen Universitas Krisnadwipayana, Bekasi (2014). • Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana, Bekasi (2016). • Magister Terapan Operasi Laut di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) (2020). • Bachelor of Management, Krisnadwipayana University, Bekasi (2014). • Master of Management, Krisnadwipayana University, Bekasi (2016). • Applied Master of Marine Operations at the Naval Staff and Command School (Seskoal) (2020).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP) • Risk Management Certification (QRGP)
Pengalaman Kerja Employment History	• Pangkogabwilhan I (2019-2020). • Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) (2020-2022). • Panglima TNI (2022–2023). • Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) (2024-sekarang). • Pangkogabwilhan I (2019-2020). • Chief of Naval Staff (KSAL) (2020-2022). • Commander of the TNI (2022–2023). • President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) (2024-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara SK-28/MBU/01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya tanggal 31 Januari 2024. Appointed as President Commissioner concurrently Independent Commissioner according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises SK-28/MBU/01/2024 about Termination and Appointing of President Commissioner of PT Hutama Karya Company's Board of Directors dated January 31, 2024.
Periode Menjabat Term of Office	2024 – 2029, Periode Pertama. 2024 – 2029, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan Terbuka Lainnya: - Chairman of PT Hutama Karya (Persero) Integrated Governance Committee Other Public Company: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Muhamad Lukman Edy

Wakil Komisaris Utama merangkap Sebagai Komisaris Independen
Vice President Commissioner Concurrently as Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Teluk Pinang, pada tahun 1970 | Was born in Teluk Pinang in 1970.
Usia 54 tahun Per Desember 2024.
54 years old as of December 2024



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya, Malang (1995). • Magister Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2004). • Doktor Sosiologi dan Antropologi dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur (2010). • Bachelor of Civil Engineering from Brawijaya University, Malang (1995). • Master of Public Policy from Padjadjaran University, Bandung (2004). • Doctor of Sociology and Anthropology from University of Malaya, Kuala Lumpur (2010).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Governance (Certified Governance Oversight Professional (CGOP) • Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP) • Certified Governance Oversight Professional (CGOP) • Risk Management Certificate (QRGP)
Pengalaman Kerja Employment History	• Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu I (2007-2009). • Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI (2012). • Wakil Ketua Komisi II (Politik dalam negeri, Pemerintahan, Pertahanan, Desa, Kepemiluan dan Aparatur Sipil Negara) (2014). • Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu (2016). • Anggota DPR RI Dapil Riau Periode (2009-2014 dan 2014-2019). • Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) (2020-sekarang). • Minister of State for Development of Disadvantaged Regions, United Indonesia Cabinet I (2007-2009). • Deputy Chairman of the MPR RI Budget Agency (2012). • Deputy Chairman of Commission II (Domestic Politics, Government, Defense, Villages, Elections and State Civil Apparatus) (2014). • Chairman of the Special Committee for the Election Bill (RUU) (2016). • Member of the Indonesian House of Representatives for the Riau Electoral District for the Period (2009-2014 and 2014-2019). • Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) (2020-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara SK-146/MBU/05/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya tanggal 14 Mei 2020. Appointed as Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises SK-146/MBU/05/2020 about Termination, Duty Reassignment, and Appointing of Board of Commissioners of PT Hutama Karya Company dated May 14, 2020.
Periode Menjabat Term of Office	2020 – 2025, Periode Pertama. 2020 – 2025, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Hutama Karya. • Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Hutama Karya. Perusahaan Terbuka Lainnya: - • Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of Hutama Karya. • Vice Chairman of Hutama Karya Integrated Governance Committee Other Public Companies: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Agung Sabar Santoso

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Banjarmasin, pada tahun 1962 | Was born in Banjarmasin in 1962.
Usia 62 tahun Per Desember 2024.
62 years old as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Dikpol AKABRI (1984). • Indonesian Military Academy Police Education and Training Center (1984). • PTIK (1990). • SESPIMEN (1999). • SESPIMTI (2008). • LEMHANAS (2015).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP). • Risk Management Certificate (QRGP).
Pengalaman Kerja Employment History	• Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) POLRI (2018). • Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri (2019). • Kapolda Banten (2019). • Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) (2021-sekarang). • Deputy Inspectorate of General Supervision (Wairwasum) of the Indonesian National Police (2018). • Assistant Chief of Police for General Planning and Budget of the Chief of Police (2019). • Banten Police Chief (2019). • Independent Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) (2021-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris Independen untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-316/MBU/09/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya 27 September 2021. Appointed as Independent Commissioners according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No SK-316/MBU/09/2021 about the Termination and Appointing of the Company's Commissaries in PT Hutama Karya dated September 27, 2021.
Periode Menjabat Term of Office	2021 – 2026, Periode Pertama. 2021 – 2026, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Ketua Komite Audit PT Hutama Karya (Persero). • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan Terbuka Lainnya: - • Chairman of the PT Hutama Karya (Persero) Audit Committee. • Member of PT Hutama Karya (Persero) Integrated Governance Committee Other Public Companies: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Wahyu Muryadi

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Surabaya, pada tahun 1964 | Was born in Surabaya in 1964.
Usia 60 tahun Per Desember 2024.
60 years old as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi di Universitas Airlangga, Surabaya (1988). • Sarjana Ekonomi di Universitas As- Syafi'iyah, Bekasi (2014). • Magister Management di Universitas Bina Nusantara, Jakarta (2016). • Bachelor of Economics from Airlangga University, Surabaya (1988). • Bachelor of Economics from As-Syafi'iyah University, Bekasi (2014). • Master of Management from Bina Nusantara University, Jakarta (2016).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP) • Risk Management Certificate (QRGP)
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Biro Protokol Istana Presiden (1999-2001). • Managing Editor Desk Nasional di Majalah Tempo (2001-2003). • Executive Editor di Majalah Tempo (2004-2010). • Chief Editor di Majalah Tempo (2010-2013). • Chief Editor di Tempo TV dan Tempo Channel (2013-2016). • CCO PT Tempo Inti Media, Tbk. (2016-2019). • Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) (2019-sekarang). • Head of the Presidential Palace Protocol Bureau (1999-2001). • Managing Editor of the National Desk at Tempo Magazine (2001-2003). • Executive Editor at Tempo Magazine (2004-2010). • Chief Editor at Tempo Magazine (2010-2013). • Chief Editor at Tempo TV and Tempo Channel (2013-2016). • CCO of PT Tempo Inti Media, Tbk. (2016-2019). • Independent Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) (2019-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris Independen untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-107/MBU/05/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya 28 Mei 2019. Kemudian diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK Menteri BUMN No. SK-121/MBU/05/2024 Appointed as Independent commissioner according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-107/MBU/05/2019 about the Termination and Appointing of the Company's Commissaries in PT Hutama Karya dated May 28. Then reappointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number of SK Minister of SOE No. SK-121/MBU/05/2024
Periode Menjabat Term of Office	2019 – 2024, Periode Pertama. 2024 – 2029, Periode Kedua. 2019 – 2024, First Period. 2024 – 2029, Second Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG PT Hutama Karya (Persero). • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan Terbuka Lainnya: - • Deputy Chairman of the Risk Management and GCG Committee of Hutama Karya. • Member of Hutama Karya Integrated Governance Committee Other Public Companies: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Chairiah

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Medan, pada tahun 1965 | Was born in Medan in 1965.
Usia 59 tahun Per Desember 2024
59 years old as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknologi Industri Pertanian di Institut Teknologi Indonesia (1992). • Magister Business Administration di Monash University, Australia (1999). • Bachelor of Agricultural Industrial Technology at the Indonesian Institute of Technology (1992). • Master of Business Administration at Monash University, Australia (1999).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP). • Risk Management Certificate (QRGP).
Pengalaman Kerja Employment History	• Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN Kementerian BUMN (2014-2015). • Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas Kementerian BUMN (2015-2019). • Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I Kementerian BUMN (2019- 2020). • Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Kepegawaian Kementerian BUMN (2020-2023). • Komisaris PT Hutama Karya (Persero) (2019-sekarang). • Deputy Assistant for SOE Restructuring, Ministry of SOEs (2014-2015). • Deputy Assistant for SOE Restructuring and Utilization of Minority State Ownership Portfolio, Ministry of SOEs (2015-2019). • Deputy Assistant for Financial Services, Survey Services and Consulting I, Ministry of SOEs (2019-2020). • Head of Organizational Planning and Personnel Bureau, Ministry of SOEs (2020-2023). • Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) (2019-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-107/MBU/05/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya 28 Mei 2019. Kemudian diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK Menteri BUMN No. SK-121/MBU/05/2024 Appointed as Commissioner according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No SK-107/MBU/05/2019 about the Termination and Appointing of the Company's Commissaries in PT Hutama Karya dated May 28, 2019. Then reappointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number of SK Minister of BUMN No. SK-121/MBU/05/2024.
Periode Menjabat Term of Office	2019 – 2024, Periode Pertama 2024 – 2029, Periode Kedua 2019 – 2024, First Period 2024 – 2029, Second Period
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Wakil Ketua Komite Audit PT Hutama Karya (Persero). • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan Terbuka Lainnya: - • Deputy Chairman of the Audit Committee of Hutama Karya. • Member of Hutama Karya Integrated Governance Committee Other Public Companies: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Susdiyarto Agus Praptono*

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Surakarta, pada tahun 1959 | Was born in Surakarta in 1959.
Usia 65 tahun Per Desember 2024.
65 years old as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1984). • Master Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta (2001). • Bachelor of Law from Sebelas Maret University, Surakarta (1984). • Master of Law from IBLAM College of Law, Jakarta (2001).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP) • Risk Management Certificate (QRGP)
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (2017). • Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (2017). • Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung (2019). • Jaksa Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan RI (Kejaksaan Agung) (2019). • Komisaris PT Hutama Karya (Persero) (2020-2025). • Head of the South Sumatra High Prosecutor's Office (2017). • Secretary of the Deputy Attorney General for Development of the Attorney General's Office (2017). • Secretary of the Deputy Attorney General for Intelligence of the Attorney General's Office (2019). • Functional Prosecutor at the Indonesian Attorney General's Education and Training Agency (AGO) (2019). • Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) (2020-2025).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-45/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya tanggal 7 Februari 2020. Appointed as Commissioner according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No SK-45/MBU/02/2020 about the Termination and Appointing of the Company's Commissaries in PT Hutama Karya dated February 7, 2020.
Periode Menjabat Term of Office	2020 – 2025, Periode Pertama. 2020 – 2025, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hutama Karya (Persero). • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan Terbuka Lainnya: - • Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Hutama Karya (Persero). • Member of PT Hutama Karya (Persero) Integrated Governance Committee. Other Public Companies: -
Kepemilikan Saham Shareholding	-

*Menyelesaikan masa jabatannya pada 7 Februari 2025
*Completes term of office on February 7, 2025



Iwan Suprijanto

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Malang, pada tahun 1971 | Was born in Malang in 1971.
Usia 53 tahun Per Desember 2024.
53 years old as of December 2024.

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Brawijaya, Malang (1995). • Magister Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997). • Insinyur Program Profesi Insinyur Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (2021). • Bachelor of Architecture Engineering, Brawijaya University, Malang (1995). • Master of Architecture Engineering, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1997). • Engineer Professional Program Engineer, Parahyangan Catholic University, Bandung (2021).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP). • Risk Management Certificate (QRGP).
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019-2020). • Direktur Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021-2021). • Direktur Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021-2023). • Komisaris PT Hutama Karya (Persero) (2023-sekarang). • Head of the Center for Development of Educational, Sports and Market Facilities and Infrastructure, Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing (2019-2020). • Director of Strategic Infrastructure, Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing (2021-2021). • Director General of Housing, Directorate General of Housing, Ministry of Public Works and Public Housing (2021-2023). • Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) (2023-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keptusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Hutama Karya (Persero) No. SK-61/MBU/03/2023 tanggal 30 Maret 2023. Appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders PT Hutama Karya (company) No. SK-61/MBU/03/2023 dated March 30, 2023.
Periode Menjabat Term of Office	2023 – 2028, Periode Pertama. 2023 – 2028, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG PT Hutama Karya (Persero). • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan Terbuka Lainnya: • Chairman of the Risk Management and GCG Committee of PT Hutama Karya (Persero). • Member of PT Hutama Karya (Persero) Integrated Governance Committee. Other Public Companies:
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Budiman*

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1956 | Was born in Jakarta in 1956.
Usia 68 tahun Per Desember 2024.
He's 68 years old as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1978). • Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (1994). • Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (2001). • Lembaga Ketahanan Nasional RI (2004). • Indonesian Armed Forces Academy (1978). • Army Staff and Command College (1994). • Indonesian National Army Staff and Command College (2001). • Indonesian National Resilience Institute (2004).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP) • Risk Management Certificate (QRGP)
Pengalaman Kerja Employment History	• Sekjen Kemenhan & ex officio Komisaris Utama PT Dahana (2013). • Kepala Staf TNI AD & ex officio Komisaris Utama PT Pindad (2013-2014). • Komisaris PT PLN (2015-2019). • Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) (2020-2024). • Secretary General of the Ministry of Defense & ex officio President Commissioner of PT Dahana (2013). • Chief of Staff of the Indonesian Army & ex officio President Commissioner of PT Pindad (2013-2014). • Commissioner of PT PLN (2015-2019). • President Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) (2020-2024).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat menjadi Komisaris Utama untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-45/MBU/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. Appointed as President Commissioner based on the Decree of Minister of State for State-Owned Enterprises No. SK-45/MBU/02/2020 dated February 7, 2020.
Periode Menjabat Term of Office	2020 – 2024, Periode Pertama. 2020 – 2024, First Period.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Does not hold concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

*Menyelesaikan masa jabatan pada 31 Januari 2024
*Completes term of office on January 31, 2024

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliation of Board of Commissioners

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Table of the affiliation relationship of commissioners

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris
Financial, Familial, and Management Relationships of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship						Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship						Hubungan Kepengurusan Management Relations	
		Dewan Komisaris Board of Commisioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali* Controlling Shareholder*		Dewan Komisaris Board of Commisioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali* Controlling Shareholder*			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Yudo Margono	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Chairiah	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung dan Tidak Langsung | Direct and Indirect

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2024 – 31 Januari 2024

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.

Changes In The Composition of The Board of Commissioners and The Reasons for The Changes

Throughout 2024, there have been changes in the composition of the Board of Commissioners. These changes were made based on the needs of the Company. The details of the changes in the composition of the Board of Commissioners are as follows:

Composition of The Board of Commissioners for The Period of January 1, 2024 – January 31, 2024

The composition of the Board of Commissioners for the period January 1, 2024 to January 31, 2024 is 7 (seven) persons consisting of 1 (one) President Commissioner who concurrently serves as Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner who concurrently serves as Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The composition and the basis of appointment of the Board of Commissioners are presented in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2024 – 31 Januari 2024
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Commissioners The Period of January 1, 2024 – January 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Budiman	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-45/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-45/MBU/02/2020	7 Februari 2020 February 7, 2020
Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-146/MBU/05/2020 tanggal Minister of SOEs Decree No. SK-146/MBU/05/2020	14 Mei 2020 May 14, 2020
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-316/MBU/09/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-316/MBU/09/2021	27 September 2021 September 27, 2021
Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-107/MBU/05/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-107/MBU/05/2019	28 Mei 2019 May 28, 2019
Chairiah	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-107/MBU/05/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-107/MBU/05/2019	28 Mei 2019 May 28, 2019
Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-45/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-45/MBU/02/2020	7 Februari 2020 February 7, 2020
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-61/MBU/03/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-61/MBU/03/2023	30 Maret 2023 March 30, 2023

Komposisi Dewan Komisaris Periode 31 Januari 2024 – 29 Mei 2024

Pada tanggal 31 Januari 2024, RUPS Luar Biasa memutuskan memberhentikan dengan hormat Budiman sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan mengangkat Yudo Margono sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 31 Januari 2024 sampai dengan 29 Mei 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Composition of The Board of Commissioners Period of January 31, 2024 – May 29, 2024

On January 31, 2024, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) resolved to honorably dismiss Budiman from his position as President Commissioner and Independent Commissioner and appoint Yudo Margono as the new President Commissioner and Independent Commissioner. Period of January 31, 2024 until May 29, 2024 consists of seven (7) members, comprising one (1) President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners. The composition and the basis of appointment of the Board of Commissioners are presented in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 31 Januari 2024 – 29 Mei 2024
Table of Composition and Basis of Appointment of the Board of Commissioners Period of January 31, 2024 – May 29, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Yudo Margono	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-28/MBU/01/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-28/MBU/01/2024	31 Januari 2024 January 31, 2024
Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-146/MBU/05/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-146/MBU/05/2020	14 Mei 2020 May 14, 2020
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-316/MBU/09/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-316/MBU/09/2021	27 September 2021 September 27, 2021
Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-107/MBU/05/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-107/MBU/05/2019	28 Mei 2019 May 28, 2019
Chairiah	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-107/MBU/05/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-107/MBU/05/2019	28 Mei 2019 May 28, 2019
Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-45/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-45/MBU/02/2020	7 Februari 2020 February 7, 2020
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-61/MBU/03/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-61/MBU/03/2023	30 Maret 2023 March 30, 2023

Komposisi Dewan Komisaris Periode 29 Mei 2024 – 31 Desember 2024

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Nomor SK-121/MBU/05/2024 telah mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Chairiah sebagai Komisaris dan Wahyu Muryadi sebagai Komisaris Independen. Kemudian, mengangkat kembali Chairiah sebagai Komisaris dan Wahyu Muryadi sebagai Komisaris Independen. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 29 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.

Composition of The Board of Commissioners for The Period of May 29, 2024 – December 31, 2024

The Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Hutama Karya Number SK-121/MBU/05/2024 has confirmed the honorable dismissal of Chairiah as Commissioner and Wahyu Muryadi as Independent Commissioner. Then, reappoint Chairiah as Commissioner and Wahyu Muryadi as Independent Commissioner. So that the composition of the Board of Commissioners for the period of May 29, 2024 until December 31, 2024 is 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner concurrently as Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The composition and basis for the appointment of the Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 29 Mei 2024 – 31 Desember 2024
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Commissioners for the Period of May 29, 2024 – December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Yudo Margono	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-28/MBU/01/2024 Decree of the Minister of SOE No. SK-28/MBU/01/2024	31 Januari 2024 January 31, 2024
Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-146/MBU/05/2020 Decree of the Minister of SOE No. SK-146/MBU/05/2020	14 Mei 2020 May 14, 2020
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-316/MBU/09/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-316/MBU/09/2021	27 September 2021 September 27, 2021
Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-107/MBU/05/2019 SK Menteri BUMN No. SK-121/MBU/05/2024 Decree of the Minister of SOE No. SK-107/ MBU/05/2019 Decree of the Minister of SOE No. SK-121/MBU/05/2024	28 Mei 2019 May 28, 2019
Chairiah	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-107/MBU/05/2019 SK Menteri BUMN No. SK-121/MBU/05/2024 Decree of the Minister of SOE No. SK-107/ MBU/05/2019 Decree of the Minister of SOE No. SK-121/MBU/05/2024	28 Mei 2019 May 28, 2019
Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-316/MBU/09/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-107/ MBU/05/2019	7 Februari 2020 February 7, 2020
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-61/MBU/03/2023 Decree of the Minister of SOE No. SK-61/MBU/03/2023	30 Maret 2023 March 30, 2023

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profile



Adjib Al Hakim

EVP Sekretaris Perusahaan
EVP of Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Purwokerto pada tahun 1968 | Was born in Purwokerto in 1968.
Usia 56 tahun Per Desember 2024.
56 years old as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro (1995). • Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat (2007). • Bachelor's Degree in Civil Engineering, Diponegoro University (1995). • Master's Degree in Management, Lambung Mangkurat University (2007).
Pengalaman Kerja Employment History	• Sr. Expert Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (2023-2024). • Sr. Expert pada Sekretaris Perusahaan (2024) • EVP Sekretaris Perusahaan (2024-Sekarang). • Senior Expert, Toll Road Operations and Maintenance Division (2023–2024). • Senior Expert, Corporate Secretary (2024). • EVP of Corporate Secretary (2024–Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 965/KPTS/33/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 First appointed in 2024 based on the Board of Directors Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. 965/KPTS/33/III/2024 dated March 27, 2024.
Kepemilikan Saham Shareholding	-



Tri Wibowo

EVP Satuan Pengawasan Intern
EVP of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Sragen pada tahun 1972 | Was born in Sragen in 1972.
Usia 52 tahun Per Desember 2024.
52 years old as of December 2024.

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1997). • Magister Administrasi Bisnis Institut Teknologi Bandung (2022). • Bachelor's Degree in Civil Engineering Sebelas Maret University (1997). • Master's Degree in Business Administration, Institut Teknologi Bandung (2022).
Pengalaman Kerja Employment History	• EVP QHSSE (2018-2023). • Senior Expert Divisi Sipil Umum (2023 - 2024). • EVP Satuan Pengawasan Intern (2024-Sekarang). • EVP QHSSE (2018-2023). • Senior Expert Infrastructure Division (2023 - 2024). • EVP of Internal Audit Unit (2024–Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 4390/KPTS/92/2024 tanggal 14 Oktober 2024 First appointed in 2023 based on the Board of Directors Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. 4390/KPTS/92/2024 dated October 14, 2024
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Ekwan Hadyanto

EVP Divisi Pengembangan Bisnis & Manajemen Portofolio
EVP Business Development & Portfolio Management Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Grobogan pada tahun 1973 | Born in Grobogan in 1973.
Usia 51 tahun Per Desember 2024.
Age 51 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro (1996). • Magister Manajemen Keuangan Universitas Diponegoro (2008). • Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University (1996). • Master of Financial Management, Diponegoro University (2008).
Pengalaman Kerja Employment History	• EVP Proyek Khusus/KPBU (2020-2021). • EVP Divisi Pengembangan Bisnis & Investasi (2021-2024). • EVP Divisi Pengembangan Bisnis & Manajemen Portofolio (2024 – Sekarang). • EVP Special Projects/KPBU (2020-2021). • EVP Business Development & Investment Division (2021-2024). • EVP Business Development & Portfolio Management Division (2024 – Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 2001/ KPTS/64/VII/2024. First appointed in 2024 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 2001/ KPTS/64/VII/2024.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Andung Damar Sasongko

EVP Divisi QHSSE
EVP QHSSE Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Pacitan pada tahun 1970 | Born in Pacitan in 1970.
Usia 54 tahun Per Desember 2024.
Age 54 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang (1996). • Magister Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang (2007). • Bachelor of Architecture Engineering, Diponegoro University, Semarang (1996). • Master of Architecture Engineering, Diponegoro University, Semarang (2007).
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Wilayah IV, Direktorat Wilayah Timur PT Hutama Karya (Persero) (2018-2019). • General Manager Departemen Konstruksi II, Direktorat Operasi PT Hutama Karya (Persero) (2019-2020). • Senior Vice President/ SVP Departemen Konstruksi II, pada Divisi Sipil Umum PT Hutama Karya (Persero) (2020-2022). • Senior Vice President/ SVP Departemen Konstruksi I & II, pada Divisi Sipil Umum PT Hutama Karya (Persero) (2022-2023). • Executive Vice President/ EVP Divisi QHSSE (2023-sekarang). • Head of Region IV, Directorate of Eastern Region of PT Hutama Karya (Persero) (2018-2019). • General Manager of Construction Department II, Directorate of Operations of PT Hutama Karya (Persero) (2019-2020). • Senior Vice President / SVP of Construction Department II, in the Infrastructure Division of PT Hutama Karya (Persero) (2020-2022). • Senior Vice President / SVP of Construction Department I & II, at the Infrastructure Division of PT Hutama Karya (Persero) (2022-2023). • Executive Vice President / EVP of QHSSE Division (2023-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 4997/ KPTS/92/XI/2023. Appointed for the first time in 2023 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 4997/ KPTS/92/XI/2023.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Muhroni

EVP Divisi Akuntansi & Keuangan
EVP Accounting & Finance Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Boyolali pada tahun 1970 | Was born in Boyolali in 1970.
Usia 54 tahun Per Desember 2024.
He's 54 years old as of December 2024



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Manajemen STIE STIKUBANK (2004). • Master of Business Administration SBM-ITB (2022). • Bachelor of Management STIE STIKUBANK (2004). • Master of Business Administration SBM-ITB (2022).
Pengalaman Kerja Employment History	• Site Administration Manager Proyek Utama 1 (2011-2014). • Manajer Senior Keuangan pada Wilayah I (Medan) (2014-2017). • Manajer Senior Bagian Keuangan pada Wilayah IV (Jatim, Jateng, DIY, Bali, NTB) (2017-2018). • Manager Senior Keuangan Kantor Pusat (2018). • EVP Divisi Akuntansi & Keuangan Kantor Pusat pada Direktorat Keuangan (2018-sekarang). • Site Administration Manager Main Project 1 (2011-2014). • Senior Finance Manager in Region I (Medan) (2014-2017). • Senior Finance Manager in Region IV (East Java, Central Java, DIY, Bali, NTB) (2017-2018). • Senior Finance Manager Head Office (2018). • EVP Accounting & Finance Division Head Office in Finance Directorate (2018-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 2786/ KPTS/86/2018. First appointed in 2018 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 2786/ KPTS/86/2018.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Heru Ermadi

EVP Divisi Corporate Planning
EVP Corporate Planning Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Magelang,pada tahun 1970 | Born in Magelang in 1970.
Usia 54 tahun Per Desember 2024.
Age 54 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1993). • Magister di Bidang Teknik Sipil Universitas Roorke (2001). • Magister di Bidang Manajemen Universitas Gadjah Mada (2024). • Bachelor of Civil Engineering, Sebelas Maret University (1993). • Master of Civil Engineering, Roorke University (2001). • Master of Management, Gadjah Mada University (2024).
Pengalaman Kerja Employment History	• Manajer Senior Pengembangan Jalan Tol (2014-2018). • EVP Divisi Corporate Planning (2018-sekarang). • Senior Manager of Toll Road Development (2014-2018). • EVP of Corporate Planning Division (2018-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 940/ KPTS/30/2018 First appointed in 2018 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 940/ KPTS/30/2018
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Paryanto

EVP Divisi Pengelolaan Risiko
EVP Risk Management Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Boyolali pada tahun 1972 | Born in Boyolali in 1972.
Usia 52 tahun Per Desember 2024.
Age 52 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1996). • Magister Ilmu Ekonomi Universitas Cendrawasih (2009). • Bachelor's Degree in Civil Engineering, Sebelas Maret University (1996). • Master's Degree in Economics, University of Cendrawasih (2009).
Pengalaman Kerja Employment History	• Direktur Operasi PT Hutama Karya Infrastruktur (2020 - 2021). • EVP Divisi Manajemen Risiko (2021-2024). • EVP Divisi Pengelolaan Risiko (2024 – sekarang). • Director of Operations, PT Hutama Karya Infrastruktur (2020–2021). • EVP of Risk Management Division (2021–2024). • EVP of Risk Management Division (2024–Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 2001/KPTS/64/VII/2024. First appointed in 2024 based on the Board of Directors Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. 2001/KPTS/64/VII/2024.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Eko Nurmaryadi

Plt. EVP Divisi Sistem & Kepatuhan
Acting EVP of Systems & Compliance Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Sukoharjo pada tahun 1979 | Born in Sukoharjo in 1979.
Usia 45 tahun Per Desember 2024.
Age 45 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (2003). • Magister Manajemen Universitas Indonesia (2023). • Bachelor's Degree in Civil Engineering, Gadjah Mada University (2003). • Master's Degree in Management, University of Indonesia (2023).
Pengalaman Kerja Employment History	• Auditor pada Satuan Pengawasan Intern PT Hutama Karya (Persero) (2018-2020). • VP Risiko Operasional Pada Divisi Manajemen Risiko (2020-2024). • Plt. EVP Divisi Sistem & Kepatuhan (2024-sekarang). • Auditor, Internal Audit Unit, PT Hutama Karya (Persero) (2018-2020). • VP of Operational Risk, Risk Management Division(2020-2024). • Acting EVP of Systems & Compliance Division (2024–Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 2001/KPTS/64/VII/2024. First appointed in 2024 based on the Board of Directors Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. 2001/KPTS/64/VII/2024.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Mardiansyah

EVP Divisi Human Capital
EVP Human Capital Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Bandung pada tahun 1978 | Born in Bandung in 1978.
Usia 46 tahun Per Desember 2024.
Age 46 as of December 2024



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Bung Hatta (2002). • Magister di Bidang Proyek Manajemen Universitas Indonesia (2019). • Bachelor of Civil Engineering, Bung Hatta University (2002). • Master of Project Management, University of Indonesia (2019).
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Dept. Infrastruktur PT HK Infrastruktur (2020-2021). • Kepala Satuan Pengawasan Intern PT HK Infrastruktur (2021-2022). • EVP Divisi Human Capital (2022-sekarang). • Head of Infrastructure Dept. PT HK Infrastruktur (2020-2021). • Head of Internal Audit Unit PT HK Infrastruktur (2021-2022). • EVP Human Capital Division (2022-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 3149/ KPTS/69/VIII/2022. First appointed in 2022 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 3149/ KPTS/69/VIII/2022
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Sarastuti Laksmi Wardhani

Plt. EVP Divisi Legal
Acting EVP Legal Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Yogyakarta pada tahun 1961 | Born in Yogyakarta in 1961.
Usia 63 tahun Per Desember 2024.
Age 63 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1987). • Program Hukum Kenotariatan Universitas Indonesia (2002). • Bachelor of Law, University of Indonesia (1987). • Notary Law Program, University of Indonesia (2002).
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Yogyakarta (2010 – 2013). • KABAG. SUNPROGLAPNIL Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (2013 – 2021). • Plt. EVP Divisi Legal (2021-Sekarang). • Head of Kulon Progo District Attorney's Office, Yogyakarta (2010 – 2013). • HEAD OF SUNPROGLAPNIL SECTION, Secretariat of the Deputy Attorney General for Civil and State Administration (2013 – 2021). • Acting EVP of Legal Division (2021-Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) No. DHCL/HC.66/ UDP/3/I/2021. First appointed in 2021 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) No. DHCL/HC.66/ UDP/3/I/2021.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

G Aji Sentosa

EVP Divisi Engineering & TI
EVP of Engineering & IT Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Purwokerto pada tahun 1973 | Born in Purwokerto in 1973.
Usia 51 tahun Per Desember 2024.
Age 51 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro (1996). • Magister di Bidang Teknik Sipil Universitas Tarumanegara (2008). • Bachelor's Degree in Civil Engineering, Diponegoro University(1996). • Master's Degree in Civil Engineering, Tarumanagara University(2008).
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Divisi Sistem & Risiko pada Direktorat Pengembangan (2017-2020). • EVP Divisi Sistem, TI & Riset Teknologi (2020-2024). • EVP Divisi Engineering & TI (2024-sekarang). • Head of Systems & Risk Division, Directorate of Development (2017-2020). • EVP of Systems, IT & Technology Research Division (2020-2024). • EVP of Engineering & IT Division (2024-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 2001/KPTS/64/VII/2024.. First appointed in 2024 based on the Board of Directors Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. 2001/KPTS/64/VII/2024.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Rizky Agung Saputra

EVP Divisi Sipil Umum
EVP of Infrastructure Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Purwokerto pada tahun 1984 | Born in Purwokerto in 1984.
Usia 40 tahun Per Desember 2024.
Age 40 as of December 2024



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Arsitektur Universitas Sebelas Maret (2006) • Magister Urban Design, Universitas Gadjah Mada (2008) • Bachelor's Degree in Architecture, Sebelas Maret University(2006) • Master's Degree in Urban Design, Gadjah Mada University (2008)
Pengalaman Kerja Employment History	• Vice President BIM Divisi Sistem, TI & Riset Teknologi (2020-2023). • Sr. VP Departemen Kontruksi pada Divisi Sipil Umum (2023-2024). • EVP Divisi Sipil Umum (2024-sekarang). • Vice President BIM Systems, IT & Technology Research Division (2020-2023). • Senior VP of Construction Department, Infrastructure Division (2023-2024). • EVP of Infrastructure Division (2024–Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 1951/KPTS/60/VI/2024. First appointed in 2024 based on the Board of Directors Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. 1951/KPTS/60/VI/2024.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Jusuf Sitorus

EVP Divisi EPC
EVP EPC Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Lumban Rihit pada tahun 1970 | Born in Lumban Rihit in 1970.
Usia 54 tahun Per Desember 2024.
Age 54 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Udayana (1996). • Magister Manajemen Universitas Esa Unggul (2022). • Bachelor of Civil Engineering, Udayana University (1996). • Master of Management, Esa Unggul University (2022).
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Proyek Pembangunan Integrated Building Bandara Soetta pada Divisi Gedung (2019-2020). • Vice President bagian Procurement merangkap Executive Project Manager Divisi Gedung (2020-2022). • Vice President Procurement Divisi EPC (2022). • Executive Vice President Divisi EPC (2022-sekarang). • Head of Integrated Building Development Project of Soetta Airport in the Building Division (2019-2020). • Vice President of Procurement and Executive Project Manager of the Building Division (2020-2022). • Vice President Procurement EPC Division (2022). • Executive Vice President of the EPC Division (2022-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 3292/KPTS/72/VIII/2022. First appointed in 2022 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 3292/KPTS/72/VIII/2022.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Nyoman Endi Mahendra

EVP Divisi Gedung
EVP Building Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Singaraja pada tahun 1971 | Born in Singaraja in 1971.
Usia 53 tahun Per Desember 2024.
Age 53 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master of Business Administration SBM-ITB (2022). • Sarjana Teknik Sipil Universitas Udayana (1997). • Master of Business Administration SBM-ITB (2022). • Bachelor of Civil Engineering Udayana University (1997).
Pengalaman Kerja Employment History	• VP Engineering Divisi Gedung (2020-2022). • VP Engineering Merangkap Plt. VP Procurement Divisi Gedung (2022). • EVP Divisi Gedung (2022 – Sekarang). • VP of Engineering Division, Building Division (2020-2022). • VP Engineering, concurrently Acting VP Procurement, Building (2022). • EVP of Building Division (2022 – Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor DHCL/HC.4276/UDP/214/X/2022. First appointed in 2022 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number DHCL/HC.4276/UDP/214/X/2022.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Pulung Satyo Anggono

EVP Divisi Pengembangan Jalan Tol
EVP Toll Road Development Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Kudus pada tahun 1978 | Born in Kudus in 1978.
Usia 46 tahun Per Desember 2024.
Age 46 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro (2002). • Magister Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (2024). • Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University (2002). • Master of Civil and Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology (2024).
Pengalaman Kerja Employment History	• Kepala Proyek Tol Permai S-4bps PT HK Infrastruktur (2019-2020). • Kepala Proyek Tol Binbran Z-3 PT HK Infrastruktur (2021-2022). • EVP Pembangunan Jalan Tol (2022-sekarang). • Head of Permai S-4bps Toll Project PT HK Infrastruktur (2019-2020). • Head of Binbran Z-3 Toll Project PT HK Infrastruktur (2021-2022). • EVP of Toll Road Development (2022-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 4694/KPTS/124/XI/2022. First appointed in 2022 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 4694/KPTS/124/XI/2022.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Iwan Hermawan

EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol
EVP Toll Road Planning Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Karawang pada tahun 1980 | Born in Karawang in 1980. .
Usia 44 tahun Per Desember 2024.
Age 44 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (2004). • Magister Teknik Sipil Universitas Trisakti (2022). • Magister Manajemen Universitas Indonesia (2023). • Bachelor of Civil Engineering, Gadjah Mada University (2004). • Master of Civil Engineering, Trisakti University (2022). • Master of Management Indonesian University (2023).
Pengalaman Kerja Employment History	• Vice President Bagian Teknik pada Divisi Pengembangan Jalan Tol (2018-2020). • Vice President Perencanaan dan Engineering pada Divisi Perencanaan Jalan Tol (2020-2021). • EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol (2021-sekarang). • Vice President of Engineering at Toll Road Development Division (2018-2020). • Vice President of Planning and Engineering at Toll Road Planning Division (2020-2021). • EVP of Toll Road Planning Division (2021-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 4080/ KPTS/108/XI/2021. First appointed in 2021 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 4080/ KPTS/108/XI/2021.
Kepemilikan Saham Shareholding	-



Dwi Aryono Bayuaji

EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
EVP of Toll Road Operation and Maintenance Division

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Solo pada tahun 1976 | Born in Solo in 1976.
Usia 48 tahun Per Desember 2024.
Age 48 as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil UNIKA Atmajaya (2000). • Magister Manajemen Konstruksi UNIKA Atmajaya (2002). • Bachelor of Civil Engineering UNIKA Atmajaya (2000). • Master of Construction Management UNIKA Atmajaya (2002).
Pengalaman Kerja Employment History	• Vice President Bagian Pemeliharaan pada Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol (2019-2021). • Plt. EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (2021-2022) • EVP Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol (2022-sekarang). • Vice President of Maintenance in the Toll Road Operation & Maintenance Division (2019-2021). • Acting EVP of Toll Road Operation and Maintenance Division (2021-2022) • EVPof Toll Road Operation Department (2022-present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 2955/KPTS/63/VII/2022. First appointed in 2022 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 2955/KPTS/63/VII/2022.
Kepemilikan Saham Shareholding	-

Profil Pegawai
Employee Profile

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees by Gender

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam satuan orang)
Table of Number of Employees by Gender (in number of persons)

Jenis Kelamin Gender	2024	2023
Pria Male	1.659	1.624
Wanita Female	482	451
Jumlah Total	2.141	2.075

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Number of Employees by Position Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan (dalam satuan orang)
Table of Number of Employees by Position Level (in number of persons)

Level Jabatan Position Level	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
EVP & Setingkat EVP & Equivalent	54	4	58	38	3	41
VP & Setingkat VP & Equivalent	105	18	123	134	18	121
Manajer & Setingkat Manager & Equivalent	258	27	285	282	31	186
Asisten Manajer Assistant Manager	663	125	788	530	97	379
Officer	579	308	887	640	302	942
Jumlah Total	1.659	482	2.141	1.624	451	2.075

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Number of Employees by Age Range

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia (dalam satuan orang)
Table of Number of Employees by Age Range (in number of persons)

Rentang Usia Age Range	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
> 55	109	12	121	122	16	138
50-54	157	24	181	184	21	205
45-49	126	14	140	120	16	136
40-44	145	21	166	142	19	161
35-39	195	37	232	150	27	177
30-34	452	121	573	384	91	475
25-29	406	213	619	474	232	706
20-24	69	40	109	48	29	77
Jumlah Total	1.659	482	2.141	1.624	451	2.075

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees by Education Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (dalam satuan orang)
Table of Number of Employees by Education Level (in number of persons)

Tingkat Pendidikan Education Level	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Pasca Sarjana Postgraduate	243	42	285	186	34	220
Sarjana Bachelor	1.170	384	1.554	1.160	359	1.519
Diploma Diploma	144	49	193	147	50	197

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (dalam satuan orang)
Table of Number of Employees by Education Level (in number of persons)

Tingkat Pendidikan Education Level	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Non akademik Non-academic	102	7	109	131	8	139
Jumlah Total	1.659	482	2.141	1.624	451	2.075

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Number of Employees by Employee Status

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian (dalam satuan orang)
Table of Number of Employees by Employee Status (in number of persons)

Status Kepegawaian Employee Status	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Karyawan Tetap Permanent Employee	1.114	260	1.374	1.105	247	1.352
Kontrak Contract	545	222	767	519	204	723
Jumlah Total	1.659	482	2.141	1.624	451	2.075

Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja

Number of Employees by Work Area

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja (dalam satuan orang)
Table of Number of Employees by Work Area (in number of persons)

Wilayah Kerja Work Area	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Kantor Head Office	830	389	1.219	811	362	1.173
Cabang Branch Office	58	7	65	67	6	73
Proyek Project	679	78	757	660	76	736
Ruas Jalan Tol Toll Road Section	92	8	100	86	7	93
Jumlah Total	1.659	482	2.141	1.624	451	2.075

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

The composition of Hutama Karya's shareholders is presented as follows:

Tabel Komposisi Pemegang Saham Hutama Karya
Table of Hutama Karya Shareholder Composition

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Nominal (Rp) Nominal (Rp)	Kepemilikan Ownership
Negara Republik Indonesia Government of Republic of Indonesia	131.646.000	131.646.000.000.000	100%

Per 1 Januari 2024 dan 31 Desember 2024, tidak terdapat perubahan komposisi pemegang saham. Per 31 Desember 2024, tidak terdapat kepemilikan saham institusi lokal, kepemilikan institusi asing, kepemilikan individu lokal, dan kepemilikan individu asing.

As of January 1, 2024, and December 31, 2024, there were no changes in the composition of shareholders. As of December 31, 2024, there was no ownership by local institutions, foreign institutions, local individuals, or foreign individuals.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Sampai dengan 31 Desember 2024, Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar.

Composition of The 20 Largest Shareholders

As of December 31, 2024, Hutama Karya remained a State-Owned Enterprise (SOE) with 100% of its shares owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information available regarding the composition of the 20 largest shareholders.

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Sampai dengan 31 Desember 2024, Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Repulik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Composition of Shareholders With 5% or More

As of December 31, 2024, Hutama Karya was a State-Owned Enterprise with 100% of its shares owned by the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders holding 5% or more of the Company's shares has been provided in the shareholder composition section.

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

Sampai dengan 31 Desember 2024, Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Repulik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Composition of Shareholders with Less Than 5%

Sampai dengan 31 Desember 2024, Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Repulik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, Direksi Dan Manajemen

Sampai dengan 31 Desember 2024, Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Hutama Karya tidak mempunyai kepemilikan saham atas Hutama Karya. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Dengan demikian, Hutama Karya tidak menyajikan menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

Share Ownership of The Board of Commissioners, Board of Directors and Management

As of December 31, 2024, the Board of Commissioners, Board of Directors, and Management of Hutama Karya do not hold any shares in the company. The entire share ownership is held 100% by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, Hutama Karya does not present details of any members of the Board of Directors or Board of Commissioners who hold shares, either directly or indirectly.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Major and Controlling Shareholders

Kepemilikan saham mayoritas Hutama Karya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Hutama Karya adalah Negara Republik Indonesia sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemiliki individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

The majority share ownership of Hutama Karya is held by the Republic of Indonesia, with a 100% shareholding. Therefore, the Principal and Controlling Shareholder of Hutama Karya is the Republic of Indonesia, meaning there are no indirect Principal and Controlling Shareholders, no individual ultimate owners, and no shareholders acting on behalf of other shareholders.



Negara Republik Indonesia
Government of Republic of Indonesia

100%

Inovasi Untuk Solusi

Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associates, and Joint Venture Companies

Entitas Anak

Subsidiaries

Kepemilikan Langsung

Direct Ownership

PT HK REALTINDO ("HKR")		
Bidang Usaha Line of Business	Pengembang properti Property Developer	
Tahun Beroperasi Operation Year	2010	
Jumlah Aset Total of Assets	Rp4,078,228 juta Rp4,078,228 million	
Kepemilikan (%) Ownership (%)	99.75%	
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating	
Alamat Address	HK Tower - Lantai 17 | 17th Floor Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8 RT. 12 RW. 11 Cawang Jatinegara Jakarta Timur 13340 Tel : (021) 8193570 Email : marketing@hkrealtindo.co.id Web : hkrealtindo.com	
Pengurus Perusahaan Company Management	**Dewan Komisaris** **Board of Commissioners**	
	Komisaris Utama President Commissioner	Karjono
	Komisaris Commissioner	Muhammad Fauzan
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Razikin
	Direksi **Board of Directors**	
	Plt Direktur Utama Acting President Director	Juni Iranto
	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management Director	Juni Iranto
	Plt Direktur Bisnis & Teknik Acting Business and Technique Director	M Reza Arisandy

PT HAKAASTON ("HKA")	
Bidang Usaha Line of Business	Layanan Jalan dan Operasi Jalan Tol & Manufaktur Road Services, Toll Road Operations & Manufacturing
Tahun Beroperasi Operation Year	2011
Jumlah Aset Total of Assets	Rp1,085,891 juta Rp1,085,891 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	99.75%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating

PT HAKAASTON ("HKA")		
Alamat Address	HK Tower - Lantai 16 | 16th Floor Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8 RT. 12 RW. 11 Cawang Jatinegara Jakarta Timur 13340 Tel : (021) 84995068 Fax : (021) 8497116868 Email : mail.info@hakaaston.co.id Web : hakaaston.co.id	
Pengurus Perusahaan Company Management	**Dewan Komisaris** **Board of Commissioners**	
	Komisaris Utama President Commissioner	Iqbal Alan Abdullah
	Komisaris Commissioner	Gunadi
	Komisaris Commissioner	Djoni Suherman
	Direksi **Board of Directors**	
	Direktur Utama President Director	J Aries Dewantoro
	Direktur Keuangan, SDM & Pengembangan Finance, HR & Development Director	M Izzan Zubair
	Direktur Teknik dan Operasi Engineering and Operations Director	Martin Barita Uli Nababan

PT HK INFRASTRUKTUR ("HKI")		
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konstruksi	
Tahun Beroperasi Operation Year	2011	
Jumlah Aset Total of Assets	Rp12,668,353 Juta Rp12,668,353 Million	
Kepemilikan (%) Ownership (%)	100.00%	
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating	
Alamat Address	HK Tower - Lantai 15 | 15th Floor Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8 RT. 12 RW. 11 Cawang Jatinegara Jakarta Timur 13340 Tel : (021) 296 34957 Email : hki@hkinfrastruktur.com Web : hkinfrastruktur.com	
Pengurus Perusahaan Company Management	**Dewan Komisaris** **Board of Commissioners**	
	Plt Komisaris Utama Acting President Commissioner	Taufik Widjoyono
	Komisaris Commissioner	Eka Setya Adrianto
	Komisaris Commissioner	Heru Ermadi
	Komisaris Commissioner	Tumik Kristianingsih
	Komisaris Commissioner	Mulyadi Wiriatmadja
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sarbini

PT HK INFRASTRUKTUR ("HKI")

	Direksi **Board of Directors**	
	Direktur Utama President Director	Aji Prasetyanti
	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management Director	Dadan Hikmat Ramdhani
	Direktur Operasi I Operations Director I	Fatma Dewi Setyowati
	Direktur Operasi II Operations Director II	M. Rozi Rinjayadi
	Direktur Operasi III Operations Director III	Aditya Novendra Jaya

EPC ENERGY SINGAPORE, PTE. LTD

Bidang Usaha Line of Business	Jasa konstruksi Construction Services
Tahun Beroperasi Operation Year	2019
Jumlah Aset Total of Assets	Rp201,143 juta Rp201,143 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	100.00%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	24 Sin Ming Lane, #05-107 Midview City, Singapore Tel : - Email : - Web : -
Pengurus Perusahaan Company Management	**Direksi** **Board of Directors**
	Direktur Utama President Director: Ready Bela Adhitama
	Direktur Director: Ng Lay Hoon

PT HUTAMA MARGA WASKITA

Bidang Usaha Line of Business	Pengusahaan jalan tol Toll Road Development and Management
Tahun Beroperasi Operation Year	2017
Jumlah Aset Total of Assets	Rp14,295,730 juta Rp14,295,730 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	99.186%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jl. Bina Marga No.3, Cipayung, Jakarta Timur | East Jakarta Tel : (021) 8444640 Fax : (021) 8444640 Email : sekretariat@hmwtollroad.com Web : www.hmwtollroadweb.com

PT HUTAMA MARGA WASKITA		
Pengurus Perusahaan Company Management	**Dewan Komisaris** **Board of Commissioners**	
	Komisaris Utama President Commissioner	Muhroni
	Komisaris Commissioner	Dwi Aryono Bayuaji
	Komisaris Commissioner	Sunandar
	Direksi **Board of Directors**	
	Direktur Utama President Director	Dindin Solakhuddin
	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management Director	Ayu Hutami Hariyanti
	Direktur Teknik Engineering Director	Jimmy Leonard

PT TERBANGGI BESAR KAYU AGUNG TOLL		
Bidang Usaha Line of Business	Pengusahaan jalan tol Tol Road Development and Management	
Tahun Beroperasi Operation Year	-	
Jumlah Aset Total of Assets	Rp61 juta Rp61 million	
Kepemilikan (%) Ownership (%)	99.90%	
Status Operasi Operation Status	Dalam tahap pengembangan Under construction	
Alamat Address	Jl. Dewa Ruci Km 218+800 Desa Bumi Harapan, Way Serdang, Mesuji, Lampung Telp : - Email : - Web : -	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** **Board of Commissioners**	
	Komisaris Commissioner	Gunadi
	Direksi **Board of Directors**	
	Direktur Director	Dinny Suryakencana

PT HUTAMA MAMBELIM TRANS PAPUA	
Bidang Usaha Line of Business	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Trans Papua Construction and Maintenance of Trans Papua Road
Tahun Beroperasi Operation Year	2024
Jumlah Aset Total of Assets	Rp150,666 juta Rp150,666 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	100.00%
Status Operasi Operation Status	Dalam tahap pengembangan Under construction

PT HUTAMA MAMBELIM TRANS PAPUA		
Alamat Address	Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8 RT. 12 RW. 11 Cawang Jatinegara Jakarta Timur 13340 Tel : - Email : - Web : -	
Pengurus Perusahaan Company Management	**Dewan Komisaris** **Board of Commissioners**	
	Komisaris Commissioner	Paryanto
	Direksi **Board of Directors**	
	Plt Direktur Acting Director	Kun Hartawan Adi Satria

PT HUTAMA PANORAMA SITINJAU LAUIK		
Bidang Usaha Line of Business	Konstruksi Bangunan Sipil, Aktivitas Arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi Manajemen Civil Building Construction, Architectural and Engineering Activities, and Management Consulting	
Tahun Beroperasi Operation Year	-	
Jumlah Aset Total of Assets		
Kepemilikan (%) Ownership (%)	100.00%	
Status Operasi Operation Status	Dalam tahap pengembangan Under construction	
Alamat Address	Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8 RT. 12 RW. 11 Cawang Jatinegara Jakarta Timur 13340 Tel : - Email : hpsl@hutamakarya.com Web : -	
Pengurus Perusahaan Company Management	**Dewan Komisaris** **Board of Commissioners**	
	Komisaris Commissioner	Busmart Zuriantomy
	Direksi **Board of Directors**	
	Direktur Director	Michael AP Rumenser

Kepemilikan Tidak Langsung

Indirect Ownership

PT BHIRAWA STEEL	
Bidang Usaha Line of Business	Manufaktur Manufacture
Tahun Beroperasi Operation Year	1974
Jumlah Aset Total of Assets	Rp1,733,604 juta Rp1,733,604 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	65,00% milik PT Hutama Karya Infrastruktur 65.00% Owned by PT Hutama Karya Infrastruktur
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating

PT BHIRAWA STEEL	
Alamat Address	*Representative Office* HK Tower - Lantai 3 | 3rd Floor Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8 RT. 12 RW. 11 Cawang Jatinegara Jakarta Timur 13340 Tel : - Email : - Web : -

PT NUSA PRATAMA PROPERTI	
Bidang Usaha Line of Business	Properti Property
Tahun Beroperasi Operation Year	2008
Jumlah Aset Total of Assets	Rp765,187 juta Rp765,187 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	90,00% milik PT HK Realtindo 90.00% owned by PT HK Realtindo
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jl. Let Jend TB Simatupang Kav. 9 Kebagusan – Pasar Minggu Jakarta Selatan | South Jakarta 12520 Telp : (021) 82470131 Email : - Web : -

PT PETRONESIA BENIMEL	
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konstruksi Construction Services
Tahun Beroperasi Operation Year	2005
Jumlah Aset Total of Assets	Rp1,107,394 juta Rp1,107,394 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	57,00% milik PT Hutama Karya Infrastruktur 57.00% owned by PT Hutama Karya Infrastruktur
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	L'Avenue Office Tower Unit 20F Jl. Raya KH Guru Amin No Kav.16 Jakarta Selatan | South Jakarta 12780 Telp : (021) Email : mailbox@petronesia.co.id Web : -

PT SEMEN INDOGREEN SENTOSA	
Bidang Usaha Line of Business	Manufaktur Manufacture
Tahun Beroperasi Operation Year	2012
Jumlah Aset Total of Assets	Rp902,097 juta Rp902,097 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	85,00% milik PT Hutama Karya Infrastruktur 85.00% owned by PT Hutama Karya Infrastruktur
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating

PT SEMEN INDOGREEN SENTOSA	
Alamat Address	HK Tower - Lantai 17 | 17th Floor Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8 RT. 12 RW. 11 Cawang Jatinegara Jakarta Timur 13340 Tel : - Email : - Web : -

ENTITAS ASOSIASI

PT INDONESIA INTERNASIONAL AUTOMOTIVE PROVING GROUND	
Bidang Usaha Line of Business	Aktivitas Perancangan dan Pembangunan Fasilitas serta Penyediaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Design and Development of Facilities and Provision of Motor Vehicle Testing Equipment
Tahun Beroperasi Operation Year	-
Jumlah Aset Total of Assets	Rp1,914,854 juta *(unaudited)* Rp1,914,854 million (unaudited)
Kepemilikan (%) Ownership (%)	5.00%
Status Operasi Operation Status	Dalam Tahap Pengembangan Under construction
Alamat Address	Jl. Dewi Sartika No 14, Cawang II, Jakarta – 13630, Indonesia Tel : (021) 9015663/4 Email : gobelinternationalpg@gobel.co.id Web : -

PT HUTAMA PRIMA	
Bidang Usaha Line of Business	Pembuatan *Asphalt Emulsion* Asphalt Emulsion Production
Tahun Beroperasi Operation Year	1990
Jumlah Aset Total of Assets	-
Kepemilikan (%) Ownership (%)	30%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jl. Metro Duta Niaga Blok II BA-3, Pondok Indah, Jakarta 12310 Tel : (021) 7669501, 7507202 Email : - Web : -

PT TAKENAKA INDONESIA	
Bidang Usaha Line of Business	Jasa Konstruksi Construction Services
Tahun Beroperasi Operation Year	1974
Jumlah Aset Total of Assets	Rp1,077,271 juta Rp1,077,271 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	1.07%

PT TAKENAKA INDONESIA	
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Mid Plaza 1 18th Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta 10220 Tel : (021) 5735660 Email : info@takenaka.co.id Web : -

PT JASA MARGA BALI TOL	
Bidang Usaha Line of Business	Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Development and Management
Tahun Beroperasi Operation Year	2011
Jumlah Aset Total of Assets	Rp1,893,205 juta Rp1,893,205 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	0.97%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Kawasan Ikat Plaza Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No 505, Denpasar, Bali Tel : - Email : - Web : -

PT GORONTALO ENERGY	
Bidang Usaha Line of Business	Pembangunan pembangkit tenaga listrik Power Plant Construction
Tahun Beroperasi Operation Year	-
Jumlah Aset Total of Assets	-
Kepemilikan (%) Ownership (%)	1.00%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jl. Bulungan Raya No 26, Kebayoran Baru, Jakarta - 12130 Tel : (021) 72796733 Email : - Web : -

PT ANGGREK GORONTALO INTERNASIONAL TERMINAL	
Bidang Usaha Line of Business	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut Seaport Services Activities
Tahun Beroperasi Operation Year	2022
Jumlah Aset Total of Assets	-
Kepemilikan (%) Ownership (%)	5.00%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating

PT ANGGREK GORONTALO INTERNASIONAL TERMINAL	
Alamat Address	Jl. Ahmad A. Wahab No 2, Gorontalo, Gorontalo Telp : (021) Email : - Web : -

PT KARYA LOGISTIK NUSANTARA	
Bidang Usaha Line of Business	Penyediaan *readymix* dan material alam lainnya Provision of Readymix and Other Natural Materials
Tahun Beroperasi Operation Year	2023
Jumlah Aset Total of Assets	Rp412,799 Juta *(Unaudited)* Rp412,799 Million (Unaudited)
Kepemilikan (%) Ownership (%)	13.95%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jakarta Office: MTH Square Apartment & Office Tower 2nd Floor Unit 233 Jl. Otista Raya No 390, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330 Tel : - Email : karya.logistiknusantara@gmail.com Web : -

Perusahaan Ventura Bersama / Joint Venture Companies

KSO HUTAMA - YODYA	
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konstruksi Construction services
Tahun Beroperasi Operation Year	2018
Jumlah Aset Total of Assets	Rp6,197 juta Rp6,197 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	99.50%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jl. Duren Sawit Baru No. 2, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

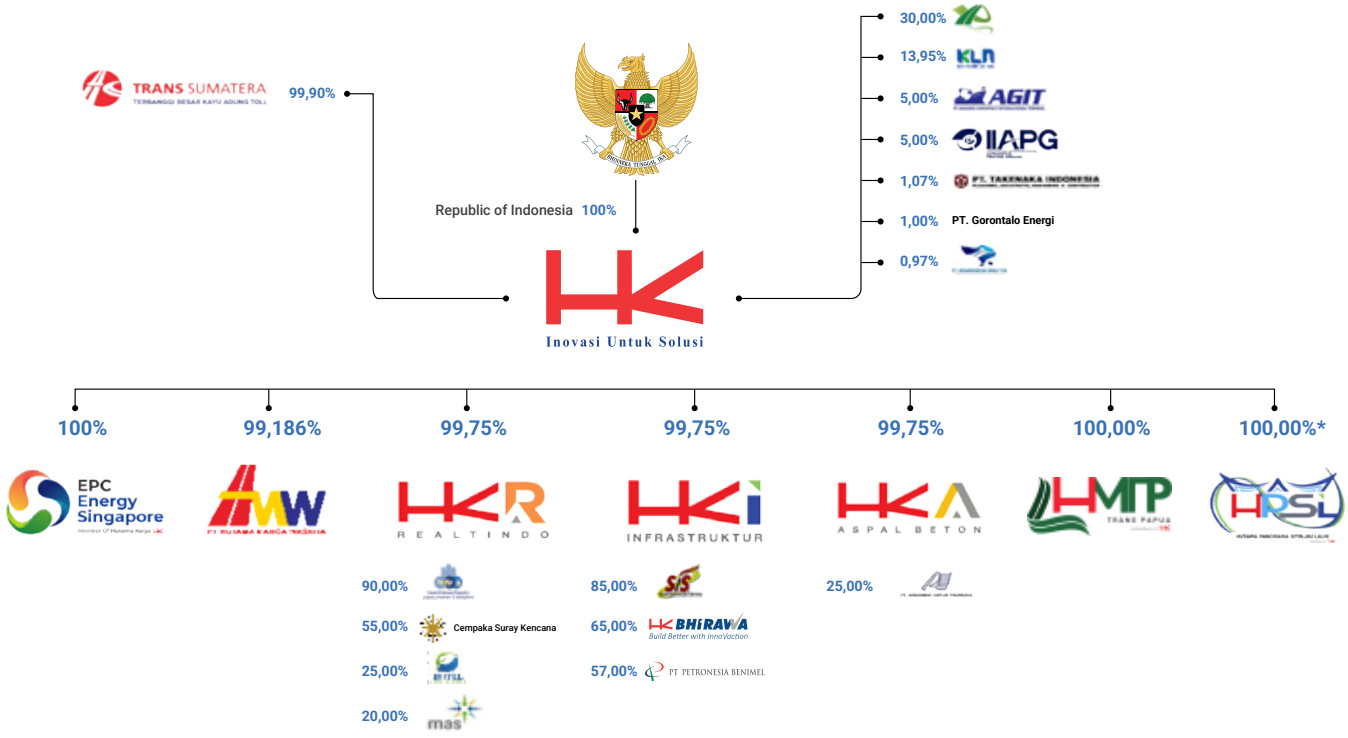
KSO HUTAMA - PERAPEN	
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konstruksi Construction services
Tahun Beroperasi Operation Year	2014
Jumlah Aset Total of Assets	Rp7,053 juta Rp7,053 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	90.00%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jalan Masjid Helvetia Ujung No. 48, Helvetia Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara

KSO HUTAMA - MOELADI	
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konstruksi Construction services
Tahun Beroperasi Operation Year	2018
Jumlah Aset Total of Assets	Rp38,134 juta Rp38,134 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	100.00%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jl. Ir. H. Juanda No. 27 RT 059, Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur

KSO HUTAMA - NSE	
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konstruksi Construction services
Tahun Beroperasi Operation Year	2019
Jumlah Aset Total of Assets	Rp8,169 juta Rp8,169 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	97.00%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	HK Tower Lt. 14, Jl. Letjen MT Haryono Kav.8 RT 012, RW 011, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur

KSO HUTAMA KARYA - GERBANG SARANA BAJA	
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konstruksi Construction services
Tahun Beroperasi Operation Year	2021
Jumlah Aset Total of Assets	Rp202,580 juta Rp202,580 million
Kepemilikan (%) Ownership (%)	99.99%
Status Operasi Operation Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jalan Letjen MT Haryono, Cawang 8 No. – RT 012, RW 011, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur

Struktur Grup Perusahaan
Company's Groups Structure



*dibentuk pada tanggal 23 Desember 2024 | established on December 23, 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, Hutama Karya tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of December 31, 2024, Hutama Karya does not have any Special Purpose Vehicles (SPVs).

Kronologi Penerbitan Saham
Shares Issuance Chronology

Hutama Karya per 31 Desember 2024, belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tindakan korporasi *(corporate action),* harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2024, Hutama Karya has not listed its shares on the Stock Exchange. Therefore, there is no information regarding corporate actions, share offering prices for each corporate action, the number of shares recorded after each corporate action, or the name of the stock exchange where the company's shares are listed.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Share Issuance and/or on Other Securities Listing

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi
Chronology of Bonds Issuance and/or Listing

Tabel Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi
Table of Bonds Issuance and / or Listing

No	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date of Issuance	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (jutaan) Total of Obligation (in millions rupiah)	Harga Penawaran Offering Price
1	Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri A Hutama Karya Bond I Year 2013 Series A	24 Juni 2013 June 24, 2013	3 Tahun 3 Years	Rp	135,000	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
2	Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri B Hutama Karya Bond I Year 2013 Series B	24 Juni 2013 June 24, 2013	5 Tahun 5 Years	Rp	290,000	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
3	Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C Hutama Karya Bond I Year 2013 Series C	24 Juni 2013 June 24, 2013	7 Tahun 7 Years	Rp	325,000	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
4	Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 Hutama Karya Continuous Bonds I Phase I Year 2016	21 Desember 2026 December 21, 2016	10 Tahun Years	Rp	1,000,000	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
5	Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 Hutama Karya Continuous Bonds I Phase II Year 2017	7 Juni 2027 June 7, 2017	10 Tahun Years	Rp	1,968,000	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
6	Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B Hutama Karya Continuous Bonds I Phase III Year 2017 Series B	26 September 2017 September 26, 2017	10 Tahun Years	Rp	2,367,000	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
7	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A Hutama Karya Continuous Bonds II Phase I Year 2021 Series A	7 September 2021 September 7, 2021	3 Tahun Years	Rp	33,500	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
8	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B Hutama Karya Continuous Bonds II Phase I Year 2021 Series B	7 September 2021 September 7, 2021	5 Tahun Years	Rp	185,550	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
9	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C Hutama Karya Continuous Bonds II Phase I Year 2021 Series C	7 September 2021 September 7, 2021	7 Tahun Years	Rp	780,950	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
10	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A Hutama Karya Continuous Bonds II Phase II Year 2022 Series A	12 Januari 2022 January 12, 2022	3 Tahun Years	Rp	81,000	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond

Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rate		Wali Amanat Trustee
			2024	2023	
24 Juni 2016 June 24, 2016	8.75%	Lunas Paid off	-	-	PT CIMB Niaga Tbk
24 Juni 2018 June 24, 2018	9.10%	Lunas Paid off	-	-	PT CIMB Niaga Tbk
24 Juni 2020 June 24, 2020	9.50%	Lunas Paid off	-	-	PT CIMB Niaga Tbk
21 Desember 2026 December 21, 2016	8.55%	Belum Lunas Not yet paid off	idAAA (gg)	idAAA (gg)	Bank BJB
7 Juni 2027 June 7, 2017	8.07%	Belum Lunas Not yet paid off	idAAA (gg)	idAAA (gg)	Bank BJB
26 September 2027 September 26, 2017	8.40%	Belum Lunas Not yet paid off	idAAA (gg)	idAAA (gg)	Bank BJB
7 September 2024 September 7, 2024	8.25%	Lunas Paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB
7 September 2026 September 7, 2026	8.55%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB
7 September 2028 September 7, 2028	9.30%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB
12 Januari 2025 January 12, 2025	6.50%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB

Tabel Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi
Table of Bonds Issuance and / or Listing

No	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date of Issuance	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (jutaan) Total of Obligation (in millions rupiah)	Harga Penawaran Offering Price
11	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B Hutama Karya's Continuous Bonds II Phase II Year 2022 Series B	12 Januari 2022 January 12, 2022	5 Tahun Years	Rp	176,500	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond
12	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C Hutama Karya's Continuous Bonds II Phase II Year 2022 Series C	12 Januari 2022 January 12, 2022	7 Tahun Years	Rp	742,500	100% dari jumlah pokok obligasi 100% of the principal amount of the bond

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Sukuk

Chronology of Sukuk Issuance and/or Listing

Tabel Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Sukuk
Table of Chronology of Sukuk Issuance and/or Listing

No	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date of Issuance	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Sukuk (jutaan) Total of Sukuk (in millions rupiah)	Harga Penawaran Offering Price
1	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series C	7 September 2021 September 7, 2021	7 Tahun Years	Rp	419,050	100% dari jumlah pokok sukuk 100% of the principal amount of sukuk
2	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series B	7 September 2021 September 7, 2021	5 Tahun Years	Rp	64,450	100% dari jumlah pokok sukuk 100% of the principal amount of sukuk
3	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series A	7 September 2021 September 7, 2021	3 Tahun Years	Rp	16,500	100% dari jumlah pokok sukuk 100% of the principal amount of sukuk
4	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series C	12 Januari 2022 January 12, 2022	7 Tahun Years	Rp	69,490	100% dari jumlah pokok sukuk 100% of the principal amount of sukuk
5	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series B	12 Januari 2022 January 12, 2022	5 Tahun Years	Rp	105,260	100% dari jumlah pokok sukuk 100% of the principal amount of sukuk
6	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series A	12 Januari 2022 January 12, 2022	3 Tahun Years	Rp	138,250	100% dari jumlah pokok sukuk 100% of the principal amount of sukuk

Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rate		Wali Amanat Trustee
			2024	2023	
12 Januari 2027 January 12, 2027	7.75%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB
12 Januari 2029 January 12, 2029	8.25%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-	idAA-	Bank BJB

Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rate		Wali Amanat Trustee
			2024	2023	
7 September 2028 September 7, 2028	9.30%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB
7 September 2026 September 7, 2026	8.55%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB
07 September 2024 September 7, 2024	8.25%	Lunas Paid off	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB
12 Januari 2029 January 12, 2029	8.25%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB
12 Januari 2027 January 12, 2027	7.75%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB
12 Januari 2025 January 12, 2025	6.50%	Belum Lunas Not yet paid off	idAA-(sy)	idAA-(sy)	Bank BJB

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan belum menerbitkan obligasi konversi.

Chronology of Convertible Bonds and/or Listing

As of December 31, 2024 the company did not issue any of convertible bonds.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Sumber Pendanaan Lainnya

Chronology of Other Fundings Issuance and/or Listing

Tabel Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Medium Term Notes
Table of Issuance and/or Listing Chronology of Medium-Term Notes

No	Nama Name	Mata Uang Currency	Nominal (Juta) (in millions rupiah)	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Tenor	Tanggal Penerbitan Date of Issuance	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Moody's Rating		Fitch Rating	
								2024	2023	2024	2023
1	Global Medium Term Notes Hutama Karya	USD	600	3,75%	10 Tahun	11 Mei 2020	11 Mei 2030	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Information on The Use of Services from Public Accountant (AP) and Public Accountant Firm (KAP)

Nama KAP KAP's name	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
Jaringan Asosiasi Asscociation Networking	PwC (PricewaterhouseCoopers)
Alamat KAP KAP'S address	WTC 3, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta 12920
Nama AP AP'S name	Yusron
Periode Penugasan KAP KAP'S Assignment Period	Periode Ke 2 2nd Period
Periode Penugasan AP AP'S Assignment Period	Periode Ke 4 4th Period
Jasa Audit Audit Services	Audit Laporan Keuangan Financial Report Audit
Fee Audit* Audit Fee	Rp14.9 miliar Rp14.9 billion
Jasa Non Audit Non Audit Services	Due Diligence Atas Saldo Awal Laporan Keuangan Konsolidasian Waskita Grup 31 Desember 2023 Due diligence on the opening balance of the consolidated financial statements of the Waskita Group as of December 31, 2023
Fee Non Audit Non Audit Fee	Rp19.9 miliar Rp19.9billion

*Termasuk PPN dan Prosedur yang disepakati
*Include VAT and Agreed-upon procedures

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professions

Jenis Lembaga/ Profesi Institutions / profession	**Nama** Name	**Periode Penugasan** Assignment Period	**Ruang Lingkup Penugasan** Assignment Scopes	**Biaya Jasa Penunjang Per tahun** Supporting Service Fee
Pencatatan tahunan saham dan/atau efek bersifat utang dan sukuk Annual Listing of Shares and/or Debt Securities and Sukuk	PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta – 12190	2013 – selama Hutama Karya tergolong perusahaan tercatat 2013 –As long as Hutama Karya is classified as a listed company	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Parties that organize and provide systems and/or facilities to facilitate the matching of securities buy and sell offers from other parties with the aim of trading securities among them.	Rp1,330,120,401
Notaris Notary	1. Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Notaris & PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Esi Susanti, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT Kota Administrasi Jakarta	Penggunaan jasa Notaris bersifat kasuistis, pembayaran dilakukan per penerbitan akta notaris. The use of Notary services is casuistic, payment is made per notarial deed issuance.	• Pembuatan Akta Notaris dan Legalisir Akta • Pembuatan Akta Kuasa Direksi • Drafting of Notarial Deeds and Legalization of Deeds • Pembuatan Akta Kuasa Direksi	Rata-rata +/- Rp3,000,000 sampai dengan Rp11,000,000 per penerbitan akta In the average of +/- Rp3,000,000 up to Rp11,000,000 for every notarial deeds issuance
Konsultan Hukum Legal Consultant	Tumbuan & Partners (T&P) Jl. Gandaria Tengah III No.8, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Jakarta	Kontrak sejak 2024 - ongoing Contract since 2024 - ongoing	Konsultan Penunjuang Divisi Legal – Pemberian Pendampingan & Legal Opini Supporting Consultant for Legal Division – Assistance & Legal Opinion Provision	Rp25,000,000/ bulan Rp25,000,000/ month
	Rivai, Triprasetio & Partners (RTNP) KMO Building (suite 305), 3rd Floor, Jl. Kyai Maja No 1, South Jakarta, Jakarta, RT. 3/ RW. 8, Gunung, Kec. Kby. Baru, Jakarta Selatan	Kontrak sejak bulan Juni 2021 - ongoing Contract since June 2021 - ongoing	Konsultan Penunjuang Divisi Legal – Pemberian Pendampingan & Legal Opini Supporting Consultant for Legal Division – Assistance & Legal Opinion Provision	*Hourly rate* dengan total tagihan tidak melebihi Rp4,005,146,471 (sepanjang masa kontrak) Hourly Rate with a Total Billing Not Exceeding Rp4,005,146,471 (Throughout the Contract Period)

Jenis Lembaga/ Profesi Institutions / profession	**Nama** Name	**Periode Penugasan** Assignment Period	**Ruang Lingkup Penugasan** Assignment Scopes	**Biaya Jasa Penunjang Per tahun** Supporting Service Fee
	Hendro, Widodo & Partners (HWP) The Mansion Bougenville, Fontana Office Tower, Zona 1, Lt-38, BF-F1 - BF-K1, Jl. Trembesi No.Blok D, Pademangan Timur, Jakarta	Kontrak sejak 2024 - ongoing Contract since 2024 - ongoing	Konsultan Penunjuang Divisi Legal – Pemberian Pendampingan & Legal Opini Supporting Consultant for Legal Division – Assistance & Legal Opinion Provision	Rp41,000,000/ bulan Rp41,000,000/ month
Biro Administrasi Efek Securities Administration Bureau	PT Bursa Efek Indonesia	2016 – sampai dengan Obligasi Hutama Karya dan/atau Sukuk Hutama Karya dinyatakan lunas 2016 – Until Hutama Karya Bonds and/or Hutama Karya Sukuk Are Fully Settled	Penatausahaan Pencatatan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Efek, Agen Pembayaran dan/atau jasa administrasi lainnya sehubungan dengan Efek Bersifat Utang Hutama Karya di di Bursa Efek Indonesia Administration of Recording Ownership or Changes in Ownership of Securities, Paying Agent, and/or Other Administrative Services Related to Hutama Karya's Debt Securities on the Indonesia Stock Exchange	Rp1,368,098,587 Rp1,368,098,587
	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	2016 – sampai dengan Obligasi Hutama Karya dan/atau Sukuk Hutama Karya dinyatakan lunas 2016 – Until Hutama Karya Bonds and/or Hutama Karya Sukuk Are Fully Settled	Penatausahaan Pencatatan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Efek, Agen Pembayaran dan/atau jasa administrasi lainnya sehubungan dengan Efek Bersifat Utang Hutama Karya di di Bursa Efek Indonesia Administration of Recording Ownership or Changes in Ownership of Securities, Paying Agent, and/or Other Administrative Services Related to Hutama Karya's Debt Securities on the Indonesia Stock Exchange	Rp160,950,000 Rp160,950,000

Jenis Lembaga/ Profesi Institutions / profession	**Nama** Name	**Periode Penugasan** Assignment Period	**Ruang Lingkup Penugasan** Assignment Scopes	**Biaya Jasa Penunjang Per tahun** Supporting Service Fee
Wali Amanat Obligasi Bonds Trustee	Bank BJB	2016 – sampai dengan Obligasi Hutama Karya dan/atau Sukuk Hutama Karya dinyatakan lunas 2016 – Until Hutama Karya Bonds and/or Hutama Karya Sukuk Are Fully Settled	• Mewakili kepentingan pemegang surat berharga di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan, peraturan OJK mengenai kontrak perwaliamanatan efek, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sejak menandatangani kontrak perwaliamanatan dengan emiten. • Melaksanakan ketentuan berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan dokumen terkait lainnya. • Memberikan keterangan atau informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada OJK. • Representing the interests of security holders both in and out of court in accordance with the trust agreement, Financial Services Authority (OJK) regulations on trust agreements for securities, and applicable laws and regulations. • Committing to carrying out core duties and responsibilities from the moment the trust agreement is signed with the issuer. • Executing provisions based on the trust agreement and other related documents. • Providing explanations or information regarding the execution of trustee duties to Financial Services Authority (OJK)	Rp735.180.180 *(exclude,* PPN) Rp735,180,180 (exclude, PPN)

Jenis Lembaga/ Profesi Institutions / profession	Nama Name	Periode Penugasan Assignment Period	Ruang Lingkup Penugasan Assignment Scopes	Biaya Jasa Penunjang Per tahun Supporting Service Fee
			Obligasi Berkelanjutan II HK Tahap I Tahun 2021 Sustainable Bonds II HK Phase I Year 2021	
			Obligasi Berkelanjutan II HK Tahap II Tahun 2022 Sustainable Bonds II HK Phase II Year 2022	
			Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I HK Tahap I Tahun 2021 Sustainable Mudharabah Sukuk I HK Phase I Year 2021	
			Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I HK Tahap II Tahun 2022 Sustainable Mudharabah Sukuk I HK Phase II Year 2022	
			Obligasi Berkelanjutan I HK Tahap II Tahun 2017 Sustainable Bonds I HK Phase II Year 2017	
			Obligasi Berkelanjutan I HK Tahap I Tahun 2016 Sustainable Bonds I HK Phase I Year 2016	
			Obligasi Berkelanjutan I HK Tahap III Tahun 2017 Sustainable Bonds I HK Phase III Year 2017	
	BNY Mellon	2020 – sampai dengan Global Medium Term Notes Hutama Karya dan/ atau Sukuk Hutama Karya dinyatakan lunas 2020 –Until Hutama Karya Global Medium-Term Notes and/or Hutama Karya Sukuk Are Fully Settled	Tugas wali amanat adalah mewakili kepentingan pemegang surat berharga di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan, peraturan SGX mengenai kontrak perwaliamanatan efek, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The trustee's duty is to represent the interests of security holders both in and out of court in accordance with the trust agreement, SGX regulations on securities trust agreements, and applicable laws and regulations.	USD1,500 (Agent Fee)
				USD4,500 (Trustee Fee)

Jenis Lembaga/ Profesi Institutions / profession	**Nama** Name	**Periode Penugasan** Assignment Period	**Ruang Lingkup Penugasan** Assignment Scopes	**Biaya Jasa Penunjang Per tahun** Supporting Service Fee
Perusahaan Pemeringkat Efek Securities Rating Company	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Sampai dengan Hutama Karya menginginkan diakhirinya kerja sama pemering- katan/ dinyatakan pailit/ dibubarkan dan/atau sampai dengan seluruh Efek Bersifat Utang Perseroan dinyatakan lunas. Until Hutama Karya decides to terminate the rating cooperation, is declared bankrupt, is dissolved, and/or until all of the Company's Debt Securities are fully settled.	Pemeringkatan atas Perusahaan dan Efek Bersifat Utang Perusahaan Rating of the Company and Its Debt Securities	Rp194,250,000
	Moody's Investor Service Singapore Pte. Limited	2022 - Sampai dengan Hutama Karya menginginkan diakhirinya kerja sama pemeringkatan/ dinyatakan pailit/ dibubarkan dan/atau sampai dengan seluruh Efek Bersifat Utang Perseroan dinyatakan lunas. 2022 - Until Hutama Karya decides to terminate the rating cooperation, is declared bankrupt, is dissolved, and/or until all of the Company's Debt Securities are fully settled.	Pemeringkatan atas Perusahaan dan Efek Bersifat Utang Perusahaan (GMTN) Rating of the Company and Its Debt Securities (GMTN)	USD86,500
	Fitch Ratings Ltd	2022 - Sampai dengan Hutama Karya menginginkan diakhirinya kerja sama pemeringkatan/ dinyatakan pailit/ dibubarkan dan/atau sampai dengan seluruh Efek Bersifat Utang Perseroan dinyatakan lunas. 2022 - Until Hutama Karya decides to terminate the rating cooperation, is declared bankrupt, is dissolved, and/or until all of the Company's Debt Securities are fully settled.	Pemeringkatan atas Perusahaan dan Efek Bersifat Utang Perusahaan (GMTN) Rating of the Company and Its Debt Securities (GMTN)	USD84,000
			Entity Rating Fee	Rp190,000,000

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

Penghargaan Awards

No	Nama Penghargaan Awards	Lembaga Instution	Kategori Category	Tahun Year
1	Indonesia Digital Innovation Awards 2024	WartaEkonomi.co.id	Infrastructure Services Industry - The Most Innovativ Services Industry for Technology Implementation to Improve Construction Works Quality and Efficiency	2024
2	BUMN Corporate Communications and Sustainability 2024	Kementerian BUMN	Sustainability Community Involvement and Development (CID) Pendidikan - Bronze	2024
3	BIM 5D Multi-Project Software Utilization Award	Glodon Cubicost Indonesia	-	2024
4	50 CSR Brand Equity Awards 2024	The Iconomics	Construction	2024
5	TOP CSR Awards 2024	TopBusiness	Top Leader on CSR Commitment 2024 - Budi Harto	2024
6	TOP CSR Awards 2024	TopBusiness	# Star 5	2024
7	The 3rd IDEAS 2024	PR INDONESIA	Bronze Winner Sub Kategori Social Project (Peso Communication Strategy)	2024
8	Fortune Southeast Asia 500 2024 (peringkat #183 Perusahaan Terbaik se-Asia Tenggara) Fortune Southeast Asia 500 2024 (ranked #183 as Best Company in Southeast Asia)	Fortune Magazine	Southeast Asia	2024
9	Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Security Management System for National Vital Objects and Specific Objects	Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Security Maintenance Agency (Baharkam)	Gold Reward	2024
10	Publikasi Ilmiah Konferensi Green Building 2024 Scientific Publication – Green Building Conference 2024	University of Nis, Serbia		2024
11	BUMN Award	PR INDONESIA	Bronze Winner Kategori Laporan Tahunan Sub Kategori Annual Report Bronze Winner in the Annual Report Category – Subcategory Annual Report	2024
12	TJSL & CSR Awards 2024	BUMN Track	Pilar Sosial (#Star 4) Social Pillar (#Star 4)	2024
13	TJSL & CSR Awards 2024	BUMN Track	Pilar Ekonomi (#Star 4) Economic Pillar (#Star 4)	2024
14	TJSL & CSR Awards 2024	BUMN Track	Pilar Lingkungan (#Star 4) Environment Pillar (#Star 4)	2024
15	TJSL & CSR Awards 2024	BUMN Track	Strong Commitment Senior Officer on Social, Economic, and Environment Programs of CSR (Agus Kosasih)	2024
16	Indonesia PR Awards 2024	The Iconomics	Construction	2024
17	Indonesia PR Awards 2024	The Iconomics	50 PR Person Awards (Intan Zania)	2024
18	GRC & Performance Excellence Awards 2024	BusinessNews Indonesia	The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2024 (Construction Services)	2024
19	GRC & Performance Excellence Awards 2024	BusinessNews Indonesia	The Best GRC For Corporate Finance 2024 (Construction Services)	2024

No	Nama Penghargaan Awards	Lembaga Instution	Kategori Category	Tahun Year
20	GRC & Performance Excellence Awards 2024	BusinessNews Indonesia	The Best Chief Executive Officer (Budi Harto)	2024
21	7 Most Popular Brand of the Year 2024	Jawa Post Indonesia	Pengembang Infrastruktur & Jasa Konstruksi Infrastructure Developer and Construction Services	2024
22	Autodesk ASEAN Innovation Awards 2024	Autodesk	Grand Winner: Better World Builder of the Year Award (PT Hutama Karya (Persero) - KSO ADHI HK RS IKN)	2024
23	Autodesk ASEAN Innovation Awards 2024	Autodesk	Top Entry In Country: Better World Builder of the Year Award (PT Hutama Karya (Persero) - KSO ADHI HK RS IKN)	2024
24	SPS Media Relation Awards 2024	PR INDONESIA	Sub Kategori Program Press Gathering - Silver Silver Winner in the Press Gathering Program Subcategory	2024
25	SPS Media Relation Awards 2024	PR INDONESIA	Sub Kategori Program Press Release - Bronze Bronze Winner in the Press Release Program Subcategory	2024
26	ADPI 2023	Perkumpulan ADPI ADPI Asscociation	Juara II Penghargaan kepada Dana Pensiun dengan Kinerja Baik 2nd Place Award for Pension Fund with Outstanding Performance	2024
27	The 3rd International Seminar on Civil and Environmental Engineering (ISCEE) 2024	Universitas IPB IPB University	Best Presenter	2024
28	Museum Rekor Dunia Indonesia Indonesian World Records Museum	MURI Indonesian World Records Museum (MURI)	Pekerjaan Dinding Fasad, Kolom dan Tangga Terintegrasi Rumah Susun Tercepat (Menggunakan Teknologi Bekisting Aluminium Formwork) Fastest Execution of Facade Wall, Column, and Integrated Staircase Work for Apartment Buildings (Using Aluminum Formwork Technology)	2024
29	Museum Rekor Dunia Indonesia Indonesian World Records Museum	MURI Indonesian World Records Museum (MURI)	Pekerjaan Antar Lantai Rumah Susun Tercepat Fastest Execution of Inter-Floor Construction for Apartment Buildings	2024
30	BUMN Technology Adoption Award 2024	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	Cost Optimization - Juara 3 Cost Optimization – 3rd winner	2024
31	Penerapan K3 Tahun 2023 K3 Implementation 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Zero Accident - Kantor Pusat Zero Accident – Head Office	2024
32	Penerapan K3 Tahun 2023 K3 Implementation 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Zero Accident - Divisi EPC Zero Accident -EPC Division	2024
33	Penerapan K3 Tahun 2023 K3 Implementation 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Zero Accident - Divisi Gedung Zero Accident – Building Division	2024
34	Penerapan K3 Tahun 2023 K3 Implementation 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Pencegahan dan Penanganan HIV & AIDS di Tempat Kerja - Kantor Pusat HIV & AIDS Prevention and Management in the Workplace – Head Office	2024

No	Nama Penghargaan Awards	Lembaga Instution	Kategori Category	Tahun Year
35	Penerapan K3 Tahun 2023 K3 Implementation 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Pencegahan dan Penanganan HIV & AIDS di Tempat Kerja - Divisi Sipil Umum HIV & AIDS Prevention and Management in the Workplace - Infrastructure Division	2024
36	Penerapan K3 Tahun 2023 K3 Implementation 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Pencegahan dan Penanganan HIV & AIDS di Tempat Kerja - Divisi EPC HIV & AIDS Prevention and Management in the Workplace – Head Office – EPC Division	2024
37	Penerapan K3 Tahun 2023 K3 Implementation 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Pencegahan dan Penanganan HIV & AIDS di Tempat Kerja - Divisi EPC HIV & AIDS Prevention and Management in the Workplace – EPC Division	2024
38	Anugerah Humas Indonesia 2024 Indonesian Public Relations Award 2024	PR INDONESIA	Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Laporan Pelayanan Informasi Publik Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Most Innovative Public Information Service, Public Information Service Report 2023	2024
39	Anugerah Humas Indonesia 2024 Indonesian Public Relations Award 2024	PR INDONESIA	PPID Terbaik, PPID Pelaksana Transformasi Layanan Informasi Publik di PT Hutama Karya (Persero) untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan Best PPID, Implementing PPID Transformation of Public Information Services at PT Hutama Karya (Persero) to Achieve Transparent Infrastructure Development	2024
40	Anugerah Humas Indonesia 2024 Indonesian Public Relations Award 2024	PR INDONESIA	Kanal Digital, Media Sosial Instagram Instagram Hutama Karya: BERGERAK, BERLARI, MELESAT Digital Channel, Instagram Social Media Hutama Karya Instagram: MOVE, RUN, ACCELERATE	2024
41	Anugerah Humas Indonesia 2024 Indonesian Public Relations Award 2024	PR INDONESIA	Media Internal, Majalah Cetak IMVID Vol.3/2023: The Unseen Behind Infrastructure Media Internal, Printed Magazine IMVID Vol.3/2023: The Unseen Behind Infrastructure	2024
42	Anugerah Humas Indonesia 2024 Indonesian Public Relations Award 2024	PR INDONESIA	Media Internal, Video Profile Media Internal Video Profile PT Hutama Karya (Persero) Internal Media,, Profile Video PT Hutama Karya (Persero)	2024
43	Anugerah Humas Indonesia 2024 Indonesian Public Relations Award 2024	PR INDONESIA	Media Internal, E-Magazine IMVID Vol.3/2023: The Unseen Behind Infrastructure Internal Media E-Magazine IMVID Vol.3/2023: The Unseen Behind Infrastructure	2024

No	Nama Penghargaan Awards	Lembaga Instution	Kategori Category	Tahun Year
44	Anugerah Humas Indonesia 2024 Indonesian Public Relations Award 2024	PR INDONESIA	PPID Terbaik, PPID Pelaksana Transformasi Layanan Informasi Publik di PT Hutama Karya (Persero) untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan Best PPID, Implementing PPID Transformation of Public Information Services at PT Hutama Karya (Persero) to Achieve Transparent Infrastructure Development	2024
45	Penyedia Jasa Terbaik (Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 2 IKN) Best Service Provider (Building Construction and Office Area Development Package for the Coordinating Ministry 2 at IKN)	Kementerian Pekerjaan Umum Ministry of Public Works	Kinerja Penyedia Jasa dalam Penerapan Implementasi Teknologi *Building Innovation Modelling* (BIM) Terbaik Bidang Cipta Karya Best Service Provider Performance in Implementing Building Information Modeling (BIM) Technology in the Cipta Karya Sector	2024
46	Penyedia Jasa Terbaik (Paket Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Rumah Susun ASN 2) Best Service Provider (Integrated Design and Build Construction Package for State Civil Aparatus (ASN) 2 Apartment Development)	Kementerian Pekerjaan Umum Ministry of Public Works	Kinerja Penyedia Jasa dalam Penerapan Implementasi Teknologi *Building Innovation Modelling* (BIM) Terbaik Bidang Perumahan Best Service Provider Performance in Implementing Building Information Modeling (BIM) Technology in the Housing Sector	2024
47	Penyedia Jasa Terbaik (Paket Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3) Bidang Bina Marga Best Service Provider (Bayung Lencir-Tempino Toll Road Development Package Section 3) Highways Field	Kementerian Pekerjaan Umum Ministry of Public Works	Kinerja Implementasi Teknologi Building Information Modeling (BIM) Performance of Building Information Modeling (BIM) Technology Implementation	

Sertifikasi | Certification



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sistem Manajemen Lalu Lintas Jalan ISO 39001:2012
Road Traffic Management System ISO 39001:2012

Validasi | Validation:
2021 – 2024
Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) dan Divisi Pembangunan Jalan Tol (PBJT)
Toll Road Operation & Maintenance Division (OPJT) and Toll Road Development Division (PBJT)

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
SGS



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Project, Programme and Portfolio Management Standard based on ISO 21500 Series

Validasi | Validation:
2022 - 2025
Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
PT Hutama Karya (Persero)

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
dgiCert.



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015
Environment Management System ISO 14001:2015

Validasi | Validation:
2021 – 2024
Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
Divisi Pembangunan Jalan Tol (PJT); Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT); Divisi Sipil Umum (DSU); Divisi Engineering, Procurement & Construction (EPC); Divisi Gedung (DG)
Toll Road Development Division (PBJT); Toll Road Operation and Maintenance Division (OPJT); Infrastructure Division (DSU); Engineering, Procurement & Construction (EPC) Division; Building Division (DG

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
SGS



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
ISO 19650 Kitemark (Manajemen Informasi Berbasis BIM)
Building information modeling (BIM) ISO 19650:2018 Kitemark

Validasi | Validation:
2024-2027
Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
PT Hutama Karya (Persero)

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
The British Standard Institution



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Quality Management System ISO 9001:2015

Validasi | Validation:
2023 – 2026
Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
Divisi Pembangunan Jalan Tol (PJT);
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPT); Divisi Perencanaan Jalan Tol (RJT); Divisi Sipil Umum; Divisi Gedung; Divisi Engineering, Procurement & Construction (EPC)
Toll Road Development Division (PBJT); Toll Road Operation and Maintenance Division (OPT); Toll Road Planning Division (RJT); Infrastructure Division; Building Division; Engineering, Procurement & Construction (EPC) Division

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
SGS



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016
Anti-Bribery Management SystemISO 37001:2016

Validasi | Validation:
2023 – 2026

Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
Satuan Pengawasan Intern (SPI); Divisi Sistem, TI, dan Riset Teknologi; Divisi Human Capital, Divisi EPC; Divisi Quality, Health, Safety, Security, dan Environment; Divisi Akuntansi & Keuangan; Divisi Legal; Divisi Sipil Umum; Divisi Pembangunan Jalan Tol; Divisi Gedung; Divisi Perencanaan Jalan Tol; Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol; Divisi pengembangan Bisnis & Investasi; Sekretaris Perusahaan; Divisi Corporate Planning; Divisi Manajemen Risiko
Internal Audit Unit (SPI); Systems, IT, and Technology Research Division; Human Capital Division; EPC Division; Quality, Health, Safety, Security, and Environment Division; Accounting & Finance Division; Legal Division; Infrastructure Division; Toll Road Development Division; Building Division; Toll Road Planning Division; Toll Road Operation and Maintenance Division; Business Development & Investment Division; Corporate Secretary; Corporate Planning Division; Risk Management Division

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
Sucofindo



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018
K3 Management System ISO 45001:2018

Validasi | Validation:
23 Februari 2024 – 4 Februari 2025
February 23, 2024 – February 4, 2025

Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
Divisi Pembangunan Jalan Tol (PJT); Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPT); Divisi Perencanaan Jalan Tol (RJT); Divisi Sipil Umum; Divisi Gedung; Divisi Engineering, Procurement & Construction (EPC)
Toll Road Development Division (PJT); Toll Road Operation and Maintenance Division (OPT); Toll Road Planning Division (RJT); Infrastructure Division; Building Division; Engineering, Procurement & Construction (EPC) Division

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
SGS



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Quality Management System ISO 9001:2015

Validasi | Validation:
19 Februari 2024 – 25 Maret 2026
February, 19 2024 –March 25, 2026

Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
Divisi Pembangunan Jalan Tol (PJT); Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPT); Divisi Perencanaan Jalan Tol (RJT); Divisi Sipil Umum; Divisi Gedung; Divisi Engineering, Procurement & Construction (EPC)
Toll Road Development Division (PJT); Toll Road Operation and Maintenance Division (OPT); Toll Road Planning Division (RJT); Infrastructure Division; Building Division; Engineering, Procurement & Construction (EPC) Division

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
SGS



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015
Environmental Management System ISO 14001:2015

Validasi | Validation:
27 April 2024 – 27 April 2027
April 27, 2024-April 27, 2027

Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
Divisi Pembangunan Jalan Tol (PJT); Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPT); Divisi Perencanaan Jalan Tol (RJT); Divisi Sipil Umum; Divisi Gedung; Divisi Engineering, Procurement & Construction (EPC)
Toll Road Development Division (PJT); Toll Road Operation and Maintenance Division (OPT); Toll Road Planning Division (RJT); Infrastructure Division; Building Division; Engineering, Procurement & Construction (EPC) Division

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
SGS



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan Gold Reward
Security Management System Audit Certificate Gold Reward

Validasi | Validation:
25 Juni 2024 – 2027
June 25, 2024 – 2027

Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
PT Hutama Karya (Persero)

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesian National Police



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
ISO 39001:2012

Validasi | Validation:
3 Mei 2024 – 2 Mei 2027
May 3, 2024 – May 2, 2027

Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
Divisi Pembangunan Jalan Tol (PJT);
Divisi Perencanaan Jalan Tol (Divisi RJT); Divisi Pembangunan Jalan Tol (Divisi PJT); Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (Divisi OPT)
Toll Road Planning Division (RJT Division); Toll Road Development Division (PJT Division); Toll Road Operation and Maintenance Division (OPT Division)

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesian National Police



Jenis Sertifikasi | Type of Certification:
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022

Validasi | Validation:
2022 – 2025

Penerima Sertifikasi | Certification Recipient:
PT Hutama Karya (Persero)

Dikeluarkan Oleh | Issued by:
BSI

Informasi yang Tersedia Pada Website
Information Available on Website

Muatan situs web Hutama Karya terdiri atas informasi sebagai berikut:

1. Informasi terkait Hubungan Investor: Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Ikhtisar Laporan Keuangan, Pemegang Saham, Posisi Keuangan, Presentasi Perusahaan, dan Dividen.
2. Informasi terkait Media: Berita Perusahaan, Siaran Pers, Berita CSR & Lingkungan, Video, IMVID Magazine, Pengumuman, E-Procurement, dan Pengumuman Pelelangan.
3. Informasi terkait *Good Corporate Governance:* Ikhtisar GCG, Prinsip GCG, Pedoman GCG, Penerapan GCG, Buku Saku Pengenalan Gratifikasi, Buku Saku Pengendalian GCG, Video Pedoman *Whistle Blowing System,* Rapat Umum Pemegang Saham, dan Anggaran Dasar.
4. Informasi terkait Profil Perusahaan: Sejarah Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Sekper dan SPI, Struktur Organisasi, Standar Internasional, Anak Perusahaan dan Afiliasi, serta Penghargaan.
5. Informasi terkait Bisnis Perusahaan: Trans Sumatera, Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, Jasa Konstruksi dan EPC, Pengembangan Properti, dan Manufaktur.
6. Informasi terkait Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL): Aktivitas TJSL, Program Pendanaan Usaha Mikro & Usaha Kecil (PUMK), Program TJSL Non PUMK, serta Laporan Kegiatan TJSL.
7. Informasi terkait Karier.

The Hutama Karya website contains the following information:

1. Investor Relations Information: Annual Reports, Financial Reports, Financial Highlights, Shareholders, Financial Position, Company Presentations, and Dividends.
2. Media Information: Company News, Press Releases, CSR & Environmental News, Videos, IMVID Magazine, Announcements, E-Procurement, and Tender Announcements.
3. Good Corporate Governance (GCG) Information: GCG Overview, GCG Principles, GCG Guidelines, GCG Implementation, Gratification Awareness Pocketbook, GCG Control Pocketbook, Whistle Blowing System Guidelines Video, General Meeting of Shareholders, and Articles of Association.
4. Company Profile Information: Company History, Vision and Mission, Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary & Internal Audit, Organizational Structure, International Standards, Subsidiaries and Affiliates, and Awards.
5. Business Information: Trans-Sumatra, Toll Road Operation and Maintenance, Construction and EPC Services, Property Development, and Manufacturing.
6. Information related to Corporate Social & Environmental Responsibility (TJSL) Information : Activities, Micro & Small Business Funding Program (PUMK), Non-PUMK TJSL Program, and TJSL Activity Reports
7. Career Information.





Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian
Economic Review



Analisis Perekonomian Global

Di awal tahun 2024, ketegangan politik dunia masih tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan geopolitik kembali meningkat, dipicu oleh serangan Israel ke Palestina. Menjelang penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* diperkirakan akan membawa perubahan besar dalam lanskap geopolitik dan perekonomian dunia. Asesmen awal menunjukkan bahwa pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump kemungkinan akan menerapkan tarif tinggi terhadap negara-negara dengan surplus perdagangan besar dengan AS, seperti Eropa, Inggris, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Sebagai contoh, tarif tinggi dapat dikenakan terhadap seluruh produk impor dari Tiongkok, serta terhadap impor besi baja, aluminium, logam dasar, dan kendaraan dari Eropa dan Inggris, yang berpotensi memicu retaliasi dari ketiga negara tersebut. Selain itu, kebijakan imigrasi yang sangat ketat diperkirakan akan diterapkan terhadap tenaga kerja asing ilegal, sementara kebijakan politik luar negeri terhadap NATO, Rusia-Ukraina, dan Timur Tengah dapat mengubah peta geopolitik dunia.

Global Economic Analysis

At the beginning of 2024, global political tensions were increasingly high with the ongoing conflict between Russia and Ukraine. After slight easement, geopolitical tensions re-increased, triggered by Israel's attack on Palestine. Towards the end of 2024, the re-election of President Trump in the United States (US) with the America First policy was expected to bring major changes to the geopolitical and economic landscape of the world. Initial assessments indicated that the US government under Trump's leadership was likely to impose high tariffs on countries with large trade surpluses with the US, such as Europe, the UK, China, Mexico, Canada, Japan, South Korea, and Vietnam. For example, high tariffs could be imposed on all imports from China and on imports of steel, aluminum, base metals, and vehicles from Europe and the UK, potentially triggering retaliation from the three countries. In addition, highly strict immigration policies were expected to be implemented against illegal foreign workers, while foreign policy towards NATO, Russia-Ukraine, and the Middle East could change the world's geopolitical map.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik AS, pemerintahan baru di AS diperkirakan akan memberlakukan pemotongan pajak baik untuk korporasi maupun individu, yang berisiko meningkatkan defisit fiskal dan memperburuk utang pemerintah AS di masa depan. Hasil Pemilihan Umum di AS ini telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi pasar keuangan global pada Triwulan IV 2024. Dinamika geopolitik yang cepat berubah ini turut mempengaruhi perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2024. Ketidakpastian yang tinggi dan ketegangan internasional berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi global setelah pandemi, dengan negara-negara menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

To boost US domestic economic growth, the new US administration was expected to enact tax cuts for both corporations and individuals, which risked in increasing the fiscal deficit and worsening US government debt in the future. The results of the US General Election had a negative impact on global financial market conditions in Q4-2024. These rapidly changing geopolitical dynamics had also affected global economic developments throughout 2024. High uncertainty and international tensions had the potential to hinder the global economic recovery process after the pandemic, with countries dealing with challenges in maintaining sustainable growth.

Selain itu, krisis energi global, inflasi yang tinggi, dan gangguan rantai pasokan turut memperburuk situasi ekonomi di banyak negara. Bank-bank sentral di berbagai belahan dunia, termasuk di Eropa, AS, dan Asia, diperkirakan akan terus menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kebijakan moneter antara menanggulangi inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, negara-negara berkembang, yang bergantung pada ekspor komoditas dan investasi asing, diperkirakan akan mengalami tantangan besar dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

In addition, the global energy crisis, high inflation, and supply chain disruptions had worsened the economic situation in many countries. Central banks in various parts of the world, including in Europe, the US, and Asia, were expected to continuously deal with a dilemma in balancing monetary policy between tackling inflation and supporting economic growth. Meanwhile, developing countries, which depended on commodity exports and foreign investment, were expected to deal with major challenges in maintaining growth momentum amid global uncertainty.

Peningkatan ketegangan perdagangan, pengaruh kebijakan proteksionisme, dan volatilitas pasar keuangan dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan melambat menjadi 3,2%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 3,3%. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara dalam menanggulangi dampak ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks.

Intensifying trade tensions, the influence of protectionist policies, and financial market volatility could limit the potential for global economic growth. Based on the World Economic Outlook (WEO) report released by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth in 2024 was expected to slow to 3.2%, slightly lower than 2023, which was 3.3%. This reflected the challenges faced by many countries in dealing with the impact of geopolitical instability and an increasingly complex global economy.

Sumber:
- *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), Januari 2025
- Laporan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia, 22 Januari 2025

Source:
- World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), January 2025
- Indonesian Economic Report, Bank Indonesia, January 22, 2025

Analisis Perekonomian Nasional

Meskipun perekonomian global menghadapi berbagai tantangan, seperti ketegangan geopolitik dan ketidakpastian pasar, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengatasi dinamika global dengan kebijakan yang tepat dan sumber daya yang kuat. Pada Triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02% (yoy), meningkat dari 4,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan tahun 2024 mencapai 5,03% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh permintaan domestik, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap baik. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik, sejalan dengan permintaan domestik yang terjaga. Secara spasial, kinerja pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Namun, meskipun perekonomian domestik menunjukkan kinerja yang positif, tantangan eksternal tetap mempengaruhi stabilitas nilai tukar. Nilai tukar Rupiah pada Desember 2024 (hingga 17 Desember 2024) melemah sebesar 1,37% (ptp) dibandingkan bulan sebelumnya. Pelemahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global, terutama terkait dengan arah kebijakan AS, ruang penurunan FFR yang lebih terbatas, penguatan mata uang dolar AS secara luas, serta risiko geopolitik yang menyebabkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS. Meskipun demikian, pelemahan nilai tukar Rupiah tetap terkendali, dengan depresiasi sebesar 4,16% dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, yang lebih kecil dibandingkan dengan pelemahan Dolar Taiwan, Peso Filipina, dan Won Korea, yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,58%, 5,94%, dan 10,47%.

Selain itu, meskipun ada tekanan eksternal terhadap nilai tukar, inflasi Indonesia tetap terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, dengan inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini didorong oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy), sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-*Rate*) dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran. Sementara itu, kelompok *Volatile Food* (VF) mencatat inflasi 0,12% (yoy), didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

National Economic Analysis

Although the global economy dealt with various challenges, such as geopolitical tensions and market uncertainty, Indonesia's economic growth continuously showed positive performance. This demonstrated that Indonesia could overcome global dynamics with the right policies and strong resources. In Q4-2024, Indonesia's economic growth was recorded at 5.02% (yoy), increasing from 4.95% (yoy) in the previous quarter so that, overall, in 2024, it reached 5.03% (yoy). This growth was mainly driven by domestic demand, along with increasing household consumption and investment which remained good. In terms of Business Fields (LU), the Manufacturing Industry and Trade sectors as the main contributors to growth also grew well, in line with maintained domestic demand. Spatially, the highest growth performance was recorded in the Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) region.

However, in addition to the positive performance of the domestic economy, external challenges continuously affected the stability of the exchange rate. Rupiah exchange rate in December 2024 (until December 17, 2024) weakened by 1.37% (ptp) than the previous month. This weakening was influenced by increasing global uncertainty, especially related to the direction of US policy, more limited room for FFR reductions, the broad strengthening of the US dollar, and geopolitical risks that had caused global investors to prefer to move their portfolio allocations back to the US. Nevertheless, the weakening of Rupiah exchange rate remained under control, with a depreciation of 4.16% compared to the level at the end of December 2023, which was smaller than the weakening of the Taiwan Dollar, Philippine Peso, and Korean Won, which depreciated by 5.58%, 5.94%, and 10.47% respectively.

Additionally, despite external pressures on the exchange rate, Indonesia's inflation remained under control. Consumer Price Index (CPI) inflation in 2024 was maintained within the target range of 2.5±1%, with inflation in December 2024 recorded at 1.57% (yoy). This development was driven by core inflation which was controlled at 2.26% (yoy), in line with the consistency of Bank Indonesia's policy interest rate (BI-Rate) in directing inflation expectations according to the target. Meanwhile, the Volatile Food (VF) group recorded inflation of 0.12% (yoy), supported by an increase in food supply as the harvest season continued, as well as synergy in controlling inflation by the Central Inflation Control Team (TPIP) and the Regional Inflation Control Team (TPID) through the National Food Inflation Control Movement (GNPIP). Partially,

Secara spasial, inflasi IHK di berbagai daerah juga terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional.

Sumber:
- Laporan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia, 22 Januari 2025
- Laporan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, Desember 2024 dan Februari 2025.

Analisis Industri Infrastruktur

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif juga tercermin dalam sektor konstruksi, yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap infrastruktur, sektor konstruksi menjadi salah satu pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor konstruksi berkontribusi 10,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan I tahun 2024, menempatkannya sebagai sektor dengan kontribusi terbesar keempat dalam perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, yang terlihat dari berbagai proyek besar yang sedang berlangsung. Salah satu contohnya adalah jalan tol Trans-Sumatra dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang menjadi contoh konkret dari upaya ini. Progres pembangunan IKN Nusantara juga terus berjalan, dengan melibatkan investasi sebesar Rp58,41 triliun dari investor lokal dan asing, menunjukkan komitmen besar terhadap pengembangan infrastruktur yang strategis. Secara keseluruhan, tahun 2024 merupakan periode penting bagi sektor infrastruktur Indonesia, dengan investasi besar dan proyek-proyek strategis yang semakin mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selaras dengan upaya ini, pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas Pemerintah dalam 10 tahun terakhir, dengan tujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung peningkatan daya saing nasional, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial. Pada tahun 2024, sektor infrastruktur Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik, didukung oleh alokasi anggaran yang signifikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun, yang merupakan 12,73% dari total anggaran belanja negara Rp3.325,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima alokasi sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%. Pemerintah terus fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung modernisasi dan pemerataan, termasuk pembangunan jalan baru dan pengoperasian jalan tol baru.

CPI inflation in various regions was also controlled within the national inflation target range.

Source:
- Indonesian Economic Report, Bank Indonesia, January 22, 2025
- Monetary Policy Report, Bank Indonesia, December 2024 and February 2025.

Infrastructure Industry Analysis

Indonesia's positive economic growth was also reflected in the construction sector, which continuously made a significant contribution to the national economy. Along with the increasing demand for infrastructure, the construction sector was one of the main drivers in achieving stable economic growth. The Central Statistics Agency (BPS) noted that the construction sector contributed 10.23% to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) in the first quarter of 2024, placing it as the fourth largest contributor to the national economy. Infrastructure development played an important role in increasing national competitiveness and driving further economic growth, as seen from various major ongoing projects. One example was the Trans-Sumatra toll road and the development of the Nusantara Capital City (IKN), which were concrete examples of this effort. The progress of the development of the IKN also continued, involving an investment of Rp58.41 trillion from local and foreign investors. It showed a great commitment to strategic infrastructure development. Overall, 2024 was an important period for Indonesia's infrastructure sector, with major investments and strategic projects that would increasingly support national economic growth.

In line with these efforts, infrastructure development had been a priority for the Government in the last 10 years, with the aim of generating economic growth that supported increasing national competitiveness, equitable development, and social justice. In 2024, Indonesia's infrastructure sector showed good growth, supported by significant budget allocations. The government allocated a national infrastructure budget of Rp423.4 trillion, which was 12.73% of the total state budget of Rp3,325.1 trillion. Of this amount, the Ministry of Public Works and People Housing (PUPR) received an allocation of Rp146.98 trillion or 34.7%. The government continuously focused on infrastructure development that supported modernization and equity, including the construction of new roads and the operation of new toll roads.

Sumber:
- Kementerian PUPR Kembali Gelar Konstruksi Indonesia 2024, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 24 Juli 2024.
- Membangun Fondasi Transformasi Infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, 08 November 2024.
- Indikator Konstruksi, Triwulan I-2024, Badan Pusat Statistik, Juli 2024

Source:
- Ministry of PUPR Held the 2024 Indonesian Construction, Directorate General of Construction Work dated July 24, 2024.
- Building Infrasturcture Transformation Foundation for Indonesia Emas 2045, Regional Infrastructure Development Agency of the Ministry of Public Works, dated November 8, 2024.
- Construction Indicators, Q1-2024, Central Statistics Agency, July 2024



Tinjauan Operasional
Operational Review

Strategi Perusahaan

Strategi Jangka Panjang

Rencana Jangka Panjang Perusahaan disusun dalam periode 5 (lima) tahunan 2025-2029 dengan tema strategis BRAVE. Tema strategis BRAVE yaitu:

1. *Business Resilience*
   Tema ini bertujuan untuk memastikan perusahaan mencapai profitabilitas positif di seluruh segmen bisnis. Untuk dapat mencapai tujuan dari tema ini, terdapat lima inisiatif strategi yang dapat membantu perusahaan mencapai profitabilitas positif, antara lain:

   a. Melanjutkan penugasan Jalan Tol Trans Sumatera.
   b. Meningkatkan efisiensi operasional.
   c. Optimisasi manajemen arus kas.
   d. Optimisasi dalam kerjasama persediaan properti
   e. Mengusahakan pembangunan JTTS dengan skema *availability payment/creative financing* lain.
2. *Realigned Portofolio*
   Tema ini bertujuan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi struktur holding dan efisiensi bisnis untuk memperkuat integrasi antar unit bisnis dan meningkatkan efektivitas perusahaan secara menyeluruh. Guna mendukung ketercapaian target ini, terdapat empat strategi inisiatif yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:
   a. Transformasi menjadi *strategic holding.*
   b. Moratorium EPC dan relokasi sumber daya.
   c. *Streamlining* bisnis properti.
   d. Rasionalisasi struktur bisnis dan kapabilitas *battlefield* antara Hutama Karya dan Waskita.

3. *Accelerated Growth*
   Tema ini untuk menjadi arah pengembangan dan sebagai revenue engine untuk mendorong pemaksimalan potensi pendapatan dan peningkatan profitabilitas. Diperlukan beberapa strategi inisiatif untuk dapat mendorong pertumbuhan perusahaan, diantaranya:
   a. Melaksanakan *creative investment.*
   b. Monetisasi barang milik negara melalui PMN non-tunai.
   c. Inkubasi bisnis baru dengan mitra strategis.

Company Strategy

Long-Term Strategy

The Company's Long-Term Plan is prepared in a 5 (five) year period, which is 2025-2029, with the strategic theme of BRAVE. The strategic theme of BRAVE is:

1. Business Resilience
   This theme aims to ensure the company achieves positive profitability across business segments. To achieve the objectives of this theme, there are five strategic initiatives that can help the company achieve positive profitability, including:
   a. Continuing the assignment of the Trans Sumatra Toll Road.
   b. Increasing operational efficiency.
   c. cOptimizing cash flow management.
   d. Enhancing property inventory cooperation

   e. Engaging to develop JTTS with other availability payment/creative financing schemes.
2. Realigned Portfolio
   This theme aims for the Company to improve the efficiency of holding structures and business efficiency to strengthen integration between business units and improve the overall effectiveness of the company. In order to support the achievement of this target, there are four initiative strategies that can be performed, as follows:
   a. Transformation into a strategic holding.
   b. EPC moratorium and resource relocation.
   c. Streamlining the property business.
   d. Rationalization of business structure and battlefield capabilities between Hutama Karya and Waskita.
3. Accelerated Growth
   This theme is the direction of development and as a revenue engine to encourage maximizing revenue potential and increasing profitability. Several initiative strategies are required to encourage company growth, including:

   a. Implementing creative investment.
   b. Monetizing state-owned goods through non-cash PMN.
   c. Incubating new businesses with strategic partners.

4. *Value Enhancement*
   Integrasi Hutama Karya dan Waskita diharapkan dapat menciptakan manfaat yang maksimal dan hasil yang signifikan dari segi potensi pendapatan dan efisiensi biaya atas sinergi yang telah dibangun. Terdapat tiga fokus strategi utama untuk memaksimalkan manfaat dari sinergi ini, yaitu:
   a. Optimisasi transaksi internalisasi dan sinergi.
   b. Relokasi aset manufaktur.
   c. Menciptakan sinergi pendapatan dan biaya Hutama Karya-Waskita.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan atau hingga tahun 2029, Hutama Karya akan fokus menyukseskan mandat pemerintah untuk pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera, berkomitmen melakukan transformasi dengan melakukan klasterisasi segmen bisnis yang jelas menggunakan pendekatan *holding* menjadi *strategic holding,* serta meningkatkan sistem tata kelola perusahaan yaitu melakukan sentralisasi terhadap beberapa fungsi strategis seperti *human capital*, manajemen risiko, serta *engineering* dan teknologi informasi.

Strategi Jangka Pendek

Pada tahun 2024, Hutama Karya terus berkomitmen untuk memperbaiki dan menyehatkan kinerja Perusahaan. Beberapa poin kunci yang menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran strategis Hutama Karya di antaranya adalah:

1. Penyelesaian 100% proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I pada tahun 2024.
2. Penyerapan proyek JTTS Tahap II oleh Divisi Sipil Umum dan PT HKI, yang mencakup ruas Betung-Jambi, Lingkar Pekanbaru, dan ruas Kapal Betung.
3. Perolehan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp18,6 triliun pada awal tahun 2024.
4. Akselerasi proses penyesuaian tarif jalan tol dan kolaborasi dengan anak usaha dalam pengoperasian jalan tol untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
5. Pembayaran jatuh tempo PT HKR melalui setoran modal sebesar Rp1,5 triliun.
6. Efisiensi beban usaha mengingat keterbatasan kapasitas kapitalisasi yang ada.
7. Akselerasi klaim pada Divisi Sipil Umum, PT HKI, dan Divisi EPC.
8. Penguatan dan pengendalian biaya, mutu, waktu, serta *governance* dalam seluruh aspek operasional perusahaan.

4. Value Enhancement
   The integration of Hutama Karya and Waskita is expected to create maximum benefits and significant results in terms of potential revenue and cost efficiency for the synergy that has been built. There are three main strategic focuses to maximize the benefits of this synergy, as follows:
   a. Optimization of internalization transactions and synergies.
   b. Relocation of manufacturing assets.
   c. Creating synergy of income and costs of Hutama Karya-Waskita.

In the next 5 (five) years or until 2029, Hutama Karya will focus on the success engagement of the government's mandate for the Trans Sumatra Toll Road, committing to transform by clustering clear business segments, using a holding approach to become a strategic holding, and improving the corporate governance system, such as by centralizing several strategic functions, such as human capital, risk management, and engineering and information technology.

Short Term Strategy

In 2024, Hutama Karya continuously committed to improve and enhance the Company's performance. Several key points that were the main focus in achieving Hutama Karya's strategic targets included:

1. 100% completion of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) Phase I project in 2024.
2. Absorption of the JTTS Phase II project by the Infrastructure Division and PT HKI, which included the Betung-Jambi section, the Pekanbaru Ring Road, and the Kapal Betung section.
3. Obtaining State Capital Participation (PMN) of Rp18.6 trillion in early 2024.
4. Acceleration of the toll road tariff adjustment process and collaboration with subsidiaries in toll road operations to increase effectiveness and efficiency.
5. Payment of PT HKR's due date through a capital injection of Rp18.6 trillion.
6. Efficiency of business expenses considering the limitations of existing capitalization capacity.
7. Acceleration of claims in the Infrastructure Division, PT HKI, and the EPC Division.
8. Strengthening and controlling costs, quality, time, and governance in all aspects of the company's operations.

Hutama Karya terus berkomitmen untuk memperkuat dan menyehatkan kinerja Perusahaan secara menyeluruh, dengan tetap konsisten dalam menjalankan setiap aspek bisnis sesuai dengan arahan Pemegang Saham. Komitmen ini tercermin dalam upaya Hutama Karya untuk melakukan akselerasi pengembangan serta perbaikan bisnis yang komprehensif, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan meningkatkan daya saing di industri. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Hutama Karya fokus pada berbagai sektor penting yang menjadi pilar utama dalam keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis Hutama Karya.

Pada Segmen Jalan Tol, Hutama Karya memprioritaskan penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I sebagai bagian dari komitmen untuk menyediakan infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Hutama Karya mulai merencanakan dan menjajaki beberapa ruas jalan tol pada Tahap II, yang seiring dengan pengembangan ini, diiringi dengan berbagai langkah strategis untuk melakukan optimalisasi operasional. Pengendalian biaya, penerapan metode konstruksi yang lebih efisien, serta pengelolaan sumber daya yang optimal, akan menjadi fokus utama untuk memastikan kelancaran setiap proyek dan keberlanjutan hasil yang dicapai.

Pada Segmen Pengoperasian Jalan Tol, Hutama Karya menempatkan fokus utama pada pelaksanaan *preventive maintenance* yang efektif dan efisien, untuk menjaga kualitas dan keselamatan operasional jalan tol secara berkelanjutan. Selain itu, Hutama Karya juga mengembangkan dan mengintegrasikan sistem serta teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan kinerja operasional dan memaksimalkan layanan kepada pengguna jalan tol.

Pada Segmen Jasa Konstruksi, Hutama Karya merencanakan untuk lebih mengutamakan segmen-segmen *champion*, yakni segmen-segmen yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan peluang pasar yang signifikan. Untuk mencapai hasil yang optimal, Hutama Karya akan memperkuat kualitas perencanaan sejak tahap awal proyek hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengendalian biaya, mutu, dan waktu akan menjadi bagian integral dalam setiap fase, guna memastikan proyek berjalan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Additionally, Hutama Karya committed to strengthen and improve the Company's overall performance, by remaining consistent in carrying out every aspect of the business in accordance with the Shareholders' direction. This commitment was reflected in Hutama Karya's efforts to accelerate comprehensive business development and improvement, which was expected to support the achievement of long-term goals and increase competitiveness in the industry. As part of these efforts, Hutama Karya focused on various important sectors that were the main pillars in the sustainability and growth of Hutama Karya's business.

In the Toll Road Segment, Hutama Karya prioritized the completion of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) Phase I project as part of its commitment to provide strategic infrastructure that supported connectivity and national economic growth. In addition, Hutama Karya started to plan and explore several toll road sections in Phase II, which was in line with this development and accompanied by various strategic steps to optimize operations. Cost control, the implementation of more efficient construction methods, and optimal resource management were the main focus to ensure the smooth running of each project and the sustainability of the achieved results.

In the Toll Road Operation Segment, Hutama Karya placed its main focus on implementing effective and efficient preventive maintenance, to maintain the quality and safety of toll road operations sustainably. In addition, Hutama Karya also developed and integrated more sophisticated information systems and technologies to improve operational performance and maximize services to toll road users.

In the Construction Services Segment, Hutama Karya planned to prioritize champion segments, such as segments that had high growth potential and significant market opportunities. To achieve optimal results, Hutama Karya strengthened the quality of planning from the early stages of the project to the implementation of on-site work. Cost, quality and time control were an integral part of each phase to ensure that the project runs efficiently, on time, and in accordance with the established standards.

Selain itu, Hutama Karya juga senantiasa selektif dalam pemilihan proyek-proyek yang akan dilaksanakan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap proyek yang diperoleh memiliki kualitas terbaik dan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kinerja Hutama Karya.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Pada tahun 2024, Hutama Karya memfokuskan upayanya pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Komitmen Hutama Karya terhadap PSN ini mencerminkan perhatian yang kuat terhadap proyek-proyek infrastruktur besar yang tidak hanya mendukung konektivitas antar wilayah, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan kemajuan negara. Keberhasilan proyek ini akan meningkatkan mobilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pembangunan wilayah Sumatera secara menyeluruh. Selain itu, Hutama Karya juga terus berinovasi dengan menerapkan teknologi terbaru dalam setiap lini bisnis, termasuk pada proyek-proyek yang sedang berjalan.

Dalam hal strategi pemasaran, Hutama Karya berfokus pada beberapa langkah kunci untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Hutama Karya diantaranya sebagai berikut:

1. Membangun kemitraan strategis dengan mitra terpercaya untuk memperkuat kapabilitas bisnis.
2. Menerapkan *value added* dan *value engineering* guna mengoptimalkan dan meningkatkan layanan operasi serta pemeliharaan jalan tol.
3. Mengidentifikasi proyek-proyek potensial secara selektif berdasarkan kelembagaan dan kriteria yang sesuai dengan *threshold* Perseroan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan mulai dari tahap pra-tender hingga pelaksanaan tender berbasis digitalisasi.
5. Memperoleh proyek-proyek berkualitas dengan melakukan penilaian manajemen risiko secara menyeluruh.
6. Menjalin kerjasama dengan mitra berskala global untuk pengembangan kapabilitas perusahaan.
7. Memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui *customer relationship management*, merespon aspirasi klien, dan mengelola hubungan dengan klien utama secara efektif,

In addition, Hutama Karya was always selective in selecting projects to be implemented. The purpose was to ensure that the obtained project had the best quality and could provide maximum contribution to Hutama Karya's performance achievements.

Marketing Aspect

Marketing Strategy

In 2024, Hutama Karya focused its efforts on completing the National Strategic Projects (PSN), especially in the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). Hutama Karya's commitment to this PSN reflected a strong focus on large infrastructure projects that did not only support connectivity between regions, but also had a significant impact on the economy and progress of the country. The success of this project increased mobility, facilitated the distribution of goods and services, and accelerated the development of the Sumatra region as a whole. In addition, Hutama Karya also innovated by implementing the latest technology in every line of business, including ongoing projects.

In terms of marketing strategy, Hutama Karya focused on several key steps to support Hutama Karya's growth and success, including:

1. Establishing strategic partnerships with trusted partners to strengthen business capabilities.
2. Implementing value added and value engineering to optimize and improve toll road operation and maintenance services.
3. Selectively identifying potential projects based on institutions and criteria that are in accordance with the Company's threshold.
4. Improving the quality of planning from the pre-tender stage to the implementation of digitalization-based tenders.
5. Obtaining quality projects by conducting a comprehensive risk management assessment.
6. Establishing cooperation with global partners to develop the company's capabilities.
7. Reinforcement customer relationships through customer relationship management, responding to client aspirations, and managing relationships with key clients effectively,

Pangsa Pasar

Pendapatan Hutama Karya berasal dari kontrak-kontrak yang dimenangkan melalui tender. Selain itu, penunjukan langsung dari pemerintah juga memainkan peran signifikan dalam memperoleh kontrak pekerjaan.

Pangsa pasar bisnis Hutama Karya dapat dibagi menjadi dua segmen utama, yaitu:
- Segmen pemilik (*owner*), yang meliputi Pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
- Segmen bidang pekerjaan, yang mencakup sumber daya air, jalan dan jembatan, prasarana perhubungan, gedung, EPC, dan properti lainnya.

Pada tahun 2024, kinerja pemasaran Hutama Karya menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan total kontrak yang berhasil diperoleh senilai Rp70.032 miliar, atau terealisasi 117,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total kontrak baru sebesar Rp34.839 miliar, sekitar 85% merupakan proyek BUMN, dan 85% berasal dari sektor jalan dan jembatan.

Secara umum, Hutama Karya menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan sejenis dalam upaya menguasai pangsa pasar. Persaingan ini dapat dilihat dari realisasi ruas jalan tol yang telah dibangun.

Market Share

Hutama Karya's revenue derives from contracts won through tenders. In addition, direct appointments from the government also play a significant role in obtaining work contracts.

Hutama Karya's market share of business can be divided into two main segments, as follows:
- Owner, comprising of Government, SOE, and private sector.
- Work, including water resources, road, bridge, transportation infrastructure, EPC, and other properties.

In 2024, Hutama Karya's marketing performance showed significant growth, with a total of contracts successfully obtained as of Rp70,032 billion, or realized by 117.00% than the previous year. Of the total new contracts as of Rp34,839 billion, around 85% were SOE projects, and 85% came from the road and bridge sector.

In general, Hutama Karya has dealt with tight competition with similar companies to control market share. This competition can be seen from the realization of toll road sections that have been built.

Tabel Pangsa Pasar
Table of Market Share

Uraian Detail	Satuan Unit	2024
Hutama Karya	km	1,015.2
Jalan Tol Indonesia Indonesian Toll Road	km	3,026
Pangsa Pasar Berdasarkan Jalan Tol Market Share by Toll Road	%	33.55%

Sumber: https://bpjt.pu.go.id/konten/progress/beroperasi, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum, Oktober 2024
Source: https://bpjt.pu.go.id/konten/progress/beroperasi, Toll Road Regulatory Agency of the Ministry of Public Works, October 2024

Total panjang jalan tol di Indonesia hingga tahun 2024 mencapai 3.026 km, sementara Hutama Karya telah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.015,2 km. Dengan demikian, pangsa pasar Hutama Karya dalam sektor jalan tol mencapai 33,55%, mencerminkan kontribusi Hutama Karya yang cukup signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Secara keseluruhan, pada tahun 2024, pangsa pasar Hutama Karya didominasi oleh proyek-proyek BUMN, dengan segmen portofolio utama pada jalan dan jembatan. Hal ini sejalan dengan fokus Hutama Karya sebagai *champion segment*

The total length of toll roads in Indonesia until 2024 reached 3,026 km, while Hutama Karya had succeeded in constructing 1,015.2 km of toll roads. Thus, Hutama Karya's market share in the toll road sector achieved 33.55%, reflecting Hutama Karya's significant contribution to the development of toll road infrastructure in Indonesia.

Overall, in 2024, Hutama Karya's market share was dominated by SOE projects, with the main portfolio segment on roads and bridges. It was is in line with Hutama Karya's focus as a champion segment in this sector, which was reflected in the

di sektor ini, yang tercermin dalam kumulatif panjang jalan tol yang telah dibangun, yaitu 1.015,2 km pada tahun 2024. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan Hutama Karya dalam mengelola proyek besar, tetapi juga membuktikan peran penting Hutama Karya dalam mendukung pengembangan infrastruktur nasional, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui jalan tol.

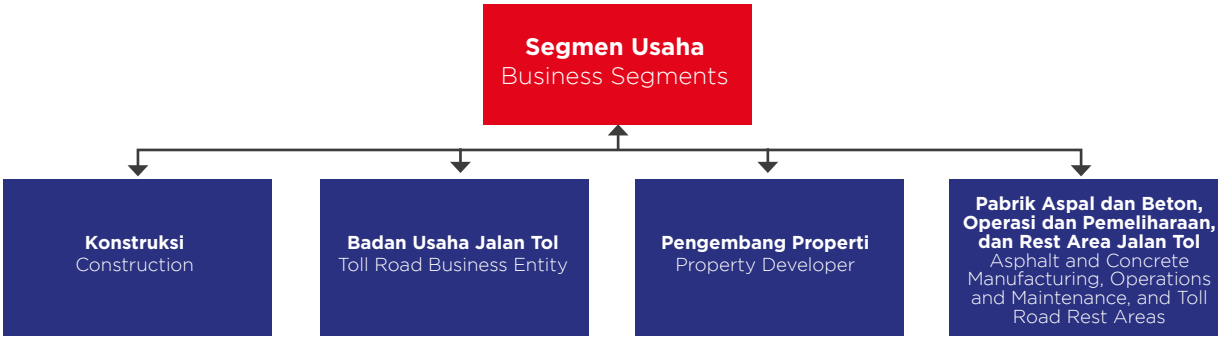
cumulative length of toll roads that had been built, which was 1,015.2 km in 2024. This success not only showed Hutama Karya's ability to manage large projects, but also proven Hutama Karya's important role in supporting the development of national infrastructure, especially in improving connectivity between regions through toll roads.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Pembahasan kinerja per segmen pada laporan tahunan ini disusun sesuai dengan catatan "informasi segmen" yang tersaji pada Laporan Keuangan Audited PT Hutama Karya.

Review of Operations by Business Segment

The discussion of performance by segment in this annual report is prepared in accordance with the "segment information" notes presented in the Audited Financial Statements of PT Hutama Karya.



Segmen Usaha

Business Segments

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Usaha

Explanation and Productivity of Business Segments

Konstruksi

Hutama Karya terus mendorong kinerja segmen usaha konstruksi dengan berbagai strategi usaha yang terintegrasi dan berfokus pada pertumbuhan jangka panjang. Mulai dari mengandalkan proyek-proyek internal yang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan, hingga memperluas jangkauan dengan fokus membidik proyek-proyek besar yang didanai oleh pemerintah. Dengan pendekatan yang cermat dan terukur, Hutama Karya memastikan ketersediaan kas yang stabil dan mampu mengelola likuiditas secara efektif, sehingga dapat mendukung keberlanjutan proyek dan memperkuat posisi finansial Hutama Karya di tengah dinamika pasar. Hal ini tidak hanya memperkuat daya saing Hutama Karya, tetapi juga membuka peluang baru dalam memenangkan tender proyek infrastruktur yang semakin besar dan strategis.

Construction

Hutama Karya continues to drive the performance of the construction business segment through various integrated business strategies focused on long-term growth. This includes relying on internal projects that have proven to contribute significantly to revenue and expanding its reach by targeting large government-funded projects. With a careful and measured approach, Hutama Karya ensures stable cash availability and effectively manages liquidity, supporting project sustainability and strengthening the company's financial position amid market dynamics. This not only enhances Hutama Karya's competitiveness but also creates new opportunities to secure increasingly large and strategic infrastructure project tenders.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Konstruksi

Keunggulan kompetitif dan inovasi dalam industri konstruksi sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Berikut adalah penjelasan dari beberapa keunggulan dan inovasi yang diterapkan oleh Hutama Karya:

1. **Berpengalaman dalam Mega Proyek Infrastruktur**
   Pada tahun 2020 Hutama Karya mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia. Pengalaman ini memberikan keunggulan dalam hal manajemen proyek, efisiensi operasional, dan penyelesaian proyek tepat waktu.
2. **Implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG)**
   Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, Hutama Karya telah mengadopsi prinsip ESG dalam operasionalnya. Beberapa inisiatif ESG yang telah diterapkan meliputi:
   a. Penggunaan material ramah lingkungan.
   b. Optimalisasi efisiensi energi dalam proyek konstruksi.
   c. Program tanggung jawab sosial (CSR) untuk masyarakat sekitar proyek.
   d. *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik
3. ***Lean Construction***
   Lean Construction adalah pendekatan manajemen dalam industri konstruksi yang berfokus pada peningkatan efisiensi, kolaborasi, dan pengurangan *waste* di setiap tahapan proyek. Implementasinya tercermin melalui berbagai praktik seperti penggunaan *Last Planner System* untuk perencanaan yang partisipatif dan realistis, *Visual Management* untuk memantau progres secara transparan, serta pemanfaatan Building Information Modeling (BIM) 4D-5D untuk integrasi pengendalian waktu dan biaya. Dengan cara ini, *Lean Construction* membantu mempercepat pelaksanaan proyek, meningkatkan akurasi dan kualitas hasil, serta menciptakan budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
4. **Budaya *Quality, Health, Safety, Security, and Environment* (QHSSE) untuk Karyawan dan Lingkungan Kerja**
   HK *Shield* adalah platform terintegrasi yang menggabungkan QHSSE untuk memastikan bahwa seluruh karyawan dan lingkungan kerja tetap aman, sehat, dan produktif. *Platform* ini mencakup:

Competitive Advantages and Construction Innovation

Competitive advantages and innovation in the construction industry are crucial for enhancing a company's competitiveness. Below are several advantages and innovations implemented by Hutama Karya:

1. **Experience in Mega Infrastructure Projects**
   In 2020, Hutama Karya was assigned by the government to build the Trans Sumatra Toll Road (JTTS), one of Indonesia's largest infrastructure projects. This experience provides an advantage in project management, operational efficiency, and timely project completion.
2. **Implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG)**
   As a sustainability-oriented company, Hutama Karya has adopted ESG principles in its operations. Several ESG initiatives include:
   a. Use of environmentally friendly materials.
   b. Optimization of energy efficiency in construction projects.
   c. Corporate Social Responsibility (CSR) programs for communities surrounding the projects.
   d. Good Corporate Governance (GCG) to ensure proper corporate governance.
3. **Lean Construction**
   Lean Construction is a management approach in the construction industry that focuses on increasing efficiency, collaboration, and reducing waste at every stage of a project. Its implementation is reflected through various practices such as the use of the Last Planner System for participatory and realistic planning, Visual Management to monitor progress transparently, and the use of Building Information Modeling (BIM) 4D-5D for integrated time and cost control. In this way, Lean Construction helps accelerate project implementation, improve the accuracy and quality of results, and create an adaptive work culture that is oriented towards continuous improvement.
4. **Quality, Health, Safety, Security, and Environment (QHSSE) Culture for Employees and the Work Environment**
   HK Shield is an integrated platform combining QHSSE to ensure that all employees and work environments remain safe, healthy, and productive. This platform includes:

a. Komitmen manajemen terhadap standar QHSSE.
b. Upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.
c. Penerapan budaya keselamatan yang kuat di seluruh level perusahaan.

5. **Konstruksi *Digital* Melalui Integrasi Standar *Digital Construction***
Hutama Karya telah mengimplementasikan teknologi digital dalam proses konstruksi. Dengan adanya standar *Digital Construction*, proyek-proyek akan lebih efisien dan terukur. Implementasi yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan pengukuran kinerja dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setiap bulan dan realisasi mencapai 106,7%, menandakan efektivitas implementasi teknologi dalam proyek.
6. **Audit ISO 19650 *Kitemark***
Pada tahun 2024, Hutama Karya telah melakukan audit internal dan resertifikasi BIM ISO 19650, yang menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan standar internasional. Beberapa poin terkait audit dan sertifikasi:
a. Audit Internal ISO 19650: Menyusun dan mengimplementasikan BIM sesuai dengan dokumen tata kelola, dengan temuan minor.
b. Resertifikasi BIM ISO 19650: Dilakukan oleh BSI Group Indonesia dengan hasil positif dan tanpa temuan.

Strategi Konstruksi Tahun 2024

Strategi Segmen Konstruksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)**
Hutama Karya berfokus pada penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek jalan tol dan bendungan. Untuk memastikan keberhasilan proyek-proyek tersebut, perusahaan menerapkan strategi percepatan yang meliputi pemenuhan kebutuhan sumber daya, material, dan peralatan secara optimal. Selain itu, perusahaan secara intensif mengontrol dan mengevaluasi pencapaian target proyek serta menjaga koordinasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan terkait, guna memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
2. **Penerapan *Building Information Modelling* (BIM)**
Perseroan mengadopsi teknologi BIM untuk

a. Management's commitment to QHSSE standards.
b. Efforts to create a safer work environment.
c. Implementation of a strong safety culture across all company levels.

5. **Digital Construction through Digital Construction Standards Integration**
Hutama Karya has implemented digital technology in construction processes. With Digital Construction standards, projects become more efficient and measurable. The 2024 implementation showed positive results, with performance measurements conducted through monthly monitoring and evaluation, achieving 106.7%, demonstrating the effectiveness of technology implementation in projects.
6. **ISO 19650 Kitemark Audit**
In 2024, Hutama Karya conducted an internal audit and BIM ISO 19650 recertification, demonstrating its commitment to quality and international standards. Key audit and certification points include:
a. Internal ISO 19650 Audit: Formulating and implementing BIM according to governance documents, with minor findings.
b. BIM ISO 19650 Recertification: Conducted by BSI Group Indonesia with positive results and no findings.

2024 Construction Strategy

The 2024 Construction Segment Strategy includes:

1. **Completion of National Strategic Projects (PSN)**
Hutama Karya focuses on completing several National Strategic Projects (PSN), including toll roads and dams. To ensure project success, the company applies acceleration strategies, including optimal resource, material, and equipment fulfillment. Additionally, intensive monitoring and evaluation of project target achievements and effective coordination with all relevant stakeholders are maintained to ensure timely completion according to established quality standards.
2. **Implementation of Building Information Modelling (BIM)**
The company adopts BIM technology to enhance

meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaksanaan manajemen biaya proyek. Implementasi digitalisasi konstruksi ini merupakan langkah transformasi menuju konstruksi digital sesuai dengan strategi perusahaan.

3. **Partisipasi dalam Pameran Industri Konstruksi**
   Hutama Karya turut berpartisipasi dalam ajang Konstruksi Indonesia 2024, sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap adaptasi dan inovasi dalam sektor konstruksi. Dalam pameran ini, perusahaan menampilkan portofolio proyek-proyek ikonik dan inovasi-inovasi terkini di bidang infrastruktur, termasuk penerapan teknologi BIM dan LiDAR dalam pembangunan jalan tol berbasis *Virtual Reality* (VR), yang diharapkan dapat memajukan industri konstruksi Indonesia melalui pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi.

Melalui strategi-strategi tersebut, Hutama Karya berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan, berkualitas, dan memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

productivity and project cost management quality. This digital construction implementation is part of the company's transformation strategy toward digital construction.

3. **Participation in Construction Industry Exhibitions**
   Hutama Karya participates in Konstruksi Indonesia 2024 as a commitment to adaptation and innovation in the construction sector. In this exhibition, the company showcases its portfolio of iconic projects and the latest innovations in infrastructure, including the application of BIM and LiDAR technology in toll road construction using Virtual Reality (VR). This initiative aims to advance Indonesia's construction industry through a more modern and integrated approach.

Through these strategies, Hutama Karya is committed to supporting the development of sustainable, high-quality national infrastructure that positively impacts Indonesia's economic progress.

Produktivitas Konstruksi

Informasi mengenai produktivitas badan usaha jalan tol adalah sebagai berikut.

Construction Productivity

Information regarding the productivity of the toll road business entity is as follows.

Tabel Kinerja/Produktivitas Konstruksi
Table of Construction Performance and Productivity

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Jalan dan Jembatan Roads and Bridges	29,557,181	24,103,159	5,454,022	22.63
Gedung Buildings	1,379,500	3,775,066	(2,395,566)	(63.46)
Sumber Daya Air (SDA) Water Resources (SDA)	2,727,582	1,544,599	1,182,983	76.59
Prasarana Perhubungan Transportation Infrastructure	560,366	76,922	483,444	628.49
Lainnya Others	613,969	1,375,937	(761,968)	(55.38)
Perolehan Kontrak Contract Acquisition	34,838,598	30,875,683	3,962,915	12.84

Total perolehan kontrak konstruksi pada tahun 2024 mencapai Rp34,84 triliun, meningkat 12,84% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp30,88 triliun. Sektor konstruksi didominasi oleh perolehan kontrak baru pada segmen Jalan dan Jembatan, yang mengalami pertumbuhan sebesar 22,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada

Total construction contract acquisition in 2024 reached Rp34.84 trillion, an increase of 12.84% compared to Rp30.88 trillion in 2023. The construction sector was dominated by new contract acquisitions in the Roads and Bridges segment, which grew by 22.63% from the previous year. In 2024, construction productivity mainly came from

tahun 2024, produktivitas konstruksi terutama berasal dari proyek jalan dan jembatan, dengan proyek jalan tol Betung – Jambi seksi 2A sebagai proyek terbesar, dengan nilai kontrak mencapai Rp4,42 triliun.

road and bridge projects, with the Betung – Jambi Section 2A Toll Road being the largest project, with a contract value of Rp4.42 trillion.

Prospek Usaha dan Strategi Konstruksi Tahun 2025

Hutama Karya optimis terhadap prospek usaha Jasa Konstruksi pada tahun 2025. Proyeksi perolehan kontrak baru pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp20.075 miliar. Perolehan kontrak baru ini direncanakan didominasi oleh portofolio segmen unggulan Hutama Karya, yaitu jalan dan jembatan, yang diperkirakan mencapai sekitar 62% dari total kontrak baru. Asumsi perolehan kontrak baru pada sektor jalan dan jembatan telah mengakomodasi rencana pengerjaan beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II.

Business Prospects and Construction Strategy for 2025

Hutama Karya is optimistic about the Construction Services business in 2025. The projected new contract acquisition for 2025 is expected to reach Rp20,075 trillion, with the Roads and Bridges segment dominating around 62% of the total new contracts. This assumption accommodates the Phase II development of several sections of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS).

Beberapa strategi Hutama Karya dalam rangka meningkatkan pendapatan diantaranya dengan melakukan klaim pada Divisi EPC dan Divisi Gedung serta rencana perolehan gain *asset recycling* yang diproyeksikan sebesar Rp379 miliar. Hutama Karya melakukan identifikasi proyek dan peningkatan kualitas perencanaan keikutsertaan berbasis digitalisasi, proyeksi calon *owner* yang tidak terbatas pada dana pemerintah dengan tetap melakukan mitigasi risiko pendanaan yang lebih detail, juga terus memperluas *networking* dengan meningkatkan hubungan yang intensif dengan pemberi Jasa, memperbanyak SKK untuk kompetensi jasa konstruksi sesuai bidang *tender* yang akan diikuti serta memperluas jaringan kerjasama dengan *vendor* yang *qualified*.

Some of Hutama Karya's strategies to increase revenue include making claims in the EPC Division and the Building Division, as well as a plan to obtain gain from asset recycling, which is projected to reach Rp379 billion. Hutama Karya identifies projects and improves the quality of participation planning based on digitalization, projects potential owners that are not limited to government funding while still conducting more detailed financial risk mitigation, and continues to expand networking by strengthening intensive relationships with service providers, increasing SKK for construction service competencies according to the tender fields to be participated in, and expanding collaboration networks with qualified vendors.

Badan Usaha Jalan Tol

Dalam mengelola bisnisnya, segmen usaha Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dibagi ke dalam empat bagian utama, yaitu:

1. Perencanaan Jalan Tol (RJT)
2. Pembangunan Jalan Tol (PJT)
3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPT)
4. PT Hutama Marga Waskita

Toll Road Business Entity (BUJT)

In its operations, Hutama Karya's Toll Road Business Entity (BUJT) is divided into four main segments:

1. Toll Road Planning (RJT)
2. Toll Road Construction (PJT)
3. Toll Road Operation and Maintenance (OPT)
4. PT Hutama Marga Waskita

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, yang diterbitkan pada 22 Oktober 2015, penugasan kepada Hutama Karya mencakup pembangunan 24 ruas jalan tol di Sumatera. Dari sisi konsesi, Hutama Karya memiliki hak pengoperasian di beberapa jalan tol, antara lain:

- Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (S/Jakarta Outer Ring Road S - JORR S)
- Jalan Tol Akses Tanjung Priok (ATP)

Based on Presidential Decree No. 117 of 2015, which amends Presidential Decree No. 100 of 2014 on the Acceleration of Toll Road Development in Sumatra, Hutama Karya was assigned to construct 24 toll road sections in Sumatra. From the concession side, Hutama Karya has the operating rights on several toll roads, including:

- Jakarta Outer Ring Road (S/Jakarta Outer Ring Road S - JORR S)
- Tanjung Priok Access Toll Road (ATP)

Selain itu, Hutama Karya juga mengoperasikan beberapa ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), di antaranya:
- Ruas Medan-Binjai
- Ruas Palembang-Indralaya
- Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar
- Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung
- Ruas Pekanbaru-Dumai
- Ruas Aceh-Sigli

In addition, Hutama Karya also operates several sections of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS), including:
- Medan-Binjai Section
- Palembang-Indralaya Section
- Bakauheni-Terbanggi Besar Section
- Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Section
- Pekanbaru-Dumai Section
- Aceh-Sigli Section

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Badan Usaha Jalan Tol

Hutama Karya senantiasa memprioritaskan kualitas, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam setiap tahap pembangunan jalan tol. Salah satu inovasi teknologi yang diusung untuk meningkatkan ketahanan terhadap gempa adalah *Lead Rubber Bearing* (LRB), yaitu bantalan karet inti timbal yang banyak diterapkan pada struktur jembatan. Teknologi ini telah diterapkan pada beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), seperti Tol Binjai-Brandan dan Tol Bangkinang-Koto Kampar. Penerapan teknologi LRB memberikan kualitas terbaik pada jalan tol yang dikelola oleh Hutama Karya. Teknologi ini memperpanjang umur ketahanan jalan tol dan meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga menciptakan jalan tol yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna yang melintas di JTTS.

Competitive Advantages and Innovation in The Toll Road Business

Hutama Karya always prioritizes quality, safety, and occupational health in every stage of toll road construction. One of the technological innovations introduced to enhance earthquake resistance is Lead Rubber Bearing (LRB), a lead-core rubber bearing widely applied to bridge structures. This technology has been implemented on several sections of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS), such as the Binjai-Brandan Toll Road and the Bangkinang-Koto Kampar Toll Road. The application of LRB technology provides the best quality for the toll roads managed by Hutama Karya. This technology extends the durability of toll roads and improves infrastructure quality, creating safer and more comfortable toll roads for users traveling on JTTS.

Strategi Badan Usaha Jalan Tol Tahun 2024

Strategi Badan Usaha Jalan Tol Tahun 2024 meliputi perencanaan dan pembangunan serta operasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pembangunan
   a. Restrukturisasi *capital structure* BUJT.
   b. Penyelesaian JTTS Tahap I dan melanjutkan beberapa ruas pada Tahap II (Rengat Pekanbaru – Seksi Lingkar Pekanbaru dan Betung – Jambi)
      i. Fokus dalam pengendalian progres, biaya konstruksi dan perubahan lingkup.
      ii. Melakukan *monitoring* mutu, optimalisasi metode konstruksi dan sumber daya proyek.
      iii. Meningkatkan kapabilitas dan produktivitas sumber daya dalam perencanaan dan pembangunan jalan tol.
      iv. Optimalisasi biaya investasi dengan menerapkan desain tipikal yang distandarkan serta penggunaan teknologi BIM *advanced*.
      v. *Monitoring* dan pendampingan proses pengadaan tanah yang sedang berjalan serta pengembalian Dana Talangan Tanah (DTT) serta biaya *Cost of Fund* (CoF).

Strategy of The Toll Road Business Entity in 2024

The strategy of the Toll Road Business Entity in 2024 includes planning and construction as well as operations, outlined as follows:

1. Planning and Construction
   a. Restructuring the capital structure of BUJT.
   b. Completion of JTTS Phase I and continuation of several sections in Phase II (Rengat Pekanbaru – Pekanbaru Ring Section and Betung – Jambi).
      i. Focus on progress control, construction costs, and scope changes.
      ii. Conducting quality monitoring, optimizing construction methods, and project resources.
      iii. Enhancing the capability and productivity of resources in toll road planning and construction.
      iv. Optimizing investment costs by applying standardized typical designs and using advanced BIM technology.
      v. Monitoring and assisting the ongoing land acquisition process, as well as the reimbursement of Land Bailout Funds (DTT) and Cost of Fund (CoF).

vi. Penyelesaian *Detail Engineering Design* (DED)/Rencana Teknik Akhir (RTA).
vii. Melakukan kajian risiko dan kajian dari sisi teknis, finansial, operasional, dan hukum untuk skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL).
viii. Penyusunan dan pengajuan perizinan pengusahaan kepada pemegang saham.
ix. Pemenuhan pendanaan melalui ekuitas (PMN) dan pinjaman.

2. Operasi
   a. Pengoperasian jalan tol yang efektif dan efisien:
      i. *Preventive maintenance*.
      ii. Pengembangan dan integrasi sistem/ teknologi informasi.
      iii. Internalisasi operasi dan pemeliharaan jalan tol.
   b. Penyesuaian tarif tol mengikuti *ability to pay* terkini dalam rangka memperbaiki kelayakan dari JTTS.
   c. Fokus dalam pengelolaan dan menjalin kerjasama pada *Rest Area* Ruas JTTS dan non JTTS.
   d. Peningkatan kompetensi personil pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

vi. Completing the Detail Engineering Design (DED)/Final Technical Plan (RTA).
vii. Conducting risk studies and assessments from technical, financial, operational, and legal perspectives for the Service-Based Periodic Payment (PBBL) scheme.
viii. Preparing and submitting business licensing applications to shareholders.
ix. Securing funding through equity (PMN) and loans.

2. Operations
   a. Effective and efficient toll road operations:
      i. Preventive maintenance.
      ii. Development and integration of information systems/technology.
      iii. Internalization of toll road operations and maintenance.
   b. Adjusting toll rates according to the latest ability to pay to improve the feasibility of JTTS.
   c. Focus on management and collaboration in Rest Areas of JTTS and non-JTTS sections.
   d. Enhancing the competency of personnel in toll road operations and maintenance.

Produktivitas Badan Usaha Jalan Tol

Informasi mengenai produktivitas badan usaha jalan tol adalah sebagai berikut.

Productivity of The Toll Road Business Entity

Information regarding the productivity of the toll road business entity is as follows.

Tabel Kinerja/Produktivitas Badan Usaha Jalan Tol
Table of Performance/Productivity of the Toll Road Business Entity

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Panjang jalan tol beroperasi (km) Operating Toll Road Length (km)	640	722.87	(83)	(11.46)
Volume Lalu Lintas Transaksi (jumlah kendaraan dalam jutaan) Transaction Traffic Volume (million vehicles)	87.88	79.24	9	10.90
Volume Lalu Lintas Transaksi Harian Rata-Rata (Ribuan kendaraan) Average Daily Transaction Traffic Volume (thousand vehicles)	242.14	294.65	(53)	(17.82)
Pendapatan Tol Harian Rata-Rata (jutaan Rupiah) Average Daily Toll Revenue (millions Rupiah)	8,829	13,776	(4,947)	(35.91)

Pada tahun 2024, panjang jalan tol yang beroperasi tercatat sepanjang 640 km, mengalami penurunan sebesar 11,46% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sepanjang 722,87 km. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya divestasi/*asset recycling* terhadap dua ruas tol pada tahun 2023, yaitu ruas Medan - Binjai dan Bakauheni - Terbanggi Besar.

In 2024, the total length of operational toll roads was recorded at 640 km, experiencing a decrease of 11.46% compared to 2023, which was recorded at 722.87 km. This decline was influenced by the divestment/asset recycling of two toll road sections in 2023, namely the Medan - Binjai section and the Bakauheni - Terbanggi Besar section.

Meskipun demikian, volume lalu lintas transaksi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 87,88 juta kendaraan, meningkat sebesar 10,90% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 79,24 juta kendaraan. Peningkatan ini didorong oleh adanya penambahan ruas tol baru yang beroperasi, yaitu ruas tol Indralaya - Prabumulih dan ruas tol Indrapura - Kisaran.

Nevertheless, the total transaction traffic volume in 2024 was recorded at 87.88 million vehicles, an increase of 10.90% compared to 2023, which was recorded at 79.24 million vehicles. This increase was driven by the addition of newly operational toll road sections, namely the Indralaya - Prabumulih section and the Indrapura - Kisaran section.

Volume lalu lintas transaksi harian rata-rata pada tahun 2024 tercatat sebanyak 242,14 ribu kendaraan, mengalami penurunan sebesar 17,82% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 294,65 ribu kendaraan. Penurunan ini dipengaruhi oleh pelepasan dua ruas tol yang telah didivestasi pada pertengahan tahun 2023.

The average daily transaction traffic volume in 2024 was recorded at 242.14 thousand vehicles, experiencing a decrease of 17.82% compared to 2023, which was recorded at 294.65 thousand vehicles. This decline was influenced by the release of two toll road sections that had been divested in mid-2023.

Pendapatan tol harian rata-rata pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp8,83 miliar, mengalami penurunan sebesar 35,91% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp13,77 miliar. Penurunan ini sejalan dengan penurunan panjang jalan tol yang beroperasi di tahun 2024.

The average daily toll revenue in 2024 was recorded at Rp8.83 billion, experiencing a decrease of 35.91% compared to 2023, which was recorded at Rp13.77 billion. This decline is in line with the decrease in the operational toll road length in 2024.

Prospek Usaha dan Strategi Badan Usaha Jalan Tol Tahun 2025

Prospek bisnis jalan tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat pada tahun 2025 sangat menjanjikan, terutama dalam mendukung sektor logistik dan program swasembada nasional. Dengan beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub logistik internasional yang terintegrasi Zona Ekonomi Khusus (KEK), ruas tol ini menjadi jalur vital untuk distribusi barang dari pelabuhan ke pusat-pusat industri di Sumatera Utara. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan mencapai 2 juta TEUs (*Twenty-Foot Equivalent Units*) pada 2025, meningkat 25% dari tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan akan mendorong peningkatan arus kendaraan logistik hingga 20%-25%, menjadikan ruas tol ini sebagai infrastruktur utama dalam mendukung kelancaran distribusi hasil produksi dan bahan baku. Selain itu, pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas diproyeksikan menarik lebih dari 3 (tiga) juta wisatawan pada tahun 2025 yang sebagian besar melalui akses jalan tol ini.

Business Prospects and Strategy of Toll Road Enterprises in 2025

The business prospects for the Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat toll road in 2025 are highly promising, particularly in supporting the logistics sector and the national self-sufficiency program. With the operation of Kuala Tanjung Port as an international logistics hub integrated with the Special Economic Zone (KEK), this toll road section serves as a vital route for distributing goods from the port to industrial centers in North Sumatra. Kuala Tanjung Port is projected to reach 2 million TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units) in 2025, increasing by 25% from the previous year. This is expected to drive a 20%-25% increase in logistics vehicle traffic, making this toll road a key infrastructure in facilitating the smooth distribution of production outputs and raw materials. Additionally, the development of Lake Toba as a super-priority tourism destination is projected to attract more than 3 million tourists in 2025, most of whom will access the area via this toll road.

Strategi bisnis tahun 2025 akan difokuskan pada tiga pilar utama yaitu digitalisasi, pengembangan infrastruktur tambahan, dan keberlanjutan lingkungan. Digitalisasi layanan di seluruh gerbang tol akan meningkatkan efisiensi logistik dengan mengurangi waktu tempuh dan biaya logistic akibat kemacetan di jalan nasional. Dari sisi pengembangan fasilitas rest area dengan kapasitas parkir truk yang lebih besar dan *weigh-in-motion systems* akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan operasional. Selain itu, penanaman 50.000 pohon di sepanjang ruas tol akan mendukung target pengurangan emisi karbon sebesar 10%, sesuai

The 2025 business strategy will focus on three main pillars: digitalization, additional infrastructure development, and environmental sustainability. Digitalizing services at all toll gates will improve logistics efficiency by reducing travel time and logistics costs due to congestion on national roads. In terms of facility development, rest areas with larger truck parking capacity and weigh-in-motion systems will enhance operational convenience and safety. Furthermore, the planting of 50,000 trees along the toll road will support the national sustainability program's goal of reducing carbon emissions by 10%. Through this

dengan program keberlanjutan nasional. Dengan kombinasi strategi ini, perusahaan tidak hanya akan meningkatkan daya saing tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

combined strategy, the company aims not only to strengthen its competitiveness but also to make a significant contribution to economic growth and environmental preservation.

Pengembang Properti

Lini bisnis *realty* dan properti Hutama Karya dijalankan oleh anak perusahaan Hutama Karya yakni HK Realtindo yang bergerak dalam bidang usaha *realty*, jasa properti dan jasa lainnya seperti pengembangan *landed house, high-rise building* (*apartment, condotel, office mixed use*) serta *industrial estate*. Di bidang properti manajemen, HK Realtindo telah sukses mengembangkan beberapa produk unggulan yaitu pengelolaan beberapa hotel yang tersebar di Pulau Jawa, Pengelolaan *Rest Area* dan *Building Management*.

Property Development

Hutama Karya's realty and property business is managed by its subsidiary, HK Realtindo, which operates in realty, property services, and other related businesses such as the development of landed houses, high-rise buildings (apartments, condotels, office mixed-use), and industrial estates. In property management, HK Realtindo has successfully developed several flagship products, including hotel management services across Java, rest area management, and building management.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Pengembang Properti

Keunggulan kompetitif dan inovasi dalam industri properti sangat penting untuk dapat bertahan dan bersaing. Inovasi seperti teknologi dan desain dapat meningkatkan efisiensi dalam pengembangan produk dan dapat menjadi daya tarik konsumen. Sedangkan keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui strategi pemasaran, *brand awareness*, pemasaran digital, kualitas produk, fasilitas kawasan, *unique selling point*, layanan pelanggan dan pelayanan *after sales* yang unggul.

Competitive Advantages and Innovation In Property Development

Competitive advantages and innovation in the property industry are crucial for sustaining and excelling in the market. Innovations in technology and design enhance product development efficiency and attract consumers. Competitive advantages can be achieved through marketing strategies, brand awareness, digital marketing, product quality, area facilities, unique selling points, customer service, and superior after-sales services.

Strategi Pengembang Properti Tahun 2024

Strategi pengembangan dan penjualan properti berfokus pada peningkatan *brand awareness* melalui program dan konten *digital* marketing di *platform* media sosial, pembangunan fasilitas kawasan seperti *clubhouse* dan masjid serta *rejuvenate* kawasan, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi untuk pemasaran secara *bulk sales*, menambah kerjasama dengan perbankan untuk memberikan alternatif kemudahan konsumen dalam memilih skema pembayaran. Untuk menjaga minat dan ketertarikan pasar diperlukan penyesuaian *siteplan* dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan melakukan evaluasi serta penyesuaian harga jual unit Sedangkan untuk memastikan kualitas produk dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek secara berkala, program pengawasan konstruksi dan *Quality Control* dengan melakukan kerjasama dengan kontraktor dan konsultan yang kompeten dan berpengalaman.

Property Development Strategy for 2024

The property development and sales strategy focuses on increasing brand awareness through digital marketing programs and content on social media platforms, building community facilities such as clubhouses and mosques, and rejuvenating residential areas. Collaborations with institutions for bulk sales marketing and partnerships with banks to offer flexible payment schemes will be expanded. To maintain market interest and appeal, site plans will be adjusted based on market conditions, with continuous price evaluations. Ensuring product quality involves regular project evaluation and monitoring, construction supervision programs, and quality control in collaboration with experienced contractors and consultants.

Strategi untuk meningkatkan pendapatan di bidang properti manajemen dan menjaga kestabilitasan HPP serta okupansi yaitu dengan melakukan evaluasi dan monitoring pemasaran secara berkala, bekerjasama dengan instansi Pemerintahan untuk melakukan pengelolaan *Office Building*, melakukan optimalisasi aset dan *Sponsorship Event* melalui

To increase revenue in property management and maintain cost stability and occupancy rates, periodic marketing evaluations and monitoring will be conducted. Partnerships with government agencies for office building management, asset optimization, and sponsorship events through strategic partners will be implemented. Investor

mitra, melakukan *investor gathering* untuk *engagement* dengan perusahaan dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan pengelolaan *Rest Area*.

gatherings will be organized to engage companies, and regular oversight will be conducted on rest area management activities.

Selain itu, terhadap aset-aset lahan idle dilakukan kajian bisnis pengembangan dan/atau optimalisasi lahan baik dikembangkan sendiri, bekerjasama dengan mitra maupun penawaran/*project expose* kepada developer lain yang memiliki *portofolio* dan kompetensi pada bidang properti.

Additionally, for idle land assets, business studies on development and/or optimization will be carried out, whether through self-development, partnerships, or project exposure to other developers with strong portfolios and expertise in the property sector.

Produktivitas Pengembang Properti

Produktivitas pengembangan properti di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dengan banyaknya perusahaan properti yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia bahwa harga properti residensial di pasar primer menunjukkan perkembangan harga yang meningkat. Selain itu, properti perumahan menjadi salah satu jenis investasi yang menjanjikan, terutama karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian yang nyaman dan strategis.

Property Development Productivity

The productivity of the property development sector in Indonesia continues to show growth, with many property companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). A survey by Bank Indonesia indicates that residential property prices in the primary market are increasing. Furthermore, residential property remains a promising investment, particularly due to the growing demand for comfortable and strategically located housing.

Tabel Kinerja/Produktivitas Pengembang Properti
Table of Property Developer Performance/Productivity

(dalam miliar)
(in billions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penjualan Properti Property Sales	18,553	72,257	(53,704)	(74.32)
Sewa Ruangan dan Jasa Room and Service Rent	133,791	97,212	7,939	37.63
Hotel Hotel	109,364	105,151	4,213	4.01

Dalam sektor penjualan properti pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 74,32% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh persaingan yang semakin ketat di industri properti, terutama setelah pandemi Covid-19 dinyatakan selesai. Banyak pengembang properti yang berlomba-lomba untuk memasarkan produk mereka dengan menawarkan berbagai fasilitas, insentif, diskon, dan promosi lainnya secara masif, sehingga menambah kompetisi yang semakin sengit.

In the property sales sector sales in 2024 decreased by 74.32%, respectively, compared to 2023. This decline was driven by increasingly intense competition in the property industry, particularly after the Covid-19 pandemic was declared over. Many property developers aggressively marketed their products by offering various facilities, incentives, discounts, and other promotions, further intensifying the competition.

Sementara itu, di sektor *recurring income* yang berfokus pada manajemen properti, Perseroan mengalami kenaikan sebesar 37,63% untuk pendapatan sewa dan jasa, dari Rp 97.212 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 133.791 miliar pada tahun 2024. Serta, pada pendapatan Hotel

Meanwhile, in the recurring income sector that focuses on property management, the Company achieved an increase of 37.63% for rental and service revenue, from Rp97,212 billion in 2023 to Rp133,791 billion in 2024. Hotel revenue increased by 4.01% from Rp105,151 billion in 2023 to Rp109,364 billion

meningkat 4,01% dari Rp 105.151 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 109.364 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan tingkat keterisian/okupansi unit properti yang dikelola oleh perusahaan.

in 2024. This increase was driven by an increase in the occupancy rate of property units managed by the company.

Prospek Usaha dan Strategi Pengembang Properti Tahun 2025

Prospek usaha properti di Indonesia, terutama tahun 2025 berpeluang untuk bertumbuh dan diproyeksikan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Keyakinan ini ditopang dengan kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat. Dengan adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah dapat mendorong pertumbuhan penjualan properti di Indonesia. Selain itu dengan adanya kebijakan Pemerintah dengan program 3 (tiga) juta rumah dan insentif fiskal seperti perpanjangan insentif PPN DTP (PPN Ditanggung Pemerintah) memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar properti.

Business Prospects and Property Development Strategy for 2025

The property business in Indonesia, particularly in 2025, has the potential to grow and is projected to expand beyond the previous year. This confidence is supported by the establishment of the Ministry of Housing and Settlements (PKP), which specifically focuses on public housing. New regulations and various government incentives are expected to drive property sales growth in Indonesia. Additionally, the government's policy to build three million houses and fiscal incentives, such as the extension of the VAT subsidy (PPN DTP), provide a strong foundation for property market growth.

Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol

Melalui anak usaha PT Hakaaston, Perseroan memiliki produk *asphalt* dan *concrete* manufacture yang meliputi baja, geosintetik, *precast, readymix,* serta *asphalt*. Semua produk tersebut diproduksi langsung oleh Hakaaston di pabrik-pabrik yang dimilikinya.

Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, and Rest Area of Toll Road

Through its subsidiary PT Hakaaston, the Company has hotmix and precast manufacture products that include steel, geosynthetics, precast, readymix, and asphalt. All of these products are produced directly by Hakaaston in its factories.

PT Semen Indogreen Sentosa (HKSIS), yang merupakan bagian dari PT Hutama Karya Group, adalah perusahaan terdepan dalam industri beton dengan pengalaman dan inovasi yang berkelanjutan. Didukung oleh 17 *batching plant* yang terletak di lokasi strategis, armada modern, serta standar kualitas yang tinggi, HKSIS menyediakan berbagai jenis beton untuk proyek infrastruktur nasional. Dengan akses langsung ke proyek-proyek strategis dan komitmen terhadap pengembangan teknologi, HKSIS memastikan ketepatan waktu, efisiensi, dan daya tahan optimal pada setiap produk yang dihasilkan.

PT Semen Indogreen Sentosa (HKSIS), part of PT Hutama Karya Group, is a leading company in the concrete industry with experience and continuous innovation. Supported by 17 batching plants located in strategic locations, modern fleets, and high quality standards, HKSIS provides various types of concrete for national infrastructure projects. With direct access to strategic projects and a commitment to technology development, HKSIS ensures timeliness, efficiency, and optimum durability in every product.

Perseroan juga mengembangkan bisnis jasa pengoperasian jalan tol guna mengoptimalkan aset yang dimiliki. Melalui Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol, Perseroan mengelola empat lini bisnis yang dikelola bersama entitas anak, yaitu PT Hakaaston dan PT HK Realtindo, antara lain:

The Company also develops toll road operating service business to optimize its assets. Through the Toll Road Operation & Maintenance Division, the Company manages four business lines managed together with its subsidiaries, namely PT Hakaaston and PT HK Realtindo, including:

1. **Layanan Transaksi**
   Layanan transaksi yang disediakan oleh Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan layanan transaksi pengoperasian jalan tol. Contoh jasa transaksi, antara lain yaitu

1. **Transaction Services**
   Transaction services provided by the Toll Road Operation & Maintenance Division include planning, management, and implementation of toll road operation transaction services. Examples of transaction services include toll

pelayanan pengumpulan tol, sewa kendaraan *shuttle, consumable,* dan lain-lain.

2. **Layanan Lalu Lintas**
   Layanan lalu lintas yang disediakan oleh Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol bersama PT Hakaaston meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pelayanan lalu lintas di jalan tol. Contoh layanan lalu lintas, antara lain yaitu sewa kendaraan operasional (patroli, derek, *rescue, ambulance*, kamtib, Patroli Jalan Raya/ PJR), sewa radio komunikasi, dan lain-lain.
3. **Layanan Pemeliharaan**
   Layanan pemeliharaan yang disediakan oleh Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol bersama PT Hakaaston meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan tol. Contoh layanan pemeliharaan, antara lain yaitu pengaturan layanan pemeliharaan, pemeliharaan kantor dan gerbang tol, serta layanan pemeliharaan lainnya.
4. **Layanan *Rest Area***
   Layanan pemeliharaan yang disediakan oleh Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol bersama PT HK Realtindo meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pemeliharaan rutin *rest area* jalan tol. Contoh layanan pemeliharaan *rest area*, antara lain yaitu layanan kebersihan, layanan pengelolaan sampah, manajemen fasilitas, dan layanan pemeliharaan lainnya.

collection services, shuttle vehicle rental, consumables, and others.

2. **Traffic Services**
   Traffic services provided by the Toll Road Operation & Maintenance Division together with PT Hakaaston include planning, management, and implementation of traffic services on toll roads. Examples of traffic services include operational vehicle rental (patrol, towing, rescue, ambulance, security, Highway Patrol), radio communication rental, and others.
3. **Maintenance Services**
   Maintenance services provided by the Toll Road Operation & Maintenance Division together with PT Hakaaston include planning, management, and implementation of routine toll road maintenance. Examples of maintenance services include maintenance service arrangements, office and toll gate maintenance, and other maintenance services.
4. **Rest Area Services**
   Maintenance services provided by the Toll Road Operation & Maintenance Division together with PT HK Realtindo include planning, management, and implementation of routine maintenance of toll road rest areas. Examples of rest area maintenance services include cleaning services, waste management services, facility management, and other maintenance services.

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI PABRIKASI ASPAL DAN BETON, OPERASI DAN PEMELIHARAAN, DAN *REST AREA* JALAN TOL

Dalam pabrikasi aspal, PT Hakaaston memiliki *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang menjadi keunggulan dalam memastikan pasokan yang stabil serta konsistensi kualitas bahan baku aspal. Hal ini mendukung PT Hakaaston dalam melaksanakan proyek pemeliharaan jalan tol dengan kualitas tinggi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain itu, PT Hakaaston telah berhasil mengembangkan produk aspal *hotmix* terbaru, yaitu *asphalt Performance Grade* (PG 70), yang memiliki kualitas dan daya tahan lebih baik terhadap suhu tinggi. Aspal jenis ini juga telah ditetapkan sebagai ketentuan wajib (*mandatory*) oleh Kementerian PUPR dalam pemeliharaan jalan tol.

PT Hakaaston juga menawarkan berbagai produk turunan aspal, di antaranya *Grouting* dan *Nano-Grout, Hakapatch, Hakasoil, Hakabase, d*an *Anti-fungal*, yang masing-masing memiliki fungsi serta keunggulan dalam pemeliharaan jalan. Sementara itu, dalam pabrikasi beton, PT Hakaaston memiliki berbagai produk turunan, termasuk aditif beton dan Hakafast, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas serta ketahanan beton dalam berbagai aplikasi konstruksi.

COMPETITIVE ADVANTAGE AND INNOVATION OF HOTMIX AND PRECAST MANUFACTURING, OPERATION AND MAINTENANCE, AND REST AREA OF TOLL ROAD

In asphalt manufacturing, PT Hakaaston has an Asphalt Mixing Plant (AMP) which is an advantage in ensuring a stable supply and consistent quality of asphalt raw materials. This supports PT Hakaaston in implementing toll road maintenance projects with high quality in line with the Minimum Service Standards (SPM). In addition, PT Hakaaston has succeeded in developing the latest hotmix asphalt product, namely asphalt Performance Grade (PG 70), which has better quality and resistance to high temperatures. This type of asphalt has also been stipulated as a mandatory provision by the Ministry of Public Work and Housing (PUPR) in toll road maintenance.

PT Hakaaston also offers various asphalt derivative products, including Grouting and Nano-Grout, Hakapatch, Hakasoil, Hakabase, and Anti-fungal, each of which has its own function and advantages in road maintenance. Meanwhile, in concrete manufacturing, PT Hakaaston has various derivative products, including concrete additives and Hakafast, which are designed to improve the quality and durability of concrete in various construction applications.

PT Semen Indogreen Sentosa (HKSIS) terus berinovasi dalam industri beton dengan menghadirkan produk ramah lingkungan, seperti *Green Concrete dan Self-Healing Concrete* yang dapat memperbaiki retakan secara otomatis. Teknologi *Cement Treated Base* (CTB) dikembangkan untuk efisiensi dalam pembangunan jalan, sementara digitalisasi produksi dan distribusi memastikan ketepatan waktu. HKSIS juga memperkenalkan ConMT, sensor canggih berbasis *Maturity Method* untuk memantau kekuatan beton secara *real-time.* Dengan inovasi berkelanjutan, HKSIS berkomitmen mendukung infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan di Indonesia.

PT Semen Indogreen Sentosa (HKSIS) continues to innovate in the concrete industry by presenting environmentally friendly products, such as Green Concrete and Self-Healing Concrete that can repair cracks automatically. Cement Treated Base (CTB) technology was developed for efficiency in road construction, while digitalization of production and distribution ensures timeliness. HKSIS also introduced ConMT, a sophisticated sensor based on the Maturity Method to monitor concrete strength in real-time. With continuous innovation, HKSIS is committed to supporting strong and sustainable infrastructure in Indonesia.

Dalam Pengoperasian Jalan Tol Hutama Karya menerapkan teknologi terkini dalam pelayanan jalan tol. Sejumlah teknologi tersebut mencakup pengembangan *Intelligent Traffic System* (ITS) yang didalamnya terdapat *Smart Closed Circuit Television* (*Smart* CCTV) dan D*ata Remote Traffic Microwave Sensor* (RTMS) serta pengembangan aplikasi HK Toll Apps sebagai platform informasi berkendara di Jalan Tol Hutama Karya berbasis *mobile*.

In the Operation of the Hutama Karya Toll Road, the latest technology is applied in toll road services. A number of these technologies include the development of the Intelligent Traffic System (ITS) which contains Smart Closed Circuit Television (Smart CCTV) and Data Remote Traffic Microwave Sensor (RTMS) as well as the development of the HK Toll Apps application as a mobile-based driving information platform on the Hutama Karya Toll Road.

HK *Toll Apps* berfungsi menyajikan seluruh informasi tentang jalan tol yang dikelola oleh Hutama Karya dan dapat diakses oleh pengguna jalan tol sehingga dapat mempermudah pemudik untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan sebelum melintas di jalan tol.

HK Toll Apps serves to present all information about toll roads managed by Hutama Karya and can be accessed by toll road users so that it can make it easier for travelers to obtain various information needed before crossing the toll road.

Teknologi RTMS berfungsi untuk mengukur kepadatan lalu lintas di jalan tol yang dapat memberikan informasi tentang volume kendaraan, tingkat okupansi, dan kecepatan rata-rata di jalan tol, yang kemudian dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini sebelum terjadi kepadatan di area tertentu.

RTMS technology functions to measure traffic density on toll roads which can provide information on vehicle volume, occupancy levels, and average speeds on toll roads, which can then be used as an early warning system before congestion occurs in certain areas.

Untuk membuat pengguna jalan tol merasa aman dan nyaman melintas di JTTS, Hutama Karya juga memastikan bahwa sejumlah ruas di JTTS telah dilengkapi 3.704 Penerangan Jalan Umum (JPU) yang menggunakan *smart lamp* yang memiliki sistem penerangan berbasis *Internet of Things* (IoT). *Smart lamp* ini dapat dikendalikan dengan sistem *mapping*, sehingga Hutama Karya bisa dengan mudah memantau, mengatur jadwal pencahayaan hingga tingkat penerangan lampu di jalan tol

To make toll road users feel safe and comfortable crossing the JTTS, Hutama Karya also ensures that a number of sections in the JTTS have been equipped with 3,704 Public Street Lighting (JPU) that use smart lamps that have an Internet of Things (IoT) based lighting system. This smart lamp can be controlled with a mapping system so that Hutama Karya can easily monitor, set lighting schedules, and the level of lighting on the toll road.

Rest area yang dikelola oleh PT Hutama Karya juga memiliki beberapa keunggulan, antara lain desain *rest are*a yang mengusung tema dan adat lokal, penyediaan lahan parkir khusus perempuan (*ladies parking),* pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan budidaya maggot serta bekerja sama dengan UMKM lokal untuk membantu memperkenalkan makanan khas daerah.

The rest area managed by PT Hutama Karya also has several advantages, including the rest area design that carries local themes and customs, the provision of special parking areas for women (ladies parking), environmentally friendly waste management with maggot cultivation and collaborating with local MSMEs to help introduce regional specialties.

Strategi Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol Tahun 2024

Di tahun 2024, strategi pabrikasi aspal dan beton bertujuan untuk mendukung bisnis utama PT Hakaaston dalam pemeliharaan jalan tol, serta mendukung *core business* Hutama Karya dalam jasa konstruksi dan bisnis manufaktur pendukung konstruksi jalan tol lainnya.

HKSIS menghadapi dinamika industri konstruksi dengan strategi pabrikasi beton yang berfokus pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Optimalisasi produksi di *batching plant,* penerapan teknologi ramah lingkungan seperti *self-healing concrete*, serta digitalisasi melalui IoT memastikan kualitas dan efisiensi operasional. HKSIS juga mengembangkan beton inovatif seperti *High-Performance Concrete* (HPC) untuk ketahanan struktur yang lebih baik. Dengan efisiensi biaya dan optimalisasi logistik, HKSIS berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur yang kokoh, modern, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:

1. Peningkatan kompetensi tenaga inti regional dengan membuat program pelatihan internal mengenai pengoperasian jalan tol.
2. Pemenuhan tenaga profesional baik dari internal maupun eksternal Hutama Karya bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
3. Pengembangan *Intelligent Traffic Management System* di JTTS.
4. Penerapan SMT, CMMS dan *Dashboard* Ruas baru.
5. Menjaga pemenuhan Sistem Pelayanan Minimal ada ruas-ruas beroperasi dengan melaksanakan:
   a. Pengendalian rutin pelaksanaan pelayanan transaksi dan lalu lintas baik melalui Sistem Kendali Operasi maupun pengawasan langsung di lapangan.
   b. Pengendalian performa konstruksi jalan melalui pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala meliputi:
      i. SFO, rekonstruksi, *overlay*
      ii. Peremajaan jaringan elektrikal dan PJU
      iii. Sarkapja
      iv. Normalisasi saluran
      v. Beautifikasi jalur dan gerbang tol
      vi. Pengecatan Median Concrete Barrier

Strategy for Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, and Rest Area of Toll Road In 2024

In 2024, the hotmix and precast manufacturing strategy aimed to support PT Hakaaston's main business in toll road maintenance, as well as support Hutama Karya's core business in construction services and other supporting manufacturing businesses of toll road construction.

HKSIS faces the dynamics of the construction industry with a concrete manufacturing strategy that focuses on efficiency, innovation, and sustainability. Optimizing production at the batching plant, implementing environmentally friendly technologies such as self-healing concrete, and digitalization through IoT ensure operational quality and efficiency. HKSIS also develops innovative concrete such as High-Performance Concrete (HPC) and Ultra High-Performance Concrete (UHPC) for better structural durability. With cost efficiency and logistics optimization, HKSIS is committed to supporting the development of solid, modern, and sustainable infrastructure in Indonesia.

In the operation and maintenance of toll roads, several strategies implemented by the Company include:

1. Improving the competence of regional core staff by creating internal training programs on toll road operations.
2. Fulfillment of professional manpower both from within and outside Hutama Karya in the field of toll road operation and maintenance.
3. Development of Intelligent Traffic Management System at JTTS.
4. Implementation of new SMT, CMMS and Section Dashboard.
5. Maintaining the fulfillment of the Minimum Service System, there are operational sections by implementing:
   a. Routine control of the implementation of transaction and traffic services both through the Operational Control System and direct supervision in the field.
   b. Road construction performance control through routine and periodic maintenance including:
      i. SFO, reconstruction, overlay
      ii. Rejuvenation of electrical and PJU networks
      iii. Sarkapja
      iv. Channel normalization
      v. Beautification of toll roads and gates
      vi. Median Concrete Barrier Painting

Dalam pengelolaan *rest area*, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:
1. Pemilihan jasa layanan *rest area* untuk mengelola keamanan dan kebersihan *rest area* agar memenuhi SPM.
2. Membangun Infrastruktur iklan/reklame pada ruas JTTS dan Non JTTS untuk optimalisasi perolehan.
3. Melakukan kajian pengembangan potensi kerjasama pemanfaatan lahan pada ruas JTTS dan Non JTTS untuk usaha jasa lainnya.

In managing rest areas, several strategies implemented by the Company include:
1. Selection of rest area service providers to manage the security and cleanliness of rest areas to meet SPM.
2. Building advertising infrastructure on JTTS and Non JTTS routes to optimize revenue.
3. Conducting a study on the development of potential cooperation in land use on the JTTS and Non-JTTS sections for other service businesses.

Produktivitas Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan *Rest Area* Jalan Tol

Productivity of Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, And Rest Area of Toll Road

Tabel Kinerja/Produktivitas Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol
Performance/Productivity Table of Hotmix and Precast Manufacturing, Operation and Maintenance, and Rest Area of Toll Road

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pabrikasi Aspal dan Beton **Hotmix and Precast Manufacture**				
Produksi Readymix (M^3) Readymix Production (M^3)	835,040	816,459	18,581	2.28
Produksi Hotmix (ton) Hotmix Production (tons)	358,561	411,278	(52,717)	(12.81)
Operasi dan Pemeliharaan **Operation and Maintenance**				
Lalu Lintas harian Rata-rata Tertimbang (kendaraan) Weighted Average Daily Traffic (vehicles)				
JORR S JORR S	145,264	133,491	11,773	8.82
Akses Tanjung Priok Access to Tanjung Priok	21,914	21,368	546	2.56
Palembang – Indralaya Palembang – Indralaya	8,308	8,221	87	1.06
Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	9,338	8,931	407	4.56
Pekanbaru – Dumai Pekanbaru – Dumai	7,974	8,951	(977)	(10.91)
Sigli - Banda Aceh Sigli - Banda Aceh	2,029	1,900	129	6.79
Binjai – Stabat Binjai – Stabat	6,577	8,244	(1,667)	(20.22)
Pekanbaru - Bangkinang - Koto Kampar Pekanbaru - Bangkinang - Koto Kampar	5,633	4,783	850	17.77
Bengkulu - Taba Penanjung Bengkulu - Taba Penanjung	1,736	1,514	222	14.66
Medan Binjai Medan Binjai	-	26,680	-	-
Bakauheni - Terbanggi Besar Bakauheni - Terbanggi Besar	-	14,713	-	-
Indralaya – Prabumulih Indralaya – Prabumulih	3,784	-	-	-

Tabel Kinerja/Produktivitas Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol
Performance/Productivity Table of Hotmix and Precast Manufacturing, Operation and Maintenance, and Rest Area of Toll Road

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Indrapura – Kisaran Indrapura – Kisaran	7,557	-	-	-
Total Total	220,115	238,797	(18,682)	(7.82)
Rest Area Jalan Tol **Rest Area of Toll Road**				
Keterisian Tenant Rest Area Rest Area Tenant Occupancy				
Indralaya Prabumulih Indralaya Prabumulih	46	46	0	0
Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	329	316	13	4.11
Pekanbaru – Dumai Pekanbaru – Dumai	80	36	44	122
Binjai – Langsa Binjai – Langsa	10	-	-	-
Indrapura – Kisaran Indrapura - Kisaran	44	-	-	-
Total Total	509	398	111	27.89

Produksi *readymix* tahun 2024 terealisasi 835.040 M^3 meningkat 2,28% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 816.459 M^3 atau tercapai 102,28% dibandingkan pencapaian tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pada tahun 2023 didominasi volume produksi untuk pekerjaan proyek JTTS Ruas Binjai - Pangkalan Brandan sebesar 30% dari total volume produksi tahunan 2023, kemudian selesai di tahun 2024 dengan kontribusi 13% dari total volume produksi.
2. Kemudian di tahun 2023 juga perusahaan menyelesaikan penyediaan beton untuk JTTS Ruas Sekitar Tebing Tinggi dengan kontribusi sebesar 20% dari total volume produksi 2023.
3. Untuk proyek JTTS Ruas Padang - Sicincin menyumbang 11% di tahun 2023, lalu pada tahun 2024 meningkat menjadi 25% kontribusi terhadap total volume produksi tahunan.
4. JTTS Ruas Betung - Jambi pada tahun 2023 mulai persiapan *supply* kebutuhan beton dengan kontribusi 17%, lalu meningkat menjadi 25% di tahun 2024.
5. Selain itu juga Perseroan melakukan produksi beton untuk kebutuhan JTTS Ruas Lingkar Pekanbaru, Lampung, Palembang Indralaya selama tahun 2023 dan 2024.

Readymix production in 2024 was realized at 835,040 M^3, an increase of 2.28% compared to 2023 which was 816,459 M^3 or an increase of 102.28% compared to the achievement in 2023. This was influenced by several factors, including:

1. In 2023, the production volume was dominated by the JTTS project work for the Binjai - Pangkalan Brandan Section at 30% of the total annual production volume in 2023, then completed in 2024 with a contribution of 13% of the total production volume.
2. Then in 2023 the company also completed the provision of concrete for the JTTS Section around Tebing Tinggi with a contribution of 20% of the total production volume in 2023.
3. For the JTTS project, the Padang - Sicincin section contributed 11% in 2023, then in 2024 increased to 25% contribution to the total annual production volume.
4. JTTS Betung - Jambi Section in 2023 started preparing concrete supply needs with a contribution of 17%, then increasing to 25% in 2024.
5. In addition, the Company also produced concrete for the needs of the JTTS Pekanbaru, Lampung, Palembang Indralaya Ring Road Section during 2023 and 2024.

6. Pada proyek Non JTTS, Kontribusi terbesar pada Proyek Jalan Tol Probolinggo Probowangi dengan disupport 2 *Batching Plant*, Kontribusi tahun 2023 sebesar 3% terhadap total volume produksi perusahaan tahunan, kemudian meningkat menjadi 16% di tahun 2024.
7. Kemudian Perseroan juga memproduksi beton untuk keperluan Proyek Irigasi Rentang dengan kontribusi 5% 2023 dan 6% 2024 terhadap total volume produksi tahunan Perseroan.

Pada tahun 2024, tingkat produksi *hotmix* mengalami penurunan sebesar 12,81% dari produksi tahun 2023. Penurunan ini disebabkan transformasi bisnis PT Hakaaston yang saat ini juga berfokus pada bisnis *maintenance* jalan tol.

Kinerja/produktivitas segmen operasi serta pemeliharaan jalan tol, yang ditinjau dari tingkat Lalu Lintas Harian Rata-rata Tertimbang (LHR-T), tercatat pada tahun 2024 sebanyak 220.115 kendaraan, mengalami penurunan sebesar 7,82% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 238.797 kendaraan. Penurunan ini disebabkan oleh divestasi dua ruas jalan tol pada tahun 2023, yaitu ruas Medan-Binjai dan Bakauheni-Terbanggi Besar.

Kinerja *rest area* pada tahun 2024 ditinjau dari aspek tingkat keterisian *tenant* di *rest area* sepanjang Trans Sumatera (TTS) yang mengalami kenaikan sebesar 27,89% dari 389 *tenant* di tahun 2023 menjadi 509 *tenant* pada tahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan bertambahnya ruas tol yang beroperasi pada tahun 2024, perluasan area komersial pada *rest area* dan pembukaan *rest area* baru. Peningkatan ini menunjukan semakin matangnya Hutama Karya dalam dalam mengelola dan menjalankan bisnis *rest area.*

Prospek Usaha dan Strategi Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan *Rest Area* Jalan Tol Tahun 2025

Pada tahun 2025, strategi pabrikasi aspal dan beton akan difokuskan untuk mendukung bisnis utama PT Hakaaston dalam pemeliharaan jalan tol, serta memperkuat *core business* PT Hutama Karya dalam sektor jasa konstruksi. Selain itu, pabrikasi ini juga bertujuan untuk mendukung lini bisnis manufaktur yang berhubungan dengan konstruksi jalan tol lainnya, seperti penyediaan material berkualitas tinggi untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan tol.

Seiring dengan bertambahnya jumlah ruas tol yang beroperasi di Indonesia, prospek usaha pada segmen pengoperasian jalan tol diperkirakan akan semakin membaik. Hal ini membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan usaha, seiring dengan peningkatan volume lalu lintas dan optimalisasi operasional ruas-ruas tol

6. In the Non JTTS project, the largest contribution to the Probolinggo Probowangi Toll Road Project was supported by 2 Batching Plants. The contribution in 2023 was 3% of the company's total annual production volume, then increasing to 16% in 2024.
7. Then the Company also produced concrete for the needs of the Rentang Irrigation Project with a contribution of 5% in 2023 and 6% in 2024 to the Company's total annual production volume.

In 2024, the hotmix production rate decreased by 12.81% from production in 2023. This decrease was due to the business transformation of PT Hakaaston, which was also focused on the toll road maintenance business.

The performance/productivity of the toll road operations and maintenance segment, as viewed from the Weighted Average Daily Traffic (LHR-T) level, was recorded in 2024 at 220,115 vehicles, a decrease of 7.82% compared to 2023 which reached 238,797 vehicles. This decrease was due to the divestment of two toll road sections in 2023, namely the Medan-Binjai and Bakauheni-Terbanggi Besar sections.

Rest area performance in 2024 was reviewed from the aspect of tenant occupancy rate in rest areas along Trans Sumatera (TTS) which increased by 27.89% from 389 tenants in 2023 to 509 tenants in 2024. This increase was in line with the addition of toll roads operating in 2024, the expansion of commercial areas, and the opening of new rest areas. This increase shows the increasing maturity of Hutama Karya in managing and running the rest area business.

Business Prospects and Strategies for Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, and Rest Area of Toll Road in 2025

In 2025, the hotmix and precast manufacturing strategy will be focused on supporting PT Hakaaston's core business in toll road maintenance, as well as strengthening PT Hutama Karya's core business in the construction services sector. In addition, this manufacturing also aims to support other toll road construction-related manufacturing business lines, such as providing high-quality materials for the construction and repairing toll road infrastructure.

As the number of toll roads operating in Indonesia increases, business prospects in the toll road operating segment are expected to improve. This opens up greater opportunities to increase business revenues, along with increasing traffic volume and optimizing the operation of new toll roads. With the increasing length of connected toll

baru. Dengan bertambahnya panjang jalan tol yang terhubung, Perseroan dapat memanfaatkan potensi pasar yang lebih luas.

roads, the Company can take advantage of wider market potential.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis di bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol di Indonesia, Hutama Karya melalui Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol berfokus pada penyediaan layanan pengoperasian jalan tol yang terpadu dan terintegrasi, dengan mengimplementasikan teknologi terkini. Teknologi yang diterapkan mencakup pengembangan *Intelligent Traffic System* (ITS), yang di dalamnya terdapat *Smart Closed Circuit Television (Smart CCTV)* dan *Remote Traffic Microwave Sensor* (RTMS), serta pengembangan aplikasi HK Toll Apps sebagai *platform* informasi berkendara berbasis *mobile* di Jalan Tol Hutama Karya. Untuk memperkuat dan memperbesar skala bisnisnya, Hutama Karya, melalui PT Hakaaston, akan terus mengikuti lelang terbuka untuk ruas-ruas jalan tol baru yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), selain dari Jasa Hutama Karya Group.

To maintain business sustainability in the field of toll road operation and maintenance in Indonesia, Hutama Karya through the Toll Road Operation and Maintenance Division focuses on providing integrated toll road operation services, by implementing the latest technology. The technology implemented includes the development of the Intelligent Traffic System (ITS), which includes Smart Closed Circuit Television (Smart CCTV) and Remote Traffic Microwave Sensor (RTMS), as well as the development of the HK Toll Apps application as a mobile-based driving information platform on the Hutama Karya Toll Road. To strengthen and expand its business scale, Hutama Karya, through PT Hakaaston, will continue to participate in open auctions for new toll road sections owned by the Toll Road Business Entity (BUJT) besides Jasa Hutama Karya Group.

Dalam rangka menuju perusahaan yang berbasis digital, Hutama Karya terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produk digital yang menjadi keunggulan kompetitif *(competitive advantage)* bagi Hutama Karya, khususnya dalam segmen usaha Pengoperasian Jalan Tol. Sebagai bagian dari upaya ini, Hutama Karya memastikan bahwa sejumlah ruas di JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) telah dilengkapi dengan 3.704 Penerangan Jalan Umum (JPU) yang menggunakan *smart lamp*. *Smart lamp* ini mengadopsi sistem penerangan berbasis *Internet of Things* (IoT), yang memungkinkan pengendalian secara otomatis melalui sistem *mapping*. Dengan teknologi ini, Hutama Karya dapat dengan mudah memantau, mengatur jadwal pencahayaan, dan menyesuaikan tingkat penerangan lampu di sepanjang jalan tol, sehingga meningkatkan efisiensi operasional serta kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol.

In order to become a digital-based company, Hutama Karya continues to innovate by developing digital products that become a competitive advantage for Hutama Karya, especially in the Toll Road Operation business segment. As part of this effort, Hutama Karya ensures that a number of sections on the JTTS (Trans Sumatra Toll Road) have been equipped with 3,704 Public Street Lighting (JPU) that use smart lamps. These smart lamps adopt an Internet of Things (IoT)-based lighting system, which allows automatic control through a mapping system. With this technology, Hutama Karya can easily monitor, set lighting schedules, and adjust the level of lighting along the toll road, thereby increasing operational efficiency as well as the comfort and safety of toll road users.

Dalam pengelolaan rest area, Perseroan optimis bahwa segmen usaha ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi pendapatan yang lebih baik seiring dengan bertambahnya panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Perseroan juga berencana untuk melakukan kerja sama dalam penempatan iklan/reklame serta usaha lainnya di ruas-ruas JTTS dan Non-JTTS. Selain itu, Perseroan akan menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik yang akan diolah menjadi pupuk, guna menyediakan layanan Rest Area yang lebih bersih dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di jalan tol. Untuk meningkatkan efisiensi, Perseroan juga akan memperluas cakupan *Property Management System* pada pengelolaan *rest area* serta menjalin kemitraan strategis untuk mengembangkan *revenue stream* pada bisnis *rest area*.

In rest area management, the Company is optimistic that this business segment will continue to grow and provide better revenue contributions along with the increasing length of toll roads operating in Indonesia. The Company also plans to cooperate in placing advertisements/billboards and other businesses on JTTS and Non-JTTS sections. In addition, the Company will implement the sorting of organic and inorganic waste which will be processed into fertilizer, in order to provide cleaner Rest Area services and support the achievement of Minimum Service Standards (SPM) on toll roads. To increase efficiency, the Company will also expand the scope of the Property Management System in rest area management and establish strategic partnerships to develop revenue streams in the rest area business.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

Pendapatan dan profitabilitas menurut segmen usaha disajikan sebagai berikut.

Business Segment Revenue and Profitability

Revenue and profitability by business segment are presented as follows.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha
Table of Business Segment Revenue and Profitability

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	Konstruksi Construction	Badan Usaha Jalan Tol Toll Roads Business Entity	Pengembang Properti Property Developer	Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, and Rest Areas of Toll Road	Eliminasi Elimination	Total Total
2024						
Pendapatan eksternal External Revenue	7,602,526	20,791,011	261,708	1,597,048	-	30,252,293
Pendapatan antar segmen Intersegment Revenue	13,525,231	-	-	2,992,029	(16,517,260)	-
Jumlah pendapatan **Total Revenue**	**21,127,757**	**20,791,011**	**261,708**	**4,589,077**	**(16,517,260)**	**30,252,293**
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(18,889,635)	(19,451,759)	(268,645)	(3,982,185)	16,613,953	(25,978,271)
Laba (rugi) bruto Gross profit (loss)	2,238,122	1,339,252	(6,937)	606,892	96,693	4,274,022
Beban penjualan Selling expenses	(11,958)	(776)	(306)	(26,900)	-	(39,940)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(805,126)	(218,702)	(60,862)	(157,374)	20,346	(1,221,718)
Beban penurunan nilai piutang Impairment of receivables	(153,785)	(92,450)	29,897	(18,259)	-	(142,147)
Beban pajak penghasilan final Final tax expenses	(546,677)	(88,849)	(4,552)	(22,374)	-	(662,452)
Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama Shares of net profit of associates and joint venture	1,425,209	-	-	-	(972,776)	452,433
Penghasilan (beban) lainnya, bersih Other income (expenses) - Net	(166,029)	133	11,242	(6,087)	(16,214)	(176,955)
Laba/(rugi) usaha Operating Income (Loss)	1,979,756	1,031,058	(31,518)	375,898	(871,951)	2,483,243
Pendapatan keuangan Finance Income	64,245	2,177,608	58,364	11,394	(142,810)	2,168,801

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha
Table of Business Segment Revenue and Profitability

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	Konstruksi Construction	Badan Usaha Jalan Tol Toll Roads Business Entity	Pengembang Properti Property Developer	Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, and Rest Areas of Toll Road	Eliminasi Elimination	Total Total
Biaya keuangan Finance Costs	(257,239)	(1,148,646)	(287,095)	(93,381)	142,810	(1,643,551)
Laba (rugi) kurs, bersih Exchange rate profit (loss), net	7,971	(7,560)	-	(22,277)	(848)	(22,714)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Profit (Loss) before income tax	1,794,733	2,052,460	(260,249)	271,634	(872,799)	2,985,779
Beban pajak penghasilan Income tax expenses	(12,137)	(131,383)	(7,141)	(70,337)	1,741	(219,257)
Laba/(rugi) tahun berjalan Profit (Loss) for the year	1,782,596	1,921,077	(267,390)	201,297	(871,058)	2,766,522
Aset **Assets**						
Aset segmen Segment assets	18,219,030	199,738,559	4,792,138	3,721,593	(29,955,160)	196,516,160
Liabilitas **Liabilities**						
Liabilitas segmen Segment liabilities	17,810,204	46,465,146	3,700,796	1,870,426	(11,804,560)	58,042,012
2023						
Pendapatan eksternal External Revenue	4,663,475	20,412,189	299,720	1,550,937	-	26,926,321
Pendapatan antar segmen Intersegment Revenue	12,332,269	-	19,542	3,016,009	(15,367,820)	-
Jumlah pendapatan **Total Revenue**	**16,995,744**	**20,412,189**	**319,262**	**4,566,946**	**(15,367,820)**	**26,926,321**
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(15,119,309)	(19,998,947)	(362,894)	(4,093,657)	15,006,280	(24,568,527)
Laba (rugi) bruto Gross profit (loss)	1,876,435	413,242	(43,632)	473,289	(361,540)	2,357,794
Beban penjualan Selling expenses	(9,074)	(657)	(134)	(2,130)	-	(11,995)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(606,073)	(132,731)	(44,710)	(165,543)	19,542	(929,515)

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha
Table of Business Segment Revenue and Profitability

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	Konstruksi Construction	Badan Usaha Jalan Tol Toll Roads Business Entity	Pengembang Properti Property Developer	Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, and Rest Areas of Toll Road	Eliminasi Elimination	Total Total
Beban penurunan nilai piutang Impairment of receivables	(222,137)	(389,138)	(541,702)	(14,286)	-	(1,167,263)
Beban penurunan nilai aset real estat Impairment of real estate asset	-	-	(180,000)	-	-	(180,000)
Beban pajak penghasilan final Final tax expenses	(426,563)	(21,938)	(4,412)	(29,831)	-	(482,744)
Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama Shares of net profit of associates and joint venture	173,922	-	-	1,196	-	175,118
Keuntungan dari penjualan hak pengusahaan jalan tol Gain on sale of toll road	-	3,643,245	-	-	-	3,643,245
Penghasilan (beban) lainnya, bersih Other income (expenses) - Net	(38,459)	(215,364)	47,013	(37,414)	66,217	(178,007)
Laba/(rugi) usaha Operating Income (Loss)	748,051	3,296,659	(767,577)	225,281	(275,781)	3,226,633
Pendapatan keuangan Finance Income	356,914	640,383	20,705	7,915	(218,282)	807,635
Biaya keuangan Finance Costs	(259,854)	(1,437,161)	(430,959)	(130,023)	218,282	(2,039,715)
Laba (rugi) kurs, bersih Exchange rate profit (loss), net	(11,092)	180,783	-	(15,663)	(4,378)	149,650
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Profit (Loss) before income tax	834,019	2,680,664	(1,177,831)	87,510	(280,159)	2,144,203
Beban pajak penghasilan Income tax expenses	(6,755)	(221,834)	-	(43,058)	-	(271,647)
Laba/(rugi) tahun berjalan Profit (Loss) for the year	827,264	2,458,830	(1,177,831)	44,452	(280,159)	1,872,556

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha
Table of Business Segment Revenue and Profitability

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	Konstruksi Construction	Badan Usaha Jalan Tol Toll Roads Business Entity	Pengembang Properti Property Developer	Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, and Rest Areas of Toll Road	Eliminasi Elimination	Total Total
Aset Assets						
Aset segmen Segment assets	14,506,117	152,872,735	4,034,665	3,478,108	(5,152,138)	169,739,487
Liabilitas Liabilities						
Liabilitas segmen Segment liabilities	12,683,245	36,317,491	6,943,027	1,775,376	(4,604,165)	53,114,974
Pertumbuhan 2023-2024 (%) Growth of 2023-2024 (%)						
Pendapatan eksternal External Revenue	63.02	1.86	(12.68)	2.97	-	12.35
Pendapatan antar segmen Intersegment Revenue	9.67	-	(100.00)	(0.80)	7.48	-
Jumlah pendapatan Total Revenue	24.31	1.86	(18.03)	0.48	7.48	12.35
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	24.94	(2.74)	(25.97)	(2.72)	10.71	5.74
Laba (rugi) bruto Gross profit (loss)	19.28	224.08	(84.10)	28.23	(126.74)	81.27
Beban penjualan Selling expenses	31.78	18.11	128.36	1162.91	-	232.97
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	32.84	64.77	36.13	(4.93)	4.11	31.44
Beban penurunan nilai piutang Impairment of receivables	(72.39)	(76.24)	(105.52)	27.81	-	(87.82)
Beban penurunan nilai aset real estat Impairment of real estate asset	-	-	(100.00)	-	-	(100.00)
Beban pajak penghasilan final Final tax expenses	28.16	305.00	3.17	(25.00)	-	37.23
Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama Shares of net profit of associates and joint venture	719.45	-	-	(100.00)	-	158.36

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha
Table of Business Segment Revenue and Profitability

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	Konstruksi Construction	Badan Usaha Jalan Tol Toll Roads Business Entity	Pengembang Properti Property Developer	Pabrikasi Aspal dan Beton, Operasi dan Pemeliharaan, dan Rest Area Jalan Tol Hotmix and Precast Manufacture, Operation and Maintenance, and Rest Areas of Toll Road	Eliminasi Elimination	Total Total
Keuntungan dari penjualan hak pengusahaan jalan tol Gain on sale of toll road	-	(100.00)	-	-	-	(100.00)
Penghasilan (beban) lainnya, bersih Other income (expenses) - Net	331.70	(100.06)	(76.09)	(83.73)	(124.49)	(0.59)
Laba/(rugi) usaha Operating Income (Loss)	177.01	(71.53)	(95.89)	66.86	216.18	(23.04)
Pendapatan keuangan Finance Income	(82.00)	240.05	181.88	43.95	(34.58)	168.54
Biaya keuangan Finance Costs	(1.01)	(20.08)	(33.38)	(28.18)	(34.58)	(19.42)
Laba (rugi) kurs, bersih Exchange rate profit (loss), net	(171.86)	(104.18)	-	42.23	(80.63)	(115.18)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Profit (Loss) before income tax	126.28	(26.88)	(122.10)	210.40	211.54	39.25
Beban pajak penghasilan Income tax expenses	79.67	(40.77)	-	63.35	-	(19.29)
Laba/(rugi) tahun berjalan Profit (Loss) for the year	126.66	(25.63)	(77.30)	352.84	210.92	47.74
Aset **Assets**						
Aset segmen Segment assets	25.60	30.66	18.77	7.00	481.41	15.78
Liabilitas **Liabilities**						
Liabilitas segmen Segment liabilities	40.42	27.94	(46.70)	5.35	156.39	9.28

Pendapatan Segmen Usaha

Jumlah pendapatan segmen tahun 2024 sebesar Rp30,25 triliun, meningkat 12,35% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp26,93 triliun. Hal tersebut disebabkan adanya proyek tol Betung-Tempino-Jambi yang baru berjalan di tahun 2024 dengan pendapatan sebesar Rp1,79 triliun serta perkembangan progres pada proyek tol Rengat-Pekanbaru yang memiliki pendapatan sebesar Rp2,38 triliun atau selisih Rp1,95 triliun dibandingkan tahun lalu.

Business Segment Revenue

The total segment revenue in 2024 was Rp30.25 trillion, an increase of 12.35% compared to 2023 which was Rp26.93 trillion. This was due to the Betung-Tempino-Jambi toll road project which was just underway in 2024 with revenue of Rp1.79 trillion and the progress of the Rengat-Pekanbaru toll road project which had revenue of Rp2.38 trillion or a difference of Rp1.95 trillion compared to last year.

Profitabilitas Segmen Usaha

Laba tahun berjalan segmen usaha tahun 2024 sebesar Rp2,76 triliun, meningkat 47,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,87 triliun. Hal tersebut disebabkan adanya proyek tol baru yakni Betung-Tempino-Jambi serta peningkatan kinerja dari HKI yang berdampak pada kenaikan laba secara konsolidasi.

Business Segment Profitability

The profit for the year of the business segment in 2024 was Rp2.76 trillion, an increase of 47.74% compared to 2023 which was Rp1.87 trillion. This was driven by the new toll road project, Betung-Tempino-Jambi, as well as the improved performance of HKI, which contributed to the consolidated profit growth.

Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Penugasan Lain

Proyek Strategis Nasional yang dijalankan oleh Hutama Karya mencakup berbagai inisiatif besar yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia. Sebagai salah satu BUMN terkemuka, Hutama Karya berperan penting dalam mewujudkan proyek-proyek yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

National Strategic Project (PSN) or Other Assignments

The National Strategic Projects undertaken by Hutama Karya encompass major initiatives that have a significant impact on Indonesia's infrastructure development. As one of the leading State-Owned Enterprises (SOEs), Hutama Karya plays a crucial role in implementing projects that enhance interregional connectivity and drive national economic growth.

Tabel Proyek Strategis Nasional
Table of National Strategic Projects

No	Nama Proyek Project Name	Dasar Penugasan Assignment Basis	Deskripsi Proyek Project Description	Progres Fisik (%) Physical Progress (%)
1	Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura (Seksi 2) Kuala Tanjung - Indrapura Toll Road (Section 2)	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan jalan tol Sumatera ruas Kuala Tanjung - Indrapura dengan panjang penanganan 16 Km Construction of the Sumatra toll road, Kuala Tanjung - Indrapura segment, spanning 16 km	100.00
2	Jalan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan (Seksi 3) Tebing Tinggi - Serbelawan Toll Road (Section 3)	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan jalan tol Sumatera ruas Tebing Tinggi - Serbelawan dengan panjang penanganan 30 Km Construction of the Sumatra toll road, Tebing Tinggi - Serbelawan segment, spanning 30 km	100.00
3	Tol Serbelawan Siantar Serbelawan - Siantar Toll Road	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan jalan tol Sumatera ruas Serbelawan - Siantar dengan panjang penanganan 28 Km Construction of the Sumatra toll road, Serbelawan - Siantar segment, spanning 28 km	93.87
4	Irigasi Rentang LMS-02 Rentang LMS-02 Irrigation	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan saluran irigasi primer sepanjang 30 Km Construction of a primary irrigation channel spanning 30 km	97.19

Tabel Proyek Strategis Nasional
Table of National Strategic Projects

No	Nama Proyek Project Name	Dasar Penugasan Assignment Basis	Deskripsi Proyek Project Description	Progres Fisik (%) Physical Progress (%)
5	Irigasi Rentang LSS-01 Rentang LSS-01 Irrigation	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan saluran irigasi sekunder dan normalisasi saluran drainase Construction of a secondary irrigation channel and drainage system normalization	57.92
6	Bendungan Tigadihaji Tigadihaji Dam	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan Maindam Construction of the main dam	73.77
7	Bendungan Maninting Maninting Dam	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan Maindam Construction of the main dam	95.88
8	Bendungan Way Apu Way Apu Dam	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan Spillway dan bangunan fasilitas Construction of the spillway and facility buildings	97.57
9	Bendungan Bolango Ulu Bolango Ulu Dam	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan Maindam Construction of the main dam	85.71
10	Bendungan Karangnongko Karangnongko Dam	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan Spillway dan bangunan fasilitas Construction of the spillway and facility buildings	24.06
11	Spam Kobema Kobema Spam	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pekerjaan jaringan pipa untuk air bersih Pipeline network work for clean water supply	97.53
12	Jakarta Sewerage System Paket 6 Jakarta Sewerage System Package 6	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan jaringan pipa air limbah Construction of wastewater pipeline network	36.63
13	Patimban Access Toll Road Construction Project Package 3 Patimban Access Toll Road Construction Project Package 3	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan jalan tol di Subang untuk Akses ke Pelabuhan Patimban dengan panjang penanganan 5,5 Km Construction of a toll road in Subang to provide access to Patimban Port, spanning 5.5 km	32.32
14	Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 3 Bayung Lencir - Tempino Toll Road Section 3	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan jalan tol Sumatera ruas Bayung Lencir - Tempino dengan panjang penanganan 15 Km Sumatra toll road, Bayung Lencir - Tempino segment, spanning 15 km	100.00
15	Jalan Tol Semarang Demak Semarang - Demak Toll Road	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan jalan tol di Jawa Tengah ruas Semarang - Demak dengan panjang penanganan 1.25 Km Construction of a toll road in Central Java, Semarang - Demak segment, spanning 1.25 km	74.14
16	MRT Fase-203 MRT Phase-203	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan Jalur dan Stasiun MRT pada ruas Stasiun Glodok - Stasiun Kota Construction of MRT track and stations along the Glodok - Kota route	27.30

Tabel Proyek Strategis Nasional
Table of National Strategic Projects

No	Nama Proyek Project Name	Dasar Penugasan Assignment Basis	Deskripsi Proyek Project Description	Progres Fisik (%) Physical Progress (%)
17	Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III (Cileles - Panimbang) Fase 2 Paket 2 Serang - Panimbang Toll Road Section III (Cileles - Panimbang) Phase 2 Package 2	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pembangunan jalan tol di Banten ruas Cileles - Panimbang dengan panjang penanganan 8.2 Km Construction of a toll road in Banten, Cileles - Panimbang segment, spanning 8.2 km	31.15
18	Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Karingau IKN Toll Road Segment Karangjoang - KKT Karingau	Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Law No. 2 of 2022	Pembangunan jalan tol IKN ruas Karangjoang - Kariangao dengan panjang penanganan 9,3 Km Construction of the IKN toll road, Karangjoang - Karingau segment, spanning 9.3 km	99.63
19	Jalan Tol IKN Seksi 3A-2: Segmen Karangjoang - KKT Karingau IKN Toll Road Section 3A-2: Karangjoang - KKT Karingau Segment	Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Law No. 2 of 2022	Pembangunan jalan tol IKN ruas Karangjoang - Kariangao dengan panjang penanganan 4.1 Km Construction of the IKN toll road, Karangjoang - Karingau segment, spanning 4.1 km	85.12
20	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jembatan Pulau Balang - Sp. Riko IKN Freeway Segment Pulau Balang Bridge - Sp. Riko	Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Law No. 2 of 2022	Pembangunan jalan tol IKN ruas Jembatan Pulau Balang - Sp. RIko dengan panjang penanganan 13.275 Km Construction of the IKN toll road, Pulau Balang Bridge - Sp. Riko segment, spanning 13.275 km	54.48
21	Rusun ASN Paket 2 Kawasan IKN ASN Residential Tower Package 2 in IKN Area	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pekerjaan Gedung Building Construction	85.28
22	Proyek Kemenko II IKN Coordinating Ministry II Project in IKN	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pekerjaan Gedung Building Construction	83.84
23	Terminal Bandara VVIP IKN IKN VVIP Airport Terminal	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pekerjaan Bandara Airport construction	98.00
24	Sarana & Prasarana Istana Presiden 2 Presidential Palace Infrastructure & Facilities 2	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pekerjaan Kawasan Istana Presiden Presidential Palace area construction	76.76
25	Masjid IKN IKN Grand Mosque	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pekerjaan Gedung Masjid Negara National mosque building construction	58.54
26	RS Vertikal IKN IKN Vertical Hospital	Permenko No. 7 Tahun 2023 Coordinating Minister Regulation No. 7 of 2023	Pekerjaan Gedung Building Construction	100.00
27	PLTM Harjosari dan Lambur Harjosari and Lambur Mini Hydropower Plants	Perpres No. 3 dan 4 Tahun 2016, Perpres No 56 Tahun 2018 dan Perpres No 14 Tahun 2017 Presidential Decree No. 3 & 4 of 2016, Presidential Decree No. 56 of 2018, and Presidential Decree No. 14 of 2017	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Mini hydro power plant construction	77.58

Tabel Proyek Strategis Nasional
Table of National Strategic Projects

No	Nama Proyek Project Name	Dasar Penugasan Assignment Basis	Deskripsi Proyek Project Description	Progres Fisik (%) Physical Progress (%)
28	PLTGU Muara Tawar Add On 650 MW Muara Tawar 650 MW Gas and Steam Power Plant (PLTGU) Add-On	Perpres No. 3 dan 4 Tahun 2016, Perpres No 56 Tahun 2018 dan Perpres No 14 Tahun 2017 Presidential Decree No. 3 & 4 of 2016, Presidential Decree No. 56 of 2018, and Presidential Decree No. 14 of 2017	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Gas and steam power plant construction	99.16
29	PLTU Suralaya 2x1000 MW Suralaya Coal-Fired Power Plant (PLTU) 2x1000 MW	Perpres No. 3 dan 4 Tahun 2016, Perpres No 56 Tahun 2018 dan Perpres No 14 Tahun 2017 Presidential Decree No. 3 & 4 of 2016, Presidential Decree No. 56 of 2018, and Presidential Decree No. 14 of 2017	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Coal-fired power plant construction	98.58
30	Lawe-Lawe Facilities RDMP RU V Balikpapan Lawe-Lawe Facilities RDMP RU V Balikpapan	Perpres No. 3 Tahun 2016 Presidential Decree No. 3 of 2016,	Pipeline onshore and offshore, Raw Water dan lain-lain. Construction of onshore and offshore pipelines, raw water facilities, and other supporting infrastructure.	84.01
31	Pengembangan Pipa CB-III (Lomanis - Tasikmalaya) CB-III Pipeline Development (Lomanis - Tasikmalaya)	-	Pipeline dari TBBM Lomanis - TBBM Tasikmalaya Construction of a pipeline from TBBM Lomanis to TBBM Tasikmalaya	77.20
32	Open Access RU VII Kasim (Sorong) Open Access RU VII Kasim (Sorong)	Perpres No. 3 Tahun 2016 Presidential Decree No. 3 of 2016,	Pembangunan Tangki Minyak, Jetty dan Pipeline Construction of oil storage tanks, jetty, and pipeline	66.89

Tinjauan Keuangan
Financial Review



Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Hutama Karya (Persero) dan Entitas Anaknya (Grup) serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Hutama Karya terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian yang disajikan sebagai berikut.

The following financial review refers to the Financial Statements for the year ended December 31, 2024, as presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners and have received an unqualified opinion in all material respects regarding the financial position of PT Hutama Karya (Persero) and its subsidiaries (the Group), as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, under Indonesian Financial Accounting Standards.

Financial Performance

Hutama Karya's financial performance consists of the performance of the Consolidated Statement of Financial Position, the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and the Consolidated Statement of Cash Flows, which are presented as follows.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET **ASSET**				
Aset lancar **Current Assets**				
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	36,769,029	39,059,927	(2,290,898)	(5.87)
Piutang usaha Trade Receivables				
Pihak ketiga Third Parties	366,567	414,910	(48,343)	(11.65)
Pihak berelasi Related Parties	690,303	714,461	(24,158)	(3.38)
Piutang ventura bersama Receivables from Joint Venture	130,206	86,348	43,858	50.79
Piutang retensi Retention Receivables				
Pihak ketiga Third Parties	93,623	61,981	31,642	51.05
Pihak berelasi Related Parties	85,199	129,785	(44,486)	(34.35)
Tagihan bruto kepada pemberi kerja **Gross Amount Due from Customers**				
Pihak ketiga Third Parties	523,881	674,124	(150,243)	(22.29)
Pihak berelasi Related Parties	2,890,180	1,867,030	1,023,150	54.80
Piutang lain-lain **Other Receivables**				
Pihak ketiga Third Parties	5,368,107	76,807	5,291,300	6889.09
Pihak berelasi Related Parties	132,726	64,305	68,421	106.40
Persediaan Inventories	360,019	495,274	(135,255)	(27.31)
Aset real estat Real Estate Assets	622,367	670,525	(48,158)	(7.18)
Uang muka dan beban dibayar dimuka Advances and Prepayments	438,616	350,128	88,488	25.27
Pajak dibayar dimuka **Prepaid Taxes**				
Pajak penghasilan Corporate Income Taxes	-	16,057	(16,057)	(100.00)
Pajak lain-lain Other Taxes	694,479	1,565,098	(870,619)	(55.63)
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted Cash	7,292,670	3,364,613	3,928,057	116.75
Aset keuangan lain-lain Other Financial Assets	-	2,962	(2,962)	(100.00)
Jumlah aset lancar Total Current Assets	56,457,972	49,614,335	6,843,637	13.79

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset tidak lancar **Non-Current Assets**				
Piutang lain-lain Other Receivables				
Pihak ketiga Third Parties	662,506	5,545,128	(4,882,622)	(88.05)
Pihak berelasi Related Parties	3,642	-	3,642	100.00
Piutang retensi **Retention Receivables**				
Pihak ketiga Third Parties	47,856	49,196	(1,340)	(2.72)
Pihak berelasi Related Parties	136,604	47,458	89,146	187.84
Uang muka dan beban dibayar dimuka Advances and Prepayments	984,944	780,065	204,879	26.26
Pajak dibayar dimuka jangka panjang **Long-Term Prepaid Taxes**				
Pajak penghasilan Corporate Income Taxes	78,289	82,155	(3,866)	(4.71)
Pajak lain-lain Other Taxes	2,010,539	643,060	1,367,479	212.65
Bagian tidak lancar dari aset real estat Non-Current Portion of Real Estate Assets	1,067,899	953,928	113,971	11.95
Properti investasi Investment Properties	259,554	229,367	30,187	13.16
Investasi pada entitas asosiasi Investments in Associates	45,893	45,893	-	-
Investasi pada ventura bersama Investments in Joint Ventures	632,713	259,885	372,828	143.46
Aset tetap Fixed Assets	3,319,839	3,460,096	(140,257)	(4.05)
Aset tak berwujud **Intangible Assets**				
Hak pengusahaan jalan tol Toll Road Concession Rights	127,111,601	107,731,985	19,379,616	17.99
Lain-lain Others	29,718	25,001	4,717	18.87
Aset keuangan - hak pengusahaan jalan tol Financial Assets - Toll Road Concession Rights	2,865,228	-	2,865,228	100.00
Goodwill Goodwill	116,743	116,743	-	-
Aset pajak tangguhan Deferred Tax Assets	43,492	17,291	26,201	151.53
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted Cash	37,025	25,839	(11,186)	43.29
Aset keuangan lain-lain Other Financial Assets	73,422	65,225	8,197	12.57

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset tidak lancar lain-lain Other Non-Current Assets	56,984	46,837	10,147	21.66
Jumlah aset tidak lancar Total Non-Current Assets	139,584,491	120,125,152	19,486,292	16.20
Jumlah aset Total Assets	196,042,463	169,739,487	26,302,976	15.50
Liabilitas **Liabilities**				
Liabilitas jangka pendek **Current Liabilities**				
Utang usaha **Trade Payables**				
Pihak ketiga Third Parties	10,105,074	8,943,727	1,161,347	12.99
Pihak berelasi Related Parties	1,316,922	2,249,416	(932,494)	(41.45)
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	5,921,908	3,454,956	2,466,952	71.40
Utang lain-lain Other Payables				
Pihak ketiga Third Parties	311,542	212,142	99,400	46.86
Pihak berelasi Related Parties	2,719,537	18	2,719,519	15,108,438.89
Utang retensi Retention Payables				
Pihak ketiga Third Parties	218,960	113,404	105,556	93.08
Pihak berelasi Related Parties	149,051	181,475	(32,424)	(17.87)
Utang pajak Tax Payables				
Pajak penghasilan Corporate Income Taxes	88,113	24,344	63,769	261.95
Pajak lain-lain Other Taxes	600,929	427,210	173,719	40.66
Uang muka kontrak jangka pendek Short-term contract advances	405,123	680,818	(275,695)	(40.49)
Akrual dan provisi Accruals and provisions	3,865,774	3,027,446	838,328	27.69
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang: **Current maturities of long-term loans:**				
Non-bank Non-bank	40,000	40,000	-	-
Medium Term Notes Medium Term Notes	-	1,475,000	(1,475,000)	(100.00)
Utang obligasi Bonds payable	81,000	33,445	47,555	142.19
Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah	138,250	16,474	121,776	739.20

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas sewa Lease liabilities	54,566	46,786	7,780	16.63
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits obligations	389,420	317,517	71,903	22.65
Bagian lancar atas pendapatan ditangguhkan Current portion of deferred revenue	-	575,843	(575,843)	(100.00)
Jumlah liabilitas jangka pendek Total current liabilities	26,406,169	21,820,021	4,586,148	21.02
Liabilitas jangka panjang **Long-term liabilities**				
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Long-term loans – net of current maturities:				
Bank Bank	11,106,392	11,083,452	22,940	0.21
Non-bank Non-bank	686,326	908,184	(221,858)	(24.43)
Medium Term Notes Medium Term Notes	9,649,315	9,195,353	453,962	4.94
Utang obligasi Bonds payable	7,213,920	7,292,677	(78,757)	(1.08)
Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah	656,214	793,627	(137,413)	(17.31)
Liabilitas sewa Lease liabilities	116,494	141,272	(24,778)	(10.89)
Uang muka kontrak jangka panjang Long-term contract advances	121,136	109,238	(11,898)	(10.89)
Akrual dan provisi Accruals and provisions	449,415	478,435	(29,020)	(6.07)
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits obligations	164,523	71,551	92,972	129.94
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	698,646	532,644	166,002	31.17
Utang tidak lancar lain-lain **Other non-current liabilities**				
Pihak ketiga Third Parties	12,456	13,198	(742)	(5.62)
Pihak berelasi Related Parties	1,027	1,027	-	-
Utang retensi **Retention payables:**				
Pihak ketiga Third Parties	478,613	433,470	45,143	10.41
Pihak berelasi Related Parties	281,366	240,825	40,541	16.83
Jumlah liabilitas jangka panjang Total long-term liabilities	31,635,843	31,294,953	340,890	1.09
Jumlah liabilitas Total liabilities	58,042,012	53,114,974	4,927,038	9.28

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Ekuitas **Equity**				
Modal saham Share capital	131,646,000	113,042,000	18,604,000	16.46
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	44,037	44,037	-	-
Cadangan revaluasi aset tetap Fixed assets revaluation reserve	740,784	740,784	-	-
Saldo laba/(akumulasi rugi) **Retained earnings/(accumulated deficit)**				
Dicadangkan Appropriated	5,619,215	5,619,215	-	-
Belum dicadangkan Unappropriated	(995,205)	(3,731,874)	2,736,669	(73.33)
Ekuitas yang dapat diatribusikan **Equity attributable to**				
Ekuitas yang dapat diatribusikankepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent	137,054,831	115,714,162	21,340,669	18.44
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	945,620	910,351	35,269	3.87
Jumlah ekuitas Total equity	138,000,451	116,624,513	21,375,938	18.33
Jumlah liabilitas dan ekuitas Total liabilities and equity	196,042,463	169,739,487	26,302,976	15.50

Aset

Aset tahun 2024 sebesar Rp196,04 triliun, meningkat 15,50% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp169,74 triliun. Hal tersebut didominasi oleh beberapa kenaikan pada kas yang dibatasi penggunaannya, pajak dibayar dimuka lain-lain, aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol dan aset keuangan jangka panjang - hak konsesi.

Assets

The total assets in 2024 amounted to Rp196.04 trillion, marking a 15.50% increase compared to Rp169.74 trillion in 2023. This increase was mainly driven by several components, including restricted cash, prepaid taxes, others, intangible assets – toll road concession rights, and long-term financial assets – concession rights.

Aset Lancar

Aset lancar tahun 2024 sebesar Rp56,46 triliun, meningkat 13,79% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp49,61 triliun. Hal tersebut didominasi oleh kenaikan atas piutang lain-lain yakni adanya reklas dari jangka panjang ke jangka pendek oleh PT Swarna Investasi Indonesia (INA) atas jatuh tempo penerimaan penjualan hak konsesi jalan tol ruas Bakauheni - Terbanggi Besar dan Medan - Binjai yang terjadi pada tahun 2023. Selain itu, kas yang dibatasi penggunaannya atas penambahan pada pinjaman bank.

Current Assets

Current assets in 2024 amounted to Rp56.46 trillion, an increase of 13.79% compared to Rp49.61 trillion in 2023. This was primarily driven by an increase in other receivables due to a reclassification from long-term to short-term by PT Swarna Investasi Indonesia (INA) related to the maturity of proceeds from the sale of toll road concession rights for the Bakauheni–Terbanggi Besar and Medan–Binjai sections, which occurred in 2023. In addition, there was an increase in restricted cash due to additional bank loans.

Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas tahun 2024 sebesar Rp36,77 triliun, menurun 5,87% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp39,06 triliun. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan PMN TA 2024 sebesar Rp18,6 triliun yang diterima pada bulan April 2024.

Piutang Usaha
Piutang usaha tahun 2024 sebesar Rp1,06 triliun, menurun 6,42% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,13 triliun. Hal tersebut disebabkan pada piutang usaha bersih pihak berelasi menurun sebesar 3,38% dari Rp714,47 miliar di tahun 2023 menjadi Rp690,30 miliar dan piutang usaha bersih pihak ketiga menurun sebesar 11,65% dari Rp414,91 miliar di tahun 2023 menjadi Rp366,56 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penerimaan pada tahun 2024.

Piutang Ventura Bersama
Piutang ventura bersama tahun 2024 sebesar Rp130,20 miliar, meningkat 50,79% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp86,35 miliar. Hal ini disebabkan penambahan proyek yang dikerjaan Perseroan oleh KSO.

Piutang retensi
Piutang retensi tahun 2024 sebesar Rp178,82 miliar, menurun 6,75% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp191,77 miliar. Hal tersebut disebabkan pada piutang retensi pihak berelasi menurun sebesar 34,35% menjadi Rp85,20 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp129,79 miliar, sedangkan piutang retensi pihak ketiga meningkat sebesar 51,05% menjadi Rp93,62 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp61,99 miliar.

Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja
Tagihan bruto kepada pemberi kerja tahun 2024 sebesar Rp3,41 triliun, meningkat 34,35% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,54 triliun. Hal tersebut disebabkan adanya reklasifikasi dari tagihan bruto jangka pendek ke jangka panjang atas Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) ruas tol Betung - Jambi sebesar Rp2,7 triliun.

Piutang Lain-Lain
Piutang lain-lain tahun 2024 sebesar Rp5,50 triliun, meningkat 3.798,20% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp141,11 miliar. Hal tersebut disebabkan adanya reklasifikasi piutang lain - lain jangka panjang ke jangka pendek atas penjualan ruas tol JTTS kepada INA sebesar Rp5,5 triliun yang rencananya akan dibayarkan bulan Juni 2025.

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents in 2024 amounted to Rp36.77 trillion, a decrease of 5.87% compared to Rp39.06 trillion in 2023. This decline was due to the addition of state capital participation (PMN) for the 2024 fiscal year amounting to Rp18.6 trillion, which was received in April 2024.

Trade Receivables
Trade receivables in 2024 amounted to Rp1.06 trillion, a decrease of 6.42% compared to Rp1.13 trillion in 2023. This decline was due to a 3.38% decrease in net trade receivables from related parties, from Rp714.47 billion in 2023 to Rp690.30 billion, and an 11.65% decrease in net trade receivables from third parties, from Rp414.91 billion in 2023 to Rp366.56 billion. The decrease was due to receipts in 2024.

Receivables from Joint Venture
Receivables from joint venture in 2024 amounted to Rp130.20 billion, an increase of 50.79% compared to Rp86.35 billion in 2023. This increase was due to the addition of projects undertaken by the Company through the Joint Operation (KSO).

Retention Receivables
Retention receivables in 2024 amounted to Rp178.82 billion, a decrease of 6.75% compared to Rp191.77 billion in 2023. This decline was due to a 34.35% decrease in retention receivables from related parties, from Rp129.79 billion in 2023 to Rp85.20 billion, while retention receivables from third parties increa

Gross Amount Due from Customers
Gross Amount Due from Customers in 2024 amounted to Rp3.41 trillion, an increase of 34.35% compared to Rp2.54 trillion in 2023. This was due to the reclassification of short-term gross receivables to long-term for service-based periodic payments (PBBL) of the Betung-Jambi toll road, amounting to Rp2.7 trillion.

Other Receivables
Other receivables in 2024 amounted to Rp5.50 trillion, an increase of 3,798.20% compared to Rp141.11 billion in 2023. This was due to the reclassification of long-term other receivables to short-term for the sale of JTTS toll road sections to ina, amounting to Rp5.5 trillion, which is planned to be paid in June 2025.

Persediaan
Persedian Hutama Karya berupa bahan baku, barang jadi, dan bahan pembantu, serta barang dalam proses. Persediaan tahun 2024 sebesar Rp360,01 miliar, menurun 27,31% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp495,27 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan persediaan dari barang jadi disebabkan oleh pemakaian selama tahun 2024.

Inventory
Hutama Karya's inventories consist of raw materials, finished goods, auxiliary materials, and work-in-progress items. Inventory in 2024 amounted to Rp360.01 billion, a decrease of 27.31% compared to Rp495.27 billion in 2023. This decline was primarily due to an increase in finished goods inventory due to usage throughout 2024.

Aset Real Estat
Aset real estat tahun 2024 sebesar Rp622,36 miliar, menurun 7,18% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp670,53 miliar. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan provisi yang di-net off terhadap harga pokok pendapatan pada apartemen seperti H Residence Kemayoran dan H Tower Kuningan.

Real Estate Assets
Real estate assets in 2024 amounted to Rp622.36 billion, a decrease of 7.18% compared to Rp670.53 billion in 2023. This decrease was due to the addition of provisions that were net off against the cost of revenue for apartment projects such as H Residence Kemayoran and H Tower Kuningan.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka
Uang muka dan beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp438,61 miliar, meningkat 25,27% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp350,13 miliar. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan penambahan asuransi yang dibayarkan pada proyek Betung - Tempino - Jambi dan Palembang - Betung dari HKI.

Advances and Prepayment
Advances and prepayment in 2024 amounted to Rp438.61 billion, an increase of 25.27% compared to Rp350.13 billion in 2023. This increase was driven by additional insurance payments made for the Betung–Tempino–Jambi and Palembang–Betung projects from HKI.

Pajak Dibayar Dimuka
Pajak dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp694,48 miliar, menurun 56,08% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,58 triliun. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya restitusi pajak yang telah disetorkan di tahun 2024 atas restitusi pajak penambahan nilai (PPN) tahun 2023 dan 2022.

Prepaid Taxes
Prepaid taxes in 2024 amounted to Rp694.48 billion, a decrease of 56.08% compared to Rp1.58 trillion in 2023. This decrease was due to tax restitution submitted in 2024 related to Value Added Tax (VAT) restitution for the years 2023 and 2022.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2024 sebesar Rp7,30 triliun, meningkat 116,75% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,37 triliun. Hal tersebut karena adanya penarikan pinjaman pinjaman jangka pendek yang dilakukan oleh HK sehingga mewajibkan untuk menempatkan kas yang dibatasi penggunaannya.

Restricted Cash
Restricted cash in 2024 amounted to Rp7.30 trillion, an increase of 116.75% compared to Rp3.37 trillion in 2023. This increase was due to the withdrawal of short-term loans by HK, which required the placement of restricted cash.

Aset Keuangan Lain-Lain
Aset keuangan lain-lain tahun 2024 sebesar Rp0 miliar, menurun 100,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,96 miliar. Hal tersebut karena adanya reklas akun ke kas yang dibatasi penggunaannya.

Other Financial Assets
Other financial assets in 2024 amounted to Rp0 billion, a decrease of 100.00% compared to Rp2.96 billion in 2023. This was due to a reclassification of the account to restricted cash.

Aset Tidak Lancar
Aset tidak lancar tahun 2024 sebesar Rp139,59 triliun, meningkat 16,20% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp120,13 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan aset takberwujud dari hak penguasaan jalan tol.

Non-Current Assets
Non-current assets in 2024 amounted to Rp139.59 trillion, an increase of 16.20% compared to Rp120.13 trillion in 2023. This increase was primarily driven by the growth of intangible assets from toll road concession rights.

Piutang Lain-Lain
Piutang lain-lain tahun 2024 sebesar Rp666,15 miliar, menurun 87,99% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,55 triliun. Hal tersebut disebabkan karena penyesuaian jangka waktu dari piutang lain-lain yang semula piutang lain-lain tidak lancar menjadi piutang lain-lain lancar.

Piutang Retensi
Piutang retensi tahun 2024 sebesar Rp184,46 miliar, meningkat 90,85% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp96,65 miliar. Hal tersebut disebabkan pada piutang retensi pihak berelasi dari sebelumnya Rp47,45 miliar menjadi Rp136,60 miliar dan pihak ketiga dari sebelumnya Rp49,20 miliar menjadi Rp47,86 miliar.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka
Uang muka dan beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp984,94 miliar, meningkat 26,26% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp780,06 miliar. Peningkatan ini seiring dengan progres pekerjaan.

Pajak Dibayar Dimuka Jangka Panjang
Pajak dibayar dimuka jangka panjang tahun 2024 sebesar Rp2,09 triliun, meningkat 188,03% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp725,21 miliar yang berupa pajak penghasilan turun menjadi Rp78,29 miliar dan pajak lain-lain naik sebesar Rp2,01 triliun.

Bagian Tidak Lancar dari Aset Real Estat
Bagian tidak lancar dari aset real estat tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun, meningkat 11,95% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp953,93 miliar. Peningkatan ini seiring dengan progres pekerjaan yang sedang berlangsung.

Properti Investasi
Properti investasi tahun 2024 sebesar Rp259,55 miliar, meningkat 13,16% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp229,37 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan properti dari tanah di Simatupang.

Investasi Pada Entitas Asosiasi
Investasi pada entitas asosiasi tahun 2024 sebesar Rp45,89 miliar, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp45,89 miliar.

Investasi Pada Ventura Bersama
Investasi pada ventura bersama merupakan bagian kontrak pengaturan atau pengendalian bersama Perusahaan dan entitas anak pada berbagai proyek dengan kisaran bagi hasil aset neto antara 20% sampai dengan 80%. Secara kumulatif, nilai investasi pada ventura bersama tahun 2024 sebesar

Other Receivables
Other receivables in 2024 amounted to Rp666.15 billion, a decrease of 87.99% compared to Rp5.55 trillion in 2023. This decline was due to the adjustment of the maturity period, reclassifying non-current other receivables to current other receivables.

Retention Receivables
Retention receivables in 2024 amounted to Rp184.46 billion, an increase of 90.85% compared to Rp96.65 billion in 2023. This growth was due to an increase in retention receivables from related parties, rising from Rp47.45 billion to Rp136.60 billion, while retention receivables from third parties slightly declined from Rp49.20 billion to Rp47.86 billion.

Advances and Prepayment
Advances and prepayment in 2024 amounted to Rp984.94 billion, an increase of 26.26% compared to Rp780.06 billion in 2023. This increase was in line with project progress.

Long-Term Prepaid Taxes
In 2024, long-term prepaid taxes amounted to Rp2.09 trillion, an increase of 188.03% compared to 2023, which stood at Rp725.21 billion. This consisted of a decrease in income tax to Rp78.29 billion and an increase in other taxes to Rp2.01 trillion.

Non-Current Portion of Real Estate Assets
The non-current portion of real estate assets in 2024 amounted to Rp1.07 trillion, an increase of 11.95% compared to Rp953.93 billion in 2023. This increase was in line with the progress of ongoing projects.

Investment Properties
Investment properties in 2024 amounted to Rp259.55 billion, an increase of 13.16% compared to Rp229.37 billion in 2023. This increase was driven by the acquisition of land property in Simatupang.

Investment In Associates
Investment in associates in 2024 amounted to Rp45.89 billion, remaining unchanged from Rp45.89 billion in 2023.

Investment In Joint Ventures
Investment in joint ventures represents contractual or jointly controlled agreements between the Company and its subsidiaries for various projects, with a net asset profit-sharing range between 20% and 80%. Cumulatively, the investment in joint ventures in 2024 amounted to Rp632.71 billion, an

Rp632,71 miliar, meningkat 143,46% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp259,89 miliar.

Aset Tetap
Aset tetap tahun 2024 sebesar Rp3,31 triliun, menurun 4,05% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,46 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan aset hak guna dai kendaraan serta mesin dan peralatan berat.

Aset Takberwujud
Aset hak pengusahaan jalan tol merupakan hak konsesi yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan, melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Perseroan dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) berupa pengusahaan jalan tol dengan masa konsesi antara 36 sampai 50 tahun. Aset takberwujud tahun 2024 sebesar Rp127,14 triliun, meningkat 17,99% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp107,76 triliun.

Goodwill
Goodwill tahun 2024 sebesar Rp116,74 miliar, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp116,74 miliar.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan tahun 2024 sebesar Rp43,50 miliar, meningkat 151,53% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp17,29 miliar. Hal tersebut karena adanya penambahan terhadap aset pajak tangguhan dari HKA, HKR dan HKI.

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya
Kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2024 sebesar Rp37,02 miliar, meningkat 43,29% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp25,84 miliar. Hal tersebut karena adanya penarikan pinjaman pinjaman jangka panjang yang dilakukan oleh HK sehingga mewajibkan untuk menempatkan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Keuangan Lain-Lain
Aset keuangan lain-lain tahun 2024 sebesar Rp73,42 miliar, meningkat 12,57% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp65,23 miliar. Hal tersebut karena adanya penambahan *capital injection* dan reklas investasi kerjasama operasi.

Aset Tidak Lancar Lain-Lain
Aset tidak lancar lain-lain tahun 2024 sebesar Rp56,99 miliar, meningkat 21,66% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp46,84 miliar.

Liabilitas
Liabilitas tahun 2024 sebesar Rp58,04 triliun, meningkat 9,28% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp53,11 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan liabilitas jangka pendek dari utang lain-lain serta pinjaman jangka pendek pada tahun 2024.

increase of 143.46% compared to Rp259.89 billion in 2023.

Fixed Assets
Fixed assets in 2024 amounted to Rp3.31 trillion, a decrease of 4.05% compared to Rp3.46 trillion in 2023. This increase was primarily due to additional right-of-use assets for vehicles as well as heavy machinery and equipment.

Intangible Assets
Toll road concession rights are concessions granted by the Government of the Republic of Indonesia to the Company through a Toll Road Concession Agreement (PPJT) between the Company and the Toll Road Regulatory Agency (BPJT), allowing the Company to operate toll roads for concession periods ranging from 36 to 50 years. Intangible assets in 2024 amounted to Rp127.14 trillion, an increase of 17.99% compared to Rp107.76 trillion in 2023.

Goodwill
Goodwill in 2024 amounted to Rp116.74 billion, remaining unchanged from Rp116.74 billion in 2023.

Deferred Tax Assets
Deferred tax assets in 2024 amounted to Rp43.50 billion, an increase of 151.53% compared to Rp17.29 billion in 2023. This increase was due to the addition of deferred tax assets from HKA, HKR, and HKI.

Restricted Cash
Restricted cash in 2024 amounted to Rp37.02 billion, an increase of 43.29% compared to Rp25.84 billion in 2023. This increase was attributable to the withdrawal of long-term loans by HK, which required the placement of restricted cash.

Other Financial Assets
Other financial assets in 2024 amounted to Rp73.42 billion, an increase of 12.57% compared to Rp65.23 billion in 2023. This increase was due to additional capital injections and the reclassification of joint operation investments.

Other Non-Current Assets
Other non-current assets in 2024 amounted to Rp56.99 billion, an increase of 21.66% compared with 2023 which amounted to Rp46.84 billion.

Liabilities
Liabilities in 2024 amounted to Rp58.04 trillion, an increase of 9.28% compared to Rp53.11 trillion in 2023. This increase was driven by the growth of current liabilities from other payables and short-term loans in 2024.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek tahun 2024 sebesar Rp26,41 triliun, meningkat 21,02% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp21,82 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan liabilitas dari utang lain-lain.

Utang Usaha

Sejalan dengan ekspansi bisnis Perseroan, Hutama Karya membukukan peningkatan utang usaha tahun 2024 sebesar Rp11,42 triliun, meningkat 2,04% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp11,19 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan utang usaha pihak ketiga dari pemasok.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek tahun 2024 sebesar Rp5,92 triliun, meningkat 71,40% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,45 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari adanya pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2024.

Utang Lain-Lain

Utang lain-lain tahun 2024 sebesar Rp3,03 triliun, meningkat 1.329% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp212 miliar. Peningkatan secara signifikan tersebut terjadi karena adanya pengambilalihan hak konsesi atas ruas tol Palembang – Betung milik Waskita sebesar Rp2,7 triliun.

Utang Retensi

Hutama Karya membukukan Utang retensi tahun 2024 sebesar Rp368,01 miliar, meningkat 24,80% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp294,88 miliar. Hal tersebut seiring dengan peningkatan utang retensi pada pihak berelasi turun sebesar 17,87% dan pihak ketiga naik sebesar 93,08%.

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2024 sebesar Rp689,04 miliar, meningkat 52,59% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp451,55 miliar.

Uang Muka Kontrak Jangka Pendek

Uang muka kontrak jangka pendek tahun 2024 sebesar Rp405,12 miliar, menurun 40,49% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp680,82 miliar. Hal tersebut seiring dengan progres pekerjaan di tahun berjalan.

Akrual dan Provisi

Akrual dan provisi tahun 2024 sebesar Rp3,87 triliun, meningkat 27,69% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,03 triliun. Hal

Current Liabilities

Current liabilities in 2024 amounted to Rp26.41 trillion, an increase of 21.02% compared to Rp21.82 trillion in 2023. This increase was primarily due to the rise in other payables.

Trade Payables

In line with the Company's business expansion, Hutama Karya recorded an increase in trade payables in 2024, amounting to Rp11.42 trillion, up 2.04% from Rp11.19 trillion in 2023. This increase was mainly due to higher trade payables to third-party suppliers.

Short-Term Loans

Short-term loans in 2024 amounted to Rp5.92 trillion, an increase of 71.40% compared to Rp3.45 trillion in 2023. This increase was primarily due to bank loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in 2024.

Other Payables

In 2024, other payables amounted to Rp3.03 trillion, a significant increase of 1,329% compared to 2023, which stood at Rp212 billion. This sharp increase was mainly due to the acquisition of the concession rights for the Palembang–Betung toll road segment from Waskita, amounting to Rp2.7 trillion.

Retention Payables

In 2024, Hutama Karya recorded retention payables of Rp368.01 billion, an increase of 24.80% compared to 2023, which stood at Rp294.88 billion. This was in line with a decrease in retention payables to related parties by 17.87% and an increase to third parties by 93.08%.

Tax Payable

In 2024, tax payables amounted to Rp689.04 billion, an increase of 52.59% compared to 2023, which stood at Rp451.55 billion.

Short-Term Contract Advances

Short-term contract advances in 2024 amounted to Rp405.12 billion, a decrease of 40.49% compared to Rp680.82 billion in 2023. This decline was in line with project progress during the year.

Accruals and Provisions

Accruals and provisions in 2024 amounted to Rp3.87 trillion, an increase of 27.69% compared to Rp3.03 trillion in 2023. This increase was due to

tersebut karena ada kenaikan provisi di proyek EPC, provisi pajak dan akrual pajak di proyek Jalan Tol.

Bagian Lancar atas Pinjaman Jangka Panjang
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang tahun 2024 sebesar Rp313,82 miliar, menurun 80.53% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,61 triliun. Hal tersebut disebabkan MTN sudah tidak ada di tahun 2024

Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Pendek
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek tahun 2024 sebesar Rp389,42 miliar, meningkat 22,65% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp317,52 miliar.

Bagian Lancar atas Pendapatan Ditangguhkan
Pada tahun 2024, tidak terdapat bagian lancar atas pendapatan yang ditangguhkan, yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp575,84 miliar. Hal tersebut seiring dengan target progres konstruksi selama satu tahun.

Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang tahun 2024 sebesar Rp31,64 triliun, meningkat 1,09% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp31,29 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan pinjaman jangka panjang dari *Medium Term Notes.*

Pinjaman Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun tahun 2024 sebesar Rp29,43 triliun, meningkat 0,05% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp29,41 triliun.

Uang Muka Kontrak Jangka Panjang
Uang muka kontrak jangka panjang tahun 2024 sebesar Rp121,13 miliar, menurun 10,89% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp109,24 miliar. Penurunan tersebut disebabkan turunnya uang muka kontrak dari pihak ketiga.

Akrual dan Provisi
Akrual dan provisi tahun 2024 sebesar Rp449,41 miliar, menurun 6,07% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp478,44 miliar. Penurunan tersebut disebabkan turunnya provisi atas klaim bank garansi.

Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang tahun 2024 sebesar Rp164,52 miliar, meningkat 129,94% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp71,55 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan akrual imbalan kerja.

higher provisions in EPC projects, tax provisions, and tax accruals in toll road projects.

Current Portion of Long-Term Loans
The current maturities of long-term loans in 2024 amounted to Rp313.82 billion, a decrease of 80.53% compared to Rp1.61 trillion in 2023. This was due to the absence of MTN in 2024.

Short-Term Employee Benefits Obligations
Short-term employee benefits obligations in 2024 amounted to Rp389.42 billion, an increase of 22.65% compared to Rp317.52 billion in 2023.

Current Portion of Deferred Revenue
In 2024, there was no current portion of deferred revenue, a decrease compared to Rp575.84 billion recorded in 2023. This change was in line with the targeted construction progress over the year.

Long-Term Liabilities
Long-term liabilities in 2024 amounted to Rp31.64 trillion, an increase of 1.09% compared to Rp31.29 trillion in 2023. This increase was driven by higher long-term loans from Medium Term Notes.

Long-Term Loans – Net of Current Maturities

Long-term loans – net of current maturities in 2024 amounted to Rp29.43 trillion, an increase of 0.05% compared to Rp29.41 trillion in 2023. This increase was due to additional long-term loans from Medium Term Notes.

Long-Term Contract Advances
Long-term contract advances in 2024 amounted to Rp121.13 billion, a decrease of 10.89% compared to Rp109.24 billion in 2023. This decline was due to a reduction in contract advances from third parties.

Accruals And Provisions
Accruals and provisions in 2024 amounted to Rp449.41 billion, a decrease of 6.07% compared to Rp478.44 billion in 2023. This decline was primarily due to a reduction in provisions for bank guarantee claims.

Long-Term Employee Benefits Obligations
Long-term employee benefits obligations in 2024 amounted to Rp164.52 billion, an increase of 129.94% compared to Rp71.55 billion in 2023. This increase was mainly due to higher accrued employee benefits.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan tahun 2024 sebesar Rp698,64 miliar, meningkat 31,17% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp532,64 miliar. This increase was due to several JTTS segments officially commencing operations with toll rates in 2024, resulting in higher amortization calculations that impacted the income tax payable.

Utang Tidak Lancar Lain-Lain

Utang tidak lancar lain-lain tahun 2024 sebesar Rp13,50 miliar, menurun 5,22% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp14,22 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya utang tidak lancar lain-lain dari pihak ketiga.

Utang Retensi

Utang retensi tahun 2024 sebesar Rp759,98 miliar, meningkat 12,71% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp674,30 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan utang retensi dari pihak ketiga.

Ekuitas

Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp138,00 triliun, meningkat 18,33% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp116,63 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Modal Saham

Modal saham tahun 2024 sebesar Rp131,64 triliun, meningkat 16,46% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp113,04 triliun. Hal tersebut disebabkan karena ada penambahan PMN TA 2024 sebesar Rp18,6 triliun yang diterima pada bulan April 2024.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor tahun 2024 sebesar Rp44,04 miliar, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp44,04 miliar.

Cadangan Revaluasi Aset Tetap

Cadangan revaluasi aset tetap tahun 2024 sebesar Rp740,78 miliar, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp740,78 miliar.

Saldo Laba/(Akumulasi Rugi)

Saldo laba/(akumulasi rugi) tahun 2024 sebesar Rp4,62 triliun, meningkat 145,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,89 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan

Ekuitas yang dapat diatribusikan tahun 2024 sebesar Rp138,00 triliun, meningkat 18,33% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp116,63 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liabilities in 2024 amounted to Rp698.64 billion, an increase of 31.17% compared to Rp532.64 billion in 2023. Hal tersebut karena terdapat beberapa ruas JTTS yang telah resmi beroperasi dengan tarif pada tahun 2024 sehingga terdapat kenaikan perhitungan amortisasi yang berdampak pajak terutangnya.

Other Non-Current Liabilities

Other non-current liabilities in 2024 amounted to Rp13.50 billion, a decrease of 5.22% compared to Rp14.22 billion in 2023. This decline was primarily due to a reduction in other non-current liabilities from third parties.

Retention Payables

Retention payables in 2024 amounted to Rp759.98 billion, an increase of 12.71% compared to Rp674.30 billion in 2023. This increase was mainly due to higher retention payables from third parties.

Equity

Equity in 2024 amounted to Rp138.00 trillion, an increase of 18.33% compared to Rp116.63 trillion in 2023. This growth was driven by an increase in the profit for the year.

Share Capital

Share capital in 2024 amounted to Rp131.64 trillion, an increase of 16.46% compared to Rp113.04 trillion in 2023. This increase was due to the additional State Capital Injection (PMN) of Rp18.6 trillion received in April 2024.

Additional Paid-In Capital

Additional paid-in capital in 2024 amounted to Rp44.04 billion, unchanged from Rp44.04 billion in 2023.

Revaluation Surplus of Fixed Assets

The revaluation surplus of fixed assets in 2024 amounted to Rp740.78 billion, unchanged from Rp740.78 billion in 2023.

Retained Earnings/(Accumulated Deficit)

Retained earnings/(accumulated losses) in 2024 amounted to Rp4.62 trillion, an increase of 145.00% compared to Rp1.89 trillion in 2023. This increase was driven by higher net profit for the year.

Attributable Equity

Attributable equity in 2024 amounted to Rp138.00 trillion, an increase of 18.33% compared to Rp116.63 trillion in 2023. This was due to the increase in profit for the year.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Revenue	30,252,293	26,926,321	3,325,972	12.35
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(25,978,271)	(24,568,527)	(1,409,744)	5.74
Laba bruto Gross profit	4,274,022	2,357,794	1,916,228	81.27
Beban penjualan Selling expenses	(39,940)	(11,995)	(27,945)	232.97
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	(1,221,718)	(929,515)	(292,203)	31.44
Beban penurunan nilai piutang Impairment of Receivables	(142,147)	(1,167,263)	1,025,116	(87.82)
Beban pajak penghasilan final Final Tax Expense	(662,452)	(482,744)	(179,708)	37.23
Beban penurunan nilai aset real estat Impairment of Real Estate Assets	-	(180,000)	180,000	(100.00)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share of Net Profit of Associates and Joint Ventures	452,433	175,118	277,315	158.36
Keuntungan dari penjualan hak pengusahaan jalan tol Gain on Sale of Toll Road Concession Rights	-	3,643,245	(3,643,245)	(100.00)
Beban lain-lain, bersih Other Expenses, Net	(176,955)	(178,007)	1,052	(0.59)
Laba usaha Operating Income	2,483,243	3,226,633	(743,390)	(23.04)
Penghasilan keuangan Finance Income	2,168,801	807,635	1,361,166	168.54
Biaya keuangan Finance Costs	(1,643,551)	(2,039,715)	396,164	(19.42)
(Kerugian)/keuntungan dari selisih kurs, bersih (Loss)/gain from foreign exchange differences, net	(22,714)	149,650	(172,364)	(115.18)
Laba sebelum pajak penghasilan Profit Before Income Tax	2,985,779	2,144,203	841,576	39.25
Beban pajak penghasilan Income Tax Expense	(219,257)	(271,647)	52,390	(19.29)
Laba tahun berjalan Profit for the Year	2,766,522	1,872,556	893,966	47.74
Penghasilan komprehensif lain Other Comprehensive Income				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items that will not be reclassified subsquently to profit or loss:				
Keuntungan revaluasi tanah Gain on Revaluation of Land	-	104,529	(104,529)	(100.00)
Pengukuran kembali imbalan pascakerja Remeasurement of Post Employment Benefits	5,416	(18,246)	23,662	(129.68)

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive Income for the Year	2,771,938	1,958,839	813,099	(41.51)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to				
Pemilik entitas induk Owners of the Parent	2,731,253	1,827,891	903,362	49.42
Kepentingan non-pengendali Non-controlling Interests	35,269	44,665	(9,396)	(21.04)
	2,766,522	1,872,556	893,966	47.74
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to				
Pemilik entitas induk Owners of the Parent	2,736,669	1,914,174	822,495	42.97
Kepentingan non-pengendali Non-controlling Interests	35,269	44,665	(9,396)	(21.04)
	2,771,938	1,958,839	813,099	41.51
Laba per saham - Dasar dan Dilusian (Rupiah penuh) Profit per share - Basic and Diluted (full Rupiah)	22,062	21,787	(275)	(1.26)

Pendapatan

Pendapatan tahun 2024 sebesar Rp30,25 triliun, meningkat 12,35% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp26,93 triliun. Hal tersebut disebabkan adanya proyek tol Betung-Tempino-Jambi yang baru berjalan di tahun 2024 dengan pendapatan sebesar Rp1,79 triliun serta perkembangan progres pada proyek tol Rengat-Pekanbaru yang memiliki pendapatan sebesar Rp2,38 triliun atau selisih 1,95 triliun dibandingkan tahun lalu.

Revenue

Revenue in 2024 amounted to Rp30.25 trillion, an increase of 12.35% compared to Rp26.93 trillion in 2023. This increase was primarily driven by the newly commenced Betung-Tempino-Jambi toll road project, which contributed Rp1.79 trillion, and the progress of the Rengat-Pekanbaru toll road project, generating Rp2.38 trillion — a Rp1.95 trillion increase from the previous year.

Beban Pokok Pendapatan

Seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis Perseroan, beban pokok pendapatan Hutama Karya tahun 2024 sebesar Rp25,98 triliun, meningkat 5,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp24,57 triliun. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan usaha.

Cost of Revenue

In line with the increase in the Company's business activities, Hutama Karya's cost of revenue in 2024 amounted to Rp25.98 trillion, an increase of 5.74% compared to Rp24.57 trillion in 2023. This increase was due to the rise in operating revenue.

Laba Bruto

Hutama Karya mengalami peningkatan laba bruto tahun 2024 sebesar Rp4,27 triliun, meningkat 81,27% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,36 triliun. Hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pada beban pokok penjualan.

Gross Profit

Hutama Karya recorded an increase in gross profit in 2024 to Rp4.27 trillion, up 81.27% from Rp2.36 trillion in 2023. This increase was in line with the rise in cost of goods sold.

Beban Penjualan

Beban penjualan tahun 2024 sebesar Rp39,9 miliar, meningkat 232,97% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp11,99 miliar. Hal tersebut salah satunya yang signifikan terjadi yakni peningkatan biaya angkut oleh Bhirawa Steel (BS) yang terkoreksi dari tahun sebelumnya.

Beban Umum Dan Administrasi

Beban umum dan administrasi tahun 2024 sebesar Rp1,22 triliun, meningkat 31,44% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp0,93 triliun. Hal tersebut disebabkan kenaikan pada beban pegawai dan *profesional fee.*

Beban Penurunan Nilai Piutang

Beban penurunan nilai piutang tahun 2024 sebesar Rp142,15 miliar, menurun 87,82% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,17 triliun. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pada pencadangan piutang yang diakui di tahun 2023.

Beban Pajak Penghasilan Final

Beban pajak penghasilan final tahun 2024 sebesar Rp662,45 miliar, meningkat 37,23% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp482,74 miliar. Hal tersebut disebabkan seiring dengan kenaikan pendapatan usaha.

Beban Penurunan Nilai Aset Real Estat

Beban penurunan nilai aset real estat tahun 2024 sebesar Rp0 miliar, menurun 100,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp180,00 miliar. Hal tersebut karena tidak adanya penurunan nilai aset real estat.

Bagian atas Laba Bersih Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama

Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama tahun 2024 sebesar Rp452,43 miliar, meningkat 158,36% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp175,12 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan distribusi laba yang diterima Grup.

Keuntungan dari Penjualan Hak Pengusahaan Jalan Tol

Keuntungan dari penjualan hak pengusahaan jalan tol tahun 2024 sebesar Rp0 triliun, menurun 100,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,64 triliun. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada penjualan hak konsesi jalan tol pada tahun 2024.

Beban Lain-Lain, Bersih

Beban lain-lain, bersih tahun 2024 sebesar Rp176,95 miliar, menurun 0,59% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp178,01 miliar.

Selling Expenses

Selling expenses in 2024 amounted to Rp39.9 billion, a 232.97% increase from Rp11.99 billion in 2023. One significant factor contributing to this increase was the rise in transportation costs by Bhirawa Steel (BS), which were adjusted from the previous year.

General And Administrative Expenses

General and administrative expenses in 2024 reached Rp1.22 trillion, increasing by 31.44% compared to Rp0.93 trillion in 2023. This increase was due to higher employee expenses and professional fees.

Impairment of Receivables

The impairment of receivables in 2024 stood at Rp142.15 trillion, marking an 87.82% decrease from Rp1.17 trillion in 2023. This decrease was due to adjustments made to the receivable provision recognized in 2023.

Final Tax Expense

Final income tax expense in 2024 was recorded at Rp662.45 billion, rising by 37.23% from Rp482.74 billion in 2023. This increase was in line with the growth in operating revenue.

Impairment of Real Estate Assets

In 2024, no impairment of real estate assets was recorded, compared to Rp180.00 billion in 2023, representing a 100.00% decrease. This decrease was due to the absence of impairment on real estate assets.

Share of Net Profit Of Associates And Joint Ventures

The share of net profit from associates and joint ventures in 2024 amounted to Rp452.43 billion, an increase of 158.36% from Rp175.12 billion in 2023. This growth was due to the increase in profit distribution received by the Group.

Gain on Sale of Toll Road Concession Rights

No gain from the sale of toll road concession rights was recorded in 2024, compared to Rp3.64 trillion in 2023, reflecting a 100,00% decrease. This decline was due to the absence of toll road concession rights sales in 2024.

Other Expenses, Net

Other expenses, net, in 2024 amounted to Rp176.95 billion, slightly decreasing by 0.59% from Rp178.01 billion in 2023.

Laba Usaha

Laba usaha tahun 2024 sebesar Rp2,48 triliun, menurun 23,04% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,23 triliun. Penurunan laba usaha disebabkan tidak adanya keuntungan penjualan hak konsesi jalan tol pada tahun 2024

Operating Profit

Operating profit in 2024 stood at Rp2.48 trillion, marking a decrease of 23.04% from Rp3.23 trillion in 2023. The decrease in operating profit was due to the absence of gains from the sale of toll road concession rights in 2024.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan tahun 2024 sebesar Rp2,17 triliun, meningkat 168,54% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp807,64 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan penghasilan keuangan dari bunga dan amortisasi diskon piutang lain-lain.

Finance Income

Finance income in 2024 amounted to Rp2.17 trillion, up 168.54% compared to Rp807.64 billion in 2023. This increase was due to higher finance income from interest and the amortization of other receivables discount.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan tahun 2024 sebesar Rp1,64 triliun, menurun 19,42% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,04 triliun. Hal tersebut karena di tahun 2024 sudah tidak terdapat pembayaran bunga atas ruas tol Bakter dan Medbin yang telah dijual pada tahun 2023 silam.

Finance Costs

Finance costs in 2024 reached Rp1.64 trillion, reflecting a 19.42% decrease compared to Rp2.04 trillion in 2023. This decrease was due to the absence of interest payments on the Bakter and Medbin toll road segments in 2024, which were sold in 2023.

Keuntungan/(Kerugian) dari Selisih Kurs, Bersih

Keuntungan dari selisih kurs, bersih tahun 2024 sebesar Rp22,71 miliar, berbanding terbalik dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatatkan keuntungan dari selisih kurs, bersih sebesar Rp149,65 miliar. Hal tersebut terkait dengan *Global Medium Term Notes* (GMTN).

Foreign Exchanges, Net

Net foreign exchanges in 2024 was recorded at Rp22.71 billion, a reversal from the net foreign exchange gain of Rp149.65 billion in 2023. This change was related to the Global Medium Term Notes (GMTN).

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2024 sebesar Rp2,99 triliun triliun, meningkat 39,25% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,14 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan laba bruto.

Profit before Income Tax

Profit before income tax in 2024 amounted to Rp2.99 trillion, an increase of 39.25% compared to Rp2.14 trillion in 2023. This increase was in line with the growth in gross profit.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun 2024 sebesar Rp219,26 miliar, menurun 19,29% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp271,65 miliar. Hal tersebut karena penurunan basis pajak yang dihitung berdasarkan tarif pajak efektif yang berdampak kontribusi beban pajak penghasilan tahun di tahun 2024.

Income Tax Expense

Income tax expense in 2024 was recorded at Rp219.26 billion, a 19.29% decrease from Rp271.65 billion in 2023. This decrease was due to a reduction in the tax base, which was calculated based on the effective tax rate, impacting the income tax expense contribution in 2024.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp2,77 triliun, meningkat 27,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,87 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha, laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama dan pendapatan keuangan.

Profit for The Year

Profit for the year in 2024 reached Rp2.77 trillion, reflecting a 27.74% increase from Rp1.87 trillion in 2023. This increase was due to higher operating revenue, net profit from associates and joint ventures, and finance income.

Laba/(rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 sebesar Rp2,73 triliun, meningkat 49,92% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,83 triliun. Demikian pula dengan laba/(rugi) tahun berjalan

Profit/(loss) for the year attributable to the owners of the parent entity in 2024 amounted to Rp2.73 trillion, increasing by 49.92% compared to Rp1.83 trillion in 2023. Meanwhile, profit/(loss) for the year attributable to non-controlling interests in

yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2024 sebesar Rp35,27 miliar, menurun 21,04% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp44,67 miliar.

2024 amounted to Rp35.27 billion, decreasing by 21.04% compared to Rp44.67 billion in 2023.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain tahun 2024 sebesar Rp5,41 miliar, menurun 93,72% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp86,29 miliar. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dari keuntungan revaluasi tanah.

Other Comprehensive Income

Other comprehensive income in 2024 totaled Rp5.41 billion, marking a 93.72% decrease compared to Rp86.29 billion in 2023. This decrease was due to the decline in items that will not be reclassified to profit or loss from the gain on revaluation of land.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp2,77 triliun, meningkat 41,51% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,96 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan laba tahun berjalan.

Comprehensive Profit For The Year

comprehensive Profit for the year in 2024 amounted to Rp2.77 trillion, an increase of 41.51% from Rp1.96 trillion in 2023. This increase was in line with the growth in profit for the year.

Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024 sebesar Rp2,73 triliun, meningkat 42,97% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,91 triliun. Demikian pula dengan laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2024 sebesar Rp35,27 miliar, menurun 21,04% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp44,67 miliar.

Comprehensive profit for the year attributable to the owners of the parent entity in 2024 amounted to Rp2.73 trillion, increasing by 42.97% compared to Rp1.91 trillion in 2023. Meanwhile, comprehensive profit for the year attributable to non-controlling interests in 2024 amounted to Rp35.27 billion, decreasing by 21.04% compared to Rp44.67 billion in 2023.

Laba Per Saham - Dasar Dan Dilusian

Laba per saham - dasar dan dilusian tahun 2024 sebesar Rp22,062, meningkat 126% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp21,787. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan pada laba tahun berjalan.

Profit Per Share - Basic And Diluted

Profit per share - basic and diluted earnings per share in 2024 stood at Rp22.062, reflecting an increase of 1.26% compared to Rp21.787 in 2023. This increase was due to the rise in profit for the year.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Arus kas dari aktivitas operasi Cash Flows from Operating Activities				
Penerimaan dari pelanggan Receipts from customers	12,202,085	9,449,914	2,752,171	29.12
Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain Payments to suppliers and other parties	(14,017,777)	(9,678,673)	(4,339,104)	44.83
Pembayaran kepada karyawan Payments to employees	(692,092)	(565,278)	(126,814)	22.43
Kas yang dihasilkan dari operasi Cash generated from operations	(2,507,784)	(794,037)	(1,713,747)	215.83

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan bunga Interest received	1,738,402	807,635	930,767	115.25
Pembayaran beban keuangan Payment of finance costs	(1,651,654)	(1,934,480)	282,826	(14.62)
Pembayaran pajak penghasilan Payment of income taxes	(64,275)	(77,535)	13,260	(17.10)
Pembayaran pajak final Payment of final tax	(554,851)	(515,370)	(39,481)	7.66
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan badan Receipts from corporate income tax refunds	20,203	-	20,203	-
Penerimaan pengembalian pajak Receipts from tax refunds	1,063,849	257,711	806,138	312.81
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi **Net cash flows used in operating activities**	**(1,956,110)**	**(2,256,076)**	**299,966**	**(13.30)**
Arus kas dari aktivitas investasi **Cash Flows from Investing Activities**				
Perolehan aset hak pengusahaan jalan tol Additions of toll road concession rights	(15,761,081)	(18,567,711)	2,806,630	(15.12)
Perolehan aset tak berwujud lainnya Acquisition of other intangible assets	(10,551)	(6,110)	(4,441)	72.68
Penambahan dana talangan pembebasan lahan Addition of bridging fund for land acquisition	(120,768)	(118,474)	(2,294)	1.94
Perolehan dana talangan pembebasan lahan Acquisition fund for land acquisition	189,218	92,510	96,708	104.54
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets	(62,894)	(57,210)	(5,684)	9.94
Penerimaan atas pelepasan investasi lainnya Receipts from disposal of other investments	-	40,000	(40,000)	(100.00)
Penerimaan atas penjualan hak konsesi jalan tol Proceeds from sale of toll road concession rights	-	6,832,200	(6,832,200)	(100.00)
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya Placement of restricted cash	(3,740,306)	(3,114,613)	(625,693)	20.09
Penambahan atas investasi lainnya Additional other investments	(8,197)	(15,000)	15,000	(100.00)
Penerimaan dividen dari ventura bersama Dividends received from joint ventures	288,904	132,848	(3,873,154)	(2,915.48)

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penambahan atas investasi ventura bersama Additional investment in joint ventures	(212,064)	-	212,064	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi **Net cash flows used in investing activities**	**(19,437,739)**	**(14,781,560)**	**(4,656,179)**	**31.50**
Arus kas dari aktivitas pendanaan **Cash Flows from Financing Activities**				
Investasi modal pemerintah Government capital injection	18,604,000	28,884,000	(10,280,000)	(35.59)
Penerimaan pinjaman jangka pendek Receipts from short-term loans	7,558,258	6,893,960	664,298	9.64
Pembayaran pinjaman jangka pendek Repayment of short-term loans	(5,184,921)	(4,638,749)	(546,172)	11.77
Penerimaan pinjaman jangka panjang Receipts from long-term loans	-	168,849	(168,849)	(100.00)
Pembayaran pinjaman jangka panjang Repayment from long-term loans	(1,746,858)	(8,928,041)	7,181,183	(80.43)
Pembayaran liabilitas sewa Repayment of Finance Lease	(161,017)	(14,648)	(146,369)	999.24
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan **Net cash flows provided by financing activities**	**19,069,462**	**22,365,371**	**(3,295,909)**	**(14.74)**
Kenaikan bersih kas dan setara kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents	(2,324,388)	5,327,735	(7,652,123)	(143.63)
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year	39,059,927	33,656,186	5,403,741	16.06
Pengaruh selisih kurs Effect of Exchange Rate Fluctuations on Cash	33,490	76,006	(42,516)	(55.94)
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and Cash Equivalents at the End of Year	36,769,029	39,059,927	(2,290,898)	(5.87)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2024 sebesar Rp1,96 triliun, menurun 13,30% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2023 yang sebesar Rp2,26 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok dan lain-lain.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash flows used in operating activities in 2024 amounted to Rp1.96 trillion, a 13.30% decrease compared to net cash flows used in operating activities in 2023, which amounted to Rp2.26 trillion. This decline was due to an increase in payments to suppliers and others.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2024 sebesar Rp19,43 triliun, meningkat 31,50% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2023 sebesar Rp14,78 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pengeluaran atas penempatan kas yang dibatasi penggunaannya serta penurunan penerimaan atas penjualan hak konsesi jalan tol di tahun 2024.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash flows used in investing activities in 2024 amounted to Rp19.43 trillion, an increase of 31.50% compared to net cash flows used in investing activities in 2023, which amounted to Rp14.78 trillion. This increase was due to higher expenditures for restricted cash placements and a decrease in proceeds from the sale of toll road concession rights in 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2024 sebesar Rp19,07 triliun, menurun 14.74% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2023 yang sebesar Rp22,37 triliun. Penurunan yang utama disebabkan oleh investasi modal pemerintah yang menurun dan tidak adanya penerimaan pinjaman jangka panjang.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash flows provided by financing activities in 2024 amounted to Rp19.07 trillion, a decrease of 14.74% compared to net cash flows provided by financing activities in 2023, which amounted to Rp22.37 trillion. The decline was primarily due to a decrease in government capital investment and the absence of long-term loan proceeds.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Debt Payment Ability and Receivables Collectibility

Kemampuan Membayar Utang

Ability to Pay Debt

Pelindungan Hak Kreditur

Dalam rangka melalukan pelindungan terhadap hak-hak kreditur serta sebagai jaminan pembayaran kembali kewajiban kredit, Hutama Karya memanfaatkan layanan pengelolaan Rekening Penampungan untuk mengatur pemasukan serta pengeluaran melalui rekening penampungan *(escrow)* sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan Nomor 16 tanggal 17 Desember 2019 antara Hutama Karya dengan para Kreditur Sindikasi yang ditandatangani di hadapan Ati Mulyati, SH., Mkn, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta.

Creditor Rights Protection

In order to protect the rights of creditors and ensure the repayment of credit obligations, Hutama Karya utilizes the Escrow Account Management service to regulate incoming and outgoing funds through the escrow account, as outlined in the Escrow Account Management Agreement Deed No. 16 dated December 17, 2019, between Hutama Karya and the Syndicated Creditors, signed in the presence of Ati Mulyati, SH., Mkn, Notary & Land Deed Official (PPAT) in Jakarta.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Ability To Pay Short-Term Debt (Liquidity)

Tabel Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek
Table of the Ability to Pay Short-term Debt

(dalam %) (in %)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)
Rasio Kas Cash Ratio	139.24	183.86	(44.62)
Rasio Cepat Quick Ratio	144.42	190.49	(46.07)
Rasio Lancar Current Ratio	213.81	233.54	(19.73)

Rasio likuiditas menunjukkan kinerja yang ideal (≥ 100%) dan dapat diartikan Hutama Karya mampu mengelola kewajiban jangka pendeknya dengan baik.

The liquidity ratio shows ideal performance (≥ 100%) and can be interpreted as Hutama Karya being able to manage its short-term liabilities well.

Pada tahun 2024, rasio kas tercatat sebesar 139,24%, menurun sebesar 44,62% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 183,86%. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya utang jangka pendek serta turunnya jumlah kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Sementara itu, rasio cepat justru mengalami penurunan menjadi 144,42% pada tahun 2024, turun sebesar 46,07% dari tahun sebelumnya sebesar 190,49%. Penurunan ini mencerminkan penurunan aset lancar. Namun demikian, rasio lancar mengalami penurunan dari 233,54% pada tahun 2023 menjadi 213,81% di tahun 2024, atau turun sebesar 19,73%. Penurunan ini terjadi karena kenaikan utang lancar yang lebih besar dibandingkan peningkatan aset lancar.

In 2024, the cash ratio was recorded at 139.24%, a decrease of 44.62% compared to 2023, which was 183.86%. This decline was due to an increase in short-term debt and a decrease in the amount of cash and cash equivalents held by the company. Meanwhile, the quick ratio decreased to 144.42% in 2024, a decrease of 46.07% from the previous year of 190.49%. This decrease reflects the decline in current assets. However, the current ratio decreased from 233.54% in 2023 to 213.81% in 2024, a decrease of 19.73%. This decrease occurred because the increase in current liabilities was greater than the increase in current assets.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Ability To Pay Long-Term Debt (Solvency)

Tabel Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang
Table of the Ability to Pay Long-term Debt

(dalam %) (in %)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	6.41	6.78	(0.37)
Rasio Pinjaman terhadap Aset Debt to Asset Ratio	4.51	4.66	(0.15)
Rasio Total Kewajiban terhadap Ekuitas Total Liabilities to Equity Ratio	22.63	22.27	0.36
Rasio Modal terhadap Total Aset Equity to Total Assets Ratio	70.06	68.86	1.20
Kemampuan Membayar Beban Bunga Interest Coverage Ratio	219.09	197.07	22.02

Pada tahun 2024, rasio pinjaman terhadap ekuitas mencapai 6,41%, menurun sebesar 0,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 6,78%. Sejalan dengan hal tersebut, rasio pinjaman terhadap aset juga mengalami penurunan, dari 4,66% pada tahun 2023 menjadi 4,51% di tahun 2024, atau turun sebesar 0,15%. Selain itu, rasio total kewajiban terhadap ekuitas tercatat sebesar 22,63% pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 0,36% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 22,27%. Meskipun terdapat peningkatan pada rasio kewajiban, Perseroan tetap menjaga struktur modal yang sehat, yang tercermin dari peningkatan rasio modal terhadap total aset sebesar 1,20%, dari 68,86% pada tahun 2023 menjadi 70,06% di tahun 2024. Kemampuan Perseroan dalam membayar beban bunga juga menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2024, rasio kemampuan membayar beban bunga tercatat sebesar 219,09%, meningkat sebesar 22,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 197,07%. Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan kinerja operasional Perseroan, yang ditandai dengan peningkatan EBITDA, pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, serta penurunan beban bunga.

In 2024,the loan-to-equity ratio reached 6.41%, an decrease of 0.37% compared to the previous year's 6.78%. In line with this, the loan-to-assets ratio also decrease, from 4.66% in 2023 to 4.51% in 2024, marking a decrease of 0.15%. In addition, the total liabilities-to-equity ratio stood at 22.63% in 2024, up by 0.36% from 22.27% in 2023. Despite the increase in debt, the Company maintained a healthy capital structure, as reflected in the improvement of the capital-to-total assets ratio by 1.20%, from 68.86% in 2023 to 70.06% in 2024. The Company's ability to cover interest expenses also showed improvement. In 2024, the interest coverage ratio reached 219.09%, an increase of 22.02% compared to the previous year's 197.07%. This improvement was driven by the Company's enhanced operational performance, as indicated by increased EBITDA, revenue growth, cost efficiency, and a reduction in interest expenses.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek - Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek-efek yang diterbitkan Hutama Karya yaitu obligasi dan sukuk. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Ability to Pay Debt from Issued Securities

The Company's debt payment capability can also be reflected in the rating of Hutama Karya's issued securities, such as bonds and sukuk. The issued securities are regularly assessed by rating agencies to support the credibility of the securities. The quality of securities is highly dependent on the issuing company's ability to pay the securities upon maturity and its capacity to pay interest or coupons during the securities' tenure.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Obligasi dan Sukuk
Table of Debt Payment Ability from Bonds and Sukuk

Uraian Description	Peringkat Rating	
	2024	2023
Obligasi Bonds		
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 Sustainable Bonds I Hutama Karya Phase I Year 2016	idAAA (gg)	idAAA (gg)
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 Sustainable Bonds I Hutama Karya Phase II Year 2017	idAAA (gg)	idAAA (gg)
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B Sustainable Bonds I Hutama Karya Phase III Year 2017 Series B	idAAA (gg)	idAAA (gg)
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A Sustainable Bonds II Hutama Karya Phase I Year 2021 Series A	idAA-	idAA-
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B Sustainable Bonds II Hutama Karya Phase I Year 2021 Series B	idAA-	idAA-
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C Sustainable Bonds II Hutama Karya Phase I Year 2021 Series C	idAA-	idAA-
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A Sustainable Bonds II Hutama Karya Phase II Year 2022 Series A	idAA-	idAA-
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B Sustainable Bonds II Hutama Karya Phase II Year 2022 Series B	idAA-	idAA-
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C Sustainable Bonds II Hutama Karya Phase II Year 2022 Series C	idAA-	idAA-
Sukuk Sukuk		
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C Sustainable Sukuk Mudharabah I Hutama Karya Phase I Year 2021 Series C	idAA-(sy)	idAA-(sy)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B Sustainable Sukuk Mudharabah I Hutama Karya Phase I Year 2021 Series B	idAA-(sy)	idAA-(sy)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A Sustainable Sukuk Mudharabah I Hutama Karya Phase I Year 2021 Series A	idAA-(sy)	idAA-(sy)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C Sustainable Sukuk Mudharabah I Hutama Karya Phase II Year 2022 Series C	idAA-(sy)	idAA-(sy)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B Sustainable Sukuk Mudharabah I Hutama Karya Phase II Year 2022 Series B	idAA-(sy)	idAA-(sy)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A Sustainable Sukuk Mudharabah I Hutama Karya Phase II Year 2022 Series C	idAA-(sy)	idAA-(sy)

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Global Medium Term Notes
Table of Debt Payment Ability from Global Medium Term Notes

Uraian Description	Moody's Rating		Fitch Rating	
	2024	2023	2024	2023
Global Medium -Term Notes Hutama Karya Global Medium -Term Notes Hutama Karya	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-

Tabel Arti Peringkat
Table of Rating Definition

Rating *Agency* Agency Rating	*Rating* Rating	*Rating Definition* Rating Definition
Pefindo	idAAA (gg)	Efek utang dengan peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah superior Debt securities rated idAAA are the highest rating given by PEFINDO. The issuer's ability to meet its long-term financial obligations on these debt securities, compared to other Indonesian issuers, is superior.
	idAA-	Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. Debt securities rated idAA differ only slightly from the highest rating given. The issuer's ability to meet its long-term financial obligations on these debt securities, compared to other Indonesian issuers, is very strong. The minus sign (-) indicates that the given rating is relatively weak and below the average for the respective category.
	idAA-(sy)	Instrumen pendanaan syariah dengan peringkat idAA(sy) hanya berbeda sedikit dengan peringkat tertinggi. Kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas kontrak pendanaan syariah dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah sangat kuat. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. Sharia-compliant financing instruments rated idAA(sy) differ only slightly from the highest rating. The issuer's ability to meet its long-term financial obligations on these sharia financing contracts, compared to other Indonesian issuers, is very strong. The minus sign (-) indicates that the given rating is relatively weak and below the average for the respective category.
Moody's	Baa3	Obligasi dengan peringkat Baa memiliki risiko kredit sedang. Obligasi tersebut dianggap berperingkat sedang dan dengan demikian mungkin memiliki karakteristik spekulatif tertentu. Bonds rated Baa are subject to moderate credit risk. They are considered medium-grade and may possess certain speculative characteristics.
Fitch	BBB-	Peringkat BBB menunjukkan bahwa ekspektasi risiko gagal bayar saat ini rendah. Kapasitas pembayaran komitmen keuangan dianggap memadai, tetapi kondisi bisnis atau ekonomi yang buruk lebih mungkin mengganggu kapasitas ini. BBB ratings indicate that expectations of default risk are currently low. The capacity for payment of financial commitments is considered adequate, but adverse business or economic conditions are more likely to impair this capacity.

Kolektibilitas Piutang

Untuk mitigasi risiko piutang yang tidak tertagih, Hutama Karya membentuk pencadangan penurunan nilai, selain itu Perseroan juga membentuk tim kerja untuk melakukan percepatan pencairan piutang.

Receivables Collectibility

To mitigate the risk of uncollected receivables, Hutama Karya established an impairment reserve. Additionally, the Company formed a working team to accelerate receivables collection..

Tabel Kolektibilitas Piutang
Table of Receivables Collectibility

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
Periode Penagihan (hari) Collection Period (days)	57	53	4

Periode penagihan piutang tahun 2024 mencapai 57 hari dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 53 hari. Hal tersebut disebabkan adanya reklasifikasi dari tagihan bruto jangka pendek ke jangka panjang atas skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) pada ruas tol Betung - Jambi.

Kolektibilitas piutang berdasarkan analisis umur piutang usaha masih dalam kategori baik, sehingga dapat mendukung kegiatan Perseroan. Berikut informasi analisis umur piutang usaha Hutama Karya.

The receivables collection period in 2024 reached 57 days, compared to 53 days in 2023. This increase was due to the reclassification of short-term gross receivables into long-term receivables under the Service-Based Periodic Payment (PBBL) scheme for the Betung-Jambi toll road section.

The collectibility of receivables, based on the aging analysis, remains in the good category, supporting the Company's operations. Below is the aging analysis of Hutama Karya's trade receivables:

Tabel Analisis Umur Piutang Usaha
Table of Trade Receivables Aging Analysis

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
Belum jatuh tempo Not yet due	616,705	697,988	(81,283)
Lewat jatuh tempo: Past due:			
Kurang dari 6 bulan Less than 6 Months	267,900	278,578	(10,678)
Antara 6-12 bulan Between 6-12 Months	169,593	97,559	72,034
Lebih dari 12 bulan More than 12 Months	330,933	366,212	(35,279)
	1,385,131	1,440,337	(55,206)
Provisi atas penurunan nilai Provision for impairment	(328,261)	(310,966)	(17,295)
Jumlah piutang usaha, bersih Net trade receivables	1,056,870	1,129,371	(72,501)

Struktur Modal

Hutama Karya senantiasa menjaga struktur modal agar tetap optimal dalam rangka menunjang pengembangan usaha Hutama Karya.

Rincian Struktur Modal

Rincian struktur modal hutama karya tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Capital Structure

Hutama Karya consistently maintains an optimal capital structure to support its business development.

Capital Structure Composition

The composition of Hutama Karya's capital structure for 2024 and 2023 are as follows.

Tabel Rincian Struktur Modal
Table of Capital Structure Composition

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024		2023		Pertumbuhan Growth	
	(Rp) (Rupiah)	Composition (%)	(Rp) (Rupiah)	Composition (%)	(Rp) (Rupiah)	(%)
Liabilitas jangka pendek Short-term Liabilities	26,406,169	13.47	21,820,021	12.86	4,586,148	21.02
Liabilitas jangka panjang Long-term Liabilities	31,635,843	16.14	31,294,953	18.44	340,890	1.09

Tabel Rincian Struktur Modal
Table of Capital Structure Composition

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024		2023		Pertumbuhan Growth	
	(Rp) (Rupiah)	Composition (%)	(Rp) (Rupiah)	Composition (%)	(Rp) (Rupiah)	(%)
Jumlah liabilitas Total Liabilities	58,042,012	29.61	53,114,974	31.29	4,927,038	9.28
Jumlah ekuitas Total Equity	138,000,451	70.39	116,624,513	68.71	21,375,938	18.33
Jumlah liabilitas dan ekuitas Total Liabilities and Equity	196,042,463	100,00	169,739,487	100.00	31,230,014	18.40

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur modal Hutama Karya dominasi oleh ekuitas yang berasal dari penerimaan PMN. Struktur modal dari liabilitas ini berasal dari pinjaman dari lembaga keuangan/lembaga non keuangan. Kontribusi terbesar pinjaman perusahaan sendiri berasal dari pinjaman bank. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan atas struktur modal akan berfokus pada pemenuhan *convenant* dari bank.

Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Perseroan juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal.

Management Policy On Capital Structure

Hutama Karya's capital structure is still predominantly composed of equity derived from State Capital Injection (PMN). Meanwhile, the company's liabilities mainly consist of loans obtained from financial and non-financial institutions, with the largest contribution coming from bank loans. Therefore, the company's capital structure policy will focus on complying with the covenants set by the banks.

The Board of Directors, together with the Board of Commissioners, actively and regularly reviews and manages the Company's capital to ensure an optimal capital structure and returns for shareholders, taking into account the efficiency of capital utilization based on operating cash flows and capital expenditures, as well as future capital needs. The Company also strives to maintain a balance between the level of borrowings and equity position to ensure an optimal capital structure and return.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Hutama Karya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Basis For Selection Of Management Policy On Capital Structure

The management policy on capital structure is based on protecting Hutama Karya's ability to maintain business continuity, ensuring sustainable returns for shareholders, providing benefits to other stakeholders, and maintaining an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

Ikatan Material Investasi Barang Modal

Hutama Karya memiliki ikatan material terkait dengan investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun 2023-2024 sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Material Commitment For Capital Goods Investment

Hutama Karya has material commitments related to capital goods investment realized during 2023–2024, as shown in the following table.

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal
Table of Material Commitment for Capital Goods Investment

Nama Pihak yang Melakukan Ikatan Party Involved	Jenis Ikatan Type of Commitment	Tujuan Ikatan Purpose of Commitment	Sumber Dana Source of Funds	Mata Uang Currency	Langkah Yang Direncakan Untuk Melindungi Risiko dari Posisi Mata Uang Asing Planned Steps to Mitigate Foreign Currency Risk
2024					
Badan Pengatur Jalan Tol Toll Road Regulatory Agency	Konsesi Jalan Tol Toll Road Concession	Pemberian konsesi pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera Granting concessions for the development and operation of the Trans Sumatra Toll Road	Pinjaman bank, pinjaman non bank, penerbitan obligasi, dan bantuan pemerintah (kas dan non kas) Bank loans, non-bank loans, bond issuance, and government assistance (cash and non-cash)	Rupiah dan USD Rupiah and USD	Melakukan *natural hedging* secara konsisten Consistently applying natural hedging
2023					
Badan Pengatur Jalan Tol Toll Road Regulatory Agency	Konsesi Jalan Tol Toll Road Concession	Pemberian konsesi pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera Granting concessions for the development and operation of the Trans Sumatra Toll Road	Pinjaman bank, pinjaman non bank, penerbitan obligasi, dan bantuan pemerintah (kas dan non kas) Bank loans, non-bank loans, bond issuance, and government assistance (cash and non-cash)	Rupiah dan USD Rupiah and USD	Melakukan *natural hedging* secara konsisten Consistently applying natural hedging

Investasi Barang Modal

Hutama Karya merealisasikan belanja modal setiap tahun yang digunakan untuk membeli sejumlah aset atau investasi yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan untuk mendukung ekspansi bisnis Hutama Karya.

Capital Goods Investment

Hutama Karya realizes annual capital expenditure to acquire assets or make investments expected to provide future benefits, supporting the company's business expansion.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Realisasi investasi penambahan barang modal yang dilakukan Hutama Karya sepanjang tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut.

Types and Values of Capital Goods Investment

The realization of the increase in capital goods investment throughout 2023–2024 is as follows.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal
Table of Types and Values of Capital Goods Investment

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Jenis Type	Penambahan Investasi Investment Addition 2024	Penambahan Investasi Investment Addition 2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)
Investasi JTTS JTTS Investment	21,903	17,345	4,558
Investasi aset tetap Fixed Asset Investment	241	189	52
Total	22,144	17,534	4,610

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal yang dilakukan oleh Hutama Karya utamanya ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha yang menunjang operasional

Purpose of Capital Goods Investment

The capital goods investment carried out by Hutama Karya was primarily aimed at supporting business activities that enhanced the operations

Perseroan dan entitas anak, pada tahun buku 2024 dan 2023. Selain itu, Hutama Karya juga melakukan investasi terkait dengan penugasan pemerintah untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sesuai surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-138/MBU/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Hutama Karya (Persero), Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Hutama Karya (Persero) menetapkan perubahan jenis saham pada PT Hutama Karya (Persero) yang semula tanpa Seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Dari penetapan tersebut Hutama Karya menindaklanjuti dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2025.

Pada tanggal 17 April 2025, terjadi perubahan Anggaran Dasar PT Hutama Karya yang tertuang dalam Akta Nomor 19 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian Holding Operasional dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-174/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 tentang Persetujuan Pengalihan Saham PT Hutama Karya (Persero). Perubahan tersebut mencakup:

1. Perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk dijadikan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yakni sebanyak 131.645.999 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai sebesar Rp131.645.999.000.000,00 (seratus tiga puluh satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

of the Company and its subsidiaries in the 2024 and 2023 fiscal years. Additionally, Hutama Karya also made investments related to government assignments to accelerate the development of the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS).

Information and Material Facts after Balance Sheet Date

Pursuant to the letter from the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number S-138/MBU/03/2025 dated March 18, 2025, regarding the Change in Share Classification and Amendment to the Articles of Association of PT Hutama Karya (Persero), the Ministry of State-Owned Enterprises, acting as the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Hutama Karya (Persero), resolved to change the share classification of PT Hutama Karya (Persero) from previously non-series shares to consist of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

Following this resolution, Hutama Karya proceeded with the amendment to its Articles of Association, as notarized by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, a Notary in the Administrative City of South Jakarta, on March 20, 2025.

On April 17, 2025, PT Hutama Karya amended its Articles of Association as stated in Deed Number 19, notarized by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, a Notary in the Administrative City of South Jakarta. This amendment was a follow-up to the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2025 dated March 21, 2025, concerning the Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia for the Establishment of an Operational Holding, and the letter from the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-174/MBU/03/2025 dated March 22, 2025, regarding the Approval of Share Transfer of PT Hutama Karya (Persero). The amendment includes the following:

1. The change in the Company's shareholder structure resulting from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), to be recognized as an additional State Capital Participation in PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), amounting to 131,645,999 (one hundred thirty-one million six hundred forty-five thousand nine hundred ninety-nine) shares with a total value of Rp131,645,999,000,000.00 (one hundred thirty-one trillion six hundred forty-five billion nine hundred ninety-nine million rupiah).

2. Perubahan struktur pemegang saham meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp131.646.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar rupiah) oleh para pemegang saham sebagai berikut:
   a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Negara RI merupakan setoran modal lama Saham Seri A Dwiwarna.

   b. Rp131.645.999.000.000,00 (seratus tiga puluh satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan setoran modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara RI pada Perseroan.

Perubahan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja Hutama Karya sekaligus memperkuat Hutama Karya dalam mengelola risiko usaha di masa yang akan datang.

Prospek Usaha dan Strategi ke Depan Tahun 2025

Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,3% pada tahun 2025, sedikit meningkat dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,2%. Meskipun ada penyesuaian positif untuk Amerika Serikat, proyeksi ini masih di bawah rata-rata historis pertumbuhan global antara tahun 2000 hingga 2019 yang mencapai 3,7%. Proyeksi ini mencerminkan ketidakpastian yang masih tinggi di pasar global, dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan fluktuasi harga komoditas. IMF juga memperingatkan bahwa ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis bisa menghambat pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Namun, beberapa negara maju diperkirakan akan menunjukkan pemulihan yang lebih baik, berkat kebijakan fiskal yang lebih efektif dan sektor-sektor tertentu yang mengalami pemulihan.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia memiliki proyeksi yang lebih optimis. Pemerintah Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2025, dengan asumsi dasar ekonomi makro yang lengkap dari Kementerian Keuangan sebagai berikut:

2. The change in shareholder structure includes the fulfillment of the Company's total issued and paid-in capital in the amount of Rp131,646,000,000,000.00 (one hundred thirty-one trillion six hundred forty-six billion rupiah) by the shareholders as follows:
   a. Rp1,000,000.00 (one million rupiah) by the Republic of Indonesia, representing the previous capital contribution in the form of Series A Dwiwarna share.
   b. Rp131,645,999,000,000.00 (one hundred thirty-one trillion six hundred forty-five billion nine hundred ninety-nine million rupiah) by PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), representing the capital contribution originating from the transfer of all Series B shares previously held by the Republic of Indonesia in the Company.

This change is expected to enhance Hutama Karya's performance while strengthening the Company's ability to manage business risks in the future.

Business Outlook And Future Strategy In 2025

According to the World Economic Outlook (WEO) released by the International Monetary Fund (IMF) in January 2025, global economic growth is projected to reach 3.3%, slightly increasing from the previous projection of 3.2%. Despite an upward revision for the United States, this forecast remains below the historical average of 3.7% recorded between 2000 and 2019. This projection indicates high uncertainty in the global market, with various factors potentially influencing growth, such as geopolitical tensions, protectionism,and commodity price fluctuations. The IMF also warned that escalating geopolictical conflicts and more protectionist trade policies could hinder a stronger economic recovery. However, some advanced economies are expected to experience more robust recovery, driven by effective fiscal policies and sector-specific rebounds.

On the other hand, Indonesia's economic outlook is more optimistic. The Indonesian government projects economic growth to reach 5.2% in 2025, with macroeconomic assumptions from the Ministry of Finance as follows:

Tabel Asumsi Ekonomi Makro
Table of Macroeconomic Assumptions

Indikator Indicators	Outlook 2024	RAPBN 2025 2025 State Budget
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) Economic Growth (%, yoy)	5.1	5.2
Inflasi (%, yoy) Inflation (%, yoy)	2.7	2.5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Exchange Rate (Rupiah/US$)	16,000	16,100
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) 10-Year Rate SUN Interest Rate (%)	6.9	7.1
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel) Indonesian Crude Oil Price (US$/barrel)	82	82
Lifting Minyak (ribu barrel per hari) Oil Lifting (thousand barrels per day)	592	600
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	990	1,055

Sumber: Nota Keuangan RAPBN Tahun 2025, Kementerian Keuangan, September 2024
Source: Financial Memorandum of the 2025 State Budget, Ministry of Finance, September 2024

Dengan memperhatikan proyeksi tersebut, Pemerintah senantiasa merancang berbagai mekanisme kebijakan untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis guna memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pondasi utama yang tidak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan hal ini, bidang infrastruktur ke depan diarahkan untuk melanjutkan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kebijakan anggaran infrastruktur tahun 2025 yang disusun Pemerintah diantaranya mencakup:

- Pembangunan jaringan irigasi dan bendungan.
- Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah.
- Pembangunan rumah sakit berkualitas.
- Pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi.
- Pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan.
- Pelabuhan penunjang distribusi pangan.
- Pemerataan infrastruktur digital dan teknologi
- Penyediaan/renovasi rumah bersanitasi baik.

Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan sektor infrastruktur Indonesia pada tahun 2025 sangat

Given these projections, the government continues to develop various policy mechanisms to strengthen Indonesia's economic fundamentals. The government transtion period holds strategic importance in ensuring the continuity and reinforcement of development agendas, enhancing fiscal policy functions, and sustaining the reformation momentum for economic transformation in order to achieve high, inclusive, and sutainable economic growth, aligned with the vision of Golden Indonesia 2045. To achieve these goals, infrastructure development remains a fundamental pillar that cannot be overlooked.

In line with this, future infrastructure development will be directed to fostering economic growth and promoting equitable progress. The government's 2025 infrastructure budget policy includes:

- Construction of irrigation networks and dams.
- Development of integrated flagship schools and school renovations.
- Construction of high-quality hospitals.
- Expansion of road networks, port and airport facilities, and rail connectivity to support downstreaming.
- Construction of regional roads to stimulate growth centers.
- Development of port infrastructure to enhance food distribution.
- Equitable expansion of digital and technological infrastructure.
- Provision/renovation of well-sanitized housing.

Overall, the outlook for Indonesia's infrastructure sector in 2025 remains highly optimistic, with various major projects planned to support sutainable

optimis, dengan berbagai proyek besar yang direncanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang terus mendukung pembangunan infrastruktur, ditambah dengan kemitraan publik-swasta dan penggunaan teknologi modern, akan mendorong sektor ini untuk terus berkembang. Namun, tantangan dari ketidakpastian ekonomi global dan isu keberlanjutan akan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Sumber:
- *World Economic Outlook* (WEO), *International Monetary Fund* (IMF), Januari 2025
- Nota Keuangan RAPBN Tahun 2025, Kementerian Keuangan, September 2024

Mempertimbangkan hal tersebut, Hutama Karya melakukan analisis daya saing dengan menggunakan metode *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) untuk mengidentifikasi aspek internal dan eksternal Hutama Karya, serta menggambarkan kondisi perkembangan terkini. Hasil analisis SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

economic growth. Government policies that continue to support infrastructure development, combined with public-private partnerships and modern technology adoption, is expected to drive continued sector growth. However, challenges such as global economic uncertainty and sustainability concerns will be the key factors to consider in the planning and implementation of infrastcruture projects in Indonesia.

Sources:
- World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), January 2025
- Financial Memorandum of the 2025 State Budget, Ministry of Finance, September 2024

In response to this, Hutama Karya conducted a competitiveness analysis using the Stengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) to identify both internal and external factors infuencing the company and to outline current development conditions.

Strength
- Memiliki banyak pengalaman konstruksi dan pengoperasian jalan tol
- Memiliki pertumbuhan kinerja keuangan yang kuat dan relatif stabil
- Memiliki peringkat perusahaan yang "Sangat Baik" serta mendapatkan akses pada pendanaan yang lebih baik
- Kinerja pengembangan sumber daya manusia dengan tingkat turnover yang rendah
- Dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap bisnis Hutama Karya
- Extensive experience in toll road construction and operations
- Strong and relatively stable financial growth
- "Very Good" corporate rating, providing access to better funding opportunities
- Effective human resource development, with a low turnover rate
- Strong support from the government for Hutama Karya's business

Weakness
- HK belum menjadi top of mind dalam pembangunan jalan dan jembatan
- Bisnis non-inti mencetak profitabilitas negatif bagi perusahaan, terutama bisnis unit EPC dan property
- Operasional JTTS belum mencapai kelayakan finansial
- Persebaran talenta unggul belum merata
- Hutama Karya is not yet a top-of-mind choice in road and bridge construction
- Non-core businesses, particularly the EPC and property units, are generating negative profitability
- JTTS operations have not yet achieved financial viability.
- Top talents have uneven distribution

Opportunity
- Pertumbuhan pasar konstruksi menunjukkan kinerja positif
- Proyek infrastruktur konektivitas menjadi agenda pembangunan pemerintah
- Implementasi teknologi terdepan dalam meningkatkan akurasi perencanaan dan engineering design proyek konstruksi
- Peluang adanya Kerjasama JO/Venture dengan Perusahaan lain
- Positive growth in the construction market
- Connectivity infrastrcuture projects as a priority in the government's development agenda
- Implementation of advanced technology to enhance the accuracy of planning and engineering design in construction projects
- Opprotunities for JO/Venture cooperation with other companies

Threat
- Fluktuasi harga bahan baku dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah dan isu geo-politik
- Kompetisi harga anatara BUMN Karya dalam proses tender konstruksi dan dengan perusahaan kontraktor lainnya
- Potensi perubahan kebijakan, dalam agenda pembangunan dan pembiayaan infrastuktur
- Internal Consortium Agreement (ICA) dalam proyek EPC berpotensi merugikan kontraktor
- Fluctuations in raw material prices, influenced by the Rupiah exchange rate and geopolitical issues
- Intensifying price competition among BUMN Karya and other contractors in the construction tender process
- Potential policy changes in the agendas of infrastructure development and financing
- Internal Consortium Agreements (ICA) in EPC projects, which may disadvantage contractors.

Kondisi global yang semakin tidak menentu, perkembangan pertumbuhan ekonomi domestik, dan adanya perubahan regulasi yang berlaku, dapat memberikan dampak pada kinerja Hutama Karya di masa mendatang. Isu strategis seperti kelanjutan proyek mandat Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), kekuatan *brand power* Hutama Karya, keberlanjutan bisnis EPC dan properti, implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, serta persebaran talenta unggul yang belum merata menjadi tantangan tersendiri bagi Hutama Karya. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat menjadi aspek krusial dalam mengatasi kompleksitas tantangan eksternal dan internal, terutama risiko terkait penugasan JTTS. Selain itu, optimalisasi operasional bisnis juga perlu mendapat perhatian khusus guna meningkatkan profitabilitas Hutama Karya.

Increasing global uncertainty, domestic economic developments, and regulatory changes may impact Hutama Karya's future performance. Key strategic issues, such as the continuation of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) mandate project, the strength of Hutama Karya's brand power, the sustainability of the EPC and property businesses, the implementation of comprehensive risk management, and the uneven distribution of top talent, have become challenges for the company. Therefore, selecting the right strategy is crucial to navigating both external and internal challenges, particularly risks related to JTTS assignments. Additionally, optimizing business operations requires special attention to enhance Hutama Karya's profitability.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut dan merespon dinamika yang ada, Hutama Karya terus beradaptasi dengan merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat. Prospek industri infrastruktur di tahun 2025, meskipun penuh tantangan, menawarkan peluang signifikan bagi Hutama Karya untuk mengembangkan portofolio proyek dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Pemerintah yang terus berfokus pada pembangunan infrastruktur, terutama di sektor transportasi, energi, dan teknologi, memberikan landasan yang kuat bagi Hutama Karya untuk memperluas peranannya di pasar.

To address these challenges and respond to evolving dynamics, Hutama Karya continues to adapt by formulating the right strategic measures. While the infrastructure industry outlook for 2025 presents various challenges, it also offers significant opportunities for Hutama Karya to expand its project portfolio and contribute to national development. The government's continued focus on infrastructure development, particularly in the transportation, energy, and technology sectors, provides a strong foundation for Hutama Karya to enhance its market presence.

Sebagai respon terhadap tantangan dan peluang ini, Hutama Karya telah menyusun sasaran dan strategi korporasi untuk tahun 2025, dengan mengacu pada rancangan RJPP Tahun 2025-2029. Dalam rangka memperkuat daya saing dan menghadapi masa depan, Hutama Karya mengusung tema strategis jangka panjang yaitu *Business Resilience, Realigned Portfolio, Accelerated Growth*, dan *Value Enhancement* (BRAVE). Tema ini mencakup profitabilitas positif pada seluruh segmen bisnis, efisiensi struktur *holding* dan optimasi bisnis, pengembangan *revenue engine* untuk peningkatan profitabilitas, serta menciptakan manfaat maksimal dari hasil sinergi dalam mendukung Rencana Pembangunan Pemerintah Indonesia.

In response to these challenges and opportunities, Hutama Karya has set corporate goals and strategies for 2025 based on the Company's Long Term Plan (RJPP) for 2025-2029. To enhance competitiveness and prepare for the future, Hutama Karya has adopted a long-term strategic theme: Business Resilience, Realigned Portfolio, Accelerated Growth, and Value Enhancement (BRAVE). This strategy focuses on achieving positive profitability across all business segments, implementing the holding structure efficiency and business optimization, developing revenue engines to drive profitability, and maximizing synergies to support the Indonesian Government's Development Plan.

Dengan strategi tersebut, Hutama Karya berkomitmen untuk menghadapi masa depan dengan lebih tangguh dan terstruktur. Untuk mewujudkan hal tersebut, Hutama Karya telah merumuskan sasaran strategis jangka panjang yang akan dijalankan dalam periode 2025-2029. Sasaran-sasaran ini bertujuan untuk memperkuat posisi Hutama Karya dan memastikan keberlanjutan pertumbuhannya dalam menghadapi dinamika industri. Adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Through this strategy, Hutama Karya is committed to navigating the future with a more resilient and structured approach. To achieve this, the company has formulated long-term strategic goals for the 2025–2029 period. These goals are designed to strengthen Hutama Karya's market position and ensure sustainable growth amid industry dynamics. The strategic goals are as follows:

1. ***Business Resilience***
   Tema ini bertujuan untuk memastikan Perseroan mencapai profitabilitas positif di seluruh segmen bisnis dengan fokus utama pada jasa konstruksi dan meningkatkan efisiensi seluruh segmen bisnis.
2. ***Realigned Portfolio***
   Tema ini bertujuan bagi Perseroan untuk meningkatkan efisiensi struktur holding dan efisiensi bisnis untuk memperkuat integrasi antar unit bisnis dan meningkatkan efektivitas Perseroan secara menyeluruh.
3. ***Accelerated Growth***
   Tema ini berkaitan dengan arah pengembangan *revenue engine* untuk mendorong pemaksimalan potensi pendapatan dan peningkatan profitabilitas.
4. ***Value Enhancement***
   Tema ini berkaitan dengan menciptakan manfaat dari hasil rencana sinergi yang dibentuk Perseroan di masa mendatang.

Pencapaian Target dan Target ke Depan

Pencapaian Target

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan 2024

Informasi perbandingan target dan realisasi keuangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan
Table of Financial Targets and Realization

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2024	Realisasi Realization 2024	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
Posisi Keuangan **Financial Position**			
Aset Assets	183,820,260	196,042,463	106.65%
Liabilitas Liability	49,703,505	58,042,012	116.78%
Ekuitas Equity	134,116,755	138,000,451	102.90%
Laba Rugi **Profit or Loss**			
Pendapatan Revenue	26,565,775	30,252,293	113.88%
Laba Bersih Net Profit	249,289	2,766,522	1,109.76%
Rasio Keuangan **Financial Ratios**			
Rasio Kas Cash Ratio	1.38	1.39	104.79%
Rasio Cepat Quick Ratio	1.49	1.44	146.44%
Rasio Lancar Current Ratio	2.17	2.14	102.33%

1. **Business Resilience**
   This theme aims to ensure the Company to achieve positive profitablity across all business segments, with a primary focus on construction services and enhancing efficiency in all business segments.
2. **Realigned Portfolio**
   This theme aims to optimize the Company's holding structure and business efficiency to strengthen integration between business units and improve the effectiveness of the company as a whole.
3. **Accelerated Growth**
   This theme aims to develop revenue streams to maximize potential earnings and drive profitability.
4. **Value Enhancement**
   This theme aims to create long-term benefits through strategic synergies planned by the Company.

Target Achievements And Future Targets

Target Achievements

Comparison Of Financial Targets And Realization For 2024

The following presents a comparison between the Company's financial targets and actual performance in 2024.

Rasio likuiditas menunjukkan kinerja yang ideal (≥ 1) dan dapat diartikan Perseroan mampu mengelola kewajiban jangka pendeknya dengan baik.

Liquidity ratio reflects an ideal performance (≥ 1) and can indicate the Company's strong ability to manage its current liabilities effectively.

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Hutama Karya tercatat sebesar Rp30,25 triliun, atau 113,88% dari target RKAP 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi positif dari seluruh lini bisnis Hutama Karya, baik di sektor Jasa Konstruksi maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yang seiring dengan penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera dan peningkatan pendapatan operasional tol.

Comparison of Revenue Target And Realization

Hutama Karya's revenue reached Rp30.25 trillion, achieving 113.88% of the 2024 RKAP target. This growth was driven by positive contributions across all business lines, particularly in Construction Services and Toll Road Business Entities (BUJT), aligned with the completion of the Trans Sumatra Toll Road project and higher toll operating income.

Perbandingan Target dan Realisasi Laba

Laba bersih Hutama Karya tercatat sebesar Rp2,77 triliun, atau 1.109,77% dari target RKAP 2024. Kenaikan signifikan ini didorong oleh kinerja kuat sektor Jasa Konstruksi, terutama dari entitas anak HK Infrastruktur (HKI) dan Divisi Sipil Umum. Selain itu, efisiensi operasional HPP juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih Hutama Karya pada tahun 2024.

Comparison of Profit Target And Realization

Hutama Karya's net profit stood at Rp2.77 trillion, achieving 1,109.77% of the 2024 RKAP target. This substantial growth was driven by strong performance in the Construction Services sector, particularly from subsidiaries of HK Infrastruktur (HKI) and the Infrastructure Division. Additionally, improved operational efficiency in HPP played a key role in boosting the Company's net profit in 2024.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal 2024

Informasi perbandingan target dan realisasi struktur modal disajikan sebagai berikut.

Comparison of Capital Structure Target and Relaization for 2024

The following presents a comparison between the targeted and actual capital structure performance.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal
Table of Comparison of Targeted and Actual Capital Structure

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2024	Realisasi Realization 2024	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
Liabilitas jangka pendek Current liabilities	13,630,338	26,406,169	193.73%
Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities	36,073,167	31,635,843	87.70%
Jumlah liabilitas Total liabilities	49,703,505	58,042,012	116.78%
Jumlah ekuitas Total equity	134,116,755	138,000,451	102.90%
Jumlah liabilitas dan ekuitas Total liabilities and equity	183,820,260	196,042,463	106.65%

Pada tahun 2024, liabilitas Hutama Karya tercatat sebesar Rp58,04 triliun, atau 116,78% dari target RKAP 2024. Hal ini dipengaruhi oleh tertundanya aksi pengambilalihan hak konsesi atas ruas tol Palembang – Betung milik Waskita sebesar Rp2,73 triliun, serta peningkatan utang bank jangka pendek atas fasilitas *notional pooling* HKR di Bank BRI sebesar Rp1,5 triliun.

In 2024, Hutama Karya's liabilities were recorded at Rp58.04 trillion, reaching 116.78% of the 2024 RKAP target. This increase was primarily influenced by the delayed acquisition of concession rights for the Palembang-Betung toll road section, owned by Waskita, amounting to Rp2.73 trillion. Additionally, a rise in short-term bank debt under the HKR notional pooling facility at Bank BRI, totaling Rp1.5 trillion, contributed to the higher liabilities.

Sementara itu, ekuitas Hutama Karya pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp138,00 triliun, atau 102,90% dari RKAP. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham yang signifikan akibat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada April 2024 sebesar Rp18,6 triliun, serta peningkatan *retained earnings* yang berasal dari laba bersih tahun 2023 sebesar Rp1,87 triliun dan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp2,39 triliun.

Meanwhile, Hutama Karya's equity in 2024 stood at Rp138.00 trillion, or 102.90% of the RKAP target. This growth was mainly driven by a significant increase in share capital following the addition of State Capital Participation (PMN) in April 2024, amounting to Rp18.6 trillion, and the increase in retained earnings, sourced from the net profit of Rp1.87 trillion in 2023 and Rp2.39 trillion in 2024.

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran 2024

Informasi perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

Comparison of Marketing Target and Realization for 2024

The following presents a comparison between the target and realization of marketing in 2024.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Table of Comparison of Marketing Target and Realization

Uraian Description	RKAP 2024	Realisasi Realization 2024	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
Persentase tender yang dimenangkan (%) Percentage of Tenders Won (%)	41.21	64.97	157.64%
Kontrak Baru (jutaan Rupiah) New Contract (millions Rupiah)	28,915,206	34,838,598	120.49%
Ruas Tol yang Terbangun (km) Built Toll Roads (km)	88.3	91.0	103.06%

Hutama Karya berhasil mencatatkan kontrak baru sebesar Rp34,84 triliun pada tahun 2024, atau 120,49% dari target RKAP 2024. Kenaikan perolehan kontrak baru ini didominasi oleh proyek BUMN, serta segmen jalan dan jembatan, yang memberikan kontribusi mencapai 85% dari total perolehan kontrak baru.

Hutama Karya succeedded to secure new contracts worth Rp34.84 trillion in 2024, achieving 120.49% of the 2024 RKAP target. This growth in contract acquisition was primarily driven by projects from state-owned enterprises (SOEs) and the road and bridge segment, which accounted for 85% of the total new contracts.

Tabel Rincian Target dan Realisasi Perolehan Kontrak Baru
Table of Target and Realization of New Contract Acquisition

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Kontrak Baru New Contracts	RKAP 2024	Realisasi 2024 Realization 2024			Kontrak Ditangan Contracts in Hand	Kontrak Lama Old Contracts
		Total Total	Kontrak Internal Internal Contracts	Kontrak Eksternal External Contracts		
Divisi Sipil Umum (DSU) Infrastructure Division	8,064,000	6,275,700	2,684,980	3,590,720	18,579,566	12,303,866
Divisi Gedung (DG) Building Division	4,026,000	1,229,262	-	1,229,262	4,800,207	3,570,945
EPC EPC	-	-	-	-	1,759,421	1,759,421
Hakaaston (HKA) Hakaaston (HKA)	1,496,368	1,095,295	1,031,484	63,811	2,163,969	1,068,674
HK Infrastruktur (HKI) HK Infrastruktur (HKI)	15,328,839	26,238,340	24,702,694	1,535,646	16,490,144	16,490,144
HK Realtindo (HKR) HK Realtindo (HKR)	-	-	-	-	-	-
Total Total	28,915,206	34,838,598	28,419,158	6,419,439	70,031,647	35,193,050

Divisi Sipil Umum pada tahun 2024 memperoleh kontrak senilai Rp6,28 triliun, lebih rendah dari target RKAP 2024. Ketidaktercapaian ini terjadi akibat terjadi perubahan asumsi pekerjaan proyek tol ruas Betung – Jambi yang semula direncanakan dikerjakan secara *Joint Operation* (JO) bersama HKI, berubah menjadi Non JO (NJO) yang dikerjakan secara mandiri oleh HKI. Divisi Gedung memperoleh kontrak baru senilai Rp1,23 triliun atau terealisasi 30,53% dari target. Kontrak baru yg diperoleh divisi HKA belum mencapai rencana tahun 2024.

The Infrastructure Division obtained contracts worth Rp6.28 trillion in 2024, falling short of the 2024 RKAP target. This shortfall was due to a change in the approach for the Betung–Jambi toll road project, which was initially planned as a Joint Operation (JO) with HKI but was later executed as a Non-Joint Operation (NJO) solely by HKI. The Building Division secured new contracts worth Rp1.23 trillion, achieving 30.53% of the target. Meanwhile, the HKA Division has not yet met the 2024 target.

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM 2024

Informasi perbandingan target dan realisasi pengembangan SDM disajikan sebagai berikut.

Comparison of Target and Realization of Human Resource Development for 2024

The following presents a comparison between the target and realization of human resource development.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM
Table of Comparison of Target and Realization of HR Development

Uraian Description	RKAP 2024	Realisasi Realization 2024	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
Biaya pengembangan SDM (Rupiah) Costs of HR development (Rupiah)	40,535,750,000	32,938,000,000	81.26%
Jumlah pelatihan (pelatihan) Number of trainings (training)	161	219	136.02%
Jumlah peserta pelatihan (orang) Number of training participants (people)	4,500	7,300	179.00%

Realisasi biaya pengembangan SDM Hutama Karya tahun 2024 mencapai Rp32,94 miliar, atau 81,26% dari target RKAP. Meskipun demikian, jumlah pelatihan yang dilaksanakan berhasil melampaui target dengan pencapaian 136,02%, yaitu sebanyak 219 pelatihan, yang diikuti oleh 7.300 peserta. Pencapaian ini didorong oleh program pengembangan yang menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti *self-learning, structured learning, social learning,* dan *learning while working*. Salah satu inisiatif yang mendukung keberhasilan ini adalah pemanfaatan para *expert* internal Hutama Karya untuk melakukan sesi *knowledge sharing* dan *learning while working*. Selain itu, pembelajaran melalui *platform* pembelajaran daring *(self-learning)* juga dimanfaatkan, memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan.

On the one hand, Hutama Karya's human resource development costs in 2024 amounted to Rp32.94 billion, or 81.26% of the RKAP target. On the other hand, the number of training sessions conducted exceeded the target, reaching 136.02% with a total of 219 trainings attended by 7,300 participants. This achievement was driven by development programs that incorporated various learning methods, including self-learning, structured learning, social learning, and learning while working. A key initiative contributing to this success was the engagement of Hutama Karya's internal experts for knowledge-sharing and learning-while-working sessions. Additionally, the use of online learning platforms (self-learning) provided participants with the flexibility to learn anytime and anywhere, catering to their specific needs.

Target/Proyeksi Ke Depan

Asumsi dalam Menyusun Target/Proyeksi 2025

Dalam penyusunan proyeksi tahun 2025, Hutama Karya menggunakan beberapa asumsi makro ekonomi sebagai berikut.

Target/Future Projections

Assumptions In Preparing for The 2025 Target/Projections

In preparing for the 2025 projections, Hutama Karya relies on several microeconomic assumptions, as follows:

Tabel Asumsi dalam Menyusun Target/Proyeksi 2025
Table of Assumption in Preparing for the 2025 Target/Projections

Uraian Description	2025
(1)	(2)
Pertumbuhan ekonomi (%) Economic growth (%)	5.2
Tingkat inflasi (%) Inflation rate (%)	2.5
Nilai tukar Rp/USD (Rp) Exchange rate Rupiah/US$ (Rupiah)	16,100

Sumber: Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025, Kementerian Keuangan, September 2024
Soyrce: Financial Memorandum of the 2025 State Budget, Ministry of Finance, September 2024

Target/Proyeksi Keuangan 2025

Informasi terkait target/proyeksi keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Financial Target/Projections for 2025

The following presents information on the 2025 financial target or projections.

Tabel Target/Proyeksi Keuangan 2025
Table of the 2025 Financial Target/Projections

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions Rupiah)

Uraian Description	2025
(1)	(2)
Posisi Keuangan **Financial Position**	
Aset Asset	198,235,248
Liabilitas Liabilities	45,898,125
Ekuitas Equity	152,337,124
Laba Rugi **Profit Or Loss**	
Pendapatan Revenue	26,986,920
Laba Bersih Net Profit	808,387
Rasio Keuangan **Financial Ratios**	
Rasio Kas Cash Ratio	1.69
Rasio Cepat Quick Ratio	1.79
Rasio Lancar Current Ratio	3.04

Target/Proyeksi Struktur Modal 2025

Informasi terkait target/proyeksi struktur modal tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Target/Projections of Capital Structure for 2025

The following presents the target/projections of capital structure in 2025.

Tabel Proyeksi Struktur Modal 2025
Table of the 2025 Capital Structure Projection

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2025
(1)	(2)
Liabilitas jangka pendek Current Lialibilities	17,383,037
Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities	28,515,088
Jumlah liabilitas Total liabilities	45,898,125
Jumlah ekuitas Total equity	152,337,124
Jumlah liabilitas dan ekuitas Total liabilities and equity	198,235,248

Target/Proyeksi Kebijakan Dividen 2025

Merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa cadangan yang belum mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi dari cadangan lain, sehingga Perseroan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pembagian dividen pada tahun 2024 dan 2025.

Target/Projection of Dividends For 2025

In reference to the Limited Liability Company Law (UU PT) Number 40 of 2007, which states that reserves that have not reached 20% of the total issued and paid-up capital can only be used to cover losses that cannot be met from other reserves, Hutama Karya has not yet met the requirements to distribute dividends in 2024 and 2025.

Target/Proyeksi Pemasaran 2025

Informasi terkait proyeksi pemasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Target/Projection of Marketing for 2025

The following presents the target/projections of marketing in 2025.

Tabel Perbandingan Target/Proyeksi Pemasaran 2025
Table of Comparison of the 2025 Marketing Target/Projections

Uraian Description	2025
(1)	(2)
Persentase tender yang dimenangkan (%) Percentage of Tenders Won (%)	44.57
Kontrak Baru (jutaan Rupiah) New Contracts (millions Rupiah)	20,074,711
Ruas Tol yang Terbangun (km) Built Roll Roads (km)	92.8

Target/Proyeksi Pengembangan SDM

Informasi terkait proyeksi pengembangan SDM tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Target/Projections of HR Developmen

The following presents the target/projections of HR development in 2025.

Tabel Target/Proyeksi Pengembangan SDM 2025
Tale of Target/Projections of the 2025 HR Development

Uraian Description	2025
(1)	(2)
Biaya pengembangan SDM (Rupiah) Costs of HR Development (Rupiah)	39,500,000,000
Waktu pelatihan (jam) Training time (hours)	70,000
Jumlah peserta Pelatihan (orang) Number of training participants (people)	6,500

Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)

Periode 2020-2024 menjadi tahun yang penuh tantangan dan tahun transformasi untuk Hutama Karya, karena selain meningkatnya persaingan di industri konstruksi di Indonesia, perusahaan dapat melanjutkan merealisasikan JTTS. Selama 4 (empat) tahun terakhir, Perseroan belum berhasil merealisasikan pendapatan yang ditargetkan pada RJPP dan RKAP. Hal ini terjadi diantaranya karena tidak terealisasinya kontrak-kontrak yang telah dijadwalkan karena Covid-19 terhadap kinerja 2020-2021 dan tingkat kompetisi harga yang kurang bersaing dengan BUMN Karya lainnya.

Hutama Karya terus berkomitmen dalam penyehatan kinerja Perseroan melalui aksi restrukturisasi berupa *asset recycling* ruas dalam rangka penurunan utang berbunga, efisiensi HPP, dan penurunan beban bunga. Hal ini ditunjukan dengan perusahaan terus mencetak peningkatan pendapatan dengan pertumbuhan 7% selama 5 (lima) tahun terakhir dengan kinerja laba bersih yang positif di tahun 2023 sebesar Rp1,8 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp2,4 triliun. Di samping itu, performa Hutama Karya terus meningkat signifikan dari total nilai aset dan nilai ekuitas serta mengurangi ketergantungan terhadap liabilitas.

Pada aspek lainnya diluar performa keuangan, Hutama Karya juga konsisten dalam mengimplementasikan manajemen risiko, transformasi sistem dan *human capital* serta terus menjaga keberlangsungan bisnis melalui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dari segi jasa konstruksi dan BUJT, untuk total kilometer JTTS terbangun sampai dengan tahun 2024 mencapai 1.015,2 km dan total tol yang beroperasi ada 798 km (640 km di luar ruas Medan – Binjai dan Bakauheni Terbanggi – Besar).

Pada periode 2020-2024, Hutama Karya telah mencapai beberapa pencapaian dalam bidang tata kelola dan manajemen risiko yaitu Meraih predikat Good Corporate Governance (GCG) "Sangat Baik" dengan perolehan skor *self-assessment*

Evaluation of Long-Term Plans (RJP)

The 2020-2024 period has been both challenging and transformative for Hutama Karya. In addition to increasing competition in Indonesia's construction industry, the company has continued to advance the realization of the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS). However, over the past four years, the Company has not fully achieved the revenue targets set in the RJPP and RKAP. This was due, among other factors, to the non-realization of scheduled contracts, particularly during the Covid-19 pandemic in 2020–2021, as well as less competitive pricing compared to other state-owned construction companies (BUMN Karya).

Hutama Karya, however, remains committed to restructuring its performance through strategic initiatives, including asset recycling to reduce interest-bearing debt, improving cost efficiency (HPP), and lowering interest expenses. These efforts have resulted in a 7% revenue growth over the past five years, with a positive net profit of Rp1.8 trillion in 2023 and Rp2.4 trillion in 2024. Additionally, Hutama Karya has demonstrated significant improvements in total asset value and equity while reducing its reliance on liabilities.

Beyond financial performance, Hutama Karya continues to implement risk management, as well as system and human capital transformation, while ensuring business continuity through the principles of Good Corporate Governance (GCG). In terms of construction services and BUJT, the total length of the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS) built as of 2024 reached 1,015.2 km, with 798 km of toll roads already in operation, excluding the Medan-Binjai and Bakauheni-Terbanggi Besar sections, which account for 640 km.

During the 2020–2024 period, Hutama Karya has achieved significant milestones in governance and risk management by attaining a "Very Good" rating in its Good Corporate Governance (GCG) assessment, with a self-assessment score of 86.71.

GCG sebesar 86,71. Pada tahun 2024 Hutama Karya berhasil menjaga eksposur risiko pada level terkendali, "*Low to Moderate*", sesuai dengan penerapan *Risk Appetite Statement* yang selaras dengan arahan Kementerian BUMN. Berdasarkan penilaian komposit risiko, Hutama Karya berada pada Peringkat 2 yang mencerminkan risiko terkendali dengan kemungkinan kegagalan mencapai target kinerja yang rendah. Hutama Karya juga memenuhi ketentuan SK-3/DKU. MBU/05/2023 terkait komposisi dan kualifikasi organ pengelola risiko.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Sebagai badan usaha yang bertujuan untuk senantiasa meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Perseroan berusaha untuk memenuhi setiap hak dari pemegang saham yakni Pemerintah Republik Indonesia. Besaran pembagian dividen ditetapkan dengan menimbang laba bersih yang dibukukan oleh Perseroan. Perseroan akan mengalokasikan dana sesuai dengan Keputusan RUPS yang berlaku dengan mengukur keberlangsungan usaha dan juga laju pertumbuhan kinerja Perseroan ke depannya. Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tidak terdapat penetapan penggunaan laba bersih yang disebabkan kondisi Perseroan yang masih merugi.

Berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 pada 26 Juni 2024 Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih sebagai cadangan sehingga tidak membagikan dividen. Sedangkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 akan diputuskan dalam RUPS pada tahun 2025.

In 2024, Hutama Karya succeeded to maintain risk exposure at a controlled level of "Low to Moderate", in line with the implementation of the Risk Appetite Statement set by the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE). Based on the risk composite assessment, Hutama Karya achieved a ranking of 2, indicating controlled risk with a low probability of failing to meet performance targets. Additionally, the company has fully complied with the provisions outlined in SK-3/DKU.MBU/05/2023 regarding the composition and qualifications of risk management bodies.

Policy, Announcement, and Payment of Dividends

As a business entity committed to continuously increasing shareholder value, the Company strives to fulfill its obligations to its sole shareholder, the Government of the Republic of Indonesia. The distribution of dividends is determined based on the net profit recorded by the Company. The Company will allocate the funds in accordance with the applicable General Meeting of Shareholders (GMS) decisions while considering business sustainability and the Company's future performance growth. At the 2022 Annual GMS, no net profit allocation was determined due to the Company's financial condition, which was experiencing financial losses.

Based on the 2023 Annual GMS held on June 26, 2024, the Company decided to allocate its net profit as a reserve and, therefore, did not distribute dividends. The decision regarding the use of net profit for the 2024 Financial Year will be made at the GMS in 2025.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen
Table of Dividend Announcement and Payment

Uraian Description	Tahun Buku 2023 Financial Year 2023	Tahun Buku 2022 Financial Year 2022
Laba (rugi) tahun berjalan Profit (loss) of the current year	1,872,556	(445,232)
Dividen Kas Cash Dividend	-	-
Dividen Non Kas Non-Cash Dividend	-	-
Dividen Kas Per Saham Cash Dividend Per Share	-	-
Dividen Non Kas Per Saham Non-Cash Dividend Per Share	-	-
Dividend Payout Ratio (%) Dividend Payout Ratio (%)	-	-
Tanggal Pengumuman Date of Anouncement	26 Juni 2024*	29 Mei 2023*
Tanggal Pembayaran Dividen Kas Date of Cash Dividend Payment	-	-
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas Date of Non-Cash Dividend Payment	-	-

*) Mengumumkan tidak membagikan dividen
*) Announced no dividend distribution

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Hutama Karya telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut.

Realization of The Use of The Proceeds From The Public Offering

In accordance with OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of Use of Proceeds from Public Offering, Hutama Karya has submitted the following report on the realization of the use of proceeds from its public offering.

No.	Deskripsi Decsription	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realization Value of Proceeds from Public Offering		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum (dalam Rp) Total Proceeds from Public Offering (in Rupiah)	Biaya Penawaran Umum (dalam Rp) Costs of Public Offering (in Rupiah)	Hasil Bersih (dalam Rp) Net Yield (in Rupiah)
1	2	3	4	5	6
1	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Sustainable Bonds I Phase I Year 2016	09 Desember 2016 December 09, 2016	1,000,000,000,000	4,630,000,000	995,370,000,000
2	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Sustainable Bonds I Phase II Year 2017	09 Desember 2016 December 09, 2016	1,968,000,000,000	1,735,776,000	1,966,264,224,000
3	Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2017 Sustainable Bonds I Phase III Year 2017	09 Desember 2016 December 09, 2016	3,532,000,000,000	3,178,800,000	3,528,821,200,000
4	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Sustainable Bonds II Phase I Year 2021	30 Agustus 2021 August 30, 2021	1,000,000,000,000	8,193,224,467	991,820,000,000
5	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 Sustainable Bonds II Phase II Year 2022	30 Agustus 2021 August 30, 2021	1,000,000,000,000	3,941,000,000	996,059,000,000
6	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 Sustainable Sukuk I Phase I Year 2021	30 Agustus 2021 August 30, 2021	500,000,000,000	3,979,612,233	496,020,387,767
7	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2022 Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2022	30 Agustus 2021 August 30, 2021	313,000,000,000	1,388,919,622	311,611,080,378

	Rencana Penggunaan Dana Fund Usage Plan		Realisasi Penggunaan Dana Fund Usage Realization		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Proceeds from Public Offering
	Penyaluran Kredit (dalam Rp) Loan Disbursement (in Rupiah)	Total (dalam Rp) (in Rupiah)	Penyaluran Kredit (dalam Rp) Loan Disbursement (in Rupiah)	Total (dalam Rp) Total (in Rupiah)	(dalam Rp) (in Rupiah)
	7	8	9	10	11
	995,370,000,000	995,370,000,000	995,370,000,000	995,370,000,000	-
	1,966,264,224,000	1,966,264,224,000	1,966,264,224,000	1,966,264,224,000	-
	3,528,821,200,000	3,528,821,200,000	3,528,821,200,000	3,528,821,200,000	-
	991,820,000,000	991,820,000,000	991,820,000,000	991,820,000,000	-
	996,059,000,000	996,059,000,000	996,059,000,000	996,059,000,000	-
	496,020,387,767	496,020,387,767	496,020,387,767	496,020,387,767	-
	311,611,080,378	311,611,080,378	311,611,080,378	311,611,080,378	-

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Investasi

Pada tahun 2024, Hutama Karya melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas Perseroan di sektor infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengusahaan Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat
   Peningkatan ekonomi kawasan provinsi Sumatera Utara didorong dengan terhubungnya pusat ekonomi seperti bandara, pelabuhan dan kawasan pariwisata. Beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub logistik internasional yang terintegrasi Zona Ekonomi Khusus (KEK), ruas tol ini menjadi jalur vital untuk distribusi barang dari pelabuhan ke pusat-pusat industri di Sumatera Utara. Selain itu, pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas diproyeksikan menarik lebih dari 3 (tiga) juta wisatawan pada tahun 2025. Pemerintah memberikan penugasan kepada Hutama Karya untuk menghubungkan pusat ekonomi tersebut dengan mengembangkan Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat melalui anak usaha Hutama Karya oleh PT Hutama Marga Waskita. Perseroan melakukan penambahan setoran modal di tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp2.587 miliar untuk memenuhi pendanaan pembangunan jalan tol tersebut.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi
   Pemerintah mengembangkan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (*proving ground*) dengan harapan meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor di Indonesia, mendorong pelindungan lingkungan hidup di Indonesia melalui peningkatan kelaikan jalan dan pengendalian tingkat emisi kendaraan bermotor dan memperluas standar pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan di Indonesia sehingga dapat memperkuat daya saing Indonesia dalam ekspor kendaraan bermotor yang sejalan dengan penandatanganan *Association of Southeast Asian Nations* ("ASEAN")*Mutual Recognition Agreement* ("MRA"). Pengembangan *proving ground* tersebut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hutama Karya sebagai salah satu pemegang saham dari Badan Usaha Pelaksana yang bernama PT Indonesia *International Automotive Proving Ground* (PT IIAPG) yang

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Merger, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Investment

In 2024, Hutama Karya will invest in order to increase the Company capacity in the infrastructure sector with the following details:

1. Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Toll Road Business
   The economic growth of the North Sumatra province is driven by the connection of economic centers such as airports, ports and tourism areas. The operation of Kuala Tanjung Port as an international logistics hub integrated with the Special Economic Zone (KEK), this toll road is a vital route for the distribution of goods from the port to industrial centers in North Sumatra. In addition, the development of Lake Toba as a super priority tourist destination is projected to attract more than 3 (three) million tourists in 2025. The government has assigned Hutama Karya to connect these economic centers by developing the Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Toll Road through Hutama Karya's subsidiary PT Hutama Marga Waskita. The company made an additional capital injection on May 8, 2024 amounting to Rp2,587 billion to meet the funding for the construction of the toll road.

2. Government Cooperation with Business Entities (KPBU) of the Motor Vehicle Roadworthiness and Certification Testing Center (BPLJSKB) in Bekasi
   The government is developing a motor vehicle testing facility (proving ground) with the hope of improving the safety and security of motor vehicles in Indonesia, encouraging environmental protection in Indonesia through improving roadworthiness and controlling motor vehicle emission levels and expanding the standards for motor vehicle testing carried out in Indonesia so that it can strengthen Indonesia's competitiveness in motor vehicle exports in line with the signing of the Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN") Mutual Recognition Agreement ("MRA"). The development of the proving ground uses the Government and Business Entity Cooperation (KPBU) scheme. Hutama Karya as one of the shareholders of the Implementing Business Entity named PT Indonesia International Automotive Proving Ground (PT IIAPG) which is the manager of

menjadi pengelola dari BPLJSKB selama masa konsesi dengan skema pengembalian *availability payment* dari pemerintah. Perseroan melakukan penambahan setoran modal di bulan September dan Desember 2024 sebesar Rp4,5 miliar dan Rp8,5 miliar dalam rangka pemenuhan pendanaan dari sisi ekuitas pada proyek pengembangan tersebut.

3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo – Elelim
   Berdasarkan Permen PUPR No. 23/PRT/M/2020, Kementerian PUPR memiliki tanggung jawab untuk kegiatan penyelenggaraan dan pembangunan jalan baru dengan target 3.000 km hingga tahun 2024. Atas dasar Permen PUPR tersebut, pemerintah memberikan penugasan kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim) menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Konsorsium terbentuk antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur pada tanggal 22 Mei 2024 dan sepakat untuk mendirikan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Trans Papua dengan nama PT Hutama Mambelim Trans Papua. Skema KPBU yang akan diterapkan adalah *Design, Build, Finance, Operation, Maintain, Transfer* (DBFOMT).

   Pemerintah berupaya memenuhi konektivitas antara Kota Jayapura dengan Kota Wamena dengan tujuan menghubungkan Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan serta Pusat Pelayanan Lokal pergerakan orang dan barang (logistik) di wilayah Papua. Untuk memenuhi pendanaan akan pembangunan jalan trans papua, pemerintah membuka kerjasama dengan badan usaha sebagai bagian dari *creative financing* yang dilakukan oleh pemerintah.

   Hutama Karya melakukan kerjasama badan usaha (KPBU) melalui anak usaha yaitu PT Hutama Mambelim Trans Papua sebagai badan usaha pelaksana yang membangun dan mengoperasikan selama masa konsesi dengan skema pengembalian *availability payment* dari pemerintah. Perseroan melakukan penambahan setoran modal di bulan Agustus dan Desember 2024 sebesar Rp1,4 miliar dan Rp19,7 miliar dalam rangka pemenuhan pendanaan dari sisi ekuitas pada proyek pengembangan tersebut.

BPLJSKB during the concession period with an availability payment return scheme from the government. The Company made additional capital deposits in September and December 2024 amounting to Rp4.5 billion and Rp8.5 billion in order to fulfill funding from the equity side of the development project.

3. Government Cooperation with Business Entities (KPBU) Trans Papua Road Section Jayapura-Wamena Mamberamo – Elelim Segment
   Based on PUPR Ministerial Regulation No. 23/PRT/M/2020, the PUPR Ministry is responsible for the implementation and construction of new roads with a target of 3,000 km by 2024. Based on the PUPR Ministerial Regulation, the government has assigned Hutama Karya to build and operate the Trans Papua Road Section Jayapura – Wamena (Mamberamo – Elelim Segment) using the Government and Business Entity Cooperation (KPBU) scheme. The consortium was formed between PT Hutama Karya (Persero) and PT Hutama Karya Infrastruktur on May 22, 2024 and agreed to establish a Business Entity for the Trans Papua KPBU Project Implementation under the name PT Hutama Mambelim Trans Papua. The KPBU scheme that will be implemented is Design, Build, Finance, Operation, Maintain, Transfer (DBFOMT).

   The government is trying to fulfill connectivity between Jayapura City and Wamena City with the aim of connecting the Local Activity Center, Regional Service Center and Local Service Center for the movement of people and goods (logistics) in the Papua region. To fulfill funding for the construction of the trans-Papua road, the government has opened cooperation with business entities as part of the creative financing carried out by the government.

   Hutama Karya carries out business entity cooperation (KPBU) through its subsidiary, PT Hutama Mambelim Trans Papua as the implementing business entity that builds and operates during the concession period with an availability payment return scheme from the government. The company made additional capital deposits in August and December 2024 of Rp1.4 billion and Rp19.7 billion in order to fulfill funding from the equity side of the development project.

Ekspansi

Sebagai upaya meningkatkan profit Perseroan, Hutama Karya melakukan ekspansi dengan cara mengikuti proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) baik *solicited* maupun *unsolicited*. Selain itu, Perseroan mengoptimalkan aset – aset milik hutama karya melalui kerja sama partner strategis Perseroan dengan skema Sewa Menyewa, Kerja Sama Usaha, hingga pengembangan secara mandiri dimana Hutama Karya melakukan investasi untuk pengembangan bisnis *hospitality* dengan memanfaatkan aset milik Perseroan yang pada mulanya sudah berfungsi sebagai villa dan mess Perseroan. Optimalisasi ini bertujuan untuk memberikan pendapatan tambahan bagi Perseroan serta utamanya dapat menekan biaya operasional seperti pembayaran penjaga, utilitas listrik hingga PBB apabila aset tersebut *idle* dan tidak termanfaatkan. Salah satu realisasi pelaksanaan optimalisasi Aset di tahun 2024 adalah kerjasama sewa menyewa atas aset yang berada di Cikiwul, Narogong, Bekasi untuk digunakan sebagai *workshop* dan *storage* penyimpanan dengan jangka waktu kerjasama selama 4 (empat) tahun. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada 9 Oktober 2024 dan memberikan kontrak pendapatan kepada Hutama Karya dengan nilai sebesar Rp5.100.000.000.

Expansion

As an effort to increase the Company profit, Hutama Karya is expanding by participating in the Government and Business Entity Cooperation (KPBU) project, both solicited and unsolicited. In addition, the Company optimizes Hutama Karya's assets through strategic partner cooperation with the Company with a Lease, Business Cooperation, and independent development scheme where Hutama Karya invests in developing the hospitality business by utilizing the Company assets which initially functioned as villas and company messes. This optimization aims to provide additional income for the Company and primarily to reduce operational costs such as paying guards, electricity utilities to PBB if the assets are idle and not utilized. One of the realizations of the implementation of Asset optimization in 2024 is the lease cooperation for assets located in Cikiwul, Narogong, Bekasi to be used as a workshop and storage with a cooperation period of 4 (four) years. This Cooperation Agreement was signed on October 9, 2024 and provided a revenue contract to Hutama Karya with a value of Rp5,100,000,000.

Divestasi

Sepanjang tahun 2024 Hutama Karya tidak melakukan kegiatan divestasi

Divestment

Throughout 2024, Hutama Karya will not carry out divestment activities

Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2024 Hutama Karya tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

Business Merger/Merger

Throughout 2024, Hutama Karya will not carry out business merger/merger activities.

Akuisisi

Sepanjang tahun 2024 Hutama Karya tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Acquisition

Throughout 2024, Hutama Karya will not carry out acquisition activities.

Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2024 Hutama Karya tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang/modal.

Debt/Capital Restructuring

Throughout 2024, Hutama Karya will not carry out debt/capital restructuring activities.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis

Conflict of Interest Transactions

According to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 Concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, a Conflict of Interest is a difference between the economic interests of a public company and the personal

pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Pada tahun 2024, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Transaksi Afiliasi Sebagai Kegiatan Usaha yang Dijalankan dalam Rangka Menghasilkan Pendapatan Usaha dan Dijalankan Secara Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Terdapat transaksi afiliasi lainnya yang merupakan kegiatan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 POJK 42/2020. Informasi mengenai transaksi tersebut yang meliputi nilai transaksi, nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan disajikan pada bagian transaksi pihak berelasi yang tercatat dalam Catatan 36 pada Laporan Keuangan.

economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Majority Shareholders, or Controllers that may be detrimental to the public company in question.

In 2024, there were no material transactions involving conflicts of interest.

Affiliate Transactions

Based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 Concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, Affiliation is:

1. Family relationships due to marriage and descent up to the second degree, either horizontally or vertically;
2. Relationships between parties with Employees, Directors, or Commissioners of the party;
3. Relationships between 2 (two) Companies where there are 1 (one) or more members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are the same;
4. Relationships between Companies and Parties, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the company;
5. Relationships between 2 (two) companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same party; or
6. Relationships between Companies and Major Shareholders.

Furthermore, Affiliate transactions are any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company with an Affiliate of the public company or an Affiliate of a Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Major Shareholder, or Controller, including any activity and/or transaction carried out by a Public Company or Controlled Company for the benefit of an Affiliate of the Public Company or an Affiliate of a member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Major Shareholder, or Controller.

Affiliate Transactions as Business Activities Carried Out in order to Generate Business Income and Carried Out Routinely, Repeatedly, and/or Continuously

Other affiliated transactions were carried out as part of business activities aimed at generating revenue and conducted on a routine, recurring, and/or ongoing basis, in accordance with Articles 8 and 9 of OJK Regulation 42/2020. Information regarding the transaction, including the transaction value, the name of the party conducting the transaction, and the nature of the relationship, is presented in the related party transactions section recorded in Note 36 to the Financial Statements.

Kewajaran Transaksi dan Pemenuhan Peraturan Terkait

Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi pada tahun 2024 dan 2023 merupakan transaksi yang dilakukan dengan prinsip kewajaran *(arm's length principle).* Transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan yang berlaku dalam transaksi dengan pihak ketiga. Hutama Karya melakukan transaksi dengan pihak-pihak afiliasi dan/atau berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 224 mengenai Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi serta tidak terdapat transaksi pihak afiliasi dan/atau berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS. Jika transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham maka persetujuan dilakukan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan dengan transaksi tersebut.

Pernyataan Direksi Terkait Transaksi Afiliasi

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2024 dilakukan secara wajar, sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tata kerja dan prinsip-prinsip dasar integritas Perseroan serta prinsip-prinsip GCG yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Terkait Transaksi Afiliasi

Dewan Komisaris dan Komite Audit menjadi bagian dari organisasi yang melakukan review terhadap rencana, realisasi, dan evaluasi terhadap transaksi Perseroan serta memastikan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi telah melalui prosedur yang memadai, dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum, serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness of Transactions and Compliance with Related Regulationst

All transactions with affiliated and/or related parties in 2024 and 2023 were conducted under fair transaction principles (arm's length principle). These transactions were carried out under the same conditions and requirements as transactions with third parties. Hutama Karya executed transactions with affiliated and/or related parties in compliance with PSAK No. 224 concerning Related Party Disclosures, Bapepam-LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, regarding Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies, and the OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

There were no violations of laws and regulations related to transactions with affiliated and/or related parties, and no such transactions required General Meeting of Shareholders (GMS) approval. If any transaction with an affiliated and/or related party required shareholder approval, it was obtained from shareholders without any conflicting interests in the transaction.

Board of Directors Statement Regarding Affiliate Transactions

All transactions conducted in 2024 were carried out fairly, in accordance with generally accepted business practices, and in compliance with applicable laws and regulations. These transactions adhered to the Company's code of conduct, fundamental integrity principles, and Good Corporate Governance (GCG) principles outlined in the Corporate Governance Guidelines. The Board of Directors affirms that all affiliated and/or related party transactions underwent adequate procedures to ensure compliance with generally accepted business practices, including adherence to the arm's length principle.

The Role of the Board Of Commissioners and Audit Committee Related to Affiliate Transactions

The Board of Commissioners and the Audit Committee play a crucial role in reviewing, monitoring, and evaluating the Company's affiliated transactions. They ensure that all such transactions follow appropriate procedures, align with standard business practices, and comply with the arm's length principle and prevailing regulations.

Transaksi Pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 224 mengenai Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah, sebagai pemegang saham dari Perusahaan, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 36. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan yang berlaku dalam transaksi dengan pihak ketiga.

Nama Pihak dan Sifat Hubungan Transaksi Pihak Berelasi

Berikut adalah nama pihak dan sifat hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Related Party Transactions

The Group engages in transactions with related parties as defined in PSAK No. 224 concerning Disclosure of Related Parties, Bapepam-LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Based on the BAPEPAM-LK Regulation, a government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government. The government, as the shareholder of the Company, in this case is the Minister of Finance.

Details of significant balances and transactions with related parties are presented in Note 36. Transactions with related parties are conducted under the same conditions and requirements as those applicable to transactions with third parties.

Name of Parties and Relationship Transactions Nature of Related Parties

The following are the names of the parties and the relationship transaction nature with related parties.

Sifat Hubungan Nature of Relationship	**Pihak Berelasi** **Related Parties**	**Sifat Transaksi** **Nature of Transactions**
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entities	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Bank, deposito berjangka, dan pinjaman Banks, time deposits and loans
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk	
	PT Bank Tabungan Negara Syariah	
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entities	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Pendapatan jasa kontrak konstruksi Construction contract service income
	PT Pertamina Patra Niaga	
	PT Angkasa Pura II (Persero)	
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
	PT PLN Indonesia Power	
	PT PLN Nusantara Power	
	PT Indo Raya Tenaga	
	PT Kilang Pertamina Internasional	
	PT Pertamina Hulu Rokan	
	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	
	PT Jasamarga Japek Selatan	
	PT Anggrek Gorontalo International Terminal	
	PT Indonesia International Automotive Proving Ground	

Sifat Hubungan Nature of Relationship	Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Transaksi Nature of Transactions
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entities	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pendapatan penjualan barang Revenue from sales of goods
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entities	PT Brantas Abipraya (Persero)	Pembelian bahan baku dan subkontraktor Purchase of raw materials and subcontractors
	PT Waskita Beton Precast Tbk	
	PT Adhi Persada Beton	
	PT Wijaya Karya Beton Tbk	
	PT Armindo Catur Pratama	
	PT Indra Karya (Persero)	
	PT Virama Karya	
	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
	PT Waskita Beton Precast Tbk	
	PT Waskita Karya Infrastruktur	
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	
	PT Solusi Bangun Beton	
	PT Semen Indonesia Logistik	
	PT Waskita Sriwijaya Toll	
	PT Nindya Beton	
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	
Ventura bersama Joint Venture	KSO HK-WIKA	Piutang ventura bersama dan utang usaha Receivables from joint venture and trade payables
	KSO PP-WIKA-Waskita	
	KSO Hutama-Modern	
	KSO Hutama Karya-Gerbang Sarana Baja	
	KSO Hutama-Adhi-Abipraya	
	KSO Adhi-Abipraya-MKN	
	KSO Hutama-WIKA-BAP	
	KSO HK-Timas	
	KSO Hutama-Jakon	
	KSO PP-NK	
	KSO Hutama-Betesda Mandiri	
	KSO HKI-ACSET-NK	
	KSO Adhi-HK	
	KSO Hutama-Euroasiatic-Uttam	

Realisasi Transaksi

Saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Transaction Realization

Significant balances with related parties as of December 31, 2024 and 2023 are outlined in the following table.

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi
Table of Related Party Transaction Realization

(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)

Uraian Description	2024	2023
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	34,891,659	36,821,416
Piutang usaha Trade receivables	690,303	714,461
Piutang ventura bersama Receivables from joint venture	130,206	86,348
Piutang retensi Retention receivables	221,803	177,243
Tagihan bruto kepada pemberi kerja Gross Amount Due from Customers	2,890,180	1,867,030
Piutang lain-lain Other receivables	136,368	64,305
Jumlah **Total**	**38,960,519**	**39,730,803**
Persentase terhadap jumlah aset (%) **Percentage of total assets (%)**	**19.87**	**23.41**
Utang usaha Trade payables	1,316,922	2,249,416
Pinjaman jangka pendek Short-term loans	5,921,908	3,454,956
Pinjaman jangka panjang Long-term loans	7,671,120	7,892,978
Uang muka kontrak Contract advances	151,194	16,525
Utang lain-lain Other payables	2,720,564	1,045
Utang retensi Retention payables	430,417	422,300
Jumlah **Total**	**18,212,125**	**14,037,220**
Persentase terhadap jumlah liabilitas (%) **Percentage of total liabilities (%)**	**31.38**	**26.43**

Rujukan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada Catatan 36 atas Laporan Keuangan yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Alasan Dilakukan Transaksi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan utamanya untuk kepentingan dan keberlanjutan kegiatan usaha Hutama Karya yang berhubungan dengan pinjaman, pendapatan jasa, pembelian bahan baku dan subkontraktor, serta piutang ventura bersama dan utang usaha.

References to Disclosure in Financial Reports

Details of the names of parties related to the realization (value) of related party transactions are presented in Note 36 to the Financial Statements attached to this Annual Report. The related party transactions are business activities carried out in order to generate business revenue and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously.

Reasons for Transactions

Transactions with related parties are carried out primarily for the interests and sustainability of Hutama Karya's business activities related to loans, service income, purchases of raw materials and subcontractors, as well as Receivables from joint venture and trade payables.

Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi di tahun 2024 dan 2023 merupakan transaksi yang wajar (*arm's length principle*) yang tercerminkan dari persentase aset, liabilitas, pendapatan usaha, dan beban pokok pendapatan terkait transaksi dengan pihak berelasi bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya tidak memberikan dampak yang signifikan. Manajemen menganalisa bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan yang dapat mendorong kinerja finansial.

Pemenuhan Peraturan Terkait

Hutama Karya melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang definisinya sesuai dengan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Terkait dengan pihak-pihak berelasi tersebut, transaksi yang dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi yang dilaksanakan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi serta tidak terdapat transaksi pihak afiliasi dan/atau berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS. Jika transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham maka persetujuan dilakukan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan dengan transaksi tersebut.

Fairness of Transactions

All transactions with related parties in 2024 and 2023 are arm's length transactions as reflected in the percentage of assets, liabilities, business revenues, and cost of revenue related to transactions with related parties when compared to the total amount does not have a significant impact. Management analyzes that all transactions with related parties are needed to support the smooth running of the Company's operational activities that can drive financial performance.

Compliance with Related Regulations

Hutama Karya conducts transactions with related parties whose definition is in accordance with PSAK No. 224 concerning Disclosure of Related Parties. In normal business activities, the Company conducts transactions with related parties. In relation to these related parties, the transactions carried out are in accordance with the same terms and conditions as transactions carried out with parties who do not have a special relationship.

There were no violations of laws and regulations concerning transactions with affiliated and/or related parties, nor did any such transactions require approval from the General Meeting of Shareholders (GMS). If a transaction with an affiliated and/or related party required shareholder approval, the decision was made by shareholders who had no conflicting interests in the transaction.

Pernyataan Direksi Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2024 dilakukan secara wajar, sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tata kerja dan prinsip-prinsip dasar integritas Perseroan serta prinsip-prinsip GCG yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Dewan Komisaris dan Komite Audit menjadi bagian dari organisasi yang melakukan *review* terhadap rencana, realisasi dan evaluasi terhadap transaksi Perseroan serta memastikan bahwa transaksi afiliasi dan/atau berelasi telah melalui prosedur yang memadai, dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum, serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arm's length principle)* dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Dewan Komisaris/Direksi

Perseroan tidak memiliki kebijakan pemberian pinjaman kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi, Perseroan hanya memiliki Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang merupakan bagian dari program TJSL BUMN yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

Board of Directors Statement Regarding Related Parties

All transactions conducted in 2024 were executed fairly, in accordance with generally accepted business practices, and in full compliance with applicable laws and regulations. These transactions were carried out following the Company's code of conduct, fundamental integrity principles, and Good Corporate Governance (GCG) guidelines outlined in the Corporate Governance Manual. The Board of Directors affirms that affiliated and/or related party transactions underwent adequate procedures to ensure compliance with standard business practices, particularly in adherence to the arm's length principle.

The Role of The Board of Commissioners and Audit Committee Related to Related Party Transactions

The Board of Commissioners and the Audit Committee play an essential role in reviewing, monitoring, and evaluating the Company's related party transactions. They ensure that all such transactions follow appropriate procedures, align with standard business practices, and comply with the arm's length principle and applicable regulations.

The Role of The Board of Commissioners and Audit Committee Related to Related Party Transactions

The Company does not have a policy of providing loans to the Board of Commissioners or the Board of Directors, the Company only has a Micro and Small Business Funding Program (PUMK) which is part of the SOE TJSL program which focuses on fostering and developing Micro and Small Businesses.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya

Changes in Legislation and Its Impact

Informasi perubahan peraturan perundang undangan dan dampaknya terhadap Hutama Karya adalah sebagai berikut.

Information on changes to laws and regulations and their impact on Hutama Karya is as follows.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Table of Changes in Legislation

No	Peraturan Perundang-Undangan Legislation	Pokok Pengaturan Legal Terminology	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Hutama Karya Information on Adjustments Made by Hutama Karya	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
	Industri Jasa Konstruksi Construction Services Industry			
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perpu Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 anatara lain mengatur perubahan proses perizinan, persaingan usaha, standar keselamatan, pengembangan usaha bagi Perusahaan konstruksi, peningkatan kompetensi, dan lain-lain: 1. Kemudahan Perizinan Pemerintah pusat kini mengelola proses perizinan usaha jasa konstruksi secara lebih terpusat dan sederhana, mempercepat kontraktor dalam mendapatkan izin usaha. 2. Persaingan yang Lebih Sehat Pemerintah mengawasi pasar konstruksi agar lebih adil serta melindungi kontraktor nasional dari persaingan yang tidak sehat. 3. Peningkatan Standar Keselamatan dan Keberlanjutan Kontraktor wajib mengikuti standar keselamatan kerja, lingkungan, dan keberlanjutan yang lebih ketat demi memastikan kualitas dan keamanan proyek. 4. Dukungan terhadap Pengembangan Usaha Pemerintah mengembangkan sistem rantai pasok, permodalan, serta kemitraan dengan perusahaan asing agar kontraktor nasional dapat berkembang lebih baik. 5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Standar pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja ditingkatkan guna meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja konstruksi. 6. Dorongan Inovasi Teknolog Pemerintah mendorong penggunaan teknologi baru dalam konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, serta daya saing industri. 7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat • Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. • Pemerintah memfasilitasi forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat. 8. Pengembangan Sistem Informasi Konstruksi • Sistem informasi Jasa Konstruksi nasional dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. • Data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional dikumpulkan untuk mendukung pengambilan keputusan.	Hutama Karya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi perlu melakukan beberapa penyesuaian dalam berbagai aspek operasional, manajerial, dan strategis agar tetap sesuai dengan peraturan terbaru tersebut.	Memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan Hutama Karya dalam hal peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Table of Changes in Legislation

No	Peraturan Perundang-Undangan Legislation	Pokok Pengaturan Legal Terminology	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Hutama Karya Information on Adjustments Made by Hutama Karya	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
		Law Number 2 of 2017 regulates, among other things, changes to the licensing process, business competition, safety standards, business development for construction companies, increasing competence, and others: 1. Ease of Licensing The central government now manages the construction service business licensing process in a more centralized and simplified manner, accelerating contractors in obtaining business licenses. 2. Healthier Competition The government supervises the construction market to make it fairer and protect national contractors from unhealthy competition. 3. Improved Safety and Sustainability Standards Contractors are required to follow stricter occupational safety, environmental, and sustainability standards to ensure project quality and safety. 4. Support for Business Development The government is developing a supply chain system, capital, and partnerships with foreign companies so that national contractors can develop better. 5. Improved Workforce Competence Workforce training and certification standards are improved to improve the quality and competitiveness of the construction workforce. 6. Encouragement of Technological Innovation The government is encouraging the use of new technology in construction to improve the efficiency, quality, and competitiveness of the industry. 7. Increasing Community Participation • The community is encouraged to play an active role in supervising the implementation of Construction Services. • The government facilitates the Construction Services forum as a medium for community aspirations. 8. Development of Construction Information Systems • A national Construction Services information system is developed to increase transparency and efficiency. • National and international Construction Services data and information are collected to support decision making.		

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Table of Changes in Legislation

No	Peraturan Perundang-Undangan Legislation	Pokok Pengaturan Legal Terminology	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Hutama Karya Information on Adjustments Made by Hutama Karya	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
	Industri Infrastruktur Infrastructure Industry			
2	Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengembangan Usaha Berkelanjutan (“PerPUPR”) Regulation of the Minister of PUPR Number 7 of 2024 concerning Sustainable Business Development (“PerPUPR”)	Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 anatara lain mengatur perubahan: • BUJK wajib melakukan PUB untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing. PUB diselenggarakan oleh Asosiasi BUJK dan dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya • BUJK harus menerapkan tata kelola yang lebih baik melalui sistem manajemen yang jelas, termasuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan sistem pelaporan berbasis teknologi • BUJK dinilai berdasarkan nilai kinerja tahunan dengan kategori grade (AAA, AA, A, B, C, D). BUJK dengan grade rendah (B, C, D) wajib mengikuti PUB khusus untuk meningkatkan performa • BUJK kecil mendapat prioritas dalam PUB untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan dalam proyek konstruksi. • BUJK dengan penilaian kinerja rendah wajib mengulang PUB jika tidak menunjukkan peningkatan setelah evaluasi. Ini dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dalam proyek konstruksi.18 • BUJK diharapkan berkolaborasi dengan asosiasi, pemerintah, dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. PUPR Ministerial Regulation Number 7, among others, regulates changes: • BUJK is required to conduct PUB to improve competence and competitiveness. PUB is organized by the BUJK Association and can collaborate with the government, universities, and other institutions • BUJK must implement better governance through a clear management system, including the Anti-Bribery Management System (SMAP) and a technology-based reporting system • BUJK is assessed based on annual performance scores with grade categories (AAA, AA, A, B, C, D). BUJK with low grades (B, C, D) are required to participate in special PUB to improve performance • Small BUJK are given priority in PUB to improve competitiveness and capabilities in construction projects. • BUJK with low performance ratings are required to repeat PUB if they do not show improvement after the evaluation. This can affect business continuity in construction projects.18 • BUJK are expected to collaborate with associations, governments, and training institutions to improve the competitiveness and quality of construction work results.	Hutama Karya melakukan penyesuaian dalam setiap aspek operasional dan kebijakan korporasi untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024 dapat diimplementasikan dengan efektif. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pengembangan sosial, serta memastikan bahwa seluruh proses pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.	Dampak terhadap laporan keuangan Hutama Karya melibatkan perubahan dalam pengeluaran untuk penerapan keberlanjutan (terutama pada proyek ramah lingkungan dan program CSR), tetapi juga membuka peluang untuk pendapatan tambahan dari proyek infrastruktur berkelanjutan dan kemitraan dengan sektor swasta. Biaya jangka pendek mungkin meningkat, tetapi dalam jangka panjang, investasi dalam keberlanjutan dapat menghasilkan penghematan biaya, peningkatan reputasi, dan akses ke pembiayaan yang lebih murah.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Table of Changes in Legislation

No	Peraturan Perundang-Undangan Legislation	Pokok Pengaturan Legal Terminology	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Hutama Karya Information on Adjustments Made by Hutama Karya	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
3	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 3 Tahun 2024 (“PerLKPP”) Regulation of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP) No. 3 of 2024 (“PerLKPP”)	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 3 anatara lain mengatur perubahan: • Kemudahan dan Fleksibilitas Pengadaan • Peningkatan Peran UMKM • Perubahan Kontrak dalam Pekerjaan Rancang dan Bangun • Besaran Uang Muka • Perubahan dalam Strategi Pemaketan dan Jenis Kontrak • Kemudahan bagi Pekerjaan Mendesak • Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja dan Material Lokal Regulation of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP) No. 3, among others, regulates changes to: • Ease and Flexibility of Procurement • Increasing the Role of MSMEs • Changes to Contracts in Design and Build Work • Amount of Down Payment • Changes in Packaging Strategy and Type of Contract • Ease for Urgent Work • Obligation to Use Local Labor and Materials	Penyesuaian yang dilakukan Hutama Karya yaitu peningkatan transparansi, efisiensi dalam proses pengadaan, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.	Dampak terhadap laporan keuangan Hutama Karya mencakup pengurangan biaya operasional dan biaya pengadaan.
4	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (“PP Jalan Tol”) Government Regulation Number 23 of 2024 concerning Toll Roads (“Toll Road Usage in and out”)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 anatara lain mengatur perubahan: • Perusahaan konstruksi wajib menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proyek jalan tol, termasuk keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. • BUJK harus memastikan jalan tol yang dibangun memenuhi SPM terkait kondisi jalan, keselamatan, keamanan, serta fasilitas pendukung lainnya • Pengelola rest area jalan tol wajib mengalokasikan minimal 30% lahan untuk UMKM, memberikan peluang bagi perusahaan konstruksi dalam pembangunan fasilitas ini • Perusahaan konstruksi harus membangun jalan tol dengan kecepatan rencana minimum 80 km/jam untuk antarkota dan 60 km/jam untuk perkotaan • Jalan tol harus memiliki jalur utama minimal 2 lajur per arah, median pemisah, bahu jalan, dan fasilitas pengamanan lainnya • BUJK yang ingin mengusahakan jalan tol dapat mengajukan prakarsa proyek atau mengikuti lelang pengusahaan yang dilakukan oleh pemerintah	Penyesuaian yang dilakukan oleh Hutama Karya mencakup perubahan pada berbagai aspek internal perusahaan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan regulasi, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mempertahankan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.	Dampaknya terhadap laporan keuangan Hutama Karya yaitu pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi proyek, dan peningkatan kredibilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih Hutama Karya.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Table of Changes in Legislation

No	Peraturan Perundang-Undangan Legislation	Pokok Pengaturan Legal Terminology	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Hutama Karya Information on Adjustments Made by Hutama Karya	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
		Government Regulation Number 23 of 2024 regulates changes, among others: • Construction companies are required to apply the principle of sustainable development in toll road projects, including a balance between environmental, economic, and social aspects. • BUJK must ensure that the toll roads built meet the SPM related to road conditions, safety, security, and other supporting facilities • Toll road rest area managers are required to allocate a minimum of 30% of land for MSMEs, providing opportunities for construction companies in the construction of these facilities • Construction companies must build toll roads with a minimum planned speed of 80 km/hour for intercity and 60 km/hour for urban areas • Toll roads must have a main lane of at least 2 lanes per direction, a dividing median, road shoulders, and other safety facilities • BUJK that wish to develop toll roads can submit a project initiative or participate in the tender conducted by the government		
5	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Presidential Regulation Number 42 of 2024 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation Number 100 of 2014 concerning the Acceleration of Toll Road Development in Sumatra	Perubahan yang ada dalam peraturan tersebut mengacu pada penambahan ruas tol Sumatera yang akan dibangun oleh Pemerintah dengan menugaskan kepada Hutama Karya sebagai Badan Pelaksana. The changes in the regulation refer to the addition of the Sumatra toll road section which will be built by the Government by assigning Hutama Karya as the Implementing Agency.	Hutama Karya akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pembiayaan yang lebih cepat, serta pengelolaan proyek yang lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik, terutama dalam penugasan korporasi untuk percepatan pembangunan tol di Sumatera.	Memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap laporan keuangan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan maupun laba Hutama Karya.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan.

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, yang relevan dengan operasi Grup Hutama Karya.

Changes in Accounting Policy

Reasons for Changes in Accounting Policies

Changes in accounting policies are made to comply with the Financial Accounting Standards Statements (PSAK) in effect in the current year.

Information on Changes In Accounting Policies

Application of the following standards, new/revised interpretations of standards which are effective from January 1, 2024, which are relevant to Hutama Karya Group's operations.

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi
Table of Changes in Accounting Policies

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Impact of Changes in Accounting Policies on Financial Statements
1	Amandemen PSAK No. 116, "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik. PSAK Amendment No. 116, "Leases" regarding lease liabilities in sale and leaseback transactions.	Tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Does not result in a substantial change to the Group's accounting policies and has a material effect on the amounts reported for the current or prior years.
2	Amandemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar. PSAK Amendment No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding the classification of current or non-current liabilities.	Tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Does not result in a substantial change to the Group's accounting policies and has a material effect on the amounts reported for the current or prior years.
3	Amandemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan. PSAK Amendment No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with covenants.	Tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Does not result in a substantial change to the Group's accounting policies and has a material effect on the amounts reported for the current or prior years.
4	Amandemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas". PSAK Amendment No. 207, "Cash Flow Statement".	Tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Does not result in a substantial change to the Group's accounting policies and has a material effect on the amounts reported for the current or prior years.
5	Amandemen PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok. PSAK Amendment No. 107, "Financial Instruments: Disclosures" regarding supplier financing arrangements.	Tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Does not result in a substantial change to the Group's accounting policies and has a material effect on the amounts reported for the current or prior years.

Tingkat Kesehatan Perseroan

Pada tanggal 4 April 2024, PT Fitch Ratings Indonesia telah melakukan penilaian pemeringkatan (*rating assessment*) terhadap Hutama Karya dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): BB (idn)
2. Peringkat Akhir (*Final Rating*): AA+(idn)/ *Outlook* Stabil

Adapun hasil tersebut menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama. Risiko gagal bayar inheren hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut.

Fitch Ratings mengevaluasi risiko kredit Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti kemampuan membayar hutang, struktur permodalan, stabilitas pendapatan serta kondisi makroekonomi dan industri yang sedang berlangsung.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Hutama Karya pada tahun 2024 telah menyusun dokumen *contingency plan* berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham (APS) tahun 2024 yang meliputi indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas, kualitas aset serta indikator lain (dalam hal ini operasional) yang bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi Perseroan secara signifikan.

Kejadian yang berpotensi berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan diidentifikasi dan dilakukan asesmen melalui *Business Impact Analysis (BIA)* dengan tujuan agar Perseroan dapat merespon dengan cepat dan tepat atas setiap kejadian yang bersifat *disruptif* yang berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Hutama Karya telah memiliki Pedoman *Business Continuity Management System (BCMS)* namun masih terbatas hanya pada lingkup kejadian yang bersifat operasional saja. Pada tahun 2024 ini Perseroan menyusun kerangka *Business Continuity Management* dan *Contingency Plan* dalam rangka pemenuhan Aspirasi Pemegang Saham (APS) tahun 2024 sebagai berikut:

Company Soundness Level

On April 4, 2024, PT Fitch Ratings Indonesia conducted a rating assessment on Hutama Karya with the following results:

1. Stand Alone Rating: BB (IDN)
2. Final Rating: AA+(IDN)/Stable Outlook

The results indicate a very low default risk expectation compared to other issuers or bonds in the same country or monetary union. The inherent default risk is only slightly different from the highest rated issuers or bonds in the country.

Fitch Ratings evaluates the Company credit risk by considering several key factors such as debt repayment capacity, capital structure, revenue stability, and ongoing macroeconomic and industry conditions.

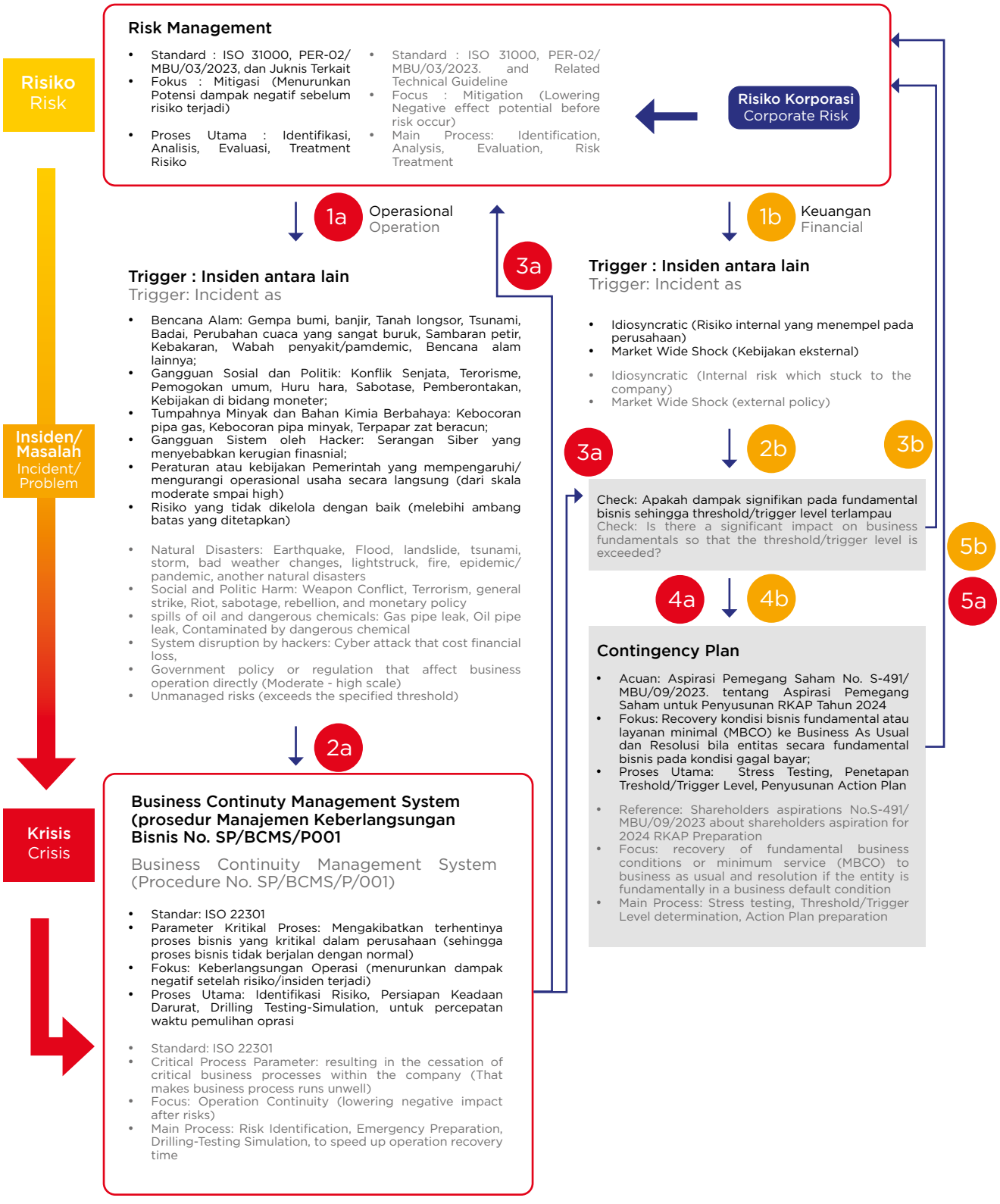
Business Continuity Information

Things That Have The Potential To Have A Significant Influence On Business Continuity

Hutama Karya, in 2024, has prepared a contingency plan document based on the 2024 Shareholder Aspirations (APS) which includes capital indicators, liquidity, profitability, asset quality and other indicators (in this case operational) that are quantitative or qualitative in nature that can cause significant problems to the Company condition.

Events that have the potential to affect the Company's business continuity are identified and assessed through Business Impact Analysis (BIA) with the aim that the Company can respond quickly and appropriately to any disruptive events that have an impact on the Company's business continuity.

Hutama Karya already has a Business Continuity Management System (BCMS) Guideline but is still limited to the scope of operational events only. In 2024, the Company will prepare a Business Continuity Management and Contingency Plan framework in order to fulfill the 2024 Shareholder Aspirations (APS) as follows:



Kerangka *Business Continuity Management* dan *Contingency Plan* tersebut dibagi ke dalam 2 proses yang ditinjau terhadap masing-masing *trigger* insidennya (Operasional dan Finansial).

The Business Continuity Management and Contingency Plan framework is divided into 2 processes that are reviewed against each incident trigger (Operational and Financial).

Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha

Tantangan yang dihadapi Hutama Karya selama tahun 2024 mencakup sejumlah masalah yang berpotensi mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. **Gagal Dalam Pengajuan Klaim, Kompensasi, dan Eskalasi**
   Tidak diterimanya nilai pengajuan klaim dan evidence oleh pihak asuransi, akibat data yang kurang lengkap dan valid, berpotensi menyebabkan kegagalan dalam proses klaim, kompensasi, dan eskalasi. Untuk mengatasi hal ini, Hutama Karya telah melakukan sejumlah mitigasi, antara lain dengan berkoordinasi dengan pemilik proyek mengenai potensi pekerjaan yang melibatkan interface dengan kontraktor lain. Selain itu, Perseroan juga menempatkan *Person In Charge* (PIC) khusus yang bersinggungan langsung dengan pemilik proyek, serta melakukan pelatihan dan pengembangan personil pada bagian *project control, scheduler*, dan pelaksana lapangan. Proses pelaporan dan pengumpulan *evidence* dari proyek ke divisi juga dilakukan secara berkala. Tidak hanya itu, Hutama Karya juga menunjuk para ahli, konsultan klaim, auditor independen, APH, dan pengacara dari Direktur *Human Capital* & Legal untuk memastikan proses klaim berjalan lancar
2. **Denda Keterlambatan atas Proyek yang Tidak Sesuai Jadwal**
   Keterlambatan dalam proyek, yang disebabkan oleh performa mitra KSO atau subkon/supplier yang tidak memenuhi target, berpotensi mengakibatkan pekerjaan terhenti akibat keterlambatan pembayaran. Untuk memitigasi hal ini, beberapa langkah yang diambil Perseroan meliputi permintaan Personil *Quality Control* (QC) kepada konsorsium untuk memantau pekerjaan ME secara khusus. Selain itu, subkon/vendor diwajibkan untuk menerbitkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk *Bank Guarantee.* Perseroan juga membuat kontrak eksklusif dengan *vendor* terkait keterlambatan yang merugikan Hutama Karya, serta mengajukan perpanjangan waktu apabila diperlukan, dengan menyertakan bukti yang kuat.

Details of Problems Arising During The Fiscal Year that Affect Business Activities

The challenges faced by Hutama Karya during 2024 include a number of problems that have the potential to affect the smooth running of business activities. Some of the challenges faced include:

1. **Failure in Claim Submission, Compensation, and Escalation**
   The failure to accept the value of the claim submission and evidence by the insurance party, due to incomplete and invalid data, has the potential to cause failure in the claim, compensation, and escalation processes. To overcome this, Hutama Karya has carried out a number of mitigations, including coordinating with project owners regarding potential work involving interfaces with other contractors. In addition, the company also places a special Person In Charge (PIC) who is in direct contact with the project owner, as well as conducting training and development of personnel in the project control, scheduler, and field implementer sections. The process of reporting and collecting evidence from the project to the division is also carried out periodically. Not only that, Hutama Karya also appoints experts, claim consultants, independent auditors, APH, and lawyers from Director of Human Capital & Legal to ensure the claim process runs smoothly
2. **Late Penalties for Projects That Aren't on Schedule**
   Delays in projects, caused by the performance of KSO partners or subcontractors/suppliers that do not meet targets, have the potential to result in work being stopped due to late payments. To mitigate this, several steps taken by the Company include requesting Quality Control (QC) Personnel to the consortium to specifically monitor ME work. In addition, subcontractors/vendors are required to issue a performance guarantee in the form of a Bank Guarantee. The Company also makes exclusive contracts with vendors regarding delays that are detrimental to Hutama Karya, and submits an extension of time if necessary, by including strong evidence.

Assessment Manajemen Terhadap Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Hal-hal yang diidentifikasi dalam penyusunan rencana kedaruratan/*contingency plan* tahun 2024 diantaranya adalah yang berasal dari kejadian kahar baik skala regional maupun nasional dan yang berasal dari *extreme market wide shock* yang berdampak pada kelangsungan operasional

Management Assessment of Matters that Have The Potential To Significant Impact on Business Continuity

Matters identified in the preparation of the 2024 contingency plan include those originating from force majeure events on both a regional and national scale and those originating from extreme market wide shocks that have an impact on the Company's operational continuity and the Company's financial

Perseroan maupun kondisi keuangan Perseroan yang di detailkan pada Dokumen *Contingency Plan* Hutama Karya Tahun 2024.

condition as detailed in the Hutama Karya 2024 Contingency Plan Document.

Asumsi yang Digunakan Manajemen untuk Melakukan *Assessment*

Asesmen terhadap hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha dilakukan berdasarkan Top Risk RKAP tahun 2024, yang kemudian dikembangkan menjadi identifikasi terhadap potensi risiko yang dapat menghentikan operasional Perseroan. Risiko ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu kejadian kahar yang berskala regional maupun nasional, serta dampak dari *extreme market wideshock*, seperti pandemi Covid-19 atau krisis moneter.

Assumptions Used by Management to Conduct Assessment

Assessment of matters that have the potential to significantly impact business continuity is carried out based on the Top Risk RKAP for 2024, which is then developed into an identification of potential risks that can stop the Company operations. These risks are grouped into two main categories, namely force majeure events on a regional or national scale, and the impact of extreme market wide shocks, such as the Covid-19 pandemic or monetary crisis.

Indikator-indikator yang menjadi *trigger level* dalam penerapan *contingency plan* meliputi permodalan, likuiditas, rentabilitas (profitabilitas), kualitas aset, dan operasional. *Trigger level* ini dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu pencegahan, *recovery*, dan resolusi. Tujuannya adalah agar Perseroan dapat merespon dengan cepat sesuai dengan level insiden yang terjadi atau yang telah disimulasikan, untuk memastikan kelangsungan operasional dan kembali ke proses bisnis semula

The indicators that become trigger levels in the implementation of contingency plans include capital, liquidity, profitability, asset quality, and operations. This trigger level is divided into three levels, namely prevention, recovery, and resolution. The goal is for the Company to be able to respond quickly according to the level of incidents that occur or have been simulated, to ensure operational continuity and return to the original business process.

Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan memiliki aktivitas utama Jasa Konstruksi termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan tol, konstruksi gedung, serta pembangunan jembatan dan bendungan, dan lainnya. Hutama Karya berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku.

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("HPP") UU Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang mencakup perubahan tarif pajak Pajak Konstruksi menjadi 1,75%, 2,65%, 3,5%, dan 4% sesuai dengan kriteria Jenis Kegiatan Usaha. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sesuai dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Disclosure of Governance Framework, Management and Control of Taxation Aspects

Hutama Karya is a State-Owned Enterprise (SOE) whose shares are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia and has the main activity of Construction Services including the construction and maintenance of toll roads, building construction, as well as the construction of bridges and dams, and others. Hutama Karya is committed to fulfilling tax obligations effectively and efficiently in accordance with applicable tax regulations.

In 2021, the Government issued the Law on Harmonization of Tax Regulations ("HPP") Law Number 7 of 2021. Furthermore, the stipulation of Government Regulation Number 9 of 2022 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business which includes changes to the Construction Tax tax rate to 1.75%, 2.65%, 3.5%, and 4% according to the criteria of the Type of Business Activity. As well as Government Regulation Number 58 of 2023 concerning the Withholding Rate of Article 21 Income Tax on Income in Connection with Work, Services, or Activities of Individual Taxpayers in accordance with the Average Effective Rate (TER).

Hutama Karya menentukan kebijakan pajak serta pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan Key Performance Indicator ("KPI") yang disetujui oleh Direktur Keuangan seperti PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), PPh Badan, serta Pajak Lainnya. Pada praktiknya Hutama Karya memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan perencanaan dan pengelolaan perpajakan dengan pendekatan manajemen risiko yang efektif yang dimonitor melalui Kantor Pusat melalui beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Perhitungan, Pelaporan, dan Penentuan Keputusan kewajiban perpajakan melalui persetujuan dan tanggung jawab Direktur Keuangan.
2. Hutama Karya menerbitkan Surat Edaran dalam hal terdapat Regulasi Pajak baru dari Pemerintah, yang diterbitkan oleh Kantor Pusat untuk disampaikan kepada Divisi Operasi, Kebutuhan Proyek, Anak Perusahaan, serta KSO.
3. Hutama Karya menerbitkan Nota Dinas dalam hal terdapat Arahan dengan bentuk Instruksi pada pelaksanaan kewajiban perpajakan seluruh Insan Hutama Karya baik Kantor Pusat, Divisi Operasi, Kebutuhan Proyek, Anak Perusahaan, serta KSO.

Hutama Karya, sebagai Wajib Pajak yang senantiasa mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara transparan dan tepat waktu. Perseroan secara aktif melaporkan pajaknya melalui mekanisme yang tersedia, baik secara daring melalui sistem elektronik maupun secara luring melalui kantor pajak terdaftar, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Hutama Karya senantiasa menjaga komunikasi yang baik dengan otoritas perpajakan dalam konteks yang konstruktif. Hal ini dilakukan melalui penerimaan informasi terkini terkait regulasi perpajakan, partisipasi dalam kegiatan sosialisasi pajak yang diselenggarakan oleh perwakilan kantor pajak. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Perseroan dalam mendukung program pemerintah di bidang perpajakan serta berkontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan negara demi keberlanjutan pembangunan nasional negara Indonesia.

Hutama Karya senantiasa memberikan kontribusi kepada negara diantaranya berupa pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Pemenuhan kewajiban PPh badan memberikan kontribusi besar senilai Rp4,09 triliun di tahun 2024, meningkat 62,95% dari Rp2,51 triliun di tahun sebelumnya. Hutama Karya melaporkan tidak terdapat ketidakpatuhan Perseroan dalam kewajiban membayar pajak atau dengan status NIHIL. Hutama Karya hanya beroperasi di Indonesia, untuk itu laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia.

Hutama Karya determines tax policies and the implementation of tax obligations in accordance with the Key Performance Indicators ("KPI") approved by the Director of Finance such as Article 21 Income Tax, Article 4 paragraph (2) Final Income Tax, Value Added Tax ("PPN"), Corporate Income Tax, and Other Taxes. In practice, Hutama Karya fulfills its tax obligations based on tax planning and management with an effective risk management approach that is monitored through the Head Office through several steps, as follows:

1. Calculation, Reporting, and Determination of Tax Obligation Decisions through the approval and responsibility of the Director of Finance.
2. Hutama Karya issues Circulars in the event of new Tax Regulations from the Government, which are issued by the Head Office to be submitted to the Operations Division, Project Needs, Subsidiaries, and KSO.
3. Hutama Karya issues Service Notes in the event of Directions in the form of Instructions on the implementation of tax obligations of all Hutama Karya Personnel, both the Head Office, Operations Division, Project Needs, Subsidiaries, and KSO.

Hutama Karya, as a Taxpayer who always complies with applicable tax regulations, is committed to fulfilling its tax obligations transparently and on time. The Company actively reports its taxes through available mechanisms, both online through electronic systems and offline through registered tax offices, to ensure compliance with applicable tax provisions. In addition, Hutama Karya always maintains good communication with the tax authorities in a constructive context. This is done through receiving the latest information related to tax regulations, participating in tax socialization activities organized by tax office representatives. This effort is also in line with the Company commitment to supporting government programs in the field of taxation and contributing to optimizing state revenues for the sustainability of national development in Indonesia.

Hutama Karya always contributes to the country, including in the form of fulfilling the Company obligations as a taxpayer and as a tax withholding/collector. Fulfillment of corporate income tax obligations made a major contribution of Rp4.09 trillion in 2024, an increase of 62.95% from Rp2.51 trillion in the previous year. Hutama Karya reported that there was no non-compliance by the Company in its obligation to pay taxes or with nil status. Hutama Karya only operates in Indonesia, therefore tax reporting is only done for Indonesia.

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to The Country

(dalam jutaan Rupiah)(in millions Rupiah)

No.	Jenis Pajak Tax Type	Tahun 2024 Year	Tahun 2023 Year
A	**Pajak** Taxes		
1.	Pajak Penghasilan (PPh) Corporate Income Taxes (PPh)	875,394	610,565
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Value Added Taxes (PPN) and Luxury Goods Sales Taxes (PPnBM)	2,977,761	1,749,794
3.	Bea Masuk/Keluar, Bea dan Cukai, Bea Materai Import/Export Duty, Customs and Excise, Stamp Duty	420	46
4.	PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) PBB P3 (Plantation, Forestry, Mining)	0	136,347
5.	Pajak Pemerintah Pusat Lainnya (misalnya Pajak Karbon) Other Government Taxes (e.g. Carbon Tax)	209	9,083
6.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), termasuk PBB P2 (Perkotaan dan Pedesaan) Regional Taxes and Regional Retributions (PDRD), including PBB P2 (Urban and Rural)	238,075	388
	Total Kontribusi Pajak (Total A) Total Tax Contribution (Total A)	4,091,858	2,506,172
B	**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** **Non-Tax State Revenue (PNBP)**		
1.	Dividen Dividends	-	-
2.	PNBP Lainnya Other PNBP	838	-
	Total Kontribusi PNBP (Total B) PNBP Total Contribution (Total B)	-	-
	Total Kontribusi kepada Negara (Total A dan B) Total Contribution to the State (Total A and B)	4,092,696	2,506,172

Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas dan dikelola secara korporasi. Sesuai ketentuan pada Pasal 110 PER-2/MBU/03/2023:

1. Tambahan PMN dilakukan dengan tujuan untuk:
   a. Memperbaiki struktur permodalan BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
   b. Meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau Perseroan Terbatas.
2. Tambahan PMN kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka:
   a. Melaksanakan penugasan Pemerintah kepada BUMN;
   b. Melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN; dan/atau
   c. Melakukan pengembangan usaha BUMN

Report on Additional Use of State Capital Inclusion (PMN)

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Additional State Capital Participation (PMN) is the separation of state assets from the state revenue and expenditure budget which is used as capital for SOE and/or Limited Liability Companies and managed as a corporation. In accordance with the provisions of Article 110 of PER-2/MBU/03/2023:

1. Additional PMN is carried out with the aim of:
   a. Improving the capital structure of SOE or Limited Liability Companies; and/or
   b. Increasing the business capacity of SOE or Limited Liability Companies.
2. Additional PMN to SOE as referred to in paragraph (1) is used in order to:
   a. Carry out Government assignments to SOE;
   b. Restructuring and/or rescuing SOE; and/or
   c. Conducting SOE business development

Berikut informasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Hutama Karya

The following is information on the Use of Additional State Capital Participation (PMN) for Hutama Karya

Tabel Realisasi Penyertaan Modal Negara Hutama Karya
Table of Hutama Karya State Capital Participation Realization

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Nilai PMN PMN Value	Realisasi Keuangan Penggunaan Tambahan PMN Tahun 2024 (Rp juta) Financial Realization of Additional PMN Use in 2024 (millions Rupiah)			
				Sampai dengan TW I Until Quarter I	Sampai dengan TW II Until Quarter II	Sampai dengan TW III Until Quarter III	Sampai dengan TW IV Until Quarter IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ruas Jalan Tol Binjai - Langsa Binjai - Langsa Toll Road Section	30 April 2024 April 30, 2024	1,350,000	-	1,189,700	1,350,000	1,350,000
2	Ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Section of the Indralaya - Muara Enim Toll Road	30 April 2024 April 30, 2024	99,000	-	-	-	-
3	Ruas Jalan Tol Kisaran – Indrapura Section of the Kisaran – Indrapura Toll Road	30 April 2024 April 30, 2024	245,000	-	-	-	57,811
4	Ruas Jalan Tol Kuala Tanjung – Indrapura - Tebing Tinggi – Parapat Section of the Kuala Tanjung – Indrapura - Tebing Tinggi – Parapat Toll Road	30 April 2024 April 30, 2024	246,000	-	-	-	-

Realisasi Fisik Penggunaan Tambahan PMN Physical Realization of Additional PMN Usage			
Sampai dengan TW I Until Quarter I	**Sampai dengan TW II Until Quarter II**	**Sampai dengan TW III Until Quarter III**	**Sampai dengan TW IV Until Quarter IV**
9	**10**	**11**	**12**
94.89% (Seksi Binjai – Pangkalan Brandan) 94.89% (Binjai – Pangkalan Brandan Section)	97.68% (Seksi Binjai – Pangkalan Brandan) 97.68% (Binjai – Pangkalan Brandan Section)	98.82% (Seksi Binjai – Pangkalan Brandan) 98.82% (Binjai – Pangkalan Brandan Section)	100.00% (Seksi Binjai – Pangkalan Brandan) 100% (Binjai – Pangkalan Brandan Section)
100.00% (Optimasi nilai kontrak Prabumulih – Muara Enim) 100.00% (Prabumulih – Muara Enim Contract Value Optimization)	100.00% (Optimasi nilai kontrak Prabumulih – Muara Enim) 100.00% (Prabumulih – Muara Enim Contract Value Optimization)	100.00% (Optimasi nilai kontrak Prabumulih – Muara Enim) 100.00% (Prabumulih – Muara Enim Contract Value Optimization)	100.00% (Optimasi nilai kontrak Prabumulih – Muara Enim) 100.00% (Prabumulih – Muara Enim Contract Value Optimization)
18.91% (Junction Palembang) 18.91% (Palembang Junction)	40.96% (Junction Palembang) 40.96% (Palembang Junction)	82.92% (Junction Palembang) 82.92% (Palembang Junction)	94.36% (Junction Palembang) 94.36% (Palembang Junction)
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
93.82%	95.08%	95.62%	98.34%

Tabel Realisasi Penyertaan Modal Negara Hutama Karya
Table of Hutama Karya State Capital Participation Realization

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Nilai PMN PMN Value	Realisasi Keuangan Penggunaan Tambahan PMN Tahun 2024 (Rp juta) Financial Realization of Additional PMN Use in 2024 (millions Rupiah)			
				Sampai dengan TW I Until Quarter I	Sampai dengan TW II Until Quarter II	Sampai dengan TW III Until Quarter III	Sampai dengan TW IV Until Quarter IV
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (Seksi Bengkulu - Taba Penanjung) Section of the Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu Toll Road (Section of Bengkulu - Taba Penanjung)	30 April 2024 April 30, 2024	141,000	-	-	-	43,667
6	Ruas Jalan Tol Sigli - Banda Aceh Section of the Sigli - Banda Aceh Toll Road	30 April 2024 April 30, 2024	738,000	-	-	-	-
7	Ruas Jalan Tol Pekanbaru - Padang (Seksi Padang - Sicincin) Section of the Pekanbaru - Padang Toll Road (Section of Padang - Sicincin)	30 April 2024 April 30, 2024	2,131,000	-	-	-	699,519
8	Ruas Jalan Tol Pekanbaru - Padang (Seksi Pekanbaru - Pangkalan) Section of the Pekanbaru - Padang Toll Road (Section of Pekanbaru - Pangkalan)	30 April 2024 April 30, 2024	227,000	-	-	-	-
9	Ruas Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Seksi Palembang - Betung) Section of the Kayu Agung - Palembang - Betung Toll Road (Section of Palembang - Betung)	30 April 2024 April 30, 2024	13,427,000	-	101	1,543	3,410,526
Total Total			18,604,000	-	1,189,801	1,351,543	5,561,523

Realisasi Fisik Penggunaan Tambahan PMN Physical Realization of Additional PMN Usage			
Sampai dengan TW I Until Quarter I	**Sampai dengan TW II** Until Quarter II	**Sampai dengan TW III** Until Quarter III	**Sampai dengan TW IV** Until Quarter IV
9	**10**	**11**	**12**
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
90.97%	93.46%	95.01%	100.00%
58.76%	67.20%	78.90%	90.66%
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
0% (Proses PPJT) (PPJT Process)	0% (Proses PPJT) (PPJT Process)	0% (Terbit PPJT) (PPJT Published)	49.21%

Tabel Rincian Realisasi Penyertaan Modal Negara Tahun 2015-2024
Table of Details of State Capital Participation Realization of 2015-2024

No	Ruas Section	Panjang (km) Length (km)	Struktur Pendanaan (Rp miliar) Funding Structure (billions Rupiah)			
			Nilai Investasi Investment Values	PMN PMN	Pinjaman dan Lainnya Loan and Others	Dukungan Konstruksi Construction Support
Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I Trans Sumatra Toll Road Phase I						
1	Medan - Binjai Medan - Binjai	17	3,214	2,764	450	-
2	Bakauheni - Terbanggi Besar Bakauheni - Terbanggi Besar	140	15,905	2,217	13,688	-
3	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	106	13,987	4,844	9,143	-
	Dukungan Konstruksi TBPPKA TBPPKA Construction Support	83	8,376	-	-	8,376
4	Palembang - Simpang Indralaya Palembang - Indralaya Intersection	22	3,394	2,514	880	-
5	Pekanbaru - Dumai Pekanbaru - Dumai	132	20,169	10,421	9,748	-
6	Binjai - Langsa (Seksi Binjai - Pangkalan Brandan) Binjai - Langsa (Binjai - Pangkalan Brandan Section)	58	11,617	9,732	1,885	-
7	Sp Indralaya - Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya - Prabumulih) Sp Indralaya - Muara Enim (Indralaya - Prabumulih Intersection Section)	65	13,128	13,128	-	-
8	Kisaran - Indrapura Kisaran - Indrapura	48	6,321	5,714	608	-
9	Kuala Tanjung - Parapat (Seksi Kuala Tanjung - Pematang Siantar) Kuala Tanjung - Parapat (Kuala Tanjung - Pematang Siantar Section)	104	13,773	13,667	106	-
10	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (Seksi Taba Penanjung - Bengkulu) Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (Taba Penanjung - Bengkulu Section)	17	4,443	4,443	-	-
11	Sigli - Banda Aceh Sigli - Banda Aceh	74	13,555	13,555	-	-

Realisasi PMN (Rp miliar) PMN Realization (billions Rupiah)									Kekurangan PMN (Rp miliar) PMN Shortage (Billions Rupiah Billions)
2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah PMN diterima PMN Received in Total	
1,014	-	-	-	1,737	13	-	-	2,764	-
1,729	488	-	-	-	-	-	-	2,217	-
-	-	2,500	1,500	-	844	-	-	4,844	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
799	1,512			-	203	-	-	2,514	-
58		3,000	3,011	1,964	2,388	-	-	10,421	-
-	-	226	498	2,981	3,581	1,096	1,350	9,732	-
-	-	500	3,200	2,149	7,180	-	99	13,128	-
-	-	800	-	1,066	2,427	1,176	245	5,714	-
-	-	1,200	-	4,128	5,057	3,036	246	13,667	-
-	-	-	-	2,702	1,334	266	141	4,443	-
-	-	274	-	4,684	5,879	1,980	738	13,555	-

Tabel Rincian Realisasi Penyertaan Modal Negara Tahun 2015-2024
Table of Details of State Capital Participation Realization of 2015-2024

No	Ruas Section	Panjang (km) Length (km)	Struktur Pendanaan (Rp miliar) Funding Structure (billions Rupiah)			
			Nilai Investasi Investment Values	PMN PMN	Pinjaman dan Lainnya Loan and Others	Dukungan Konstruksi Construction Support
12	Pekanbaru - Padang (Seksi Sicincin - Padang) Pekanbaru - Padang (Sicincin - Padang Section)	37	9,848	9,470	378	-
13	Pekanbaru - Padang (Seksi Pekanbaru - Koto Kampar) Pekanbaru - Padang (Pekanbaru - Koto Kampar Section)	65	9,871	9,793	79	-
Subtotal Tahap I Phase I Subtotal		966	147,602	102,262	36,964	8,376
Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II **Trans Sumatra Toll Road Phase II**						
1	Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru Pekanbaru Junction-Bypass Pekanbaru	31	7,909	7,909	-	-
2	Betung-Tempino-Jambi Betung-Tempino-Jambi	137	21,012	7,367	13,645	-
	Dukungan Konstruksi Betung-Tempino-Jambi Betung-Tempino-Jambi Construction Support	34	5,995	-	-	5,995
3	Kayu Agung-Palembang-Betung (Seksi Palembang – Betung) Kayu Agung-Palembang-Betung (Palembang – Betung Section)	69	14,981	14,981	-	-
Subtotal Tahap II + Dukon Phase II Subtotal + Dukon		271	49,897	30,257	13,645	5,995

	Realisasi PMN (Rp miliar) PMN Realization (billions Rupiah)									Kekurangan PMN (Rp miliar) PMN Shortage (Billions Rupiah Billions)
	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah PMN diterima PMN Received in Total	
	-	-	2,000	-	-	-	5,339	2,131	9,470	-
	-	-	-	2,791	3,534	2,444	797	227	9,793	-
	3,600	2,000	10,500	11,000	24,945	31,350	13,690	5,177	102,262	-
	-	-	-	-	-	-	7,909	-	7,909	-
	-	-	-	-	82	-	7,285	-	7,367	-
	-	-	-	-	-	-	-	13,427	13,427	1,554
	-	-	-	-	82	-	15,194	13,427	28,703	1,554





Tinjauan Penunjang Bisnis

Business Support Review

Human Capital
Human Capital



Strategi Manajemen *Human Capital*

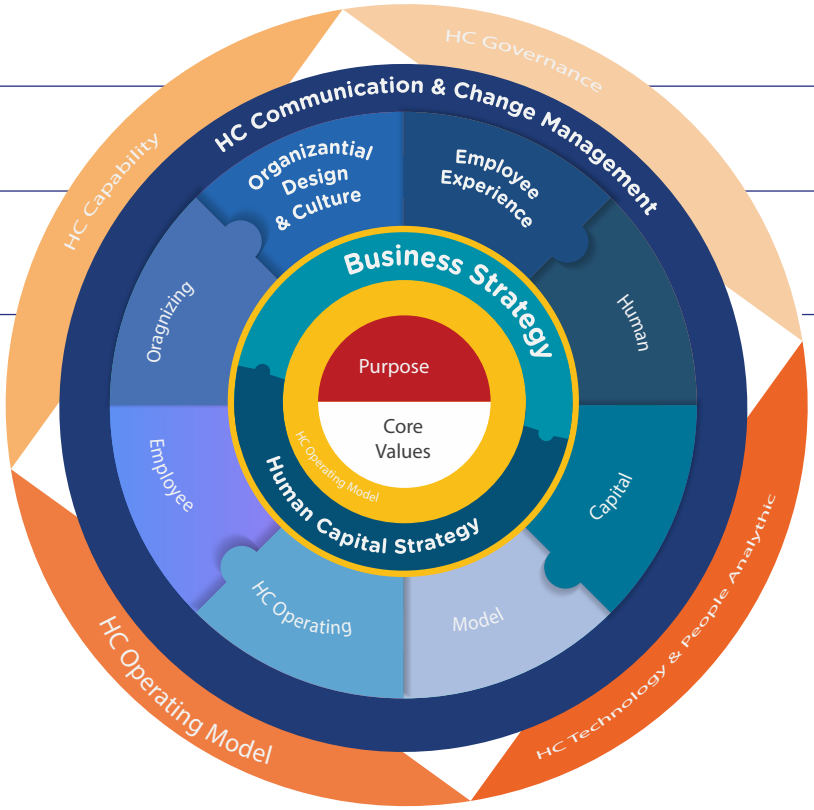
Human Capital (HC) *Strategy* direncanakan dan dilaksanakan secara terarah untuk memastikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif dan selaras dengan kebutuhan bisnis dan memastikan keberlanjutan bisnis yang kompetitif di industri infrastruktur. Hal ini sejalan dengan perwujudan visi menjadi "Pengembang Infrastruktur Terkemuka Indonesia" dan pencapaian misi "Membangun Kapasitas dan Kapabilitas Korporasi Yang Berkesinambungan Melalui Pemantapan *Human Capital* dan *Financial Capital*".

Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian BUMN (KBUMN) memaparkan terkait *Human Capital Architecture* BUMN yang menjelaskan tentang kerangka kerja pengelolaan SDM di BUMN. Penerapan HC Architecture BUMN tersebut dijabarkan oleh Perseroan ke dalam delapan pilar yang mencakup berbagai program strategis dan aktivitas untuk membangun ekosistem pengelolaan SDM yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Human Capital Management Strategy

Human Capital (HC) Strategy is carefully planned and implemented to ensure effective human resource management that aligns with business needs while maintaining a competitive and sustainable presence in the infrastructure industry. This strategy aligns with the company's vision of becoming "Indonesia's Leading Infrastructure Developer" and its mission to "Build Sustainable Corporate Capacity and Capability Through Strengthening Human Capital and Financial Capital."

The Assistant Deputy for Human Resource Management at the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) has presented the Human Capital Architecture for SOEs, outlining the framework for human resource management within state-owned enterprises. The company has adopted and implemented this HC Architecture through eight pillars, encompassing various strategic programs and activities aimed at building an effective, adaptive, and sustainable human resource management ecosystem.



8 HC Architecture Pillar

Delapan pilar HC Arsitektur menggambarkan fungsi kunci yang harus dijalankan oleh setiap HC BUMN agar HC dapat berperan sebagai Strategic Business Partner untuk mencapai strategi dan objektif perusahaan

The eight pillars of HC Architecture describe the key functions that must be carried out by each HC in SOEs (State-Owned Enterprises) so that HC can play a role as a Strategic Business Partner in achieving the company's strategy and objectives

HC Communication & Change Management

- HC harus mampu memastikan komunikasi dan kolaborasi internal antar fungsi dengan efektif berjalan
- HC harus memastikan semua kebijakan HC dikomunikasikan dengan baik kepada business leader dan pegawai, serta merancang shange management dan siap untuk menjalankan perubahan/trasnformasi yang dijalankan

- HC must be able to ensure effective communication and collaboration between functions internally.
- HC must ensure that all HC policies are communicated well to business leaders and employees, as well as design change management strategies and be ready to implement changes/ transformation efforts

4 HC Excellence Area

Merupakan factor kunci yang harus dijalankan secara utuh oleh HC agar operasional HC bisa berjalan ekselen

This is a key factor that must be carried out fully by HC to ensure that HC operations can run excellently.

Purpose & Core Values

- Tujuan BUMN yaitu "Hadir untuk Indonesia", beserta spirit insan BUMN "why we work in BUMN?" adalah sebagai value creator dan agent development
- Core value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) menjadi inti utama dari segala aktivitas HC

- The goal of SOE is "Hadir untuk Indonesia" (Present for Indonesia), and the spirit of SOE employees, "why we work in SOE?" is to be a value creator and agent of development
- The core value of AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) is central to all HC activities

Employee Value Propositon (EVP)

EVP BUMN yaitu "Belajar, Bertumbuh, dan Berkontribusi Untuk Indonesia" sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan HC BUMN. EVP merupakan kendaraan bagi Purpose dan Core Value bisa secara nyata dirasakan dan kelihatan dampaknya.

The SEO EVP, namely 'Learn, Grow, and Contribute for Indonesia,' serves as a key indicator of effective human capital management within SOEs. The EVP functions as an enabler, allowing the organization's Purpose and Core Values to be meaningfully internalized and visibly impactful.

HC - Business Strategy Alignment

Strategi Human Capital mendukung ketercapaian business strategy & objective dan memastikan dampaknya kepada bottom line. Business Strategy dan HC Strategy harus selaras terhadap Purpose dan Core Values BUMN.

The Human Capital strategy supports the achievement of business strategy and objectives while ensuring its impact on the bottom line. The Business Strategy and HC Strategy must be aligned with the Purpose and Core Values of SOE.

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital*

Rekrutmen

Kebijakan

Pengelolaan SDM Hutama Karya dilakukan secara menyeluruh dimulai dari perekrutan karyawan sampai karyawan menjalani masa purnabakti. Perseroan memberikan kesempatan peningkatan karir, remunerasi, hingga benefit untuk karyawan dalam pengelolaan karyawan. Implementasi pengelolaan SDM tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kualitas pelaksanaannya terus ditingkatkan sehingga target terkait dengan SDM dapat tercapai.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan Perseroan yang selaras dengan kebutuhan pengembangan usaha, Hutama Karya melakukan perencanaan kebijakan rekrutmen dan seleksi perencanaan karyawan dan rekrutmen. Terkait dengan hal ini, Hutama Karya mempertimbangkan berbagai aspek seperti arah pengembangan bisnis jangka panjang, produktivitas, *Strategic Workforce Planning* (SWP), kapasitas dan kapabilitas, serta kebutuhan pasar/industri.

Pelaksanaan Rekrutmen

Rekrutmen dikategorikan berdasarkan kebutuhan masing-masing divisi. Rekrutmen Perseroan dapat dapat dilakukan melalui jalur PKWT/ Kontrak Profesional (level officer dan/atau jabatan tertentu), maupun Internal KTS (Karyawan Tetap Setempat) menggunakan sistem *online* (*website* rekrutmen) dan *offline* (pengajuan berkas). Perseroan juga merencanakan pengembangan sistem rekrutmen khusus bagi Karyawan Disabilitas yang mengedepankan asas kesetaraan di masa mendatang. Hutama Karya juga melakukan rekrutmen melalui *roadshow* diberbagai Universitas dan kota untuk mendapatkan dan menemukan potensi kandidat terbaik. Selain itu, Perseroan memanfaatkan *job fair* sebagai sarana *branding* Perusahaan.

Perseroan sudah menerapkan sistem *online test* dalam proses seleksi. Seleksi yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan secara internal yang didukung oleh jasa pihak ketiga/*vendor* untuk melakukan seleksi psikotest dan jasa *medical check up* bagi para calon karyawan. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh kualitas kandidat karyawan yang terbaik secara objektif. Perseroan melakukan peninjauan kepada pihak ketiga/vendor setiap dua tahun sekali dalam rangka menjaga objektivitas hasil dan kualitas jasa. Perseroan menitikberatkan pada optimalisasi karyawan eksisting dan pemenuhan professional hire untuk pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan pada

Human Capital Management Policy and Implementation

Recruitment

Policies

Hutama Karya's human resources management is thorough from the recruitment of employees to the retirement of employees. The Company provides opportunities for career advancement, remuneration and benefits for employees in the management of employees. The implementation of HR management is carried out in accordance with the applicable regulations and the quality of implementation is continuously improved in order to achieve the goals related to HR.

In order to support the growth of the company in accordance with the business development needs, Hutama Karya plans the recruitment policy and selects the staff planning and recruitment. In doing so, Hutama Karya considers various aspects such as long-term business development direction, productivity, SWP (Strategic Workforce Planning), capacity and capability, and market/ industry needs.

Recruitment Implementation

Recruitment is categorized based on the specific needs of each division. The company's recruitment can be carried out through Management Trainee (MT), PKWT/Professional Contracts (Officer level and/or certain positions), as well as Internal KTS (Local Permanent Employees) using the online system (recruitment website) and offline (submission of files). In the future, the company also plans to develop a special recruitment system for employees with disabilities that prioritizes the principle of equality. Hutama Karya is in the forefront of recruiting through recruitment road shows in various universities and cities to attract and find the best potential candidates. As a means of corporate branding, the company also uses job fairs.

The Company has implemented an online testing system as part of the selection process. The company's selection is carried out internally with the support of third party services/vendors for psychological test selection and medical check-up services for prospective employees. This step aims to obtain the best quality employee candidates in an objective manner. In order to maintain the objectivity of the results and the quality of the services, the Company reviews the third-party services/vendors every two years. In the recruitment and selection process, the Company focuses on optimizing existing employees and making professional hires to meet the competencies

proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Di sisi lain, Hutama Karya melakukan upaya pencegahan penyebaran informasi bohong/*hoax* melalui pemberitahuan secara berkala di sosial media Perseroan.

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Kemampuan suatu organisasi untuk dapat bertumbuh, berkembang dan berkelanjutan didasari atas keberadaan Karyawan dengan kapabilitas individu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Setiap karyawan dianggap sebagai aset Perusahaan yang sangat penting. Karyawan adalah *core* dan roda utama dalam menggerakan seluruh proses bisnis Perusahaan dan pihak Manajemen percaya bahwa kinerja Perusahaan juga bergantung pada kompetensi dan kapabilitas karyawannya.

Mengacu pada *Employee Value Proposition* (EVP) Hutama Karya yang telah ditetapkan yaitu "Belajar, Bertumbuh dan Berinovasi" menjadi selaras atas upaya Perusahaan dalam mengembangkan kapabilitas Karyawan untuk terus belajar dan bertumbuh sehingga dapat berinovasi untuk terus membantu Perusahaan untuk berkontribusi bagi Indonesia. Salah satu langkah perwujudannya adalah pembentukan *Unit Center of Excellence* untuk melakukan pengembangan *Human Capital* yang terintegrasi sebagai salah satu upaya keberlangsungan proses bisnis dan ketercapaian target Perusahaan. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Perseroan.

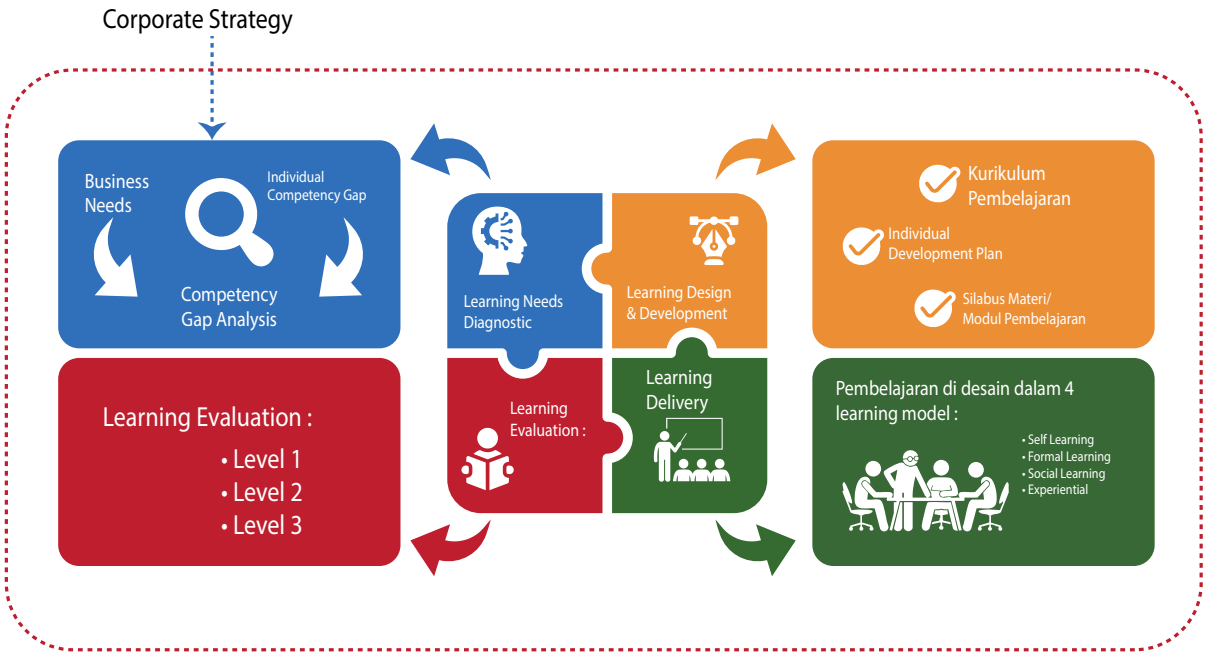
required by the Company. On the other hand, through regular notifications on social media and the Company's recruitment website, Hutama Karya makes efforts to prevent the spread of false/ fake information.

Competency Development

Policy

An organization's ability to grow, develop, and sustain itself is based on having employees with individual capabilities that align with the company's business needs. Every employee is regarded as a vital corporate asset. Employees serve as the core and primary driving force behind all business processes. Management firmly believes that the company's performance is also dependent on the competency and capability of its employees.

Referring to Hutama Karya's Employee Value Proposition (EVP)—"Learn, Grow, and Innovate"—the company aligns its efforts to enhance employee capabilities, enabling them to continuously learn, grow, and innovate to contribute to Indonesia. One key initiative in realizing this commitment is the establishment of a Center of Excellence Unit, which focuses on integrated Human Capital development as a means to ensure business continuity and the achievement of corporate targets. In competency development, the company provides equal opportunities for all employees to participate in various competency development programs organized by the company.



Learning & Knowledge Manajement System

Gambar tersebut merupakan model pengembangan kompetensi individu dalam Hutama Karya. Model ini menunjukkan bagaimana kebutuhan bisnis yang terus berubah dapat dijembatani dengan meningkatkan kompetensi karyawan. Prosesnya dimulai dengan menganalisis kesenjangan kompetensi antara kebutuhan bisnis dengan kemampuan individu. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merancang program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

The image represents Hutama Karya's Individual Competency Development Model. This model illustrates how the constantly evolving business needs can be addressed by enhancing employee competencies. The process begins with analyzing competency gaps between business requirements and individual capabilities. The results of this analysis are then used to design customized learning programs tailored to the specific needs of each employee.

Program pembelajaran yang dirancang dalam model ini memiliki beberapa tahap, mulai dari diagnosa kebutuhan belajar, desain pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Tahap-tahap ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa program pembelajaran yang diberikan efektif dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Selain itu, model ini juga menekankan pentingnya berbagai metode pembelajaran, seperti pembelajaran mandiri, formal, sosial, dan pengalaman, untuk mengakomodasi preferensi belajar yang berbeda-beda. Semua proses pembelajaran ini kemudian dikelola melalui sistem manajemen pembelajaran dan pengetahuan untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kompetensi karyawan.

The learning programs designed within this model consist of several stages, starting from diagnosing learning needs, designing learning programs, and evaluating learning outcomes. These stages are carried out systematically to ensure that the provided learning programs effectively enhance employee competencies. Additionally, the model emphasizes the importance of various learning methods, including self-learning, formal training, social learning, and experiential learning, to accommodate different learning preferences. All these learning processes are managed through a learning and knowledge management system to ensure the sustainability of employee competency development.

Selain itu, proses pembelajaran juga difasilitasi dengan *learning & knowledge platform* berupa media Hakademy dan Linked in Learning. Modul Hakademy berfungsi menjadi *tools* untuk mengumpulkan aset pengetahuan dari aktivitas dan proses bisni, di antaranya materi pelatihan, hasil diskusi bersama Komunitas Praktisi, hasil karya inovasi dan lain-lain. Secara ringkas, gambar tersebut merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengembangan kompetensi Insan Hutama. Model ini menjadi panduan bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

Additionally, the learning process is facilitated through a learning & knowledge platform, including Hakademy and LinkedIn Learning. The Hakademy module serves as a tool for collecting knowledge assets from business activities and processes, such as training materials, discussions with the Community of Practice, innovation outputs, and more. In summary, the image represents a comprehensive competency development framework for Hutama Karya employees. This model acts as a guideline for the company in its efforts to enhance employee performance and achieve its business objectives.

Melalui Unit *Center of Excellence* sebagai Unit di Divisi Human Capital, harapannya menjadi menjadi pusat keunggulan pengembangan talenta terintegrasi yang selaras dengan strategis bisnis Perusahaan dengan 4 (empat) portofolio meliputi *Learning Center, Knowledge & Innovation Center* dan *Assessment Center*, serta *Alliance & Partnership*. Keempat pilar tersebut berpusat pada pengembangan kapabilitas Karyawan serta Perusahaan Hutama Karya itu sendiri dengan beberapa enablers yang mendukung pengembangan tersebut.

Through the Center of Excellence Unit within the Human Capital Division, the aim is to create an integrated talent development hub aligned with the company's business strategy. This is achieved through four key portfolios: Learning Center, Knowledge & Innovation Center, Assessment Center, and Alliance & Partnership. These four pillars focus on developing both employee capabilities and the company itself, supported by several enablers that facilitate this development.

Fokus pada pilar Learning Center adalah Training, Education, Development dan Certification yang akan memaksimalkan potensi yang dimiliki karyawan dalam peningkatan manajerial, kepemimpinan, kemampuan bisnis, dan kemampuan teknis dengan tujuan bahwa setiap karyawan diharapkan untuk menjadi pemimpin yang memiliki attitude baik, mampu meningkatkan kerja tim, dan mampu memberikan kinerja serta kontribusi tinggi bagi Perusahaan. Berikut adalah beberapa program pengembangan yang telah dilakukan sampai Tahun 2024.

The Learning Center pillar focuses on Training, Education, Development, and Certification, aiming to maximize employees' potential in improving managerial, leadership, business, and technical skills. The goal is for every employee to become a leader with a positive attitude, strong teamwork abilities, and the capacity to deliver high performance and meaningful contributions to the company. Below are some development programs that have been implemented up to the year 2024.

Pada pilar Knowledge & Innovation Center dan Assessment, Manajemen menyadari pengetahuan yang ada di kepala karyawan juga merupakan aset yang berharga dan berperan penting bagi *business continuity* dan *sustainability*. Dengan hal tersebut, Perusahaan juga kerap melakukan *knowledge sharing* melalui berbagai forum seperti HK Academy dan Komunitas Praktisi Insan Hutama.

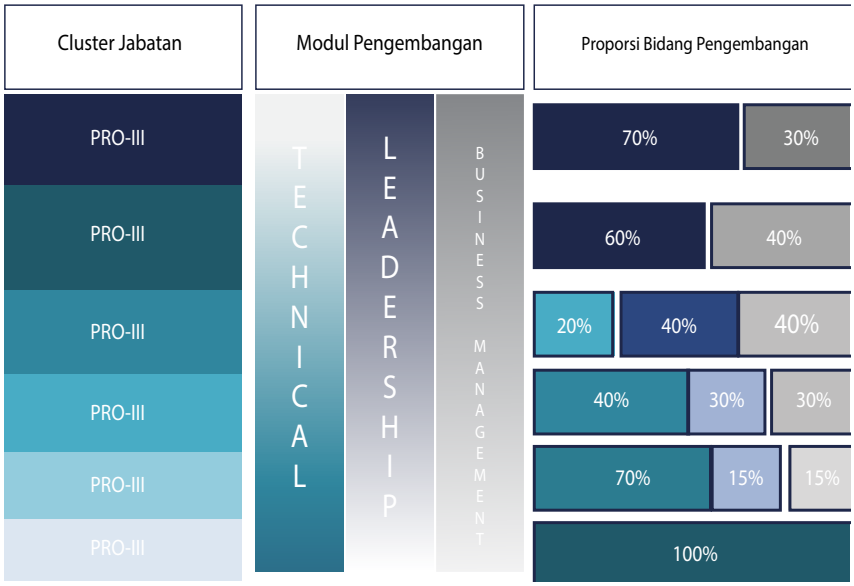
In the Knowledge & Innovation Center and Assessment pillar, management recognizes that the knowledge employees possess is a valuable asset that plays a crucial role in business continuity and sustainability. To support this, the company frequently conducts knowledge-sharing sessions through various forums, such as HK Academy and the Insan Hutama Practitioner Community.

Hutama Karya menjalankan fungsi *Alliance & Partnership* dengan menggandeng Universitas dan instansi terkait industri konstruksi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendukung inovasi teknologi, dan memperkuat citra perusahaan. Melalui kolaborasi ini, perusahaan mengembangkan program pelatihan, magang, serta penelitian bersama yang relevan dengan tren terkini di industri. Partisipasi dalam berbagai kegiatan akademik dan profesional juga memberikan exposure lebih luas, sekaligus meningkatkan brand image Hutama Karya sebagai BUMN di bidang jasa konstruksi.

Hutama Karya carries out the Alliance & Partnership function by collaborating with universities and institutions related to the construction industry to enhance human resource competencies, support technological innovation, and strengthen the company's image. Through this collaboration, the company develops training programs, internships, and joint research projects that align with the latest industry trends. Participation in various academic and professional activities also provides broader exposure while enhancing Hutama Karya's brand image as a state-owned enterprise in the construction services sector.

Didasarkan pada Prosedur Perencanaan & Pelaksanaan Pelatihan Talenta nomor HC/LD/P/002 Revisi 03 tanggal 12 Juli 2022 program pelatihan dan sertifikasi dilaksanakan guna mendukung aspek 10% dari desain pengembangan kompetensi. Aspek 20% didukung dengan pelaksanaan program knowledge management sebagaimana diatur dalam Prosedur Manajemen Pengetahuan nomor HC/LD/P/03 tanggal 26 September 2022 dan Prosedur Pengelolaan Subject Matter Expert (SME) nomor HC/LD/P/01 tanggal 12 Juli 2022. Selanjutnya dalam mendukung proses pengembangan karyawan melalui pendidikan formal dihadirkan pula program beasiswa pendidikan lanjutan yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 3929/KPTS/100/X/2022 tentang Program Pendidikan Lanjutan Di Dalam/Luar Negeri Bagi Karyawan PT Hutama Karya (Persero). Secara filosofi pengembangan kompetensi karyawan, mengacu dengan konsep taksonomi bloom yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan.

Based on the Talent Training Planning & Implementation Procedure number HC/LD/P/002 Revision 03 dated July 12, 2022, training and certification programs are conducted to support the 10% aspect of competency development design. The 20% aspect is supported by the implementation of knowledge management programs, as regulated in the Knowledge Management Procedure number HC/LD/P/03 dated September 26, 2022, and the Subject Matter Expert (SME) Management Procedure number HC/LD/P/01 dated July 12, 2022. Furthermore, to support employee development through formal education, an advanced education scholarship program is also provided, based on the Board of Directors Decree Number 3929/KPTS/100/X/2022 regarding Advanced Education Programs at Domestic/Overseas Institutions for PT Hutama Karya (Persero) Employees. Philosophically, employee competency development refers to Bloom's Taxonomy, which is adjusted to align with the company's business needs.



Keterangan:
*) Jarak Pembelajaran dan Pengembangan Karyawan dibagi 3 (tiga) aspek yang mencakup Leadership Competency, Business & Managerial Competency, Technical Competency
**) Proporsi Pengembangan Karyawan semakin banyak aspek Leadership dan aspek Technical semakin sedikit.
***) Proporsi pembelajaran dan pengembangan Business & Managerial Competency karyawan semakin keatas semakin mendalam dan kompleks
****) Dalam Matriks di bab us, alon dijabarkan jenis modul dengan minimum ketercapaian pelaksanaan perkaryawan sesuai clusteredlabus adalah 80% dari total modul yang telah ditetapkam untuk suatu cluster grnade maupun cluster job family (pada lampiran 2 keputusan ini)

*) Jarak Pembelajaran dan Pengembangan Karyawan dibagi 3 (tiga) aspek yang mencakup Leadership Competency, Business & Managerial Competency, Technical Competency
**) Proporsi Pengembangan Karyawan semakin banyak aspek Leadership dan aspek Technical semakin sedikit.
***) Proporsi pembelajaran dan pengembangan Business & Managerial Competency karyawan semakin keatas semakin mendalam dan kompleks
****) Dalam Matriks di bab us, alon dijabarkan jenis modul dengan minimum ketercapaian pelaksanaan perkaryawan sesuai clusteredlabus adalah 80% dari total modul yang telah ditetapkam untuk suatu cluster grnade maupun cluster job family (pada lampiran 2 keputusan ini)

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Perseroan. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perseroan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi pekerja secara intensif dan berkesinambungan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Program Beasiswa Pendidikan Lanjutan (Pasca Sarjana)
   Bahwa untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan kompetensi serta mendukung kesediaan Human Capital sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) terkait lini bisnis dimasa yang akan datang, maka PT Hutama Karya (Persero) mengadakan Program Beasiswa Pendidikan Lanjutan (Pasca Sarjana) bagi karyawan yang berprestasi dan berdedikasi bagi Perusahaan. Berikut Program Beasiswa Pendidikan Lanjutan Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang dilaksanakan Perusahaan baik yang masih berlangsung pada Tahun 2024, antara lain:
   a. Program Beasiswa Pendidikan Lanjutan Luar Negeri

Implementation of Competency Development

The company provides equal opportunities for all employees to participate in competency development programs organized by the company. In line with this principle, the company implements intensive and continuous employee competency development programs.

The competency development initiatives carried out by the company are as follows:

1. Postgraduate Education Scholarship Program

   To support efforts in enhancing quality and competency, as well as ensuring the availability of Human Capital under the Company's Long-Term Plan (RJPP) for future business lines, PT Hutama Karya (Persero) provides a Postgraduate Education Scholarship Program for employees who demonstrate outstanding performance and dedication to the company. Below are the Domestic and International Postgraduate Education Scholarship Programs that are ongoing in 2024:

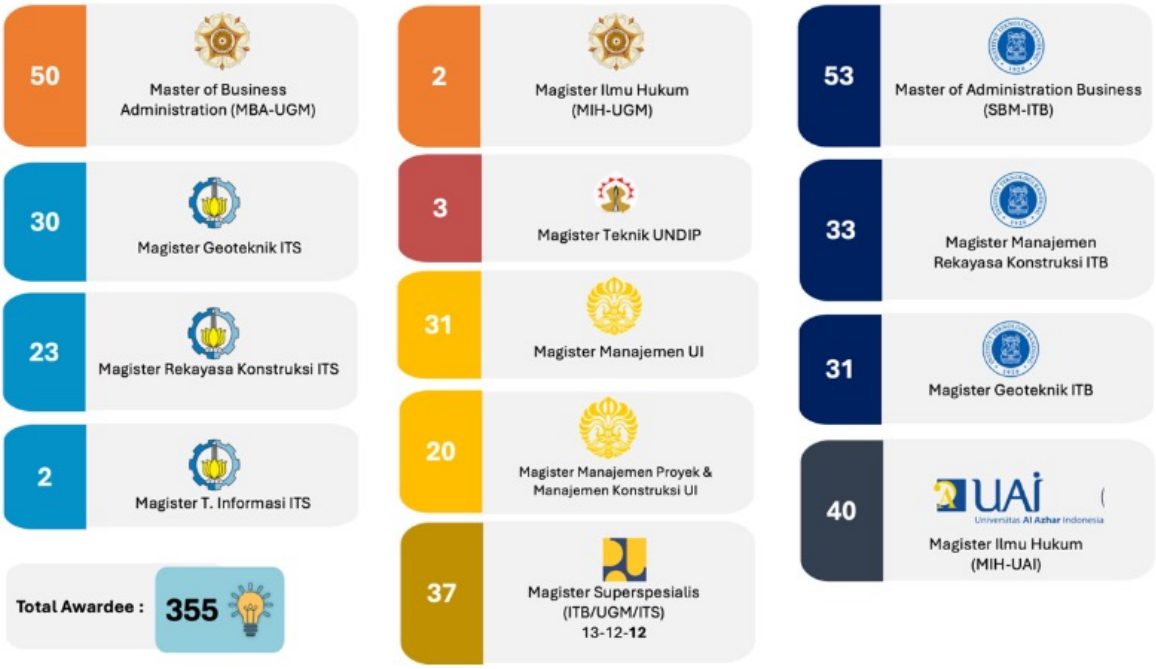
   a. International Postgraduate Education Scholarship Program

Total 2

1 Columbia University
Master of Science in Human Capital Management
Columbia Unversity, NY

1 The University of Western Australia
Master of Building Information Modelling
Unversity of Western Australia

b. Program Beasiswa Pendidikan Lanjutan Dalam Negeri



Berikut Program Beasiswa Pendidikan Lanjutan Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang telah selesai sampai dengan Tahun 2024:

- Master of Business Administration, Indiana University: 1 orang
- Program Master Business Administration Institut Teknologi Bandung: 13 orang
- Program Master Business Administration Universitas Indonesia: 10 orang
- Program Master Business Administration Universitas Gadjah Mada: 15 orang
- Program Magister Geoteknik Institut Teknologi Bandung: 21 orang
- Program Magister Geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember: 10 orang
- Program Magister Manajemen Rekayasa Konstruksi Institut Teknologi Sepuluh Nopember: 10 orang
- Program Magister Super Spesialis kerjasama dengan PUPR: 8 orang
- Program Magister Teknik Universitas Indonesia: 10 orang

2. Program Kepemimpinan Lapangan & Bela Negara

Sebagai bentuk dukungan terhadap visi pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Maju, PT Hutama Karya (Persero) berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas talenta perusahaan. Talenta yang berkualitas tidak hanya dibutuhkan dalam hal keahlian teknis,

b. Domestic Postgraduate Education Scholarship Program

Below are the Domestic and International Postgraduate Education Scholarship Programs that have been completed as of 2024:

- Master of Business Administration, Indiana University: 1 person
- Master of Business Administration Program, Bandung Institute of Technology: 13 persons
- Master of Business Administration Program, University of Indonesia: 10 persons
- Master of Business Administration Program, Gadjah Mada University: 15 persons
- Master of Geotechnics Program, Bandung Institute of Technology: 21 persons
- Master of Geotechnics Program, Sepuluh Nopember Institute of Technology: 10 persons
- Master of Construction Engineering Management Program, Sepuluh Nopember Institute of Technology: 10 persons
- Super Specialist Masters Program in collaboration with PUPR: 8 persons
- Master of Engineering Program, University of Indonesia: 10 persons

2. The Leadership and State Defense Program

As part of its support for the government's vision to develop superior human resources towards a progressive Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) is committed to enhancing the capacity and capability of its talent. High-quality talent is not only required in terms of technical expertise but also in attitude, behavior, and

tetapi juga dalam sikap, perilaku, dan kebugaran fisik. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap karyawan BUMN. Program Pelatihan Kepemimpinan Lapangan dan Bela Negara bertujuan untuk membentuk karyawan yang tidak hanya disiplin dan berpengetahuan, tetapi juga terampil, memiliki kebugaran jasmani, serta berintegritas tinggi. Beberapa kompetensi inti yang dikembangkan dalam program ini meliputi:

a. Kepemimpinan: Meningkatkan kemampuan kepemimpinan baik dalam memimpin diri sendiri maupun dalam mengelola tim secara efektif.
b. Kesadaran Bela Negara: Menumbuhkan rasa cinta tanah air, pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, dan tanggung jawab terhadap negara.
c. Kedisiplinan: Membangun sikap disiplin tinggi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.
d. Kerja Sama Tim: Meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama.
e. Keterampilan Komunikasi: Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.
f. Ketahanan Fisik dan Mental: Meningkatkan daya tahan fisik dan ketangguhan mental untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaan dan kehidupan.
g. Pemecahan Masalah: Mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah secara cepat dan tepat.
h. Etika dan Integritas: Menanamkan pentingnya bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam setiap aspek pekerjaan.
i. Manajemen Sumber Daya: Meningkatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya, termasuk waktu, peralatan, dan tenaga manusia, dengan efisien.
j. Perencanaan dan Strategi: Mengembangkan kemampuan untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Melalui pengembangan kompetensi-kompetensi tersebut, diharapkan karyawan PT Hutama Karya (Persero) dapat menjadi pemimpin yang tangguh, profesional, dan siap menghadapi tantangan dalam rangka mendukung visi Indonesia Maju. Program ini telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pelatihan lapangan, simulasi kepemimpinan, serta latihan fisik dan mental untuk mempersiapkan talenta unggul yang siap berkontribusi maksimal.

physical fitness. Therefore, national insight and state defense awareness are essential aspects that every SOE employee should possess. The Leadership and State Defense Training Program aims to shape employees who are not only disciplined and knowledgeable but also skilled, physically fit, and highly dedicated. Some of the core competencies developed in this program include various essential skills necessary for professional and personal growth:

a. Leadership: Enhancing leadership skills in both self-management and team management.
b. State Defense Awareness: Fostering patriotism, understanding of Pancasila values, and responsibility towards the nation.
c. Discipline: Building a high level of discipline in work and daily life.
d. Teamwork: Strengthening the ability to collaborate effectively to achieve common goals.
e. Communication Skills: Developing effective communication skills and constructive conflict resolution.
f. Physical and Mental Resilience: Improving physical endurance and mental toughness to face challenges in work and life.
g. Problem-Solving: Sharpening analytical and problem-solving abilities for quick and accurate decision-making.
h. Ethics and Integrity: Instilling the importance of acting with integrity and honesty in all aspects of work.
i. Resource Management: Enhancing the ability to manage resources, including time, equipment, and manpower efficiently.
j. Planning and Strategy: Developing the ability to plan and implement appropriate strategies to tackle challenges in the field.

Through the development of these competencies, employees of PT Hutama Karya (Persero) are expected to become resilient and professional leaders who are prepared to face challenges in support of the Indonesia Maju vision. This program has been implemented throughout 2024 through various activities, including field training, leadership simulations, as well as physical and mental exercises, to prepare outstanding talents capable of making maximum contributions.

1. Pemantapan Nilai – Nilai Kebangsaan - LEMHANNAS RI
   Program Pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan – LEMHANNAS RI merupakan salah satu inisiatif pengembangan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh PT Hutama Karya (Persero). Program ini bertujuan untuk mencetak pemimpin yang kompeten serta meningkatkan loyalitas terhadap Bangsa, Negara, dan Perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam II (Dua) batch.

   Batch I diselenggarakan secara luring (offline) bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan PT Brantas Abipraya (Persero) pada tanggal 24–30 Juni 2024. Pelatihan ini diikuti oleh 34 karyawan dengan jabatan setara Executive Vice President, Vice President, serta Manager/Sr. Analyst.





   Batch II diselenggarakan secara luring (offline) bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Persatuan Insinyur Indonesia pada tanggal 26 Agustus – 1 September 2024. Pelatihan ini diikuti oleh 9 Karyawan dengan jabatan setara Vice President.





1. Strengthening National Values - LEMHANNAS RI
   The Strengthening National Values Training Program – LEMHANNAS RI is a leadership development initiative organized by PT Hutama Karya (Persero). This program aims to cultivate competent leaders while enhancing loyalty to the Nation, the State, and the Company. The program is conducted in two batches.

   Batch I was held in an offline format in collaboration with the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (LEMHANNAS RI) and PT Brantas Abipraya (Persero) from June 24 to 30, 2024. The training was attended by 34 employees holding positions equivalent to Executive Vice President, Vice President, and Manager/Senior Analyst.

   Batch II was conducted in an offline format in collaboration with the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (LEMHANNAS RI) and the Indonesian Engineers Association from August 26 to September 1, 2024. This training was attended by nine employees holding positions equivalent to Vice President.

2. Program Pelatihan Kepemimpinan Lapangan & Bela Negara – Pusdikzi
   Pelatihan Kepemimpinan Lapangan dan Bela Negara diselenggarakan dengan tujuan utama untuk membekali karyawan dengan sikap dan perilaku disiplin sebagai warga negara yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar kemiliteran yang mendukung kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan di lapangan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan kondisi jasmani peserta berada dalam keadaan prima, guna mendukung kinerja yang optimal dalam berbagai tugas perusahaan dan negara.

   Program ini diadakan oleh PT Hutama Karya (Persero) bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Zeni – TNI AD untuk memberikan pelatihan yang komprehensif dalam berbagai aspek kepemimpinan, bela negara, dan pengembangan fisik. Pelatihan Kepemimpinan Lapangan dan Bela Negara dilaksanakan secara luring di Pusat Pendidikan Zeni, Bogor, Jawa Barat, pada periode 20 Agustus 2024 hingga 2 September 2024. Pelatihan ini menggabungkan teori dan praktik lapangan yang dirancang untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta mempersiapkan karyawan untuk memiliki kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

   Kegiatan ini diikuti oleh 66 peserta, yang terdiri dari Karyawan Future Leader dan Karyawan PKWT yang telah diangkat menjadi Karyawan Tetap PT Hutama Karya (Persero) Angkatan XIX-XX tahun 2024. Peserta pelatihan mendapatkan berbagai modul pembelajaran yang meliputi dasar-dasar kemiliteran, strategi kepemimpinan, kerja sama tim, ketahanan fisik dan mental, serta wawasan kebangsaan. Selain itu, mereka juga menjalani latihan fisik yang intensif, seperti berlari, rintangan, dan kegiatan militer lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan stamina dan kekuatan fisik mereka.

   Pelatihan ini bertujuan untuk menghasilkan karyawan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga memiliki mentalitas kepemimpinan yang kuat, disiplin tinggi, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, yang dapat mendukung kesuksesan PT Hutama Karya dalam mewujudkan visi perusahaan serta berkontribusi pada kemajuan negara.

   Berdasarkan hasil evaluasi oleh Peserta kegiatan program Kepemimpinan Lapangan dan Bela Negara ini dinilai baik dan bermanfaat

2. Field Leadership and National Defense Training Program – Pusdikzi
   The Field Leadership and National Defense Training Program is conducted with the primary objective of equipping employees with a disciplined attitude and responsible citizenship, while also enhancing their knowledge and fundamental military skills to support their readiness in facing challenges in the field. Additionally, this program aims to ensure that participants maintain peak physical condition, enabling them to perform optimally in fulfilling various duties for both the company and the nation.

   This program is organized by PT Hutama Karya (Persero) in collaboration with the Engineering Education Center of the Indonesian Army (Pusat Pendidikan Zeni – TNI AD) to provide comprehensive training in various aspects of leadership, national defense, and physical development. The Field Leadership and National Defense Training Program was conducted in an offline format at the Engineering Education Center in Bogor, West Java, from August 20 to September 2, 2024. The training combines theoretical instruction with practical field exercises designed to build character, enhance discipline, and prepare employees to develop strong leadership skills in overcoming various challenges.

   This program was attended by 66 participants, consisting of Future Leader employees and PKWT employees who were officially appointed as Permanent Employees of PT Hutama Karya (Persero) for the XIX-XX batch of 2024. The training provided participants with various learning modules covering military fundamentals, leadership strategies, teamwork, physical and mental resilience, and national awareness. In addition, they underwent intensive physical training, including running, obstacle courses, and other military exercises aimed at enhancing their stamina and physical strength.

   This training aims to develop employees who not only possess strong technical skills but also demonstrate a resilient leadership mentality, high discipline, and a deep commitment to national values. These qualities are essential in supporting PT Hutama Karya's success in achieving its corporate vision and contributing to the nation's progress.

   Based on the evaluation results from the participants, the Field Leadership and National Defense Training Program was considered

untuk meningkatkan kedisiplinan, mental, dan jiwa korsa karyawan, namun disarankan agar tempo kegiatan disesuaikan dengan kondisi fisik karyawan, durasi pelatihan diperpanjang menjadi 3 bulan, dan metode pembelajaran lebih interaktif serta efektif; fasilitas untuk ibu menyusui dan dukungan obat-obatan perlu ditingkatkan standar fasilitas kesehatan.

beneficial in enhancing employee discipline, mental resilience, and esprit de corps. However, several recommendations were made for improvement, including adjusting the training pace to align with employees' physical conditions, extending the program duration to three months, and adopting more interactive and effective learning methods. Additionally, it was suggested that facilities for nursing mothers and the availability of medical supplies be improved to meet higher healthcare standards.





3. Pelatihan & Sertifikasi 2024
   Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, disipilin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian di bidangnya. Serta mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan yang dikehendaki, maka Perusahaan mengadakan Program Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Berikut adalah beberapa pelatihan yang telah dilakukan pada Tahun 2024, antara lain:

3. Training & Certification 2024
   To develop and enhance work competencies, productivity, discipline, attitude, and work ethic at various skill and expertise levels, as well as to minimize or eliminate gaps between the desired and actual capabilities of employees, the company has implemented an Education and Training Program. This program is designed to align with the job levels and qualifications of employees. Below are some of the training programs conducted in 2024:

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
1	Officer	1	Certification	Sertifikasi *Certified IDEA Data Analyst (CIDA)* Certified IDEA Data Analyst (CIDA) Certification	PT Insight Consulting	Jakarta, 10 & 12 Januari 2024 Jakarta, January 10 & 12, 2024
2	Officer - Sr. Analyst	4	Technical	Seminar "Membangun Integritas, Memperkuat Reputasi" Seminar "Building Integrity, Strengthening Reputation"	PT Waskita Karya (Persero)	Jakarta, 05 Januari 2024 Jakarta, January 05, 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
3	VP setingkat VP level	2	Certification	Pelatihan & Sertifikasi Asesor Kompetensi BNSP Sektor Konstruksi Training & Certification of BNSP Competency Assessors in the Construction Sector	PU-BANGUN	Jakarta, 15-19 Januari 2024 Jakarta, January 15-19, 2024
4	Kepala Unit - EVP Unit Head - EVP	2	Leadership	*Chief Human Resource Officer (CHRO) Masterclass - Innovation Workplace "Work Less Produce More"*	BUMN School of Excellence	Jakarta, 18 Januari 2024 Jakarta, January 18, 2024
5	Personil Inti Proyek Project Core Personnel	33	Technical	*Webinar "Installing Optimism"*	PELINDO	*Virtual Class*, 20 Januari 2024 January 20, 2024
6	Officer - Manager setingkat Officer - Manager level	50	Technical	*Integrated Management System QHSE & ISO 39001 Refreshment*	PT SGS Indonesia	*Virtual Class*, 22-23 Januari 2024 January 22-23, 2024
7	Officer - VP setingkat Officer - VP level	30	Technical	Pelatihan Integrated Management System Internal Audit QHSE & ISO 39001 Integrated Management System Internal Audit QHSE & ISO 39001 Training	PT SGS Indonesia	*Virtual Class,* 24-26 Januari 2024 January 24-26, 2024
8	Analyst - VP setingkat Analyst - VP level	115	Certification	Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP) Certification	CRMS Indonesia & Lembaga Sertifikasi Profesi MKS CRMS Indonesia & Lembaga Sertifikasi Profesi MKS	Jakarta, 29 Januari - 02 Februari; 13-17 Mei; 24 September; 07-11 & 29 Oktober; 11-15 November 2024 Jakarta, January 29 - February 02; May 13-17; September 24; October 07-11 & 29; November 11-15, 2024
9	Officer - Expert	2	Certification	Pelatihan Governance Fundamentals & Uji Sertifikasi Certified Governance Professional (CGP) Governance Fundamentals Training & Certified Governance Professional (CGP) Certification Test	CRMS Indonesia & LSP MKS	*Virtual Class*, 30 Januari - 02 Februari 2024 January 30 - February 02, 2024
10	Manager - VP	2	Technical	Workshop Integrating Risk Capacity with Organizational Risk Appetite	GRC Management	Bogor, 01-02 Februari 2024 February 01-02, 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
11	Officer - EVP	5	Technical	Pelatihan Chartered Financial Analyst (CFA) – Level 1 Chartered Financial Analyst (CFA) Training – Level 1	PPM Manajemen	*Virtual Class*, 05 Februari - 08 Maret 2024 February 05 - March 08, 2024
12	Officer - VP	27	Technical	Workshop Enterprise Risk Management (ERM)	PT Cipta Kreasi Talenta (Thanra Consulting)	Jakarta, 13, 15, 16 Februari 2024 February 13, 15, 16, 2024
13	Officer - Expert	17	Certification	Pelatihan & Sertifikasi Calon Asesor Kompetensi BNSP Sektor Konstruksi (ASKOM) Periode Februari 2024 Training & Certification of BNSP Competency Assessor Candidates for the Construction Sector (ASKOM) Period February 2024	PT. LSP ATM	Jakarta, 19-13 Februari 2024 February 19-13, 2024
14	Officer	2	Certification	Pelatihan Recognition of Prior Learning (RPL) untuk Register Negara Akuntan	Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)	Jakarta, 19-22 Februari 2024 February 19-22, 2024
15	VP setingkat	1	Certification	Uji Sertifikasi Certified Human Resource Manager (CHRM)	PPM Manajemen	Jakarta, 02 Februari 2024 February 2, 2024
16	Direktur Anak Perusahaan Subsidiary Director	5	Managerial & Business	Mini MBA Real Estate Program	Center for Strategic Entrepreneurial Leadership Universitas Indonesia (CSEL UI)	*Virtual Class*, 23-24 Februari, 07 Maret, 09 Maret-30 Mei 2024 23-24 February, 07 March, 09 March-30 May 2024
17	Officer - Sr. Analyst	30	Technical	Pelatihan Awareness ISO 37001:2016 SMAP ISO 37001:2016 SMAP Awareness Training	Sucofindo	Jakarta, 28-29 Februari 2024 28-29 February 2024
18	Karyawan Masa Persiapan Purna Bakti Employees in Preparatory Period for Retirement	25	Technical	Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) Tahun 2024 Retirement Preparation Period (MPP) Training in 2024	PT Arga Nusa Persada / ESQ	Bogor, 01-03 Maret 2024 01-03 March 2024
19	Officer	4	Technical	Pelatihan Talent & Knowledge Management Batch 5 - I2LI Talent & Knowledge Management Training Batch 5 - I2LI	BUMN Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI)	*Virtual Class*, 04 Maret - 02 April 2024 March 04 - April 02, 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
20	Officer - EVP	13	Technical	Pelatihan Penilai Risk Maturity Index (RMI) Batch II Risk Maturity Index (RMI) Assessor Training Batch II	Kementerian BUMN	Bogor, 08 Maret 2024 March 08, 2024
21	Analyst	4	Certification	Pelatihan & Sertifikasi *Certified Practitioner of Internal Auditor (CPIA)* Certified Practitioner of Internal Auditor (CPIA) Training & Certification	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)	*Virtual Class*, 18 Maret - 01 April 2024 March 18 - April 01, 2024
22	Analyst	20	Technical	Pelatihan *Green Gas House (GHG) ISO 14064-1 Awareness* Green Gas House (GHG) ISO 14064-1 Awareness Training	PT SGS Indonesia	Jakarta, 19-20 Maret 2024 March 19-20, 2024
23	Officer - VP Setingkat Officer - VP Level	17	Technical	Pelatihan KPI Masterclass KPI Masterclass Training	PT Aksara Juara Nusantara	*Virtual Class*, 19-20 Maret 2024
24	Officer	3	Certification	Pelatihan & Uji Kompetensi Certified Secure Computer User (CSCU) Certified Secure Computer User (CSCU) Training & Competency Test	PT Mitra Integrasi Informatika	*Virtual Class*, 20-21 Maret 2024 March 20-21, 2024
25	Officer - EVP	11	Technical	Webinar Neuro-Linguistic Programming (NLP) for Culture	SCB Consulting	*Virtual Class*, 21 Maret 2024 March 21, 2024
26	Officer - Analyst	15	Technical	Pelatihan Audit Sistem Manajemen ISO 19011 ISO 19011 Management System Audit Training	PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia	Jakarta, 21-22 Maret 2024 21-22 March 2024
27	Analyst - Sr. Analyst	5	Technical	Pelatihan Aspek Finansial dan Legal "Merger & Valuasi Bisnis" Financial and Legal Aspects Training "Merger & Business Valuation"	Instrinsics	Bandung, 21-22 Maret 2024 21-22 March 2024
28	SEM, Scheduler, QS, Officer, Analyst	18	Technical	Pelatihan Microsoft Project	PT Mektan Babakan Tujuh Konsultan	Jakarta, 01-02 April 2024 01-02 April 2024
29	Personil Inti Proyek	18	Certification	Pelatihan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Learning Program (Batch VI - Tahun 2024) Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Learning Program Training (Batch VI - 2024)	PT Avenew Indonesia	Jakarta, 02-08 Mei 2024 02-08 May 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
30	Personil Inti Proyek	8	Technical	Pelatihan & Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Bidang Jalan dan Jembatan Training & Work Competency Certification Test (SKK) Expert in the Field of Roads and Bridges	Perkumpulan Pakar Utama Bangunan Nusantara (PU-Bangun) Perkumpulan Pakar Utama Bangunan Nusantara (PU-Bangun)	*Virtual Class*, 06-08 Mei 2024 06-08 May 2024
31	Officer - VP	4	Technical	*19th World Human Resource Congress 2024*	Singapore HR Institute & Madani Corporation	Singapura, 13-17 Mei 2024 May 13-17, 2024
32	Analyst	1	Certification	Pelatihan & Sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA) Certified Information Systems Auditor (CISA) Training & Certification	Multimatics	Jakarta, 13-17 Mei 2024 May 13-17, 2024
33	Officer - Analyst	7	Technical	Pelatihan Interpretasi dan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001: 2022 ISO 27001:2022 Information Security Management System Interpretation and Implementation Training	PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia	Jakarta, 13-14 Mei 2024 May 13-14, 2024
34	Officer - Manager setingkat	103	Certification	Sertifikasi *Qualified Risk Management Officer (QRMO)* Qualified Risk Management Officer (QRMO) Certification	CRMS Indonesia & LSP MKS	Jakarta, 15-17 Mei; 02-04 Oktober; 13-15 November 2024 May 15-17; October 2-4; November 13-15, 2024
35	Officer - VP setingkat	13	Technical	Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Internal Objek Vital Nasional dan Tertentu Training for Internal Security Management System (SMP) Auditors for National and Certain Vital Objects	PT Tetap Setia Sekuriti Indonesia	Jakarta, 15-19 Mei 2024 May 15-19, 2024
36	Officer - VP setingkat	7	Technical	*Certified Learning Manager (CLM) Program*	PT Wahana Tatar Wirakelola	Jakarta, 13 Mei - 15 Juni 2024 May 13 - June 15, 2024
37	Wakil Komisaris, Komisaris, Komisaris Independen Deputy Commissioner, Commissioner, Independent	5	Managerial & Business	*Pathway to CA Indonesia - Professional Level Batch 2*	BUMN School of Excellence	*Virtual Class*, 16 Mei - 13 Juni 2024 May 16 - June 13, 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
38	Expert, Officer-VP setingkat Expert, Officer-VP level	23	Certification	Pelatihan & Sertifikasi Pengawas Sistem Manajemen K3 Kontraktor / Contractor Safety Management System (CSMS) Training & Certification for Contractor Safety Management System (CSMS) Supervisors	PT Hanosen Pratama (HSP Academy)	Jakarta, 20-22 Mei 2024 May 20-22, 2024
39	EVP, Direktur Utama Anak Perusahaan EVP, President Director of Subsidiary	4	Managerial & Business	*Merger and Acquisition Masterclass: Merger and Acquisition Conclave to Address Integration Challenges*	Mercer & Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Jakarta, 22 Mei 2024 May 22, 2024
40	Analyst – EVP setingkat Analyst – EVP level	11	Technical	*Sharing Session "Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)"* dengan tema Urgensi dan Peran Internal Auditor pada Tataran Implementasi with the theme Urgency and Role of Internal Auditors at the Implementation Level	Asosiasi Auditor Internal	*Virtual Class*, 25 Mei 2024 May 25, 2024
41	Officer - Expert	16	Technical	Pelatihan dan Pengujian Calon Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Training and Testing of Prospective Building Failure Expert Assessors	Kementerian PUPR	*Virtual Class*, 27-31 Mei 2024 May 27-31, 2024
42	Analyst, Sr. Analyst, Plt VP	3	Managerial & Business	The 19th ITS Asia Pacific Forum 2024	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Jakarta, 28-30 Mei 2024 May 28-30, 2024
43	*Officer - Manager* setingkat Officer - Manager level	99	Technical	Pelatihan *Change Agent – Change Champion & Change Innovator* Tim Internalisasi Tata Nilai AKHLAK Change Agent Training – Change Champion & Change Innovator AKHLAK Internalization Team	Kubik Coaching	Jakarta, 28 Mei & 03-05 Juni 2024 May 28 & June 03-05, 2024
44	Officer	2	Technical	Pelatihan DigiSavvy: Advancing BUMN Digital Competence DigiSavvy Training: Advancing BUMN Digital Competence	Forum Digital BUMN	Jakarta, 28-30 Mei 2024 May 28-30, 2024
45	Officer - Analyst	3	Certification	Pelatihan Sertifikasi Pejabat Pelindungan Data Diri Personal Data Protection Officer Certification Training	Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia (APPDI)	Online class, 28-30 Mei 2024 28-30 Mei 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
46	Officer - Manager setingkat Officer - Manager level	10	Managerial & Business	Pelatihan Knowledge Management Masterclass Bootcamp 2024 Knowledge Management Masterclass Bootcamp 2024 Training	Knoco Indonesia	Virtual class, 28 Mei-28 Juni 2024 May 28-June 28, 2024
47	Analyst - VP setingkat Analyst - VP level	10	Leadership	Pelatihan Leadership Fundamental Leadership Fundamental Training	Academy	Jakarta, 29-30 Mei 2024 May 29-30, 2024
48	Officer, Analyst	4	Technical	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI) – Modul Digital Construction School (Batch 1 - Tahun 2024) (Batch 1 - Year 2024)	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI)	Hybrid (Offline & Online) 30 Mei - 30 Agustus 2024 May 30 - August 30, 2024
49	EVP	1	Certification	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi BNSP Skema General Manager Sumber Daya Manusia (SDM) Technical Guidance and BNSP Competency Certification for Human Resources (HR) General Manager Scheme	Forum Human Capital Indonesia (FHCI) & LPK FHCI Prima Unggul	Online Class, 31 Mei 2024 May 31, 2024
50	Officer dan Analyst Officer and Analyst	2	Technical	Sharing Session Bidang Industrial Relations Sharing Session for Industrial Relations	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Jakarta, 03 Juni 2024 June 03, 2024
51	Officer	1	Certification	Ujian Profesi Advokat Tahun 2024 Advocate Profession Exam 2024	Ujian Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA)	Yogyakarta, 07-09 Juni 2024 07-09 June 2024
52	Officer	1	Technical	Pelatihan Understanding & Internal Auditor SA 8000 Understanding & Internal Auditor SA 8000 Training	PT Bureau Veritas Indonesia	Online Class, 11-12 Juni 2024 11-12 June 2024
53	Officer - Pj. Sr. Analyst	14	Certification	Pelatihan Certificate of Business Management: Human Resources Management (CBM HRM) Certificate of Business Management Training: Human Resources Management (CBM)	PT Prasetiya Mulya ELI	Online Class, 19 Juni - 19 Agustus 2024 19 June - 19 August 2024
54	Officer - VP setingkat	21	Technical	Pelatihan Doing To Done : Productivity Made Simple Doing To Done Training: Productivity Made Simple	PT Talenta Berbakat Indonesia	Jakarta, 21 Juni 2024 21 June 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
55	VP	1	Managerial & Business	Top Gun Program - Acceleration Development Program (BOD-1) Batch 1	Kementerian BUMN	Hybrid (Online & Offline), Juni - Oktober 2024
56	Analyst - Sr. Analyst setingkat	9	Technical	SCM Series: Manager Maintenance, Repair dan Overhaul	LSP Teknik Manajemen Industri	Virtual class, 22 Juni 2024
57	Officer - Analyst	15	Technical	Pelatihan Revit ARS & STR	Persatuan Insinyur Indonesia	Jakarta, 22 & 29 Juni 2024
58	VP setingkat	34	Leadership	Pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)	Jakarta, 24-30 Juni 2024
59	Analyst & Manager setingkat	8	Technical	Implementasi Integrasi SIMPK dan SIPBJ, serta SIKOMPAK dan SIMPAN dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa di Kementerian PUPR	Kementerian PUPR	Bandung & Kalimantan, 21 Mei & 25 Juni 2024
60	Officer - VP setingkat	20	Technical	Pelatihan & Praktik Pajak Ekualisasi PPh & PPN	DDTC Academy	Jakarta, 26 & 27 Juni 2024
61	EVP setingkat	4	Managerial & Business	Program *Business Essential Batch* II Tahun 2024	*BUMN School of Excellence*	*Hybrid Class*, Juni s/d September 2024
62	Officer - Analyst	13	Technical	Pelatihan Claim & Change Management (CCM) BUMN I2LI	BUMN Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI)	Virtual class, 27 Juni & 03-11 Juli 2024
63	Officer - EVP	7	Technical	The 32nd Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC32)	The Auckland University of Technology	Auckland, 01-06 Juli 2024
64	BIM Engineer - Analyst setingkat	20	Technical	*Building Information Modeling Architecture, Engineering and Construction (BIM AEC)*	PT EDPMedia Multimitra Primanusa	Jakarta, 08-12 Juli 2024
65	Manager setingkat	9	Technical	Uji Sertifikasi (Skema Manajer Perencana Material)	LSP Teknik Manajemen Industri dan BNSP	Jakarta, 10 Juli 2024
66	Officer - Analyst	37	Technical	Workshop Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya	Jakarta, 11 Juli 2024
67	Officer - Analyst setingkat	4	Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut (Sertifikat KEMNAKER RI)	PT Betracom Gemilang Nusa	Bogor, 10 Juli-04 Agustus 2024
68	*Officer - Manager* setingkat	82	Technical	Pelatihan *Change Agent - Change Mover* Internalisasi Tata Nilai AKHLAK	Kubik Coaching	Jakarta, 11-16 Juli 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
69	Officer - VP	4	Technical	Perancangan dan Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) bagi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN	YAKASPI	Bandung, 12 Juli 2024
70	Expert - VP setingkat	4	Certification	Pelatihan Certified Internal Audit Executive (CIAE) Program Tahun 2024	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Hybrid, 15 Juli - 21 Agustus 2024
71	VP	1	Certification	Pelatihan Certified Compliance Professional (CCP)	PPM Manajemen	Jakarta, 16-19 Juli 2024
72	Officer - Plt. Kepala Unit	5	Technical	Pelatihan Publik Awareness ISO 370001:2016 SMAP	PT Cakra Biwa Consultant	Virtual class, 17-18 Juli 2024
73	Officer & Analyst	3	Managerial & Business	PADSK & SCLI International Conference 2024	Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) dan Society of Construction Law Indonesia (SCLI)	Jakarta, 18 - 19 Juli 2024
74	Officer - Sr. Analyst	17	Technical	Webinar Solusi Persyaratan Dokumen Tender, Permohonan SBU dan SKK Pasca Gangguan di Sistem SIMPAN, SIKI, SIMPK dan SIPASTI Kementerian PUPR	Pakar Utama Bangunan Nusantara (PU-Bangun) dan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)	*Virtual class*, 18 Juli 2024
75	Officer & Analyst	2	Technical	Workshop Becoming Adaptive Leaders of High Performance	PT Momenta Indonesia	Jakarta, 18 Juli 2024
76	Analyst setingkat	2	Certification	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Skema *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*	PT Widya Dharma Artha & LSP MKS	*Virtual class*, 23-25 Juli 2024
77	EVP	1	Certification	Pelatihan Certified Anti-Fraud Governance (CAFG) & Master Class LSPMR	LSP Manajemen Risiko	Bandung, 24-26 & 29 Juli 2024
78	Analyst	2	Technical	Master Class Program Series XXIII: Life Cycle Assessment (LCA) and Carbon Reduction Strategy	LSP Manajemen Risiko	*Virtual class*, 25-26 Juli 2024
79	EVP setingkat - Direktur	10	Certification	*Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*	CRMS Indonesia & LSP MKS	*Virtual class*, 24-25 Juli 2024
80	Officer - VP setingkat	30	Technical	Penugasan Pelatihan Penanganan Limbah B3 (PLB3)	PT Hanosen Pratama (HSP Academy)	*Virtual class*, 26 Juli 2024
81	Officer - Anayst setingkat	10	Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Petugas P3K Sertifikasi KEMNAKER	PT Hanosen Pratama (HSP Academy)	Jakarta, 30 Juli - 01 Agustus 2024
82	EVP	1	Certification	Resertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP)	LSP Manajemen Risiko	*Virtual class*, 01 Agustus 2024
83	EVP	1	Certification	Resertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP)	LSP Manajemen Risiko	*Virtual class*, 01 Agustus 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
84	Officer - VP	3	Technical	Tea for Elsie – Lean Construction Talk	Forum T4LC	Jakarta, 01 Agustus 2024
85	Officer - VP	27	Technical	Pelatihan Perhitungan Jejak Carbon pada Program Dekarbonisasi	PT. Biruni	Jakarta, 01 Agustus 2024
86	Officer	3	Technical	Pelatihan New Product Development Professional (NPDP)	PPM Manajemen	Jakarta, 06 - 09 Agustus 2024
87	Officer - Sr. Analyst setingkat	19	Technical	*Management and Administration of Construction Project Contracts Workshop*	Pemateri Personal: Ilham Z. Alkayat	Jakarta, 07 Agustus - 02 Oktober 2024
88	Officer - Analyst	5	Technical	Seminar Nasional "Peta Jalan BIM Menuju Standar Nasional Indonesia (SNI) BIM"	Institut BIM Indonesia	Tangerang, 11 Agustus 2024
89	Officer - Analyst	100	Technical	Ngobrol Santai Bareng BUMN Karya	Kementerian BUMN	Jakarta, 14 Agustus 2024
90	Analyst	2	Technical	Kegiatan Edukasi Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jakarta, 14 -15 Agustus 2024
91	Officer - Manager/ Sr. Analyst	14	Technical	Pelatihan Manajemen Kontrak Batch 2	Persatuan Insinyur Indonesia	Jakarta, 20- 21 Agustus 2024
92	Officer - manager setingkat	66	Leadership	Pelatihan Kepemimpinan Lapangan dan Bela Negara Tahun 2024 (Angkatan XIX dan XX)	Pusat Pendidikan Zeni TNI-AD	Bogor, 20 Agustus - 02 September 2024
93	VP - EVP	4	Business & Managerial	*Master Class & Seminar GRC Summit 2024 "Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs"*	IRMAPA & CRMS Indonesia	Yogyakarta, 22-23 Agustus 2024
94	DO-II	1	Business & Managerial	Top Gun Program - Acceleration Development Program (BOD-1) Batch 2	BUMN School of Excellence	*Hybrid class*, 22 Agustus - Desember 2024
95	Analyst - Sr. Analyst	4	Business & Managerial	Seminar GRC Summit 2024 "Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs"	IRMAPA & CRMS Indonesia	Yogyakarta, 23 Agustus 2024
96	Officer - Manager setingkat, Expert, Jr PD	24	Business & Managerial	Pelatihan Certified Business Management (CBM) - Business Strategy	PT Prasetiya Mulya ELI	Hybrid (Online dan Offline), 24 Agustus - 19 Oktober 2024
97	Analyst setingkat	2	Certification	Sertifikasi *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*	Widya Dharma Artha & LSP MKS	Jakarta, 26 Agustus - 10 September 2024
98	VP, EVP setingkat	9	Leadership	ASEAN Global Leadership Program (AGLP) 2024 in London & China	SRW&Co. dan the London School of Economics and Political Science	London & China, 02-06 September & 04-08 November 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
99	BIM Engineer, Drafter Piping, Field Drafter Engineer	3	Technical	*Building Information Modeling (BIM)*	Divisi Engineering & TI	*Virtual class*, 02-06 September 2024
100	Sr. Analyst	1	Leadership	Expansive Leadership Program	Center of Leadership Development & Innovation	Bali, 05-06 September 2024
101	Officer	1	Technical	Edukasi Aplikasi Coretax secara Hands On	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Jakarta, 06 September 2024
102	Analyst - Sr. Analyst	2	Technical	Internal Real Estate Research Symposium	Institut Penilaian Negara (INSPEN)	Malaysia, 09-11 September 2024
103	Officer - Analyst	14	Certification	Pelatihan & Sertifikasi Perancang Kontrak (Certified Contract Drafter)	BUMN Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI)	*Virtual class*, 09-13 September 2024
104	Officer	1	Technical	Pelatihan Pelayanan Prima	Magnet Solusi Integra	*Virtual class*, 07-08 September 2024
105	Officer	1	Certification	Uji Sertifikasi Pelayanan Prima	Magnet Solusi Integra	Surabaya, 13 - 15 September 2024
106	Officer - Jr Section Head	19	Technical	Pelatihan Character-Based Inter-Personal Skills (CB-IPS)	PT Realia Karsa Mulya	Jakarta, 19-20 September 2024
107	VP setingkat	5	Technical	Workshop dan Seminar Implementasi GRC & ESG Mendukung Business Judgement Rule UU BUMN & UU PT	BusinessNews Indonesia dan Forum Manajemen Risiko BUMN	Bali, 19-21 September 2024
108	Analyst - Manager setingkat	17	Technical	Pelatihan & Sertifikasi Ahli Kontrak Konstruksi (Certified Construct Construction Specialist)	BUMN Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI)	Jakarta, 23-27 September 2024
109	Officer & Plt. VP	2	Technical	Pelatihan Publik Awareness ISO 370001:2016 SMAP	PT Cakra Biwa Consultant	*Virtual class*, 23 -24 September 2024
110	Tim Tanggap Darurat HK Tower	71	Technical	Refreshment Tim Tanggap Darurat	Damkar RI	Jakarta, 25 September 2024
111	Officer - VP setingkat, Expert	32	Managerial & Business	Certified Business Management (CBM): Financial Management	PT Prasetiya Mulya ELI	*Virtual class*, 30 September - 22 November 2024
112	Officer - Manager setingkat	20	Technical	Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Kompetensi Level 1) Tahun 2024	PPM Manajemen dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Jakarta, 01-04 Oktober 2024
113	Direktur Utama Anak Perusahaan	1	Managerial & Business	Program *Business Essential Batch* III Tahun 2024 (*Modul Innovation & Digital Disruption*)	*BUMN School of Excellence*	*Hybrid class*, 03 Oktober - 13 November 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
114	EVP	1	Managerial & Business	Program *Business Essential Batch* III Tahun 2024 (*Finance for Executive*)	*BUMN School of Excellence*	*Hybrid class*, 03 Oktober - 13 November 2024
115	Officer - VP setingkat	14	Technical	Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Learning Program (Batch VII) Tahun 2024 / Sesi Inclass Training & Mentoring	PT Avenew Indonesia	*Hybrid class*, 07-11 Oktober - 07 November 2024
116	Officer - VP	46	Technical	Refreshment Kepatuhan PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2024	Divisi Sistem & Kepatuhan	Jakarta, 08 Oktober 2024
117	Officer - Analyst	22	Technical	Pelatihan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Online Single Submission (OSS)	PT Justika Solusi Indonesia	Jakarta, 08-10 Oktober 2024
118	Analyst - Direktur	22	Technical	Workshop "Alasan Penghapus Pidana & Pelindungan Hukum untuk Direksi/ Komisaris BUMN dalam Corporate Action: Fiduciary Duty Sebagai Tolak Ukur Pertanggungjawaban Direksi terhadap Kerugian Bisnis Perseroan"	Indonesian Training Institute & Consulting Services (INTRINSICS)	Bandung, 10-11 Oktober 2024
119	Officer	5	Technical	Pelatihan Autodesk Civil 3D	Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia	Jakarta, 11-12 Oktober 2024
120	Officer - Sr. Analyst	7	Technical & Certification	Workplace Counselor Certification Program	Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia	*Virtual class*, 14-18 Oktober 2024
121	Officer & Analyst	2	Technical	Pelatihan ITIL4 Digital and IT Strategy (DITS)	Multimatics	Jakarta, 14-16 Oktober 2024
122	DU AP, Plt. Dir. Bisnis dan Teknik	3	Business & Managerial	Seminar Implementasi GRC & ESG Mendukung Business Judgement Rule UU BUMN & UU PT	BusinessNews Indonesia	Yogyakarta, 17-19 Oktober 2024
123	EVP, Expert	15	Technical	*Workshop* Program Kepatuhan Persaingan Usaha	Tim Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha - Hutama Karya	Bandung, 17-18 Oktober 2024
124	Manager setingkat	51	Leadership	Middle Manager Development Program (MMDP) Tahun 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Jakarta, Oktober - Desember 2024
125	Manager setingkat	64	Leadership	First Line Manager Development Program (FLMDP) Tahun 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Jakarta, Oktober s/d Desember 2024
126	Analyst - EVP setingkat	9	Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Kontrak	Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Jakarta, 23-26 Oktober 2024

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
127	Officer	6	Technical	Pelatihan Certified Innovation Professional (CIP)	PT Solusi Riset Bangsa (iDNA Solutions)	*Virtual class*, 01-10 November 2024
128	Officer - VP setingkat	250	Technical	Webinar Digital Talent (Information: Definition, Format, Life Cycle & Risk Cybersecurity)	PT Pijar Edukasi Teknologi (IGNITE)	*Virtual class*, November - Desember 2024
129	Analyst - Sr. Analyst	7	Certification	Pelatihan Internal Audit Fundamentals & Uji Kompetensi Certified Internal Audit Officer (CIAO)	CRMS Indonesia	*Hybrid class*, 05-08 November 2024
130	Officer - Manager setingkat	17	Technical	Inhouse Training Brevet C	Pusat Pengembangan Akuntansi FEB Universitas Indonesia	*Virtual class*, 05 November 2024 - 23 Januari 2025
131	Officer - Manager setingkat	21	Technical	Inhouse Training Brevet AB + e-SPT	Pusat Pengembangan Akuntansi FEB Universitas Indonesia	*Virtual class*, 05 November 2024 - 24 April 2025
132	Officer - Analyst	250	Technical	Webinar Digital Talent (Incident Detection and Identification)	PT Pijar Edukasi Teknologi (IGNITE)	*Virtual class*, 05 dan 14 November 2024
133	Officer - VP	3	Certification	Pelatihan & Sertifikasi COBIT 2019 Foundation	Multimatics	Jakarta, 18 - 20 November 2024
134	Officer - VP	1	Certification	Uji Sertifikasi COBIT 2019 Foundation	Multimatics	Jakarta, 18 - 20 November 2024
135	Officer	8	Technical	Pelatihan Pemrograman Front-end Website VueJS	PT Sahoot Indonesia Pratama (Rumah Coding)	*Virtual class*, 19 - 22 November 2024
136	Officer - Sr. Analyst	5	Technical	Pelatihan Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta, 19- 22 November 2024
137	Officer - Sr. Analyst setingkat	60	Technical	*Planning & Scheduling for Scheduler*	Bapak Syafriandi	Jakarta, 19 - 22 November & 03-06 Desember 2024
138	Officer - VP	7	Technical	World Public Relation Forum 2024	Global Alliance for Public Relations and Communication Management, Perhumas, & Katadata Indonesia	Bali, 20-21 November 2024
139	Officer - EVP	11	Managerial & Business	Workshop "Beberapa Isu Penting dalam Penerapan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN"	KORAN BUMN	Jakarta, 22 November 2024
140	Officer - VP setingkat	21	Certification	Pelatihan Certified Business Management (CBM): General Business Management	PT Prasetiya Mulya ELI	*Hybrid class*, 25 November 2024 - 24 Januari 2025

No	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Number of participants	Jenis Pelatihan Types of Training	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Kota & Waktu Pelaksanaan City & Implementation Time
141	Officer - Analyst	19	Certification	Pelatihan dan Uji Sertifikasi Certified Business Analytic Professional (CBAP) Tahun 2024	PT Hanosen Pratama/ HSP Academy	Jakarta, 03-05 Desember 2024
142	Officer- DHCL, Expert	11	Technical	Pelatihan dan Uji Sertifikasi Certified Public Private Partnership Professional (CP3P) – Level Foundation	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)	Jakarta, 03-10 Desember 2024
143	Officer & Analyst	115	Technical	Pelatihan Website Hacking/ Penetration Testing	Udemy	*Virtual class*, 17 Desember 2024 - 10 Januari 2025

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Program Pelatihan dan Pengembangan dilakukan berdasarkan Pemetaan *Training Need Analysis* (TNA) pada level Divisi dan Individual *Development Plan* (IDP) dari setiap Karyawan. Dari hasil pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Karyawan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 143 program dengan diikuti sebanyak 7241 peserta pelatihan yang dilakukan secara offline/luring dan online/daring melalui platform pembelajaran. Hasil dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan diraih bahwa lebih dari 90% peserta atau karyawan menunjukkan kemampuan dari hasil akuisisi pengetahuan baru dari dilaksanakannya program pelatihan dan pengembangan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah karyawan yang tersertifikasi sesuai dengan keahlihan dan peningkatan nilai dari hasil pre dan post-test setelah dilakukannya pembelajaran. Dalam rangka evaluasi peningkatan program pelatihan dan pengembangan kompetensi, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, meliputi:

1. Penyusunan Program yang lebih tepat kompetensi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan;
2. Pemetaan Kompetensi karyawan yang sesuai dengan jabatan saat ini dan mendukung rencana karir karyawan ke depan;
3. Komitmen dari karyawan dalam mengikuti program pembelajaran (*learning path*);
4. Peningkatan dukungan dari atasan karyawan yang telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan sebagaimana tertuang dalam Evaluasi Level 3 (Behavior) program pelatihan yang dilakukan oleh para atasan; dan
5. Optimalisasi Learning Platform sebagai media pembelajaran mandiri Karyawan.

Evaluation of Competency Development Implementation

The Training and Development Program is conducted based on a Training Needs Analysis (TNA) at the divisional level and the Individual Development Plan (IDP) of each employee. In 2024, a total of 143 training and development programs were implemented, involving 7,241 participants through both offline (in-person) and online (virtual) learning platforms. The results of these training and development initiatives indicate that over 90% of participants demonstrated improved competencies and successfully acquired new knowledge. This is evidenced by an increase in the number of certified employees in their respective fields and improved scores in pre- and post-training assessments. To further enhance the effectiveness of the Training and Competency Development Program, several areas require improvement, including:

1. Developing more targeted competency programs that align with the company's business needs;
2. Mapping employee competencies to their current positions while also supporting their future career development;
3. Strengthening employee commitment to following their designated learning path;
4. Increasing managerial support for employees who have completed training and development programs, as reflected in Level 3 (Behavior) Evaluation conducted by their supervisors; and
5. Optimizing the Learning Platform as a medium for employees' self-directed learning.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan pengembangan kompetensi untuk pegawai dengan mengikutsertakan 6.837 pegawai. Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan pada tahun 2024 dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebesar Rp32.938.000.000 menurun dari biaya yang dikeluarkan pada 2023 yang sebesar Rp37.786.870.000. Penurunan biaya pengembangan kompetensi dikarenakan oleh pemanfaatan platform pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran secara mandiri oleh masing-masing karyawan dimanapun dan kapanpun.

Competency Development Costs

In 2024, the company implemented competency development programs involving 6,837 employees. The total expenditure for these programs amounted to Rp32,938,000,000, reflecting a decrease from the Rp37,786,870,000 spent in 2023. This reduction in competency development costs was primarily due to the effective utilization of learning platforms, which enabled employees to engage in self-directed learning anytime and anywhere, thereby optimizing training expenses.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2023-2024
Table of Competency Development Cost 2023-2024

Keterangan Description	2024	2023
Total Biaya (Rp) Total Cost (Rp)	Rp32,938,000,000	Rp37,786,870,000

Pengembangan Karir

Kebijakan

Hutama Karya melakukan pengelolaan karier Karyawan yang telah tersistem di dalam Prosedur Manajemen Karier Karyawan dan tertuang dalam Matriks Jalur Karier Karyawan. Matriks Jalur Karier Karyawan merupakan sistem kepangkatan/urutan Tingkatan Jabatan yang harus dilalui karyawan untuk mencapai tujuan kariernya. Matriks tersebut terbagi ke dalam dua jalur karier, yaitu secara vertikal (Promosi) dan Horizontal (Rotasi), serta Karyawan dapat berkarier pada 4 kelompok Jabatan yang berbeda yaitu Struktural, Operasional (Jasa Konstruksi, Ruas Pembangunan Jalan Tol, Regional & Cabang Operasi Jalan Tol), Fungsional, dan Anak/ Afiliasi Perusahaan.

Pengembangan karier karyawan di PT Hutama Karya (Persero) terintegrasi dengan strategi perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sebagai bagian dari komitmen ini, perusahaan memiliki kebijakan melaksanakan promosi jabatan/ grade tersentralisasi sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Hutama Karya juga mendorong untuk melakukan rotasi sebagai bentuk pengayaan untuk memastikan karyawan dapat mencapai potensi maksimalnya sekaligus mendorong keberlanjutan bisnis perusahaan.

Career Development

Policies

Hutama Karya manages employee careers which are systematized in the Employee Career Management Procedure and Career Path Matrix. This career path matrix is a system of rank / order of the position levels that need to be passed by the employees in order to achieve a career goal. Hutama Karya's Career Path Matrix is divided into two paths, namely Vertical (Promote) and Horizontal (Rotate). Hutama Karya's career management starts from Officer to Executive Vice President and employees can have careers in 4 different position groups, namely Structural, Functional, Operational (Construction Services, Toll Roads & Toll Operations) and Subsidiaries/ Affiliates.

Employee career development at PT Hutama Karya (Persero) is integrated with the company's strategy to cultivate a highly skilled and competitive workforce. As part of this commitment, the company has established a centralized promotion policy, conducted twice a year in March and September. Additionally, Hutama Karya encourages job rotations as a means of enrichment, ensuring employees can reach their full potential while also supporting the company's business sustainability.

Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pengelolaan karier Karyawan mensyaratkan Karyawan yang akan promosi harus memenuhi Persyaratan promosi sesuai dengan persyaratan Prosedur Manajemen Karier Karyawan, yaitu persyaratan administrasi (usulan unit kerja, masa kerja, klasifikasi *talent mapping* minimal di Kotak 7, 8, 9, penilaian *behavior*, capaian KPI Individu, daftar *reward & penalty*) dan persyaratan kualifikasi (hasil asesmen Kompetensi *Leadership* dan kompetensi Inti dengan hasil "Fit/ Setara"). Selanjutnya, Karyawan akan diuji secara langsung oleh Komite Talenta yang akan mengevaluasi Kompetensi Teknis dan kesiapan Karyawan untuk menduduki Jabatan yang lebih tinggi. Apabila, Karyawan disetujui untuk promosi Jabatan oleh Komite Talenta maka Karyawan akan terlebih dahulu melewati masa percobaan selama minimal enam bulan sebagai Pejabat Pra Jabatan (Pj.) dan akan dievaluasi kembali sebelum ditetapkan sebagai Pejabat Definitif. Promosi ini didasarkan pada kebutuhan Perusahaan berdasarkan rencana bisnis dan hasil evaluasi kinerja, kompetensi, dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan.

Selain itu, Hutama Karya aktif juga aktif mendorong untuk program rotasi Karyawan sebagai bagian dari pengayaan Karyawan dan mengimplementasikan prinsip pembelajaran berkelanjutan melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan, pelatihan berbasis proyek, serta pemanfaatan teknologi digital. Perusahaan juga mengintegrasikan nilai-nilai AKHLAK BUMN sebagai fondasi dalam pengembangan karier, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, integritas, dan kolaborasi. Dengan pendekatan ini, Hutama Karya tidak hanya meningkatkan kualitas individu karyawan tetapi juga memastikan kontribusi mereka dalam mencapai target strategis perusahaan di sektor infrastruktur nasional.

Penilaian Kinerja

Kebijakan

Hutama Karya menerapkan sistem penilaian Karyawan berdasarkan kinerja sehingga memacu dan menjaga kualitas SDM yang unggul untuk memberikan output terbaiknya. Melalui sistem ini, karyawan diharapkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan karir yang lebih cepat. Hutama Karya melakukan penilaian kinerja karyawan sekali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari 3 (aspek) yaitu KPI Individu sebesar 60%, KPI Unit Kerja (Hasil Kinerja Unit) sebesar 30%, dan Perilaku Kerja Karyawan yang dinilai oleh atasan langsung sebesar 10%.

Implementation of Career Development

Employee career management also requires that employees who are to be promoted must go through the promotion requirements in accordance with Employee Career Requirements Procedures, namely administrative requirements (proposed work unit, work period, talent mapping classification at least in Box 7, 8, 9, behavioral assessment, Individual KPI achievement, reward & penalty list) and qualification requirements (results of Leadership Competency assessment and Core competency with the result of "Fit/Equivalent"). Furthermore, Employees will be tested directly by the Talent Committee which will evaluate the Technical Competency and readiness of Employees to occupy a higher Position. If the Employee is approved for a Job promotion by the Talent Committee, the Employee will first go through a trial period of at least six months as a Pre-Job Official (Pj.) and will be re-evaluated before being appointed as a Definitive Official. This promotion is based on the Company's needs based on the business plan and the results of the evaluation of employee performance, competence, and contribution to the company.

In addition, Hutama Karya is also actively encouraging Employee rotation programs as part of Employee enrichment and implementing the principle of continuous learning through collaboration with educational institutions, project-based training, and the use of digital technology. The company also integrates the values of BUMN AKHLAK as a foundation for career development, creating a work environment that supports innovation, integrity, and collaboration. With this approach, Hutama Karya not only improves the quality of individual employees but also ensures their contribution to achieving the company's strategic targets in the national infrastructure sector.

Performance Assessment

Policies

In order to stimulate and maintain high quality human resources to provide the best performance, the Company implements a performancebased employee evaluation system. Through this system, it is expected that the employees will have the opportunity to advance their career at a faster pace. Hutama Karya evaluates employee performance once in 1 (one) year based on Key Performance Indicator (KPI) achievement which consists of 3 (aspects), namely Individual KPI 50%, Work Unit KPI (Unit Performance Results) 40%, and Work Behavior Employees evaluated by their direct supervisors are 10%.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Hutama Karya juga telah mengembangkan *Human Capital Information System* (HCIS), sistem pengelolaan SDM berbasis web yang terintegrasi. HCIS ini dikembangkan untuk mendukung keberlangsungan proses penilaian kinerja yang lebih maksimal karena HITS didesain sebagai sistem pengelolaan SDM berbasis web yang terintegrasi. Melalui HITS, hasil penilaian kinerja karyawan tertintegrasi dengan rencana pengembangan karir yang diminati maupun yang direkomendasikan berdasarkan evaluasi. Selain itu, hasil penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan atas pelatihan yang akan diberikan kepada karyawan guna mendukung pengembangan karir ke depan.

Implementation of Performance Assessment Development

Hutama Karya has also developed the Human Capital Information System (HCIS), an integrated web-based human resource management system. This HCIS has been developed in order to support a more optimal performance appraisal process, as the HITS is designed to be an integrated web-based human resource management system. Through HITS, the results of employee performance appraisals are integrated with career development plans that are of interest or recommended based on the appraisal. In addition, the results of the performance appraisal can also be used as a basis for determining the training needs of employees to support their future career development.

Remunerasi

Kebijakan

Hutama Karya menerapkan kebijakan pemberitan remunerasi yang sangat kompetitif berdasarkan kinerja dan kompetensi masing-masing jabatan dalam rangka meningkatkan produktivitas karyawan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan upaya untuk mempertahankan karyawan terbaiknya. Remunerasi merupakan salah satu bentuk perhatian dan Perseroan terhadap kesejahteraan karyawannya.

Remunerasi merupakan salah satu bentuk perhatian dari Perseroan terhadap kesejahteraan karyawan. Karyawan yang menunjukkan kinerja unggul berkesempatan untuk mendapatkan peningkatan karir, yang diikuti dengan peningkatan tunjangan dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, kebijakan remunerasi tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi karyawan, tetapi juga sebagai bentuk perhatiaan Perseroan kepada karyawan agar terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan.

Selain mempertimbangkan aspek finansial jangka pendek, kebijakan remunerasi di Hutama Karya juga memperhitungkan kinerja Perseroan secara holistik, termasuk aspek keberlanjutan, inovasi, serta dampak sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, remunerasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian profitabilitas, tetapi juga mencerminkan komitmen Perseroan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain kompensasi gaji, Perseroan memberikan benefit baik yang diterima selama masa kerja, seperti program pemeliharaan kesehatan maupun

Remuneration

Policies

Hutama Karya implements a very competitive remuneration policy based on the performance and competence of each position. This is done in order to increase the productivity of the employees in achieving the set goals and in an effort to retain the best employees. Remuneration is a form of concern from the company for the welfare of its employees.

Remuneration is one form of the Company's attention to employee welfare. Employees who demonstrate superior performance have the opportunity to get career advancement, followed by increased benefits and other facilities. Thus, the remuneration policy is not only a form of appreciation for employee contributions, but also a form of the Company's attention to employees so that they continue to develop and provide the best for the company.

In addition to considering short-term financial aspects, the remuneration policy at Hutama Karya also takes into account the Company's performance holistically, including aspects of sustainability, innovation, and social and environmental impacts. With this approach, remuneration is not only oriented towards achieving profitability, but also reflects the Company's commitment to creating long-term value for all stakeholders.

In addition to compensation, the Company provides benefits both while working, such as health care programs, and after employment ends, such as

yang diterima setelah berakhirnya hubungan kerja, seperti program pensiun, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh perusahaan sejenis di industri konstruksi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dan sebagai bentuk pemberian manfaat timbal balik antara Perseroan dengan karyawan. Pemberian benefit ini juga bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perseroan.

Berbagai fasilitas dan benefit yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan, antara lain:

1. Lembur & Piket Karyawan
2. Tunjangan Hari Raya
3. Jasa Produksi/Bonus Kinerja Tahunan
4. Cuti Tahunan & Cuti Besar
5. Fasilitas Perjalanan Dinas & Mobilisasi
6. Fasilitas Pengobatan dan Kesehatan
7. Program Pensiun
8. Pakaian Seragam
9. Bantuan Khusus:
   a. Kedukaan
   b. Pernikahan
   c. Beasiswa Pendidikan untuk Anak Karyawan yang Meninggal Dunia yang Meninggal Dunia Akibat Menjalankan Tugas-tugas Perusahaan
10. Beasiswa Pendidikan Dalam dan Luar Negeri untuk Karyawan
11. Penghargaan Satya Karya untuk Karyawan dengan Masa Kerja 10 Tahun, 20 Tahun, 30 Tahun.

Hutama Karya berkomitmen untuk memberikan kebijakan remunerasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan dan pengembangan karyawan. Dengan pendekatan yang holistik, kebijakan ini dirancang untuk memberikan penghargaan yang adil bagi karyawan berdasarkan kinerja dan kompetensi mereka, sekaligus mempertimbangkan kontribusi terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang.

Melalui kombinasi kompensasi finansial, berbagai remunerasi dan benefit yang diberikan, Hutama Karya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan loyalitas karyawan. Dengan demikian, kebijakan remunerasi ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga cerminan dari upaya perusahaan dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi karyawan maupun perusahaan.

pension programs, as well as other facilities that are commonly provided by comparable companies in the construction industry. This is done to provide a sense of security in the workplace. It is also a form of mutual benefit between the company and its employees. The provision of these benefits is also intended to make it easier for employees to carry out their duties and responsibilities to the Company.

Various facilities and benefits provided by the Company to its employees include:

1. Overtime and Employee Duty
2. Holiday Allowance
3. Production Services/Annual Performance Bonus
4. Annual Leave & Grand Leave
5. Business Travel & Mobilization Facilities
6. Treatment and Health Facilities
7. Retirement Program
8. Uniform
9. Special Assistance:
   a. Bereavement
   b. Wedding
   c. Educational Scholarships for Children of Employees Who Died in the Line of Duty
10. Domestic and International Educational Scholarships for Employees
11. Satya Karya Award for employees with 10, 20 and 30 years of service.

Hutama Karya is committed to providing a remuneration policy that is not only competitive, but also oriented towards employee welfare and development. With a holistic approach, this policy is designed to provide fair rewards for employees based on their performance and competence, while considering contributions to the Company's sustainability and growth in the long term.

Through a combination of financial compensation, various remunerations and benefits provided, Hutama Karya creates a work environment that supports employee productivity and loyalty. Thus, this remuneration policy is not only a form of appreciation, but also a reflection of the company's efforts in building harmonious, sustainable and mutually beneficial working relationships for both employees and the company.

Program Pensiun

Kebijakan

Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan yang telah memasuki usia pensiun, maka perlu ditetapkan kebijakan mengenai manfaat pensiun bagi karyawan untuk memberikan kepastian atas kesejahteraan di masa pensiun. Dengan pengelolaan manfaat pensiun yang baik akan mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang melalui peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan Karyawan

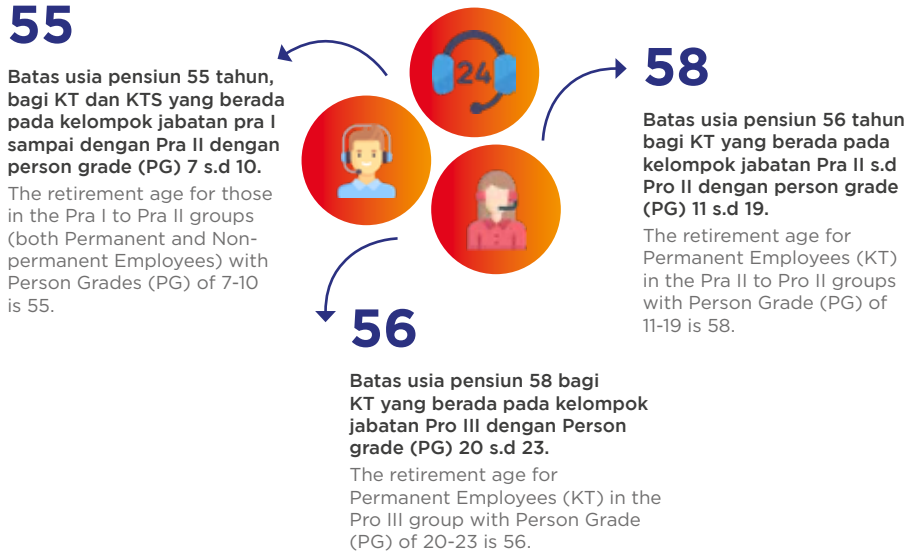
Dalam rangka menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan dinamika industri dan menghadapi tantangan bisnis yang kompleks, kebutuhan untuk mempertahankan pengalaman dan keahlian ditingkat eksekutif dianggap perlu guna mempersiapkan pemimpin dimasa depan sehingga di tahun 2024 dilakukan perubahan batas usia Pensiun Normal yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) nomor 4439/KPTS/95/X/2024.

Retirement Program

Policies

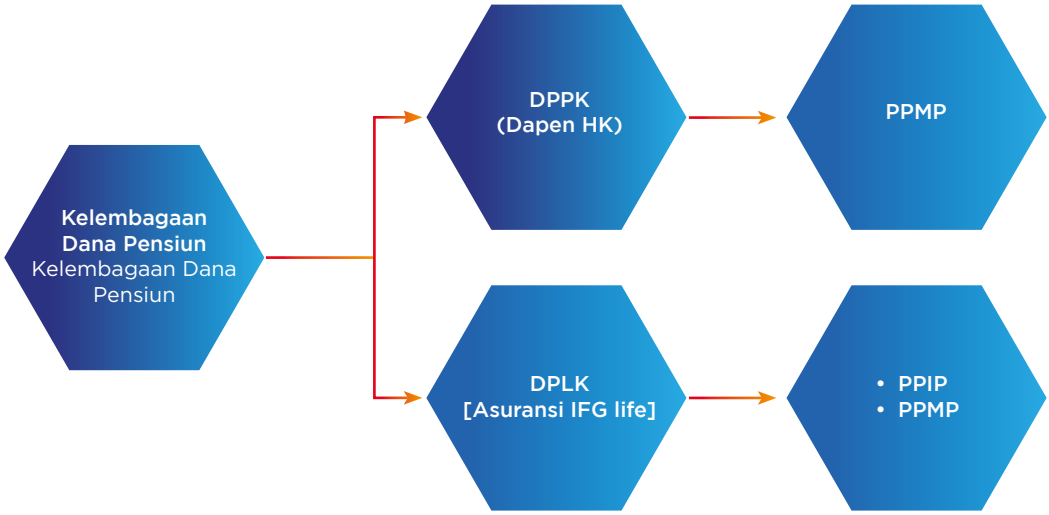
That in order to improve the welfare of employees who have entered retirement age, it is necessary to establish a policy regarding pension benefits for employees to provide certainty of welfare during retirement. With good pension benefit management, it will support the sustainability of the company in the long term by improving harmonious industrial relations with Employees.

In order to adjust the company's policies to the dynamics of the industry and face complex business challenges, the need to maintain experience and expertise at the executive level is considered necessary to prepare future leaders so that in 2024 a change was made to the Normal Retirement Age limit as stated in the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) number 4439/KPTS/95/X/2024.



Pelaksanaan Program Pensiun melalui Dana Pensiun Hutama Karya (Dapen HK) diperuntukan bagi karyawan dengan status pengangkatan sebagai Karyawan Tetap sebelum 01 Desember 2016 disebut juga peserta Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sedangkan bagi karyawan yang diangkat sebagai Karyawan Tetap setelah 01 Desember 2016 disebut peserta Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Pengelolaan dana pensiun oleh PT Asuransi Jiwa IFG melalui program IFG Life terbagi menjadi 2 (dua) polis asuransi yaitu *Pooled Fund* (PPMP) dan *Individual Account* (PPIP).

The implementation of the Pension Program through the Hutama Karya Pension Fund (Dapen HK) is intended for employees with the status of being appointed as Permanent Employees before December 1, 2016, also called participants in the Defined Benefit Pension Program (PPMP), while for employees who are appointed as Permanent Employees after December 1, 2016, they are called participants in the Defined Contribution Pension Program (PPIP). Pension fund management by PT Asuransi Jiwa IFG through the IFG Life program is divided into 2 (two) insurance policies, namely Pooled Fund (PPMP) and Individual Account (PPIP).



Tahun 2024 besaran iuran Dapen dan IFG Life mengalami perubahan sesuai dengan hasil valuasi aktuaria yang tertuang dalam Laporan Aktuaris nomor 100/LA-DP/KKAICS/III-2024 menjadi 22,16% setiap bulan dengan ketentuan 17,16% merupakan beban Perusahaan dan 5% merupakan beban karyawan.

Human Capital Information System

Dalam menjalankan program kerja sesuai Arsitektur Human Capital, Hutama Karya memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan berbagai aspek Sumber Daya Manusia. Teknologi tersebut mencakup sistem berbasis digital seperti aplikasi *Human Capital Integrated System* (HCIS) yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDM. Hutama Karya terus meningkatkan kemampuan HCIS yang dimiliki untuk mendukung kemampuan *People Analytics* yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM, seperti pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis, pengelolaan talenta berbasis teknologi, serta perencanaan dan evaluasi yang lebih terukur dan akurat.

Internalisasi Budaya

Hutama Karya terus berkomitmen untuk menerapkan Tata Nilai AKHLAK sebagai Budaya Perusahaan. Divisi Human Capital berperan dalam membuat kebijakan maupun program internalisasi AKHLAK untuk meningkatkan penerapan AKHLAK dalam perilaku sehari-hari insan Hutama. Pada Tahun 2024, Hutama Karya memasuki tahap Penerimaan pada AKHLAK *Culture Journey.* Beberapa Program yang dilaksanakan untuk mempercepat proses internalisasi di antaranya adalah *Culture Change Management Team*, Pelatihan *Change Agent, Knowledge sharing* dalam AKHLAK Series, Dashboard Pelaporan kegiatan

In 2024, the amount of Dapen and IFG Life contributions will change according to the actuarial valuation results stated in the Actuarial Report number 100/LA-DP/KKAICS/III-2024 to 22.16% per month with the provision that 17.16% is the Company's burden and 5% is the employee's burden.

Human Capital Information System

In implementing work programs according to the Human Capital Architecture, Hutama Karya utilizes technology to support the implementation and management of various aspects of Human Resources. The technology includes digital-based systems such as the Human Capital Integrated System (HCIS) application which is designed to improve the efficiency and accuracy of decision-making related to HR management. Hutama Karya continues to improve its HCIS capabilities to support People Analytics capabilities which aim to improve the effectiveness of HR management, such as the use of data for strategic decision-making, technology-based talent management, and more measurable and accurate planning and evaluation.

Internalization of Culture

Hutama Karya continues to be committed to implementing AKHLAK Values as a Corporate Culture. The Human Capital Division plays a role in creating policies and internalization programs for AKHLAK to improve the implementation of AKHLAK in the daily behavior of Hutama employees. In 2024, Hutama Karya will enter the Acceptance stage of the AKHLAK Culture Journey. Several programs implemented to accelerate the internalization process include the Culture Change Management Team, Change Agent Training, Knowledge sharing in the AKHLAK Series, AKHLAK Activity Reporting Dashboard (AKHLAKactivity),

AKHLAK (AKHLAKtivity), *Townhall Meeting, Culture Visit, Best Change Agent AKHLAK 1st Semester, AKHLAK Day Giveaway.*

Change Agent memiliki peran yang sangat penting dalam perubahan Budaya, maka dari itu pada tahun 2024 Manajemen Hutama Karya menerbitkan Keputusan Direksi terkait Pengelolaan Change Agent Internalisasi AKHLAK yang mencakup tugas, tanggung jawab, program pengembangan dan benefit dari peran Change Agent. Program Change Agent yang dirancang Divisi Human Capital juga mewajibkan setiap *Change Agent* untuk melaporkan kegiatan internalisasi Tata Nilai AKHLAK setiap bulan. Sebelum menjalankan kegiatan internalisasi pada Unit Kerja masing -masing, *Change Agent* diberikan pelatihan berupa *change management* dan perihal Tata Nilai AKHLAK.

Selain program Change Agent, Divisi Human Capital juga melakukan internalisasi AKHLAK langsung kepada karyawan Proyek/Ruas/Cabang Hutama Karya dalam sesi Culture Visit. Upaya internalisasi AKHLAK ini berbuah manis. PT Hutama Karya (Persero) berhasil mencatatkan skor Indeks Pemahaman Tata Nilai dan Budaya (PTNTB) sebesar 84,21, melampaui rata-rata nasional seluruh BUMN sebesar 83,49, serta secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata klaster infrastruktur dan konstruksi.

Tidak hanya itu, Hutama Karya juga menunjukkan performa unggul dalam seluruh aspek utama survei intervensi AKHLAK. Pada Aspek Komitmen Pimpinan, HK meraih skor 8,22, lebih tinggi dibandingkan rerata klaster (8,08) maupun rerata BUMN secara keseluruhan (8,19). Pada Aspek Sistem, HK mencatat skor 2,66, melebihi klaster (2,61) dan nasional (2,59). Sementara pada Aspek Simbol dan Atribut, skor HK mencapai 2,67, juga lebih tinggi dari klaster (2,53) dan BUMN (2,48).

Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa internalisasi nilai AKHLAK di lingkungan Hutama Karya bukan hanya slogan, tetapi telah bertransformasi menjadi budaya kerja yang hidup dan terintegrasi di seluruh level organisasi.

Keterbukaan Informasi Kepada Pegawai

Pada tahun 2024, keterbukaan informasi kepada pegawai internal Hutama Karya dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi, antara lain:

1. Majalah IMVID – Majalah internal yang diterbitkan secara berkala sebagai sarana informasi bagi pegawai. Pada tahun 2024, telah diterbitkan 4 (empat) edisi Majalah IMVID.
2. Management Letter – Diterbitkan setiap 2 bulan sekali untuk memberikan pembaruan terkait kebijakan, strategi, dan pencapaian perusahaan.

Townhall Meeting, Culture Visit, Best Change Agent AKHLAK 1st Semester, AKHLAK Day Giveaway.

Change Agents have a very important role in Cultural change, therefore in 2024 Hutama Karya Management issued a Board of Directors Decree regarding the Management of Change Agent Internalization of AKHLAK which includes duties, responsibilities, development programs and benefits of the Change Agent role. The Change Agent program designed by the Human Capital Division also requires each Change Agent to report on the internalization of AKHLAK Values every month. Before carrying out internalization activities in their respective Work Units, Change Agents are given training in the form of change management and AKHLAK Values.

The internalization efforts of AKHLAK were successful. PT Hutama Karya (Persero) managed to record a score of the Understanding of Values and Culture Index (PTNTB) of 84.21, exceeding the national average of all SOE of 83.49, and significantly higher than the average of the infrastructure and construction cluster.

Hutama Karya also showed superior performance in all main aspects of the AKHLAK intervention survey. In the Leadership Commitment Aspect, HK achieved a score of 8.22, higher than the cluster average (8.08) and the SOE average as a whole (8.19). In the System Aspect, HK recorded a score of 2.66, exceeding the cluster (2.61) and the national (2.59). Meanwhile, in the Symbol and Attribute Aspect, HK's score reached 2.67, also higher than the cluster (2.53) and SOE (2.48).

This achievement is concrete evidence that the internalization of AKHLAK values in the Hutama Karya environment is not just a slogan, but has transformed into a living and integrated work culture at all levels of the organization.

Information Disclosure to Employees

In 2024, information disclosure to Hutama Karya's internal employees will be implemented through various communication channels, including:

1. IMVID Magazine – An internal magazine published periodically as a means of information for employees. In 2024, 4 (four) editions of IMVID Magazine have been published.
2. Management Letter – Published every 2 months to provide updates on company policies, strategies, and achievements.

3. Town Hall Meeting – Forum komunikasi antara manajemen dan pegawai yang diadakan secara berkala untuk menyampaikan informasi penting dan menjawab pertanyaan dari karyawan.
4. WhatsApp Blast – Penyampaian informasi secara cepat dan langsung kepada pegawai melalui pesan WhatsApp secara reguler.

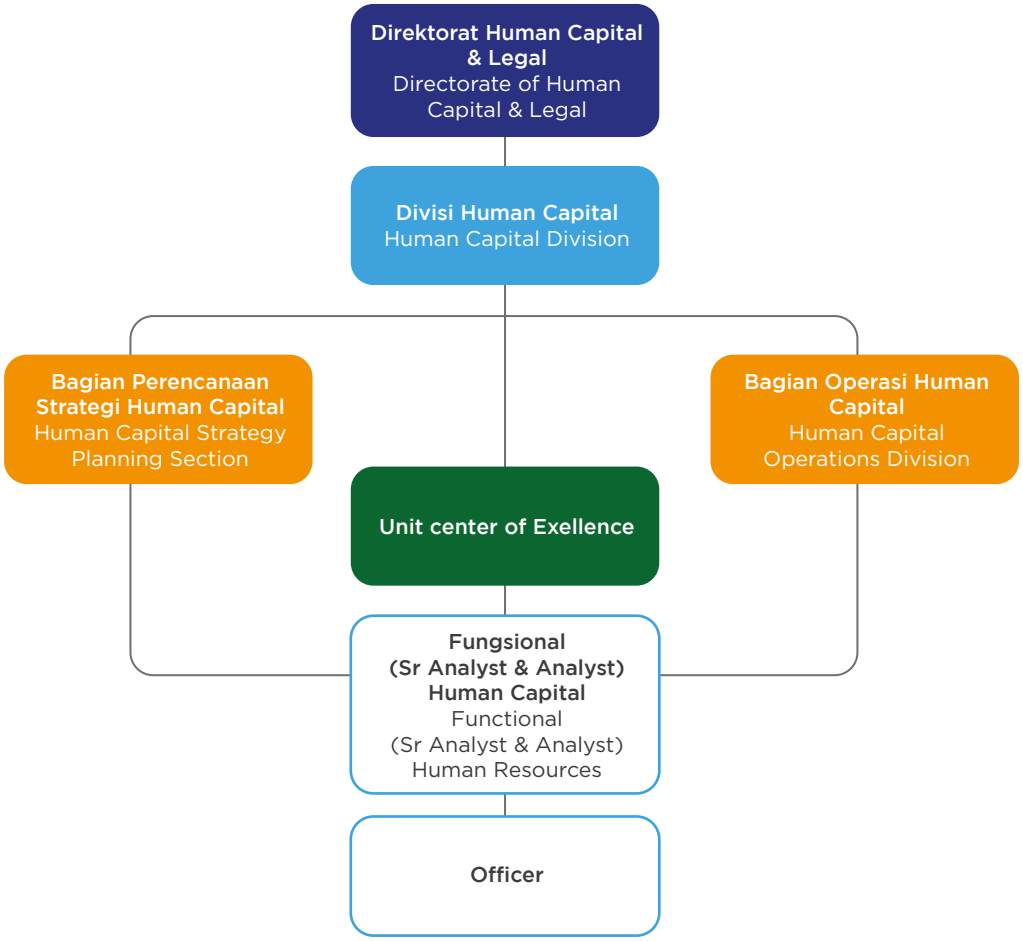
Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi dalam lingkungan kerja, sehingga pegawai dapat memahami perkembangan perusahaan dengan lebih baik.

3. Town Hall Meeting – A communication forum between management and employees held periodically to convey important information and answer questions from employees.
4. WhatsApp Blast – Delivering information quickly and directly to employees via regular WhatsApp messages.

These steps are being taken to ensure transparency and openness of information in the work environment, so that employees can understand the company's developments better.

Struktur Pengelola Human Capital

Human Capital Management Structure



Struktur Organisasi pada Divisi Human Capital dirancang untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Strategis dan Operaional secara terintegrasi. Dengan hierarki yang jelas, setiap level memiliki peran spesifik untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam mencapai tujuan Perusahaan. Fungsi dari masing – masing level adalah sebagai berikut:

1. Direktur *Human Capital & Legal* (Level Direktur)

   Bertanggung jawab atas arahan strategis dan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aspek Hukum Perusahaan.

The Organizational Structure in the Human Capital Division is designed to support the integrated management of Strategic and Operational Human Resources. With a clear hierarchy, each level has a specific role in ensuring effective collaboration in achieving the Company's goals. The functions of each level are as follows:

1. Director of Human Capital & Legal (Director Level)
   Responsible for the strategic direction and policies of Human Resources development and Legal Aspects of the Company.

2. *Executive Vice President* (EVP)- BOD-1
   Memastikan Implementasi Stretegi SDM agar berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mampu mendukung operasionalisasi dan pencapaian perusahaan.

3. *Vice President* (VP) – BOD -2
   - Bagian Perencanaan Strategi Human Capital: Mengelola Perencanaan Strategi Human Capital yang meliputi Budaya Perusahaan, Desai Organisasi Perusahaan, Job Design dan Pengelolaan kinerja serta karir karyawan dalam upaya meningkatkan peran strategis Human Capital untuk pencapaian bisnis Perusahaan.
   - Bagian Operasi Human Capital: Mengelola proses rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan, remunerasi dan administrasi karyawan dalam rangka peningkatan layanan fungsi Human Capital sebagai partner strategis yang menunjang kegiatan operasional.
   - Unit Center of Excellence: Pengelolaan Assessment, Pelatihan dan pengembangan karyawan, Knowledge Management, Pengelolaan Talent Pool dan beasiswa serta magang dengan tujuan meningkatkan kapabilitas dan optimalisasi Sumber Daya Manusia di Perusahaan.

4. Fungsional (Sr. Analyst, Analyst dan Officer)
   Menjalankan fungsi operasional dan analisis teknik untuk mendukung implementasi strategi dan operasional Sumber Daya Manusia di Perusahaan.

Rencana Kerja Human Capital 2025

Pada tahun 2025, Divisi Human Capital akan menjalankan 36 program strategis yang mengacu pada framework dengan 4 elemen utama sebagai berikut:

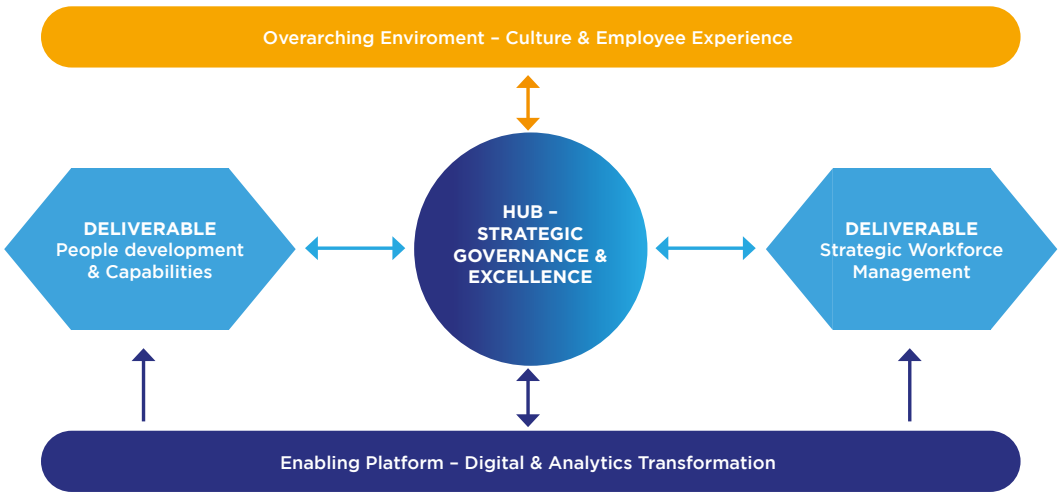
2. Executive Vice President (EVP)- BOD-1
   Ensuring the implementation of HR strategies to run according to the company's needs and can support the company's operations and achievements.

3. Vice President (VP) – BOD -2
   - Human Capital Strategy Planning Section: Manages Human Capital Strategy Planning which includes Corporate Culture, Corporate Organizational Design, Job Design and Management of employee performance and career to increase the strategic role of Human Capital for the Company's business achievements.
   - Human Capital Operations Division: Manages the recruitment, selection and placement process of employees, remuneration and employee administration to improve the Human Capital function service as a strategic partner that supports operational activities.
   - Center of Excellence Unit: Assessment Management, Employee Training and Development, Knowledge Management, Talent Pool Management and scholarships and internships with the aim of improving the capabilities and optimization of Human Resources in the Company.

4. Functional (Sr. Analyst, Analyst and Officer)
   Perform operational functions and technical analysis to support the implementation of Human Resources strategies and operations in the Company.

Human Capital Work Plan 2025

In 2025, the Human Capital Division will run 36 strategic programs referring to a framework with 4 main elements as follows:



1. *Overarching Environment – Culture & Employee Experience*
   Elemen ini menjadi payung utama yang berfungsi untuk menciptakan budaya organisasi yang kuat dan meningkatkan pengalaman karyawan. Fokusnya adalah membangun lingkungan kerja yang mendukung pengembangan talenta dan kolaborasi.
2. *HUB – Strategic Governance & Excellence*
   Sebagai pusat pengelolaan strategis, program-program pada HUB memastikan tata kelola dan keunggulan operasional divisi Human Capital. Semua inisiatif diselaraskan melalui pendekatan ini untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang optimal.
3. *Deliverables*:
   a. *People Development & Capabilities*
      Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan melalui berbagai pelatihan, pengembangan, dan program pembinaan.
   b. *Strategic Workforce Management*
      Berfokus pada pengelolaan tenaga kerja secara strategis, program ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengelolaan kinerja, dan penguatan kapasitas SDM untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan.

4. *Enabling Platform – Digital & Analytics Transformation*
   Sebagai fondasi utama, elemen ini memanfaatkan teknologi digital dan analitik untuk mendorong transformasi *human capital.* Melalui *Human Capital Information System* (HCIS) dan teknologi digital human capital lainnya, perusahaan akan lebih adaptif dalam pengambilan keputusan berbasis data dan pelaksanaan program secara terintegrasi.

Adapun daftar 36 Program Kerja Human Capital tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Overarching Environment – Culture & Employee Experience

1. *Employee Branding* berbasis *Employee Value Propositions* (EVP) Perusahaan
2. Peningkatan Skor *Employee Experience* (EE)
3. *Respectful Work Policy* (RWP)
4. *Employee Well Being* (EWB)
5. AKHLAK *Culture Journey* (ACJ)

1. Overarching Environment – Culture & Employee Experience
   This element is the main umbrella that serves to create a strong organizational culture and enhance employee experience. The focus is on building a work environment that supports talent development and collaboration.

2. HUB – Strategic Governance & Excellence
   As a strategic management center, programs in the HUB ensure the governance and operational excellence of the Human Capital division. All initiatives are aligned through this approach to achieve optimal effectiveness and efficiency.

3. Deliverables:
   a. People Development & Capabilities
   This program aims to improve employee competency and capabilities through various training, development, and coaching programs.

   b. Strategic Workforce Management
   Focusing on strategic workforce management, this program includes workforce needs planning, performance management, and strengthening HR capacity to support the company's business goals.

4. Enabling Platform – Digital & Analytics Transformation
   As the main foundation, this element utilizes digital technology and analytics to drive human capital transformation. Through the Human Capital Information System (HCIS) and other digital human capital technologies, companies will be more adaptive in data-based decision making and integrated program implementation.

The list of 36 Human Capital Work Programs in 2025 is as follows:

Overarching Environment – Culture & Employee Experience

1. Employer Branding based on the Company's Employee Value Propositions (EVP)
2. Improving Employee Experience (EE) Scores
3. Respectful Work Policy (RWP)
4. Employee Well Being (EWB)
5. AKHLAK Culture Journey (ACJ)

The Prime HUB – Strategic Governance & Excellence

1. *Embracing BUMN HC Architecture*
2. *Organizational Development System*
3. Penyusunan dan Penetapan aturan tentang Sistem *Employee Mapping* (EM)
4. Pembaruan Model Kompetensi Kepemimpinan Perusahaan berbasis kompetensi Direksi BUMN dan Penyesuaian terhadap Implementasi *Leadership Development Program* berjenjang
5. Perapihan & Update Kebijakan HC - Struktur Aturan, Penyeragaman Definisi, Omnibus
   a. Prosedur Pemberian Tantiem AP
   b. Prosedur Remunerasi Karyawan
   c. Pembaharuan Prosedur Rekrutmen
   d. Pembaharuan KPTS IKP terkait Proyek Daerah Konflik
   e. Pembaharuan KPTS Beasiswa Anak Karyawan
   f. Prosedur Seleksi Pengurus Anak/ Afiliasi Perusahaan
6. Persiapan ISO 30414:2018 *Certifications* tentang *Human Capital Reporting*
7. *Integrated HC Management*

Deliverables - People Development & Capabilities

1. Penyusunan dan Penetapan Aturan tentang *Succession Management and Talent Pool System,* khususnya bagi Karyawan Milennial dan Perempuan
2. Penyusunan dan Penetapan Jalur Karir Operasional (Personil Inti Proyek (PIP) pada Jasa Konstruksi, Ruas Tol, dan Cabang Tol)
3. Penyusunan dan Penetapan Jalur Karir Fungsional + TL *Progression to VP*
4. Penyelenggaraan *pilot project* dalam implementasi *Leadership Accountability System* berbasis Filosofi Leadership terkemuka
5. *HC People Capacity Building*
6. *Focused Competency Development*
   a. *Auditor Competency Development*
   b. *Construction Quality Competency Development*
   c. *Construction HSSE Competency Development*
   d. *Construction Contract Management Competency Development*
   e. *Litigation Competency Development*
   f. *Site Administration & Finance Manager (SAFM) Competency Development*
   g. *Site Operational Manager Compatency (SOM) Development*

The Prime HUB – Strategic Governance & Excellence

1. Embracing BUMN HC Architecture
2. Organizational Development System
3. Preparation and Determination of Rules on the Employee Mapping (EM) System
4. Updates to the Company's Leadership Competency Model based on SOE Directors' competencies and Adjustments to the Implementation of a Tiered Leadership Development Program
5. HC Policy Refinement & Update - Rule Structure, Definition Standardization, Omnibus
   a. Procedure for Providing AP Bonuses
   b. Employee Remuneration Procedures
   c. Update on Recruitment Procedures
   d. Update on IKP KPTS related to Conflict Area Projects
   e. Update on Employee Children Scholarship KPTS
   f. Selection Procedure for Child/Company Affiliate Managers
6. Preparation of ISO 30414:2018 Certifications on Human Capital Reporting
7. Integrated HC Management

Deliverables - People Development & Capabilities

1. Preparation and Determination of Rules on Succession Management and Talent Pool System, especially for Millennial and Female Employees
2. Preparation and Determination of Operational Career Paths (Core Project Personnel (PIP) in Construction Services, Toll Roads, and Toll Branches)
3. Preparation and Determination of Functional Career Paths + TL Progression to VP
4. Implementation of a pilot project in the implementation of a Leadership Accountability System based on a leading Leadership Philosophy
5. HC People Capacity Building
6. Focused Competency Development
   a. Auditor Competency Development
   b. Construction Quality Competency Development
   c. Construction HSSE Competency Development
   d. Construction Contract Management Competency Development
   e. Litigation Competency Development
   f. Site Administration & Finance Manager (SAFM) Competency Development
   g. Site Operational Manager Compatency (SOM) Development

The Deliverables – Strategic Workforce Management

1. *Strategic Workforce Planning* (SWP) berbasis RJPP Perusahaan dari tahun 2025 s/d 2029
2. Perhitungan *Work-Load Analysis* (WLA) berbasis proses bisnis baru
3. Pelaksanaan EM
4. Penyelenggaraan *pilot project* dalam menerapkan sistem evaluasi pembelajaran di Level 3 sesuai Model Kirkpatrick
5. Pengembangan Pegawai Disabilitas Perusahaan
6. Penyusunan dan Penetapan Jalur Karir Struktural
7. Implementasi *Performance Management* sesuai Prosedur dan Sistem terbaru tahun 2024
8. Pengendalian Angka Produktivitas sesuai target RKAP & RJPP Perusahaan
9. Pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai struktur dan kebijakan terbaru
10. *HC as Business Driver*
11. Penyusunan Kajian Remunerasi Eksekutif HK
12. Penyusunan Kajian Remunerasi Eksekutif AP
13. Perubahan Pengurus Yayasan Beasiswa
14. *Job-Swap*
15. *Individual Development Plan*

Enabling Platform – Digital & Analytics Transformation

1. Implementasi *Human Capital Information System* (HCIS) yang digunakan oleh seluruh pegawai Perusahaan + Absensi berbasis *Face Recognition.*
2. *HC Big Data Development - Deep Profile & Data for each Employees & Data Visualization*
3. *HC Digital Library Development*

The Deliverables – Strategic Workforce Management

1. Strategic Workforce Planning (SWP) based on the Company's RJPP from 2025 to 2029
2. Calculation of Work-Load Analysis (WLA) based on new business processes
3. Implementation of EM in
4. Implementation of a pilot project in implementing a learning evaluation system at Level 3 according to the Kirkpatrick Model
5. Development of Company Disabled Employees
6. Preparation and Determination of Structural Career Paths
7. Implementation of Performance Management according to the latest Procedures and Systems in 2024
8. Control of Productivity Figures according to the Company's RKAP & RJPP targets
9. Renewal of the Collective Labor Agreement (PKB) according to the latest structure and policies
10. HC as Business Driver
11. Preparation of HK Executive Remuneration Review
12. Preparation of AP Executive Remuneration Review
13. Changes to the Management of the Scholarship Foundation
14. Job-Swap
15. Individual Development Plan

Enabling Platform – Digital & Analytics Transformation

1. Implementation of Human Capital Information System (HCIS) used by all Company employees + Attendance based on Face Recognition.
2. HC Big Data Development - Deep Profile & Data for each Employees & Data Visualization
3. HC Digital Library Development

Teknologi Informasi
Information Technology



Rencana Strategis Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung proses bisnis perusahaan dan meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi serta memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan telah menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) periode 2020-2024. Pada Tahun 2024 Perusahaan memiliki tema pengembangan teknologi informasi antara lain IT *Governance Improvement*, IT *Security Enhancement*, dan Adopsi *Advanced Technology* detil sebagai berikut:

Strategic Information Technology Plan

To support the company's business processes, enhance the quality of Information Technology services, and provide a competitive advantage, the company has developed a Strategic Information Technology Plan (SITP) for the 2020-2024 period. In 2024, the company's Information Technology development theme includes IT Governance Improvement, IT Security Enhancement, and the Adoption of Advanced Technology, with the following details:

Kategori Pengembangan TI Category of IT Development	**Inisiatif** Initiatives
IT Governance Improvement	1. Perbaikan dan Penyusunan Guideline Penerapan IT Operating Model. 2. Penerapan dan Penyusunan Regulasi Penerapan Pelindungan Data Pribadi. 3. Upgrading Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. 1. Improvement and development of guidelines for implementing the IT Operating Model. 2. Implementation and development of regulations for Personal Data Protection. 3. Upgrading Information Security Management System certification to ISO 27001:2022.
IT Security Enhancement	• Penerapan *Mobile Device Management.* • Penerapan *Security Operation Center.* • Implementation of Mobile Device Management. • Implementation of Security Operation Center.
Adopsi *Advanced Technology* Adoption of Advanced Technology	Pengembangan *Dashboard Analytics* Development of Dashboard Analytics.

Inovasi Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung proses bisnis Perusahaan dan meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi serta memberikan keunggulan kompetitif, pada tahun 2024 Perusahaan telah melakukan inovasi teknologi informasi antara lain:

1. AI HSSE, Pemanfaatan *Artificial Intelligence* untuk mendeteksi keselamatan karyawan proyek.
2. Merancang *framework* maturitas ERP sektor Konstruksi, untuk mengukur tingkat kematangan Perusahaan dalam implementasi ERP.
3. *Concrete Maturity Test* (ConMT), produk hasil riset & inovasi untuk pengukuran kekuatan beton berbasis Internet of Things (IoT)
4. Aplikasi *Project Quality Monitoring* / E-QC *(Everyone Quality Control),* aplikasi yang mendukung peningkatan mutu pekerjaan melalui identifikasi produk tidak sesuai yang terintegrasi pada platform HK Shield.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Sehubungan untuk mendukung pelaksanaan *business continuity management systems,* Perusahaan terus melakukan peningkatan Infrastruktur dengan peremajaan data center dan migrasi *server* ke *cloud*. Hal ini dilakukan guna memastikan Layanan Teknologi Informasi dapat berjalan dan digunakan optimal.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung *Good Corporate Governance,* PT Hutama Karya (Persero) telah menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi sesuai dengan standar *best practice*. Tata Kelola yang diterapkan mengacu pada standar COBIT 2019, dan ISO 27001:2022. Selain itu, untuk mendukung UU Nomor 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 maka perusahaan telah menerapkan Pelindungan Data Pribadi. Hal ini dilakukan guna memastikan pelindungan data pribadi yang dikelola perusahaan dikelola dengan baik. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memastikan bahwa risiko teknologi informasi seperti IT disruption, cyber security, dan disaster recovery telah dikelola dengan baik dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan.

Information Technology Innovation

To support the company's business processes, enhance the quality of Information Technology services, and provide a competitive advantage, in 2024, the company has implemented several technological innovations, including:

1. AI HSSE, Utilizing Artificial Intelligence to detect project employee safety.
2. Designing an ERP maturity framework for the Construction sector, to measure the Company's maturity level in implementing ERP.
3. Concrete Maturity Test (ConMT), a product of research & innovation for measuring concrete strength based on the Internet of Things (IoT)
4. Project Quality Monitoring / E-QC (Everyone Quality Control) application, an application that supports improving the quality of work through identifying non-conforming products integrated into the HK Shield platform.

Information Technology Infrastructure

In order to support the implementation of business continuity management systems, the Company continues to improve infrastructure by rejuvenating data centers and migrating servers to the cloud. This is done to ensure that Information Technology Services can run and be used optimally.

Information Technology Governance

To support Good Corporate Governance, PT Hutama Karya (Persero) has implemented Information Technology Governance under best practice standards. The governance framework is based on COBIT 2019 and ISO 27001:2022 standards. Additionally, to comply with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/03/2023, the company has implemented a Personal Data Protection system. This ensures that the personal data managed by the company is handled securely and under regulations. Furthermore, the Board of Commissioners and Board of Directors continuously ensure that information technology risks such as IT disruption, cyber security, and disaster recovery are well managed and integrated into the overall risk management framework.

Pada tahun 2024, sesuai dengan Petunjuk Teknis Kementerian BUMN terkait Teknis Pelaporan dan Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi serta untuk memastikan pelaksanaan dan pengembangan Teknologi Informasi, telah dilaksanakan serangkaian Kegiatan Audit Teknologi Informasi antara lain Audit Surveilance & Upgrading ISO 27001:2022 dan Self Assesment IT Maturity Assesment COBIT 2019.

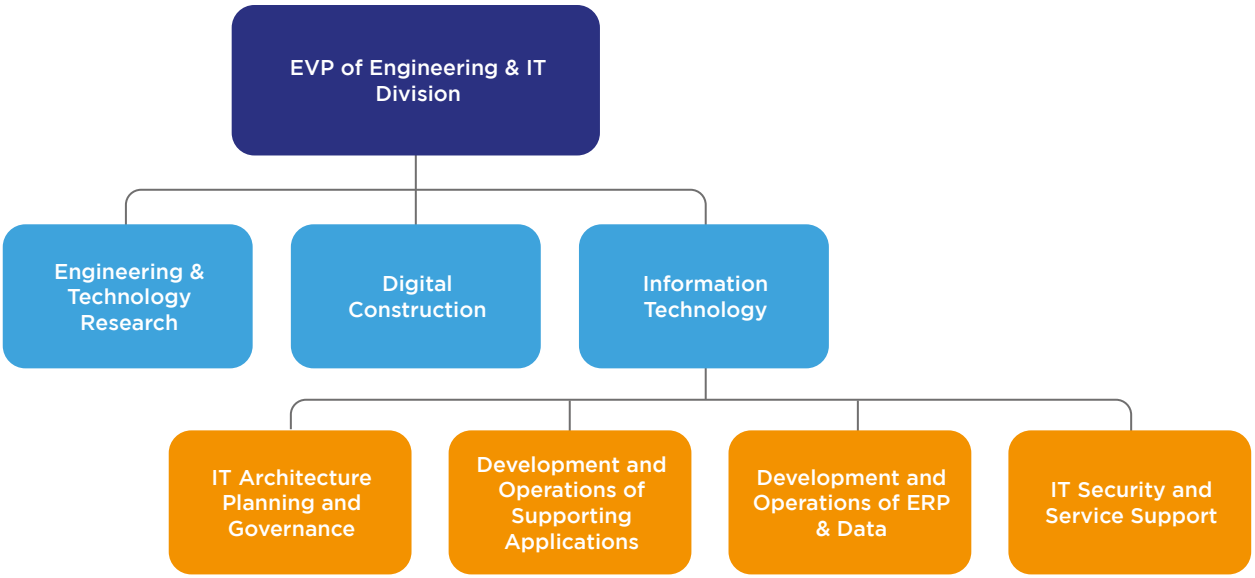
Struktur Pengelola Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung proses bisnis Perusahaan dan meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi serta memberikan keunggulan kompetitif, Perusahaan telah membentuk Struktur Pengelola Teknologi Informasi sebagai berikut:

In 2024, under the Technical Guidelines of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) regarding the Technical Reporting and Implementation of Information Technology Audits, and to ensure the execution and development of Information Technology, a series of Information Technology Audit Activities have been conducted. These include Surveillance Audit & Upgrading ISO 27001:2022 and Self-Assessment of IT Maturity COBIT 2019.

Information Technology Management Structure

To support the company's business processes, enhance the quality of Information Technology services, and provide a competitive advantage, the company has established the following Information Technology Management Structure:



Rencana Kerja Teknologi Informasi 2025

Selaras dengan Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2025. Perusahaan telah menetapkan program kerja teknologi informasi tahun 2025. Program kerja yang sudah ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan pengendalian dan efektifitas proses melalui Integrasi ERP dan fungsi *locking*.
2. Peningkatan standar aplikasi pendukung sesuai dengan teknologi ter-*update*.
3. Peningkatan *cyber security* untuk mendukung *Business Continuity Management*.
4. Peningkatan Tata kelola TI yang terintegrasi.

Information Technology Work Plan for 2025

Aligned with the Company's 2025 Work Plan, the company has established its 2025 Information Technology Work Program, which includes:

1. Enhancing control and process effectiveness through ERP integration and locking function.
2. Improving supporting application standards under the latest technology.
3. Strengthening cybersecurity to support Business Continuity Management.
4. Enhancing integrated IT governance.





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Achievement in Corporate Governance Implementation

77,48

point | points

ACGS periode *assessment* Tahun Buku 2023 menghasilkan total skor capaian (Level 1 dan Level 2) sebesar 77,48 poin

ACGS assessment period for the 2023 Fiscal Year produced a total achievement score (Level 1 and Level 2) of 77.48 points

Corporate Governance Perception Index

Penghargaan Corporate Governance Perception Index dengan kategori *"Trusted Company"* di tahun 2023

Corporate Governance Perception Index Award with the trusted company category in 2023

The Best GRC For Corporate Governance & Compliance (Construction Services) pada GRC & Performance Excellence Award 2024

Memperoleh penghargaan The Best GRC For Corporate Governance & Compliance (Construction Services) pada GRC & Performance Excellence Award 2024

Achieving the Best GRC For Corporate Governance & Compliance (Construction Services) award at the 2024 GRC & Performance Excellence Award

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Basis of Corporate Governance Implementation

Dalam menerapkan praktik GCG, Hutama Karya mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 21 April 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik.
9. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) versi 2024 yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Markets Forum* (ACMF).
10. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

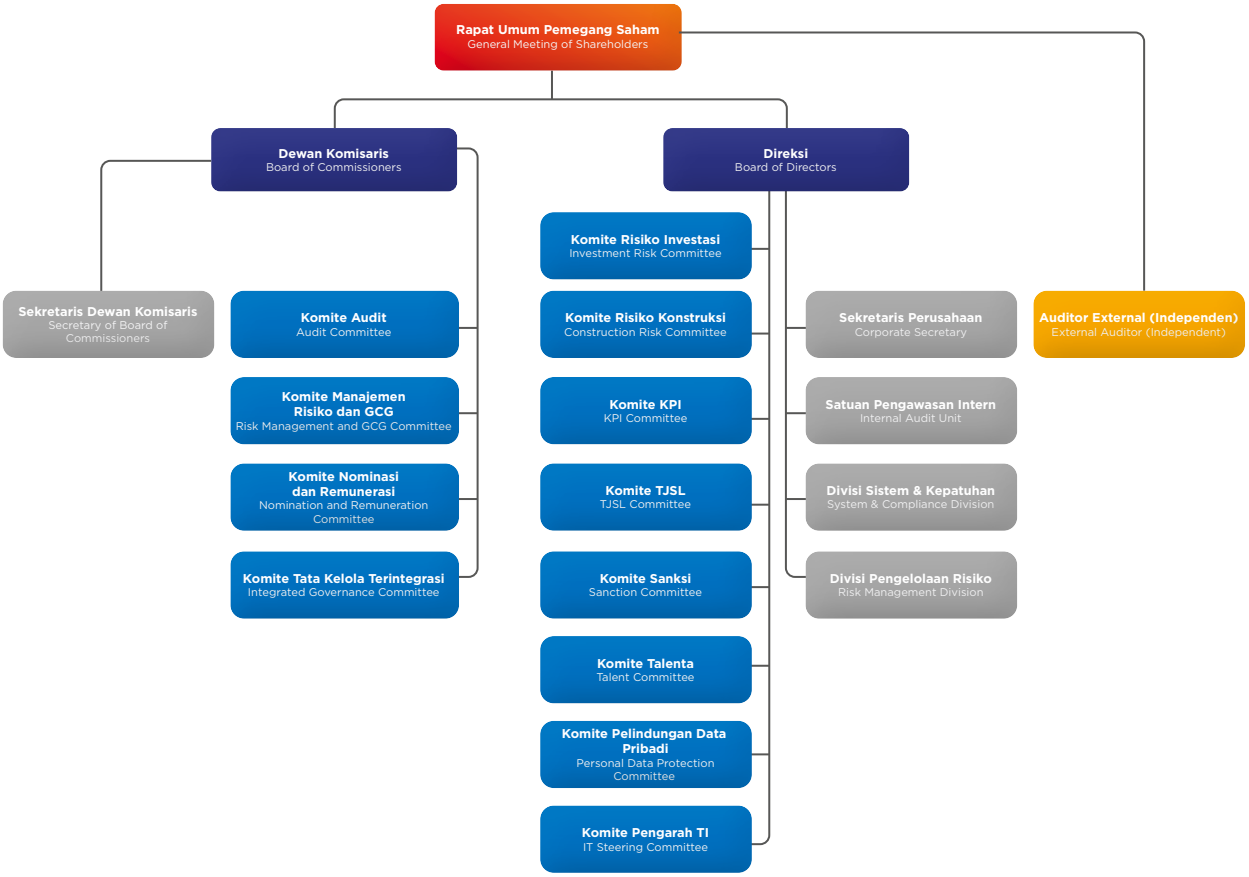
In terms of GCG practices implementation, Hutama Karya refers to laws and regulations, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE).
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Company (PT).
3. Government Regulation Number 45 of 2005 dated October 25, 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.
4. Law Number 14 of 2008 dated April 30, 2008 concerning Public Information Disclosure.
5. Law Number 19 of 2016 dated November 25, 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 dated April 21, 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOE.
8. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
9. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) version 2024 published by the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).
10. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure and Mechanism

Struktur Organ Perusahaan

Company Organ Structure



Governance Soft Structure

Governance soft structure yang telah dimiliki oleh Hutama Karya:

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
3. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
5. Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis
6. Kebijakan Manajemen Risiko
7. Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
8. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
9. Kebijakan Anti *Fraud*
10. Kebijakan *Whistleblowing System*
11. Pedoman Kepatuhan Persaingan Usaha
12. Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan yang Baik
13. Piagam Komite Audit
14. Piagam Komite Manajemen Risiko & GCG
15. Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
16. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Governance Soft Structure

Governance soft structures that have been owned by Hutama Karya are as follows:

1. Company's Articles of Association
2. Board of Commissioners Manual
3. Board of Directors Manual
4. Good Corporate Governance Guidelines
5. Work Ethics and Business Ethics Guidelines
6. Risk Management Policy
7. Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Policy
8. Gratification Control Policy
9. Anti-Fraud Policy
10. Whistleblowing System Policy
11. Business Competition Compliance Guidelines
12. Good Subsidiary Governance Guidelines
13. Audit Committee Charter
14. Risk Management & GCG Committee Charter
15. Nomination & Remuneration Committee Charter
16. Integrated Governance Committee Charter

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
   b. Persetujuan perubahan permodalan
   c. Mengusulkan dan menyetujui pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   d. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
   e. Persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
   f. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS 1 (satu) saham 1 (satu) hak suara.
3. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur.
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
5. Mengajukan agenda RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan Perseroan dan memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
3. Anggaran Dasar Perseroan

Corporate Governance Mechanism

Shareholders

Shareholders' Rights

1. Right to approve in GMS related the following matters:
   a. Ratification of changes to the Articles of Association
   b. Ratification of changes to capital
   c. Propose and approve of dismissal and nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners
   d. Ratification of the Company's Work Plan and Budget
   e. Ratification of merger, amalgamation, acquisition, separation, and dissolution.
   f. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. Attending and voting in a GMS 1 (one) share 1 (one) vote.
3. Obtaining material information regarding the Company in a timely, measurable, and regular manner.
4. Receiving share of the Company's profit allocated for shareholders in the form of dividend, and the remaining of assets resulting from liquidation, which is equal to the total of the owned shares.
5. Submitting the agenda for the GMS.

General Meeting Of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the holder of the highest power in the Company's management structure and has authority that is not possessed by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Decisions taken in the GMS must be based on the Company's long-term business interests. The GMS and/or Shareholders may not intervene in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations, including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

The Company's GMS is held with reference to the following provisions:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Company.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
3. The Company's Articles of Association

Prosedur penyelenggaran RUPS, mekanisme pemungutan suara, termasuk mengajukan pertanyaan/tanggapan mengenai agenda RUPS disampaikan sebelum RUPS dimulai.

Procedures for organizing the GMS, voting mechanisms, including submitting questions/responses regarding the GMS agenda are submitted before the GMS begins.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 dan Realisasinya

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024
Waktu : 14.16 WIB
Tempat : Ballroom HK Tower
Jl. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur

Annual GMS Implementation on Ratification of The 2024 Company's Work Plan and Budget as Well as Its Realization

GMS implementation was conducted on:
Day/Date : Tuesday, January 30, 2024
Time : 14.16 WIB
Venue : Ballroom HK Tower
Jl. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Tentang Pengesahan RKAP Tahun 2024

Attendance Recapitulation of Annual GMS on Ratification of The 2024 RKAP

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Anindita Eka Wibisono	Kuasa Pemegang Saham Shareholders' Power of Attorney	Hadir Attend
2	Budiman	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Attend
3	Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice of President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Attend
4	Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
5	Chairiah	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
6	Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Attend
7	Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Attend
8	Budi Harto	Direktur Utama President Director	Hadir Attend
9	Aloysius Kiik Ro	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	Hadir Attend
10	Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Director of Operations I	Hadir Attend
11	Gunadi	Direktur Operasi II Director of Operations II	Hadir Attend
12	Koentjoro	Direktur Operasi III Director of Operations III	Hadir Attend
13	Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Hadir Attend
14	Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal	Hadir Attend

PIHAK INDEPENDEN

Pihak independen penyusun akta RUPS yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

INDEPENDENT PARTY

The independent party who drafted the GMS deed is Notary Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tentang Pengesahan RKAP Tahun 2024

Resolution and Realization of Annual GMS on Ratification of The 2024 RKAP

Agenda Pertama
First Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024.
Ratification of the Company's Work Plan and Budget and the Board of Commissioners' 2024 Work Budget Plan.

Keputusan:
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024. Adapun pokok-pokok RKAP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Usaha (JO+NJO) sebesar Rp43.433 Miliar;
- Laba (Rugi) Bersih sebesar Rp249 Miliar;
- Jumlah Aset sebesar Rp183.820 Miliar;
- Saldo Kas Akhir sebesar Rp18.871 Miliar;
- Total Investasi sebesar Rp40.424 Miliar.

Resolution:
Approving the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP) and the Board of Commissioners' 2024 Work Budget Plan (RKA). The key points of the 2024 RKAP were as follows:
- Operating Income (JO+NJO) as of Rp43,433 billion;
- Net Profit (Loss) as of Rp249 billion;
- Total Assets as of Rp183,820 billion;
- Ending Cash Balance as of Rp18,871 billion;
- Total Investment as of Rp40,424 billion.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham RUPS RKAP Tahun 2024
- Pokok-pokok RKAP yang telah disahkan dipublikasikan pada Risalah RUPS RKAP dalam Bahasa Indonesia melalui situs Otoritas Jasa Keuangan https://spe.ojk.go.id/idxnet
- Perseroan menjalankan operasional tahun 2024 berdasarkan RKAP yang telah disahkan oleh RUPS

Follow Up of Shareholders' Directives in the 2024 RKAP GMS
- The key points of the RKAP that had been approved were published in the Minutes of the RKAP GMS in Bahasa Indonesia via the Financial Services Authority website https://spe.ojk.go.id/idxnet
- The Company performed operations in 2024 based on the RKAP that had been approved by the GMS

Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024.
Ratification of the 2024 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget.

Keputusan:
- Mengesahkan RKA Program TJSL yang dijalankan di unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/ *Community Involvement and Development* (CID) dimana sumbernya dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya PT Hutama Karya (Persero), di luar Pendanaan UMK pada laporan RKA Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp13.630.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Mengesahkan RKA Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2024 yang akan disalurkan melalui kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dicatatkan pada akun Aktiva Tidak Lancar.

Resolution:
- Approving the RKA of the TJSL Program implemented in the Community Involvement and Development (CID) unit where the source was from the budget calculated as the cost of PT Hutama Karya (Persero), outside the UMK Funding in the Company's 2024 RKA report as Rp13,630,000,000.00 (thirteen billion six hundred and thirty million Rupiah);
- Approving the RKA of the TJSL Program for UMK Funding sourced from the revolving fund of the 2024 UMK Funding Program, which were distributed through cooperation with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) as of Rp1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah) recorded in the Non-Current Assets account.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham RUPS RKAP Tahun 2024
- Pokok-pokok RKA TJSL yang telah disahkan dipublikasikan pada Risalah RUPS RKAP dalam Bahasa Indonesia melalui situs Otoritas Jasa Keuangan https://spe.ojk.go.id/idxnet
- Pelaksanaan program TJSL tahun 2024 berdasarkan RKA yang telah disahkan oleh RUPS

Follow Up of Shareholders' Directives in the 2024 RKAP GMS
- The key points of the RKA TJSL that had been approved were published in the Minutes of the RKAP GMS in Bahasa Indonesia via the Financial Services Authority website https://spe.ojk.go.id/idxnet
- Implementation of the 2024 TJSL program based on the RKA that had been approved by the GMS

Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham dan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2024.
Determination of Management Contract (Key Performance Indicators) of the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders and between the Board of Commissioners and Shareholders in 2024.

Keputusan:
Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham dan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2024.
Resolution:
Establishing Management Contracts (Key Performance Indicators) of the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders and between the Board of Commissioners and Shareholders in 2024.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham RUPS RKAP Tahun 2024
- Kontrak Manajemen yang ditetapkan pada RUPS menjadi KPI Direksi secara kolegial tahun 2024, yang selanjutnya di *cascade* menjadi KPI Direksi secara Individual, KPI Divisi hingga individu.

Follow Up of Shareholders' Directives in the 2024 RKAP GMS
- The Management Contract stipulated at the GMS became the Board of Directors' KPI collegially in 2024, which was cascaded into the Board of Directors' KPI individually, KPI Division to individual.

Status: Telah Terealisasi | Realized

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tentang Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Realisasinya

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2024
Waktu : 09.10 WIB
Tempat : Ballroom HK Tower
Jl. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur

Annual GMS Implementation on Ratification of the 2023 Annual Report and Consolidated Financial Statements and Its Realization

GMS implementation was conducted on:
Day/Date : Wednesday/June 26, 2024
Time : 09.10 WIB
Venue : Ballroom HK Tower
Jl. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Tentang Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023

Attendance Recapitulation of Annual GMS on Ratification of the 2023 Annual Report and Consolidated Financial Statements

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Anindita Eka Wibisono	Kuasa Pemegang Saham Shareholders' Power of Attorney	Hadir Attend
2	Yudo Margono	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Attend
3	Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice of President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Attend
4	Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
5	Chairiah	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
6	Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
7	Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Attend
8	Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Attend
9	Budi Harto	Direktur Utama President Director	Hadir Attend
10	Aloysius Kiik Ro	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	Hadir Attend
11	Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Director of Operations I	Hadir Attend
12	Gunadi	Direktur Operasi II Director of Operations II	Hadir Attend
13	Koentjoro	Direktur Operasi III Director of Operations III	Hadir Attend
14	Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan Director of Finance	Hadir Attend
15	Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal	Hadir Attend
16	Sugiarti	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Hadir Attend
17	Hari Mochamad Rochim	Penata Kelola Perusahaan Negara Muda Kementerian Badan Usaha Milik Negara Governance of Young State Enterprises Ministry of State-Owned Enterprises	Hadir Attend

Pihak Independen

Pihak independen penyusun akta RUPS yaitu Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn.

Independent Party

The independent party who drafted the deed of the GMS is Notary Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tentang Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023

Resolution and Realization of The Annual GMS on The Ratification of the Annual Report and Consolidated Financial Statements for The Financial Year 2023

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali *(Restatement)* Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report for the 2023 Fiscal Year, including Ratification of the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year as well as Granting of Full Settlement and Release of Liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions that had been conducted during the 2023 Fiscal Year.

Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) RINTIS, JUMADI, RIANTO, dan Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00403/2.1025/AU.1/03/0243-1/1/III/2024 tanggal 26-3-2024 (dua puluh enam maret dua ribu dua puluh empat), laporan keuangan konsolidasian PT Hutama Karya (Persro) dan entitas anak Perusahaan tahun buku 2023 mendapat opini "laporan keuangan konsolidasian PT Hutama Karya (Persero) menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", termasuk penyajian kembali *(restatement)* Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember 2023) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.
- Direksi dan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi penyebab penyajian kembali *(restatement)* Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan peningkatan kinerja PT Hutama Karya (Persero).
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2023 yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) RINTIS, JUMADI, RIANTO, dan Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00637/2.1025/AU.2/11/0243-1/1/IV/2024 tanggal 19-4-2024 (sembilan belas April dia ribu dua puluh empat) dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Hutama Karya (Persero) tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercemin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution:
- Approving the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the 2023 Fiscal Year and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, and ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) RINTIS, JUMADI, RIANTO, DAN REKAN (PwC Indonesia) in accordance with the Independent Auditor's Report Number: 00403/2.1025/AU.1/03/0243-1/1/III/2024 dated 26-3-2024 (the twenty-sixth day of March two thousand and twenty-four), the consolidated financial statements of PT Hutama Karya (Persro) and its subsidiaries for the 2023 fiscal year by receiving the opinion that "the consolidated financial statements of PT Hutama Karya (Persero) is presented fairly in material respects, and the consolidated financial position of the Group as of 31-12-2023 (the thirty-first day of December two thousand and twenty-three) as well as the consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", including a restatement of the Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, and granting release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the Company's management and supervision actions carried out in the Financial Year ended on 31-12-2023 (thirty-first December 2023) as long as such actions do not constitute a criminal act and/or violate applicable laws and legal procedures, are reflected in the Company's books of accounts, and do not cause losses to the Company and its subsidiaries..
- The Board of Directors and Commissioners were requested to fully resolve the matters that caused the restatement of the Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year and to consistently perform their duties and functions carefully and cautiously to optimize resources owned by PT Hutama Karya (Persero) in order to fully resolve improvements and increase performance of PT Hutama Karya (Persero).
- Stipulation of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year.
- Ratifying the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for 2023 ending on 31-12-2023, which was part of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) as audited by the Public Accounting Firm (KAP) RINTIS, JUMADI, RIANTO, DAN REKAN (PwC Indonesia) in accordance with the Independent Auditor's Report Number: 00637/2.1025/AU.2/11/0243-1/1/IV/2024 dated 19-4-2024 (the nineteen day of April two thousand twenty-four) with the opinion "fair in material respects, the financial position of the Micro and Small Business Funding Program of PT Hutama Karya (Persero) dated 31-12-2023 (the thirty-first day of December two thousand twenty-three) as well as its activities and cash flows for the year ended on that date were in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability", and providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Micro and Small Business Funding Program ending on 31-12-2023 (the thirty first day of December two thousand twenty three) as long as such actions did not constitute criminal actions and/or violate applicable laws and legal procedures and were reflected in the Company's report books.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali *(Restatement)* Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)
Follow-Up of Shareholders' Directives
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report for the 2023 Fiscal Year, including Ratification of the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year as well as Granting of Full Settlement and Release of Responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions that had been conducted during the 2023 Fiscal Year, which had been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)
Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Determination of the Company's Net Profit Utilization for the 2023 Fiscal Year.

Keputusan:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp1.872.554.734.239 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) seluruhnya sebagai cadangan.
Resolution:
Determining the Net Profit utilization attributable to the owners of the Company's holding entity for the 2023 (two thousand twenty-three) Fiscal Year as of Rp1,872,554,734,239 (one trillion eight hundred seventy-two billion five hundred fifty-four million seven hundred thirty-four thousand two hundred thirty-nine rupiah) completely as reserves.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
Perseroan mencadangkan laba bersih sebesar Rp1.872.554.734.239 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai ekuitas
Follow-Up of Shareholders' Directives
The Company reserved net profit as of Rp1,872,554,734,239 (one trillion eight hundred seventy-two billion five hundred fifty-four million seven hundred thirty-four thousand two hundred thirty-nine rupiah) as equity.
Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024
Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year

Keputusan:
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (PwC Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") periode Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik ("KAP") Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (PwC Indonesia) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

Resolution:
- Appointing the Public Accounting Firm ("KAP") Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (PwC Indonesia) to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 (two thousand twenty-four) fiscal year and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") for the 2024 (two thousand twenty-four) fiscal year.
- Granting the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees, additions/adjustments to other scopes other than as stated in the decision above, including the appointment of a Public Accountant, and other appointment requirements that were reasonable for the KAP.
- Granting authority and power to the Board of Commissioners by firstly obtaining written approval from the General Meeting of Shareholders to determine a Replacement KAP in case the Public Accounting Firm ("KAP") Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (PwC Indonesia) for any reason whatsoever, could not complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") for the 2024 (two thousand twenty-four) Fiscal Year, including determining the amount of audit service fees and other requirements for the Replacement KAP.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
KAP Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (PwC Indonesia) melakukan pekerjaan dalam lingkup audit yang telah ditetapkan.
Follow-Up of Shareholders' Directives
Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (PwC Indonesia) conducted work within the audit scope that had been determined.
Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun 2023, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024.
Determination of Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for 2023 and Salary and Honorarium and other Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024.

Keputusan:
Penetapan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) bagi Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan secara tersendiri.
Resolution:
Determination of bonuses/performance incentives/special incentives for performance in the 2023 (two thousand twenty-three) fiscal year as well as salary/honorarium including facilities and allowances for the 2024 (two thousand twenty-four) fiscal year for the Board of Directors and Board of Commissioners was stipulated separately.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun 2023, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024 ditetapkan tersendiri oleh Pemegang Saham.
Follow-Up of Shareholders' Directives
Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for 2023, Salary and Honorarium and other Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 were determined separately by the Shareholders.
Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Approval of the Realization Report of the Additional State Capital Participation Funds Utilization for the 2021, 2022, and 2023 Fiscal Years.

Keputusan:
Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu), 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang hal-hal yang dilaporkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati, menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
Resolution:
Accepting the Accountability Report on the Realization of the Additional State Capital Participation Funds Utilization for the 2021 (two thousand twenty-one), 2022 (two thousand twenty-two) and 2023 (two thousand twenty-three) Fiscal Years as long as any matters reported by the Board of Directors and Board of Commissioners had been conducted carefully and cautiously by implementing the principles of good corporate governance and in accordance with the provisions of regulations and statutory.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Follow-Up of Shareholders' Directives
Approval of the Realization Report of the Additional State Capital Participation Funds Utilization for the 2021, 2022, and 2023 Fiscal Years.
Status: Telah Terealisasi | Realized

RUPS Luar Biasa

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya dan Realisasinya

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/ 31 Januari 2024

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Extraordinary GMS

Extraordinary GMS Implementation on Dismissal and Nomination of President Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) and Its Realization

GMS implementation was held on:
Day/Date : Wednesday/ January 31, 2024

Resolution and Realization of Extraordinary GMS on Dismissal and Nomination of President Commissioner of PT Hutama Karya (Persero)

Keputusan
Resolution

- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Budiman sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-45/MBU/02/2020 tanggal 7 Februari 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut
- Mengangkat Sdr. Yudo Margono sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-28/MBU.01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya pada tanggal 31 Januari 2024
- Honorably dismissing Mr. Budiman as President Commissioner and Independent Commissioner of PT Hutama Karya (Persero), who was nominated based on the Decree of the Minister of SOEs Number SK-45/MBU/02/2020 dated February 7, 2020, with gratitude for his contributions of energy and thoughts during his term of office
- Nominating Mr. Yudo Margono as President Commissioner and Independent Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company No. SK-28/MBU.01/2024 concerning the Dismissal and Nomination of the President Commissioner of PT Hutama Karya (Persero) dated January 31, 2024

Keputusan Resolution

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham RUPSLB Tahun 2024
Keputusan ini telah diaktakan dihadapan Esi Susianti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Pusat dengan akta nomor 07 tanggal 13 Februari 2024
Follow Up Of Shareholders' Directives In The 2024 Extraordinary GMS
The resolution was drawn in deed before Esi Susianti, S.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, with deed number 07 dated February 13, 2024
Status: Telah Terealisasi | Realized

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat/ 15 Maret 2024

Extraordinary GMS Implementation on Dismissal and Nomination of The Company's Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero)

GMS implementation was conducted on:
Day/Date : Friday/March 15, 2024

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Resolution and Realization Of Extraordinary GMS on Changes to Nomenclature, Assignment of Duties, and Nomination of Members of The Company's Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero)

Keputusan Resolution:

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya sebagai berikut:
- Changing the nomenclature of positions of members of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) as follows:

Semula | Previously	**Menjadi** | Becoming
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Direktur Keuangan | Director of Finance
	Direktur Manajemen Risiko | Director of Risk Management

- Mengalihkan penugasan Sdr. Eka Setya Adrianto yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-92/MBU/04/2024 tanggal 4 April 2022 semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya, dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatannya sebagaimana Keputusan Menteri BUMN tersebut.
- Mengangkat Sdri. Sugiarti sebagai Direktur Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) Hutama Karya berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-66/MBU/03/2024 tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya pada tanggal 15 Maret 2024
- Transferring the assignment of Mr. Eka Setya Adrianto, who was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs Number SK-92/MBU/04/2024 dated April 4, 2022, previously as Director of Finance and Risk Management becoming Director of Finance of PT Hutama Karya (Persero) with the term of office continuing the remaining term of office as stated in the Decree of the Minister of SOEs.
- Nominating Ms. Sugiarti as Director of Risk Management of PT Hutama Karya (Persero) based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company No. SK-66/MBU/03/2024 concerning Changes in Nomenclature, Assignment of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) dated March 15, 2024

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham RUPSLB Tahun 2024
Keputusan ini telah diaktakan dihadapan Esi Susianti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Pusat dengan akta nomor 03 tanggal 3 April 2024
Follow-Up Of The 2024 Extraordinary GMS' Directives
The resolution had been notarized before Esi Susianti, S.H., M.Kn Notary in Central Jakarta with deed number 03 dated April 3, 2024
Status: Telah Terealisasi | Realized

Pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 dan Realisasinya

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin/ 30 Januari 2023
Waktu : 15.54 WIB
Tempat : Ballroom HK Tower
Jl. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur

Annual GMS Implementation on Ratification of The Company's 2023 Work Plan and Budget and Its Realization

GMS implementation was held on:
Day/Date : Monday/January 30, 2023
Time : 15.54 WIB
Venue : Ballroom HK Tower
Jl. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tentang Pengesahan RKAP Tahun 2023

Attendance Recapitulation of Annual GMS on Ratification of The 2023 Annual Report

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Hendrika Nora Osloi Sinaga	Kuasa Pemegang Saham Shareholders' Power of Attorney	Hadir Attend
2	Budiman	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Attend
3	Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice of President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Attend
4	Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
5	Mohamad Zainal Fatah	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
6	Chairiah	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
7	Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Attend
8	Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Attend
9	Budi Harto	Direktur Utama President Director	Hadir Attend
10	Aloysius Kiik Ro	Wakil Direktur Utama Vice of President Director	Hadir Attend
11	Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Director of Operations I	Hadir Attend
12	Gunadi	Direktur Operasi II Director of Operations II	Hadir Attend
13	Koentjoro	Direktur Operasi III Director of Operations III	Hadir Attend
14	Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Hadir Attend
15	Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal	Hadir Attend

Pihak Independen

Pihak independen penyusun akta RUPS yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Independent Party

The independent party who drafted the GMS deed is Notary Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2023

Resolution and Realization of Annual GMS on Ratification of The 2023 RKAP

Agenda Pertama First Agenda
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Hutama Karya (Persero) pada kuadran Sistemik A serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2023. Ratification of the Company's Work Plan and Budget including the determination of the risk classification of PT Hutama Karya (Persero) in the Systemic A quadrant and the Board of Commissioners' 2023 Work Budget Plan (RKA).
Keputusan: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Hutama Karya (Persero) pada kuadran Sistemik A serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2023 Resolution: Ratifying the Company's Work Plan and Budget (RKAP) including the determination of the risk classification of PT Hutama Karya (Persero) in the Systemic A quadrant and the Board of Commissioners' 2023 Work and Budget Plan (RKA).

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS RKAP TAHUN 2023
- Pokok-pokok RKAP yang telah disahkan dipublikasikan pada Risalah RUPS RKAP dalam Bahasa Indonesia melalui situs Otoritas Jasa Keuangan https://spe.ojk.go.id/idxnet
- Perseroan menjalankan operasional tahun 2023 berdasarkan RKAP yang telah disahkan oleh RUPS
- Perseroan melakukan penyesuaian organ dan melaksanakan kewajiban sesuai klasifikasi kuadran Sistemik A

FOLLOW-UP OF GMS' DIRECTIVES ON THE 2023 RKAP
- The key points of the RKAP that had been approved were published in the Minutes of the GMS RKAP in Bahasa Indonesia via the Financial Services Authority website https://spe.ojk.go.id/idxnet
- The Company conducted operations in 2023 based on the RKAP that had been approved by the GMS
- The Company made adjustments to organs and conducted obligations according to the Systemic A quadrant classification

Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023
Ratification of the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL)

Keputusan:
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai Pedoman Kerja Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Resolution:
Ratifying the 2023 (two thousand twenty-three) Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL) as the 2023 (two thousand twenty-three) Work Guidelines.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS RKAP TAHUN 2023
- Pokok-pokok RKA TJSL yang telah disahkan dipublikasikan pada Risalah RUPS RKAP dalam Bahasa Indonesia melalui situs Otoritas Jasa Keuangan https://spe.ojk.go.id/idxnet
- Pelaksanaan program TJSL tahun 2023 berdasarkan RKA yang telah disahkan oleh RUPS

FOLLOW-UP OF GMS' DIRECTIVES ON THE 2023 RKAP
- The key points of the RKA TJSL that had been approved were published in the Minutes of the GMS RKAP in Bahasa Indonesia via the Financial Services Authority website https://spe.ojk.go.id/idxnet
- The 2023 TJSL program implementation based on the RKA that had been approved by the GMS

Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2023
Determination of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year.

Keputusan:
Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2023
Resolution:
Stipulating Operational Aspect Indicator for the 2023 Soundness Level Assessment

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS RKAP TAHUN 2023
- Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2023 yang telah disahkan dipublikasikan pada Risalah RUPS RKAP dalam Bahasa Indonesia melalui situs Otoritas Jasa Keuangan https://spe.ojk.go.id/idxnet
- Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2023 yang telah disahkan menjadi acuan Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2023 oleh perseroan

FOLLOW-UP OF GMS' DIRECTIVES ON THE 2023 RKAP
- The Operational Aspect Indicators for the 2023 Soundness Level Assessment that had been ratified were published in the Minutes of the RKAP GMS in Bahasa Indonesia via the Financial Services Authority website https://spe.ojk.go.id/idxnet
- The Operational Aspect Indicators for the 2023 Soundness Level Assessment that had been ratified became the reference for the 2023 Soundness Level Assessment by the Company

Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham dan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023
Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) of the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders and between the Board of Commissioners and Shareholders in 2023

Keputusan:
Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham dan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023
Resolution:
Establishing Management Contracts (Key Performance Indicators) of the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders and between the Board of Commissioners and Shareholders in 2023

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS RKAP TAHUN 2023
Kontrak Manajemen yang ditetapkan pada RUPS menjadi KPI Direksi secara kolegial tahun 2024, yang selanjutnya di *cascade* menjadi KPI Direksi secara Individual, KPI Divisi hingga individu.

FOLLOW-UP OF GMS' DIRECTIVES ON THE 2023 RKAP
The Management Contract stipulated at the GMS became the Board of Directors' KPI collegially in 2024, which was cascaded into the Board of Directors' KPI individually, KPI Division to individual.

Status: Telah Terealisasi | Realized

Pelaksanaan RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Realisasinya

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin/ 29 Mei 2023
Waktu : 19.31 WIB
Tempat : Ballroom HK Tower
Jl. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur

Annual GMS Implementation on Ratification of The 2022 Annual Report and Its Realization

GMS implementation was held on:
Day/Date : Monday/ May 29, 2023
Time : 19.31 WIB
Venue : Ballroom HK Tower
Jl. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022

Attendance Recapitulation of Annual GMS on Ratification of The 2022 Annual Report

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Hendrika Nora Osloi Sinaga	Kuasa Pemegang Saham Shareholders' Power of Attorney	Hadir Attend
2	Budiman	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Attend
3	Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice of President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Hadir Attend
4	Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
5	Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
6	Chairiah	Komisaris Commissioner	Hadir Attend
7	Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Attend
8	Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Attend
9	Budi Harto	Direktur Utama President Director	Hadir Attend
10	Aloysius Kiik Ro	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Attend
11	Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Director of Operations I	Hadir Attend
12	Gunadi	Direktur Operasi II Director of Operations II	Hadir Attend
13	Koentjoro	Direktur Operasi III Director of Operations III	Hadir Attend
14	Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Hadir Attend
15	Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal	Hadir Attend

Pihak Independen

Pihak independen penyusun akta RUPS yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Independent Party

The independent party who drafted the GMS deed is Notary Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022

Resolution and Realization of Annnual GMS on Ratification of The 2022 Annual Report

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year.

Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit sebagaimana dimuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00205/2.1051/AU.1/03/0555-1/1/ III/2023 tanggal 23-3-2023 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31- 12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseoran dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berkahir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution:

- Approving the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year and the Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year and ratifying the Company's Consolidated Financial Statements ending on 31-12-2023 (the thirty-first day December two thousand twenty-three), which had been audited and stated in the Report of Public Accounting Firm, Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Indonesia) in accordance with Report Number 00205/2.1051/AU.1/03/0555-1/1/ III/2023 dated 23-3-2023 (the twenty-third day of March two thousand twenty-three) with the opinion of "Fair" in all material respects, the Group's consolidated financial position as of 31-12-2022 (the thirty-first day December two thousand twenty-two) as well as the consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.
- Granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors for their management actions of the Company and the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company that had been conducted during the fiscal year ending on 31-12-2022 (the thirty-first day of December two thousand and twenty-two) as long as such actions did not constitute criminal action and had been reflected in the Company's report books.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia)
FOLLOW-UP OF ANNUAL GMS' DIRECTIVES ON RATIFICATION OF THE 2022 ANNUAL REPORT
Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year, which had been audited by KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia)
Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Approval of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program for the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year including Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program.

Keputusan:

- Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN (anggota dari Crowe Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00368/2.1051/AU.2/10/0555-1/1/IV/2023 tanggal 5-4-2023 (lima April dua ribu dua puluh tiga) dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Konsolidasian Grup tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution:

- Approving the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Year 2022 (two thousand twenty-two) ending on 31-12-2022 (the thirty first day of December two thousand twenty-two), which was part of the Social and Environmental Responsibility Report that had been audited by the Public Accounting Firm KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN (a member of Crowe Indonesia) in accordance with Report Number 00368/2.1051/AU.2/10/0555-1/1/IV/2023 dated 5-4-2023 (the fifth day of April two thousand twenty-three) with the opinion "Fair" in all material respects, the Group's Consolidated Financial Position as of 31-12-2022 (the thirty first day of December two thousand twenty-two) as well as the financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with the Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) in Indonesia.
- Granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors for the Company's management actions and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions in the Micro and Small Business Funding Program that had been implemented in the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year as long as the actions did not constitute criminal actions and had been reflected in the Company's report books.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia)

FOLLOW-UP OF ANNUAL GMS' DIRECTIVES ON RATIFICATION OF THE 2022 ANNUAL REPORT

Approval of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program for the 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Year including the Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program, which had been audited by KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia)

Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
Determination of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year.

Keputusan:

Tidak ada penetapan penggunaan laba bersih Perseroan karena Perseroan mengalami laba minus atau rugi bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Resolution:

None of the determination of the Company's net profit utilization was available because the Company experienced a negative profit or net loss for the 2022 (two thousand and twenty-two) Fiscal Year.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

Keputusan langsung berlaku dan dilaksanakan

FOLLOW-UP OF ANNUAL GMS' DIRECTIVES ON RATIFICATION OF THE 2022 ANNUAL REPORT

The resolution was directly applicable and enforceable

Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 (two thousand twenty-three) Fiscal Year and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") for the 2023 (two thousand twenty-three) Fiscal Year.

Keputusan:
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (terafiliasi dengan Price Waterhouse Cooper) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yan diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis RUPS untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (terafiliasi dengan Price Waterhouse Cooper), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
- Appointing Public Accounting Firm TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (affiliated with Price Waterhouse Cooper) as the Public Accounting Firm that audited the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) ending on 31-12-2023 (the thirty-first day of December two thousand twenty-three).
- Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees, the required additional work scope and other requirements that were reasonable for the Public Accounting Firm.
- Granting authority and power to the Board of Commissioners by firstly obtaining written approval from the GMS to determine a replacement Public Accounting Firm in case the Public Accounting Firm TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (affiliated with Price Waterhouse Cooper), for any reason, could not complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 (two thousand twenty three) Fiscal Year, and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") for the 2023 (two thousand twenty three) Fiscal Year, including determining the audit fee and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
KAP TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (PwC Indonesia) melakukan pekerjaan dalam lingkup audit yang telah ditetapkan.
FOLLOW-UP OF ANNUAL GMS' DIRECTIVES ON RATIFICATION OF THE 2022 ANNUAL REPORT
KAP TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (PwC Indonesia) conducted work in the stipulated audit scope.
Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Penetapan Tantiem/ Insentif Kinerja/ Insentif Khusus Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Determination of Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for 2022 (two thousand twenty-two), Salary and Honorarium and other Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023 (two thousand twenty-three).

Keputusan:
Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), akan ditetapkan secara tersendiri.
Resolution:
Determination of Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for 2022 (two thousand twenty-two), Salary and Honorarium and Other Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023 (two thousand twenty-three), which was stipulated separately.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ditetapkan secara tersendiri.
FOLLOW-UP OF ANNUAL GMS' DIRECTIVES ON RATIFICATION OF THE 2022 ANNUAL REPORT
Determination of Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for 2022 (two thousand twenty-two), Salary and Honorarium and Other Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023 (two thousand twenty-three), which was stipulated separately.
Status: Telah Terealisasi | Realized

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Ratification of the Realization Report of the Additional State Capital Participation Funds Utilization for the 2021 (two thousand twenty-one) and 2022 (two thousand twenty-two) Fiscal Years.

Keputusan:

- Mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana PMN sampai dengan tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) atas PMN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) Tahap II (dua) sebesar Rp9.000 miliar (sembilan ribu miliar rupiah) atau 100% (seratus persen) dari dana PMN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) Tahap II (dua), PMN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) Tahap III (tiga) sebesar Rp8.562 miliar (delapan ribu lima ratus enam puluh dua miliar rupiah) atau 85,62% (delapan puluh lima koma enam dua persen) dari dana PMN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) Tahap III (tiga) sebesar Rp10.000 miliar (sepuluh ribu miliar rupiah), PMN Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) Tahap I (satu) sebesar Rp12.475 miliar (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) atau 52,31% (lima puluh dua koma tiga satu persen) dari dana PMN Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) Tahap I (satu) sebesar Rp23.850 miliar (dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh miliar rupiah), dan PMN Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) Tahap II (dua) sebesar Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari dana PMN Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) Tahap II (dua) sebesar Rp7.500 miilar (tujuh ribu lima ratus miliar rupiah) dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Adapun penggunaan PMN diperuntukkan untuk investasi JTTS meliputi perencanaan, konstruksi, peralatan tol, supervisi, eskalasi, fixed cost termasuk biaya pajak, biaya keuangan, dan beban usaha ruas tol, divisi serta beban usaha kantor pusat.
- Direksi diminta agar mengoptimalkan penyerapan dana PMN untuk pembangunan proyek JTTS sesuai target yang telah ditetapkan dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian/Lembaga antara lain:
  a. Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Manajemen Aset Negara terkait pembebasan lahan, baik perencanaan maupun pendanaan tanah.
  b. Percepatan pemenuhan kelengkapan berkas pengadaan tanah.
  c. Pengawalan keselarasan progres konstruksi dengan progres pembebasan lahan.
  d. Percepatan proses pembayaran jasa konstruksi.
  e. Menjaga komitmen terhadap pencapaian KPI dalam rangka realisasi PMN.
  f. Melakukan upaya percepatan penyelesaian ruas JTTS tahap I (satu) sesuai dengan *time schedule* yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh ruas JTTS tahap I (satu) dapat

Resolution:

- Approving the report on the realization of the use of PMN funds up to dated 31-12-2022 (the thirty first day of December two thousand twenty two) for PMN for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year Phase II (two) as of Rp9,000 billion (nine thousand billion rupiah) or 100% (one hundred percent) of the PMN funds for the 2021 (two thousand twenty one) Phase II (two) Fiscal Year, PMN for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year Phase III (three) as of Rp8,562 billion (eight thousand five hundred sixty two billion rupiah) or 85.62% (eighty five point six two percent) of the PMN funds for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year Phase III (three) as of Rp10,000 billion (ten thousand billion rupiah), PMN for the 2022 (two thousand twenty two) Fiscal Year Phase I (one) as of Rp12,475 billion (twelve thousand four hundred seventy five billion rupiah) or 52.31% (fifty two point three one percent) of the PMN funds for the 2022 (two thousand twenty two) Fiscal Year Phase I (one) as of Rp23,850 billion (twenty three thousand eight hundred fifty billion rupiah), and the PMN for the 2022 (two thousand twenty two) Fiscal Year Phase II (two) as of Rp0 (zero rupiah) or 0% (zero percent) of the PMN funds for the 2022 (two thousand twenty two) Fiscal Year Phase II (two) as of Rp7,500 billion (seven thousand five hundred billion rupiah) providing that activities and uses were in accordance with the Joint PMN Study and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The use of PMN was intended for JTTS investment including planning, construction, toll equipment, supervision, escalation, fixed costs including tax costs, financial costs, and toll road section operating expenses, divisions and head office operating expenses.
- The Board of Directors was requested to optimize the PMN funds absorption for the JTTS project development according to the targets that had been set by conducting intensive coordination with the Ministries/Institutions, including:
  a. Coordination with the Ministry of Public Works and Public Housing and the State Asset Management Institution regarding land acquisition, both planning and land funding.
  b. Acceleration of the fulfillment of land acquisition file requirements.
  c. Monitoring the alignment of construction progress with land acquisition progress.
  d. Acceleration of the construction service payment process.
  e. Maintaining commitment to achieving KPI in the context of PMN realization.
  f. Accelerating the JTTS section phase I (one) completion according to the timetable that had been prepared so that it was expected that JTTS sections phase I (one) could be completed

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
Perseroan telah melakukan Upaya-upaya optimalisasi penyerapan dana PMN untuk pembangunan proyek JTTS sesuai target yang telah ditetapkan dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian/Lembaga
FOLLOW UP OF SHAREHOLDERS' DIRECTIVES ON RATIFICATION OF THE 2022 ANNUAL REPORT
The Company made efforts to optimize the PMN funds absorption for the JTTS project development according to the targets that had been set by performing intensive coordination with the Ministries/Institutions.
Status: Telah Terealisasi | Realized

Keputusan RUPS Pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku yang Direalisasikan pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2024 telah terealisasi pada tahun 2024 dan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi pada tahun 2023. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2023 yang belum direalisasikan pada tahun 2024.

GMS Resolution in Book Year and 1 (One) Year before Book Year Realized in The Book Year

All decisions of the 2024 GMS have been realized in 2024 and the 2023 GMS has been realized in 2023. So there are no decisions of the 2023 GMS that have not been realized in 2024.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Tugas Umum Direksi
   a. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas oleh masing-masing Anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing Anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

   b. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
   c. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Pengelolaan Direksi
   a. Tugas Direksi Terkait Penetapan Struktur Organisasi.
   b. Tugas Direksi Terkait Kebijakan Operasional dan *Standard Operational Procedure* (SOP).

   c. Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

The Board of Directors, a company organ, has collegial duties and responsibilities in managing the Company. Each member of the Board of Directors can perform tasks and make resolutions in accordance with the division of tasks and authorities.

DUTY AND RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. General Duties of the Board of Directors are
   a. The Board of Directors as a company organ has collegial duties and responsibilities in managing the company. Each member of the Board of Directors can carry out duties and make decisions in accordance with the division of duties and authorities. The implementation of duties by each member of the Board of Directors remains a joint responsibility. The position of each member of the Board of Directors including the President Director is equal. The duty of the President Director as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Directors.
   b. The Board of Directors is tasked with performing actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company and representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
   c. The Board of Directors must manage the Company in accordance with the authority and responsibility of the Board of Directors as stipulated in the articles of association and provisions of laws and regulations.
2. Management Duties of the Board of Directors are
   a. Duties of the Board of Directors Related to Determination of Organizational Structure.
   b. Duties of the Board of Directors Related to Operational Policies and Standard Operational Procedures (SOP).
   c. Duties of the Board of Directors Related to Human Resources (HR) Management.

d. Tugas Direksi Terkait Manajemen Karir.

e. Tugas Direksi Terkait Pengukuran dan Penilaian Kinerja.
f. Tugas Direksi terkait Usulan Insentif Kinerja.

g. Tugas Direksi Terkait Melaksanakan Program/Kegiatan Sesuai dengan RKAP dan Mengambil Keputusan yang Diperlukan.

h. Tugas Direksi Terkait Usulan Peluang Bisnis dan Perubahan Lingkungan Bisnis.

i. Tugas Direksi Terkait Penerapan Manajemen Risiko.
j. Tugas Direksi Terkait Penerapan Sistem Teknologi Informasi.

k. Tugas Direksi Terkait Sistem Peningkatan Produk dan Pelayanan.
l. Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.
m. Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Anak Perusahaan *(Subsidiary Governance)* dan/atau Perusahaan Patungan.
n. Tugas Direksi Terkait Penerapan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK.

o. Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tentang Pengendalian Intern.
p. Tugas Direksi Terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
q. Tugas Direksi Terkait Pengurusan Perseroan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
r. Tugas Direksi Terkait Hubungan Stakeholder.

s. Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi.

t. Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Duties of the Board of Directors Related to Career Management.
e. Duties of the Board of Directors Related to Performance Measurement and Assessment.
f. Duties of the Board of Directors Related to Proposed Performance Incentives.
g. Duties of the Board of Directors Related to Implementing Programs/Activities in Accordance with the RKAP and Making Necessary Decisions.
h. Duties of the Board of Directors Related to Proposed Business Opportunities and Changes in the Business Environment.
i. Duties of the Board of Directors Related to Implementation of Risk Management.
j. Duties of the Board of Directors Related to Implementation of Information Technology Systems.
k. Duties of the Board of Directors Related to Product and Service Improvement Systems.
l. Duties of the Board of Directors Related to Management of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL).
m. Duties of the Board of Directors Related to Management of Subsidiary Governance and/or Joint Ventures.
n. Duties of the Board of Directors Related to Implementation of Accounting Policies and Preparation of Financial Reports in Accordance with SAK.
o. Duties of the Board of Directors Related to Management of Internal Control.
p. Duties of the Board of Directors Related to Follow-up of Internal Auditor and External Auditor Inspection Results.
q. Duties of the Board of Directors Related to Management of the Company in Accordance with Laws and Regulations.
r. Duties of the Board of Directors Related to Stakeholder Relations.
s. Duties of the Board of Directors Related to Management of Information and Communication Disclosure.
t. Duties of the Board of Directors Related to Management of Procurement of Goods and Services.

Tanggung Jawab Direksi

1. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Direksi bertanggung-jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan Perusahaan.

Responsibility of the Board of Directors

1. In performing their duties, members of the Board of Directors must comply with the SOE's articles of association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. The Board of Directors is responsible for managing the Company in order to generate profits and ensure the continuity of the Company.

3. Pengurusan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
4. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud.
5. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Direksi.
6. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak Anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.
8. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Pidana.
9. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
10. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud juga bagi Anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

11. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan:
    a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3. The referred management must be carried out by each Member of the Board of Directors in good faith and with full responsibility.
4. Each Member of the Board of Directors is fully responsible personally for the Company's losses if the said person is guilty or negligent in carrying out his duties in accordance with the referred provisions.
5. n case the Board of Directors consists of 2 (two) or more Members of the Board of Directors, the said responsibility applies jointly and severally to each Member of the Board of Directors.
6. Members of the Board of Directors cannot be accountable for the said losses if they can prove:
   a. Such loss is not due to his/her fault or negligence;
   b. Having performed management in good faith and cautiously for the benefit and in accordance with the Company's intention and purpose;
   c. Having no conflict of interest either directly or indirectly regarding management actions that result in losses;
   d. Having taken preventive action for the occurrence or continuation of such losses.
7. The said provisions shall not reduce the rights of other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to file a lawsuit on behalf of the Company.
8. The provisions regarding the responsibility of the Board of Directors for their errors and negligence as regulated in this Law do not reduce the provisions regulated in Criminal Code.
9. In case bankruptcy as referred to in above paragraph occurs due to the error or negligence of the Board of Directors and the bankrupt assets are insufficient to pay all of the Company's obligations in the bankruptcy, each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for outstanding obligations from the bankrupt assets.
10. The responsibility as referred to above paragraph also applies to members of the Board of Directors who are at fault or negligent and have served as members of the Board of Directors within a period of 5 (five) years before the decision of bankruptcy is announced.
11. Members of the Board of Directors are not responsible for the bankruptcy of the Company as referred to if they can prove:
    a. Such loss is not due to his/her fault or negligence;
    b. Having performed management in good faith and cautiously for the benefit and in accordance with the Company's intention and purpose;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

12. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Tugas dan Wewenang Direktur Utama adalah:

1. Pemimpin organisasi utama yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengurusan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mempertimbangkan risiko yang relevan dalam pengambilan keputusan dan tindakan.
2. Pemimpin organisasi utama yang menetapkan Visi, Misi, kebijakan, arah, strategi Perusahaan, struktur organisasi dan menumbuhkan komitmen organisasi dan *corporate culture.*
3. Pengambilan keputusan utama dalam organisasi, dalam fungsi yang memegang hal-hal strategic dan jangka panjang.
4. Bertanggung jawab dan mengatur keberlangsungan pengembangan bisnis/usaha dan operasional produk utama dari organisasi termasuk fungsi pengembangan SDM, pengendalian internal, kepatuhan regulasi, serta hubungan korporat dengan para *shareholder* dan *stakeholder.*
5. Mengatur koordinasi dari tugas dan wewenang seluruh direksi untuk kepentingan keselarasan dan kesinambungan pencapaian visi dan misi Perusahaan.
6. Melakukan pengelolaan organisasi Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
7. Bertanggung jawab sebagai pembina utama pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Tugas dan Wewenang Wakil Direktur Utama adalah:

1. Membantu Direktur Utama dalam melakukan pengendalian proses integrasi atas aktifitas operasional yang dilakukan oleh para Direktur Operasi terkait untuk memastikan kesinambungan seluruh inisiatif program penugasan pemerintah telah sesuai dan selaras, termasuk hubungan dengan pihak eksternal Perusahaan (*shareholder* dan *stakeholder*) untuk kepentingan yang terkait tugasnya.
2. Membantu Direktur Utama dalam mengkoordinasikan, pengendalian dan mengevaluasi pengembangan strategi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah

c. Having no conflict of interest either directly or indirectly regarding management actions that result in losses;
d. Having taken preventive action for the occurrence or continuation of such losses

12. The said provisions also apply to the Board of Directors of the Company, which is declared bankrupt based on a lawsuit from a third party.

DUTY AND RESPONSIBILITY OF EACH DIRECTOR

Duties and Authorities of President Director are:

1. The leader of the main organization, who is responsible for organizing the management of the company in accordance with the Company's intention and purpose as stipulated in the Company's Articles of Association by considering relevant risks in decision-making and actions.
2. The leader of the main organization, who determines the Company's Vision, Mission, policies, direction, strategy, organizational structure, and fosters organizational commitment and corporate culture.
3. The key decision-maker in the organization, which his/her function holds strategic and long-term matters.
4. Being responsible for and managing the sustainability of business/enterprise development and the operation of the main products of the organization including HR development functions, internal control, regulatory compliance, and corporate relations with shareholders and stakeholders.
5. Administering the coordination of the duties and authorities of directors for the benefit of harmony and continuity in achieving the Company's vision and mission.
6. Managing the organization of the Corporate Secretary and Internal Supervisory Unit (SPI).
7. Being responsible as the main supervisor in the Company's Social and Environmental Responsibility program.

Duties and Authorities of Deputy of President Director are:

1. Assisting the President Director in controlling the integration process of operational activities carried out by the related Operations Directors to ensure that the sustainability of governance assignment program initiatives is appropriate and aligned, including relations with external parties of the Company (shareholders and stakeholders) for interests related to their duties.
2. Assisting the President Director in coordinating, controlling and evaluating the development of strategies and implementation of financial management that has integrated functions and

mengintegrasikan seluruh fungsi dan unit-unit bisnis untuk memastikan perolehan strategi yang efektif dan efisien. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengelolaan risiko, sesuai dengan arah pertumbuhan organisasi.

3. Membantu Direktur Utama dalam merencanakan arah kebijakan manajemen risiko dan kebijakan keuangan & investasi Perusahaan selaras dengan perencanaan Perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti secara operasional oleh Direktorat Keuangan dan Direktorat terkait, menerjemahkan kebijakan arah organisasi dan mengawasi pelaksanaan secara operasional keuangan organisasi untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran kelompok usaha Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Membantu Direktur Utama mengkoordinasikan pengendalian kegiatan pendanaan dan penyelengaraan Keuangan untuk memastikan perolehan dana strategis sesuai arahan pertumbuhan organisasi.
5. Sebagai Ketua *Project Management Officer* (PMO) Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Trans Sumatera sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-49/MBU/02/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Trans Sumatera.
6. Melakukan pengelolaan pelaksanaan pengembangan bisnis dan investasi Perusahaan meliputi kajian kelayakan, merger & akuisisi, bisnis portofolio dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha sesuai perencanaan Perusahaan serta melakukan pembinaan pengendalian terhadap sistem QHSSE.
7. Melakukan pengelolaan organisasi Divisi Pengembangan Bisnis & Manajemen Portofolio dan Divisi QHSSE.

Tugas dan Wewenang Direktur Keuangan adalah:

1. Melakukan pengelolaan kegiatan perencanaan Perusahaan, pengelolaan keuangan Perusahaan meliputi perencanaan, perolehan dan penggunaan dana Perusahaan, pengelolaan perpajakan dan akuntansi, termasuk dengan berhubungan dengan pihak internal Perusahaan maupun eksternal Perusahaan untuk kepentingan yang terkait tugasnya dan memastikan seluruh kegiatan tersebut di atas telah memenuhi kepentingan seluruh bisnis Perusahaan melalui penetapan kebijakan/pedoman dan prosedur sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengelolaan organisasi Divisi Corporate Planning dan Divisi Akuntansi & Keuangan.

business units to ensure effective and efficient strategic acquisition. Supervising and ensuring the implementation of risk management in accordance with the direction of organizational growth.

3. Assisting the President Director in planning the direction of risk management policies and financial & investment policies of the Company in line with the Company's plan for operational follow-up purpose by the Directorate of Finance and related Directorates, translating organizational direction policies and supervise the operational implementation of organizational finances to support the achievement of the Company's vision, mission and business group targets that have been set by the Company.
4. Assisting the President Director in coordinating the control of funding activities and financial management to ensure the acquisition of strategic funds in accordance with the direction of organizational growth.
5. Being the Head of the Project Management Officer (PMO) of the Trans Sumatra Development Acceleration Team in accordance with the Decree of the Minister of SOEs No. SK-49/MBU/02/2022 dated February 7, 2022 concerning Changes to the Membership Composition of the Trans Sumatra Development Acceleration Team.
6. Administering the implementation of the Company's business development and investment including feasibility studies, mergers & acquisitions, portfolio businesses and government cooperation with business entities according to the Company's plan, and providing guidance on controlling the QHSSE system.
7. Managing the organization of the Business Development & Portfolio Management Division and the QHSSE Division.

Duties and Authorities of Director of Finance are:

1. Performing management of the Company's planning activities, the Company's financial management, including planning, obtaining and using the Company' funds, taxation and accounting management, comprising of liaising with internal and external parties of the Company for interests related to its duties and ensuring that the foregoing activities have met the Company's business interests through the establishment of policies/guidelines and procedures in accordance with applicable regulations.
2. Conducting organizational management of the Corporate Plan Division and the Accounting & Finance Division.

Tugas dan Wewenang Direktur Operasi I adalah:

1. Melakukan pengelolaan kegiatan pelaksanaan usaha pengembangan jasa konstruksi Sipil Umum yang meliputi dari proses perencanaan, pembangunan, pengelolaan rantai pasok *(supply chain management),* pengoperasian, pemeliharaan dan pengendalian operasi/bisnis serta pengembangan bisnis/pemasaran jasa konstruksi Sipil Umum. Melakukan pengelolaan dan pengembangan *digital construction, lean construction* serta pengelolaan teknologi informasi dan riset teknologi sesuai bisnis proses, termasuk dapat berhubungan dengan pihak internal Perusahaan maupun eksternal Perusahaan untuk kepentingan yang terkait tugasnya dan memastikan seluruh kegiatan tersebut di atas telah memenuhi kepentingan seluruh bisnis Perusahaan melalui penetapan kebijakan/pedoman dan prosedur sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengelolaan organisasi Divisi Sipil Umum dan Divisi *Engineering* & TI.

Duties and Authorities of Director of Operation I are:

1. Managing the implementation of the General Civil construction service development business activities which include the planning process, construction, supply chain management, operation, maintenance and control of operations/business as well as business development/marketing of General Civil construction services. Carrying out management and development of digital construction, lean contraction and management of information technology and technology research according to business processes, including being able to liaise with internal and external parties of the Company for interests related to its duties and ensuring that the above activities have met the Company's business interests through the establishment of policies/ guidelines and procedures in accordance with applicable regulations.
2. Conducting organizational management of the Infrastructure Division and the Engineering & IT Division.

Tugas dan Wewenang Direktur Operasi II adalah:

1. Melakukan pengelolaan kegiatan jasa konstruksi Bangunan Gedung dan EPC yang meliputi dari proses perencanaan, pembangunan, pengelolaan rantai pasok *(supply chain management),* pengoperasian, pemeliharaan dan pengendalian operasi/ bisnis serta pengembangan bisnis/pemasaran jasa konstruksi Bangunan Gedung dan EPC, termasuk dengan berhubungan dengan pihak internal Perusahaaan maupun eksternal Perusahaan untuk kepentingan yang terkait tugasnya dan memastikan seluruh kegiatan tersebut di atas telah memenuhi kepentingan seluruh bisnis Perusahaan melalui penetapan kebijakan/pedoman dan prosedur sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengelolaan organisasi Divisi Gedung dan Divisi EPC.

Duties and Authorities of Director Operation II are:

1. Performing management of Building and EPC construction services activities which include the planning process, construction, supply chain management, operation, maintenance and control of operations/business as well as business development/marketing of Building and EPC construction services, including liaising with internal and external parties of the Company for interests related to its duties and ensuring that the above activities have met the Company's business interests through the establishment of policies/guidelines and procedures in accordance with applicable regulations.
2. Conducting organizational management of the Building Division and EPC Division.

Tugas dan Wewenang Direktur Operasi III adalah:

1. Melakukan pengelolaan kegiatan pelaksanaan usaha pengembangan jalan tol yang meliputi dari proses pengadaan, perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol termasuk berhubungan dengan pihak internal Perusahaan maupun eksternal Perusahaan untuk kepentingan yang terkait tugasnya dan memastikan seluruh kegiatan tersebut di atas telah memenuhi kepentingan seluruh bisnis Perusahaan melalui penetapan kebijakan/pedoman dan prosedur sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

Duties and Authorities of Director of Operation III are:

1. Conducting management of toll road development business implementation activities, covering the procurement, planning, construction, operation and maintenance of toll roads including liaising with internal and external parties of the Company for interests related to its duties and ensuring that the above activities have met the Company's business interests through the establishment of policies/ guidelines and procedures in accordance with applicable regulations.

2. Melakukan pengelolaan organisasi Unit Pengadaan Jalan Tol, Divisi Perencanaan Jalan Tol, Divisi Pembangunan Jalan Tol dan Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol.

Tugas dan Wewenang Direktur Manajemen Risiko:

1. Melakukan pengelolaan dan pengendalian risiko Perusahaan yang tepat serta pengelolaan sistem prosedur dan Monitoring kepatuhan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang diperlukan sekaligus komunikasi dengan pihak internal Perusahaan maupun eksternal Perusahaan untuk kepentingan yang terkait tugasnya dan memastikan seluruh kegiatan tersebut telah memenuhi kepentingan seluruh bisnis Perusahaan melalui penetapan kebijakan/ pedoman dan prosedur sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengelolaan organisasi Divisi Pengelolaan Risiko dan Divisi Sistem & Kepatuhan.

Tugas dan Wewenang Direktur *Human Capital & Legal* adalah:

1. Melakukan pengelolaan seluruh kegiatan *Human Capital* dan koordinasi penanganan bidang Legal (korporasi, litigasi, manajemen kontrak dan legal terkait Jalan Tol Trans Sumatera) termasuk berhubungan dengan pihak internal perusahaaan maupun eksternal perusahaan untuk kepentingan yang terkait tugasnya dan memastikan seluruh kegiatan tersebut di atas telah memenuhi kepentingan seluruh bisnis perusahaan melalui penetapan kebijakan/ pedoman dan prosedur sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengelolaan organisasi Divisi Human Capital & Divisi Legal.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.
3. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

4. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

2. Performing organizational management of the Toll Road Procurement Unit, Toll Road Planning Division, Toll Road Development Division and Toll Road Operation & Maintenance Division.

Duties and Authorities of Director of Risk Management are:

1. Conducting proper management and control of Company risks as well as management of the procedure system and compliance monitoring in accordance with the required standards and regulations as well as communication with internal and external parties of the Company for interests related to its duties and ensure that all activities have met the Company's business interests through the establishment of policies/ guidelines and procedures in accordance with applicable regulations.

2. Managing organizational management of the Risk Management Division and the System & Compliance Division.

Duties and Authorities of Director of Human Capital & Legal are:

1. Managing Human Capital activities and coordinating the management of Legal aspects (corporate, litigation, contract management and legal related to the Trans Sumatra Toll Road) including liaising with internal and external parties of the company for interests related to its duties and ensuring that all activities above have met the Company's business interests through the establishment of policies/ guidelines and procedures in accordance with applicable regulations.
2. Administering the organization of the Human Capital Division and Legal Division.

RIGHT AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Directors perform the management of the Company for the Company's benefit and in accordance with the Company's intention and purpose.
2. The Board of Directors is authorized to carry out management in accordance with policies deemed appropriate, within the limits determined in this law and/or the Articles of Association.
3. In case the Board of Directors consists of 2 (two) or more members of the Board of Directors, the division of tasks and authority of management among the members of the Board of Directors is determined based on a GMS resolution.
4. In case the said GMS does not determine, the division of tasks and authority of the members of the Board of Directors is determined based on the resolutions of the Board of Directors.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:
   a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
   b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
   c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
   d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan perundang-undangan harus peraturan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perseroan;
   g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pemilikan kekayaan pengurusan Perseroan, maupun mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
   h. Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:
      - Menetapkan, mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan strategis dan operasional yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan, yakni seluruh kebijakan yang dapat secara material mempengaruhi kondisi anak perusahaan dan dapat memberikan nilai tambah yang dituangkan dalam blue print untuk diratifikasi dalam RUPS anak perusahaan;

5. In terms of performing its duties, the Board of Directors is authorized to:
   a. Determining the Company's management policy;
   b. Regulating the transfer of the Board of Directors' authority to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and out of court;
   c. Regulating the transfer of the Board of Directors' authority to one or several employees of the Company, either individually or together or to other persons, to represent the Company in and out of court;
   d. Regulating provisions regarding the Company's personnel including the determination of salaries, pensions or old-age security and other income for the Company's employees based on applicable laws and regulations, with the provision that the determination of salaries, pensions or old-age security and other income for employees that exceed the obligations stipulated by laws and regulations must first obtain approval from the General Meeting of Shareholders;
   e. Appointing and dismissing the Company's employees based on the Company's personnel regulations and applicable laws and regulations;
   f. Appointing and dismissing Company Secretary;
   g. Conducting other actions and deeds regarding the ownership of the Company's management assets, or binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company in and out of court regarding all matters and all events, with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
   h. The Board of Directors as shareholders and/or majority shareholders in each subsidiary has the authority to, as follows:
      - Determine, manage, control and monitor strategic and operational policies to be implemented by the subsidiary, namely all policies that can materially affect the condition of the subsidiary and can provide added value as outlined in the blueprint to be ratified in the subsidiary's GMS;

- Merencanakan, memutuskan, mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan cash management, logistic, pengadaan, capital expenditure dan lainnya;
- Menetapkan kebijakan strategis dan operasional yang belum ditetapkan dalam *blue print* sebagaimana dimaksud;
- Menetapkan kebijakan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi anak perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris anak perusahaan;
- Memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusahaan atas tindakan yang bersifat operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran anak perusahaan melalui mekanisme RUPS;
- Mendapatkan laporan dan penjelasan berkala baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan serta memberikan keputusan di dalam maupun di luar forum RUPS anak perusahaan tersebut;
- Menetapkan nilai atau jangka waktu kerjasama antara anak perusahaan dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi (KSO), bangunan guna serah (BOT), bangunan milik serah (bowt), bangunan serah guna (BTO), dan perjanjian sejenisnya;
- Menyetujui pemberian pinjaman, penerimaan pinjaman pengagunan, pengalihan agunan bank kepada pihak lain;
- Menyetujui penyertaan modal dan jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan oleh anak perusahaan pada perseroan lain;
- Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;
- Menyetujui pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;
- Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau anak perusahaan dari anak perusahaan dimaksud;
- Menyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/atau menyetujui penjualan terhadap persediaan barang tidak dapat digunakan oleh anak perusahaan;

- Plan, decide, manage, and control strategic activities and functions, including cash management, logistics, procurement, capital expenditure and others;
- Determine strategic and operational policies that have not been determined in the blueprint as referred to;
- Determine organizational structure policies 1 (one) level below the subsidiary's Board of Directors by considering input from the subsidiary's Board of Commissioners;
- Provide approval to the subsidiary's Board of Directors for operational actions that have not been determined in the subsidiary's Work Plan and Budget through the GMS mechanism;
- Receive periodic reports and explanations from both the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the subsidiary and provide decisions both inside and outside the subsidiary's GMS forum; Determining the value or term of cooperation between subsidiaries and business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, asset rental, operational cooperation (KSO), transfer-to-use buildings (BOT), transfer-to-own buildings (BOWT), transfer-to-use buildings (BTO), and similar agreements;
- Approve the provision of loans, receipt of collateral loans, transfer of bank collateral to other parties;
- Approve the capital participation and the amount of capital participation to be made by subsidiaries in other companies;
- Approve the establishment of subsidiaries and/or joint ventures of the said subsidiaries;
- Approve the release of capital participation in subsidiaries and/or joint ventures of the said subsidiaries;
- Approve the merger, amalgamation, takeover, separation, and dissolution of subsidiaries and/or subsidiaries of the said subsidiaries;
- Approve the write-off of uncollectible receivables and/or approve the sale of inventory that cannot be used by subsidiaries;

- Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merk dagang anak perusahaan;
- Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;
- Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;
- Menyetujui pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

6. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal Anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap Anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

7. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS.
8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
   a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan;
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
9. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Establish and/or change the logo and trademark of the subsidiary;
- Approve the establishment of foundations, organizations and/or associations that are legal entities, either directly or indirectly related, formed by the subsidiary;
- Approve the imposition of fixed and routine costs and obligations for foundations, organizations and/or associations that are legal entities formed by the subsidiary;
- Approve the purchase of land assets and/or land banks for property business activities or used as fixed assets, by first obtaining approval from the Board of Commissioners and a certain value determined by the Board of Commissioners.

6. The Board of Directors represents the Company both inside and outside the court. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) person, each Board of Directors member is authorized to represent the Company, unless otherwise specified in the Articles of Association.
7. The authority of the Board of Directors to represent the Company as referred to is unlimited and unconditional, unless otherwise specified in this law, the Articles of Association, or the resolution of the GMS.
8. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
   a. There is a case in court between the Company and the relevant Board of Directors Member;
   b. The relevant Board of Directors Member has a conflict of interest with the Company.
9. In case the said situation occurs, the person, who has the right to represent the Company, is:
   a. Other members of the Board of Directors, who do not have a conflict of interest with the Company;
   b. Board of Commissioners in case members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
   c. Other parties appointed by the GMS in case members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
10. The Board of Directors is not authorized to file a bankruptcy petition for the Company itself to the Commercial Court before obtaining approval from the GMS, without prejudice to the provisions as stipulated in the law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

11. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

PERSYARATAN DIREKSI

1. Persyaratan Materiil Persyaratan materiil Direksi Perseroan, yaitu:
   a. Keahlian.
   b. Integritas.
   c. Kepemimpinan.
   d. Pengalaman.
   e. Jujur.
   f. Perilaku yang baik.
   g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
2. Persyaratan Formal Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero atau anggota Direksi Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
   a. Orang perseorangan.
   b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
   c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. dan
   e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
3. Untuk dapat diangkat sebagai Direksi BUMN, selain memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formal sebagaimana dimaksud, seseorang harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

11. In case bankruptcy occurs due to the fault or negligence of the Board of Directors and the bankruptcy assets are insufficient to pay all of the Company's obligations in the bankruptcy, each Member of the Board of Directors is jointly and severally liable for all obligations that are not paid from the bankruptcy assets.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Term of office of Members of the Board of Directors are stipulated for 5 (five) years and can be re-nominated for 1 (once) term of service.

REQUIREMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Material requirements of the Company's Board of Directors are as follows:
   a. Expertise.
   b. Integrity.
   c. Leadership.
   d. Experience.
   e. Honesty.
   f. Good behavior.
   g. High dedication to advance and develop the Company.
2. Formal requirements in addition to meet the said criteria to be appointed as a member of the Board of Directors of a Limited Company or a member of the Board of Directors of a Subsidiary, a person must meet the following formal requirements:
   a. Individual.
   b. Being capable in performing legal action.
   c. Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment.
   d. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board, who is found guilty of causing a SOE, Subsidiary and/or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment; and
   e. Never been convicted of committing a criminal action that is detrimental to the finances of the State, SOE, Subsidiary, other business entities and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.
3. To be appointed as a SOE Director, in addition to fulfil the referred material and formal requirements, a person must accomplish other requirements, as follows:
   a. Not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member of the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial People's Representative Council, and Regency/City People's Representative Council.

b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah.
c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode.

d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.

e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi.
f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
g. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOD *CHARTER*)

Direksi sebagai organ utama Perseroan memerlukan pedoman dan tata kerja kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan Perseroan beserta hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD *Charter*) yang diperbaharui pada Juni 2024.

Dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD Charter) sebagai berikut:
1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar PT Hutama Karya (Persero)

3. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

4. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

b. Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head.

c. Not serving as a member of the Board of Directors at the relevant SOE or Subsidiary for 2 (two) periods.
d. Not currently serving as an official at a ministry/institution, member of the Board of Commissioners/Supervisory Board at another SOE, member of the Board of Directors at another SOE, member of the Board of Directors at a Subsidiary and/or other business entity.
e. Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited from being held concurrently with the position of member of the Board of Directors.
f. Having dedication and providing full time to exercise his/her duties, as stated in a declaration from the said person.

g. Physically and mentally healthy, such as not currently suffering from an illness that may hinder the implementation of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a health certificate from the hospital.
h. Having a Taxpayer Identification Number (NPWP) and fulfilled the obligation to pay taxes for the past 2 (two) years.

THE BOARD OF DIRECTORS CHARTER SEKPER

The Board of Directors, the main organ of the Company, requires guidelines and work procedures that regulate the duties and responsibilities related to the implementation of the Company's management functions along with the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with GCG principles. The Board of Directors has had a Board of Directors Charter, which was updated in June 2024.

Drafting basis of the Board of Directors Charter is as follows:
1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Company.
2. Articles of Association of PT Hutama Karya (Persero)
3. General Guidelines for GCG Indonesia from the National Committee for Governance Policy (KNKG).
4. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD *Charter*) antara lain:

1. Ketentuan Umum
2. Tata Nilai dan Kode Etik Direksi
3. Keanggotaan Direksi
4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
5. Organ Pendukung Direksi
6. Hubungan Kerja Direksi dengan Dewan Komisaris
7. Penutup

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

1. Organ Direksi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Kebijakan Direksi terkait potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya adalah sebagai berikut:
   a. Benturan kepentingan yang dimaksud adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi angggota Direksi Perusahaan;
   b. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi Perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya;
   c. Anggota Direksi Perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain secara langsung maupun

The contents of the Board of Directors Charter are as follows:

1. General Provisions
2. Board of Directors' Values and Code of Ethics
3. Board of Directors' Membership
4. Board of Directors' Duties, Responsibilities and Authorities
5. Board of Directors' Supporting Organs
6. Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners
7. Closing

CONCURRENT POSITIONS POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as stated below, as follows:

1. Member of the Board of Directors at State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises.
2. Member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board at State-Owned Enterprises.
3. Other structural and functional positions at central and/or regional government agencies/ institutions.
4. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.
5. Administrators of political parties and/ or legislative candidates/members and/ or candidates for Regional Head/Deputy of Regional Head.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Directors must avoid domination by any party, not be influenced by certain interests, free from conflicts of interest and from any influence or pressure, so that decision-making can be done objectively.
2. The Board of Directors' policy regarding potential conflicts of interest concerning themself is as follows:
   a. The said conflict of interest is a situation where there is a conflict between the Company's economic interests and the personal economic interests of members of the Company's Board of Directors;
   b. In terms of performing their duties and obligations, members of the Company's Board of Directors must always prioritize the economic interests of the company above the economic interests of their personal or family, or other parties;
   c. Members of the Company's Board of Directors are prohibited from abusing their position for personal, family, and other parties' interests or benefits directly or

tidak langsung dari kegiatan Perusahan selain penghasilan yang sah;

d. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta;

e. Setiap anggota Direksi Perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Perusahaan;

3. Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan penjabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.
   a. Menyusun mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan penjabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan.
   b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan penjabat struktural Perusahaan.
   c. Membuat surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.

4. Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.
   a. Direksi menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam daftar khusus.
   b. Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
   c. Direksi menghindari pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan, meliputi:
      - Transaksi kesempatan Perusahaan (*corporate opportunity*);
      - Transaksi dengan Perusahaan yang bersangkutan, baik yang di laksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (*sell dealing*).
      - Transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).
      - Transaksi yang di bantu oleh orang dalam *(insider information*).

indirectly from the Company's activities other than legitimate income;

d. In case any discussions and decision-making contain conflict of interest element, the relevant party is not permitted to participate;

e. Every member of the Company's Board of Directors, who has decision-making authority is required to annually make a statement that he/she has no conflict of interest in any decision that has been made by him/her and has implemented the guidelines for behavior set by the Company;

3. The Board of Directors establishes policies regarding mechanisms for the Board of Directors and structural officials to prevent personal gain and other party gain due to conflicts of interest, as follows:
   a. Drafting a mechanism to prevent personal gain by the Board of Directors and structural officials of the Company due to conflict of interest.
   b. Implementing socialization of policies on mechanisms to prevent personal gain by the Board of Directors and structural officials of the Company.
   c. Creating a declaration stating that the Board of Directors does not have a conflict of interest between personal/family interests, other positions, or groups with the interests of the Company at the beginning of the appointment which is renewed at the beginning of each year.

4. The Board of Directors applies policy to prevent conflict of interest, as follows:
   a. The Board of Directors submits a report on Share ownership in other Companies to the Corporate Secretary to be recorded in a special list.
   b. The Board of Directors signs an Integrity Pact attached to the Board of Directors' Action Proposal which must obtain approval from the Board of Commissioners and/or recommendations from the Board of Commissioners and approval from the GMS.
   c. The Board of Directors avoids making transactional decisions that contain conflicts of interest, including:
      - Transaction of corporate opportunity;
      - Transactions with the said Company, whether it is carried out by the Director personally or indirectly by the Director through members of his family or close family (sell dealing).
      - Transaction containing conflict of interest.
      - Transaction assisted by insider (insider information).

5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
   a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
   b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

7. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DIREKSI

KEBIJAKAN RAPAT

Ketentuan Umum Rapat Direksi

1. Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi.
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Direksi memiliki rencana penyelenggaraan rapat Direksi paling sedikit satu kali dalam setiap bulan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT.

5. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
   a. There is a case before the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; or
   b. The relevant member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company.
6. In case the said situation occurs, the person, who has the right to represent the Company, is:
   a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company appointed by other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest.
   b. The Board of Commissioners in case members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company.
   c. Other parties appointed by the General Meeting of Shareholders in case members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
7. In case members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company and none of the members of the Board of Commissioners, the Company will be represented by another party appointed by the General Meeting of Shareholders.

THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING

MEETING POLICY

General Provisions of the Board of Directors' Meeting

1. The Board of Directors has guidelines/procedures for the Board of Directors' Meetings, in accordance with the provisions of statutory.
2. The Board of Directors' Meetings must be held periodically, at least once a month, and the Board of Directors' Meeting may invite the Board of Commissioners/Board of Supervisories.
3. The Board of Directors' Meetings may be held at any time if:
   a. Deemed necessary by one or more Members of the Board of Directors.
   b. Upon written request from one or more members of the Board of Commissioners; or
   c. Upon written request from 1 (one) or more Shareholders, who collectively represent 1/10 (one tenth) or more of the total of shares with voting rights.

4. The Board of Directors has a plan to hold a Board of Directors' Meeting at least once a month in accordance with the plan set out in the RKAT.

5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
7. Laporan tahunan wajib memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Etika rapat

1. Pimpinan dan peserta rapat hadir sebelum rapat dimulai.
2. Setiap peserta rapat memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan topik yang dibahas.
3. Menghargai pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat.
4. Menyampaikan perbedaan pendapat, kritik atau saran secara baik dengan argument yang kuat dan tidak keluar dari topik yang dibahas dalam forum rapat.
5. Saling menghormati, bersifat terbuka dan tidak memaksakan pendapat serta bersedia menerima kritik dan saran dari peserta rapat lainnya.
6. Tidak membuat forum tersendiri di dalam rapat kecuali terkaik keperluan rapat.
7. Tidak menggunakan media elektronik atau gadget dan keluar masuk ruangan rapat tanpan alasan yang jelas diluar keperluan rapat atau kepentingan Perseroan, kecuali untuk alasan darurat saat rapat berlangsung.
8. Tidak diperbolehkan meninggalkan ruang rapat sebelum rapat selesai kecuali dengan alasan yang jelas.

Pemanggilan Rapat

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
2. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
3. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi hadir dalam rapat.

Pelaksanaan Rapat

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

5. A Board of Directors' Meeting is considered valid if it is held at the Company's domicile or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia.
6. The holding of a Board of Directors' Meeting is in accordance with the plan set out in the Annual Work Plan and Budget (RKAT).
7. The annual report must include the number of Board of Directors' Meetings and the number of attendees of each member of the Board of Directors.

Ethics of the Meeting

1. The chairman and participants of the meeting are present before the meeting begins.
2. Each participant of the meeting has the same opportunity and freedom to express their opinion according to the topic being discussed.
3. Respecting the opinions expressed by participants of the meeting.
4. Delivering dissenting opinion, criticism or suggestions in a good manner with strong arguments and not deviating from the topic discussed in the meeting forum.
5. Respecting each other, being open and not forcing opinions and willing to accept criticism and suggestions from other meeting participants.
6. Do not create a separate forum in the meeting unless it is related to the needs of the meeting.
7. Do not use electronic media or gadgets and enter and exit the meeting room without a clear reason outside the needs of the meeting or the interests of the Company, except for emergency reasons during the meeting.
8. It is prohibited to leave the meeting room before the meeting is over, unless it has a clear reason.

Summons of the Meeting

1. The summons to the Board of Directors' Meeting shall be made in writing by the member of the Board of Directors, who is entitled to represent the Company and shall be delivered no later than 3 (three) days before the meeting is held or a shorter time if, in urgent circumstances, without considering the summons and meeting dates.
2. The summons to the meeting must include the agenda, date, time, and venue of the meeting.
3. A prior summons to the meeting is not required if Members of the Board of Directors are present at the meeting.

Meeting Implementation

1. The Board of Directors' Meeting is valid and has the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total members of Board of Directors or their authorized representatives by considering the provisions of the Articles of Association.

2. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

3. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
4. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
5. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.
6. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

7. Pimpinan dan peserta rapat harus memperhatikan etika rapat dalam pelaksanaan rapat Direksi.
8. Rapat Direksi diantaranya melakukan pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.

9. Di dalam setiap rapat Direksi dilakukan evaluasi (pemantauan progres) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

10. Direksi memastikan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai, dilakukan pembahasan untuk tindak lanjutnya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perseroan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu, sebagai berikut:
   a. Mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal dapat melalui rapat Direksi;
   b. Standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi ditetapkan sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi, berkisar 7 hari (baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup);

2. A member of the Board of Directors may only represent one other member of the Board of Directors.
3. The Board of Directors' Meetings are chaired by the President Director.
4. If the President Director is absent or unavailable, the Deputy of President Director chairs the Board of Directors' Meeting, or the Director appointed by the President Director chairs the Board of Directors' Meeting, if, at the same time, the Deputy of President Director is absent or unavailable, or the Director appointed by the Deputy of President Director chairs the Board of Directors' Meeting, if, at the same time, the President Director is absent or unavailable and does not make an appointment.
5. In case the President Director does not make an appointment, one of the Directors, who has served the longest Member of the Board of Directors shall chair the Board of Directors' Meeting.
6. In case the Director, who has served the longest Member of the Board of Directors of the Company, is more than 1 (one) person, the said Director, who has the longest service and is the oldest member shall act as the chairman of the Board of Directors' Meeting.
7. The chairman and participants of the meeting must consider the ethics of the meeting in the implementation of the Board of Directors' Meeting.
8. The Board of Directors' Meeting includes discussions on the direction/proposals and/or decisions of the Board of Commissioners related to the Board of Directors' proposals.
9. In terms of each Board of Directors' Meeting, monitoring of progress is carried out on the resolutions implementation of the previous meeting results.
10. The Board of Directors ensures that the results of the previous meeting that have not been completed are discussed for follow-up.

Decision-Making Mechanism

1. The Board of Directors determines the decision-making mechanism for the corporate action in accordance with the provisions of statutory and in a timely manner, as follows:
   a. The formal decision-making mechanism of the Board of Directors can be done through a Board of Directors' Meeting;
   b. The time standard for the immediacy level of the Board of Directors' decision-making is determined since the proposed action along with supporting documents and other complete information are submitted in the Board of Directors' Meeting, ranging from 7 days (good) to up to 14 days (sufficient);

c. Mengkomunikasikan Ketentuan tentang kesegeraan untuk kepada tingkatan organisasi dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.
2. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
3. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
5. Setiap Anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk Anggota Direksi yang diwakilinya.
6. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
7. Suara blanko *(abstain)* dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
9. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Perbedaan Pendapat *(Dissenting Opinion)*

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.
2. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat.
3. Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali bagi Direktur yang melakukan *dissenting opinion* dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Communicating the provisions on immediacy to the organizational level below the Board of Directors related to the resolutions, maximally 7 (seven) days since it is ratified/ signed.
2. Resolutions of the Board of Directors are taken in the Board of Directors' Meeting.
3. Resolutions in the Board of Directors' Meeting are taken by deliberation to reach consensus.
4. In case any resolution cannot be taken by deliberation to reach consensus, the resolution is taken by ordinary majority vote.
5. Each Member of the Board of Directors has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for the represented Member of the Board of Directors.
6. If the number of votes in-favour and against are the same, the meeting resolution is in accordance with the opinion of the chairman of the meeting, while considering the provisions regarding accountability as referred to in the Articles of Association.
7. Blank votes (abstain) are considered to be in-favour to the results of the meeting resolutions.
8. In case there are more than two alternative proposals and the voting results have not obtained one alternative with more than 1/2 (one half) of the total casted votes, re-election will be held for the two proposals that receive the most votes so that one of the proposals receives more than 1/2 (one half) of the total casted votes.
9. Invalid votes are deemed to be non-existent and not counted in determining the total casted votes at the meeting.

Dissenting Opinion

1. Any occurring dissenting opinion must be included in the Meeting Resolutions and the Director, who has a dissenting opinion, must state the reasons for the dissenting opinion regarding the resolutions.
2. Dissenting opinion shall not mean giving the said Director the right not to implement the meeting resolutions. Though there are dissenting opinion, all Directors must follow and implement the meeting resolutions.
3. The Board of Directors is jointly and severally responsible personally if proven guilty or negligent in performing their duties for the Company's interests and business, unless for the Director, who gives a dissenting opinion, can prove that he/she has taken preventive action to the occurrence or continuation of the loss.

4. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Direktur yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

Risalah Rapat

1. Risalah rapat Direksi wajib dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
2. Risalah rapat Direksi disusun dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.
3. Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
4. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi wajib disimpan oleh Perusahaan.
5. Laporan tahunan wajib memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.
6. Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis.
7. Penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perseroan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan UndangUndang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Jika diperlukan, Risalah Rapat Direksi dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi, Peraturan Direksi, atau Surat Edaran.

4. Dissenting opinion stated in the resolutions and minutes of the meeting can be evidence that the said Director has taken preventive action to the occurrence or continuation of the loss by disagreeing to the meeting resolutions. This means that the said Director can be free from any claims for the occurrence or continuation of the loss as a result of the implementation of the meeting resolutions.

Minutes of the Meeting

1. Minutes of the Board of Directors' Meeting must be made for each Board of Directors' Meeting containing any matters discussed and decided in the meeting, including but not limited to opinions developed in the meeting, both supporting and dissenting opinions, and reasons for the absence of members of the Board of Directors, if any.
2. Minutes of the Board of Directors' Meeting is prepared and administered by the Corporate Secretary.
3. Each member of the Board of Directors has the right to receive a copy of the minutes of the Board of Directors' Meeting, whether the said person is present or not at the Board of Directors' Meeting.
4. The original minutes of each Board of Directors' Meeting must be kept by the Company.
5. The annual report must contain the number of Board of Directors' Meetings and the number of attendees of each member of the Board of Directors.
6. Electronic documents can be used as valid evidence of minutes of meetings other than written minutes of meetings.
7. The use of electronic documents as the Company's documents is determined by the Board of Directors by fulfilling the minimum requirements for organizing an electronic system in the Company in accordance with the provisions of the Law on Information and Electronic Transactions.
8. If necessary, the Minutes of the Board of Directors' Meeting can be followed up by issuing a Board of Directors' Decree, Board of Directors' Regulation, or Circular Letter.

RENCANA RAPAT DIREKSI

Direksi telah menyusun jadwal rencana Rapat Direksi sepanjang tahun 2024, adapun rencana rapat dan agenda rapat Direksi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

THE BOARD OF DIRECTOERS' MEETING PLAN

The Board of Directors prepared a schedule of the Board of Directors' Meetings plan during 2024. The meetings plan and agenda for the Board of Directors' meetings in 2024 were as follows:

Jadwal Schedule	**Agenda**
Triwulan I Quarter I	• *Review* bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. • *Review* bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. • Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. • *Review* dan persetujuan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2023. • Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2024. • Monthly/quarterly review of the Company and Subsidiaries' performance. • Monthly/quarterly review of the Company's Strategy and Work Plan. • Preparation of the Annual General Meeting of Shareholders. • Review and approval of the Audited Financial Report for the 2023 Fiscal Year. • Election of External Auditor for the 2024 Fiscal Year.
Triwulan II Quarter II	• *Review* bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. • *Review* bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. • Diskusi RJPP 2025-2029. • Monthly/quarterly review of the Company and Subsidiaries' performance. • Monthly/quarterly review of the Company's Strategy and Work Plan. • Discussion of 2025-2029 RJPP.
Triwulan III Quarter III	• *Review* bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. • *Review* bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. • Monthly/quarterly review of the Company and Subsidiaries' performance. • Monthly/quarterly review of the Company's Strategy and Work Plan.
Triwulan IV Quarter IV	• *Review* bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. • *Review* bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. • Monthly/quarterly review of the Company and Subsidiaries' performance. • Monthly/quarterly review of the Company's Strategy and Work Plan.

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

AGENDA, DATE AND PARTICIPANTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

Throughout 2024, the agenda, dates and participants of the Board of Directors Meetings are as follows.

Tabel Rapat Direksi

Table of Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
1.	Selasa, 2 Januari 2024 Tuesday, January 2, 2024	1. Arahan Direktur Utama dan Kordinasi antar Direktorat 2. Lain-lain; • *Update* kajian usulan penambahan bagian / biro BOC BOD • *Update* usulan penataan ruang kerja Divisi Sipil Umum 1. Direction of the Main Director and Coordination between Directorates 2. Others; • Update on the proposed study of adding BOC BOD sections/bureaus • Update on proposed work space arrangement for the Infrastructure Division	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
2.	Senin, 8 Januari 2024 Monday, January 8, 2024	1. Arahan Direksi 2. *Update* PMN Non Tunai 3. Pembahasan Tender Penambangan di Vale, PB 4. Lain-lain; • *Update* pembahasan jalur karir • *Update* resertifikasi Green Building • Penyampaian proposal HUT HK ke 63 1. Board of Directors Directive 2. Update on Non-Cash PMN 3. Discussion on Vale Mining Tender, PB 4. Others: • Update on career path discussion • Update on Green Building recertification • Submission of proposal for 63rd HK Anniversary Celebration	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
3.	Selasa, 16 Januari 2024 Tuesday, January 16, 2024	1. Arahan Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Lain-lain; • *Update* progres PMN Non Tunai • *Update* usulan kajian Day Care di HK Tower • *Update* kajian penataan ruang HK Tower 1. Direction from President Director and Inter-Directorates Coordination 2. Others: • Update on Non-Cash PMN Progress • Update on Proposed Day Care Study at HK Tower • pdate on HK Tower Spatial Arrangement Study	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
4.	Senin, 22 Januari 2024 Monday, January 22, 2024	1. Arahan Direktur Utama dan Koordinasi antar Direktorat 2. *Update* hasil ICOFR, EY 3. *Update* audit KAP, PWC 4. Lain-lain 1. Direction from President Director and Inter-Directorate Coordination 2. Update on ICOFR, EY 3. Update on Audit Findings, PWC 4. Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
5.	Senin, 29 Januari 2024 Monday, January 29, 2024	1. Arahan Direktur Utama dan Koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan Cash Flow proyek Divisi Operasi (DG, DSU, dan EPC) 3. Pembahasan perubahan PPh Pegawai, sesuai PP No 58/2023 dan PMK No 168/2023 4. Lain-lain; • *Update* tim akuisisi PMN dan ruas Kapal Betung • *Update* tim Buku Putih PMN • *Update* tim co-working space 1. Direction from President Director and Inter-Directorate Coordination 2. Discussion on Cash Flow for Division Operation Projects (DG, DSU, and EPC) 3. Discussion on Changes to Employee Income Tax, in accordance with PP No. 58/2023 and PMK No. 168/2023 4. Others: • Update on PMN Acquisition Team and Kapal Betung Route • Update on PMN White Paper Team • Update on Co-Working Space Team	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
6.	Senin, 5 Februari 2024 Monday, february 5, 2024	1. Arahan DU dan Kordinasi antar Direktorat 2. *Update* audit KAP, PWC 3. Lain-lain 1. Direction from the Board of Directors and Inter-Directorate Coordination 2. Update on KAP Audit, PWC 3. Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Tidak Hadir | Not Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
7.	Senin, 12 Februari 2024 Monday, February 12, 2024	1. Arahan Direksi 2. Persetujuan pengadaan DED ruas Dumai Kisaran sesuai Surat Dirjen Bina Marga dengan dana bridging PMN 3. Persiapan tim Integrasi HK dan Waskita sebagai tindaklanjut surat Wakil Menteri BUMN 4. Lain-lain; Pembahasan materi Ragab: • Kinerja Unaudited PT Hutama Karya (Persero) tahun 2023 • *Update* hasil reviu ICOFR PT Hutama Karya (Persero) tahun 2023 1. Board of Directors Directive 2. Approval for Procurement of Detailed Engineering Design (DED) for Dumai-Kisaran Route, in accordance with the Directorate General of Highways letter, using PMN Bridging Funds 3. Preparation of the HK and Waskita Integration Team as a follow-up to the Deputy Minister of State-Owned Enterprises letter 4. Others: Discussion on Ragab materials: • Unaudited Performance of PT Hutama Karya (Persero) for 2023 • Update on ICOFR Review Results for PT Hutama Karya (Persero) for 2023	Budi Harto	Tidak Hadir | Not Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
8.	Senin, 19 Februari 2024 Monday, February 12, 2024	1. Arahan Direksi 2. *Update* progres PBBL ruas Betung Jambi 3. Permohonan dana talangan untuk Proyek CB3 dan Jatiroto 4. Usulan alternatif pendanaan untuk pembayaran MTN PT HKR 5. Usulan bonus task force dan bonus efisien proyek 6. Lain-lain 1. Board of Directors Directive 2. Update on Progress of Betung-Jambi Road Project (PBBL) 3. Request for Bridging Funds for CB3 and Jatiroto Projects 4. Alternative Funding Proposal for MTN Payment of PT HKR 5. Proposal for Task Force Bonus and Project Efficiency Bonus 6. Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
9.	Senin, 26 Februari 2024 Monday, February 26, 2024	1. Arahan DU dan Kordinasi antar Direktorat 2. Lain-lain; • Pengajuan ketentuan kendaraan dinas BoD 1. Direction from the Board of Directors and Inter-Directorate Coordination 2. Others: • Submission of Official Vehicle Policy for the Board of Directors	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
10.	Senin, 4 Maret 2024 Monday, March 4, 2024	1. Arahan Direksi 2. Rencana Penyusunan RJPP Tahun 2025-2029 3. *Update* perhitungan Investasi Ruas JTT Tahap 2 dan 3 4. *Update* kajian FS ruas Kapal-Betung oleh Konsultan Delloite 5. Persetujuan dana talangan untuk proyek Tol Serang Panimbang DSU 6. Lain-lain • Pengajuan jasa konsultan Pengelolaan Arsip HK 1. Board of Directors Directive 2. Plan for Preparing the 2025-2029 RJPP 3. Update on Investment Calculation for JTT Route Phase 2 and 3 4. Update on FS of Kapal-Betung Route by Deloitte Consultant 5. Approval of Bridging Funds for Serang-Panimbang Toll Road Project DSU 6. Others: • Submission of Consultant Services for HK Archive Management	Budi Harto	Tidak Hadir | Not Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
11.	Senin, 18 Maret 2024 Monday, March 18, 2024	1. Arahan DU dan Kordinasi antar Direktur 2. Lain-lain; • Tanggapan Direksi atas Rencana Pemenuhan Organ Pengelola RisikoUsulan KPI Direksi secara Individual Tahun 2024*Update* Pengajuan kendaraan operasional BOD 1. Direction from the Board of Directors and Inter-Director Coordination 2. Others: • Board of Directors' Response to Risk Management Organizational Plan Proposal for Individual Director KPIs for 2024 Update on Submission of Operational Vehicles for the Board of Directors	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
12.	Senin, 25 Maret 2024 Monday, March 25, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan Koordinasi antar Direktorat 2. *Update* progres final Audit KAP 2023 PwC 3. Usulan Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 4. Lain-lain: Pembahasan Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi: • Pembahasan Kinerja PT HKR Tahun 2023 dan Rencana Restrukturisasi Keuangan PT HKR dengan Skema Equity Injection Tahun 2024 • Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan Tertentu Permasalahan Tata Kelola Perpajakan PT Bhirawa Steel Tahun buku 2020 1. Direction from the President Director and Inter-Directorates Coordination 2. Update on Final Audit Progress 2023 by PwC 3. Proposal for Lebaran Holiday Toll Tariff Discount 4. Others: Discussion on Materials for the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors: • Discussion on PT HKR's 2023 Performance and Financial Restructuring Plan with Equity Injection Scheme in 2024 • Audit Report on Specific Objectives Regarding Tax Governance Issues at PT Bhirawa Steel for the 2020 Financial Year	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Tidak Hadir | Not Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Tidak Hadir | Not Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
13.	Senin, 1 April 2024 Monday, April 1, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan Kordinasi antar Direktorat 2. *Update* reviu BPKP untuk Ruas Tol Kapal Betung 3. Lain-lain: • Persetujuan lokasi penempatan dan design Ruang DMR 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Update on BPKP Review for Kapal Betung Toll Road Section 3. Miscellaneous: • Approval of Location and Design for DMR Room	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
14.	Selasa, 16 April 2024 Tuesday, April 16, 2024	1. Arahan DU dan Kordinasi antar Direktorat 2. *Update* terkait CSK 3. Perubahan Struktur Organisasi HK 4. Lain-lain • *Update* Kesiapan tanda tangan perjanjian KPBU Trans Papua, pembentukan SPV Pembahasan Daycare 1. Direction from the Board of Directors and Inter-Directorates Coordination 2. Update on CSK 3. Changes to HK's Organizational Structure 4. Others: • Update on Readiness for Signing the Trans Papua KPBU (Public-Private Partnership) Agreement and Establishment of SPV (Special Purpose Vehicle) Discussion on Daycare	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
15.	Senin, 22 April 2024 Monday, April 22, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan Koordinasi antar Direktorat 2. Ketentuan penilaian aspek kinerja dalam RMI sesuai juknis PER.02 KBUMN 3. Persiapan PPJT PBBL Betung-Jambi dan Ijin Persetujuan Pengadaan Penyedia Jasa Ruas Betung-Jambi 4. *Update* Penugasan Palembang-Betung dan Ijin Pengadaan Penyedia Jasa ruas Palembang-Betung 5. Penyelesaian Permasalahan EPC 6. Outstanding hutang proyek JO Divisi Gedung 7. Lain-lain: Calon PM External Divisi Gedung 1. Direction from the President Director and Inter-Directorates Coordination 2. Provisions for Evaluating Performance Aspects in RMI in accordance with PER.02 KBUMN Guidelines 3. Preparation of PPJT for PBBL Betung-Jambi and Approval for Procurement of Service Providers for Betung-Jambi Route 4. Update on Palembang-Betung Assignment and Approval for Procurement of Service Providers for Palembang-Betung Route 5. Resolution of EPC 6. Outstanding Debt of JO Projects in Building Division 7. Others: Candidate for External Project Manager in Building Division	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Tidak Hadir | Not Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
16.	Senin, 29 April 2024 Monday, April 29, 2024	1. Arahan DU dan Kordinasi antar Direktorat 2. *Update* Sinergi Bisnis dan Keuangan HK-WSKT (persiapan materi Wamen) 3. Outstanding hutang proyek JO Divisi Gedung 4. Lain-lain • Warehouse Asset CikiwulBuilding Automatic System HK Tower 1. Direction from the Board of Directors and Inter-Directorates Coordination 2. Update on Business and Financial Synergy between HK and WSKT (preparation of materials for the Deputy Minister) 3. Outstanding Debt of Joint Operation (JO) Projects in Building Division 4. Others: • Warehouse Asset Management at Cikiwul Building Automatic System HK Tower	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
17.	Senin, 6 Mei 2024 Monday, May 6, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan Kordinasi antar Direktorat 2. Penawaran PwC untuk Due Diligence Waskita Karya 3. Persetujuan pengadaan konsultan QA untuk Ruas Palembang-Betung dan untuk perhitungan Progres Waskita Karya 4. Usulan persetujuan penggunaan dana lahan Palembang-Betung untuk pelaksanaan pembebasan lahan Palembang-Betung 5. Materi Paparan Hutama Karya ke Deputi Bappenas, rundown, layout 6. Lain-lain: Pembahasan *Building Automatic System* 1. Direction from the President Director and Inter-Directorates Coordination 2. PwC's Offer for Due Diligence on Waskita Karya 3. Approval for Procurement of QA Consultant for Palembang-Betung Route and for Waskita Karya Progress Calculation 4. Proposal for Approval of Using Palembang-Betung Land Funds for Land Acquisition Implementation 5. Presentation Materials for Hutama Karya to Bappenas Deputy, Rundown, Layout 6. Miscellaneous: Discussion on Building Automatic System	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
18.	Senin, 13 Mei 2024 Monday, May 13, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan Materi Ragab 3. Laporan Audit Proyek JO Adhi Karya 4. Lain-lain 1. Direction from the President Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Ragab Materials 3. Audit Report on JO Project of Adhi Karya 4. Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Tidak Hadir | Not Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
19.	Senin, 20 Mei 2024 Monday, May 20, 2024	1. Koordinasi antar Direktorat 2. Ijin Persetujuan pembayaran sebagian eskalasi dengan indeks khusus untuk perhitungan s.d Desember Tahun 2023 untuk Ruas Tahap I 3. Ijin persetujuan instruksi kerja sebagian pek ruas Palembang-Betung untuk Waskita dan HKI 4. Pembahasan Kajian Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Betung Tempino Jambi dan Palembang-Betung 5. Lain-lain 1. Inter-Directorates Coordination 2. Approval for Partial Payment of Escalation with Special Index for Calculation until December 2023 for Phase I Section 3. Approval for Work Instruction for Part of Palembang-Betung Section for Waskita and HKI 4. Discussion on Direct Appointment Study for Service Providers for Betung Tempino Jambi and Palembang-Betung 5. Others	Budi Harto	Tidak Hadir | Not Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Tidak Hadir | Not Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
20.	Senin, 27 Mei 2024 Monday, May 27, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direksi 2. Materi Paparan Kinerja TW I kepada KBUMN 3. Rencana *Workshop* RJPP Tahun 2025-2029 4. Penanganan Darurat Bencana Padang 5. Lain-lain 1. Direction from the Main Director and Coordination among Directors 2. Presentation Materials for Q1 Performance to KBUMN 3. Plan for RJPP Workshop for 2025-2029 4. Emergency Response to Padang Disaster 5. Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Tidak Hadir | Not Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
21.	Senin, 3 Juni 2024 Monday, June 3, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. *Update* perkembangan Tindak Lanjut MLFF atas surat Dirjen Bina Marga 3. Pembahasan *support* pendanaan PT Bhirawa Steel 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Update on Progress of Follow-up on MLFF based on Letter from Director General of Bina Marga 3. Discussion on Funding Support for PT Bhirawa Steel	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
22.	Senin, 10 Juni 2024 Monday, June 10, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Restrukturisasi HKR & *Update Shareholder Loan* 3. *Update* Jalan Tol Ruas Palembang Betung 4. Lain-lain: Perubahan Struktur Organisasi Laporan *Survey* Corcomm 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Restructuring of HKR and Update on Shareholder Loan 3. Update on Palembang-Betung Toll Road 4. Miscellaneous: Changes in Organizational Structure Corcomm Survey Report	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Tidak Hadir | Not Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
23.	Senin, 19 Juni 2024 Monday, June 19, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Laporan *Update* kasus-kasus Legal & Perkembangan pengadilan STJ & CSK 3. Pembahasan Jalur Karir Fungsional 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Update Report on Legal Cases and Court Developments for STJ and CSK 3. Discussion on Functional Career Path	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
24.	Senin, 24 Juni 2024 Monday, June 24, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembelian alat Tower Crane & Concrete Pump Divisi Gedung 3. Skema bonus tahunan 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Purchase of Tower Crane and Concrete Pump Equipment for Building Division 3. Annual Bonus Scheme	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
25.	Senin, 1 Juli 2024 Monday, July 1, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Usulan persetujuan penyelesaian nilai klam IDC paket Ruas Aceh Sigli 3. *Update* permasalahan EPC tentang tagihan dan Jatiroto 4. Pembahasan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Ruas Akses Tanjung Priok 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Proposal for Approval of Settlement of IDC Claim Value for Aceh Sigli Section Package 3. Update on EPC Issues regarding Invoices and Jatiroto 4. Discussion on Certification of Security Management System for Tanjung Priok Access Route	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
26.	Senin, 8 Juli 2024 Monday, July 8, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan ICOFR 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on ICOFR	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
27.	Senin, 15 Juli 2024 Monday, July 15, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. *Update* JTTS Ruas Jambi Rengat Pekanbaru dan Dumai Langsa 3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Update on JTTS for Jambi-Rengat-Pekanbaru and Dumai-Langsa Routes 3. Guidelines for Integrated Governance	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
28.	Senin, 22 Juli 2024 Monday, July 22, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Posisi Financial Closing Proyek Tambak Lorok dan Dispute dengan Marubeni 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Update on Financial Closing Position of Tambak Lorok Project and Dispute with Marubeni	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
29.	Senin, 29 Juli 2024 Monday, July 29, 2024	1. Arahan Direksi dan koordinasi antar Direktorat 2. *Update* Rencana Usaha Palembang-Betung 3. Pembahasan Dana Pensiun: Penagihan Portofolio Reksa Dana 4. Pembahasan Tata Kelola Terintegrasi 1. Direction from the Board of Directors and Inter-Directorates Coordination 2. Update on Palembang-Betung Business Plan 3. Discussion on Pension Fund: Claiming Reksa Dana Portfolio 4. Discussion on Integrated Governance	Budi Harto	Tidak Hadir | Not Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Tidak Hadir | Not Attend
			Gunadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
30.	Senin, 5 Agustus 2024 Monday, August 5, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan Materi Ragab: • Permohonan Persetujuan Dekom atas Perpanjangan Jatuh Tempo Utang Afiliasi HKR • -Pembahasan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum HK sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 3. Dan Lain-lain • Restrukturisasi Organisasi HKR • Peningkatan Status Karyawan • Perpanjangan Asuransi Kesehatan 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Ragab Materials: • Request for Approval of Debt Restructuring regarding Extension of HKR Affiliate Debt • Discussion on Settlement of HK's Legal Cases up to Q2 2024 3. And Other Matters: • Restructuring of HKR Organization • Employee Status Upgrade • Extension of Health Insurance	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
31.	Senin, 12 Agustus 2024 Monday, August 12, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan tata kelola anak perusahaan 3. Identifikasi Risiko Integrasi Waskita kepada Hutama Karya 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Subsidiary Company Governance 3. dentification of Risks in Integrating Waskita into Hutama Karya	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Tidak Hadir | Not Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
32.	Senin, 19 Agustus 2024 Monday, August 19 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Rencana Divestasi saham pada PT Hutama Prima 3. *Update* Trans papua 4. *Update* Rencana usahan dan PPJT Ruas Palembang Betung 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Divestment Plan of Shares in PT Hutama Prima 3. Update on Trans Papua Project 4. Update on Business Plan and Work Plan for Palembang-Betung Route	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
33.	Senin, 26 Agustus 2024 Monday, August 26, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. *Timeline* dan *Outline* Kajian bersama Integrasi HK Waskita 3. Pembahasan masalah Hukum CSK dan BANI Jatoroto 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Timeline and Outline of Joint Study on HK-Waskita Integration 3. Discussion on Legal Issues of CSK and BANI Jatoroto	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
34.	Senin, 2 September 2024 Monday, September 2, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan Materi Ragab Dewan Komisaris dan Direksi 3. Dan Lain-lain • Pembahasan materi putusan perkara perdata CSK • Permohonan tanggapan tertulis atas perubahan usulan penambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2024 Periode II • *Update* Progres Integrasi PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) • Pembahasan Permasalahan berkaitan dengan manajemen kontrak sampai dengan semester I tahun 2024 4. Pembahasan *Update* Proyek-proyek Divisi EPC 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Ragab Materials for the Board of Commissioners and Directors 3. And Other Matters: • Discussion on Civil Case Decision Materials for CSK • Request for Written Response on Changes to State Capital Participation (PMN) Proposal for Fiscal Year (TA) 2024, Period II • Update on Progress of Integration between PT Hutama Karya (Persero) and PT Waskita Karya (Persero) • Discussion on Contract Management Issues up to Semester I 2024 4. Discussion on Update of EPC Division Projects	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
35.	Senin, 9 September 2024 Monday, September 9, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan KPBU Trans Papua 3. Pembahasan Multi Lane Free Flow (MLFF) 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Trans Papua KPBU 3. Discussion on Multi Lane Free Flow (MLFF)	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Tidak Hadir | Not Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
36.	Senin, 18 September 2024 Monday, September 18, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan tantiem & Kenaikan Gaji BOD Anak Perusahaan 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Allowances & Salary Increases for Board of Directors (BOD) of Subsidiary Companies	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
37.	Senin, 23 September 2024 Monday, September 23, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan KPBU Sitinjau Lauik 3. Dan Lain-Lain; • *Update* Proyek-Proyek Divisi EPC • Pembahasan Pelepasan & Penghapusan Asset • Hasil Pendampingan Site Visit Pengelolaan Risiko • Persetujuan PRPP Proyek KSPN Toba • Pembayaran Tagihan Somasi Proyek Masjid Al Jabbar 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Sitinjau Lauik KPBU 3. And Other Matters: • Update on EPC Division Projects • Discussion on Asset Disposal and Elimination • Results of Risk Management Site Visit Accompaniment • Approval of PRPP for KSPN Toba Project • Payment of Somasi Invoice for Al Jabbar Mosque Project	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Tidak Hadir | Not Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
38.	Senin, 30 September 2024 Monday, September 30, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan RKAP Tahun 2025 3. Dan Lain-lain • *Update* Proyek-Proyek Divisi EPC • *Update* Kasus Legal • *Update* Progres Konstruksi terbangun Waskita di Ruas Palembang-Betung 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on 2025 Work Plan and Budget (RKAP) 3. And Other Matters: • Update on EPC Division Projects • Update on Legal Cases • Update on Construction Progress of Waskita's Buildings in Palembang-Betung Route	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
39.	Senin, 7 Oktober 2024 Monday, October 7, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Pembahasan PT HMTP; 3. Usulan persetujuan penerapan discount tarif Tol Terpeka; 4. Pembahasan Draft Jawaban Gugatan PTPN XI kepada KSO HK UTTAM & Euroasiatik pada BANI Jkt; 5. Dan Lain-lain: 6. Pembahasan Materi Ragab Dewan Komisaris dan Direksi: • Pembahasan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh PT Hutama Karya (Persero) yang dibiayai PMN dan KMK Penjaminan Pemerintahan; • penyelesaian kasus hukum pembelian tanah di wilayah Indralaya; • Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI tahun 2020-2021. 7. Jadwal Photo Session BOD dan Seragam Baru; 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on PT HMTP 3. Proposal for Approval of Discount Application on Terpeka Toll Tariff 4. Discussion on Draft Response to Lawsuit from PTPN XI to KSO HK UTTAM & Euroasiatik at BANI Jakarta 5. And Other Matters: 6. Discussion on Ragab Materials for the Board of Commissioners and Directors: • Discussion on Audit Report on Specific Objectives for Project Implementation by PT Hutama Karya (Persero) funded by State Capital Participation (PMN) and Government Guarantee (KMK) • Settlement of Land Purchase Legal Case in Indralaya Area • Follow-up on Audit Results from BPK RI for 2020-2021 7. Schedule for Photo Session and New Uniform for BOD	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
40.	Senin, 14 Oktober 2024 Monday, October 14, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Penentuan BOD,BOC dan Tantiem Anak Perusahaan; 3. Lain-lain: • *Update* hasil audit BPK terakhir; • *Update* penyelesaian ruas Tebing Tinggi Sirbelawan Siantar; • Pelepasan Kendaraan Operasional PJT. 1. Direction from the President Director and Inter-Directorates Coordination 2. Determination of Board of Directors, Board of Commissioners, and Allowances for Subsidiary Companies 3. Other Matters: • Update on Latest Audit Results from BPK • Update on Completion of Tebing Tinggi-Sirbelawan-Siantar Route • Release of Operational Vehicles for PJT	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
41.	Senin, 21 Oktober 2024 Monday, October 21, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Pembahasan RKAP Tahun 2025; 3. *Update* Kasus Pajak JORR-S dan Akses Tanjung Priok; 4. Dan Lain-lain. 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on 2025 RKAP 3. Update on JORR-S and Tanjung Priok Access Tax Cases 4. And Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
42.	Senin, 28 Oktober 2024 Monday, October 28, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Usulan biaya OM Ruas Betejam seksi dukon Bayung Lencir-Tempino untuk diajukan ke PU; 3. Dan Lain-lain • Pembahasan Materi Ragab Dewan Komisaris dan Direksi: - Usulan RKAP Tahun 2025 PT Hutama Karya (Persero); - Permohonan Tanggapan Rencana Pendanaan Ruas Betung (Sp. Sekayu) Tempino – Jambi. 1. Direction from the President Director and Inter-Directorates Coordination 2. Proposal for OM Costs for Betejam Section, Dukon Bayung Lencir-Tempino to be submitted to PU 3. And Other Matters: • Discussion on Ragab Materials for the Board of Commissioners and Directors: - Proposal for 2025 RKAP of PT Hutama Karya (Persero); - Request for Response on Funding Plan for Betung (Sp. Sekayu) Tempino-Jambi Section.	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
43.	Senin, 4 November 2024 Monday, November 4, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Usulan persetujuan pembayaran sebagian pekerjaan terprogres WST Palembang – Betung; 3. Dan Lain-lain 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Proposal for Approval of Partial Payment for Progress Work on WST Palembang-Betung 3. And Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
44.	Senin, 11 November 2024 Monday, November 11, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Progres penyerapan pembayaran PMN Hamawas; 3. Pembahasan rencana biaya JTTS tahap 2 lanjutan dan tahap 3; 4. Pembahasan finalisasi kenaikan gaji karyawan; 5. Laporan dan Tindaklanjut Perkara CSK; 6. Pembahasan kebutuhan Personil Divisi PJT; 7. Rencana Penunjukan Konsultan QS dan Law Firm Overseas; 8. Dan Lain-lain. 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Progress on PMN Hamawas Payment Absorption 3. Discussion on JTTS Phase 2 and Phase 3 Budget Plan 4. Discussion on Finalization of Employee Salary Increase 5. Report and Follow-up on CSK Case 6. Discussion on Personnel Needs for PJT Division 7. Plan for Appointment of QS Consultant and Overseas Law Firm 8. And Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Aloysius Kiik Ro	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
45.	Senin, 18 November 2024 Monday, November 18, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Dampak kenaikan gaji terhadap Dana Pensiun & Benchmark BUMN Karya; 3. Dan Lain-lain; • Reevaluasi prioritisasi pembangunan tol agar tidak membebani saat pengoperasian Tol. 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Impact of Salary Increase on Pension Fund & SOE Karya Benchmark 3. And Other Matters: • Reevaluation of Toll Road Development Prioritization to Avoid Burden during Operation	Budi Harto	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
46.	Senin, 25 November 2024 Monday, November 25, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Pembahasan Materi Ratek KBUMN: • Kinerja TW III Tahun 2024; • *Monitoring* Realisasi Penggunaan & Capaian KPI PMN; • *Update* PMN Cadangan Investasi TA 2024 & PMN Tunai Tahun 2025; 3. Pembahasan Restrukturisasi Karyawan Divisi EPC; 4. Dan Lain-lain. 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on KBUMN Ratek Materials: • Performance Review of Q3 2024 • Monitoring of Realization and Achievement of KPI for State Capital Participation (PMN) • Update on PMN Reserve Investment for FY 2024 and PMN Cash for 2025 3. Discussion on Restructuring of EPC Division Employees 4. And Other Matters	Budi Harto	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
47.	Senin, 2 Desember 2024 Monday, December 2, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Optimalisasi dan Penyehatan Protofolio Invetasi Dapen HK 3. *Update* Yayasan Beasiswa karyawan 4. *Update* Proyek Divisi Gedung yang harus akhir tahun dan permasalahannya. 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Optimization and Sanitization of HK's Investment Portfolio 3. Update on Employee Scholarship Foundation 4. Update on Building Division Projects that must be completed by year-end and their issues	Budi Harto	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
48.	Senin, 9 Desember 2024 Monday, December 9, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Pembahasan Materi Ragab Dewan Komisaris & Direksi: • Status Kesiapan Tahapan Implementasi ICOFR HK Grup; • Permasalahan hukum di Anak Perusahaan PT Hutama Karya (Persero): • Gugatan Divisi Sipil Umum dengan PT Hutama Marga Waskita melalui BANI; • Permasalahan Kasus Hukum PT Inasa di PT Hakaaston. 3. Pembahasan Permohonan Persetujuan RUPS atas rencana pinjaman PT HMTP dan Mengagunkan Aset Perseroan; 4. Dan Lain-lain. 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Materials for the Board of Commissioners and Directors joint meeting: • Status of Readiness for Implementation of ICOFRS for HK Group • Legal Issues in Subsidiaries of PT Hutama Karya (Persero): • Lawsuit between Infrastructure Division and PT Hutama Marga Waskita through BANI (Indonesian National Arbitration Board) • Legal Issues of PT Inasa at PT Hakaaston 3. Discussion on Request for Approval of RUPS on PT HMTP's Loan Plan and Mortgage of Company Assets 4. And Others	Budi Harto	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
49	Senin, 16 Desember 2024 Monday, December 16, 2024	1. Arahan Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Pembahasan Materi Ragab Dewan Komisaris & Direksi: • Status Kesiapan Tahapan Implementasi ICOFR HK Group: • Permasalahan Hukum Anak Perusahaan PT Hutama Karya (Persero); - Gugatan Divisi Sipil Umum dengan PT Hutama Marga Waskita melalui BANI; - Permasalahan Kasus Hukum PT Inasa di PT Hakaaston 3. Pembahasan Permohonan Persetujuan RUPS atas rencana pinjaman PT HMTP dan Mengagunkan Aset Perseroan; 4. Dan Lain-lain. 1. Direction from the Main Director and Inter-Directorates Coordination 2. Discussion on Materials for the Board of Commissioners and Directors joint meeting: • Status of Readiness for Implementation of ICOFRS for HK Group • Legal Issues in Subsidiaries of PT Hutama Karya; - Lawsuit between Infrastructure Division and PT Hutama Marga Waskita through BANI (Indonesian National Arbitration Board) - Legal Issues of PT Inasa at PT Hakaaston 3. Discussion on Request for Approval of RUPS on PT HMTP's Loan Plan and Mortgage of Company Assets 4. And Others	Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
50	Senin, 23 Desember 2024 Monday, December 23, 2024	1. Arahan Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Proyeksi Pendanaan Tahun 2024 dan potensi Defisit Dana Pensiun; 3. Permohonan persetujuan discount tarif Nataru untuk Ruas Terpeka dan Permai; 4. Adendum Sewa HK Tower; 5. Alokasi budget bonus dan tantiem; 6. Dan Lain-lain. 1. Direction from the President Director's and inter-directorate coordination; 2. 2024 Funding Projection and potential Pension Fund Deficit; 3. Request for approval of Nataru tariff discount for Terpeka and Permai Sections; 4. HK Tower Lease Addendum; 5. Bonus and tantiem budget allocation; 6. And Others.	Budi Harto	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Hadir | Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend
51	Senin, 30 Desember 2024 Monday, December 30, 2024	1. Arahan Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat; 2. Pembahasan Jaminan Pembayaran Proyek Rehab Sekolah DKI; 3. Dan Lain-lain. 1. Direction from the President Director and Inter-Directorates Coordinations; 2. Discussion of Payment Guarantee for DKI School Rehab Project; 3. And Others.	Budi Harto	Hadir | Attend
			Agung Fajarwanto	Hadir | Attend
			Gunadi	Hadir | Attend
			Koentjoro	Hadir | Attend
			Eka Setya Adrianto	Hadir | Attend
			Muhammad Fauzan	Tidak Hadir | Not Attend
			Sugiarti	Hadir | Attend

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

The agenda and participants of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been presented in the Board of Commissioners Meeting section of the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Table of Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meeting Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage
Budi Harto	Direktur Utama President Director	51	47	92%
Aloysius Kiik Ro*	Wakil Direktur Utama Vice President Director	44	43	98%
Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Operation Director I	51	44	86%
Gunadi	Direktur Operasi II Operation Director II	51	47	92%
Koentjoro	Direktur Operasi III Operation Director III	51	48	94%
Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan Director of Finance	51	51	100%
Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal	51	49	96%
Sugiarti**	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	41	41	100%

**Menyelesaikan jabatannya per 17 November 2024
**Mulai menjabat sejak 15 Maret 2024
*Completes term of office on November 17, 2024
**Employed since March 15, 2024

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan.
2. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan. Cakupan penerapannya adalah:
   a. Direksi menyusun kebijakan pelatihan bagi Direksi sesuai kebutuhan.
   b. Direksi menyusun Rencana Kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi Anggota Direksi.
   c. Pelaksanaan program pelatihan/ pembelajaran meliputi:
      - Pelaksanaan pelatihan bagi Anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris.

TRAINING AND/OR IMPROVING THE COMPETENCE OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

1. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate and sustainable training and knowledge development programs.
2. The Board of Directors implements training programs in order to improve the competence of Members of the Board of Directors according to needs. The scope of its implementation is:
   a. The Board of Directors prepares training policies for the Board of Directors according to needs.
   b. The Board of Directors prepares a Work Plan and budget for training activities for Members of the Board of Directors.
   c. The implementation of training/learning programs includes:
      - The implementation of training for Members of the Board of Directors is realized in accordance with the Board of Commissioners Work Plan.

	Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris The Board of Directors and the Board of Commissioners Joint Meeting			RUPS		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
	Jumlah Rapat Number of Meeting	**Jumlah Kehadiran** Number of Presence	**Persentase** Percentage	**Jumlah Rapat** Number of Meeting	**Jumlah Kehadiran** Number of Presence	**Persentase** Percentage
	9	8	89%	2	2	100%
	8	8	100%	2	2	100%
	9	8	89%	2	2	100%
	9	9	100%	2	2	100%
	9	9	100%	2	2	100%
	9	8	89%	2	2	100%
	9	9	100%	2	2	100%
	8	8	100%	1	1	100%

- Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani Anggota Direksi.

3. Untuk memfasilitasi pelaksanaan *Update knowledge* tersebut, maka Anggota Direksi perlu untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan, yang dikombinasikan dalam *self-study* dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.
4. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dan atas beban Perseroan.
5. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi Anggota Direksi.
6. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran:
   a. Kegiatan pelatihan bagi Anggota Direksi tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
   b. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani Anggota Direksi.

- There is a report on the results of training that has been undergone by Members of the Board of Directors.

3. To facilitate the implementation of the Knowledge Update, Members of the Board of Directors need to receive continuing education, which is combined in self-study and participation in special education, training, workshops, seminars, conferences, which can be useful in improving the effectiveness of the Board of Commissioners' function.
4. Continuing education can be carried out domestically and abroad, and at the expense of the Company.
5. There is a work plan and budget for training activities for Members of the Board of Directors.
6. Implementation of training/learning programs:
   a. raining activities for Members of the Board of Directors are listed in the Company's Work Plan and Budget.
   b. There is a report on the results of the training that the Board of Directors members have undergone.

Adapun pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2024, yaitu:

The training that the Board of Directors has attended during 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Waktu Period	Penyelenggara Organizer
Budi Harto	Direktur Utama President Director	-	-	-
Aloysius Kiik Ro	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	ASEAN Global Leadership Program (AGLP) 2024 in China	China, 04 - 08 November 2024 China, November 04-08, 2024	SRW&Co. dan Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB)
Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Operational Director I	Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification	Virtual class, 06, 07 & 13 Mei 2024 Virtual class, May 06, 07 & 13, 2024	RAP Indonesia
Gunadi	Direktur Operasi II Operational Director II	-	-	-
Koentjoro	Direktur Operasi III Operational Director III	Menentukan Star Rating Keselamatan Pengguna Jalan Determining the Road User Safety Star Rating	Virtual class, 03 Februari 2024 Virtual class, February 03, 2024	Inspirasi Sipodem
Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan Director of Finance	Pathway to Chartered Accountant Indonesia - Professional Level	Virtual class, 14 Maret - 11 Mei 2024 Virtual class, March 14 - May 11, 2024	BUMN School of Excellence & Ikatan Akuntan Indonesia
		ASEAN Global Leadership Program (AGLP) 2024 in China	China, 04 - 08 November 2024 China, November 04-08, 2024	SRW&Co. dan Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB)
Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi BNSP Skema Direktur Sumber Daya Manusia Technical Guidance and Competency Certification BNSP Human Resources Director Scheme	*Hybrid class* 16 Februari & 03 Mei 2024 Hybrid Class February 16 & May 03, 2024	FHCI Lembaga Pelatihan Kerja FHCI Prima Unggul dan LSP HCMI
		Merger and Acquisition Masterclass: Merger and Acquisition Conclave to Address Integration Challenges	Jakarta, 22 Mei 2024 Jakarta, May 22, 2024	Mercer & Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
		Pengujian Calon Penilai Ahli Kegagalan Bangunan Building Failure Expert Assessor Candidate Testing	*Virtual class*, 27 - 31 Mei 2024 Virtual Class, May 27-31, 2024	Kementerian PUPR
		Sertifikasi Manajemen Kontrak Contract Management Certification	Jakarta, 23 - 26 Oktober 2024 Jakarta, October 23-26, 2024	Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Waktu Period	Penyelenggara Organizer
Sugiarti*	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management368	*Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*	*Virtual class*, 24-25 Juli 2024 Virtual Class, July 24-25, 2024	CRMS Indonesia & LSP MKS
		Master Class & Seminar GRC Summit 2024 "Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs"	Yogyakarya, 22 - 23 Agustus 2024 Yogyakarta, August 22-23, 2024	IRMAPA & CRMS Indonesia
		Beberapa Isu Penting dalam Penerapan *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)* di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN	Jakarta, 22 November 2024 Jakarta, November 22, 2024	KORAN BUMN
		Sustainable Symphony: Echoes of Change	Bali, 05 - 06 Desember 2024 Bali, December 05-06, 2024	IRMAPA & CRMS Indonesia

*Mulai menjabat sejak 15 Maret 2024
*Employed since March 15, 2024

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Hutama Karya memiliki program orientasi bagi anggota Direksi baru yang ditujukan sebagai upaya percepatan kontribusi dari anggota Direksi tersebut terhadap kinerja Perseroan. Adapun kebijakan Direksi dalam Program Pengenalan Direksi Hutama Karya adalah sebagai berikut:

1. Program Pengenalan mengenai Perseroan wajib diberikan kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya.

2. Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan menjadi penanggung jawab dari Program Pengenalan.
3. Materi dalam Program Pengenalan mencakup:

    a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
    b. Gambaran mengenai Perseroan, yang berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
    c. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit serta penyampaian informasi mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

Hutama Karya has an orientation program for new members of the Board of Directors which is intended as an effort to accelerate the contribution of the members of the Board of Directors to the Company's performance. The Board of Directors' policies in the Hutama Karya Board of Directors Introduction Program are as follows:

1. The Introduction Program regarding the Company must be given to members of the Board of Directors who are appointed for the first time.
2. The Corporate Secretary or anyone who functions as the Corporate Secretary is responsible for the Introduction Program.

3. The materials in the Introduction Program include:
    a. Implementation of GCG principles by the Company.
    b. An overview of the Company, relating to the objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues.
    c. Delivery of information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee and delivery of information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and matters that are not permitted.

4. Program Pengenalan Perseroan dapat dikemas ke dalam bentuk presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan, pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan.
5. Laporan terkait tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Perusahaan.

Selama tahun 2024 tidak ada pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru. Hal ini dikarenakan pengangkatan sdr. Sugiarti menjadi Direktur Hutama Karya bukan untuk pertama kalinya.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengeluarkan total 199 surat keputusan. Keputusan-keputusan tersebut mencakup berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2024 antara lain:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan antara lain RKPP & RKAP
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan
3. Pengelolaan aset dan keuangan
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepengurusan Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi sebanyak 8 (delapan) Komite, yaitu:

1. Komite Risiko Investasi
2. Komite Risiko Konstruksi
3. Komite KPI
4. Komite TJSL
5. Komite Sanksi
6. Komite Talenta
7. Komite Pelindungan Data Pribadi
8. Komite Pengarah Teknologi Informasi

4. The Company's Introduction Program can be packaged in the form of presentations, meetings, visits to the Company, document reviews or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented.
5. Reports regarding the level of attendance/ activeness of Members of the Board of Commissioners in participating in the Company's introduction program.

During 2024 there will be no orientation program for new Directors. This is because the appointment of Mrs. Sugiarti as Director of Hutama Karya is not for the first time.

DECISIONS AND IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' TASKS

Throughout 2024, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities by issuing a total of 199 decisions. These decisions cover various operational and strategic aspects of the company, aimed at supporting the smooth operation and overall development of the company. Additionally, the implementation of the Board of Directors' tasks throughout 2024 includes:

1. Preparation of the Company's planning, including the Annual Work Plan and Budget (RKPP) & the Annual Corporate Budget Plan (RKAP
2. Achievement of the Company's performance targets
3. Management of assets and finances
4. Conducting Board of Directors meetings
5. Attending the Board of Commissioners meetings
6. Organizing the General Shareholders Meeting
7. Supervision and improvement of internal business processes; and
8. Execution of other tasks related to the management of the Company.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS FOR ASSESSMENT

In carrying out its management duties, the Board of Directors assisted by 8 (Eight) Committees under the Board of Directors, namely:

1. Investment Risk Committee
2. Construction Risk Committee
3. KPI Committee
4. TJSL Committee
5. Sanctions Committee
6. Talent Committee
7. Personal Data Protection Committee
8. Information Technology Steering Committee

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan secara tahunan oleh Direksi dengan kriteria penilaian yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite di bawah Direksi. Secara umum, Direksi menilai masing-masing komite telah bekerja secara baik selama 2024 yang tercermin melalui dukungan dan peran komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dukungan yang telah diberikan mencakup dalam pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan batasan kewenangannya.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pemberhentian Direksi

1. Anggota Direksi Perusahaan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS/ Menteri dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
   a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen dan/atau kontrak manajemen tahunan Direksi BUMN.
   b. Adanya perubahan strategi bisnis pada BUMN.
   c. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara.
   e. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
   f. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara.
   g. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan.
   h. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi BUMN.
   i. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan
   j. Berhalangan tetap, termasuk sakit keras/ sakit berkepanjangan.

Jabatan Direksi berakhir apabila:
1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS/Menteri BUMN; dan/atau Keputusan
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

The performance assessment procedure of the Committees under the Board of Directors is carried out annually by the Board of Directors with the assessment criteria being the implementation of the duties and responsibilities of each Committee under the Board of Directors. In general, the Board of Directors assesses that each committee has worked well during 2024, which is reflected in the support and role of the committee in supporting the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities. The support that has been provided includes decision-making and providing recommendations in accordance with the limitations of its authority.

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS

Dismissal of the Board of Directors

1. Members of the Company's Board of Directors may be dismissed at any time based on a decision of the GMS/Minister by stating the reasons.
2. The reasons for dismissal of members of the Company's Board of Directors as referred to are as follows:
   a. Unable to fulfill their obligations as agreed in the Management Contract and/or annual management contract of the SOEs' Board of Directors.
   b. Changes in business strategy at the SOE.
   c. Unable to carry out their duties properly.
   d. Involved in actions that are detrimental to the SOE and/or state finances.
   e. Violating the provisions of laws and regulations and/or articles of association.
   f. Has been named a suspect or defendant by the authorized party in actions that are detrimental to the SOEs and/or state finances.
   g. Committing actions that violate ethics and/or propriety.
   h. Committing actions that violate the code of ethics of the SOE's Board of Directors.
   i. Declared guilty by a court decision
   j. Permanently prevented, including serious illness/prolonged illness.

The term of office of the Director ends if:
1. Death occurs;
2. Term of office ends;
3. Dismissed based on the GMS/SOE Minister; and/or Decision
4. No longer meets the requirements as a Director of the Company based on the provisions of the articles of association and laws and regulations including prohibited dual positions.

Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara Direksi

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga pluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
3. Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dapat melakukan pengunduran diri demi membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseoan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

   b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.

Resignation and Temporary Dismissal of the Board of Directors

1. A member of the Board of Directors has the right to resign from his/her position by notifying the Company in writing of his/her intention with a copy to the Shareholders, members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. If the letter of resignation states an effective date of less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is deemed not to have stated the effective date of the resignation.

2. If by the date requested by the member of the Board of Directors concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received in the event that the effective date of the resignation is not stated, there is no decision from the GMS, then the member of the Board of Directors shall automatically resign on the date requested above or upon the expiration of 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received without requiring the approval of the GMS.
3. A member of the Board of Directors involved in a financial crime may resign in order to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the existence of a convicted status against a member of the Board of Directors by the authorized party. The financial crimes referred to include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities as well as Criminal Acts of Money Laundering as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Money Laundering.
4. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners if they act contrary to the Articles of Association or there are indications of causing losses to the Company or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company, by considering the following provisions:

   a. The decision of the Board of Commissioners regarding the temporary dismissal of members of the Board of Directors is carried out in accordance with the procedures for making decisions by the Board of Commissioners.
   b. The temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned along with the reasons causing the action with a copy to the Shareholders and the Board of

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan peseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian tersebut. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Dewan Komisaris. sementara
f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membala diri.
g. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang-Saham tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
i. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu.
j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.
k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Directors.
c. The notification as referred to is submitted no later than 2 (two) days after the temporary dismissal is determined.

d. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out the management of the company and represent the company both inside and outside the Court.

e. Within a period of no later than 30 (thirty) days after the temporary dismissal, a General Meeting of Shareholders must be held to decide whether to revoke or confirm the decision to dismiss. The General Meeting of Shareholders is held by the temporary Board of Commissioners.

f. In the General Meeting of Shareholders as referred to, the relevant member of the Board of Directors is given the opportunity to defend himself/herself.
g. The General Meeting of Shareholders is chaired by one of the Shareholders elected by and from among the Shareholders present.
h. In the event that the 30 (thirty) day period has passed, the General Meeting of Shareholders is not held or the General Meeting of Shareholders cannot make a decision, then the temporary suspension is void.
i. The decision to revoke or strengthen the decision to temporarily dismiss a member of the Board of Directors can also be made by Shareholders outside the GMS on the condition that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the relevant decision while still paying attention to the time provisions.

j. In the event that the decision to revoke or strengthen the decision to temporarily dismiss a member of the Board of Directors is made outside the General Meeting of Shareholders, then the relevant member of the Board of Directors is notified verbally or in writing, and is given the opportunity to submit a written defense within 14 (fourteen) days after receiving the notification.

k. If the General Meeting of Shareholders or Shareholders cancels the temporary suspension or the circumstances as referred to occur, then the relevant member of the Board of Directors is required to resume his/her duties as intended.

Dewan Komisaris
Board of Comissioners

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungiawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.

The Board of Commissioners as a company organ has the duty and responsibility to collectively supervise and provide advice to the Board of Directors and ensure that the Company implements GCG.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Tugas Umum Dewan Komisaris
   Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebiiakan pengurusan, ialannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Persetujuan Atas Rancangan RJPP yang Disampaikan Kepada Direksi.
3. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Persetujuan Atas Rancangan RKAP yang Disampaikan Kepada Direksi.
4. Tugas Arahan Dewan Komisaris:
   a. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Terkait Perubahan Lingkungan Bisnis.
   b. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Terkait Hubungan dengan *Stakeholder*.
   c. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Tentang Penguatan Sistem Pengendalian Internal.
   d. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Tentang Manajemen Risiko.
   e. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Tentang Sistem Teknologi Informasi.
   f. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir.
   g. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Tentang` Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.
   h. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Tentang Kebijakan Pengadaan.
   i. Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan Arahan Kebijakan Mutu dan Pelayanan.

THE BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. General Duties of the Board of Commissioners
   The Board of Commissioners is tasked with supervising management policies, namely general management of the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP and provisions of the Articles of Association and GMS Decisions, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company.
2. Duties of the Board of Commissioners in Approving the Draft RJPP Submitted to the Board of Directors.
3. Duties of the Board of Commissioners in Approving the Draft RKAP Submitted to the Board of Directors.
4. Duties of the Board of Commissioners' Direction:
   a. Duties of the Board of Commissioners in Providing Direction Regarding Changes in the Business Environment.
   b. Duties of the Board of Commissioners in Providing Direction Regarding Relations with Stakeholders.
   c. Duties of the Board of Commissioners in Providing Direction Regarding Strengthening the Internal Control System.
   d. Duties of the Board of Commissioners in Providing Direction Regarding Risk Management.
   e. Duties of the Board of Commissioners in Providing Direction Regarding Information Technology Systems.
   f. Duties of the Board of Commissioners in Providing Direction Regarding Career Development Policies and Implementation.
   g. Duties of the Board of Commissioners in Providing Directions on Accounting Policies and Preparation of Financial Reports.
   h. Duties of the Board of Commissioners in Providing Directions on Procurement Policies.
   i. Duties of the Board of Commissioners in Providing Directions on Quality and Service Policies.

5. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

   a. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait Kepatuhan Direksi dalam Menialankan Peraturan Perundangan dan Perianiian dengan Pihak Ketiga.

   b. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait Kepatuhan Direksi Sesuai RKAP dan/atau RJPP.

   c. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait Persetuiuan Atas Transaksi.

   d. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait Pengajuan Calon Auditor Eksternal.

   e. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal.
   f. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait Geiala Menurunnya Kinerja Perusahaan.

   g. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait Kebiiakan Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan.

   h. Tugas Terkait Pengawasan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

6. Tugas terkait pencalonan Anggota Direksi, Penilaian Kinerja Direksi (Individu dan Kolegial) dan Pengajuan Usulan Tantiem/insentif Kinerja Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Mempertingkan Kinerja Direksi.

7. Tugas Terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
8. Tugas Terkait Fungsi Sebagai Organ Pengelola Risiko.
   a. Tugas Dewan Komisaris Terkait Pelaksanaan Fungsi Manaiemen Risiko.

   b. Tugas Dewan Komisaris Terkait Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.

   c. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait Pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi.

Tanggung jawab Dewan Komisaris, meliputi:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menialankan tugas pengawasan

5. Supervisory Duties of the Board of Commissioners
   a. Supervisory Duties of the Board of Commissioners Regarding the Compliance of the Board of Directors in Carrying Out Laws and Regulations and Agreements with Third Parties.
   b. Supervisory Duties of the Board of Commissioners Regarding the Compliance of the Board of Directors in Accordance with the RKAP and/or RJPP.
   c. Supervisory Duties of the Board of Commissioners Regarding Approval of Transactions.
   d. Supervisory Duties of the Board of Commissioners Regarding the Submission of External Auditor Candidates.
   e. Supervisory Duties of the Board of Commissioners Regarding the Effectiveness of Internal Audit and External Audit.
   f. Supervisory Duties of the Board of Commissioners Regarding the Declining Performance of the Company.
   g. Supervisory Duties of the Board of Commissioners Regarding the Management Policy of Subsidiaries/Joint Venture Companies.
   h. Duties Related to the Supervision of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL).
6. Duties related to the nomination of Members of the Board of Directors, Assessment of the Performance of the Board of Directors (Individual and Collegial) and Submission of Proposals for Tantiem/Performance Incentives in Accordance with Applicable Provisions and Considering the Performance of the Board of Directors.
7. Duties Related to Good Corporate Governance Practices.
8. Duties Related to the Function as a Risk Management Organ.
   a. Duties of the Board of Commissioners Related to the Implementation of Risk Management Functions.
   b. Duties of the Board of Commissioners Related to the Implementation of Internal Audit Functions.
   c. Supervisory Duties of the Board of Commissioners Related to the Implementation of Integrated Governance Functions.

Responsibilities of the Board of Commissioners, include:
1. The Board of Commissioners is responsible for the supervision of the Company.
2. Each Member of the Board of Commissioners must in good faith, be careful, and be responsible in carrying out the duties of supervision and

dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan halhal sebagi berikut:
   a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tuiuan Perusahaan;
   b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
   c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanlutnya kerugian tersebut.
6. Atas nama Perusahaan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan ke pengadilan negeri.
7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengumsan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewaiiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
8. Tanggung jawab berlaku juga bagi Anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak meniabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungiawaban atas kepailitan Perusahaan apabila dapat membuktikan:
   a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
   c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengumsan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan;

providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company.

3. Each Member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his/her duties.
4. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more Members of the Board of Commissioners, the responsibility applies jointly and severally to each Member of the Board of Commissioners.
5. A Member of the Board of Commissioners cannot be held liable for losses if he/she can prove the following:
   a. Has carried out supervision in good faith and with care for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company;
   b. Has no personal interest, either directly or indirectly, in the management actions of the Board of Directors that result in losses;
   c. Has provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses.
6. On behalf of the Company, Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights may sue Members of the Board of Commissioners who, due to their mistakes or negligence, cause losses to the Company to the district court.
7. In the event of bankruptcy due to the mistakes or negligence of the Board of Commissioners in supervising the implementation of the disbursement carried out by the Board of Directors and the Company's assets are insufficient to pay all of the Company's obligations due to the bankruptcy, each Member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable with the Members of the Board of Directors for the obligations that have not been paid.
8. This responsibility also applies to Members of the Board of Commissioners who have not been in debt for 5 (five) years before the bankruptcy declaration decision is pronounced.
9. Members of the Board of Commissioners cannot be held liable for the bankruptcy of the Company if they can prove:
   a. The bankruptcy was not due to their mistakes or negligence;
   b. Have carried out their supervisory duties in good faith and with due care for the interests of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company;
   c. Have no personal interest, either directly or indirectly, in the disbursement action by the Board of Directors that resulted in bankruptcy;

d. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

d. Has provided advice to the Board of Directors to prevent bankruptcy.

PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS ASSIGNMENTS AND RESPONSIBILITIES

Nama Name	Jabatan Position	Pembidangan Tugas Assignments
Budiman*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrent Independent Commissioner	• Mengkoordinasikan semua pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris. • Memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan dan kebijakan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. • Coordinate all implementation of the duties and activities of the Board of Commissioners. • Provide direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business and policies in accordance with the principles of good corporate management.
Yudo Margono**	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrent Independent Commissioner	
Muhamad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	• Membantu Komisaris Utama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris; • Melaksanakan tugas pengawasan, memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan di bidang: a. Strategi, pengembangan usaha dan investasi; b. Operasional Direktorat I. • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. • Assisting the Main Commissioner in coordinating the implementation of the duties and activities of the Board of Commissioners; • Carrying out supervisory duties, providing direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business in the fields of: a. Strategy, business development and investment; b. Directorate I Operations. • Carrying out duties and responsibilities as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Melaksanakan tugas pengawasan, memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan di bidang: a. Pemasaran dan Kerjasama/ KSO; b. Pengembangan SDM, Organisasi dan Umum; c. Quality dan assurance; • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Audit. • Carrying out supervisory duties, providing direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business in the fields of: a. Marketing and Cooperation/KSO; b. Human Resources, Organization and General Development; c. Quality and assurance; • Carrying out duties and responsibilities as Chairman of the Audit Committee.

Nama Name	Jabatan Position	Pembidangan Tugas Assignments
Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Melaksanakan tugas pengawasan, memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan di bidang: a. Komunikasi dan informasi korporat; b. Sistem dan Teknologi Informasi; c. PKBL; • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG. • Carrying out supervisory duties, providing direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business in the fields of: a. Corporate communication and information; b. Information Systems and Technology; c. PKBL; • Carrying out duties and responsibilities as Deputy Chair of the Risk Management and GCG Committee.=
Chairiah	Komisaris Commissioner	• Melaksanakan tugas pengawasan, memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan perusahaan di bidang: a. Strategi pendanaan dan pengelolaan utang; b. Keuangan dan Akuntansi; c. Pengendalian Internal Perusahaan; dan • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Komite Audit. • Carrying out supervisory duties, providing direction to the Board of Directors regarding the management of the company in the fields of: a. Funding strategy and debt management; b. Finance and Accounting; c. Company Internal Control; and • Carrying out duties and responsibilities as Deputy Chairman of the Audit Committee.
Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	• Melaksanakan tugas pengawasan, memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan di bidang: a. Hukum dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG); b. Pengelolaan Anak Perusahaan; • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. • Carrying out supervisory duties, providing direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business in the fields of: a. Law and Good Corporate Governance (GCG); b. Management of Subsidiaries; • Carrying out duties and responsibilities as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	• Melaksanakan tugas pengawasan, memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan di bidang: a. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan; b. Operasional Direktorat II; c. Operasional Direktorat III; dan • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG. • Carrying out supervisory duties, providing direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business in the fields of: a. Company risk management policy; b. Operational Directorate II; c. Operational Directorate III; and • Carrying out duties and responsibilities as Chairman of the Risk Management and GCG Committee.

*Mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
*Employed as of January 31, 2024

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lainjain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala Persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebiiakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam langka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepaniang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya.

1. Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan Kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi.
2. Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.
3. Jika Direksi tidak memenuhi kewaiiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.

THE BOARD OF COMMISSIONERS AUTHORITY

The Board of Commissioners is authorized to:

1. See books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and check the Company's assets.
2. Enter the yard, building and office used by the Company.
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues concerning the management of the Company.
4. Know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting.
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary.
7. Temporarily dismiss Members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.
8. Establish other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary by considering the Company's capabilities.
9. Use experts for certain matters within a certain time frame at the expense of the Company, if deemed necessary.
10. Take actions to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association.
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed.
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS Decisions.

The Board of Commissioners has access to Company information according to its authority.

1. There is a policy/guideline of the Board of Commissioners regarding information that must be provided by the Board of Directors and the Policy is submitted to the Board of Directors.
2. The substance of the policy/guideline includes: the form of information submitted, both periodically and incidentally, the standard time for submission and the mechanism for submitting the information by the Board of Directors.
3. If the Board of Directors does not fulfill the obligation to provide information to the Board of Commissioners, there is an effort to communicate with the Board of Directors to request the information needed to carry out their duties.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai dan/atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan.
5. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
7. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
8. Melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada perusahan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.
9. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar yang menggunakan pembiayaan dari Perseroan terlebih dahulu (proyek *turnkey/prefinancing*) dengan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris.

DECISIONS THAT NEED THE APPROVAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The following actions of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners for:

1. Pledge fixed assets for short-term credit withdrawals.
2. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation with a certain value and/or period determined by the General Meeting of Shareholders.
3. Receive or provide medium/long-term loans, except for loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans provided to subsidiaries of the Company, with the provision that loans to subsidiaries of the Company must obtain approval from the Board of Commissioners.
4. Provide loans to subsidiaries of the Company.
5. Write off bad debts and dead stock from the books with a certain value determined by the General Meeting of Shareholders.
6. Release movable fixed assets with an economic life that is generally applicable in the industry of up to 5 (five) years.
7. Establishing an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors.
8. Releasing capital participation including changes in capital structure with a certain value determined by the General Meeting of Shareholders in other companies, subsidiaries, and joint ventures that are not in the context of rescuing receivables.
9. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist) with a certain value determined by the General Meeting of Shareholders.
10. Proposing representatives of the Company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that make significant contributions to the Company and/or have strategic value with certain criteria determined by the General Meeting of Shareholders.
11. Carrying out the main business activities as referred to in the Articles of Association that use financing from the Company in advance (turnkey projects/prefinancing) with a certain value and/or criteria determined by the Board of Commissioners.

12. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Melakukan investasi dengan Batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan materiil, anggota Dewan Komisaris yaitu:
   a. Integritas.
   b. Dedikasi.
   c. Memahami masalah-masalah manaiemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manaiemen.
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero/perum dimana yang bersangkutan dicalonkan.
   e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:
   a. Orang perseorangan.
   b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
   c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
   d. Tidak pernah meniadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
   e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN,
   f. Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 ([ima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris, yaitu:
   a. Bukan pengurus partai politik calon anggota legistatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Ralryat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

12. Purchasing land assets and/or land banks for property business activities or used as fixed assets, with a certain value determined by the General Meeting of Shareholders.

13. Making investments with certain value limits and/or criteria determined by the Board of Commissioners.

THE BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

The term of office of the Board of Commissioners members is set at 5 (five) years and they can be reappointed for 1 (one) term of office.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Material requirements for members of the Board of Commissioners are:
   a. Integrity.
   b. Dedication.
   c. Understanding company management issues related to one of the management functions.
   d. Having adequate knowledge in the field of the limited liability company/public company where the person concerned is nominated.
   e. Able to provide sufficient time to carry out his/her duties.
2. Formal requirements for members of the Board of Commissioners are:
   a. Individuals.
   b. Able to carry out legal acts.
   c. Never having been declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment.
   d. Never having been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a SOE, Subsidiary and/or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment.
   e. Never having been convicted of committing a criminal act that is detrimental to the finances of the State, SOE,
   f. Subsidiary, other business entities and/or those related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.

3. Other requirements for members of the Board of Commissioners, namely:
   a. Not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member in the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial People's Representative Council, and Regency/City Regional People's Representative Council.

b. Bukan calon kepala/wakit kepala daerah dan/ atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk peniabat kepala/wakil kepala daerah.
c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan.
d. Tidak meniabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode.
e. Tidak sedang menduduki labatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan iabatan anggota Dewan Komisaris.
f. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.
g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewaliban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
h. Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
i. Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

b. Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head.
c. Not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the relevant SOE/Subsidiary.
d. Not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board at a SOE or Board of Commissioners at the relevant Subsidiary for 2 (two) periods.
e. Not currently holding a position that based on statutory regulations is prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Board of Commissioners.
f. Physically and mentally healthy, not suffering from an illness that could hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board, as evidenced by a health certificate from the hospital.
g. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have carried out the obligation to pay taxes for the past 2 (two) years.
h. For prospective candidates from technical ministries or other government agencies, it must be based on a proposal letter from the head of the relevant agency.
i. For prospective candidates for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who come from state administrators, they must report the Management of State Official Wealth Report (LHKPN) for the last 2 (two) years, proven by evidence of LHKPN reporting to the authorized institution.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOC *CHARTER*)

Dewan Komisaris sebagai organ utama dalam struktur organ tata kelola Perseroan yang menjalankan fungsi pengawasan memerlukan pedoman tata kerja yang memuat peraturan dan *best practices* penerapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (BOC *Charter*) yang telah diperbaharui pada 31 Oktober 2024.

Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (BOC *Charter*) antara lain:

GUIDELINES AND WORKING PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS (BOC CHARTER)

The Board of Commissioners as the main organ in the Company's governance structure that carries out the supervisory function requires a work procedure guideline that contains regulations and best practices for implementing the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners has had the Board of Commissioners Work Guidelines and Rules (BOC Charter) which was updated on October 31, 2024.

The contents of the Board of Commissioners Work Guidelines and Rules (BOC Charter) include:

Bab I **Chapter I**	Pendahuluan Introduction
Bab II **Chapter II**	Nilai-Nilai Akhlak & Indikator Perilaku dan Etika Jabatan Dewan Komisaris Ethical Values & Indicators of Behavior and Ethics of the Board of Commissioners
Bab III **Chapter III**	Keanggotaan Dewan Komisaris Membership of the Board of Commissioners

Bab IV **Chapter IV**	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners
Bab V **Chapter V**	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners
Bab VI **Chapter VI**	Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
   b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.
   c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris BUMN, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut lika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris korporasi.

POLICY ON CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as Members of the Board of Commissioners and/or the Supervisory Board of SOE, except based on special assignments from the Minister.
2. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:
   a. Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises.
   b. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, administrators of political parties and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Heads and Deputy Regional Heads.
   c. Other positions that may cause a conflict of interest.
3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors of SOE, other business entities or holding positions that based on laws and regulations are prohibited from being held concurrently with the position of member of the Board of Commissioners of SOE, or positions that may cause a conflict of interest with the SOE concerned, and signing a statement of willingness to resign from the position if elected as a member of the Board of Commissioners of the corporation.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

1. Organ Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Kebijakan Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya adalah sebagai berikut:
   a. Benturan kepentingan yang dimaksud adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan

THE BOARD OF COMMISSIONERS MANAGEMENT OF CONFLICT INTEREST

1. The Board of Commissioners must avoid domination by any party, not be influenced by certain interests, free from conflicts of interest and from any influence or pressure, so that decision-making can be done objectively.
2. The Board of Commissioners' policy regarding potential conflicts of interest concerning itself is as follows:
   a. The conflict of interest referred to is a situation where there is a conflict between the economic interests of the company and

dan kepentingan ekonomis pribadi angggota Dewan Komisaris perusahaan.

b. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
c. Anggota Dewan Komisaris perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk Kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
d. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
e. Setiap anggota Dewan Komisaris perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan.

3. Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS, meliputi:
   a. Adanya surat pernyataan Dewan Komisaris tidak memiiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
   b. Pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Manajemen atau Rencana Keria Anggaran (RKA) Dewan Komisaris.
   c. Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengalami (potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan Dewan Komisaris mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada pemegang saham.
   d. Dewan Komisaris membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
4. Dewan Komisaris melaporkan kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain.

the personal economic interests of members of the Board of Commissioners of the company.

b. In carrying out their duties and obligations, members of the Board of Commissioners of the company must always prioritize the economic interests of the company above the economic interests of their personal or family, or other parties.
c. Members of the Board of Commissioners of the company are prohibited from abusing their position for personal, family and other parties' interests or benefits.
d. In the case of discussions and decision-making containing elements of conflict of interest, the relevant party is not permitted to participate.
e. Every member of the Board of Commissioners of the company who has decision-making authority is required to make a statement every year that they have no conflict of interest in every decision they have made and have implemented the guidelines for behavior set by the company.

3. The Board of Commissioners signs a statement of no conflict of interest and states in writing matters that have the potential to cause a conflict of interest to them and submits it to the GMS, including:
   a. A written statement of the Board of Commissioners that they have no conflict of interest at the beginning of their appointment which is renewed at the beginning of each year.
   b. Annual statements can be made by adding the statement as an attachment or part of the Management Contract or the Board of Commissioners' Work Budget Plan (RKA).
   c. If during the period of carrying out their duties, the Board of Commissioners experiences (potential) conflict of interest, there is a written statement of the Board of Commissioners regarding this matter and it is submitted to the shareholders.
   d. The Board of Commissioners makes an Integrity Pact which is attached to the proposed actions of the Board of Directors which must obtain recommendations from the Board of Commissioners and approval from the GMS.
4. The Board of Commissioners reports to the Company (Corporate Secretary) to be recorded in the Special Register regarding their and/or their family's share ownership in the Company and other Companies.

5. Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manaiemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.

5. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest shall not participate in monitoring and decision-making on potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.

KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan Anggota Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Per Desember 2024 Komisaris Independen Perseroan sebanyak 4 (empat) orang dari 7 (tujuh) orang atau sebesar 57,14% dari jumlah Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi Komisaris Independen telah mengikuti peraturan yang berlaku.

INDEPENDENT COMMISSIONER

In the composition of the Board of Commissioners, at least 20% (twenty percent) are Independent Commissioner Members as determined in the decision of their appointment. As of December 2024, the Company's Independent Commissioners are 4 (four) people out of 7 (seven) people or 57.14% of the total number of the Board of Commissioners. This shows that the composition of the Independent Commissioners has followed the applicable regulations.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENT COMMISSIONER CRITERIA

Independent Commissioner Members are Members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with other Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and/or controlling Shareholders or relationships with the Company, which may affect their ability to act independently.

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN



Pernyataan Independensi
Komisaris Independen

Dengan ini, saya selaku Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) menyatakan bahwa:
1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya dalam bertugas dan bertindak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perseroan.
2. Tidak memiliki kegiatan atau aktivitas:
   a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
   c. Menjabat jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pengurus partai politik, calon atau menjabat anggota legislatif, calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah, dan/atau;
   d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berpengaruh pada fungsi pengawasan saya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Apabila suatu hari nanti ditemukan bahwa saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam poin 1 dan 2 di atas, maka saya bersedia melepas jabatan Komisaris Independen Perseroan.

Jakarta, 1 Februari 2024

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

INDEPENDENT COMMISSIONER'S



Pernyataan Independensi
Komisaris Independen

Dengan ini, saya selaku Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) menyatakan bahwa:
1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya dalam bertugas dan bertindak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perseroan.
2. Tidak memiliki kegiatan atau aktivitas:
   a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
   c. Menjabat jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pengurus partai politik, calon atau menjabat anggota legislatif, calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah, dan/atau;
   d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berpengaruh pada fungsi pengawasan saya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Apabila suatu hari nanti ditemukan bahwa saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam poin 1 dan 2 di atas, maka saya bersedia melepas jabatan Komisaris Independen Perseroan.

Jakarta, 3 Januari 2024

Muhamad Luknan Edy
Wakil Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen



Pernyataan Independensi
Komisaris Independen

Dengan ini, saya selaku Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) menyatakan bahwa:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya dalam bertugas dan bertindak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perseroan.
2. Tidak memiliki kegiatan atau aktivitas:
   a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
   c. Menjabat jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pengurus partai politik, calon atau menjabat anggota legislatif, calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepada Pemerintahan Daerah, dan/atau;
   d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berpengaruh pada fungsi pengawasan saya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Apabila suatu hari nanti ditemukan bahwa saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam poin 1 dan 2 di atas, maka saya bersedia melepas jabatan Komisaris Independen Perseroan.

Jakarta, 1 Januari 2024

Wanya Dharyadi
Komisaris Independen

STATEMENT



Pernyataan Independensi
Komisaris Independen

Dengan ini, saya selaku Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) menyatakan bahwa:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya dalam bertugas dan bertindak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perseroan.
2. Tidak memiliki kegiatan atau aktivitas:
   a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
   c. Menjabat jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pengurus partai politik, calon atau menjabat anggota legislatif, calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepada Pemerintahan Daerah, dan/atau;
   d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berpengaruh pada fungsi pengawasan saya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Apabila suatu hari nanti ditemukan bahwa saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam poin 1 dan 2 di atas, maka saya bersedia melepas jabatan Komisaris Independen Perseroan.

Jakarta, 3 Januari 2024

Agung Subar Santoso
Komisaris Independen

RAPAT DEWAN KOMISARIS

KEBIJAKAN RAPAT

Ketentuan Umum Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

4. Dewan Komisaris menyusun rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

MEETING POLICY

General Provisions of Board of Commissioners Meetings

1. The Board of Commissioners has guidelines/ rules of procedure for Board of Commissioners meetings in accordance with statutory provisions.
2. The Board of Commissioners holds meetings at least once a month, in which the Board of Commissioners may invite the Board of Directors.
3. The Board of Commissioners may hold meetings at any time upon the request of 1 (one) or several Members of the Board of Commissioners, the request of the Board of Directors, or upon written request from 1 (one) or several Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights, stating the matters to be discussed.

4. The Board of Commissioners prepares a plan for holding internal Board of Commissioners meetings and Board of Commissioners Meetings attended by the Board of Directors (Joint Meetings), with the number and time of meetings in accordance with applicable provisions.

5. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Jumlah rapat dan agenda yang dibahas sesuai dengan yang direncanakan.

7. Jumlah kehadiran masing-masing Anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Etika rapat

1. Pimpinan dan peserta rapat hadir sebelum rapat dimulai.
2. Setiap peserta rapat memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan topik yang dibahas.
3. Menghargai pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat.
4. Menyampaikan perbedaan pendapat, kritik atau saran secara baik dengan argument yang kuat dan tidak keluar dari topik yang dibahas dalam forum rapat.
5. Saling menghormati, bersifat terbuka dan tidak memaksakan pendapat serta bersedia menerima kritik dan saran dari peserta rapat lainnya.
6. Tidak membuat forum tersendiri di dalam rapat kecuali terkaik keperluan rapat.
7. Tidak menggunakan media elektronik atau gadget dan keluar masuk ruangan rapat tanpan alasan yang ielas diluar keperluan rapat atau kepentingan Perseroan, kecuali untuk alasan darurat saat rapat berlangsung.
8. Tidak diperbolehkan meninggalkan ruang rapat sebelum rapat selesai kecuali dengan alasan yang jelas.

Pemanggilan Rapat

1. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang dituniuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat lika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

2. Penyusunan undangan rapat dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

3. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
4. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

5. A Board of Commissioners meeting is considered valid if it is held at the Company's domicile or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia.
6. The number of meetings and the agenda discussed are in accordance with what was planned.
7. The number of attendance of each Member of the Board of Commissioners must be included in the Company's Annual Report.

Meeting ethics

1. The meeting leader and participants are present before the meeting begins.
2. Each meeting participant has the same opportunity and freedom to express their opinion according to the topic being discussed.
3. Respect the opinions expressed by meeting participants.
4. Convey differences of opinion, criticism or suggestions in a good manner with strong arguments and not deviating from the topic discussed in the meeting forum.
5. Respect each other, be open and not force opinions and be willing to accept criticism and suggestions from other meeting participants.

6. Do not create a separate forum in the meeting unless it is related to the meeting's needs.
7. Do not use electronic media or gadgets and enter and exit the meeting room without a clear reason outside the meeting's needs or the interests of the Company, except for emergency reasons during the meeting.
8. It is not allowed to leave the meeting room before the meeting is over except for a clear reason.

Meeting Invitation

1. The invitation to a meeting of the Board of Commissioners shall be submitted in writing by the President Commissioner or by a Member of the Board of Commissioners addressed by the President Commissioner and shall be submitted no later than 3 (three) days before the meeting is held or within a shorter period if in urgent circumstances, without taking into account the date of the invitation and the date of the meeting.
2. The preparation of the meeting invitation shall be carried out by the Secretary of the Board of Commissioners.
3. The invitation to a meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.
4. The invitation to a meeting is not required if all Members of the Board of Commissioners are present at the meeting.

Pelaksanaan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris.

2. Terdapat surat kuasa yang dibuat oleh Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan Komisaris serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut yang dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya.
4. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

6. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

7. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang maka Anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pemimpin rapat.

8. Pimpinan dan peserta rapat harus memperhatikan etika rapat dalam pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

9. Rapat Dewan Komisaris diantaranya melakukan pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.

10. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.

11. Dewan Komisaris memastikan hasil rapat sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Meeting Implementation

1. The Board of Commissioners Meeting is valid and has the right to make binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (half) of the number of Members of the Board of Commissioners.
2. There is a power of attorney made by the Board of Commissioners who are unable to attend the Board of Commissioners meeting and an explanation of the absence from the meeting which is stated in the Minutes of the Meeting.
3. A Member of the Board of Commissioners may only represent one other Member of the Board of Commissioners.
4. All meetings of the Board of Commissioners are led by the President Commissioner.
5. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, the Board of Commissioners meeting is led by another Member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.
6. In the event that the President Commissioner does not make an appointment, then the Member of the Board of Commissioners who has served the longest as a Member of the Board of Commissioners acts as the leader of the Board of Commissioners meeting.
7. In the event that the Member of the Board of Commissioners who has served the longest as a Member of the Board of Commissioners is more than one person, then the Member of the Board of Commissioners who is oldest in age acts as the leader of the meeting.
8. The leadership and participants of the meeting must pay attention to meeting ethics in implementing the Board of Commissioners meeting.
9. The Board of Commissioners meeting includes discussing/reviewing the Board of Directors' proposals and the direction/decisions of the GMS related to the Board of Directors' proposals.
10. The Board of Commissioners conducted an evaluation of the follow-up to the results of the previous meeting.
11. The Board of Commissioners ensured that the results of the previous meeting had been followed up in their entirety.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang di wakilinya.
4. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban kecuali mengenai diri orang pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
5. Suara blanko *(abstain)* dianggap menyetuiui hasil keputusan rapat.
6. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya.
9. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetuiui penambahan mata acara rapat.
10. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan sejak usulan tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris - Direksi, tingkat kesegeraan berkisar 7 hari (baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup).
11. Tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan atau ditandatangani.

Decision-Making Mechanism

1. All decisions in the Board of Commissioners meeting are taken by deliberation to reach consensus.
2. If no consensus is reached through deliberation, then the decision of the Board of Commissioners meeting is taken by ordinary majority vote.
3. Each Member of the Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the Member of the Board of Commissioners they represent.
4. If the number of votes that agree and disagree are the same, then the decision of the meeting, while still considering the provisions regarding accountability except regarding individuals, the decision-making of the meeting is carried out by closed voting.
5. Blank votes (abstain) are considered to agree to the results of the meeting decision.
6. In the case of more than two alternative proposals and the voting results have not obtained one alternative with more than 1/2(half) of the total votes cast, then a re-election is carried out on the two proposals that received the most votes so that one of the proposals receives more than 1/2 (half) of the total votes cast.
7. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting.
8. A member of the Board of Commissioners may only represent one other member of the Board of Commissioners.
9. In other agenda items, the Board of Commissioners meeting does not have the right to make decisions unless all members of the Board of Commissioners or their authorized representatives are present and agree to additional meeting agenda items.
10. The decision making of the Board of Commissioners is carried out in accordance with the time standards determined from the time the proposed action is submitted at the Board of Commissioners Meeting and/or the Board of Commissioners - Directors Meeting, the level of immediacy ranges from 7 days (good) and up to 14 days (sufficient).
11. The level of immediacy for communicating the Board of Commissioners' decision to the Board of Directors is a maximum of 7 (seven) days after it is ratified or signed.

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan Pendapat diatur sebagai berikut:
1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.
2. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat.
3. Meskipun terdapat perbedaan pendapat namun seluruh Anggota Dewan Komisaris tetap berkewaiiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat.
4. Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali Komisaris yang melakukan *dissenting opinion* dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Komisaris yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah tumbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Komisaris yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

Dissenting Opinion

Dissenting Opinions are regulated as follows:
1. Differences of opinion that occur must be included in the Meeting Decision and the Commissioner who has a dissenting opinion must state the reasons for the difference of opinion regarding the decision.
2. Differences of opinion do not mean giving the Commissioner concerned the right not to implement the meeting decision.
3. Even though there are differences of opinion, all Members of the Board of Commissioners are still obliged to follow and implement the meeting decision.
4. The Board of Commissioners is jointly and severally responsible personally if proven guilty or negligent in carrying out their duties for the interests and business of the Company, unless the Commissioner who issued a dissenting opinion can prove that he has taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss.
5. Differences of opinion stated in the decision and minutes of the meeting can be evidence that the Commissioner concerned has taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss by not agreeing to the meeting decision. This means that the Commissioner concerned can be free from claims for the occurrence or continuation of the loss as a result of the implementation of the meeting decision.

Risalah Rapat

1. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat (dinamika rapat), baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya serta alasan ketidakhadiran Anggota Dewan Komisaris, apabila ada.
2. Risalah rapat Dewan Komisaris disusun dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
4. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Minutes of Meeting

1. Every Board of Commissioners Meeting must be prepared with minutes of meeting containing opinions that develop in the meeting (meeting dynamics), both opinions that support and those that do not support or differing opinions (dissenting opinions), decisions/conclusions of the meeting, evaluation results of the implementation of decisions of the previous meeting and reasons for the absence of Members of the Board of Commissioners, if any.
2. Minutes of Board of Commissioners meetings are prepared and administered by the Secretary of the Board of Commissioners.
3. Each Member of the Board of Commissioners has the right to receive a copy of the minutes of the Board of Commissioners Meeting, whether or not the person concerned is present at the Board of Commissioners Meeting.
4. The minutes of the meeting are signed by the Chairperson of the Meeting and all Members of the Board of Commissioners present at the meeting.

5. Risalah asli rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.
6. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus disimpan oleh Perusahaan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

7. Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis.
8. Penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimun penyelenggaraan sistem elektronik di Perusahaan sesuai ketentuan Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam sebulan. Adapun Rencana Rapat Kerja Dewan Komisaris Hutama Karya Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

5. The original minutes of the Board of Commissioners meeting are submitted to the Board of Directors to be stored and maintained, while the Board of Commissioners keeps a copy.
6. The original minutes of each Board of Commissioners Meeting must be kept by the Company and must be available upon request by each Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
7. Electronic documents can be used as valid evidence of minutes of meetings other than written minutes of meetings.
8. The use of electronic documents as Company documents is determined by the Board of Directors by fulfilling the minimum requirements for organizing electronic systems in the Company in accordance with the provisions of the Law on Information and Electronic Transactions.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING PLAN

Internal Routine Meeting of the Board of Commissioners at least once a month. The 2024 Hutama Karya Board of Commissioners Work Meeting Plan is presented as follows:

Bulan Month	**Agenda** Agenda
Januari 2024 January, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis Anak Perusahaan • *Monitoring* pengelolaan utang dan pembayaran kewajiban • *Monitoring* restrukturisasi PT HKR • Evaluasi Laporan Keuangan 2023 Unaudited • *Monitoring* Kinerja Divisi EPC dan Gedung • *Monitoring* tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu • Pemantauan Audit KAP termasuk *progress* tindak lanjut temuan audit • *Monitoring* perkembangan penyelesaian permasalahan proyek, hukum, investasi dan piutang macet. • Pembahasan *progress* PMN Tahun Anggaran 2024 • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • Monitoring the development of JTTS • Monitoring and evaluation of strategic issues of Subsidiaries • Monitoring debt management and payment of obligations • Monitoring restructuring of PT HKR • Evaluation of Unaudited Financial Report 2023 • Monitoring the Performance of the EPC and Building Division • Monitoring the follow-up of audit results with specific objectives • Monitoring of KAP Audit including progress of follow-up of audit findings • Monitoring the progress of resolving project, legal, investment and bad debt problems. • Discussion of PMN progress for Fiscal Year 2024 • Discussion of incoming letters and review by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners
Februari 2024 February, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis Anak Perusahaan • *Monitoring* pengelolaan utang dan pembayaran kewajiban • *Monitoring progress* pelaksanaan audit oleh KAP • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite • terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • *Monitoring* persiapan RUPS Tahunan • Menyusun penilaian kinerja individual Direksi Tahun 2023 • Pembahasan Revisi Peraturan Presiden terkait Jalan Tol Trans Sumatera • Pembahasan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris • untuk tahun buku 2024 (dibahas sebelumnya oleh Komite Nominasi dan Remunerasi) • *Monitoring* SMAP dan Laporan Manajemen Risiko Triwulanan • Monitoring the development of JTTS • Monitoring and evaluation of strategic issues of Subsidiaries • Monitoring debt management and payment of obligations • Monitoring the progress of audit implementation by KAP • Discussion of incoming letters and review by the Committee • on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Monitoring the preparation of the Annual GMS • Preparing individual performance assessments of the Board of Directors in 2023 • Discussion of the Revision of the Presidential Regulation regarding the Trans Sumatra Toll Road • Discussion of the proposed remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners • for the 2024 financial year (previously discussed by the Nomination and Remuneration Committee) • Monitoring SMAP and Quarterly Risk Management Report

Bulan Month	**Agenda** Agenda
Maret 2024 March, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis Perseroan • Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK, BPKP dan KAP). • Finalisasi Laporan Keuangan 2023 Audited termasuk evaluasi temuan audit yang belum sesuai rekomendasi • Pembahasan tanggapan Dewan Komisaris tentang Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • Pengawasan Kebijakan Human Capital dan Culture di PT Hutama Karya (Persero) • *Monitoring* dan evaluasi perkembangan penyelesaian permasalahan proyek, hukum, investasi dan piutang macet. • Pembahasan hasil audit atas pelaksanaan Program TJSL Tahun 2023 • *Monitoring* pelaksanaan pembayaran kedua Asset Recycling • Monitoring the development of JTTS • Monitoring and evaluation of the Company's strategic issues • Discussion of follow-up actions on the findings of both internal (SPI) and external (BPK, BPKP and KAP) auditors. • Finalization of the 2023 Audited Financial Report including evaluation of audit findings that are not in accordance with recommendations • Discussion of the Board of Commissioners' response to the 2023 Annual Report • Discussion of incoming letters and review by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Supervision of Human Capital and Culture Policy at PT Hutama Karya (Persero) • Monitoring and evaluation of the progress of resolving project, legal, investment and bad debt issues. • Discussion of audit results on the implementation of the 2023 TJSL Program • Monitoring the implementation of the second Asset Recycling payment
April 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • Pembahasan *progress* penggunaan dana PMN. • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis: Divisi OPJT • *Monitoring* pengelolaan utang dan pembayaran kewajiban • *Monitoring* restrukturisasi PT HKR • Evaluasi Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2024 • Evaluasi penyusunan Laporan Tahunan periode tahun 2023 • Evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP • Pemantauan Temuan SPI TW I serta Rencana Tindak Lanjut oleh Divisi • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite • terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • *Monitoring* kinerja Direksi/ Divisi/ Anak Perusahaan • Pembahasan usulan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2024 • *Monitoring* / Pembahasan Evaluasi Profil Risiko Triwulan I Tahun 2024 • Monitoring the development of JTTS • Discussion of the progress of the use of PMN funds. • Monitoring and evaluation of strategic issues: OPJT Division • Monitoring debt management and payment of obligations • Monitoring the restructuring of PT HKR • Evaluation of the Management Report for Quarter I of 2024 • Evaluation of the preparation of the Annual Report for the period of 2023 • Evaluation of the implementation of the audit by the KAP • Monitoring of the Findings of SPI Quarter I and the Follow-up Plan by the Division • Discussion of incoming letters and studies by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Monitoring the performance of the Board of Directors / Divisions / Subsidiaries • Discussion of the KAP proposal to audit the Financial Statements for the 2024 financial year • Monitoring / Discussion of the Evaluation of the Risk Profile for Quarter I of 2024

Bulan Month	**Agenda** Agenda
Mei 2024 May, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis: Divisi PBJT • Pembahasan hasil-hasil keputusan dan arahan RUPS tentang • Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2023 • Pembahasan kajian yang dilakukan oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dan GCG • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • *Monitoring* dan *Update* Rencana Asset Recycling TBPPKA • Monitoring the development of JTTS • Monitoring and evaluation of strategic issues: PBJT Division • Discussion of the results of decisions and directions of the GMS on • Ratification of the 2023 Financial Report • Discussion of studies conducted by the Audit Committee and the Risk Management and GCG Committee • Discussion of incoming letters and studies by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Monitoring and Update of the TBPPKA Asset Recycling Plan
Juni 2024 June, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis: Divisi PBJT • Pembahasan hasil-hasil keputusan dan arahan RUPS tentang • Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2023 • Pembahasan kajian yang dilakukan oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dan GCG • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite • terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • *Monitoring* dan *Update* Rencana Asset Recycling TBPPKA • Monitoring the development of JTTS • Monitoring and evaluation of strategic issues: PBJT Division • Discussion of the results of decisions and directions of the GMS on • Ratification of the 2023 Financial Report • Discussion of studies conducted by the Audit Committee and the Risk Management and GCG Committee • Discussion of incoming letters and studies by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Monitoring and Update of the TBPPKA Asset Recycling Plan

Bulan Month	**Agenda** Agenda
Juli 2024 July, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* perkembangan proyek Jalan Tol Kapalbetung • Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK, BPKP dan KAP). • Pembahasan *progress* penggunaan dana PMN. • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis: Divisi Gedung • *Monitoring* restrukturisasi PT HKR • Evaluasi Laporan Manajemen Semester I tahun 2024 • Pemantauan Temuan SPI s.d TW II serta Rencana Tindak Lanjut oleh Divisi • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite • terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • *Monitoring* pengelolaan utang dan pembayaran kewajiban • *Monitoring*/Pembahasan Evaluasi Profil Risiko Triwulan Triwulan II II Tahun 2024 • *Monitoring* SMAP dan Laporan Manajemen Risiko Triwulanan • Monitoring the development of JTTS • Monitoring the development of the Kapalbetung Toll Road project • Discussion of follow-up actions on the findings of both internal (SPI) and external (BPK, BPKP and KAP) auditors. • Discussion of the progress of the use of PMN funds. • Monitoring and evaluation of strategic issues: Building Division • Monitoring the restructuring of PT HKR • Evaluation of the Management Report for Semester I of 2024 • Monitoring of SPI Findings until Q2 and Follow-up Plans by the Division • Discussion of incoming letters and studies by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Monitoring debt management and payment of obligations • Monitoring/Discussion of Quarterly Risk Profile Evaluation for Quarter II of 2024 • Monitoring of SMAP and Quarterly Risk Management Report
Agustus 2024 August, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis: Divisi Perencanaan Jalan Tol • Pembahasan *Monitoring* Dashboard • Pembahasan Progres PMN Nontunai HK • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite • terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • *Monitoring* kinerja Direksi/Divisi/Anak Perusahaan • *Monitoring* Kinerja Divisi EPC dan Gedung • *Monitoring* dan *Update* Rencana *Asset Recycling* termasuk pembayaran kedua • Monitoring the development of JTTS • Monitoring and evaluation of strategic issues: Toll Road Planning Division • Discussion of Monitoring Dashboard • Discussion of HK Non-Cash PMN Progress • Discussion of incoming letters and review by the Committee • on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Monitoring the performance of the Board of Directors/Divisions/Subsidiaries • Monitoring the Performance of the EPC and Building Divisions • Monitoring and Update of the Asset Recycling Plan including the second payment

Bulan Month	**Agenda** Agenda
September 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis: Aspek GCG dan manajemen risiko • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • *Monitoring* persiapan pelaksanaan audit interim tahun 2024 oleh KAP • Pembahasan kajian yang dilakukan oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dan GCG • *Monitoring* dan evaluasi perkembangan penyelesaian permasalahan proyek, hukum, investasi dan piutang macet. • Monitoring the development of JTTS • Monitoring and evaluation of strategic issues: GCG and risk management aspects • Discussion of incoming letters and review by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Monitoring the preparation for the implementation of the 2024 interim audit by KAP • Discussion of the study conducted by the Audit Committee and the Risk Management and GCG Committee • Monitoring and evaluation of the progress of resolving project, legal, investment and bad debt issues.
Oktober 2024 October, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • Pembahasan *progress* penggunaan dana PMN. • Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK, BPKP dan KAP). • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis: Divisi Proyek Khusus/KPBU/PBI • *Monitoring* pengelolaan utang dan pembayaran kewajiban • *Monitoring* restrukturisasi PT HKR • Penyusunan program kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite • Evaluasi Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2024 • Pemantauan Temuan SPI s.d TW III serta Rencana Tindak Lanjut oleh Divisi • Pembahasan draft RKAP tahun 2024 • *Monitoring* pelaksanaan audit interim periode tahun 2024 oleh KAP t interim periode • *Monitoring* dan evaluasi atas program investasi • *Monitoring*/ Pembahasan Evaluasi Profil Risiko Triwulan III Tahun 2024 • *Monitoring* SMAP dan Laporan Manajemen Risiko Triwulanan • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris
	• Monitoring the development of JTTS • Discussion of the progress of the use of PMN funds. • Discussion of follow-up actions on the findings of auditors, both internal (SPI) and external (BPK, BPKP and KAP). • Monitoring and evaluation of strategic issues: Special Projects/KPBU/PBI Division • Monitoring debt management and payment of obligations • Monitoring PT HKR restructuring • Preparation of the work program of the Board of Commissioners and Committees • Evaluation of the Management Report for Quarter III of 2024 • Monitoring of SPI Findings until Quarter III and Follow-up Plans by the Division • Discussion of the draft RKAP for 2024 • Monitoring of the implementation of the interim audit for the period of 2024 by KAP t interim period t • Monitoring and evaluation of the investment program • Monitoring/ Discussion of the Risk Profile Evaluation for Quarter III of 2024 • Monitoring of SMAP and Quarterly Risk Management Report • Discussion of incoming letters and review by the Committee of the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners

Bulan Month	**Agenda** Agenda
November 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • *Monitoring* dan evaluasi isu strategis: Divisi QHSSE • *Monitoring* Perkembangan usulan RKAP 2024 • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite • terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • Pembahasan prognosa kinerja Perusahaan • *Monitoring* Kinerja Divisi EPC dan Gedung • Monitoring the development of JTTS • Monitoring and evaluation of strategic issues: QHSSE Division • Monitoring the development of the 2024 RKAP proposal • Discussion of incoming letters and studies by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners • Discussion of the Company's performance prognosis • Monitoring the Performance of the EPC and Building Division
Desember 2024 December, 2024	• *Monitoring* perkembangan JTTS • Pembahasan *progress* penggunaan dana PMN. • Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK, BPKP dan KAP). • *Monitoring* pengelolaan utang dan pembayaran kewajiban • *Monitoring* restrukturisasi PT HKR • Finalisasi RKAP tahun 2024 untuk diajukan ke RUPS • *Monitoring* pelaksanaan audit oleh KAP dan evaluasi temuan audit • Pemantauan Temuan SPI s.d TW IV serta Rencana Tindak Lanjut oleh Divisi *Monitoring*/Pembahasan Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV • Tahun 2024 *Monitoring* dan evaluasi perkembangan penyelesaian permasalahan proyek, hukum, investasi dan piutang macet. • Pembahasan surat-surat masuk dan kajian oleh Komite terhadap usulan rekomendasi yang diajukan ke Dewan Komisaris • Monitoring the development of JTTS • Discussion of the progress of the use of PMN funds. • Discussion of follow-up actions on the findings of both internal (SPI) and external (BPK, BPKP and KAP) auditors. • Monitoring debt management and payment of obligations • Monitoring the restructuring of PT HKR • Finalization of the 2024 RKAP to be submitted to the GMS • Monitoring the implementation of the audit by KAP and evaluation of audit findings • Monitoring of SPI Findings until Q4 and Follow-up Plans by the Monitoring Division/ Discussion of Risk Profile Evaluation Quarter IV • Year 2024 Monitoring and evaluation of the progress of resolving project, legal, investment and bad debt problems. • Discussion of incoming letters and review by the Committee on the proposed recommendations submitted to the Board of Commissioners

REALISASI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

REALIZATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Throughout 2024, the agenda, dates and participants of the Board of Commissioners meetings are as follows.

Table of Board of Commissioners Meeting

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
1.	9 Januari 2024 January 9, 2024	1. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Perubahan Alokasi Penambahan PMN TA 2024 2. Permohonan Tanggapan Tertulis Pelepasan Aktiva Tetap Bergerak PT HK th 2023 1. Request for Written Response to Changes in Allocation of Additional PMN for the Year 2024 2. Request for Written Response to Disposal of Fixed Assets of PT HK in the Year 2023	Budiman	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Tidak Hadir | Not Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Tidak Hadir | Not Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir
2.	17 Januari 2024 January 17, 2024	1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Calon Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Hutama Mambelim Trans Papua 2. Penyampaian Surat Laporan dan Penyampaian Rencana Usaha dan Rencana Amandemen PPJT 9 Ruas jalan tol tahap 1 3. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas tim WBS triwulan IV tahun 2023 4. Penyampaian hasil evalasi atas draft RKAP BUMN tahun 2024 berbasis manajemen risiko 1. Response of the Board of Commissioners to the Candidate for President Commissioner and President Director of PT Hutama Mambelim Trans Papua 2. Submission of Report Letter and Submission of Business Plan and Amendment Plan for PPJT 9 Toll Road Sections Phase 1 3. Submission of the report on the implementation of the WBS team's duties for the fourth quarter of 2023 4. Submission of the results of the evaluation of the 2024 SOEs' RKAP draft based on risk management	Budiman	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
3.	23 Januari 2024 January 23, 2024	1. Permohonan Tanggapan Tertulis ata Penyampaian Kembali Permohonan Usulan Penambahan PMN TA 2025 2. Pembahasan tindak lanjut laporan hasil audit tujuan tertentu PT HK oleh Konsultan PT Ernst & Young Indonesia 1. Request for Written Response or Resubmission of Request for 2025 PMN TA addition proposal 2. Discussion of follow-up to the report on the results of the specific audit of PT HK by Consultant PT Ernst & Young Indonesia	Budiman	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
4.	6 Februari 2024 February 6, 2024	1. Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan direksi anak perusahaan dan calon EVP Sekretaris Perusahaan 2. Laporan penggunaan dana PMN Tw IV tahun 2023 3. Laporan kinerja SMAP Tw-IV tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024 1. Board of Commissioners' approval of the the subsidiary's directors proposal and the candidate for EVP Corporate Secretary 2. Report on the use of PMN funds for Q4 2023 3. SMAP performance report for Q4 2023 and work plan for 2024	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
5.	19 Februari 2024 February 19, 2024	1. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Penambahan PMN TA 2024 periode II 2. Permohonan Tanggapan tertulis atas rencana pembentukan anak perusahaan sebagai badan usaha pelaksana proyek KPBU trans papua, porsi dan penyertaan modal, nama perusahaan serta pengurus perseroan 3. Laporan pemakaian fasilitas per 31 Desember 2023 4. Penyampaian laporan coporate guarantee anak perusahaan per 31 Desember 2023 1. Request for Written Response to the Additional PMN for the 2024 Fiscal Year Period II 2. Request for Written Response to the plan to establish a subsidiary as a business entity implementing the Trans Papua KPBU project, portion and capital participation, company name and company management 3. Report on facility usage as of December 31, 2023 4. Submission of subsidiary corporate guarantee report as of December 31, 2023	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
6.	26 Februari 2024 February 26, 2024	1. Permohonan Tanggapan tertulis atas perubahan pengajuan penambahan PMN TA 2025 2. Laporan kinerja QHSSE triwulan IV tahun 2023 3. Progress audit laporan keuagnan HK tb 2023 1. Request for written response to changes in the submission of additional PMN FY 2025 2. QHSSE performance report for the fourth quarter of 2023 3. Progress audit of HK financial report for 2023	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
7.	13 Maret 2024 March 13, 2024	1. Permohonan tanggapan atas usulan Key Performance Indicator (KPI) PMN PT HK TA 2024 2. Permohonan pelunasan sisa tagihan kontrak kerja PT Teknotronik jaya perkasa (penerusan surat dari asdep bidang jasa infrastruktur terkait tagihan yang belum dibayar PT HK) 3. Pemenuhan organ pengelola risiko BUMN 4. Penambahan biaya jasa audit terkait pekerjaan tambahan- 31 Desember 2023 1. Request for response to the proposed Key Performance Indicator (KPI) for PMN PT HK for the 2024 fiscal year 2. Request for payment of remaining work contract bills for PT Teknotronik Jaya Perkasa (forwarding a letter from the Deputy Assistant for Infrastructure Services regarding unpaid bills for PT HK) 3. Fulfillment of SOE risk management organs 4. Additional audit service fees related to additional work - December 31, 2023	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Chairiah	Tidak Hadir | Not Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
8.	19 Maret 2024 March 19, 2024	1. Pembahasan top 20% nominated talent PT HK 2. Laporan tahunan SPI tahun 2023 1. Discussion of top 20% nominated talent PT HK 2. SPI annual report 2023	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
9	20 Maret 2024 March 20, 2024	Pembahasan top 20% nominated talent PT HK Top 20% nominated talent PT HK discussion	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
10	26 Maret 2024 March 26, 2024	1. Pembahasan Top 20% Nominated Talent PT Hutama Karya (Persero) 2. Permohonan Persetujuan atas Calon DO II dan DO III PT Hutama Karya Infrastruktur. 1. Discussion of Top 20% Nominated Talent of PT Hutama Karya (Persero) 2. Request for Approval of Candidates for DO II and DO III of PT Hutama Karya Infrastruktur.	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
11	2 April 2024 April 2, 2024	Progress Pelaksanaan Diagnostik ICOFR bagi BUMN sistemik A dan BUMN Sistemik B serta evaluasi kebijakan ambang batas kewenangan transaksi BUMN dan anak perusahaan BUMN Progress of ICOFR Diagnostic Implementation for Systemic A SOE and Systemic B SOE and evaluation of transaction authority threshold policy for SOE and SOE subsidiaries	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
12	17 April 2024 April 17, 2024	Pembahasan evaluasi dan masukan Dekom atas kebijakan eksisting ambang batas transaksi di PT HK dan anak perusahaan Discussion of the evaluation and input of the Board of Commissioners on the existing policy on transaction thresholds at PT HK and its subsidiaries	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Chairiah	Tidak Hadir | Not Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
13	23 April 2024 April 23, 2024	1. Tindak lanjut rekomendasi laporan hasil ADTT permasalahan tata kelola perpajakan PT Bhirawa Steel 2. Laporan manajemen risiko Triwulan IV tahun 2023 dan draft risk maturity index 2023 1. Follow-up on recommendations from the ADTT report on tax governance issues at PT Bhirawa Steel 2. Risk management report for the fourth quarter of 2023 and the draft risk maturity index 2023	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
14	30 April 2024 April 30, 2024	1. Pembahasan Laporan Manajemen Audited Tahun 2023 dan Persiapan RUPS Tahunan TB 2023; Laporan manajemen Tw I tahun 2024 2. Pembahasan Code of Conduct PT Hutama Karya (Persero) tahun 2024; 3. Penyampaian Dokumen Pelaporan Penggunaan Tambahan Dana PMN TA 2021 tahap III, PMN TA 2022 tahap I dan II, dan PMN TA 2023 periode Maret 2024. 1. Discussion of the Audited Management Report for 2023 and Preparation of the Annual General Meeting of Shareholders for 2023; Management Report for 2024 Quarter I 2. Discussion of the Code of Conduct of PT Hutama Karya (Persero) for 2024; 3. Submission of Reporting Documents on the Use of Additional Funds for PMN for 2021 Phase III, PMN for 2022 Phases I and II, and PMN for 2023 for the March 2024 period.	Yudo Margono	Tidak Hadir
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
15	7 Mei 2024 May 7, 2024	1. Laporan pelaksanaan tugas tim WBS Tw I tahun 2024 2. Laporan kinerja SMAP Tw I tahun 2024 3. Laporan fasilitas pinjaman HK Group per 31 Maret 2024 1. Report on the implementation of the WBS team's duties for Q1 2024 2. Report on the performance of SMAP for Q1 2024 3. Report on HK Group's loan facilities as of March 31, 2024	Yudo Margono	Tidak Hadir | Not Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
16	17 Mei 2024 May 17, 2024	Pembahasan usulan Remunerasi Dekom dan Direksi PT HK pada RUPS Tahunan 2024 Discussion of the proposed Remuneration of the Board of Commissioners and Directors of PT HK at the 2024 Annual GMS	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir
17	21 Mei 2024 May 21, 2024	1. Update proses pemilihan KAP PT HK untuk ditetapkan dalam RUPS Tahunan tb 2024 2. Laporan atas penerbitan corporate guarantee kepada anak perusahaan Tw I 2024 3. Usulan SPI Terintegrasi dan Reorganisasi SPI PT HK 1. Update on the process of selecting KAP PT HK to be determined in the Annual GMS in 2024 2. Report on the issuance of corporate guarantees to subsidiaries in Q1 2024 3. Proposal for Integrated SPI and Reorganization of SPI PT HK	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
18	28 Mei 2024 May 28, 2024	1. Tindak lanjut perubahan struktur organisasi PT HK 2. Permohonan tanggapan atas penyampaian penggunaan laba bersih tahun 2023 3. Permohonan tanggapan atas usulan agenda RUPS Persetujuan laporan tahunan program TJSL tb 2023 termasuk pengesahan laporan keuangan program pendanaan UMK 4. Permohonan tanggapan atas usulan agenda RUPS pengesahan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN TA 2021, 2022, dan 2023. 5. Pembahasan RJPP PT HK tahun 2025-2029 1. Follow-up on changes to the organizational structure of PT HK 2. Request for response to the submission of the use of net profit in 2023 3. Request for response to the proposed GMS agenda for approval of the annual report of the TJSL program for 2023 including the ratification of the financial report of the UMK funding program 4. Request for response to the proposed GMS agenda for ratification of the report on the realization of the use of additional PMN funds for the 2021, 2022, and 2023 fiscal years. 5. Discussion of the RJPP of PT HK for 2025-2029	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
19	11 Juni 2024 June 11, 2024	1. Permohonan persetujuan atas rencana pemberian shareholder loan kepada EPC Energy Singapore Pte Ltd tahun 2024 2. Permohonan tanggapan tertulis Dekom dalam rangka permohonan persetujuan RUPS atas pelaksanaan penugasan jalan tol Palembang-Betung dan Pelabuhan Panjang-Lematang 3. Arahan penyusunan dan penguatan implementasi kebijakan tata kelola benturan kepentingan pada lingkungan BUMN 1. Request for approval of the plan to provide a shareholder loan to EPC Energy Singapore Pte Ltd in 2024 2. Request for a written response from the Board of Commissioners in the context of requesting approval from the GMS for the implementation of the assignment of the Palembang-Betung toll road and Panjang-Lematang Port 3. Directions for the preparation and strengthening of the implementation of conflict of interest governance policies in the SOEs environment.	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
20	2 Juli 2024 July 2, 2024	1. Penyampaian Dokumen Contingency Plan tahun 2024 PT HK 2. Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris atas Kendaraan Dinas Direksi 3. Persetujuan KPI Direksi secara Individual tahun 2024 4. Pemberitahuan terkait masa jabatan EVP SPI dan EVP Sekper 1. Submission of 2024 Contingency Plan Documents for PT HK 2. Request for Board of Commissioners' Response to Board of Directors' Official Vehicles 3. Approval of Individual Board of Directors' KPIs for 2024 4. Notification regarding the term of office of EVP SPI and EVP Sekper	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Chairiah	Hadir
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
21	8 Juli 2024 July 8, 2024	Rencana Kerja Sama Sewa Menyewa Aset PT HK di Cipayung, Bogor dengan PT Hita Kreatif Nusantara Collaboration Plan for Lease of PT HK Assets in Cipayung, Bogor with PT Hita Kreatif Nusantara	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
22	17 Juli 2024 July 17, 2024	1. Tindaklanjut arahan Dewan Komisaris atas Calon Direktur Utama PT HKR 2. Penyampaian perubahan treshold dan Penyesuaian Anggaran Dasar PT HK 1. Follow-up of the Board of Commissioners' direction for the Candidate for President Director of PT HKR 2. Submission of changes to the threshold and Adjustment to the Articles of Association of PT HK	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Tidak Hadir | Not Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
23	23 Juli 2024 July 23, 2024	1. Permohonan tanggapan calon (shortlist) Direktur Bisnis & Teknik PT HKR 2. Penyampaian dokumen pelaporan penggunaan tambahan dana PMN TA 2022 tahap I, dan II, PMN TA 2023 dan PMN TA 2024 periode Juni 2024 3. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas tim WBS Tw II thun 2024 4. Somasi ketiga PT Putra Kundur Transportasi Perkasa 1. Request for response from candidates (shortlist) for Director of Business & Engineering of PT HKR 2. Submission of reporting documents on the use of additional PMN funds for the 2022 fiscal year phase I and II, PMN for the 2023 fiscal year and PMN for the 2024 fiscal year for the period of June 2024 3. Submission of the report on the implementation of the WBS team's duties for the second quarter of 2024 4. Third summons from PT Putra Kundur Transportasi Perkasa	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
24	30 Juli 2024 July 30, 2024	1. Penyampaian Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2024 PT HK 2. Pembahasan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum PT HK sd Tw II tahun 2024 1. Submission of PT HK's 2024 Quarter II Management Report 2. Discussion of PT HK's Settlement of Legal Cases until Quarter II of 2024	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
25	12 Agustus 2024 August 12, 2024	1. Permohonan persetujuan pedoman tata kelola terintegrasi konglomerasi perusahaan dan pemberitahuan penetapan Direktur Pembina & Direktur Fungsional 2. Laporan audit intern Tw II tahun 2024 PT HK 3. Lain-lain (Pembahasan hasil interview calon anggota komite risiko, rencana penambahan staf komisaris, aduan melalui email) 1. Application for approval of the integrated governance guidelines of the company's conglomerate and notification of the appointment of the Director of Trustees & Functional Directors 2. Internal audit report for Q2 2024 of PT HK 3. Others (Discussion of interview results for prospective risk committee members, plans to increase commissioner staff, complaints via email)	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
26	20 Agustus 2024 August 20, 2024	1. Permohonan penambahan materi akhlak pada BOC Charter 2. Laporan atas Penerbitan Fasilitas pinjaman & corporate guarantee kepada anak perusahaan per 30 Juni 2024 3. Lain-lain (Hasil wawancara calon anggota komite audit) 1. Request for additional material on ethics in the BOC Charter 2. Report on the Issuance of Loan Facilities & Corporate Guarantees to Subsidiaries as of June 30, 2024 3. Others (Results of interviews with prospective members of the audit committee)	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
27	27 Agustus 2024 August 27, 2024	1. Penyampaian Kembali Dokumen Contingency Plan tahun 2024 PT HK untuk Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris 2. Pembahasan Rencana Equity Injection/Penyertaan Modal tahun 2024 PT HKR 3. Pembahasan Hasil Putusan Perkara Perdata CSK 1. Resubmission of PT HK's 2024 Contingency Plan Documents to Obtain Board of Commissioners' Approval 2. Discussion of PT HKR's 2024 Equity Injection/ Capital Participation Plan 3. Discussion of CSK Civil Case Decision Results	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
28	6 September 2024 September 6, 2024	1. Pembahasan 3 (tiga) Top risk PT HK dalam rangka tindak lanjut pembahasan risiko portfolio BUMN tb 2023 2. Penyampaian update progres rencana integrasi PT HK dan PT Waskita tbk serta permohonan arahan dan Tanggapan Dekom 3. Permohonan pengesahan rencana KPI Direksi secara Individual th 2024 4. Update revisi dokumen pedoman tata kelola terintegrasi dan dokumen Contingency plan PT HK 1. Discussion of 3 (three) Top risks of PT HK in the context of follow-up discussion of SOE portfolio risk tb 2023 2. Submission of progress updates on the integration plan of PT HK and PT Waskita tbk and request for direction and response from the Board of Commissioners 3. Request for approval of the KPI plan of the Board of Directors individually for 2024 4. Update on the revision of the integrated governance guidelines document and the Contingency plan document of PT HK	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Tidak Hadir | Not Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
29	13 September 2024 September 13, 2024	Pembahasan Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Whistleblowing System (WBS) Discussion on Submission of Reports of Alleged Violations of the Whistleblowing System (WBS)	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
30	17 September 2024 September 17, 2024	1. Surat Pemberitahuan dari Triwin Law Firm yang disampaikan kepada Dekom PT HK 2. Pembahasan usulan 3 top risks PT HK tahun 2024 3. Pembahasan penyampaian kembali Audit intern terintegrasi 4. Pembahasan Laporan kinerja QHSSE Tw II 2024 1. Notification Letter from Triwin Law Firm submitted to the Board of Commissioners of PT HK 2. Discussion of the proposal for the 3 top risks of PT HK in 2024 3. Discussion of the re-submission of the integrated internal audit 4. Discussion of the QHSSE performance report for Q2 2024	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend
31	24 September 2024 September 24, 2024	1. Permohonan persetujuan EVP Divisi SPI dan EVP Divisi Corsec PT HK 2. Pembahasan update dokumen RJPP PT HK tahun 2025-2029 3. Pembahasan laporan hasil audit tujuan tertentu atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan ileh PT HK yang dibiayai PMN dan KMK penjaminan pemerintah 4. Pembahasan pembentukan anak perusahaan sebagai badan usaha pelaksana ("BUP") dalam proyek KPBU pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) 1. Request for approval from EVP of SPI Division and EVP of Corsec Division of PT HK 2. Discussion of the update of RJPP document of PT HK for 2025-2029 3. Discussion of specific purpose audit report on the implementation of development projects by PT HK funded by PMN and KMK government guarantee 4. Discussion of the establishment of a subsidiary as an implementing business entity ("BUP") in the KPBU project for the construction of Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I)	Yudo Margono	Tidak Hadir | Not Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
32	3 Oktober 2024 October 3, 2024	1. Rekomendasi Komisaris dan Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik 2. Pembahasan laporan hasil dan roadmap perbaikan penerapan Manajemen Risiko atas Penilaian Risk Maturity Index (RMI) PT HK tb 2023 3. Penyampaian kembali pedoman tata kelola terintegrasi konglomerasi perusahaan 1. Recommendation of Commissioners and Directors of PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik 2. Discussion of the report on the results and roadmap for improving the implementation of Risk Management for the Risk Maturity Index (RMI) Assessment of PT HK tb 2023 3. Resubmission of the integrated governance guidelines for the company's conglomerate	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Tidak Hadir
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
33	17 Oktober 2024 October 17, 2024	1. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Usulan KPI PMN PT HK TA 2024 Cadangan Investasi 2. Permohonan Pengesahan Rencana KPI Direksi secara Individual tahun 2024 3. Pembahasan usulan rancangan RKAP tahun 2025 PT HK 1. Request for Written Response to the Proposed KPI PMN PT HK FY 2024 Investment Reserves 2. Request for Approval of the KPI Plan of the Board of Directors Individually in 2024 3. Discussion of the proposed draft RKAP for 2025 PT HK	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
34	22 Oktober 2024 October 22, 2024	1. Update pembahasan usulan RKAP tahun 2025 2. Permohonan tanggapan tertulis pelepasan dan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Bergerak PT HK tahun 2024 3. Penyampaian dokumen pelaporan penggunaan dana PMN TA 2022 tahap I dan II, PMN TA 2023 dan PMN TA 2024 periode September 2024 1. Update on the discussion of the proposed RKAP for 2025 2. Request for written response to the release and Write-off of PT HK's Fixed Assets in 2024 3. Submission of reporting documents on the use of PMN funds for the 2022 fiscal year stages I and II, PMN for the 2023 fiscal year and PMN for the 2024 fiscal year for the period September 2024	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
35	28 Oktober 2024 October 28, 2024	1. Tanggapan atas surat Kementerian BUMN nomor: S-360/Wk.MBU.10/10/2024 2. RKA Dewan Komisaris tahun 2025 3. Laporan Manajemen Tw III tahun 2024 4. Laporan audit intern PT HK Tw III tahun 2024 1. Response to the letter of the Ministry of SOEs number: S-360/Wk.MBU.10/10/2024 2. RKA of the Board of Commissioners for 2025 3. Management Report for Q3 2024 4. Internal audit report of PT HK for Q3 2024	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
36	11 November 2024 November 11, 2024	1. Pemberitahuan Rencana Pemberhentian Sementara Direktur dan Penunjukan Plt Direktur PT Hamawas 2. Laporan Manajemen Kegiatan Teknologi Informasi sd Triwulan 3 tahun 2024 PT HK 3. Laporan Kinerja Divisi QHSSE Tw III tahun 2024 1. Notification of Plan for Temporary Dismissal of Director and Appointment of Acting Director of PT Hamawas 2. Information Technology Activity Management Report until Quarter 3 of 2024 PT HK 3. Performance Report of QHSSE Division Quarter III of 2024	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
37	19 November 2024 November 19, 2024	1. Laporan Kinerja SMAP Tw III Tahun 2024 2. Laporan pelaksanaan tugas tim WBS Tw III tahun 2024 3. Pembahasan Update dokumen Contingency Plan 2024 PT HK 1. SMAP Performance Report Q3 2024 2. Report on the implementation of the WBS team's duties Q3 2024 3. Discussion of the Update of the 2024 PT HK Contingency Plan Document	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
38	25 November 2024 November 25, 2024	1. Laporan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 1293/PDT/2024/PT DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 379/Pdt.G/2024/PMN Jkt Tim 2. Progres Audit Laporan Keuangan tb 2024 PT HK 1. Decision report of the DKI Jakarta High Court Number 1293/PDT/2024/PT DKI in conjunction with the Decision of the East Jakarta District Court 379/Pdt.G/2024/PMN Jkt Tim 2. Progress of the Audit of the Financial Report tb 2024 PT HK	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
39	3 Desember 2024 December 3, 2024	1. Pembahasan Perubahan Pembaharuan Daftar Usulan Selected Talent dan Daftar BOD-1 PT HK 2. Pembahasan Laporan Pemakaian Fasilitas & Corporate Guarantee per 30 September 2024 1. Discussion about Changes in the Update of the Proposed List of Selected Talents and the BOD-1 PT HK List 2. Discussion of the Report on the Use of Facilities & Corporate Guarantees as of September 30, 2024	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
40	17 Desember 2024 December 17, 2024	Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi PT HK Tw III tahun 2024 Integrated Risk Management Report of PT HK Conglomerate Q3 2024	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Hadir | Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir | Not Attend
			Chairiah	Hadir | Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Tidak Hadir | Not Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir | Not Attend
41	27 Desember 2024 December 27, 2024	Permohonan Persetujuan atas Rencana Perpanjangan Jatuh Tempo Utang Afiliasi PT HKR Request for Approval of PT HKR Affiliate Debt Maturity Extension Plan	Yudo Margono	Hadir | Attend
			Lukman Edy	Tidak Hadir | Not Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir | Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir | Attend
			Chairiah	Tidak Hadir | Not Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir | Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir | Attend

REALISASI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

REALIZATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Throughout 2024, the agenda, dates, and participants of the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Table of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Presence	Peserta Rapat - Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Presence
1.	13 Februari 2024 February 13, 2024	1. Kinerja Unaudited PT HK tahun 2023 2. Update hasil reviu ICOFR PT Hutama Karya (Persero) tahun 2023 1. PT HK Unaudited Performance in 2023 2. Update on the results of the ICOFR review of PT Hutama Karya (Persero) in 2023	Yudo Margono	Hadir Attend Attend	Budi Harto	Hadir Attend
			Lukman Edy	Hadir Attend	Aloysius Kiik Ro	Hadir Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir Attend	Agung Fajarwanto	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir Attend	Gunadi	Hadir Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir Not Attend	Muhammad Fauzan	Hadir Attend
2	26 Maret 2024 March 26, 2024	1. Pembahasan kinerja PT HKR tahun 2023 dan rencana restrukturisasi keuangan PT HK Realtindo dengan skema equity ijection tahun 2024 2. Laporan hasil audit (LHA) tujuan tertentu permasalahan tata kelola perpajakan PT Bhirawa Steel tb 2020 1. Discussion of PT HKR's performance in 2023 and PT HK Realtindo's financial restructuring plan with an equity injection scheme in 2024 2. Specific purpose audit report (LHA) on tax governance issues of PT Bhirawa Steel tb 2020	Yudo Margono	Hadir Attend	Budi Harto	Hadir Attend
			Lukman Edy	Hadir Attend	Aloysius Kiik Ro	Hadir Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir Attend	Agung Fajarwanto	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir Not Attend	Gunadi	Hadir Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir Not Attend	Muhammad Fauzan	Hadir Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Presence	Peserta Rapat - Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Presence
3	14 Mei 2024 May 14, 2024	1. Pembahasan draft RJPP PT HK tahun 2025-2029 2. Persiapan RUPST Tb 2023 PT HK 3. Pembahasan rencana perbahan struktur organisasi PT HK 4. Pembahasan laporan tugas tim WBS Tw I th 2024 1. Discussion of the draft of PT HK's RJPP for 2025-2029 2. Preparation for PT HK AGMS 2023 3. Discussion of plans to change the organizational structure of PT HK 4. Discussion of the WBS team task report for Quarter 1 of 2024	Lukman Edy	Hadir Attend	Budi Harto	Tidak Hadir Not Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir Attend	Aloysius Kiik Ro	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir Attend	Agung Fajarwanto	Tidak Hadir Not Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Gunadi	Hadir Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Hadir Attend
					Muhammad Fauzan	Hadir Attend
					Sugiarti	Hadir Attend
4.	8 Juli 2024 July 8, 2024	Pembahasan Dokumen Contingency Plan tahun 2024 Discussion of the 2024 Contingency Plan Document	Budiman	Hadir Attend	Budi Harto	Hadir Attend
			Lukman Edy	Hadir Attend	Aloysius Kiik Ro	Hadir Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir Attend	Agung Fajarwanto	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir Attend	Gunadi	Hadir Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir Attend	Muhammad Fauzan	Hadir Attend
					Sugiarti	Hadir Attend
5	6 Agustus 2024 August 6, 2024	1. Permohonan persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana perpanjangan jatuh tempo utang afiliasi PT HKR 2. Pembahasan penyelesaian kasus-kasus hukum PT HK sd triwulan II tahun 2024 1. HKR Request for approval from the Board of Commissioners for the planned extension of the maturity date of PT HKR's affiliated debts 2. Discussion on settlement of PT HK legal cases until quarter 2 of 2024	Budiman	Hadir Attend	Budi Harto	Hadir Attend
			Lukman Edy	Tidak Hadir Not Attend	Aloysius Kiik Ro	Hadir Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir Attend	Agung Fajarwanto	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Tidak Hadir Not Attend	Gunadi	Hadir Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir Not Attend		

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Presence	Peserta Rapat - Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Presence
6	2 September 2024 September 2, 2024	1. Pembahasan Hasil Putusan Perkara Perdata CSK 2. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Perubahan Usulan Penambahan PMN TA 2024 periode II 3. Update progress integrasi PT HK dan PT Waskita 4. Pembahasan permasalahan berkaitan dengan Manajemen Kontrak sampai dengan Semester I tahun 2024 1. CSK Discussion of the Results of the CSK Civil Case Decision 2. Request for Written Response to the Proposed Changes to the Additional PMN for the 2024 Fiscal Year Period II 3. Update on the progress of the integration of PT HK and PT Waskita 4. Discussion of issues related to Contract Management until Semester I of 2024	Budiman	Hadir Attend	Budi Harto	Hadir Attend
			Lukman Edy	Hadir Attend	Aloysius Kiik Ro	Hadir Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir Attend	Agung Fajarwanto	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir Attend	Gunadi	Hadir Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir Attend	Muhammad Fauzan	Hadir Attend
					Sugiarti	Hadir Attend
7	8 Oktober 2024 October 8, 2024	1. Pembahasan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan oleh PT HK yang dibiayai PMN dan KMK Penjaminan Pemerintah 2. Update penyelesaian kasus hukum pembelian tanah di wilayah Indralaya 3. Tindak lanjut hasil audit BPK RI tahun 2020-2021 1. Discussion of Specific Purpose Audit Result Report on the Implementation of Development Projects by PT HK Funded by PMN and KMK Government Guarantee 2. Update on the settlement of legal cases for land purchases in the Indralaya area 3. Follow-up to the results of the 2020-2021 BPK RI audit	Budiman	Hadir Attend	Budi Harto	Hadir Attend
			Lukman Edy	Hadir Attend	Aloysius Kiik Ro	Hadir Attend
			Agung Sabar Santoso	Tidak Hadir Not Attend	Agung Fajarwanto	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir Attend	Gunadi	Hadir Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir Attend	Muhammad Fauzan	Hadir Attend
					Sugiarti	Hadir Attend

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Presence	Peserta Rapat - Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Presence
8	28 Oktober 2024 October 28, 2024	1. Usulan RKAP Tahun 2025 PT HK 2. Permohonan Tanggapan Rencana Pendanaan ruas Betung (Sp, Sekayu) - Tempino - Jambi 1. PT HK's 2025 RKAP Proposal 2. Request for Response to Funding Plan for Betung (Sp, Sekayu) - Tempino - Jambi Section	Budiman	Hadir Attend	Budi Harto	Hadir Attend
			Lukman Edy	Hadir Attend	Aloysius Kiik Ro	Hadir Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir Attend	Agung Fajarwanto	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir Attend	Gunadi	Hadir Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Tidak Hadir Not Attend	Muhammad Fauzan	Hadir Attend
					Sugiarti	Hadir Attend
9	23 Desember 2024 December 23, 2024	1. Status Kesiapan Tahapan Implementasi ICOFR HK Grup 2. Permasalahan hukum di anak perusahaan PT HK • Gugatan DSU dengan PT Hamawas melalui BANI • Permasalahan kasus hukum PT Inasa di HKA 3. Readiness Status of HK Group's ICOFR Implementation Stage 4. Legal issues in PT HK subsidiary • DSU's lawsuit against PT Hamawas through BANI • Legal case issues of PT Inasa in HKA	Budiman	Hadir Attend	Budi Harto	Hadir Attend
			Lukman Edy	Hadir Attend	Agung Fajarwanto	Hadir Attend
			Agung Sabar Santoso	Hadir Attend	Gunadi	Hadir Attend
			R. Wahyu Muryadi	Hadir Attend	Koentjoro	Hadir Attend
			Chairiah	Hadir Attend	Eka Setya Adrianto	Tidak Hadir Not Attend
			Susdiyarto Agus Praptono	Hadir Attend	Muhammad Fauzan	Hadir Attend
			Iwan Suprijanto	Hadir Attend	Sugiarti	Hadir Attend

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Table of Board of Commissioners Meeting Frequency and Attendance

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Dewan Komisaris** Board of Commissioners Meeting **Jumlah dan Persentasi Kehadiran** Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage
Budiman*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	3	3	100%
Yudo Margono**	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	38	35	92%
Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	41	38	93%
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	41	40	98%
Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	41	32	78%
Chairiah	Komisaris Commissioner	41	34	83%
Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	41	40	98%
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	41	20	49%

*Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
**Mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
* Resigned from office on January 31, 2024
** Started serving from January 31, 2024

	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors			RUPS GMS		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage
	-	-	-	1	1	100%
	9	9	100%	1	1	100%
	9	8	89%	2	2	100%
	9	8	89%	2	2	100%
	9	7	78%	2	2	100%
	9	9	100%	2	2	100%
	9	9	100%	2	2	100%
	9	5	56%	2	2	100%

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebiiakan Dewan Komisaris terkait Program Pelatihan Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (BOC *Charter*) adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melaksanakan kebiiakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan.
2. Dewan Komisaris menyusun Rencana Keria dan Anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris.
4. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani Anggota Dewan Komisaris.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

The Board of Commissioners' policy regarding the Board of Commissioners' Training Program regulated in the Board of Commissioners' Guidelines and Work Procedures (BOC Charter) is as follows:

1. The Board of Commissioners implements training program policies to improve the competence of the Board of Commissioners Members according to needs.
2. The Board of Commissioners prepares a Work Plan and Budget for training activities for Members of the Board of Commissioners.
3. The implementation of training for Members of the Board of Commissioners is realized in line with the Board of Commissioners Work Plan.
4. There is a report on the results of the training that the Members of the Board of Commissioners have undergone.

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

The realization of the competency development program undergone by the Board of Commissioners throughout 2024 is described in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan** Types and Materials of Training and Competency Development	**Waktu dan Tempat Pelaksanaan** Date and Place of Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Yudo Margono*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Onboarding Commissioner Program Angkatan 8 tahun 2024	Jakarta, 7 - 8 Agutus 2024 Jakarta, August 7 – 8, 2024	BUMN School of Excellence
		Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Online, 14 Agustus 2024 Online, August 14, 2024	Center for Risk Management & Sustainability
Budiman**	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	-	-	-
Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Pathways Chartered Accountant	Online, 15 Mei - 28 Juni 2024 Online, May 15 - June 28 2024	BUMN School of Excellence & Ikatan Akuntansi Indonesia
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pathways Chartered Accountant	Online, 15 Mei - 28 Juni 2024 Online, May 15 - June 28 2024	BUMN School of Excellence & Ikatan Akuntansi Indonesia
Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pathways Chartered Accountant	Online, 15 Mei - 28 Juni 2024 Online, May 15 - June 28 2024	BUMN School of Excellence & Ikatan Akuntansi Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types and Materials of Training and Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Date and Place of Implementation	Penyelenggara Organizer
Chairiah	Komisaris Commissioner	*Pathways Chartered Accountant*	Online, 15 Mei - 28 Juni 2024 Online, May 15 - June 28 2024	BUMN School of Excellence & Ikatan Akuntansi Indonesia
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	*Pathways Chartered Accountant*	Online, 15 Mei - 28 Juni 2024 Online, May 15 - June 28 2024	BUMN School of Excellence & Ikatan Akuntansi Indonesia

*Mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
**Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
* Started serving from January 31, 2024
** Resigned from office on January 31, 2024

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Kebijakan Dewan Komisaris terkait Program Pengenalan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perusahaan.
2. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris.
3. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
4. Materi Program Pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh BUMN.
   b. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya.
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Direksi serta hal yang tidak diperbolehkan.
5. Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kuniungan ke Perusahaan dan pengkaiian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan.
6. Program Pengenalan Perusahaan didokumentasikan termasuk materi dan daftar hadir (tingkat kehadiran/keaktifan) anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Perusahaan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

The Board of Commissioners' policy regarding the Board of Commissioners' Introduction Program is as follows:

1. Members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time must be given an Introduction Program regarding the Company.
2. The Board of Commissioners contacts the Board of Directors to hold an introduction program for the Members of the Board of Commissioners.
3. The responsibility for holding the Introduction Program lies with the Company Secretary or anyone who performs the function of Company Secretary.
4. Introductory Program materials include:
   a. a.Implementation of Good Corporate Governance principles by SOE.
   b. A description of the company's objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues.
   c. Information relating to delegated authority, Internal Audit and External Audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
   d. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors and things that are prohibited to them.
5. The Company Introduction Program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company, and the use of documents or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented.
6. The Company Introduction Program is documented including materials and attendance list (level of attendance/activeness) of members of the Board of Commissioners in participating in the Company introduction program.

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang pertama kali ditunjuk, diberikan orientasi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Program orientasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai kondisi Perseroan secara umum, nilai-nilai, visi dan misi Perseroan, pengenalan atas kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan serta kebijakan, prosedur dan penerapan tata kelola Perseroan.

Program perkenalan Perusahaan kepada Komisaris Utama Baru telah dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Februari 2024 pukul 13.00 WIB. Agenda ini dilaksanakan secara hybrid di ruang rapat Sutami Lt 6, HK Tower, serta melalui zoom meeting. Agenda ini dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko & GCG, Sekretaris Dewan Komisaris, EVP Kantor Pusat dan Divisi Operasi, serta Direksi Anak Perusahaan dan Afiliasi.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan antara lain:

1. Pengawasan atas Sistem Pengendalian Internal: Pengawasan dilakukan untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal telah dijalankan dan efektif dalam:
   a. Menjaga dan mengamankan kekayaan perusahaan yang digunakan hanya untuk kepentingan perusahaan.
   b. Meyakinkan keakuratan dan keandalan data akuntansi dan laporan keuangan sebagai informasi gambaran perkembangan kinerja keuangan perusahaan.
   c. Mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
   d. Mendorong kepatuhan pada perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kebijakan manajemen.

2. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Dewan Komisaris secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Melakukan reviu dan evaluasi secara mingguan terhadap kinerja, isu strategis dan progress pencapaian target-target dalam RKAP Tahun 2024.
   b. Secara Triwulan, berdasarkan Laporan Manajemen Triwulan yang disampaikan, Dewan Komisaris dengan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dan GCG melakukan pembahasan guna mendukung pencapaian target dalam RKAP tahun 2024 dan apabila terjadi kelemahan sistem pengendalian internal.

Each new member of the Board of Commissioners who is first appointed is given orientation regarding his/her duties and responsibilities. The orientation program aims to provide an understanding and description of the Company's general condition, the Company's values, vision and mission, an introduction to the Company's business activities and its Subsidiaries as well as the Company's policies, procedures, and implementation of governance.

The Company's introduction program to the New President Commissioner was held on Tuesday, February 13, 2024 at 13.00 WIB. This agenda was carried out in a hybrid manner in the Sutami meeting room, 6th floor, HK Tower, and via zoom meeting. This agenda was attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Management & GCG Committee, Secretary of the Board of Commissioners, EVP of Head Office and Operations Division, and Directors of Subsidiaries and Affiliates.

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

During 2024, the Board of Commissioners has performed its supervisory duties, including:

1. Supervision of the internal control system: Supervision was carried out to ensure that the internal control system was implemented and effective in:
   a. Safeguarding and protecting company assets to ensure they are used solely for the company's interests.
   b. Ensuring the accuracy and reliability of accounting data and financial statements as information reflecting the company's financial performance.
   c. Promoting increased efficiency and effectiveness to achieve better company performance.
   d. Encouraging compliance with laws, company regulations, and management policies.

2. To carry out its supervisory duties, the Board of Commissioners regularly conducted the following activities:
   a. Conducting weekly reviews and evaluations of performance, strategic issues, and the progress of target achievements in the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).
   b. On a quarterly basis, based on the submitted Quarterly Management Reports, the Board of Commissioners, together with the Audit Committee and the Risk Management and GCG Committee, held discussions to support the achievement of 2024 RKAP targets and to address any weaknesses in the internal control system.

c. Melaksanakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi membahas laporan berkala perusahaan dan memberikan tanggapan serta saran atas pencapaian RKAP bulanan serta isu strategis lainnya. Tanggapan dituangkan dalam Risalah Rapat untuk selanjutnya diminta kepada Direksi melakukan perbaikan-perbaikan.

3. Dari hasil evaluasi, reviu, dan pembahasan yang dilakukan dengan Direksi dan Divisi/Cabang/Unit, Dewan Komisaris meminta Direksi dan manajemen agar seluruh aktivitas produksi, pemasaran, keuangan, dan proses administrasi dilakukan secara akurat sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku di perusahaan. Menyempurnakan SOP dan ketentuan perusahaan dalam rangka menunjang kelancaran operasional untuk meningkatkan pendapatan operasi, efisiensi, laba usaha, dan kinerja perusahaan.

4. Menekankan kepada Direksi agar setiap perubahan Struktur Organisasi Perusahaan yang akan dilakukan harus didasarkan pada kajian yang matang dan mempunyai nilai tambah dalam mendorong potensi-potensi strategis yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan daya saing, pendapatan operasi, efisiensi, dan produktivitas karyawan serta kinerja perusahaan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Sistem evaluasi kinerja Direksi di tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Surat KBUMN No. S-220/MBU/04/2023 tanggal 19 April 2023.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh komite Dewan Komisaris berdasarkan KPI Korporasi yang termuat di dalam Kontrak Manajemen antara Direksi dengan Pemegang Saham.

c. Conducting joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the company's periodic reports, and providing responses and recommendations regarding the achievement of monthly RKAP targets and other strategic issues. The responses are documented in the Minutes of Meeting and subsequently communicated to the Board of Directors for necessary improvements.

3. Based on the results of evaluations, reviews, and discussions with the Board of Directors and Divisions/Branches/Units, the Board of Commissioners requested that the Board of Directors and management ensure that all production, marketing, financial, and administrative activities are conducted accurately in accordance with the company's applicable regulations and Standard Operating Procedures (SOPs). The Board of Commissioners also requested the enhancement of SOPs and company regulations to support smooth operations and to increase operating income, efficiency, operating profits, and overall company performance.

4. Emphasizing to the Board of Directors that any changes to the company's organizational structure must be based on thorough studies and must provide added value in leveraging the company's strategic potentials to enhance competitiveness, operating income, efficiency, employee productivity, and overall company performance.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

The performance assesment system of the Board of Directors in 2024 referred to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance, and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and KBUMN Letter No. S-220/MBU/04/2023 dated April 19, 2023.

PROCEDURE OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT IMPLEMENTATION

The assessment of the Board of Directors' performance was carried out by the Board of Commissioners with the assistance of the Board of Commissioners' committee based on the Corporate KPI contained in the Management Contract between the Board of Directors and Shareholders.

Kontrak Manajemen tahun 2024 ditetapkan dan disetujui Pemegang Saham dalam RUPS RKAP Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024. Penilaian KPI dilakukan mengacu pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing variabel KPI maksimal sebesar 110%.

Selanjutnya, hasil pencapaian KPI Direksi kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham di dalam RUPS Tahunan. Melalui RUPS tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan capaian kinerja KPI Korporasi pada tahun operasional, dengan Direksi memiliki kewajiban untuk menjelaskan kaitan perolehan KPI dengan kondisi lapangan dan respons operasional yang diimplementasikan. Adapun di dalam forum itu, Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan selama tahun pelaporan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria penilaian kinerja Direksi terdiri atas *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual yang disusun sesuai dengan strategi serta fokus perusahaan di periode berjalan yang tertuang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

1. KPI Kolegial
   KPI Kolegial dijabarkan ke dalam lima program prioritas yaitu:
   a. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia yang mencakup aspek finansial dan sosial
   b. Inovasi Model Bisnis
   c. Kepemimpinan Teknologi
   d. Peningkatan Investasi
   e. Pengembangan Talenta.

   Masing-masing program prioritas terdiri dari beberapa KPI yang mencerminkan sasaran kinerja keuangan dan non-keuangan yang selaras dengan inisiatif strategis yang telah ditetapkan.

2. KPI Individual KPI Direksi secara individual disusun sesuai dengan tugas, fungsi pokok, dan tanggung jawab masing- masing anggota Direksi.

The 2024 Management Contract was determined and approved by Shareholders in the 2024 RKAP GMS on January 30, 2024. The KPI assessment was carried out referring to the measurement results carried out by the external auditor who audited the company's financial statements for the year in question, with the provision that the final realization of each KPI variable is a maximum of 110%.

Furthermore, the results of the Board of Directors' KPI achievement were then submitted to Shareholders in the Annual GMS. Through the GMS, the Board of Directors and the Board of Commissioners were accountable for the achievement of the Corporation's KPI performance in the operational year, with the Board of Directors having an obligation to explain the relationship between KPI achievement and field conditions and operational responses implemented. In this forum, the Board of Commissioners provided an explanation and was accountable for the supervisory and advisory aspects implemented during the reporting year.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA OF BOARD OF DIRECTORS

The performance assessment criteria for the Board of Directors consist of the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPIs) collegially and the Board of Directors' KPIs individually which are compiled in accordance with the company's strategy and focus in the current period as stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

1. Collegial KPI
   The Collegial KPI is described in five priority programs, namely:
   a. Economic and social value for Indonesia which includes financial and social aspects
   b. Business Model Innovation
   c. Technology Leadership
   d. Increased Investment
   e. Talent Development.

Each priority program consists of several KPIs that reflect financial and non-financial performance targets that are aligned with established strategic initiatives.

2. Individual KPIs The Board of Directors' KPIs are individually compiled in line with the duties, main functions, and responsibilities of each member of the Board of Directors.

KPI Direktur Utama merupakan KPI Kolegial Perseroan. KPI Individual Direksi selain Direktur Utama dijelaskan sebagai berikut.

KPI of the President Director represent the collegial KPIs of the Company. The individual KPIs for the members of the Board of Directors, excluding the President Director, are described as follows.

KPI Wakil Direktur Utama

KPI of the Vice President Director

No	KPI
A. KPI KOLEGIAL **A. COLLEGIAL KPI**	
1	EBITDA Konsolidasi Consolidated EBITDA
2	ROIC terhadap WACC BUJT ROIC to WACC BUJT
3	ROIC terhadap WACC Non BUJT ROIC to WACC Non BUJT
4	*Interest Bearing Debt to* EBITDA Konsolidasi Interest Bearing Debt to Consolidated EBITDA
5	*Cash Conversion Cycle* (CCC) Non BUJT
6	Project On Time & On Budget
7	*Order Book Burn Rate to Revenue*
8	*Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)
9	*Revenue from Focus & Champion Segment*
10	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Length of Constructed Toll Roads under the JTTS Development
11	Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Domestic Component Level (TKDN) Value
12	Mengkaji Kebutuhan Restrukturisasi dan/atau Melaksanakan Program Restrukturisasi Perusahaan Assessing the Need for and/or Implementing the Company Restructuring Program
13	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of the Risk Management Improvement Roadmap
14	Peningkatan Maturitas Penerapan ERP Enhancement of ERP Implementation Maturity
15	Implementasi Transformasi Digital Korporasi sesuai *Roadmap* & sesuai *Framework* INDI 4.0 Implementation of Corporate Digital Transformation in accordance with the Roadmap and INDI 4.0 Framework
16	Divestasi Divestment
17	Pencapaian KPI PMN Achievement of PMN KPI Targets
18	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent* Ratio of Young Top Talent (≤ 42 years old) within the Nominated Talent
19	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Ratio of Women within the Nominated Talent
20	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Fulfillment of Qualifications for Risk Management Officers
21	Implementasi Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Implementation of the Pension Fund Recovery Roadmap
B. KPI DIREKTORAT **B. DIRECTORATE KPI**	
1	Pencapaian *Key Activity* Proyek KPBU Achievement of Key Activities in Public-Private Partnership (PPP) Projects
2	Optimalisasi Asset Asset Optimization
3	Optimalisasi Portofolio Anak Perusahaan/ Afiliasi Optimization of Subsidiaries/Affiliates Portfolio
4	Kinerja Anak Perusahaan (EBITDA) Subsidiary Performance(EBITDA)

No	KPI
5	Sertifikasi Tenaga Ahli (PBI, QHSSE) Expert Certification (PBI, QHSSE)
6	Pelaksanaan verifikasi laporan emisi oleh badan verifikasi independen untuk lingkup KP dan JORR-S Verification of Emission Reports by Independent Verification Bodies for KP and JORR-S areas
7	*Sustainable Certificate* Sistem Manajemen Pengamanan Sustainable Certification of the Security Management System
8	*Sustainable Certificate* ISO 9K, 14K, 45K, 39K, PP 50 Sustainable Certifications for ISO 9001, 14001, 45001, 39001, and Government Regulation No. 50
9	Closing temuan / MTL tahun berjalan hasil audit eksternal yang sudah jatuh tempo Closure of Findings/Management Action Plans (MTL) from External Audits Due in the Current Year
10	Pelaksanaan Program TJSL mengacu pada 7 subjek inti Tahun 2024 Implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) Program based on the 7 Core Subjects in 2024
11	Integrasi BUMN Karya Integration of BUMN Karya

KPI Direktur Keuangan — KPI of the Finance Director

No	KPI
A. KPI BERSAMA **A. SHARED KPI**	
1	EBITDA Konsolidasi Consolidated EBITDA
2	ROIC terhadap WACC BUJT ROIC to WACC BUJT
3	ROIC terhadap WACC Non BUJT ROIC to WACC Non BUJT
4	*Interest Bearing Debt to* EBITDA Konsolidasi Interest-Bearing Debt to Consolidated EBITDA
5	*Cash Conversion Cycle* (CCC) Non BUJT
6	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Total Length of Toll Roads Constructed under the JTTS Development
7	Peningkatan Maturitas Penerapan ERP Enhancement of ERP Implementation Maturity
8	Implementasi Transformasi Digital Korporasi sesuai *Roadmap* & sesuai *Framework* INDI 4.0 Implementation of Corporate Digital Transformation according to the Roadmap and the INDI 4.0 Framework
9	Divestasi Divestment
10	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent* Ratio of Young Top Talent (≤ 42 years old) within Nominated Talent
11	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Ratio of Women within Nominated Talent
12	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Risiko Kualifikasi) Ratio of Fulfillment of Qualifications for Risk Management Officers
B. KPI DIREKTORAT **B. DIRECTORATE KPI**	
1	Pencairan Restitusi Pajak untuk Proyek JO (Pengendali) Disbursement of Tax Restitution for JO Projects (as the Controlling Entity)
2	Pengendalian BUKP Control of Non-Budgetary Company Expenditures (BUKP)
3	Pengendalian Cash (Kas/Setara Kas) Cash Management (Cash and Cash Equivalents)
4	Penyusunan RKAP Tepat Waktu Timely Preparation of the Annual Corporate Budget Plan (RKAP)
5	Penyusunan RJPP Preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP)

No	KPI
6	Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan Unit Bisnis Secara Periodik Periodic Evaluation of Business Unit Financial Performance
7	Pengajuan dan Pencairan PMN PMN Submission and Disbursement
8	Penyusunan Laporan Triwulan Progress Penggunaan PMN Preparation of Quarterly Reports on PMN Utilization Progress
9	Tidak Terjadi Risiko Gagal Bayar atas Penjaminan Pemerintah No Occurrence of Default Risk under Government Guarantees
10	Pemenuhan Covenant Kreditur Fulfillment of Creditor Covenants
11	Dukungan Pendanaan Induk Financial Support for the Parent Company
12	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Timely Submission of the Company's Financial Statements
13	Closing temuan/MTL tahun berjalan hasil audit internal dan eksternal yang sudah jatuh tempo Closure of Findings/Management Action Plans (MTL) from Internal and External Audits Due in the Current Year
14	Pelaporan Pajak Tahunan (setelah tutup buku) Submission of Annual Tax Report (Post-Year-End Closing)
15	Pemenuhan Target Rating Perusahaan Achievement of Targeted Corporate Credit Rating
16	Pemenuhan program pengembangan, pelatihan, sertifikasi Tenaga Ahli sesuai Kebutuhan Divisi dalam Direktorat Keuangan Fulfillment of Development, Training, and Certification Programs for Experts as Required by Divisions under the Finance Directorate
17	Mengkaji Kebutuhan Restrukturisasi dan/atau Melaksanakan Program Restrukturisasi Perusahaan (HKR) Assessment of the Need for and/or Implementation of the Corporate Restructuring Program (HKR)
18	Integrasi BUMN Karya Integration of BUMN Karya

KPI Direktur Manajemen Risiko — KPI of the Risk Management Director

No	KPI
A. KPI BERSAMA **A. SHARED KPI**	
1	EBITDA Konsolidasi Consolidated EBITDA
2	ROIC terhadap WACC BUJT ROIC to WACC BUJT
3	ROIC terhadap WACC Non BUJT ROIC to WACC Non BUJT
4	*Interest Bearing Debt to* EBITDA Konsolidasi Interest Bearing Debt to Consolidated EBITDA
5	*Cash Conversion Cycle* (CCC) Non BUJT
6	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Length of Toll Roads Constructed under the JTTS Development
7	Peningkatan Maturitas Penerapan ERP Enhancement of ERP Implementation Maturity
8	Implementasi Transformasi Digital Korporasi sesuai Roadmap & sesuai Framework INDI 4.0 Implementation of Corporate Digital Transformation according to the Roadmap and the INDI 4.0 Framework
9	Divestasi Divestment
10	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent* Ratio of Young Top Talent (≤ 42 years old) within Nominated Talent
11	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Ratio of Women within Nominated Talent
12	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Risiko Kualifikasi) Ratio of Fulfillment of Qualifications for Risk Management Officers

No	KPI
B. KPI DIREKTORAT **B. DIRECTORATE KPI**	
1	Tidak Terjadi *Lost Event* atas *Top Risk* Korporasi No Lost Events Occurred for the Company's Top Risks
2	Penyesuaian *Risk Management System* (RMS) sesuai Permen BUMN 2/2023 Adjustment of the Risk Management System (RMS) in accordance with SOE Regulation No. 2/2023
3	Pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI) Measurement of Risk Maturity Index (RMI)
4	Penetapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Establishment of Integrated Governance Guidelines
5	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of the Risk Management Improvement Roadmap
6	Integrasi dan Otomasi Proses Bisnis Integration and Automation of Business Processes
7	Pemenuhan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Fulfillment of Integrated Governance Reporting
8	Penilaian Kinerja Rekanan Evaluation of Partner Performance
9	Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pencapaian Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Commitment to Domestic Product Spending (PDN) and Achievement of the Domestic Component Level (TKDN)
10	Realisasi belanja PaDi UMKM Realization of PaDi MSME Spending
11	Skor Kepatuhan Sistem Manajemen Operasi Compliance Score for the Operations Management System
12	Kesesuaian Biaya Mitigasi Risiko Alignment of Risk Mitigation Costs
13	Pencapaian Nilai Eksposur Risiko sesuai target Risiko Residual Achievement of Risk Exposure Value in line with the Residual Risk Target
14	Closing temuan/MTL tahun berjalan hasil audit internal dan eksternal yang sudah Jatuh Tempo Closure of Findings/Management Action Plans (MTL) from Internal and External Audits Due in the Current Year
15	Pemenuhan Sertifikasi Tenaga Ahli sesuai Kebutuhan Divisi dalam Direktorat Manajemen Risiko Fulfillment of Expert Certification Requirements for Divisions within the Risk Management Directorate
16	Pengesahan *Contingency Plan* Approval of Contingency Plan
17	Integrasi BUMN Karya Integration of BUMN Karya

KPI Direktur Operasional I — KPI of Director of Operation I

No	KPI
A. KPI BERSAMA **A. SHARED KPI**	
1	EBITDA Konsolidasi Consolidated EBITDA
2	ROIC terhadap WACC BUJT ROIC to WACC BUJT
3	ROIC terhadap WACC Non BUJT ROIC to WACC Non BUJT
4	*Interest Bearing Debt to* EBITDA Konsolidasi Interest Bearing Debt to Consolidated EBITDA
5	*Cash Conversion Cycle* (CCC) Non BUJT
6	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Length of Toll Roads Constructed under the JTTS Development
7	Peningkatan Maturitas Penerapan ERP Enhancement of ERP Implementation Maturity

No	KPI
8	Implementasi Transformasi Digital Korporasi sesuai Roadmap & sesuai Framework INDI 4.0 Implementation of Corporate Digital Transformation according to the Roadmap and the INDI 4.0 Framework
9	Divestasi Divestment
10	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent* Ratio of Young Top Talent (≤ 42 years old) within Nominated Talent
11	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Ratio of Women within Nominated Talent
12	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Risiko Kualifikasi) Ratio of Fulfillment of Qualifications for Risk Management Officers
B. KPI DIREKTORAT **B. DIRECTORATE KPI**	
1	EAT (DSU)
2	Rasio Cash in Operasi terhadap Pendapatan (DSU) Cash Ratio from Operations to Revenue (DSU)
3	*Cash Conversion Cycle* (DSU)
4	Kontrak didapat (DSU) Contracts Won (DSU)
5	Pendapatan DSU (JO & NJO) DSU Revenue (JO & NJO)
6	*Revenue from Specialization* (Jalan dan Jembatan) Revenue from Specialization (Road and Bridge)
7	HPP (DSU, NJO) COGS (DSU, NJO)
8	Operasional: *on Time on Budget* (DSU) Operations: on Time on Budget (DSU)
9	*Order Book Burn Rate to Revenue* (DSU)
10	*Lost Time Injury Frequency Rate* (LTI-FR)
11	Pemenuhan *Zero Major Rework* Zero Major Rework Fulfillment
12	Closing temuan / MTL tahun berjalan hasil audit internal dan eksternal yang sudah jatuh tempo Closing Findings / MTL of Current Year from Internal and External Audits Due for Resolution
13	Penilaian Kinerja Rekanan Partner Performance Assessment
14	Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pencapaian Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Domestic Product Expenditure Commitment (PDN) and Domestic Component Level Achievement (TKDN)
15	*Hit Rate* Eksternal External Hit Rate
16	Realisasi belanja PaDi UMKM Realization of PaDi MSME Expenditure
17	Sertifikasi Tenaga Ahli (DSU) Certification of Expert Personnel (DSU)
18	*Customer Satisfaction Index* (CSI)
19	Integrasi BUMN Karya BUMN Karya Integration

KPI Direktur Operasional II — KPI's Director of Operations II

No	KPI
A. KPI BERSAMA **A. SHARED KPI**	
1	EBITDA Konsolidasi Consolidated EBITDA
2	ROIC terhadap WACC BUJT ROIC to WACC BUJT
3	ROIC terhadap WACC Non BUJT ROIC to WACC Non BUJT

No	KPI
4	*Interest Bearing Debt to* EBITDA Konsolidasi Interest Bearing Debt to Consolidated EBITDA
5	*Cash Conversion Cycle* (CCC) Non BUJT
6	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Length of Toll Roads Constructed under the JTTS Development
7	Peningkatan Maturitas Penerapan ERP Enhancement of ERP Implementation Maturity
8	Implementasi Transformasi Digital Korporasi sesuai *Roadmap* & sesuai *Framework* INDI 4.0 Implementation of Corporate Digital Transformation according to the Roadmap and the INDI 4.0 Framework
9	Divestasi Divestment
10	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent* Ratio of Young Top Talent (≤ 42 years old) within Nominated Talent
11	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Ratio of Women within Nominated Talent
12	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Risiko Kualifikasi) Ratio of Fulfillment of Qualifications for Risk Management Officers
B. KPI DIREKTORAT **B. DIRECTORATE KPI**	
1	EAT (EPC)
2	EAT (DG)
3	*Cash Conversion Cycle* (EPC)
4	*Cash Conversion Cycle* (DG)
5	Rasio *Cash-in* Operasi Terhadap Pendapatan (EPC, DG) Cash-in Ratio to Income (EPC, DG)
6	Kontrak Didapat (DG) Contracts Won (DG)
7	Pendapatan (NJO) Revenue (NJO)
8	HPP (EPC) COGS (EPC)
9	HPP (DG) COGS (DG)
10	Operasional: *on Time on Budget* (DG) Operations: on Time on Budget (DG)
11	Operasional: on Time on Budget (EPC) Periode Berjalan Operations: on Time on Budget (EPC) for Ongoing Period
12	Realisasi Klaim EPC EPC Claims Realization
13	*Order Book Burn Rate to Revenue* (DG) Order Book Burn Rate to Revenue (DG)
14	Penilaian Kinerja Rekanan Partner Performance Assessment
15	*Customer Satisfaction Index*
16	Pemenuhan *Zero Major Rework* Zero Major Rework Fulfillment
17	Komitmen Belanja PDN dan Pencapaian Nilai TKDN Domestic Product Expenditure Commitment (PDN) and Domestic Component Level Achievement (TKDN)
18	Realisasi belanja PaDi UMKM Realization of PaDi MSME Expenditure
19	*Closing* temuan / MTL tahun berjalan hasil audit internal dan eksternal yang telah jatuh tempo Closing Findings / MTL of Current Year from Internal and External Audits Due for Resolution
20	*Lost Time Injury Frequency Rate* (LTI-FR)
21	Sertifikasi Tenaga Ahli (EPC, DG) Certification of Expert Personnel (EPC, DG)
22	Integrasi BUMN Karya BUMN Karya Integration

KPI Direktur Operasional III

KPI's Director of Operations III

No	KPI
A. KPI BERSAMA **A. SHARED KPI**	
1	EBITDA Konsolidasi Consolidated EBITDA
2	ROIC terhadap WACC BUJT ROIC to WACC BUJT
3	ROIC terhadap WACC Non BUJT ROIC to WACC Non BUJT
4	*Interest Bearing Debt to* EBITDA Konsolidasi Interest Bearing Debt to Consolidated EBITDA
5	*Cash Conversion Cycle* (CCC) Non BUJT
6	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Length of Toll Roads Constructed under the JTTS Development
7	Peningkatan Maturitas Penerapan ERP Enhancement of ERP Implementation Maturity
8	Implementasi Transformasi Digital Korporasi sesuai *Roadmap* & sesuai *Framework* INDI 4.0 Implementation of Corporate Digital Transformation according to the Roadmap and the INDI 4.0 Framework
9	Divestasi Divestment
10	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent* Ratio of Young Top Talent (≤ 42 years old) within Nominated Talent
11	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Ratio of Women within Nominated Talent
12	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Risiko Kualifikasi) Ratio of Fulfillment of Qualifications for Risk Management Officers
B. KPI DIREKTORAT **B. DIRECTORATE KPI**	
1	Pengembalian DTT & COF DTT & COF Return
2	*Cash Flow Operation*
3	EBITDA Operation Operational EBITDA
4	Penyelesaian RTA Jalan Tol Toll Road RTA Completion
5	Dukungan data (skema bisnis) untuk mendapatkan PPJT Data Support (business scheme) for PPJT Acquisition
6	Operasional: *on Time on Budget* Operations: on Time on Budget
7	Pendapatan Revenue
8	HPP (%) OPT COGS (%) OPT
9	Pemenuhan SPM SPM Fulfillment
10	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Ruas Pacin Length of Toll Road Built in JTTS Development for Pacin Section
11	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Ruas Binsa Length of Toll Road Built in JTTS Development for Binsa Section
12	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Ruas Sibanceh Length of Toll Road Built in JTTS Development for Sibanceh Section
13	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Ruas Betujam Length of Toll Road Built in JTTS Development for Betujam Section
14	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Ruas Lingpek Length of Toll Road Built in JTTS Development for Lingpek Section
15	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Ruas Palembang-Betung Length of Toll Road Built in JTTS Development for Palembang-Betung Section

No	KPI
16	Seksi *(gate to gate)* yang telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari seluruh ruas JTTS Tahap I dan sebagian ruas JTTS Tahap II pada Tahun Berjalan Sections (gate to gate) that have obtained the Operational Feasibility Certificate (SLO) for all Toll Roads in JTTS Phase I and parts of JTTS Phase II in the Current Year
17	Penilaian Kinerja Rekanan Partner Performance Assessment
18	Pemenuhan *Zero Major Rework* Zero Major Rework Fulfillment
19	Closing temuan/MTL tahun berjalan hasil audit internal dan eksternal yang telah jatuh tempo Closing Findings / MTL of Current Year from Internal and External Audits Due for Resolution
20	Realisasi penyerapan Dana PMN Tahun Anggaran 2021 Tahap III, TA 2022 Tahap I & II dan TA 2023 Realization of PMN Fund Absorption for Fiscal Year 2021 Phase III, Fiscal Year 2022 Phase I & II, and Fiscal Year 2023
21	Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pencapaian Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Domestic Product Expenditure Commitment (PDN) and Domestic Component Level Achievement (TKDN)
22	Realisasi belanja PaDi UMKM Realization of PaDi MSME Expenditure
23	Tersedianya Kajian Kebutuhan Pendanaan untuk Kelanjutan Proyek JTTS Availability of Funding Needs Study for JTTS Project Continuation
24	Tersedianya Kajian Perencanaan Jalan Tol Availability of Toll Road Planning Study
25	Kenaikan Tarif Tol sesuai jadwal Toll Rate Increase as per Schedule
26	Sertifikasi Tenaga Ahli Certification of Expert Personnel
27	Customer Satisfaction Index (CSI)
28	Integrasi BUMN Karya BUMN Karya Integration

KPI Direktur Human Capital dan Legal

KPI of Director of Human Capital and Legal

No	KPI
A. KPI BERSAMA **A. SHARED KPI**	
1	EBITDA Konsolidasi Consolidated EBITDA
2	ROIC terhadap WACC BUJT ROIC to BUJT WACC
3	ROIC terhadap WACC Non BUJT ROIC to Non-BUJT WACC
4	*Interest Bearing Debt to* EBITDA Konsolidasi Interest Bearing Debt to Consolidated EBITDA
5	*Cash Conversion Cycle* (CCC) Non BUJT Non-BUJT Cash Conversion Cycle (CCC)
6	Panjang Tol Terbangun Pembangunan JTTS Length of Toll Road Built in JTTS Development
7	Peningkatan Maturitas Penerapan ERP ERP Implementation Maturity Improvement
8	Implementasi Transformasi Digital Korporasi sesuai *Roadmap* & sesuai *Framework* INDI 4.0 Corporate Digital Transformation Implementation according to Roadmap & INDI 4.0 Framework
9	Divestasi Divestment
10	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent* Ratio of Top Young Talent (≤ 42 years) in nominated talent
11	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Female Ratio in Nominated Talent
12	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Risiko Kualifikasi) Qualification Fulfillment Ratio of Risk Management Body (Risk Qualification)

No	KPI
B. KPI DIREKTORAT **B. DIRECTORATE KPI**	
1	Penerimaan atas penagihan piutang Perusahaan (non litigasi) Receivables Collection (Non-Litigation)
2	Nilai penyelamatan keuangan perusahaan yang berasal dari gugatan pihak lain (litigasi) The Company's Financial Recovery Value from other parties' lawsuits (Litigation)
3	Nilai keberhasilan VO, Klaim & Anti-Klaim Success Rate of VO, Claims & Anti-Claims
4	Pelaksanaan Internal Control proyek pada Divisi Operasi BUJK dan BUJT Internal Control Implementation on Projects in BUJK and BUJT Operations Division
5	Jumlah Pemenangan Perkara Hukum Number of Legal Case Wins
6	Laporan secara periodik progres penanganan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya kepada Pemegang Saham dalam Laporan Manajemen Triwulan dan Tahunan Periodic Reporting of Legal Case Progress of the Company and Subsidiaries to Shareholders in Quarterly and Annual Management Reports
7	*Lead Time* Legal Reviu dan Pendapat Hukum Lead Time for Legal Review and Legal Opinions
8	Pendampingan permasalahan hukum BUJT Legal Assistance for BUJT Issues
9	Pengurusan legalitas aset Perusahaan (Non-Litigasi) Legalization of Company Assets (Non-Litigation)
10	Closing temuan/MTL tahun berjalan hasil audit internal dan eksternal yang telah jatuh tempo Closing Findings / MTL of Current Year from Internal and External Audits Due for Resolution
11	Rekrutmen Pegawai Penyandang Disabilitas Recruitment of Employees with Disabilities
12	Tindak-Lanjut Rekomendasi Hasil HC *Maturity Assessment* Follow-Up on HC Maturity Assessment Recommendations
13	Pencapaian EBITDA *Per Person* Achievement of EBITDA Per Person
14	Partisipasi Program *Making Digital Talent* BUMN Participation in SOE Digital Talent Making Program
15	Implementasi AKHLAK *Culture Journey* Tahun 2024 Implementation of AKHLAK Culture Journey 2024
16	Pemenuhan data Portal HC BUMN lengkap dengan kualitas data yang diupload Fulfillment of SOE HC Portal data with complete and high-quality uploaded data
17	Nilai Survey *Employee Experience & Engagement* Survey Results of Engagement Employee Experience & Engagement
18	Implementasi Program Perputaran Talenta (Klaster atau lintas BUMN) IImplementation of Talent Rotation Program (Cluster or Cross-SOE)
19	Sertifikasi Keahlian dan Personil Inti Proyek (PIP) & KP Certification of Expertise and Core Project Personnel (PIP) & KP
20	Implementasi program Talent Management di Induk dan Anak-Anak Perusahaan (*Holding* dan *Subholding*) Implementation of Talent Management Program in Parent and Subsidiaries (Holding and Subholding)
21	Implementasi Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Implementation of the Pension Fund Restructuring Roadmap
22	Sertifikasi Bidang Human Capital dan Legal Certification in the Field of Human Capital and Legal
23	Integrasi BUMN Karya BUMN Karya Integration

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan individual dilaporkan dalam laporan berkala kepada Dewan Komisaris. Di sisi lain, perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN

THE PARTY CONDUCTING THE ASSESSMENT

The Board of Directors' KPI achievements, both collegially and individually, are reported in periodic reports to the Board of Commissioners. On the other hand, the calculation of the Board of Directors' KPI achievements, both collegially and individually, is reviewed by the Public Accounting Firm (KAP) that audits the company's financial statements to then be submitted to Shareholders, in this case the Ministry of SOEs.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS

No	Indikator Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Realisasi Realization (R)	Target (T)	Pencapaian Achievement (%)	Nilai Value	Pencapaian KPI KPI Achievement
A	**Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** Economics and Social Value for Indonesia							
	Finansial Financial							
1	EBITDA konsolidasi Consolidated EBITDA	6,00	Miliar	4.288	4.227	101,45%	101,45%	6,09
2	ROIC terhadap WACC BUJT ROIC to WACC BUJT	4,00	%	(3,94)	(4,34)	109,20%	109,20%	4,37
3	ROIC terhadap WACC Non BUJT ROIC to WACC Non BUJT	4,00	%	12,63	15,27	82,70%	82,70%	3,31
4	Interest bearing debt to EBITDA konsolidasi Interest Bearing Debt to Consolidated EBITDA	6,00	Kali	8,32	8,08	97,06%	97,06%	5,82
5	Cash Conversion Cycle (CCC) Non BUJT	4,00	Hari	2,10	2,67	121,32%	110,00%	4,40
	Operasional Operational							
6	Project on Time & on Budget	6,00	%	67,50	Minimal 62,50	108,00%	108,00%	6,48
7	Order Book Burn Rate to Revenue	4,00	%	42,85%	Minimal 59,00	72,62%	72,62%	2,90
8	Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	5,00	Koef	0,00	< 1,00	123005,22%	110,00%	5,50
9	Revenue from focus and champion segment	4,00	%	64,51%	Minimal 68,59	94,05%	94,05%	3,76
	Sosial Social							
10	Panjang tol terbangun pembangunan JTTS Length of toll road built for JTTS construction	4,00	km	91,01	Minimal 88,00	103,43%	103,43%	4,14
11	Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Domestic Component Level (TKDN) Value	4,00	%	73,17%	Minimal 62,10	110,00%	110,00%	4,40
Subjumlah Subtotal		51,00						51,17

No	Indikator Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Realisasi Realization (R)	Target (T)	Pencapaian Achievement (%)	Nilai Value	Pencapaian KPI KPI Achievement
B	**Inovasi Model Bisnis** **Business Model Innovation**							
1	Mengkaji kebutuhan restrukturisasi dan/ atau melaksanakan program restrukturisasi Perusahaan Reviewing restructuring needs and/or implementing the Company's restructuring program	7,00	%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	7,00
2	Implementasi roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko Implementation of the roadmap for improving risk management implementation	7,00	%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	7,00
	Subjumlah Subtotal	14,00						14,00
C	**Kepemimpinan Teknologi** **Technology Leadership**							
1	Peningkatan maturitas penerapan ERP Increasing the maturity of ERP implementation	5,00	%	133,33%	100,00	133,33%	110,00%	5,50
2	Implementasi transformasi digital korporasi sesuai roadmap & sesuai framework INDI 4.0 Implementation of corporate digital transformation according to the roadmap & according to the INDI 4.0 framework	5,00	%	97,91%	85,00	115,19%	110,00%	5,50
	Subjumlah Subtotal	10,00						11,00
D	**Peningkatan Investasi** **Increased Investment**							
1	Divestasi Divestment	4,00	Transaksi	1,00	1,00	100,00%	100,00%	4,00
2	Pencapaian KPI PMN PMN KPI Achievement	6,00	%	85,74%	100,00	85,74%	85,74%	5,13
	Subjumlah Subtotal	10,00						9,13
E	Pengembangan Talenta Talent Development							
1	Rasio top talent muda (≤42 tahun) dalam nominated talent Ratio of young top talent (≤42 years) in nominated talent	4,00	%	23,08%	30,77	75,00%	75,00%	3,00
2	Rasio perempuan dalam nominated talent Ratio of women in nominated talent	4,00	%	30,77%	30,77	100,00%	100,00%	4,00

No	Indikator Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Realisasi Realization (R)	Target (T)	Pencapaian Achievement (%)	Nilai Value	Pencapaian KPI KPI Achievement
3	Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko Ratio of qualification fulfillment of risk management organs	3,00	%	37,10%	90,00	109,43%	109,43%	3,28
4	Implementasi roadmap penyehatan dana pensiun Implementation of pension fund health roadmap	4,00	%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	4,00
	Subjumlah Subtotal				15,00			14,28
	Jumlah Total				**100,00**			**99,58**

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Pencapaian Rencana Kerja Dewan Komisaris Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan melalui penyampaian kinerja Dewan Komisaris yang tertuang di dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Berdasarkan laporan tersebut, RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun. Sebagai bagian dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang selaras dengan Peraturan Menteri Negara BUMN PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris pada awal tahun telah menyusun rencana kerja tahunan Dewan komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan rencana

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

PROCEDURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT IMPLEMENTATION

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out through a self-assessment method on the performance of the Board of Commissioners and reported to Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA OF BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners Performance Assessment is based on the Achievement of the Board of Commissioners Work Plan. The Board of Commissioners Performance Assessment is carried out collegially and reported to Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) through the submission of the Board of Commissioners' performance as stated in the Board of Commissioners' Supervisory Report. Based on the report, the GMS then provides full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Commissioners for the supervisory actions carried out in the Financial Year ending at the end of the year. As part of the implementation of Good Corporate Governance in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, at the beginning of the year the Board of Commissioners has prepared an annual work plan for the Board of Commissioners which is an inseparable part of the Company's Work Plan and

kerja, Dewan Komisaris selanjutnya melakukan penilaian kinerja mereka secara kolegial. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bagaimana Dewan Komisaris telah berkinerja selama Tahun Buku dengan menggunakan metode penilaian sendiri *(self-assessment).*

Penilaian kinerja secara kolegial dilakukan melalui pengukuran ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) kolegial Tahunan Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan pada awal tahun. KPI kolegial Dewan Komisaris Tahun 2024 yang disusun dan ditetapkan di awal tahun oleh Dewan Komisaris, terbagi dalam 3 aspek dengan masing-masing bobot sebagai berikut:

1. Aspek pengawasan dan pemberian nasehat, dengan bobot sebesar 55%;
2. Aspek pelaporan, dengan bobot 30%; dan
3. Aspek dinamis, dengan bobot 15%.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2024 dengan menggunakan metode penilaian sendiri (*self assessment*) dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Budget (RKAP). To evaluate the implementation of the work plan, the Board of Commissioners then conducts a collegial assessment of their performance. This assessment aims to ensure how the Board of Commissioners has performed during the Financial Year using a self-assessment method.

Collegial performance assessment is carried out through measuring the achievement of the Annual Collegial Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners which has been prepared and determined at the beginning of the year. The 2024 Collegial KPI of the Board of Commissioners which was prepared and determined at the beginning of the year by the Board of Commissioners, is divided into 3 aspects with each weight as follows:

1. Supervision and advice aspects, with a weighting of 55%;
2. Reporting aspect, with a weighting of 30%; and
3. Dynamic aspect, with a weight of 15%.

THE PARTY CONDUCTING THE ASSESSMENT

The Board of Commissioners assessed the performance of the Board of Commissioners during 2024 using a self-assessment method and reported it to Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

RESULTS OF BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

Program Kerja Work Program	**Target**	**Bobot** Weight	**Realisasi** Realization	**Nilai** Value
Aspek Pengawasan dan Pengarahan Supervision and Direction Aspects		55		55
Reviu/anaisis kinerja Perusahaan Company performance review/analysis	11	20	10	20
Evaluasi Laporan Kinerja Audited Tahun 2023 Evaluation of Audited Performance Report 2023	1 Dokumen Document	3	1 Dokumen Document	3
Telaah RKAP 2025 RKAP 2025 Review	1 Dokumen Document	3	1 Dokumen Document	3
Evaluasi Pelaksanaan RKAP 2024 Evaluation of the Implementation of RKAP 2024	3 Dokumen Document	4	3 Dokumen Document	4
Pengawasan dan pemberian nasihat Kinerja Direksi dan pelaporan kepada pemegang saham Supervision and advising of the Board of Directors' performance and reporting to shareholders	2 Dokumen Document	4	2 Dokumen Document	4
Perubahan Lingkungan Bisnis/gejala menurunnya kinerja Changes in the Business Environment/Signs of declining performance	1 Dokumen Document	2	1 Dokumen Document	2
Tindaklanjut atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan Follow up on suggestions, expectations, problems and complaints from stakeholders	1 Dokumen Document	2	1 Dokumen Document	2
Penilaian kinerja Anak Perusahaan Subsidiary Performance Assessment	1 Dokumen Document	2	1 Dokumen Document	2

Program Kerja Work Program	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Nilai Value
Pengawasan dan Pemberian nasihat atas: Supervision and Providing advice on:	12	15	21	15
Kebijakan rancangan SPI SPI draft policy	1 Dokumen Document	1	3 Dokumen Document	1
Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy	1 Dokumen Document	2	3 Dokumen Document	2
Kebijakan Sistem TI IT System Policy	1 Dokumen Document	1	1 Dokumen Document	1
Kebijakan Akuntansi dan penyusunan LK Accounting Policy and preparation of LK	1 Dokumen Document	3	1 Dokumen Document	3
Kebijakan Pengelolaan SDM Human Resource Management Policy	1 Dokumen Document	1	1 Dokumen Document	1
Kebijakan PPBJ PPBJ Policy	1 Dokumen Document	1	1 Dokumen Document	1
Kebijakan Mutu dan Pelayanan Quality and Service Policy	1 Dokumen Document	1	3 Dokumen Document	1
Kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Company compliance with the Law	1 Dokumen Document	2	5 Dokumen Document	2
Transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS Transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners or GMS	1 Dokumen Document	2	1 Dokumen Document	2
Kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan Subsidiary/joint venture management policy	1 Dokumen Document	1	1 Dokumen Document	1
Kebijakan penerapan prinsip GCG GCG principle implementation policy	1 Dokumen Document	1	1 Dokumen Document	1
Pemantauan Temuan Audit Audit Findings Monitoring	2	5	3	5
Penunjukan KAP Appointment of KAP	1 Dokumen Document	2,5	1 Dokumen Document	2,5
Pengawasan dan efektivitas KAP Oversight and effectiveness of KAP	1 Dokumen Document	2,5	1 Dokumen Document	2,5
Monitoring Proyek Project Monitoring	3	5	3	5
Rapat Meeting	32	10	57	10
Internal Internal	24 Kegiatan	5	24 Kegiatan	5
Gabungan dengan Direksi Joint meeting with the Board of Directors	8 Kegiatan	5	16 Kegiatan	5
Aspek Pelaporan Reporting Aspects		30	1 Dokumen Document	30
Program kerja tahunan Dewan Komisaris tahun 2024 Board of Commissioners' annual work program for 2024	1	10	4 Dokumen Document	10
Laporan/pendapat dan saran kepada RUPS Reports/opinions and suggestions to the GMS	5	10	5	10
Pemantauan Kinerja Direksi Monitoring of Board of Directors Performance	4 Dokumen Document	5	4 Dokumen Document	5
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration of the Board of Commissioners and Directors	1 Dokumen Document	5	1 Dokumen Document	5
Laporan tugas pengawasan tahunan Report of Annual supervisory task	2	10	2 Dokumen Document	10
Aspek Dinamis/Lain-lain Dynamic Aspects/Others		15		15

Program Kerja Work Program	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Nilai Value
Peningkatan Kompetensi Competency Development	5	5	8	5
Program pengembangan kompetensi seminar, diklat dan sejenisnya Competency development programs, seminars, training and others	4x	2,5	7x	2,5
Studi banding Dewan Komisaris Comparative study of the Board of Commissioners	1x	2,5	1x	2,5
Rekomendasi atas usulan yang disampaikan Direksi Recommendations on proposals submitted by the Board of Directors	100%	10	100%	10
Total Nilai KPI Total KPI Score		100		100

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Masing-masing kegiatan/aktivitas dalam Program Kerja Komite di bawah Dewan Komisaris dirumuskan kuantitasnya. Kuantitas tersebut yang menjadi tolok ukur capaian kinerja Komite Komite di bawah Dewan Komisaris. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara tahunan oleh Dewan Komisaris. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan realisasi kegiatan atas program kerja tahunan masing-masing Komite. Sepanjang Tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BASIS FOR ASSESSMENT

Each activity in the Committee Work Program under the Board of Commissioners is formulated in terms of quantity. This quantity is the benchmark for the achievement of the Committee's performance under the Board of Commissioners. The performance assessment procedure of the Committee under the Board of Commissioners is carried out annually by the Board of Commissioners. The criteria for assessing the performance of the Committees under the Board of Commissioners is based on the realization of activities on the annual work program of each Committee. Throughout 2024, the Board of Commissioners assessed that the performance of the Committee under the Board of Commissioners has been run well.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diatur sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
4. Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
   a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
   b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara.
   d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
   e. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara.
   f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS/Menteri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris BUMN berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

MECHANISM FOR DISMISSAL AND RESIGNATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dismissal of the Board of Commissioners

1. The dismissal of the Board of Commissioners is carried out by the GMS.
2. Dismissal of members of the Board of Commissioners is regulated in the Company's Articles of Association.
3. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on a decision of the GMS by stating the reasons.
4. Dismissal may be carried out at any time if the member of the Board of Commissioners concerned:
   a. Cannot carry out his/her duties properly.
   b. Does not implement the provisions of laws and/or articles of association.
   c. Is involved in actions that are detrimental to state-owned enterprises and/or state finances.
   d. Carries out actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of a SOE.
   e. Has been named a suspect or defendant by the authorities in an action that is detrimental to an SOE and/or state finances.
   f. Is declared guilty by a court decision that has permanent legal force.
5. In addition to the reasons for dismissing members of the Board of Commissioners above, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the Minister or the GMS based on other reasons deemed appropriate by the Minister or the GMS for the interests and objectives of the Company.

The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:

1. Dies.
2. His term of office ends.
3. Dismissed based on GMS/Minister.
4. No longer fulfilling the requirements as a Member of the Board of Commissioners of an SOE based on the provisions of the Articles of Association and laws and regulations, including prohibited dual positions.

Pengunduran Diri Dewan Komisaris

1. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari iabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga pluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetuiuan RUPS.
3. Dewan Komisaris yang terlibat dalam keiahatan keuangan dapat melakukan pengunduran diri demi membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu ialannya kegiatan usaha. Selaniutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam keiahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Keiahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan iasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Resignation of the Board of Commissioners

1. A Member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her position by notifying the Company in writing of his/her intention with a copy to the Shareholders, other Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. If the letter of resignation states an effective date of less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is deemed not to have stated the effective date of the resignation.
2. If by the date requested by the member of the Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of resignation request is received in the event that the effective date of resignation is not stated, there is no decision from the GMS, then the member of the Board of Commissioners concerned will automatically resign on the date requested above or upon the expiration of 30 (thirty) days from the date the letter of resignation request is received without requiring the approval of the GMS.
3. The Board of Commissioners involved in financial matters may resign in order to help smooth the legal process so that the legal process does not interfere with the running of business activities. Furthermore, what is meant by being involved in financial matters is the existence of a convict status against a member of the Board of Commissioners from the authorized party. The financial matters referred to include manipulation and various forms of embezzlement in financial matters and Criminal Acts of Money Laundering as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of The Board of Directors And Board of Commissioners

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR NOMINASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), PT Hutama Karya (Persero) senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel, dan sesuai strategi Perseroan serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

KEBIJAKAN NOMINASI

Kebijakan nominasi di PT Hutama Karya (Persero) didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kompetensi: Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang usaha perusahaan.

2. Integritas: Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Independensi: Anggota Dewan Komisaris harus memiliki independensi yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasannya.
4. Transparansi: Seluruh proses nominasi dilakukan secara terbuka dan transparan.
5. Akuntabilitas: Setiap keputusan yang diambil dalam proses nominasi dapat dipertanggungjawabkan.

PROSES NOMINASI

Proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris di lingkungan PT Hutama Karya (Persero) secara garis besar meliputi tahapan sebagai berikut:

Penjaringan Calon: Penjaringan calon dilakukan baik dari Talenta Kementerian BUMN, Talenta BUMN (Internal), maupun Talenta Eksternal.

1. Seleksi Awal: Calon yang memenuhi persyaratan administrasi akan diseleksi berdasarkan kualifikasi dan pengalaman dari Talenta Internal Perusahaan.
2. Asesmen: Terhadap Calon/Talenta Internal Perusahaan yang memenuhi persyaratan (*eligible talent*) dilakukan Asesmen berupa penilaian atas pemenuhan terhadap syarat

POLICY AND PROCEDURE FOR NOMINATION OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

In order to realize good corporate governance, PT Hutama Karya (Persero) is always committed to carrying out a nomination process for members of the Board of Directors and Board of Commissioners that is transparent, accountable, and in accordance with the Company's strategy and with applicable laws and regulations, especially the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

NOMINATION POLICY

The nomination policy at PT Hutama Karya (Persero) is based on the following principles:

1. Competence: Prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners must have competencies relevant to the company's business field.
2. Integrity: Prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners must have high integrity and be free from conflicts of interest.
3. Independence: Members of the Board of Commissioners must have strong independence in carrying out their supervisory duties.
4. Transparency: The entire nomination process is conducted openly and transparently.
5. Accountability: Every decision taken in the nomination process can be accounted for.

NOMINATION PROCESS

The nomination process for members of the Board of Directors and Board of Commissioners at PT Hutama Karya (Persero) broadly includes the following stages:

Candidate Recruitment: Candidate recruitment is carried out from both the Ministry of SOEs Talent, SOEs Talent (Internal), and External Talent.

1. Initial Selection: Candidates who meet the administrative requirements will be selected based on qualifications and experience from the Company's Internal Talent.
2. Assessment: Internal Company Candidates/Talents who meet the requirements (eligible talent) are assessed in the form of an assessment of fulfillment of material requirements through

materiil melalui penilaian standar kompetensi, kualifikasi professional (*professional qualification*), dan karakter (*traits*).
3. Evaluasi dan Pembahasan: Hasil asesmen akan dievaluasi dan dibahas oleh Tim Penilai yang independen di Level Direksi dan Dewan Komisaris (Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hutama Karya (Persero)).

4. Direktur *Human Capital* & Legal sebagai anggota Direksi BUMN yang membidangi fungsi sumber daya manusia pada PT Hutama Karya (Persero) bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis sistem Manajemen Talenta BUMN di PT Hutama Karya (Persero).
5. Penetapan Calon: Terhadap Calon/Talenta Internal Perusahaan yang memenuhi kriteria (*Nominated Talent*) akan diajukan oleh Perusahaan melalui Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) kepada Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan.
6. Pengangkatan: Setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham akan mengangkat calon yang terpilih.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Hutama Karya memiliki kebijakan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup mulai dari prosedur pengusulan hingga dengan penetapan remunerasi. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:
1. Besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

2. Besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
3. Penetapan remunerasi Direksi dilakukan oleh RUPS/Menteri setiap tahun.

an assessment of competency standards, professional qualifications, and character (traits).
3. Evaluation and Discussion: The assessment results will be evaluated and discussed by an independent Assessment Team at the Board of Directors and Board of Commissioners Level (Nomination and Remuneration Committee of PT Hutama Karya (Persero)).
4. Director of Human Capital & Legal as a member of the SOEs Board of Directors who oversees the human resources function at PT Hutama Karya (Persero) is responsible for the technical implementation of the SOE Talent Management system at PT Hutama Karya (Persero).
5. Determination of Candidates: Internal Company Candidates/Talents who meet the criteria (Nominated Talent) will be submitted by the Company through the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) to the Minister of SOEs as the Company's General Meeting of Shareholders to obtain approval.
6. Appointment: After obtaining approval from the Company's General Meeting of Shareholders, the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders will appoint the selected candidate.

POLICY AND PROCEDURES OF REMUNERATION DETERMINATION

Hutama Karya has a policy for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors which includes from the proposal procedure to determining the remuneration. The procedures are as follows:
1. The amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors has been regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOEs Organs and Human Resources.
2. The amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors is proposed by the Board of Commissioners to Shareholders.
3. The determination of the Board of Directors' remuneration is carried out by the GMS/Minister every year.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Sesuai dengan BOC *Charter*, indikator penetapan atas remunerasi bagi Dewan Komisaris mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Skala usaha.
2. Kompleksitas usaha.
3. Tingkat inflasi.
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta kinerja jangka panjang Perseroan.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, termasuk tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis.
6. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bonus Kinerja

Dewan Komisaris dan Direksi juga menerima bonus kinerja berupa tantiem atau insentif kinerja yang bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, KPI, tingkat kesehatan Perseroan, dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan *(merit system)* yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/ KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan struktur Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN adalah sebagai berikut:

REMUNERATION DETERMINATION INDICATORS

Based on the Board Manual for the Board of Commissioners, the indicators for determining remuneration for the Board of Commissioners take into account the following matters:

1. Business scale.
2. Business complexity.
3. Inflation rate.
4. The Company's financial condition and capability as well as the Company's long-term performance.
5. Other relevant factors, including prevailing earnings levels in the industry.
6. Must not conflict with statutory regulations.

Performance Bonus

The Board of Commissioners and Directors also receive performance bonuses in the form of bonuses or variable performance incentives, carried out by considering factors such as target achievement, KPI, the Company's soundness level, and financial capabilities, as well as other relevant factors (merit system) that are generally applicable in similar industries.

STRUCTURE AND NOMINAL AMOUNT/ COMPONENTS OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The determination of the remuneration structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama. Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Direktur Utama. The honorarium for the President Commissioner is set at 45% of the honorarium of the President Director. The honorarium for the Vice President Commissioner is set at 42.5% of the honorarium of the President Director. The honorarium for each Member of the Board of Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Director.	Gaji Direktur Utama sebesar 100% Wakil Direktur Utama sebesar 90% Anggota Direksi sebesar 85% The salary of the President Director is set at 100%. The salary of the Vice President Director is set at 90%. The salary of each Member of the Board of Directors is set at 85%.
Tunjangan | Allowances: Tunjangan hari raya Tunjangan transportasi Asuransi purna jabatan Religious Holiday Allowance Transportation Allowance Post-Employment Insurance	**Tunjangan** | Allowances: Tunjangan hari raya. Tunjangan perumahan Asuransi purna jabatan Religious Holiday Allowance Housing Allowance Post-Employment Insurance

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas | Facilities: Fasilitas Kesehatan Fasilitas bantuan hukum Health Facilities Legal Assistance Facilities	**Fasilitas** | Facilities: Fasilitas Kendaraan Fasilitas Kesehatan Fasilitas bantuan hukum Vehicle Facilities Health Facilities Legal Assistance Facilities
Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus/Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive) Tantiem/Work Incentives/Special Incentives / Long Term Incentives	Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus/Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive) Tantiem/Work Incentives/Special Incentives/Long Term Incentives

Remunerasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, jumlah remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Board of Commissioners

In 2024, the amount of remuneration for the Board of Commissioners was as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Jabatan** Position	**Penghasilan per Bulan** Income per Month		**Jumlah Penghasilan per Bulan** Total Income per Month	**Jumlah Penghasilan per Tahun** Total Income per Year	**Tunjangan Hari Raya** Hari Raya Alowance
		Honorarium Honorarium	**Tunjangan Transport** Transportation Allowance			
		(Rp)	**(Rp)**	**(Rp)**	**(Rp)**	**(Rp)**
Budiman*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	137,250,000	27,450,000	164,700,000	164,700,000	-
Yudo Margono**	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	137,250,000	27,450,000	164,700,000	1,811,700,000	137,250,000
H. Muhammad Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	129,625,000	25,925,000	155,550,000	1,866,600,000	129,625,000
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	123,525,000	24,705,000	148,230,000	1,778,760,000	123,525,000
R. Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	123,525,000	24,705,000	148,230,000	1,778,760,000	123,525,000
Chairiah	Komisaris Commissioner	123,525,000	24,705,000	148,230,000	1,778,760,000	123,525,000

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jabatan Position	Penghasilan per Bulan Income per Month: Honorarium Honorarium (Rp)	Penghasilan per Bulan Income per Month: Tunjangan Transport Transportation Allowance (Rp)	Jumlah Penghasilan per Bulan Total Income per Month (Rp)	Jumlah Penghasilan per Tahun Total Income per Year (Rp)	Tunjangan Hari Raya Hari Raya Alowance (Rp)
Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	123,525,000	24,705,000	148,230,000	1,778,760,000	123,525,000
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	123,525,000	24,705,000	148,230,000	1,778,760,000	123,525,000

*Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
**Mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
*Resigned from office on January 31, 2024
**Started serving from January 31, 2024

Remunerasi Direksi

Pada tahun 2024, jumlah remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

Remuneration for Board of Directors

In 2024, the amount of remuneration for the Board of Directors was as follows:

Direksi Directors	Jabatan Position	Penghasilan per Bulan Income per Month: Honorarium Honorarium (Rp)	Penghasilan per Bulan Income per Month: Tunjangan Perumahan Housing Allowance (Rp)	Jumlah Penghasilan per Bulan Total Income per Month (Rp)	Jumlah Penghasilan per Tahun Total Income per Year (Rp)	Tunjangan Hari Raya Hari Raya Alowance (Rp.)
Budi Harto	Direktur Utama President Director	305,000,000	27,500,000	332,500,000	3,990,000,000	305,000,000
Aloysius K. Ro*	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	264,600,000	27,500,000	292,100,000	3,213,100,000	-
Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan Director of Finance	259,250,000	27,500,000	286,750,000	3,441,000,000	259,250,000
Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Operational Director I	259,250,000	27,500,000	286,750,000	3,441,000,000	259,250,000
Gunadi	Direktur Operasi II Operational Director II	259,250,000	27,500,000	286,750,000	3,441,000,000	259,250,000
Koentjoro	Direktur Operasi III Operational Director III	259,250,000	27,500,000	286,750,000	3,441,000,000	259,250,000
M. Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal	259,250,000	27,500,000	286,750,000	3,441,000,000	259,250,000
Sugiarti**	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	259,250,000	27,500,000	286,750,000	2,580,750,000	259,250,000

* Menyelesaikan masa jabatannya pada 17 Februari 2024
**Mulai menjabat sejak 15 Maret 2024
* Completes his term of office on February 17, 2024
**Started serving from March 15, 2024

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Directors and Board of Commissioners Diversity Policy

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Perseroan telah mengatur terkait dengan keberagaman komposisi Direksi pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Anggota Direksi dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi yang mewakili komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman yang meliputi keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan.

DIVERSITY OF THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The Company has regulated the diversity of the composition of the Board of Directors in the Guidelines and Work Rules of the Board of Directors. Members of the Board of Directors are selected and appointed in such a way that the composition of the Board of Directors represents the commitment, knowledge, ability, experience and expertise needed to properly fulfill the management role of the Board of Directors. Determination of the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity that includes the expertise, knowledge and experience needed by the Company.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Table of Board of Directors Composition Diversity

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Employment History	**Keahlian** Skill
Budi Harto	Direktur Utama President Director	65 tahun 65 year old	Pria Male	• Sarjana Teknik Sipil • Magister Manajemen • Magister Psikologi Industri • Bachelor of Civil Engineering • Master of Management • Master of Industrial Psychology	Memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur pada PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya Having employment history as Director at PT Wijaya Karya and PT Adhi Karya	Teknik Sipil, Manajemen, Psikologi Industri
Aloysius Kiik Ro*	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	63 tahun 63 year old	Pria Male	• Sarjana Akuntansi • Master of Business • Doctor Finance • Bachelor of Accounting • Master of Business • Doctor of Finance	Memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur PT Danareksa dan Komisaris PT PLN Having employment history as Director at PT Danareksa and Commissioner at PT PLN	Akuntansi, Business Administration, Finance

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Employment History	Keahlian Skill
Agung Fajarwanto	Direktur Operasi I Operational Director I	51 tahun 51 year old	Pria Male	• Sarjana Teknik Sipil • Master of Business Administration • Bachelor of Civil Engineering • Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di Hutama Karya Having employment history at Hutama Karya	Teknik Sipil, Business Administration
Gunadi	Direktur Operasi II Operational Director II	56 tahun 56 year old	Pria Male	• Sarjana Teknik Sipil • Magister Manajemen • Bachelor of Civil Engineering • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di Hutama Karya Having employment history at Hutama Karya	Teknik Sipil, Manajemen
Koentjoro	Direktur Operasi III Operational Director III	54 tahun 54 year old	Pria Male	• Sarjana Teknik Sipil • Magister Manajemen • Bachelor of Civil Engineering Bisnis • Master of Business Management	Memiliki pengalaman kerja di Hutama Karya dan Waskita Karya Having employment history at Hutama Karya and Waskita Karya	Teknik Sipil, Manajemen
Eka Setya Adrianto	Direktur Keuangan Director of Finance	40 tahun 40 year old	Pria Male	• Sarjana Akuntansi • Magister Manajemen • Bachelor of Accounting • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di Jasa Marga Having employment history at Jasa Marga	Akuntansi
Muhammad Fauzan	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal	51 tahun 51 year old	Pria Male	• Sarjana Teknik Sipil • Magister Manajemen Keuangan • Doktor Manajemen Teknologi • Bachelor of Civil Engineering • Master of Financial Management • Doctoral in Technology Management	Memiliki pengalaman kerja di Hutama Karya Having employment history at Hutama Karya	Teknik Sipil, Manajemen Keuangan
Sugiarti**	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	60 tahun 60 year old	Wanita Female	• Sarjana Ekonomi • Magister Manajemen • Bachelor of Economics • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di Bank Rakyat Indonesia, Perum Perhutani dan Hutama Karya Having employment history at Bank Rakyat Indonesia, Perum Perhutani and Hutama Karya	Manajemen Risiko Risk Management

* Menyelesaikan masa jabatannya pada 17 Februari 2024
**Mulai menjabat sejak 15 Maret 2024
* Completes his term of office on February 17, 2024
**Started serving from March 15, 2024

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Perseroan telah mengatur terkait dengan keberagaman komposisi Dewan Komisaris pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Dewan Komisaris adalah beragam dan terdiri dari para Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengawasan Dewan Komisaris. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman yang meliputi keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perusahaan.

DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

The Company has regulated the diversity of the composition of the Board of Commissioners in the Guidelines and Work Rules of the Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners are selected and appointed in such a way that the composition of the Board of Commissioners is diverse and consists of Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience and expertise needed to properly fulfill the supervisory role of the Board of Commissioners. Determination of the composition of the members of the Board of Commissioners takes into account the diversity that includes the expertise, knowledge and experience needed by the Company.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Table of Board of Commissioners Composition Diversity

Nama Name	**Jabatan** Age	**Usia** Gender	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Educational	**Pengalaman Kerja** Work Experience	**Keahlian** Expertise
Budiman*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	68 tahun 68 year old	Pria Male	• Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia • Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat • Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia • Lembaga Ketahanan Nasional RI • Indonesian Armed Forces Academy • Army Staff and Command College • Indonesian National Army Staff and Command College • National Resilience Institute of the Republic of Indonesia	Memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala Staf TNI AD dan Komisaris PT PLN Having employment history as Chief of Staff of the Indonesian Army and Commissioner of PT PLN	Pertahanan dan keamanan Defense and security

Nama Name	Jabatan Age	Usia Gender	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Educational	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Yudo Margono**	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently as Independent Commissioner	59 tahun 59 year old	Pria Male	• Sarjana Manajemen • Magister Manajemen • Magister Terapan Operasi Laut • Bachelor of Management • Master of Management • Applied Master of Marine Operations	Memiliki pengalaman kerja sebagai panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut Having employment history as TNI Commander and Chief of Naval Staff	Manajemen dan Pertahanan & Keamanan Management and Defense & Security
Lukman Edy	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	54 tahun 54 year old	Pria Male	• Sarjana Teknik Sipil • Master Administrasi Pembangunan • Doktor Sosiologi dan Antropologi • Bachelor of Civil Engineering • Master of Development Administration • Doctor of Sociology and Anthropology	Memiliki pengalaman kerja sebagai Anggota MPR dan anggota DPR Having employment history as a member of the MPR and member of the DPR	Teknik Sipil, Administrasi Pembagunan, sosiologi dan antropologi Civil Engineering, Development Administration, Sociology and Anthropology
Agung Sabar Santoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	62 tahun 62 year old	Pria Male	• Dikpol AKABRI • PTIK • SESPIMEN • SESPIMTI • LEMHANAS	Memiliki pengalaman kerja di Kepolisian RI Having employment history in the Indonesian Police	Pertahanan dan keamanan Defense and security
Wahyu Muryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	60 tahun 60 year old	Pria Male	• Sarjana Ekonomi • Magister Manajemen • Bachelor of Economics • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di PT Tempo Inti media Having employment history at PT Tempo Inti media	Ekonomi, Manajemen Economics, Management

Nama Name	**Jabatan** Age	**Usia** Gender	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Educational	**Pengalaman Kerja** Work Experience	**Keahlian** Expertise
Chairiah	Komisaris Commissioner	59 tahun 59 year old	Wanita Female	• Sarjana Teknologi Industri Pertanian • Magister Business Administration • Bachelor of Agricultural Industrial Technology • Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian BUMN Having employment history in the Ministry of SOEs	*Business Adminsitration* Business Adminsitration
Susdiyarto Agus Praptono	Komisaris Commissioner	65 tahun 65 year old	Pria Male	• Sarjana Hukum • Master Hukum • Bachelor of Law • Master of Law	Memiliki pengalaman kerja di Kejaksaan Agung Having employment history at the Attorney General's Office	Hukum Law
Iwan Suprijanto	Komisaris Commissioner	53 tahun 53 year old	Pria Male	• Sarjana Teknik Arsitektur • Magister Teknik Arsitektur • Insinyur Program Profesi Insinyur • Bachelor of Architectural Engineering • Master of Architectural Engineering • Engineer of Engineering Professional Program	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Having employment history in the Ministry of Public Works and Public Housing	Teknik Arsitektur Architectural Engineering

*Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
**Mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2024
*Resigned from office on January 31, 2024
**Started serving from January 31, 2024

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
Organs and Committees Under The Board of Commissioners

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.
2. Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu dewan Komisaris dalam melakukan tugasnya berupa:

    a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat *(briefing sheet)* Dewan Komisaris.

    b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

    c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuh surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.

    d. Menyusun Rancangan Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
    e. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.
    f. Melakukan tugas lain dari Dewan Komisaris.

3. Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan sekretariat, melakukan tugas lain berupa:

    a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
    b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
    c. Mengkoordinasikan anggota komite, iika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
    d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Commissioners has a Secretary to the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners.
2. The Secretary of the Board of Commissioners is tasked with activities to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties in the form of:
    a. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners.
    b. Preparing minutes of the Board of Commissioners' meetings in accordance with the provisions of the Company's articles of association.
    c. Administering Board of Commissioners documents, including incoming and outgoing letters, meeting minutes and other documents.
    d. Drafting the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners.
    e. Drafting of the Board of Commissioners' Reports.
    f. Performing other duties from the Board of Commissioners.
3. The Secretary of the Board of Commissioners as the head of the secretariat, carries out other duties in the form of:
    a. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and implements GCG principles.
    b. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested.
    c. Coordinating committee members, if necessary, in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners.
    d. Becoming a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.

4. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
   b. Menyelenggrakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
   c. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris. (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan. (c) Dukungan administrasi serta *Monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
   d. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
5. Sekretariat Dewan Komisaris melakukan tugas administrasi dan penyimpanan dokumen berupa:
   a. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Dewan Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.
   b. Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.
6. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

4. The main duties and functions of the Secretary to the Board of Commissioners are to assist the Board of Commissioners in the field of secretarial activities, including at least the following:
   a. Organizing secretarial administration activities within the Board of Commissioners.
   b. Organizing Board of Commissioners meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, Directors, and other related parties.
   c. Providing data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners related to (a) Monitoring the follow-up of the results of decisions, recommendations and directives of the Board of Commissioners. (b) Administrative materials/subjects regarding reports/activities of the Board of Directors in managing the Company. (c) Administrative support and Monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners in connection with the Company's management activities carried out by the Board of Directors.
   d. Collecting technical data from committees within the Board of Commissioners and expert staff of the Board of Commissioners for the needs of the Board of Commissioners.
5. The Secretary of the Board of Commissioners carries out administrative and document storage duties in the form of:
   a. The Secretary of the Board of Commissioners has storage facilities for Board of Commissioners documents provided by the Company.
   b. The Secretary of the Board of Commissioners administers outgoing and incoming letters to the Board of Commissioners and other documents in an orderly manner.
6. Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Secretary may access records or information about employees, funds, assets, and other resources belonging to the Company relating to the implementation of its duties.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dini Desvalina **Sekretaris Dewan Komisaris** Secretary of the Board of Commissioners		
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/ Age	Palembang, 1984 / 40 tahun	Palembang, 1984 / 40 year old

Dini Desvalina **Sekretaris Dewan Komisaris** Secretary of the Board of Commissioners		
Riwayat Pendidikan Educational Background	• D3 Akuntansi, STAN (2006) • S1 Ilmu Ekonomi, UI (2009) • S2 Manajemen Keuangan Syariah, UI (2013)	• D3 Accounting, STAN (2006 • Bachelor of Economics, UI (2009) • Master of Islamic Financial Management, UI (2013)
Pengalaman Kerja (Penugasan BUMN) Employment history (SOE Assignment)	• Sekretaris Dekom PT Jasa Raharja (Persero) (2013 – 2016) • Sekretaris Dekom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • Sekretaris Dekom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019-2021) • Sekretaris Dekom PT Hutama Karya (Persero) (2021-2024)	• Secretary of the Board of Commissioners of PT Jasa Raharja (Persero) (2013 – 2016) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019-2021) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) (2021-2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat menjadi Sekretaris Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara SK-01.II/DK/PTHK/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Hutama Karya tanggal 01 Februari 2024.	Appointed as Secretary of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) for the first time based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises SK-01.II/DK/PTHK/2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya dated February 1, 2024.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	

*berhenti menjabat sejak 29 November 2024
*resigned from office on November 29, 2024

Edy Widyaya **Sekretaris Dewan Komisaris** Secretary Of The Board Of Commissioners		
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/ Age	Jakarta, 1972 / 52 tahun per Desember 2024	Jakarta, 1972 / 52 years old as of December 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Manajemen Perusahaan, Universitas Kristen Indonesia • S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya	• Bachelor of Corporate Management, Christian University of Indonesia • Master of Law, Jayabaya University
Pengalaman Kerja (Penugasan BUMN) Employment history (SOE Assignment)	• Sekretaris Dewan Komisaris PT Angkasa Pura II (2013 - 2017) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (2017 - 2019) • Komisaris PT KAI Commuter Indonesia (2019 - 2024) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) (2024 - Sekarang)	• Secretary of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura II (2013 - 2017) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (2017 - 2019) • Commissioner of PT KAI Commuter Indonesia (2019 - 2024) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) (2024 - Present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat menjadi Sekretaris Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) nomor : SK-12.IX/DK/PTHK/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Hutama Karya tanggal 6 November 2024.	Appointed as Secretary of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) for the first time based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) number: SK-12.IX/DK/PTHK/2024 concerning the Appointment of Secretary of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya dated November 6, 2024.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melakukan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan sekretariat, melakukan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer)* Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Tugas pokok fungsi Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris; (c) Dukungan administrasi serta *Monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;

DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

Throughout 2024, the Board of Commissioners' Secretary was responsible for assisting the Board of Commissioners in carrying out their duties, including:

1. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners;
2. Meeting minutes in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
3. Managing administrative documents of the Board of Commissioners, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other related documents;
4. Preparing the Work Plan and Budget Draft for the Board of Commissioners;
5. Drafting reports for the Board of Commissioners;
6. Carrying out other tasks as assigned by the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners' Secretary is also responsible for the following tasks:

1. Ensuring compliance of the Board of Commissioners with laws and regulations and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles;
2. Providing necessary information to the Board of Commissioners periodically and/or upon request;
3. Coordinating with committee members, if required, to facilitate the Board of Commissioners' duties;
4. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other relevant parties.

The primary function of the Board of Commissioners' Secretary is to assist the Board of Commissioners in secretarial activities, which at a minimum include the following:

1. Managing secretarial administrative activities within the Board of Commissioners;
2. Organizing meetings of the Board of Commissioners as well as meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, the Board of Directors, and other relevant parties;
3. Providing data and information required by the Board of Commissioners and its committees, specifically regarding (a) Monitoring the follow-up actions on the Board of Commissioners' decisions, recommendations, and instruction, (b) Administrative support and monitoring of matters requiring Board of Commissioners' approval or recommendations related to the Company's management activities carried out by the Board of Directors,

KOMITE AUDIT

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bekerja secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. Komite melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aset dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan.

2. Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka:

   a. Pemahaman Pengendalian Internal diperoleh antara lain dari mempelajari Standar Operasi Perusahaan dan presentasi manajemen mengenai desain dan implementasi pengendalian internal;
   b. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
   c. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Internal Auditor sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee operates independently in both the execution of its duties and its reporting, and it is directly accountable to the Board of Commissioners. The committee works collectively to assist the Board of Commissioners by providing professional and independent opinions on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. Additionally, the Audit Committee carries out other tasks related to the Board of Commissioners' responsibilities.

AUDIT COMMITTEE'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Audit Committee operates independently in carrying out its duties and responsibilities, which include:

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and providing recommendations for its improvement and implementation. The committee reviews the design and execution of policies and procedures to obtain reasonable assurance regarding the effectiveness of internal controls. This aims to Prevent material misstatements in financial reports, Prevent misuse of assets and violations of laws and regulations, Enhance asset protection and ensure the company meets its obligations.

2. To ensure the internal control system is effectively implemented, there are several ways to be conducted :

   a. Understanding Internal Controls is obtained through studying Company Operating Standards and management presentations on the design and implementation of internal controls;
   b. To enhance internal control effectiveness, the Audit Committee must provide recommendations for improving the internal control system and its implementation;
   c. The Audit Committee must receive periodic internal audit reports from the Internal Auditor to identify potential weaknesses in internal controls.

d. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit untuk:

- Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan internal auditor dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
- Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas reviunya antara lain menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.

e. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

f. Setiap awal tahun Komite Audit me-reviu dan memberi masukan atas PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang disusun oleh Internal Audit.

g. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian EVP Satuan Pengawasan Intern berdasarkan usulan Direktur Utama.

3. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit internal auditor dan eksternal auditor.
   a. Terkait Internal Auditor:
      - Melakukan reviu Internal Audit Charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit). Melakukan pengkajian, evaluasi dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris atas ruang lingkup dan Program Kerja Tahunan Internal Auditor.
      - Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan Laporan Hasil Audit yang penting/material termasuk audit pengadaan dan audit Anak Perusahaan untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal.
      - Melakukan pengkajian tentang kesulitan yang dihadapi waktu melaksanakan audit, hambatan atas lingkup kerja audit, hambatan kerja audit atau hambatan akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses audit.

d. The Audit Committee must coordinate with Internal Audit to ensure the effectiveness of internal controls through the following actions:

- Holding regular meetings (e.g., monthly) to discuss internal audit findings and/or other matters that indicate weaknesses in internal controls, including errors in the application of accounting standards.
- Requesting Internal Audit, if necessary, to expand its review, including assessing the nature, scope, magnitude, and impact of significant internal control weaknesses and their effect on financial statements.

e. The Audit Committee enhances its review of internal control effectiveness through the following measures by Utilizing independent auditor reports to identify potential weaknesses in the internal control system.

f. Reviewing and providing input on the Annual Supervision Work Program (PKPT) prepared by Internal Audit at the beginning of each year.

g. The Audit Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the approval of the appointment and dismissal of the Internal Audit Division Head, based on the proposal from the President Director.

3. The Audit Committee supports the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal audit activities and their results by:
   a. Internal Auditor:
      - Reviewing the Internal Audit Charter and Audit Implementation Guidelines (SOP Audit) and Assessing, evaluating, and providing recommendations to the Board of Commissioners on the scope and Annual Work Program of the Internal Auditor.
      - Examining the execution of audits by the Internal Auditor and analyzing significant/material Audit Reports, including procurement audits and subsidiary audits, for reporting to the Board of Commissioners and Directors.
      - Reviewing challenges faced during audits, including constraints in audit scope, work execution, or access to necessary information.

- Melakukan pengkajian tentang kecukupan sumber daya manusia dan anggaran Internal Audit.
- Memonitor ketaatan terhadap kode etik profesi Internal Auditor.
- Menelaah tentang semua kesulitan-kesulitan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit internal, termasuk batasan ruang lingkup apapun atau kesempatan untuk memperoleh informasi.
- Melaksanakan *quality assurance* Internal Audit.
- Mengevaluasi independensi, obyektivitas dan efektivitas Internal Auditor.
- Melakukan pengkajian tentang Perubahan penting dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Melakukan pengkajian tentang perubahan signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula.

b. Terkait Eksternal Auditor:
   - Dalam proses seleksi dan penunjukan Auditor Independen:
     - » Komite Audit melakukan reviu basil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
     - » Komite harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan dan fee akuntan publik;
     - » Melakukan pengkajian tentang tujuan dan ruang lingkup untukmemastikan bahwa tidak ada pembatasan ruang lingkup audit, serta mengevakuasi independensi dan obyektivitas Eksternal Auditor.
   - Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen:
     - » Melakukan reviu Rencana Audit dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan;
     - » Komite memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya;
     - » Secara periodik berkonsultasi dengan Eksternal Auditor tanpa kehadiran Manajemen tentang pengendalian intern serta pernenuhan dan ketetapan laporan keuangan.

- Assessing the adequacy of human resources and budget allocation for Internal Audit.
- Monitoring compliance with the Internal Auditor's professional code of ethics.
- Identifying and evaluating significant challenges encountered during internal audits, including scope limitations or restricted access to critical information.
- Conducting quality assurance for Internal Audit functions.
- Assessing the independence, objectivity, and effectiveness of Internal Auditors.
- Reviewing significant changes in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
- Evaluating substantial modifications in audit scope from the original plan.

b. External Auditor:
   - In relation to the selection and appointment of an Independent Auditor, the Audit Committee is responsible for:
     - » Reviewing the selection results conducted by management and recommending candidates for the independent auditor who will audit the Company's Financial Statements to the Board of Commissioners.
     - » Ensuring compliance with legal requirements, competency standards, assignment conditions, and public accountant fees as per regulatory guidelines.
     - » Assessing the objectives and scope of the external audit to ensure there are no limitations on the audit scope.
   - Supervision of Independent Auditor's Work
     - » Reviewing the Audit Plan and ensuring the adequacy of the audit program, as well as monitoring the execution of the audit in the field.
     - » Providing an independent opinion in case of any disagreement between management and the auditor regarding the services rendered.
     - » Regularly consulting with the External Auditor without the presence of management to discuss internal controls, financial reporting compliance, and overall audit findings.

- Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:
  - » Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan;
  - » Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian internal;
  - » Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;
  - » Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan;
  - » *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan; Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan Audited;
  - » Koreksi audit yang signifikan;
  - » Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya;
  - » Kesulitan-kesulitan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit eksternal, termasuk batasan ruang lingkup apapun atau kesempatan untuk memperoleh informasi.
  - » Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.
- Mengadakan pengkajian, penilaian dan penelaahan hasil audit oleh Auditor Eksternal antara lain:
  - » Kajian tentang Laporan keuangan tahunan dan catatan atas laporan keuangan tersebut sebelum dipublikasikan;
  - » Kajian tentang Laporan Audit Eksternal Auditor mengenai laporan keuangan tahunan dan saran serta pendapat dari Eksternal Auditor;
  - » Kajian tentang temuan penting dan rekomendasi Eksternal Auditor serta memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut;

- The Audit Committee must ensure that the Independent Auditor communicates the following key matters:
  - » The auditor's level of responsibility concerning internal controls in financial reporting.
  - » Any significant weaknesses in the design and implementation of internal controls.
  - » Major changes in accounting policies and their impact.
  - » Methods of recording, reporting, and the financial effects of significant extraordinary transactions.
  - » Instances of fraud or violations of laws and regulations by management or employees that result in material misstatements in the Financial Statements. Procedures performed by the auditor on the Annual Report containing the Audited Financial Statements.
  - » Significant audit adjustments
  - » Disagreements with management regarding the application of accounting principles, audit scope, financial statement disclosures, and wording used in the auditor's report.
  - » Significant difficulties encountered during the external audit, including any scope limitations or challenges in obtaining necessary information.
  - » Consultations made by management with other Public Accounting Firms and the auditor's opinion on the matters consulted.
- Conducting assessments, evaluations, and reviews of the External Auditor's findings, including:
  - » Review of the annual Financial Report and accompanying notes before publication.
  - » Examination of the External Auditor's report on the annual Financial Report including recommendations and opinions.
  - » Analysis of key findings and recommendations from the External Auditor, ensuring that Management has followed up on these recommendations.

» Menilai keterpaduan dari proses Laporan Keuangan, baik Eksternal maupun Internal melalui konsultasi dengan Eksternal Auditor dan Internal Auditor;
» Menilai pendapat Eksternal Auditor tentang mutu dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan;
» Menilai dan memberi pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap saran yang diajukan oleh Eksternal Auditor, Internal Auditor dan Manajemen tentang perubahan yang signifikan dalam audit serta prinsip dan praktik akuntansi;
» Menelaah kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern, legal dan etika yang ditetapkan oleh perusahaan dan proses auditing maupun prosedur akuntansi yang diterapkan.

- Memastikan konsep Laporan Keuangan audit diterima sepuluh hari sebelum diterbitkan atau seminggu sebelum dibahas dalam rapat untuk di reviu oleh Komite.
- Komite dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa auditor tidak independen atau terbukti auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

c. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi penting yang dikeluarkan Perusahaan;
- Penelaahan atas informasi Perusahaan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan tahunan, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya;
- Penelaahan dan klarifikasi untuk mendorong agar informasi Perusahaan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal dan dapat dipercaya, dan dilakukan melalui:
  » Reviu atas basil pemeriksaan auditor independen dan/atau internal auditor;
  » Klarifikasi proses penyiapan informasi Perusahaan yang akan dipublikasikan.

- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;

» Assessment of the overall integrity of the financial reporting process, both external and internal, through consultations with the External Auditor and Internal Auditor.
» Evaluation of the External Auditor's opinion regarding the quality and principles of accounting applied in the financial statements.
» Providing an opinion to the Board of Commissioners on recommendations from the External Auditor, Internal Auditor, and Management concerning significant changes in audit procedures and accounting principles and practices.
» Reviewing compliance with the company's internal control systems, legal and ethical standards, as well as the auditing and accounting procedures implemented.

- Ensuring that the draft of the audited Financial Report is received at least ten days before publication or one week before discussion in a meeting for review by the Committee.
- The Committee may propose the termination of the independent auditor's engagement to the Board of Commissioners if there are strong indications that the auditor is not independent or if it is proven that the auditor did not conduct the audit in accordance with public accounting standards.

c. Ensuring a Satisfactory Evaluation Procedure for Important Company Information

- Reviewing corporate information that will be disclosed to the public and/or regulatory authorities, including the annual report, financial report, projections, and other reports.
- Reviewing and clarifying information to ensure that any publicly disclosed corporate information is accurate, reliable, and trustworthy, through the following measures:
  » Reviewing the results of examinations conducted by independent auditors and/or internal auditors.
  » Clarifying the process of preparing corporate information before its publication.
- Reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company.

- Menelaah pengaduan (jika ada) yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

d. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;

e. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan. Oleh karena itu Komite Audit harus:

- Memastikan bahwa manajemen memberikan representasi tertulis yang berisi pernyataan bahwa:
  - » Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
  - » Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui:
  - » Reviu atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
  - » Reviu atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen dan internal auditor.
- Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Komite dapat memperluas reviunya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite dapat meminta bantuan pihak internal auditor atau eksternal auditor;
- Pemantauan Risiko dan Mitigasinya. Komite Audit berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara benar *(correctly)* sehingga dapat menghindari risiko materil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

- Examining complaints (if any) related to the Company's accounting processes and financial reporting.

d. Identify key issues requiring the Board of Commissioners' attention, as well as other duties of the Board.

e. Compliance with laws and regulations.

Ensure compliance with laws and regulations by collaborating with the Risk Management Committee to confirm that the Company's internal controls adequately enforce operational compliance with applicable laws and regulations. Therefore, the audit committee is required to:

- Ensure that management provides a written representation stating:
  - » Management has not violated any laws or regulations.
  - » Management is responsible for Company's compliance towards any laws or regulations;
- Conduct monitoring through:
  - » Reviewing management reports or legal advocate opinions related to the Company's compliance with applicable laws and regulations.
  - » Reviewing findings or audit results from regulatory bodies, independent auditors, and internal auditors.
- If indications of legal violations are found, the Committee may expand its review through an investigative audit to assess the impact and financial losses caused by the violation. To conduct this audit, the Committee may seek assistance from internal or external auditors.
- Risk Monitoring and Mitigation: The Audit Committee coordinates with the Risk Management Committee in monitoring risks and their mitigation, particularly in the preparation of the Company's Financial Report. This ensures that the internal control system and its implementation are adequate to safeguard assets and accurately record liabilities/debts, thereby minimizing material risks in financial reporting for a given fiscal year.

Penugasan Lain

Selain tugas khusus sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian tugas lain kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:
   a. Nama anggota Komite yang diberi tugas;
   b. Sifat dan lingkup pekerjaan;
   c. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
   d. Waktu penugasan; dan
   e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.
2. Tugas lain dapat mencakup tugas diluar bidang audit yang menjadi lingkup pengawasan dan arahan Dewan Komisaris, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan tugas lain Komite Audit antara lain dapat:
   a. Dilakukan melalui reviu terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait;
   c. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Fungsi Audit Internal atau dengan Auditor Eksternal.
4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

Other Assignments

In addition to the specific duties mentioned above, the Board of Commissioners may assign other tasks to the Audit Committee under the following conditions:

1. The assignment of additional tasks to the Audit Committee by the Board of Commissioners shall be carried out through a written instruction specifying:
   a. The name of the Committee member assigned to the task;
   b. The nature and scope of the work;
   c. The objectives and targets of the task;
   d. The duration of the assignment; and
   e. Administrative matters related to the specific task.
2. Additional tasks may include duties beyond the audit scope that fall within the oversight and directives of the Board of Commissioners. These may include, but are not limited to, examining suspected errors in the Board of Directors' meeting decisions or deviations in the implementation of such decisions in relation to their duties and responsibilities.
3. The execution of additional tasks by the Audit Committee may include:
   a. Conducting a review of all records, documents, and other necessary information, including the Minutes of Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
   b. Submitting inquiries to the Board of Directors and their staff, with the results documented in a Q&A Meeting Minutes signed by the relevant parties;
   c. Conducting an investigative audit in collaboration with the Internal Audit Function or an External Auditor If necessary,
4. The Audit Committee must submit a report on the execution of additional tasks with the highest level of confidentiality, limited to members of the Audit Committee and the Board of Commissioners.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan orientasi dan program pengenalan bagi anggota baru Komite Audit mengenai peran,tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit;
2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
   a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
   b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
   c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
   d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perusahaan;
3. Bekerjasama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain (Audit Internal dan Unit-unit operasional perusahaan terkait);
4. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/ pihak independen diluar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;
5. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc,* dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya;
6. Komite Audit berwenang mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;
7. Komite Audit mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, auditor eksternal/akuntan dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
8. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
9. Komite Audit berwenang mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;

AUDIT COMMITTEE'S AUTHORITIES

The Audit Committee has the following authorities:

1. Receive orientation and an introductory program for new Audit Committee members regarding the role, responsibilities, and framework of the Audit Committee.
2. Access the Company's documents, data, and information related to employees, funds, assets, and other company resources necessary for carrying out its duties, including:
   a. Reviewing books, letters, and other documents, verifying cash and other securities, and examining the Company's assets.
   b. Entering premises, buildings, and offices used by the Company.
   c. Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding any matters related to Company management.
   d. Being informed of all policies and actions that have been or will be implemented by the Company.
3. Collaborate with relevant work partners, including the Supporting Organs of the Board of Commissioners and related management units such as Internal Audit and other relevant operational units of the Company.
4. If necessary, the Audit Committee may engage experts and/or independent consultants outside the Committee members to assist in performing its duties, with the approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense.
5. If required, the Audit Committee may establish an ad hoc team, with criteria and assignment periods adjusted according to the nature of the work.
6. The Audit Committee has the authority to review the independence and objectivity of the External Auditor and to recommend the selection of an External Auditor to the Board of Commissioners for auditing the Company's Financial Report.
7. The Audit Committee has the authority to communicate directly with employees, including the Board of Directors, as well as individuals responsible for internal audit, risk management, external auditing/accounting, and other parties related to the Committee's duties and responsibilities.
8. Excecute other authorities granted by the Board of Commissioners
9. The Audit Committee has the authority to review the independence and objectivity of the External Auditor and to recommend the selection of an External Auditor to the Board of Commissioners for auditing the Company's Financial Report.

10. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut diatas, Komite Audit dapat bekerja sama dengan Fungsi Audit Internal.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-08.XII/DK/PTHK/2023. Piagam Komite Audit merupakan pedoman bagi seluruh anggota Komite Audit yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang serta struktur Komite Audit yang disusun demi terciptanya pengawasan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan Perusahaan. Piagam Komite Audit memiliki cakupan sebagai berikut:

1. Pendahuluan
   Menjelaskan terkait latar belakang, visi dan misi, maksud dan tujuan, landasan hukum serta ruang lingkup.
2. Organisasi dan Kode Etik Komite Audit
   Menjelaskan terkait pembentukan, komposisi dan struktur organisasi, persyaratan anggota Komite Audit, pengangkatan dan pemberhentian, independensi dan masa jabatan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Wewenang Komite Audit
   Menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab, hak dan wewenang Komite Audit.
4. Kode Etik Komite Audit
   Menjelaskan terkait integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi anggota Komite Audit.
5. Rapat dan Hubungan Kerja Komite Audit
   Menjelaskan terkait kegiatan rapat dan hubungan kerja komite audit.
6. Rencana Kerja, Anggaran dan Program Pengembangan Komite Audit
   Menjelaskan terkait rencana kerja, anggaran, honorarium dan program pengembangan.
7. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
   Menjelaskan terkait pertanggungjawaban, pelaporan, akses dan kerahasiaan informasi.
8. Evaluasi Kinerja Komite Audit
   Menjelaskan terkait periode dan bentuk evaluasi kinerja serta indikator kinerja Komite Audit.
9. Penutup
   Menjelaskan terkait masa berlaku, tanggung jawab penerapan dan reviu Piagam.

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

1. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun

10. In carrying out its authority as mentioned above, the Audit Committee may collaborate with the Internal Audit Function.

AUDIT COMMITTEE CHARTERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter, which has been ratified based on the Board of Commissioners' Decree Number SK-08.XII/DK/PTHK/2023. The Audit Committee Charter serves as a guideline for all Audit Committee members, outlining the duties, responsibilities, authorities, and structure of the Audit Committee to ensure efficient and effective oversight in the Company's management. The Audit Committee Charter covers the following aspects:

1. Introduction
   Outlines the background, vision and mission, purpose and objectives, legal basis, and scope.
2. Organization and Code of Ethics of the Audit Committee
   Describes the establishment, composition, and organizational structure, membership requirements, appointment and dismissal, independence, and tenure of the Audit Committee.
3. Duties and Responsibilities, Rights, and Authorities of the Audit Committee
   Explains the duties and responsibilities, rights, and authorities of the Audit Committee.
4. Audit Committee Code of Ethics
   Covers integrity, objectivity, confidentiality, and competence of Audit Committee members.
5. Meetings and Working Relations of the Audit Committee
   Describes the meeting activities and working relationships of the Audit Committee.
6. Work Plan, Budget, and Development Program of the Audit Committee
   Details the work plan, budget, remuneration, and development program.
7. Accountability, Reporting, and Performance Evaluation
   Explains accountability, reporting, access, and confidentiality of information.
8. Audit Committee Performance Evaluation
   Describes the evaluation period, evaluation format, and key performance indicators of the Audit Committee.
9. Conclusion
   Outlines the validity period, responsibility for implementation, and review of the Charter.

TERM OF OFFICE FOR AUDIT COMMITTEE

1. The term of office for Audit Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of three (3) years and may be extended once for a period

masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota ahli, sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

of two (2) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.
2. The term of office for Audit Committee members who are part of the Board of Commissioners is the same as their tenure as determined by the General Meeting of Shareholders.
3. The term of office for Audit Committee members who are expert members is the same as the tenure of the Board of Commissioners and may be reappointed for only one additional term.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

STRUCTURE, MEMBERSHIP, AND EXPERTISE OF THE AUDIT COMMITTEE

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
Agung Sabar Santoso	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pertahanan dan keamanan Defense and security
Chairiah	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	*Business Adminsitration* Business Adminsitration
Wakhid Kurniawan Saputra*	Anggota Member	Pihak independen Independent party	Akuntansi Accounting
Thauriq Anwar**	Anggota Member	Pihak independen Independent party	Akuntansi Accounting
Rifky Adrianto Firdaus***	Anggota Member	Pihak independen Independent party	Akuntansi Accounting
Resi Ariyasa Qadri****	Anggota Member	Pihak independen Independent party	Akuntansi Accounting

*Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Maret 2024
**Berhenti menjabat sejak tanggal 1 Oktober 2024
***Mulai menjabat sejak tanggal 16 April 2024
****Mulai menjabat sejak tanggal 2 September 2024
* Terminated from the position since March 28, 2024.
**Terminated from the position since October 1, 2024
*** Appointed to the position since April 16, 2024.
****Appointed to the position since September 2, 2024

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE PROFILE

The Audit Committee Profile per December 31, 2024, is explained below

Agung Sabar Santoso
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Audit sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Audit Committee align with the period and term of office of the Board of Commissioners.

Chairiah

Wakil Ketua Komite Audit/Komisaris
Vice Chairman of the Audit Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Audit sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Audit Committee align with the period and term of office of the Board of Commissioners.

Rifky Adrianto Firdaus

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)
Member of Audit Committee (Independent Party)



Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Jakarta, 1987 | Born in Jakarta, 1987.
Usia 37 tahun Per Desember 2024.
Age 37 as of December 2024.

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya (2010) • Magister Akuntansi Universitas Indonesia (2021)	• Bachelor's Degree in Accounting, Brawijaya University (2010) • Master's Degree in Accounting, University Indonesia (2021)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification
Pengalaman Kerja Employment History	• Senior Auditor di KAP Mulyamin Sensi Suryanto dan Lianny (Moore Stephens) (2010-2012) • Senior Auditor di KAP Osman, Bing, Satrio dan Eny (Deloitte) (2012 – 2014) • Senior Associate di KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC) (2014-2016) • Audit Manager di KAP Johannes, Juara dan Rekan (INAA International) (2016-2017) • Periset Senior, Ikatan Akuntan Indonesia (2017 – sekarang)	• Senior Auditor at KAP Mulyamin Sensi Suryanto and Lianny (Moore Stephens) (2010-2012) • Senior Auditor at KAP Osman, Bing, Satrio and Eny (Deloitte) (2012-2014) • Senior Associate at KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PwC) (2014-2016) • Audit Manager at KAP Johannes, Juara and Partners (INAA International) (2016-2017) • Senior Researcher at the Indonesian Institute of Accountants (2017 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-04.IV/DK/PTHK/2024 tanggal 16 April 2024	Board of Commissioners' Decision Number SK-04.IV/DK/PTHK/2024 dated April 16, 2024
Periode dan Masa Jabatan Period and The term of office	Periode Pertama : 2024 - 2027	First Period : 2024-2027
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	-	

Resi Ariyasa Qadri

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)
Member of Audit Committee (Independent Party)

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Depok, Indonesia

Lahir di Bandung, 1984 | Born in Bandung, 1984.
Usia 40 tahun Per Desember 2024.
Age 40 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Diploma III Taxation Polytechnic of State Finance STAN (2005) • Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009) • Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran (2017) • Doktor Akuntansi Universitas Trisakti (2024)	• Bachelor's Degree in Accounting Universitas Indonesia (2009) • Master's Degree in Accounting, Padjadjaran University (2017) • Doctorate in Accounting, Trisakti University (2024)
Sertifikasi Certification	• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Certified Risk Associate • Certified Risk Professional • Certified Professional Fraud Investigator • Certified Islamic Wealth Planner • Certified Investment Consultant • Certified Insurance Specialist • Qualified Wealth Planner • Associate Wealth Planner • Associate Certified Public Accountant • Certified Sustainability Reporting Specialist • Certified Sustainability Practitioner	• Government Goods/Services Procurement Expert • Certified Risk Associate • Certified Risk Professional • Certified Professional Fraud Investigator • Certified Islamic Wealth Planner • Certified Investment Consultant • Certified Insurance Specialist • Qualified Wealth Planner • Associate Wealth Planner • Associate Certified Public Accountant • Certified Sustainability Reporting Specialist • Certified Sustainability Practitioner
Pengalaman Kerja Employment History	• Asisstant Professor Bachelor of Public Sector Accounting Program, Polytechnic of State Finance STAN (2019 – sekarang) • Internal Auditor Polytechnic of State Finance STAN (2020 – 2023) • Visiting Lecturer Master of Accounting Program, Universitas Padjadjaran (2019-2024) • Visiting Lecturer Bachelor of Accounting Program, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2024) • Tax Trainer PPAK Training Center (2022-2024) • Audit Trainer PPAK Training Center (2022-2024) • Audit Expert DSK Global (2023-2024) • Audit Expert KAP Abdul Hamid dan Rekan (2023-2024) • Audit Expert KAP AR Utomo (2024)	• Asisstant Professor Bachelor of Public Sector Accounting Program, Polytechnic of State Finance STAN (2019 – present) • Internal Auditor Polytechnic of State Finance STAN (2020 – 2023) • Visiting Lecturer Master of Accounting Program, Padjajaran University (2019-2024) • Visiting Lecturer Bachelor of Accounting Program, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2024) • Tax Trainer PPAK Training Center (2022-2024) • Audit Trainer PPAK Training Center (2022-2024) • Audit Expert DSK Global (2023-2024) • Audit Expert KAP Abdul Hamid and partners (2023-2024) • Audit Expert KAP AR Utomo (2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-10.IX/DK/PTHK/2024 tanggal 2 September 2024	Board of Commissioners Decree Number SK-10.IX/DK/PTHK/2024 dated September 2, 2024
Periode dan Masa Jabatan Period and The term of office	Periode Pertama : 2024 - 2027	First Period : 2024-2027
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Asisstant Professor Bachelor of Public Sector Accounting Program, Polytechnic of State Finance STAN (2019 – sekarang)	• Asisstant Professor Bachelor of Public Sector Accounting Program, Polytechnic of State Finance STAN (2019 – present)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EMPLOYMENT HISTORY OF THE AUDIT COMMITTEE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Table of Educational Qualifications and Employment History of The Audit Commitee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Employment History
Agung Sabar Santoso	Ketua Chairman	• Dikpol AKABRI • PTIK • SESPIMEN • SESPIMTI • LEMHANAS	Memiliki pengalaman kerja di Kepolisian RI Has working experience in the Indonesian National Police.
Chairiah	Wakil Ketua Vice Chairman	• Sarjana Teknologi Industri Pertanian • Magister Business Administration • Bachelor's Degree in Agricultural Industrial Technology • Master's Degree in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian BUMN Has work experience at the Ministry of State-Owned Enterprises (Kementerian BUMN).
Rifky Adrianto Firdaus	Anggota Member	• Sarjana Akuntansi • Magister Akuntansi • Bachelor's Degree in Accounting • Master's Degree in Accounting	Memiliki pengalaman kerja sebagai auditor Has work experience as an auditor
Resi Ariyasa Qadri	Anggota Member	• Diploma III Taxation Polytechnic • Sarjana Akuntansi • Magister Akuntansi • Doktor Akuntansi • Diploma III Taxation Polytechnic • Bachelor's Degree in Accounting • Master's Degree in Accounting • Doctorate in Accounting	Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen dan trainer Has work experience as a lecturer and trainer.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCY

The Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the independence qualifications of the Audit Committee members must meet the following criteria:

Tabel Independensi Komite Audit

Table of Audit Committee Independency

Aspek Independensi Independency Aspects	Agung Sabar Santoso	Chairiah	Rifky Adrianto Firdaus	Resi Ariyasa Qadri
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship with the company, its subsidiaries, or affiliated companies.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Has no share ownership relationship in the company.	√	√	√	√

Aspek Independensi Independency Aspects	Agung Sabar Santoso	Chairiah	Rifky Adrianto Firdaus	Resi Ariyasa Qadri
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee.	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a political party official, government official, or public officer.	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2024

TRAINING AND / OR COMPETENCY ENHANCEMENT OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2024

Nama Name	Jabatan Positions	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Competency Development Materials / Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place	Penyelenggara Organizers
Agung Sabar Santoso	Ketua Chairman	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency development program can be found in the Training and/or Competency Development Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Chairiah	Wakil Ketua Vice Chairman	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency development program can be found in the Training and/or Competency Development Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Rifky Adrianto Firdaus	Anggota Member	*Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*	*Virtual class, 24-25 Juli 2024*	*CRMS Indonesia & Lembaga Sertifikasi Profesi MKS*
Resi Ariyasa Qadri	Anggota Member	-	-	-

RAPAT KOMITE AUDIT

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
2. Pemanggilan Rapat Komite dilakukan oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Ketua Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite;
3. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang disepakati;
4. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
5. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan;
6. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
   a. Mengatur jadwal rapat;
   b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
   c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
   d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
7. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite berhalangan pada jam dimulai rapat sesuai undangan, maka atas izin Ketua Komite rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dapat hadir. Jika anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin rapat terlambat datang, atau karena sesuatu hal harus meninggalkan rapat sementara, maka rapat sementara dipimpin oleh anggota Komite Audit yang paling senior masa jabatannya;
8. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

AUDIT COMMITTEE MEETING POLICIES

1. The Audit Committee holds meetings at least as frequently as the minimum meeting requirement of the Board of Commissioners, which is at least once (1) per month, as stipulated in the Articles of Association.
2. The Audit Committee meetings are convened by the Chairman of the Audit Committee. In the event that the Chairman is unable to do so, the meeting shall be convened by the Vice Chairman designated by the Chairman.
3. The meeting notice shall be given at least fourteen (14) days in advance, or in urgent situations, at least three (3) days before the meeting date, specifying the day, date, time, venue, and agenda of the meeting. Meetings shall be held at the Company's domicile or at another location within the territory of the Republic of Indonesia as agreed upon.
4. If deemed necessary, the Audit Committee may invite other relevant parties related to the meeting agenda to attend the meeting, with the knowledge of the relevant members of the Board of Directors.
5. If required, the Audit Committee may invite resource persons from the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other parties, whether from within or outside the Company.
6. To facilitate the execution of its duties, the Audit Committee is assisted by the Committee Secretary in carrying out secretarial tasks, including:
   a. a. Scheduling meetings;
   b. Proposing and contacting necessary resource persons;
   c. Preparing and distributing meeting invitations and materials;
   d. Drafting and distributing meeting minutes.
7. The Audit Committee meeting is lead by the Chairperson of the Committee. If the Chairperson is unable to attend, the meeting is lead by the Vice Chairperson. In the event that both the Chairperson and Vice Chairperson are unavailable at the scheduled meeting time, the meeting may, with the Chairperson's approval, be chaired by a member of the Board of Commissioners who is present. If the designated member of the Board of Commissioners arrives late or must temporarily leave the meeting for any reason, the meeting shall be temporarily chaired by the most senior member of the Audit Committee in terms of tenure.
8. Each member of the Committee is given full freedom to express their professional opinions during discussions on any meeting agenda without any intervention

9. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
10. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda *(dissenting opinions),* dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Untuk risalah rapat komite, selain ditandatangani oleh anggota Komite yang hadir dalam rapat, juga diketahui oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite;
11. Setiap anggota Komite menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas Risalah Rapat, dengan mempertimbangkan ketentuan batas waktu penyampaian Risalah Rapat yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Komite. Jika sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari setelah rapat, tidak ada usulan perubahan, maka Risalah Rapat dianggap disetujui oleh seluruh anggota Komite;
12. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
13. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite;
14. Tata tertib rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

9. Decisions in Audit Committee meetings are made based on deliberation to reach a consensus.
10. All matters discussed and decided upon in the Committee meetings, including dissenting opinions, are recorded in the Minutes of Meeting, which are signed by all attending Committee members as official evidence of the decisions made. The minutes are then submitted to the Board of Commissioners. In addition to being signed by the attending Committee members, the minutes must also be acknowledged by the Chairperson and Vice Chairperson of the Committee.
11. Each Committee member may express their approval, objection, and/or suggestions for revisions to the Minutes of Meeting, considering the deadline for submission as regulated in the Committee Meeting Procedures. If no proposed revisions are submitted within 15 (fifteen) days after the meeting, the Minutes of Meeting shall be deemed approved by all Committee members.
12. Each Committee member has the right to receive a copy of the Minutes of Meeting even if they were not present at the meeting
13. The attendance of Audit Committee members in meetings is reported in the Committee's quarterly and annual reports.
14. The rules and procedures for Committee meetings are outlined in a separate regulation.

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout the year 2024, the dates of implementation, meeting agendas, and participants of the Audit Committee meetings are presented below.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

Table of Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
1	5 Januari 2024 January 5, 2024	• Permohonan Tanggapan Tertulis atas Perubahan Alokasi Penambahan PMN TA 2024 • Permohonan Tanggapan Tertulis Pelepasan Aktiva Tetap Bergerak PT HK tahun 2023 • Penyampaian Kelengkapan Dokumen dan Pemberitahuan Informasi atas Rencana Penambahan Setoran Modal pada PT Hamawas • Request for Written Response on the Reallocation of Additional State Capital Injection (PMN) for Fiscal Year 2024 • Request for Written Response on the Disposal of Movable Fixed Assets of PT HK in 2023 • Submission of Document Completeness and Notification of Information on the Planned Additional Capital Injection in PT Hamawas	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
2	16 Januari 2024 January 16, 2024	• Penyampaian Surat Laporan dan Penyampaian Rencana Usaha dan Rencana Amandemen PPJT 9 Ruas Jalan Tol tahap I • Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas tim WBS Triwulan IV tahun 2023 • Penyampaian hasil evaluasi atas draft RKAP BUMN tahun 2024 berbasis Manajemen Risiko • Pembahasan tembusan surat perihal somasi/peringatan 1 (pertama) terkait Piutang PT Rahmi Ida Nusantara • Submission of Report Letter and Business Plan Submission, including the Proposed Amendment to the PPJT for 9 Toll Road Sections – Phase I • Submission of the Fourth Quarter 2023 Task Implementation Report by the Whistleblowing System (WBS) Team • Submission of Evaluation Results on the Draft 2024 SOE Budget and Business Plan (RKAP) Based on Risk Management • Discussion on the Copy of the First Warning Letter/ Summons Regarding PT Rahmi Ida Nusantara's Receivables	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
3	19 Januari 2024 January 19, 2024	• Pembahasan Tembusan surat kepada Dekom perihal Kajian atas Rencana Transaksi saham antara PT Jasa Marga (Persero) tbk dan PT HK pada PT Jasa Marga Bali Toll dan PT Hamawas • Pembahasan tembusan surat kepada Dekom perihal Penyampaian kembali dokumen rancangan RKAP PT HK tahun 2024 • Discussion on the copy of the letter to the Board of Commissioners regarding the Review of the Planned Share Transaction between PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT HK in PT Jasa Marga Bali Toll and PT Hamawas. • Discussion on the copy of the letter to the Board of Commissioners regarding the Resubmission of the Draft 2024 Budget and Business Plan (RKAP) of PT HK.	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
4	26 Januari 2024 January 26, 2024	• Laporan kinerja SMAP Tw IV tahun 2023 dan Rencana Kerja tahun 2024 • Laporan penggunaan dana PMN Tw IV tahun 2023 • Laporan manajemen tahunan 2023 *(unaudited)* • *Update* Hasil Reviu ICOFR PT HK tahun 2023 • Performance Report of SMAP for Q4 2023 and Work Plan for 2024 • Report on the Use of PMN Funds for Q4 2023 • 2023 Annual Management Report (Unaudited) • Update Hasil Reviu ICOFR PT HK tahun 2023 / Update on the Review Results of ICOFR PT HK for 2023	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
5	2 Februari 2024 February 2, 2024	• Laporan pemakaian fasilitas per 31 Desember 2023 • Laporan kinerja divisi QHSSE triwulan IV tahun 2023 • Report on Facility Usage per December 31, 2023 • Performance Report of the QHSSE Division for Q4 2023	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
6	16 Februari 2024 February 16, 2024	• Penyampaian laporan Corporate guarantee anak perusahaan per 31 Desember 2023 • Permohonan tanggapan tertulis atas penambahan PMN TA 2024 periode II • Permohonan penyelesaian pembayaran • Pemenuhan data SPV KPBU Trans Papua sesuai arahan tim teknis Kementerian BUMN • Submission of Subsidiary Corporate Guarantee Report per December 31, 2023 • Request for Written Response on Additional PMN for Fiscal Year 2024 (Phase II) • Request for Payment Completion • Fulfillment of SPV KPBU Trans Papua Data as Directed by the Technical Team of the Ministry of SOEs	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
7	23 Februari 2024 February 23, 2024	• Penyampaian laporan manajemen teknologi informasi tahun 2023 PT HK • Laporan tahunan SPI tahun 2023 • Usulan PMN PT HK TA 2025 • Submission of PT HK's 2023 Information Technology Management Report • 2023 Annual SPI Report • Proposal for PT HK's PMN for Fiscal Year 2025	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
8	1 Maret 2024 March 1, 2024	• Permohonan pelunasan sisa tagihan kontrak kerja • *Update* penyelesaian permasalahan hukum • Pembahasan kinerja EPC Energy Singapore Pte. Ltd serta kelanjutan pendiriannya • Permohonan pelunasan sisa tagihan kontrak kerja • Update penyelesaian permasalahan hukum) • Pembahasan kinerja EPC Energy Singapore Pte. Ktd serta kelanjutan pendiriannya	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
9	8 Maret 2024 March 8, 2024	• Pemenuhan organ pengelola risiko BUMN • Penambahan biaya jasa audit terkait pekerjaan tambahan - 31 Desember 2023 • Penyampaian usulan KPI PMN PT HK tahun 2024 • Fulfillment of SOE Risk Management Organ • Additional Audit Service Fees for Additional Work – December 31, 2023 • Submission of KPI Proposal for PT HK's PMN for 2024	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
10	15 Maret 2024 March 15, 2024	• Kinerja PT HKR dan Rencana dana talangan induk ke PT HKR • Laporan hasil audit (LHA) tujuan tertentu permasalahan tata kelola perpajakan PT Bhirawa Steel 2020 • Pembahasan PKPT SPI tahun 2024 • Performance of PT HKR and Plan for Parent Company Bailout Funds to PT HKR • Report on the Audit Findings (LHA) for Specific Purpose of Tax Governance Issues at PT Bhirawa Steel Tbk. 2020 • Discussion on the 2024 PKPT SPI	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
11	22 Maret 2024 March 22, 2024	• Laporan hasil audit (LHA) tujuan tertentu permasalahan tata kelola perpajakan • The Audit Findings Report (LHA) for Specific Purpose on Tax Governance Issues.	Agung Sabar Santoso Chairiah Wakhid Kurniawan Thauriq Anwar
12	1 April 2024 April 1, 2024	• Progres Pelaksanaan Diagnostik ICOFR bagi BUMN Sistemik A dan BUMN Sistemik B serta Evaluasi Kebijakan Ambang Batas Kewenangan Transaksi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. • Progress of the ICOFR Diagnostic Implementation for Systemic State-Owned Enterprises (SOEs) A and B, as well as Evaluation of the Policy on Threshold Limits for Transactions of State-Owned Enterprises and Their Subsidiaries.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar
13	19 April 2024 April 19, 2024	• Permintaan penyampaian evaluasi kinerja KAP atas Pemeriksaan laporan keuangan tb 2023 • Laporan manajemen risiko Tw IV tahun 2023 dan Draft Risk Maturity Index 2023 • Tindak lanjut rekomendasi laporan hasil ADTT permasalahan Tata kelola perpajakan PT Bhirawa Steel • Request for submission of the performance evaluation of the Public Accounting Firm (KAP) on the Financial Report audit for FY 2023. • Risk management report for Q4 2023 and Draft Risk Maturity Index 2023. • Follow-up on the recommendations from the audit findings on the governance issues related to taxation at PT Bhirawa Steel.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
14	25 April 2024 April 25, 2024	• Pembahasan dampak makroekonomi terhadap kinerja perusahaan • Pembahasan proyek KPBU Sitinjau lauik • Pembahasan laporan manajemen audited tahun 2023 dan persiapan RUPS tahunan tb 2023 • Pembahasan code of conduct PT Hutama Karya (Persero) tahun 2024 • Laporan penggunaan tambahan dana PMN TA 2021 tahap III, PMN TA 2022 tahap I dan II, dan PMN TA 2023 periode Maret 2024/Tw I 2024 • Discussion on the macroeconomic impact on the company's performance. • Discussion on the KPBU Sitinjau Lauik project • Discussion on the audited management report for 2023 and preparation for the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) for FY 2023. • Discussion on the Code of Conduct for PT Hutama Karya (Persero) for 2024. • Report on the usage of additional PMN funds for FY 2021 Phase III, FY 2022 Phase I and II, and FY 2023 for the March 2024 period/Q1 2024.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
15	3 Mei 2024 May 3, 2024	• Laporan pemakaian fasilitas pinjaman per 31 Maret 2024 • Laporan pelaksanaan tugas tim WBS tw I tahun 2024 • Laporan kinerja SMAP Tw I tahun 2024 • Hasil Laporan reviu penyelesaian temuan atas laporan hasil pekerjaan jasa konstruksi keuangan ICOFR dan rekomendasi tata kelola hasil audit tujuan tertentu (ATT) • Report on the usage of loan facilities per March 31, 2024. • Report on the implementation of tasks by the WBS team for Q1 2024. • SMAP performance report for Q1 2024. • Results of the review report on the resolution of findings from the financial construction services ICOFR report and recommendations for governance based on the audit results of specific-purpose audit reports (ATT).	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
16	8 Mei 2024 May 8, 2024	• Pembahasan draft RJPP PT HK • Persiapan RUPST Tahun Buku 2023 PT HK • Pembahasan rencana perubahan struktur organisasi PT HK • Discussion on the draft RJPP (Long-Term Corporate Plan) of PT HK • Preparation for the Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) for the 2023 fiscal year of PT HK. • Discussion on the proposed changes to the organizational structure of PT HK.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
17	17 Mei 2024 May 17, 2024	• Laporan atas penerbitan *corporate guarantee* kepada anak perusahaan tw I tahun 2024 • Laporan hasil audit Divisi QHSSE thun 2024 • Usulan SPI Terintegrasi dan Reorganisasi SPI PT HK • Laporan triwulan I SPI th 2024 • Report on the issuance of corporate guarantees to subsidiaries for Q1 2024. • Audit report of the QHSSE Division for 2024. • Proposal for Integrated SPI and SPI Reorganization at PT HK. • Quarterly report of SPI for Q1 2024.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
18	27 Mei 2024 May 27, 2024	• Tindak lanjut perubahan struktur organisasi PT HK • Permohonan tanggapan atas penyampaian penggunaan laba bersih tahun 2023 • Permohonan tanggapan atas usulan agenda RUPS persetujuan laporan tahunan program TJSL Tahun Buku 2023 termasuk pengesahan laporan keuangan program UMK • Permohonan tanggapan atas usulan agenda RUPS pengesahan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN TA 2021, 2022, dan 2023 (termasuk persetujuan penggunaan dana PMN untuk BUKP) • Pembahasan draft RJPP PT HK tahun 2025-2029 • Follow-up on the organizational structure changes at PT HK. • Request for feedback on the presentation of net profit usage for the year 2023. • Request for feedback on the proposed RUPS agenda for the approval of the 2023 annual report and TJSL program, including the ratification of the Financial Report for the UMK program. • Request for feedback on the proposed RUPS agenda for the ratification of the realization report on the use of additional PMN funds for 2021, 2022, and 2023 (including approval for the use of PMN funds for BUKP). • Discussion of the draft RJPP PT HK for 2025-2029.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
19	30 Mei 2024 May 30, 2024	• Penjelasan atas skema pengusahaan ruas Palembang-Betung • Explanation of the concession scheme for the Palembang-Betung section	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
20	3 Juni 2024 June 3, 2024	• Penjelasan atas kecelakaan pada proyek Kejagung RI • Pembahasan kinerja Tw I 2024 divisi QHSSE • Arahan penyusunan dan penguatan implementasi kebijakan tata kelola benturan kepentingan pada lingkungan BUMN • Pembahasan tindak lanjut rekomendasi dan implementasi roadmap ICOFR • Explanation of the accident at the Attorney General's Office (Kejagung RI) project • Discussion of the QHSSE division's performance for Q1 2024 • Guidance on the development and strengthening of the implementation of governance policies regarding conflict of interest within the BUMN (State-Owned Enterprises) environment • Discussion of the follow-up on recommendations and implementation of the ICOFR (Internal Control over Financial Reporting) roadmap	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
21	7 Juni 2024 June 7, 2024	• Permohonan persetujuan atas rencana pemberian shareholder loan kepada EPC Energy Singapore Ltd tahun 2024 • Penyampaian laporan manajemen risiko Tw I PT HK tahun 2024 • Permohonan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dalam rangka permohonan persetujuan RUPS PT HK atas pelaksanaan penugasan jalan tol Palembang-Betung (bagian dari ruas jalan tol kayu agung-Palembang-Betung) dan ruas Pelabuhan Panjang-Lematang) • Request for approval of the plan to provide a shareholder loan to EPC Energy Singapore Ltd in 2024 • Submission of the risk management report for Q1 PT HK 2024 • Request for written response from the Board of Commissioners regarding the request for approval at the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) of PT HK for the implementation of the Palembang-Betung toll road assignment (part of the Kayu Agung-Palembang-Betung toll road) and the Pelabuhan Panjang-Lematang road segment	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
22	25 Juni 2024 June 25, 2024	• Pembahasan lanjutan atas permohonan persetujuan RUPS atas pelaksanaan penugasan jalan tol Palembang-Betung (bagian dari ruas jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung) dan ruas Pelabuhan Panjang-Lematang • Further discussion on the request for RUPS approval regarding the implementation of the assignment for the Palembang-Betung toll road (part of the Kayu Agung-Palembang-Betung toll road) and the Pelabuhan Panjang-Lematang road segment.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
23	28 Juni 2024 June 28, 2024	• Penyampaian Dokumen contingency plan tahun 2024 PT HK • Pembahasan LHA dan MTL Audit Tematik Kualitas Utang PG Jatiroto tahun 2024 • Pembahasan Lanjutan SPI Terintegrasi • Persetujuan KPI Direksi secara individual tahun 2024 • Permohonan tanggapan Dewan Komisaris atas Kendaraan dinas Direksi • Submission of the 2024 PT HK Contingency Plan Document • Discussion on LHA and MTL Thematic Audit of PG Jatiroto Debt Quality 2024 • Continued discussion on Integrated SPI • Approval of Individual Director's KPI for 2024 • Request for the Board of Commissioners' response on the Directors' official vehicles	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
24	5 Juli 2024 July 5, 2024	• Rencana kerjasama sewa menyewa aset PT HK di Cipayung, Bogor dengan PT Hita Kreatif Nusantara • Somasi Ketiga PT Putra Kundur Transportasi Perkasa • Planned collaboration for leasing assets of PT HK in Cipayung, Bogor with PT Hita Kreatif Nusantara • Third notice (Somasi) to PT Putra Kundur Transportasi Perkasa	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
25	12 Juli 2024 July 12, 2024	• Penyampaian perubahan Treshold dan Penyesuaian Anggaran Dasar PT HK • Informasi surat OJK Pemberitahuan kewajiban pemenuhan POJK 9/2023 dan SEOJK 18/2023 • Submission of changes to the threshold and adjustments to the Articles of Association of PT HK • Information on OJK letter regarding the obligation to comply with POJK 9/2023 and SEOJK 18/2023	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
26	19 Juli 2024 July 19, 2024	• Penyampaian dokumen pelaporan penggunaan tambahan dana PMN TA 2022 tahap I dan II, PMN TA 2023 dan PMN TA 2024 periode Juni 2024 • Penyampaian arahan Dewan Komisaris terkait perubahan treshold dan penyesuaian anggaran dasar PT HK • Pembahasan hasil stress test PT HK • Pembahasan dokumen *Contingency plan* tahun 2024 PT HK • Penyampaian laporan pelaksanaan tugas tim WBS Triwulan II tahun 2024 • Submission of reporting documents on the use of additional PMN funds for FY 2022 Phase I and II, PMN FY 2023, and PMN FY 2024 for the June 2024 period • Submission of the Board of Commissioners' directives regarding changes to the threshold and adjustments to the Articles of Association of PT HK • Discussion of the results of the stress test for PT HK • Discussion of the 2024 Contingency Plan document for PT HK • Submission of the report on the tasks performed by the WBS team for the second quarter of 2024	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
27	26 Juli 2024 July 26, 2024	• Penyampaian Laporan Manajemen Tw II tahun 2024 PT HK • Pembahasan penyelesaian kasus-kasus hukum PT HK sd Tw II tahun 2024 • Pembahasan lanjutan *stress testing* PT HK • Submission of the Management Report for Q2 2024 of PT HK • Discussion of the resolution of legal cases of PT HK up to Q2 2024 • Follow-up discussion on the stress testing of PT HK	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
28	2 Agustus 2024 August 2, 2024	• Laporan Audit Intern Tw II tahun 2024 PT HK • Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Perpanjangan Jatuh Tempo Utang Afiliasi PT HKR • Laporan Pemakaian Fasilitas Pinjaman per 30 Juni 2024 • Internal Audit Report for Q2 2024 of PT HK • Request for Approval from the Board of Commissioners on the Plan for Extension of the Affiliate Debt Maturity of PT HKR • Report on the Utilization of Loan Facilities per June 30, 2024	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
29	9 Agustus 2024 August 9, 2024	• Laporan Kinerja SMAP Tw II tahun 2024 • Laporan atas Penerbitan Corporate Guarantee kepada Anak Perusahaan • Pembahasan Lanjutan Dokumen Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan dan Pemberitahuan Penetapan Direktur Pembina & Direktur Fungsional • SMAP Performance Report for Q2 2024 • Report on the Issuance of Corporate Guarantee to Subsidiaries • Continued Discussion on the Integrated Corporate Governance Guidelines for the Conglomerate and Notification of the Appointment of the Director of Development & Functional Director	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
30	16 Agustus 2024 August 16, 2024	• Permohonan penambahan materi AKHLAK pada BOC Charter • Pembahasan Laporan Hasil Audit (Proyek Pembangunan Masjid Raya Prov Jabar (Tahap IV), proyek kampus baru Untirta Sindangsari Banten, Proyek Gedung OJK • Laporan internal tahunan penilaian asurans dan peningkatan kualitas • Request for the addition of AKHLAK material in the BOC Charter • Discussion on the Audit Results Report (Development Project of Masjid Raya Prov Jabar (Phase IV), New Campus Project of Untirta Sindangsari Banten, OJK Building Project) • Annual Internal Report on Assurance and Quality Improvement Evaluation	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
31	23 Agustus 2024 August 23, 2024	• Penyampaian Kembali Dokumen Contingency Plan tahun 2024 PT HK untuk Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris • Laporan Kinerja Divisi QHSSE Tw II tahun 2024 • Pembahasan *Progress* Rencana Equity Injection/ Penyertaan Modal tahun 2024 kepada PT HKR • Pembahasan Hasil Putusan Perkara Perdata CSK • Resubmission of the 2024 PT HK Contingency Plan Document for Approval by the Board of Commissioners • Report on the Performance of the QHSSE Division for Q2 2024 • Discussion on the Progress of the 2024 Equity Injection/ Capital Investment Plan to PT HKR • Discussion on the Outcome of the Civil Case Decision for CSK	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
32	30 Agustus 2024 August 30, 2024	• Pembahasan Permasalahan berkaitan dengan Manajemen Kontrak sampai dengan Semester I tahun 2024 • *Update progress* RJPP 2025-2029 PT HK dan Integrasi PT HK dan PT Waskita Tbk • Permohonan Tanggapan Tertulis atas Perubahan Usulan Penambahan PMN TA 2024 Periode II • Pembahasan Aduan pada WBS mengenai ketidakdisiplinan karyawan • Discussion on Issues Related to Contract Management until the First Half of 2024 • Update on the Progress of the RJPP 2025-2029 PT HK and the Integration of PT HK and PT Waskita Tbk • Request for Written Response on the Proposed Changes to the Additional PMN TA 2024, Period II • Discussion on Complaints to the WBS Regarding Employee Indiscipline	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
33	5 September 2024 September 5, 2024	• Pembahasan 3 (tiga) Top Risks PT HK dalam rangka Tindaklanjut Pembahasan Risiko Portfolio BUMN tahun buku 2023 • Penyampaian *Update progress* rencana integrasi PT HK dan PT Waskita Tbk serta Permohonan arahan dan tanggapan tertulis Dekom • Permohonan pengesahan Rencana KPI Direksi secara individual th 2024 • *Update* revisi dokumen pedoman tata kelola terintegrasi dan dokumen Contingency Plan PT HK • Discussion of the 3 (three) Top Risks of PT HK in the context of Follow-up on the Risk Portfolio Discussion of State-Owned Enterprises for the 2023 Fiscal Year. • Presentation of the progress update on the integration plan of PT HK and PT Waskita Tbk, and request for direction and written response from the Board of Commissioners. • Request for approval of the 2024 individual KPI plan for the Board of Directors. • Update on the revision of the integrated governance guidelines and the Contingency Plan documents of PT HK.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
34	12 September 2024 September 12, 2024	• Pembahasan Kembali Usulan 3 Top Risk PT HK thn 2024 (Bersama WDU, DMR, DHCL) • Re-discussion of the Proposed 3 Top Risks of PT HK for 2024 (Together with WDU, DMR, DHCL)	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
35	13 September 2024 September 13, 2024	• Pembahasan usulan 3 top risks PT HK tahun 2024 • Pembahasan *Update* dokumen Contingency Plan PT HK tahun 2024 • Pembahasan Laporan Hasil dan Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko atas Penilaian Risk Maturity Index (RMI) PT HK tb 2023 • Penyampaian kembali audit intern terintegrasi • Surat pemberitahuan dari Triwin Law Firm yang disampaikan kepada Dewan Komisaris PT HK • Discussion of the Proposed 3 Top Risks of PT HK for 2024. • Discussion of the Update on PT HK's 2024 Contingency Plan Document. • Discussion of the Report on Results and the Roadmap for Improving Risk Management Implementation based on the Risk Maturity Index (RMI) Assessment for PT HK FY 2023. • Presentation of the integrated internal audit report. • Notification letter from Triwin Law Firm submitted to the Board of Commissioners of PT HK.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
36	20 September 2024 September 20, 2024	• Pembahasan laporan hasil audit tujuan tertentu atas Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh PT HK yang dibiayai PMN dan KMK penjaminan pemerintah • Pembahasan laporan hasil reviu atas Rencana penggunaan dana PMN TA 2024 PT HK dalam rangka penyelesaian ruas Jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung • Pembahasan surat pengaduan tagihan sewa scafolding PT HK Divisi Gedung (tembusan surat Asdep Infrastruktur) • Discussion of the report on the results of a specific purpose audit on the implementation of development projects by PT HK financed by PMN and government guarantee KMK. • Discussion of the report on the review of the PMN fund utilization plan for the 2024 fiscal year by PT HK in relation to the completion of the Kayu Agung-Palembang-Betung toll road section. • Discussion of the complaint letter regarding scaffolding rental bills from PT HK's Building Division (with a copy to the Assistant Deputy for Infrastructure).	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
37	23 September 2024 September 23 2024	• Pembahasan *Update* dokumen RJPP PT HK tahun 2025-2029 • Discussion of the Update on PT HK's RJPP Document for 2025-2029.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
38	24 September 2024 September 24, 2024	• Pembahasan pembentukan anak perusahaan sebagai Badan Usaha Pelaksana ("BUP") dalam proyek KPBU Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) • Discussion on the establishment of a subsidiary as the Implementing Business Entity ("BUP") for the PPP project of the Panorama I Flyover (Sitinjau Lauik I) development.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
39	27 September 2024 September 27, 2024	• Penyampaian kembali pedoman tata kelola terintegrasi konglomerasi perusahaan • Pemberitahuan penambahan materi nilai-nilai utama perusahaan pada code of conduct PT HK • Laporan dan penyampaian rencana penandatanganan berita acara rencana usaha dan penandatanganan PPJT ruas Palembang-Betung • Presentation of the updated integrated governance guidelines for the corporate conglomerate. • Notification of the addition of core values to the Code of Conduct of PT HK. • Report and presentation of the plan for signing the minutes of the business plan and the signing of the PPJT for the Palembang-Betung section.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus
40	4 Oktober 2024 October 4, 2024	• Pembahasan program kerja divisi HC dan Realisasi Sd Triwulan 3 tahun 2024 • Pembahasan kinerja dana pensiun PT HK tahun 2023-2024 • *Update* penyelesaian kasus hukum pembelian tanah di wilayah Indralaya • Tindak lanjut hasil audit BPK RI tahun 2020-2021 • Pembahasan awal RKAP 2025 PT HK • Discussion of the work program of the HC division and its realization as of the 3rd quarter of 2024. • Discussion of the performance of PT HK's pension fund for the 2023-2024 period. • Update on the resolution of the legal case regarding the land purchase in the Indralaya area. • Follow-up on the results of the BPK RI audit for the 2020-2021 period. • nitial discussion of PT HK's RKAP for 2025.	Agung Sabar Santoso Chairiah Thauriq Anwar Rifky Adrianto Firdaus

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
41	11 Oktober 2024 October 11, 2024	• Permohonan Tanggapan Tertulis atas Usulan KPI PMN PT HK TA 2024 Cadangan Investasi • Permohonan Pengesahan Rencana KPI Direksi secara Individual th 2024 • Pembahasan kinerja PT HKR • *Update* rencana pemberian SHL kepada PT HKR • Request for written feedback on the proposed KPI for PMN PT HK for the 2024 fiscal year - Investment Reserves. • Request for approval of the individual KPI plan for the Board of Directors for 2024. • Discussion of PT HKR's performance. • Update on the plan to provide SHL to PT HKR.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
42	18 Oktober 2024 October 18, 2024	• Pembahasan Lanjutan Usulan RKAP Tahun 2025 • Permohonan Tanggapan Tertulis Pelepasan dan Penghapusbukuan aktiva tetap bergerak PT HK Tahun 2024 • Penyampaian Dokumen Pelaporan Penggunaan Dana PMN TA 2022 tahap I dan II, PMN TA 2023 dan PMN TA 2024 periode September 2024 • Follow-up discussion on the proposed RKAP for 2025. • Request for written feedback on the disposal and write-off of PT HK's fixed movable assets for the 2024 fiscal year. • Submission of the reporting documents for the use of PMN funds for the 2022 fiscal year (Phase I and II), PMN funds for the 2023 fiscal year, and PMN funds for the 2024 fiscal year for the period of September 2024.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
43	25 Oktober 2024 October 25, 2024	• Laporan Audit Intern PT HK TW III tahun 2024 • Permohonan Tanggapan rencana Pendanaan ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi • Laporan Manajemen TW III tahun 2024 • Internal Audit Report of PT HK for Q3 2024. • Request for feedback on the funding plan for the Betung (Sekayu-Sp.)-Tempino-Jambi section. • Management Report for Q3 2024.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
44	1 November 2024 November 1, 2024	• Pembahasan proyek keuangan pendanaan tol ruas Tempino-Jambi • Laporan pelaksanaan tugas tim WBS Tw III tahun 2024 • Laporan Kinerja SMAP TW III tahun 2024 • Laporan Kinerja Divisi QHSSE TW III tahun 2024 • Discussion of the financing project for the Tempino-Jambi toll section. • Report on the tasks performed by the WBS team for Q3 2024. • SMAP Performance Report for Q3 2024. • QHSSE Division Performance Report for Q3 2024.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
45	8 November 2024 November 8, 2024	• Laporan Manajemen Kegiatan Teknologi Informasi sd Triwulan 3 tahun 2024 PT HK • Pembahasan Lanjutan *Contingency Plan* HK • *Update* Sengketa Pajak JORRS dan ATP • Management Report on Information Technology Activities as of the 3rd Quarter of 2024 for PT HK. • Follow-up discussion on the HK Contingency Plan. • Update on the Tax Dispute for JORRS and ATP.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
46	15 November 2024 November 15, 2024	• Laporan pemakaian fasilitas pinjaman per 30 September 2024 • Report on the utilization of loan facilities per September 30, 2024.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri

No.	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Participants
47	22 November 2024 November 22, 2024	• *Progress* audit laporan keuangan tahun buku 2024 PT HK • Laporan Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 1293/PDT/2024/PT DKI jo. Putusan Pengadilan negeri Jaktim 379/Pdt.G/2024/PMN Jkt tim • Pembahasan *progress* pembangunan proyek Rusun ASN 2 & proyek Kemenko 2 • Progress of the financial report audit for the 2024 fiscal year • Report on the decision of the Jakarta High Court Number 1293/PDT/2024/PT DKI in conjunction with the decision of the East Jakarta District Court Number 379/Pdt.G/2024/PMN Jkt Tim. • Discussion of the progress of the ASN 2 residential project and the Kemenko 2 project development.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
48	28 November 2024 November 28, 2024	• Pembahasan Rencana Audit atas Pelepasan Aset Tetap PT HK oleh SPI • Laporan atas Penerbitan Corporate Guarantee kepada Anak Perusahaan per 30 September 2024 • Pemaparan Costing dan Perhitungan Biaya Perolehan Aset Real Estate proyek H City Sawangan dan H Residence Sentul • Discussion of the audit plan for the disposal of fixed assets of PT HK by the SPI. • Report on the issuance of corporate guarantees to subsidiaries as of September 30, 2024. • Presentation on costing and the calculation of asset acquisition costs for the H City Sawangan and H Residence Sentul real estate projects.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
49	5 - 6 Desember 2024 December 5-6, 2024	• Pembahasan Kinerja Keuangan dan Operasional Anak Perusahaan PT HK per Oktober 2024 • Pembahasan isu strategis termasuk top risk dan permasalahan hukum anak perusahaan • Discussion of the financial and operational performance of PT HK's subsidiaries per October 2024. • Discussion of strategic issues, including top risks and legal matters of subsidiaries.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
50	12 Desember 2024 December 12, 2024	• Status Kesiapan tahapan implementasi ICOFR HK grup • Pembahasan gugatan DSU dengan HMW melalui BANI • Permasalahan kasus hukum PT Inasa di PT HKA • Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi TW III tahun 2024 • Status of readiness for the implementation stages of ICOFR for the HK Group • Discussion of the lawsuit between DSU and HMW through BANI. • Legal case issues involving PT Inasa at PT HKA. • Integrated Risk Management Report for Q3 2024.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri
51	19 Desember 2024 December 19, 2024	• Permohonan persetujuan atas Rencana Perpanjangan Jatuh Tempo utang afiliasi PT HKR • *Update* pembahasan dokumen contingency plan PT HK 2024 • Request for approval of the plan to extend the maturity of PT HKR's affiliate debt. • Update on the discussion of PT HK's 2024 contingency plan document.	Agung Sabar Santoso Chairiah Rifky Adrianto Firdaus Resi Ariyasa Qadri

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Table of Meeting Frequency and Attendance of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Attendance Percentage		
		Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Number of attendance	Persentase Percentage
Agung Sabar Santoso	Ketua Chairman	51	51	100%
Chairiah	Wakil Ketua Vice Chairman	51	51	100%
Wakhid Kurniawan Saputra*	Anggota member	11	11	100%
Thauriq Anwar**	Anggota member	39	39	100%
Rifky Adrianto Firdaus***	Anggota member	39	39	100%
Resi Ariyasa Qadri****	Anggota member	19	19	100%

*Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Maret 2024
**Berhenti menjabat sejak tanggal 1 Oktober 2024
***Mulai menjabat sejak tanggal 16 April 2024
****Mulai menjabat sejak tanggal 2 September 2024
* terminated from the position since March 28, 2024
** terminated from the position since October 1, 2024
*** Appointed for the position since April 16, 2024
**** Appointed for the position since September 2, 2024

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2024

AUDIT COMMITTEE'S WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION FOR 2024

No	Kegiatan Program	Jadwal Pelaksanaan Schedule
1.	Pelaksanaan Rapat internal Komite Audit bersama dengan Komite Manajemen Risiko Internal Audit Committee Meeting in collaboration with the Risk Management Committee.	Setiap Minggu every week
2.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit Coordination Meeting with the Board of Commissioners and the Audit Committee.	Setiap Minggu every week
3.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan SPI Coordination Meeting with the SPI	Setiap Bulan every month
4.	Pelaksanaan Rapat koordinasi dengan Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan Coordination Meeting with the Head of the Accounting and Finance Division.	Minimal Setiap 3 bulan untuk laporan manajemen risiko At least every 3 months for the risk management report
5.	Pemantauan audit oleh auditor eksternal (KAP) termasuk pendampingan ke lapangan (site visit) Monitoring of the audit by external auditors (KAP), including field assistance (site visit).	Oktober s.d Maret 2024 October until March 2024
6.	Pemantauan pelaksanaan proyek konstruksi di wilayah Monitoring of the implementation of construction projects in the region.	Minimal 2x setahun atau sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris At least twice a year or as assigned by the Board of Commissioners.

No	Kegiatan Program	Jadwal Pelaksanaan Schedule
7	Penyusunan telaah Komite tentang laporan manajemen	Setiap bulan untuk masalah tertentu. Bulan April, Juli dan Oktober untuk laporan triwulan, Bulan Maret untuk laporan tahunan Monthly for specific issues. In April, July, and October for quarterly reports, and in March for the annual report.
8.	Penyampaian telaah komite kepada Dewan Komisaris terkait aktivitas perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang terkait dengan RJPP, RKAP, aspek keuangan, aspek risiko dan aspek manajerial lainnya Submission of the committee's review to the Board of Commissioners regarding company activities that require the Board of Commissioners' approval, related to RJPP, RKAP, financial aspects, risk aspects, and other managerial aspects.	Sesuai dengan kebutuhan As needed.
9.	Program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, seminar dan sertifikasi Competency development program in the form of training, seminars, and certifications.	2 kali dalam setahun Twice a year
10	Pemilihan KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2024 Selection of KAP (Public Accounting Firm) to conduct the audit of the company's financial report for the 2024 fiscal year.	Bulan Mei 2024 May 2024
11	Penyusunan telaah atas RKAP tahun 2025 Preparation of the review of the RKAP for 2025.	Bulan Oktober October
12	Penyampaian telaah atas aspek keuangan, risiko dan GCG dalam annual report HK Submission of the review of financial, risk, and GCG aspects in the annual report of HK.	Bulan April April
13	Penyusunan Program Kerja Komite Audit tahun 2025 Preparation of the Audit Committee's work program for 2025.	Pada November November
14	Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit tahun 2024 kepada Dewan Komisaris Preparation of the Audit Committee's activity report for 2024 to the Board of Commissioners.	Bulan April, Juli, Oktober 2024 (Laporan Triwulanan) dan Bulan Januari 2025 (Laporan Tahunan) April, July, October 2024 (Quarterly Reports) and January 2025 (Annual Report)

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan dalam memberi dukungan kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan Karyawan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

The Nomination and Remuneration Committee is a supporting body of the Board of Commissioners that plays a role in assisting the Board of Commissioners in overseeing the implementation of nomination and remuneration policies for the Board of Directors, Management Team, and Employees, in accordance with the principles of good corporate governance.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugasnya secara kolegial dan bertindak independen;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
4. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi Nominasi sebagai berikut:
   a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

   b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
   c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
   d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan tahapan antara lain:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Duties and Responsibilities

1. The Nomination and Remuneration Committee performs its duties collegially and acts independently.
2. In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee is accountable to the Board of Commissioners.
3. The committee prepares and submits the Annual Work Program of the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners for approval.
4. The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee related to the Nomination function are as follows:
   a. Conducting evaluations and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - The composition of the positions of the Board of Directors and/or Board of Commissioners members;
      - The policies and criteria required in the Nomination process; and
      - The performance evaluation policies for the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
   b. Assisting the Board of Commissioners in evaluating the performance of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners based on the established benchmarks as evaluation materials;
   c. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the development program for the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and
   d. Proposing qualified candidates as members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders, with stages including:

- Mendapatkan usulan *selected talent* BUMN (Anggota Direksi dan pejabat setingkat di bawah Direksi) dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang kandidat untuk setiap pos jabatan Direksi yang ada saat ini, yang merupakan talent yang sudah direviu dan diusulkan oleh Direksi dengan pertimbangan antara lain berdasarkan:
  - » *Talent classification* yang memenuhi kategori "*high potensial*" atau sekurang-kurangnya "*promotable*";
  - » Kapasitas yang terdiri dari kompetensi aktual serta kemauan dan kecepatan belajar (*learning agility*);
  - » Evaluasi/penilaian dari Direksi secara mandiri berdasarkan *leaders professional judgement;*
  - » Mempertimbangkan pemenuhan program unleash talent terkait *top talent* perempuan dan *top talent* muda sesuai arah kebijakan Menteri BUMN.
- Melakukan validasi dan kalibrasi atas selected talent yang diusulkan oleh Direksi;
- Menyampaikan data *selected talent* yang sudah divalidasi kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan pembahasan sebagai *nominated talent* yang kemudian akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada Menteri/RUPS;

5. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi Remunerasi paling kurang:
   a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Sistem Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/ tantiem/insentif, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan;
      - Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group,* sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
      - Besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- Obtaining proposals for selected SOE talents (Board of Directors members and officials at the level below the Board of Directors) with at least 3 (three) candidates for each current Board of Director position, who are talents that have been reviewed and proposed by the Board of Directors with considerations including, but not limited to:
  - » Talent classification that meets the "high potential" category or at least "promotable";
  - » Capacity consisting of actual competencies as well as willingness and learning agility;
  - » Evaluation/assessment from the Board of Directors independently based on professional leadership judgment;
  - » Considering the fulfillment of the unleash talent program related to top female talent and top young talent in accordance with the policies of the Minister of BUMN (State-Owned Enterprises)
- Conducting validation and calibration of the selected talents proposed by the Board of Directors;
- Submitting the validated selected talent data to the Board of Commissioners for discussion as nominated talent, which will then be nominated by the Board of Commissioners to the Minister/General Meeting of Shareholders (GMS);

5. The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee related to the Remuneration function:
   a. Conducting evaluations and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - The remuneration system for the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, including the salary/honorarium system, provision of facilities, allowances, bonuses/tantiem/ incentives, pension system, evaluation of the system,
      - The remuneration policy for the members of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners, based on performance, risk, fairness compared to peer groups, the company's long-term goals and strategy, and the company's potential future revenue;
      - The amount of remuneration for the members of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners.

b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi.
c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

6. Menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
7. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Penugasan Lain

Selain tugas khusus sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian tugas lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:
   a. Nama anggota Komite yang diberi tugas;
   b. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
   c. Waktu penugasan;
   d. Sifat dan lingkup pekerjaan;
   e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.
2. Penugasan dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan dari suatu hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab yang menyangkut nominasi dan remunerasi;
3. Komite harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Untuk melakukan tugas-tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi berhak untuk mendapatkan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana dan aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komunikasi secara langsung dengan pihak terkait termasuk informasi, kegiatan operasional, keuangan dan manajemen Perusahaan.
3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & GCG serta pihak-pihak yang berkepentingan yang mendukung pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Assisting the Board of Commissioners in evaluating performance in alignment with the remuneration received by each member of the Board of Directors.
c. Conducting periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy.

6. Preparing the Nomination and Remuneration Committee Charter and reviewing it as needed, at least every 2 (two) years.
7. Preparing the Annual Work Plan and Budget and submitting it to the Board of Commissioners.

Other Assigmments

In addition to the specific duties mentioned above, the Board of Commissioners may assign other tasks to the Nomination and Remuneration Committee under the following conditions:

1. The assignment of other tasks to the Nomination and Remuneration Committee by the Board of Commissioners is done through a written order that outlines:
   a. The name of the committee member assigned the task;
   b. The purpose and objectives of the task;
   c. The duration of the assignment;
   d. The nature and scope of the task;
   e. Administrative matters related to the specific task.
2. The assignment may include, but is not limited to, an examination of the alleged errors in the decisions made by the Board of Directors or deviations in the implementation of the Board of Directors' decisions in relation to the duties and responsibilities concerning nomination and remuneration;
3. The Committee must submit a report on the implementation of other tasks with a high level of confidentiality, limited to the members of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Commissioners.

THE AUTHORITIES OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

1. In performing its duties, the Nomination and Remuneration Committee has the right to have full, free, and unrestricted access to the company's records, employees, funds, assets, and other resources related to the performance of its duties.
2. Direct communication with relevant parties, including information, operational activities, financial matters, and company management.
3. Coordinating with the Audit Committee, Risk Management & GCG Committee, and other relevant parties that support the execution of the Nomination and Remuneration Committee's duties.

4. Atas persetujuan Dewan Komisaris dapat mencari masukan dari para profesional di luar perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atas beban perusahaan.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-10.XII/DK/PTHK/2023 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hutama Karya (Persero). Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini merupakan pedoman dan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan transparansi proses nominasi dan remunerasi juga meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki cakupan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Persyaratan Komite
Bab III Organisasi Komite
Bab IV Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kode Etik Komite Nominasi dan Remunerasi

Bab V Rapat dan Hubungan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Bab VI Rencana Kerja, Anggaran, Honorarium dan Program Pengembangan Komite Nominasi dan Remunerasi
Bab VII Pelaporan, Akses dan Kerahasiaan Informasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Bab VIII Penutup

MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remuenrasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS.

4. With the approval of the Board of Commissioners, the committee may seek input from external professionals related to the performance of its duties at the company's expense.

THE CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In carrying out its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee refers to the Board of Commissioners' Decree Number SK-10.XII/DK/PTHK/2023 concerning the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT Hutama Karya (Persero). This Nomination and Remuneration Committee Charter serves as a guideline and formal document reflecting the commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors to create transparency in the nomination and remuneration processes, as well as to improve the quality, competence, and responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Charter of the Nomination and Remuneration Committee covers the following sections:
Chapter I: Introduction
Chapter II: Committee Requirements
Chapter III: Committee Organization
Chapter IV: Duties, Responsibilities, Authorities, and Code of Ethics of the Nomination and Remuneration Committee
Chapter V: Meetings and Working Relationships of the Nomination and Remuneration Committee
Bab VI Chapter VI: Work Plan, Budget, Honorarium, and Development Program of the Nomination and Remuneration Committee
Chapter VII: Reporting, Access, and Confidentiality of Information of the Nomination and Remuneration Committee
Chapter VIII: Closing

THE TERM OF OFFICE FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee is a maximum of 3 (three) years and may be extended once for a further 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss the committee member at any time. The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee who are also members of the Board of Commissioners is the same as their term of appointment as Commissioner, as determined by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

STRUCTURE, MEMBERSHIP, AND EXPERTISE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
Muhamad Lukman Edy	Ketua Chairman	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Teknik Sipil, Administrasi Pembangunan, Sosiologi dan Antropologi Civil Engineering, Development Administration, Sociology and Anthropology
Susdiyarto Agus Praptono	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Hukum Law
Mardiansyah	Anggota Member	BOD-1 di bidang SDM BOD-1 in the Human Resources field	Teknik Sipil, Human Capital Civil Engineering, Human Capital

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILE

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

The profile of the Nomination and Remuneration Committee per December 31, 2024, is presented below.

Muhamad Lukman Edy

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Wakil Komisaris Utama
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Vice President Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Term and Duration of Appointment: The term and duration of the Nomination and Remuneration Committee's appointment are in accordance with the term and duration of the Board of Commissioners' appointment.

Susdiyarto Agus Praptono

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris
Member of the Nomination and Remuneration Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Term and Duration of Appointment: The term and duration of the Nomination and Remuneration Committee's appointment are in accordance with the term and duration of the Board of Commissioners' appointment.

Mardiansyah*

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Bandung, 1978 | Born in Bandung, 1978.
Usia 46 tahun Per Desember 2024.
Age 46 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Bung Hatta (2002). • Magister di Bidang Proyek Manajemen Universitas Indonesia (2019).	• Bachelor of Civil Engineering, Bung Hatta University (2002). • Master's Degree in Project Management, Universitas Indonesia (2019).
Sertifikasi Certification	• Ahli Utama Teknik Jembatan (2023-2028) • Certified Human Resources Manager (CHRM)(2022-2025) • Qualified Risk Management Professional (QRMP) (2022-2026)	• Senior Expert in Bridge Engineering (2023-2028). • Certified Human Resources Manager (CHRM)(2022-2025) • Qualified Risk Management Professional (QRMP) (2022-2026)
Pengalaman Kerja Employment History	• EVP Divisi Human Capital (2022-sekarang). • Kepala Satuan Pengawasan Intern PT HK Infrastruktur (2021-2022). • Kepala Dept. Infrastruktur PT HK Infrastruktur (2020-2021)	• EVP of Human Capital Division (2022-present). • Head of the Internal Audit Unit • Head of Infrastructure Department, PT HK Infrastruktur (2020-2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) Nomor SK-08.X/DK/PTHK/2020 tanggal 20 Oktober 2020	Decision of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) Number SK-08.X/DK/PTHK/2020 dated October 20, 2020.
Periode dan Masa Jabatan Period and The term of office	2020 - sekarang	2020 - present
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	EVP Divisi Human Capital PT Hutama Karya (Persero)	EVP of Human Capital Division

* Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi melekat pada jabatan Pejabat satu tingkat di bawah direksi yang membidangi pengelolaan Human Capital.
* The position of the Nomination and Remuneration Committee is attached to the position of an official one level below the board of directors who is responsible for managing Human Capital.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EMPLOYMENT HISTORIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Educational Qualifications and Employement Histories of The Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Employment Histories
Muhamad Lukman Edy	Ketua Chairman	• Sarjana Teknik Sipil • Master Administrasi Pembangunan • Doktor Sosiologi dan Antropologi • Bachelor of Civil Engineering • Master of Development Administration • Doctor of Sociology and Anthropology	Memiliki pengalaman kerja sebagai Anggota MPR dan anggota DPR Has work experience as a Member of the People's Consultative Assembly (MPR)

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Employment Histories
Susdiyarto Agus Praptono	Anggota Member	• Sarjana Hukum • Master Hukum • Bachelor of Law • Master of Law	Memiliki pengalaman kerja di Kejaksaan Agung Has work experience at the Attorney General's Office.
Mardiansyah	Anggota Member	• Sarjana Teknik Sipil • Magister di Bidang Proyek Manajemen • Bachelor of Civil Engineering • Master's Degree in Project Management	Memiliki pengalaman kerja di PT HK Infrastruktur Has work experience at PT HK Infrastruktur.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

INDEPENDENCY OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Independency of Nomination and Remuneration Committee

Aspek Independensi Independency Aspects	Muhamad Lukman Edy	Susdiyarto Agus Praptono	Mardiansyah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have any financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not have any management relationship with the company, subsidiaries, or affiliated companies.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have any share ownership in the company.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Does not have any family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination and Remuneration Committee.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah not serving as an executive of a political party, government official, or in any government position.	√	√	√

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

ENHANCEMENT PROGRAM FOR THE NOMINATION AND REMUNERATION COMITTEE

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan** Types of Training and Competency Development Materials / Training	**Waktu dan Tempat Pelaksanaan** Time and Place	**Penyelenggara** Organizers
Muhamad Lukman Edy	Ketua Chairman	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency enhancement program can be seen in the Training and/or Competency Development section for the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Susdiyarto Agus Praptono	Anggota Member	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency enhancement program can be seen in the Training and/or Competency Development section for the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Mardiansyah	Anggota Member	-	-	-

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan dan hasilnya harus dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero).
2. Rapat dapat dilaksanakan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Di luar rapat berkala tersebut, Komite Nominasi Dan Remunerasi dapat melakukan rapat sesuai kebutuhan dengan agenda yang disepakati bersama oleh anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi.
4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila:
   a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
   b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota yang hadir merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Pemanggilan Rapat Komite dilakukan oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Ketua Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.
6. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang

Policy on the Nomination and Remuneration Committee Meetings

1. The Nomination and Remuneration Committee meetings shall be held at least once every four (4) months, and the results must be reported in writing to the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero).
2. Meetings may be conducted either in person or virtually through teleconference media or other means that allow all meeting participants to see and/or hear each other directly and actively participate in the meeting.
3. In addition to the regular meetings, the Nomination and Remuneration Committee may hold meetings as needed, with agendas agreed upon by the committee members.
4. The Nomination and Remuneration Committee meeting may only be held if:
   a. It is attended by the majority of the Committee members.
   b. One of the majority members present is the Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee.
5. The Committee meeting shall be convened by the Chairperson of the Committee. In the event that the Chairperson is unable to attend, the meeting shall be convened by the Vice Chairperson appointed by the Chairperson.
6. The notice of the meeting shall be given at least fourteen (14) days in advance, and in urgent circumstances, a minimum of three (3) days prior to the meeting date. The notice shall specify the

akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang disepakati.

7. Dalam hal diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
8. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dibantu oleh Sekretaris Komite (jika ada) untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
   a. Mengatur jadwal rapat.
   b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
   c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
   d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
9. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite.
10. Dalam hal Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite berhalangan pada jam dimulai rapat sesuai undangan, maka atas izin Ketua Komite rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dapat hadir. Jika anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin rapat terlambat datang, atau karena sesuatu hal harus meninggalkan rapat sementara, maka rapat sementara dipimpin oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang paling senior masa jabatannya.
11. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun.
12. Rapat Komite yang dipimpin oleh selain Ketua Komite, keputusan yang akan menjadi usulan rapat tetap harus mendapat persetujuan dari Ketua Komite.
13. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.
14. Komite Nominasi Dan Remunerasi dapat meminta Direksi atau Karyawan Perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
15. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

day, date, time, venue, and agenda of the meeting, which shall be held at the Company's registered office or another location within the Republic of Indonesia as agreed upon.

7. If necessary, the Nomination and Remuneration Committee may invite resource persons from the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other relevant internal or external parties.
8. To facilitate the execution of its duties, the Nomination and Remuneration Committee may be assisted by a Committee Secretary (if available) in carrying out secretarial functions, including:
   a. Arranging meeting schedules.
   b. Proposing and coordinating with necessary resource persons.
   c. Preparing and distributing meeting invitations and materials.
   d. Drafting and disseminating meeting minutes.
9. The Nomination and Remuneration Committee meeting shall be chaired by the Chairperson of the Committee. If the Chairperson is unable to attend, the meeting shall be chaired by the Vice Chairperson of the Committee.
10. In the event that both the Chairperson and the Vice Chairperson are unable to attend at the scheduled start time of the meeting, the meeting may be chaired by a member of the Board of Commissioners who is present, subject to the Chairperson's approval. If the designated member of the Board of Commissioners arrives late or must temporarily leave the meeting for any reason, the meeting shall be temporarily chaired by the most senior member of the Nomination and Remuneration Committee in terms of tenure.
11. Each Committee member is granted full freedom to express their professional opinions during discussions on every agenda item without any external interference.
12. If a meeting is chaired by someone other than the Chairperson, any decisions proposed in the meeting must still receive approval from the Chairperson.
13. The Nomination and Remuneration Committee meetings may be attended by members of the Board of Commissioners.
14. The Nomination and Remuneration Committee may request the presence of members of the Board of Directors or Company employees to attend meetings and provide necessary information.
15. Decisions in the Nomination and Remuneration Committee meetings shall be made through deliberation to reach a consensus.
16. If a consensus cannot be reached, decisions shall be made based on a majority vote.

17. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang akan memutuskan.
18. Jika dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinions),* maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
19. Setiap anggota Komite menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas Risalah Rapat, dengan mempertimbangkan ketentuan batas waktu penyampaian Risalah Rapat yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Komite.
20. Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi harus didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang dibuat oleh anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi atau staf sekretariat lainnya yang ditunjuk.
21. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

22. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

23. Daftar absensi sebagai bukti kehadiran rapat wajib diadakan pada setiap pelaksanaan rapat dan menjadi bagian dari Risalah Rapat. Jika rapat dilaksanakan secara virtual melalui media telekonferensi, maka bukti kehadiran pada rapat dapat berupa tangkapan layar media telekonferensi.
24. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Komite.
25. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggoa Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
26. Tata tertib rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.

17. In terms of a tie in the voting process, the final decision shall be made by the Chairperson of the meeting.

18. If there are dissenting opinions in the decision-making process, the opinions must be recorded in the meeting minutes along with the reasons for the disagreement

19. Each Committee member shall provide approval, objections, and/or proposed revisions to the Meeting Minutes, taking into account the time limit provisions stipulated in the Committee Meeting Rules.

20. The Nomination and Remuneration Committee meeting must be documented in meeting minutes, which shall be prepared by a member of the Committee or other designated secretariat staff.
21. The meeting minutes shall be signed by the Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee and submitted to the Board of Commissioners and all members of the Nomination and Remuneration Committee.
22. Each Committee member is entitled to receive a copy of the Meeting Minutes, even if they were not present at the meeting.
23. An attendance list as proof of meeting participation must be provided for each meeting and shall be included as part of the Meeting Minutes. If the meeting is conducted virtually via teleconference, attendance proof may be in the form of a screenshot of the teleconference session.

24. The attendance of Committee members at meetings shall be reported in the Committee's Quarterly Report and Annual Report.
25. The number of meetings held, the attendance record of each Committee member, and a summary report highlighting key issues discussed by the Committee shall be disclosed in the Annual Report.
26. The Committee meeting rules and procedures are outlined in a separate regulation.

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

MEETING AGENDA OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Meeting Agenda of Nomination and Remuneration Committee

No.	Tanggal Rapat Dates	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Keterangan (Nominasi/ Remunerasi) (Nomination / Remuneration)
1	15 Januari 2024 January 15, 2024	Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Hutama Mambelim Trans Papua Fit and Proper Test for the Proposed President Commissioner and President Director of PT Hutama Mambelim Trans Papua.	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono • Mardiansyah	Nominasi Nomination
2	5 Februari 2024 February 5, 2024	Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan Sekretaris Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan PT HK Fit and Proper Test for the Proposed Corporate Secretary and Board of Directors of PT HK's Subsidiaries.	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono • Mardiansyah	Nominasi Nomination
3	18 Maret 2024 March 18, 2024	Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan *Talent Pool* Direksi BUMN Fit and Proper Test for the Proposed Talent Pool of SOE Directors	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono	Nominasi Nomination
4	14 Mei 2024 May, 14 2024	• Pembahasan usulan calon EVP SPI • Pembahasan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT HK tahun 2024 • Discussion on the Proposed Candidate for EVP of SPI • Discussion on the Proposed Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PT HK for the Year 2024	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono • Mardiansyah	Nominasi & Remunerasi Nomination and Remunreation
5	16 Juli 2024 July 16, 2024	Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan Direktur Utama PT HKR Fit and Proper Test for the Proposed President Director of PT HKR	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono • Mardiansyah	Nominasi Nomination
6	23 Juli 2024 July 23, 2024	Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan Direktur Bisnis & Teknik PT HKR Fit and Proper Test for the Proposed Director of Business & Engineering of PT HKR	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono • Mardiansyah	Nominasi Nomination
7	23 September 2024 September 23, 2024	Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan EVP Sekper dan EVP SPI Fit and Proper Test for the Proposed EVP of Corporate Secretary and EVP of Internal Audit	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono • Mardiansyah	Nominasi Nomination
8	30 September 2024 September 30, 2024	Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan Pengurus PUB Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Panorama (Sitinjau Lauik I) Fit and Proper Test for the Proposed Management of the PUB KPBU Project for the Construction of the Panorama Flyover (Sitinjau Lauik I)	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono • Mardiansyah	Nominasi Nomination
9	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Pembahasan *Update* daftar usulan selected talent dan daftar BOD-1 PT HK Discussion on the Updated List of Proposed Selected Talent and the List of BOD-1 of PT HK	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono • Mardiansyah	Nominasi Nomination
10	2 Desember 2024 December 2, 2024	Pelaksanaan Fit and Proper Test terhadap usulan Selected Talent PT HK Fit and Proper Test for the Proposed Selected Talent of PT HK	• Muhamad Lukman Edy • Susdiyarto Agus Praptono	Nominasi Nomination

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Level of Attendance of the Nomination and Remuneration Committee meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Meetings		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran Attendance Number and Percentage		
		Jumlah Rapat Meeting Numbers	Jumlah Kehadiran Attendance Numbers	Persentase Percentage
Muhamad Lukman Edy	Ketua Chairman	10	10	100%
Susdiyarto Agus Praptono	Anggota member	10	10	100%
Mardiansyah	Anggota member	10	8	80%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan Komisaris Utama dan Direktur Utama Anak Perusahan.
2. Pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap usulan *Talent Pool* Direksi BUMN.
3. Pembahasan usulan calon EVP SPI.
4. Pembahasan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Hutama Karya tahun 2024.
5. Pembahasan *update* daftar usulan *selected talent* dan daftar BOD-1 Hutama Karya.

WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE DUTIES IN 2024

During 2024, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties, among others:

1. Implementation of Fit and Proper Test on the proposal of President Commissioner and President Director of Subsidiaries.
2. Implementation of Fit and Proper Test on the proposed Talent Pool of Directors of SOEs.
3. Discussion of the proposed EVP SPI candidate.
4. Discussion of the proposed Remuneration of the Board of Commissioners and Directors of Hutama Karya in 2024.
5. Discussion of updates to the list of selected talent proposals and the list of BOD-1 Hutama Karya.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

1. Sumber Bakal Calon Direksi Perusahaan berasal dari:
   a. Talenta Kementerian BUMN, yang terdiri dari:
      - Pejabat pimpinan tinggi madya;
      - Pejabat pimpinan tinggi pratama; dan/atau
      - Jabatan administrator serta pejabat fungsional yang memiliki jenjang paling rendah setara dengan pejabat administrator

DIRECTOR SUCCESSION POLICY

1. Sources of Prospective Company Directors
   a. Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) Talent, consisting of:
      - Senior High Leadership Officials;
      - Primary High Leadership Officials; and/or
      - Administrative Officials and Functional Officials with a rank at least equivalent to an Administrative Official.

b. Talenta BUMN, yang terdiri atas:

- Direksi BUMN;
- karyawan yang jabatannya 1 (satu) tingkat di bawah Direksi BUMN;
- Direksi atau karyawan yang jabatannya 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Anak Perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang berkontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis bagi BUMN; dan/atau
- Direksi atau karyawan yang jabatannya 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Anak Perusahaan yang diperlakukan sama dengan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Talenta Eksternal.

2. Talenta yang sudah dinominasikan, selanjutnya ditetapkan sebagai *Nominated Talent*.
3. Terhadap Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang akan ditetapkan sebagai *Eligible Talent* dilakukan pemeriksaan latar belakang oleh Deputi berdasarkan berbagai sumber/informasi yang terkait, termasuk dalam hal ini mempertimbangkan dan memperhatikan daftar dan rekam jejak yang telah ditetapkan oleh Menteri.
4. Penilaian terhadap *Eligible Talent* yang akan ditetapkan sebagai Qualified Talent meliputi pemenuhan persyaratan materiil melalui penilaian kompetensi, kualifikasi profesional (*professional qualification*) dan karakter (*traits*).
5. Asesmen dilakukan oleh Lembaga Profesional yang dipilih yang memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis.
6. Ketentuan mengenai metodologi dan hasil Asesmen serta pembiayaan kepada Lembaga Profesional ditetapkan oleh Menteri.
7. Asesmen terhadap standar kompetensi terdiri dari:
   a. Kepemimpinan digital (*digital leadership*);
   b. Kemampuan bisnis global (*global business savvy*);
   c. Fokus pada pelanggan (*customer focus*);
   d. Membangun hubungan bisnis strategis (*building strategic partnership*);
   e. Berorientasi strategis (*strategic orientation*);
   f. Mendorong eksekusi (*driving execution*);
   g. Mendorong inovasi (*driving innovation*);
   h. Mengembangkan kemampuan organisasi (*developing organizational capabilities*);
   i. Memimpin perubahan (*leading change*);
   j. Mengelola keberagaman (*managing diversity*).

b. State Owned Enterprises (SOE) Talent, consisting of:

- Directors of SOE
- Employees holding positions one level below the Board of Directors of SOE;
- Directors or employees holding positions one level below the Board of Directors in SOE subsidiaries/joint ventures that contribute significantly and/or hold strategic value for the SOE; and/or

- Directors or employees holding positions one level below the Board of Directors in subsidiaries treated as SOE in accordance with applicable laws and regulations.

c. External Talent.

2. Once a talent has been nominated, they will be designated as Nominated Talent.
3. Nominated Talent being considered for Eligible Talent status will undergo a background check conducted by the Deputy. This assessment is based on various relevant sources of information, including a review of records and track records established by the Minister.
4. The assessment of Eligible Talent for designation as Qualified Talent includes meeting material requirements through competency evaluation, professional qualifications, and character traits assessment.
5. The assessment is conducted by a Professional Institution that meets both administrative and technical requirements.
6. The methodology, results, and funding for the assessment conducted by the Professional Institution are determined by the Minister.
7. Competency Standards Assessed
   a. digital leadership
   b. global business savvy
   c. customer focus
   d. building strategic partnership
   e. strategic orientation
   f. driving execution
   g. driving innovation
   h. developing organizational capabilities
   i. leading change
   j. managing diversity

8. Asesmen terhadap kualifikasi profesional (*professional qualification*) terdiri dari:
   a. keuangan (*financial*);
   b. komersial (*commercial*);
   c. sumber daya manusia (*human resources*);
   d. operasional (operational); dan
   e. teknologi (*technology*).
9. Asesmen terhadap karakter (*traits*) terdiri dari:
   a. keterbukaan (*openness*);
   b. kesadaran (*conscientiousness*);
   c. ekstraversi (*extraversion*);
   d. mudah akur atau mudah (*agreeableness*) dan bersepakat
   e. toleransi pada tekanan (*stress tolerance*).
10. Sebelum dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, kandidat harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lainnya.
11. Evaluasi pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lainnya dilakukan oleh Deputi.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk menghasilkan Kandidat Direksi dilakukan oleh Komite Suksesi.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan melalui wawancara atau metode lain yang disepakati oleh Komite Suksesi.
14. Deputi menyampaikan Daftar Qualified Talent yang berasal dari Talent Pool Kementerian BUMN untuk setiap posisi/jabatan Direksi yang akan berakhir dan/atau diganti kepada Ketua Komite Suksesi.
15. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan atau penataan Direksi Perusahaan, Komite Suksesi melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk diusulkan sesuai peringkat kepada Menteri BUMN untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Direksi Perusahaan.

8. Professional Qualification Standards Assessed
   a. financial
   b. commercial
   c. human resources
   d. operational and
   e. technology
9. The character (traits) assessment includes:
   a. openness
   b. conscientiousness
   c. extraversion
   d. agreeableness
   e. stress tolerance
10. Candidates must fulfill formal requirements and other relevant criteria before undergoing the Fit and Proper Test.
11. The evaluation of formal and other requirements is conducted by the Deputy
12. The Fit and Proper Test to determine Director Candidates is conducted by the Succession Committee.
13. The test is conducted through interviews or other methods as agreed upon by the Succession Committee.
14. The Deputy submits the List of Qualified Talent from the Ministry of SOEs' Talent Pool for each Director position that is set to expire or be replaced to the Chairperson of the Succession Committee.
15. In terms of a vacant position or restructuring of the Company's Board of Directors, the Succession Committee conducts a Fit and Proper Test and submits the ranked candidates to the Minister of SOEs, who will select and appoint the new Director.

Komite Manajemen Risiko dan GCG
Risk Management and GCG Committee

Komite Manajemen Risiko dan GCG (KMRGCG) dibentuk melalui keputusan Dewan Komisaris untuk memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan atas manajemen risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. KMRGCG berkoordinasi dengan Divisi Pengelolaan Risiko berkenaan dengan fungsi pengawasan terkait dengan efektivitas pelaksanaaan manajemen risiko. Koordinasi dilakukan secara berkala maupun dengan cara lainnya untuk membahas progres dari setiap tahapan pengelolaan risiko Perusahaan.

The Risk Management and Corporate Governance Committee (KMRGCG) was established by a resolution of the Board of Commissioners to strengthen its oversight function in monitoring risk management and the implementation of corporate governance carried out by the Board of Directors. KMRGCG coordinates with the Risk Management Division regarding its supervisory function to ensure the effectiveness of the company's risk management implementation. This coordination is conducted regularly or through other means to review the progress of each stage of the company's risk management process.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

KMRGCG bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. KMRGCG bekerja secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, KMRGCG harus mengetahui lingkup pekerjaannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang dilakukan oleh setiap Divisi, anak dan cucu perusahaan dan melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas implementasi manajemen risiko dengan tahapan sebagai berikut:

    a. Proses identifikasi risiko, analisis dampak risiko, pemilihan metode pengelolaan risiko yang tepat, implementasi metode tersebut dan evaluasinya dalam kaitan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG);
    b. Proses pengendalian potensi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya, khususnya risiko yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari suatu keputusan/tindakan yang akan diambil oleh Direksi;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

KMRGCG operates independently in carrying out its duties as well as in reporting and is directly accountable to the Board of Commissioners. The committee works collectively to assist the Board of Commissioners by providing professional and independent opinions on reports or matters submitted by the Board of Directors. Additionally, KMRGCG undertakes other tasks related to the responsibilities of the Board of Commissioners.

In carrying out its responsibilities, KMRGCG must understand the scope of its work, which includes the following:

1. Conducting reviews and providing recommendations to the Board of Commissioners on the effectiveness of the Company's risk management implementation, carried out by each Division, subsidiary, and sub-subsidiary. This is done through regular meetings or other means to discuss the implementation of risk management, following these stages:
    a. The process of identifying risks, analyzing risk impacts, selecting appropriate risk management methods, implementing those methods, and evaluating them in relation to good corporate governance (GCG).
    b. The process of controlling potential risks that may affect the Company's ability to achieve its goals and objectives, particularly risks that may arise as a consequence of decisions/actions taken by the Board of Directors.

c. Proses penilaian terhadap kemungkinan/ probabilitas risiko-risiko akan terjadi dan konsekuensinya;
d. Proses penyusunan rencana mitigasi dalam upaya upaya pengelolaan risiko-risiko untuk mengurangi risiko tersebut dan/atau kemungkinan pada tingkat yang dapat diterima;
e. Proses *Monitoring* atas pelaksanaan realisasi mitigasi risiko dan kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun;

2. Melakukan pengawasan atas rencana dan realisasi kerja dari Divisi Pengelolaan Risiko;
3. Melakukan analisis dan evaluasi atas peta risiko yang disampaikan dalam usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi;
4. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan, sesuai kebutuhan, termasuk risiko pada perjanjian dengan pihak ketiga dan aksi korporasi yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris;
5. Dalam hal Direksi menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan, maka tugas Komite Manajemen Risiko adalah:
   a. Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;
   b. Melakukan *Monitoring* pekerjaan konsultan melalui Divisi anajemen Risiko.
6. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tata Kelola Perusahaan dengan melakukan analisis kesesuaian pengurusan perusahaan dengan peraturan yang berlaku dan *best practices*;

7. Daiam hal Direksi menganggap perlu menggunakan konsultan GCG dalam pelaksanaan *Self Assessment* GCG, maka tugas KMRGCG adalah:
   a. Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;
   b. Melakukan *Monitoring* pekerjaan konsultan melalui Sekretaris Perusahaan.
8. Melakukan reviu dan *Monitoring* atas pelaksanaan prosedur QHSSE di PT Hutama Karya (Persero);
9. Menyusun Piagam Komite Manajemen Risiko dan GCG dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
10. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

c. The process of assessing the likelihood/ probability of risks occurring and their consequences.
d. The process of developing mitigation plans as part of risk management efforts to reduce risks and/or maintain them at an acceptable level.
e. The process of monitoring the implementation of risk mitigation measures and their alignment with the established plans.

2. Monitoring the planning and implementation done by the Risk Management Division
3. Conducting analysis and evaluation of the risk map presented in the proposed Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the Long-Term Corporate Plan (RJPP) submitted by the Board of Directors.
4. Discussing critical risks within the Company's units as needed, including risks asscociated with agrrements with third parties and corporate actions that fall within the supervisory authority of the Board of Commissionsers

5. In terms of Board of Directors decides that it is necessary to engage an independent risk management consultant to reassess the Company's implemented risk management processes, the duties of the Risk Management Committee shall include :
   a. Providing input on the criteria and competencies of the consultant.
   b. Monitoring the consultant's work through the Risk Management Division.
6. Conducting reviews and providing recommendations to the Board of Commissioners on corporate governance implementation by analyzing the compliance of corporate management with applicable regulations and best practices.
7. In the event that the Board of Directors deems it necessary to engage a GCG consultant for the implementation of the GCG Self-Assessment, the duties of KMRGCG shall include:
   a. Providing input on the criteria and competencies of the consultant.
   b. Monitoring the consultant's work through the Corporate Secretary.
8. Conducting reviews and monitoring the implementation of QHSSE procedures at PT Hutama Karya (Persero).
9. Preparing the Charter of the Risk Management and GCG Committee and reviewing it as needed, at least once every two years.
10. Developing the Annual Work Plan and Budget and submitting it to the Board of Commissioners.

Penugasan Lain

Selain tugas khusus sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Manajemen Risiko dan GCG dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian tugas lain kepada Komite Manajemen Risiko dan GCG oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:
   a. Nama anggota Komite yang diberi tugas;
   b. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
   c. Waktu penugasan;
   d. Sifat dan lingkup pekerjaan;
   e. Hal-hal administratif yang berkaian dengan tugas khusus dimaksud.
2. Tugas lain dapat mencakup tugas di luar bidang manajemen risiko dan GCG yang menjadi lingkup pengawasan dan arahan Dewan Komisaris, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaiannya dengan tugas dan tanggung jawabnya;
3. Komite harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota KMRGCG dan anggota Dewan Komisaris.

Other Assignments

In addition to the specific duties mentioned above, the Board of Commissioners may assign other tasks to the Risk Management and GCG Committee under the following conditions:

1. The assignment of additional tasks to the Risk Management and GCG Committee by the Board of Commissioners must be carried out through a written directive specifying:
   a. The name of the Committee member assigned to the task;
   b. The objectives and goals of the assignment;
   c. The duration of the assignment;
   d. The nature and scope of the work;
   e. Administrative matters related to the specific assignment.
2. Other tasks may include assignments beyond the scope of risk management and GCG that fall under the supervision and direction of the Board of Commissioners. These may include, but are not limited to, reviewing alleged errors in Board of Directors' meeting decisions or deviations in the implementation of meeting resolutions in relation to their duties and responsibilities.
3. The Committee must submit a report on the execution of additional tasks while maintaining the highest level of confidentiality, ensuring that access is restricted to members of the Risk Management and GCG Committee and the Board of Commissioners.

WEWENANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

1. KMRGCG mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaian dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, KMRGCG wajib bekerjasama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen;
3. KMRGCG mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan Penerapan GCG, Assesor Independen Manajemen Risiko dan penerapaan GCG, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite;
4. Jika diperlukan, KMRGCG dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen diluar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;

THE AUTHORITIES OF RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

1. The Risk Management and GCG Committee (KMRGCG) has the authority to access company documents, data, and information related to employees, funds, assets, and other company resources necessary for the execution of its duties.
2. In exercising its authority, KMRGCG is required to collaborate with its working partners, including the Supporting Bodies of the Board of Commissioners and relevant work units at the management level.
3. KMRGCG has the authority to communicate directly with employees, including the Board of Directors, individuals responsible for risk management and GCG implementation, independent risk management and GCG assessors, and other relevant parties related to the Committee's duties and responsibilities.
4. If necessary, KMRGCG may engage experts and/or independent consultants outside the Committee members to assist in the execution of its duties, with the approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense.

5. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, KMRGCG dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc,* dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya;
6. KMRGCG melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya KMRGCG mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-04.VII/DK/PTHK/2022 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko dan GCG PT Hutama Karya (Persero). Piagam KMRGCG ini disusun sebagai acuan bagi Komite dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris Perseroan agar Komite dapat bekerja lebih optimal sehingga penerapan Pengendalian risiko dan Penerapan Tata Kelola dapat lebih baik. Piagam Komite Manajemen Risiko dan GCG memiliki cakupan sebagai berikut:

1. Pendahuluan
   Menjelaskan terkait latar belakang, visi dan misi, maksud dan tujuan, landasan hukum serta ruang lingkup.
2. Organisasi dan Kode Etik Komite Manajemen Risiko dan GCG
   Menjelaskan terkait pembentukan, komposisi dan struktur organisasi, persyaratan anggota Komite, pengangkatan dan pemberhentian, independensi dan masa jabatan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak Komite Manajemen Risiko dan GCG
   Menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak Komite Manajemen Risiko dan GCG.
4. Kode Etik Komite Manajemen Risiko dan GCG
   Menjelaskan terkait integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG.
5. Rapat dan Hubungan Kerja Komite Manajemen Risiko dan GCG
   Menjelaskan terkait kegiatan rapat dan hubungan kerja Komite Manajemen Risiko dan GCG.
6. Rencana Kerja, Anggaran dan Program Pengembangan Komite Manajemen Risiko dan GCG
   Menjelaskan terkait rencana kerja, anggaran, honorarium dan program pengembangan.
7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
   Menjelaskan terkait pertanggungjawaban, pelaporan, akses dan kerahasiaan informasi.

5. If required, KMRGCG may establish an ad hoc team to carry out its duties and responsibilities, with the criteria and assignment period adjusted according to the nature of the work.
6. KMRGCG exercises other authorities as assigned by the Board of Commissioners.

THE CHARTERS OF RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

In carrying out its duties and responsibilities, KMRGCG refers to the Board of Commissioners' Decree Number SK-04.VII/DK/PTHK/2022 concerning the Charter of the Risk Management and GCG Committee of PT Hutama Karya (Persero). This KMRGCG Charter is drafted as a guideline for the Committee in performing its role as a supporting body to the Company's Board of Commissioners, ensuring that the Committee operates more effectively to enhance the implementation of risk control and corporate governance. The Risk Management and GCG Committee Charter covers the following aspects:

1. Introduction
   Provides an overview of the background, vision and mission, purpose and objectives, legal basis, and scope of work.
2. Organization and Code of Ethics of the Risk Management and GCG Committee
   Describes the formation, composition, and organizational structure, member requirements, appointment and dismissal, independence, and tenure of the Committee.
3. Duties, Responsibilities, Authorities, and Rights of the Risk Management and GCG Committee
   Explains the duties and responsibilities, authority, and rights of the Risk Management and GCG Committee.
4. Code of Ethics of the Risk Management and GCG Committee
   Covers integrity, objectivity, confidentiality, and competency of the Committee members.
5. Meetings and Working Relations of the Risk Management and GCG Committee
   Outlines meeting activities and the working relationship of the Risk Management and GCG Committee.
6. Work Plan, Budget, and Development Program of the Risk Management and GCG Committee
   Details the work plan, budget, remuneration, and development programs.
7. Accountability and Reporting
   Defines accountability, reporting mechanisms, access, and confidentiality of information.

8. Evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko dan GCG
   Menjelaskan terkait periode dan bentuk evaluasi kinerja serta indikator kinerja Komite Manajemen Risiko dan GCG.
9. Penutup
   Menjelaskan terkait masa berlaku, tanggung jawab penerapan dan reviu Piagam.

8. Performance Evaluation of the Risk Management and GCG Committee
   Explains the evaluation period, evaluation methods, and key performance indicators for the Committee.
9. Closing Provisions
   Specifies the validity period, responsibilities for implementation, and review of the Charter.

MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

1. Masa jabatan anggota KMRGCG yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Masa jabatan anggota KMRGCG yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari pada masa jabatan Komusaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. Masa jabatan anggota KMRGCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TERM OF OFFICE OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

1. The term of office of KMRGCG members who are members of the Board of Commissioners is the same as their tenure as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders.
2. The term of office of KMRGCG members who are from the Board of Commissioners must not exceed the term of the Commissioners and may only be reappointed for one (1) additional term.
3. The term of office of KMRGCG members who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of three (3) years and may be extended once for a term of two (2) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

STRUCTURE, MEMBERSHIP, AND EXPERTISE OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

Nama Name	**Jabatan** Position	**Keterangan** Description	**Keahlian** Expertise
Iwan Suprijanto	Ketua Chair	Komisaris Commissioner	Teknik Arsitektur Architecture Engineering
Wahyu Muryadi	Wakil ketua Vice chair	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ekonomi, Manajemen Economics, Management
Ira Ariani Chaerunisa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota Civil Engineering, Regional and City Planning
Maria Ulpah*	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Ekonomi, Manajemen Economics, Management
M. Budi Prasetyo**	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Ekonomi, Manajemen Economics, Management

*Berhenti menjabat sejak tanggal 2 September 2024
**Mulai menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2024
*Stopped serving on September 2, 2024
**Started serving on August 16, 2024

PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Profil Komite Manajemen Risiko dan GCG per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

PROFILE OF RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

Profile of Risk Management and GCG Committee as of December 31, 2024 is as follows.

Iwan Suprijanto

Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG/Komisaris
Chairman of the Risk Management and GCG Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko dan GCG sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Wahyu Muryadi

Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG/Komisaris Independen
Member of the Risk Management and GCG Committee/Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko dan GCG sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Ira Ariani Chaerunisa

Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG (Pihak Independen)
Member of the Risk Management and GCG Committee

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Bandung, 1983 | Born in Bandung, 1983.
Usia 41 tahun Per Desember 2024.
Age 41 as of December 2024.



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Bandung, 1983/Usia 41 tahun per Desember 2024 Bandung, 1983 / Age 41 as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Parahyangan (2005) • Master Perencanaan Wilayah dan Kota University of Groningen (2012) • Master Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung (2012) • Bachelor's Degree in Civil Engineering, Parahyangan University (2005) • Master's Degree in Regional and Urban Planning, University of Groningen (2012) • Master's Degree in Regional and Urban Planning, Bandung Institute of Technology (2012)
Sertifikasi Certification	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Subbidang Pengendalian Investasi, Bidang Investasi, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015 - 2016) • Kepala Subbidang Pengawasan Investasi, Bidang Investasi, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016 – 2019) • Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019 – 2020) • Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020 – sekarang)
	• Head of Investment Control Subdivision, Investment Division, Secretariat of the Toll Road Regulatory Agency, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing (2015 - 2016) • Head of Investment Supervision Subdivision, Investment Division, Secretariat of the Toll Road Regulatory Agency, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing (2016 - 2019) • Head of Monitoring and Evaluation Sub-Directorate, Directorate of Infrastructure Financing Implementation for Roads and Bridges, Directorate General of Infrastructure Financing for Public Works and Housing, Ministry of Public Works and Public Housing (2019 - 2020) • Head of Investment Plan Legalization Sub-Directorate, Directorate of Infrastructure Financing Implementation for Roads and Bridges, Directorate General of Infrastructure Financing for Public Works and Housing, Ministry of Public Works and Public Housing (2020 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-09.X/DK/PTHK/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Decree of the Board of Commissioners No. SK-09.X/DK/PTHK/2022 dated October 26, 2022
Periode dan Masa Jabatan Term and Duration of Office	Periode Pertama : Oktober 2022 - Oktober 2025 First Term: October 2022 - October 2025
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020 – sekarang) Head of Investment Plan Legalization Sub-Directorate, Directorate of Infrastructure Financing Implementation for Roads and Bridges, Directorate General of Infrastructure Financing for Public Works and Housing, Ministry of Public Works and Public Housing (2020 – present)

M. Budi Prasetyo

Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG (Pihak Independen)
Independent Members of the Risk Management and GCG Committee

Warga Negara Indonesia
Indonesia

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Lahir di Bandung, 1984 | Born in Bandung, 1984.
Usia 41 tahun Per Desember 2024.
Age 41 as of December 2024.



Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Ekonomi (Kekhususan Manajemen Keuangan) , Universitas Indonesia • S2 Ilmu Manajemen di bidang Keuangan dan Perbankan, Universitas Indonesia • Bachelor's Degree in Economics (Specialization in Financial Management), University of Indonesia • Master's Degree in Management Science (Finance and Banking), University of Indonesia
Sertifikasi Certification	Ahli Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi/CRMP (Certified Risk Management Professional). Certified Risk Management Professional (CRMP) – Integrated Organizational Risk Management Expert
Pengalaman Kerja	• Peneliti di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013 – sekarang) • Staf Pengajar (Dosen) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. (2013 – sekarang) • Staf Akademik. Program Studi S1 Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2013 – 2019) • Manajer Bidang Riset dan Konsultasi, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB – UI (2019 – 2021) • Anggota Komite Risiko, Pengembangan, dan Good Corporate Governance PT. Bio Farma (Persero) (2019 – 2024) • Staf Akademik. Program Studi S1 Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2024 – sekarang) • Researcher at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2013 – present) • Lecturer, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2013 – present) • Academic Staff, Bachelor's Program in Islamic Business, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2013 – 2019) • Manager of Research and Consulting Division, Center for Islamic Economics and Business (PEBS), Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2019 – 2021) • Member of the Risk, Development, and Good Corporate Governance Committee, PT. Bio Farma (Persero) (2019 – 2024)Academic Staff, Bachelor's Program in Management, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2024 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-08.VIII/DK/PTHK/2024 tanggal 16 Agustus 2024 Decree of the Board of Commissioners No. SK-08.VIII/DK/PTHK/2024 dated August 16, 2024
Periode dan Masa Jabatan Term and Duration of Office	Periode Pertama: 2024 - 2027 First Term: 2024 - 2027
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Peneliti di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013 – sekarang) • Staf Pengajar (Dosen) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. (2013 – sekarang) • Staf Akademik Program Studi S1 Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2024 – sekarang) • Researcher at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2013 – present) • Lecturer, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2013 – present) • Academic Staff, Bachelor's Program in Management, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2024 – present)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Manajemen Risiko dan GCG
Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Risk Management and GCG Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Iwan Suprijanto	Ketua Chair	• Sarjana Teknik Arsitektur • Magister Teknik Arsitektur • Insinyur Program Profesi Insinyur • Bachelor of Architecture Engineering • Master of Architecture Engineering • Engineer (Professional Engineer Program)	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Work experience in Ministry of Public Works and Housing
Wahyu Muryadi	Wakil ketua Vice chair	• Sarjana Ekonomi • Magister Manajemen • Bachelor of Economics • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di PT Tempo Inti media Work experience in PT Tempo Inti Media
Ira Ariani Chaerunisa	Anggota Member	• Sarjana Teknik Sipil • Master Perencanaan Wilayah dan Kota • Bachelor of Civil Engineering • Master of Regional and City Planning	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Work experience in Ministry of Public Works and Housing
M. Budi Prasetyo	Anggota Member	• S1 Ekonomi (Kekhususan Manajemen Keuangan) • S2 Ilmu Manajemen di bidang Keuangan dan Perbankan • Bachelor of Economics (Specialization in Financial Management) • Master of Management Science in Finance and Banking	Memiliki pengalaman kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Work experience at Faculty of Economy and Business University of Indonesia

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

INDEPENDENCE OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

Tabel Independensi Komite Manajemen Risiko dan GCG
Table of Independence of the Risk Management and GCG Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Iwan Suprijanto	Wahyu Muryadi	Ira Ariani Chaerunisa	M. Budi Prasetyo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi No management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	√	√	√	√

Tabel Independensi Komite Manajemen Risiko dan GCG
Table of Independence of the Risk Management and GCG Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Iwan Suprijanto	Wahyu Muryadi	Ira Ariani Chaerunisa	M. Budi Prasetyo
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan No share ownership in the company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG No family relationship with the Board of Commissioners, Directors, or fellow RMGCG members	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not a political party official, government official	√	√	√	√

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Training Type and Competency Development Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time & Place	Penyelenggara Organizer
Iwan Suprijanto	Ketua Chairman	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency enhancement program can be found in the Training and/or Competency Enhancement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Wahyu Muryadi	Wakil ketua Vice Chairman	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency enhancement program can be found in the Training and/or Competency Enhancement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Ira Ariani Chaerunisa	Anggota Member	Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	Virtual class, 24-25 Juli 2024 Virtual class, July 24-25, 2024	CRMS Indonesia & Lembaga Sertifikasi Profesi MKS Conducted by CRMS Indonesia & Lembaga Sertifikasi Profesi MKS
M. Budi Prasetyo	Anggota Member	-	-	-

Rapat Komite Manajemen Risiko dan GCG
Meeting Of The Risk Management and GCG Committee

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

1. KMRGCG mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat KMRGCG hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri setidaknya 1/2 (satu per dua) anggota Komite.
3. Pemanggilan Rapat Komite dilakukan oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Ketua Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.
4. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang disepakati.
5. Dalam hal diperlukan, KMRGCG dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
6. Jika dipandang perlu, KMRGCG dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.
7. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KMRGCG dapat dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
   a. Mengatur jadwal rapat.
   b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
   c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
   d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
8. Rapat KMRGCG dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite.
9. Dalam hal Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite berhalangan pada jam dimulai rapat sesuai undangan, maka atas izin Ketua Komite rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dapat hadir. Jika anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin rapat terlambat datang, atau karena sesuatu hal harus meninggalkan rapat sementara, maka rapat sementara dipimpin oleh anggota KMRGCG yang paling senior masa jabatannya.

POLICY ON MEETINGS OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

1. KMRGCG holds meetings at least as frequently as the minimum meeting requirement of the Board of Commissioners, which is at least once (1) a month as stipulated in the Articles of Association.
2. A KMRGCG meeting can only be held if attended by at least half (1/2) of the Committee members.
3. The Committee Meeting is convened by the Chair of the Committee. If the Chair is unavailable, the meeting is convened by the Vice Chair appointed by the Chair.
4. The meeting call must be made at least fourteen (14) days in advance, and in urgent cases, at least three (3) days before the meeting date, specifying the day, date, time, place, and agenda of the meeting, which will be held at the Company's domicile or another agreed location within the Republic of Indonesia.
5. If necessary, KMRGCG may invite resource persons from the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other parties, either internal or external to the Company.
6. If deemed necessary, KMRGCG may invite other relevant parties related to the meeting's subject matter to attend with the knowledge of the relevant members of the Board of Directors.
7. To facilitate task execution, KMRGCG may be assisted by the Committee Secretary in carrying out secretarial duties, including:
   a. Scheduling meetings.
   b. Proposing and contacting necessary resource persons.
   c. Preparing and distributing invitations and meeting materials.
   d. Drafting and distributing meeting minutes.
8. KMRGCG meetings are chaired by the Chair of the Committee. If the Chair is unavailable, the meeting is chaired by the Vice Chair of the Committee.
9. If both the Chair and Vice Chair of the Committee are unavailable at the scheduled meeting time, the meeting, with the Chair's permission, may be chaired by a present member of the Board of Commissioners. If the designated Board of Commissioners member is late or must leave temporarily, the meeting is temporarily chaired by the most senior KMRGCG member in terms of tenure.

10. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun.
11. Rapat Komite yang dipimpin oleh selain Ketua Komite, keputusan yang akan menjadi usulan rapat tetap harus mendapat persetujuan dari Ketua Komite.
12. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
13. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Untuk risalah rapat komite, selain ditandatangani oleh anggota Komite yang hadir dalam rapat, juga diketahui oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite.
14. Setiap anggota Komite menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas Risalah Rapat, dengan mempertimbangkan ketentuan batas waktu penyampaian Risalah Rapat yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Komite. Jika sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari setelah rapat, tidak ada usulan perubahan, maka Risalah Rapat dianggap disetujui oleh seluruh anggota Komite.
15. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
16. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Komite.
17. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggoa Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
18. Tata tertib rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.

10. Each Committee member is granted full freedom to express their professional opinions during the discussion of each agenda item without interference from anyone.
11. If the Committee Meeting is chaired by someone other than the Chair, the proposed meeting resolutions must still receive approval from the Chair.
12. Committee meeting decisions are made based on deliberation to reach a consensus.
13. All discussions and decisions made in the Committee meeting, including dissenting opinions, are recorded in the Meeting Minutes, signed by all attending Committee members as valid evidence of decisions made and submitted to the Board of Commissioners. The meeting minutes must also be acknowledged by the Chair and Vice Chair of the Committee.
14. Each Committee member may submit approval, objections, and/or proposed amendments to the Meeting Minutes, considering the deadline provisions stipulated in the Committee Meeting Rules. If no amendments are proposed within fifteen (15) days after the meeting, the Meeting Minutes are considered approved by all Committee members.
15. Each Committee member is entitled to receive a copy of the Meeting Minutes, even if they did not attend the meeting.
16. The attendance of Committee members in meetings is reported in the Committee's Quarterly and Annual Reports.
17. The number of meetings, attendance of each Committee member, and a summary report containing key issues discussed by the Committee are disclosed in the Annual Report.
18. The Committee meeting rules are outlined in a separate regulation.

AGENDA RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

AGENDA OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE MEETING

Tabel Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko dan GCG

Table of the Risk Management and GCG Committee Meeting Agenda.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	5 Januari 2024 January 5, 2024	1. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Perubahan Alokasi Penambahan PMN TA 2024 2. Permohonan Tanggapan Tertulis Pelepasan Aktiva Tetap Bergerak PT HK th 2023 3. Penyampaian Kelengkapan Dokumen dan Pemberitahuan Informasi atas Rencana Penambahan Setoran Modal pada PT Hamawas 1. Request for Written Response Regarding Changes in the Allocation of Additional PMN for FY 2024 2. Request for Written Response on the Disposal of PT HK's Movable Fixed Assets in 2023 3. Submission of Document Completeness and Notification of Information Regarding the Plan for Additional Capital Injection into PT Hamawas	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
2	16 Januari 2024 January 16, 2024	1. Penyampaian Surat Laporan dan Penyampaian Rencana Usaha dan Rencana Amandemen PPJT 9 Ruas Jalan Tol tahap I 2. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas tim WBS Triwulan IV tahun 2023 3. Penyampaian hasil evaluasi atas draft RKAP BUMN tahun 2024 berbasis Manajemen Risiko 4. Pembahasan tembusan surat perihal somasi/ peringatan 1 (pertama) terkait Piutang PT Rahmi Ida Nusantara 1. Submission of Report Letter and Business Plan Submission and Amendment Plan of PPJT for 9 Toll Road Sections Phase I 2. Submission of the Implementation Report of the WBS Team for Q4 2023 3. Presentation of Evaluation Results on the Draft RKAP of SOEs for 2024 Based on Risk Management 4. Discussion on the Copy of the Warning Letter/ Summons (First) Regarding PT Rahmi Ida Nusantara's Receivables	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
3	19 Januari 2024 January 19, 2024	1. Pembahasan Tembusan surat kepada Dekom perihal Kajian atas Rencana Transaksi saham antara PT Jasa Marga (Persero) tbk dan PT HK pada PT Jasa Marga Bali Toll dan PT Hamawas 2. Pembahasan tembusan surat kepada Dekom perihal Penyampaian kembali dokumen rancangan RKAP PT HK tahun 2024 1. Discussion on the Copy of the Letter to the Board of Commissioners Regarding the Study on the Share Transaction Plan Between PT Jasa Marga (Persero) Tbk and PT HK at PT Jasa Marga Bali Toll and PT Hamawas 2. Discussion on the Copy of the Letter to the Board of Commissioners Regarding the Resubmission of the Draft RKAP Document for PT HK for 2024	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
4	26 Januari 2024 January 26, 2024	1. Laporan kinerja SMAP Tw IV tahun 2023 dan Rencana Kerja tahun 2024 2. Laporan penggunaan dana PMN Tw IV tahun 2023 3. Laporan manajemen tahunan 2023 (unaudited) 4. *Update* Hasil Reviu ICOFR PT HK tahun 2023 1. Performance Report of SMAP for Q4 2023 and Work Plan for 2024 2. Report on the Use of PMN Funds for Q4 2023 3. 2023 Annual Management Report (Unaudited) 4. Update on the ICOFR Review Results of PT HK for 2023	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
5	2 Februari 2024 February 2, 2024	1. Laporan pemakaian fasilitas per 31 Desember 2023 2. Laporan kinerja divisi QHSSE triwulan IV tahun 2023 1. Report on Facility Utilization as of December 31, 2023 2. Performance Report of the QHSSE Division for Q4 2023	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
6	16 Februari 2024 February 16, 2024	1. Penyampaian laporan Corporate guarantee anak perusahaan per 31 Desember 2023 2. Permohonan tanggapan tertulis atas penambahan PMN TA 2024 periode II 3. Permohonan penyelesaian pembayaran 4. Pemenuhan data SPV KPBU Trans Papua sesuai arahan tim teknis kementerian BUMN 1. Submission of the Corporate Guarantee Report for Subsidiaries as of December 31, 2023 2. Request for Written Response Regarding the Additional PMN for FY 2024 Period II 3. Request for Payment Settlement 4. Fulfillment of SPV KPBU Trans Papua Data Following the Technical Team's Directions from the Ministry of SOEs	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
7	23 Februari 2024 February 23, 2024	1. Penyampaian laporan manajemen teknologi informasi tahun 2023 PT HK 2. Laporan tahunan SPI tahun 2023 3. Usulan PMN PT HK TA 2025 1. Submission of PT HK's 2023 IT Management Report 2. Annual SPI Report for 2023 3. Proposal for PMN PT HK for FY 2025	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
8	1 Maret 2024 March 1, 2024	1. Permohonan pelunasan sisa tagihan kontrak kerja 2. *Update* penyelesaian permasalahan hukum) 3. Pembahasan kinerja EPC Energy Singapore Pte. Ktd serta kelanjutan pendiriannya 1. Request for Settlement of Remaining Contractual Payments 2. Update on Legal Issue Resolutions 3. Discussion on EPC Energy Singapore Pte. Ltd.'s Performance and the Continuation of Its Establishment	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
9	8 Maret 2024 March 8, 2024	1. Pemenuhan organ pengelola risiko BUMN 2. Penambahan biaya jasa audit terkait pekerjaan tambahan - 31 Desember 2023 3. Penyampaian usulan KPI PMN PT HK tahun 2024 1. Fulfillment of SOE Risk Management Organ 2. Additional Audit Service Costs Related to Additional Work - December 31, 2023 3. Submission of PT HK's PMN KPI Proposal for 2024	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
10	15 Maret 2024 March 15, 2024	1. Kinerja PT HKR dan Rencana dana talangan induk ke PT HKR 2. Laporan hasil audit (LHA) tujuan tertentu permasalahan tata kelola perpajakan PT Bhirawa Steel Tbk. 2020 3. Pembahasan PKPT SPI tahun 2024 1. Performance of PT HKR and the Parent Company's Bridging Fund Plan to PT HKR 2. Audit Report (LHA) on Specific Governance Issues of PT Bhirawa Steel Tbk. 2020 3. Discussion on PKPT SPI for 2024	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
11	22 Maret 2024 March 22, 2024	Laporan hasil audit (LHA) tujuan tertentu permasalahan tata kelola perpajakan The Audit Report (LHA) on Specific Governance Issues Related to Tax Management.	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
12	1 April 2024 April 1, 2024	Progres Pelaksanaan Diagnostik ICOFR bagi BUMN Sistemik A dan BUMN Sistemik B serta Evaluasi Kebijakan Ambang Batas Kewenangan Transaksi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Progress on the Implementation of ICOFR Diagnostics for Systemic SOE A and Systemic SOE B and the Evaluation of the Threshold Policy for SOE and SOE Subsidiary Transactions.	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
13	19 April 2024 April 19, 2024	1. Permintaan penyampaian evaluasi kinerja KAP atas Pemeriksaan laporan keuangan tb 2023 2. Laporan manajemen risiko Tw IV tahun 2023 dan Draft Risk Maturity Index 2023 3. Tindak lanjut rekomendasi laporan hasil ADTT permasalahan Tata kelola perpajakan PT Bhirawa Steel 1. Request for Submission of KAP Performance Evaluation Regarding Financial Statement Audits for FY 2023 2. Q4 2023 Risk Management Report and Draft 2023 Risk Maturity Index 3. Follow-up on Recommendations from the ADTT Report on PT Bhirawa Steel's Tax Governance Issues	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
14	25 April 2024 April 25, 2024	1. Pembahasan dampak makroekonomi terhadap kinerja perusahaan 2. Pembahasan proyek KPBU Sitinjau lauik 3. Pembahasan laporan manajemen audited tahun 2023 dan persiapan RUPS tahunan tb 2023 4. Pembahasan code of conduct PT Hutama Karya (Persero) tahun 2024 5. Laporan penggunaan tambahan dana PMN TA 2021 tahap III, PMN TA 2022 tahap I dan II, dan PMN TA 2023 periode Maret 2024/Tw I 2024 1. Discussion on the Macroeconomic Impact on Corporate Performance 2. Discussion on the KPBU Sitinjau Lauik Project 3. Discussion on the 2023 Audited Management Report and Preparation for the Annual GMS for FY 2023 4. Discussion on PT Hutama Karya (Persero)'s Code of Conduct for 2024 5. Report on the Use of Additional PMN Funds for FY 2021 Phase III, FY 2022 Phases I and II, and FY 2023 for March 2024/Q1 2024	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
15	3 Mei 2024 May 3, 2024	1. Laporan pemakaian fasilitas pinjaman per 31 Maret 2024 2. Laporan pelaksanaan tugas tim WBS tw I tahun 2024 3. Laporan kinerja SMAP Tw I tahun 2024 4. Hasil Laporan reviu penyelesaian temuan atas laporan hasil pekerjaan jasa konstruksi keuangan ICOFR dan rekomendasi tata kelola hasil audit tujuan tertentu (ATT) 1. Report on the Utilization of Loan Facilities as of March 31, 2024 2. Report on the Implementation of WBS Team Duties for Q1 2024 3. Performance Report of SMAP for Q1 2024 4. Review Report on Findings of Financial Construction Service Audit Work and Recommendations for Governance Audit Results	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
16	8 Mei 2024 May 8, 2024	1. Pembahasan draft RJPP PT HK 2. Persiapan RUPST Tahun Buku 2023 PT HK 3. Pembahasan rencana perubahan struktur organisasi PT HK 1. Discussion on the Draft RJPP PT HK 2. Preparation for the Annual GMS for FY 2023 PT HK 3. Discussion on the Organizational Structure Change Plan for PT HK	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
17	17 Mei 2024 May 17, 2024	1. Laporan atas penerbitan *corporate guarantee* kepada anak perusahaan tw I tahun 2024 2. Laporan hasil audit Divisi QHSSE thun 2024 3. Usulan SPI Terintegrasi dan Reorganisasi SPI PT HK 4. Laporan triwulan I SPI th 2024 1. Report on the Issuance of Corporate Guarantee to Subsidiaries for Q1 2024 2. Audit Report of the QHSSE Division for 2024 3. Proposal for Integrated SPI and SPI Reorganization of PT HK 4. Q1 2024 SPI Report	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
18	27 Mei 2024 May 27, 2024	1. Tindak lanjut perubahan struktur organisasi PT HK 2. Permohonan tanggapan atas penyampaian penggunaan laba bersih tahun 2023 3. Permohonan tanggapan atas usulan agenda RUPS persetujuan laporan tahunan program TJSL Tahun Buku 2023 termasuk pengesahan laporan keuangan program UMK 4. Permohonan tanggapan atas usulan agenda RUPS pengesahan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN TA 2021, 2022, dan 2023 (termasuk persetujuan penggunaan dana PMN untuk BUKP) 5. Pembahasan draft RJPP PT HK tahun 2025-2029 1. Follow-up on PT HK's Organizational Structure Changes 2. Request for Feedback on the Use of Net Profit for 2023 3. Request for Feedback on the Proposed GMS Agenda for the Approval of the Annual Report on the TJSL Program for FY 2023, Including the Ratification of the UMK Program Financial Report 4. Request for Feedback on the Proposed GMS Agenda for the Ratification of the Realization Report on the Use of Additional PMN Funds for FY 2021, 2022, and 2023 (Including Approval for PMN Fund Use for BUKP) 5. Discussion on the Draft RJPP PT HK for 2025-2029	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
19	30 Mei 2024 May 30, 2024	Penjelasan atas skema pengusahaan ruas Palembang-Betung Explanation of the Business Scheme for the Palembang-Betung Section	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
20	3 Juni 2024 June 3, 2024	1. Penjelasan atas kecelakaan pada proyek Kejagung RI 2. Pembahasan kinerja Tw I 2024 divisi QHSSE 3. Arahan penyusunan dan penguatan implementasi kebijakan tata kelola benturan kepentingan pada lingkungan BUMN 4. Pembahasan tindak lanjut rekomendasi dan implementasi roadmap ICOFR 1. Explanation of the Accident on the Attorney General's Office Project 2. Discussion on the Performance of the QHSSE Division for Q1 2024 3. Direction on the Preparation and Strengthening of the Conflict of Interest Governance Policy in the SOE Environment 4. Discussion on the Follow-Up of Recommendations and Implementation of the ICOFR Roadmap	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
21	7 Juni 2024 June 7, 2024	1. Permohonan persetujuan atas rencana pemberian shareholder loan kepada EPC Energy Singapore Ltd tahun 2024 2. Penyampaian laporan manajemen risiko Tw I PT HK tahun 2024 3. Permohonan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dalam rangka permohonan persetujuan RUPS PT HK atas pelaksanaan penugasan jalan tol Palembang-Betung (bagian dari ruas jalan tol kayu agung-Palembang-Betung) dan ruas Pelabuhan Panjang-Lematang) 1. Request for Approval for the Shareholder Loan Plan to EPC Energy Singapore Ltd for 2024 2. Submission of PT HK's Risk Management Report for Q1 2024 3. Request for a Written Response from the Board of Commissioners for GMS Approval on PT HK's Assignment for the Palembang-Betung Toll Road (Part of the Kayu Agung-Palembang-Betung Toll Road) and the Pelabuhan Panjang-Lematang Section	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
22	25 Juni 2024 June 25, 2024	Pembahasan lanjutan atas permohonan persetujuan RUPS atas pelaksanaan penugasan jalan tol Palembang-Betung (bagian dari ruas jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung) dan ruas Pelabuhan Panjang-Lematang Follow-up Discussion on the Request for Approval from the General Meeting of Shareholders (RUPS) for the Implementation of the Palembang-Betung Toll Road Assignment (Part of the Kayu Agung-Palembang-Betung Toll Road Section) and the Pelabuhan Panjang-Lematang Section	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
23	28 Juni 2024 June 28, 2024	1. Penyampaian Dokumen contingency plan tahun 2024 PT HK 2. Pembahasan LHA dan MTL Audit Tematik Kualitas Utang PG Jatiroto tahun 2024 3. Pembahasan Lanjutan SPI Terintegrasi 4. Persetujuan KPI Direksi secara individual tahun 2024 5. Permohonan tanggapan Dewan Komisaris atas Kendaraan dinas Direksi 1. Submission of PT HK's 2024 Contingency Plan Document 2. Discussion on LHA and MTL of Thematic Audit on PG Jatiroto Debt Quality in 2024 3. Follow-up Discussion on Integrated SPI 4. Approval of Individual KPIs for Directors in 2024 5. Request for the Board of Commissioners' Response Regarding Directors' Official Vehicles	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
24	5 Juli 2024 July 5, 2024	1. Rencana kerjasama sewa menyewa aset PT HK di Cipayung, Bogor dengan PT Hita Kreatif Nusantara 2. Somasi Ketiga PT Putra Kundur Transportasi Perkasa 1. Lease Agreement Plan for PT HK's Assets in Cipayung, Bogor, with PT Hita Kreatif Nusantara 2. Third Summons to PT Putra Kundur Transportasi Perkasa	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
25	12 Juli 2024 July 12, 2024	1. Penyampaian perubahan Treshold dan Penyesuaian Anggaran Dasar PT HK 2. Informasi surat OJK Pemberitahuan kewajiban pemenuhan POJK 9/2023 dan SEOJK 18/2023 1. Submission of Amendments to the Threshold and Adjustment of PT HK's Articles of Association 2. Information on OJK Letter Regarding Compliance with POJK 9/2023 and SEOJK 18/2023	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
26	19 Juli 2024 July 19, 2024	1. Penyampaian dokumen pelaporan penggunaan tambahan dana PMN TA 2022 tahap I dan II, PMN TA 2023 dan PMN TA 2024 periode Juni 2024 2. Penyampaian arahan Dewan Komisaris terkait perubahan treshold dan penyesuaian anggaran dasar PT HK 3. Pembahasan hasil stress test PT HK 4. Pembahasan dokumen *Contingency plan* tahun 2024 PT HK 5. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas tim WBS Triwulan II tahun 2024 1. Submission of the Reporting Documents on the Use of Additional PMN Funds for FY 2022 Phases I & II, FY 2023, and FY 2024 as of June 2024 2. Submission of the Board of Commissioners' Directives on Threshold Amendments and Adjustments to PT HK's Articles of Association 3. Discussion on PT HK's Stress Test Results 4. Discussion on PT HK's 2024 Contingency Plan Document 5. Submission of the Q2 2024 WBS Team Performance Report	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
27	26 Juli 2024 July 26, 2024	1. Penyampaian Laporan Manajemen Tw II tahun 2024 PT HK 2. Pembahasan penyelesaian kasus-kasus hukum PT HK sd Tw II tahun 2024 3. Pembahasan lanjutan *stress testing* PT HK 1. Submission of PT HK's Q2 2024 Management Report 2. Discussion on the Resolution of PT HK's Legal Cases up to Q2 2024 3. Follow-up Discussion on PT HK's Stress Testing	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
28	2 Agustus 2024 August 2, 2024	1. Laporan Audit Intern Tw II tahun 2024 PT HK 2. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Perpanjangan Jatuh Tempo Utang Afiliasi PT HKR 3. Laporan Pemakaian Fasilitas Pinjaman per 30 Juni 2024 1. PT HK's Q2 2024 Internal Audit Report 2. Request for the Board of Commissioners' Approval of PT HKR's Affiliated Debt Maturity Extension Plan 3. Report on the Use of Loan Facilities as of June 30, 2024	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
29	9 Agustus 2024 August 9, 2024	1. Laporan Kinerja SMAP Tw II tahun 2024 2. Laporan atas Penerbitan Corporate Guarantee kepada Anak Perusahaan 3. Pembahasan Lanjutan Dokumen Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan dan Pemberitahuan Penetapan Direktur Pembina & Direktur Fungsional 1. Q2 2024 SMAP Performance Report 2. Report on the Issuance of Corporate Guarantees to Subsidiaries 3. Follow-up Discussion on the Integrated Corporate Governance Guidelines and Notification on the Appointment of Supervisory & Functional Directors	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
30	16 Agustus 2024 August 16, 2024	1. Permohonan penambahan materi AKHLAK pada BOC Charter 2. Pembahasan Laporan Hasil Audit (Proyek Pembangunan Masjid Raya Prov Jabar (Tahap IV), proyek kampus baru Untirta Sindangsari Banten, Proyek Gedung OJK 3. Laporan internal tahunan penilaian asurans dan peningkatan kualitas 1. Request for the Inclusion of AKHLAK Values in the BOC Charter 2. Discussion on the Audit Report (Construction of the West Java Provincial Grand Mosque (Phase IV), New Untirta Sindangsari Campus Project in Banten, OJK Building Project) 3. Annual Internal Report on Insurance Assessment and Quality Improvement	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa Maria Ulpah
31	23 Agustus 2024 August 23, 2024	1. Penyampaian Kembali Dokumen Contingency Plan tahun 2024 PT HK untuk Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris 2. Laporan Kinerja Divisi QHSSE Tw II tahun 2024 3. Pembahasan *Progress* Rencana Equity Injection/ Penyertaan Modal tahun 2024 kepada PT HKR 4. Pembahasan Hasil Putusan Perkara Perdata CSK 1. Resubmission of PT HK's 2024 Contingency Plan Document for the Board of Commissioners' Approval 2. Q2 2024 Performance Report of the QHSSE Division 3. Discussion on the Progress of the 2024 Equity Injection/Capital Participation Plan for PT HKR 4. Discussion on the Civil Court Case Verdict on CSK	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
32	30 Agustus 2024 August 30, 2024	1. Pembahasan Permasalahan berkaitan dengan Manajemen Kontrak sampai dengan Semester I tahun 2024 2. *Update progress* RJPP 2025-2029 PT HK dan Integrasi PT HK dan PT Waskita Tbk 3. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Perubahan Usulan Penambahan PMN TA 2024 Periode II 4. Pembahasan Aduan pada WBS mengenai ketidakdisiplinan karyawan 1. Discussion on Contract Management Issues Up to H1 2024 2. Update on PT HK's 2025-2029 RJPP and Integration with PT Waskita Tbk 3. Request for Written Response on the Amendment Proposal for Additional PMN FY 2024 Phase II 4. Discussion on Employee Discipline Complaints in WBS	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
33	5 September 2024 September 5, 2024	1. Pembahasan 3 (tiga) Top Risks PT HK dalam rangka Tindaklanjut Pembahasan Risiko Portfolio BUMN tahun buku 2023 2. Penyampaian *Update progress* rencana integrasi PT HK dan PT Waskita Tbk serta Permohonan arahan dan tanggapan tertulis Dekom 3. Permohonan pengesahan Rencana KPI Direksi secara individual th 2024 4. *Update* revisi dokumen pedoman tata kelola terintegrasi dan dokumen Contingency Plan PT HK 1. Discussion on PT HK's Top 3 Risks as a Follow-up to the SOE Portfolio Risk Discussion for FY 2023 2. Update on PT HK and PT Waskita Tbk Integration Plans and Request for Written Directions and Responses from the Board of Commissioners 3. Request for the Approval of Individual KPI Plans for Directors in 2024 4. Update on the Revision of Integrated Governance Guidelines and PT HK's Contingency Plan Document	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
34	12 September 2024 September 12, 2024	Pembahasan Kembali Usulan 3 Top Risk PT HK thn 2024 (Bersama WDU, DMR, DHCL) Re-discussion of PT HK's 2024 Top 3 Risk Proposals (With WDU, DMR, DHCL)	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
35	13 September 2024 September 13, 2024	1. Pembahasan usulan 3 top risks PT HK tahun 2024 2. Pembahasan *Update* dokumen Contingency Plan PT HK tahun 2024 3. Pembahasan Laporan Hasil dan Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko atas Penilaian Risk Maturity Index (RMI) PT HK tb 2023 4. Penyampaian kembali audit intern terintegrasi 5. Surat pemberitahuan dari Triwin Law Firm yang disampaikan kepada Dewan Komisaris PT HK 1. Discussion on PT HK's 2024 Top 3 Risk Proposals 2. Discussion on the Update of PT HK's 2024 Contingency Plan Document 3. Discussion on the Audit Report and Improvement Roadmap for Risk Management Implementation Based on PT HK's 2023 Risk Maturity Index (RMI) Assessment 4. Resubmission of the Integrated Internal Audit 5. Notification Letter from Triwin Law Firm to PT HK's Board of Commissioners	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
36	20 September 2024 September 20, 2024	1. Pembahasan laporan hasil audit tujuan tertentu atas Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh PT HK yang dibiayai PMN dan KMK penjaminan pemerintah 2. Pembahasan laporan hasil reviu atas Rencana penggunaan dana PMN TA 2024 PT HK dalam rangka penyelesaian ruas Jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung 3. Pembahasan surat pengaduan tagihan sewa scafolding PT HK Divisi Gedung (tembusan surat Asdep Infrastruktur) 1. Discussion on the Specific Purpose Audit Report on the Implementation of PT HK's PMN and Government-Guaranteed KMK Funded Projects 2. Discussion on the Review Report on the Use of PMN FY 2024 PT HK Funds for the Completion of the Kayu Agung-Palembang-Betung Toll Road Section 3. Discussion on the Complaint Letter Regarding the Scaffolding Rental Invoice of PT HK's Building Division (CC to Asdep Infrastructure Letter)	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
37	23 September 2024 September 23, 2024	Pembahasan *Update* dokumen RJPP PT HK tahun 2025-2029 Discussion on the Update of PT HK's 2025-2029 RJPP	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
38	24 September 2024 September 24, 2024	Pembahasan pembentukan anak perusahaan sebagai Badan Usaha Pelaksana ("BUP") dalam proyek KPBU Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) Discussion on the Establishment of a Subsidiary as an Implementing Business Entity ("BUP") for the KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) Project	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
39	27 September 2024 September 27, 2024	1. Penyampaian kembali pedoman tata kelola terintegrasi konglomerasi perusahaan 2. Pemberitahuan penambahan materi nilai-nilai utama perusahaan pada code of conduct PT HK 3. Laporan dan penyampaian rencana penandatanganan berita acara rencana usaha dan penandatanganan PPJT ruas Palembang-Betung 1. Resubmission of Integrated Corporate Governance Guidelines for the Corporate Conglomerate 2. Notification on the Addition of Core Corporate Values in PT HK's Code of Conduct 3. Report and Submission of the Signing Plan for the Business Plan Minutes and PPJT Signing for the Palembang-Betung Section	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
40	4 Oktober 2024 October 4, 2024	1. Pembahasan program kerja divisi HC dan Realisasi Sd Triwulan 3 tahun 2024 2. Pembahasan kinerja dana pensiun PT HK tahun 2023-2024 3. *Update* penyelesaian kasus hukum pembelian tanah di wilayah Indralaya 4. 4. Tindak lanjut hasil audit BPK RI tahun 2020-2021 5. Pembahasan awal RKAP 2025 PT HK 1. Discussion on the Work Program of the HC Division and Realization as of Q3 2024 2. Discussion on PT HK's Pension Fund Performance for 2023-2024 3. Update on the Legal Resolution of Land Purchases in Indralaya 4. Follow-up on BPK RI's 2020-2021 Audit Findings 5. Initial Discussion on PT HK's 2025 RKAP	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
41	11 Oktober 2024 October 11, 2024	1. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Usulan KPI PMN PT HK TA 2024 Cadangan Investasi 2. Permohonan Pengesahan Rencana KPI Direksi secara Individual th 2024 3. Pembahasan kinerja PT HKR 4. *Update* rencana pemberian SHL kepada PT HKR 1. Request for Written Responses on PT HK's 2024 PMN KPI Proposal for Investment Reserves 2. Request for Approval of Individual KPI Plans for Directors in 2024 3. Discussion on PT HKR's Performance 4. Update on the SHL Grant Plan for PT HKR	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
42	18 Oktober 2024 October 18, 2024	1. Pembahasan Lanjutan Usulan RKAP Tahun 2025 2. Permohonan Tanggapan Tertulis Pelepasan dan Penghapusbukuan aktiva tetap bergerak PT HK Tahun 2024 3. Penyampaian Dokumen Pelaporan Penggunaan Dana PMN TA 2022 tahap I dan II, PMN TA 2023 dan PMN TA 2024 periode September 2024 1. Follow-up Discussion on the 2025 RKAP Proposal 2. Request for Written Responses on the Release and Write-off of PT HK's Movable Fixed Assets in 2024 3. Submission of the Reporting Documents on the Use of PMN FY 2022 Phases I & II, FY 2023, and FY 2024 as of September 2024	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
43	25 Oktober 2024 October 25, 2024	1. Laporan Audit Intern PT HK Tw III tahun 2024 2. Permohonan Tanggapan rencana Pendanaan ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi 3. Laporan Manajemen Tw III tahun 2024 1. PT HK's Q3 2024 Internal Audit Report 2. Request for Responses on the Funding Plan for the Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Section 3. Q3 2024 Management Report	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
44	1 November 2024 November 1, 2024	1. Pembahasan proyek keuangan pendanaan tol ruas Tempino-Jambi 2. Laporan pelaksanaan tugas tim WBS Tw III tahun 2024 3. Laporan Kinerja SMAP Tw III tahun 2024 4. Laporan Kinerja Divisi QHSSE Tw III tahun 2024 1. Discussion on Financial Project Funding for the Tempino-Jambi Toll Road Section 2. Q3 2024 WBS Team Performance Report 3. Q3 2024 SMAP Performance Report 4. Q3 2024 QHSSE Division Performance Report	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
45	8 November 2024 November 8, 2024	1. Laporan Manajemen Kegiatan Teknologi Informasi sd Triwulan 3 tahun 2024 PT HK 2. Pembahasan Lanjutan Contingency Plan HK 3. *Update* Sengketa Pajak JORRS dan ATP 1. IT Activities Management Report as of Q3 2024 for PT HK 2. Follow-up Discussion on HK's Contingency Plan 3. Update on JORRS and ATP Tax Disputes	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
46	15 November 2024 November 15, 2024	Laporan pemakaian fasilitas pinjaman per 30 September 2024 Report on Loan Facility Utilization as of September 30, 2024	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
47	22 November 2024 November 22, 2024	1. *Progress* audit laporan keuangan tahun buku 2024 PT HK 2. Laporan Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 1293/PDT/2024/PT DKI jo. Putusan Pengadilan negeri Jaktim 379/Pdt.G/2024/PMN Jkt tim 3. Pembahasan *progress* pembangunan proyek Rusun ASN 2 & proyek Kemenko 2 1. Progress on the 2024 Financial Statement Audit for PT HK 2. Report on the Jakarta High Court Ruling No. 1293/PDT/2024/PT DKI jo. East Jakarta District Court Ruling No. 379/Pdt.G/2024/PMN Jkt Tim 3. Discussion on the Progress of the ASN 2 Apartment and Kemenko 2 Project Construction	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
48	28 November 2024 November 28, 2024	1. Pembahasan Rencana Audit atas Pelepasan Aset Tetap PT HK oleh SPI 2. Laporan atas Penerbitan Corporate Guarantee kepada Anak Perusahaan per 30 September 2024 3. Pemaparan Costing dan Perhitungan Biaya Perolehan Aset Real Estate proyek H City Sawangan dan H Residence Sentul 1. Discussion on the Audit Plan for PT HK's Fixed Asset Disposal by SPI 2. Report on the Issuance of Corporate Guarantees to Subsidiaries as of September 30, 2024 3. Presentation on Costing and Acquisition Cost Calculation of Real Estate Assets for H City Sawangan and H Residence Sentul Projects	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
49	5 - 6 Desember 2024 December 5-6, 2024	1. Pembahasan Kinerja Keuangan dan Operasional Anak Perusahaan PT HK per Oktober 2024 2. Pembahasan isu strategis termasuk top risk dan permasalahan hukum anak perusahaan 1. Discussion on the Financial and Operational Performance of PT HK's Subsidiaries as of October 2024 2. Discussion on Strategic Issues, Including Top Risks and Legal Problems of Subsidiaries	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
50	12 Desember 2024 December 12, 2024	1. Status Kesiapan tahapan implementasi ICOFR HK grup 2. Pembahasan gugatan DSU dengan HMW melalui BANI 3. Permasalahan kasus hukum PT Inasa di PT HKA 4. Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi Tw III tahun 2024 1. Readiness Status of the HK Group's ICOFR Implementation Stages 2. Discussion on DSU's Lawsuit Against HMW Through BANI 3. Legal Issues Involving PT Inasa at PT HKA 4. Q3 2024 Integrated Risk Management Report	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo
51	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. Permohonan persetujuan atas Rencana Perpanjangan Jatuh Tempo utang afiliasi PT HKR 2. *Update* pembahasan dokumen contingency plan PT HK 2024 1. Request for Approval of PT HKR's Affiliated Debt Maturity Extension Plan 2. Update on PT HK's 2024 Contingency Plan Document Discussion	Iwan Suprijanto Wahyu Muryadi Ira Ariani Chaerunisa M. Budi Prasetyo

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE MEETINGS

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko dan GCG

Table of Attendance Rate for the Risk Management and GCG Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Manajemen Risiko dan GCG Risk Management and GCG Committee Meetings Jumlah dan Persentasi Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Iwan Suprijanto	Ketua Chairman	51	51	100%
Wahyu Muryadi	Wakil ketua Vice Chairman	51	51	100%
Ira Ariani Chaerunisa	Anggota Member	51	51	100%
M. Budi Prasetyo	Anggota Member	51	51	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG TAHUN 2024

WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE IN 2024

No.	Kegiatan Activity	Jadwal/ Pelaksanaan Schedule/ Implementation
1.	Rapat internal Komite Manajemen Risiko bersama dengan Komite Audit Internal meeting of the Risk Management Committee with the Audit Committee	Setiap Minggu Every week
2.	Rapat Koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit Coordination meeting with the Board of Commissioners and Audit Committee	Setiap Minggu Every week
3.	Rapat Koordinasi dengan Divisi Pengelolaan Risiko dan QHSSE Coordination meeting with the Risk Management and QHSSE Division	MInimal 3 bulan sekali At least once every 3 months

No.	Kegiatan Activity	Jadwal/ Pelaksanaan Schedule/ Implementation
4.	Membuat telaah atas kebijakan dan implementasi manajemen risiko Review of risk management policies and implementation	Minimal Setiap 3 bulan untuk laporan manajemen risiko At least every 3 months for the risk management report
5.	Melakukan telaah atas kebijakan dan implementasi QHSSE Review of QHSSE policies and implementation	Minimal Setiap 3 bulan untuk laporan QHSSE At least every 3 months for the QHSSE report
6.	Melakukan koordinasi dengan Manajemen Risiko atas top risk Hutama Karya Coordination with Risk Management on Hutama Karya's top risks	Sebulan Sekali Once a month
7	Pemantauan wilayah/proyek Project/site monitoring	Minimal 2x setahun atau sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris At least twice a year or as assigned by the Board of Commissioners
8.	Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan Coordination with the Corporate Secretary	Minimal setiap 3 bulan At least every 3 months
9.	Penyusunan telaah Komite tentang laporan manajemen Committee review on management reports	Setiap bulan untuk masalah tertentu. Bulan April, July dan October untuk laporan triwulan, Bulan March untuk laporan tahunan Monthly for specific issues; April, July, and October for quarterly reports; March for the annual report
10	Penyampaian telaah komite kepada Dewan Komisaris terkait aktivitas perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang terkait dengan RJPP, RKAP, aspek keuangan, aspek risiko dan aspek manajerial lainnya Submission of committee review to the Board of Commissioners regarding company activities requiring Board approval related to RJPP, RKAP, financial aspects, risk aspects, and other managerial aspects	Sesuai dengan kebutuhan As needed
11	Program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, seminar dan sertifikasi Competency development programs such as training, seminars, and certifications	2 kali dalam setahun Twice a year
12	Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan terkait dengan self assessment GCG termasuk dalam pemilihan konsultan Coordination with the Corporate Secretary regarding GCG self-assessment, including consultant selection	Januari-Maret January-March
13	Penyusunan telaah atas RKAP tahun 2025 Review of the 2025 RKAP	Oktober October
14	Melakukan koordinasi dengan Div Manrisk terkait pemilihan konsultan risk maturity level. Coordination with the Risk Management Division regarding consultant selection for risk maturity level assessment	Mei May
15	Penyampaian telaah atas aspek keuangan, risiko dan GCG dalam annual report HK Submission of review on financial, risk, and GCG aspects in HK's annual report	April
16	Menyusun Program Kerja Komite MR&GCG Preparation of the MR&GCG Committee's Work Program	November
17	Penyusunan laporan kegiatan Komite MR&GCG kepada Dewan Komisaris Preparation of the MR&GCG Committee's activity report for the Board of Commissioners	April, July, October 2024 (Laporan Triwulanan) dan Bulan January 2025 (Laporan Tahunan) April, July, October 2024 (Quarterly Report) and January 2025 (Annual Report)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite TKT bekerja

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Integrated Governance Committee (TKT) is independent both in carrying out its duties and in reporting and is directly responsible to the Board of Commissioners. The TKT Committee

secara kolektif dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tugas dan Tanggung Jawab Komite TKT

Komite TKT bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan TKT.
2. Mengawasi penerapan TKT pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan TKT dan Manajemen Risiko Komite melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aset dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan. Agar pengendalian internal Terintegrasi dapat dijalankan secara efektif, maka:
   a. Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
   b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
   c. Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
   d. Melakukan pertemuan berkala dengan Divisi Pengelolaan Risiko untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
   e. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

works collectively by providing professional and independent opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and carrying out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Duties and Responsibilities of the TKT Committee

The TKT Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities as follows:

1. Conducting evaluation and approval of TKT policies.
2. Supervising the implementation of TKT in Subsidiaries to align with TKT policies and Risk Management. The Committee reviews the design and implementation of policies and procedures to obtain adequate assurance regarding the effectiveness of internal controls so that material misstatements in Financial Reports, misuse of assets, and violations of laws and regulations can be prevented and so that asset security and corporate obligation fulfillment can be enhanced. To ensure that Integrated Internal Control is effectively implemented:
   a. Evaluating that the Company and its Subsidiaries have a standardized integrated internal control system in accordance with best practices through a review of the Integrated Governance Guidelines implemented in the Company.
   b. Monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of integrated internal control through a review of Periodic Reports and Audit Reports issued by the Integrated Internal Audit Unit.
   c. Holding regular meetings with the Integrated Internal Audit Unit to discuss matters related to the integrated internal control system.
   d. Holding regular meetings with the Integrated Risk Management Unit to discuss matters related to integrated risk management.
   e. Monitoring and evaluating the follow-up actions taken by the Board of Directors of the Company and its Subsidiaries based on the findings of the Integrated Internal Audit Unit, Public Accounting Firm, and the supervision of the Financial Services Authority regarding weaknesses in the integrated internal control system and implementation.

3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi HK, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi HK atas pelaksanaan kebijakan TKT, yang meliputi:

   a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Jasa Konstruksi, dan Persaingan Usaha serta peraturan lainnya yang terkait dengan industri konstruksi, investasi, dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
   b. Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
   c. Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan intern dan ekstern.
   d. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
4. Mengevaluasi kebijakan TKT dan mengarahkan untuk penyempurnaan, yang meliputi:
   a. Penelaahan atas informasi Perusahaan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan tahunan, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya;
   b. Penelaahan dan klarifikasi untuk mendorong agar informasi Perusahaan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, andal dan dapat dipercaya, dan dilakukan melalui: Reviu atas hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau internal auditor;
   c. Klarifikasi proses penyiapan informasi Perusahaan yang akan dipublikasikan.
   d. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;

   e. Menelaah pengaduan (jika ada) yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
5. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi TKT lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Supervising the execution of duties and responsibilities of the Board of Directors of HK and providing direction or advice to the Board of Directors of HK on the implementation of TKT policies, which includes:
   a. Monitoring and evaluating the compliance of the Company and its Subsidiaries with applicable laws and regulations in the field of Construction Services, Business Competition, and other regulations related to the construction, investment, and financing industries through coordination with the Integrated Compliance Unit.
   b. Reviewing periodic reports and audit reports related to compliance with internal and external regulations issued by the Integrated Compliance Unit and external auditors.
   c. Holding regular meetings with the Integrated Compliance Unit to discuss matters related to the compliance of the Company and its Subsidiaries with internal and external regulations.

   d. Monitoring and evaluating the follow-up actions taken by the Board of Directors of the Company and its Subsidiaries based on the findings of the Integrated Compliance Unit, Public Accounting Firm, and the supervision of the Financial Services Authority regarding weaknesses in the integrated compliance system and function.
4. Evaluating TKT policies and directing improvements, which include:
   a. Reviewing the Company's information to be disclosed to the public and/or authorities, including annual reports, financial statements, projections, and other reports;

   b. Reviewing and clarifying to ensure that the Company's information to be published is accurate, reliable, and credible, conducted through: Review of the audit results of independent auditors and/or internal auditors; Clarification of the preparation process for the Company's information to be published.
   c. Reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company;
   d. Reviewing complaints (if any) related to the Company's accounting and financial reporting processes.
5. Conducting supervision and providing advice on the implementation of other TKT functions in accordance with laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

6. Bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan. Oleh karena itu Komite TKT harus:
   a. Memastikan bahwa manajemen memberikan representasi tertulis yang berisi pernyataan bahwa:
      i. Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
      ii. Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan;
   b. Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui:
      i. Reviu atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
      ii. Reviu atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen dan internal auditor.
   c. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Komite dapat memperluas reviunya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite dapat meminta bantuan pihak internal auditor atau eksternal auditor;
   d. Pemantauan Risiko dan Mitigasinya. Komite TKT berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara benar (*correctly*) sehingga dapat menghindari risiko materil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Penugasan Lain

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite TKT dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian tugas lain kepada Komite TKT oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:

6. Collaborating with the Risk Management Committee to ensure adequate internal control so that the Company's operational activities comply with applicable laws and other regulations related to the Company's operations. Therefore, the TKT Committee must:
   a. Ensure that management provides a written representation containing statements that:
      i. Management has not violated laws and regulations.
      ii. Management is responsible for the Company's compliance with laws and regulations;
   b. Conduct monitoring through:
      i. Review of management reports or legal advisor reports related to compliance with laws and regulations relevant to the Company's activities.
      ii. Review of findings or audit results conducted by regulatory bodies, independent auditors, and internal auditors.
   c. If there is an indication of a violation of laws and regulations, the Committee may expand its review through an investigative audit to determine the impact and magnitude of losses caused by the violation. To conduct such an investigative audit, the Committee may seek assistance from internal or external auditors;
   d. Monitoring Risks and Mitigation. The TKT Committee coordinates with the Risk Management Committee regarding risk monitoring and mitigation, especially in the preparation of the Company's Financial Reports to ensure that the internal control system and implementation are adequate in safeguarding Assets and correctly recording Liabilities/Debts to avoid material misstatements in Financial Reports for a fiscal year.
7. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners.

Other Assignments

In addition to the aforementioned duties, the Board of Commissioners may assign other tasks to the TKT Committee under the following conditions:

1. Other assignments from the Board of Commissioners to the TKT Committee must be given in writing, specifying:

a. Nama anggota Komite yang diberi tugas;

b. Sifat dan lingkup pekerjaan;
c. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
d. Waktu penugasan; dan
e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.

2. Tugas lain dapat mencakup tugas di luar bidang audit yang menjadi lingkup pengawasan dan arahan Dewan Komisaris, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan tugas lain Komite TKT antara lain dapat:
   a. Dilakukan melalui reviu terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait;
   c. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Fungsi Audit Internal atau dengan Auditor Eksternal.
4. Komite TKT harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain dengan menjaga kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite TKT dan anggota Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite TKT mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan orientasi dan program pengenalan bagi anggota baru Komite TKT mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite TKT;
2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
   a. Melihat dan mempelajari buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
   b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
   c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

   d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perusahaan;

a. The name of the Committee member assigned;
b. The nature and scope of work;
c. The objectives and targets of the work;
d. The assignment duration; and
e. Administrative matters related to the specific assignment.

2. Other assignments may include duties beyond the audit field within the scope of supervision and guidance of the Board of Commissioners, but not limited to reviewing suspected errors in Board of Directors' meeting decisions or deviations in the implementation of Board of Directors' meeting resolutions in relation to their duties and responsibilities;
3. The implementation of other assignments by the TKT Committee may include:
   a. Reviewing all records, documents, and other necessary information, including Board of Directors' and Board of Commissioners' meeting minutes;
   b. Questioning the Board of Directors and their staff, with results documented in a Q&A Meeting Report signed by the relevant parties;
   c. Conducting an investigative audit, if deemed necessary, in cooperation with the Internal Audit Function or External Auditor.
   d.
4. The TKT Committee must submit reports on the implementation of other assignments while maintaining maximum confidentiality, limited to TKT Committee members and the Board of Commissioners.

AUTHORITY OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The TKT Committee has the authority as follows:

1. Receiving orientation and introduction programs for new TKT Committee members regarding the role, responsibilities, and framework of the TKT Committee;
2. Accessing documents, data, and Company information about employees, funds, assets, and Company resources required in relation to the performance of its duties;
   a. Viewing and studying books, letters, and other documents, examining cash for verification purposes and other securities, and inspecting the Company's assets;

   b. Entering the premises, buildings, and offices used by the Company;
   c. Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters related to the management of the Company;
   d. Being informed about all policies and actions that have been and will be implemented by the Company;

3. Bekerjasama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain (Audit Internal dan Unit-unit operasional perusahaan terkait);
4. Apabila diperlukan, Komite TKT dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/ pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;
5. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite TKT dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc,* dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya;
6. Komite TKT berwenang mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;
7. Komite TKT mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, auditor eksternalf akuntan dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite TKT;

8. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
9. Komite TKT berwenang mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;
10. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite TKT dapat bekerja sama dengan Fungsi Audit Internal.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan melaui Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-11.XII/DK/ PTHK/2023 tanggal 29 Desember 2023. Piagam Komite TKT memiliki cakupan sebagai berikut:

1. Pendahuluan
   Menjelaskan terkait latar belakang, visi dan misi, maksud dan tujuan, landasan hukum serta ruang lingkup.
2. Organisasi dan Kode Etik Komite TKT

   Menjelaskan terkait pembentukan, komposisi dan struktur organisasi, persyaratan anggota Komite TKT, pengangkatan dan pemberhentian, independensi dan masa jabatan.

3. Collaborating with work partners, including: Supporting Organs of the Board of Commissioners, related work units at the management level such as (Internal Audit and relevant operational units of the company);
4. If needed, the TKT Committee may involve experts and/or consultants/independent parties outside the Committee as needed to assist in carrying out its duties with the approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense;
5. If needed, in carrying out its duties and obligations, the TKT Committee may form an ad hoc team, where the criteria and assignment period are adjusted to the type of work;

6. The TKT Committee has the authority to review independence, objectivity, and recommend an External Auditor to the Board of Commissioners to be selected by the Company to audit the Company's Financial Statements;
7. The TKT Committee has the authority to communicate directly with employees, including the Board of Directors and those performing the functions of internal audit, risk management, external auditors, accountants, and other parties related to the duties and responsibilities of the TKT Committee;
8. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners;
9. The TKT Committee has the authority to review independence, objectivity, and recommend an External Auditor to the Board of Commissioners to be selected by the Company to audit the Company's Financial Statements;
10. In exercising the authority as mentioned above, the TKT Committee may collaborate with the Internal Audit Function.

CHARTER OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

In carrying out its duties, the Integrated Governance Committee refers to the Integrated Governance Committee Charter, which was ratified through the Board of Commissioners' Decision Number SL-11. XII/DK/PTHK/2023 dated December 29, 2023. The TKT Committee Charter covers the following:

1. Introduction
   Explains the background, vision and mission, objectives, legal basis, and scope.

2. Organization and Code of Ethics of the TKT Committee
   Explains the formation, composition, and organizational structure, membership requirements, appointment and dismissal, independence, and tenure of the TKT Committee.

3. Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Wewenang Komite TKT
   Menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab, hak dan wewenang Komite TKT.
4. Kode Etik Komite TKT
   Menjelaskan terkait integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi anggota Komite TKT.
5. Rapat dan Hubungan Kerja Komite TKT

   Menjelaskan terkait kegiatan rapat dan hubungan kerja Komite TKT.
6. Rencana Kerja, Anggaran dan Program Pengembangan Komite TKT.
   Menjelaskan terkait rencana kerja, anggaran, honorarium dan program pengembangan.
7. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
   Menjelaskan terkait pertanggungjawaban, pelaporan, akses dan kerahasiaan informasi.
8. Evaluasi Kinerja Komite TKT
   Menjelaskan terkait periode dan bentuk evaluasi kinerja serta indikator kinerja KomiteTKT.

9. Penutup
   Menjelaskan terkait masa berlaku, tanggung jawab penerapan dan reviu Piagam KomiteTKT.

MASA JABATAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
Yudo Margono	Ketua Chairman	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Manajemen Management
Muhamad Lukman Edy	Anggota Member	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Teknik Sipil, Administrasi Pembagunan, sosiologi dan antropologi Civil Engineering, Development Administration, Sociology and Anthropology

3. Duties and Responsibilities, Rights, and Authorities of the TKT Committee
   Explains the duties and responsibilities, rights, and authorities of the TKT Committee.
4. Code of Ethics of the TKT Committee
   Explains integrity, objectivity, confidentiality, and competence of the TKT Committee members.
5. Meetings and Working Relations of the TKT Committee
   Explains the meeting activities and working relationships of the TKT Committee.
6. Work Plan, Budget, and Development Program of the TKT Committee
   Explains the work plan, budget, honorarium, and development programs.
7. Accountability, Reporting, and Performance Evaluation
   Explains accountability, reporting, access, and confidentiality of information.
8. Performance Evaluation of the TKT Committee
   Explains the period and form of performance evaluation as well as the performance indicators of the TKT Committee.
9. Closing
   Explains the validity period, responsibility for implementation, and review of the TKT Committee Charter.

TENURE OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The tenure of the Integrated Governance Committee members is a maximum of 3 (three) years and may be extended once for a period of 2 (two) years, without limiting the right of the Board of Commissioners to dismiss a committee member at any time. The tenure of Integrated Governance Committee members who are also members of the Board of Commissioners is the same as their appointment period as Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
Agung Sabar Santoso	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pertahanan dan keamanan
Chairiah	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Business Adminsitration
Wahyu Muryadi	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ekonomi, Manajemen
Susdiyarto Agus Praptono	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Hukum
Iwan Suprijanto	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Teknik Arsitektur
Sarbini	Anggota Member	Komisaris Independen PT Hutama Karya Infrastruktur Independent Commissioner of PT Hutama Karya Infrastruktur	Ilmu Sosial dan Politik, Administrasi
Iqbal Alan Abdullah	Anggota Member	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Hakaaston President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Hakaaston	Manajemen Informatika
Karjono	Anggota Member	Komisaris Utama PT Hutama Karya Realtindo President Commissioner of PT Hutama Karya Realtindo	Ilmu Sosial dan Politik, Hukum
Sunandar	Anggota Member	Komisaris PT Hutama Marga Waskita Commissioner of PT Hutama Marga Waskita	Perencanaan Kebijakan Publik

PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE PROFILE

The profile of the Integrated Governance Committee as of December 31, 2024, is as follows.

Yudo Margono

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi/ Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Chairman of the Integrated Governance Committee/President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Muhamad Lukman Edy

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Member of the Integrated Governance Committee/Vice President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Agung Sabar Santoso

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Independen
Member of the Integrated Governance Committee/Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Chairiah

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris
Member of the Integrated Governance Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Wahyu Muryadi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Independen
Member of the Integrated Governance Committee/Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Susdiyarto Agus Praptono

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris
Member of the Integrated Governance Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Iwan Suprijanto

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris
Member of the Integrated Governance Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be found in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of the Integrated Governance Committee are in accordance with the period and term of office as the Board of Commissioners.

Karjono

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Integrated Governance Committee



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang, Banten Tangerang, Banten
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Klaten, 08 Mei 1961/Usia 63 tahun per Desember 2024 Klaten, May 8, 1961 / 63 years old as of December 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka (1991) • Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas March (1997) • Magister Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro (2001) • Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (2011) • Bachelor's Degree in Social and Political Sciences, Universitas Terbuka (1991) • Bachelor's Degree in Law, Universitas Sebelas Maret (1997) • Master's Degree in Economic and Technology Law, Universitas Diponegoro (2001) • Master's Degree in Law, Universitas Padjadjaran (2011)
Sertifikasi Sertification	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM (2015) • Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Kementerian Hukum dan HAM (2018) • Sekretaris Utama (SESTAMA) Presiden Republik Indonesia (2018) • Director of Harmonization of Legislation, Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights (2015) • Expert Staff to the Minister of Law and Human Rights on Social Affairs (2018) • Principal Secretary (SESTAMA) to the President of the Republic of Indonesia (2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK-15.XII/DK/PTHK/2024, dated December 6, 2024
Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office	Periode Pertama: 2024-2027 First Term: 2024-2027
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris Utama PT HK Realtindo President Commissioner of PT HK Realtindo

Sarbini

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Integrated Governance Committee



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Tangerang, 4 Januari 1971/usia 53 tahun per Desember 2024 Tangerang, January 4, 1971 / 53 years old as of December 2024

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 August 1945 (2000) • Magister Ilmu Administrasi Universitas Prof. Dr. Moestopo • Bachelor's Degree in Social and Political Sciences, Universitas 17 August 1945 (2000) • Master's Degree in Administrative Sciences, Universitas Prof. Dr. Moestopo
Sertifikasi Sertification	-
Pengalaman Kerja Work Experience	• Staf Direksi di Non Aligned Movement Centre (NAM Centre) (2000-2003) • Staf Ahli Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta (2004-2009) • Direktur Eksekutif Puter Indonesia Foundation (2009-2013) • Director's Staff at the Non-Aligned Movement Centre (NAM Centre) (2000-2003) • Expert Staff for a Member of the Regional Representative Council (DPD RI) from DKI Jakarta Province (2004-2009) • Executive Director of Puter Indonesia Foundation (2009-2013)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK-15.XII/DK/PTHK/2024 tanggal 6 Desember 2024
Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office	Periode Pertama: 2024-2027 First Term: 2024-2027
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris Independen PT HK Infrastruktur President Commissioner and Independent Commissioner of PT Hakaaston

Iqbal Alan Abdullah

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Integrated Governance Committee



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, Jakarta South Jakarta, Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 11 Januari 1960/usia 64 tahun per Desember 2024 Jakarta, January 11, 1960 / 64 years old as of December 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Terapan Administrasi Negara, Politeknik Negeri Jakarta (2007) • Magister Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata, Universitas Gadjah Mada (2008) • Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Brawijaya (2017) • Bachelor of Applied Public Administration, Jakarta State Polytechnic (2007) • Master of Architecture and Tourism Planning, Gadjah Mada University (2008) • Doctor of Management Science, Brawijaya University (2017)
Sertifikasi Sertification	*Certified Master Management of Conference* (2011)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota DPR RI periode tahun 2009-2014 • Ketua Panitia Bidang Event (PCO) dalam rangka Visit Indonesia Year 2008, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI (2008) • President & CEO, Gadjah Mada Motor (2002-2006) • Member of the Indonesian House of Representatives for the period of 2009-2014 • Head of the Event Committee (PCO) for Visit Indonesia Year 2008, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia (2008) • President & CEO, Gadjah Mada Motor (2002-2006)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK-15.XII/DK/PTHK/2024 tanggal 6 Desember 2024 SK-15.XII/DK/PTHK/2024 dated December 6, 2024
Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office	Periode Pertama: 2024-2027 First Term: 2024-2027
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Hakaaston President Commissioner and Independent Commissioner of PT Hakaaston



Sunandar

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Integrated Governance Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 6 Maret 1970/ Usia 54 tahun per Desember 2024 Jakarta, March 6, 1970/ 54 Years Old as of December 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia 2003 • Sarjana Manajemen Informatika, STMIK Kuwera 1999 • Diploma III Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma 1996 • Master's in Planning and Public Policy, University of Indonesia (2003) • Bachelor's in Information Management, STMIK Kuwera (1999) • Diploma III in Information Management, Gunadarma University (1996)
Sertifikasi Sertification	Qualified Risk Governance Professional (2023)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024-sekarang) • Komisaris PT Hutama Marga Waskita (2022-sekarang) • Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020-024) • Plt. Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022-2024) • Assistant Deputy for Electricity and Geological Development, Deputy for Energy and Mineral Resources Coordination, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2024–present) • Commissioner of PT Hutama Marga Waskita (2022–present) • Assistant Deputy for Utilities and Manufacturing Industry, Deputy for State-Owned Enterprises Business Development, Research, and Innovation Coordination, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2020–2024) • Acting Assistant Deputy for Agro, Pharmacy, and Tourism, Deputy for State-Owned Enterprises Business Development, Research, and Innovation Coordination, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2022–2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK-15.XII/DK/PTHK/2024 tanggal 6 Desember 2024
Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office	Periode Pertama: 2024-2027 First Term: 2024-2027
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Hakaaston President Commissioner and Independent Commissioner of PT Hakaaston

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Integrated Governance Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Yudo Margono	Ketua Chairman	• Sarjana Manajemen • Magister Manajemen • Magister Terapan Operasi Laut • Bachelor's in Management • Master's in Management • Master's in Applied Naval Operations	Memiliki pengalaman kerja sebagai panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut Experience as Commander of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and Chief of Naval Staff

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Muhamad Lukman Edy	Anggota Member	• Sarjana Teknik Sipil • Master Administrasi Pembangunan • Doktor Sosiologi dan Antropologi • Bachelor's in Civil Engineering • Master's in Development Administration • Doctorate in Sociology and Anthropology	Memiliki pengalaman kerja sebagai Anggota MPR dan anggota DPR Experience as a Member of the People's Consultative Assembly (MPR) and House of Representatives (DPR)
Agung Sabar Santoso	Anggota Member	• Dikpol AKABRI • PTIK • SESPIMEN • SESPIMTI • LEMHANAS • Police Academy (AKABRI) Police Science College (PTIK) • Advanced Police Education (SESPIMEN) • Advanced Leadership Education (SESPIMTI) • National Resilience Institute (LEMHANAS)	Memiliki pengalaman kerja di Kepolisian RI Experience in the Indonesian National Police (Polri)
Chairiah	Anggota Member	• Sarjana Teknologi Industri Pertanian • Magister Business Administration • Bachelor's in Agricultural Industrial Technology • Master's in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian BUMN Experience at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN)
Wahyu Muryadi	Anggota Member	• Sarjana Ekonomi • Magister Manajemen • Bachelor's in Economics • Master's in Management	Memiliki pengalaman kerja di PT Tempo Inti media Experience at PT Tempo Inti Media
Susdiyarto Agus Praptono	Anggota Member	• Sarjana Hukum • Master Hukum • Bachelor's in Law • Master's in Law	Memiliki pengalaman kerja di Kejaksaan Agung Experience at the Attorney General's Office
Iwan Suprijanto	Anggota Member	• Sarjana Teknik Arsitektur • Magister Teknik Arsitektur • Insinyur Program Profesi Insinyur • Bachelor's in Architecture Engineering Master's in Architecture Engineering • Professional Engineer Program	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Experience at the Ministry of Public Works and Housing
Sarbini	Anggota Member	• Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Magister Ilmu Administrasi • Bachelor's in Social and Political Sciences • Master's in Administrative Sciences	Memiliki pengalaman kerja di Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Experience as a Member of the Regional Representative Council (DPD RI) for DKI Jakarta
Iqbal Alan Abdullah	Anggota Member	• Sarjana Terapan Administrasi Negara • Magister Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata • Doktor Ilmu Manajemen • Bachelor of Applied Public Administration • Master of Architecture and Tourism Planning • Doctor of Management Science	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Having work experience at the Coordinating Ministry for Economic Affairs

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Karjono	Anggota Member	• Sarjana Ilmu Sosial Politik • Sarjana Ilmu Hukum • Magister Hukum Ekonomi dan Teknologi • Magister Ilmu Hukum • Bachelor's in Social and Political Sciences • Bachelor's in Law • Master's in Economic and Technology Law • Master's in Law	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Hukum dan HAM Experience at the Ministry of Law and Human Rights
Sunandar	Anggota Member	• Diploma III Manajemen Informatika • Sarjana Manajemen Informatika • Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik • Diploma in Information Management • Bachelor's in Information Management • Master's in Planning and Public Policy	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Experience at the Coordinating Ministry for Economic Affairs

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INDEPENDENCE OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Table of Independence of the Integrated Governance Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Yudo Margono	Muhamad Lukman Edy	Agung Sabar Santoso	Chairiah	Wahyu Muryadi	Susdiyarto Agus Praptono	Iwan Suprijanto	Sarbini	Iqbal Alan Abdullah	Karjono	Sunandar
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have financial relationships with the Board of Commissioners and Directors.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not hold management positions in the company, subsidiaries, or affiliated companies.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership in the company.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Aspek Independensi Independence Aspect	Yudo Margono	Muhamad Lukman Edy	Agung Sabar Santoso	Chairiah	Wahyu Muryadi	Susdiyarto Agus Praptono	Iwan Suprijanto	Sarbini	Iqbal Alan Abdullah	Karjono	Sunandar
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Does not have family relationships with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Integrated Governance Committee.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a political party official, government official, or civil servant.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Competency Development Materials/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Implementation	Penyelenggara Organizer
Yudo Margono	Ketua Chairman	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency improvement program can be found in the Training and/or Competency Improvement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Muhamad Lukman Edy	Anggota Member	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency improvement program can be found in the Training and/or Competency Improvement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Agung Sabar Santoso	Anggota Member	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency improvement program can be found in the Training and/or Competency Improvement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Chairiah	Anggota Member	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency improvement program can be found in the Training and/or Competency Improvement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Competency Development Materials/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Implementation	Penyelenggara Organizer
Wahyu Muryadi	Anggota Member	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency improvement program can be found in the Training and/or Competency Improvement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Susdiyarto Agus Praptono	Anggota Member	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency improvement program can be found in the Training and/or Competency Improvement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Iwan Suprijanto	Anggota Member	Program peningkatan kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. The competency improvement program can be found in the Training and/or Competency Improvement Section of the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Sarbini	Anggota Member	Executive Briefing on Environmental, Social, and Governance	Jakarta 28 November 2024 Jakarta, November 28, 2024	CRMS
Iqbal Alan Abdullah	Anggota Member	-		
Karjono	Anggota Member	-		
Sunandar	Anggota Member	Executive Briefing on Environmental, Social, and Governance	Jakarta, 28 November 2024 Jakarta, November 28, 2024	CRMS

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Komite TKT mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) semester.
2. Di luar rapat berkala tersebut, Komite TKT dapat melakukan rapat sesuai kebutuhan dengan agenda yang disepakati bersama oleh anggota Komite TKT;
3. Rapat Komite TKT hanya dapat dilaksanakan apabila:
   a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite TKT.
   b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota yang hadir merupakan Ketua Komite TKT.
4. Pemanggilan Rapat Komite TKT dilakukan oleh Ketua Komite TKT. Dalam hal Ketua Komite TKT berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh anggota Ketua Komite TKT yang ditunjuk oleh Ketua Komite;

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETINGS

POLICY ON INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETINGS

1. The Integrated Governance Committee (TKT Committee) holds meetings at least once every semester.
2. In addition to regular meetings, the TKT Committee may hold meetings as needed, with an agenda agreed upon by the committee members;
3. The TKT Committee meeting can only be held if:
   a. It is attended by the majority of the TKT Committee members.
   b. One of the majority members present must be the Chairman of the TKT Committee.
4. The TKT Committee meeting is called by the Chairman of the TKT Committee. If the Chairman is unable to attend, the meeting is called by a member appointed by the Chairman;

5. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang disepakati;
6. Jika dipandang perlu, Komite TKT dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
7. Dalam hal diperlukan, Komite TKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan;
8. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite TKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
   a. Mengatur jadwal rapat;
   b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
   c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
   d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
9. Rapat Komite TKT dipimpin oleh Ketua Komite TKT. Dalam hal Ketua Komite TKT berhalangan pada jam dimulai rapat sesuai undangan, maka atas izin Ketua Komite TKT rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dapat hadir. Jika anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin rapat terlambat datang, atau karena sesuatu hal harus meninggalkan rapat sementara, maka rapat sementara dipimpin oleh anggota Komite TKT yang paling senior masa jabatannya;
10. Setiap anggota Komite TKT diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapa pun;
11. Keputusan rapat Komite TKT diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
12. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite TKT termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite TKT yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Untuk risalah rapat Komite TKT, selain ditandatangani oleh anggota Komite TKT yang hadir dalam rapat, juga diketahui oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite;

5. Meeting invitations must be sent at least 14 (fourteen) days before the meeting date and, in urgent situations, at least 3 (three) days prior. The invitation must include the date, time, location, and agenda of the meeting, which shall take place at the Company's headquarters or another agreed location within Indonesia;
6. If necessary, the TKT Committee may invite other relevant parties to participate in the meeting with the approval of the relevant Board of Directors member;
7. If needed, the TKT Committee may invite resource persons from the Board of Commissioners, Directors, or other internal and external parties;
8. To facilitate its duties, the TKT Committee is assisted by a Committee Secretary responsible for:
   a. Scheduling meetings;
   b. Proposing and contacting required resource persons;
   c. Preparing and distributing invitations and meeting materials;
   d. Drafting and distributing meeting minutes.
9. The TKT Committee meeting is chaired by the Chairman of the TKT Committee. If the Chairman is unable to attend at the scheduled time, with the Chairman's permission, another attending member of the Board of Commissioners may lead the meeting. If that member arrives late or must leave temporarily, the meeting will be chaired by the most senior TKT Committee member present;
10. Each TKT Committee member is given full freedom to express professional opinions on each meeting agenda without any external interference.
11. Decisions in TKT Committee meetings are made based on deliberation and consensus.
12. All discussions and decisions made during TKT Committee meetings, including dissenting opinions, must be recorded in the meeting minutes, which are signed by all attending committee members as legal proof of the decisions made and submitted to the Board of Commissioners. The meeting minutes must also be acknowledged by the Chairman and Vice Chairman of the Committee.

13. Setiap anggota Komite TKT menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas Risalah Rapat, dengan mempertimbangkan ketentuan batas waktu penyampaian risalah rapat yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Komite TKT. Jika sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari setelah rapat, tidak ada usulan perubahan, maka Risalah Rapat dianggap disetujui oleh seluruh anggota Komite TKT;
14. Setiap anggota Komite TKT berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
15. Kehadiran anggota Komite TKT dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite TKT;
16. Tata tertib rapat Komite TKT tertuang dalam aturan tersendiri.

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

13. Each TKT Committee member may provide approval, objections, or suggestions for amendments to the meeting minutes, considering the deadline set in the TKT Committee Meeting Rules. If no changes are proposed within 15 (fifteen) days after the meeting, the minutes are deemed approved by all committee members.
14. Each TKT Committee member has the right to receive a copy of the meeting minutes, even if they did not attend the meeting.
15. The attendance of TKT Committee members at meetings is reported in the committee's quarterly and annual reports.
16. The rules governing TKT Committee meetings are set out in a separate regulation.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETING AGENDA

Table of Integrated Governance Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	11 Juni 2024 June 11, 2024	Sosialisasi Komite Tata Kelola Terintegrasi Hutama Karya Socialization of the Integrated Governance Committee of Hutama Karya	Yudo Margono Muhamad Lukman Edy Agung Sabar Santoso Chairiah Wahyu Muryadi Susdiyarto Agus Praptono Iwan Suprijanto Sarbini Iqbal Alan Abdullah Karjono Sunandar
2	10 Desember 2024 December 10, 2024	1. Pembahasan Kinerja Keuangan dan Operasional Anak Perusahaan Hutama Karya per Oktober 2024 2. Pembahasan Isu Strategis termasuk Top Risk dan Permasalahan Hukum Anak Perusahaan Hutama Karya 1. Discussion on Financial and Operational Performance of Hutama Karya's Subsidiaries as of October 2024 2. Discussion on Strategic Issues, including Top Risks and Legal Issues of Hutama Karya's Subsidiaries	Yudo Margono Muhamad Lukman Edy Agung Sabar Santoso Chairiah Wahyu Muryadi Susdiyarto Agus Praptono Iwan Suprijanto Sarbini Iqbal Alan Abdullah Karjono Sunandar

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETINGS

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Table of Attendance Rate in Integrated Governance Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Meetings Jumlah dan Persentasi Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Yudo Margono	Ketua Chairman	2	2	100%
Muhamad Lukman Edy	Anggota Member	2	2	100%
Agung Sabar Santoso	Anggota Member	2	2	100%
Chairiah	Anggota Member	2	2	100%
Wahyu Muryadi	Anggota Member	2	2	100%
Susdiyarto Agus Praptono	Anggota Member	2	2	100%
Iwan Suprijanto	Anggota Member	2	2	100%
Sarbini	Anggota Member	2	2	100%
Iqbal Alan Abdullah	Anggota Member	2	2	100%
Karjono	Anggota Member	2	2	100%
Sunandar	Anggota Member	2	2	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Sosialisasi Komite Tata Kelola Terintegrasi Hutama Karya
2. Pembahasan Kinerja Keuangan dan Operasional Anak Perusahaan Hutama Karya
3. Pembahasan Isu Strategis termasuk Top Risk dan Permasalahan Hukum Anak Perusahaan Hutama Karya

WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE YEAR 2024

During 2024, the Integrated Governance Committee has carried out its duties, among others:

1. Socialization of the Hutama Karya Integrated Governance Committee
2. Discussion of Financial and Operational Performance of Hutama Karya Subsidiaries
3. Discussion of Strategic Issues including Top Risk and Legal Issues of Hutama Karya Subsidiaries

Organ dan Komite di Bawah Direksi
Corporate Organs and Committees Under The Board of Directors

SEKRETARIS PERUSAHAAN

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

STRUCTURE OF THE CORPORATE SECRETARY



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan telah menetapkan beberapa tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, yakni terkait dengan penyebaran informasi Perseroan dan GCG. Berikut uraiannya:

1. Terkait dengan penyebaran informasi
   a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
   b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan investor berkaitan dengan kondisi Perseroan.
   c. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.
   d. Sebagai penghubung atau liaison officer antara Perseroan dengan OJK, dan masyarakat.
2. Tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan yang terkait dengan GCG
   Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada Badan Usaha Milik Negara adalah:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Company has established several duties and responsibilities for the Corporate Secretary, particularly related to the dissemination of corporate information and Good Corporate Governance (GCG). Below is a breakdown:

1. Related to Information Dissemination
   a. Monitoring developments in the capital market, especially regulations applicable to the capital market sector.
   b. Providing services to the public regarding any information required by investors concerning the Company's condition.
   c. Advising the Company's Board of Directors to comply with the Capital Market Law (UUPM) and its implementing regulations.
   d. Acting as a liaison officer between the Company and the Financial Services Authority (OJK), as well as the public.

2. Duties and Functions of the Corporate Secretary Related to GCG
   According to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities in State-Owned Enterprises (SOE), the Corporate Secretary is responsible for:

a. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
c. Sebagai penghubung *(liaison officer).*
d. Menyusun serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Selain itu, dalam Pedoman GCG Hutama Karya disebutkan bahwa tugas Sekretaris Perusahaan mencakup sebagai berikut:
1. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS.
2. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
3. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perseroan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perseroan yang penting lainnya.
4. Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan.
5. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perseroan dari setiap unit kerja.
6. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang disampaikan kepada *stakeholders*, baik dalam website, buletin, atau media informasi lainnya.
7. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik.
8. Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan *(Annual Report)* telah mencantumkan penerapan GCG di lingkungan Perseroan.
9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direksi secara berkala.

a. Ensuring that the Company complies with disclosure requirements in line with the principles of GCG.
b. Providing necessary information to the Board of Directors and the Board of Commissioners/Supervisory Board regularly and/or upon request.
c. Acting as a liaison officer.
d. Preparing and maintaining Company documents, including but not limited to the Shareholder Register, Special Register, and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings, and General Meetings of Shareholders (GMS).

In addition, the Hutama Karya Good Corporate Governance (GCG) Guidelines state that the duties of the Corporate Secretary include:
1. Preparing the organization of the General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Attending Board of Directors meetings and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Managing and storing documents related to the Company's activities, including GMS documents, Board of Directors meeting minutes, joint meeting minutes between the Board of Directors and the Board of Commissioners, and other important Company documents.
4. Recording a Special Register related to the Board of Directors and their families, as well as the Board of Commissioners and their families, both within the Company and its affiliates, covering share ownership, business relationships, and other roles that may create conflicts of interest with the Company's interests.
5. Gathering all important information about the Company from each business unit.
6. Maintaining and updating company information provided to stakeholders through the website, bulletins, or other information media.
7. Establishing criteria regarding the type and content of information that can be disclosed to stakeholders, including information that can be shared as public documents.
8. Ensuring that the Company's Annual Report includes the implementation of GCG within the Company.
9. Reporting the execution of duties and responsibilities to the Board of Directors on a regular basis.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE



Adjib Al Hakim
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia
Tempat dan Tahun Lahir/Usia Place and Year of Birth/Age	Lahir di Purwokerto pada tahun 1968. Usia 56 tahun Per Desember 2024. Born in Purwokerto in 1968. 56 years old as of December 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro (1995) • Magsiter Manajemen Universitas Lambung Mangkurat (2007) • Bachelor's Degree in Civil Engineering, Diponegoro University (1995) • Master's Degree in Management, Lambung Mangkurat University (2007)
Sertifikasi Certifications	• ASEAN Chartered Professional Engineer (2014) • Qualified Risk Governance Professional (QRGP) (2021)
Pengalaman Kerja Work Experience	Pernah menjabat di Hutama Karya antara lain sebagai: • EVP Sekretaris Perusahaan (2024-Sekarang). • Sr. Expert pada Sekretaris Perusahaan (2024) • *Sr. Expert* Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (2023-2024). Previously held positions at Hutama Karya, including: • EVP Corporate Secretary (2024 - Present) • Sr. Expert in Corporate Secretary (2024) • Sr. Expert in Toll Road Operations and Maintenance Division (2023-2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 965/KPTS/33/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 First appointed in 2024 based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 965/KPTS/33/III/2024 dated 27 March 2024.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Type of Training and Competency Development Materials/Training	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
Merger and Acquisition Masterclass: Merger and Acquisition Conclave to Address Integration Challenges	Jakarta, 22 Mei 2024 Jakarta, May 22, 2024	Mercer & Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
Workshop Program Kepatuhan Persaingan Usaha Competition Compliance Program Workshop	Bandung, 17-18 Oktober 2024 Bandung, October 17-18, 2024	Tim Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha - Hutama Karya Competition Compliance Program Implementation Team - Hutama Karya

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2024

1. Menyelenggarakan RUPS RKAP Tahun Buku 2024 dan RUPS Pertangungjawaban Kinerja Tahun Buku 2023;

2. Melaksanakan dokumentasi risalah RUPS, akta RUPS, dan hal-hal lain berkenaan dengan RUPS;

3. Membuat dan mendokumentasikan risalah Rapat Direksi;
4. Memastikan pelaksanaan agenda kegiatan, kesekretariatan, persuratan dan kebutuhan kedinasan Direksi.
5. Mengoordinasikan rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi, seperti Rapat Gabungan dan Rapat Koordinasi;
6. Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Komisaris dam keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan Perseroan.

7. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024;
8. Melaksanakan *assessment* GCG Tahun Buku 2023;
9. Melaporkan setiap informasi material kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
10. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang disampaikan kepada stakeholders, baik dalam website, buletin, atau media informasi lainnya.
11. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapt disampakan sebagai dokumen *public*.
12. Memastikan pelaksanaan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai kebutuhan keterbukaan informasi publik.

13. Melakukan korespondensi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan.
14. Memastikan pengembangan kebijakan dan strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berbasis pada *International Organization for Standarization* (ISO) dan selaras dengan tujuan pengembangan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2024

1. Organizing the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 Work Plan and Budget and the Performance Accountability Meeting for the 2023 Fiscal Year.
2. Carrying out documentation of AGMS minutes, AGMS deeds, and other matters related to the AGMS.
3. Preparing and documenting the Board of Directors' meeting minutes.
4. Ensuring the execution of activity agendas, secretarial duties, correspondence, and official needs of the Board of Directors.
5. Coordinating meetings attended by the Board of Directors, such as Joint Meetings and Coordination Meetings.
6. Recording a Special Register related to the Board of Directors and their families, as well as the Board of Commissioners and their families, both within the Company and its affiliates, covering share ownership, business relationships, and other roles that create conflicts of interest within the Company.
7. Preparing the 2024 Annual Report and Sustainability Report.
8. Conducting a Good Corporate Governance (GCG) assessment for the 2023 Fiscal Year.
9. Reporting any material information to the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Financial Services Authority (OJK).
10. Maintaining and updating company information provided to stakeholders, whether through the website, bulletins, or other information media.

11. Determining criteria regarding the type and content of information that can be disclosed to stakeholders, including information that can be shared as public documents.
12. Ensuring the execution of the function as the Information and Documentation Management Officer (PPID) in accordance with public information disclosure requirements.
13. Handling correspondence with shareholders and stakeholders.
14. Ensuring the development of Corporate Social Responsibility and Environmental (TJSL) policies and strategies based on the International Organization for Standardization (ISO) and aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs).

SATUAN PENGAWASAN INTERN

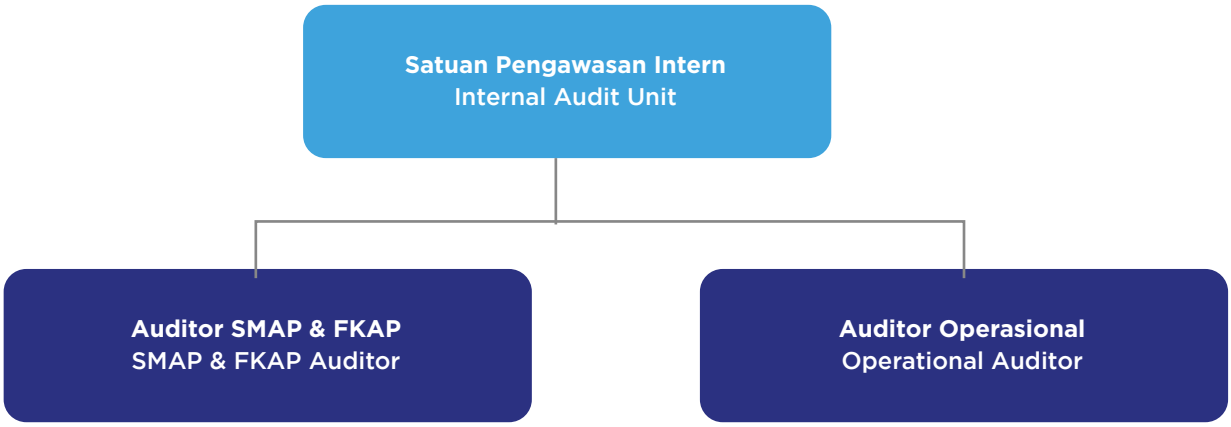
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Hutama Karya (Persero) dipimpin oleh Executive Vice President yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

INTERNAL AUDIT UNIT

INTERNAL AUDIT UNIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Internal Audit Unit (SPI) PT Hutama Karya (Persero) is led by an Executive Vice President, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The SPI reports directly to the President Director.



KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Dalam organisasi Perseroan, kedudukan Satuan Pengawasan Intern dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan dipimpin oleh seorang Executive Vice President (EVP) Satuan Pengawasan Intern (SPI);
2. EVP SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan atas persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan mekanisme internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. EVP SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perusahaan dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
4. Auditor yang duduk dalam Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab secara langsung kepada EVP SPI;
5. EVP SPI dan Auditor SPI lainnya tidak diperkenankan memegang fungsi operasional di dalam Perusahaan.

POSITION OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In the Company's organization, the position of the Internal Supervisory Unit is detailed as follows:

1. The Company's Internal Supervisory Unit (SPI) is led by an Executive Vice President (EVP) of the Internal Supervisory Unit (SPI).
2. The EVP of SPI is appointed and dismissed by the President Director with written approval from the Board of Commissioners, based on the internal mechanisms of the State-Owned Enterprise (SOE).
3. The EVP of SPI is accountable to the President Director of the Company and maintains a line of communication with the Board of Commissioners through the Audit Committee.
4. Auditors within the Internal Supervisory Unit report directly to the EVP of SPI.
5. The EVP of SPI and other SPI auditors are not permitted to hold operational functions within the Company.

PROFIL EVP SATUAN PENGAWASAN INTERN

PROFILE OF EVP INTERNAL SUPERVISORY UNIT



Tri Wibowo

EVP Satuan Pengawasan Internal
EVP Internal Audit Unit

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Sragen, 15 April 1972 / 53 Tahun Sragen, April 15, 1972 / 53 Years Old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master of Business Administration Institut Teknologi Bandung (2022) • Sarjana Teknik Sipil Universitas Sebelas March (1997) • Master of Business Administration, Bandung Institute of Technology (2022) • Bachelor of Civil Engineering, Sebelas March University (1997)
Sertifikasi Certifications	• Asesor Kompetensi Sertifikasi SKK Konstruksi • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 3 Instruktur Juneor/Juneor Trainer • Ahli Investigasi Insiden • Green Construction, A Sustainability in Building • Auditor Sistem Manajemen Pengamanan • Ahli Utama Keselamatan Jalan • Ahli Utama Jalan dan Jembatan • Ahli Utama Keselamatan Konstruksi • Lead Auditor ISO 9001:2015 terkait Quality • Lead Auditor ISO 14001:2018 terkait Lingkungan • Lead Auditor ISO 45001:2021 terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Competency Assessor for SKK Construction Certification • Indonesian National Qualification Framework (KKNI) Level 3 Juneor Instructor/ Juneor Trainer • Incident Investigation Expert • Green Construction, A Sustainability in Building • Security Management System Auditor • Principal Road Safety Expert • Principal Road and Bridge Expert • Principal Construction Safety Expert • Lead Auditor ISO 9001:2015 on Quality • Lead Auditor ISO 14001:2018 on Environment • Lead Auditor ISO 45001:2021 on Occupational Health and Safety
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Senior Expert* Divisi Sipil Umum (2023-Okt 2024) • EVP Divisi QHSSE (2018-2023) • Senior Manajer Produksi Wilayah III (2016-2018) • Senior Expert in Infrastructure Division (2023-Oct 2024) • EVP QHSSE Division (2018-2023) • Senior Production Manager Region III (2016-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero)Nomor 439/KPTS/92/2024 tanggal 14 October 2024 • Surat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) Nomor S-109.IX/ DK/PTHK/2024 tanggal 27 September 2024 • Board of Directors Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. 439/KPTS/92/2024 dated October 14, 2024 • Approval Letter from the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) No. S-109.IX/DK/PTHK/2024 dated September 27, 2024

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (*Executive Vice President*) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE HEAD OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit is led by a Head of the Internal Audit Unit (Executive Vice President), who is appointed and dismissed by the President Director, with the approval of the Board of Commissioners and recommendations of the Audit Committee.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN, setiap tahun masing-masing personil SPI wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik audit, manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan atau akuntansi. Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan secara akumulasi paling sedikit 40 (empat puluh) jam untuk kepala SPI dan 20 (dua puluh) jam untuk anggota SPI, di bawah ini merupakan partisipasi personil SPI dalam Tahun 2024 sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY ENHANCEMENT PROGRAM

Based on the Copy of the Decision of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Guidelines on the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOE, each SPI personnel is required to participate in at least one training session annually on topics related to audit, risk management, fraud, business, corporate operations, law, compliance, finance, or accounting. Each year, the mandatory cumulative training hours are at least 40 (forty) hours for the Head of SPI and 20 (twenty) hours for SPI members. Below is the participation of SPI personnel in 2024:

No	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara Organizer	Jumlah orang Number of Participants
1	Workshop Nasional dengan Tema "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah" National Workshop on "Corporate Accountability in Criminal Acts of Corruption in Government Procurement of Goods and Services"	11-12 Desember 2024 December 11-12, 2024	PB SEMMI	1
2	Pelatihan Qualified Risk Management Officer (QRMO) Qualified Risk Management Officer (QRMO) Training	3-5 Desember 2024 December 3-5, 2024	PPM Manajemen	3
3	Pelatihan Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA Certification Training	2-11 Desember 2024 December 2-11, 2024	YPIA	1
4	Pelatihan dan Uji Sertifikasi Certified Public Private Partnership Professional (CP3P) – Level Foundation Rev. 1 Training and Certification Test for Certified Public Private Partnership Professional (CP3P) – Level Foundation Rev. 1	3-10 Desember 2024 December 3-10, 2024	PT PII	1
5	Pelatihan Certified Anti Fraud Governance (CAFG) Certified Anti-Fraud Governance (CAFG) Training	12-14 Desember 2024 December 12-14, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi GRS Tangguh Management	2
6	SPI sebagai Organ Pengelola Risiko: Tantangan & Realita dalam Mencapai Kinerja Optimal Perusahaan" SPI as a Risk Management Organization: Challenges & Realities in Achieving Optimal Company Performance	28-29 November 2024 November 28-29, 2024	FKSPI	1

No	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara Organizer	Jumlah orang Number of Participants
7	Pelatihan & Sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 Training & Certification	26 Nov 2024 -15 Feb 2025 November 26, 2024 - February 15, 2025	PPA FEB UI	2
8	Pelatihan & Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) Batch III Tahun 2024 Qualified Risk Management Professional (QRMP) Batch III 2024 Training & Certification	7-11 Oktober 2024 October 7-11, 2024	CRMS Indonesia	2
9	Pelatihan Internal Control Testing Internal Control Testing Training	17-18 September 2024 September 17-18, 2024	CRMS Indonesia dan Deloitte	1
10	Pelatihan Understanding & Internal Auditor QHSE, Understanding & Internal Auditor QHSE Training	2-5 September 2024 September 2-5, 2024	Bureau Varitas Service	1
11	Pelatihan Manajemen Kontrak Contract Management Training	20-21 Agustus 2024 August 20-21, 2024	Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Indonesian Engineers Association	2
12	Pelatihan Certified Anti-Fraud Governance (CAFG) & Master Class LSPMR Certified Anti-Fraud Governance (CAFG) & LSPMR Master Class Training	24-26 Juli 2024 July 24-26, 2024	GRC Management bekerjasama dengan LSP Manajemen Risiko (LSPMR)	1
13	Workshop Perancangan Dan Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (Icofr) Bagi Bumn Dan Anak Perusahaan Bumn Workshop On The Design And Implementation Of Internal Control Over Financial Reporting (Icofr) For Soe And Soe Subsidiaries	12 Juli 2024 July 12, 2024	Koran BUMN	2
14	Pelatihan SAP – Advance Learning Hub & SAP Exam Certification SAP Training – Advanced Learning Hub & SAP Exam Certification	-	-	1
15	Konferensi Auditor Internal 2024 dengan tema “Elevating Internal Audit as a Value Driver: Achieving Business Resilience in the Era of Digitalization” Internal Auditor Conference 2024 “Elevating Internal Audit as a Value Driver: Achieving Business Resilience in the Era of Digitalization”	10-11 Juli 2024 July 10-11, 2024	YPIA	6
16	Pelatihan *Certified Internal Auditor (CIA) Review* Certified Internal Auditor (CIA) Review Training	6 Juli - 26 Oktober 2024 July 6 - October 26, 2024	PPA FEB UI	1
17	Pelatihan & Praktik Pajak Ekualisasi PPh & PPN Tax Equalization Practice Training for Income Tax & VAT	26-27 Juni 2024 June 26-27, 2024	DDTC Academy	1
18	Pelatihan Audit Internal ISO 27001: 2022 Internal Audit Training ISO 27001: 2022	-	PT BSI Group Indonesia	2
19	Pelatihan & Sertifikasi Qualified Risk Management Officer (QRMO) Batch 1 Qualified Risk Management Officer (QRMO) Batch 1 Training & Certification	15-17 Mei 2024 May 15-17, 2024	CRMS Indonesia	2
20	Pelatihan & Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) Batch 2 Qualified Risk Management Professional (QRMP) Batch 2 Training & Certification	13-17 Mei 2024 May 13-17, 2024	CRMS Indonesia	2
21	Pelatihan Understanding & Internal Auditor SA 8000 Understanding & Internal Auditor SA 8000 Training	11-12 Juni 2024 June 11-12, 2024	Bureau Varitas Service	1

No	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara Organizer	Jumlah orang Number of Participants
22	Pelatihan Risk Maturity Index Kementerian BUMN Tahun 2024 Risk Maturity Index Training for Ministry of SOE 2024	8 Maret 2024 March 8, 2024	KBUMN dan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	4
23	Pelatihan Recognition of Prior Learning (RPL) untuk Register Negara Akuntan Recognition of Prior Learning (RPL) Training for State Accountant Register	19-22 Februari 2024 February 19-22, 2024	Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)	2
24	Pelatihan & Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP) Training & Certification	29 Jan -2 Feb 2024 January 29 - February 2, 2024	CRMS Indonesia	4
25	Pelatihan Integrated Management System QHSE & ISO 39001 Refreshment Training on Integrated Management System QHSE & ISO 39001 Refreshment	22-23 Januari 2024 January 22-23 2024	PT SGS Indonesia	1
26	Pelatihan & Sertifikasi Certified IDEA Data Analyst (CIDA) Training & Certification for Certified IDEA Data Analyst (CIDA)	10 Januari 2024	PT Insight Consulting	1
27	Pelatihan Awareness ISO 37001:2016 SMAP Training on Awareness ISO 37001:2016 SMAP	28-29 Februari 2024 February 28-29 2024	Sucofindo	2
28	Bimbingan Teknis Quality Asurance Review (QAR) Technical Guidance on Quality Assurance Review (QAR)	3 & 8 Mei 2024 May 3 & 8, 2024	Bina Audita Indonesia	26
29	Recognition Prior Learning For Register Akuntan Negara - ACPA Recognition of Prior Learning for Register of State Accountant - ACPA	19 -22 Februari 2024 February 19-22, 2024	Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)	1
30	Certified Internal Audit Executive (CIAE)	15 Juli s/d 1 Agustus 2024 July 15 to August 1, 2024	Pusdiklatwas BPKP	1
31	Global Internal Audit Standard (GIAS)	11 Mei 2024 May 11, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	1
32	Certified Practitioner of Internal Auditor (CPIA)	18 Maret-1 April 2024 March 18 to April 1, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	4
33	Internal Control Over Financial Report (ICoFR)	25 Mei 2024 May 25, 2024	Asosiasi Audit Internal (AAI)	4
34	Sertifikat Mengenal Model IACM Certificate of Understanding the IACM Model	9 Maret 2024 March 9, 2024	Asosiasi Audit Internal (AAI)	1
35	Certificate Advance testing Technology for Soil Compaction IntroducingElectrical Density Gauge (EDC)	26-Apr-24 April 26, 24	HK Expert Talk	1
36	Sertifikat Seminar Nasional Emerging awareness and opportunity in Road Infrastructure Management Certificate of National Seminar on Emerging Awareness and Opportunity in Road Infrastructure Management	2 Oktober 2024 October 2, 2024	Pengembang Jalan Indonesia (HPJI)	3
37	Sertifikat Sikap SPI dalam Situasi Goncangan kecurangan di Perusahaan Certificate on SPI's Attitude in Fraud Shocks within Companies	6-Apr-24 April 6, 2024	Asosiasi Audit Internal (AAI)	2
38	Fundamental Leadership	29-30 Mei 2024 May 29-30, 2024	Ascademy - Arya Sinulingga Founder	3

No	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara Organizer	Jumlah orang Number of Participants
39	Diskusi Panel GRC Series 2024 "Defending Organizational Objectives : Strategies Against Fraud Panel Discussion GRC Series 2024 "Defending Organizational Objectives: Strategies Against Fraud"	22 Agustus 2024 August 22, 2024	MRT Jakarta	1
40	Riskhub International Webinar "Building Sustainable Systems Internal Controls and ESG Converegence"	5 Desember 2024 December 5, 2024	IRMAPA	1
41	Webinar IFAWPCA " Digital Transformation In Infrastructure : Unlocking Universal Application	16 Mei 2024 May 16, 2024	Asosiasi Kontraktor Indonesia	2
42	Linkeden Lerning sesuai Individual Development Planning LinkedIn Learning according to Individual Development Planning		LinkedIn Learning	26

INTERNAL AUDIT CHARTER

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Intern *(Internal Audit Charter)* SPI Nomor DU/SPI.5273.2/KPTS/114.3/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Piagam Audit Intern *(Internal Audit Charter)* mengatur antara lain:

1. Pendahuluan
   1.1 Latar Belakang
   1.2 Referensi
   1.3 Visi dan Misi
   1.4 Tujuan
   1.5 Istilah
2. Struktur dan Kedudukan
3. Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, dan Pertanggungjawaban Tugas
   3.1 Tugas dan Tanggung Jawab
   3.2 Wewenang
   3.3 Pertanggungjawaban Tugas
4. Kode Etik, Standar Atribut dan Persyaratan Profesi
   4.1 Kode Etik
   4.2 Standar Atribut
   4.3 Persyaratan Profesi
   4.4 Prinsip Inti Profesi Audit Internal
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

Satuan Pengawas Intern Hutama Karya memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

1. Merencanakan Audit Intern yang disusun berdasarkan Risiko *(Risk Based Audit)* dengan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. mengevaluasi penilaian Risiko;
   b. menilai tingkat kematangan Risiko dalam pendekatan audit;

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Company has established the Internal Audit Charter (SPI) No. DU/SPI.5273.2/KPTS/114.3/XII/2024 dated December 27, 2024, which is formulated in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The Internal Audit Charter regulates, among others:

1. Introduction
   1.1 Background
   1.2 References
   1.3 Vision and Mission
   1.4 Objectives
   1.5 Terminology
2. Structure and Position
3. Duties and Responsibilities, Authority, and Accountability
   3.1 Duties and Responsibilities
   3.2 Authority
   3.3 Task Accountability
4. Code of Ethics, Attribute Standards, and Professional Requirements
   4.1 Code of Ethics
   4.2 Attribute Standards
   4.3 Professional Requirements
   4.4 Core Principles of the Internal Audit Profession
5. Closing

INTERNAL AUDIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Internal Supervisory Unit of Hutama Karya has duties and responsibilities that include:

1. Planning Internal Audits based on Risk-Based Audit with the following responsibilities:
   a. Evaluating risk assessment;
   b. Assessing the level of risk maturity in the audit approach;

c. menyusun perencanaan audit;
d. melaksanakan perencanaan audit intern dan menyetujui temuan audit bersama unit yang di audit;
e. memantau pelaksanaan audit intern anak perusahaan;
f. melaporkan hasil pelaksanaan audit; dan
g. *Monitoring* tindak lanjut temuan audit.

2. Mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit;
6. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
7. Memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai dengan standar profesional Audit Intern dan kode etik Audit Intern;
8. Memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
9. Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam audit intern secara periodik;
10. Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
11. Memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana;
12. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
13. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
14. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
15. Melakukan penugasan audit dengan jenis sebagai berikut:
    a. Audit Umum;
    b. Audit Tematik (Termasuk Audit Khusus/ Investigasi, apabila diperlukan);
    c. Audit Mandatory Oleh Regulator;
    d. Audit Anak Perusahaan;
    e. Consulting;
    f. Audit Tujuan Tertentu; dan
    g. Audit IT.

c. Preparing audit planning;
d. Implementing internal audit planning and approving audit findings with the audited unit;
e. Monitoring the implementation of internal audits in subsidiaries;
f. Reporting audit implementation results; and
g. Monitoring follow-up actions on audit findings.

2. Evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and governance processes in accordance with laws and company policies.
3. Conducting examinations and assessments of efficiency, effectiveness, and economic aspects in finance, commerce, operations, human resources, information technology, and other activities.
4. Providing improvement suggestions and objective information about the examined activities to management levels.
5. Preparing audit reports and submitting them to the President Director and Board of Commissioners cq. Audit Committee.
6. Developing programs to evaluate the quality of internal audit activities performed.
7. Ensuring the implementation of internal supervision functions follows Internal Audit professional standards and the Internal Audit code of ethics.
8. Ensuring SPI members participate in continuous professional development and other training aligned with the increasing complexity and business activities of State-Owned Enterprises (SOE).
9. Periodically drafting and reviewing the internal audit charter.
10. Preparing an annual audit plan and budget allocation for internal supervision functions.
11. Ensuring the execution of internal supervision follows the plan.
12. Reporting significant findings to the President Director and Board of Commissioners for corrective action promptly.
13. Monitoring corrective actions for significant findings.
14. Reporting the monitoring results of corrective actions on significant findings to the President Director and Board of Commissioners.
15. Conducting audit assignments of the following types:
    a. General Audit;
    b. Thematic Audit (including Special/ Investigative Audit, if necessary);
    c. Mandatory Audit by Regulators;
    d. Subsidiary Audit;
    e. Consulting;
    f. Specific Purpose Audit; and
    g. IT Audit.

16. Melakukan reviu dan atau *Monitoring* dan evaluasi (monev) terhadap pengelolaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima perusahaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
17. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;
18. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
19. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan intern agar:
    a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SPI mengingat penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
    b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SPI ; dan
    c. Pihak eksternal mematuhi piagam Audit Intern Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
20. Sebagai SPI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Induk:
    a. Menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
    b. Merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
    c. Memantau pelaksanaan Audit Intern pada masing-masing Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
21. Melaksanakan audit terintegrasi (individual audit atau joint audit) terhadap Unit Kerja berdasarkan surat perintah Direktur Utama Perusahaan secara independen, objektif dan profesional;
22. Mengadakan rapat koordinasi dengan SPI Anak dan Afiliasi Perusahaan untuk membahas dan memantau hasil Pemeriksaaannya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
23. Melakukan review dan/atau audit atas Laporan Keuangan Perusahaan secara periodik;
24. Mengelola aktivitas audit intern secara efektif, efisien dan ekonomis; dan
25. Memberikan jasa konsultasi kepada unit kerja (apabila diperlukan) untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas serta tersedia sumber daya yang memadai.

16. Reviewing and/or Monitoring and Evaluating (M&E) the management of State Capital Investment (PMN) funds received by the company from the State Budget (APBN).
17. Maintaining confidentiality of company-related information and/or data in performing internal audit duties and responsibilities unless permitted by laws and/or court decisions.
18. Safeguarding confidential information obtained during tenure following legal provisions.
19. Ensuring that if external service providers are used for internal supervision activities:
    a. Knowledge transfer occurs between external parties and SPI members, considering that external expertise services are temporary;
    b. The use of external services does not affect the independence and objectivity of SPI functions; and
    c. External parties comply with the State-Owned Enterprise (SOE) Internal Audit Charter.
20. As the SPI of the Parent State-Owned Enterprise (SOE):
    a. Determining the implementation strategy of Internal Audits in State-Owned Enterprise (SOE) subsidiaries;
    b. Formulating Internal Audit principles, including audit methodology and quality control steps; and
    c. Monitoring the implementation of Internal Audits in each State-Owned Enterprise (SOE) subsidiary.
21. Conducting integrated audits (individual audits or joint audits) of Work Units based on a directive from the President Director independently, objectively, and professionally.
22. Holding coordination meetings with SPI subsidiaries and corporate affiliates to discuss and monitor examination results at least once a year.
23. Reviewing and/or auditing the Company's Financial Statements periodically.
24. Managing internal audit activities effectively, efficiently, and economically.
25. Providing consulting services to work units (if necessary) to add value and improve control, risk management, and corporate governance quality, provided it does not affect independence and objectivity and adequate resources are available.

KEWENANGAN INTERNAL AUDIT

Selain memiliki tugas dan tanggung jawab, Satuan Pengawas Intern juga memiliki wewenang yang ditujukan untuk mendukung fungsinya, yaitu:

1. Melakukan aktivitas internal audit terhadap semua Unit Kerja dalam Perusahaan dan seluruh perusahaan anak serta afiliasi sesuai governance yang berlaku;
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan tugas dan fungsi SPI;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
4. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik audit lainnya kepada pihak-pihak yang diaudit (auditan), atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit asurans dan konsultansi;
5. Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal;
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara *(voting rights);*
8. Memberikan konsultansi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional;
9. SPI memiliki wewenang untuk memberikan opini untuk keseluruhan korporasi, dan Dewan Direksi akan memberikan dukungan atas opini yang diberikan oleh SPI ;
10. Secara berkala menerima laporan temuan audit anak perusahaan yang signifikan untuk dilaporkan dalam laporan berkala triwulanan/ tahunan gabungan Induk dan anak perusahaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit;
11. Memiliki akses tidak terbatas atas semua informasi, fungsi, catatan, properti, dan personel yanng berkaitan dengan pekerjaan dan bertanggung jawab atas kerahasiaan, catatan dan informasi tersebut; dan
12. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SPI.

INTERNAL AUDIT AUTHORITY

In addition to having duties and responsibilities, the Internal Supervisory Unit also has authority aimed at supporting its function, namely:

1. Conducting internal audit activities on all Work Units within the Company and all subsidiaries as well as affiliates in accordance with applicable governance;
2. Accessing all relevant information about State-Owned Enterprises (SOE) related to the duties and functions of SPI;
3. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
4. Conducting verification, interviews, confirmations, and other audit techniques with audited parties (auditees) or other parties related to the implementation of assurance and consulting audits;
5. Holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee;
6. Coordinating activities with External Auditors;
7. Attending strategic meetings without voting rights;
8. Providing consultancy and assurance on strategic matters both during planning and operational activities;
9. SPI has the authority to provide opinions on the overall corporation, and the Board of Directors will support the opinions provided by SPI;
10. Periodically receiving reports on significant audit findings from subsidiaries to be reported in the consolidated quarterly/annual report of the Parent and subsidiary companies to the President Director and Board of Commissioners cq. Audit Committee;
11. Having unlimited access to all information, functions, records, properties, and personnel related to the work and being responsible for the confidentiality of those records and information; and
12. Selecting competent human resources as needed in carrying out SPI's duties .

KOMPOSISI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jumlah personil SPI di Triwulan IV 2024 yaitu 24 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

INTERNAL CONTROL UNIT PERSONNEL COMPOSITION

The number of SPI personnel in Q4 2024 was 24 people, with the following composition:

Jabatan Position	Jumlah Number	Keterangan Description
Senior Expert	1 Orang 1 People	1 Orang Sarjana Ekonomi 1 Person Bachelor of Economics
Expert	3 Orang 3 People	1 Orang Magister Hukum dan Pembangunan 2 Orang Sarjana Ekonomi 1 Person Master of Law and Development 2 People Bachelor of Economics
Senior Analyst	7 Orang 7 People	2 Orang Magister Manajemen 2 Orang Magister Teknik 1 Orang Magister Hukum 2 Orang Sarjana Ekonomi 2 people Master of Management 2 People Master of Engineering 1 person Master of Law 2 People Bachelor of Economics
Analyst	8 Orang 8 People	1 Orang Magister Manajemen 1 Orang Sarjana Teknik 5 Orang Sarjana Eknomi 1 Orang Sarjana Akuntansi 1 person Master of Management 1 person Bachelor of Engineering 5 People Bachelor of Economics 1 Person Bachelor of Accounting
Officer	3 Orang 3 People	1 Orang Magister Akuntansi 1 Orang Sarjana Ekonomi 1 Orang Sarjana Akuntansi 1 person Master of Accounting 1 Person Bachelor of Economics 1 Person Bachelor of Accounting
Jumlah **Amount**	**22 Orang** **22 People**	-
EVP	1 Orang 1 People	1 Orang Magister Business Administration 1 Person Master of Business Administration
Officer	1 Orang 1 People	1 Orang Magister Akuntansi (sedang bertugas di KBUMN) 1 Master of Accounting (currently serving in KBUMN)
Total	**24 Orang** **24 People**	

Ket: Jumlah personil SPI sebanyak 24 orang termasuk EVP dan 1 orang officer yang sedang bertugas di KBUMN, sehingga personil auditor tersedia adalah 22 orang
Note: The number of SPI personnel is 24 including EVP and 1 officer who is on duty at KBUMN, so the available auditor personnel is 22 people.

SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN, disyaratkan bahwa Kepala dan anggota SPI wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi yang dipenuhi paling lambat dalam satu tahun sejak menjabat dan selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun paling sedikit memiliki 3 (tiga) sertifikasi antara lain di bidang audit, manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, dan atau akuntansi.Dibawah ini merupakan sertifikasi personil SPI sebagai organ pengelola risiko:

PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL CONTROL UNIT PERSONNEL

Based on the Copy of the Decision of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Guidelines on the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOEs, it is required that the Head and members of the Internal Audit Unit (SPI) must obtain at least one (1) certification within one year of assuming office. Additionally, if their tenure exceeds one (1) year, they must hold at least three (3) certifications in fields such as audit, risk management, fraud, business, corporate activities, law, compliance, finance, and/or accounting. Below is the certification record of SPI personnel as part of the risk management organ:

No	Nama Sertifikasi Certification Name	Jumlah Orang Number of People	Bidang Sertifikasi Certification Field
1	Qualified Risk Management Professional (QRMP) Qualified Risk Management Professional (QRMP)	12	Manajemen Risiko Risk Management
2	Auditor Internal SMAP Internal Auditor for Anti-Bribery Management System (Auditor Internal SMAP)	11	Audit Audit
3	Qualified Risk Managament Officer (QRMO) Qualified Risk Management Officer (QRMO)	8	Manajemen Risiko Risk Management
4	Professional Internal Auditor (PIA) Professional Internal Auditor (PIA)	7	Audit Audit
5	Qualified Internal Auditor (QIA) Qualified Internal Auditor (QIA)	7	Audit Audit
6	Certified Forensic Auditor (CFrA) Certified Forensic Auditor (CFrA)	6	Audit Audit
7	Certified Practicioner of Internal Audit (CPIA) Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	5	Audit Audit
8	Certified Auditor Madya Certified Intermediate Auditor	4	Audit Audit
9	Certified Corporate Finance Foundation Professional Certified Corporate Finance Foundation Professional	2	Keuangan Finance
10	Chartered Accountant (CA) Chartered Accountant (CA)	3	Akuntansi Accounting
11	Certifies Internal Auditor Executive (CIAE) Certified Internal Auditor Executive (CIAE)	2	Audit Audit
12	Certified Anti Fraud Governance (CAFG) Certified Anti-Fraud Governance (CAFG)	2	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
13	Akuntan (AK) Accountant (AK)	2	Akuntansi Accounting
14	Ahli Investigasi Insiden Incident Investigation Expert	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
15	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan Intermediate Expert in Road Engineering	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
16	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan Intermediate Expert in Bridge Engineering	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
17	Ahli Madya K3 Konstruksi Intermediate Expert in Occupational Health and Safety for Construction	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
18	Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air Senior Expert in Water Resources Engineering	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
19	Ahli Utama Jalan dan Jembatan Senior Expert in Road and Bridge Engineering	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
20	Ahli Utama Keselamatan Jalan Senior Expert in Road Safety	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
21	Ahli Utama Keselamatan Konstruksi Senior Expert in Construction Safety	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
22	Asean Chartered Professional Accountant ASEAN Chartered Professional Accountant	1	Akuntansi Accounting
23	Asesor Kompetensi Sertifikasi SKK Konstruksi Competency Assessor for SKK Construction Certification	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
24	Associate Certified Public Accountant Associate Certified Public Accountant	1	Akuntansi Accounting
25	Audit Internal 1 Akuntansi dan Keuangan Internal Audit Level 1 in Accounting and Finance	1	Audit Audit
26	Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Security Management System Auditor	1	Audit Audit
27	Certificate in Data Analytics (CertDA) Certificate in Data Analytics (CertDA)	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities

No	Nama Sertifikasi Certification Name	Jumlah Orang Number of People	Bidang Sertifikasi Certification Field
28	Certified Auditor Muda Certified Junior Auditor	1	Audit Audit
29	Certified Expert Tutor (C.Ext) Certified Expert Tutor (C.Ext)	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
30	Certified Financial Report (C.FR) Certified Financial Report (C.FR)	1	Akuntansi Accounting
31	Certified Fundamental Tax (C.FTax) Certified Fundamental Tax (C.FTax)	1	Akuntansi Accounting
32	Certified Human Resources Analyst (C.HRA) Certified Human Resources Analyst (C.HRA)	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
33	Certified in Business Valuations Certified in Business Valuations	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
34	Certified Internal Auditor Senior Certified Senior Internal Auditor	1	Audit Audit
35	Certified Master Trainer of AR Learning Center (CMT-ALC) Certified Master Trainer of AR Learning Center (CMT-ALC)	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
36	Certified Public Accountant (CPA) Certified Public Accountant (CPA)	1	Akuntansi Accounting
37	Certified Senior Activity Based Costing (CSABC) Certified Senior in Activity-Based Costing (CSABC)	1	Keuangan Finance
38	Certified Tax Audit Senior (CTAS) Certified Senior Tax Auditor (CTAS)	1	Akuntansi Accounting
39	Certified Trainer of AR Learning Center (CT-ALC) Certified Trainer of AR Learning Center (CT-ALC)	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
40	Green Construction, A Sustainibility in Building Green Construction: Sustainability in Building	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
41	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 3 Indonesian National Qualification Framework (KKNI) Level 3 – Junior Instructor/Junior TrainerInstruktur Junior/Junior Trainer	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
42	Lead Auditor ISO 14001:2018 terkait Lingkungan Lead Auditor ISO 14001:2018 (Environmental Management System)	1	Audit Audit
43	Lead Auditor ISO 45001:2021 terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lead Auditor ISO 45001:2021 (Occupational Health and Safety Management System)	1	Audit Audit
44	Lead Auditor ISO 9001:2015 terkait Quality Lead Auditor ISO 9001:2015 (Quality Management System)	1	Audit Audit
45	Program Profesi Insinyur Professional Engineer Program	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
46	Project Management Professional Project Management Professional	1	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate Business Activities
47	Qualified MYOB Service Accounting Qualified MYOB Service Accounting	1	Akuntansi Accounting
48	Qualified Risk Governance Professional Qualified Risk Governance Professional	1	Manajemen Risiko Risk Management

KODE ETIK AUDITOR

1. Integritas
   a. Auditor SPI harus menunjukkan kejujuran, Objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya;

CODE OF ETHICS FOR AUDITORS

1. Integrity
   a. Internal Audit Unit (SPI) auditors must demonstrate honesty, objectivity, and diligence in carrying out their duties and fulfilling their professional responsibilities.

b. Auditor SPI harus mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur oleh hukum dan profesi;
c. Auditor SPI tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi maupun Perusahaan; dan
d. Auditor SPI harus menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan Perusahaan yang etis berdasarkan hukum.

2. Objektivitas
   a. Auditor SPI tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dapat mengurangi atau dianggap mengurangi Objektivitas Pengawasan Intern dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   b. Auditor SPI tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
   c. Auditor SPI harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diperiksa; dan
   d. Auditor SPI dilarang menghilangkan seluruh dokumen/barang bukti audit sesuai standar prosedur yang berlaku.
3. Kerahasiaan
   a. Auditor SPI harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya; dan
   b. Auditor SPI tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
4. Kompetensi
   a. Auditor SPI harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
   b. Auditor SPI harus melaksanakan fungsi pengawasan intern berdasarkan standar profesi; dan
   c. Auditor SPI wajib secara berkesinambungan meningkatkan keahlian dan kompetensi serta kualitas pekerjaan.

b. SPI auditors must comply with the law and disclose information as required by legal and professional regulations.
c. SPI auditors must not engage in unlawful activities or any activities that could tarnish the profession or the Company.
d. SPI auditors must show respect and contribute to achieving the Company's ethical goals in accordance with legal requirements.

2. Objectivity
   a. SPI auditors must not engage in activities that could impair or be perceived as impairing the objectivity of internal supervision in conducting assessments, including activities or relationships that could create conflicts of interest.
   b. SPI auditors must not accept any form of compensation from any party that could influence their professional judgment.
   c. SPI auditors must disclose all material facts known to them, which, if undisclosed, could result in distorted reporting of the audited activities.
   d. SPI auditors are prohibited from removing any audit documents or evidence in violation of applicable procedural standards.
3. Confidentiality
   a. SPI auditors must exercise caution and discretion when using information obtained in the course of their duties.
   b. SPI auditors must not use confidential information for personal gain or to conceal illegal practices.
4. Competence
   a. SPI auditors must possess the necessary knowledge, skills, and competencies required to fulfill their duties and responsibilities.
   b. SPI auditors must perform internal supervision functions in accordance with professional standards.
   c. SPI auditors must continuously enhance their expertise, competencies, and the quality of their work.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2024

Pada tahun 2024, pelaksanaan audit intern dilakukan dengan menggunakan pendekatan *risk-based audit* (RBA), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang ada dalam kegiatan organisasi dan memastikan pengendalian yang efektif untuk mitigasi risiko tersebut. Dalam pelaksanaan audit tahun ini, total realisasi audit mencapai 31 obyek, yang terdiri dari 22 obyek audit PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dan sembilan obyek audit Non-PKPT (audit di luar program kinerja utama).

Jenis penugasan atas 31 obyek audit Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Audit Umum sebanyak 11 obyek audit
2. Audit Tematik sebanyak 6 obyek audit
3. Audit Mandatory dari Regulator sebanyak 6 obyek audit
4. Audit Anak Perusahaan sebanyak 4 obyek audit
5. Consulting sebanyak 4 obyek

Selain melakukan audit, kegiatan lainnya yang dilakukan SPI di Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)/Computer Assisted Audit Techniques (CAAT) sebagai berikut:
   a. Development TABK oleh SPI & SIT dengan pengembangan T-Code SAP dan Caseware IDEA
   b. Development SDM SPI ERP SAP:
   c. Implementasi Tahap Awal TABK ERP SAP menggunakan SAP GUI, SAP Fiori dan SAP Office. Pada Audit SPI Triwulan III, seluruh tim audit telah melakukan uji coba implementasi TABK ERP SAP menggunakan SAP GUI, SAP Fiori dan SAP Office
2. Melakukan benchmarking pengelolaan Internal Control over Financial Report (ICoFR) dan tata kelola terintegrasi, dan tata kelola SPI terintegrasi.
3. Melakukan Review Penilaian *Internal Control over Financial Report* (ICoFR).
4. Melakukan Bimbingan Teknis *Quality Assurance* untuk meningkatkan level maturitas/kualitas audit SPI, dilakukan oleh PT Bina Audita Indonesia.
5. Sebagai counterpart dengan Auditor Eksternal di PT Hutama Karya (Persero)

SUMMARY REPORT OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES FOR 2024

In 2024, internal audit activities were conducted using a Risk-Based Audit (RBA) approach, aimed at identifying and assessing organizational risks and ensuring effective controls to mitigate those risks. This year, the total number of completed audits reached 31 audit objects, consisting of 22 audit objects under the Annual Supervision Work Program (PKPT) and nine audit objects outside the main performance program (Non-PKPT audits).

The breakdown of the 31 audit assignments conducted in 2024 is as follows:

1. General Audits – 11 audit objects
2. Thematic Audits – 6 audit objects
3. Mandatory Audits by Regulators – 6 audit objects
4. Subsidiary Audits – 4 audit objects
5. Consulting Assignments – 4 objects

Other Activities Conducted by SPI in 2024:

1. Implementation of Computer-Assisted Audit Techniques (CAAT):
   a. Development of CAAT by SPI & SIT, including the enhancement of SAP T-Code and Caseware IDEA.
   b. Development of SPI Human Resources for ERP SAP.
   c. Initial implementation of CAAT ERP SAP using SAP GUI, SAP Fiori, and SAP Office. By Q3 of 2024, all audit teams had conducted trial implementations of CAAT ERP SAP using these platforms.
2. Conducted benchmarking on the management of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) and integrated corporate governance, including SPI's integrated governance framework.
3. Conducted a review and evaluation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).
4. Provided Technical Guidance on Quality Assurance to improve SPI audit maturity and quality, facilitated by PT Bina Audita Indonesia.
5. Acted as a counterpart to external auditors at PT Hutama Karya (Persero).

RAPAT BERSAMA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT

Dalam Piagam Audit Intern *(Internal Audit Charter)*, Internal Audit dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara *(voting rights)*. Adapun rapat Internal Audit bersama Direksi, Dewan Komisaris maupun Komite Audit selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

MEETINGS WITH THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE

In the Internal Audit Charter, Internal Audit can communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee and attend strategic meetings without having voting rights. The Internal Audit meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee during 2024 are as follows:

No	Jenis Rapat Meeting Type	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Selasa, 9 Januari 2024 Tuesday, January 9, 2024	Pembahasan Laporan Audit Khusus atas Tindak Lanjut Whistleblowing System terkait Divisi EPC dan DSU serta Rencana Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI pada Divisi Gedung, Divisi EPC dan Divisi Sipil Umum Discussion on Special Audit Report regarding the Follow-up of the Whistleblowing System related to the EPC and DSU Divisions, as well as the Follow-up Action Plan for SPI Audit Findings in the Building Division, EPC Division, and Infrastructure Division.
2	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 22 Jan 2024 Monday, January 22, 2024	Update Hasil ICOFR EY Update on ICOFR EY Results
3	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 26 Jan 2024 Friday, January 26, 2024	1. Update hasil reviu ICoFR PT HK Tahun 2023 2. Laporan Kinerja SMAP TW IV Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2024 1. Update on the 2023 ICoFR Review of PT HK 2. Report on the SMAP (Anti-Bribery Management System) Performance for Q4 2023 and the 2024 Work Plan
4	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 12 Februari 2024 Monday, February 12, 2024	Update hasil reviu ICOFR PT Hutamma Karya (Persero) tahun 2023 Update on the 2023 ICoFR Review of PT Hutama Karya (Persero)
5	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 23 Feb 2024 Friday, February 23, 2024	Laporan Tahunan SPI Tahun 2023 SPI Annual Report 2023
6	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Senin, 4 Mar 2024 Monday, March 4, 2024	1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Divisi QHSSE Tahun 2023 2. Pembahasan Tindak Lanjut Surat Asdep Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN Nomor S-11/DK.MBU.B/02/2024 tanggal 28 Feb 2024 1. Discussion on QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) Division Performance Evaluation for 2023 2. Discussion on the Follow-up of the Assistant Deputy for Risk Management and Compliance of the Ministry of SOEs' Letter No. S-11/DK.MBU.B/02/2024, dated February 28, 2024
7	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 15 Mar 2024 Friday, March 15, 2024	1. LHA Tujuan Tertentu Permasalahan Tata Kelola Perpajakan PT Bhirawa Steel Tahun Buku 2020 2. Pembahasan PKPT SPI Tahun 2024 1. Specific Audit Report on Tax Governance Issues of PT Bhirawa Steel for the 2020 Fiscal Year 2. Discussion on SPI Annual Supervision Work Program (PKPT) for 2024
8	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 22 Maret 2024 Monday, March 22, 2024	Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan Tertentu Permasalahan Tata Kelola Perpajakan PT Bhirawa Steel Tahun buku 2020 Specific Audit Report on Tax Governance Issues of PT Bhirawa Steel for the 2020 Fiscal Year

No	Jenis Rapat Meeting Type	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Agenda Rapat Meeting Agenda
9	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Senin, 1 April 2024 Monday, April 1, 2024	Progres Pelaksanaan Diagnostik ICoFR bagi BUMN Sistemik A dan BUMN Sistemik B serta Evaluasi Kebijakan Ambang Batas Kewenangan Transaksi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Progress on the Implementation of ICoFR Diagnostics for Systemic A SOEs and Systemic B SOEs and Evaluation of the Threshold Policy for the Transaction Authority of SOEs and SOE Subsidiaries
10	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 19 April 2024 Friday, April 19, 2024	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil ADTT Permasalahan Tata Kelola Perpajakan Bhirawa Steel Follow-up on the Recommendations of the Specific Audit Report (ADTT) on Tax Governance Issues at PT Bhirawa Steel
11	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Kamis, 25 April 2024 Thursday, April 25, 2024	Pembahasan Code of Conduct PT HK Tahun 2024 cussion on PT HK's Code of Conduct for 2024
12	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 3 Mei 2024 Friday, May 3, 2024	Hasil laporan reviu penyelesaian temuan atas Laporan hasil pekerjaan JasaKonstruksi Keuangan ICOFR dan Rekomendasi tata kelola hasil audit tujuan tertentu (ATT) Results of the review report on the completion of findings on the ICOFR Financial Construction Services work report and governance recommendations from the results of specific audit objectives (ATT)
13	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 13 Mei 2024 Monday, May 13, 2024	Laporan Audit Proyek JO Adhi Karya Audit Report on the JO Adhi Karya Project
14	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 17 Mei 2024 Friday, May 17, 2024	1. Laporan Hasil Audit Divisi QHSSE Tahun 2024 2. Usulan SPI Terintegrasi dan Reorganisasi SPI PT Hutama Karya (Persero) 3. Laporan Triwulan I SPI tahun 2024. 1. QHSSE Division Audit Report for 2024 2. Proposal for Integrated SPI and SPI Reorganization at PT Hutama Karya (Persero) 3. SPI Q1 2024 Report
15	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 27 Mei 2024 Monday, May 27, 2024	Materi Paparan Kinerja TW I kepada KBUMN (sesuai undangan selasa) Presentation Material on Q1 Performance for the Ministry of SOEs (KBUMN) (per invitation on Tuesday)
16	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Selasa, 28 Mei 2024 Tuesday, May 28, 2024	Usulan SPI Terintegrasi dan Reorganisasi SPI PT HK Proposed Integrated SPI and Reorganization of PT HK SPI
17	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Senin, 3 Juni 2024 Monday, June 3, 2024	1. Penjelasan atas Kecelakaan pada Proyek Kejagung RI 2. Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Implementasi Roadmap ICOFR 1. Explanation of Accident on AGO Project 2. Discussion on Follow-up of Recommendations and Implementation of ICOFR Roadmap
18	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Selasa, 4 Juni 2024 Tuesday, June 4, 2024	Penjelasan Direksi atas Kecelakaan pada Proyek Kejagung RI Explanation on the Accident at the Attorney General's Office (Kejagung RI) Project

No	Jenis Rapat Meeting Type	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Agenda Rapat Meeting Agenda
19	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 28 Juni 2024 Friday, June 28, 2024	1. Pembahasan LHA dan MTL Audit Tematik Kualitas Utang PG Jatiroto Tahun 2024 2. Pembahasaan Lanjutan SPI Terintegrasi 1. Discussion on Specific Audit Report (LHA) and Follow-up Audit Memo (MTL) on PG Jatiroto Debt Quality Thematic Audit for 2024 2. Further Discussion on Integrated SPI
20	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 1 Juli 2024 Monday, July 1, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan koordinasi antar Direktorat 2. Usulan persetujuan penyelesaian nilai klam IDC paket Ruas Aceh Sigli 3. Update permasalahan EPC tentang tagihan dan Jatiroto 4. Pembahasan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Ruas Akses Tanjung Priok 1. Directive from the President Director and Inter-Directorate Coordination 2. Proposal for Approval of IDC Claim Settlement for the Aceh Sigli Road Package 3. Update on EPC Issues Related to Billing and Jatiroto 4. Discussion on Security Management System Certification for Tanjung Priok Access Road
21	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 8 Juli 2024 Monday, July 8, 2024	Pembahasan ICOFR Discussion on ICOFR
22	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 12 Juli 2024 Friday, July 12, 2024	Informasi Surat OJK Pemberitahuan Kewajiban Pemenuhan POJK 9/2023 dan SEOJK 18/2023 Notification Letter from OJK Regarding Compliance Obligations for POJK 9/2023 and SEOJK 18/2023
23	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 22 Juli 2024 Monday, July 22, 2024	1. Arahan Bapak Direktur Utama dan Koordinasi anatar Direktorat 2. Posisi Financial Closing Proyek Tambak Lorok damDispute dengan Marubeni 3. Dan lain-lain 1. Directive from the President Director and Inter-Directorate Coordination 2. Financial Closing Position of the Tambak Lorok Project and Dispute with Marubeni 3. Miscellaneous
24	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 2 Agt 2024 Friday, August 2, 2024	Laporan Audit Intern TW II 2024 Internal Audit Report Q2 2024
25	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 9 Agt 2024 Friday, August 9, 2024	Laporan Kinerja SMAP TW II 2024 SMAP Performance Report Q2 2024
26	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 16 Agt 2024 Friday, August 16, 2024	Laporan Internal Tahunan Penilaian Asurans dan Peningkatan Kualitas Annual Internal Assurance and Quality Improvement Report

No	Jenis Rapat Meeting Type	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Agenda Rapat Meeting Agenda
27	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Selasa, 20 Agt 2024 Tuesday, August 20, 2024	Pembahasan Laporan Audit Intern TW II 2024 Discussion on Internal Audit Report Q2 2024
28	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 30 Agt 2024 Friday, August 30, 2024	Pembahasan Audan WBS mengenai ketidakdisiplinan Karyawan Discussion on WBS Audit Regarding Employee Disciplinary Issues
29	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Kamis, 5 Sep 2024 Thursday, September 5, 2024	Update Revisi Dokumen Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Dokumen Contigency Plan Update on the Revision of the Integrated Governance Guidelines and Contingency Plan Document
30	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 13 Sep 2024 Friday, September 13, 2024	Penyampaian Kembali Audit Intern Terintegrasi Re-delivery of Integrated Internal Audit
31	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 20 Sep 2024 Friday, September 20, 2024	Pembahasan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan oleh PT HK yang dibiayai PMN dan KMK Penjaminan Pemerintah Discussion on Specific Audit Findings on the Implementation of PT HK's Government-Funded Projects (PMN and KMK Government Guarantee)
32	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 27 Sep 2024 Friday, September 27, 2024	Penyampaian Kembali Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan Re-delivery of the Integrated Governance Guidelines for the Corporate Conglomerate
33	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 4 Okt 2024 Friday, October 4, 2024	Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI Tahun 2020-2021 Follow-up on the Audit Findings of BPK RI for 2020-2021
34	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 14 Okt 2024 Monday, October 7, 2024	Miscellaneous: Update on the Latest BPK Audit Results
35	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Senin, 7 Okt 2024 Monday, October 14, 2024	Pembahasan Materi Ragab Dekom & Direksi 1. Pembahasan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh PT Hutama Karya (Persero) yang dibiayai PMN dan KMK Penjaminan Pemerintah 2. Tindak lanjut hasil audit BPK RI Tahun 2020-2021 Discussion on Board of Commissioners and Directors' Meeting Materials: 1. Discussion on Specific Audit Findings on PT Hutama Karya (Persero)'s Government-Funded Projects (PMN and KMK Government Guarantee) 2. Follow-up on BPK RI's Audit Findings for 2020-2021

No	Jenis Rapat Meeting Type	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Agenda Rapat Meeting Agenda
36	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 25 Okt 2024 Friday, October 25, 2024	Laporan Audit Intern PT HK Triwulan III 2024 Internal Audit Report of PT HK Q3 2024
37	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Jumat, 1 Nov 2024 Friday, November 1, 2024	Laporan Kinerja SMAP TW III Tahun 2024 SMAP Performance Report Q3 2024
38	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Kamis, 28 Nov 2024 Thursday, November 28, 2024	Pembahasan Rencana Audit atas Pelepasan Aset Tetap PT HK oleh SPI Discussion on the Audit Plan for Fixed Asset Disposal of PT HK by SPI
39	Rapat Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Board of Commissioners and/or Audit Committee Meeting	Kamis, 12 Des 2024 Thursday, December 12, 2024	Status Kesiapan Tahapan Impelementasi ICOFR HK Grup Status of the Readiness for ICOFR Implementation Stages within the HK Group

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Dari hasil audit internal yang telah dilakukan, terdapat temuan sejumlah 649 temuan dan 977 rekomendasi. Atas 977 rekomendasi, sejumlah 478 rekomendasi telah jatuh tempo di Triwulan IV 2024 dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan tuntas, sedangkan sebanyak 499 rekomendasi belum jatuh tempo pada Triwulan IV 2024.

Selain audit internal, SPI juga melakukan *monitoring* tindak lanjut hasil audit eksternal, dengan persentase pemenuhan rekomendasi sebagai berikut:

AUDIT FINDINGS AND FOLLOW-UP ACTIONS

From the internal audit conducted, a total of 649 findings and 977 recommendations were identified. Out of the 977 recommendations, 478 recommendations were due in Q4 2024, all of which have been fully addressed. Meanwhile, 499 recommendations have not yet reached their due date in Q4 2024.

In addition to internal audits, SPI also monitors the follow-up actions on external audit results, with the following percentage of recommendation fulfillment:

Instansi Institution	**Jenis Pemeriksaan** Type of Examination	**Jumlah Temuan** Number of Findings	**Jumlah Rekomendasi** Number of Recommendations	**Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi** Follow-Up Actions in Accordance with Recommendations	**Keterangan** Descriptions
BPK RI	Pengelolaan Pendapatan Usaha Dan Pengendalian Beban Kontrak Tahun 2010 & 2011 Management of Business Revenue and Contract Cost Control for the Years 2010 & 2011	9	24	100%	Risalah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) antara BPK RI dan Hutama Karya pada tanggal 3 Agustus 2022. Terdapat 1 Rekomendasi dengan status Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Usaha Dan Pengendalian Beban Kontrak Tahun 2010 & 2011, status TDD telah ditetapkan BPK RI melalui surat No 302/S/XX/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 Minutes of Meeting on the Follow-Up Discussion of Audit Recommendations (TLRHP) between BPK RI and Hutama Karya on August 3, 2022. There was 1 recommendation with the status "Cannot Be Followed Up" (TDD) in the Specific Purpose Audit on the Management of Business Revenue and Contract Cost Control for the Years 2010 & 2011, with the TDD status determined by BPK RI through letter No. 302/S/XX/07/2014 dated July 15, 2014.
BPK RI	Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2014, 2015 Dan 2016 (Semester I) Management of Business Revenue, Cost Control, and Investment Activities for the Years 2014, 2015, and 2016 (First Semester)	9	24	100%	Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) antara BPK RI (Tingkat Tim) dan HK pada tanggal 2 Agustus 2023. Based on the Minutes of Meeting on the Follow-Up Discussion of Audit Recommendations (TLRHP) between BPK RI (Team Level) and HK on August 2, 2023.
BPK RI	Kegiatan Investasi dan Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahun Buku 2016, 2017, 2018 dan 2019 Investment Activities and Business Operations of the Trans-Sumatra Toll Road for the Fiscal Years 2016, 2017, 2018, and 2019	16	33	100%	Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) antara BPK RI (Tingkat Tim) dan HK pada tanggal 2 Agustus 2023. Based on the Minutes of Meeting on the Follow-Up Discussion of Audit Recommendations (TLRHP) between BPK RI (Team Level) and HK on August 2, 2023.

Instansi Institution	**Jenis Pemeriksaan** Type of Examination	**Jumlah Temuan** Number of Findings	**Jumlah Rekomendasi** Number of Recommendations	**Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi** Follow-Up Actions in Accordance with Recommendations	**Keterangan** Descriptions
BPK RI	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 dan 2021 pada PT HK, Anak Perusahaan dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Bengkulu Financial Management and Accountability for the Years 2020 and 2021 at PT HK, Subsidiaries, and Related Institutions in DKI Jakarta, Aceh, North Sumatra, Riau, and Bengkulu	11	40	90%	1. Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 28 Desember 2023. (Tingkat Tim) 2. Berdasarkan Risalah Pembahasan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI tanggal 22 Oktober 2024. (Tingkat Tim) 3. Based on the Minutes of Meeting on the Follow-Up Discussion of Audit 4. Recommendations (TLRHP) between BPK RI (Team Level) and HK on August 2, 2023.
ITJEN KEMENKEU	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu atas Pemberian Dukungan Pemerintah kepada BUMN yaitu PT Hutama Karya Persero) dalam rangka Pengendalian Fiskal Specific Purpose Supervision on Government Support Provided to SOEs, Specifically PT Hutama Karya (Persero), in the Context of Fiscal Control	13	24	100%	Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu atas Pemberian Dukungan Pemerintah pada PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka Pengendalian Fiskal, BA Nomor BA-03/ST-54/MK.9/2023 tanggal 30 November 2023. Minutes of Monitoring and Evaluation Results on the Follow-Up of Audit Recommendations from the Specific Purpose Supervision on Government Support Provided to PT Hutama Karya (Persero) in the Context of Fiscal Control, BA Number BA-03/ST-54/MK.9/2023 dated November 30, 2023.

Instansi Institution	Jenis Pemeriksaan Type of Examination	Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi Follow-Up Actions in Accordance with Recommendations	Keterangan Descriptions
ITJEN KEMENKEU	Evaluasi Skema Pendanaan Pengusahaan Ruas Tol Betung Jambi Evaluation of the Funding Scheme for the Betung–Jambi Toll Road Operation	5	12	100%	1. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Skema Pendanaan Ruas Tol Betung-Jambi pada PT Hutama Karya (Persero) BA Nomor BA-01/ST-54/MK.9/2023 tanggal 27 November 2023 2. Surat Itjen Kemenkeu Nomor S-2/IJ/IJ.5/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen Kemenkeu oleh PT Hutama Karya (Persero) pada Penugasan Evaluasi Skema Pendanaan Ruas Tol Betung - Tempino – Jambi. 1. Minutes of Monitoring and Evaluation Results on the Follow-Up of Audit Recommendations from the Evaluation of the Funding Scheme for the Betung–Jambi Toll Road at PT Hutama Karya (Persero), BA Number BA-01/ST-54/MK.9/2023 dated November 27, 2023. 2. Letter from the Inspectorate General of the Ministry of Finance No. S-2/IJ/IJ.5/2024 dated December 20, 2024, regarding the Response to the Implementation of Follow-Up Recommendations by the Inspectorate General of the Ministry of Finance for PT Hutama Karya (Persero) on the Evaluation Assignment of the Funding Scheme for the Betung–Tempino–Jambi Toll Road.

DIVISI PENGELOLAAN RISIKO

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENGELOLAAN RISIKO

Struktur Organisasi Divisi Pengelolaan Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 1992/KPTS/61/VII/2024 adalah sebagai berikut :

RISK MANAGEMENT DIVISION

RISK MANAGEMENT DIVISION ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Organizational Structure of the Risk Management Division based on the Decree of the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero) Number 1992/KPTS/61/VII/2024 is as follows:



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI PENGELOLAAN RISIKO

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lini kedua dalam konsep tata kelola perusahaan *Three Lines Model* Divisi Pengelolaan Risiko memiliki Tugas dan tanggung jawab menginisiasi, mengarahkan, dan mengendalikan tata kelola manajemen risiko, pengembangan infrastruktur untuk penentuan lingkup, konteks, dan kriteria risiko, pengelolaan risk assessment dan risk treatment, pengelolaan risk improvement & communication, serta *Business Continuity Management* perusahaan dalam rangka upaya untuk pengembangan budaya risiko agar perusahaan dapat berjalan optimal dan terhindar dari kerugiaan atau risiko-risiko yang dapat mengancam keberlangsungan proses operasional dan bisnis perusahaan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION

In carrying out its function as the second line in the Three Lines Model corporate governance concept, the Risk Management Division has the duties and responsibilities to initiate, direct, and control risk management governance, infrastructure development for determining the scope, context, and risk criteria, managing risk assessment and risk treatment, managing risk improvement & communication, and Business Continuity Management of the company in order to develop a risk culture so that the company can run optimally and avoid losses or risks that can threaten the sustainability of the company's operational and business processes.

PROFIL EVP DIVISI PENGELOLAAN RISIKO

RISK MANAGEMENT DIVISION EVP PROFILE

Paryanto
EVP Divisi Pengelolaan Risiko
EVP Risk Management Division



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Boyolali, 20 Oktober 1972/ 52 tahun pada akhir Tahun Buku 2024 Boyolali, October 20, 1972 / 52 years old at the end of the 2024 Fiscal Year
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1996) • Magister Ilmu Ekonomi Universtias Cendrawasih (2009) • Bachelor of Civil Engineering, Universitas Sebelas Maret (1996) • Master of Economics, Universitas Cendrawasih (2009)
Sertifikasi Certifications	• *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)* • Insinyur Professional Madya • Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah • Qualified Risk Governance Professional (QRGP) • Intermediate Professional Engineer • Government Procurement of Goods and Services
Pengalaman Kerja Work Experience	• EVP Divisi Pengelolaan Risiko (Juli 2024-sekarang) • EVP Divisi Manajemen Risiko (2021-Juli 2024) • Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT Hutama Karya Infrastruktur (2020) • Kepala Divisi Supply Chain Management pada Direktorat Operasi III (2018) • EVP Risk Management Division (July 2024 – Present) • EVP Risk Management Division (2021 – July 2024) • Assigned to Subsidiary PT Hutama Karya Infrastruktur (2020) • Head of Supply Chain Management Division at Directorate of Operations III (2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Diangkat pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 2001/KPTS/64/VII/2024 Appointed in 2024 based on the Board of Directors' Decree of PT Hutama Karya (Persero) Number 2001/KPTS/64/VII/2024.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Pengembangan kompetensi bidang manajemen risiko yang dilaksanakan mengacu kepada Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 dimana personal Divisi Pengelolaan Risiko (Kepala Unit maupun anggota) termasuk salah satu dari organ pengelola risiko sehingga diwajibkan memenuhi sertifikasi dengan bidang diantaranya manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, dan/atau K3/HSSE serta diwajibkan memenuhi total jam pelatihan paling sedikit 60 jam pelatihan/tahun dari bidang diantaranya manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, K3/HSSE, data analytitcs, dan/atau ESG/*sustainability*.

DEVELOPMENT OF COMPETENCE IN THE FIELD OF RISK MANAGEMENT

The development of competence in risk management is carried out based on the Technical Guidelines on the Composition and Qualifications of Risk Management Bodies within State-Owned Enterprises, Regulation No. SK-3/DKU.MBU/05/2023. According to these guidelines, personnel from the Risk Management Division (both Unit Heads and members) are considered part of the risk management body and are therefore required to obtain certifications in various fields, including risk management, fraud, business, corporate operations, law, compliance, finance, accounting, audit, and/or K3/HSSE (Occupational Health, Safety, Security, and Environment). Additionally, they must complete a minimum of 60 hours of training per year in one or more of the following areas: risk management, fraud, business, corporate operations, law, compliance, finance, accounting, audit, K3/HSSE, data analytics, and/or ESG/sustainability.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalankan manajemen risiko yang berintegritas, menciptakan standarisasi, dan meningkatkan profesionalisme masing-masing perosnil pada Divisi Pengelolaan Risiko selain itu diperlukan komitmen dari masing-masing personil pemegang sertifikasi manajemen risiko untuk selalu menjaga status keaktifan sertifikasinya. Berikut ini dilampirkan rincian sertifikasi personil Divisi Pengelolaan Risiko:

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

The Risk Management Certification is conducted to ensure integrity in risk management, establish standardization, and enhance the professionalism of each personnel in the Risk Management Division. Furthermore, each certified personnel is required to maintain their certification's active status as part of their commitment to professional development. Below is a detailed list of certifications held by the personnel of the Risk Management Division:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1.	Paryanto	EVP EVP (Executive Vice President	QRGP (Qualified Risk Governance Professional)
2.	Irwan Yunianto	VP Risiko Korporat & Bisnis VP of Corporate & Business Risk	QCRO (Qualified Chief Risk Officer)
3.	Harry Poetra Lubis	VP Risiko Keuangan VP of Financial Risk	QCRO (Qualified Chief Risk Officer)
4.	Agus Jajang Hendrawan	VP Risiko Operasional VP of Operational Risk	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
5.	Eko Harry Jugyanto	Sr. Analyst Senior Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
6.	Dini Hadaitana	Sr. Analyst Senior Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
7.	Farida Listriana	Sr. Analyst Senior Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
8.	Muh. Fachrudin Arrozi	Sr. Analyst Senior Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional), BCMCP (Business Continuity Management Certified Professional)
9.	Nida Rahmayani	Analyst Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional) Financial Risk Analyst for Corporation (FRAC)

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
10.	Eko Putra Siburian	Analyst Analyst	QRMA (Qualified Risk Management Analyst)
11.	Dias Bramantyo Fahmi	Analyst Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
12.	Andi Iqra Selle Pais	Analyst Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
13.	Rizal Ardhi	Analyst Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
14.	Dwieky Anugerah	Pj. Analyst Acting Analyst	QRMA (Qualified Risk Management Analyst)
15.	Ridho Caesar	Analyst Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
16.	Muhamad Riza	Analyst Analyst	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
17.	Kuncoro Aji Kusrianto	Officer	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
18.	Adi Faqdhi Akbar	Officer	QRMP (Qualified Risk Management Professional)
19.	Ghiffari Apria Rizky	Officer	QRMO (Qualified Risk Management Officer)

PELAKSANAAN TUGAS DIVISI PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2024

Tugas Divisi Pengelolaan Risiko dirumuskan ke dalam matriks Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja (SSKP) yang tercantum dalam Buku RKAP tahun 2024. Berikut SSKP Divisi Pengelolaan Risiko untuk tahun 2024:

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT DIVISION TASKS IN 2024

The tasks of the Risk Management Division are formulated into a matrix of Goals, Strategies, Policies and Work Programs (SSKP) listed in the 2024 RKAP Book. The following is the Risk Management Division's SSKP for 2024:

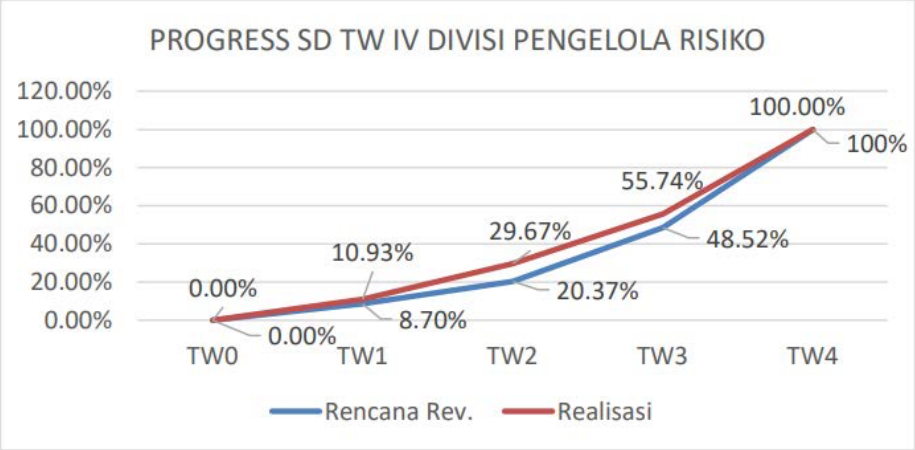
Sasaran Goals	Strategi Strategies	Core Value Akhlak Akhlak Core Value	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program
Pengembangan Enterprise Risk Management untuk menciptakan dan melindungi nilai perusahaan Developing Enterprise Risk Management to create and protect the value of Company	Meningkatkan Risk Awareness di seluruh unit perusahaan Increasing Risk Awareness in all units of the company	1. Amanah Bertanggungjawab atas tugas, keputusan, dan tindakan dilakukan. yang 2. Kompeten Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. yang selalu berubah 3. Harmonis Membangun lingkungan kerja yang kondusif 4. Loyal Menjaga perusahaan nama baik 5. Adaptif Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan 6. Kolaboratif Terbuka bekerjasama menghasilkan tambah dalam untuk nilai 1. Trustworthy Responsible for tasks, decisions, and actions taken. which 2. Competent Improve self-competence to meet the challenges that are always changing. 3. Harmonious Build a conducive work environment 4. Loyal Maintain the company's good name 5. Adaptive Quickly adjust to changes 6. Collaborative Open to working together to add value	Mengembangkan Sistem Manajemen Risiko dan Perencanaan Tata Kelola Terintegrasi Developing Risk Management System and Integrated Governance Planning	1. Pengembangan Risk Management System (RMS) 2. Review Berkala Prosedur Manajemen Risiko 3. Perbaikan Integrasi Data 4. Menyusun Pedoman Perencanaan Tata Kelola Terintegrasi (Perencanaan penyusunan struktur, perencanaan pelaksanaan proses, serta perencanaan atas hasil tata kelola terintegrasi) 1. Development of Risk Management System (RMS) 2. Periodic Review of Risk Management Procedures 3. Improvement of Data Integration 4. Develop Integrated Governance Planning Guidelines (structure planning, process implementation planning, and integrated governance results planning)

Sasaran Goals	Strategi Strategies	Core Value Akhilak Akhilak Core Value	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program
			Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Risiko Enhancing Risk Management Capability	1. Pelatihan dan Sertifikasi Penunjang Program Kerja Manajemen Risiko dan Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko 2. Seminar Nasional Manajemen Risiko untuk Personil Divisi Manajemen Risiko 1. Training and Certification Supporting the Risk Management Work Program and Fulfilling the Qualifications of Risk Management Organs 2. National Seminar on Risk Management for Risk Management Division Personnel
			Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi manajemen risiko Improving the quality of risk management reporting and evaluation	1. Meningkatkan Kualitas Asesmen Risiko untuk Unit Kerja, AP, dan Proyek (untuk Jakon termasuk REM, REL, dan REP) 2. Melakukan kaji ulang risiko utama yang dihadapi dan melaporkan ke KBUMN secara berkala (Draft APS 2024) 3. Menyusun Risiko RKAP 2025 4. Pemenuhan Kelengkapan Data Manajemen Risiko dalam RKAP 2024 kepada KBUMN 1. Improve the Quality of Risk Assessments for Work Units, APs, and Projects (for Jakon including REM, REL, and REP) 2. Review the main risks faced and report to KBUMN on a regular basis (Draft APS 2024) 3. Develop 2025 RKAP Risk 4. Fulfillment of Risk Management Data Completeness in RKAP 2024 to KBUMN
			Meningkatkan risk maturity level Improving risk maturity level	1. Implementasi, dan Sosialisasi BCMS (Business Continuity Management System) 2. Penilaian Risk Maturity Index RMI Tahun 2024 (atas tahun buku 2023) dan Menyusun roadmap perbaikan manajemen risiko atas penilaian RMI tahun 2024 (Draft APS 2024) 3. Implementasi roadmap perbaikan manajemen risiko (atas penilaian RMI Tahun 2024 (Draft APS 2024) 1. Implementation, and Socialization of BCMS (Business Continuity Management System) 2. Assessment of Risk Maturity Index RMI in 2024 (for fiscal year 2023) and Developing a roadmap for risk management improvement on the RMI assessment in 2024 (Draft APS 2024) 3. Implementation of risk management improvement roadmap (on RMI assessment in 2024 (Draft APS 2024) 3.

Sasaran Goals	Strategi Strategies	Core Value Akhilak Akhilak Core Value	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program
			Meningkatkan risk awareness Increasing risk awareness	1. Sharing Session internal maupun eksternal 2. Pengukuran risk awareness 1. Internal and external Sharing Session 2. Risk awareness measurement

Untuk pelaksanaan Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja (SSKP) tersebut pada tahun 2024 yang dimonitor setiap Triwulanan tercantum sebagai berikut :

For the implementation of these Goals, Strategies, Policies, and Work Programs (SSKP) in 2024 which are monitored on a quarterly basis are listed below:



Progres program kerja Divisi Pengelolaan Risiko s.d Triwulan IV dapat dilihat pada grafik di atas, pada s.d Triwulan IV setiap program kerja telah 100% dilaksanakan, untuk detail progres tiap program kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Progres program kerja Divisi Pengelolaan Risiko s.d Triwulan IV dapat dilihat pada grafik di atas, pada s.d Triwulan IV setiap program kerja telah 100% dilaksanakan, untuk detail progres tiap program kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KEBIJAKAN POLICY		PROGRAM KERJA WORK PROGRAM		SD TW IV UNTIL Q4 (QUARTER IV) SD MINGGU INI UNTIL THIS WEEK		
				Ra	Ri	Dev
A.	Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Implementation of Integrated Risk Management and Governance System	1.	Pengembangan Risk Management System (RMS) Development of Risk Management System (RMS)	6.67%	6.67%	0.00%
		2.	Review Berkala Prosedur Manajemen Risiko Periodic Review of Risk Management Procedures	6.67%	6.67%	0.00%
		3.	Perbaikan Integrasi Data Improvement of Data Integration	6.67%	6.67%	0.00%
		4.	Menyusun Perencanaan Tata Kelola Terintegrasi (Perencanaan penyusunan struktur, perencanaan pelaksanaan proses, serta perencanaan atas hasil tata kelola terintegrasi) Preparation of Integrated Governance Planning (including structural planning, process implementation planning, and planning for integrated governance outcomes)	6.67%	6.67%	0.00%

KEBIJAKAN POLICY		PROGRAM KERJA WORK PROGRAM		SD TW IV UNTIL Q4 (QUARTER IV) SD MINGGU INI UNTIL THIS WEEK		
				Ra	Ri	Dev
B.	Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Human Resources Capability Enhancement	1.	Pelatihan dan sertifikasi penunjang program kerja manajemen risiko dan pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko Training and Certification to Support Risk Management Work Programs and Fulfillment of Risk Management Body Qualifications	6.67%	6.67%	0.00%
		2.	Seminar Nasional Manajemen Risiko untuk personil Divisi Pengelolaan Risiko National Risk Management Seminar for Risk Management Division Personnel	6.67%	6.67%	0.00%
C.	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Function	1.	Meningkatkan kualitas Asesmen Risiko untuk unit kerja, AP dan Proyek (untuk Jakon termasuk REM, REL, dan REP) Enhancing the Quality of Risk Assessment for Work Units, Subsidiaries (AP), and Projects (for construction, including REM, REL, and REP)	6.67%	6.67%	0.00%
		2.	Melakukan kaji ulang risiko utama yang dihadapi dan melaporkan ke KBUMN secara berkala Reviewing Key Risks and Reporting to the Ministry of SOEs (KBUMN) on a Regular Basis	6.67%	6.67%	0.00%
		3.	Menyusun Risiko RKAP 2025 Formulating the 2025 RKAP (Company Work Plan and Budget) Risks	6.67%	6.67%	0.00%
		4.	Pemenuhan Kelengkapan Data Manajemen Risiko dalam RKAP 2024 kepada KBUMN Completion of Risk Management Data Requirements in the 2024 RKAP for Submission to the Ministry of SOEs (KBUMN)	6.67%	6.67%	0.00%
D.	Pemenuhan Risk Maturity Level Risk Maturity Level Fulfillment	1.	Implementasi dan Sosialisasi BCMS (Business Continuity Management System) Implementation and Socialization of the Business Continuity Management System (BCMS)	6.67%	6.67%	0.00%
		2.	Penilaian Risk Maturity Index (RMI) tahun 2024 (atas tahun buku 2023) dan menyusun roadmap perbaikan manajemen risiko atas penilaian RMI tahun 2024 Assessment of the 2024 Risk Maturity Index (RMI) (Based on the 2023 Fiscal Year) and Preparation of a Risk Management Improvement Roadmap Based on the 2024 RMI Assessment	6.67%	6.67%	0.00%
		3.	Implementasi roadmap perbaikan manajemen risiko (atas penilaian RMI Tahun 2024) Implementation of the Risk Management Improvement Roadmap (Based on the 2024 RMI Assessment)	6.67%	6.67%	0.00%
E.	Meningkatkan Risk Awareness Increasing Risk Awareness	1.	Sharing Session internal maupun eksternal Internal and External Sharing Sessions	6.67%	6.67%	0.00%
		2.	Pengukuran Risk Awareness Risk Awareness Measurement	6.67%	6.67%	0.00%
Total				100.00%	100.00%	0.00%

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi sebanyak 8 (delapan) Komite, yaitu:

1. Komite Risiko Investasi
2. Komite Risiko Konstruksi
3. Komite KPI
4. Komite TJSL
5. Komite Sanksi
6. Komite Talenta
7. Komite Pelindungan Data Pribadi
8. Komite Pengarah Teknologi Informasi

KOMITE RISIKO INVESTASI

Direksi membentuk Komite Risiko Investasi dalam rangka pengoptimalan hasil pengelolaan investasi pada Perusahaan dan menjamin proses tata kelola perusahaan yang baik untuk mendorong sinergi usaha bagi seluruh entitas Hutama Karya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE RISIKO INVESTASI

1. Merekomendasikan kebijakan dan strategi investasi perusahaan kepada Direksi, antara lain kriteria investasi dan profil risiko investasi, sebagai dasar usulan investasi dari Tim investasi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perusahaan.
2. Melakukan review dan merekomendasikan persetujuan atau penolakan sebagian/seluruh proposal investasi dari Tim Investasi, yang akan diusulkan sebagai investasi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga mencapai hasil investasi yang optimal dengan pengelolaan yang prudent.
3. Melakukan analisa dan review berkala, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atas laporan pencapaian kegiatan investasi perusahaan, profil risiko perusahaan akibat struktur permodalan dan investasi yang dilaksanakan perusahaan, serta melaporkan hasil analisa dan review tersebut kepada Direksi atau melakukan review hold point saat terjadi perubahan dan atau penyimpangan dari recana awal.
4. Melakukan evaluasi atas investasi untuk menilai suatu investasi telah mengikuti strategi investasi perusahaan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta memastikan investasi yang dilakukan perusahaan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas investasi yang telah dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan rencana bisnis dan investasi yang telah disetujui.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Carrying out its management duties, the Board of Directors is assisted by 7 (seven) Committees under the Board of Directors, namely:

1. Investment Risk Committee
2. Construction Risk Committee
3. KPI Committee
4. TJSL Committee
5. Sanctions Committee
6. Talent Committee
7. Personal Data Protection Committee
8. Information Technology Steering Committee

INVESTMENT RISK COMMITTEE

The Board of Directors has formed an Investment Risk Committee in order to optimize investment management results in the Company and ensure good corporate governance processes to encourage business synergy for all Hutama Karya entities.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INVESTMENT RISK COMMITTEE

1. Recommend the company's investment policies and strategies to the Board of Directors, including investment criteria and investment risk profiles, as the basis for investment proposals from the Investment Team to obtain approval in accordance with applicable regulations in the company.
2. Review and recommend approval or rejection of part/all investment proposals from the Investment Team, which will be proposed as investments to obtain approval in accordance with applicable regulations in the company, so as to achieve optimal investment results with prudent management.
3. Conduct periodic analysis and review, at least once every 6 (six) months, of the company's investment activity achievement report, the company's risk profile due to the capital structure and investments implemented by the company, and report the results of the analysis and review to the Board of Directors or conduct a hold point review when there are changes and/or deviations from the initial plan.
4. Conduct investment evaluations to assess whether an investment has followed the company's investment strategy contained in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP) and ensure that the company's investments do not violate applicable regulations.
5. Conduct supervision and evaluation of investments that have been implemented by the company in accordance with the approved business and investment plans.

6. Investasi pada proyek penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Komite Risiko Investasi melaksanakan kajian dan pengendalian investasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di proyek khusus penugasan Jalan tol.

6. Investment in the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) assignment project, the Investment Risk Committee carries out investment studies and controls in accordance with the provisions and procedures applicable in the special toll road assignment project.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE RISIKO INVESTASI

INVESTMENT RISK COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

Pembina Advisor	:	Direktur Keuangan Finance Director
Ketua Chairman	:	EVP Divisi Manajemen Risiko EVP Risk Management Division
Wakil Ketua Vice Chairman	:	EVP Divisi Corporate Planning EVP Corporate Planning Division
Sekretaris Secretary	:	EVP Divisi Sekretaris Perusahaan EVP Corporate Secretary Division
Anggota Member	:	EVP Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi EVP Divisi Legal EVP Divisi Akuntansi dan Keuangan EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol EVP Divisi QHSSE EVP Divisi Pembangunan Jalan Tol EVP Business Development and Investment Division EVP Legal Division EVP Accounting and Finance Division EVP Toll Road Planning Division EVP QHSSE Division EVP Toll Road Development Division

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE RISIKO INVESTASI

Selama tahun 2024, Komite Risiko Investasi telah melakukan tugasnya dengan melakukan kajian atas risiko antara lain:

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE INVESTMENT RISK COMMITTEE

Throughout 2024, the Investment Risk Committee carried out its duties by conducting studies on risks including:

No	Kajian Risiko Risk Assessment
1	Pemberian *share holderloan* kepada EPC Energy Singapore Pte Ltd tahun 2024 Granting Share holderloan to EPC Energy Singapore Pte Ltd in 2024
2	Rencana kerja sama aset cikiwul Bekasi milik PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Duta Daya Digital *(Crewdible)* The plan for cooperation between the Cikiwul Bekasi assets owned by PT Hutama Karya (Persero) and PT Duta Daya Digital (Crewdible)
3	*Equity injection* kepada PT HKR Equity injection to PT HKR
4	Rencana Kerja Sama Sewa Menyewa Losarang Indramayu milik PT Hutama Karya The Plan for Lease Collaboration of Losarang Indramayu owned by PT Hutama Karya
5	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung - Tempino - Jambi Management of the Betung - Tempino - Jambi Toll Road Section
6	Penunjukan langsung PT HKI Sebagai Penyedia Jasa Pembangunan Jalan Tol Ruas Betung - Tempino - Jambi Seksi 1 Paket 1A dan Seksi 3 Paket 4 Appointment of PT HKI as a service provider for the construction of the Betung - Tempino - Jambi toll road, Section 1 Package 1A and Section 3 Package 4
7	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang - Betung Management of the Palembang – Betung Toll Road Section
8	PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN LANJUTAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG – BETUNG SEKSI 1 DAN SEKSI 2 SPEEDING UP THE COMPLETION OF ONGOING CONSTRUCTION ON PALEMBANG – BETUNG TOLL ROAD SECTIONS 1 AND 2

No	Kajian Risiko Risk Assessment
9	PENYEDIA JASA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG – BETUNG SEKSI 3 (STA 97+000 – STA 111+690), IC P. RIMO, IC GANDUS, JC PALEMBANG DAN REST AREA SERVICE PROVIDER FOR THE CONSTRUCTION OF THE PALEMBANG – BETUNG TOLL ROAD SECTION 3 (STA 97+000 – STA 111+690), IC P. RIMO, IC GANDUS, JC PALEMBANG AND REST AREA
10	PenunjukanPenyedia Jasa Pembangunan Jalan Tol Ruas Betung - Tempino - Jambi Seksi 1 Paket 1B dan Seksi 2 Paket 2A & 2B Appointment of Service Provider for the Construction of Betung - Tempino - Jambi Toll Road Section 1 Package 1B and Section 2 Package 2A & 2B
11	Pemenuhan Porsi Pinjaman untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung-Jambi Loan disbursement for the Construction of the Trans Sumatra Toll Road, Betung-Jambi Section
12	Rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai PT Hutama Karya PT Hutama Karya's Non-Cash State Capital Participation (PMN) Plan
13	Perpanjangan Jatuh Tempo Hutang Afiliasi /*Shareholder Loan* PT HKR Extension of Affiliate Loan Maturity / Shareholder Loan of PT HKR
14	Pembentukan *Cash Management Notional Pooling* Untuk PT HKR Establishment of Cash Management Notional Pooling for PT HKR
15	Rencana Kerja Sama Sewa Menyewa Aset Cipayung, Kabupaten Bogor Milik PT Hutama Karya (Persero) Partnership Plan for the Lease of Cipayung Assets, Bogor Regency, Owned by PT Hutama Karya (Persero)
16	Rencana Kerja Sama Sewa Menyewa Aset Argapura Papua Milik Pt Hutama Karya (Persero) Partnership Plan for the Lease of Argapura Papua Assets Owned by PT Hutama Karya (Persero)
17	Rencana Kerja Sama Sewa Menyewa Sebagian Luasan Aset Cikiwul, Bekasi Milik PT Hutama Karya (Persero) Partnership Plan for the Lease of Part of Cikiwul Asset Area, Bekasi, Owned by PT Hutama Karya (Persero)
18	Rencana Optimalisasi Aset Gunung Mas, Bandung Milik PT Hutama Karya (Persero) Plan to improve Gunung Mas Assets, Bandung, Owned by PT Hutama Karya (Persero)
19	Rencana Optimalisasi Aset Comal, Surabaya Milik PT Hutama Karya (Persero) Plan to improve Comal Asset, Surabaya, Owned by PT Hutama Karya (Persero)
20	RENCANA PERPANJANGAN SEWA MENYEWA ASET ADINEGORO, PADANG DAN ASET TAMPAN, PEKANBARU, MILIK PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PLAN TO EXTEND THE LEASE OF ADINEGORO, PADANG AND TAMPAN, PEKANBARU ASSETS, OWNED BY PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
21	Rencana Kerja Sama Sewa Menyewa Aset Tateli Satu Minahasa Milik PT Hutama Karya (Persero) Partnership Plan for the Lease of Tateli Satu Minahasa Assets Owned by PT Hutama Karya (Persero)
22	KAJIAN RISIKO PELAKSANAAN PROYEK KPBU PROVING GROUND BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN & SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT RISK ASSESSMENT OF KPBU PROJECT IMPLEMENTATION PROVING GROUND ROADWORTHINESS TESTING & MOTOR VEHICLE CERTIFICATION CENTER (BPLJSKB) BEKASI REGENCY, WEST JAVA PROVINCE
23	PEMUTUSAN PERJANJIAN PELAKSANAAN DENGAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK PADA PEMBANGUNAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR – PEMATANG – PANGGANG – KAYU AGUNG OLEH DIVISI PJT PADA TAHUN 2024 TERMINATION OF THE IMPLEMENTATION AGREEMENT WITH PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK FOR THE CONSTRUCTION OF THE TERBANGGI BESAR – PEMATANG – PANGGANG – KAYU AGUNG TOLL ROAD SECTION BY THE PJT DIVISION IN 2024
24	Rencana Kerja Sama Sewa Menyewa Aset Melawai Milik PT Hutama Karya (Persero) Partnership Plan for Melawai Assets Lease Owned by PT Hutama Karya (Persero)
25	PEMBAYARAN SEBAGIAN PENGGANTIAN *(REIMBURSEMENT)* ATAS NILAI KONSTRUKSI TERVERIFIKASI STA 42+500 – 97+000 KEPADA PT WASKITA SRIWIJAYA TOL PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG – BETUNG A PARTIAL REIMBURSEMENT PAYMENT IS BEING MADE TO PT WASKITA SRIWIJAYA TOL FOR THE VERIFIED VALUE OF CONSTRUCTION WORK BETWEEN STA 42+500 AND 97+000 ON THE PALEMBANG – BETUNG TOLL ROAD PROJECT.
26	RENCANA SEWA MENYEWA ASET ARGAPURA, ASET NIRWANA, DAN ASET ENTROP MILIK PT HUTAMA KARYA (PERSERO LEASE PLAN FOR ARGAPURA ASSETS, NIRWANA ASSETS, AND ENTROP ASSETS OWNED BY PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
27	KAJIAN SETORAN MODAL PELAKSANAAN KPBU PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA ASSESSMENT OF CAPITAL DEPOSIT FOR KPBU IMPLEMENTATION OF TRANS PAPUA ROAD CONSTRUCTION
28	*SHAREHOLDER LOAN* KEPADA PT HK REALTINDO UNTUK PEMENUHAN PUTUSAN BANI ATAS LAHAN INDRALAYA SHAREHOLDER LOAN TO PT HK REALTINDO TO FULFILL BANI DECISION ON INDRALAYA LAND

KOMITE RISIKO KONSTRUKSI

TUGAS DAN TAGGUNG JAWAB KOMITE RISIKO KONSTRUKSI

1. Memberi reviu dan tanggapan atas identifikasi yang disampaikan tim proyek sesuai bidang keahlian.
2. Komite Risiko Konstruksi dapat meminta tambahan materi atau rapat tambahan apabila data yang disiapkan oleh divisi operasi tidak lengkap.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE RISIKO KONSTRUKSI

- Ketua : EVP Divisi Pengelolaan Risiko
- Anggota : EVP Divisi Legal
- EVP Divisi Akuntansi dan Keuangan
- EVP Divisi QHSSE
- EVP Divisi Human Capital
- EVP Divisi Corporate Planning
- EVP Divisi Engineering dan Teknologi Informasi
- EVP Divisi Sistem & Kepatuhan

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE RISIKO KONSTRUKSI

CONSTRUCTION RISK COMMITTEE

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CONSTRUCTION RISK COMMITTEE

1. Provide reviews and responses to the identification submitted by the project team according to their field of expertise
2. The Construction Risk Committee may request additional materials or additional meetings if the data prepared by the operations division is incomplete.

CONSTRUCTION RISK COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

- Head : EVP Risk Management Division
- Members : EVP Legal Division
- EVP of Accounting and Finance Division
- EVP QHSSE Division
- EVP Human Capital Division
- EVP Corporate Planning Division
- EVP Engineering and Information Technology Division
- EVP Systems & Compliance Division

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE CONSTRUCTION RISK COMMITTEE

No	Tanggal Date	Agenda
1	29 Februari 2024 February 29, 2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Bendungan Way Apu, P.Buru Risk Assessment for the Implementation of the Way Apu Dam, P.Buru
2	04 Maret 2024 March 4,2024	Kajian Risiko REL Proyek Kemenko-2 Risk Assessment of REL for the Kemenko-2 Project
3	04 Maret 2024 March 4,2024	Kajian Risiko REP Proyek IKN Karang Joang Seksi 3A Risk Assessment of REP for the Karang Joang IKN Project Section 3A
4	04 Maret 2024 March 4,2024	Kajian Risiko REP Proyek IKN Karang Joang Seksi 3A-2 Risk Assessment of REP for the Karang Joang IKN Project Section 3A-2
5	04 Maret 2024 March 4,2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Proyek TBBM Implementation Risk Assessment for the TBBM Project
6	05 Maret 2024 March 5,2024	Kajian Risiko REP Proyek IKN Seksi 5 Risk Assessment of REP for the IKN Project Section 5
7	05 Maret 2024 March 5,2024	Kajian Risiko REP Proyek Rusun ASN Risk Assessment of REP for the State Civil Apparatus Apartment Project
8	05 Maret 2024 March 5,2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Proyek Lawe-Lawe Implementation Risk Assessment for the Lawe-Lawe Project
9	06 Maret 2024 March 6,2024	Kajian Risiko REP Proyek Bandara VVIP Risk Assessment of REP for the VVIP Airport Project
10	06 Maret 2024 March 6, 2024	Kajian Risiko REL Proyek SPAM Risk Assessment of REL for the SPAM Project
11	07 Maret 2024 March 7, 2024	Kajian Risiko REL Proyek Sarana Prasarana IKN Risk Assessment of REL for the IKN Infrastructure and Facilities Project
12	07 Maret 2024 March 7, 2024	Kajian Risiko REP Proyek Masjid IKN Risk Assessment of REP for the IKN Mosque Project
13	07 Maret 2024 March 7, 2024	Kajian Risiko REP Proyek Rumah Sakit IKN Risk Assessment of REP for the IKN Hospital Project
14	07 Maret 2024 March 7, 2024	Kajian REP Pelaksanaan Proyek Fender Pulau Balang REP Assessment for the Implementation of the Pulau Balang Fender Project

No	Tanggal Date	Agenda
15	30 Juli 2024 July 30, 2024	Kajian Risiko REL Proyek Proving Ground 2 Risk Assessment of REL for the Proving Ground 2 Project
16	30 Juli 2024 July 30, 2024	Kajian Risiko REL Proyek Proving Ground 3 Risk Assessment of REL for the Proving Ground 3 Project
17	30 Juli 2024 July 30, 2024	Kajian Risiko REP Proyek Bendungan Cijurey Risk Assessment of REP for the Cijurey Dam Project
18	13 Agustus 2024 August 13, 2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Bendungan Bulango Ulu Implementation Risk Assessment for the Bulango Ulu Dam Project
19	13 Agustus 2024 August 13, 2024	Kajian Risiko REP Paket SD Jakarta Risk Assessment of REP for the Jakarta Elementary School Package
20	15 Agustus 2024 August 15, 2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Proyek Dermaga Anggrek Implementation Risk Assessment for the Anggrek Pier Project
21	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Proyek Bendungan Maninting Implementation Risk Assessment for the Maninting Dam Project
22	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Proyek Jampidsus Implementation Risk Assessment for the Jampidsus Project
23	21 Agustus 2024 August 21, 2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Proyek Sanglah PL Estetik Implementation Risk Assessment for the Sanglah PL Estetik Project
24	25 September 2024 September 25, 2024	Kajian Risiko Pelaksanaan Proyek EPC Suralaya Jawa 9-10 Implementation Risk Assessment for the Suralaya Java 9-10 EPC Project
25	26 September 2024 September 26, 2024	Kajian Risiko REP Proyek Serang Panimbang Risk Assessment of REP for the Serang Panimbang Project

KOMITE *KEY PERFORMANCE INDICATOR* (KPI)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KPI

Komite KPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan penyusunan KPI dan penurunan KPI Korporasi ke KPI Direktorat dan Divisi dilakukan oleh unit Perusahaan yang bertanggung jawab dan dapat tersusun secara komprehensif/menyeluruh dan terintegrasi untuk memastikan target tercapai sesuai sasaran perusahaan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KPI

Ketua : EVP Divisi Corporate Planning
Koordinator KPI Korporasi : EVP Divisi Corporate Planning
Koordinator KPI Direksi : EVP Sekretaris Perusahaan

Koordinator KPI Divisi/Unit Kerja : EVP Divisi Human Capital
Anggota :
- EVP Divisi Engineering & TI
- EVP Divisi Akuntansi & Keuangan
- EVP Divisi Sistem & Kepatuhan

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) COMMITTEE

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE KPI COMMITTEE

The KPI Committee is responsible for ensuring that the formulation of KPIs and the cascading of Corporate KPIs to Directorate and Division KPIs are carried out by the responsible units within the Company. This process must be conducted in a comprehensive and integrated manner to ensure that targets are achieved in alignment with the Company's objectives.

KPI COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

Chairperson : EVP Corporate Planning Division
Corporate KPI Coordinator : EVP Corporate Planning Division
Board of Directors KPI Coordinator : EVP Corporate Secretary
Division/Work Unit KPI Coordinator : EVP Human Capital Division
Member :
- EVP Engineering & IT Division
- EVP Accounting & Finance Division
- EVP System & Compliance Division

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KPI

Selama tahun 2024, Komite KPI telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Melakukan verifikasi realisasi KPI Divisi tahun 2023
2. Melakukan verifikasi rencana KPI Divisi tahun 2024
3. Menyusun dan mengusulkan KPI Direksi secara Individual kepada Direksi yang kemudian untuk disetujui Dewan Komisaris tahun 2024
4. Melaksanakan monitoring realisasi KPI Direksi secara Individual Tahun 2024
5. Menyusun dan Mengusulkan KPI Korporasi 2024
6. Melaksanakan monitoring triwulanan realisasi KPI Korporasi tahun 2024

KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN (TJSL)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TJSL

Pembina

- Memberikan arahan pelaksanaan dalam program-program TJSL yang berpedoman pada ISO 26000 untuk keberlanjutan Perusahaan.
- Menentukan arah dan kebijakan TJSL berpedoman pada ISO 26000 di lingkungan Perusahaan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan.
- Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberhasilan program-program TJSL yang berpedoman pada ISO 26000 untuk mendukung keberlanjutan Perusahaan.

Ketua

- Bertanggung jawab atas semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan implementasi TJSL berpedoman pada ISO 26000 dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
- Memberikan arahan teknis dan menetapkan rencana kerja TJSL berpedoman pada ISO 26000 sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- Mengkoordinasikan fungsi Divisi dan Bidang yang terkait dalam implementasi TJSL berpedoman pada ISO 26000.
- Melaksanakan dan memimpin rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada saat perencanaan program dan menyusun laporan keberlanjutan *(sustainability reports).*

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE KPI COMMITTEE

Throughout 2024, the KPI Committee carried out its duties, which included the following:

1. Verify the 2023 Division KPI realization
2. Verify the 2024 Division KPI plans
3. Prepare and propose the 2024 Individual KPI of the Board of Directors to be approved by the Board of Commissioners
4. Monitor the realization of the 2024 Individual KPI of the Board of Directors
5. Prepare and propose Corporate KPI 2024
6. Quarterly monitoring of the realization of Corporate KPIs in 2024

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (TJSL) COMMITTEE

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE TJSL COMMITTEE

Advisor

- Provide strategic direction for the implementation of TJSL (Social and Environmental Responsibility) programs in accordance with ISO 26000 to support corporate sustainability.
- Establish the direction and policy of TJSL based on ISO 26000 within the Company, aligned with the Company's Vision, Mission, and Objectives.
- Conduct supervision, monitoring, and evaluation of the effectiveness of TJSL programs in accordance with ISO 26000 to support the Company's sustainability goals.

Chairperson

- Responsible for all activities related to the planning, implementation, evaluation, and execution of TJSL programs based on ISO 26000 and aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs).
- Provide technical guidance and establish TJSL work plans based on ISO 26000 in accordance with the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP).
- Coordinate related Divisions and Departments in the implementation of TJSL programs based on ISO 26000.
- Lead and conduct coordination meetings at least twice a year—during program planning and during the preparation of sustainability reports.

Koordinator
- Merencanakan program kerja dan anggaran sesuai dengan Divisi dan Bidang masing-masing dan melaporkan kepada Ketua.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program untuk keberhasilan program dan perbaikan.
- Menyusun Laporan Berkala setiap 3 bulan dan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Reports).*

Anggota
- Merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran sesuai dengan Divisi dan Bidang masing-masing dan melaporkan kepada Ketua.
- Mengimplementasikan program kerja sesuaidengan Divisi dan Bagian masing-masing.
- Membantu Koordinator menyusun Laporan Berkala setiap 3 bulan dan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Reports).*
- Mensosialisasikan dan mempublikasikan program-program TJSL yang berpedoman pada ISO 26000 yang dilaksanakan Perusahaan kepada Internal dan Eksternal Perusahaan.

Coordinator
- Develop work programs and budgets according to their respective Divisions and Departments and report to the Chairperson.
- Conduct monitoring and evaluation of program implementation to ensure success and identify areas for improvement.
- Prepare quarterly reports and the Sustainability Report.

Member
- Plan and implement work programs and budgets according to their respective Divisions and Departments, and reports to the Chairperson.
- Implement the work programs based on their respective Divisions and Sections.
- Assist the Coordinator in preparing quarterly reports and the Sustainability Report.

- Promote and disseminate information about TJSL programs based on ISO 26000, both internally and externally.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TJSL

Pembina : Direktur Utama
Ketua : Direktur Human Capital dan Legal

Tata Kelola
1. Koordinator : EVP Satuan Pengawas Intern
2. Anggota :
   EVP Sekretaris Perusahaan
   EVP Divisi Pengelolaan Risiko
   EVP Divisi Corporate Planning
   EVP Divisi Legal

Hak Asasi Manusia
1. Koordinator : EVP Divisi Legal
2. Anggota : EVP Divisi Human Capital

Lingkungan
1. Koordinator : EVP Divisi QHSSE
2. Anggota : EVP Sekretaris Perusahaan

Aktivitas Ketenagakerjaan
1. Koordinator : EVP Divisi Human Capital
2. Anggota : EVP Divisi QHSSE

Konsumen
1. Koordinator : EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
2. Anggota :
   EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol
   EVP Divisi Pembangunan Jalan Tol
   EVP Divisi EPC
   EVP Divisi Sipil Umum
   EVP Divisi Gedung

TJSL COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

Supervisor : Main Director
Chairman : Director of Human Capital and Legal

Governance
1. Coordinator : EVP Internal Audit Unit
2. Member :
   EVP Corporate Secretary
   EVP Risk Management Division
   EVP Corporate Planning Division
   EVP Legal Division

Human Rights :
1. Coordinator : EVP Legal Division
2. Member : EVP Human Capital Division

Environment
1. Coordinator : EVP Legal Division
2. Member : EVP Human Capital Division

Employment Activities
1. Coordinator : EVP QHSSE Division
2. Member : EVP Corporate Secretary

Consumer
1. Coordinator : EVP Toll Road Operation and Maintenance Division
2. Member :
   EVP Toll Road Planning Division
   EVP Toll Road Development Division
   EVP EPC Division
   EVP Infrastructure Division
   EVP Building Division

Aktivitas Operasi yang Adil
1. Koordinator : EVP Divisi Engineering & TI
2. Anggota :
   EVP Sekretaris Perusahaan
   EVP Divisi Legal

Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat/ Komunitas : EVP Sekretaris Perusahaan

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TJSL

Selama tahun 2024, Komite TJSL telah melaksanakan tugasnya antara lain:
1. Menyusun dan mengusulkan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2024
2. Menyusun dan mengusulkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2024
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam perencanaan anggaran dan program TJSL di Divisi tahun 2024
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL tahun 2024

KOMITE SANKSI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE SANKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sanksi adalah:

1. Menerima rekomendasi atas laporan dugaan pelanggaran oleh Karyawan dari pimpinan unit kerja dan/atau EVP Divisi terkait dan/atau EVP Divisi *Human Capital* dan/atau EVP Satuan Pengawasan Intern dan/atau Direksi dan/atau WBS.
2. Melakukan pemeriksaan, pembuktian atas dugaan pelanggaran dan/atau memberikan pertimbangan atas hasil pemeriksaan, pembuktian yang dilakukan oleh unit kerja.
3. Memberikan sanksi kepada Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran.
4. Menerima dan memproses banding dari Karyawan yang sudah diberikan Sanksi oleh pimpinan unit kerja dan/atau EVP Divisi *Human Capital.*

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE SANKSI

Keberadaan Komite Sanksi berjenjang dengan Susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Tingkat I

Untuk melakukan pemeriksaan, pembuktian atas dugaan pelanggaran dan pemberian Sanksi kepada Karyawan/Pejabat Profesional III yang beranggotakan:

Fair Operation Activities
1. Coordinator : EVP Engineering & IT Division
2. Member :
   EVP Corporate Secretary
   EVP Legal Division

Community Development & Empowerment : EVP Corporate Secretary

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE TJSL COMMITTEE

During 2024, the TJSL Committee has carried out its duties including:
1. Preparing and proposing the 2024 Social and Environmental Responsibility budget
2. Preparing and proposing the 2024 Social and Environmental Responsibility program
3. Implementing a Coordination Meeting in planning the TJSL budget and program in the Division in 2024
4. Monitoring and evaluating the implementation of the 2024 TJSL program

SANCTIONS COMMITTEE

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SANCTIONS COMMITTEE

Duties and Responsibilities of the Sanctions Committee are:
1. Receive recommendations on reports of alleged violations by Employees from the head of the work unit and/or EVP of the relevant Division and/or EVP of the Human Capital Division and/or EVP of the Internal Audit Unit and/or the Board of Directors and/or WBS.
2. Conduct examinations, provide evidence of alleged violations and/or provide considerations on the results of examinations, evidence conducted by the work unit.
3. Impart sanctions to Employees who are proven to have committed violations.
4. Receive and process appeals from Employees who have been given Sanctions by the head of the work unit and/or EVP of the Human Capital Division.

SANCTIONS COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

The existence of the Sanctions Committee is tiered with the following membership structure:

A. Level I

To conduct examinations, provide evidence of alleged violations and impose sanctions on Professional Employees/Officials III, consisting of:

Ketua merangkap Anggota Chairman concurrently Member	:	**Direktur Utama / Wakil Direktur Utama** President Director / Vice President Director
Anggota Member	:	Direktur Human Capital & Legal; Direktur Keuangan & Manajemen Risiko; Direktur Pembina Karyawan terkait; EVP Satuan Pengawasan Intern; EVP Divisi Human Capital; EVP Divisi Legal; Ketua Umum DPP Sekar Hutama. Director of Human Capital & Legal; Director of Finance & Risk Management; Director of Employee Development; EVP of Internal Audit Unit; EVP of Human Capital Division; EVP of Legal Division; Chairman of DPP Sekar Hutama.

Anggota Komite Sanksi Tingkat I yang berhak memberikan voting suara hanya terbatas pada anggota Direksi, sedangkan anggota lainnya hanya berhak memberikan saran/pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan (member non voting).

Members of the Level I Sanctions Committee who are entitled to cast a vote are limited to members of the Board of Directors, while other members are only entitled to provide suggestions/considerations in the decision-making process (non-voting members).

B. Tingkat II

Untuk melakukan pemeriksaan, pembuktian atas dugaan pelanggaran dan pemberian Sanksi (kepada seluruh Karyawan selain Pejabat Profesional III) yang beranggotakan:

B. Level II

To conduct investigations, provide evidence of alleged violations and impose sanctions (on all employees other than Professional Officer III) consisting of:

Ketua merangkap Anggota Chairman concurrently Member	:	**Direktur Human Capital & Legal** Director of Human Capital & Legal
Anggota Member	:	EVP Satuan Pengawasan Intern; EVP Divisi Human Capital; EVP Divisi Legal; EVP Sekretaris Perusahaan; EVP Divisi terkait; Ketua Umum DPP Sekar Hutama. EVP Internal Audit Unit; EVP Human Capital Division; EVP Legal Division; EVP Corporate Secretary; EVP Related Division; Chairman of DPP Sekar Hutama.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SANKSI

IMPLEMENTATION OF THE SANCTIONS COMMITTEE'S DUTIES

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	29 April 2024 April 29, 2024	Pemutusan sanksi kepada karyawan akibat melakukan tindakan pelanggaran prosedur yang menyebabkan Perusahaan mengalami kerugian Termination of sanctions against employees due to committing procedural violations that cause the Company to suffer losses
2	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Pemutusan sanksi kepada karyawan akibat tindakan indisipliner Termination of sanctions against employees due to indisciplinary actions
3	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Pemutusan sanksi kepada karyawan akibat melakukan pelanggaran prosedur/ tata tertib perusahaan Termination of sanctions against employees due to violating company procedures/rules

KOMITE TALENTA

TALENT COMMITTEE

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TALENTA

Komite Talenta untuk Evaluasi Jabatan, Grade Karyawan, dan Talent Pool Tingkatan Jabatan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian kompetensi/keahlian karyawan dalam bentuk wawancara dan atau presentasi sebagai bagian dari proses evaluasi jabatan, grade karyawan dan talent pool tingkat jabatan.

TALENT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Talent Committee for Job Evaluation, Employee Grade, and Job Level Talent Pool has the duty and authority to conduct employee competency/expertise assessments in the form of interviews and/or presentations as part of the job evaluation process, employee grades, and job level talent pools.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TALENTA

TALENT COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

Jenjang Tingkatan Jabatan Profesional III atau Executive Vice President setingkat (BOD-1) Professional Position Level III or Executive Vice President level (BOD-1)		
Ketua Chairman	:	Direktur Utama President Director
Sekretaris Secretary	:	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal
Anggota Member	:	• Wakil Direktur Utama; • Direktur Keuangan; • Direktur Operasi I; • Direktur Operasi II; • Direktur Operasi III. • Deputy President Director; • Director of Finance; • Director of Operations I; • Director of Operations II; • Director of Operations III.

Jenjang Tingkatan Jabatan Profesional II atau Vice President setingkat (BOD-2) khusus yang berada di Direktorat Utama Professional Position Level II or Vice President level (BOD-2) specifically located in the Main Directorate		
Ketua Chairman	:	Wakil Direktur Utama Deputy President Director
Sekretaris Secretary	:	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal
Anggota Member	:	EVP Divisi Human Capital EVP of Human Capital Division
Anggota	:	EVP dari Unit Kerjanya 3 (tiga) EVP dari Unit Kerja berbeda EVP of Work Unit 3 (three) EVPs from different Work Units

Jenjang Tingkatan Jabatan Profesional I atau Manager setingkat (BOD-3) Professional Position Level I or Manager Level (BOD-3)		
Ketua Chairman	:	Direktur Human Capital & Legal Director of Human Capital & Legal
Sekretaris Secretary	:	EVP Divisi Human Capital EVP of Human Capital Division
Anggota Member	:	EVP dari Unit Kerjanya 1 (satu) EVP dari Unit Kerja berbeda 1 (satu) SVP/VP dari Unit Kerjanya EVP of Work Unit 1 (one) EVP from different Work Unit 1 (one) SVP/VP from the Work Unit

Jenjang Tingkatan Jabatan Pratama III atau Assistant Manager setingkat (BOD-4) Professional Position Level III or Assistant Manager Level (BOD-4)		
Ketua Chairman	:	EVP Divisi Human Capital EVP of Human Capital Division
Sekretaris Secretary	:	EVP dari Unit Kerjanya EVP of Work Unit
Anggota Member	:	1 (satu) SVP/VP dari Unit Kerjanya 2 (dua) SVP/VP dari Unit Kerja berbeda 1 (one) SVP/VP from the Work Unit 2 (two) SVP/VP from different Work Units

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TALENTA

COMMITTEE'S DUTIES

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	12 Februari 2024 February 12, 2024	Evaluasi terhadap Karyawan yang memiliki Jabatan Fungsional (Expert & Sr. Expert) sejumlah 11 Karyawan. Penunjukan Komite dan Karyawan yang di Evaluasi ditunjuk pada Surat Edaran Nomor DU/HC.5011/SE/42/XII/2024 tanggal 12 Desmber 2024 Tentang Evaluasi Jabatan Fungsional untuk band jabatan Profesional II Profesional III (Expert & Sr. Expert) PT Hutama Karya (Persero). Evaluation of Employees with Functional Positions (Expert & Sr. Expert) totaling 11 Employees. The appointment of the Committee and Employees to be Evaluated is designated in Circular Letter Number DU/HC.5011/SE/42/XII/2024 dated December 12, 2024 concerning the Evaluation of Functional Positions for the Professional II Professional III (Expert & Sr. Expert) position bands of PT Hutama Karya (Persero).
2	08 Maret 2024 March 8, 2024	Evaluasi Promosi pada Periode I (Maret) dengan Metode Sirkuler oleh Komite Talenta dilakukan kepada 115 Karyawan dengan tingkatan jabatan Pra II sd Pro II. Promotion Evaluation in Period I (March) with the Circular Method by the Talent Committee was carried out on 115 Employees with Pra II to Pro II position levels.
3	27 Maret 2024 March 27, 2024	Persetujuan atas penilaian dan pengangkatan pejabat dalam kegiatan Promosi Periode I (Maret) tertuang dalam Surat Keputusan Direksi 966/KPTS/33.1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 sejumlah 113 Karyawan. Approval of the assessment and appointment of officials in the Period I (March) Promotion activities is stated in the Board of Directors Decree 966/KPTS/33.1/III/2024 dated March 27, 2024 totaling 113 Employees.
4	05 Juli 2024 July 5, 2024	Evaluasi Promosi pada Periode I (September) dengan Proses Daring oleh Komite Talenta dilakukan kepada 35 Karyawan dengan tingkatan jabatan Pra II sd Pro II. Promotion Evaluation in Period I (September) with the Online Process by the Talent Committee was carried out on 35 Employees with Pra II to Pro II position levels.
5	07 Oktober 2024 October 7, 2024	Persetujuan atas penilaian dan pengangkatan pejabat dalam kegiatan Promosi Periode II (September) tertuang dalam Surat Keputusan Direksi 4330/KPTS/90.2/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sejumlah 34 Karyawan. Approval of the assessment and appointment of officials in the Promotion Period II (September) activities is stated in the Board of Directors' Decree 4330/KPTS/90.2/X/2024 dated October 7, 2024 for 34 employees.

KOMITE PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PERSONAL DATA PROTECTION COMMITTEE

TUGAS DAN TAGGUNG JAWAB KOMITE PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

1. Mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta Peraturan pelaksanaannya di lingkungan PT Hutama Karya (Persero).
2. Mengkoordinasikan, dan memantau pengumpul data, pengelolaan data, pengontrol data, dan subjek data dalam semua hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PERSONAL DATA PROTECTION COMMITTEE

Duties and Responsibilities of the Personal Data Protection Committee, as follows:

1. Oversee the implementation of the Personal Data Protection Law and its implementing regulations within PT Hutama Karya (Persero).
2. Coordinate and monitor data collectors, data managers, data controllers, and data subjects in all matters relating to the Personal Data Protection Law.

3. Menetapkan, memantau dan mengatur standar pelindungan data pribadi.
4. Memantau, menyelidiki, dan melaporkan kepatuhan terhadap pelindungan data pribadi.
5. Menerima dan menyelidiki keluhan terkait pelanggaran hak subjek data berdasarkan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi.
6. Memberikan panduan untuk pengumpulan data, pengelolaan data, pengendalian data, dan subjek data tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
7. Menyediakan *single-point-of-contact* (SPOC) ketika terjadi insiden terkait kebocoran data pribadi.
8. Merencanakan tindak lanjut insiden mengenai pelindungan data pribadi jika insiden tersebut tidak dapat diselesaikan oleh internal, melalui eskalasi insiden tersebut kepada pihak ketiga (jika dibutuhkan).
9. Melakukan *tracking* terhadap penyelesaian setiap insiden terkait kebocoran data pribadi, baik yang penyelesaiannya ditangani secara internal maupun dieskalasikan ke pihak ketiga.
10. Komite Pelindungan Data Pribadi menetapkan jalur komunikasi yang tepat dalam *first support* insiden mengenai pelindungan data pribadi.
11. Anggota Komite Pelindungan Data Pribadi melakukan analisis atas dampak dan rencana tindak lanjut yang diakibatkan dari terjadinya insiden pelindungan data pribadi.
12. Komite Pelindungan Data Pribadi memiliki kewenangan untuk merencanakan investasi yang dibutuhkan dalam program kerja pelindungan data pribadi.
13. Menyusun strategi sosialisasi atas pedoman dan program kerja pelindungan data pribadi.
14. Memastikan kecukupan sumber daya *(people, process, technology)* untuk pelaksanaan program kerja Pelindungan Data Pribadi.

3. Determine, monitor and regulate personal data protection standards.
4. Monitor, investigate and report compliance with personal data protection.
5. Receive and investigate complaints regarding violations of data subject rights under the Personal Data Protection Law.
6. Provide guidance for data collection, data management, data control, and data subjects regarding the rights, obligations, and responsibilities for personal data protection under the Personal Data Protection Law.
7. Provide a single-point-of-contact (SPOC) when an incident occurs regarding a personal data leak.
8. Plan follow-up incidents regarding personal data protection if the incident cannot be resolved internally, through escalation of the incident to a third party (if needed).
9. Tracking the resolution of every incident related to personal data leaks, whether the resolution is handled internally or escalated to a third party.
10. The Personal Data Protection Committee establishes the right communication channel in first support incidents regarding personal data protection.
11. Members of the Personal Data Protection Committee conduct analysis of the impact and follow-up plans resulting from the occurrence of personal data protection incidents.
12. The Personal Data Protection Committee has the authority to plan the investment needed in the personal data protection work program.
13. Prepare a socialization strategy for the guidelines and work program for personal data protection.
14. Ensure adequate resources (people, process, technology) for the implementation of the Personal Data Protection work program.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PERSONAL DATA PROTECTION COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

Pengarah Director	:	Direktur Operasi I Direktur Human Capital & Legal Director of Operations I Director of Human Capital & Legal
Ketua Chairman	:	EVP Divisi Engineering & Teknologi Informasi EVP of Engineering & Information Technology Division
Wakil Ketua Vice Chairman	:	EVP Divisi Legal EVP of Legal Division
Anggota Member	:	• Sekretaris Perusahaan • EVP Divisi Human Capital • EVP Divisi Legal • EVP Divisi Sistem dan Kepatuhan • EVP Divisi Engineering & Teknologi Informasi • Corporate Secretary • EVP Human Capital Division • EVP Legal Division • EVP System and Compliance Division • EVP Engineering & Information Technology Division

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PELINDUNGAN DATA PRIBADI

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE PERSONAL DATA PROTECTION COMMITTEE

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	15 Mei 2024	Penyusunan Standar pengelolaan akun dan perangkat digital karyawan Preparation of Employee Account Management and Digital Device Standards
2	30 Agustus 2024	Sosialisasi *Profiling* Implementasi PDP Socialization of PDP Implementation Profiling
3	16 September 2024	Self Assesmen *Profiling* Impementasi PDP Self Assessment of PDP Implementation Profiling
4	3 - 9 Oktober 2024	*Forum Group Discussion* Implementasi Pelindungan Data Pribadi Forum Group Discussion of Personal Data Protection Implementation
5	10 Oktober 2024	• Penyusunan RoPA (*Record of Processing Activities*) yang mencatat semua aktivitas pemrosesan data pribadi yang dilakukan • Penyusunan DPIA (*Data Protection Impact Assessment*) sebagai penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak terhadap pelindungan data pribadi • Preparation of RoPA (Record of Processing Activities) which records all personal data processing activities carried out
6	15 Oktober 2024	• Penyusunan Pedoman dan Prosedur PDP sebagai kebijakan perusahaan yang mengatur pengelolaan & pelindungan data pribadi • Penyusunan Data breach response plan yang menjelaskan rencana/langkah perusahaan ketika terjadi kebocoran data pribadi *(breach)* • Preparation of DPIA (Data Protection Impact Assessment) as a risk assessment to identify and mitigate potential impacts on personal data protection
7	10 Desember 2024	Implementasi *Security Operation Center* Preparation of PDP Guidelines and Procedures as company policies that regulate the management & protection of personal data
8	19 Desember 2024	Pembaharuan Organisasi Pengelola PDP Perusahaan Preparation of Data breach response plan which explains the company's plans/steps when a personal data leak (breach) occurs

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

TUGAS DAN TAGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Hutama Karya (Persero), sebagai berikut:

1. Melakukan *review* secara berkala atas Master Plan TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberikan arahan untuk efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI.
3. Memberikan arahan untuk kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
4. Memberikan arahan atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
5. Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Master Plan TI.
6. Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati *(project charter)*.
7. Memastikan terlaksanakanya pengawasan terhadap manfaat dan kapabilitas TI.
8. Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.

Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee of PT Hutama Karya (Persero), as follows:

1. Conducting periodic reviews of the IT Master Plan to be in line with the strategic plan of the Company's business activities.
2. Provide direction for the effectiveness of strategic measures to minimize the risk of the Company's investment in the IT sector.
3. Provide direction for the feasibility of investment in the IT sector that can contribute to the achievement of the Company's business objectives.
4. Provide direction on the formulation of key IT policies, standards and procedures.
5. Monitor and ensure the conformity of approved IT projects with the IT Master Plan.
6. Monitor and ensure the conformity of the implementation of IT projects with the agreed project plan (project charter).
7. Ensure the implementation of supervision of IT benefits and capabilities.
8. Monitor and ensure the compatibility of IT with the needs of the management information system and the needs of the Company's business activities.

9. Memantau kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja.
10. Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
11. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan atas implementasi TI.
12. Berperan sebagai *Emergency Change Advisory* Board untuk memutuskan pelaksanaan perubahan dengan mempertimbangkan dampak terhadap dukungan bisnis.

9. Monitor IT performance and performance improvement efforts.
10. Monitor efforts to resolve various IT-related problems, which cannot be resolved by the user work unit and the TI organizer work unit effectively, efficiently and in a timely manner.
11. Ensure the adequacy and allocation of resources owned by the Company for IT implementation.
12. Serve as Emergency Change Advisory Board to decide the implementation of changes by considering the impact on business support.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

MEMBERSHIP STRUCTURE OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Pengarah Advisor	:	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Human Capital President Director Vice President Director Director of Human Capital
Ketua Chairman	:	Direktur Operasi I Director of Operations I
Wakil Ketua Vice Chairman	:	Direktur Manajemen Risiko Direktur Keuangan Director of Risk Management Director of Finance
Sekretariat	:	EVP Divisi Engineering dan Teknologi Informasi EVP Engineering and Information Technology Division
Anggota Member	:	EVP Sekretariat Perusahaan EVP Divisi Human Capital EVP Divisi Corporate Planning EVP Divisi Akuntansi dan Keuangan EVP Divisi Pengelolaan Risiko EVP Divisi Sistem dan Kepatuhan EVP Corporate Secretary EVP Human Capital Division EVP Corporate Planning Division EVP Accounting and Finance Division EVP Risk Management Division EVP Systems and Compliance Division

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	1 April 2024 April 1, 2024	• Pencapaian Program Kerja TI Tahun 2023 • Tanggapan dan Arahan Komite Pengarah TI atas Program Kerja Tahun 2024 • Achievement of IT Work Program Year 2023 • IT Steering Committee Feedback and Direction on Work Program Year 2024
2	13 September 2024 September 13, 2024	• Program Kerja TI Tahun 2024 • Tanggapan dan Arahan Komite Pengarah TI atas Program Kerja Tahun 2024 • IT Work Program Year 2024 • IT Steering Committee Feedback and Direction on Work Program Year 2024
3	11 Oktober 2024 October 11, 2024	Rencana Pengembangan *Human Capital Information System* (HCIS) Human Capital Information System (HCIS) Development Plan

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers). Penunjukkan tersebut berdasarkan keputusan dalam RUPS untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi Hutama Karya. Penunjukan KAP tersebut telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

The Company has appointed the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (a member firm of the global PricewaterhouseCoopers network). This appointment was based on a resolution from the General Meeting of Shareholders (GMS) to audit the consolidated financial statements of Hutama Karya. The appointment of this public accounting firm complies with the applicable regulations. Additionally, the Audit Committee conducts an evaluation of the audit services provided for the annual historical financial information by the public accounting firm.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE

PUBLIC ACCOUNTING FIRM, ACCOUNTANT NAME, AND FEES

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

Table of Public Accounting Firm, Accountant Name, and Fees.

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Responsible Partner)	Periode AP Accountant Period	Fee Jasa Audit (Rp Miliar) Audit Service Fee (Billions Rupiah)
2024	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Periode 2 Period 2	Yusron	Periode 4 Period 4	14.9
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Periode 1 Period 1	Yusron	Periode 3 Period 3	13.7
2022	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Firma anggota jaringan global Crowe)	Periode 1 Period 1	Ali Hery	Periode 1 Period 1	4.8
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Periode 5 Period 5	Yusron Fauzan	Periode 2 Period 2	9.2
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Periode 4 Period 4	Chrisna A. Wardhana	Periode 1 Period 1	9.9

*Termasuk PPN dan Prosedur yang disepakati
*Include VAT and Agreed-upon procedures

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

OTHER SERVICES PROVIDED BY ACCOUNTANTS

No	Jasa Non Audit yang Diberikan Non Audit Services Provided	Entitas Entity	Biaya Jasa (Juta Rp) Service Fee (Millions Rupiah)	Status Status
1	Prosedur yang disepakati atas Laporan Key Performance Indicators (KPI) Korporasi/PMN/Direksi, Laporan keuangan BUJT dan Non-BUJT, Laporan keuangan Penugasan dan Non Penugasan, Laporan Anaplan. Agreed-upon procedures for the Key Performance Indicators (KPI) Report for Corporation/PMN/Board of Directors, Financial Statements of BUJT and Non-BUJT, Financial Statements for Assigned and Non-Assigned Projects, and Anaplan Report.	HK dan Entitas Anak HK and Subsidiaries	1,651	Dalam Proses In process
2	Due Diligence Atas Saldo Awal Laporan Keuangan Konsolidasian Waskita Grup 31 Desember 2023 Due diligence on the opening balance of the consolidated financial statements of the Waskita Group as of December 31, 2023.	HK	19,902	Selesai Done

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Hutama Karya telah memiliki kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang telah diperbaharui dan disahkan Direksi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DU/SPI.5197.6/KPTS/113/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024. Kebijakan sistem pengendalian internal tersebut sebagai respons dari:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. COSO (*Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commission*) Edisi 2013
3. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan seluruh personel Perseroan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan Perseroan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap prosedur/kebijakan serta peraturan perundangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional.

TUJUAN PENGENDALIAN

1. Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Hutama Karya has established an Internal Control System (SPI) policy, which has been updated and approved by the Board of Directors through the Board of Directors Decree No. DU/SPI.5197.6/KPTS/113/XII/2024 dated December 18, 2024. This internal control system policy is formulated in response to:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises.
2. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 2013 Edition.
3. The Internal Control System is a continuous process carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and all company personnel to provide reasonable assurance in achieving the company's vision, mission, goals, and objectives through effective and efficient activities, reliable financial reporting, asset protection, and compliance with procedures, policies, and applicable laws and regulations. The internal control system includes both financial and operational controls.

CONTROL OBJECTIVES

1. Operational Objectives – Related to the effectiveness and efficiency of operations. Internal control aims to improve the effectiveness and efficiency of all company operations, ensuring cost control and organizational goal achievement.

2. Tujuan pelaporan. Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.
3. Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan kebijakan entitas itu sendiri.

2. Reporting Objectives – Internal control is designed to enhance the reliability of financial and management reports, ensuring that data and accounting records are accurate and verifiable, preventing misleading information for report users.

3. Compliance Objectives – Internal control is intended to ensure compliance with laws, regulations, and company policies set by the government, regulatory bodies, and the company itself.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN

Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activites*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The COSO conceptual framework serves as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control. It consists of five (5) components:
1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information & Communication
5. Monitoring and Evaluation

LINGKUNGAN PENGENDALIAN (CONTROL ENVIRONMENT)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu perusahaan dan mempengaruhi kesadaran personal tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intrenal yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

Lima prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam perusahaan untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu:
1. Perusahaan yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
2. Dewan direksi menunjukkan indenpendensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
3. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan.

CONTROL ENVIRONMENT

The control environment sets the tone of the company and influences personnel awareness regarding internal control. It serves as the foundation for all other internal control components, shaping discipline and structure. The control environment consists of a set of standards, processes, and structures that establish the foundation for implementing internal control across the organization.

Five key principles that support an effective control environment:

1. The company, including the Board of Directors, management, and personnel, demonstrates a commitment to integrity and ethical values.
2. The Board of Commissioners maintains independence from management and oversees the development and performance of internal control.
3. Management, under the supervision of the Board of Commissioners, establishes the structure, reporting lines, authorities, and responsibilities necessary for goal achievement.

4. Perusahaan menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompetensi sejalan dengan tujuan.
5. Perusahaan meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

PENILAIAN RISIKO *(RISK ASSESSMENT)*

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh perusahaan.

Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko:
1. Perusahaan menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
2. Perusahaan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Perusahaan mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
4. Perusahaan mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi system pengendalian internal

KEGIATAN PENGENDALIAN (*CONTROL ACTIVITIES*) - PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda,seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. Prinsip prinsip dalam perusahaan yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu sebagai berikut:

4. The company is committed to attracting, developing, and retaining competent individuals aligned with its objectives.

5. The company ensures that individuals are accountable for their internal control responsibilities in pursuing objectives.

RISK ASSESSMENT

Risk assessment is a dynamic and interactive process to identify and evaluate risks that may impact goal achievement. Risk refers to the possibility of an event occurring that could affect the entity's ability to achieve its objectives. Risks are evaluated based on tolerance levels set by the company. Therefore, risk assessment forms the basis for determining how risks should be managed

Principles of risk assessment:
1. The company defines its objectives clearly to enable the identification and assessment of related risks.

2. The company identifies risks across the entity and analyzes them as a basis for determining risk management strategies.

3. The company considers potential fraud risks when assessing risks that could impact goal achievement.
4. The company identifies and assesses significant changes that could impact the internal control system.

CONTROL ACTIVITIES – FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROLS

Control activities are policies and procedures designed to ensure management directives are implemented to mitigate risks and achieve objectives. These activities occur at all levels of the organization, throughout business processes, and within technological environments.

Control activities serve various purposes and apply across different organizational functions, including authorization, verification, reconciliation, performance analysis, safeguarding company assets, and segregation of duties. Principles that support control activities:

1. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima.
2. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
3. Perusahaan menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan kebijakan ke dalam tindakan.

Perusahaan telah mengimplementasikan berbagai aktivitas kontrol secara komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini mencakup:

1. Keterlibatan aktif setiap *Business Process Owner* (BPO) di Divisi Operasi dan Kantor Pusat. dalam pengelolaan manajemen risiko. Setiap BPO melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyusunan rencana mitigasi risiko dengan langkah mitigasi, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab. Monitoring realisasi tindak lanjut dilakukan secara periodik, disertai pelaporan peristiwa kerugian ke dalam loss event database. Evaluasi ulang daftar risiko dilakukan minimal setiap triwulan, dengan dukungan konsultatif dari Unit Manajemen Risiko. Selain itu, efektivitas implementasi manajemen risiko diuji oleh SPI untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan sesuai ketentuan.
2. Perusahaan telah menerapkan kontrol aktivitas yang sistematis dalam pengelolaan dan pengendalian dokumen Sistem Manajemen. Evaluasi dokumen dilakukan setiap tiga tahun, dimonitor oleh *Business Process Management,* serta didukung oleh pemantauan rutin terhadap progres pembaruan dokumen oleh masing-masing divisi. Untuk menjamin transparansi, perusahaan secara berkala menerbitkan dan mendistribusikan Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen yang memuat status terkini dokumen. Prosedur Kepatuhan Sistem Manajemen mengatur pelaksanaan sosialisasi tata kelola kepatuhan secara berkala oleh koordinator QA secara berkala.Selain itu, Prosedur Kepatuhan Sistem Manajemen menetapkan tanggung jawab lapis pertama kepada jajaran pimpinan (SVP, VP, PM, Prodir, dan BM) untuk memastikan pemahaman dan implementasi dokumen sistem manajemen oleh seluruh personil di unit kerja masing-masing.
3. Perusahaan telah mengimplementasikan berbagai aktivitas kontrol teknologi secara komprehensif seperti adanya prosedur pengelolaan konfigurasi, infrastruktur, kapasitas, ketersediaan, dan kontinuitas layanan TI, serta manual tata kelola TI yang terstruktur. Selain itu, telah tersedia prosedur tata kelola data

1. The company selects and develops control activities that contribute to risk mitigation at an acceptable level.
2. The company selects and develops general control activities over technology to support goal achievement.
3. The company enforces control activities through policies that define expectations and procedures that operationalize these policies.

The Company has implemented various control activities comprehensively to support the achievement of organizational goals. These include:

1. Active involvement of each Business Process Owner (BPO) in the Operations Division and Head Office. in managing risk management. Each BPO identifies, analyzes, evaluates, and prepares a risk mitigation plan with mitigation steps, implementation time, and person in charge. Monitoring of follow-up realization is carried out periodically, accompanied by reporting of loss events to the loss event database. Re-evaluation of the risk list is carried out at least every quarter, with consultative support from the Risk Management Unit. In addition, the effectiveness of risk management implementation is tested by SPI to ensure that risk management is running according to regulations.
2. The company has implemented systematic activity control in the management and control of Management System documents. Document evaluation is carried out every three years, monitored by Business Process Management, and supported by routine monitoring of the progress of document updates by each division. To ensure transparency, the company periodically publishes and distributes the Master List of Management System Documents containing the current status of the documents. The Management System Compliance Procedure regulates the implementation of periodic socialization of compliance governance by the QA coordinator periodically. In addition, the Management System Compliance Procedure establishes first-level responsibilities for the leadership ranks (SVP, VP, PM, Prodir, and BM) to ensure the understanding and implementation of the management system documents by all personnel in their respective work units.
3. The company has implemented various comprehensive technology control activities such as the existence of procedures for managing configuration, infrastructure, capacity, availability, and continuity of IT services, as well as a structured IT governance manual. In addition, there are data governance

yang mengatur struktur organisasi dan tugas fungsional, serta kebijakan keamanan informasi (ISMS) dan prosedur pengelolaan insiden siber untuk melindungi dari ancaman dan gangguan. Pengelolaan operasional TI juga diperkuat dengan prosedur terkait perencanaan, perubahan, proyek, layanan, pihak ketiga, pengembangan, rilis, dan portofolio layanan TI secara menyeluruh dan terdokumentasi.

4. Melalui *User Access Matrix* dan Instruksi Kerja Pengelolaan Hak Akses ERP, perusahaan memastikan pemisahan tugas *(Segregation of Duties/SoD)* yang efektif dalam sistem SAP. *Handbook* ERP juga disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara proses bisnis dan teknologi pada tingkat strategis serta didukung dengan instruksi kerja khusus untuk pengelolaan jasa konstruksi dengan ERP.

Tiap-tiap jabatan di dalam Perseroan melaksanakan sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian keuangan dan operasional dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap terintegrasi pada setiap level entitas. Berikut penjelasannya:

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan sistem pengendalian internal Perseroan yang ditetapkan Direksi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum dan memberikan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kecukupan sistem pengendalian internal Perseroan.

Direksi

Direksi berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan dan memelihara kebijakan sistem pengendalian internal Perseroan, berdasarkan prinsip kehati-hatian, memantau kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan serta memastikan bahwa sistem pengendalian internal tersebut berjalan dengan tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien dan konsisten untuk mencapai tujuan Perseroan. Manajemen Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan di level manajemen, sesuai dengan fungsi masing-masing dengan cara mengembangkan dan memelihara pengendalian Intern yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pengelolaan Perseroan.

Komite Audit

Sebagai organ yang membantu Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian

procedures that regulate the organizational structure and functional tasks, as well as information security policies (ISMS) and cyber incident management procedures to protect against threats and disruptions. IT operational management is also strengthened by procedures related to planning, changes, projects, services, third parties, development, releases, and IT service portfolios in a comprehensive and documented manner.

4. Through the User Access Matrix and ERP Access Rights Management Work Instructions, the company ensures effective separation of duties (Segregation of Duties/SoD) in the SAP system. The ERP Handbook is also prepared to describe the relationship between business processes and technology at a strategic level and is supported by specific work instructions for managing construction services with ERP.

Each position within the Company implements the internal control system, which includes financial and operational controls, with different responsibilities. However, its implementation remains integrated at every level of the entity. Below are the explanations:

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for evaluating the Company's internal control system policies established by the Board of Directors, supervising the overall implementation of internal control, and providing direction to the Board of Directors to improve the adequacy of the Company's internal control system.

Board of Directors

The Board of Directors actively works to prevent irregularities by establishing and maintaining the Company's internal control policies based on prudence principles. They monitor the adequacy and effectiveness of the internal control system and ensure that it functions effectively, efficiently, and consistently to achieve the Company's objectives. Internal Control System Management is carried out at the management level, in accordance with each function, by developing and maintaining an integrated internal control system that is an inseparable part of the overall corporate management process.

Audit Committee

As an entity assisting the Board of Commissioners, the Audit Committee is responsible for evaluating the effectiveness of the Company's internal

internal Perseroan dengan mengevaluasi laporan kegiatan audit Internal dan pemantauan proses audit laporan keuangan oleh auditor eksternal. Kemudian, evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan *(internal Control over financial reporting).*

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

SPI mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan serta berperan aktif dalam meningkatkan sistem pengendalian internal Perseroan secara berkesinambungan dengan cara memberikan saran mengenai perbaikan terhadap penerapan pengendalian internal Perseroan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pegawai

Setiap pegawai di lingkungan Hutama Karya wajib memahami dan melaksanakan pengendalian internal yang telah ditetapkan.

Manajemen Risiko

Fungsi Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab untuk menyusun profil risiko termasuk cara memitigasi serta pengendalian internal agar dapat dijadikan acuan bagi seluruh personel Perseroan.

PENGENDALIAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi beserta jajaran manajemen dan unit-unit kerja di bawah Direksi melakukan *monitoring* berkala terhadap kesesuaian pengelolaan operasional dan bisnis perusahaan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja terhadap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan batas toleransi risiko yang dapat diterima perusahaan.

KAP Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (PwC Indonesia) sebagai auditor independen melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan perusahaan terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Hasil pengujian menunjukkan berdasarkan unsur-unsur yang diuji, perusahaan mematuhi hal-hal material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan.

control system by assessing internal audit reports and monitoring the external audit process of financial statements. Additionally, it evaluates the implementation of internal control over financial reporting.

Internal Audit Unit (SPI)

The Internal Audit Unit (SPI) evaluates the adequacy and effectiveness of internal control implementation and actively contributes to improving the Company's internal control system continuously. It does so by providing recommendations for improvements to enhance the effectiveness of internal control implementation and achieve the Company's objectives.

Employees

Every employee at Hutama Karya is required to understand and implement the established internal control measures.

Risk Management

The Risk Management function has the responsibility to develop a risk profile including ways to mitigate and internal controls so that it can be used as a reference for all Company personnel.

COMPLIANCE CONTROL WITH OTHER LAWS AND REGULATIONS

To enhance the Company's compliance with applicable laws and regulations, the Board of Directors, along with management and work units under the Board of Directors, conduct periodic monitoring to ensure that the Company's operational and business management aligns with applicable laws and regulations while considering the Company's acceptable risk tolerance levels.

KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PwC Indonesia), as an independent auditor, performs tests on the Company's compliance with specific legal provisions, regulations, contracts, and assistance requirements to ensure that the consolidated financial statements are free from material misstatements. The test results indicate that, based on the elements examined, the Company complies with material aspects, specific legal provisions, regulations, contracts, and assistance requirements.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*INFORMATION AND COMMUNCATION*)

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi.

Ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu:

1. Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
2. Perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
3. Perusahaan berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi berkelanjutan adalah bagian dari proses bisnis dan memberikan informasi secara tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan Dewan Direksi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilakukan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap

INFORMATION AND COMMUNICATION

Information is crucial for every entity in executing internal control responsibilities to support the achievement of objectives. Management requires relevant and high-quality information from both internal and external sources, which is used to support other internal control components. Information is obtained or generated through a continuous, repetitive, and shared communication process between internal and external parties.

Three key principles that support the information and communication component in internal control:

1. The Company obtains, generates, and utilizes high-quality and relevant information to support internal control functions.
2. The Company internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control, to ensure effective internal control functions.
3. The Company communicates with external parties regarding matters that impact the internal control function.

MONITORING AND EVALUTION

Monitoring activities involve ongoing, separate, or combined evaluations to ensure that each of the five internal control components is present and functioning within the organization. Continuous evaluation is part of the business process and provides timely information. Separate evaluations are conducted periodically, with scope and frequency varying based on risk assessments, the effectiveness of ongoing evaluations, and management considerations. Findings from monitoring are assessed against criteria established by policymakers, recognized standards, or management and the Board of Directors. Any deficiencies identified are communicated to management and the Board of Directors.

Monitoring activities include assessing the quality of internal control performance over time to ensure that all processes are operating as intended and are adjusted to changes in circumstances. Monitoring should be performed by personnel responsible for such tasks, both during the design and operation of internal controls, at appropriate times, to

desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik.

KESESUAIAN DENGAN *COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TRADEWAY COMMISSION* (COSO)

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu pada COSO *Internal Control-Integrated Framework,* yaitu kerangka konseptual pengendalian internal COSO yang merupakan kerangka kerja komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal. Implementasi dalam Perseroan, meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian *(Control Environment);*
   a. Perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai etika dan insan perusahaan memahami aturan perilaku.
      i. Penerbitan buku Kode Etik Perseroan sebagai pedoman pelaksanaan etika bisnis yang harus dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan.
      ii. Penetapan Piagam Komite Audit yang selalu diperbaharui secara berkala.
      iii. Pengesahan Program Kerja Tahunan Komite Audit oleh Dewan Komisaris.
      iv. Penetapan Piagam Audit Internal dan Piagam Audit Terintegrasi sebagai pedoman Satuan Pengawasan Intern serta Satuan Pengawasan Intern Anak dan afiliasi.
      v. Penetapan target kinerja dan program kerja pada setiap unit kerja Perseroan.
   b. Dewan Komisaris telah menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan fungsi pengawasan dalam pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern.
   c. Direksi telah menetapkan struktur organisasi, alur pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab.
   d. Perusahaan telah memiliki komitmen untuk menarik minat, mengembangkan, dan

determine whether internal control is functioning as expected and whether it has been adapted to evolving conditions.

In summary, monitoring is conducted to provide assurance on whether internal controls are adequately implemented. The results of monitoring help identify weaknesses and deficiencies in controls, allowing for proposals for improvement.

COMPLIANCE WITH THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO)

The Company's Internal Control System adheres to the COSO Internal Control Integrated Framework., the COSO internal control conceptual framework is a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control. Its implementation in the Company includes:

1. Control Environment;
   a. The Company has demonstrated a commitment to integrity and ethical values, and all personnel understand the code of conduct.
      i. Publication of the Company Code of Ethics as a guideline for business ethics that must be adhered to by all Company personnel.
      ii. Establishment of the Audit Committee Charter, which is regularly updated.
      iii. Approval of the Audit Committee's Annual Work Program by the Board of Commissioners.
      iv. Establishment of the Internal Audit Charter and Integrated Audit Charter as guidelines for the Internal Audit Unit and Internal Audit Units of Subsidiaries and Affiliates.
      v. Setting performance targets and work programs for each Company work unit.
   b. The Board of Commissioners has demonstrated independence from management and exercises oversight functions in the development and implementation of internal control.
   c. The Board of Directors has established the organizational structure, reporting lines, and authority and responsibilities.
   d. The Company has demonstrated commitment to attracting, developing, and

mempertahankan individu-individu yang kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

i. Penerapan kebijakan serta prosedur terkait SDM sejak dari seleksi rekrutmen, pengembangan karier, pelatihan sampai dengan pemberhentian dalam bentuk SOP.
ii. Direksi fokus dan memberikan perhatian terhadap pembinaan karyawan antara lain dengan program pemberian beasiswa S2 dalam dan luar negeri untuk para karyawan.
iii. Program sertifikasi dan pelatihan audit pada setiap auditor termasuk workshop dan seminar terkait dengan profesi auditor.

e. Direksi berkomitmen mendukung terhadap pelaksanaan pengendalian internal yang efektif
   i. Direksi memberikan respons yang positif pada setiap pelaporan yang menyangkut keuangan maupun operasional lainnya.
   ii. Direksi membuka komunikasi dengan para *Executive Vice President* setiap seminggu sekali melalui forum rapat koordinasi Direksi.
f. Struktur organisasi yang mendukung terciptanya pengendalian internal yang efektif
   i. Setelah melalui evaluasi yang mendalam terkait dengan lingkungan strategis Perseroan maka dibentuk struktur organisasi yang baru guna memenuhi tantangan Perseroan di masa mendatang.
   ii. Perubahan struktur organisasi juga diikuti dengan penetapan jumlah pegawai yang kompeten berdasarkan *work load analysis.*
g. Para *Executive Vice President, Vice President,* dan karyawan diberi kewenangan dan tanggung jawab yang memadai
   i. Penetapan tanggung jawab serta wewenang yang melekat dalam setiap jabatan tertentu, meliputi tanggung jawab utama, tanggung jawab umum serta wewenang yang diberikan dalam pencapaian tujuan unit kerja dan Perseroan.
   ii. Tanggung jawab dan wewenang setiap level jabatan sebagai bentuk pendelegasian level di atasnya kepada level di bawahnya.

2. Penilaian Risiko *(Risk Assessment);*
   a. Menetapkan secara spesifik tujuan Perseroan. Perusahaan telah menetapkan tujuan dengan cukup jelas sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan pengukuran risiko, dan tujuan perusahaan telah di-*cascading*

retaining competent individuals to support corporate goal achievement.

i. Implementation of HR policies and procedures covering recruitment, career development, training, and termination through Standard Operating Procedures (SOPs).
ii. The Board of Directors focuses on employee development, including providing Master's degree scholarships (domestic and international) for employees.
iii. Certification and training programs for auditors, including workshops and seminars related to the auditing profession.

e. The Board of Directors is committed to supporting the effective implementation of internal control.
   i. The Board of Directors responds positively to all financial and operational reports.
   ii. The Board of Directors maintains weekly communication with Executive Vice Presidents through coordination meetings.
f. An organizational structure that supports the creation of effective internal control.
   i. Following a thorough evaluation of the Company's strategic environment, a new organizational structure was established to meet future challenges.
   ii. Changes in organizational structure are also accompanied by the determination of the number of competent employees based on workload analysis.
g. Executive Vice Presidents, Vice Presidents, and employees are given adequate authority and responsibilities.
   i. Defining responsibilities and authority for each specific position, including primary responsibilities, general responsibilities, and delegated authority to achieve the Company's and work unit's objectives.
   ii. Responsibilities and authority at each job level are structured as delegations from higher to lower levels.

2. Risk Assessment;
   a. Establishing the Company's Specific Objectives. The Company has clearly defined its objectives, enabling the identification and measurement of risks. These objectives have been cascaded down to the operational

sampai level operasional serta Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pelaporan Non Keuangan untuk pihak eksternal.

i. Penetapan itu dimanifestasikan dalam bentuk misi Perseroan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan. Seluruh *Executive Vice President* dilibatkan dalam penyusunan RKAP sekaligus menetapkan ukuran kinerja untuk setiap level unit kerja dari Direksi hingga manajer dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI).

ii. Tujuan dan sasaran tingkat divisi dan anak Perseroan ditetapkan selaras dengan RKAP, termasuk target dan sasaran kinerja selama satu tahun di dalamnya. Review terhadap pencapaian kinerja setiap divisi dilaksanakan setiap triwulan sekali bersama dengan Direksi.

b. Identifikasi risiko, mitigasi risiko serta pemantauan risiko setiap unit kerja dari tingkat korporasi hingga ke tingkat kegiatan proyek, dilakukan dengan menyusun lembar manajemen risiko yang berisi identifikasi risiko, rencana mitigasi sampai tingkat risiko yang diterima serta pemantauan risiko secara berkala. Penyusunan lembar manajemen risiko berdasarkan prosedur manajemen risiko Nomor: MR/CP/P/001 Revisi 3 yang telah diperbarui tanggal 27 Desember 2024.

c. Perusahaan telah melakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan potensi risiko kecurangan *(fraud)* yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan.

d. Perusahaan memiliki mekanisme *whistleblowing system* melalui portal Perseroan untuk mengurangi risiko kecurangan *(fraud).*

3. Kegiatan Pengendalian *(Control Activities);*

a. Perusahaan telah memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.

i. Sistem Informasi yang terkendali Perseroan menetapkan dan terus mengembangkan Master Plan Sistem dan Arsitektur IT Perseroan yang mendukung pencapaian Visi Perseroan

b. Perusahaan telah mendefinisikan dan menjabarkan aktivitas pengendalian dalam bentuk kebijakan dan prosedur, dan dalam pelaksanaannya seluruh unit kerja mengacu pada Prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.

i. Setiap unit kerja secara berkala me-*review business process* secara internal berikut dengan mekanisme pengendalian yang diperlukan.

level, and the Company has established a Non-Financial Reporting Policy for external stakeholders.

i. This establishment is manifested in the Company's mission, which is outlined in the Annual Corporate Work Plan and Budget (RKAP). All Executive Vice Presidents are involved in the preparation of the RKAP while also setting performance metrics at every level, from the Board of Directors to managers, in the form of Key Performance Indicators (KPI).

ii. The objectives and targets at the division and subsidiary levels are aligned with the RKAP, including one-year performance targets and goals. Performance reviews for each division are conducted quarterly with the Board of Directors.

b. Each work unit, from the corporate level to project activities, identifies, mitigates, and monitors risks by preparing a risk management sheet, which includes risk identification, mitigation plans, and acceptable risk levels, along with regular risk monitoring. The risk management sheet is developed based on Risk Management Procedure No. MR/CP/P/001 Revision 3, which was updated on December 27, 2024.

c. The Company has conducted risk assessments considering the potential risks of fraud that may impact goal achievement.

d. The Company has implemented a whistleblowing system (WBS) through its corporate portal to mitigate fraud risks.

3. Control Activities;

a. The Company has selected and developed general IT controls to support goal achievement.

i. Controlled Information Systems – The Company has established and continues to develop its IT System and Architecture Master Plan, which supports the Company's Vision.

b. The Company has defined and outlined control activities in the form of policies and procedures, and all work units adhere to these established procedures.

i. Each work unit periodically reviews internal business processes, including necessary control mechanisms.

ii. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai. Setiap divisi mengembangkan sistem prosedur yang berkaitan dengan proses bisnis yang bersangkutan dan mengikat kepada seluruh unit kerja Perseroan. Dilakukannya review berkala terhadap prosedur untuk menyesuaikan kebutuhan Perseroan seiring dengan perubahan lingkungan strategisnya.

4. Informasi dan Komunikasi *(Information & Communication);*
   a. Perusahaan telah memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dalam rangka mendukung berfungsinya komponen lain pengendalian intern.
      i. Perseroan menerapkan sistem *whistleblowing system* untuk mendukung kebijakan anti fraud dan gratifikasi.
      ii. Mendistribusi informasi yang penting dan berguna bagi perseroan Perseroan memiliki portal website www.hutamakarya.com yang memuat informasi mengenai Perseroan, di antaranya update informasi kegiatan Perseroan, Visi Misi Perseroan, Annual Report Perseroan dan informasi lain, yang terkait dengan kebijakan Perseroan.
   b. Perusahaan telah mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan, peran dan tanggungjawab pengendalian intern dalam rangka mendukung berfungsinya komponen lain pengendalian intern.
   c. Perusahaan telah berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal-hal yang mempengaruhi pengendalian internal. Komunikasi eksternal Dalam halnya implementasi komunikasi eksternal,

   Perseroan selalu menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan masukan dari auditor/ pengawas eksternal.

5. Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring).
   a. Perusahaan telah memiliki, mengembangkan dan melakukan evaluasi terpisah, untuk memastikan apakah komponen Sistem

ii. Developing adequate policies and procedures – Each division develops procedural systems related to its business processes, which apply to all Company work units. Periodic procedure reviews are conducted to align with the Company's strategic environmental changes.

4. Information and Communication;
   a. The Company has obtained and utilized high-quality and relevant information to support the proper functioning of other internal control components.
      i. The Company implements a whistleblowing system to support its anti-fraud and anti-gratification policies.
      ii. Distribution of important and useful information – The Company maintains the official website www.hutamakarya.com , which provides information about the Company, including updates on corporate activities, vision and mission, annual reports, and other relevant policies.
   b. The Company has communicated information, including objectives, roles, and responsibilities of internal control, to support the effective operation of other internal control components.
   c. The company has communicated with external parties regarding matters affecting internal control. External communication in the case of the implementation of external communication,

   The Company actively follows up on all recommendations and feedback from external auditors and supervisors.

5. Monitoring and Evaluation
   a. The Company has developed and conducted separate evaluations to ensure that internal

Pengendalian Intern ada dan berfungsi, namun perusahaan belum memiliki pedoman evaluasi berkelanjutan.

b. Perusahaan telah melakukan evaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan/ kekurangan (defisiensi) pengendalian intern secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan perbaikan, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal keuangan dan operasional. Satuan pengawasan intern bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Melalui laporan hasil audit, satuan pengawasan intern menyajikan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya, menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit dan melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. Kemudian berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI tahun 2024, SPI telah melakukan evaluasi pengendalian internal. Hasil evaluasi selama tahun 2024 diperoleh bahwa manajemen telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan Standar yang ditetapkan Perusahaan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit melakukan telaah secara tahunan atas penerapan sistem pengendalian internal Perseroan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa selama tahun 2024 sistem pengendalian internal Perseroan telah berjalan dengan efektif dan memadai. Perseroan terus menerapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan, transparansi, serta kepatuhan dalam setiap aspek operasionalnya.

control components exist and function properly. However, the Company has not yet established continuous evaluation guidelines.

b. The Company evaluates and communicates weaknesses/deficiencies in internal control in a timely manner to the responsible parties, including the Board of Directors and the Board of Commissioners, for corrective actions.

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

The Company periodically evaluates the effectiveness of its financial and operational internal control system. The Internal Audit Unit is responsible for evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, control, and governance processes in accordance with laws, regulations, and corporate policies. Through audit reports, the Internal Audit Unit provides recommendations for improvements, which are then followed up and monitored for implementation. The audit findings are reported to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee), with significant findings being escalated to the President Director and Board of Commissioners for immediate corrective action. Additionally, based on the 2024 Annual Audit Work Program (PKPT), the Internal Audit Unit (SPI) has conducted an internal control evaluation. The evaluation results for 2024 indicate that management has implemented an adequate internal control system in accordance with the Company's established standards.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee conduct an annual review of the Company's internal control system implementation. The evaluation results show that during the year 2024 the Company's internal control system has been effectively and adequately Implemented. The Company continues to adopt strategic measures to ensure security, transparency, and compliance in all operational aspects.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko Perusahaan merupakan proses yang berlangsung dan berulang terus-menerus yang terdiri atas:

PROSES AWAL

Proses awal manajemen risiko terdiri dari:

1. Komunikasi dan Konsultasi
   Komunikasi dan konsultasi sebagai proses penunjang yang mendukung setiap proses manajemen risiko termasuk di dalam proses awal. Perusahaan harus terus menerus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan (*key stakeholders*) yakni terutama Pemegang Saham, pengguna jasa/produk Perusahaan, serikat pekerja, mitra kerja, pemerintah, media masa dan media sosial, asosiasi terkait, masyarakat sekitar, dan organisasi kemasyarakatan yang berkepentingan. Komunikasi dan konsultasi ini dimaksudkan untuk memahami dan memetakan kepentingan dari masing-masing pihak terhadap Perusahaan, pengaruh (power and influence) yang mereka miliki, sifat hubungan antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan tersebut dan dampaknya bagi Perusahaan.
2. Proses Perencanaan Manajemen Risiko
   a. Taksonomi Risiko Perusahaan (Kategori Risiko & Jenis Risiko)
      Kategori Risiko terdiri atas:
      i. Risiko Korporat dan Portofolio Bisnis: Risiko strategis/risiko jangka panjang perusahaan terkait arah strategik perusahaan, pengambilan keputusan investasi (*Merger & Acquisition, Joint Venture, Joint Operation*, dan lainnya), perikatan kerjasama, restrukturisasi dan transformasi bisnis dan organisasi HK terkait dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan seluruh risiko terkait dengan berbagai *Strategic Business Units* (SBU), kinerja Anak Perusahaan, dan kerjasama yang mengikat perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
      ii. Risiko Operasional: Risiko operasional (termasuk risiko proyek) yang dijalankan oleh berbagai unit kerja terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan pencapaian target-target KPI, baik untuk kegiatan operasional/kegiatan proyek rutin.

RISK MANAGEMENT PROCESS

The Company's Risk Management Process is an ongoing and continuous process, consisting of:

INITIAL PROCESS

The initial risk management process includes:

1. Communication and Consultation
   Communication and consultation serve as supporting processes that enhance every stage of risk management, including the initial phase. The Company must continuously communicate and consult with all key stakeholders, including shareholders, service/product users, labor unions, business partners, government agencies, mass media and social media, relevant associations, surrounding communities, and concerned organizations. The purpose of communication and consultation is to understand and map the interests of each stakeholder in relation to the Company, their power and influence, the nature of the relationship between the Company and these stakeholders, and the potential impact on the Company.
2. Risk Management Planning Process
   a. Company Risk Taxonomy (Risk Categories & Types of Risk)
      The Risk Categories include:
      i. Corporate and Business Portfolio Risk: Covers strategic/long-term risks related to the Company's strategic direction, investment decisions (Merger & Acquisition, Joint Venture, Joint Operation, etc.), partnerships, business and organizational restructuring and transformation, all aligned with the Company's Long-Term Plan (RJPP). It also includes risks associated with Strategic Business Units (SBU), subsidiary performance, and long-term corporate commitments.
      ii. Operational Risk: Includes operational risks (including project risks) within various work units, related to the execution of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the achievement of KPI targets, whether for routine operational activities or project activities.

iii. Risiko Finansial: Seluruh risiko yang disebabkan oleh aktivitas keuangan dan berdampak terhadap kondisi kesehatan keuangan Perusahaan, mencakup risiko pasar, risiko investasi, risiko likuiditas, dan risiko kewajiban finansial perusahaan.

b. Strategi Risiko
Perusahaan wajib menyusun Strategi Risiko sebelum menyusun rencana strategi bisnis. Penyusunan Strategi Risiko Perusahaan mempertimbangkan:
i. *Risk Appetite Statement* (RAS);
ii. *Core competence* perusahaan;
iii. Outlook industri dan *positioning* Perusahaan pada industri;
iv. Kondisi Perusahaan pada tahun berjalan dalam survival mode (kontraksi), *business as usual,* atau *expansion mode;*
v. Cakupan waktu penetapan target Perusahaan dalam RJPP atau RKAP; dan
vi. Kapasitas Risiko Perusahaan.

c. Strategi Risiko Perusahaan terdiri dari:
i. Pernyataan selera Risiko (Risk Appetite Statement/RAS) Perusahaan dengan memperhatikan selera Risiko Kementerian BUMN.
ii. Nilai ambang Risiko di level enterprise korporat yang memuat risk capacity, risk appetite, risk tolerance, dan risk limit.
iii. Metrik strategi Risiko.

d. Perusahaan menggunakan 4 (empat) Sikap Terhadap Risiko sebagaimana ketentuan pada dalam penentuan *Risk Appetite Statement* (RAS).
i. Tidak Toleran, yaitu:
- Sangat berhati-hati dalam mengambil Risiko dan lebih memilih menjaga stabilitas dan konsistensi dalam operasi bisnis.
- Keputusan bisnis yang didasarkan pada pemeliharaan modal.

ii. Konservatif, yaitu:
- Berhati-hati dalam mengambil Risiko, dengan memilih beberapa Risiko yang terkendali tetapi tetap memprioritaskan kestabilan usaha.
- Keputusan bisnis didasarkan pada upaya untuk melindingi nilai dari Risiko besar yang tidak terduga termasuk didalamnya menghindari paparan terhadap fluktuasi yang signifikan serta dapat menanggung beban yang kecil.

iii. Moderat, yaitu:
- Bersedia mengambil Risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan pelindungan terhadap kerugian besar.

iii. Financial Risk: Encompasses all risks arising from financial activities, which impact the Company's financial health, including market risk, investment risk, liquidity risk, and financial obligation risk.

b. Risk Strategy
The Company must develop a Risk Strategy before formulating its business strategy plan. The preparation of the Company's Risk Strategy considers:
i. Risk Appetite Statement (RAS);
ii. Company's core competencies;
iii. Industry outlook and the Company's position within the industry;
iv. Current Company condition (whether in survival mode (contraction), business as usual, or expansion mode);
v. Timeframe for achieving corporate targets within the RJPP or RKAP; and
vi. Company's risk capacity.

c. The Company's Risk Strategy consists of:
i. The Company's Risk Appetite Statement (RAS), taking into account the risk appetite set by the Ministry of SOEs.

ii. Enterprise-level corporate risk thresholds, which include risk capacity, risk appetite, risk tolerance, and risk limits.

d. Risk strategy metrics.
The Company applies four (4) Risk Attitudes when determining the Risk Appetite Statement (RAS):
i. Intolerant:
- Extremely cautious in taking risks and prioritizing stability and operational consistency.

- Business decisions are based on capital preservation

ii. Conservative:
- Cautious in taking risks, choosing manageable risks while still prioritizing business stability.

- Business decisions focus on protecting value from unexpected major risks, including avoiding exposure to significant fluctuations and only taking small, manageable burdens.

iii. Moderate:
- Willing to take risks within a defined limit to achieve growth and profit, while still ensuring protection against major losses.

- Keputusan bisnis mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak Risiko secara bersamaan dan dapat menanggung beban yang sedang.

iv. Strategis, yaitu:
- Secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan Risiko sebagai bagian integral dan rencana bisnis, mengambil Risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan inovasi uang lebih besar.
- Keputusan bisnis didasarkan pada analisis Risiko dan potensi pengembalian investasi panjang serta dapat menanggung beban yang besar.

e. Perusahaan wajib melakukan perhitungan nilai ambang Risiko di level enterprise/ korporat secara handal dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan nilai yang paling optimal bagi Perusahaan dengan ketentuan antara lain:

- Business decisions balance growth opportunities with risk impact and can bear moderate levels of risk.

iv. Strategic:
- Actively applies risk management as an integral part of business planning, taking higher risks to achieve greater growth and innovation.

- Business decisions are based on risk analysis and potential long-term investment returns, with the capacity to bear significant levels of risk.

e. The Company must conduct a reliable and accountable calculation of enterprise/ corporate risk thresholds, ensuring optimal value for the Company while complying with specific requirements, including:

No.	Ambang Batas Risiko Risk Threshold	Keterangan Description
1	Kapasitas Risiko (Risk Capacity)	Kapasitas Risiko dihitung dalam satuan moneter dengan menggunakan pendekatan *Retained Earnings, Net Profit After Tax* (NPAT), ekuitas atau *Net Working Capital* (NWC), Kewajiban Penyediaan *Modal Minimum* (KPMM), *standby loan,* atau kemampuan lain yang disesuaikan dengan kondisi Perusahaan. Risk capacity is calculated in monetary units using approaches such as Retained Earnings, Net Profit After Tax (NPAT), Equity, Net Working Capital (NWC), Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM), standby loans, or other measures adjusted to the Company's financial condition.
2	Selera Risiko (Risk Appetite)	Selera Risiko dihitung dalam satuan moneter dengan mempertimbangkan data, diantaranya: • Data historis *(loss event database* minimal 3 (tiga) tahun terakhir); dan/ atau • Data lain yang relevan (bersifat *backward* atau *forward looking).* • Perhitungan Selera Risiko dengan menggunakan data historis dilakukan dengan melihat nilai Risiko Residual dari Risiko Utama dibandingkan dengan Kapasitas Risiko maupun rencana bisnis ke depan. • Pengambilan Selera Risiko disesuaikan dengan kebijakan Perusahaan berdasarkan tantangan bisnis ke depan apakah ekspansif atau kontraksi dengan pertimbangan Kapasitas Risiko yang dimiliki Perusahaan. Risk Appetite is calculated in monetary units, taking into account the following data: • Historical data (loss event database for at least the last three (3) years); and/or • Other relevant data (either backward- or forward-looking). • Risk Appetite Calculation using historical data is performed by comparing the Residual Risk value of key risks with Risk Capacity and future business plans. • Risk Appetite determination is aligned with the Company's policies, considering future business challenges, whether expansive or contractionary, in relation to the Company's Risk Capacity.
3	Toleransi Risiko (Risk Tolerance)	Toleransi Risiko dihitung dalam satuan moneter yang disesuaikan dengan kebijakan Selera Risiko Perusahaan dan kebijakan dalam menjawab tantangan bisnis ke depan. Nilai ini lebih besar dari nilai Selera Risiko. Risk Tolerance is calculated in monetary units, aligned with the Company's Risk Appetite Policy and business strategy to address future challenges. This value is greater than the Risk Appetite value.

No.	Ambang Batas Risiko Risk Threshold	Keterangan Description
4	Batasan Risiko (Risk Limit)	• Batasan Risiko dihitung dalam satuan moneter dan didistribusikan kepada seluruh pemilik Risiko di Induk dan Anak Perusahaan dimana total Batasan Risiko tidak boleh melebihi Toleransi Risiko. • Nilai Batasan Risiko dijadikan sebagai acuan pengelolaan Risiko dan target Risiko Residual di Induk dan Anak Perusahaan. • Metode perhitungan Batasan Risiko dapat menggunakan Regresi Logistik, *Exponentially Weighted Moving Average* (EWMA), atau metode lain mengacu pada data historis Perusahaan atau proyeksi yang diterbitkan oleh pihak ketiga/ahli yang kompeten. • Risk Limits are calculated in monetary units and distributed to all Risk Owners at the Parent Company and Subsidiaries, ensuring that the total Risk Limits do not exceed Risk Tolerance. • Risk Limits serve as a reference for risk management and as the target Residual Risk level at the Parent Company and Subsidiaries. • Risk Limit calculation methods may include Logistic Regression, Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), or other methods based on the Company's historical data or projections issued by competent third parties or experts.

f. Penyusunan metrik strategi Risiko memuat paling sedikit:
   i. Kategori Risiko
   ii. Sikap terhadap Risiko
   iii. Parameter dan satuan ukur
   iv. Nilai batasan/limit.
g. Total nilai batasan/limit dalam metrik strategi Risiko secara kuantifikasi tidak boleh melebihi nilai batasan Risiko *(risk limit)* di level enterprise/korporat.
h. Metrik strategi Risiko wajib digunakan sebagai dasar dalam menetapkan berbagai pilihan sasaran dan strategi yang akan menjadi usulan dalam rancangan RKAP.
i. Strategi Risiko Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum dijadikan sebagai pedoman Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam penyusunan strategi bisnis baik RJPP ataupun RKAP.

3. Penetapan Rencana Sasaran
   a. Sasaran Perusahaan disusun berbasis Manajemen Risiko, dengan ketetntuan sebagai berikut:
      i. Pilihan berbagai sasaran dan strategi bisnis diputuskan berdasarkan pertimbangan antara Risiko yang telah ditetapkan dengan hasil yang diharapan dapat diperoleh perusahaan.
      ii. Pertimbangan Risiko yang dapat diterima mengikuti acuan strategi risiko yang telah ditetapkan
      iii. Target yang diusulkan dalam rancangan perencanaan strategis.
   b. Sasaran Usaha
      i. Sasaran Usaha disusun secara spesifik, dapat diukur, jelas jangka waktunya serta secara rasional dapat dilaksanakan/ dicapai.
      ii. Dalam penyusunan sasaran usaha, Perusahaan wajib berpedoman pada

f. The Risk Strategy Metrics must include at least the following:
   i. Risk Categories
   ii. Risk Attitude
   iii. Parameters and Measurement Units
   iv. Risk Limits/Threshold Values
g. The total quantified risk limit value within the Risk Strategy Metrics must not exceed the enterprise/corporate risk limit.
h. The Risk Strategy Metrics must serve as the foundation for setting various target and strategy options, which will be proposed in the RKAP (Corporate Work Plan and Budget) draft.
i. The Company's Risk Strategy must be approved by the Board of Commissioners before being used as a guideline for the Company and its subsidiaries in business strategy planning, whether in the RJPP (Long-Term Corporate Plan) or RKAP.

3. Establishment of Target Plans
   a. Corporate Targets must be formulated based on Risk Management, with the following provisions:
      i. Business target and strategy options must be decided by considering the predefined risks and the expected outcomes for the Company.
      ii. Acceptable risk considerations must follow the established risk strategy guidelines.
      iii. Proposed targets must be included in the strategic planning draft.
   b. Business Targets
      i. Business targets must be specific, measurable, time-bound, and realistically achievable.
      ii. The Company must align its business targets with the primary objectives set by

sasaran utama Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

iii. Sasaran Usaha Perusahaan juga harus berpedoman pada Aspirasi Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

iv. Keputusan pemilihan sasaran didasarkan antara Risiko *(risk)* dengan imbal hasil *(return)* sesuai dengan penerimaan Risiko perusahaan sebagaimana strategi Risiko yang ditetapkan.

c. Strategi Usaha

i. Strategi usaha disusun sebagai langkah yang ditempuh untuk mencapai atau merealisasikan sasaran usaha perusahaan.

ii. Kelayakan suatu strategi yang akan digunakan dalam merealisasikan suatu sasaran usaha yang hendak dicapai, dilakukan penilaian berdasarkan Metrik Strategi Risiko.

iii. Untuk menjalankan strategi usaha yang telah dinilai layak berdasarkan strategi risiko dijabarkan dalam program kegiatan perusahaan berdasarkan bidang kegiatan yang tidak terbatas pada kegiatan pemasaran dan penjualan, pengadaan, produksi dan kualitas produk, teknis dan teknologi, keuangan dan akuntansi, sistem dan organisasi, pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, pelestarian lingkungan, investasi, atau kegiatan lainnya.

d. Strategi Usaha Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Proyeksi Laporan Keuangan

i. Perencanaan atas sasaran dan strategi termasuk meliputi pengalokasian anggaran pendapatan dan biaya serta proyeksi laporan keuangan.

ii. Penyusunan aggaran pendapatan harus selaras dengan sasaran dan strategi yang telah disesuaikan dengan strategi risiko.

iii. Pengalokasian anggaran pendapat dan biaya serta proyeksi laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan yang berlaku.

e. Perencanaan Audit

i. Dalam rancangan RKAP wajib dilengkapi dengan perencanaan Audit Intern sebagai bagian dari bab Manajemen Risiko.

ii. Ketentuan Perencanaan Audit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Perencanaan Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rancangan RKAP wajib dilengkapi dengan rencana pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

the Indonesian Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).

iii. The Company's business targets must also adhere to the Shareholder Aspirations issued by the Minister of State-Owned Enterprises of Indonesia.

iv. The selection of business targets must be based on a risk-return assessment, in line with the Company's established risk strategy.

c. Business Strategy

i. The business strategy outlines the steps required to achieve or realize the Company's business targets.

ii. The feasibility of any strategy used to achieve a business target must be assessed based on the Risk Strategy Metrics.

iii. To implement a viable business strategy based on risk strategy, it must be detailed in corporate activity programs, covering various operational areas such as marketing and sales, procurement, production and product quality, technical and technology, finance and accounting, systems and organization, human resource development, research and development, environmental sustainability, investment, and other activities.

d. Business Strategy for Budget Allocation and Financial Projections

i. Target and strategy planning must include budget allocation for revenue and expenses, as well as financial projections.

ii. Revenue budget preparation must align with the set targets and strategies, ensuring consistency with the risk strategy.

iii. Revenue and expense budget allocation, along with financial projections, must comply with applicable regulations.

e. Audit Planning

i. The RKAP draft must include an Internal Audit Plan as part of the Risk Management chapter.

ii. The Audit Planning requirements must comply with applicable regulations.

f. Perenntegrated Governance Planning

The RKAP draft must include a plan for implementing Integrated Governance, following applicable regulations.

PROSES INTI (PENILAIAN RISIKO)

Tahapan kegiatan dalam Proses Inti atau Asesmen Risiko meliputi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko dilakukan melalui *Risk Management System* (RMS). Produk akhir dari pelaksanaan Asesmen Risiko adalah tersusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*).

1. Waktu Pelaksanaan Asesmen Risiko
   Ketentuan terkait dengan waktu pelaksanaan Asesmen Risiko adalah sebagai berikut:
   a. Asesmen Risiko Korporat
   b. Pencapaian Sasaran Rencana Perolehan Kontrak Baru
   c. Pencapaian Sasaran Proyek Baru dan Revisinya
   d. Pencapaian Sasaran Proyek Kerjasama Operasi (Joint Operation)
   e. Untuk Pencapaian Sasaran Tahunan (Sesuai RKAP)
2. Konteks Penilaian dan Waktu Pelaksanaan Penilaian Risiko
3. Identifikasi Risiko
   a. Identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing pemilik risiko selaku Lini Pertama dengan berkoordinasi atau berkonsultasi kepada fungsi Manajemen Risiko selaku Lini Kedua.
   b. Setiap sasaran dan strategi wajib dilakukan identifikasi risiko.
   c. Profil Risiko hasil identifikasi disajikan paling sedikit memuat:
      i. Sasaran
      ii. Strategi
      iii. Taksonomi risiko
      iv. Peristiwa Risiko
      v. Penyebab Risiko
      vi. *Key Risk Indicator* (KRI)
      vii. Treshold KRI dalam 3 (tiga) kategori yaitu batas bahaya, batas hati-hati dan batas aman sebagai *early warning signal*
      viii. Kontrol saat ini (existing control) dan penilaian efektivitas kontrol
      ix. Dampak risiko
      x. Perkiraan waktu terjadinya eksposur risiko
   d. Identifikasi risiko mencakup risiko-risiko yang berasal dari sumber internal atau dari dalam, maupun yang berasal dari sumber eksternal atau dari luar Perusahaan.
   e. Identifikasi risiko perlu dilakukan atas dan terkait dengan perubahan faktor-faktor eksternal sebagaimana diatur dalam Manual Sistem Manajemen Risiko Perusahaan mencakup faktor Politik (*Politic*), Ekonomi (*Economic*), Social (*Social*), Teknologi (*Technology*), Legal (*Legal*) dan Lingkungan (*Environment*) dengan mengkaji dampak potensial perubahan faktor-faktor di atas terhadap perusahaan.

CORE PROCESS (RISK ASSESSMENT)

The Core Process or Risk Assessment includes Risk Identification, Risk Analysis, and Risk Evaluation, which are conducted through the Risk Management System (RMS). The final output of the Risk Assessment is the development of a Risk Register.

1. Timing of Risk Assessment Implementation
   The guidelines for conducting Risk Assessment are as follows:
   a. Corporate Risk Assessment
   b. Achievement of New Contract Acquisition Targets
   c. Achievement of New Project Targets and Their Revisions
   d. Achievement of Joint Operation Project Targets
   e. Annual Target Achievement (According to RKAP)
2. Context and Timing of Risk Assessment Implementation
3. Risk Identification
   a. Risk identification is carried out by each risk owner (First Line of Defense) in coordination or consultation with the Risk Management function (Second Line of Defense).
   b. All objectives and strategies must undergo risk identification.
   c. The Risk Profile resulting from identification must include at least the following elements:
      i. Goals
      ii. Strategy
      iii. Risk Taxonomy
      iv. Risk Event
      v. Risk Cause
      vi. Key Risk Indicator (KRI)
      vii. KRI thresholds categorized into three levels: danger threshold, caution threshold, and safe threshold as early warning signals
      viii. Existing controls and control effectiveness assessment
      ix. Risk Impact
      x. Estimated time of risk exposure occurrence
   d. Risk identification must cover both internal and external risk sources.
   e. Risk identification needs to be carried out on and related to changes in external factors as stipulated in the Company's Risk Management System Manual including Political, Economic, Social, Technology, Legal and Environment factors by examining the potential impact of changes in the above factors on the company.

f. Identifikasi risiko perlu dilakukan atas dan terkait dengan perubahan faktor-faktor internal sebagaimana diatur dalam Manual Manajemen Risiko Perusahaan mencakup faktor kepemimpinan perusahaan (perubahan pandangan atau filosofi manajemen), manusia, aset-aset produksi, proses, teknologi, dan sistem dengan mengkaji dampak potensial perubahan faktor-faktor di atas terhadap perusahaan.
g. Pemilik Risiko *(Risk owner)* wajib mengidentifikasi potensi risiko kecurangan (*fraud*) dan memasukkannya ke dalam risk register dan melakukan pemantauan atas potensi munculnya tindak kecurangan.
h. Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi dan teknik.
i. Peristiwa risiko yang diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan Taksonomi Risiko.
j. Melakukan identifikasi terhadap peristiwa Risiko.
k. Melakukan identifikasi penyebab Risiko.
l. Identifikasi KRI.
m. Identifikasi kontrol/pengendalian yang telah ada (*control existing*).
n. Penilaian efektivitas kontrol/pengendalian
o. Dampak Risiko diidentifikasi berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu: (i) dampak kuantitatif, atau (ii) dampak kualitatif.
p. Perkiraan waktu terjadinya eksposur Risiko diidentifikasi berdasarkan waktu bagi Perusahaan akan terpapar dengan suatu Risiko.

4. Analisis Risiko (Kuantifikasi Risiko)
   a. Analisa (Kuantifikasi) Risiko dilakukan untuk menentukan Eksposur Risiko, Skala Risiko, dan Level Risiko (hasil perkalian antara nilai kemungkinan dan nilai dampak) dengan memperkirakan besarnya kemungkinan terjadi dan besarnya dampak risiko.
   b. Seluruh Risiko yang telah diidentifikasi dilakukan analisis (kuantifikasi) Risiko yang terdiri: (i) Analisis (kuantifikasi) Risiko Inheren, dan (ii) Analisis (kuantifikasi) Risiko Residual.
   c. Masing-masing Analisis (kuantifikasi) Risiko meliputi: (i) Eksposur Risiko, (ii) Skala Risiko dan (iii) Level Risiko.
   d. Perhitungan Eksposur Risiko.
   e. Perhitungan untuk menentukan nilai Dampak dan nilai Probabilitas.
   f. Perhitungan Skala Risiko.
   g. Besarnya kemungkinan risiko dan besarnya dampak risiko ditetapkan oleh para Pemimpin Unit Kerja selaku Pemilik Risiko, dan dapat diberi pertimbangan oleh unit manajemen risiko sebelum mendapatkan persetujuan Direksi.

f. Risk identification needs to be carried out on and related to changes in internal factors as stipulated in the Company's Risk Management Manual including company leadership factors (changes in management views or philosophies), people, production assets, processes, technology, and systems by examining the potential impact of changes in the above factors on the company.
g. Risk owners must identify potential fraud risks and include them in the risk register and monitor the potential for fraud.
h. Risk identification may use various information sources and techniques.
i. Identified risk events must be categorized based on Risk Taxonomy.
j. Identify risk events.
k. Identify risk causes.
l. Identify Key Risk Indicators (KRI).
m. Identify existing controls.
n. Assess the effectiveness of existing controls.
o. Risk impact must be categorized into two types: (i) quantitative impact and (ii) qualitative impact.
p. Estimated time of risk exposure must be identified based on the period in which the Company will be exposed to a risk.

4. Risk Analysis (Risk Quantification)
   a. Risk Analysis (Quantification) is conducted to determine Risk Exposure, Risk Scale, and Risk Level (calculated as the product of probability value and impact value) by estimating the likelihood of occurrence and the potential impact of the risk.
   b. All identified risks undergo risk analysis (quantification), which consists of: (i) Inherent Risk Analysis (Quantification), and (ii) Residual Risk Analysis (Quantification)
   c. Each Risk Analysis (Quantification) includes: (i) Risk Exposure, (ii) Risk Scale, and (iii) Risk Level
   d. Calculation of Risk Exposure.
   e. Calculation of Impact and Probability values.
   f. Calculation of Risk Scale.
   g. The likelihood and impact of risks are determined by the respective Work Unit Leaders (Risk Owners), with input from the risk management unit before obtaining approval from the Board of Directors.

h. Bila terkendala oleh ketidakcukupan data atau masalah lain, perkiraan tentang besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan (bila risiko terjadi) dapat ditetapkan berdasarkan estimasi subjektif yang mencerminkan tingkat keyakinan Pemilik Risiko.

i. Hasil Analisis Risiko Inheren disajikan paling sedikit memuat: (i) asumsi perhitungan dampak, (ii) nilai dampak rupiah atau mata uang fungsional pembukuan untuk Risiko Kuantitatif atau nilai skor Risiko untuk Risiko Kualitatif, (iii) skala dampak, (iv) skala probabilitas, (v) Eksposur Risiko, (vi) Skala Risiko, dan (vii) Level Risiko.

j. Hasil Analisis Risiko Residual disajikan paling sedikit memuat: (i) nilai dampak tiap triwulan, (ii) skala dampak tiap triwulan, (iii) nilai probabilitas tiap triwulan, (iv) skala probabilitas tiap triwulan, (v) Eksposur Risiko setiap triwulan untuk Risiko Kuantitatif, (vi) Skala Risiko tiap triwulan, dan (vii) Level Risiko tiap triwulan.

k. Hasil perhitungan Skala dan Level Risiko Inheren dan Risiko Residual disajikan dalam peta Risiko (*Heatmap*).

5. Evaluasi Risiko
   a. Evaluasi risiko dilakukan untuk menetapkan urutan prioritas tindak lanjut (pemberian prioritas dari segi waktu dan alokasi sumber daya). Pada dasarnya risiko dengan tingkat eksposur lebih tinggi harus diprioritaskan tindak lanjutnya dari risiko dengan tingkat eksposur lebih rendah. Dalam hal terdapat lebih dari satu risiko yang tingkatnya sama, maka prioritas tindak lanjut ditetapkan dengan pertimbangan profesional.
   b. Tanggapan atas risiko, yaitu usulan untuk menentukan opsi perlakuan risiko berdasarkan Level Risiko yang dihitung sebelumnya
   c. Apabila hasil perhitungan Skala dan Level Risiko Inheren berada pada level eksposur *Moderate* dan *Moderate to High* maka perlu disusun lembar persetujuan Direktur terkait sedangkan untuk level eksposur High perlu disusun lembar persetujuan Direksi.
   d. Lembar persetujuan tersebut disusun saat penyusunan risiko awal dan saat ada perubahan risiko.

PROSES AKHIR

1. Proses Akhir manajemen risiko terdiri dari:
   Rencana Perlakuan Risiko
   a. Perusahaan menyusun rencana perlakuan Risiko dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menurunkan nilai Risiko sesuai dengan target nilai Risiko Residual.

h. If data insufficiency or other issues arise, the estimation of risk probability and potential impact (if the risk occurs) may be determined based on subjective assessments reflecting the confidence level of the Risk Owner.

i. The results of Inherent Risk Analysis must include at least: (i) Assumptions for impact calculation, (ii) Impact value in Rupiah or functional accounting currency for Quantitative Risk or risk score for Qualitative Risk, (iii) Impact Scale, (iv) Probability Scale, (v) Risk Exposure. (vi) Risk Scale. (vii) Risk Level

j. The results of Residual Risk Analysis must include at least: (i) Impact value per quarter, (ii) Impact scale per quarter, (iii) Probability value per quarter, (iv) Probability scale per quarter, (v) Risk Exposure per quarter for Quantitative Risks, (vi) Risk Scale per quarter, and (vii) Risk Level per quarter

k. The results of Inherent and Residual Risk Scale and Level calculations must be presented in a Risk Heatmap.

5. Risk Evaluation
   a. Risk evaluation is carried out to determine the priority order for follow-up actions, considering timing and resource allocation. Essentially, risks with higher exposure levels must be prioritized over those with lower exposure levels. If there are multiple risks with the same level, the follow-up priority is determined based on professional judgment.
   b. Risk response refers to proposals for determining risk treatment options based on the previously calculated Risk Level.
   c. If the calculated Inherent Risk Scale and Level fall within the Moderate or Moderate to High exposure levels, an approval sheet must be prepared for the relevant Director, whereas for risks categorized as High Exposure, an approval sheet must be prepared for the Board of Directors.
   d. These approval sheets are prepared during the initial risk assessment and whenever there is a change in risk.

FINAL PROCESS

1. The final process of risk management consists of:
   a. Risk Treatment Plan
      The Company develops a risk treatment plan and allocates an adequate budget to reduce risk values in accordance with the target residual risk value.

b. Perlakuan risiko negatif dapat dilakukan dengan menerima dan tetap memonitor risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi akibat negatif yang timbul bila risiko terjadi, memindahkan (mentransfer) risiko kepada pihak lain, membagi (*sharing*) risiko atau menghindari risiko (dengan menghindari tujuan, strategi, sasaran atau rencana hasil kegiatan yang terkait). Perlakuan risiko positif dilakukan dengan Eksploitasi (*Exploit*), Meningkatkan (*Enhance*), Berbagi (*Sharing*), Menerima (*Accept*).

c. Di dalam rencana perlakuan paling sedikit memuat antara lain Kegiatan rencana perlakuan Risiko, Jenis program kegiatan di dalam RKAP, Output kegiatan perlakuan Risiko, Anggaran biaya rencana perlakuan/ tindak lanjut Risiko, Unit Kerja yang bertanggungjawab, Timeline pelaksanaan kegiatan perlakuan risiko.

2. Prioritisasi Risiko
   a. Proses Integrasi Risko.
      Perusahaan melakukan proses integrasi Risiko terhadap seluruh Risiko yang telah dilakukan penilaian Risiko baik yang berasal dari Anak Perusahaan atau unit Lini Pertama dari Induk Perusahaan. Tujuan integrasi Risiko untuk memperoleh daftar Risiko Utama yang akan dicantumkan dalam rancangan perencanaan strategis baik RJPP atau RKAP serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pada level enterprise.
   b. Proses Agregasi Risiko
      Bersamaan dengan penyampaian usulan perencanaan strategis berbasis Risiko baik RJPP atau RKAP kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Perusahaan menyampaikan kertas kerja hasil perhitungan nilai ambang strategi Risiko, hasil penilaian Risiko, dan hasil integrasi Risiko kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
3. Pelaksanaan Rencana Pelakuan Risiko
   a. Langkah akhir dari proses manajemen risiko adalah melaksanakan perlakuan/tindak lanjut risiko yang telah direncanakan dan melakukan evaluasi setelah pelaksanaan rencana perlakuan/tindak lanjut risiko untuk mengukur tingkat risiko terkini.
   b. Setiap Pemilik Risiko bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi di unitnya masing-masing.

SELERA DAN STRATEGI RISIKO

Strategi Risiko yang terdiri dari : i) pernyataan selera risiko *(risk appetite statement)* BUMN dengan memperhatikan selera risiko Kementerian BUMN, ii) nilai ambang risiko di level enterprise/

b. Negative risk treatment can be carried out by accepting and continuously monitoring the risk, reducing the likelihood of risk occurrence, minimizing the negative consequences if the risk occurs, transferring the risk to another party, sharing the risk, or avoiding the risk (by avoiding objectives, strategies, targets, or planned activity outcomes related to the risk). Meanwhile, positive risk treatment involves Exploitation (Exploit), Enhancement (Enhance), Sharing (Sharing), and Acceptance (Accept).

c. The risk treatment plan must include at least the following elements: Risk treatment plan activities, types of programs included in the RKAP, expected outputs of the risk treatment activities, budget allocation for risk treatment/follow-up actions, responsible work units, and the timeline for implementing the risk treatment activities.

2. Risk Prioritization
   a. Risk Integration Process
      The Company integrates all assessed risks, whether originating from Subsidiaries or First-Line Units of the Parent Company. The purpose of risk integration is to compile a list of Key Risks to be included in the strategic planning draft (RJPP or RKAP) and to ensure ongoing monitoring and evaluation at the enterprise level.
   b. Risk Aggregation Process
      Alongside the submission of risk-based strategic planning proposals (RJPP or RKAP) to the Indonesian Ministry of State-Owned Enterprises, the Company also submits a working paper containing the risk strategy threshold calculations, risk assessment results, and risk integration outcomes to the Ministry.
3. Implementation of the Risk Treatment Plan
   a. The final step of the risk management process is the execution of planned risk treatment actions, followed by an evaluation of the treatment implementation to measure the current risk level.
   b. Each Risk Owner is responsible for managing the risks within their respective units.

RISK APPETITE AND STRATEGY

The Risk Strategy consists of: i) Risk appetite statement for State-Owned Enterprises (SOE), taking into account the risk appetite set by the Ministry of State-Owned Enterprises, ii) Enterprise/

korporat yang memuat *risk capacity, risk appetite, risk tolerance,* dan *risk limit*, serta iii) metrik strategi risiko.

1. Pernyataan Selera Risiko

Selera Risiko *(Risk Appetite)* adalah pernyataan secara korporasi yang menjelaskan batasan jumlah atau nilai kerugian/biaya yang siap untuk diterima dalam rangka mencapai tujuan PT Hutama Karya (Persero):

***Risk Appetite* 2024 :**

a. Mempertahankan *revenue streams* dari dua sektor bisnis utama Jalan Tol dan Jasa Konstruksi
b. Perusahaan berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik.
c. Mengerjakan penugasan pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan ketentuan secara finansial fisibel atau apabila tidak fisibel secara finansial diberikan kompensasi/subsidi atau pembiayaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperoleh margin yang wajar.
d. Memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha di bidang Jasa Konstruksi & Jalan Tol secara berkesinambungan.
e. Melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makroekonomi dengan mengurangi konsekuensi beban secara terukur dengan melakukan lindung nilai atau pencadangan kurs.
f. Laba Bersih/*Earning After Tax (EAT)* Perusahaan sesuai dengan target yang direncanakan.
g. Level risiko yang dapat diterima PT Hutama Karya (Persero) adalah pada level di bawah atas tingkat risiko yang dapat diterima pada Matriks Tingkat Eksposur atau pada level "*Low dan Low to Moderate*" termasuk kebijakan strategis terhadap Anak Perusahaan.
h. Memenuhi semua peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
i. Menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari kegiatan perusahaan yang mengarah pada perusakan lingkungan.
j. Menjaga Perusahaan dari ancaman reputasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kegiatan bisnis.
k. Melakukan pengambilan keputusan strategis yang diperlukan untuk mencapai manfaat jangka panjang sesuai kebijakan Perusahaan yang berlaku.
l. Menempatkan prioritas utama atas keamanan informasi kehandalan infrastruktur IT dan kesiapan teknologi *cyber* yang harus dijalankan oleh Perusahaan.

corporate risk threshold values, which include risk capacity, risk appetite, risk tolerance, and risk limits, and iii) Risk strategy metrics

1. Risk Appetite Statement

Risk Appetite is a corporate-level statement that defines the acceptable limit of loss/costs the Company is willing to bear in achieving its objectives at PT Hutama Karya (Persero).

Risk Appetite 2024 :

a. Maintaining revenue streams from the two core business sectors: Toll Roads and Construction Services.
b. Focusing on executing core business activities effectively and in good faith.
c. Undertaking government assignments in the form of National Strategic Projects or projects that serve a public benefit function, provided they are financially feasible or, if not, are compensated/subsidized or financed through State Capital Injection (PMN) to achieve a reasonable margin.
d. Meeting financial obligations, maintaining a healthy financial structure, and ensuring business continuity in the Construction Services and Toll Road sectors sustainably.
e. Optimizing market volatility and macroeconomic management by mitigating financial burdens through hedging or currency reserves.
f. Achieving Net Profit/Earnings After Tax (EAT) in line with the planned target.
g. Maintaining an acceptable risk level at PT Hutama Karya (Persero) within the "Low to Moderate" exposure level, as defined in the Risk Exposure Matrix, including strategic policies for Subsidiaries.
h. Complying with all applicable laws and regulations.
i. Preserving environmental sustainability and avoiding corporate activities that may lead to environmental damage.
j. Protecting the Company from reputational threats that could significantly impact business operations.
k. Making necessary strategic decisions to achieve long-term benefits in accordance with the Company's policies.
l. Prioritizing information security, ensuring IT infrastructure reliability, and enhancing cybersecurity readiness.

m. Menjaga dampak permasalahan proyek pada level "*Low dan Low to Moderate*".
n. Menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dan Manajemen Risiko Terintegrasi, melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan *prudent* serta menjunjung tinggi *core value* AKHLAK

***Risk Tolerance* 2024 :**

a. *Risk Tolerance* 2024 adalah 10% terhadap risk appetite. Apabila tingkat risiko diatas eksposur atau yang berada di atas *risk appetite* maka diputuskan sesuai mekanisme prosedur yang berlaku.
b. Tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan, perusakan lingkungan, ancaman reputasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kegiatan bisnis oleh Perusahaan.
c. Memberikan minimum toleransi terhadap permasalahan proyek

2. Nilai Ambang Risiko

Peta risiko memuat informasi posisi risiko inheren dan posisi risiko residual dalam pemetaan warna skala hasil kalibrasi antara skala probabilitas dengan sekala dampak yang mengacu pada *heatmap* sebagai berikut :

m. Keeping project-related issues at a "Low to Moderate" level.
n. Conducting business with good corporate governance and an integrated risk management approach, actively managing risk governance structures in a prudent and responsible manner, while upholding the core values of AKHLAK (Integrity, Competence, Harmony, Loyalty, Adaptability, and Collaboration).

Risk Tolerance 2024 :

a. Risk Tolerance for 2024 is set at 10% of the Risk Appetite. If the risk exposure exceeds the Risk Appetite, decisions will be made in accordance with the applicable procedures.
b. Zero tolerance for violations of laws and regulations, environmental destruction, or reputational threats that could significantly impact the Company's business operations.
c. Minimal tolerance for project-related issues

2. Risk Threshold Value

The Risk Map contains information on the positions of Inherent Risks and Residual Risks, visually represented in a heatmap, which is calibrated based on the probability scale and impact scale.

TINGKAT KEMUNGKINAN							
	Hampir Pasti Terjadi 5	5	Low to Moderate 7	Moderate 12	Moderate to High 17	High 22	High 25
	Sangat Mungkin Terjadi 4	4	Low 4	Low to Moderate 9	Moderate 14	Moderate to High 19	High 24
	Bisa Terjadi 3	3	Low 3	Low to Moderate 8	Moderate 13	Moderate to High 18	High 23
	Jarang Terjadi 2	2	Low 2	Low to Moderate 6	Low to Moderate 11	Moderate to High 16	High 21
	Sangat Jarang Terjadi 1	1	Low 1	Low 5	Low to Moderate 10	Moderate 15	High 20
			1	2	3	4	5
			Sangat Rendah 1	Rendah 2	Moderat 3	Tinggi 4	Sangat Tinggi 5
			TINGKAT DAMPAK				

Gambar. Peta Risiko PT Hutama Karya Persero

Batas atas tingkat risiko yang dapat diterima ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* Perusahaan yang areanya berada dalam batas garis putus-putus pada peta risiko di atas yaitu pada level *Eksposur Low to Moderate.* Area di luar garis putus-putus tersebut menempatkan risiko pada tingkat yang harus mendapat tindak lanjut risiko yaitu dimitigasi/dihindari/ditransfer sehingga risiko dapat diturunkan sampai pada tingkat yang dapat diterima Perusahaan.

The upper limit of the acceptable risk level is determined in accordance with the Company's risk appetite, which is within the boundaries of the dotted line on the risk map above, namely at the Low to Moderate Exposure level. The area outside the dotted line places the risk at a level that must receive risk follow-up, namely mitigated / avoided / transferred so that the risk can be reduced to an acceptable level for the Company.



Gambar. Ketentuan Ambang Batas Risiko

Tabel. Ambang Batas Risiko PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2024
Table. Risk Threshold of PT Hutama Karya (Persero) in 2024

Nilai Kapasitas Risiko Perusahaan Risk Capacity	Nilai Selera Risiko Perusahaan Risk Appetite	Nilai Toleransi Risiko Perusahaan Risk Tolerance	Nilai Batasan Risiko Risk Limit
Rp5.088.147.722.562	< Rp712.340.681.159	< Rp783.574.749.274	Rp211.359.651.481

3. Metrik Strategi Risiko

Dalam rangka menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan implementasi Peta Jalan BUMN periode 2020-2024, Perusahaan memiliki strategi risiko yang dituangkan dalam Metrik Strategi Risiko, tercantum dalam tabel berikut :

3. Risk Strategy Metrics

In order to create and protect the Company's value and support sustainable business growth in accordance with the implementation of the SOE Road Map for the period 2020-2024, the Company has a risk strategy as outlined in the Risk Strategy Metrics, listed in the following table:

Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN Risk Category T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Parameter Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan /Limit Threshold/ Limit Value
Risiko Fiskal – PMN Fiscal Risk - PMN	Mengerjakan penugasan Pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan ketentuan secara finansial fisibel atau apabila tidak fisibel secara finansial diberikan kompensasi/ subsidi atau pembiayaan dari PMN untuk memperolah margin yang wajar.	Konservatif Conservative	Keterlambatan PMN Delay in PMN	Bulan Months	2

Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN Risk Category T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Parameter Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan /Limit Threshold/ Limit Value
	Carrying out government assignments in the form of national strategic projects or providing public benefits, provided that they are financially feasible or compensated/subsidized or financed through PMN to obtain a reasonable margin.				
Risiko Kebijakan – Sektoral Policy Risk - Sectoral	Memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Complying with all applicable laws and regulations.	Tidaktoleran Intolerant	Tingkat Pemberian peringatan formal tertulis dari Regulator Formal written warning from the regulator	Kali Times	0
Risiko Kebijakan – Sektoral Policy Risk - Sectoral	Melakukan pengambilan keputusan strategis yang diperlukan untuk mencapai manfaat jangka panjang sesuai kebijakan perusahaan yang berlaku. Making decisions necessary to achieve long-term benefits in accordance with the company's prevailing policies.	Konservatif Conservative	Keterlambatan penerbitan paying hukum Perpres JTTS Issuance of Presidential Regulation (Perpres)	Bulan Months	2
Risiko Struktur – Struktur Korporasi Structural Risk - Corporate Structure	Memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan prudent serta menjunjung tinggi core value AKHLAK. Complying with all regulations and laws by implementing good corporate governance. Completing and actively operating risk management bodies in a prudent manner while upholding the core values of AKHLAK.	Tidaktoleran Intolerant	Tingkat pelanggaran terhadap peraturan dan SOP yang berlaku Violation level against applicable regulations and SOPs	Kali Times	0
Risiko Restrukturisasi & Reorganisasi – Pengabungan, Pengambilalihan, Peleburan, Pemisahan, Pembubaran, Likuidasi, Kemitraan, dan Restrukturisasi Restructuring & Reorganization Risk - Mergers, Acquisitions, Consolidations, Separations, Dissolutions, Liquidations, Partnerships, and Restructuring	Melakukan pengambilan keputusan strategis yang diperlukan untuk mencapai manfaat jangka panjang sesuai kebijakan perusahaan yang berlaku. Making necessary strategic decisions to achieve long-term benefits in accordance with the company's prevailing policies.	Tidaktoleran Intolerant	Penundaaan pemenuhan kewajiban keuangan Anak Perusahaan Delay in fulfilling financial obligations	Kali Times	0

Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN Risk Category T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Parameter Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan /Limit Threshold/ Limit Value
Risiko Industri Umum – Formulasi Strategis General Industry Risk - Strategic Formulation	Melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makroekonomi dengan mengurangi konsekuensi beban secara terukur dengan melakukan lindung nilai atau pencadangan kurs. Making necessary strategic decisions to achieve long-term benefits in accordance with the company's prevailing policies.	Tidaktoleran Intolerant	Ketersediaan APBN Availability of State Budget (APBN)	%	100
Risiko Industri Umum – Pasar & Makroekonomi General Industry Risk - Market & Macroeconomy	Memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan. Facing market and macroeconomic conditions by mitigating the financial burden in a measurable manner through hedging or foreign exchange reserves.	Konservatif Conservative	Rasio dari sewn Ratio of sewn	%	1
Risiko Industri Umum – Keuangan General Industry Risk - Finance	Menjaga perusahaan dari ancaman reputasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kegiatan bisnis. Fulfilling financial obligations and ensuring sustainable business continuity.	Konservatif Conservative	Current Ratio Current Ratio	%	100
Risiko Industri Umum – Reputasi & Kepatuhan General Industry Risk - Reputation & Compliance	Menjaga perusahaan dari ancaman reputasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kegiatan bisnis. Protecting the company from reputational threats that could significantly impact business operations.	Tidaktoleran Intolerant	Hukum di pengadilan / Frekuensi tuntutan Legal cases in court / Frequency of lawsuits	Kali	0
Risiko Industri Umum - Proyek General Industry Risk - Projects	BUMN berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik. The state-owned enterprise (SOE) focuses on carrying out its core business activities accurately and in good faith.	Konservatif Conservative	Penyimpangan HPP Proyek pada Divisi Jalan & HKR Deviation of Project HPP (Cost of Goods Sold) in Road & HKR Division		
Risiko Industri Umum – Proyek General Industry Risk - Projects	Mempertahankan revenue stream dari dua sektor bisnis utama Jalan Tol dan Jasa Konstruksi. Maintaining revenue streams from two main business sectors: Toll Roads and Construction Services.	Konservatif Conservative	Deviasi revenue atas Revenue deviation from the target	%	1,25%

Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN Risk Category T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Parameter Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan /Limit Threshold/ Limit Value
Risiko Industri Umum - Proyek General Industry Risk - Project	Mempertahankan revenue stream dari dua sektor| bisnis utama Jalan Tol dan Jasa Konstruksi Maintaining revenue streams from two main business sectors: Toll Roads and Construction Services.	Konservatif Conservative	Deviasi revenue atas kontrak baru Non BUJT Revenue deviation of Non BUJT New Contracts	%	10
Risiko Industri Umum - Teknologi & Keamanan Siber General Industry Risk - Technology & Cybersecurity	Menempatkan prioritas utama atas keamanan informasi kehandalan infrastruktur IT dan kesiapan teknologi cyber yang harus dijalankan oleh Perusahaan. Placing top priority on information security, IT infrastructure reliability, and cyber technology readiness that must be implemented by the company.	Konservatif Conservative	Downtime Sistem System downtime	Jam Hours	0-6 Jam 0 - 6 hours
Risiko Industri Umum - Sosial & Lingkungan General Industry Risk - Social & Environmental	Menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari kegiatan perusahaan yang mengarah pada perusakan lingkungan. Preserving environmental sustainability and avoiding corporate activities that lead to environmental damage.	Tidaktoleran Intolerant	Komplain dari Stakeholder Complaints from stakeholders	Kali Times	0
Risiko Industri Umum - Operasional General Industry Risk - Operational	Mengerjakan penugasan pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan ketentuan secara finansial fisibel atau apabila tidak fisibel secara finansial diberikan kompensasi/ subsidi atau pembiayaan dari PMN untuk memperoleh margin yang wajar. Carrying out government assignments in the form of national strategic projects or providing public benefits, provided that they are financially feasible or, if not financially feasible, compensated/subsidized or financed through PMN to obtain a reasonable margin.	Konservatif Conservative	Keterlambatan pembebasan Land acquisition delays	%	20
Risiko Industri Umum - Operasional General Industry Risk - Operational	EAT Perusahaan sesuai dengan target yang direncanakan. Achieving the company's Earnings After Tax (EAT) as per the planned target.	Konservatif Conservative	Penurunan EBITDA BUJT Decline in BUJ EBITDA	%	2

Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN Risk Category T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Parameter Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan /Limit Threshold/ Limit Value
Risiko Industri Umum - Operasional General Industry Risk - Operational	Menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dan Manajemen Risiko Terintegrasi, melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan prudent serta menjunjung tinggi core value AKHLAK. Conducting business by implementing good corporate governance and Integrated Risk Management, completing and actively operating risk management bodies in a prudent manner while upholding the core values of AKHLAK.	Konservatif Conservative	Tingkat kegagalan klaim Claim failure rate	%	5

Metrik strategi risiko wajib digunakan sebagai dasar dalam menetapkan berbagai pilihan sasaran dan strategi yang akan menjadi usulan dalam rancangan RKAP dengan pilihan *Accept* (Diterima)/*Avoid* (Ditolak) dalam tabel di bawah ini:

Risk strategy metrics shall be used as the basis for setting various target and strategy options that will be proposed in the draft RKAP with Accept/ Avoid options in the table below:

Pilihan Sasaran Target Options	Pemilihan Strategi Strategic Options	Hasil yang diharapkan dapat diterima perusahaan Expected Results Acceptable to the Company	Nilai Risiko yang Akan Timbul Potential Risk Value	Nilai Limit Risiko sesuai dengan Parameter Risiko dalam Metrik Strategi Risiko Risk Limit Value According to the Risk Parameter in the Risk Strategy Metric	Keputusan Penetapan Decision
Fokus sebagai *market leader* sektor jalan dan jembatan Focus as the market leader in the road and pavement sector	Peningkatan kualitas perencanaan mulai dari pra tender Improving the quality of planning from the pre-tender stage	Peningkatan laba operasi dari hasil eksteralisasi Sektor Jalan & Jembatan Rp563 miliar Increased operating profit from efficiency in the road & bridge sector of Rp563 billion	Kenaikan HPP proyek eksternal sebesar Rp58 M (1,35%) Increase in external project HPP by Rp58 billion (1.35%)	Kenaikan HPP proyek eksternal sebesar Rp58 M (1,35%) Increase in external project HPP by Rp58 billion (1.35%)	Accept
	Kerjasama dengan mitra skala global untuk pengembangan kapabilitas Collaboration with global-scale partners for quality development				Accept
	Identifikasi proyek berdasarkan kelembagaan secara efektif dan sesuai dengan threshold Perusahaan Selectively identifying projects based on sustainability and in accordance with the company's threshold				Accept

Pilihan Sasaran Target Options	Pemilihan Strategi Strategic Options	Hasil yang diharapkan dapat diterima perusahaan Expected Results Acceptable to the Company	Nilai Risiko yang Akan Timbul Potential Risk Value	Nilai Limit Risiko sesuai dengan Parameter Risiko dalam Metrik Strategi Risiko Risk Limit Value According to the Risk Parameter in the Risk Strategy Metric	Keputusan Penetapan Decision
Cost Leadership Cost Leadership	Peningkatan kualitas *deliverable* proses bisnis konstruksi proyek jasa konstruksi dan jalan tol melalui implementasi program-program *Integrated Digital Construction* Improving the quality & effectiveness of construction project business processes, including the implementation of Integrated Digital Construction programs	% HPP konsolidasi tidak lebih buruk dari 89% Consolidated % L HPP not worse than 89%	Peningkatan beban usaha sebesar 1% (Rp15 M) Increase in operating expenses by 1% (Rp15 billion)	Peningkatan beban usaha sebesar 2% (Rp30 M) Increase in operating expenses by 2% (Rp30 billion)	Accept
	Implementasi ERP dan BIM untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian kinerja secara transparan Implementation of ERP and BIM to enhance efficiency and performance control transparently				Accept
	Penguatan pengendalian biaya, mutu dan kualitas serta waktu Strengthening cost, quality, and time control				Accept
Terselesaikannya dan beroperasinya ruas JTTS Tahap I Completion and operation of JT JIS Phase I	Fokus dalam pengendalian progress, biaya kontruksi dan perubahan lingkup Focusing on progress control, construction costs, and scope changes.	Izin terbangun sesuai target RKAP 88 km Construction permits completed according to RKAP target of 263 km	Ketidaktercapaian target laba dari pembangunan JTTS Tahap I sebesar Rp10 M Failure to meet feasibility permit targets for JT JIS Phase I construction by Rp10 billion	Penurunan laba operasional dari pembangunan JTTS Tahap I Rp15 M Decrease in operating profit from JT JIS Phase I construction by Rp15 billion	Accept
	Pengoperasian jalan tol yang efektif dan efisien Effective and efficient toll road operation				Accept
	Melakukan monitoring mutu, optimalisasi metode konstruksi dan sumber daya proyek Conduct quality monitoring, optimization of construction methods and project resources				Accept
Pembangunan JTTS Tahap II (Ruang Betung-Jambi, Lingkar Pekanbaru dan Kayu Agung Palembang) Construction of JT JIS Phase II (Quasi Bundling, Implementation Level, and Urgency of Development)	Pengembangan skema pendanaan Pembangunan JTTS Tahap II Development of funding scheme for JTTS Phase II construction	Pencairan PMN TA 2024 sebesar Rp18,6 T tepat waktu, pendanaan eksternal PBBL (Rp13,9 T) sesuai jadwal Timely fulfillment of PMN TA 2024 amounting to Rp18.6 trillion, external financing for PBBL (Rp13.9 trillion) as scheduled	Mundurnya PPJT yang mengakibatkan penundaan konstruksi JTTS Tahap II yang berpengaruh terhadap laba Rp80 M The delay of PPJT which resulted in the delay of JTTS Phase II construction which affected the profit of Rp80 Billion	Penurunan laba operasional dari pembangunan JTTS Tahap II Rp100 M Decrease in operating profit and construction of JT JIS Phase II by Rp100 billion	Accept
	Penyelesaian detal DED dan RTA Conpletion of detailed engineering design (DED) and Final Engineering Plan (RTA)				Accept
	Pemenuhan Pendanaan melalui Ekuitas PMN dan Pinjaman Funding Fulfillment through PMN Equity and Loan				Accept

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA RISK PROFILE AND MANAGEMENT

Deskripsi Risiko Risk Description	Penyebab Risiko Risk Cause	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Gagal dalam Pengajuan klaim, kompensasi, dan eskalasi Failure in claims submission, compensation, and escalation	1. Adanya interface dengan kontraktor lain di area kerja yang sama/berdekatan. 2. Lamanya proses routing dalam birokrasi dengan owner. 3. Proyek tidak selesai tepat waktu akibat kesalahan Hutama Karya. 4. Tidak diterimanya nilai pengajuan klaim dan evidence oleh asuransi karena data kurang valid/ lengkap 1. Existence of interface with other contractors in the same/adjacent work area. 2. Lengthy bureaucratic routing process with the owner. 3. Project delays caused by Hutama Karya's errors. 4. Claims and evidence rejected by the insurance provider due to incomplete or invalid data.	1. Berkoordinasi dengan owner atas potensi pekerjaan yang bersinggungan dengan interface kontraktor lain, Menempatkan PIC Khusus di area perbatasan area kerja. 2. Menempatkan PIC Khusus yang bersinggungan dengan owner, Menjaga hubungan baik dengan owner melalui komunikasi yang baik. 3. Pelatihan dan Pengembangan personel project control, scheduler, pelaksana lapangan, mencantumkan pasal kontrak ke subkontraktor terkait keterlambatan pekerjaan. 4. Pelaporan dan pengumpulan evidence secara berkala dari proyek ke divisi 5. Menunjuk Expert, lost adjuster/konsultan Klaim, auditor independen, APH dan lawyer oleh DHCL 1. Coordinate with the owner regarding potential overlaps with other contractors and assign a dedicated PIC at the work area boundaries. 2. Assign a dedicated PIC for coordination with the owner and maintain good communication. 3. Provide training and development for project control personnel, schedulers, and field staff; include contract clauses related to delays in subcontractor agreements. 4. Conduct regular reporting and evidence collection from the project team to the division. 5. Appoint an expert, loss adjuster/claim consultant, independent auditor, APH, and legal counsel through DHCL.
Ketidaksesuaian Quality Pekerjaan Work quality nonconformity	Lemahnya kontrol pengawasan Weak supervisory control	1. Site Visit berkala 2. Audit Internal dan Eksternal 3. Peningkatan kompetensi SDM melalui training sertifikasi dan webinar dan menyusun work practice terkait Quality dan HSE 4. Konsistensi pengawasan dapat dilakukan dengan optimasi penggunaan penerapan teknologi berupa CCTV, BIM & GIS, MLS, Electrical Density Gauge, dan photogammetry J39 1. Conduct regular site visits. 2. Perform internal and external audits. 3. Improve HR competencies through certification training and webinars; establish work practices related to Quality and HSE. 4. Ensure consistent supervision through the use of technologies such as CCTV, BIM & GIS, MLS, Electrical Density Gauge, and photogrammetry (J39).

Deskripsi Risiko Risk Description	Penyebab Risiko Risk Cause	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Penyelesaian kasus hukum HK Group Resolution of HK Group legal cases	1. Terlambat mengajukan gugatan perdata 2. Tidak melibatkan Jamdatun selaku pengacara negara pada kesempatan pertama 3. Terlambat dalam menangkap potensi pelanggaran pidana dalam kasus terkait 4. Ketidakefektifan pendampingan konsultan hukum dalam menangani kasus hukum HK Group 5. SOP Penanganan Perkara sudah ada namun belum disusun secara detail; 6. Ketiadaan/ kekuranglengkapan dokumen/bukti asli.	1. Telah dilakukan pengiriman Surat kepada Ketua Komisi Yudisial RI Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim (dalam Perkara 379/ Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim) 2. Telah dilakukan pengiriman Surat kepada Badan Pengawas MA Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim (dalam Perkara 379/ Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim) 3. HK dan HKR melalui kuasanya yakni JPN telah mengajukan Pernyataan Banding terhadap Putusan Nomor: 379/Pdt.G/2023/ PN Jkt Tim 4. Putusan Banding tanggal 7 November menyatakan Hutama Karya dan HKR tidak melakukan PMH 5. Hutama Karya dan HKR mengajukan upaya kasasi dan dalam proses pemeriksaan 6. Telah direncanakan proses perdamaian yang nantinya akan dituangkan ke dalam Perjanjian Damai menjadi Acta Van Dading 7. Atas usulan perdamaian, HK telah memberikan kuasa kepada JAMDATUN untuk melakukan pendampingan upaya rencana perdamaian 8. Akan bersurat ke Divisi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan Rekomendasi LHAI BPKP untuk Peningkatan penerapan tata kelola perseroan (GCG) khususnya dalam proses aksi korporasi akuisisi 9. Telah dilaksanakan penambahan personil Divisi Legal 10. Telah dikirimkan Surat Permohonan Perpanjangan MoU antara Hutama Karya dan JAMDATUN tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 11. Telah disusun Prosedur Penanganan Perkara Perdata ssampai dengan bagian Penanganan Perkara Perdata Khusus (Hutama Karya sebagai Debitor dalam Penanganan Perkara PKPU) 12. Telah diserahkan dokumendokumen pendukung untuk penegakkan dugaan Tipikor Perkara CSK oleh Kejati DKI Jakarta serta telah dilakukan perjanjian dengan Konsultan Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap pihak-pihak yang dimintakan keterangan dalam proses Penyidikan
	1. Delay in filing civil lawsuits. 2. Failure to involve Jamdatun (state attorney) at the earliest opportunity. 3. Late identification of potential criminal offenses in related cases. 4. The ineffective assistance of legal consultants in handling HK Group's legal cases. 5. Existing SOP for legal handling lacks detailed structure; 6. Missing or incomplete original documents/ evidence.	1. A letter was sent to the Judicial Commission of Indonesia regarding alleged ethical violations by the panel of judges (Case No. 379/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim). 2. A letter has been sent to the Supervisory Board of the Supreme Court regarding a report on alleged violations of the Code of Ethics and Judicial Conduct by the panel of judges (in Case No. 379/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim). 3. HK and HKR, through their legal representative JPN, have submitted a Statement of Appeal against the Decision No. 379/ Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim. 4. The appeal ruling on November 7 declared that Hutama Karya and HKR were not at fault (PMH). 5. Hutama Karya and HKR filed a cassation which is currently under review. 6. A peace process is planned to be formalized in a Settlement Agreement (Acta Van Dading). 7. Based on the proposed settlement, HK has granted power of attorney to JAMDATUN to assist in the peace negotiation efforts. 8. A letter will be sent to the Systems and Compliance Division regarding the implementation of BPKP's LHAI recommendations to improve corporate governance (GCG), particularly in the acquisition-related corporate action process. 9. Additional personnel have been assigned to the Legal Division 10. A letter requesting an extension of the MoU between Hutama Karya and JAMDATUN regarding the handling of legal matters in the fields of Civil and Administrative Law has been submitted. 11. Procedures for handling civil cases have been developed, including special civil case handling (Hutama Karya as a debtor in PKPU case handling). 12. Supporting documents have been submitted to the Jakarta High Prosecutor's Office (Kejati DKI Jakarta) for the enforcement of alleged corruption (Tipikor) in the CSK case, and an agreement has been made with a legal consultant to assist parties requested to provide information during the investigation process

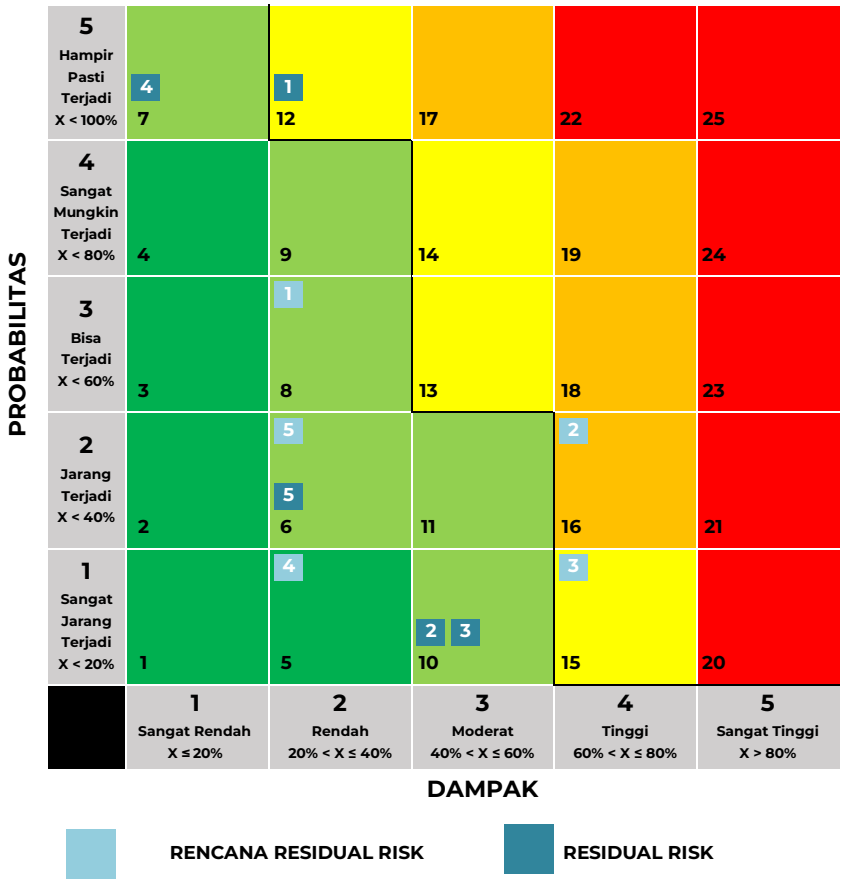
Deskripsi Risiko Risk Description	Penyebab Risiko Risk Cause	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Denda keterlambatan atas proyek yang tidak sesuai jadwal Penalty for project delays	1. Performa pembangkit tidak sesuai dengan yang disyaratkan Kontrak karena konsumsi Aux Power 2. Performa mitra kso dan/ atau subkon/supplier tidak memenuhi target, pekerjaan berhenti akibat 3. Ketidaktercapaian Availibility Factor yang ditetapkan oleh Owner sebesar 86% dikarenakan adanya Gangguan pada sistem BOP & AIS 500 KV yang menjadi lingkup pekerjaan Hutama Karya sehingga Owner tidak bisa menjual listriknya ke PLN keterlambatan pengadaan material/ peralatan 4. Kontrak tidak berimbang sehingga mengakibatkan risiko lebih besar ditanggung oleh Kontraktor 1. The power plant performance does not meet the contractual requirements due to auxiliary power consumption. 2. The performance of the joint operation partners and/or subcontractors/ suppliers does not meet targets, resulting in work stoppages. 3. Failure to achieve the 86% Availability Factor set by the Owner due to disruptions in the BOP & 500 KV AIS systems, which fall under Hutama Karya's scope of work, preventing the Owner from selling electricity to PLN, along with delays in procuring materials/equipment. 4. An imbalanced contract that places a greater share of risk on the Contractor.	1. Meminta personil QC kepada Konsorsium yang khusus memantau pekerjaan ME 2. Subkont/vendor wajib menerbitkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk BG. 3. Membuat kontrak exclusive dengan vendor terkait keterlambatan yang merugikan HK 4. Mengajukan perpanjangan waktu, dengan menyajikan bukti yang kuat. 5. Memberlakukan Performance LD for Availibility kepada vendor penyedia BOP dan AIS 500 KV 6. Melakukan mediasi ke badan pemerintahan terkait (KBUMN, BPKP, BPK, BANI) atas penyelesaian dispute klaim 7. Menegakan peraturan Reward & Punishment secara tegas oleh DIC dan DHCL atas prestasi maupun pelanggaran yang dilakukan 8. Melakukan notifikasi secara official kepada owner atas upaya Change Order(CO)/Variation Order (VO), Extension of Time (EOT) dan dilengkapi dengan evidence 1. Request QC personnel from the Consortium specifically to monitor ME work. 2. Subcontractors/vendors are required to issue performance bonds in the form of BG. 3. Establish exclusive contracts with vendors related to delays that cause losses to HK. 4. Submit a time extension request supported by strong evidence. 5. Impose performance Liquidated Damages (LD) for availability on vendors providing BOP and 500 KV AIS. 6. Initiate mediation with relevant government bodies (KBUMN, BPKP, BPK, BANI) to resolve claim disputes. 7. Enforce a strict Reward & Punishment policy by DIC and DHCL for achievements and violations. 8. Send official notification to the Owner regarding efforts for Change Orders (CO)/Variation Orders (VO), and Extension of Time (EOT), supported by evidence.

Deskripsi Risiko Risk Description	Penyebab Risiko Risk Cause	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko kerjasama operasi Operational Partnership Risk	Kurang cermat & selektif dalam pemilihan partner KSO Lack of thoroughness and selectiveness in choosing KSO partners	1. Melakukan FS atas rekan KSO melalui pengecekan finansial dan pengalaman 2. Mencantumkan klausula Perjanjian KSO perihal audit dan tata kelola KSO, serta balancing hak HK selaku member dalam keputusan atas biaya maupun pelaksanaan proyek 3. Perkuatan peran KM dalam KSO dalam mengambil keputusan strategis, khususnya atas biaya yang dicantumkan dalam pasal terkait kewenangan KM 4. Menambah poin pada pasal Perjanjian KSO diantaranya: a. Laporan Keuangan KSO wajib dilakukan audit Eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) maksimal setiap 4 (empat) bulan sekali pemeriksaan setiap tahun selama pelaksanaan proyek. b. Apabila adanya Pihak yang tidak melaporkan biaya diluar Rencana Biaya Proyek (RBP) dan telah melewati periode Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KM maupun Audit Internal (jika ada), maka Pihak yang tidak melaporkan tersebut menanggung seluruh biaya diluar RBP tersebut 1. Conduct a feasibility study (FS) on KSO partners through financial and experience checks. 2. Include clauses in the KSO Agreement regarding audit and governance of the KSO, as well as balancing HK's rights as a member in decisions concerning costs and project implementation. 3. Strengthen the role of KM in the KSO, especially in making strategic decisions related to costs, as stated in the clause concerning KM's authority. 4. Add the following points to the KSO Agreement clauses: a. KSO Financial Reports must undergo external audits by a Public Accounting Firm (KAP) at least once every four (4) months each year during the project implementation. b. If any party fails to report expenses outside the Project Cost Plan (RBP) and such expenses go beyond the audit period conducted by the KAP appointed by KM or by Internal Audit (if applicable), the party failing to report the costs shall bear all costs outside the RBP.

PENILAIAN RISIKO

RISK ASSESSMENT

Peringkat Risiko Risk Ranking	Deskripsi Risiko Risk Description	Peta Risiko Risk Map			
		Target Residual Residual Target		Realisasi Residual Residual Realisation	
		LEVEL	EKSPOSUR	LEVEL	EKSPOSUR
1	Gagal dalam pengajuan klaim, kompensasi, dan eskalasi Failure in claim submission, compensation, and escalation	8	Low to Moderate	12	Moderate
2	Ketidaksesuaian Quality Pekerjaan Non-compliance with work quality standards	16	Moderate to High	10	Low to Moderate
3	Penyelesaian kasus hukum HK Group Resolution of HK Group's legal cases	15	Moderate	10	Low to Moderate
4	Denda keterlambatan atas proyek yang tidak sesuai jadwal Project delay penalties due to schedule non-compliance	5	Low	7	Low to Moderate
5	Risiko kerjasama operasi Risks in operational cooperation	6	Low to Moderate	6	Low to Moderate



EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang merujuk kepada Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 dimana pada tahun 2024 dilakukan penilaian atas kinerja tahun 2023 dengan hasil sebesar 3.44 (Fase Praktik yang Baik) dengan detail sebagai berikut:

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The evaluation of risk management implementation is conducted through an assessment of the risk management maturity level, referring to the Technical Guidelines for Risk Maturity Index Assessment within State-Owned Enterprises, as stipulated in Regulation No. SK-8/DKU.MBU/12/2023. In 2024, an assessment was carried out for the performance of the year 2023, resulting in a score of 3.44 (Good Practice Phase), with the following details:

Aspek Dimensi
Dimensional Aspects

Parameter Parameter	Dimensi Dimension	Deskripsi Description	Skor Dimensi Dimension Score
1 s.d 3 1 to 3	A	Budaya dan Kapabilitas Risiko Risk Culture and Capability	3,00
4 s.d 19 4 to 19	B	Organisasi dan Tata Kelola Risiko Organization and Risk Governance	4,19
20 s.d 33 20 to 33	C	Kerangka Risiko dan Kepatuhan Risk Framework and Compliance	3,86
34 s.d 40 34 to 40	D	Proses dan Kontrol Risiko Risk Process and Control	4,43
41 s.d 42 41 to 42	E	Model, Data, dan Teknologi Risiko Risk Model, Data, and Technology	3,00
1 s.d 42 1 to 42	Skor Aspek Dimensi Dimension Aspect Score		1,69*

Aspek Kinerja
Performance Aspect

No	Aspek Aspect	Nilai Aspek Aspect Score	Nilai Konversi Conversion Score	Bobot Weight	Nilai Konversi x Bobot Conversion Score x Weight	Skor Score
1	Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Peringkat Akhir) Final Rating of Soundness Level (Final Rating)	AA	90	50%	45,00	
2	Peringkat Komposit Risiko Composite Risk Rating	2	78	50%	39,00	
1 s.d 2	Skor Aspek Kinerja Performance Aspect Score					84,00
	Penyesuaian Skor Score Adjustment					-0,25
Skor RMI RMI Score						3,44

Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan laporan *gap analysis* dan rekomendasi perbaikan penerapan manajemen risiko hasil penilaian *Risk Maturity Index* atas kinerja tahun 2023 dibagi menjadi *roadmap* jangka pendek (tahun 2024) dan *roadmap* jangka panjang (sesuai RJPP HK/s.d tahun 2029). Implementasi *roadmap* perbaikan penerapan manajemen risiko ini menjadi *Key Performance Indicators* Korporasi tahun 2024 dimana ditargetkan 100% dapat terimplementasikan khusus untuk *roadmap* jangka pendeknya.

The evaluation of risk management implementation is based on the gap analysis report and recommendations for improving risk management practices, derived from the Risk Maturity Index assessment for the 2023 performance. The improvement plan is divided into a short-term roadmap (2024) and a long-term roadmap (aligned with HK's Corporate Long-Term Plan/ RJPP until 2029). The implementation of this risk management improvement roadmap is designated as one of the Corporate Key Performance Indicators (KPIs) for 2024, with a target of 100% completion for the short-term roadmap.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Arahan Dewan Komisaris atas kinerja Divisi Pengelolaan Risiko disampaikan setiap Triwulanan setelah penyampaian Laporan Manajemen Risiko yang disampaikan tiap Triwulan kepada Dewan Komisaris. Berikut ini arahan dari Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko di Hutama Karya pada tahun 2024 dimana Dewan Komisaris menilai:

1. Tingginya capaian kepatuhan penerapan manajemen risiko hanya terbatas pada aspek administratif kepatuhan dan pelaporan manajemen risiko, belum mencerminkan efektivitas penerapan manajemen risiko di PT Hutama Karya (Persero).

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Commissioners' directives regarding the Risk Management Division's performance are provided quarterly, following the submission of the Quarterly Risk Management Report to the Board of Commissioners. Below are the directives from the Board of Commissioners regarding the implementation of risk management at Hutama Karya in 2024, where the Board of Commissioners has assessed:

1. The high level of compliance in risk management implementation is currently limited to administrative compliance and risk management reporting. It does not yet reflect the effectiveness of risk management implementation at PT Hutama Karya (Persero).

2. Tidak semua mitigasi risiko yang telah dijalankan oleh risk owner (unit kerja/anak perusahaan) efektif dalam meminimalisir tingkat risiko. Hal tersebut terlihat dari tingkat risiko residual beberapa peristiwa risiko di tingkat korporasi maupun per segmen bisnis/anak usaha masih lebih tinggi dibandingkan target risiko residual maupun risiko inheren.
3. Divisi Pengelolaan Risiko sebagai lini kedua agar mendorong unit kerja/anak perusahaan sebagai lini pertama untuk menyusun langkah mitigasi risiko yang lebih baik dan efektif dalam memitigasi seluruh risiko yang ada di PT Hutama Karya (Persero). Selain itu, Diviis Pengelolaan Risiko sebagai lini kedua agar lebih aktif dalam melakukan *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko oleh lini pertama.

4. Penerapan manajemen risiko agar dilakukan secara efektif dengan memasukkan evidence atas setiap perlakuan risiko yang telah dilakukan sehingga mitigasi risiko yang dilakukan merupakan action plan yang dapat memberikan dampak nyata bagi perusahaan.
5. Penyampaian data dan informasi dari unti kerja/anak perusahan sebagai lini pertama harus menyeluruh, lengkap, dan transaparan, serta disampaikan kepada Divisi Pengelolaan Risiko pada kesempatan pertama agar tidak terjadi misinformasi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan strategi mitigasi dan perlakuan risiko.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris mengharapkan penguatan pada fungsi lini kedua dalam hal ini Divisi Pengelolaan Risiko agar manajemen risiko dapat berjalan sesuai prinsipnya yaitu menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan dan diharapkan keterbukaan dari *risk owner*/pemilik risiko dalam menyampaikan data pendukung dalam setiap kajian risiko serta diharapkan setiap rencana perlakuan risiko yang disampaikan merupakan sebuah action plan yang dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengendalikan risiko di lingkup Hutama Karya.

Selama tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan secara efektif dan memadai.

2. Not all risk mitigation measures carried out by risk owners (business units/subsidiaries) have effectively minimized risk levels. This is evident from the residual risk levels of several risk events at both the corporate level and across business segments/subsidiaries, which remain higher than the targeted residual risk or inherent risk.
3. The Risk Management Division, as the second line of defense, should encourage business units/subsidiaries as the first line of defense to develop more effective risk mitigation measures in addressing all risks at PT Hutama Karya (Persero). Additionally, the Risk Management Division should take a more active role in monitoring and evaluating the implementation of risk mitigation efforts by the first line of defense.
4. The implementation of risk management should be carried out effectively by ensuring that evidence is provided for each risk treatment action taken. This will ensure that risk mitigation efforts are aligned with a clear action plan that delivers tangible benefits to the company.
5. The submission of data and information from business units/subsidiaries as the first line of defense must be comprehensive, complete, and transparent. It should be communicated to the Risk Management Division at the earliest opportunity to prevent misinformation that could lead to errors in developing risk mitigation strategies and treatments.

In conclusion, the Board of Commissioners expects the strengthening of the second line of defense, specifically the Risk Management Division, to ensure that risk management operates in accordance with its core principle of creating and protecting the Company's value. Additionally, the Board emphasizes the importance of transparency from risk owners in providing supporting data for every risk assessment. Furthermore, every proposed risk treatment plan should be a practical action plan that can be effectively implemented and has a significant impact on risk control within Hutama Karya.

During the year 2024, the Board of Directors and Board of Commissioners assessed that the risk management system has been run effectively and adequately.

Perkara Hukum
Legal Cases

Tabel Perkara Hukum **Table of Legal Cases**

No.	Perkara Penting Important Cases	Jumlah Total	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (legally binding)	31	-
2.	Dalam proses penyelesaian In the process of resolution	17	-
Total		48	-

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan **Table of Legal Cases Faced by the Company**

No	Pokok Perkara / Gugatan Case / Lawsuit	Status Penyelesaian Resolution Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Claim Amount	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on Company Condition
1	Gugatan No. 4/Pdt.G/2020/PN.Kag (Tingkat PK) Lawsuit No. 4/Pdt.G/2020/PN.Kag (Judicial Review Level)	Pemeriksaan di Tingkat Peninjauan Kembali Under Review at the Judicial Review Level	Rp79,418,160,050 Rp79,418,160,050	Tidak berpengaruh signifikan karena substansi perkara tidak terkait langsung dengan Perusahaan No significant impact as the substance of the case is not directly related to the company
2.	Gugatan No. 78/Pdt.G/2021/PN Pmn (Tingkat Kasasi) Lawsuit No. 78/Pdt.G/2021/PN Pmn (Cassation Level)	Pemeriksaan di Tingkat Kasasi Under Review at the Cassation Level	-	Tidak berpengaruh signifikan karena substansi perkara tidak terkait langsung dengan Perusahaan No significant impact as the substance of the case is not directly related to the company
3.	Gugatan No. 12/Pdt.G/2022/PN Pmn (Tingkat Kasasi) Lawsuit No. 12/Pdt.G/2022/PN Pmn (Cassation Level)	Pemeriksaan di Tingkat Kasasi Under Review at the Cassation Level	-	Tidak berpengaruh signifikan karena substansi perkara tidak terkait langsung dengan Perusahaan No significant impact as the substance of the case is not directly related to the company
4.	Permohonan BANI Nomor 46051/X/ARB-BANI/2023 BANI Petition No. 46051/X/ARB-BANI/2023	Pemeriksaan di BANI Under Review at BANI	Rp2.108.820.307.301,93 Rp2,108,820,307,301.93	Berpengaruh signifikan karena nilai gugatan cukup besar dan proyek langsung ditangani oleh Divisi EPC PT HK sebagai anggota KSO Significant impact due to the large claim amount and direct involvement of EPC Division PT HK as a KSO member
5.	PK II atas Putusan No. 452 PK/PDT/2022 PK II on Decision No. 452 PK/PDT/2022	Pemeriksaan di Tingkat Peninjauan Kembali II Under Review at Judicial Review II	-	PT HKR selaku Anak Perusahaan HK kehilangan sebagian asset PT HKR, as a subsidiary of HK, lost part of its assets

No	Pokok Perkara / Gugatan Case / Lawsuit	Status Penyelesaian Resolution Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Claim Amount	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on Company Condition
6.	Kasasi atas Putusan Nomor 430/Pdt/2024/PT DKI (Kasasi Perkara No. 127/Pdt.G/2023) Cassation on Decision No. 430/Pdt/2024/PT DKI (Cassation Case No. 127/Pdt.G/2023)	Pemeriksaan di Tingkat Kasasi Under Review at Cassation Level	Rp193.098.825.000 dan bunga moratoir Rp965.464.125 Rp193,098,825,000 and moratory interest of Rp965,464,125	Berpengaruh karena adanya potensi HK tidak mendapat pengembalian sebesar nilai gugatan Impactful due to the potential loss of reimbursement equal to the claim amount
7.	Gugatan No. 2/Pdt.G/2023/PN.Kag (Kasasi) Cassation on Decision No. 430/Pdt/2024/PT DKI (Cassation Case No. 127/Pdt.G/2023)	Pemeriksaan di Tingkat Kasasi Under Review at Cassation Level	Rp11.897.242.828 Rp11,897,242,828	Tidak berpengaruh signifikan karena substansi perkara tidak terkait langsung dengan Perusahaan No significant impact as the case's substance is not directly related to the company
8.	Kasasi atas Putusan No. 1293/PDT/2024/PT DKI (Kasasi Perkara No. 379/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim) Cassation on Decision No. 1293/PDT/2024/PT DKI (Cassation Case No. 379/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim)	Pemeriksaan di Tingkat Kasasi Under Review at Cassation Level	Rp11,5 T Rp11.5 trillion	Tidak berpengaruh karena telah diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian No impact as it has been resolved through a Settlement Agreement
9.	Gugatan No. 865/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt Lawsuit No. 865/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt	Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Negeri Under Review at District Court Level	Rp6.539.000.000 Rp6,539,000,000	Tidak berpengaruh karena Gugatan tidak berdasar No impact as the lawsuit is unfounded
10.	Gugatan No. 13/Pdt.G/2024/PN Pbm Lawsuit No. 13/Pdt.G/2024/PN Pbm	Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Negeri Under Review at District Court Level	-	Tidak berpengaruh signifikan karena substansi perkara tidak terkait langsung dengan Perusahaan No significant impact as the case's substance is not directly related to the company
11.	SIAC Case No. ARB481/24/BSB SIAC Case No. ARB481/24/BSB	Pemeriksaan di SIAC Under Review at SIAC	Rp3.558.592.727 Rp3,558,592,727	Tidak berpengaruh signifikan No significant impact
12.	SIAC Case No. ARB354/24/BSB SIAC Case No. ARB354/24/BSB	Pemeriksaan di SIAC Under Review at SIAC	USD 808.867,11 USD 808,867.11	Tidak berpengaruh signifikan No significant impact
13.	Gugatan No. 247/Pdt.G/22024/PN Bpp Lawsuit No. 247/Pdt.G/2024/PN Bpp	Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Negeri Under Review at District Court Level	Rp10.577.535.703 Rp10,577,535,703	Tidak berpengaruh karena Gugatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri No impact as the lawsuit is outside the jurisdiction of the District Court
14.	Gugatan No. 664/Pdt.G/2024/PN Mdn Lawsuit No. 664/Pdt.G/2024/PN Mdn	Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Negeri Under Review at District Court Level	Rp10.497.197.015 Rp10,497,197,015	Tidak berpengaruh signifikan No significant impact
15.	Gugatan No. 86/Pdt.G/2024/PN Pmn Lawsuit No. 86/Pdt.G/2024/PN Pmn	Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Negeri Under Review at District Court Level	Rp82.561.526.666,67 Rp82,561,526,666.67	Tidak berpengaruh signifikan karena substansi perkara tidak terkait langsung dengan Perusahaan No significant impact as the case's substance is not directly related to the company

No	Pokok Perkara / Gugatan Case / Lawsuit	Status Penyelesaian Resolution Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Claim Amount	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on Company Condition
16.	Perkara Banding Pajak Nomor PUT-004766.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 Tax Appeal Case No. PUT-004766.15/2022/PP/M.XVB Year 2024	Pemeriksaan di Tingkat Peninjauan Kembali Under Review at Judicial Review Level	Rp8.875.006.000.000,00 Rp8,875,006,000,000.00	Berpengaruh signifikan karena nilai yang cukup besar Significant impact due to the large claim amount
17.	Perkara Banding Pajak Nomor PUT-004767.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 Tax Appeal Case No. PUT-004767.15/2022/PP/M.XVB Year 2024	Pemeriksaan di Tingkat Peninjauan Kembali Under Review at Judicial Review Level	Rp4.740.000.000.000,00 Rp4,740,000,000,000.00	Berpengaruh signifikan karena nilai yang cukup besar Significant impact due to the large claim amount

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Sampai dengan Desember 2024, tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

LEGAL CASES FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN OFFICE

As of December 2024, there are no ongoing legal cases involving the current Board of Commissioners and Directors.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

LEGAL CASES FACED BY SUBSIDIARIES

No	Pokok Perkara / Gugatan Case / Lawsuit	Status Penyelesaian Resolution Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Claim Amount	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on Company Condition
Kasasi atas Putusan No. 1293/PDT/2024/PT DKI (Kasasi Perkara No. 379/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim) Cassation on Decision No. 1293/PDT/2024/PT DKI (Cassation Case No. 379/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim)	Pengajuan kasasi Cassation filed Proposal perdamaian dari Azbindo Settlement proposal from Azbindo	Rp11,546 Triliun Rp11.546 trillion	-	Tidak terpengaruh jika tercapai kesepakatan perdamaian No impact if a settlement agreement is reached	Kasasi atas Putusan No. 1293/PDT/2024/PT DKI (Kasasi Perkara No. 379/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim) Cassation on Decision No. 1293/PDT/2024/PT DKI (Cassation Case No. 379/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim)

Sanksi Administratif yang Dikenakan kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Administrative Sanctions Imposed on The Company, Board of Commissioners, and Directors by Capital Market Authorities and Other Regulators

Selama tahun 2024 terdapat 1 sanksi adminstratif oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjatuhkan sanksi peringatan tertulis I kepada PT Hutama Karya (Persero) karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan per 30 Juni 2024. Selain itu, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

In 2024, there was one administrative sanction issued by the Indonesia Stock Exchange (BEI), which imposed a first written warning on PT Hutama Karya (Persero) due to the late submission of the financial report as of June 30, 2024. Apart from this, no administrative sanctions were imposed on the Board of Commissioners and Directors.

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access To Company Information and Data

Sebagai wujud implementasi prinsip keterbukaan informasi, Perseroan menyediakan sarana dan fasilitas komunikasi untuk memudahkan para pemangku kepentingan memperoleh berbagai informasi terkait aktivitas dan kinerja yang tidak berklasifikasi rahasia. Seluruh informasi berkaitan dengan PT Hutama Karya (Persero) dapat diperoleh pada alamat:

Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero)
Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340
Telepon : (021) 8196107
Website : www.hutamakarya.com

As part of its commitment to transparency, the Company provides communication channels and facilities to facilitate stakeholders in accessing various non-confidential information related to its activities and performance. All information regarding PT Hutama Karya (Persero) can be accessed at:

Corporate Secretary of PT Hutama Karya (Persero)
Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340
Phone : (021) 8196107
Website : www.hutamakarya.com

INVESTOR RELATION

1. Meeting & Conference

    - Investor / *Analyst Meeting & Company Updates*

Investor & Analyst Meeting merupakan kegiatan pertemuan antara perusahaan dengan investor maupun analis baik individual maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun daring. Pertemuan ini dilakukan sebagai sarana komunikasi terkait informasi terkini Perusahaan terutama pada kinerja keuangan. Selain itu pertemuan ini juga sebagai salah satu upaya menjaga hubungan baik dengan investor baik di dalam maupun di luar negeri. Materi *Company Update* merupkan materi presentasi perusahaan yang berisi informasi terkini terkait kinerja operasional maupun keuangan yang dapat diunduh di website Perusahaan.

Adapun realisasi jadwal *analyst meeting* yang dilakukan tim investor relations sebagai berikut:

INVESTOR RELATION

1. Meeting & Conference

    - Investor / Analyst Meeting & Company Updates

Investor & Analyst Meeting are sessions between the company and investors or analysts, conducted either individually or in groups, both in-person and virtually. These meetings serve as a communication platform to provide updates on the company's latest information, particularly its financial performance. Additionally, they help maintain good relationships with investors both domestically and internationally. The Company Update is a presentation containing the latest operational and financial performance information, which can be downloaded from the company's website.

Below is the schedule of analyst meetings conducted by the Investor Relations team:

No	Tanggal Date	Peserta Participant
1	Jumat, 23 Februari 2024 Friday, February 23, 2024	Fitch Ratings
2	Rabu, 20 Maret 2024 Wednesday, March 20, 2024	Fitch Ratings
3	Rabu, 17 April 2024 Wednesday, April 17, 2024	Moody's Rating
4	Jumat, 05 Mei 2024 Friday, May 5, 2024	Pefindo
5	Senin, 13 Mei 2024 Monday, May 13, 2024	Pefindo
6	Kamis, 16 Mei 2024 Thursday, May 16, 2024	RHB Sekuritas dan BPJS Ketenagakerjaan

No	Tanggal Date	Peserta Participant
7	Senin, 29 Mei 2024 Monday, May 29, 2024	Fitch Ratings
8	Selasa, 04 Juni 2024 Tuesday, June 4, 2024	Bank of America
9	Rabu, 19 Juni 2024 Wednesday, June 19, 2024	Macquarie Sekuritas Indonesia, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas
10	Rabu, 28 Agustus 2024 Wednesday, August 28, 2024	Moody's Rating
11	Selasa, 12 November 2024 Tuesday, November 12, 2024	Macquarie International
12	Selasa, 19 November 2024 Tuesday, November 19, 2024	Moody's Rating
13	Rabu, 20 November 2024 Wednesday, November 20, 2024	Bank of America
14	Kamis, 21 November 2024 Thursday, November 21, 2024	Moody's Rating
15	Senin, 09 Desember 2024 Monday, December 2024	Sucorinvest Asset Management

- Conference
  Dengan mengikuti kegiatan konferensi ini merupakan salah satu cara Perusahaan dalam upaya membangun reputasi dan *networking* serta mendapat *insight* baru terhadap topik terkini baik terkait *market* maupun lintas industri.

- Conference
  Participating in conferences is one of the company's strategies to build its reputation and networking, and gain new insights on current topics, whether related to the market or across industries.

Adapun realisasi jadwal conference yang dilakukan tim investor relations sebagai berikut:

Below is the schedule of conferences attended by the Investor Relations team:

No	Tanggal	Penyelenggara	Tema
1	Rabu, 24 Juli 2024	Fitch Ratings	Indonesia Corporate Roundtable 2024: Key Credit Trends for Indonesian Corporates
2	Rabu, 4 September 2024	Bank MUFG	MUFG NOW: Indonesia's Transition to Net Zero Carbon

2. Kepatuhan dan Pelaporan
   - Pelaporan Utang Luar Negeri (ULN) & Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK)
     PT Hutama Karya (Persero) memiliki kewajiban untuk memenuhi pelaporan Utang Luar Negeri (ULN) dan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) sebagai akibat dari penerbitan Global Medium-Term Notes (GMTN) pada tahun 2020. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Hutama Karya harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, termasuk pelaporan posisi ULN secara berkala. Pelaporan ini mencakup informasi terkait struktur utang, jumlah, tenor, tingkat bunga, serta jadwal pembayaran. Selain itu, Hutama Karya wajib menyampaikan laporan KPPK, yang meliputi rencana penggunaan dana hasil penerbitan GMTN, pengelolaan risiko valuta asing, dan kapasitas pembayaran

2. Compliance and Reporting
   - Foreign Debt Reporting (ULN) & Prudential Principles Implementation Reporting (KPPK)
     PT Hutama Karya (Persero) is required to fulfill reporting obligations for External Debt (ULN) and Prudential Principles Implementation (KPPK) following the issuance of Global Medium-Term Notes (GMTN) in 2020. As a State-Owned Enterprise (SOE), Hutama Karya must ensure compliance with regulations set by Bank Indonesia and the Ministry of Finance, including the periodic reporting of its external debt position. This reporting includes details on debt structure, amount, tenor, interest rates, and payment schedules. Additionally, Hutama Karya must submit KPPK reports, covering the planned use of GMTN proceeds, foreign exchange risk management, and debt repayment capacity to ensure prudent financial management. These reporting obligations aim to support transparency, accountability,

utang, guna memastikan pengelolaan keuangan yang prudent. Pelaporan ini bertujuan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko keuangan, sesuai dengan tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan pembiayaan strategis untuk proyek-proyek nasional.

and financial risk mitigation, which is in line with the company's responsibility to manage strategic financing for national projects.

Sepanjang tahun 2024 PT Hutama Karya (Persero) telah melakukan pelaporan ULN dan Pelaporan KPPK sebanyak 18 kali sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri dan Peraturan Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

Throughout 2024, PT Hutama Karya (Persero) has submitted 18 reports on External Debt (ULN) and Prudential Principles Implementation (KPPK) in compliance with Bank Indonesia Regulation No. 12/24/PBI/2010 on External Debt Reporting Obligations and Regulation No. 16/22/PBI/2014 on the Application of Prudential Principles in the Management of External Debt for Non-Bank Corporations.

- Laporan Manajemen
  PT Hutama Karya (Persero) memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Manajemen secara berkala kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam mengelola aset negara, sekaligus menjadi media komunikasi strategis mengenai kinerja operasional, keuangan, dan pelaksanaan proyek nasional yang menjadi mandat Hutama Karya. Laporan tersebut mencakup pencapaian Key Performance Indicators (KPI), perkembangan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebagai Proyek Strategis Nasional, serta langkah mitigasi risiko terkait pendanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, laporan ini juga harus menjelaskan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta rencana strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Melalui pelaporan ini, Kementerian BUMN dapat mengevaluasi pencapaian target perusahaan, memberikan arahan strategis, serta memastikan bahwa aktivitas Hutama Karya selaras dengan visi pembangunan dan kepentingan nasional.

- Management Report
  PT Hutama Karya (Persero) is required to submit periodic Management Reports to the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) as the shareholder. These reports serve as a form of accountability and transparency in managing state assets while also acting as a strategic communication tool regarding the company's operational performance, financial status, and execution of national projects under Hutama Karya's mandate. The report covers Key Performance Indicator (KPI) achievements, updates on the Trans Sumatera Toll Road (JTTS) as a National Strategic Project, and risk mitigation measures related to project funding and implementation. Additionally, it details the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and strategic plans to support national infrastructure development. Through this reporting, the Ministry of SOE can evaluate corporate targets, provide strategic direction, and ensure that Hutama Karya's activities align with national development goals and interests.

Sepanjang tahun 2024 PT Hutama Karya (Persero) telah melakukan menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Kementerian BUMN sebanyak 5 kali sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Throughout 2024, PT Hutama Karya (Persero) has submitted Quarterly and Annual Management Reports to the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) a total of five times, under Minister of SOE Regulation No. Per-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

- Rating Perusahaan

  PT Hutama Karya (Persero) wajib memastikan pemenuhan peringkat kredit (*credit rating*) terhadap obligasi yang diterbitkan perusahaan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi pasar modal dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Peringkat kredit ini diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara nasional maupun internasional untuk menilai kelayakan kredit dan risiko investasi obligasi perusahaan. Pemenuhan peringkat ini memberikan transparansi kepada investor terkait kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Selain itu, peringkat kredit yang baik mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan dan tata kelola perusahaan, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan penerbitan obligasi dalam mendanai proyek-proyek strategis.

- Company Rating

  PT Hutama Karya (Persero) is required to maintain credit ratings for its issued bonds as part of compliance with capital market regulations and prudential debt management principles. These credit ratings are issued by nationally and internationally recognized rating agencies to assess the company's creditworthiness and investment risk. Maintaining a strong credit rating ensures transparency for investors, providing them with insights into the company's ability to meet interest and principal debt obligations. Additionally, a favorable credit rating reflects market confidence in the company's financial stability and corporate governance, ultimately supporting the success of bond issuances in financing strategic projects.

Selama tahun 2024, PT Hutama Karya (Persero) telah melakukan *Annual Credit Rating* bersama *credit rating agency* lokal dan internasional dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2024, PT Hutama Karya (Persero) has conducted Annual Credit Ratings with both local and international credit rating agencies, as detailed below:

Date	Rating Agency
04 April 2024 April 4, 2024	Fitch
14 Mei 2024 May 14, 2024	Pefindo
28 Mei 2024 & 2 Desember 2024 May 28 & December 2, 2024	Moody's

SIARAN PERS

PRESS RELEASE

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
1	8 Januari 2024 January 8, 2024	1,5 Juta Kendaraan Pilih Lintasi JTTS Selama Nataru, Trafik Meningkat Hingga 52% 1.5 Million Vehicles Choose to Cross JTTS During Christmas and New Year, Traffic Increases by 52%
2	31 Januari 2024 January 31, 2024	Hutama Karya Raih Kontrak Strategis Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi dan Gedung Jampidsus Hutama Karya Wins Strategic Contract for Integrated Shrimp Farming and Jampidsus Building
3	7 Februari 2024 February 7, 2024	Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Indrapura – Lima Puluh dan Tebing Tinggi – Indrapura President Jokowi Inaugurates Indrapura – Lima Puluh and Tebing Tinggi – Indrapura Toll Roads
4	20 Februari 2024 February 20, 2024	Jalan Tol Indralaya - Prabumulih Mulai Berlaku Tarif Pada 20 Februari 2024 Pukul 12.00 WIB Indralaya - Prabumulih Toll Road Fares Start Applying on February 20, 2024 at 12.00 WIB
5	29 Februari 2024 February 29, 2024	Hutama Karya Akan Terapkan Tarif Gerbang Tol Lima Puluh - Junction Indrapura Mulai 29 Februari 2024 Pukul 12.00 WIB Hutama Karya Will Apply Tariffs for Lima Puluh - Junction Indrapura Toll Gate Starting February 29, 2024 at 12.00 WIB

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
6	10 Maret 2024 March 10, 2024	Gerak Cepat, HK Group Turunkan Bantuan Atasi Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Pariaman HK Group quickly Provides Assistance to Overcome Flood and Landslide Disasters in Pariaman
7	15 Maret 2024 March 15, 2024	Tanggapan PT Hutama Karya (Persero) Mengenai Kasus Korupsi Lahan Yang Melibatkan Mantan Pejabat Hutama Karya PT Hutama Karya (Persero)'s Response Regarding Land Corruption Case Involving Former Hutama Karya Officials
8	15 Maret 2024 March 15, 2024	Mulai Tanggal 18 Maret 2024 Pukul 12.00 WIB Akan Diterapkan Tarif Baru Pada Jalan Tol Palembang - Indralaya dan Pekanbaru Starting March 18, 2024 at 12.00 WIB, New Tariffs Will Be Applied on the Palembang - Indralaya Toll Road and Pekanbaru
9	15 Maret 2024 March 15, 2024	Kementerian BUMN Umumkan Pergantian Nomenklatur Jabatan Direktur PT Hutama Karya (Persero) Ministry of SOE Announces Change of Nomenclature of Director Position of PT Hutama Karya (Persero)
10	27 Maret 2024 March 27, 2024	Hutama Karya Buka Peluang Karir Di Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Hutama Karya Opens Career Opportunities in Joint Recruitment of SOE 2024
11	27 Maret 2024 March 27, 2024	Jelang Mudik, Hutama Karya Imbau Pengguna Jalan Menyiapkan Sisa Saldo Tarif Jalan Tol Trans Sumatera Yang Akan Dilewati Ahead of Homecoming, Hutama Karya Urges Road Users to Prepare Remaining Balance of Trans Sumatra Toll Road Tariffs That Will Be Passed
12	29 Maret 2024 March 29, 2024	63 Tahun Berkarya, Hutama Karya Jawab Tantangan Pembangunan Infrastruktur 63 Years of Work, Hutama Karya Answers Challenges of Infrastructure Development
13	1 April 2024 April 1, 2024	Hutama Karya Umumkan Pergantian EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Announces Change of EVP Corporate Secretary
14	4 April 2024 April 4, 2024	Dukung Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024, Dua Ruas Kutepat Dibuka Secara Fungsional Supporting the 2024 Eid Homecoming and Return Traffic, Two Sections of Ketupat are Functionally Opened
15	16 April 2024 April 16, 2024	Kinerja Keuangan Impresif Tahun 2023, Hutama Karya Kantongi Laba Bersih Rp1,872 Triliun Impressive Financial Performance in 2023, Hutama Karya Pockets a Net Profit of Rp1.872 Trillion
16	24 April 2024 April 24, 2024	Optimalkan Pmn Tahun Anggaran 2024, Hutama Karya Pastikan Keberlanjutan Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Optimizing Pmn in the 2024 Fiscal Year, Hutama Karya Ensures the Continuity of the Trans Sumatra Toll Road Business Assignment
17	25 April 2024 April 25, 2024	Ditinjau Jokowi, Hutama Karya Optimis Proyek Bendungan Bulango Ulu Rampung Akhir Tahun 2024 Reviewed by Jokowi, Hutama Karya is Optimistic that the Bulango Ulu Dam Project will be Completed by the End of 2024
18	14 Mei 2024 May 14, 2024	Mulai 15 Mei 2024 Pukul 07.00 Wib, Jalan Tol Indrapura - Kisaran Seksi Lima Puluh - Kisaran Beroperasi Tanpa Tarif Starting May 15, 2024 at 07.00 WIB, the Indrapura - Kisaran Toll Road, Section Lima Puluh - Kisaran, will Operate Without Tariffs
19	14 Mei 2024 May 14, 2024	Diresmikan Presiden Jokowi, Bendungan Ameroro Garapan Hutama Karya Hadirkan Sejumlah Manfaat Inaugurated by President Jokowi, the Ameroro Dam by Hutama Karya Brings number of Benefits
20	18 Mei 2024 May 18, 2024	Hutama Karya Selesaikan Kewajiban Pembayaran Vendor Proyek Pengembangan Pipa Cilacap-Bandung III Hutama Karya Completes Payment Obligations for Vendors for the Cilacap-Bandung III Pipeline Development Project
21	20 Mei 2024 May 20, 2024	Atas Dukungan Berbagai Pihak, Hutama Karya Pastikan Tol Padang Sicincin Semakin Progresif With the Support of Various Parties, Hutama Karya Ensures the Padang Sicincin Toll Road is Increasingly Progressive
22	21 Mei 2024 May 21, 2024	Dukung Pembangunan Infrastruktur Air, Hutama Karya Hadir Di World Water Forum Ke-10 Supporting Water Infrastructure Development, Hutama Karya Present at the 10th World Water Forum

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
23	5 Juni 2024 June 5, 2024	Holding Statement
24	5 Juni 2024 June 5, 2024	Perkuat Akses Riau, Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Bangkinang – Koto Kampar Garapan Hutama Karya Strengthening Riau Access, President Jokowi Inaugurates Bangkinang – Koto Kampar Toll Road by Hutama Karya
25	13 Juni 2024 June 13, 2024	Dalam Waktu Dekat Akan Ditetapkan Tarif, Berikut Besaran Tarif Tol Indrapura – Kisaran Seksi Lima Puluh - Kisaran Tariffs Will Be Determined in the Near Future, Here are the Tariffs for the Indrapura – Kisaran Toll Road, Section Lima Puluh - Kisaran

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

TRANSPARENCY IN REPORT SUBMISSION

No	No Surat Letter No.	Tanggal Date	Perihal Subject
1	SP/AR.149/DIV/30/I/2024	Feb 1, 2024	Informasi Perubahan Pengurus Information on Management Changes
2	SP/AR.256/DIV/50/II/2024	Feb 22, 2024	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Appointment of Public Accounting Firm
3	SP/AR.289/DIV/55/II/2024	Mar 1, 2024	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Submission of Annual General Meeting Agenda
4	SP/AR.388/DIV/76/III/2024	Mar 18, 2024	Informasi Perubahan Pengurus Information on Management Changes
5	DK/AK.981/DIV/90/III/2024	Mar 29, 2024	Penyampaian Laporan Keuangan Submission of Financial Report
6	SP/AR.491/DIV/98/IV/2024	Apr 1, 2024	Informasi Perubahan Corporate Secretary Information on Corporate Secretary Changes
7	SP/AR.492/DIV/99/IV/2024	Apr 1, 2024	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan Submission of Annual Financial Report Advertisement Proof
8	DU/SP.1061/DIV/98/IV/2024	Apr 6, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
9	SP/AR.613/DIV/122/IV/2024	Apr 30, 2024	Penyampaian Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Submission of Annual and Sustainability Report
10	SP/AR.676/DIV/134/V/2024	May 15, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
11	SP/AR.696/DIV/141/V/2024	May 15, 2024	Laporan Informasi dan Fakta Material Information and Material Facts Report
12	SP/AR.709/DIV/142/V/2024	May 16, 2024	Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan Annual Rating Report
13	SP/AR.757/DIV/149/V/2024	May 29, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
14	SP/AR.773/DIV/155/V/2024	May 31, 2024	Informasi Perubahan Pengurus Information on Management Changes
15	DK/SP.1780/DIV/169/VI/2024	Jun 15, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies

No	No Surat Letter No.	Tanggal Date	Perihal Subject
16	SP/AR.968/DIV/203/VI/2024	Jun 28, 2024	Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Report on the Realization of Public Accountant and Public Accounting Form Services Usage
17	SP/AR.1174/DIV/235/VII/2024	Jul 25, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
18	SP/AR.1175/DIV/236/VII/2024	Jul 25, 2024	Laporan Informasi dan Fakta Material Information and Material Facts Report
19	SP/AR.1211/DIV/242/VII/2024	Jul 31, 2024	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim Submission of Interim Financial Report Advertisement Proof
20	DK/AK.3520/DIV/226/VII/2024	Aug 1, 2024	Penyampaian Laporan Keuangan Submission of Financial Report
21	SP/AR.1227/DIV/243/VIII/2024	2-Aug-24	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Submission of Annual General Meeting Agenda
22	SP/AR.1331/DIV/258/VIII/2024	Aug 16, 2024	Korespondensi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa Correspondence from Listed Company to the Stock Exchange
23	SP/AR.1332/DIV/260/VIII/2024	Aug 16, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
24	SP/AR.1369/DIV/266/VIII/2024	Aug 23, 2024	Laporan Informasi dan Fakta Material Information and Material Facts Report
25	DU/SP.3826/DIV/254/VIII/2024	Aug 26, 2024	Laporan Informasi dan Fakta Material Information and Material Facts Report
28	SP/AR.1422/DIV/275/VIII/2024	Aug 30, 2024	Korespondensi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa Correspondence from the Listed Company to the Stock Exchange
29	SP/AR.1613/DIV/306/IX/2024	Sep 27, 2024	Informasi Perubahan Komite Audit Information on Audit Committee Changes
30	SP/AR.1649/DIV/311/X/2024	Oct 1, 2024	Korespondensi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa Correspondence from Listed Company to the Stock Exchange
31	SP/AR.1660/DIV/313/X/2024	Oct 2, 2024	Informasi Perubahan Internal Audit Information on Audit Committee Changes
32	SP/AR.1782/DIV/343/X/2024	Oct 14, 2024	Informasi Perubahan Internal Audit Information on Internal Audit Changes
33	SP/AR.1755/Intern/273/X/2024	Oct 14, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
34	SP/AR.1880/DIV/360/X/2024	Aug 30, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
35	SP/AR.1932/DIV/369/XI/2024	Nov 6, 2024	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Appointment of Public Accounting Firm
36	SP/AR.1951/DIV/377/XI/2024	Nov 8, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies

No	No Surat Letter No.	Tanggal Date	Perihal Subject
37	DU/SP.4769/DIV/331/XI/2024	Nov 11, 2024	Laporan Informasi dan Fakta Material Information and Material Facts Report
38	SP/AR.2016/DIV/397/XI/2024	Nov 18, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
39	SP/AR.2042/DIV/410/XI/2024	Nov 19, 2024	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Explanation from Issuers and Other Public Companies
40	SP/AR.2080/DIV/416/XI/2024	Nov 26, 2024	Laporan Informasi dan Fakta Material Information and Material Facts Report
41	SP/AR.2081/DIV/417/XI/2024	Nov 26, 2024	Laporan Informasi dan Fakta Material Information and Material Facts Report

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari Etika Bisnis dan Etika Perilaku yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) merupakan bagian dari pelaksanaan GCG di Perusahaan yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam interaksi dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan standar etika berusaha.

The Code of Conduct is a set of commitments comprising Business Ethics and Behavioral Ethics, designed to influence, shape, regulate, and align behavior to achieve consistent outcomes that align with the Company's culture in pursuing its vision and mission. The Code of Conduct is an integral part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company, serving as a reference in conducting business activities, including interactions with stakeholders, based on moral values and ethical business standards.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Standar Etika Kerja dan Etika Bisnis dalam berhubungan dengan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Kepedulian Terhadap Kepentingan Karyawan
   Aspek yang diatur terkait pelindungan terhadap kepentingan Karyawan mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengelolaan Karyawan
   b. Kesempatan yang Sama, Pelecehan, Ancaman dan Kekerasan
   c. *Quality, Health, Safety, Security & Environment* (QHSSE) & *Road Traffic Safety* (RTS)
2. Etika dengan *Stakeholders*
   Aspek yang diatur terkait Hubungan dengan stakeholders, mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Hubungan dengan Pemegang Saham
   b. Hubungan dengan Kreditur
   c. Hubungan dengan Pesaing
   d. Hubungan dengan Pelanggan
   e. Hubungan dengan Pemasok
   f. Hubungan dengan Regulator
   g. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas dan Lingkungan
   h. Benturan Kepentingan
   i. Pengendalian Gratifikasi
   j. Pembayaran Tidak Wajar (Imbalan), Donasi dan Partisipasi Politik
   k. Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Pelindungan Aset dan Informasi Perusahaan
   Aspek yang diatur terkait Pelindungan Aset dan Informasi Perusahaan mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Integritas Laporan Keuangan
   b. Pengawasan dan Pelindungan Aset
   c. Pelindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual / HAKI

KEY PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The standards of Work Ethics and Business Ethics in dealing with both internal and external stakeholders include the following:

1. Concern for Employee Interests
   The aspects regulated regarding the protection of employee interests include:
   a. Employee Management
   b. Equal Opportunities, Harassment, Threats, and Violence
   c. Quality, Health, Safety, Security & Environment (QHSSE) & Road Traffic Safety (RTS)
2. Ethics with Stakeholders
   The aspects regulated in relation to stakeholder relationships include:
   a. Relationship with Shareholders
   b. Relationship with Creditors
   c. Relationship with Competitors
   d. Relationship with Customers
   e. Relationship with Suppliers
   f. Relationship with Regulators
   g. Relationship with Society, Communities, and the Environment
   h. Conflict of Interest
   i. Gratification Control
   j. Improper Payments (Remuneration), Donations, and Political Participation
   k. Equality and Respect for Human Rights (HR)
3. Protection of Company Assets and Information
   The aspects regulated regarding the protection of company assets and information include:
   a. Financial Report Integrity
   b. Supervision and Protection of Assets
   c. Protection of Intellectual Property Rights (IPR)

d. Pelindungan Informasi dan Data Perusahaan

e. Penyimpanan Dokumen
f. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

4. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
   Aspek yang diatur terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Perjanjian yang Dilarang
   b. Kegiatan yang Dilarang
   c. Penyalahgunaan Posisi Dominan
5. Anti *Fraud* dan Tindakan Anti Pencucian Uang
   a. Uji Kelayakan (*Due Diligence*) terhadap Proyek
   b. Uji Kelayakan (*Due Diligence*) terhadap Transaksi/ Aktivitas
   c. Uji Kelayakan (*Due Diligence*) terhadap Rekan Bisnis
   d. Uji Kelayakan (*Due Diligence*) terhadap Pegawai
   e. Pengendalian Transaksi Keuangan
   f. Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Kode Etik Perseroan berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Hutama Karya di seluruh jenjang organisasi Perseroan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Hutama Karya wajib membaca, memahami, dan melaksanakan isi Kode Etik Perseroan dengan benar. Selain itu juga diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen pribadi untuk mentaati dan melaksanakan kode etik tersebut secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Perseroan melakukan sosialisasi *Code of Conduct* secara berkala guna memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran seluruh insan Hutama agar senantiasa menegakkan Standar Etika Perusahaan. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh karyawan termasuk karyawan baru.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penyebarluasan *Code of Conduct* melalui broadcast whatsapp kepada seluruh karyawan pada 22 Mei 2024 dan 6 Juni 2024. Selain itu, perseroan juga memastikan seluruh insan Hutama menandatangani komitmen kepatuhan terhadap *Code of Conduct.*

d. Protection of Company Information and Data
e. Document Storage
f. Information and Communication Technology System

4. Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition
   The aspects regulated regarding the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition include:
   a. Prohibited Agreements
   b. Prohibited Activities
   c. Abuse of Dominant Position
5. Anti-Fraud and Anti-Money Laundering Actions
   a. Due Diligence on Projects
   b. Due Diligence on Transactions/Activities
   c. Due Diligence on Business Partners
   d. Due Diligence on Employees
   e. Financial Transaction Control
   f. Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing

COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct applies to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of Hutama Karya at every level of the organization. The Board of Commissioners, Directors and every individual within Hutama Karya is required to read, understand, and correctly implement the contents of the Code of Conduct. Additionally, they must sign a personal commitment statement to adhere to and consistently uphold the Code of Conduct with full responsibility.

DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCT

The Company periodically conducts socialization of the Code of Conduct to enhance understanding and raise awareness among all Hutama Karya employees, ensuring they consistently uphold the Company's Ethical Standards. This socialization is provided to all employees, including new hires.

In 2024, the dissemination of the Code of Conduct was carried out through WhatsApp broadcasts to all employees on May 22, 2024, and June 6, 2024. Additionally, the Company ensures that all Hutama Karya personnel sign a commitment to comply with the Code of Conduct.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk mengesahkan dan mengimplementasikan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*). Dewan Komisaris dan Direksi memastikan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) sebagai standar perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Insan Hutama dalam kegiatan operasional sehari-hari. Seluruh Insan Hutama wajib memiliki Buku *Code of Conduct* sebagai pedoman dalam berperilaku dan berbisnis dengan mitra Perusahaan.

Seluruh Insan Hutama wajib membaca, memahami dan melaksanakan isi Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis dengan baik dan benar. Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi menandatangani Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik yang merupakan komitmen Insan Hutama untuk mentaati dan melaksanakan *Code of Conduct* dan diperbaharui setiap awal tahun. Seluruh Karyawan Perusahaan menandatangani Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik yang merupakan komitmen Insan Hutama untuk mentaati dan melaksanakan Code of Conduct dan diperbaharui setiap awal tahun.

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis, maka dengan demikian setiap laporan atas (potensi dan/atau indikasi) pelanggaran *Code of Conduct* akan ditangani sebagai berikut:

1. Setiap Insan Hutama harus melaporkan setiap fakta penyimpangan *Code of Conduct* kepada Pihak Terkait dan identitas pelapor dilindungi.
2. Menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi.
3. Perusahaan menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan *stakeholders* termasuk Karyawan terkait dengan pelanggaran Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis.
4. Karyawan yang melakukan penyimpangan *Code of Conduct* memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
5. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat Pelindungan hukum dari Perusahaan.
6. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan.
7. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Perusahaan.

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

The Board of Commissioners and Directors are committed to endorsing and implementing the Code of Conduct. They ensure that the Code of Conduct serves as the mandatory behavioral standard for all Hutama Karya personnel in their daily operations. All Hutama Karya personnel are required to possess a copy of the Code of Conduct as a reference for ethical behavior and business interactions with the Company's partners.

All Hutama Karya personnel must read, understand, and properly implement the Code of Conduct. Each member of the Board of Commissioners and Directors signs an Integrity Pact and Code of Ethics Commitment, reaffirming their dedication to adhering to the Code of Conduct. This commitment is renewed at the beginning of each year. Similarly, all company employees must sign the Integrity Pact and Code of Ethics Commitment annually as a pledge to uphold and implement the Code of Conduct.

A violation refers to any behavior, action, or deed that deviates from the Code of Conduct. Therefore, every report regarding (potential and/or indicated) violations of the Code of Conduct will be handled as follows:

1. Every Hutama Karya employee must report any factual deviations from the Code of Conduct to the relevant authority, and the identity of the whistleblower will be protected.
2. Each report will be followed up, and the findings will be submitted to the Board of Directors.
3. The company will address all violation reports submitted by stakeholders, including employees, concerning breaches of the Code of Conduct.
4. Employees who commit violations have the right to be heard and explain their actions before their direct supervisor prior to any disciplinary action or corrective measures.
5. Individuals who participate in reporting violations are entitled to legal protection from the company.
6. Those who significantly contribute to protecting the company by exposing material or non-material damages are eligible for recognition and rewards from the company.
7. Further explanations and provisions are regulated under the company's Whistleblowing System (WBS) Policy and Procedures.

Setiap Insan Hutama menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan memiliki konsekuensi bagi dirinya, antara lain:
1. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis akan ditindak lanjuti secara tegas dan konsisten;
2. Insan Hutama yang terbukti melakukan pelanggaran atas *Code of Conduct* akan menerima sanksi berupa tindakan-tindakan disipliner sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya

Every Hutama Karya employee acknowledges that any violation of the Code of Conduct will have consequences, including:
1. Violations of the Work Ethics and Business Ethics Guidelines will be addressed firmly and consistently;
2. Hutama Karya employee found guilty of violating the Code of Conduct will face disciplinary actions proportionate to the severity of the violation.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi ringan:
1. Teguran tertulis pertama; dan
2. Teguran tertulis kedua

Sanksi sedang:
1. Peringatan tertulis pertama;
2. Peringatan tertulis kedua; dan
3. Peringatan tertulis keras dan terakhir.

Sanksi berat:
Pemberhentian/pemutusan hubungan kerja.

TYPES OF SANCTIONS FOR CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

Minor Sanctions:
1. First written warning; and
2. Second written warning

Moderate Sanctions:
1. First official reprimand;
2. Second official reprimand; and
3. Final and severe written reprimand.

Severe Sanctions:
Termination of employment.

JUMLAH PELANGGARAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

NUMBER OF VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED

Jumlah & Jenis Pelanggaran Periode Tahun 2024
Total & Types of Violations in 2024

No.	Jenis Pelanggaran Type of Violation	Jumlah Total Cases
1	Pelanggaran Indisipliner Disciplinary Violations	247
2	Penyimpangan Prosedur & Ketentuan Perusahaan Procedural & Corporate Policy Deviations	9
3	Tindaklanjut Laporan Hasil Audit SPI Follow-up on Internal Audit Reports	2
4	Tindaklanjut Laporan *Whistleblowing System* Follow-up on Whistleblowing System Reports	2
Total		260

Jumlah dan Jenis Sanksi Periode Tahun 2024
Total and Types of Sanctions in 2024

No.	Jenis Pelanggaran Type of Sanction	Jumlah Total Cases
1	Teguran Lisan Verbal Warning	238
2	Teguran Tertulis Written Warning	9
3	Surat Peringatan 1 First Warning Letter	5
4	Surat Peringatan 2 Second Warning Letter	4
5	Surat Peringatan 3 Third Warning Letter	2
6	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	2
Total		260

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA
LONG-TERM PERFORMANCE-BASED COMPENSATION POLICY

Pemberian kompensasi jangka Panjang berbasis kinerja yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dalam bentuk *Long Term Incentive* (LTI) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 3829/KPTS/76/VIII/2024 tentang Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2023 Direksi dan Dewan Komisaris PT Hutama Karya, Sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari nilai tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Hutama Karya yang menjabat dalam Tahun Buku 2023 akan ditangguhkan selama 3 (tiga) tahun dan dibayarkan setiap tahun secara pro rata setelah penutupan RUPS Tahunan atas Laporan Keuangan Tahun Buku yang bersangkutan.

The provision of long-term performance-based compensation to the Board of Commissioners and the Board of Directors is granted in the form of a Long-Term Incentive (LTI) in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Human Capital Governance of State-Owned Enterprises. Based on the Board of Directors' Decree Number 3829/KPTS/76/VIII/2024 concerning the Payment of Tantiem for the 2023 Fiscal Year to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Hutama Karya, 21% (twenty-one percent) of the tantiem value for the Board of Directors and Board of Commissioners who served during the 2023 Fiscal Year shall be deferred for a period of three (3) years and will be paid annually on a pro rata basis following the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the respective fiscal year.

Selain itu, karena Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat *Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Employee Program* (ESOP/MSOP) yang diterapkan oleh PT Hutama Karya (Persero).

Furthermore, as the Company is a State-Owned Enterprise (SOE) with 100% of its shares owned by the Government of the Republic of Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) does not implement any Employee Stock Ownership Program (ESOP) or Management Stock Option Program (MSOP).

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA
DISCLOSURE POLICY ON SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS AND ITS IMPLEMENTATION

Hutama Karya memiliki kebijakan yang mengharuskan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik di perusahaan maupun di entitas lain, melalui laporan yang diperbarui setiap tahun.

Hutama Karya has a policy requiring the the Board of Commissioners and Directors to disclose their share ownership, both in the company and in other entities, through an annually updated report.

Sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Direksi juga dilarang memiliki saham di perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan atau di entitas anaknya. Sehingga tidak terdapat pengungkapan informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan.

As a State-Owned Enterprise (SOE) fully owned by the Government, no members of the Board of Commissioners hold shares in the Company, either directly or indirectly. Additionally, Directors are prohibited from owning shares in companies affiliated with the Company or its subsidiaries.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) merupakan acuan mekanisme bagi pelaporan pelanggaran sehingga apabila ada pelanggaran yang terjadi, Perseroan memiliki penanganan secara internal terlebih dahulu sebelum menjadi pelanggaran yang bersifat publik. WBS juga ditujukan agar terdapat mekanisme deteksi dini untuk masalah pelanggaran. WBS juga diperlukan sebagai langkah antisipatif dari ketidakjelasan mekanisme pelaporan sehingga pelanggaran tidak dapat diatasi dengan tepat dan akan berujung pada pelanggaran di Perseroan menjadi tidak terkendali. Selain itu, WBS juga menjadi langkah antisipasi dari buruknya citra Perseroan karena pelanggaran tidak dikelola secara internal.

PENYAMPAIAN DAN MEDIA LAPORAN PELANGGARAN

Perseroan telah mengatur cara penyampaian laporan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak, tidak terbatas pada pihak internal saja akan tetapi juga untuk pihak eksternal. Dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, pelaporan wajib melengkapi dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Perseroan memiliki tiga media yang dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran:

1. Pelapor menyampaikan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Hutama kepada Tim Pengelola WBS dengan alamat:
   Tim Pengelola WBS PT Hutama Karya (Persero)
   Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340
2. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola WBS PT Hutama Karya (Persero) melalui saluran yang telah disediakan:

Telepon : (021)8196107
E-mail : wbs@hutamakarya.com
Website : https://wbs.hutamakarya.com
QR Code :

3. Pelapor dapat melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor maupun secara anonim, disertai nomor telepon yang dapat dihubungi.

Whistleblowing System (WBS) serves as a reference mechanism for reporting violations, ensuring that if any breaches occur, the Company can handle them internally first before they become public issues. WBS is also intended to establish an early detection mechanism for violations. It is necessary as a preventive measure to avoid ambiguity in the reporting process, which could lead to ineffective resolution and uncontrolled violations within the Company. Additionally, WBS helps safeguard the Company's reputation by ensuring that violations are managed internally and not left unaddressed.

REPORTING AND COMMUNICATION CHANNELS FOR VIOLATIONS

The Company has established procedures for submitting reports on violations, which can be made by all parties, including both internal and external stakeholders. When submitting a report of an alleged violation, the whistleblower must provide complete identification, including an address and a reachable phone number. The Company offers three reporting channels for violations:

1. The whistleblower submits a written report detailing the alleged violation committed by a Hutama Karya employee to the WBS Management Team at the following address:
   Tim Pengelola WBS PT Hutama Karya (Persero)
   Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340
2. Whistleblowers can also report alleged violations through dedicated communication channels provided by PT Hutama Karya (Persero):

Phone : (021)8196107
E-mail : wbs@hutamakarya.com
Website : https://wbs.hutamakarya.com
QR Code :

3. Whistleblowers may submit reports of alleged violations either with their full identity or anonymously, provided that they include a reachable phone number.

Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Tim Pengelola WBS menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut. Namun, apabila laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat 4W1H (*What, Where, When, Who dan How*) namun tanpa identitas pelapor maka Tim Pengelola WBS menyampaikan laporan tersebut kepada Pengarah WBS untuk mendapat persetujuan atau tidaknya dilakukan proses tindak lanjut.

Reports that do not meet the required criteria will be archived by the WBS Management Team. However, if a report meets the 4W1H criteria (What, Where, When, Who, and How) but lacks the whistleblower's identity, the WBS Management Team will forward the report to the WBS Advisory Board for approval on whether further action should be taken.

PELINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

Meskipun Perseroan mewajibkan pelapor untuk menyertakan identitas lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi akan tetapi kerahasiaan pelapor akan dijaga oleh Hutama Karya. Perseroan memandang Pelindungan pelapor akan menumbuhkan rasa aman bagi pejabat/karyawan Perseroan dan pelapor lainnya. Kebijakan Pelindungan pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap pejabat/karyawan Perseroan dan pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran.

Although the Company requires whistleblowers to provide their full identity, including address and contact number, Hutama Karya guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity. The Company believes that protecting whistleblowers fosters a sense of security among employees and other reporters. This protection policy is intended to encourage employees and stakeholders to report violations without fear of retaliation.

Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikad baik dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan Pelindungan pelapor. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Apabila masalah pelanggaran tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perseroan, misalnya mediator, lembaga pelindungan saksi dan korban atas biaya Perseroan. Direksi memberikan pelindungan kepada pelapor atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pemecatan yang tidak adil.
2. Penurunan jabatan atau pangkat.
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Hutama Karya is committed to protecting whistleblowers who report in good faith and complies with all relevant laws and best practices in whistleblower protection. Whistleblowers who experience retaliation, threats, or any form of pressure can report these incidents. If internal resolution is not possible, whistleblowers have the right to escalate their concerns to independent institutions, such as mediators or the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), at the Company's expense. The Board of Directors ensures protection for whistleblowers in the following areas:

1. Unfair Dismissal.
2. Demotion or downgrade in position.
3. Harassment or discrimination in any form.
4. Damaging records in personal files.

Selain pelindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, Perseroan juga akan menyediakan pelindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang- Undang No.15 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tidak hanya dijamin pelindungannya akan tetapi Perseroan juga akan memberikan penghargaan kepada pelapor yang mampu menyelamatkan kerugian Perseroan. Sementara itu, bagi pelaporan yang memiliki itikad baik atau bukti palsu atas laporan pelanggaran maka pelapor dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Perseroan.

In addition to the above protections, whistleblowers who act in good faith will also receive legal protection, in accordance with Article 43 of Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 on Money Laundering Crimes. Not only does the Company guarantee protection, but it also provides rewards for whistleblowers who successfully help prevent material losses to the Company. However, if a report is made in bad faith or based on false evidence, the whistleblower will be subject to sanctions as determined by the Company.

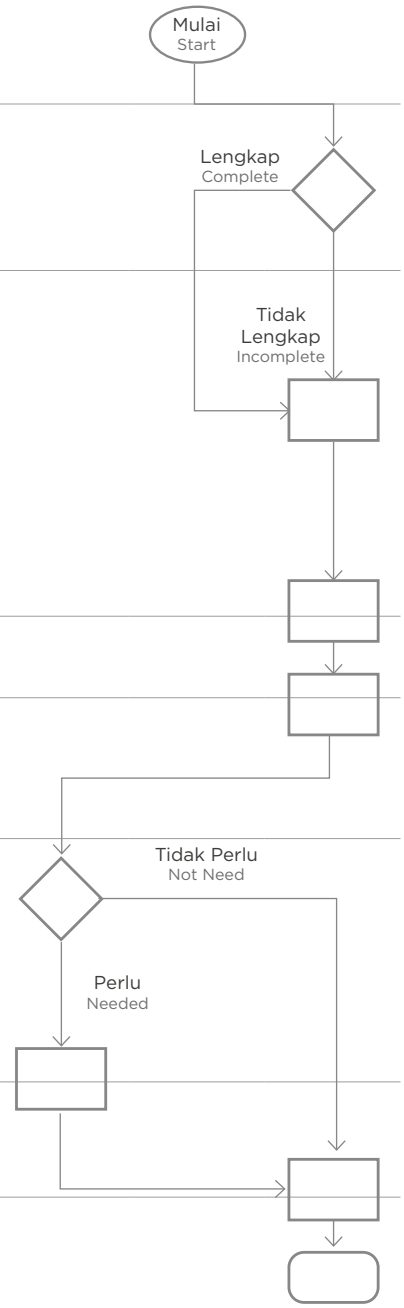
PENANGANAN PENGADUAN

HANDLING OF COMPLAINTS

Terlapor Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Karyawan

Reported Parties: Board of Directors and Board of Commissioners Subsidiaries and Employees

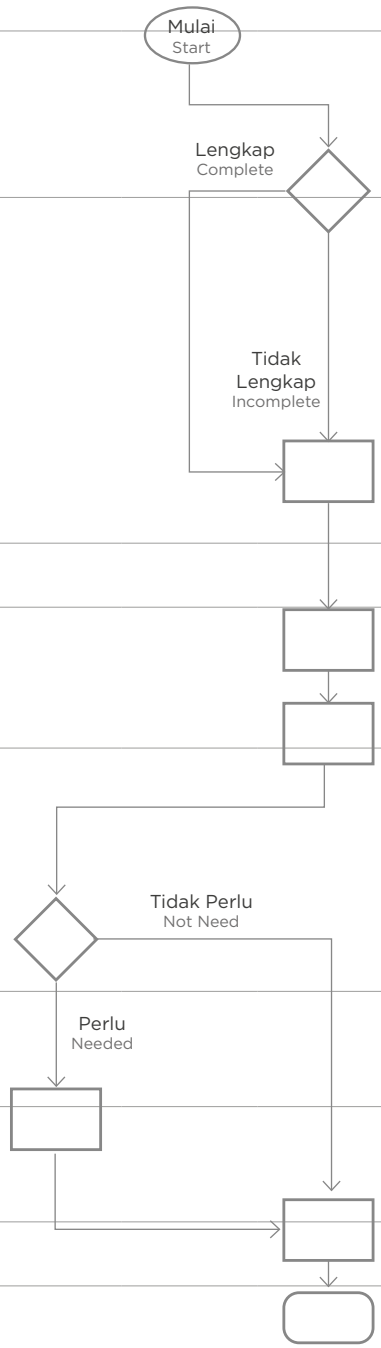
Input Indikator Input and Indicators	Output dan Indikator Output and Indicators	No	Proses dan Indikator Process and Indicators	Penanggung Jawab Party responsible Direktur Utama Main Director	Pelapor Whis-tleblower	Tim WBS WBS Team
INPUT: Laporan Dugaan pelanggaran Surat pemberitahuan ke Pelapor Report with Violations Notification Letter to the Whistleblower INDIKATOR INPUT: INPUT INDICATORS: Jumlah laporan dugaan pelanggaran Jumlah surat pemberitahuan ke Pelapor Number of Reports with Violations Number of Notification Letters to Whistleblowers	OUTPUT; Berita acara hasil penelitian awal Berita acara hasil audit investigasi Dokumentasi laporan pelanggaran Laporan berkala WBS Minutes of Initial Investigation Results Minutes of Investigative Audit Results Documentation of Violation Reports Periodic WBS Reports INDIKATOR OUTPUT: OUTPUT INDICATORS: Jumlah berita acara penelitian awal dan audit investigasi % realisasi penyelesaian pelanggaran dari jumlah yang dilaporkan Realisasi laporan berkala Number of Initial Investigation and Investigative Audit Reports Percentage of Resolved Violations from Total Reported Cases Implementation of Periodic Reports	1	Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran The reporter submits a report on alleged vioolations			
		2	Melakukan verifikasi pemenuhan unsur 4W1H dan data pendukung Verify compliance with the 4W1H elements and supporting data			
		3	Melakukan konfirmasi ke Pelapor untak meminta informasi, dokumen atau bukti tambahan jika laporan belum memenuhi unsur 4W1H dan data pendulung Confirm with the reporter to request additional information, documents, or evidence if the report does not meet the 4W1H elements and supporting data			
		4	Melakukan penelaahan Conduct a review			
		5	Melaporkan hasil penelitian awal dugaan pelanggaran Report the initial investigation results of the alleged violation			
		6	Rekomendasi Pengarah Whistleblowing System apakah perlu ditindaklanjut dengan Audit Investigasi atau tidak Whistleblowing system advisory recommendation on whether further investigative audit is necessary			
		7	Pelimpahan laporan ke SPI atau Divisi Terkait Referral of the report to SPI or the relevant division			
		8	Melakukan proses dokumentasi laporan Documenting the report, including evidence			
		9	Selesai Case Closed			
			Indikator Proses: Process Indicators • Ketepatan waktu pelaksanaan audit investigasi • Ketepatan hasil penelitian awal • Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala • Timeliness of investigative audit execution • Accuracy of initial investigation findings • Timeliness of periodic			



Terlapor Organ Dewan Komisaris

Reported Parties: Board of Commissioners Organs

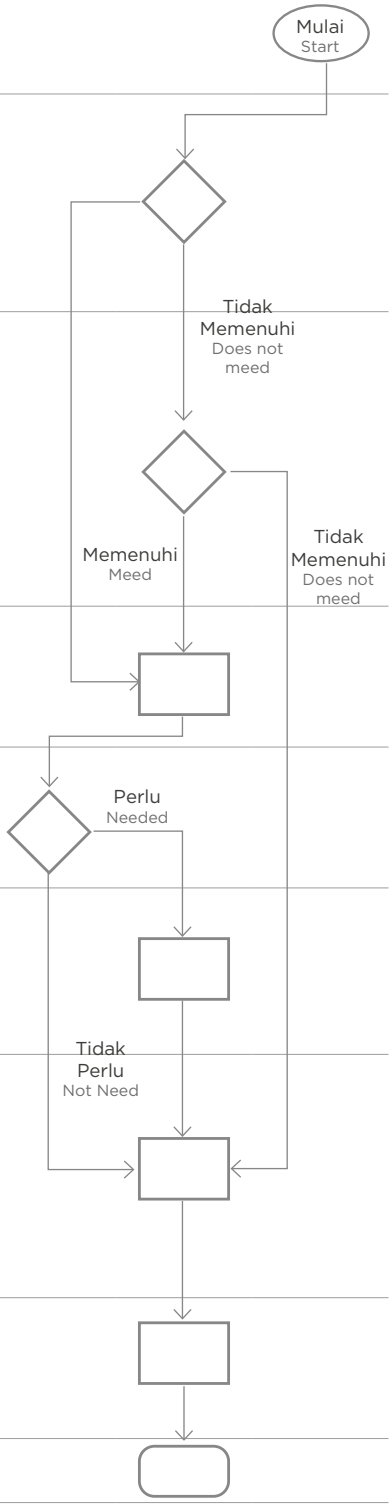
Input Indikator Input and Indicators	Output dan Indikator Output and Indicators	No	Proses dan Indikator Process and Indicators	Penanggung Jawab Party responsible Direktur Utama Main Director	Pelapor Whis-tleblower	Tim WBS WBS Team
INPUT: Laporan Dugaan pelanggaran Surat pemberitahuan ke Pelapor Report with Violations Notification Letter to the Whistleblower INDIKATOR INPUT: INPUT INDICATORS: Jumlah laporan dugaan pelanggaran Jumlah surat pemberitahuan ke Pelapor Number of Reports with Violations Number of Notification Letters to Whistleblowers	OUTPUT; Berita acara hasil penelitian awal Berita acara hasil audit investigasi Dokumentasi laporan pelanggaran Laporan berkala WBS Minutes of Initial Investigation Results Minutes of Investigative Audit Results Documentation of Violation Reports Periodic WBS Reports INDIKATOR OUTPUT: OUTPUT INDICATORS: Jumlah berita acara penelitian awal dan audit investigasi % realisasi penyelesaian pelanggaran dari jumlah yang dilaporkan Realisasi laporan berkala Number of Initial Investigation and Investigative Audit Reports Percentage of Resolved Violations from Total Reported Cases Implementation of Periodic Reports	1	Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran The reporter submits a report on alleged vioolations			
		2	Melakukan verifikasi pemenuhan unsur 4W1H dan data pendukung Verify compliance with the 4W1H elements and supporting data			
		3	Melakukan konfirmasi ke Pelapor untak meminta informasi, dokumen atau bukti tambahan jika laporan belum memenuhi unsur 4W1H dan data pendulung Confirm with the reporter to request additional information, documents, or evidence if the report does not meet the 4W1H elements and supporting data			
		4	Melakukan penelaahan Conduct a review			
		5	Melaporkan hasil penelitian awal dugaan pelanggaran Report the initial investigation results of the alleged violation			
		6	Rekomendasi Pengarah Whistleblowing System apakah perlu ditindaklanjut dengan Audit Investigasi atau tidak Whistleblowing system advisory recommendation on whether further investigative audit is necessary			
		7	Pelimpahan laporan ke SPI atau Divisi Terkait Referral of the report to SPI or the relevant division			
		8	Melakukan proses dokumentasi laporan Documenting the report, including evidence			
		9	Selesai Completion			
			Indikator Proses: Process Indicators • Ketepatan waktu pelaksanaan audit investigasi • Ketepatan hasil penelitian awal • Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala • Timeliness of investigative audit execution • Accuracy of initial investigation findings • Timeliness of periodic			



Terlapor Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris

Reported parties: Member of the Board of Directors or the Board of Commissioners

Input Indikator Input and Indicators	Output dan Indikator Output and Indicators	No	Proses dan Indikator Process and Indicators	Penanggung Jawab Party responsible Direktur Utama Main Director	Pelapor Whis-tleblower	Tim WBS WBS Team
INPUT: Laporan Dugaan pelanggaran Surat pemberitahuan ke Pelapor Report with Violations Notification Letter to the Whistleblower INDIKATOR INPUT: INPUT INDICATORS: Jumlah laporan dugaan pelanggaran Jumlah surat pemberitahuan ke Pelapor Number of Reports with Violations Number of Notification Letters to Whistleblowers	OUTPUT; Berita acara hasil penelitian awal Berita acara hasil audit investigasi Dokumentasi laporan pelanggaran Laporan berkala WBS Minutes of Initial Investigation Results Minutes of Investigative Audit Results Documentation of Violation Reports Periodic WBS Reports INDIKATOR OUTPUT: OUTPUT INDICATORS: Jumlah berita acara penelitian awal dan audit investigasi % realisasi penyelesaian pelanggaran dari jumlah yang dilaporkan Realisasi laporan berkala Number of Initial Investigation and Investigative Audit Reports Percentage of Resolved Violations from Total Reported Cases Implementation of Periodic Reports	1	Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran The reporter submits a report on alleged vioolations			
		2	Melakukan validasi & Analisa laporan apakah memenuhi unsur 4W1H dan data pendukung Validation and analysis of the report to determine if it meets the 4W1H principle and includes supporting data			
		3	Meminta informasi, dokumen atau bukti pendukung kepada Pelapor bila pelaporan belum memenuhi prinsip 4W1H dan data pendukung Requesting additional information, documents, or supporting evidence from the reporter if the report does not meet the 4W1H principle and supporting data			
		4	Melaporkan hasil penelitian awal dugaan pelanggaran Reporting the results of the initial investigation regarding the violation			
		5	Rekomendasi pengarah Whistleblowing System Recommendations from the WhistleBlowing System (WBS) advisory team			
		6	Meneruskan pengaduan kepada pengelola WBS Kementrian BUMN Forwarding the complaint to the WBS manager at the Ministry of SOEs			
		7	Menyampaikan kepada Pelapor bahwa laporan diteruskan ke KBUMN atau tidak terbukti Informing the reporter whether the report has been forwarded to the Ministry of SOEs (KBUMN) or was not proven			
		8	Melakukan proses dokumentasi laporan termasuk bukti-bukti Documenting the report, including evidence			
		9	Selesai Completion			



Indikator Proses | Process Indicators:
- Ketepatan waktu pelaksanaan audit investigasi
- Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala
- Accuracy of initial investigation result
- Timelines of periodic report submission

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola WBS merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan oleh Insan Hutama, meliputi:

Fraud

1. Korupsi, yang terdiri dari:
   a. Merugikan keuangan negara
   b. Penyuapan
   c. Penggelapan dalam jabatan
   d. Pemasaran
   e. Perbuatan curang
   f. Benturan kepentingan
   g. Gratifikasi
2. Penyalahgunaan aset Perusahaan
3. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Non-Fraud:

1. Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Perusahaan.
2. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Perusahaan
3. Pelecehan.
4. Penggunaan narkoba.
5. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang
6. Penyimpangan Prosedur

TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED

The scope of complaints to be followed up by the WBS Management Team includes actions that may harm the company, carried out by Hutama employees, including:

Fraud

1. Corruption, including:
   a. Harmful to state finances
   b. Bribery
   c. Embezzlement in office
   d. Marketing fraud
   e. Dishonest practices
   f. Conflict of interest
   g. Gratification
2. Misuse of company assetsFinancial statement fraud
3. Money laundering and terrorism financing

Non-Fraud:

1. Actions that could harm the reputation and/or good name of the company.
2. Immoral conduct both inside and outside the company
3. Harassment.
4. Drug use.
5. Involvement in prohibited community activities
6. Procedural violations

PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN

VIOLATION REPORT MANAGEMENT

No	Susunan Anggota Team Member Structure	Kedudukan Tim Pengelola Whistleblowing System Management Team
A.	**Pengarah** **Director**	
1.	Pemegang Saham Shareholder	Pengarah Director
2.	Komisaris Utama President Commissioner	Pengarah Director
3.	Direktur Utama President Director	Penanggungjawab Responsible party
	Dalam pelaksanaannya dibantu Wakil Direktur Utama dan Direktur Human Capital & Legal In practice, assisted by the Deputy President Director and the Director of Human Capital & Legal	
B	**Tim Pelaksana** **Executive Team**	
1.	Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Executive Vice President of Corporate Secretary	Ketua Chairperson
2.	Vice President Tata Kelola Perusahaan dan General Affair pada Divisi Sekretaris Perusahaan Vice President of Corporate Governace and General Affairs in the Corporate Secretary	Sekretaris Secretary

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS di seluruh tingkatan dalam organisasi, PTHK secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, pemasangan poster di sekitar lingkungan kerja, screen saver PC dan e-mail blast kepada jajaran Karyawan serta untuk pihak luar PTHK melakukan sosialisasi melalui situs web Perusahaan dan media sosial (Instagram) sehingga WBS dapat lebih efektif di masa mendatang.

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

to enhance understanding of the Whistleblowing System (WBS) at all levels of the organization, PT Hutama Karya (PTHK) consistently and continuously conducts socialization through various methods, including the display of short videos, posting posters around the workplace, using PC screen savers, and email blasts to employees. For external parties, PTHK also carries out socialization through the company's website and social media (Instagram) to make the WBS more effective in the future.

JUMLAH PENGADUAN DAN PROSES PENGADUAN

Jumlah laporan yang diterima pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

NUMBER OF COMPLAINTS AND COMPLAINT PROCESS

The number of reports received in 2024 is as follows.

Jenis Pelanggaran Types of Violations	2024		
	Dalam Proses In Process	Selesai Completed	Jumlah Total
Fraud			
Korupsi | Corrruption	-	-	-
Suap Meyuap | Bribery	-	-	-
Penggelapan dalam Jabatan | Embezzlement in office	-	-	-
Pemerasan | Extortion	-	-	-
Perbuatan Curang | Fraudulent acts	-	-	-
Benturan Kepentingan | Conflict of Interest	-	1	1
Gratifikasi | Gratification	-	-	-
Non Fraud			
Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Perusahaan Actions that may harm the company's reputation and/or good name	-	1	1
Perbuatan asusila di dalam dan di luar Perusahaan Immoral acts inside and outside the company	-	2	2
Pelecehan Harassment	-	1	1
Penggunaan narkoba Drug use	-	-	-
Terlibat dalam kegiatan Masyarakat yang dilarang Involvement in prohibited community activities	-	-	-
Out of Scope	-	7	7
Total	0	12	12

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2024

Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui Audit Investigasi berjumlah 1 aduan, dan hasilnya adalah terbukti. Atas pengaduan yang terbukti selanjutnya diberikan sanksi sesuai dengan Prosedur Pedoman Penghargaan dan Sanksi *(Reward & Penalty)* Nomor SP/HC/P/010.

PENALTIES/FOLLOW-UP ON COMPLAINTS IN 2024

The complaint followed up through an Investigative Audit amounted to 1 complaint, and the result was proven. Atas pengaduan yang terbukti selanjutnya diberikan sanksi sesuai dengan Prosedur Pedoman Penghargaan dan Sanksi (Reward & Penalty) Nomor SP/HC/P/010.

PROGRAM ANTI KORUPSI
ANTI CORRUPTION PROGRAM

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Hutama Karya terus berkomitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016. Komitmen ini diwujudkan dengan berbagai inisiatif strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 untuk memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan perusahaan.

Pada tahun 2024, Perusahaan melaksanakan Audit *Surveillance* sebagai langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap SMAP serta menilai efektivitas sistem yang telah diterapkan. Audit ini menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi penerapan kebijakan anti penyuapan dan mendukung transparansi dalam operasional perusahaan.

Selain itu, sebagai upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap SMAP, Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan *Awareness* ISO 37001:2016. Pelatihan ini ditujukan bagi karyawan perusahaan guna memperkuat pemahaman dan implementasi sistem manajemen anti penyuapan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Hutama Karya juga secara berkala mengadakan sosialisasi mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan *Whistleblowing System* (WBS). Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh karyawan memahami mekanisme pelaporan pelanggaran dan meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi dan penyuapan.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Perusahaan telah merancang program peningkatan di masa mendatang, termasuk penguatan fungsi kepatuhan anti penyuapan, evaluasi kinerja SMAP melalui audit internal, serta peningkatan berkelanjutan dalam pelaksanaan Audit *Surveillance* di tahun 2025. Langkah-langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat sistem anti korupsi perusahaan serta memastikan keberlanjutan integritas dalam seluruh aspek operasional bisnis.

PROGRAM AND PROCEDURES IMPLEMENTED TO ADDRESS CORRUPTION PRACTICES

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Hutama Karya continues to commit to implementing corporate governance that is clean, transparent, and has integrity through the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on SNI ISO 37001:2016. This commitment is realized through various strategic initiatives carried out throughout 2024 to strengthen the anti-corruption culture within the company.

In 2024, the company conducted a Surveillance Audit as a step to ensure compliance with the ABMS and assess the effectiveness of the system that has been implemented. This audit is an essential part of maintaining the consistency of anti-bribery policy enforcement and supporting transparency in the company's operations.

In addition, as an effort to raise awareness and understanding of the ABMS, the company organizes ISO 37001:2016 Awareness Training. This training is aimed at company employees to strengthen their understanding and implementation of the anti-bribery management system in daily business activities.

Hutama Karya also periodically holds socialization sessions about the Anti-Bribery Management System and Whistleblowing System (WBS). The aim of these sessions is to ensure that all employees understand the mechanisms for reporting violations and to increase active participation in maintaining a workplace free from corruption and bribery practices.

As part of the long-term strategy, the company has designed future improvement programs, including strengthening the anti-bribery compliance function, evaluating ABMS performance through internal audits, and continuous improvement in the implementation of the Surveillance Audit in 2025. These steps are expected to further strengthen the company's anti-corruption system and ensure the sustainability of integrity across all aspects of business operations.

Dengan berbagai program ini, Perusahaan menegaskan kembali komitmennya dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi. Implementasi SMAP yang selalu diperkuat akan mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan berintegritas.

STRATEGI ANTI FRAUD

Dalam menerapkan strategi anti *fraud* Perseroan mengacu pada Prosedur Anti *Fraud* yang disahkan pada 17 Juli 2023. Prosedur Anti *Fraud* digunakan sebagai acuan bagi Insan Hutama Karya dalam penerapan kebijakan dan strategi anti *fraud*, alat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*, meningkatkan kesadaran dan peran aktif serta komitmen seluruh Insan Hutama Karya dalam penerapan anti *fraud*, mengurangi dampak penyimpangan kecurangan (*fraud*).

Untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap *fraud,* maka harus memenuhi 6 (enam) unsur sebagai berikut:

1. Penyimpangan dan melakukan pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, *counterparty*, atau pihak lain.
2. Dilakukan oleh Insan Hutama Karya.
3. Terjadi dilingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana prasara Perseroan.
4. Mengakibatkan kerugian Perseroan.
5. Pelaku fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Terdapat putusan dari Pejabat Berwenang Memutus.

LINGKUNGAN PENGENDALIAN ANTI FRAUD

Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris *(Tone From The Top)*

Semangat kepemimpinan anti *fraud* dan komitmen dalam pelaksanaan Kebijakan anti *fraud*, meliputi:

1. Menumbuhkembangkan budaya dan kepedulian anti *fraud* di lingkungan Hutama Karya.
2. Turut serta dan secara aktif menerapkan program anti *fraud*.
3. Sikap *zero tolerance* teradap pelaku *fraud.*
4. Memberikan sanksi terhadap pelaku *fraud* serta mengkomunikasikannya kepada segenap Insan Hutama.

Pengelolaan Kebijakan Anti Fraud

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Hutama Karya bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola implementasi Kebijakan Anti Fraud secara efektif, berintegrasi serta memiliki jalur komunikasi

With these various programs, the company reaffirms its commitment to creating a clean, transparent, and highly competitive business environment. The implementation of the ABMS, which is continuously strengthened, will support the company's sustainable and integrity-driven growth.

ANTI-FRAUD STRATEGY

In implementing the anti-fraud strategy, the company refers to the Anti-Fraud Procedure that was ratified on July 17, 2023. The Anti-Fraud Procedure serves as a guideline for all Hutama Karya employees in implementing anti-fraud policies and strategies, as a tool to detect and prevent fraud, raise awareness, and foster the active role and commitment of all employees in implementing anti-fraud measures, as well as minimizing the impact of fraudulent behavior.

To declare that an action is considered fraud, it must meet the following six criteria:

1. Deviation and deliberate negligence intended to deceive, trick, or manipulate the Company, counterparty, or other parties.
2. Committed by Hutama Karya's employee.
3. Occurs within the Company's environment and/or uses the Company's facilities.
4. Results in loss to the Company.
5. The perpetrator gains benefits, either directly or indirectly.
6. There is a decision from the Competent Authority.

ANTI-FRAUD CONTROL ENVIRONMENT

Commitment from the Board of Directors and Board of Commissioners (Tone From The Top)

The spirit of anti-fraud leadership and commitment to implementing anti-fraud policies includes:

1. Fostering a culture and awareness of anti-fraud within Hutama Karya.
2. Actively participating in and implementing the anti-fraud program.
3. Adopting a zero-tolerance approach toward fraud perpetrators.
4. Imposing sanctions on fraud perpetrators and communicating them to all employee of Hutama Karya.

Anti Fraud Policy Management

The compliance function at Hutama Karya is responsible for effectively managing the implementation of the Anti-Fraud Policy in an integrated manner and has a direct communication

langsung dengan Direktur Utama.

Manajemen Risiko

Hutama Karya melakukan pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko *fraud* serta menyusun langkah mitigasi melakukan *Monitoring* serta melakukan evaluasi atas mitigasi yang direncanakan secara berkala.

Pengelolaan Human Capital

Hutama Karya mengembangkan pengelolaan Human Capital untuk mendapatkan sumber daya human capital yang unggul dan berintegrasi tinggi, mencakup hal-hal berikut:

1. Sistem rekrutmen yang transparan dan fair berlandaskan kompetensi dan integritas
2. Pembinaan kompetensi dan karir yang transparan
3. Manajemen kinerja dan penghargaan yang kompetitif
4. Hubungan industrial

Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku serta Peraturan Disiplin

Pedoman etika bisnis dan perilaku (*code of conduct*) merupakan standar etika dalam berbisnis dan berperilaku di lingkungan Hutama Karya, adapun peraturan disiplin adalah pedoman dalam proses pemberian hukuman atau sanksi disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Sistem Teknologi Informasi

Hutama Karya mengoptimalkan teknologi pendukung dalam memastikan integritas Insan Hutama melalui penggunaan sarana dan sistem teknologi informasi untuk mendapatkan historis data/dokumen terkait fraud yang pernah terjadi maupun pengembangan aplikasi Anti *Fraud* dalam rangka *Monitoring*, evaluasi, dan pelaporan Sinergi dengan Instansi/Lembaga Terkait Hutama Karya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi dan Lembaga terkait untuk melaksanakan Anti *Fraud* secara efektif.

LAPORAN DUGAAN FRAUD

Insan Hutama Karya melaporkan kejadian *fraud*. Pelaporan dapat disampaikan oleh seluruh Insan Hutama melalui media-media sumber informasi fraud dan harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dapat berupa dokumen, video, dan sebagainya sebagai bukti awal yang mendukung laporan atas tindakan diduga sebagai fraud kemudian seluruh laporan akan diterima oleh SPI untuk diproses lebih lanjut. Pelaporan tindakan yang diduga *Fraud* perusahaan dapat menggunakan 5 (lima) mekanisme pelaporan *Fraud* sebagai sumber informasi Fraud yaitu sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing*

channel with the President Director.

Risk Management

Hutama Karya manages the risks faced by the company, including fraud risks, and develops mitigation steps. The company conducts regular monitoring and evaluation of the planned mitigation strategies.

Human Capital Management

Hutama Karya develops Human Capital Management to attract superior and highly integrated human resources, including the following aspects:

1. A transparent and fair recruitment system based on competence and integrity
2. Transparent competency and career development
3. Competitive performance management and reward systems.
4. Industrial relations

Business Ethics and Conduct Guidelines, and Disciplinary Regulations

The business ethics and conduct guidelines (code of conduct) serve as the ethical standards for business and behavior within Hutama Karya. Meanwhile, the disciplinary regulations act as a guide for the process of giving disciplinary punishment or sanctions according to the type of violation committed.

Information Technology Systems

Hutama Karya optimizes supporting technology to ensure the integrity of its employees through the use of information technology systems to access historical data/documents related to past fraud incidents, as well as the development of Anti-Fraud applications for monitoring, evaluation, and reporting. Hutama Karya also collaborates and synergizes with various related institutions and agencies to implement Anti-Fraud measures effectively.

REPORT OF ALLEGED FRAUD

Hutama Karya employees can report suspected fraud incidents through various fraud information sources. The report must be accompanied by supporting evidence such as documents, videos, and other forms of proof that substantiate the initial fraud report. All reports will be received by the Internal Audit Unit (SPI) for further processing. Fraud reports can be made using 5 (five) reporting mechanisms as fraud information sources including Whistleblowing System, Risk Management Reports, Internal Audit Findings, Audit Committee Recommendations, and Other Sources. If the reported individual is a member of the Board of

System), laporan manajemen risiko, hasil audit internal, rekomendasi komite audit, Sumber Lain. Dalam hal Terlapor adalah Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan/atau Direksi maka pelaksanaan investigasi tetap mengikuti ketentuan investigasi pada Prosedur ini.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Setiap Insan Hutama Karya yang karena jabatannya dan/atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan/atau Keluarga Intinya, pada prinsipnya dilarang untuk menerima atau meminte secara langsung atau tidak langsung Gratifikasi dari setiap Pihak Ketiga berupa atau dalam bentuk: uang/setara uang, barang, rabat (*discount*); komisi; pinjaman tanpa bunga; fasilitas; pengobatan Cuma cuma; voucher; kompensasi; hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi; dan hal lainnya yang bertujuan memberikan keuntungan pribadi terhadap dirinya dan/atau keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektmnik maupun tanpa sarana elektronik.

PENERIMAAN GRATIFIKASI

Dalam pelaksanaannya, setiap Insan Hutama Karya dilarang untuk:

1. Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari peraturan perundang-undangan serta peraturan Perusahaan yang berlaku;
2. Menerima parsel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari keagamaan;
3. Mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Hutama Karya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Menerima pengembalian dana/*refund* dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi, yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk namun tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan;
5. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak tersebut untuk dinikmati secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Insan Hutama Karya yang lain dan/atau keluarganya.

Commissioners, the Board's Supporting Organ, and/or the Board of Directors, the investigation will still follow the investigation procedures outlined in this Policy.

GRATIFICATION POLICY SEKPER

Every employee of Hutama Karya, due to their position and/or conflicting with their duties and obligations, and/or their immediate family, is generally prohibited from accepting or soliciting, directly or indirectly, any form of gratification from any third party, including but not limited to: money/cash equivalents, goods, discounts, commissions, interest-free loans, facilities, free medical treatment, vouchers, compensation, gifts of high financial value, and anything else that aims to provide personal benefits to themselves and/or their family, both domestically and internationally, whether through electronic means or not.

ACCEPTANCE OF GRATIFICATION

In its implementation, every employee of Hutama Karya is prohibited from:

1. Accepting anything from a third party that deviates from applicable laws and regulations, as well as company policies;
2. Receiving parcels in any form related to religious holiday celebrations;
3. Allowing third parties to give anything in any form to Hutama Karya employees, either individually or collectively, and directly or indirectly;
4. Accepting refunds and/or personal benefits that exceed or are not their rights from any party, including but not limited to third parties, hotels, and restaurants, in connection with work and/or official duties;
5. Being discriminatory and unfair in selecting suppliers of goods/services and/or partners/associates with the intention of receiving compensation from these parties to be enjoyed individually or together with other employees of Hutama Karya and/or their families.

PEMBERIAN GRATIFIKASI

Insan Hutama Karya dilarang memberikan gratifikasi, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Pihak Ketiga, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, antara lain meliputi:

1. Pemberian kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang karena jabatannya sebagai pengendali/pengelola rekening instansi pemerintah/perusahaan;
2. Pemberian kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang karena jabatannya mempengaruhi Pihak Ketiga untuk melakukan suatu perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Perusahaan;
3. Memberikan sesuatu, menjanjikan atau menawarkan Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara serta Pihak Ketiga, termasuk mitra kerja, penyedia barang dan jasa, yang tidak sesuai dengan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
4. Memberikan sesuatu, menjanjikan atau menawarkan Gratifikasi kepada sesama Insan Hutama Karya yang tidak sesuai dengan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.

PENGELOLA GRATIFIKASI

Pengelola Gratifikasi Hutama Karya dilaksanakan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan sebagai UPG dengan tugas dan fungsi utama yaitu melakukan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Hutama Karya, meliputi verifikasi dan analisis laporan Gratifikasi yang masuk. Adapun penetapan status kepemilikan objek Gratifikasi akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

Selama tahun 2024, tidak terdapat laporan gratifikasi yang masuk.

GIVING GRATIFICATION

Employees of Hutama Karya are prohibited from giving gratification, whether on their own initiative or at the request of a third party, either directly or indirectly, including the following:

1. Giving to civil servants or state officials who, due to their position, control/manage the accounts of government agencies/companies;
2. Giving to civil servants or state officials who, due to their position, can influence third parties to do or not do certain actions for the company's interests;
3. Giving something, promising, or offering gratification to civil servants or state officials, as well as third parties, including partners, suppliers of goods and services, that is not in line with the Gratification Control Policy;
4. Giving something, promising, or offering gratification to fellow employees of Hutama Karya that is not in line with the Gratification Control Policy.

GRATIFICATION MANAGEMENT

The management of gratification at Hutama Karya is carried out by the Corporate Secretary Division as the UPG (Unit Pengelola Gratifikasi), with the main duties and functions including monitoring and controlling gratification within Hutama Karya. This includes verifying and analyzing incoming gratification reports. The determination of the ownership status of the gratification object will be carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK).

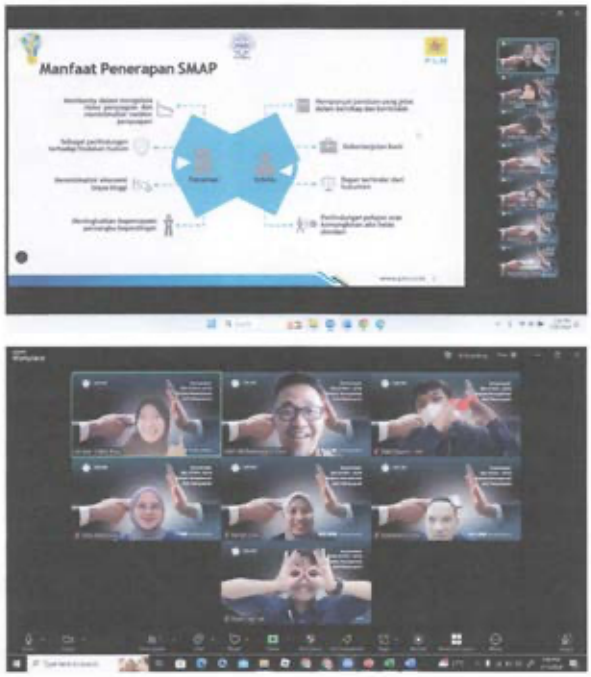
GRATIFICATION REPORT FOR 2024

Throughout the year 2024, there were no reports of gratification received.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

ANTI-CORRUPTION TRAINING/ SOCIALIZATION FOR EMPLOYEES

Agenda/ Media Event/ Media	**Nama/ Judul** Name/Title of the Event	**Waktu Pelaksanaan** Time	**Dokumentasi** Documentation
HK Academy	Integritas dan Etika: Tolak Suap dan Gratifikasi Bersama 1. Annisa Suryawardhani dan Anis Anindya - Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK 2. Adjib Al Hakim - Excecutive Vice President Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Integrity and Ethics: Rejecting Bribery and Gratification Together 1. Annisa Suryawardhani and Anis Anindya - Analyst for Corruption Crime Eradication, Gratification and Public Services Directorate, KPK 2. Adjib Al Hakim - Executive Vice President, 3. Corporate Secretary, PT Hutama Karya (Persero)	9 Agustus 2024 August 9, 2024	
Pelatihan Training	Awareness ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Awareness ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (SMAP)	28-29 Februari 2024 February 28-29, 2024	

Agenda/ Media Event/ Media	**Nama/ Judul** Name/Title of the Event	**Waktu Pelaksanaan** Time	**Dokumentasi** Documentation
Pelatihan Training	Awareness ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan Awareness ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System	17-18 Juli 2024 July 17-18, 2024	
Pelatihan Training	*Awareness* ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan Awareness ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System	23-24 September 2024 September 23-24, 2024	

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

MANAGEMENT OF STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

Sebagai komitmen mewujudkan iklim usaha yang sehat, bersih, serta bebas dari tindakan penyimpangan temasuk pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, Pedoman Perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan, sebagai bentuk komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dipandang perlu adanya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat di lingkungan PT Hutama Karya (Persero) sebagai tanda kepatuhan terhadap Undang-Undang.

Penetapan pejabat pada PT Hutama Karya (Persero) dan Anak Perusahaan serta Perusahaan Terafiliasi, yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertuang dalam KPTS nomor 5438/KPTS/98/XII/2023 tentang Kepatuhan dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero)
.
2. Direksi PT Hutama Karya (Persero).
3. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham minimal 51%.
4. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terafiliasi dengan PT Hutama Karya (Persero)
.
5. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi PT Hutama Karya (Persero):
   - *Executive Vice President;*
   - *Senior Vice President;*
   - Pejabat Fungsional/Operasional dengan *Job Grade* 20 - 23.
6. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi PT Hutama Karya (Persero):
   - *Vice President/*Kepala Unit*;*
   - Pejabat Fungsional/Operasional dengan *Job Grade* 18 - 19.
7. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

As a commitment to creating a healthy, clean business environment free from deviations, including the prevention of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), by applying the principles of good corporate governance, the Code of Conduct, and the relevant laws and regulations consistently and continuously, it is necessary to submit the State Official Wealth Report (LHKPN) by officials within PT Hutama Karya (Persero) as a sign of compliance with the law, as part of the State-Owned Enterprises' (SOE) commitment to preventing criminal corruption.

The appointment of officials at PT Hutama Karya (Persero) and its subsidiaries, as well as affiliated companies, who are required to submit the State Official Wealth Report (LHKPN) is stipulated in KPTS No. 5438/KPTS/98/XII/2023 regarding Compliance and Management of the State Official Wealth Report (LHKPN) within PT Hutama Karya (Persero) for the Year 2023, as follows:

1. Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero).
2. Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero).
3. Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries with at least 51% share ownership.
4. Board of Directors and Board of Commissioners of companies affiliated withPT Hutama Karya (Persero).
5. Officials one level below the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero):
   - Executive Vice President;
   - Senior Vice President;
   - Functional/Operational Officials with Job Grades 20-23.
6. Officials two levels below the Board of Directors of PT Hutama Karya (Persero):
   - Vice President/Unit Head;
   - Functional/Operational Officials with Job Grades 18-19.
7. Officials one level below the Board of Directors of subsidiaries and affiliated companies.

Laporan LHKPN Posisi Harta Tahun 2023 PT Hutama Karya (Persero)

LHKPN Report on Asset Position for 2023PT Hutama Karya (Persero)

No	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Wajib Lapor Total Required to Report	Status Pelaporan Reporting Status		
			Sudah Lapor Reported	Belum Lapor Not Reported	Persentase Percentage
Wajib Lapor Induk Required to Report Parent Company					
1	Komisaris Commissioners	4	4	0	100,00%
2	Direksi Board of Directors	7	7	0	100,00%
3	PT Hutama Karya (Persero)	97	97	0	100,00%
Jumlah		108	108	0	100,00%
Wajib Lapor AP/CP Required to Report Subsidiaries/Associates					
4	PT HK Infrastruktur	20	20	0	100,00%
5	PT HakaAston	12	12	0	100,00%
6	PT HK Realtindo	12	12	0	100,00%
7	PT Hutama Marga Waskita	6	6	0	100,00%
10	PT Bhirawa Steel	3	3	0	100,00%
11	PT Petronesia Benimel	4	4	0	100,00%
13	PT Semen Indogreen Sentosa	5	5	0	100,00%
14	PT Nusa Pratama Property	1	1	0	100,00%
15	Dana Pensiun Retirement	2	2	0	100,00%
Jumlah Total		**65**	**65**	**0**	**100,00%**
Total Jumlah Wajib Lapor LHKPN Total Number of Required LHKPN Reports		173	173	0	100,00%

INSIDER TRADING
INSIDER TRADING

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, PT Hutama Karya (Persero) belum memperdagangkan sahamnya di bursa saham mana pun. Sehingga tidak terdapat informasi terkait kebijakan *insider trading* Perseroan.

As of the end of the 2024 financial year, PT Hutama Karya (Persero) has not traded its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information related to the company's insider trading policy.

TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE

PT Hutama Karya (Persero) sebagai salah satu BUMN Konglomerasi sehingga diwajibkan menerapkan *Three Lines Model* dan Tata Kelola Terintegrasi. Sehingga Dewan Komisaris perlu untuk membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana merujuk pada Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 disebutkan bahwa komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari Komisaris Utama menjabat sebagai Ketua merangkap anggota, anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris Induk dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, dan anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.

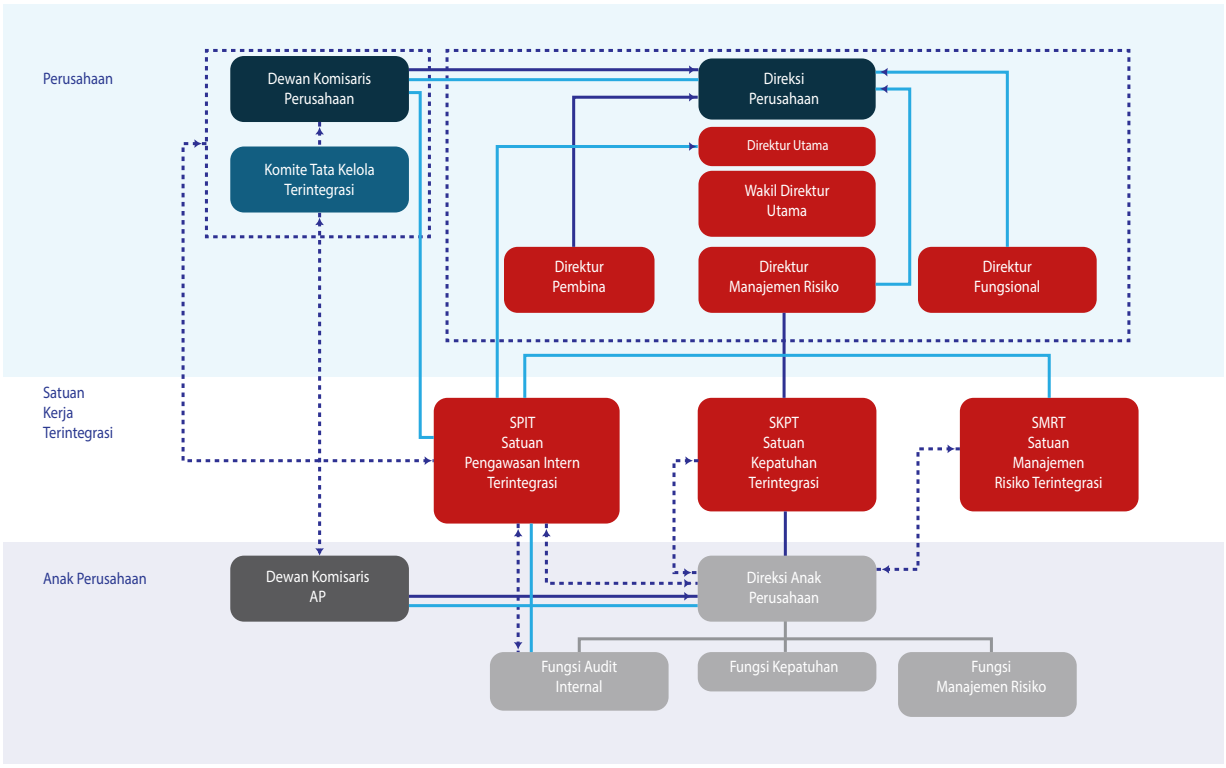
PT Hutama Karya (Persero), as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) in a conglomerate, is required to implement the Three Lines Model and Integrated Governance. Therefore, the Board of Commissioners needs to establish the Integrated Governance Committee. Referring to the Technical Guidelines on the Composition and Qualifications of the Risk Management Organ, No. SK-3/DKU.MBU/05/2023, it is stated that the composition of the Integrated Governance Committee consists of the President Commissioner serving as the Chairperson and member, committee members from the Board of Commissioners of the Parent Company and the Board of Commissioners of the Subsidiaries, and other committee members who are not from the Board of Commissioners but are assigned to assist the duties of the Integrated Governance Committee.

Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) nomor SK-01.III/DK/PTHK/2024 pada tanggal 28 Maret 2024 dimana tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta ketentuan lainnya dijelaskan pada Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang sebelumya telah diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) Nomor SK-11.XII/DK/PTHK/2023.

The Board of Commissioners established the Integrated Governance Committee through the Board of Commissioners Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. SK-01.III/DK/PTHK/2024 on March 28, 2024. The duties, authority, and responsibilities, as well as other provisions, are outlined in the Integrated Governance Committee Charter, which was previously decided through the Board of Commissioners' Decree of PT Hutama Karya (Persero) No. SK-11.XII/DK/PTHK/2023.

Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen dari Direksi dalam menjalankan tata kelola terintegrasi di konglomerasi PT Hutama Karya (Persero) maka disusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan.

Furthermore, as a form of commitment from the Board of Directors to implementing integrated governance in the conglomerate of PT Hutama Karya (Persero), the Integrated Governance Guidelines for the Company Conglomerate have been developed.



Keterangan
Information

- Jalur pelaporan — Reporting path
- Evaluasi dan Arahan — Evaluation and Direction
- Jalur Koordinasi — Coordination Line
- Koordinasi Internal pada Anak Perusahaan — Internal Coordination in Subsidiaries

Gambar Struktur Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Structure Image

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE REPORT

STRUKTUR TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE STRUCTURE

Hasil penilaian internal (self assessment) terhadap struktur tata kelola terintegrasi perusahaan adalah sebagai berikut:

The results of the internal assessment (self-assessment) of the company's integrated governance structure are as follows:

No	Indikator Struktur Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Structure Indicators	Analisis Hasil Penilaian Assessment Analysis	
		Area Kekuatan Strength Areas	Area Kelemahan Weaknesses Area
1.	Direksi BUMN Induk Parent SOE Board of Directors		
	Telah menetapkan direktur fungsional dan direktur pembina. Functional and supervisory directors have been appointed	Telah dilakukan penunjukan Direktur fungsional dan pembina dalam TKT dalam Pedoman TKT Functional and supervisory directors have been appointed in the Integrated Governance Structure (IGS/TKT) in accordance with the IGS (TKT) Guidelines.	

No	Indikator Struktur Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Structure Indicators	Analisis Hasil Penilaian Assessment Analysis	
		Area Kekuatan Strength Areas	Area Kelemahan Weaknesses Area
	Penetapan direktur fungsional dan direktur pembina telah memperhatikan tata kelola Risiko tiga lini (three lines model). The appointment of functional and supervisory directors considers the three lines of risk governance model.	Telah dilakukan penunjukan Direktur fungsional dan pembina dalam TKT dalam Pedoman TKT Functional and supervisory directors have been appointed in the IGS in accordance with the IGS Guidelines.	
	Direktur fungsional telah menjalankan tugasnya dalam melakukan harmonisasi kebijakan fungsional pada Anak Perusahaan BUMN. Functional directors have performed their duties in harmonizing functional policies at SOE subsidiaries.	Direktur fungsi supporting saat ini sudah menjalankan harmonisasi kebijakan fungsional pada Anak Perusahaan The supporting functional director has been harmonizing functional policies at the subsidiaries.	
	Direktur pembina telah menjalankan tugasnya dalam melakukan pembinaan pada Anak Perusahaan BUMN untuk memastikan keselarasan dan sinergitas strategi BUMN induk dan Anak Perusahaan BUMN. Supervisory directors have performed their duties in guiding subsidiaries to ensure alignment and synergy between the parent SOE and subsidiaries' strategies.	Telah dilakukan pembinaan Direktur fungsional oleh Direktur yang membawahkan Unit Kerja yang melakukan pengembangan dan optimalisasi Anak Perusahaan Guidance has been conducted by functional directors under the Director in charge of the unit responsible for the development and optimization of subsidiaries.	
2.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Induk Parent SOE Board of Commissioners/Supervisory Board		
	Telah membentuk komite Tata Kelola Terintegrasi An Integrated Governance Committee has been formed	Telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Maret 2024 The Integrated Governance Committee was formed in March 2024.	
	Telah menetapkan piagam komite Tata Kelola Terintegrasi. The charter for the Integrated Governance Committee has been established.	Piagam Tata Kelola Terintegrasi disahkan pada 29 Desember 2023 The Integrated Governance Charter was ratified on 29 December 2023.	
	Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan dalam PER-2/MBU/03/2023. The Integrated Governance Committee has carried out its duties, authorities, and responsibilities according to PER-2/MBU/03/2023.	Rapat Sosialisasi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero) telah dilaksanakan pada Q2 2024 A socialization meeting for the Integrated Governance Committee of PT Hutama Karya (Persero) was held in Q2 2024.	
3.	Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Work Unit		
	Telah dibentuk unit kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada direktur yang membidangi pengelolaan Risiko. A Risk Management unit has been established under the director responsible for risk management	Divisi Pengelolaan Risiko telah dibentuk yang wewenang dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan PER-2 The Risk Management Division has been formed with authorities and responsibilities aligned with PER-2.	Adanya Anak Perusahaan baru yang perlu memenuhi organ pengelola risiko dalam penerapan manajemen risiko The need to establish risk management bodies at newly established subsidiaries.
	Telah menjalankan wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan dalam PER-2/MBU/03/2023. Has exercised authority and responsibility according to PER-2/MBU/03/2023		
	Telah melaksanakan tugas kepatuhan terintegrasi apabila tidak memiliki unit kepatuhan tersendiri. Has carried out integrated compliance duties if no separate compliance unit exists.	Pembentukan Divisi Sistem dan Kepatuhan sudah disetujui Dewan Komisaris pada Q2 2024 The establishment of the Systems and Compliance Division was approved by the Board of Commissioners in Q2 2024.	
4.	SPI Internal Audit Unit (SPI)		

No	Indikator Struktur Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Structure Indicators	Analisis Hasil Penilaian Assessment Analysis	
		Area Kekuatan Strength Areas	Area Kelemahan Weaknesses Area
	Telah menjalankan tugas memantau pelaksanaan Audit Intern terintegrasi pada masing-masing Anak Perusahaan. Has monitored the implementation of integrated internal audits at each subsidiary	SPI telah melakukan memantau pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi SPI has monitored the implementation of Integrated Internal Audits.	
	Telah menyusun piagam Audit Intern terintegrasi Has prepared an integrated Internal Audit Charter.	Piagam Audit terintegrasi telah disusun The integrated audit charter has been prepared.	
	Direksi telah menetapkan piagam Audit Intern terintegrasi yang terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris The Board of Directors has established the integrated Internal Audit Charter, subject to prior approval by the Board of Commissioners.		Piagam audit terintegrasi masih dalam proses persetujuan The integrated audit charter is still in the approval process

PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil penilaian internal (self assessment) terhadap proses tata kelola terintegrasi perusahaan adalah sebagai berikut:

INTEGRATED GOVERNANCE PROCESS

The internal assessment results on the company's integrated governance process are as follows:

No	Indikator Struktur Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Process Indicator	Analisis Hasil Penilaian Assessment Analysis	
		Area Kekuatan Strengths Area	Area Kelemahan Weaknesses Area
1.	Direksi BUMN Induk Board of Directors of the Parent SOE		
	Telah menyusun kebijakan harmonisasi BUMN induk dengan Anak Perusahaan BUMN yang merupakan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dengan minimal muatan yang tercantum dalam Bab III. Has formulated a harmonization policy between the Parent SOE and its Subsidiaries, which serves as the Integrated Governance Policy, with at least the elements stated in Chapter III.	Sebagian kebijakan BUMN Induk sudah diharmonisasikan dengan Anak Perusahaan Some of the Parent SOE's policies have been harmonized with the Subsidiaries.	
	Telah melaksanakan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Has implemented the Integrated Governance Policy.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan telah disahkan The Integrated Governance Guidelines for the Corporate Conglomerate have been ratified.	
	Telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Has followed up on directions or recommendations from the Board of Commissioners/Supervisory Board to improve the Integrated Governance Policy	Arahan Dewan Komisaris sudah ditindaklanjuti dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Directions from the Board of Commissioners have been followed up and reflected in the Integrated Governance Guidelines.	

No	Indikator Struktur Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Process Indicator	Analisis Hasil Penilaian Assessment Analysis	
		Area Kekuatan Strengths Area	Area Kelemahan Weaknesses Area
	Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajemen Risiko terintegrasi dan kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The Director in charge of Risk Management has prepared and submitted a report on the implementation of integrated risk management and compliance responsibilities to the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board.	Direktur Manajemen Risiko telah menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko terintegrasi kepada Dewan Komisaris The Risk Management Director has prepared and submitted the Integrated Risk Management Report to the Board of Commissioners.	Laporan Kepatuhan terintegrasi dalam proses penyusunan dan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris setelah pemenuhan fungsi kepatuhan di seluruh Anak Perusahaan. The integrated compliance report is still in preparation and will be submitted once compliance functions are fully established across all subsidiaries.
2.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Induk Board of Commissioners/Supervisory Board of the Parent SOE		
	Telah melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Has conducted an evaluation of the Integrated Governance Policy	Arahan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti dalam ketentuan di Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan dan telah disahkan. Directions from the Board of Commissioners have been followed up in the provisions of the Integrated Governance Guidelines for the Corporate Conglomerate, which have been ratified.	
	Telah memberikan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Has approved the Integrated Governance Policy	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan telah disahkan. The Integrated Governance Guidelines for the Corporate Conglomerate have been ratified	
	Bersama komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengawasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Together with the Integrated Governance Committee, has supervised the implementation of the Integrated Governance Policy.	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero) telah dilaksanakan pada Q2 dan Q4 2024 Meetings of the Integrated Governance Committee at PT Hutama Karya (Persero) were held in Q2 and Q4 of 2024.	
	Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat secara berkali paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan. The Integrated Governance Committee has held meetings regularly, at least once every quarter.	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya (Persero) telah dilaksanakan pada Q2 dan Q4 2024 Meetings of the Integrated Governance Committee at PT Hutama Karya (Persero) were held in Q2 and Q4 of 2024.	
3.	Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Unit		
	Telah menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Has prepared a report on the implementation of its duties and responsibilities.	1. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Manajemen Risiko 2. Telah menyusun laporan setiap Triwulan kepada KBUMN mengacu pada SK-6 (Juknis Proses) dan SK-7 (Juknis Pelaporan) 3. Pelaporan Divisi dan Anak Perusahaan sudah mengacu pada SK-6 yang dilaporkan setiap bulan melalui Risk Management System (RMS)	Proses manajemen risiko perlu diintegrasikan pada Anak Perusahaan baru The risk management process needs to be integrated into the new Subsidiaries.
	Telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur yang membidangi pengelolaan Risiko. Has submitted the report on the implementation of duties and responsibilities to the Director overseeing Risk Management		

No	Indikator Struktur Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Process Indicator	Analisis Hasil Penilaian Assessment Analysis	
		Area Kekuatan Strengths Area	Area Kelemahan Weaknesses Area
		1. Has prepared a report on the implementation of its duties and responsibilities to the Risk Manegement Director 2. Has prepared quarterly reports to the Ministry of SOEs (KBUMN) referring to SK-6 (Process Technical Guidelines) and SK-7 (Reporting Technical Guidelines). 3. The reporting from Divisions and Subsidiaries has referred to SK-6 and is submitted monthly through the Risk Management System (RMS).	
	Telah menindaklanjuti temuan berkaitan dengan fungsi Manajemen Risiko terintegrasi dan kepatuhan terintegrasi. Has followed up on findings related to integrated Risk Management and Compliance functions.	Audit berbasis risiko dan tindaklanjut terhadap temuan sudah dilakukan dengan mengacu pada Risk Management System (RMS) yang terintegrasi pada Induk dan Anak Perusahaan Risk-based audits and follow-ups on findings have been conducted in accordance with the RMS, which is integrated between the Holding and Subsidiaries.	Belum dilakukan audit terkait Kepatuhan Terintegrasi An audit related to Integrated Compliance has not yet been conducted.
4.	SPI Internal Audit Unit (SPI)		
	Telah menyusun laporan Audit Intern terintegrasi secara obyektif yang terkonsolidasi antara induk dan anak. Has objectively prepared an integrated Internal Audit Report consolidated between the parent and subsidiaries.	Laporan Audit Intern Terintegrasi pada Semester II 2024 dalam tahap penyusunan The Integrated Internal Audit Report for Semester II 2024 is currently being prepared.	Penyusunan Laporan Audit Intern Terintegrasi pada Semester 2024 ditargetkan selesai pada tanggal 31 Januari 2025 The preparation of the Integrated Internal Audit Report for the 2024 Semester is targeted to be completed by January 31, 2025.
	Telah menyampaikan laporan Audit Intern terintegrasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan direktur yang membidangi pengelolaan Risiko. Has submitted the Integrated Internal Audit Report to the President Director, Board of Commissioners/Supervisory Board, and the Director in charge of Risk Management		Laporan Audit Intern Terintegrasi akan disampaikan setelah Piagam Audit Intern Terintegrasi selesai disetujui, maksimal tanggal 31 Januari 2025.
	Telah melakukan pemantauan pelaksanaan Audit Intern terintegrasi. Has monitored the implementation of integrated Internal Audits	Sudah dilakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terintegrasi Monitoring of the implementation of the integrated internal audit has been carried out.	
	Telah menyusun rekomendasi hasil audit terintegrasi yang dapat digunakan sebagai acuan perbaikan. Has prepared recommendations from the integrated audit that can serve as references for improvement	Rekomendasi Hasil audit terintegrasi pada Laporan Audit Intern Terintegrasi Semester II 2024 dalam tahap penyusunan Recommendations from the integrated audit are being drafted in the Semester II 2024 Integrated Internal Audit Report	

HASIL TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Hutama Karya meliputi:

1. Pengesahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan.
2. Pemenuhan Organ Tata Kelola Terintegrasi.
3. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali.
4. Rapat Satuan Kerja Terintegrasi (Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Pengendalian Internal Terintegrasi) telah diselenggarakan sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan.
5. Pelekatan fungsi kepatuhan pada Struktur Organisasi Anak Perusahaan.
6. Proses Tata Kelola Terintegrasi yaitu penetapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Perusahaan yang mencakup tata kelola di Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan.
7. Pelaporan hasil self assessment Tata Kelola Terintegrasi.

RESULTS OF INTEGRATED GOVERNANCE

The implementation results of Integrated Governance at Hutama Karya include:

1. The ratification of the Company Conglomerate Integrated Governance Guidelines.
2. Fulfillment of the Integrated Governance Organs.
3. The Integrated Governance Committee Meetings have been held twice.
4. Integrated Work Unit Meetings (Integrated Compliance Unit, Integrated Risk Management Unit, and Integrated Internal Control Unit) have been conducted in accordance with the Company Conglomerate Integrated Governance Guidelines.
5. Attachment of the compliance function to the organizational structure of Subsidiaries.
6. The Integrated Governance Process, namely the establishment of the Company Conglomerate Integrated Governance Guidelines covering governance in both the Parent Company and Subsidiaries.
7. Reporting of Integrated Governance self-assessment results.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

IMPLEMENTATION OF THE GUIDELINES FOR OPEN CORPORATE GOVERNANCE

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Aspect 1: Public Company Relations With Shareholders In Guaranteeing Shareholder Rights	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Increasing the Value of Organizing a General Meeting of Shareholders (GMS).	
A.1.1.	Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Keterangan: *Comply*

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
	Recommendation 1: A Public Company had a technical method or procedure for voting, both openly and privately, that prioritized independence and the interests of shareholders. Explanation: Each share with voting rights issued had one vote (one share one vote). Shareholders could exercise their voting rights when making decisions, especially in making decisions by voting. However, the decision-making mechanism by means of voting, both openly and privately, had not been regulated in detail. Public companies were recommended to have voting procedures in making decisions on a GMS agenda. The voting procedure had to maintain the independence or freedom of shareholders. For example, in open voting, it was done by raising hands in accordance with the choice instructions offered by the chairman of the GMS. Meanwhile, closed voting was carried out on decisions that require confidentiality or at the request of shareholders, by using a voting card or by using electronic voting.	A GMS may held if at least 51% of the total number of shareholders with voting rights are present or represented. Shareholders, individually or represented by a power of attorney, are entitled to attend the GMS and exercise their voting rights in accordance with the number of shares they own. Description: Comply
A.1.2.	Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. Recommendation 2:All members of the Directors and members of the Board of Commissioners of a Public Company attended the Annual GMS. Explanation: The presence of all members of the Directors and members of the Board of Commissioners of a Public Company was intended so that each member of the Directors and member of the Board of Commissioners could pay attention, explain, and answer directly the problems that occured or questions raised by shareholders related to the agenda at the GMS.	Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam RUPS Tahunan. Keterangan: *Comply* All members of the Board of Commissioners and Directors were present at the Annual GMS. Description: Comply
A.1.3.	Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. Recommendation 3:The summary of the minutes of the GMS was available on the Public Company Website for at least 1 (one) year. Explanation: Based on the provisions in Article 34 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, a Public Company was required to make a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and foreign languages (at least in English).), and announced 2 (two) working days after the GMS was held to the public, one of which was through the Public Company Website. The availability of a summary of the minutes of the GMS on the Public Company Website provided an opportunity for shareholders who were not present to obtain important information in holding the GMS easily and quickly. Therefore, the provision regarding the minimum period for the availability of the summary of the minutes of the GMS on the Website was intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.	Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPST dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ringkasan Risalah rapat dipublikasikan dalam website perseroan. Keterangan: *Comply* The Company has prepared a summary of the minutes of the AGMS in Indonesian and English. The summary of the minutes of the meeting was published on the company's website. Description: Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
A.2.	Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2: Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	
A.2.1.	Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. Recommendation 4: The Public Company had a communication policy with shareholders or investors. Explanation: The existence of communication between the Public Company and the shareholders or investors was intended so that the shareholders or investors got a clearer understanding of the information that had been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as the implementation of the Public Company's governance. In addition, shareholders or investors could also submit inputs and opinions to the management of the Public Company. The communication policy with shareholders or investors showed the commitment of the Public Company in carrying out communication with shareholders or investors. The policy might include strategies, programs, and timing of communications, as well as guidelines that supported shareholders or investors to participate in these communications.	Perseroan memiliki prosedur pelaporan emiten yang memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan investor, mencakup laporan keuangan, prospek bisnis, dan kinerja perusahaan. Melalui kebijakan komunikasi yang transparan dan terstruktur, HK tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan tetapi juga membangun hubungan yang akuntabel, berkelanjutan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan. Keterangan: *Comply* The Company has an issuer reporting procedure that ensures transparency of information to the public and investors, including financial reports, business prospects, and company performance. Through a transparent and structured communication policy, HK not only fulfills reporting obligations but also builds accountable, sustainable relationships and supports better decision-making for all stakeholders. Description: Comply
A.2.2.	Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. Recommendation 5: The Public Company disclosed the Public Company's communication policies with shareholders or investors on the Website. Explanation: Disclosure of communication policies was a form of transparency on the commitment of the Public Company in providing equality to all shareholders or investors in the implementation of communications. Disclosure of information also aimed to increase the participation and role of shareholders or investors in the implementation of the Public Company communication program.	Perseroan telah memberikan informasi kepada pemegang saham, investor dan masyarakat melalui Situs Web Keterangan: *Comply* The Company has provided information to shareholders, investors and the public through the Company's Website. Description: Comply
B.	Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Function And Role Of The Board Of Commissioners	
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
B.1.1.	Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Recommendation 6: The determination of the number of members of the Board of Commissioners considered the conditions of the Public Company. Explanation: The number of members of the Board of Commissioners could affect the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners. Determination of the number of members of the Board of Commissioners of a Public Company had to refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which consists of at least 2 people based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 33/ POJK.04/2014 concerning the Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it was also necessary to consider the condition of the Public Company which includes the characteristics, capacity, and size, as well as the achievement of goals and fulfillment of different business needs among Public Companies. However, the number of members of the Board of Commissioners that was too large has the potential to interfere with the effectiveness of the implementation of the functions of the Board of Commissioners.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan keberagaman komposisi. Keterangan: *Comply* The number of members of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2024 is 7 (seven) members by considering the diversity of composition. Description: Comply
B.1.2.	Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. Recommendation 7: The determination of the composition of the members of the Board of Commissioners considered the diversity of expertise, knowledge, and experience required. Explanation: The composition of the Board of Commissioners was a combination of characteristics, both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Public Company. These characteristics could be reflected in the determination of the expertise, knowledge, and experience required in carrying out the supervisory duties and providing advice by the Board of Commissioners of a Public Company. The composition that has considered the needs of the Public Company was a positive thing, especially regarding decision making in the context of implementing the supervisory function carried out by considering various broader aspects.	Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/ pendidikan, pengalaman kerja, usia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Keterangan: *Comply* The composition of the Board of Commissioners has fulfilled the elements of diversity, its a combination of independence, expertise/ education, work experience, age by considering the needs and complexity of the Company. Description: Comply
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4: Improving the Quality of Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
B.2.1.	Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Recommendation 8: The Board of Commissioners had a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners. Explanation: The Board of Commissioners' self-assessment policy was a guideline used as a form of accountability for collegially assessing the performance of the Board of Commissioners. The self-assessment was meant to be carried out by each member to assess the performance of the Board of Commissioners in a collegial manner, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this self-assessment, it was hoped that each member of the Board of Commissioners could contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis. The policy might include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodic implementation times, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of a Public Company, where the existence of this function had been required in the Authority Regulation. Financial Services Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self assessment) terhadap KPI Dewan Komisaris dan menunjukan bahwa Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasannya melalui program-program kerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja Dewan Komisaris sesuai dengan target yang ditetapkan. Keterangan : *Comply* The Board of Commissioners has a self-assessment policy for the Board of Commissioners' KPI and shows that the Board of Commissioners has carried out its supervisory duties through work programs that have been outlined in the Board of Commissioners' work plan in accordance with the targets set. Description: Comply
B.2.2.	Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris. Recommendation 9: The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Public Company Annual Report. Explanation: Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence, especially to shareholders or investors, on the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors know the mechanism of checks and balances on the performance of the Board of Commissioners.	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan. Keterangan : *Comply* Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, disclosed through the Annual Report. Description: Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
B.2.3.	Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris tertuang dalam BOC Charter yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dapat melakukan pengunduran diri demi membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selanjutnya yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keterangan : *Comply*
	Recommendation 10: The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes. Explanation: The policy of resigning members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in a Public Company, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. In addition, from a morality point of view, this policy builds an ethical culture within the Public Company. These policies can be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the Board of Commissioners. Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the convict status of a member of the Board of Commissioners from the authorized party. The financial crimes referred to are manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Action of Money Laundering as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.	Board of Commissioners' resignation policy was stated in the BOC Charter which stated that the Board of Commissioners involved in financial crimes can resign in order to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. Furthermore, what is meant by being involved in financial crimes is the existence of a convicted status against a member of the Board of Commissioners from the authorities. The financial crimes referred to include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities as well as Criminal Acts of Money Laundering as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Description: Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
B.2.4.	Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Recommendation 11: The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the process of nominating members of the Directors. Explanation: Based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 34/ POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the task of formulating the policies and criteria needed in the nomination process for prospective members of the Directors. One of the policies that can support the nomination process as referred to is the succession policy for members of the Directors. The succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration process or leadership regeneration in the company in order to maintain business sustainability and the company's long-term goals.	Salah satu organ Dewan Komisaris adalah Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjalankan fungsi nominasi, di antaranya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi, dengan berpedoman pada peraturan BUMN No. PER-3/ MBU/03/2023 tahun 2023. Keterangan: *Comply* One of the organs of the Board of Commissioners was the Nomination and Remuneration Committee which carried out the nomination function, including assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that had been prepared as evaluation materials, guided by SOEs Regulation No. PER-3/ MBU/03/2023 of 2023. Description: Comply
C.	Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Function And Role Of Directors	
C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of Directors	
C.1.1.	Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Jumlah anggota Direksi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 7 (tujuh) orang. Keterangan: *Comply*

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
	Recommendation 12: The determination of the number of members of the Directors takes into account the condition of the Public Company and its effectiveness in decision making. Explanation: : As a company organ that is authorized in managing the company, the determination of the number of Directors greatly affects the performance of the Public Company. Thus, the determination of the number of members of the Directors must be carried out through careful consideration and must refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which are based on the Financial Services Authority Regulation Number 33/ POJK.04/2014 concerning the Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies at least consists of 2 (two) people. In addition, the determination of the number of Directors must be based on the need to achieve the aims and objectives of the Public Company and adjusted to the conditions of the Public Company which includes the characteristics, capacity, and size of the Public Company as well as how to achieve the effectiveness of the Directors' decision making.	The number of members of the Board of Directors as of December 31, 2024 is 7 (seven) members. Description: Comply
C.1.2.	Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Recommendation 13: The determination of the composition of the members of the Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required Explanation: Like the Board of Commissioners, the diversity of the composition of the members of the Directors is a combination of desirable characteristics both in terms of organs of the Directors and individual members of the Directors, in accordance with the needs of a Public Company. The combination is determined by taking into account the appropriate expertise, knowledge and experience in the division of duties and functions of the Directors in achieving the objectives of the Public Company. Thus, the consideration of the combination of these characteristics will have an impact on the accuracy of the nomination process and the appointment of individual members of the Directors or the Directors collegially.	Komposisi Direksi Perseroan saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/ pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan memperimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Keterangan: *Comply* The composition of the Company's Board of Directors has fulfilled the elements of diversity, namely a combination of independence, expertise/ education, work experience, age and gender by considering the needs and complexity of the Company. Description: Comply
C.1.3.	Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/ atau pengalaman kerja terkait.	Direktur Keuangan yaitu Eka Setya Adrianto memiliki latar belakang pendidikan akuntansi serta sepanjang tahun 2024 melakukan peningkatan kompetensi di bidang tersebut. Keterangan : *Comply*

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
	Recommendation 14: Members of the Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting. Explanation: The Financial Report is a management accountability report for the management of resources owned by a Public Company, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including the laws and regulations in the Capital Market sector which regulates the presentation and disclosure of Public Company Financial Statements. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector which regulates the responsibilities of the Directors for the Financial Statements, the Directors is jointly and severally responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and members of the Directors in charge of accounting or finance. Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will greatly depend on the expertise and/ or knowledge of the Directors, particularly members of the Directors in charge of accounting or finance. The existence of qualifications of expertise and/ or knowledge in the field of accounting that at least belongs to the said member of the Directors can provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied on by stakeholders as the basis for making economic decisions regarding the Public Company. Such expertise and/or knowledge can be proven by educational background, training certification, and/or related work experience.	Director of Finance, Eka Setya Adrianto, had an educational background in accounting and throughout 2024, he improved his competence in that field. Description: Comply
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improving the Quality of Performing Duties and Responsibilities of Directors	
C.2.1.	Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Recommendation 15: The Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Directors.. Explanation: As with the Board of Commissioners, the Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegially assessing the performance of the Directors. The self-assessment is meant to be carried out by each member of the Directors to assess the performance of the Directors collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Directors. With this self-assessment, it is hoped that each member of the Directors can contribute to improving the performance of the Directors on an ongoing basis. The policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodical implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of a Public Company, where the establishment of this function has been required in the Authority Regulation. Financial Services Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.	Pengukuran kinerja Direksi terdiri dari beberapa KPI yang diukur secara kolegial pada seluruh Direktur dan bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh. Keterangan: *Comply* Board of Directors' performance assessment consisted of several KPIs that were assess collegially across all Directors and were both quantitative and qualitative. The Remuneration and Nomination Committee has conducted an evaluation and prepared and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the nomination and remuneration system/ policy for Commissioners, Directors, executive officers and employees as a whole. Description: Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
C.2.2.	Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi. Recommendation 16: The self-assessment policy to assess the performance of the Directors is disclosed in the Public Company's annual report. Explanation: Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of their duties, but also to provide important information on efforts to improve the management of the Public Company. This information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is certainty that the management of the company will continue to be carried out in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors know the mechanism of checks and balances on the performance of the Directors.	Kebijakan self assessment atas kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Keterangan: *Comply* Self-Assessment Policy on the Board of Directors' Performance was disclosed in the Annual Report. Description: Comply
C.2.3.	Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Recommendation 17: The Directors has a policy regarding the resignation of members of the Directors if they are involved in financial crimes. Explanation: he policy for the resignation of members of the Directors who are involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in the Public Company, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. In addition, from a morality point of view, this policy will build an ethical culture within the Public Company. These policies can be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the Directors. Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the convict status of a member of the Directors from the authorized party. The financial crimes referred to are manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Action of Money Laundering as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.	Hutama Karya telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi apabila yang bersangkutan terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau negara, sesuai yang tertera pada Board of Directors Charter. Kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Keterangan : *Comply* Hutama Karya has a policy regarding the resignation and dismissal of Directors if the person concerned is involved in actions that are detrimental to the company and/or the state, as stated in the Board of Directors Charter. The policy regarding the resignation and dismissal of Directors is regulated in the Company's Articles of Association. Description: Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
D.	Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation	
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	
D.1.1.	Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. Recommendation 18: The Public Company has a policy to prevent insider trading. Explanation: A person who has inside information is prohibited from conducting a Securities transaction using inside information as referred to in the Capital Market Law. Public companies can minimize the occurrence of insider trading through preventive policies, for example by strictly separating confidential data and/or information from those of a public nature, as well as dividing duties and responsibilities for the management of the information in a proportional and efficient manner.	Hingga berakhirnya tahun buku 2024, PT Hutama Karya (Persero) belum memperdagangkan sahamnya di bursa saham mana pun. Dengan demikian, segala informasi terkait dengan perdagangan orang dalam (insider trading) tidak dapat diuraikan. Keterangan: *Explain* Until the end of last year 2024, PT Hutama Karya (Persero) has not traded its shares on any stock exchange. Thus, any information related to insider trading cannot be explained. Description: Explain
D.1.2.	Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. Recommendation 19: The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy. Explanation: The anti-corruption policy is useful to ensure that the business activities of the Public Company are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of ethics, or in a separate form. The policy may include, among others, the programs and procedures carried out in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in a Public Company. The scope of the policy must describe the prevention of the Public Company against all corrupt practices, both giving and receiving from other parties.	Perseroan telah memiliki kebijakan anti fraud yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 4976/KPTS/132/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Keterangan: *Comply* The Company has an anti-fraud policy as regulated in the Decree of the Board of Directors Number 4976/KPTS/132/XII/2022 dated December 16, 2022. Description: Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
D.1.3.	Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman Procurement.	Perseroan telah memiliki Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SP/SCM/P/001 tanggal 28 Desember 2023. Prosedur tersebut mengatur pelaksanaan pengadaan dan alur prosesnya. Pelaksanaan Prosedur tersebut senantiasa diterapkan dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan dipedomani bagi seluruh pegawai. Keterangan : Comply
	Recommendation 20: The Public Company has a policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.. Explanation: The policy regarding the selection of suppliers or vendors is useful to ensure that the Public Company obtains the goods or services needed at competitive prices and of good quality. Meanwhile, the policy of increasing the ability of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/ fulfill the goods or services needed by the company will affect the quality of the company's output. Thus, the implementation of these policies can ensure continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by the Public Company. The scope of this policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the capacity of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors. The Company has a policy related to the procurement of goods and services which contains the selection and improvement of supplier or vendor capabilities as stated in the standard Procurement Guidelines.	The Company has a Procurement Procedure for Goods and Services Number SP/SCM/P/001 dated December 28, 2023. The procedure regulates the implementation of procurement and its process flow. The implementation of the Procedure is always applied in the Procurement of Goods and/or Services process and is used as a guideline for all employees. Description: Comply
D.1.4.	Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Recommendation 21: The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights. Explanation: The policy regarding the fulfillment of creditor rights is used as a guideline in making loans to creditors. The purpose of the policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain creditor's trust in the Public Company. The policy includes considerations in entering into agreements, as well as followup actions in fulfilling the obligations of the Public Company to creditors.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang hak-hak dan kewajiban kepada kreditur. Keterangan: Comply The Company has a policy on the rights and obligations to creditors. Description: Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
D.1.5.	Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Penjelasan : Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Recommendation 22: Public Companies have a whistleblowing system policy. Explanation: A whistleblowing system policy that has been prepared properly will provide certainty of protection to witnesses or reporters on an indication of a violation committed by the employees or management of the Public Company. The implementation of the system policy will have an impact on the formation of a good corporate governance culture. The whistleblowing system policy covers, among other things, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, the method of complaints, protection and assurance of the confidentiality of the reporter, handling of complaints, the party managing complaints, and the results of handling and following up on complaints.	WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Laporan pelanggaran melalui WBS dapat dilakukan dengan sarana email, surat maupun website. Keterangan: *Comply* WBS is a commitment to create a clean and integrity work environment to report violations that occur in the Company's environment. Reports of violations through WBS can be done by email, letter or website. Description: Comply
D.1.6.	Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat kebijakan kompensasi jangka panjang baik Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Employee Program (ESOP/MSOP) yang diterapkan oleh PT Hutama Karya (Persero).Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat kebijakan kompensasi jangka panjang baik Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Employee Program (ESOP/ MSOP) yang diterapkan oleh PT Hutama Karya (Persero). Keterangan: *Explain*

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
	Recommendation 23: The Public Company has a policy of providing long-term incentives to the Directors and employees. Explanation: Long-term incentives are incentives that are based on the achievement of long-term performance. Long-term incentive plans have the premise that the company's longterm performance is reflected by the growth in the value of the stock or other longterm targets of the company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to the Directors and employees to increase their performance or productivity which will have an impact on increasing the company's performance in the long term. The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Company to encourage the implementation of providing long-term incentives to the Directors and Employees with terms, procedures and forms that are adapted to the long-term goals of the Public Company. The policy may include, among others, the intent and purpose of providing long-term incentives, terms and procedures in providing incentives, and conditions and risks that must be considered by the Public Company in providing incentives. This policy can also be included in the existing Public Company remuneration policy.	The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no long-term compensation policy either Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Employee Program (ESOP/ MSOP) implemented by PT Hutama Karya (Persero). The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no long-term compensation policy either Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Employee Program (ESOP/ MSOP) implemented by PT Hutama Karya (Persero). Description: Explain
E.	Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure	
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8: Improving Implementation of Information Disclosure	
E.1.1.	Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. Recommendation 24: Public Companies utilize the use of information technology more broadly than the Website as a medium for information disclosure. Explanation: The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The disclosure of information that is carried out is not only information disclosure that has been regulated in laws and regulations, but also other information related to a Public Company that is felt to be useful for shareholders or investors to know. With the use of information technology more broadly in addition to the Website, it is hoped that the company can increase the effectiveness of disseminating company information. Nevertheless, the use of information technology is carried out with due regard to the benefits and costs of the company.	Selain situs web, Perseroan juga memanfaatkan teknologi informasi lainnya seperti email dan Instagram sebagai sarana komunikasi dan media keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun juga info lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui Pemegang Saham/investor. Keterangan: *Comply* In addition to the website, the Company also utilizes other information technologies such as email and Instagram as a means of communication and media for information disclosure. The disclosure of information carried out is not only the disclosure of information regulated in laws and regulations but also other information related to the Public Company that is considered useful for Shareholders/ investors to know. Description: Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	*Comply or Explain*
E.1.2.	Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. Recommendation 25: The Public Company Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the Public Company's share ownership through the major and controlling shareholders. Explanation: The laws and regulations in the Capital Market sector governing the submission of the annual report of a Public Company have regulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of a Public Company, as well as the obligation to disclose information regarding the main and controlling shareholders of a Public Company. either directly or indirectly to the ultimate beneficial owner in the ownership of the shares. In this Governance Manual, it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of share ownership in a Public Company of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of share ownership by the major and controlling shareholders.	Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga kepemilikan saham dengan porsi 5% atau lebih tidak disajikan karena sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Keterangan: *Explain* All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia, so share ownership with a portion of 5% or more is not presented because it is fully owned by the Government of the Republic of Indonesia. Description: Explain

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

KRITERIA PENILAIAN

Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard meliputi:
1. Hak-Hak Pemegang Saham
2. Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan & Transparansi
5. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Penilaian ACGS dilakukan oleh PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group).

HASIL PENILAIAN

Penilaian Good Corporate Governance (GCG) di PT Hutama Karya (Persero) menggunakan standar ACGS periode assessment Tahun Buku 2023 menghasilkan total skor capaian (Level 1 dan Level 2) sebesar 77,48 poin.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

ASSESSMENT CRITERIA

The components of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment include:
1. Shareholder Rights
2. Equitable Treatment of Shareholders
3. Role of Stakeholders
4. Disclosure & Transparency
5. Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners

PARTY CONDUCTING THE ASSESSMENT

The ACGS assessment was conducted by PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group).

Assessment Results

The Good Corporate Governance (GCG) assessment of PT Hutama Karya (Persero) using the ACGS standard for the 2023 financial year assessment period resulted in a total score of 77.48 points (Level 1 and Level 2).

Komponen Penilaian Component of Assessment		Skor 2023 2023 Score
LEVEL 1		
Bagian A	Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham Shareholder Rights and Equal Treatment	14,67
Bagian C	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	8,86
Bagian D	Transparansi dan Pengungkapan Transparency and Disclosure	21,32
Bagian E	Tanggung Jawab Dewan Board Responsibility	31,11
TOTAL LEVEL 1		75,96
LEVEL 2		
Bonus		6,67
Penalti Penalty		(5,15)
TOTAL LEVEL 2		1,52
TOTAL		77,48

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX

Penilaian CGPI dilakukan melalui 2 tahapan:
1. Tahap Analisis
   Analisis kecukupan instrumen penilaian dengan menggunakan metode kuesioner

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX

CGPI Assessment is carried out through 2 stages:
1. Analysis Stage
   The analysis of the adequacy of the assessment instruments using a self-assessment

self assessment dan penilaian kelengkapan dokumen sistem Tata Kelola Perusahaan.

2. Tahap Observasi
   Klarifikasi hasil tahap analisis melalui presentasi oleh Perusahaan serta diskusi Tim Observer dengan Organ dan Manajemen Perusahaan.

KRITERIA PENILAIAN

CGPI 2023 dinilai dari pemenuhan aspek dan indikator penilaian sebagai berikut

1. Governance Structure
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek struktur tata kelola ini meliputi:
   a. Indikator Pemegang Saham dan RUPS
   b. Indikator Dewan Komisaris
   c. Indikator Direksi
   d. Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris
   e. Indikator Organ Kelengkapan Direksi
   f. Indikator Manajemen Fungsional
2. Governance Process
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem manajemen yang mampu mewujudkan optimalisasi seluruh fungsi manajemen sesuai dengan perubahan lingkungan kontekstual perusahaan, serta prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek proses tata kelola meliputi:
   a. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham & RUPS.
   b. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi.
   c. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian.
   d. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.
   e. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Risiko.
   f. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Kepatuhan.
   g. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Pengendalian & Pengawasan.
   h. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Perencanaan Strategis.
   i. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi.

questionnaire method and evaluating the completeness of the corporate governance system documentation.

2. Observation Stage
   Clarification of the results from the analysis stage through presentations by the company and discussions between the Observer Team and the Company's Organ and Management.

EVALUATION CRITERIA

CGPI 2023 is assessed based on the fulfillment of the following aspects and indicators:

1. Governance Structure
   This aspect evaluates the completeness of the organs, structure, and infrastructure in the company under principles, values, and compliance to create value and ensure sustainable growth in an ethical and dignified manner. The assessment indicators for this governance structure aspect include:
   a. Indicators for Shareholders and GMS (General Meeting of Shareholders)
   b. Indicators for the Board of Commissioners
   c. Indicators for the Board of Directors
   d. Indicators for Supporting Organs for the Board of Commissioners
   e. Indicators for Completeness of the Board of Directors' Organs
   f. Indicators for Functional Management
2. Governance Process
   This aspect evaluates the management system's ability to optimize all management functions in line with the company's contextual environmental changes, as well as its principles, values, and compliance, to create value and ensure sustainable growth in an ethical and dignified manner. The assessment indicators for the governance process aspect include:
   a. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Shareholders & GMS (General Meeting of Shareholders).
   b. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for the Board of Commissioners and Directors.
   c. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Organizational Behavior.
   d. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Disclosure and Information Transparency.
   e. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Risk Management.
   f. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Compliance.
   g. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Control & Oversight.
   h. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Strategic Planning.
   i. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Organizational Infrastructure.

j. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi.
k. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
l. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi
m. Indikator Sistem & Mekanisme Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan.

3. *Governance Outcome*
Aspek ini merupakan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan yang optimal, berhasil guna, dan berdaya guna dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek hasil tata kelola meliputi:
a. Indikator Hasil dari Tata Kelola Organ Perusahaan.
b. Indikator Kesesuaian Perilaku Keorganisasian.
c. Indikator Hasil dari Tata Kelola Risiko, Kepatuhan serta Pengendalian dan Pengawasan.
d. Indikator Hasil dari Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
e. Indikator Hasil dari Membangun kematangan Perusahaan.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

CGPI diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG)

HASIL PENILAIAN

Pencapaian hasil penilaian GCG yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), berhasil memperoleh skor sebesar 80,41 dengan predikat "Terpercaya".

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

NO	Rekomendasi CGPI 2023 CGPI 2023 Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
Aspek Struktur Tata Kelola (Governance Structure) Governance Structure		
1	Hutama Karya perlu mempertimbangkan dan merespon keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Direksi. Hutama Karya needs to consider and respond to gender diversity within the membership structure of the Board of Directors.	Struktur keanggotaan Direksi telah mempertimbangkan keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan gender. The membership structure of the Board of Directors has taken into account diversity in expertise, educational background, and gender.

j. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Information Technology.
k. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Sustainable Development Goals.
l. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Creativity and Innovation
m. Indicators of Governance Systems & Mechanisms for Building Corporate Maturity.

3. Governance Outcome
This aspect evaluates the achievement of optimal company performance, effective and beneficial, through the efficient and effective use of resources in creating value and ensuring sustainable growth in an ethical and dignified manner. The assessment indicators for this governance result aspect include:
a. Governance Outcome Indicators of Corporate Governance Organ.
b. Indicators of Organizational Behavior Compliance.
c. Indicators of Governance Results in Risk Management, Compliance, and Control & Oversight.
d. Indicators of Governance Results in Sustainable Development Goals.
e. Indicators of Results from Building Corporate Maturity.

PARTY CONDUCTING THE ASSESSMENT

CGPI is organized byThe Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

ASSESSMENT RESULTS

The result of the GCG assessment conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) achieved a score of 80.41 with the predicate "Trusted".

RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UP ACTIONS

NO	Rekomendasi CGPI 2023 CGPI 2023 Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
2	Hutama Karya perlu mempertimbangkan pembentukan struktur komite ESG untuk mengoptimalkan implementasi dan monitoring program ESG Perusahaan. Hutama Karya should also consider the establishment of an ESG (Environmental, Social, and Governance) committee structure to optimize the implementation and monitoring of the company's ESG programs	Sudah dilakukan pembentukan Tim PMO ESG dengan tugas dan tanggungjawab dalam implementasi dan monitoring ESG. The formation of the ESG PMO (Project Management Office) team has been carried out, with responsibilities for implementing and monitoring ESG initiatives.
3	Hutama Karya perlu mengoptimalkan kompetensi SDM terutama untuk posisi kunci dalam struktur organisasi dengan sertifikasi berstandar nasional maupun internasional. Hutama Karya needs to optimize human resource competencies, particularly for key positions in the organizational structure, through certifications that meet both national and international standards	Perseroan telah melakukan optimalisasi kompetensi SDM pada posisi kunci dan juga jajaran lainnya dengan sertifikasi berstandar nasional maupun internasional. Insan Hutama senantiasa mengikuti pelatihan yang relevan dengan perkembangan industri konstruksi saat ini. The company has optimized the competencies of human resources in key positions as well as other ranks through certifications that meet national and international standards. Hutama's employees continually participate in training relevant to the current developments in the construction industry.
4	Hutama Karya perlu melakukan pemutakhiran kebijakan dan strategi Perusahaan secara berkala melalui analisis berbasis risiko yang komprehensif berkaitan dengan dinamika lingkungan bisnis dan industri agar dapat mengoptimalkan potensi perusahaan. Hutama Karya should regularly update the company's policies and strategies through comprehensive risk-based analysis related to the dynamics of the business and industry environment, to optimize the company's potential	1. Proses Penyesuaian dan penyempurnaan Kebijakan telah senantiasa dilakukan dengan memperhatikan aspek ketentuan Regulator yang berlaku, Strategi Perusahaan dan juga kebutuhan bisnis. The process of adjusting and improving policies has been consistently carried out, taking into account the applicable regulatory provisions, company strategies, and business needs 2. Strategi Perusahaan disusun dengan komprehensif dan mempertimbangkan faktor internal, eksternal. Selain itu dalam penyusunan strategi juga senantiasa berpedoman pada ketentuan regulator yang berlaku. The company's strategy is developed comprehensively, considering both internal and external factors. Additionally, the development of the strategy always adheres to the applicable regulatory provisions.
Aspek Proses Tata Kelola *(Governance Process)* Governance Process		
1	Hutama Karya perlu melakukan evaluasi kematangan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi secara berkala. Hutama Karya needs to regularly evaluate the maturity of corporate governance, risk management, and compliance in an integrated manner	Evaluasi atas penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan kepatuhan secara terintegrasi telah dilaksanakan melalui pertemuan dan koordinasi rutin antara masing – masing unit kerja fungsional, serta mekanisme arahan dan pemantauan oleh organ Komite perusahaan. The evaluation of the implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) in an integrated manner has been carried out through regular meetings and coordination between each functional work unit, as well as through directives and monitoring mechanisms by the company's committees

NO	Rekomendasi CGPI 2023 CGPI 2023 Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
2	Hutama Karya perlu perlu mengembangkan program penilaian dan pengukuran penerapan pedoman etika yang efektif oleh seluruh anggota perusahaan untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang menyimpang. Hutama Karya also needs to develop a program for assessing and measuring the effective implementation of ethical guidelines by all company members to prevent corporate involvement in deviant behaviors	Perusahaan telah memiliki kode etik yang menjelaskan prinsip dasar perilaku dan etika bisnis yang harus diterapkan Insan Hutama. Implementasi dan penegakan kode etik telah dilakukan secara terus menerus melalui Annual Disclosure, Pakta Integritas dan program awareness. The company has a code of ethics that outlines the fundamental principles of behavior and business ethics that must be adhered to by Insan Hutama. The implementation and enforcement of the code of ethics have been continuously carried out through Annual Disclosure, Integrity Pacts, and awareness programs
3	Hutama Karya perlu mengembangkan mitigasi serta perbaikan proses kerja dalam rangka mencegah terjadinya/ terulangnya fraud, kasus non fraud, sanksi/ denda, serta pelanggaran lainnya. Hutama Karya needs to develop mitigation strategies and improve work processes to prevent the occurrence or recurrence of fraud, non-fraud cases, sanctions/ penalties, and other violations.	Dalam rangka pencegahan serta mitigasi potensi terjadinya fraud, Hutama Karya mengimplementasikan Strategi Anti Fraud (SAF) yang mencakup 4 (empat) pilar yaitu sebagai berikut : 1. Pencegahan 2. Deteksi 3. Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum 4. Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut Dan pelaksanaannya terus di evaluasi secara berkelanjutan To prevent and mitigate the potential occurrence of fraud, Hutama Karya implements an Anti-Fraud Strategy (SAF) which includes four pillars as follows: • Prevention 1. Detection 2. Investigation, Reporting, Sanctions, and Legal Processes 3. Monitoring, Evaluation, and Follow-Up The implementation of these pillars is continuously evaluated
4	Hutama Karya perlu mengoptimalisasi pemanfaatan whistle blowing system (WBS) diantaranya dengan pelaksanaan sosialisasi yang terus menerus secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dalam melaporkan tindakan pelanggaran di perusahaan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, bertanggung jawab, bersih dan berintegritas. Hutama Karya should optimize the use of the whistleblowing system (WBS), including conducting continuous and sustained socialization efforts to enhance employees' understanding and awareness in reporting violations within the company, thereby creating a work environment that is open, responsible, clean, and integral.	Perusahaan terus meningkatkan awareness terhadap pemanfaatan WBS kepada seluruh Insan Hutama untuk meningkatkan lingkungan kerja yang terbuka, bertanggungjawab dan berintegritas. The company continually enhances awareness regarding the use of the Whistleblowing System (WBS) to all employees of Hutama Karya, aiming to create an open, responsible, and integral work environment

NO	Rekomendasi CGPI 2023 CGPI 2023 Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
5	Hutama Karya perlu mengoptimalkan penguatan pengendalian internal diantaranya melalui implementasi internal control over financial reporting (ICOFR) untuk peningkatan akuntabilitas pelaporan yang disesuaikan dengan rencana strategis Perusahaan. Hutama Karya needs to optimize the strengthening of internal controls, including the implementation of internal control over financial reporting (ICOFR) to enhance the accountability of reporting in line with the company's strategic plan	Saat ini, Hutama Karya sudah melaksanakan kajian diagnostik ICoFR (2023) dan sudah melakukan perancangan/desain ICoFR (2024) untuk sebagian proses bisnis untuk Entitas Induk. Selanjutnya, HK akan mempersiapkan perancangan ICoFR secara end-to-end, melakukan implementasi desain dan pemantauan berkelanjutan (CSA), serta melaksanakan evaluasi (TOD dan TOE), tidak hanya untuk Entitas Induk namun juga secara konsolidasi. Currently, Hutama Karya has conducted a diagnostic study of ICOFR (2023) and has designed the ICOFR framework (2024) for some business processes of the Parent Entity. Moving forward, Hutama Karya will prepare the end-to-end ICOFR design, implement the design, and conduct continuous monitoring (CSA), as well as carry out evaluations (TOD and TOE), not only for the Parent Entity but also for consolidation purposes
6	Hutama Karya perlu mengembangkan evaluasi pengukuran kematangan sistem tata kelola human capital yang dapat mendukung pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi perusahaan, serta menjadikan perusahaan sesuai standar best practice internasional. Hutama Karya also needs to develop an evaluation for measuring the maturity of the human capital governance system, which can support human resources management in alignment with the company's strategy, and ensure that the company meets international best practice standards.	Hutama Karya mengimplementasikan program peningkatan kematangan pengelolaan SDM (Human Capital Management Maturity Level) sebagaimana Aspirasi Pemegang Saham Hutama Karya is also implementing a human capital management maturity program (Human Capital Management Maturity Level) in line with the aspirations of the Shareholders
7	Hutama Karya perlu menjaga kehandalan dan tingkat keamanan terhadap data, network, sistem dan teknologi informasi yang digunakan sehingga terbebas dari risiko peretasan dan penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Hutama Karya needs to maintain the reliability and security levels of the data, networks, systems, and information technology used, ensuring that it is free from the risks of hacking and unauthorized data use by third parties	Hutama Karya selalu berupaya menjaga keandalan dan tingkat keamanan data, network dan sistem teknologi informasi yang digunakan. Beberapa inisiatif yang dilaksanakan untuk upaya tersebut antara lain: Hutama Karya continuously strives to maintain the reliability and security of data, networks, and information technology systems used. Some of the initiatives implemented for this purpose include 1. Penerapan dan Penyusunan Regulasi Penerapan Pelindungan Data Pribadi. 2. Upgrading Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. 3. Penerapan Mobile Device Management. 4. Penerapan Security Operation Center. 1. Implementation and formulation of regulations for Personal Data Protection. 2. Upgrading the Information Security Management System certification based on ISO 27001:2022. 3. Implementation of Mobile Device Management. 4. Implementation of Security Operation Center
8	Hutama Karya perlu mengadopsi sistem manajemen inovasi dengan mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi sesuai dengan standar ISO 56002:2019 - Sistem manajemen inovasi. Hutama Karya also needs to adopt an innovation management system by implementing and obtaining certification in accordance with the ISO 56002:2019 standard for Innovation Management Systems	Hutama Karya secara optimal terus mendorong transformasi dan inovasi untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders dan mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan sustainable Hutama Karya optimally continues to drive transformation and innovation to provide added value for all stakeholders and foster healthy and sustainable business growth.

NO	Rekomendasi CGPI 2023 CGPI 2023 Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
Aspek Hasil Tata Kelola (Governance Outcome) Governance Outcome		
1	Hutama Karya perlu meningkatkan pertumbuhan nilai untuk Pemegang Saham melalui peningkatan dividen secara konsisten dan proporsional bagi seluruh Pemegang Saham. Hutama Karya needs to enhance shareholder value growth by increasing dividends consistently and proportionally for all shareholders.	Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal kebijakan pembagian dan peningkatan dividen Hutama Karya menaati dan menjalankan kebijakan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hutama Karya is a state-owned enterprise whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. In terms of dividend distribution and increase policies, Hutama Karya adheres to and implements the policies decided in the General Meeting of Shareholders.
2	Hutama Karya perlu mengoptimalkan kapabilitas, kapasitas, kompetensi utama perusahaan melalui capaian implementasi strategi yang adaptif, kuat, tangkas dan efisien dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Hutama Karya needs to optimize the company's capabilities, capacity, and core competencies through the achievement of adaptive, strong, agile, and efficient strategy implementation to support sustainable company growth	Hutama Karya telah memetakan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja pada masing-masing fungsi yang termuat pada buku RKAP. Dalam rangka optimalisasi kapabilitas, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, Hutama Karya memiliki program pelatihan, sertifikasi, self learning maupun program beasiswa pendidikan S2/S3 yang diberikan kepada seluruh karyawan yang memenuhi kriteria. Hutama Karya has mapped out the Targets, Strategies, Policies, and Work Programs for each function, which are included in the RKAP book. In order to optimize the capabilities, capacity, and competencies of human resources, Hutama Karya has training programs, certifications, self-learning, and S2/S3 education scholarship programs provided to all employees who meet the criteria
3	Hutama Karya perlu melakukan penanganan secara progresif atas seluruh perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi risiko yang optimal atas seluruh gugatan hukum, serta mencegah terjadinya Kembali perkara hukum Perusahaan. Hutama Karya needs to progressively address all ongoing legal matters and strive to mitigate risks optimally for all legal claims, as well as prevent the recurrence of legal issues for the company.	Hutama Karya telah melakukan penanganan secara progresif atas seluruh perkara hukum yang dihadapi, hal ini dibuktikan dengan tingkat pemenangan perkara hukum pada tahun 2024 mencapai > 93%. Dalam upaya memitigasi risiko dan mencegah terjadinya kembali perkara hukum, Hutama Karya memiliki fungsi pengendalian kepatuhan pada Divisi Legal maupun Divisi Sistem dan Kepatuhan Hutama Karya has progressively handled all legal matters it faces, as evidenced by the legal case win rate in 2024, which reached > 93%. In an effort to mitigate risks and prevent the recurrence of legal issues, Hutama Karya has a compliance control function within the Legal Division and the Systems and Compliance Division
4	Hutama Karya perlu meningkatkan capaian inovasi bisnis perusahaan menjadi yang terbaik tidak hanya pada produk dan layanan namun juga pada proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi atau strategi sehingga menjadi keunggulan bersaing perusahaan serta menjaga nilai perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan. Hutama Karya needs to improve the achievement of business innovation to become the best not only in products and services but also in processes, support functions, organizational performance, or strategies, thus creating a competitive advantage and ensuring sustainable company growth	Hutama Karya secara konsisten melakukan berbagai inovasi pada berbagai sektor, tidak hanya pada produk namun juga inovasi pada proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi dan strategi seperti implementasi program peningkatan kematangan pengelolaan SDM (Human Capital Management Maturity Level), Implementasi employee well-being program. Hutama Karya consistently implements various innovations in various sectors, not only in products but also in processes, support functions, organizational performance, and strategies, such as the implementation of the Human Capital Management Maturity Level program and the Employee Well-Being program

NO	Rekomendasi CGPI 2023 CGPI 2023 Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
5	Hutama Karya perlu meningkatkan penanganan pengaduan yang diterima dari berbagai sumber untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan Perusahaan. Hutama Karya needs to improve the handling of complaints received from various sources to increase stakeholder trust in the company.	Hutama Karya telah menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima baik melalui sosial media, kontak website, Whistleblowing system maupun melalui platform yang disediakan pemerintah RI yaitu SP4N - LAPOR! Hutama Karya has followed up on all complaints received through social media, website contact, the Whistleblowing System, and the platform provided by the Government of Indonesia, SP4N - LAPOR!
Rekomendasi Konseptual **Conceptual Recommendations**		
1	Perusahaan diharapkan secara terus menerus mampu mengembangkan program membangun kematangan sesuai dengan konsep-konsep yang telah banyak tersedia, termasuk konsep-konsep di level internasional. Bagi perusahaan yang telah menjalankan pilihan konsep membangun kematangan diharapkan mampu menjalankannya secara konsisten dan berkelanjutan. Bagi yang belum menjalankan dapat memilih untuk menggunakan dari berbagai konsep yang telah ada agar perusahaan semakin terbangun kematangannya dalam menghadapi berbagai perubahan yang aktual The company is expected to continuously develop maturity-building programs in accordance with the concepts that are widely available, including those at the international level. For companies that have already implemented a chosen maturity-building concept, it is expected that they can run it consistently and sustainably. For those that have not yet implemented it, they can choose from various existing concepts so that the company can further develop its maturity in facing various current changes	Perusahaan telah mengembangkan dan menerapkan program membangun kematangan dengan konsep-konsep pada level internasional serta secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan konsep-konsep tersebut seperti ITIL (Information Technology Infrastructure Library) dan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) The company has developed and implemented maturity-building programs with concepts at the international level and consistently and sustainably applies these concepts, such as ITIL (Information Technology Infrastructure Library) and COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies).
2	Perusahaan diharapkan mampu mengembangkan konsep kematangan berdasarkan prinsip GCG melalui perencanaan bisnis perusahaan yang menghasilkan skenario bisnis sesuai tuntutan keberhasilan di dunia industri dan bisnisnya, melalui penetapan sasaran strategis yang komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan, program, dan kegiatan strategisnya. The company is expected to develop a maturity concept based on GCG principles through the company's business planning, which generates business scenarios that meet the demands for success in its industrial and business sectors, by establishing comprehensive and integrated strategic goals with policies, programs, and strategic activities	Perusahaan telah menerapkan konsep GCG dalam setiap perencanaan bisnisnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini tertuang dalam RKAP dan RJPP Perusahaan. The company has applied the GCG (Good Corporate Governance) concept in every aspect of its business planning, both short-term and long-term. This is reflected in the company's RKAP (Annual Business Plan) and RJPP (Long-Term Business Plan).

NO	Rekomendasi CGPI 2023 CGPI 2023 Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
Rekomendasi Teknikal Technical Recommendations		
1	Perusahaan diharapkan mampu merancang inisiatif membangun kematangan bisnis yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat daya saing perusahaan, dilengkapi dengan penahapan peta jalannya. The company is expected to design initiatives to build sustainable business maturity, taking into account the driving and inhibiting factors of the company's competitiveness, along with the development of a phased roadmap.	Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang yang juga memuat roadmap bisnis berkelanjutan yang berlandaskan ESG The company has developed a Long-Term Work Plan, which includes a sustainable business roadmap based on ESG principles.
2	Perusahaan diharapkan mampu melaksanakan secara disiplin program membangun kematangan yang telah menjadi inisiatif dan melakukan evaluasi secara berkala. The company is expected to implement the business maturity-building programs in a disciplined manner, with regular evaluations.	Perusahaan secara disiplin melaksanakan seluruh inisiatif yang telah diinisiasi dan melakukan evaluasi berkala yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham maupun stakeholder lain yang berkaitan. The company systematically implements all initiated programs and conducts periodic evaluations, which are reported to the Board of Commissioners, Shareholders, and other relevant stakeholders.
3	Perusahaan diharapkan mampu menyesuaikan penerapan konsep tata kelola perusahaan yang telah berkembang dalam kesepakatan sistem dunia, seperti berbasis standar sistem mutu (ISO), diantaranya dengan menerapkan standar sistem yang baru disahkan seperti model kematangan tata kelola organisasi (ISO 37004:2023), dan ISO 31050:2023 sistem manajemen risiko The company is expected to adapt the application of corporate governance concepts that have evolved in global system agreements, such as ISO-based quality system standards, including the adoption of newly established standards such as the organizational governance maturity model (ISO 37004:2023) and ISO 31050:2023 for risk management systems.	Perusahaan telah menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang berbasis standar sistem mutu ISO. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan standar-standar terbaru yang relevan dengan proses bisnis perusahaan The company has applied corporate governance concepts based on ISO quality system standards and is committed to continuously improving the application of the latest relevant standards in its business processes.

Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

		Keterangan Description	Halaman Page
Ketentuan Umum General Terms			
1		Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
	a.	Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	?
	b.	Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	
	c.	Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	
	d.	Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	
	e.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	√
	f	Direksi: Board of Directors:	
		1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	
		2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	

	Keterangan Description	Halaman Page
	g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
	1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	
	2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	
	h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
	1) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	√
	2) bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	√
2	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	√
3	Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	√
4	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	√
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	√

	Keterangan Description	Halaman Page
Bentuk Laporan Report Format		
1	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	√
2	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	√
3	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	√
4	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	√
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents		
1	Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	√
	a. ikhtisar data keuangan penting; key financial highlights;	√
	b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	√
	c. laporan Direksi; Board of Directors report	√
	d. laporan Dewan Komisaris; Board of Commissioners report;	√
	e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	√
	f. analisis dan pembahasan manajemen; management discussion and analysis;	√
	g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	√
	h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company	√
	i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	√
	j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	√
2	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
	a. Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Key financial highlights containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	
	1) pendapatan/penjualan; revenue/sales;	21
	2) laba bruto; gross profit;	21
	3) laba (rugi); profit (loss);	21

		Keterangan Description	Halaman Page
	4)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non- controlling interests;	22
	5)	total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	22
	6)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	22
	7)	laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	22
	8)	jumlah aset; total assets;	19
	9)	jumlah liabilitas; total liabilities;	20
	10)	jumlah ekuitas; total equity;	21
	11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	24
	12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	25
	13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	24
	14)	rasio lancar; current ratio;	24
	15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	25
	16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	25
	17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	24-25
b.		Informasi Saham Stock Information	
		Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock information for a Public Company shall at least contain:	
	1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	26
		jumlah saham yang beredar; number of outstanding shares;	
		kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	
		harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	
		volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	
	2)	dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	26
		tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	

Keterangan Description			Halaman Page
		rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
		jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	
		jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	
		harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	
	3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	26
	4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	26
c.	Laporan Direksi Board of Directors Report		
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:		
	1)	kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
		strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	54-55
		peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	54
		proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	54
		perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	55-56
		kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	56
	2)	gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	56-58
	3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	58-61
d.	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report		
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:		
	1)	penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	40-42
	2)	pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan opinion on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	42-43
	3)	pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik opinion on the implementation of governance of the Issuer or Public Company	43-48
		Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:		

	Keterangan Description	Halaman Page
1)	nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	68-69
2)	akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	68-70
	alamat; address;	70
	nomor telepon; telephone number;	
	alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	
	alamat situs web; website address;	
3)	riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	71
4)	visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	72-74
5)	kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	75-80
6)	wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	82-83
7)	struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	84-85
8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	81
9)	profil Direksi, paling sedikit memuat: Board of Directors' profile, at least containing:	
	nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	86-93
	foto terbaru; recent photograph;	
	usia; age;	
	kewarganegaraan; nationality;	
	riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	
	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
	dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	
	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	
	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	

	Keterangan Description	Halaman Page
	hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	94
	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	95-97
10)	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Commissioners, at least containing:	
	nama dan jabatan; name and position;	98-105
	foto terbaru; recent photograph;	
	usia; age;	
	kewarganegaraan; nationality;	
	riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	
	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
	dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	
	dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	
	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	
	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	106
	pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	N/A
	perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris,maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	106-109

	Keterangan Description	Halaman Page
11)	dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	
12)	jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	118-120
13)	nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	
	pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	121
	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	121
	kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	121
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
14)	persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	121
15)	jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	121
	kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	
	kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	
	kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	
	kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	

		Keterangan Description	Halaman Page
	16)	informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	122
	17)	nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company;For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	123-132
	18)	kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and deductions (if any);	133
	19)	informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	134-138
	20)	informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include: nama dan alamat; name and address; periode penugasan; assignment period; informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided; biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	138
	21)	nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	139-143
f.		Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion And Analysis	
		Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management discussion and analysis contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
	1)	tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	
		produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	169-182
		pendapatan/penjualan; dan revenue/sales; and	184-189
		profitabilitas; profitability;	184-189

	Keterangan Description	Halaman Page
2)	kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	
	aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	194-196, 198-202
	liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities;	196-197, 202-205
	ekuitas; equity;	198, 205
	pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	206-210
	arus kas; cash flows;	210-211
3)	kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	213-216
4)	tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	216-217
5)	struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	217-218
6)	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	
	tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	219
	sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	219
	mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	219
	langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position:	219
7)	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	
	jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	219
	tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	219-220
	nilai investasi barang modal yang dikeluarkan the total of capital goods investments;	219
8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts subsequent to the date of the accountant's report (if any);	220-221
9)	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	221-225
10)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	
	pendapatan/penjualan; revenue/sales;	225
	laba (rugi); profit (loss);	225

	Keterangan Description	Halaman Page
	struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	226
	hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	225-228
11)	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	
	pendapatan/penjualan; revenue/sales;	229
	laba (rugi); profit (loss);	229
	struktur modal (capital structure); capital structure;	230
	kebijakan dividen; atau dividend policy; or	230
	hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	229-231
12)	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	164-166
13)	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	
	kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	232-233
	tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	233
	jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	233
	jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	233
14)	realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	
	dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	234-235
	dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	N/A
15)	informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/ consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	236-245
	tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	236-238, 243
	nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	236-238, 241-242
	sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	241-242
	penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	240, 244

		Keterangan Description	Halaman Page
		pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	240, 244
		dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	
		pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	240, 245
		peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	240, 245
		untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate operating income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	239, 243
		Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	
		untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	N/A
		dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction,then this shall be disclosed;	238-239
	16)	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan Changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	246-250
	17)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada) changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	251
g.		Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	
		Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
	1)	RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	315-329
		Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	
		keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year realized in the fiscal year; and	
		keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	

	Keterangan Description	Halaman Page
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the implementation of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	
2)	Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	
	tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	333-336
	pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	341-342
	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the attendance rate of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the attendance rate of members of the Board of Directors in Board of Directors meetings, meetings of Board of Directors with the Board of Commissioners, or GMS can be presented in tabular form.	344-367
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	366-370
	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency development attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	
	penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	370-371
	prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
3)	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	
	tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	374-377
	pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	382-383
	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the attendance rate of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the attendance rate of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	386-413
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency development of members of the Board of Commissioners:	414-416

	Keterangan Description	Halaman Page
	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency development and/or training of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency development and/or training attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	
	penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	417-433
	prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	
	pihak yang melakukan penilaian; dan assessor; and	
	penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	433
	prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	
4)	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
	prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	436-437
	prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
	prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	437
	struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	438-439
	besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	439-440
5)	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	N/A
	nama; name;	
	dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
	periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
	tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	

	Keterangan Description	Halaman Page
	frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	
6)	Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	459-461
	nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
	usia; age	
	kewarganegaraan; nationality	
	riwayat pendidikan; educational history;	
	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
	dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	
	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	
	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	
	pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	462-46
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency development attended in the fiscal year (if any);	463
	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the attendance rate of audit committee members in those meetings; and	464-476
	pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	476-477
7)	komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	
	nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	482-483
	usia; age;	
	kewarganegaraan; nationality;	
	riwayat pendidikan; educational history;	
	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
	dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	
	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	
	pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	484
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency development attended in the fiscal year (if any);	485

	Keterangan Description	Halaman Page
	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	478-480
	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	481
	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the attendance rate of members at the meeting;	485-489
	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	489
	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
	alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	
	pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	
8)	komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	
	nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	497-500, 522-526
	usia; age;	
	kewarganegaraan; nationality;	
	riwayat pendidikan; educational history;	
	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
	dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	
	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	
	pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	500-501, 528-529
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency development attended in the fiscal year (if any); and	501, 529-530
	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	492-494, 516-519
	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	495-496, 520-521
	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the attendance rate of committee members at the meeting; and	502-514, 530-533
	uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	514-515, 533
9)	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	
	nama; name;	536
	domisili; domicile;	
	riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	

	Keterangan Description	Halaman Page
	dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as corporate secretary; and	
	pengalaman kerja beserta periode waktunyabaik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	riwayat pendidikan; educational history;	
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency development attended during the fiscal year; and	536
	uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	537
10)	Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	
	nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	539
	riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
	dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	
	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency dvelopment attended in the fiscal year;	540-543
	struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	538
	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	543-545
	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	543
	uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	551-556
11)	uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	
	pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	583-586
	tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	592
	pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	592
12)	sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	
	gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	593-601
	jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	610-613
	tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	614-615
	pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	615-616
13)	perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least containing:	617-619

	Keterangan Description	Halaman Page
	pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	
	status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	
	pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; Impact on the condition of the Issuer or Public Company;	
14)	informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	620
15)	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: Information regarding the code of conduct of the Issuer or Public Company includes:	
	pokok-pokok kode etik; main points of the code of conduct;	629-630
	bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of dissemination of the code of conduct and its enforcement efforts; and	630-632
	pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of conduct applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	630
16)	uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees of the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP);	630
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least containing:	
	jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	
	jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	
	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	
	harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	
17)	uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	633
	kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	
	pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	
18)	uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	
	cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	634-635
	perlindungan bagi pelapor protection for whistleblowers;	635
	penanganan pengaduan; complaint handling;	636-638
	pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	639

		Keterangan Description	Halaman Page
		hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	640
		jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	
		tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter shall be disclosed.	
		uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	
		program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuity in Issuers or Public Companies; and	641-645
		pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. anti-corruption training/dissemination to employees of Issuers or Public Companies; In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	646-647
	20)	penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	656-670
		pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	
		penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel Disclosure of information can be presented in tabular form	
h.		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	
		Bagian Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik disajikan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini The Social and Environmental Responsibility section of the Issuer or Public Company is presented in the form of a Sustainability Report, which serves as an integral part of this Annual Report.	
i.		Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Indonesia Report	
		Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with Indonesian financial accounting standards and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities firms in the event that the Issuer is a securities firm.	

	Keterangan Description	Halaman Page
	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report	
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding responsibilities for the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I, which serves as an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2024 DAN 2023/
31 DECEMBER 2024 AND 2023

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 DAN 2023

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/
AND SUBSIDIARIES

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Budi Harto
   Alamat Domisili : Taman Laguna Blok M No.25 RT.003/RW.002, Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Bekasi
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Eka Setya Adrianto
   Alamat Domisili : Mutiara Gading Timur 2, Blok M.1 No. 09, Mustika Jaya, Bekasi
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Hutama Karya (Persero) dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Directors, we, the undersigned:

1. *Name* : *Budi Harto*
   Address of Domicile : *Taman Laguna Blok M No.25 RT.003/RW.002, Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Bekasi*
   Position : *President Director*
2. *Name* : *Eka Setya Adrianto*
   Address of Domicile : *Mutiara Gading Timur 2, Blok M.1 No. 09, Mustika Jaya, Bekasi*
   Position : *Finance Director*

declare that:

1. *The Directors are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Hutama Karya (Persero) and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
   b. *The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and*
4. *The Directors are responsible for the Group's internal control systems.*

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/ *For and on behalf of the Directors.*

JAKARTA
MARET/ *MARCH* 2025



Budi Harto
Direktur Utama/ *President Director*

Eka Setya Adrianto
Direktur Keuangan/ *Finance Director*

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Hutama Karya (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Hutama Karya (Persero) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. Penilaian penurunan nilai aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol

Lihat Catatan 2r (Kebijakan akuntansi material - Penurunan nilai aset non-keuangan), Catatan 3g (Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting - Estimasi penurunan nilai aset non-keuangan) dan Catatan 18 (Aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol) atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah tercatat aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol sebesar Rp 127,1 triliun.

Manajemen melakukan penilaian penurunan nilai atas aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol dan aset terkait ketika terdapat indikator penurunan nilai sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar akuntansi dengan melibatkan tenaga ahli eksternal untuk penilai dan tenaga ahli eksternal untuk memprakirakan volume lalu lintas jalan tol. Dalam melakukan penilaian, manajemen membandingkan jumlah tercatat masing-masing aset non-keuangan dimana indikator penurunan nilai teridentifikasi dengan jumlah terpulihkan atas aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan dengan mempertimbangkan nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai aset, berdasarkan model arus kas yang didiskontokan, dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Terdapat ketidakpastian dalam mengestimasi jumlah terpulihkan atas aset non-keuangan, yang pada prinsipnya timbul dari input utama yang digunakan dalam model, termasuk prakiraan jumlah volume lalu lintas jalan tol, kenaikan tarif tol, dan tingkat diskonto.

Kami menetapkan bahwa penilaian penurunan nilai aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol dan aset terkait sebagai hal audit utama, karena pertimbangan dan estimasi signifikan yang terlibat untuk menentukan apakah jumlah tercatat aset dapat didukung.

1. Impairment assessment of intangible asset - toll road concession rights

Refer to Note 2r (Material accounting policies - Impairment of non-financial assets), Note 3g (Critical accounting estimates and judgements - Estimated impairment of non-financial assets) and Note 18 (Intangible assets - toll road concession rights) to the consolidated financial statements.

As at 31 December 2024, the carrying amount of the intangible assets - toll road concession rights was Rp 127.1 trillion.

Management performs an impairment assessment on intangible assets - toll road concession rights and related assets when indicators of impairment are identified as required by the accounting standards with the involvement of an external expert in valuation and external experts in forecasting toll road traffic volumes. In making the assessment, management compares the respective carrying amounts of the non-financial assets where impairment indicators are identified with their recoverable amounts. The recoverable amount is determined by considering the higher of the assets' value-in-use, based on a discounted cash flow model, and their fair value less costs to sell.

There is uncertainty in estimating the recoverable amount of non-financial assets, which principally arises from key inputs used in the models, including the forecasted toll road traffic volumes, increase in toll tariff and the discount rate.

We determined that the impairment assessment of intangible assets - toll road concession rights and related assets to be a key audit matter, due to the significant judgements and estimates involved to determine whether the carrying amount of the assets are supportable.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman dan mengkaji mengenai proses penilaian penurunan nilai manajemen, termasuk identifikasi indikator penurunan nilai dan model valuasi yang digunakan.
- Kami menilai kompetensi, kapabilitas dan objektivitas tenaga ahli manajemen.
- Kami melibatkan tenaga ahli valuasi kami untuk melakukan prosedur sebagai berikut:
  - Menilai metodologi yang digunakan dan akurasi matematis dari model terhadap persyaratan standar akuntansi.
  - Menilai asumsi yang digunakan untuk menentukan dan mengukur jumlah terpulihkan aset non-keuangan, serta melakukan analisa sensitivitas atas asumsi utama. Hal ini termasuk apakah asumsi tingkat diskonto dapat didukung dengan menilai input-input untuk perhitungan dan menghitung ulang tingkat diskonto
- Kami memeriksa akurasi matematis dari arus kas yang digunakan dalam model dan membandingkan anggaran historis dengan hasil aktual untuk menilai kemampuan manajemen dalam memproyeksikan arus kas yang digunakan dalam model secara akurat. Kami juga membandingkan informasi keuangan yang digunakan dengan anggaran yang disetujui manajemen dan rencana investasi jalan tol yang mencakup ekspektasi kenaikan tarif dan biaya pemeliharaan.
- Kami membandingkan prakiraan jumlah lalu lintas jalan tol yang digunakan oleh manajemen dengan kondisi lalu lintas historis dan membandingkan pertumbuhan jumlah volume lalu lintas jalan tol dengan laporan tenaga ahli manajemen.
- Kami menilai apakah pengungkapan yang disajikan pada Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan persyaratan-persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We understood and assessed management's impairment assessment process, including the identification indicator of impairment and the valuation models used.*
- *We assessed the competence, capabilities and objectivity of management's experts.*
- *We involved our valuation experts in performing the following procedures:*
  - *Assessing the methodology used and the mathematical accuracy of the models against the requirements of the accounting standards.*
  - *Assessing the assumptions used to determine and measure the recoverable amount of non-financial assets, as well as performing sensitivity analysis for the key assumptions. This included whether assumptions of the discount rate were supportable by assessing the inputs to the calculation and recalculating the discount rate.*
- *We checked the mathematical accuracy of the cash flows used in the models and compared historical budgets with actual results to assess management's ability to accurately forecast the cash flows used in the models. We also compared the financial information used with management's approved budget and toll road investment plan, which included expected tariff growth and maintenance expenses.*
- *We compared the forecasted toll road traffic used by management to historical traffic condition and compared the toll road traffic volume growth to the management's expert report.*
- *We assessed whether the disclosures provided in Note 18 to the consolidated financial statements were in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.*

2. Provisi atas taksiran rugi kontrak konstruksi yang memberatkan

Lihat Catatan 2aa (Kebijakan akuntansi material - Pengakuan pendapatan dan beban), Catatan 3a (Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting - Pengakuan provisi atas taksiran rugi proyek kontrak konstruksi yang memberatkan) dan Catatan 23 (Akrual dan Provisi) atas laporan keuangan konsolidasian.

2. Provision for expected losses on onerous construction contracts

Refer to Note 2aa (Material accounting policies - Revenue and cost recognition), Note 3a (Critical accounting estimates and judgements - Recognising provision for expected loss from onerous construction contract projects) and Note 23 (Accruals and Provisions) to consolidated financial statements.

Grup telah mengidentifikasi beberapa kontrak konstruksi yang mempunyai indikator kemungkinan menimbulkan kerugian.

Standar akuntansi mensyaratkan bahwa provisi atas taksiran rugi kontrak konstruksi yang memberatkan harus diakui berdasarkan kewajiban kini atas biaya untuk memenuhi kontrak, yang diperkirakan akan melebihi imbalan yang akan diterima setelah mempertimbangkan estimasi imbalan variabel yang akan menjadi hak Grup dan potensi denda keterlambatan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mengakui provisi sebesar Rp 1,2 triliun untuk provisi atas taksiran rugi kontrak konstruksi yang memberatkan dan potensi denda keterlambatan. Dalam menentukan provisi, pertimbangan dan asumsi yang signifikan diperlukan sehubungan estimasi biaya pemenuhan dan manfaat ekonomi yang akan diakui selama sisa periode kontrak.

Kami menetapkan bahwa provisi atas taksiran rugi kontrak konstruksi yang memberatkan sebagai hal audit utama karena signifikansi provisi terhadap laporan keuangan konsolidasian dan estimasi, pertimbangan dan ketidakpastian signifikan dalam menentukan biaya kontrak tambahan atau estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama
- Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal dan proses untuk menentukan provisi atas taksiran rugi kontrak konstruksi yang memberatkan.
- Kami melakukan uji pengendalian internal dan prosedure substantif, berdasarkan uji petik, terkait dengan pendapatan yang diakui (dihitung berdasarkan total pendapatan kontrak dikalikan dengan tingkat persentase penyelesaian).
- Kami menguji akurasi matematis dari marjin proyek yang diharapkan. Selisih lebih biaya untuk memenuhi kontrak dengan sisa imbalan yang diharapkan akan diterima diakui sebagai provisi untuk kontrak yang memberatkan.
- Kami menilai imbalan yang diharapkan akan diterima, termasuk dampak dari potensi denda keterlambatan, yang digunakan dalam penilaian manajemen, dengan memahami penilaian manajemen terhadap variasi nilai kontrak dan mengacu pada dokumen pendukung.

The Group has identified several construction contracts that have indicators that they may result in losses.

The accounting standards require that a provision for expected losses on onerous construction contracts should be recognised based on the present obligation of the cost to fulfil the contracts, which are expected to exceed the consideration to be received after considering the estimated variable consideration to which the Group will be entitled and any potential delay penalties.

As at 31 December 2024, the Group recognised a provision of Rp 1.2 trillion for provision for expected losses on onerous construction contracts and potential delay penalties. In determining the provision, significant judgements and assumptions are involved in respect of the estimated fulfilment costs and economic benefits to be recognised over the remaining contract period.

We determined the provision for expected losses on onerous construction contracts to be a key audit matter because of the significance of the provision to the consolidated financial statements and the significant estimates, judgements and uncertainty involved in determining the additional contract costs or the estimated costs to complete the projects.

How our audit addressed the Key Audit Matter
- *We understood management's internal controls and its process to determine the provision for expected losses on onerous construction contracts.*
- *We performed testing over internal controls and substantive procedures, on a sample basis, related to the revenue recognised (calculated based on total contract revenue multiplied by the percentage completion rate).*
- *We tested the mathematical accuracy of the expected margin of the projects. The excess of the costs to fulfil the contracts over the remaining consideration expected to be received was recognised as the provision for the onerous contracts.*
- *We assessed the consideration expected to be received, including the impact of any potential delay penalties, used in management's assessment by understanding management's assessment of variations to the contract value and reference to supporting documents.*

- Kami menilai keakuratan dan kelengkapan biaya pemenuhan yang diproyeksikan manajemen untuk sisa periode kontrak berdasarkan perjanjian dengan membandingkan biaya dengan anggaran. Kami menilai apakah dasar biaya pemenuhan yang diproyeksikan dapat didukung dengan melakukan pengujian ke dokumen pendukung berdasarkan uji petik.
- Kami menguji biaya aktual yang terjadi, berdasarkan uji petik, ke dokumen pendukung untuk menilai bahwa biaya-biaya yang diakui dapat didukung.

- *We assessed the accuracy and the completeness of management's projected fulfilment cost for the remaining contract period under the agreement by comparing the costs to the budget. We assessed whether the basis of the projected fulfilment cost was supportable by testing to supporting documents on a sample basis.*
- *We tested the actual costs incurred, on a sample basis, to supporting documents to assess whether the costs recognised were supportable.*

3. Pemulihan nilai atas piutang lain-lain dari PT Cempaka Surya Kencana ("CSK")

Lihat Catatan 2i.i (Kebijakan akuntansi material - Piutang usaha dan piutang lain-lain), Catatan 3b (Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting - Estimasi penurunan nilai aset keuangan), Catatan 9 (Piutang lain-lain) dan Catatan 41 (Perikatan dan komitmen yang signifikan) atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki piutang lain-lain kepada CSK dengan jumlah tercatat bersih Rp 654 miliar. Piutang lain-lain tersebut merepresentasikan nilai kas yang dibayarkan oleh PT HK Realtindo ("HKR"), anak perusahaan, kepada CSK sebagai bagian dari perikatan antara HKR dan CSK untuk mengembangkan proyek Technopark yang berlokasi di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Indonesia. Terdapat kasus hukum yang sedang berlangsung antara HKR dan CSK, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai pemulihan nilai atas piutang lain-lain dari CSK.

Grup melibatkan ahli hukumnya untuk membantu memperkirakan kemungkinan Grup akan memenangkan kasus hukum dan memulihkan piutang lain-lain dari CSK.

Kami menentukan pemulihan nilai atas piutang lain-lain dari CSK sebagai hal audit utama mengingat signifikansi piutang lain-lain dari CSK terhadap laporan keuangan konsolidasian serta pertimbangan dan asumsi signifikan yang digunakan oleh manajemen dalam mengestimasi pemulihan nilai atas piutang lain-lain dari CSK.

3. Recoverability of other receivables from PT Cempaka Surya Kencana ("CSK")

Refer to Note 2i.i (Material accounting policies - Trade and other receivables), Note 3b (Critical accounting estimates and judgements - Estimated impairment of financial assets), Note 9 (Other receivables) and Note 41 (Significant agreements and commitments) to consolidated financial statements.

As at 31 December 2024, the Group had other receivables from CSK with net carrying amount of Rp 654 billion. The other receivables represent cash paid by PT HK Realtindo ("HKR"), a subsidiary, to CSK as part of an agreement between HKR and CSK to develop the Technopark project located in Mampang Prapatan, South Jakarta, Indonesia. There was an ongoing legal case between HKR and CSK, resulting in uncertainty in the recoverability of the other receivables from CSK.

The Group involved its legal expert to estimate the likelihood of the Group to win the legal case and recover the other receivables from CSK.

We determined the recoverability of the other receivables from CSK to be a key audit matter given the significance of the other receivable from CSK to the consolidated financial statements and the significant judgement and assumptions made by management in estimating the recoverability of the other receivables from CSK.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman pengendalian internal Grup terkait dengan proses penilaian pemulihan piutang lain-lain dari CSK.
- Kami menilai kompetensi, kapabilitas dan objektivitas ahli hukum Grup.
- Dengan bantuan ahli internal kami, kami menilai bahwa kasus hukum tersebut masih berlanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
- Kami menilai estimasi manajemen mengenai jumlah terpulihkan dan waktu penyelesaian piutang lain-lain dari CSK.
- Kami melibatkan ahli internal kami untuk menilai tingkat diskonto yang digunakan manajemen untuk menghitung jumlah terpulihkan.
- Kami menilai pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi terkait pemulihan nilai atas piutang lain-lain dari CSK berdasarkan persyaratan-persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We understood the Group's internal control relating to the process to assess the recoverability of the other receivables from CSK.*
- *We assessed the competence, capabilities and objectivity of the Group's legal expert.*
- *With the assistance of our internal expert, we assessed that the legal case is still ongoing in accordance with the applicable legal process.*
- *We assessed management's estimate of the recoverable amount and timing of settlement of the other receivables from CSK.*
- *We involved our internal expert to assess the discount rate used by management to calculate the recoverable amount.*
- *We assessed the disclosures in the consolidated financial statements related to the recoverability of other receivables from CSK in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.*

4. Penilaian atas aset real estat

Lihat Catatan 2l (Kebijakan akuntansi material - Aset real estat), Catatan 3i (Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting - Penurunan nilai aset real estat), dan Catatan 11 (Aset real estat) atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki aset real estat bersih sebesar Rp 1,7 triliun, dinilai berdasarkan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Grup telah menunjuk penilai eksternal untuk mengestimasi nilai realisasi bersih aset real estat per 31 Desember 2024

Kami menentukan penilaian aset real estat sebagai hal audit utama karena signifikansi nilai aset real estat terhadap laporan keuangan konsolidasian dan pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat manajemen dalam melakukan estimasi nilai realisasi bersih aset real estat.

4. Valuation of real estate assets

Refer to Note 2l (Material accounting policies - Real estate assets), Note 3i (Critical accounting estimates and judgements - Impairment of real estate assets), and Note 11 (Real estate assets) to the consolidated financial statements.

As at 31 December 2024, the Group had net real estate assets of Rp 1.7 trillion, valued at the lower of cost or net realisable value. The net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Group has engaged external valuers in estimating the net realisable value of the real estate assets as at 31 December 2024.

We determined the valuation of real estate assets as the key audit matter given the significance of the real estate assets value to the consolidated financial statements and the significant judgement and assumptions made by management in estimating the net realisable value of real estate assets.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman pengendalian internal Grup terkait dengan proses penentuan nilai realisasi bersih aset real estat.
- Kami menilai kompetensi, kemampuan dan objektivitas penilai eksternal Grup dan menelaah pekerjaan mereka dalam mengestimasi nilai realisasi bersih aset real estat.
- Kami menghadiri observasi fisik oleh Grup di lokasi yang dijadikan sampel untuk memeriksa kondisi fisik aset real estat.
- Kami menguji konsistensi data yang digunakan oleh penilai eksternal, termasuk ukuran unit, dengan membandingkannya dengan sumber data manajemen.
- Dengan bantuan ahli internal kami, kami menilai asumsi signifikan yang digunakan manajemen dan penilai eksternal dalam mengestimasi nilai realisasi bersih aset real estat, termasuk metodologi penilaian yang diterapkan dan asumsi harga pasar.
- Kami menguji keakuratan matematis perhitungan manajemen atas nilai realisasi bersih terhadap aset real estat.
- Kami menilai pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi terkait penilaian atas aset real estat berdasarkan persyaratan-persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We understood the Group's internal control relating to the process of determining the net realisable value of the real estate assets.*
- *We assessed the competence, capabilities and objectivity of the Group external valuers and reviewed their work in estimating the net realisable value of the real estate assets.*
- *We attended the Group's physical observations at a sample of locations to check the physical condition of the real estate assets.*
- *We tested the consistency of the data used by the external valuers, including the size of units, by comparing to the management's source data.*
- *With the assistance of our internal expert, we assessed the significant assumptions that management and its external valuers used in their estimation of the net realisable value of the real estate assets, including the valuation methodology applied and the market price assumptions.*
- *We tested the mathematical accuracy of management's calculation of the net realisable value against real estate assets.*
- *We assessed the disclosures in the consolidated financial statements related to the valuation of real estate assets were in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian tau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
15 Maret/*March* 2025

Yusron, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0243

Hutama Karya (Persero)
00295/2.1457/AU.1/03/0243-2/1/III/2025

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except par value per share and share data)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Aset				***Assets***
Aset lancar				***Current assets***
Kas dan setara kas	36,769,029	4	39,059,927	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	366,567	5	414,910	*Third parties*
Pihak berelasi	690,303	5	714,461	*Related parties*
Piutang ventura bersama	130,206	6	86,348	*Receivables from joint ventures*
Piutang retensi				*Retention receivables*
Pihak ketiga	93,623	7	61,981	*Third parties*
Pihak berelasi	85,199	7	129,785	*Related parties*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja				*Gross amounts due from customers*
Pihak ketiga	523,881	8	674,124	*Third parties*
Pihak berelasi	2,890,180	8	1,867,030	*Related parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	5,368,107	9	76,807	*Third parties*
Pihak berelasi	132,726	9	64,305	*Related parties*
Persediaan	360,019	10	495,274	*Inventories*
Aset real estat	622,367	11	670,525	*Real estate assets*
Uang muka dan beban dibayar dimuka	438,616	12	350,128	*Advances and prepayments*
Pajak dibayar dimuka				*Prepaid taxes*
Pajak penghasilan	-	13a	16,057	*Corporate income taxes*
Pajak lain-lain	694,479	13a	1,565,098	*Other taxes*
Kas yang dibatasi penggunaannya	7,292,670	21	3,364,613	*Restricted cash*
Aset keuangan lain-lain	-		2,962	*Other financial assets*
Jumlah aset lancar	56,457,972		49,614,335	***Total current assets***
Aset tidak lancar				***Non-current assets***
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	662,506	7	5,545,128	*Third parties*
Pihak berelasi	3,642	7	-	*Related parties*
Piutang retensi				*Retention receivables*
Pihak ketiga	47,856	7	49,196	*Third parties*
Pihak berelasi	136,604	7	47,458	*Related parties*
Uang muka dan beban dibayar dimuka	984,944	12	780,065	*Advances and prepayments*
Pajak dibayar dimuka				*Prepaid taxes*
Pajak penghasilan	78,289	13a	82,155	*Corporate income taxes*
Pajak lain-lain	2,010,539	13a	643,060	*Other taxes*
Bagian tidak lancar dari aset real estat	1,067,899	11	953,928	*Non-current portion of real estate assets*
Properti investasi	259,554	14	229,367	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi	45,893	15	45,893	*Investment in associates*
Investasi pada ventura bersama	632,713	16	259,885	*Investment in joint ventures*
Aset tetap	3,319,839	17	3,460,096	*Fixed assets*
Aset takberwujud				*Intangible assets*
Hak pengusahaan jalan tol	127,111,601	18	107,731,985	*Toll road concession rights*
Lain-lain	29,718		25,001	*Others*
Aset keuangan - Hak konsesi	2,865,228	19	-	*Financial asset - Concession rights*
Goodwill	116,743		116,743	*Goodwill*
Aset pajak tangguhan	43,492		17,291	*Deferred tax assets*
Kas yang dibatasi penggunaannya	37,025		25,839	*Restricted cash*
Aset keuangan lain-lain	73,422		65,225	*Other financial assets*
Aset tidak lancar lain-lain	56,984		46,837	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	139,584,491		120,125,152	***Total non-current assets***
Jumlah aset	196,042,463		169,739,487	***Total assets***

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except par value per share and share data)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek				***Current liabilities***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	10,105,074	20	8,943,727	*Third parties*
Pihak berelasi	1,316,922	20	2,249,416	*Related parties*
Pinjaman bank jangka pendek	5,921,908	21a	3,454,956	*Short-term bank loans*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	311,542	24	212,142	*Third parties*
Pihak berelasi	2,719,537	24	18	*Related parties*
Utang retensi				*Retention payables*
Pihak ketiga	218,960	28	113,404	*Third parties*
Pihak berelasi	149,051	28	181,475	*Related parties*
Utang pajak				*Taxes payable*
Pajak penghasilan	88,113	13b	24,344	*Corporate income taxes*
Pajak lain-lain	600,929	13b	427,210	*Other taxes*
Uang muka kontrak jangka pendek	405,123	22	680,818	*Short-term contract advances*
Akrual dan provisi	3,865,774	23	3,027,446	*Accruals and provision*
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang:				*Current maturities of long-term loans:*
Non-bank	40,000	25b	40,000	*Non-banks*
Medium Term Notes	-	25c	1,475,000	*Medium Term Notes*
Utang obligasi	81,000	25d	33,445	*Bonds payables*
Sukuk Mudharabah	138,250	25e	16,474	*Sukuk Mudharabah*
Liabilitas sewa	54,566	25f	46,786	*Lease liabilities*
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek	389,420	27	317,517	*Short-term employee benefit obligations*
Pendapatan ditangguhkan	-	26	575,843	*Deferred revenue*
Jumlah liabilitas jangka pendek	26,406,169		21,820,021	***Total current liabilities***
Liabilitas jangka panjang				***Non-current liabilities***
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Long-term loans - net of current maturities:*
Bank	11,106,392	25a	11,083,452	*Banks*
Non-bank	686,326	25b	908,184	*Non-banks*
Medium Term Notes	9,649,315	25c	9,195,353	*Medium Term Notes*
Utang obligasi	7,213,920	25d	7,292,677	*Bonds payables*
Sukuk mudharabah	656,214	25e	793,627	*Sukuk mudharabah*
Liabilitas sewa	116,494	25f	141,272	*Lease liabilities*
Uang muka kontrak jangka panjang	121,136	22	109,238	*Long-term contract advances*
Akrual dan provisi	449,415	23	478,435	*Accruals and provision*
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang	164,523	27	71,551	*Long-term employee benefit obligations*
Liabilitas pajak tangguhan	698,646	13d	532,644	*Deferred tax liabilities*
Utang tidak lancar lain-lain				*Other non-current payables*
Pihak ketiga	12,456	24	13,198	*Third parties*
Pihak berelasi	1,027	24	1,027	*Related parties*
Utang retensi				*Retention payables*
Pihak ketiga	478,613	28	433,470	*Third parties*
Pihak berelasi	281,366	28	240,825	*Related parties*
Jumlah liabilitas jangka panjang	31,635,843		31,294,953	***Total non-current liabilities***
Jumlah liabilitas	58,042,012		53,114,974	***Total liabilities***

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except par value per share and share data)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Ekuitas				***Equity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, modal dasar - 250.000.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh - 131.646.000 lembar saham (31 Desember 2023: 113.042.000 lembar saham)	131,646,000	29	113,042,000	*Share capital - Rp1,000,000 par value per share, authorised share - 250.000.000 shares, share issued and fully paid - 131,646,000 shares (31 December 2023: 113,042,000 shares)*
Tambahan modal disetor	44,037		44,037	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset tetap	740,784		740,784	*Fixed assets revaluation reserve*
Saldo laba/(akumulasi rugi)				*Retained earnings/ (accumulated deficit)*
Dicadangkan	5,619,215	30	5,619,215	*Appropriated*
Belum dicadangkan	(995,205)		(3,731,874)	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	137,054,831		115,714,162	*Equity attributable to owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	945,620	31	910,351	*Non-controlling interests*
Jumlah ekuitas	138,000,451		116,624,513	***Total equity***
Jumlah liabilitas dan ekuitas	196,042,463		169,739,487	***Total liabilities and equity***

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Lampiran 2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Pendapatan	30,252,293	32	26,926,321	***Revenue***
Beban pokok pendapatan	(25,978,271)	33	(24,568,527)	***Cost of revenue***
Laba bruto	4,274,022		2,357,794	***Gross profit***
Beban penjualan	(39,940)	34	(11,995)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(1,221,718)	34	(929,515)	*General and administrative expenses*
Beban penurunan nilai piutang	(142,147)	34	(1,167,263)	*Impairment of receivables*
Beban pajak penghasilan final	(662,452)		(482,744)	*Final tax expense*
Beban penurunan nilai aset real estat	-		(180,000)	*Impairment of real estate assets*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	452,433	16	175,118	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Keuntungan dari penjualan hak pengusahaan jalan tol	-	41g	3,643,245	*Gain on sale of toll road concession rights*
Beban lain-lain, bersih	(176,955)		(178,007)	*Other expenses, net*
Laba usaha	2,483,243		3,226,633	***Operating income***
Penghasilan keuangan	2,168,801	35	807,635	*Finance income*
Biaya keuangan	(1,643,551)	35	(2,039,715)	*Finance costs*
(Kerugian)/keuntungan dari selisih kurs, bersih	(22,714)		149,650	*(Loss)/gain of foreign exchanges, net*
Laba sebelum pajak penghasilan	2,985,779		2,144,203	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(219,257)	13c	(271,647)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	2,766,522		1,872,556	***Profit for the year***
Penghasilan komprehensif lain				***Other comprehensive income***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:***
Keuntungan revaluasi tanah	-		104,529	*Gain on revaluation of land*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	5,416		(18,246)	*Remeasurement of post employment benefits*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	2,771,938		1,958,839	***Total comprehensive income for the year***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Profit for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	2,731,253		1,827,891	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	35,269		44,665	*Non-controlling interests*
	2,766,522		1,872,556	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	2,736,669		1,914,174	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	35,269		44,665	*Non-controlling interests*
	2,771,938		1,958,839	
Laba per saham - Dasar dan Dilusian (Rupiah penuh)	22,062	39	21,787	***Profit per share - Basic and Diluted (full Rupiah)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	Distribusikan kepada pemilik ekuitas induk/ *Attributable to owners of the parent*									
		Modal saham/ *Share capital*	Penyertaan Modal Negara/ *Government Capital Investment*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Fixed asset revaluation reserve*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah/ *Total*	Kepentingan non pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*				
SALDO PADA 1 JANUARI 2023		52,808,000	31,350,000	44,037	636,255	5,619,215	(5,541,519)	84,915,988	865,686	85,781,674	***BALANCE AS AT 1 JANUARY 2023***
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	1,827,891	1,827,891	44,665	1,872,556	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	104,529	-	(18,246)	86,283	-	86,283	*Other comprehensive income*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	104,529	-	1,809,645	1,914,174	44,665	1,958,839	*Total comprehensive income for the year*
Investasi Modal Pemerintah	29	-	28,884,000	-	-	-	-	28,884,000	-	28,884,000	*Government Capital Investment*
Penambahan modal ditempatkan dan disetor		60,234,000	(60,234,000)	-	-	-	-	-	-	-	*Additional issued and paid-up capital*
SALDO PADA 31 DESEMBER 2023		113,042,000	-	44,037	740,784	5,619,215	(3,731,874)	115,714,162	910,351	116,624,513	***BALANCE AS AT 31 DECEMBER 2023***
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	2,731,253	2,731,253	35,269	2,766,522	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	-	5,416	5,416	-	5,416	*Other comprehensive income*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	-	2,736,669	2,736,669	35,269	2,771,938	*Total comprehensive income for the year*
Investasi Modal Pemerintah	29	-	18,604,000	-	-	-	-	18,604,000	-	18,604,000	*Government Capital Investment*
Penambahan modal ditempatkan dan disetor	29	18,604,000	(18,604,000)	-	-	-	-	-	-	-	*Additional issued and paid-up capital*
SALDO PADA 31 DESEMBER 2024		131,646,000	-	44,037	740,784	5,619,215	(995,205)	137,054,831	945,620	138,000,451	***BALANCE AS AT 31 DECEMBER 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to these consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Penerimaan dari pelanggan	12,202,085	9,449,914	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain	(14,017,777)	(9,678,673)	*Cash paid to suppliers and others*
Pembayaran kepada karyawan	(692,092)	(565,278)	*Cash paid to employees*
Kas yang dihasilkan dari operasi	(2,507,784)	(794,037)	*Cash generated from operations*
Penerimaan bunga	1,738,402	807,635	*Receipts of interest*
Pembayaran beban keuangan	(1,651,654)	(1,934,480)	*Payment of finance costs*
Pembayaran pajak penghasilan	(64,275)	(77,535)	*Payment of income taxes*
Pembayaran pajak final	(554,851)	(515,370)	*Payment of final taxes*
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan badan	20,203	-	*Received of tax refund corporate income taxes*
Penerimaan pengembalian pajak	1,063,849	257,711	*Received of tax refund*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(1,956,110)	(2,256,076)	***Net cash flows used in operating activities***
Arus kas dari aktivitas investasi			***Cash flow from investing activities***
Perolehan aset hak pengusahaan jalan tol	(15,761,081)	(18,567,711)	*Additions to toll road concession rights*
Perolehan aset tak berwujud lainnya	(10,551)	(6,110)	*Acquisition of other intangible assets*
Penambahan dana talangan pembebasan lahan	(120,768)	(118,474)	*Addition of bridging fund for land acquisition*
Perolehan dana talangan pembebasan lahan	189,218	92,510	*Acquisition fund for land acquisition*
Perolehan aset tetap	(62,894)	(57,210)	*Acquisition of fixed assets*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(3,740,306)	(3,114,613)	*Placement of restricted cash*
Penerimaan dividen dari ventura bersama	288,904	132,848	*Dividends received from joint venture*
Penerimaan atas pelepasan investasi lainnya	-	40,000	*Receipts on disposal of other investments*
Penerimaan atas penjualan hak konsesi jalan tol	-	6,832,200	*Proceeds from sale of toll road concession rights*
Penambahan atas investasi ventura bersama	(212,064)	-	*Additional in investment in joint ventures*
Penambahan atas investasi lainnya	(8,197)	(15,000)	*Additional in other investments*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(19,437,739)	(14,781,560)	***Net cash flows used in investing activities***
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flow from financing activities***
Investasi modal pemerintah	18,604,000	28,884,000	*Government capital investment*
Penerimaan pinjaman jangka pendek	7,558,258	6,893,960	*Receipts of short-term loans*
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(5,184,921)	(4,638,749)	*Repayments of short-term loans*
Penerimaan pinjaman jangka panjang	-	168,849	*Receipts of long-term loans*
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(1,746,858)	(8,928,041)	*Repayments of long-term loans*
Pembayaran liabilitas sewa	(161,017)	(14,648)	*Repayments of lease liabilities*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	19,069,462	22,365,371	***Net cash provided by financing activities***
Penurunan bersih kas dan setara kas	(2,324,388)	5,327,735	***Net decrease in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	39,059,927	33,656,186	*Cash and cash equivalents at beginning of the year*
Pengaruh selisih kurs	33,490	76,006	*Effect of foreign exchange rate*
Kas dan setara kas pada akhir tahun	36,769,029	39,059,927	***Cash and cash equivalents at end of year***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Hutama Karya (Persero) ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang pada awalnya merupakan perusahaan swasta bernama Hollandsche Beton Maatschappij yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. PP 61/1961 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971 menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Hutama Karya. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 29 Maret 1961.

Sejalan dengan dipenuhinya persyaratan untuk menjadi Perseroan Terbatas, maka status Hutama Karya berubah menjadi PT Hutama Karya (Persero) dengan akta No. 74 tanggal 15 Maret 1973 dari notaris Kartini Muljadi, S.H.. Perubahan status Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 54 tanggal 1 Februari 1974, Tambahan No.10.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 25 tanggal 10 Juni 2024 dari notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn tentang penambahan modal dari Negara Republik Indonesia. Perubahan ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0143318 tanggal 12 Juni 2024.

Perusahaan berdomisili di Indonesia dengan kantor yang beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur.

b. Kegiatan usaha

Grup melakukan usaha di bidang industri konstruksi, pengusahaan jalan tol, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, pengembang properti, real estat, penyewaaan ruangan dan hotel, dan manufaktur.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Hutama Karya (Persero) ("the Company") is a State-owned Enterprise which was initially a private company named Hollandsche Beton Maatschappij, which later in accordance with Government Regulation No. PP 61/1961 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 14 in 1971 became a state owned company and changed its name to Perusahaan Negara Hutama Karya. The Company started its commercial operations on 29 March 1961.

In conjunction with the fulfilment of all necessary requirements to become a limited liability company, the Company's status had changed into PT Hutama Karya (Persero) under the notarial deed No. 74 dated 15 March 1973 of the Kartini Muljadi, S.H.. The change in the Company's status was endorsed by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his letter No.Y.A.5/300/4 dated 20 August 1973, and was published in the State Gazette No. 54 dated 1 February 1974, Supplement No.10.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest was in accordance with notarial deed No. 25 dated 10 June 2024 of Ashoya Ratam, SH. Mkn with regard to capital injection from The Government of Republic of Indonesia. This amendment was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with decree No. AHU-AH.01.03-0143318 dated 12 June 2024.

The Company is incorporated and domiciled in Indonesia. The address of its registered office is Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur.

b. Business activities

The Group conducts businesses in the field of construction industry, toll road concessions, capacity building services in the field of construction services, property developer, real estate, rent of space and hotel, and manufacture.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL INFORMATION (continued)*

c. Struktur Grup / *c. Group structure*

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as "the Group".

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mengkonsolidasi entitas-entitas sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the Company consolidates the following entities:

Nama entitas/ *Entity's name*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Kegiatan komersial/ *Commercial operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)*	
				2024	2023	2024	2023
Kepemilikan langsung/*Direct ownership*							
PT HK Realtindo ("HKR")	Jakarta	Pengembang properti/ *Property developer*	2010	99,75%	99,75%	4,078,228	4,788,506
PT Hakaaston ("HKA")	Jakarta	Manufaktur/ *Manufacture*	2011	99,75%	99,75%	1,085,891	1,103,751
PT HK Infrastruktur ("HKI")	Jakarta	Jasa konstruksi/ Construction	2011	99,75%	99,75%	12,668,353	7,875,571
KSO Hutama - Yodya	Jakarta	Jasa konstruksi/ *Construction*	2018	99,50%	99,50%	6,197	6,496
KSO Hutama - Perapen	Medan	Jasa konstruksi/ *Construction*	2014	90,00%	90,00%	7,053	7,901
KSO Hutama - Moeladi	Jakarta	Jasa konstruksi/ *Construction*	2018	100,00%	100,00%	38,134	38,347
KSO Hutama - NSE	Purbalingga	Jasa konstruksi/ *Construction*	2019	97,00%	97,00%	8,169	11,163
EPC Energy Singapore, Pte, Ltd,	Singapura/ *Singapore*	Jasa konstruksi/ *Construction*	2019	100,00%	100,00%	201,143	296,417
PT Hutama Marga Waskita	Jakarta	Pengusahaan jalan tol/ *Toll road concession*	2017	99,18%	99,00%	14,295,730	12,512,743
PT Terbanggi Besar Kayu Agung Toll	Lampung	Pengusahaan jalan tol/ *Toll road concession*	Dalam tahap pengembangan/ *Development stage*	99,90%	99,90%	61	58
PT Hutama Mambelim Trans Papua	Jakarta	Jasa konstruksi/ *Construction*	2024	100,00%	0%	150,666	-
KSO Hutama Karya-Gerbang Sarana Baja	Sorong	Jasa konstruksi/ *Construction*	2021	99,99%	70%	202,580	-
Kepemilikan tidak langsung/ *Indirect ownership*							
PT Bhirawa Steel ("BS")	Surabaya	Manufaktur/ *Manufacture*	1974	65,00%	65,00%	1,733,604	1,749,588
PT Nusa Pratama Properti ("NPP")	Jakarta	Properti/ *Property*	2008	90,00%	90,00%	765,187	756,061
PT Petronesia Benimel ("Petronesia")	Jakarta	Jasa konstruksi/ *Construction*	2005	57,00%	57,00%	1,107,394	1,086,327
PT Semen Indogreen Sentosa ("SIS")	Surabaya	Manufaktur/ *Manufacture*	2012	85,00%	85,00%	902,097	661,358

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

d. Board of Commissioners, Directors, Audit Comittee and employees

The Company's Board of Commissioners and Directors as at 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Dewan Komisaris			***Board of Commisioners***
Komisaris Utama	Yudo Margono	Budiman	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Muhamad Lukman Edy	Muhamad Lukman Edy	*Vice President Commissioner*
Komisaris	Susdiyarto Agus Praptono Chairiah	Susdiyarto Agus Praptono Chairiah	*Commissioners*
	Iwan Suprijanto	Iwan Suprijanto	
	Wahyu Muryadi	Wahyu Muryadi	
	Agung Sabar Santoso	Agung Sabar Santoso	
Direksi			***Directors***
Direktur Utama	Budi Harto	Budi Harto	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Budi Harto *)	Aloysius Kiik Ro	*Vice President Director*
Direktur Keuangan (2023: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)	Eka Setya Adrianto	Eka Setya Adrianto	*Finance Director (2023: Finance and Risk Management Director)*
Direktur Manajemen Risiko	Sugiarti	-	*Risk Management Director*
Direktur Operasi I	Agung Fajarwanto	Agung Fajarwanto	*Operations Director I*
Direktur Operasi II	Gunadi	Gunadi	*Operations Director II*
Direktur Operasi III	Koentjoro	Koentjoro	*Operations Director III*
Direktur Human Capital dan Legal	Muhammad Fauzan	Muhammad Fauzan	*Human Capital and Legal Director*

*) Para pemegang saham Perusahaan menunjuk Budi Harto sebagai Pelaksana tugas Wakil Direktur Utama efektif tanggal 18 Desember 2024.

*) *The Company's shareholders appointed Budi Harto as Acting Vice President Director effective on 18 December 2024.*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Company's Audit Committee as at 31 December 2024 and 2023 was as follows:

	2024	2023	
Ketua	Agung Sabar Santoso	Agung Sabar Santoso	*Chairman*
Wakil Ketua	Chairiah	Chairiah	*Vice Chairman*
Anggota	Rifky Adrianto Firdaus	Wakhid Kurniawan Saputra	*Members*
	Resi Ariyasa Qadri	Thauriq Anwar	

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki 1.374 karyawan tetap (2023: 1.352 karyawan tetap) (tidak diaudit).

As at 31 December 2024, the Group had 1,374 permanent employees (2023: 1,352 permanent employees) (unaudited).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Penawaran umum Perusahaan

Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya

Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan surat No. S.729/D.04/2016 tanggal 9 Desember 2016 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi ini dibagi dalam 3 tahap:

- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016

  Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.000.000 dengan tingkat bunga 8,55% per tahun dan dengan jangka waktu 10 tahun.

- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017

  Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.968.000 dengan tingkat bunga 8,07% per tahun dan dengan jangka waktu 10 tahun.

- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017

  Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok obligasi adalah sebesar Rp 3.532.000 yang terdiri dari 2 seri, yaitu:
  a. Seri A sebesar Rp 1.165.000 dengan tingkat bunga 7,80% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun.
  b. Seri B sebesar Rp 2.367.000 dengan tingkat bunga 8,40% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun.

  Seri A telah dilunasi pada tahun 2022.

Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya

Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan surat No. S.153/D.04/2021 tanggal 30 Agustus 2021 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi ini dibagi dalam 2 tahap:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

e. The Company's public offering

Hutama Karya Sustainable Bonds I

The Company received an effective notice from the Chairman of OJK by its decision letter No. S.729/D.04/2016 dated 9 December 2016 to conduct a sustainable public offering of Hutama Karya Sustainable Bonds I which was listed in the Indonesia Stock Exchange. These bonds were divided into 3 phases:

- *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase I 2016*

  Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase I 2016 were listed in the Indonesia Stock Exchange with a principal amount of Rp 1,000,000 with an interest rate of 8.55% per annum and a term of 10 years.

- *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase II 2017*

  Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase II 2017 were listed in the Indonesia Stock Exchange with a principal amount of Rp 1,968,000 with an interest rate of 8.07% per annum and a term of 10 years.

- *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase III 2017*

  Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase III 2017 were listed in the Indonesia Stock Exchange with a principal amount of Rp 3,532,000 which consists of 2 series:
  a. A series of Rp 1,165,000 with an interest rate of 7.80% per annum and a term of 5 years.
  b. B series of Rp 2,367,000 with an interest rate of 8.40% per annum and a term of 10 years.

  The A series bond have been fully repaid in 2022.

Hutama Karya Sustainable Bonds II

The Company received an effective notice from the Chairman of OJK by its decision letter No. S.153/D.04/2021 dated 30 August 2021 to conduct a sustainable public offering of Hutama Karya Sustainable Bonds II which was listed in the Indonesia Stock Exchange. These bonds were divided into 2 phases:

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Penawaran umum Perusahaan (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya (lanjutan)

- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021

  Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok obligasi adalah sebesar Rp 1.000.000 yang terdiri dari 3 seri, yaitu:

  a. Seri A sebesar Rp 33.500 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun.
  b. Seri B sebesar Rp 185.550 dengan tingkat bunga 8,55% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun
  c. Seri C sebesar Rp 780.950 dengan tingkat bunga 9,30% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

  Seri A sudah dilunasi pada tahun 2024.

- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022

  Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok obligasi adalah sebesar Rp 1.000.000 yang terdiri dari 3 seri, yaitu:

  a. Seri A sebesar Rp 81.000 dengan tingkat bunga 6,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun.
  b. Seri B sebesar Rp 176.500 dengan tingkat bunga 7,75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun.
  c. Seri C sebesar Rp 742.500 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya

Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan surat No. S.153/D.04/2021 tanggal 30 Agustus 2021 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Hutama Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sukuk Mudharabah ini dibagi dalam 2 tahap:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***e. The Company's public offering** (continued)*

Hutama Karya Sustainable Bonds II (continued)

- *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021*

  Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 were listed in the Indonesia Stock Exchange with a principal amount of Rp 1,000,000 which consists of 3 series:

  a. A series of Rp 33,500 with an interest rate of 8.25% per annum and a term of 3 years.
  b. B series of Rp 185,550 with an interest rate of 8.55% per annum and a term of 5 years.
  c. C series of Rp 780,950 with an interest rate of 9.30% per annum and a term of 7 years.

  The A series bond have been fully repaid in 2024.

- *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022*

  Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 were listed in the Indonesia Stock Exchange with a principal amount of Rp 1,000,000 which consists of 3 series:

  a. A series of Rp 81,000 with an interest rate of 6.50% per annum and a term of 3 years.
  b. B series of Rp 176,500 with an interest rate of 7.75% per annum and a term of 5 years.
  c. C series of Rp 742,500 with an interest rate of 8.25% per annum and a term of 7 years.

Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I

The Company has received an effective notice from the Chairman of OJK by its decision letter No. S.153/D.04/2021 dated 30 August 2021 to conduct a sustainable public offering of Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I which was listed in the Indonesia Stock Exchange. Sukuk Mudharabah were divided into 2 phases:

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Penawaran umum Perusahaan (lanjutan)

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya (lanjutan)

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021

  Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok adalah sebesar Rp 500.000 yang terdiri dari 3 seri, yaitu:

  a. Seri A sebesar Rp 16.500 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun.
  b. Seri B sebesar Rp 64.450 dengan tingkat bunga 8,55% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun.
  c. Seri C sebesar Rp 419.050 dengan tingkat bunga 9,30% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

  Seri A sudah dilunasi pada tahun 2024.

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022

  Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok adalah sebesar Rp 313.000 yang terdiri dari 3 seri, yaitu:

  a. Seri A sebesar Rp 138.250 dengan tingkat bunga 6,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun.
  b. Seri B sebesar Rp 105.260 dengan tingkat bunga 7,75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun.
  c. Seri C sebesar Rp 69.490 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

Global Medium Term Notes

Pada bulan Mei 2020, Perusahaan menerbitkan Global Medium Term Notes dengan jumlah pokok sebesar USD 600 juta melalui pencatatan di bursa efek Singapura dengan tingkat bunga 3,75% per tahun dan dengan jangka waktu 10 tahun.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***e. The Company's public offering** (continued)*

Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I (continued)

- *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021*

  Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 were listed on the Indonesia Stock Exchange with a principal amount of Rp 500,000 which consists of 3 series:

  a. A series of Rp 16,500 with an interest rate of 8.25% per annum with a term of 3 years.
  b. B series of Rp 64,500 with an interest rate of 8.55% per annum with a term of 5 years.
  c. C series of Rp 419,050 with an interest rate of 9.30% per annum with a term of 7 years.

  The A series have been fully repaid in 2024.

- *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022*

  Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 were listed on the Indonesia Stock Exchange with a principal amount of Rp 313,000 which consists of 3 series:

  a. A series of Rp 138,250 with an interest rate of 6.50% per annum with a term of 3 years.
  b. B series of Rp 105,260 with an interest rate of 7.75% per annum with a term of 5 years.
  c. C series of Rp 69,490 with an interest rate of 8.25% per annum with a term of 7 years.

Global Medium Term Notes

In May 2020, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to USD 600 million through listing in Singapore Exchange, with an interest rate of 3.75% per annum and a term of 10 years.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi oleh Direksi Perusahaan untuk terbit pada tanggal 15 Maret 2025.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

f. The issuance of the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were authorised for issue by the Directors of the Company on 15 March 2025.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk properti investasi dan tanah yang diukur pada nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the material accounting policies applied in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), and the Indonesian Financial Services Authority ("OJK")'s Regulation No. VIII.G.7 regarding the "Presentation and Disclosures of Financial Statements of Issuers or Public Companies".

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for the investment property and land which are measured at fair value, and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statement are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp") unless otherwise stated.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi tertentu yang penting. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, yang relevan dengan operasi Grup, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK No. 116, "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik;
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar;

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas"; dan
- Amendemen PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements** (continued)*

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISAK")

The adoption of these new and amended standards and interpretations that are effective beginning 1 January 2024, which are relevant to the Group's operations, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- *Amendment to PSAK No. 116, "Leases" regarding lease liabilities in a sale and leaseback;*
- *Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statement" regarding classification of liabilities as current or non-current;*
- *Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statement" regarding non-current liabilities with covenants;*
- *Amendment to PSAK No. 207, "Statement of Cash Flows"; and*
- *Amendment to PSAK No. 107, "Financial Instrument: Disclosure" regarding supplier finance agreements.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru dan amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Grup, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan akan berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

- PSAK No. 117: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Penerapan dini atas standar tersebut diperkenankan. Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

Grup saat ini memiliki sejumlah saldo pinjaman yang mengacu pada *Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR")* dan melampaui 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISAK")** (continued)*

New standards and amendment issued which are relevant to the Group's operation, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2024 and will be effective for periods beginning on or after 1 January 2025.

- *PSAK No. 117: "Insurance Contract";*
- *Amendment to PSAK No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to conditions when a currency is not exchangeable.*

Early adoption of the above standard is permitted. The Group is still evaluating the possible impact of the issuance of these financial accounting standards.

The Group currently has a number of outstanding borrowings which refer to Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") and extend beyond 31 December 2024 and 2023 as follows:

	2024	**2023**	
	Saldo/ *Balance*	**Saldo/ *Balance***	
Pinjaman bank jangka panjang	2,000,000	2,000,000	*Long-term bank loans*

Grup masih dalam diskusi dengan kreditur atas kontrak-kontrak pinjaman tersebut yang mengacu pada *JIBOR*. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup karena *JIBOR* masih tersedia hingga 31 Desember 2025.

The Group is still discussing with the creditors on the borrowing contracts which refer to JIBOR. Management is of the opinion that no significant impact on the Group's consolidated financial statements as the JIBOR is still available until 31 December 2025.

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas terstruktur), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil yang bervariasi dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

Subsidiaries are entities (including structured entity), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through it's the power over the entity.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian. Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

a. menghentikan pengakuan asset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
b. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali (KNP);
c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
g. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Principles of comsolidation** (continued)*

i. Subsidiaries (continued)

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group. It is deconsolidated from the date when that control ceases. Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiary have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it:

a. derecognises the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiary;
b. derecognises the carrying amount of any non-controlling interest (NCI);
c. derecognises the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
d. recognises the fair value of the consideration received;
e. recognises the fair value of any investment retained;
f. recognises any surplus or deficit in profit or loss; and
g. reclassifies the parent's share of components previously recognised in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas.

Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikankepada pemilik entitas induk.

ii. Entitas asosiasi dan pengaturan bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Pengaturan bersama diklasifikasi sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan klasifikasi pengaturan bersama. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Kerja sama operasi dicatat dengan mengakui persentase kepemilikan Grup atas aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

i. Subsidiaries (continued)

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent entity.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions.

The carrying amounts of the Group's interest and the noncontrolling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

ii. Associate and joint arrangements

Associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% and above but not exceeding 50%. Investment in an associate is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

Investment in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligation of each investor. Group has assessed the nature of its joint arrangements and determined the classification of joint arrangements. Joint ventures are accounted for using the equity method. Joint operations are accounted by recognising the Group's relevant share of assets, liabilities, revenues and expenses.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

ii. Entitas asosiasi dan pengaturan bersama (lanjutan)

Bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi dan ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

ii. Associate and joint arrangements (continued)

The Group's share of its associate's and joint venture post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss and other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from an associate or joint venture is adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associates or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group with its associate and joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset transferred. The accounting policies of the associates or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate and joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate or joint venture is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or joint venture and its carrying value and recognises the amount in profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam upaya memperoleh kendali atas pihak yang diakuisisi. Biaya terkait dengan akuisisi diakui di laba rugi pada saat terjadinya.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi, selisih tersebut langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi berdasarkan setiap akuisisi sebesar nilai wajar. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Peninjauan atas penurunan nilai pada *goodwill* dilakukan setahun sekali atau dapat lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai. *Goodwill* dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. *Goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan uji penurunan nilai.

e. Aset keuangan

i. Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya menjadi dua kategori yaitu diukur pada nilai wajar, melalui penghasilan komprehensif lain atau melalui laba rugi; dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Business combination

The Groups applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognised in profit or loss as incurred.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured intitially at their fair values at the acquisition date.

The excess of the consideration transferred and amount of any non-controlling interest in the acquired entity over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, the difference is recognised directly in profit or loss as a bargain purchase.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis at fair value. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment. Goodwill is carried at cost less accumulated impairment losses. Goodwill is allocated to cash-generating units or groups of cash-generating units for the purpose of impairment testing.

e. Financial assets

i. Classification

The Group classifies its financial assets into two categories, which are measured at fair value, either through other comprehensive income or through profit or loss; and measured at amortised cost.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi (lanjutan)

Klasifikasi tersebut berdasarkan model bisnis manajemen dan karakteristik arus kas kontraktual.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut ditempatkan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan - tanggal dimana Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi untuk seluruh aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan Grup meliputi kas dan setara kas dan setara kas, piutang usaha, piutang ventura bersama, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, piutang lain-lain, aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya, uang muka investasi pada saham dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Financial assets *(continued)*

i. Classification (continued)

The classification is based on the management's business model and their contractual cash flows characteristics.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes

Regular purchases and sale of financial assets are recognised on the trade date – the date on which the Group commits to purchase or sell the asset. Investments are initially recognised at fair value plus the transaction costs for all financial assets not carried at fair value through profit or loss. Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value, and transaction costs are expensed in profit or loss.

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, joint venture receivables, retention receivables, gross amounts due from customers, other receivables, other current and other non-current financial assets, advance for investment in shares and restricted cash. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

ii. **Pengakuan dan pengukuran**

Klasifikasi tersebut berdasarkan model bisnis manajemen dan karakteristik arus kas kontraktual.

Pengakuan dan pengukuran dari aset keuangan yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

(a) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari aset keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Grup memiliki investasi jangka panjang dan uang muka investasi pada saham, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Selisih bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar investasi jangka panjang disajikan pada laba rugi dalam "penghasilan/(beban) lain-lain, bersih" dalam periode terjadinya.

Dividen dari investasi jangka panjang diakui pada laba rugi sebagai bagian dari "beban lain-lain, bersih" ketika hak Grup untuk menerima pembayaran sudah ditetapkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Financial assets *(continued)*

ii. ***Recognition and measurement***

The classification is based on the management's business model and their contractual cash flows characteristics.

Recognition and measurement of financial assets owned by the Group is as follows:

(a) Financial assets at amortised cost

Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on the financial assets that are subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

(b) Financial assets at fair value through profit or loss

The Group has long-term investments and advance for investment in shares, which are classified as financial asset at fair value through profit and loss.

Net differences arising from changes in the fair value of the long-term investments are presented in profit or loss within "other income/(expenses), net" in the period in which they arise.

Dividends on long-term investments are recognised in profit or loss as part of "other expenses, net" when the Group's right to receive payments is established.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

iii. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dilaksanakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atas peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

iv. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Financial assets *(continued)*

iii. Offsetting of financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

iv. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

iv. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Penyisihan piutang ragu-ragu untuk piutang usaha, termasuk piutang retensi dan tagihan bruto kepada pemberi kerja, piutang lain-lain dan piutang ventura bersama, diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian yang disyaratkan oleh PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dengan melakukan penelaahan atas kolektibilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat *forward-looking* yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Piutang ragu-ragu dihapus pada saat piutang tersebut tidak akan tertagih.

f. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***e. Financial assets** (continued)*

iv. Impairment of financial assets (continued)

Provision for doubtful receivables for trade receivables, including retention receivables and gross amounts due from customers, other receivables, and receivables from joint ventures, are measured based on expected credit losses prescribed by PSAK No. 109, "Financial Instruments" by reviewing the collectibility of individual or collective balances in a lifetime of receivables using simplified approach with considering the forward-looking information at the end of each reporting period. Doubtful receivables are written-off during the period in which they are determined to be not collectible.

f. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the functional currency). The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the functional currency of the Company and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo (lanjutan)

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai penuh):

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***f. Foreign currency translation** (continued)*

ii. Transactions and balances (continued)

As at the reporting dates, the exchange rates used, based on the middle rate published by Bank Indonesia, were as follows (full amount):

	2024	2023	
Dolar Amerika Serikat (“Dollar AS”)	16,162	15,416	*United States Dollar ("US Dollar")*
Euro	16,851	17,320	*Euro*
Yuan/Renminbi Cina	2,214	2,213	*China Yuan/Renminbi*

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 224, “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah, sebagai pemegang saham dari Perusahaan, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 36.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan yang berlaku dalam transaksi dengan pihak ketiga.

g. Related parties transactions

The Group enters into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with PSAK No. 224, “Related Party Disclosures” and Regulation of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding “Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies”.

Based on this BAPEPAM-LK regulation, government related entities are entities which are controlled, jointly controlled, or materially affected by the government. The government, as the shareholder of the Company, is the Minister of Finance.

The details of significant accounts and transaction entered into with related parties are presented in Note 36.

Transactions with related parties are carried out with similar terms and conditions to those with third parties.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dalam waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan dan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai “Kas yang dibatasi penggunaannya”.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

Cash which restricted in use, are classified and presented in consolidate statement of financial position as part of “Restricted cash”.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang

i. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas pendapatan jasa konstruksi, pendapatan pengoperasian jalan tol, penjualan barang jadi dan penjualan properti real estat dalam kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai, kecuali untuk piutang lain-lain dari pinjaman wajib konversi pihak berelasi yang selanjutnya disajikan sebesar nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapus bukukan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan untuk cadangan kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan Catatan 2e.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Receivables

i. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for construction services revenue, toll road operation revenue, sale of finished goods and sale of real estate properties performed in the ordinary course of business. If collection of the receivables is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Other receivables are receivables arising from transactions outside the ordinary course of business.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment, except for other receivables from mandatory convertible loan of related parties which are subsequently carried at fair value, with changes in fair value recognised in the profit or loss.

Collectibility of trade and non-trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account for expected credit losses in accordance with Note 2e.

Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganisation and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade receivable is impaired. The amount of the impairment allowance is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cashflows, discounted at the original effective interest rate. Cash flows relating to short term receivables are not discounted if the effect of discounting is immaterial.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang (lanjutan)

ii. Piutang retensi

Piutang retensi adalah jumlah termin yang tidak dibayar hingga pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga ketidaksesuaian telah diperbaiki.

j. Tagihan bruto kepada pemberi kerja

Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja untuk pekerjaan kontrak adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah marjin yang diakui dan dikurangi jumlah kerugian dan termin yang diakui, untuk semua pekerjaan dalam proses di mana biaya yang terjadi ditambah marjin yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) melebihi termin.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan untuk persediaan barang jadi, bahan baku dan bahan pembantu ditentukan dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama ("MPKP"). Nilai persediaan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari persediaan bahan baku, tenaga kerja, biaya langsung lainnya dan biaya produksi terkait (berdasarkan kapasitas normal operasi).

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

l. Aset real estat

Aset real estat terdiri dari bangunan jadi, bangunan dalam konstruksi dan tanah dalam pengembangan, dan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan, ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada pengembangan aset real estat serta biaya pinjaman. Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke properti dalam konstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan atau dipindahkan ke tanah siap untuk dijual.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Receivables** (continued)*

ii. Retention receivables

Retention receivables are amounts of progress billings that are not paid until the satisfaction of condition specified in the contract for the payment of such amount or until defects have been rectified.

j. Gross amounts due from customers

Gross amounts due from customers for contract work is the net amount of costs incurred plus recognised margin and less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which costs incurred plus recognised margin (less recognised losses) exceed progress billings.

k. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost for finished goods, raw material and supporting materials are determined using the first-in, first-out ("FIFO") method. The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labour, other direct costs and related production overheads (based on normal operating capacity).

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

l. Real estate assets

Real estate assets consist of buildings, building under construction and land under development, and are stated at cost or net realisable value, whichever is lower.

The cost of land under development consists of cost of land not yet developed, direct and indirect costs related to the development of real estate assets and borrowing costs. The cost of land under development is transferred to the property under construction account when the development is completed or transferred to the land available for sale.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset real estat (lanjutan)

Biaya perolehan properti dalam konstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan aset real estat dan biaya pinjaman. Biaya – biaya tersebut dipindahkan ke bangunan jadi pada saat selesai dibangun dan siap dijual.

Biaya aktivitas pengembangan aset real estat, yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:
- Biaya pra-perolehan tanah;
- Biaya perolehan tanah;
- Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat; dan
- Biaya pinjaman

Grup tetap melakukan kapitalisasi biaya ke proyek pengembangan walaupun realisasi pendapatan masa depan lebih rendah dari nilai tercatat proyek. Atas perbedaan yang terjadi Grup melakukan penyisihan secara periodik. Jumlah penyisihan tersebut akan mengurangi nilai tercatat proyek dan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan.

Pengkajian atas estimasi dan alokasi biaya dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan sampai proyek selesai secara substansial. Jika terjadi perubahan mendasar terkait estimasi saat ini, Grup akan melakukan revisi dan realokasi biaya.

Beban yang tidak berhubungan dengan proyek real estat diakui di laba rugi pada saat terjadinya.

m. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

n. Properti investasi

Properti investasi terdiri dari tanah yang dikuasai Grup untuk disewakan atau untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Real estate assets *(continued)*

The cost of property under construction consists of the cost of developed land, construction costs, other costs related to the development of real estate assets and borrowing costs. They are transferred to the building when it is completed and ready for sale.

The real estate assets' development costs, which are capitalised to the real estate assets development project are:
- *Land pre-acquisition costs;*
- *Land acquisition costs;*
- *Project direct costs;*
- *Costs that are attributable to real estate development activities; and*
- *Borrowing costs*

The Group capitalises the cost of project development even if the realisation of project revenue is lower than the capitalised project cost. However, the Group recognises provision periodically for the difference that may arise. The provision is accounted for as reduction in capitalised project costs and is charged to profit or loss for the year.

Estimates and cost allocation are reviewed at reporting date until the project is substantially completed. If there are fundamental changes on the basis of current estimates, the Group will revise and reallocate the cost.

Expenses which are not related to the development of real estate, are charged to profit or loss when incurred.

m. Prepayments

Prepayments are amortised on a straight-line basis over the benefit periods of the prepayments.

n. Investment properties

Investment properties consist of land which are held by the Group to earn rent or for capital appreciation or both, rather than for the use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan properti investasi. Selanjutnya, properti investasi diukur sebesar nilai wajar yang ditentukan setiap tahun oleh penilai independen. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laba rugi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

o. Aset tetap

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Tanah tidak disusutkan.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 116, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 216, "Aset tetap".

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***n. Investment properties** (continued)*

The investment properties are stated at cost including expenditure that is directly attributable to acquisition of the investment property. Subsequently, investment properties are measured at fair value determined annually by an independent appraiser. Changes in the fair value of investment properties are recognised in profit or loss.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of or when the investment properties are permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from their disposal. Any gains or losses on the derecognition or disposal of an investment property are recognised in the profit or loss in the year of derecognition or disposal.

o. Fixed assets

Land are shown at fair value. Valuation of land is performed by external independent valuers which are registered with the Financial Services Authority ("OJK"). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Land is not depreciated.

All other fixed assets are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

The Group analyzes the facts and circumstances for each type of landrights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the landrights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK No. 116, "Lease". If landrights substantially similar to land purchases, the Group applies PSAK No. 216, "Property, plant and equipment".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun berganda, kecuali untuk bangunan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Fixed assets *(continued)*

Depreciation is computed using the multiple-declining balance method except for building, which is computed using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20 – 30	*Building*
Perlengkapan proyek	4 – 16	*Project equipment*
Perlengkapan kantor	4 – 8	*Office equipment*
Kendaraan	4 – 8	*Vehicle*

Biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama tahun dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the assets will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance costs are charged to the profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset ditentukan dengan membandingkan antara penerimaan hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset tersebut dan diakui di laporan laba rugi.

Gains and losses on disposals of assets are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised in the profit or loss.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and related accumulated depreciation are eliminated from the consolidated financial statements and any resulting gain or loss on disposal of fixed assets are recognised in profit and loss.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Assets under construction is carried at cost including borrowing costs incurred during construction arising from debts used for funding the construction. The accumulated cost will be transferred to the respective fixed assets account when the construction is substantialy completed and ready for its intended use.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

p. Perjanjian konsesi jasa

Grup telah menerapkan ISAK No. 112, "Perjanjian Konsesi Jasa" ("ISAK 112") dan ISAK 229, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" ("ISAK 229").

ISAK 112 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 112 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 229 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Operator mengakui aset atas imbalan yang diterimanya dari pemberi konsesi sebagai imbalan atas penyediaan layanan konstruksi atau peningkatan. Imbalan yang diterima dapat berupa berbagai bentuk. Imbalan yang diberikan oleh pemberi hibah kepada operator dapat berupa hak atas:
i. aset keuangan; atau
ii. aset takberwujud.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Fixed assets *(continued)*

Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

p. Service concession arrangement

The Group has adopted ISAK No. 112, "Service Concession Arrangement" ("ISAK 112") and ISAK 229, "Service Concession Arrangement: Disclosure" ("ISAK 229").

ISAK 112 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 112 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognise any infrastructure as fixed assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 229 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The operator recognises an asset for the consideration that it receives from the grantor in exchange for providing construction or upgrade services. The consideration received can take a variety of forms. The consideration given by the grantor to the operator might be rights to:

i. a financial asset; or
ii. an intangible asset.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

i. Model aset keuangan

Operator mengakui aset keuangan sejauh operator memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas. Operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan layanan publik dan mengoperasikan serta memelihara infrastruktur tersebut selama jangka waktu tertentu. Operator dibayar atas layanan tersebut selama jangka waktu perjanjian. Aset keuangan dicatat sebagai "aset keuangan yang dimiliki pada biaya diamortisasi" sesuai dengan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan". Grup mencatat pendapatan yang berkaitan dengan layanan konstruksi dan layanan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan PSAK No. 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi layanan diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

ii. Model aset takberwujud

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik sebagai imbalan atas jasa konstruksi yang dilakukan Grup. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

Sesuai dengan ISAK 112, Grup mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan PSAK No. 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" untuk jasa konstruksi jalan tol dan untuk jasa operasi dan pemeliharaan jalan tol selama masa konsesi. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud sebesar nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup. Nilai wajar dari pendapatan jasa konstruksi dihitung dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk konstruksi jalan tol ditambah dengan marjin konstruksi tertentu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Service concession arrangement *(continued)*

i. Financial asset model

The operator recognises a financial asset to the extent that it has an unconditional contractual right to receive cash. The operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. The financial asset is accounted for as a "financial assets held at amortised cost" in accordance with PSAK No. 109, "Finansial Instruments". The Group accounts for revenue relating to the construction services and operation and maintenance services in accordance with PSAK No. 115, "Revenue from Contract with Customers". Financial assets arising from service concession arrangements are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

ii. Intangible asset model

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service as a consideration for construction services performed by the Group. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service.

In accordance with ISAK 112, the Group recognises and measures construction revenue in accordance with PSAK No. 115, "Revenue from Contracts with Customers" for toll road construction services and for toll road operation and maintenance services during the concession period. During the construction period, the Group records intangible assets at fair value of the consideration received or to be received by the Group.The fair value of revenue from construction services is derived from the costs incurred for toll road construction plus certain construction margin.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

ii. Model aset takberwujud (lanjutan)

Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset takberwujud tersebut siap digunakan. Aset hak pengusahaan jalan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas selama masa konsesi. Kecuali konsesi JORR S, aset takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus selama umur masa konsesi.

Sesuai dengan ISAK 112, pemberi konsesi dapat juga menyerahkan item infrastruktur lainnya kepada operator, yang dapat disimpan atau digunakan sesuai keinginan operator. Jika aset tersebut merupakan bagian dari imbalan yang harus dibayar oleh pemberi konsesi untuk pelayanan jasa, aset tersebut bukan merupakan hibah Pemerintah. Aset tersebut diakui sebagai aset operator, yang diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal. Operator mengakui pendapatan ditangguhkan sehubungan dengan kewajiban yang belum terpenuhi, yang ditanggung sehubungan dengan pertukaran aset. Setiap perubahan selanjutnya terhadap kewajiban yang belum terpenuhi akan diakui sebagai modifikasi kontrak dan disesuaikan secara prospektif.

Grup menerapkan pendekatan akumulasi biaya pada pertimbangan variabel dalam perolehan aset takberwujud.

Aset takberwujud akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset takberwujud yang diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

Aset takberwujud yang diberikan kepada Grup dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Pemerintah/BPJT. Aset takberwujud ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset takberwujud akan dihentikan pengakuannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Service concession arrangement *(continued)*

ii. Intangible asset model (continued)

The amortisation of the costs starts when the intangible assets are ready to be operated. Concession rights for toll roads are amortised using the unit of usage method based on traffic volume during the concession period. Except for JORR S concession, the intangible asset is amortised by using straight line method in over concession period.

In accordance with ISAK 112, the grantor may provide other infrastructure items to the operator, to keep or used as the operator wishes. If these assets are part of the consideration payable by the grantor for the services, then these assets would not be viewed as Government grant. These are recognised as assets of the operator and are measured at fair value on initial recognition. The operator recognises a deferred revenue in respect of unfulfilled obligations it has assumed in exchange for the assets. Any subsequent changes of the unfulfilled obligation will be recognised as contract modification and adjusted prospectively.

The Group applied cost accumulation approach in the variable consideration in intangible assets acquisition.

The intangible asset are derecognised at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the intangible assets which are expected to be fully amortised by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") for no consideration.

Intangible asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/BPJT. These intangible assets will be transferred to the Government/BPJT at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the intangible assets will be derecognised.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

ii. Model aset takberwujud (lanjutan)

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup jika jalan tol diserahkan kepada pihak lain atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau jika tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

q. Biaya pelapisan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum ("SPM") yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol didiskontokan ke nilai kininya yang mencerminkan provisi saat ini.

r. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada tanggal pelaporan, Grup melakukan penelahaan atas penurunan nilai ketika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut mungkin tidak terpulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas masuk yang dapat diidentifikasi secara terpisah, yang sebagian besar tidak tergantung pada arus kas masuk dari aset lain atau kelompok aset (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Service concession arrangement *(continued)*

ii. Intangible asset model (continued)

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognised from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road is transferred to another party or the Government/BPJT has changed the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from discontinuance or disposal of concession assets is recognised in the consolidated statement of profit or loss.

q. Overlay costs

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain quality in accordance with the Minimum Service Standards ("SPM") established by the Ministry of Public Works, which is by performing overlay of toll road regularly. The cost of this overlay is periodically provided for based on estimated utilisation of toll road by customers. The estimated net provision for overlay is discounted to its present value that reflects current provision.

r. Impairment of non-financial assets

At the reporting date, the Group perform impairment review whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of those assets may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows, which are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets (cash generating units). Non-financial assets that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pemulihan rugi penurunan nilai, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pemulihan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan yang disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

s. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:
- Sewa jangka pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan pada laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:
- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***r. Impairment of non-financial assets** (continued)*

Reversal of impairment losses is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date when the impairment was reversed.

s. Leases

Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Group elect not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:
- *Short-term leases; and*
- *Low value asset*

The payments made for these leases are recognised through profit or loss using the straight-line method based on the lease period.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:
- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Group has the right to operate the asset;*
  2. *The Group has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Grup bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap".

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Leases *(continued)*

Group as a lessee *(continued)*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying assets's useful life. Right-of-use assets are classified as part of "Fixed Assets".

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Grup sebagai pemberi sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Aset berupa piutang sewa pembiayaan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan sewa pembiayaan. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola dari manfaat penggunaan aset pendasar yang dinikmati.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Leases *(continued)*

Group as a lessee *(continued)*

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Group as a lessor

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases are classified as finance leases if such leases transfer substantially all the risks and rewards related to the ownership of the lease assets. Leases are classified as operating leases if the leases do not transfer substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased assets.

Assets held under finance lease receivables are recognised in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net investment in the leases. Receipts from lease receivables are treated as repayments of principal and financing lease income. The recognition of financing lease income is based on a pattem reflecting constant periodic rate of retum on the Group's net investment as lessor in the finance leases.

A lessor shall recognise lease payments from operating leases as income on either a straight-line basis or another systematic basis. The lessor shall apply another systematic basis if that basis is more representative of the pattern in which benefit from the use of the underlying asset is diminished.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha biasa dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

u. Uang muka pelanggan

Uang muka pelanggan adalah jumlah yang diterima oleh Grup sebelum pekerjaan dilakukan. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

v. Provisi

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

w. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

t. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

u. Advances from customers

Advances from customers are amounts received by the Group before the related work is performed. The amounts will be compensated with progress billings based on the physical progress achieved.

v. Provision

Provisions are measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance costs.

w. Borrowings

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pinjaman (lanjutan)

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai beban dibayar di muka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

Semua biaya lain untuk mendapatkan pinjaman diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

x. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya (termasuk kerugian selisih kurs yang terkait), seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi secara substansial. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai secara substansial.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

w. Borrowings *(continued)*

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawndown. In this case the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawndown, the fee is capitalised as a prepayment for financing cost and amortised over the period of the facility to which it relates.

All other costs in obtaining the borrowings are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

x. Borrowing cost

Interest and other borrowing costs (including the related foreign exchange losses), such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is substantially complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than the borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. An entity shall cease capitalising borrowing costs when the activities necessary to prepare the qualifying asset are substantially complete.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Perpajakan

Pajak penghasilan final

Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 21 Februari 2022, dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 2,65% yang diperoleh mulai tanggal 21 Februari 2022. Penghasilan dari penjualan dan sewa properti dikenakan pajak final masing-masing sebesar 2,5% dan 10% dari nilai kontrak.

Beban pajak final disajikan terpisah dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan non-final

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya atau ekuitas.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

y. Taxation

Final income tax

Income tax from construction service is computed based on the Government Regulation No. 40 year 2009 concerning the amendment of Government Regulation No. 51 year 2008 regarding income tax from the construction business which effective starting 21 February 2022, whereby final tax at 2.65% is applied for contract signed starting 21 February 2022. Income from sale and rental of properties is subject to final tax at 2.5% and 10% of contract value, respectively.

Final tax expenses are presented separately from income tax expenses in the consolidated statements of profit or loss.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Non-final income tax

Tax expenses comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax laws and rates at the reporting date. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan non-final (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan, ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer dan kerugian pajak yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

z. Imbalan kerja

Imbalan pasca kerja

Grup memiliki program imbalan pasti dan iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas yang terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***y. Taxation** (continued)*

Non-final income tax (continued)

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. Deferred income tax is determined, using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the start of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences and tax loss can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity intends either to settle on net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

z. Employee benefits

Post-employment benefits

The Group has both defined benefit and defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena peraturan ketenagakerjaan mengharuskan entitas membayar jumlah tertentu kepada para pekerja yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, pada dasarnya kewajiban pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan adalah kewajiban imbalan pasti. Bila jumlah yang diterima karyawan dari program pensiun lebih kecil dari imbalan seperti yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan, Grup akan melakukan penyisihan atas kekurangan yang ada. Tambahan penyisihan imbalan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan tersebut tidak didanai.

Pada umumnya, program imbalan pasti menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat imbal hasil Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi konsolidasian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

z. Employee benefits *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

For defined contribution plans, the Group pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since manpower regulations require an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, in substance the pension obligation under the manpower regulations represents a defined benefit obligation. If the employee funded portion of the pension plan benefit is less than the benefit as required by the manpower regulations, the Group will provide for such shortage. The additional benefit required by the manpower regulations is unfunded.

Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the rates of Government Bonds yields that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the consolidated statement of profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam saldo laba pada laporan perubahan ekuitas dan pada laporan posisi keuangan.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen program atau kurtailmen diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa cuti besar dan program kepemilikan rumah. Hak atas imbalan ini biasanya berdasarkan pencapaian masa kerja karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

aa. Pengakuan pendapatan dan beban

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui setelah jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Tagihan bruto kepada pemberi kerja" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan ditangguhkan".

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***z. Employee benefits** (continued)*

Post-employment benefits (continued)

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the statement of financial position.

Past service costs arising from program amendment or curtailment are recognised as expense in the profit or loss when incurred.

Other long-term employee benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave and home ownership program. The entitlements to these benefits are usually based on the completion of a certain service year by the employees in accordance with the Collective Labor Agreement. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent actuaries.

aa. Revenue and cost recognition

Payment of the transaction price is differ for each contracts. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Gross amounts due from customers" and contract liabilities are presented under "Deferred revenue".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan atau meningkatkan sumber daya yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan di masa depan ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan, sehingga memenuhi syarat untuk dikapitalisasi berdasarkan PSAK No. 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan diakui sebagai aset. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Grup seperti yang dijelaskan dibawah.

Jasa jalan tol

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Perusahaan diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil pengoperasian ruas jalan tol yang terintegrasi dengan ruas jalan tol lain yang dioperasikan oleh pemegang konsesi jalan tol lainnya diakui melalui alokasi pembagian pendapatan berdasarkan volume lalu lintas yang telah disahkan BPJT dan disepakati oleh Perusahaan dan pemegang konsesi jalan tol lainnya.

Jasa konstruksi

Pendapatan dan beban kontrak konstruksi diakui dengan metode persentase penyelesaian untuk menentukan jumlah yang tepat untuk diakui dalam periode tertentu; tahap penyelesaian ditentukan dengan mengacu pada penyelesaian suatu bagian fisik dari pekerjaan kontrak untuk setiap kontrak. Laba atas kontrak diakui apabila hasil kontrak tersebut dapat diestimasi dengan andal. Apabila terdapat kemungkinan besar bahwa biaya kontrak keseluruhan akan melebihi pendapatan kontrak keseluruhan, kerugian yang diperkirakan akan terjadi segera diakui sebagai beban.

Jika ada kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***aa. Revenue and cost recognition** (continued)*

The costs that directly relate to the contract and generate or enhance resources that will be used in satisfying performance obligations in the future ("cost to fulfill") or is incremental of obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered, are therefore eligible for capitalisation under PSAK No. 115, "Revenue from Contracts with Customers" and recognised as an asset. Such cost will be amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

The specific criteria also must be met for each of the Group's activities as described below.

Toll road services

The Company's revenues from toll road operations are recognised upon the sale of toll tickets. Toll revenues from the operation of toll road sections which are integrated with other toll road sections operated by other toll road concession holders are recognised through revenue-sharing allocations based on the traffic volume authorised by BPJT and agreed by the Company and other toll road concession holders.

Construction services

Revenue and cost from construction contracts is recognised using the percentage of completion method to determine the appropriate amount to be recognised in a given period; the stage of completion is measured by reference to the completion of a physical proportion of the contract work for each contract. The profit for a contract is recognised as soon as it can be estimated reliably. When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognised as an expense immediately.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognised as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Jasa konstruksi (lanjutan)

Keseluruhan biaya yang terjadi dan laba yang diakui untuk setiap kontrak yang belum selesai dibandingkan dengan jumlah yang telah ditagih sampai akhir tahun. Apabila jumlah biaya yang terjadi dan laba yang diakui lebih besar daripada tagihan, maka jumlah tersebut disajikan sebagai "jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja". Apabila jumlah tagihan lebih besar daripada biaya yang terjadi dan laba yang diakui, maka jumlah tersebut disajikan sebagai "jumlah utang bruto dari pemberi kerja".

Penjualan properti real estat

Pendapatan dari penjualan real estat termasuk penjualan bangunan jadi beserta kavling, kavling tanah tanpa bangunan, unit bangunan, kondominium, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenis lainnya diakui pada saat pengendalian pada real estat telah dialihkan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa.

Pendapatan hotel diakui pada saat jasa diberikan kepada tamu hotel atau untuk penjualan barang, pada saat barang diserahkan.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

ab. Informasi segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Direksi merupakan pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

aa. Revenue and cost recognition *(continued)*

Construction services (continued)

The aggregate of the costs incurred and recognised profits for each uncompleted contract are compared against the progress billing up to the year end. When the sum of the costs incurred and recognised profits exceed the progress billing, the excess balance is presented as "the gross amounts due from customers". When the progress billings exceed the sum of the costs incurred and recognised profits incurred, the excess balance is presented as "the gross amounts due to customers".

Sale of real estate properties

Revenue from the sale of real estate including sale of building with lots, sale of lots without building construction, sale of kondominium, apartments, office building, shopping center and other building of similar type, are recognised when the control of real estate has been transferred to customers.

Rental revenue is recognised on a straight line basis over the term of the lease contract.

Hotel revenue is recognised when services are rendered to the hotel's guests or for sale of goods, when the goods are delivered.

Sale of goods

Revenue from the sale of goods is recognised when the control of goods has been transferred to the customers.

Expenses are recogised as incurred on an accrual basis.

ab. Segment information

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments and making strategic decisions, has been identified as the Directors.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

ad. Laba bersih per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

ae. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

Incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

ad. Earnings per share

Earnings per share are calculated by dividing profit for the year attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

ae. Dividend distribution

Dividend distributions are recognised as a liability when the dividends are approved in the Company's General Meeting of Shareholder ("GMS").

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk eskpektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

a. Pengakuan provisi atas taksiran rugi dari proyek kontrak konstruksi yang memberatkan

Grup mengestimasi jumlah imbalan yang bersifat variabel atas penyerahan jasa konstruksi yang dijanjikan ke pelanggan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak. Apabila terdapat kemungkinan Grup kehilangan hak atas sebagian imbalan yang akan dibayarkan atau berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan karena satu dan lain hal, maka nilainya akan dibukukan sebagai provisi pada saat kondisi yang dapat menimbulkan hal tersebut teridentifikasi dan nilainya diestimasi berdasarkan informasi yang tersedia sampai dengan tanggal pelaporan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgements used in preparing the consolidated financial statements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Actual results may differ from these estimates.

The estimates, assumptions and judgments that have significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

a. Recognising provision for expected loss from onerous construction contract projects

The Group estimates the variable consideration amount from fulfilling promised construction services to the customer in line with the terms and conditions in the contract. If there is a possibility that the Group loss its entitlement of a portion of consideration that will be paid or liable to pay a compensation to the customer for one reason or another, the amount will be booked as a provision when the condition that indicates it arise and the amount is estimated based on the latest available information up to the reporting date.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Pengakuan provisi atas taksiran rugi dari proyek kontrak konstruksi yang memberatkan (lanjutan)

Provisi untuk kontrak-kontrak yang memberatkan diakui berdasarkan kewajiban kini atas biaya untuk memenuhi kontrak, yang diperkirakan akan melebihi imbalan yang akan diterima berdasarkan kontrak tersebut. Imbalan yang diharapkan akan diterima berdasarkan kontrak tersebut mencakup estimasi imbalan variabel yang akan menjadi hak Grup, termasuk potensi denda keterlambatan. Provisi tersebut dapat berubah tergantung pada persetujuan dari pemilik proyek atas nilai kontrak tambahan atau perubahan estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek.

Grup juga secara berkelanjutan mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak konstruksi. Dalam mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak, Grup perlu menggunakan pertimbangan dan pengetahuan Grup atas situasi terkini dari proyek karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi hasil perhitungan kontrak yang memberatkan.

b. Estimasi penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai penurunan nilai aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang ditelaah secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Pertimbangan yang digunakan berdasarkan fakta dan keadaan yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan status kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor-faktor pasar yang diketahui. Penyisihan ini akan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***a. Recognising provision for expected loss from onerous construction contract projects** (continued)*

A provision for onerous contracts recognised based on the present obligation of the cost to fulfil the contracts, which are expected to exceed the consideration to be received under the contracts. The consideration expected to be received under the contract includes the estimated variable consideration to which the Group will be entitled, including any potential delay penalties. The provision may change subject to the approval from the project owner on the additional contract value or changes in the estimated costs to complete the project.

The Group continuously estimates the cost to complete a construction contract. In estimating the cost to complete a contract, the Group needs to include their judgements and knowledge of the latest project situation as there is no standardised measurement to calculate the cost to complete a contract. These estimates and judgements may affect the level of precision of the onerous contract calculation result.

b. Estimated impairment of financial assets

The Group assesses its financial assets for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgment as to whether there is objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgments as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between the estimated loss and the actual loss. The judgments applied are based on facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationships with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors. These provisions will be re-evaluated and adjusted as additional information received affects the provision for impairment.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang perlu dipertimbangkan atas kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan pertimbangan, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik atas awal pengakuan dari piutang.

c. Pengakuan pendapatan kontrak konstruksi

Pendapatan atas konstruksi diakui dengan metode persentase penyelesaian, sesuai dengan tahapan konstruksi. Persentase penyelesaian dibuat berdasarkan tahapan penyelesaian proyek atau kontrak, ditentukan berdasarkan pembagian biaya-biaya kontrak yang dikeluarkan sampai dengan saat ini terhadap estimasi biaya proyek atau kontrak.

d. Amortisasi hak pengusahaan jalan tol

Dalam menentukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap jumlah proyeksi volume lalu lintas. Perusahaan menunjuk konsultan lalu lintas independen untuk melakukan studi lalu lintas dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***b. Estimated impairment of financial assets** (continued)*

In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

c. Revenue recognition of construction contract

Revenue from construction contract is recognised using the percentage of completion method as contruction progresses. The percentage of completion is made by reference to the stage of completion of the project or contract, determined based on the proportion of the contract costs incurred to date to the total estimated costs of the project or contract.

d. Amortisation of toll road concession rights

In determining amortisation of toll road consession rights, management has to project the traffic volume after the current year for the remaining years of the concession agreement. Traffic volume is projected based on the number of traffic and adjusted by comparison to the actual traffic volume. However, the actual traffic volume in the future could differ from this estimate, depending upon changes in the external factors that may affect toll rates and traffic volume.

Management performs periodic assessment on the total projected traffic volume. The Company will appoint an independent traffic consultant to perform traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual traffic volume.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Perjanjian konsesi jasa

BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Perusahaan termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol. Pada akhir masa konsesi jasa, Perusahaan harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan operasional dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

i. Model aset keuangan

Berdasarkan perjanjian konsesi jasa, Perusahaan meyediakan lebih dari satu jasa (yaitu jasa konstruksi atau jasa *upgrade* dan jasa pemeliharaan operasional) dalam satu kontrak konsesi jasa. Oleh karena nilai imbalan dalam kontrak tidak dipecah secara khusus antara imbalan atas jasa konstruksi dan imbalan atas jasa pemeliharaan operasional, piutang atas jasa yang diberikan berdasarkan kontrak konsesi jasa dialokasikan ke masing-masing komponen dengan mengacu pada nilai wajar masing-masing imbalan. Dalam menentukan alokasi, manajemen menerapkan estimasi, asumsi dan pertimbangan yang signifikan seperti perkiraan biaya yang diproyeksikan untuk setiap jasa yang diberikan, asumsi margin keuntungan tertentu untuk setiap jenis penghasilan dan sebagainya.

ii. Model aset takberwujud

Seperti yang dibahas pada Catatan 26, pengalihan aset hak konsesi dari Pemerintah kepada Perusahaan sebagai dukungan dalam pembangunan Proyek JTTS diakui sebagai aset takberwujud yang diukur pada nilai wajar dan pendapatan ditangguhkan. Pengukuran nilai wajar atas hak konsesi ini menggunakan teknik analisa arus kas masa depan yang didiskontokan dengan input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi volume lalu lintas jalan tol, kenaikan tarif tol dan tingkat diskonto.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

e. Service concession arrangement

The BPJT granted the Company the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the toll roads. Upon expiry of the service concession period, the Company shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, works, toll road facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities.

i. Financial asset model

Under the terms of its service concession arrangements, the Company performs more than one service (i.e. construction or upgrade services and operational maintenance services) under a single contract or arrangement. Since the amounts of consideration in the contract are not specifically split between the construction services consideration and the operating services consideration, the consideration receivable for the services provided under the service concession arrangements is allocated to the components by reference to their relative fair values. In determining the allocation, management applied significant estimates, assumptions and judgements, e.g. the projected costs estimate for each service, certain profit margin assumption for each revenue stream, etc.

ii. Intangible asset model

As mentioned in Note 26, the transfers of concession rights assets from the Government to the Company represent Government's support to the Company regarding the Company's assignment in the construction of the JTTS which was recognised as intangible assets at fair value and deferred revenue. The measurement of the fair value of the concession rights was assessed using the future discounted cash flows analysis techniques with significant inputs in this valuation approach were the assumption of toll road traffic volume, increase of toll tariff and discount rate.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

ii. Model aset takberwujud (lanjutan)

Perusahaan diharuskan oleh ISAK No. 112, "Perjanjian Konsesi Jasa" untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Perusahaan mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK No. 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Perusahaan mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan marjin berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu berdasarkan pada komponen yang relevan, seperti keterlibatan Perusahaan, risiko terhadap Perusahaan dan perbandingan terhadap operator infrastuktur lain yang relevan.

Perusahaan menelaah taksiran marjin dari konstruksi jalan tol secara berkelanjutan.

f. Pengaturan bersama

Grup memegang hak suara 20% – 100% atas pengaturan bersama yang dimilikinya. Grup memiliki pengaturan bersama sesuai dengan perjanjian kontraktual dimana dibutuhkan adanya suara bulat dari seluruh pihak untuk persetujuan atas semua aktivitas yang relevan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

e. Service concession arrangement *(continued)*

ii. Intangible asset model (continued)

The Company is required by ISAK No. 112, "Service Concession Arrangement" to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss.

The Company recognises construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK No. 115, "Revenue from Contracts with Customers". The Company measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received and will add the margin, based on management's best estimation calculated in certain model based on relevant components, such as the Company's involvement in the project, risk borne by the Company and comparison to other relevant infrastructure operators.

The Company assesses the estimated JTTS construction margin continuously.

f. Joint arrangements

Group holds 20% – 100% of the voting rights of its joint arrangement. The Group has joint control over this arrangement as under the contractual agreements, unanimous consent is required from all parties to the agreements for all relevant activities.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Pengaturan bersama (lanjutan)

Konsolidasi atas entitas pengaturan bersama

Manajemen menilai bahwa Grup memiliki pengendalian atas pengaturan bersama tertentu yang dimilikinya berdasarkan proses pengambilan keputusan di dalam pengaturan bersama tersebut. Grup mengendalikan pengaturan bersama karena Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan pengaturan bersama dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas pengaturan bersama tersebut. Pengaturan bersama tersebut dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Grup. Pengaturan bersama tersebut tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Klasifikasi pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***f. Joint arrangements** (continued)*

Consolidation of joint arrangements entities

Management consider that the Group has control of some of their joint arrangements based on the decision-making process of those joint arrangements. The Group controls joint arrangement when the Group is exposed to, or has the rights to, variable returns from its involvement with the joint arrangements and has the ability to affect those returns through its power over the joint arrangements. They are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Classification of joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement.

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Estimasi penurunan nilai aset non-keuangan

Peninjauan atas penurunan nilai pada *goodwill* dilakukan setahun sekali atau dapat lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai. Aset non-keuangan lainnya, seperti aset takberwujud hak pengusahaan jalan tol dan aset tetap ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai, yang dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen. Perubahan asumsi penting, termasuk prakiraan jumlah volume lalu lintas jalan tol, kenaikan tarif tol, dan tingkat diskonto.

Untuk pengujian penurunan nilai, aset takberwujud hak pengusahaan jalan tol dialokasikan menjadi 4 unit penghasil kas, terdiri dari JTTS, JORR S, ATP, dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Hak pengusahaan jalan tol Sumatera dialokasikan sebagai satu unit penghasil kas, mempertimbangkan kas masuk dari ruas-ruas jalan tol Sumatera sebagian besar saling bergantung satu sama lain, serta diharapkan dapat saling memberikan manfaat dari sinergi.

h. Nilai wajar pada properti investasi

Nilai wajar dari properti investasi ditentukan menggunakan teknik valuasi. Properti investasi milik Grup divaluasi oleh penilai independen professional yang memiliki kualifikasi yang relevan dan memiliki pengalaman yang berhubungan dengan segmen properti investasi yang akan dinilai untuk semua properti investasi, penggunaan saat ini setara dengan penggunaan tertinggi dan terbaik. Nilai wajar untuk semua properti investasi ditentukan menggunakan pendekatan data pasar. Pendekatan ini membandingkan properti dalam jarak yang berdekatan. Nilai ini ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti ukuran properti, lokasi, akses menuju lokasi dan kualitas dari interior properti. Hal yang paling signifikan dalam valuasi ini adalah harga per meter persegi.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

g. Estimated impairment of non-financial assets

Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment. Other non-financial assets, such as intangible assets of toll road concession rights and fixed assets are reviewed from impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is determined based on the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use, calculated on the basis of management's assumptions and estimates. Changing the key assumptions, including the forecasted toll road traffic volumes, increase in toll tariff and the discount rate.

For the purpose of impairment testing, the intangible assets-toll road concession rights are allocated as 4 cash generating units, which are JTTS, JORR S, ATP and Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Sumatera toll road concession right is allocated as one cash generating unit, considering the cash inflow from each Sumatera toll road section are largely dependend from each others, it is also expected to benefit from the synergies.

h. Fair value in investment property

The fair value of investment property is determined by using valuation techniques. The group's investment properties were valued by independent professionally qualified valuers who hold a recognised relevant professional qualification and have recent experience in the locations and segment of the investment properties valued. For all investment properties, their current use equates to the highest and best use. The fair value for all investment properties was determined using market data approach. This approach takes into account comparable properties in close proximity. These values are adjusted for differences in key attributes such as property size, location, accessibility, and quality of interior fittings. The most significant input into this valuation approach is price per square metre.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset real estat

Penurunan nilai aset real estat ditentukan berdasarkan penelaahan berkala atas kondisi fisik dan taksiran nilai penjualan aset real estat terkait di masa mendatang. Perhitungan penurunan nilai ini melibatkan estimasi nilai realisasi bersih, yang merupakan estimasi harga jual, dikurangi biaya terkait. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan jumlah yang dapat direalisasi di masa mendatang menjadi berbeda dari nilai realisasi bersih aset real estat yang dilaporkan berdasarkan estimasi saat ini.

j. Kontrak pembiayaan pemasok

Terkait dengan perjanjian Grup untuk pembayaran kepada pemasok melalui fasilitas dari bank, manajemen melakukan penilaian apakah terdapat perubahan substansial atas syarat utang usaha. Untuk transaksi dimana tidak terdapat perubahan substansial atas syarat utang usaha, Grup melanjutkan untuk menyajikan angka terkait sebagai utang usaha pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, manajemen melakukan penilaian apakah bank sebagai prinsipal atau agen atas nama Grup. Untuk transaksi dengan bank sebagai prinsipal, Grup menyajikan pembayaran jumlah terutang ke bank sebagai pembayaran kepada pemasok dan lain-lain di dalam arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas konsolidasian.

k. Provisi yang timbul karena perjanjian konsesi jasa

Provisi pelapisan jalan tol merupakan estimasi liabilitas secara berkala seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pengguna. Provisi didiskontokan ke nilai saat ini. Provisi pelapisan jalan tol melibatkan estimasi signifikan dalam menentukan arus kas masa depan dan proyeksi volume lalu lintas di masa depan.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

i. Impairment of real estate assets

Impairment of real estate assets is determined on the basis of periodic review of the physical condition and estimated future sales value of the real estate assets. The calculation of impairment involves estimating the net realisable value, which is the estimated selling price, less any related costs. Uncertainty associated with these factors may result in the actual realisable amount in the future being different from the reported net reliasable value of real estate assets based on current estimates.

j. Supplier finance arrangements

In relation to the agreement entered by the Group for payment to suppliers through facility from banks, management performed assessment whether there is change on the substance of the trade payables. For transaction with bank where there is no change on the substance of the trade payables, the Group continue presenting the relevant amounts within trade payables in the consolidated statements of financial position.

For the purpose of the consolidated statements of cash flows, management performed assessment whether bank act as principal or agent on behalf of the Group. For transaction with bank act as principal, the Group present the payment of the amount outstanding to the bank as payment to suppliers and others under the cash flow from operating activities in the consolidated statements of cash flow.

k. Provision arising from service concession arrangement

Provision for toll road overlay is a periodic estimate of the liabilities based on the usage of the toll road by its users. The provision is discounted to present value. The overlay provision involves significant estimates in determining future cash flow and projections of future traffic volumes.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2024	2023	
Kas	4,186	3,960	*Cash on hand*
Bank	29,752,834	34,558,362	*Cash in banks*
Deposito berjangka	7,012,009	4,497,605	*Time deposits*
	36,769,029	39,059,927	

a. Kas / *a. Cash on hand*

	2024	2023
Rupiah/ *Rupiah*	4,186	3,960

b. Bank / *b. Cash in banks*

	2024	2023
Rupiah/ *Rupiah*		
Pihak ketiga/ *Third parties*		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	420,631	459,508
PT Bank Mega Tbk	112,342	72,309
PT Bank ICBC Indonesia	107,890	79,583
PT Bank Central Asia Tbk	31,552	57,690
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	15,747	31,990
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	10,673	50,626
Lain-lain di bawah Rp 25 miliar/ *Others less than Rp 25 billion*	27,949	11,477
Pihak berelasi/ *Related parties*		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,733,723	9,109,228
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,691,127	7,882,509
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,575,081	11,979,213
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,683,093	1,878,774
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9,377	366,757
PT Bank Tabungan Negara Syariah	230	82,445
	27,419,415	32,062,109
Dolar AS/ *US Dollar*		
Pihak ketiga/ *Third parties*		
PT Bank Mega Tbk	86,840	8,922
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	12,503	395,293
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	48	56
PT Bank UOB Indonesia	-	29
PT Bank Mayapada	-	2
Pihak berelasi/ *Related parties*		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,136,097	749,161
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	48,473	21,870
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	40,637	132,820
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7,363	1,188,093
	2,331,961	2,496,246
Mata uang asing lainnya/ *other currency accounts*		
Pihak ketiga/ *Third party*		
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	7
Pihak berelasi/ *Related party*		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,458	-
	29,752,834	34,558,362

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

c. Deposito berjangka

***4. CASH AND CASH EQUIVALENTS** (continued)*

c. Time deposits

	2024	2023
Rupiah/ *Rupiah*		
Pihak ketiga/ *Third parties*		
PT Bank Mega Tbk	106,000	50,000
PT Bank Mega Syariah	35,000	20,000
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	40,000
Lain-lain di bawah Rp 25 miliar/ *Others less than Rp 25 billion*	17,099	32,099
Rupiah/ *Rupiah*		
Pihak berelasi/ *Related parties*		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,500,000	540,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,000,000	25,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	800,000	1,500,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	500,000	513,000
PT Bank Tabungan Negara Syariah	100,000	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	65,000	31,000
	6,123,099	2,751,099
Dolar AS/ *US Dollar*		
Pihak ketiga/ *Third party*		
PT Bank Mega Tbk	888,910	924,960
Pihak berelasi/ *Related parties*		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	770,800
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	38,817
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	11,929
	888,910	1,746,506
	7,012,009	4,497,605

Kisaran tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The range of interest rates per annum on time deposits are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	4.00% - 7.00%	2.25% - 6.00%	*Rupiah*
Dolar AS	3.75% - 5.65%	3.75% - 5.50%	*US Dollar*

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of trade receivables are as follows:*

	2024	2023	
Piutang usaha lancar			*Current trade receivables*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Rupiah	611,900	668,862	*Rupiah*
Dolar AS	355	-	*US Dollar*
	612,255	668,862	
Provisi atas penurunan nilai	(245,688)	(253,952)	*Provision for impairment*
	366,567	414,910	
Pihak berelasi (Catatan 36b)			*Related parties (Note 36b)*
Rupiah	754,263	750,701	*Rupiah*
Dolar AS	6	2,167	*US Dollar*
	754,269	752,868	
Provisi atas penurunan nilai	(63,966)	(38,407)	*Provision for impairment*
	690,303	714,461	
Jumlah piutang usaha lancar, bersih	1,056,870	1,129,371	*Total current trade receivables, net*
Piutang usaha tidak lancar			*Non-current trade receivables*
Pihak ketiga	10,995	10,995	*Third parties*
Provisi atas penurunan nilai	(10,995)	(10,995)	*Provision for impairment*
	-	-	
Pihak berelasi (Catatan 36b)	7,612	7,612	*Related parties (Note 36b)*
Provisi atas penurunan nilai	(7,612)	(7,612)	*Provision for impairment*
	-	-	
Jumlah piutang usaha, bersih	1,056,870	1,129,371	*Total trade receivables, net*

Piutang usaha tidak lancar merupakan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun atas penjualan hunian rumah dan apartemen yang dibayarkan secara bertahap selama lebih dari satu tahun.

Non-current trade receivables represent receivables with maturity over one year from sale of residential houses and apartments which are paid by installment for a period of more than a year.

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *5. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The analysis of these trade receivables is as follows:*

	2024	2023	
Belum jatuh tempo	616,705	697,988	*Not past due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
Kurang dari 6 bulan	267,900	278,578	*Less than 6 months*
Antara 6-12 bulan	169,593	97,559	*Between 6-12 months*
Lebih dari 12 bulan	330,933	366,212	*More than 12 months*
	1,385,131	1,440,337	
Provisi atas penurunan nilai	(328,261)	(310,966)	*Provision for impairment*
	1,056,870	1,129,371	

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat piutang usaha yang telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2024 and 2023 there are no trade receivables were past due but not impaired.

Mutasi provisi atas penurunan nilai piutang usaha Grup adalah sebagai berikut:

The movements in the Group's provision for impairment of trade receivables are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	310,966	284,109	*Beginning balance*
Penambahan, bersih	17,295	26,857	*Addition, net*
Saldo akhir	328,261	310,966	*Ending balance*

Penambahan provisi atas penurunan nilai piutang usaha telah dimasukkan ke dalam "beban penurunan nilai piutang" dalam laporan laba rugi konsolidasian.

The addition of provision for impairment of trade receivables have been included in "impairment of receivables" in the consolidated profit or loss.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai piutang usaha tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the provision for impairment of trade receivables is adequate to cover loss on non-collectible receivables.

Lihat Catatan 36 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 36 for details of related party balances and transactions.

Beberapa piutang usaha digunakan sebagai jaminan utang bank (Catatan 21).

Certain trade receivables are used as collateral for bank loans (Note 21).

6. PIUTANG VENTURA BERSAMA / *6. RECEIVABLES FROM JOINT VENTURES*

	2024	2023	
Nilai bruto	500,706	423,576	*Gross amount*
Provisi atas penurunan nilai	(370,500)	(337,228)	*Provision for impairment*
	130,206	86,348	

6. PIUTANG VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *6. RECEIVABLES FROM JOINT VENTURES (continued)*

Mutasi provisi atas penurunan nilai piutang ventura bersama Grup adalah sebagai berikut:

The movements in the Group's provision for impairment of receivables from joint venture are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	337,228	278,251	*Beginning balance*
Penambahan, bersih	33,272	58,977	*Addition, net*
Saldo akhir	370,500	337,228	*Ending balance*

Piutang ventura bersama merupakan pinjaman dan biaya ventura bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup.

Joint venture receivables represent loan and advance payment of joint venture's expenses paid by the Group.

Piutang ventura bersama tidak dikenakan bunga. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan akan dilunasi pada saat diminta atau saat proyek selesai.

Joint venture receivables were not subject to interest. These accounts have no collateral and are repayable on demand or when project completed.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai piutang ventura bersama tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the provision for impairment of joint ventures receivables is adequate to cover loss on uncollectible receivables.

Lihat Catatan 36 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 36 for details of related party balances and transactions.

7. PIUTANG RETENSI / *7. RETENTION RECEIVABLES*

	2024	2023	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	180,670	155,607	*Rupiah*
Dolar AS	5,238	-	*US Dollar*
	185,908	155,607	
Provisi atas penurunan nilai	(44,429)	(44,430)	*Provision for impairment*
Sub-jumlah	141,479	111,177	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 36d)			*Related parties (Note 36d)*
Rupiah	280,710	236,967	*Rupiah*
Provisi atas penurunan nilai	(58,907)	(59,724)	*Provision for impairment*
Sub-jumlah	221,803	177,243	*Sub-total*
Jumlah piutang retensi, bersih	363,282	288,420	*Total retention receivables, net*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(178,822)	(191,766)	*Current portion*
Bagian tidak lancar	184,460	96,654	*Non-current portion*

7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)

Mutasi provisi atas penurunan nilai piutang retensi Grup adalah sebagai berikut:

***7. RETENTION RECEIVABLES** (continued)*

The movements in the Group's provision for impairment of retention receivables are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	104,154	82,002	*Beginning balance*
(Pemulihan)/penambahan, bersih	(818)	22,152	*(Recovery)/addition, net*
Saldo akhir	103,336	104,154	*Ending balance*

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai piutang retensi cukup untuk menutupi kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang retensi tersebut di kemudian hari.

Management believes that the provision for impairment of retention receivables is adequate to cover loss on uncollectible of retention receivables in the future.

Lihat Catatan 36 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 36 for details of related party balances and transactions.

8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA

Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja atas pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

8. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

Details of gross amounts due from customers for construction in progress are as follows:

	2024	2023	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	555,744	712,675	*Rupiah*
Dolar AS	16,577	1,645	*US Dollar*
	572,321	714,320	
Provisi atas penurunan nilai	(48,440)	(40,196)	*Provision for impairment*
	523,881	674,124	
Pihak berelasi (Catatan 36e)			*Related parties (Note 36e)*
Rupiah	2,819,781	1,763,222	*Rupiah*
Dolar AS	249,667	283,965	*US Dollar*
	3,069,448	2,047,187	
Provisi atas penurunan nilai	(179,268)	(180,157)	*Provision for impairment*
	2,890,180	1,867,030	
Jumlah	3,414,061	2,541,154	*Total*

8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan) / *8. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS (continued)*

Mutasi provisi atas penurunan nilai tagihan bruto Grup adalah sebagai berikut:

The movements in the Group's provision for impairment of gross amounts due from customers are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	220,353	77,263	*Beginning balance*
Penambahan, bersih	7,355	143,090	*Addition, net*
Saldo akhir	227,708	220,353	*Ending balance*

Lihat Catatan 36 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 36 for details of related party balances and transactions.

9. PIUTANG LAIN-LAIN / *9. OTHER RECEIVABLES*

	2024	2023	
Pihak ketiga			*Third parties*
Lembaga Pengelola Investasi	5,316,033	4,885,634	*Indonesia Investment Authority*
PT Cempaka Surya Kencana ("CSK")	1,350,102	1,350,102	*PT Cempaka Surya Kencana ("CSK")*
Lain-lain	381,495	339,055	*Others*
	7,047,630	6,574,791	
Provisi atas penurunan nilai	(1,017,017)	(952,856)	*Provision for impairment*
Sub-jumlah	6,030,613	5,621,935	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 36f)	701,667	608,722	*Related parties (Note 36f)*
Provisi atas penurunan nilai	(565,299)	(544,417)	*Provision for impairment*
Sub-jumlah	136,368	64,305	*Sub-total*
Jumlah piutang lain-lain, bersih	6,166,981	5,686,240	*Total other receivables, net*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(5,500,833)	(141,112)	*Current portion*
Bagian tidak lancar	666,148	5,545,128	*Non-current portion*

Mutasi provisi atas penurunan nilai piutang lain-lain Grup adalah sebagai berikut:

The movements in the Group's provision for impairment of other receivables are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	1,497,273	581,086	*Beginning balance*
Penambahan, bersih	85,043	916,187	*Addition, net*
Saldo akhir	1,582,316	1,497,273	*Ending balance*

Penambahan provisi atas penurunan nilai piutang lain-lain telah dimasukkan ke dalam "beban penurunan nilai piutang".

The addition of provision for impairment of other receivables have been included in "impairment of receivables".

9. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Pada bulan Desember 2019, Perusahaan menyetujui penambahan setoran modal untuk HKR, entitas anak sebesar Rp 256 miliar untuk pengembangan kawasan Jalan Tol Trans Sumatera ("JTTS"), yang terdiri dari pembelian lahan Bakauheni dan Kalianda masing-masing sebesar Rp 136 miliar dan Rp 27 miliar dari PT Sanitarindo Tangsel Jaya ("STJ") serta lahan Indralaya sebesar Rp 93 miliar dari berbagai individu.

Pada bulan Oktober 2021, berdasarkan hasil audit investigatif oleh BPKP dan pertimbangan hukum Kejaksaan Agung, Perusahaan dan STJ sepakat untuk membatalkan seluruh transaksi jual beli lahan Bakauheni dan Kalianda. STJ akan mengembalikan kepada Perusahaan sejumlah Rp 205 miliar dengan cara angsuran bertahap. Nilai pengembalian dikurangi cadangan penurunan nilai dicatat sebagai piutang lain-lain lancar.

Saldo bagian tidak lancar sebesar Rp 654 miliar terdiri dari transaksi dengan PT Cempaka Surya Kencana ("CSK") terkait investasi pada instrumen utang (Catatan 41d).

Berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing pihak pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai cadangan kerugian piutang lain-lain telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas jumlah piutang lain-lain tidak tertagih.

Lihat Catatan 36 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

***9. OTHER RECEIVABLES** (continued)*

In December 2019, the Company approved additional paid-in capital for HKR, a subsidiary amounting to Rp 256 billion for the development of the Trans Sumatera Toll Road ("JTTS") area, which consists of the purchase of Bakauheni and Kalianda lands for Rp 136 billion and Rp 27 billion, respectively from PT Sanitarindo Tangsel Jaya ("STJ") and Indralaya for Rp 93 billion from various individuals.

In October 2021, based on the results of an investigative audit by BPKP and Attorney General's Office legal considerations, the Company and STJ agreed to cancel all sales and purchase transactions for the Bakauheni and Kalianda lands. STJ will return to the Company a total of Rp 205 billion in gradual installments. The amount to be returned less allowance for impairment was booked as other receivables-current.

Balance of non-current portion amounting to Rp 654 billion consist of transaction with PT Cempaka Surya Kencana ("CSK") related to investment in debt instrument (Note 41d).

Based on the status review of the individual party at the end of the year, the Group management believes that the allowance for impairment of other receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible other receivables.

Refer to Note 36 for details of related party balances and transactions.

10. PERSEDIAAN / ***10. INVENTORIES***

	2024	2023	
Bahan baku	229,070	398,639	*Raw material*
Barang jadi	88,118	59,055	*Finished goods*
Bahan pembantu	39,496	34,640	*Supplies*
Barang dalam proses	5,004	8,429	*Work in process*
	361,688	500,763	
Dikurangi:			*Less:*
Provisi atas penurunan nilai	(1,669)	(5,489)	*Provision for impairment*
	360,019	495,274	

Beberapa persediaan digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 21).

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" sebesar Rp 3.798.206 (2023: Rp 3.110.813).

Certain inventories are used as collateral for bank loans (Note 21).

The cost of inventories recognised as expense and included in "cost of revenue" amounted to Rp 3,798,206 (2023: Rp 3,110,813).

11. ASET REAL ESTAT / *11. REAL ESTATE ASSETS*

Grup memiliki properti hunian berupa bangunan jadi, properti dalam konstruksi dan tanah untuk dikembangkan dengan rincian sebagai berikut:

The Group owns residential properties consist of buildings, properties under construction and lands for development detailed as follows:

	2024	2023	
Properti hunian dan kios	1,145,053	1,126,012	*Residential and kiosk properties*
Properti dalam konstruksi	496,038	495,558	*Properties under construction*
Tanah untuk dikembangkan	1,202,270	1,082,877	*Land for development*
	2,843,361	2,704,447	
Provisi atas penurunan nilai			*Provision for impairment*
Properti hunian dan kios	(522,686)	(455,487)	*Residential and kiosk properties*
Properti dalam konstruksi	(280,983)	(283,252)	*Properties under construction*
Tanah untuk dikembangkan	(349,426)	(341,255)	*Land for development*
	(1,153,095)	(1,079,994)	
	1,690,266	1,624,453	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(622,367)	(670,525)	*Current portion*
Bagian tidak lancar	1,067,899	953,928	*Non-current portion*

Mutasi aset real estat adalah sebagai berikut:

The movements of the real estate assets are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	2,704,447	2,985,963	*Beginning balance*
Penambahan	152,353	25,927	*Addition*
Reklasifikasi menjadi uang muka dan pembayaran di muka karena pembatalan pembelian	-	(202,128)	*Reclassification to advance and prepayment due to purchase cancellation*
Realisasi ke beban pokok pendapatan	(13,439)	(105,315)	*Realisation to cost of revenue*
Saldo akhir	2,843,361	2,704,447	*Ending balance*

Mutasi provisi aset real estat adalah sebagai berikut:

The movements of the real estate assets' provision are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	1,079,944	813,483	*Beginning balance*
Penambahan	73,151	266,511	*Addition*
Saldo akhir	1,153,095	1,079,994	*Ending balance*

11. ASET REAL ESTAT (lanjutan) / ***11. REAL ESTATE ASSETS*** *(continued)*

Properti hunian dan kios terdiri atas beberapa proyek sebagai berikut: / *Residential and kiosk properties consisted of several projects as follows:*

	2024	2023	
H Residence Kemayoran	284,042	335,705	*H Residence Kemayoran*
H Tower Kuningan	118,654	140,744	*H Tower Kuningan*
The Grove Epicentrum	48,091	48,488	*The Grove Epicentrum*
The Enviro	34,548	16,839	*The Enviro*
H Residence Sawangan	49,943	41,546	*H Residence Sawangan*
Pluit Sea View	36,437	34,808	*Pluit Sea View*
H Residence Cawang	14,089	14,138	*H Residence Cawang*
Pamulang Square	5,692	5,692	*Pamulang Square*
Kubikahomy Serpong	3,419	3,616	*Kubikahomy Serpong*
Casablanca East Residence	2,860	2,860	*Casablanca East Residence*
H Mansion Pejaten	1,641	1,619	*H Mansion Pejaten*
Beberapa unit hunian dan kios lainnya siap jual	22,951	24,470	*Other several units of residential and kiosk ready for sale*
	622,367	670,525	

Properti dalam konstruksi terdiri atas beberapa proyek sebagai berikut: / *Properties under construction consisted of several projects as follows:*

	2024	2023	
H City Sawangan	146,154	145,674	*H City Sawangan*
H Residence Sentul	68,901	66,632	*H Residence Sentul*
	215,055	212,306	

Properti dalam konstruksi merupakan biaya perolehan properti hunian berupa rumah tinggal dan apartemen yang masih dalam proses konstruksi. / *Properties under construction represent acquisition cost of residential properties which consist of houses and apartments under construction.*

Tanah untuk dikembangkan terdiri atas beberapa proyek berikut: / *Land for development consisted of several projects as follows:*

	2024	2023	
Simatupang	205,158	204,448	*Simatupang*
Sapphire	193,302	199,864	*Sapphire*
Indralaya	128,485	-	*Indralaya*
Sawangan	116,241	126,046	*Sawangan*
Southern Balikpapan	66,503	66,500	*Southern Balikpapan*
Grand Serang	53,078	54,015	*Grand Serang*
H Mansion Balikpapan	23,156	23,156	*H Mansion Balikpapan*
H Residence Cengkareng	22,817	23,489	*H Residence Cengkareng*
Plemburan	13,010	13,010	*Plemburan*
Lainnya	31,094	31,094	*Others*
	852,844	741,622	

Beberapa aset real estat digunakan sebagai jaminan untuk utang bank (Catatan 21). / *Several real estate assets are used as collateral for bank loans (Note 21).*

12. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *12. ADVANCES AND PREPAYMENTS*

	2024	2023	
Uang muka			*Advance payment*
Subkontraktor	340,987	45,151	*Subcontractors*
Investasi	264,343	345,679	*Investments*
Pemasok	80,520	102,146	*Suppliers*
Lain-lain	70,072	29,784	*Others*
	755,922	522,760	
Biaya dibayar dimuka			*Prepayments*
Biaya kontrak	393,893	325,098	*Contract costs*
Upfront fee atas pinjaman	100,643	100,643	*Upfront fee on borrowings*
Asuransi	98,124	75,022	*Insurance*
Bank garansi	13,097	18,310	*Bank guarantees*
Sewa	10,330	8,200	*Rent*
Lain-lain	51,551	80,160	*Others*
	667,638	607,433	
	1,423,560	1,130,193	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(438,616)	(350,128)	*Current portion*
Bagian tidak lancar	984,944	780,065	*Non-current portion*

Saldo bagian tidak lancar merupakan uang muka untuk akuisisi investasi dalam saham dan tanah untuk pengembangan dan biaya dibayar dimuka untuk biaya transaksi dan lainnya sebagai berikut:

Balance of non-current portion represents advance for acquisition of investments in shares and land for development and prepayment for transactions cost and others as follows:

	2024	2023	
Uang muka jangka panjang:			*Advance payments non-current portion of:*
- Investasi pada saham:			*Investments in shares:* -
Konsorsium untuk mengoptimalisasi properti PT Jiwasraya	193,137	193,137	*Consortium to optimize the property of PT Jiwasraya*
- Subkontraktor	239,317	-	*Subcontractors* -
- Tanah untuk pengembangan	-	117,671	*Land for development* -
- Lain-lain	72,121	37,512	*Others* -
Biaya dibayar di muka jangka panjang:			*Non-current portion prepayments:*
- Biaya kontrak	372,441	314,849	*Contract costs* -
- *Upfront fee* pinjaman	100,643	100,643	*Upfront fee borrowings* -
- Bank garansi	7,285	16,253	*Bank guarantees* -
	984,944	780,065	

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	2024	2023	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Lebih bayar tahun fiskal 2024	19,620	-	*2024 fiscal year overpayment*
Lebih bayar tahun fiskal 2023	31,116	39,372	*2023 fiscal year overpayment*
Lebih bayar tahun fiskal 2022	1,897	33,303	*2022 fiscal year overpayment*
Lebih bayar tahun fiskal 2021	9,063	8,945	*2021 fiscal year overpayment*
Lebih bayar tahun fiskal 2020	16,593	16,592	*2020 fiscal year overpayment*
	78,289	98,212	
Pajak lain-lain:			*Other taxes:*
Pajak pertambahan nilai ("PPN")	2,131,807	1,175,862	*Value added tax ("VAT")*
PPN restitusi - 2023	435,205	-	*VAT restitution - 2023*
PPN restitusi - 2022	122,272	650,134	*VAT restitution - 2022*
PPN restitusi - 2021	-	334,475	*VAT restitution - 2021*
PPN restitusi - 2020	-	9,812	*VAT restitution - 2020*
PPN restitusi - 2019	-	-	*VAT restitution - 2019*
Pajak lainnya	15,734	37,875	*Others*
	2,705,018	2,208,158	
	2,783,307	2,306,370	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(694,479)	(1,581,155)	*Current portion*
Bagian tidak lancar	2,088,828	725,215	*Non-current portion*

b. Utang pajak / *b. Tax payables*

	2024	2023	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 29	88,113	24,344	*Article 29*
Pajak lain-lain:			*Other taxes:*
PPN Wajib Pungut	388,562	215,733	*VAT Collector*
Pasal 21	14,634	26,421	*Article 21*
Pasal 22	6,103	5,091	*Article 22*
Pasal 23	12,196	9,938	*Article 23*
Pasal 4(2)	179,434	170,027	*Article 4(2)*
	600,929	427,210	
	689,042	451,554	

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	2024	2023	
Beban pajak kini	108,424	51,064	*Current tax expense*
Beban pajak tangguhan	110,833	220,583	*Deferred tax expense*
	219,257	271,647	

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

***13. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expenses** (continued)*

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax is as follows:

	2024	**2023**	
Laba sebelum pajak penghasilan - konsolidasian	2,985,779	2,144,203	*Profit before income tax - consolidated*
Dikurangi:			*Less:*
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan - porsi final	2,218,351	(390,427)	*Profit/(loss) before income tax - final portion*
Laba sebelum pajak penghasilan - porsi non final	767,428	2,534,630	*Profit before income tax - non-final portion*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak efektif	168,834	557,619	*Tax calculated at effective tax rates*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	143,907	263,482	*Non-deductible expenses*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(99,535)	(38,526)	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Kerugian pajak yang tidak diakui	6,051	-	*Unrecognised tax losses*
Rugi fiskal dimanfaatkan	-	(510,928)	*Tax losses utilised*
Beban pajak penghasilan konsolidasi	219,257	271,647	*Consolidated income tax expenses*

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

	1 Januari/ *January* 2024	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/(charged) to profit or loss***	**Dibebankan ke pendapatan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income***	**31 Desember/ *December* 2024**	
Perusahaan:					***The Company:***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Perbedaan antara nilai buku bersih aset takberwujud komersial dan fiskal	(686,659)	(167,540)	-	(854,199)	*Difference between financial reporting and tax net book values of intangible assets*
Perbedaan antara nilai pencadangan biaya perbaikan dan pemeliharaan jalan tol komersial dan fiskal	163,065	53,948	-	217,013	*Difference between financial reporting and tax of toll road repairs and maintenance expenses*
	(523,594)	(113,592)	-	(637,186)	
Entitas anak:					***Subsidiaries:***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Lain-lain	(9,050)	(52,410)	-	(61,460)	*Others*

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Grup belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki aset pajak tangguhan yang tidak diakui terkait rugi pajak sejumlah Rp 661 miliar yang akan kadaluwarsa antara tahun 2026 hingga 2027.

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-136 Tahun 2024 (PMK-136) telah disahkan di Indonesia, yurisdiksi dimana Grup didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Pelaporan pertama adalah untuk tahun pajak yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2027. Karena PMK-136 belum efektif pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki eksposur pajak saat ini yang terkait. Sesuai dengan amandemen PSAK No. 212, "Pajak Penghasilan" yang diterbitkan Desember 2023, Grup tidak mengakui maupun mengungkapkan informasi mengenai aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

Grup sedang dalam proses menilai apakah Grup berada dalam cakupan model Pilar Dua dan apakah ada dampak terhadap PMK-136 ketika peraturan tersebut mulai berlaku. Oleh karena kompleksitas dalam penerapan PMK-136, dampak kuantitatif dari penerapan peraturan belum dapat diestimasi secara wajar.

e. Ketetapan pajak

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah ketetapan pajak (tanpa adanya klaim restitusi pajak terkait yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian) yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut:

***13. TAXATION** (continued)*

***d. Deferred tax liabilities** (continued)*

In these consolidated financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Group has not yet submitted its corporate income tax returns.

As at 31 December 2024, the Group has deferred tax assets which have not been recognised in respect of total tax losses of Rp 661 billion which will expired between 2026 to 2027.

The Minister of Finance Regulatio No. PMK-136 Year 2024 (PMK-136) was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Group is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025. The first is for the fiscal year ending on 31 December 2025 which will be due by 30 June 2027. Since the PMK-136 was not effective at the reporting date, the Group has no related current tax exposure. As allowed by the amendments to PSAK No. 212, "Income taxes" issued in December 2023, the Group does not recognise and disclose information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes.

The Group is in the process of assessing whether the Group is within the scope of Pillar Two model and if there is any exposure to the PMK-136 for when it comes into effect. Due to the inherent complexities in applying the PMK-136, the quantitative impact of the enacted regulation is not yet reasonably estimable.

e. Tax assessments

As at 31 December 2024 and 2023, the amount of tax assessments (with no associated claims for tax refunds reported on the consolidated statement of financial position) that were in process of objection and appeal were as follows:

	2024	2023	
Pajak penghasilan badan	4,857,834	4,857,834	*Corporate income tax*

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) untuk berbagai jenis pajak tahun fiskal 2016 dan 2017 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp 4.901.543. Perusahaan telah menyetujui kurang bayar pajak lain-lain sebesar Rp 43.709 dan dicatat sebagai beban lain-lain pada laba rugi tahun 2020. Sehingga kurang bayar PPh Badan sebesar Rp 4.857.834 masih dalam sengketa. Pada bulan Februari dan Maret 2021, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak terkait sengketa PPh Badan yang jumlahnya sebesar Rp 4.857.834.

Sengketa terhadap ketetapan tersebut terkait dengan penerimaan aset tak berwujud atas hak pengusahaan jalan tol Jakarta Outer Ring Road Section S (JORRS) dan Akses Tanjung Priok (ATP). Pemeriksa menganggap aset ini sebagai hibah pemerintah dan diakui sebagai objek pajak penghasilan badan. Perusahaan tidak setuju dengan ketetapan tersebut karena bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Badan. Kantor Pajak menolak keberatan dan Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada bulan Mei 2022.

Pada bulan Juni 2024, Pengadilan Pajak menerima banding dari Perusahaan dan kurang bayar sebesar Rp 4.857.834 menjadi nihil. Pada bulan Oktober 2024 pihak Kantor Pajak melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas keputusan hakim Pengadilan Pajak pada sidang banding JORRS dan ATP. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada keputusan dari Mahkamah Agung.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

***13. TAXATION** (continued)*

***e. Tax assessments** (continued)*

In December 2020 and January 2021, the Company received Tax Underpayment Assessment Letters (SKPKB) for various types of taxes for the 2016 and 2017 fiscal years, which indicated an underpayment of Rp 4,901,543. The Company agreed to the underpayment of other taxes amounting to Rp 43,709, which was recorded as other expenses in the 2020 income statement. Therefore, an underpayment of Corporate Income Tax amounting to Rp 4,857,834 remained under dispute. In February and March 2021, the Company submitted an objection letter to the Tax Office regarding the Corporate Income Tax dispute of Rp 4,857,834.

The dispute concerned the receipt of intangible assets related to the concession rights for the Jakarta Outer Ring Road Section S (JORRS) and Tanjung Priok Access (ATP). The tax auditors considered these assets as government grants and treated them as taxable corporate income. The Company disagreed with this assessment on the grounds that these were not taxable corporate income. The Tax Office rejected the objection and the Company filed an appeal to the Tax Court in May 2022.

In June 2024, the Tax Court accepted the appeal from the Company, resulting in the underpayment of Rp 4,857,834 being nullified. In October 2024, the Tax Office filed for a Judicial Review (PK) with the Supreme Court regarding the Tax Court's decision on the JORRS and ATP appeal case. As of the issuance dateof these consolidated financial statements, there has been no decision from Supreme Court.

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, Companies which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Taxation may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

14. PROPERTI INVESTASI / *14. INVESTMENT PROPERTIES*

	2024	2023	
Saldo awal	229,367	247,077	*Beginning balance*
Kenaikan/(penurunan) nilai wajar	30,187	(17,710)	*Increase/(decrease) in fair value*
Saldo akhir	259,554	229,367	*Ending balance*

Properti investasi terdiri dari: / *Investment properties consist of:*

	2024	2023	
Tanah di Simatupang	253,954	223,767	*Land in Simatupang*
Lain-lain	5,600	5,600	*Others*
	259,554	229,367	

Nilai wajar properti investasi tahun 2024 dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK. Laporan penilai terakhir adalah tanggal 28 Februari 2025 dan 13 Maret 2025 untuk properti investasi per 31 Desember 2024.

The fair value of investment properties in 2024 is based on calculation of Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan, the independent appraiser registered in OJK. The latest appraisal reports were dated 28 February 2025 and 13 March 2025 for investment properties as of 31 December 2024.

Hierarki nilai wajar Tingkat 2 dari properti investasi dihitung dengan menggunakan pendekatan data pasar. Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter berdasarkan perbandingan harga pasar properti sejenis. Harga pasar yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti jenis dan hak yang melekat pada properti, lokasi, karakteristik fisik, ukuran aset dan penggunaan aset.

The Level 2 fair value hierarchy of investment properties is calculated using the market data approach. The most significant input into this valuation approach is the price per square meter assumption which are based on the comparison of market price of similar properties. The approximate market prices are adjusted for differences in the key attributes such as the type and rights on the property, location, physical characteristics, size of assets and use of assets.

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *15. INVESTMENT IN ASSOCIATES*

Rincian penyertaan saham pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

A summary of the investments in associates is as follows:

Nama entitas/ *Entity name*	Domisili/ *Domicile*	Persentase kepemilikan efektif/ *Percentage of effective ownership*	Nilai buku/*Carrying value* 2024	2023
PT Hutama Prima ("HP")	Jakarta	30	45,893	45,893
Jumlah/ *Total*			45,893	45,893

Pada tahun 2024 dan 2023, bagian Grup atas laba masing-masing sebesar nihil, nilai tersebut dibukukan sebagai bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama.

In 2024 and 2023, the Group shares of profit for the year amounted to nil, respectively which recorded in part of shares of net profits associates and joint ventures.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak terpulihkannya investasi.

Management believes that the provision for impairment of investment in associate is adequate to cover loss on unrecovered investment.

16. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA / *16. INVESTMENT IN JOINT VENTURES*

Investasi pada ventura bersama merupakan bagian kontrak pengaturan atau pengendalian bersama Grup pada berbagai proyek dengan kisaran bagi hasil aset neto antara 20% sampai dengan 80%.

Investment in joint venture is part of a contract arrangement or joint control of the Group on various projects with share in the results and the net assets ranging between 20% to 80%.

Rincian penyertaan pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investments in joint ventures are as follows:

Nama entitas/ *Entity name*	Proyek/ *Project*	Domisili/ *Domicile*	Persentase kepemilikan efektif/ *Percentage of effective ownership*	Nilai buku/*Carrying value* 2024	2023
KSO Hutama - Modern - BCK	Tol IKN Pulau Balang-Simpangriko	Kalimantan Timur	65	102,466	13,370
KSO Hutama - WIKA – BAP	Tol Bayung Lencir-Tempino-Jambi	Jambi	60	72,343	68,390
KSO Hutama - Adhi - Abipraya	Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Kariangau	Kalimantan Timur	38	65,783	54,612
KSO HK - BRP - BNL	Bendungan Bulango Ulu	Gorontalo	70	59,289	5,636
KSO Hutama - Adhi - Nindya - Abipraya	Jalan Tol IKN Seksi - 2	Kalimantan Timur	33	43,609	-
KSO HK-Jakon	Bendungan Way Apu	Kab Buru Maluku	70	29,949	25,432
KSO HK-Bangunnusa	Bendungan Maninting	Lombok	80	25,715	14,410
KSO Hutama - SMCC	MRT CP-203	Jakarta	35	25,642	6,478
KSO HK - SAC Nusantara	Bendungan Cijurey	Jawa Barat	70	22,866	4,676
Lain-lain di bawah Rp 20 miliar/ *Others below Rp 20 billion*				185,051	66,881
Jumlah/*Total*				632,713	259,885

Ringkasan mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Summary of movements in investment in joint ventures are as follows:

	2024	2023	
Nilai buku awal tahun	259,885	151,936	*Beginning carrying value*
Penambahan investasi	212,064	-	*Addition of investment*
Bagian Grup atas laba tahun berjalan	452,433	257,715	*Group's share of profit for the current year*
Distribusi laba yang diterima Grup	(288,904)	(132,848)	*Profit distribution received by the Group*
Provisi penurunan nilai	(2,765)	(16,918)	*Provision for impairment*
Jumlah	632,713	259,885	*Total*

17. ASET TETAP / *17. FIXED ASSETS*

	2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai revaluasi							***Revaluation cost***
Pemilikan langsung:							*Direct ownership:*
Tanah	1,624,766	-	-	-	(44,144)	1,580,622	*Land*
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan langsung:							*Direct ownership:*
Bangunan	1,155,650	-	(1,238)	16,334	-	1,170,746	*Building*
Perlengkapan proyek	2,149,727	45,174	(5,264)	74,958	-	2,264,595	*Project equipment*
Perlengkapan kantor	97,784	204	(246)	-	-	97,742	*Office equipment*
Kendaraan	408,724	2,151	(77,128)	51,558	-	385,305	*Vehicles*
	5,436,651	47,529	(83,876)	142,850	(44,144)	5,499,010	
Aset dalam pembangunan	25,526	15,502	(1,398)	(17,980)	-	21,650	*Assets under construction*
Aset hak guna							*Right of use assets:*
Mesin dan peralatan berat	616,556	54,174	-	(73,312)	-	597,418	*Machinery and heavy equipment*
Bangunan	177,273	5,667	-	-	-	182,940	*Building*
Kendaraan	94,548	84,177	(16,963)	(51,558)	-	110,204	*Vehicles*
	888,377	144,018	(16,963)	(124,870)	-	890,562	
	6,350,554	207,049	(102,237)	-	(44,144)	6,411,222	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung:							*Direct ownership:*
Bangunan	(284,327)	(37,024)	997	-	-	(320,354)	*Building*
Perlengkapan proyek	(1,521,833)	(149,445)	2,376	(48,662)	-	(1,717,564)	*Project equipment*
Perlengkapan kantor	(88,950)	(6,630)	-	-	-	(95,580)	*Office equipment*
Kendaraan	(288,956)	(17,160)	73,920	(37,123)	-	(269,319)	*Vehicles*
	(2,184,066)	(210,259)	77,293	(85,785)	-	(2,402,817)	
Aset hak guna:							*Right of use assets:*
Mesin dan peralatan berat	(579,942)	(22,078)	-	48,662	-	(553,358)	*Machinery and heavy equipment*
Bangunan	(50,190)	(10,882)	12,812	-	-	(48,260)	*Building*
Kendaraan	(76,260)	(47,811)	-	37,123	-	(86,948)	*Vehicles*
	(706,392)	(80,771)	12,812	85,785	-	(688,566)	
	(2,890,458)	(291,030)	90,105	-	-	(3,091,383)	
Nilai buku bersih	3,460,096					3,319,839	***Net book value***

17. ASET TETAP (lanjutan) / *17. FIXED ASSETS (continued)*

	2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation cost***
Pemilikan langsung:							*Direct ownership:*
Tanah	1,533,024	-	(12,786)	-	104,528	1,624,766	*Land*
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan langsung:							*Direct ownership:*
Bangunan	1,185,375	-	-	(29,725)	-	1,155,650	*Building*
Perlengkapan proyek	1,663,606	5,548	(22,186)	502,759	-	2,149,727	*Project equipment*
Perlengkapan kantor	50,361	911	-	46,512	-	97,784	*Office equipment*
Kendaraan	240,653	1,541	(24,131)	190,661	-	408,724	*Vehicles*
	4,673,019	8,000	(59,103)	710,207	104,528	5,436,651	
Aset dalam pembangunan	17,979	23,267	-	(15,720)	-	25,526	*Assets under construction*
Aset hak guna							*Right of use assets:*
Mesin dan peralatan berat	1,159,993	151,050	-	(694,487)	-	616,556	*Machinery and heavy equipment*
Bangunan	139,584	37,689	-	-	-	177,273	*Building*
Kendaraan	79,800	14,748	-	-	-	94,548	*Vehicles*
	1,379,377	203,487	-	(694,487)	-	888,377	
	6,070,375	234,754	(59,103)	-	104,528	6,350,554	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung:							*Direct ownership:*
Bangunan	(253,196)	(31,131)	-	-	-	(284,327)	*Building*
Perlengkapan proyek	(1,215,397)	(176,979)	22,186	(151,643)	-	(1,521,833)	*Project equipment*
Perlengkapan kantor	(68,710)	(20,240)	-	-	-	(88,950)	*Office equipment*
Kendaraan	(175,366)	(64,042)	24,131	(73,679)	-	(288,956)	*Vehicles*
	(1,712,669)	(292,392)	46,317	(225,322)	-	(2,184,066)	
Aset hak guna:							*Right of use assets:*
Mesin dan peralatan berat	(709,491)	(95,773)	-	225,322	-	(579,942)	*Machinery and heavy equipment*
Bangunan	(34,856)	(15,334)	-	-	-	(50,190)	*Building*
Kendaraan	(63,989)	(12,271)	-	-	-	(76,260)	*Vehicles*
	(808,336)	(123,378)	-	225,322	-	(706,392)	
	(2,521,005)	(415,770)	46,317	-	-	(2,890,458)	
Nilai buku bersih	3,549,370					3,460,096	***Net book value***

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses for the years ended 31 December 2024 and 2023 were allocated as follows:

	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 33)	267,430	388,081	*Cost of revenue (Note 33)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 34)	23,600	27,689	*General and administrative expenses (Note 34)*
	291,030	415,770	

17. ASET TETAP (lanjutan)

Cadangan revaluasi aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dialokasikan sebagai berikut:

***17. FIXED ASSETS** (continued)*

Fixed assets revaluation reserve for the years ended 31 December 2024 and 2023 were allocated as follows:

	2024	2023	
Nilai revaluasi	1,580,622	1,624,766	*Revaluation value*
Harga perolehan tanah	(883,982)	(883,982)	*Land acquisition cost*
Diakui dalam laba rugi	44,144	-	*Recognised in profit or loss*
	740,784	740,784	

Penilaian nilai wajar tanah yang dimiliki Grup pada 2023 telah dilakukan oleh KJPP Febriman Siregar & Rekan dengan penilai independen yaitu Febriman Muda Siregar, ST., MM., MAPPI, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan dengan penilai independen yaitu Muhammad Haikal, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI, dan KJPP Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan dengan penilai independen Ir. H. Zainal Arifin, M. Ec. Dev., MAPPI yang telah teregistrasi pada OJK. Hierarki nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan data pasar. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset, antara lain:

Valuation to determine the fair value of the Group's lands in 2023 was performed by KJPP Febriman Siregar & Rekan with an independent valuers, namely Febriman Muda Siregar, ST., MM., MAPPI KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan with an independent valuers, namely Muhammad Haikal, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI, and KJPP Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan with an independent valuers, namely Ir. H. Zainal Arifin, M. Ec. Dev., MAPPI which registered in OJK. The Level 2 fair value hierarchy of land is calculated using the market data approach. Elements used in data comparison process to determine assets' fair value were as follows:

1. Lokasi;
2. Jenis surat tanah;
3. Kondisi pembiayaan;
4. Kondisi transaksi;
5. Kondisi pasar;
6. Karakteristik fisik;
7. Karakteristik ekonomi;
8. Penggunaan.

1. *Location;*
2. *Type of land right;*
3. *Funding condition;*
4. *Transaction condition;*
5. *Market condition;*
6. *Physical characteristics;*
7. *Economic characteristics;*
8. *Utilization.*

Aset tetap Grup berupa bangunan gedung, perlengkapan proyek, perlengkapan kantor serta kendaraan bermotor telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 6.593.159. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Fixed assets of the Group in the form of building, project equipment, office equipment and motor vehicles are insured with insurance coverage amounting to Rp 6,593,159. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 21).

Certain fixed assets used as collateral for bank loans (Note 21).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

As at 31 December 2024, Management believes that there was no indication of impairment in the fixed assets value.

18. ASET TAKBERWUJUD – HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL

Aset hak pengusahaan jalan tol merupakan hak konsesi yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan dan HMW, melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT") antara Perusahaan dan Badan Pengelola Jalan Tol ("BPJT") berupa pengusahaan jalan tol dengan masa konsesi antara 36 sampai 50 tahun. Rincian aset konsesi Grup adalah sebagai berikut:

18. INTANGIBLE ASSETS – TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS

Asset of toll road concession rights represent concession rights granted by the Government of Republic of Indonesia to the Company and HMW, through Toll Road Concession Right Agreement ("PPJT") between the Company and Toll Road Regulatory Agency ("BPJT") in the form of toll road concessions with the period of 36 to 50 years. The detail of the Group's concession assets is as follows:

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya Perolehan						***Acquisition cost***
Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Jagorawi - Pondok Pinang ("JORR S")	7,404,960	-	-	-	7,404,960	*Jakarta Outer Ring Road Section Jagorawi - Pondok Pinang ("JORR S")*
Jalan Tol Akses Tanjung Priok ("ATP")	6,264,869	-	-	-	6,264,869	*Tanjung Priok Access Toll Road ("ATP")*
Jalan Tol Trans Sumatera ("JTTS"), ruas:						*Trans Sumatera Toll Road ("JTTS"), section:*
- Palembang-Indralaya	3,264,266	-	-	-	3,264,266	*Palembang-Indralaya -*
- Terbanggi Besar-Pematang Panggang	3,918,692	-	-	-	3,918,692	*Terbanggi Besar - Pematang Panggang*
- Pematang Panggang-Kayu Agung	8,428,217	-	-	-	8,428,217	*Pematang Panggang - Kayu Agung*
- Pekanbaru-Dumai	16,614,642	401,244	-	-	17,015,886	*Pekanbaru-Dumai -*
- Padang-Pekanbaru seksi Pekanbaru-Bangkinang	4,859,231	152,728	-	-	5,011,959	*Padang-Pekanbaru - section Pekanbaru Bangkinang*
- Sigli-Banda Aceh Seksi 2-6	5,493,739	-	-	2,280,440	7,774,179	*Sigli-Banda Aceh - Section 2-6*
- Binjai-Langsa seksi 1 dan 2	810,526	-	-	5,071,430	5,881,956	*Binjai-Langsa - Section 1 and 2*
- Lubuk Linggau-Bengkulu seksi Tb Penanjung-Bengkulu	4,170,639	179,600	-	-	4,350,239	*Lubuk Linggau-Bengkulu - Tb Penanjung-Bengkulu section*
- Sp Indralaya-muara enim section Sp Indralaya-Prabumulih	-	-	-	12,375,044	12,375,044	*Sp Indralaya-muara enim - section Sp Indralaya Prabumulih*
- Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat ("KTTP")	-	-	-	9,283,821	9,283,821	*Kuala Tanjung-Tebing - Tinggi-Parapat ("KTTP")*
- Kisaran-Indrapura	-	-	-	2,127,773	2,127,773	Kisaran-Indrapura -
Aset dalam penyelesaian - Jalan Tol Trans Sumatera ("JTTS"), ruas:						*Assets under construction Trans Sumatera Toll Road ("JTTS"), section:*
- Kisaran-Indrapura	2,068,730	59,043	-	(2,127,773)	-	*Kisaran-Indrapura -*
- Sigli-Banda Aceh	5,657,471	1,588,047	-	(2,280,440)	4,965,078	*Sigli-Banda Aceh -*
- Padang-Pekanbaru seksi Bangkinang-Pangkalan	4,449,621	459,509	-	-	4,909,130	*Padang-Pekanbaru - section Bangkinang-Pangkalan*
- Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin	4,959,388	4,219,454	-	-	9,178,842	*Padang-Pekanbaru - Section Padang-Sicincin*
- Simpang Indralaya-Muara Enim	11,499,529	1,847,225	-	(12,375,044)	971,710	*Simpang Indralaya-Muara Enim -*
- Binjai-Langsa	9,405,915	1,532,039	-	(5,071,430)	5,866,524	*Binjai -Langsa -*
- Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat ("KTTP")	11,173,804	941,457	-	(9,283,821)	2,831,440	*Kuala Tanjung-Tebing - Tinggi-Parapat ("KTTP")*
- Rengat – Pekanbaru	427,470	2,471,604	-	-	2,899,074	*Rengat-Pekanbaru -*
- Palembang – Betung	-	6,083,022	-	-	6,083,022	*Palembang–Betung -*
- Ruas lainnya	30,054	-	-	-	30,054	*Other sections -*
	110,901,763	19,934,972	-	-	130,836,735	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
JORR S	(1,714,460)	(208,447)	-	-	(1,922,907)	*JORR S*
JTTS	(950,492)	(288,353)	-	-	(1,238,845)	*JTTS*
ATP	(284,826)	(58,556)	-	-	(343,382)	*ATP*
	(2,949,778)	(555,356)	-	-	(3,505,134)	
Nilai buku bersih	107,951,985				127,331,601	***Net book value***
Akumulasi kerugian penurunan nilai	(220,000)	-	-	-	(220,000)	***Accumulated impairment losses***
	107,731,985				127,111,601	

18. ASET TAKBERWUJUD – HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL (lanjutan) / *18. INTANGIBLE ASSETS – TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS (continued)*

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya Perolehan						***Acquisition cost***
Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Jagorawi - Pondok Pinang ("JORR S")	7,404,960	-	-	-	7,404,960	*Jakarta Outer Ring Road Section Jagorawi - Pondok Pinang ("JORR S")*
Jalan Tol Akses Tanjung Priok ("ATP")	6,264,869	-	-	-	6,264,869	*Tanjung Priok Access Toll Road ("ATP")*
Jalan Tol Trans Sumatera ("JTTS"), ruas:						*Trans Sumatera Toll Road ("JTTS"), section:*
- Medan-Binjai seksi 1, 2 dan 3	2,795,286	2,061	(2,797,347)	-	-	*Medan-Binjai - Section 1, 2, and 3*
- Bakauheni-Terbanggi Besar	14,452,531	190,275	(14,642,806)	-	-	*Bakauheni – Terbanggi - besar*
- Palembang-Indralaya	3,264,631	-	(365)	-	3,264,266	*Palembang-Indralaya -*
- Terbanggi Besar-Pematang Panggang	3,628,312	290,380	-	-	3,918,692	*Terbanggi Besar - Pematang Panggang*
- Pematang Panggang-Kayu Agung	8,428,217	-	-	-	8,428,217	*Pematang Panggang - Kayu Agung*
- Pekanbaru-Dumai	15,928,358	686,284	-	-	16,614,642	*Pekanbaru-Dumai -*
- Padang-Pekanbaru seksi Pekanbaru-Bangkinang	3,875,428	983,803	-	-	4,859,231	*Padang-Pekanbaru - section Pekanbaru Bangkinang*
- Sigli-Banda Aceh Seksi 2,3,4	5,493,739	-	-	-	5,493,739	*Sigli-Banda Aceh - Section 2,3,4*
- Binjai-Langsa seksi 1	810,526	-	-	-	810,526	*Binjai-Langsa - Section 1*
- Lubuk Linggau-Bengkulu seksi Tb Penanjung-Bengkulu	-	-	-	4,170,639	4,170,639	*Lubuk Linggau-Bengkulu - Tb Penanjung-Bengkulu section*
Aset dalam penyelesaian - Jalan Tol Trans Sumatera ("JTTS"), ruas:						*Assets under construction Trans Sumatera Toll Road ("JTTS"), section:*
- Kisaran-Indrapura	1,506,093	562,637	-	-	2,068,730	*Kisaran-Indrapura -*
- Sigli-Banda Aceh	3,771,353	1,886,118	-	-	5,657,471	*Sigli-Banda Aceh -*
- Padang-Pekanbaru seksi Bangkinang-Pangkalan	2,989,892	1,459,729	-	-	4,449,621	*Padang-Pekanbaru - section Bangkinang-Pangkalan*
- Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin	1,996,321	2,963,067	-	-	4,959,388	*Padang-Pekanbaru - Section Padang-Sicincin*
- Lubuk Linggau-Bengkulu seksi Tb Penanjung-Bengkulu	4,060,701	109,938	-	(4,170,639)	-	*Lubuk Linggau-Bengkulu - Tb Penanjung-Bengkulu section*
- Indralaya-Muara Enim	10,023,377	1,476,152	-	-	11,499,529	*Indralaya-Muara Enim -*
- Binjai-Langsa	5,829,828	3,576,087	-	-	9,405,915	*Binjai -Langsa -*
- Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat ("KTTP")	8,046,045	3,127,759	-	-	11,173,804	*Kuala Tanjung-Tebing - Tinggi-Parapat ("KTTP")*
- Rengat – Pekanbaru	59,886	367,584	-	-	427,470	*Rengat-Pekanbaru -*
- Ruas lainnya	73,491	28,563	-	(72,000)	30,054	*Other sections -*
	110,703,844	17,710,437	(17,440,518)	(72,000)	110,901,763	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
JORR S	(1,506,021)	(208,439)	-	-	(1,714,460)	*JORR S*
JTTS	(1,357,569)	(326,228)	733,305	-	(950,492)	*JTTS*
ATP	(226,807)	(58,019)	-	-	(284,826)	*ATP*
	(3,090,397)	(592,686)	733,305	-	(2,949,778)	
Nilai buku bersih	107,613,447				107,951,985	***Net book value***
Akumulasi kerugian penurunan nilai	-	(220,000)	-	-	(220,000)	***Accumulated impairment losses***
	107,613,447				107,731,985	

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 555.356 (31 Desember 2023: Rp 752.182) dan dibebankan sebagai bagian dari beban pengoperasian jalan tol di beban pokok pendapatan untuk ruas jalan tol yang sudah beroperasi secara komersial.

Amortisation of toll road concession rights for the year ended 31 Desember 2024 amounted to Rp 555,356 (31 December 2023: Rp 752,182) and was charged as part of toll road operating expenses in cost of revenue for the toll road section which was already commercially operated.

Selama 2024, Perusahaan telah mengkapitalisasi biaya pinjaman sebesar Rp 833.276 (2023: Rp 1.358.887) atas aset takberwujud.

During 2024, the Company has capitalised borrowing costs amounting to Rp 833,276 (2023: Rp 1,358,887) on intangible assets.

18. ASET TAKBERWUJUD – HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL (lanjutan)

Berdasarkan PPJT, Perusahaan juga mendapatkan Dukungan Konstruksi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan total sepanjang 50 km pada seksi Pematang Siantar – Parapat, 80 km pada ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung dan 34,1 km pada ruas Betung Tempino Jambi. Ruas yang telah beroperasi adalah Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung sejak 2020.

Berdasarkan PPJT no. 10 tanggal 30 September 2024, Grup mendapatkan hak konsesi terkait pengelolaan jalan Tol Ruas Palembang-Betung.

Pada tahun 2023, Nilai tercatat hak pengusahaan jalan tol - ATP telah diturunkan menjadi jumlah terpulihkan melalui pengakuan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 220.000. Kerugian ini telah dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun 2023.

Pada tahun 2024, manajemen menunjuk PT Deloitte Konsultan Indonesia untuk melakukan kajian atas nilai yang dapat diperoleh kembali untuk hak pengusahaan jalan tol. Nilai yang dapat diperoleh kembali unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Berdasarkan penilaian, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada tambahan atau pemulihan kerugian penurunan nilai yang perlu diakui dalam laba rugi.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai pakai pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

18. INTANGIBLE ASSETS – TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS *(continued)*

Based on PPJT, the Company also received Construction Support from the Government of the Republic of Indonesia for 50 km on Pematang Siantar - Parapat section, 80 km on Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung section and 34,1 km on Betung-Tempino-Jambi section. The section has been operated was Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung since 2020.

Based on PPJT no. 10 dated 30 September 2024, Group obtained the concession rights for management of Palembang-Betung toll road section.

In 2023, the carrying amount of toll road concession right - ATP has been reduced to its recoverable amount through recognition of an impairment loss amounted to Rp 220,000. This loss has been included in the profit or loss 2023.

As at 31 December 2024, management has appointed PT Deloitte Konsultan Indonesia to assess the recoverable value of the toll road concession rights. The recoverable amount of CGU is determined based on the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Based on the assessment, management believes that there was no additional or recovery of impairment loss need to be recognised in profit or loss.

The key assumptions used for ViU calculations at 31 December 2024 are as follows:

	JORRS	ATP	JTTS	KTTP	
Prakiraan volume lalu lintas jalan tol	Rata-rata pertumbuhan/ *Average growth* 0% per tahun/*years*	Rata-rata pertumbuhan/ *Average growth* 5% per tahun/*years*	Rata-rata pertumbuhan/ *Average growth* 3% - 6% per tahun/*years*	Rata-rata pertumbuhan/ *Average growth* 4% per tahun/*years*	*Forecasted toll road traffic volume*
Peningkatan tarif jalan tol	12% per 2 tahun/*years*	12% per 2 tahun/*years*	12% per 2 tahun/*years*	12% per 2 tahun/*years*	*Increase in toll tariff*
Tingkat diskonto	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	*Discount rate*

19. ASET KEUANGAN - HAK KONSESI

Pada bulan April tahun 2024, Perusahaan menandatangani PPJT untuk jalan tol ruas Betung-Tempino-Jambi dengan skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (“PBBL”) yang akan berakhir pada bulan Maret 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp 21.012.000.

19. FINANCIAL ASSET - CONCESSION RIGHTS

In April 2024, the Company signed a PPJT for the Betung-Tempino-Jambi toll road section with a Service-Based Periodic Payment ("PBBL") scheme, which will end in March 2026 with a contract value of Rp 21,012,000.

19. ASET KEUANGAN - HAK KONSESI (lanjutan) / *19. FINANCIAL ASSET - CONCESSION RIGHTS (continued)*

Pada bulan Juli tahun 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha ("KPBU") Trans Papua yang akan berakhir pada bulan Juli 2039 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.008.287.

In July 2024, the Company signed a Public-Private Partnership Agreement ("KPBU") for Trans Papua, which will end in July 2039 with a contract value of Rp 3,008,287.

Perusahaan membangun, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut dan menerima kompensasi berupa kas atas layanan ini selama periode 13-15 tahun setelah infrastruktur terbangun yang di estimasi akan selesai pada tahun 2026.

The Company constructs, operates and maintains the infrastructure and compensated by received cash for these services over a periods of 13-15 years after the infrastructure is completed, which expected to be in 2026.

	2024	2023	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Pendapatan konstruksi	2,825,159	-	*Construction revenue*
Penghasilan keuangan	40,069	-	*Finance income*
Saldo akhir	2,865,228	-	*Ending balance*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	-	-	*Current portion*
Bagian tidak lancar	2,865,228	-	*Non-current portiont*

20. UTANG USAHA / *20. TRADE PAYABLES*

	2024	2023	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
Pemasok	7,769,279	6,093,575	*Suppliers*
Subkontraktor	1,895,775	2,353,578	*Sub-contractors*
Alat	248,741	249,731	*Equipment*
Dolar AS			*US Dollar*
Subkontraktor	158,561	225,991	*Sub-contractors*
Pemasok	32,718	20,852	*Suppliers*
	10,105,074	8,943,727	
Pihak berelasi (Catatan 36g)			*Related parties (Note 36g)*
Subkontraktor	839,618	1,631,440	*Sub-contractors*
Pemasok	311,614	497,649	*Suppliers*
Ventura Bersama	162,576	118,950	*Joint venture*
Alat	3,114	1,377	*Equipment*
	1,316,922	2,249,416	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(11,421,996)	(11,193,143)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	-	-	*Non-current portion*

Lihat Catatan 36 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 36 for details of related party balances and transactions.

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK / *21. SHORT-TERM LOANS*

	2024	2023	
Pinjaman bank	5,921,908	3,454,956	*Bank loans*

a. Pinjaman bank / *a. Bank loans*

	2024	2023
Perusahaan-Rupiah/*The Company - Rupiah*		
Pihak berelasi/*Related parties*		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2,533,057	2,103,057
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,485,792	670,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,213,173	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	177,515	66,522
Entitas anak-Rupiah/*Subsidiaries - Rupiah*		
Pihak berelasi/*Related parties*		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	63,096	554,383
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19,322	41,149
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	104	19,845
Entitas anak-Dolar AS/*Subsidiaries - US Dollar*		
Pihak berelasi/*Related party*		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	429,849	-
	5,921,908	3,454,956

Informasi lain mengenai pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Other information related to bank loans as at 31 December 2024 is as follows:

Kreditur/*Creditor*	Jenis fasilitas/ *Facility type*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*	Tanggal jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of facility*	Suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Jaminan/ *Collateral*
Perusahaan/ *The Company*					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Berulang/ *Revolving*	Rp 1,300 miliar/ *billion*	23 Oktober/ *October* 2025	*Rate* bagi hasil/ *income for profit sharing* + 0.50%	Deposito dan giro/ *Deposit and giro*
	Berulang/ *Revolving*	Rp 1,280 miliar/ *billion*	25 Mei/ *May* 2025	*Rate* bagi hasil / *income for profit sharing* + 0.50%	Deposito dan giro/ *Deposit and giro*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Berulang/ *Revolving*	Rp 250 miliar/ *billion*	9 September/ *September* 2025	8.75%	Tanah, bangunan, dan piutang usaha/ *Land, building, and trade receivables*
	Berulang/ *Revolving*	Rp 1,210 miliar/ *billion*	10 April/ *April* 2025	Giro + 0.50%	Kas dan giro/ *Cash and giro*
	Berulang/ *Revolving*	Rp 1,210 miliar/ *billion*	16 Desember/ *December* 2025	Giro + 0.50%	Kas dan giro/ *Cash and giro*
	Berulang/ *Revolving*	Rp 1,000 miliar *billion*	31 Oktober/ *October* 2025	Giro + 0.25%	Kas dan giro/ *Cash and giro*

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan) / *21. SHORT-TERM LOANS (continued)*

a. Pinjaman bank (lanjutan) / *a. Bank loans (continued)*

Kreditur/*Creditor*	Jenis fasilitas/ *Facility type*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*	Tanggal jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of facility*	Suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Jaminan/ *Collateral*
Perusahaan (lanjutan) / ***The Company** (continued)*					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Transaksional/ *Transactional*	Rp 590 miliar/ *billion*	12 Agustus/ *August* 2025	8.75%	Tanah, bangunan, dan tagihan termin/ *Land, building, and cessie on progress billings*
	Berulang/ *Revolving*	Rp 100 miliar/ *billion*	12 Agustus/ *August* 2025	8.75%	Tanah, bangunan dan tagihan termin/ *Land, buildings, and cessie on progress billings*
	Berulang/ *Revolving*	Rp 1,000 miliar/ *billion*	15 Januari/ *January* 2025	Giro + 0.25%	Deposito dan giro/ *Deposit and giro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Kredit agunan deposito/ *Deposit collateral credit*	Rp 1,250 miliar/ *billion*	5 Maret/ *March* 2025	Deposit + 0.50%	Deposito/ *Deposit*
Entitas anak/ *Subsidiaries* – PT Hakaaston ("HKA")					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Transaksional/ *Transactional*	Rp 115 miliar/ *billion*	12 Agustus/ *August* 2025	9.25%	Piutang usaha, persediaan, dan tagihan termin/ *Trade receivables, inventory, and cessie on progress billings*
Entitas anak/ *Subsidiaries* – PT Hutama Marga Waskita ("HMW")					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Berulang/ *Revolving*	Rp 69.6 miliar/ *billion*	26 April/ *April* 2025	Giro +0.50%	Kas dan giro/ *Cash and giro*
Entitas anak/ *Subsidiaries* – PT Hutama Karya Infrastruktur ("HKI")					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Berulang/ *Revolving*	Rp 150 miliar/ *billion*	13 November/ *November* 2025	8.25%	Piutang usaha/ *Trade receivables*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Berulang/ *Revolving*	Rp 200 miliar/ *billion*	13 September/ *September* 2025	8.00%	Piutang usaha dan persediaan/ *Trade receivables and inventory*
Entitas anak/ *Subsidiaries* – PT Bhirawa Steel ("BS")					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Kredit pembiayaan Impor/ *Import credit facilities*	Rp 1,000 miliar/ *billion*	9 September/ *September* 2025	5.4 - 6.8%	Piutang usaha, persediaan, tanah dan bangunan/ *Trade receivables, inventory, land and buildings*
	Foreign exchange line I	USD 45 juta/ *million*	9 September/ *September* 2025	-	

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan) / *21. SHORT-TERM LOANS (continued)*

a. Pinjaman bank (lanjutan) / *a. Bank loans (continued)*

Kreditur/*Creditor*	Jenis fasilitas/ *Facility type*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*	Tanggal jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of facility*	Suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Jaminan/ *Collateral*
Entitas anak (lanjutan)/ ***Subsidiaries** (continued)* **– PT Bhirawa Steel ("BS")**					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Piutang pembiayaan rantai pasokan/ *Supply chain financing account receivable*	Rp 100 miliar/ *billion*	10 Januari/ *January* 2026*)	7%	Piutang usaha, persediaan, tanah dan bangunan/ *Trade receivables, inventory, land and buildings*
Entitas anak/ *Subsidiaries* – PT Semen Indogreen Sentosa ("SIS")					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Berulang/ *Revolving*	Rp 50 miliar/ *billion*	20 Juni/ *June* 2025	9.50%	Tanah, persediaan, piutang, dan deposito/ *Land, inventory, trade receivables, and deposit*
	Transaksional/ Transactional	Rp 50 miliar/ billion	20 Juni/ June 2025	9.50%	Tanah, persediaan, piutang, dan deposito/ *Land, inventory, trade receivables, and deposit*
Entitas anak/ Subsidiaries **– PT Petronesia Benimel ("Petronesia")**					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Berulang/ *Revolving*	Rp75 miliar/ *billion*	22 Maret/ *March* 2025	9.50%	Tanah, tagihan termin, dan deposito/ *Land, inventory, cessie on progress billings, and deposit*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Berulang/ *Revolving*	Rp 22 miliar/ *billion*	20 November/ *November* 2025	9.50%	Tagihan termin dan deposito/ *Cessie on progress billings and deposit*
Ventura bersama/ *Joint ventures* – KSO Hutama Karya – Gerbang Sarana Baja					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Berulang/ *Revolving*	Rp 250 miliar / *billion*	9 September/ *September* 2025	10.00%	Tagihan termin, akta jaminan fidusia, tanah, dan bangunan/ *Cessie on progress billings, fiduciary guarantee deeds, land, and building*

*) Piutang pembiayaan rantai pasokan mempunyai jatuh tempo selama 90 hari dari tanggal faktur/
Supply chain financing account receivables had due dates for 90 days after invoice date

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Jumlah deposito dan giro yang dijaminkan untuk pinjaman *cash collateral* dan memiliki sifat terbatas untuk ditarik pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sejumlah Rp 7.248.406 (2023: Rp 3.364.614).

PB dan BS, entitas anak memiliki utang pembiayaan penyedia dengan yang merupakan utang kepada bank yaitu BRI dan Mandiri atas pencairan lebih awal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") dengan kewajiban tanggung jawab renteng dan *Supplier Chain Financing* ("SCF") yang pada tanggal pelaporan keuangan belum jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan dan entitas anak terkait telah mematuhi seluruh pembatasan keuangan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman yang akan dikaji secara tahunan.

Selama tahun 2024, Grup telah melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 5,2 triliun (2023: Rp 4,6 triliun).

***21. SHORT-TERM LOANS** (continued)*

***a. Bank loans** (continued)*

The amount of deposits and giro pledged as collateral for cash collateral and has nature of restricted to withdraw as of 31 December 2024 is amounting to Rp 7,248,406 (2023: Rp 3,364,614).

PB and BS, subsidiaries have a supplier financing payables which represents payables to banks who are BRI and Mandiri for earlier settlement of Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") with recourse and Supplier Chain Financing ("SCF") which have not yet due as at reporting date.

As at 31 December 2024, the Company and the relevant subsidiaries complied with all financial covenants required under the loan agreements that will be reviewed on annual basis.

During the year 2024, the Group has paid the matured short-term bank loans amounting to Rp 5.2 trillion (2023: Rp 4.6 trillion).

22. UANG MUKA KONTRAK

22. *CONTRACT ADVANCES*

	2024	2023	
Pihak ketiga	375,065	773,531	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 36h)	151,194	16,525	*Related parties (Note 36h)*
	526,259	790,056	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(405,123)	(680,818)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	121,136	109,238	*Non-current portion*

Uang muka kontrak adalah kewajiban yang timbul karena pembayaran di muka dari pihak pemberi kerja atau pembeli atas perjanjian pembelian maupun kontrak kerja yang telah disepakati.

Lihat Catatan 36 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

The advances received by the Company represent liabilities that arised from upfront payments received from project owners or customers under contract or sales agreement.

Refer to Note 36 for details of related party balances and transactions.

23. AKRUAL DAN PROVISI / *23. ACCRUALS AND PROVISIONS*

	2024	2023	
Provisi taksiran rugi proyek kontrak konstruksi yang memberatkan dan denda keterlambatan	1,160,951	787,285	*Provision for expected loss onerous contracts and potential delay penalties*
Biaya perbaikan dan pemeliharaan jalan tol	1,021,078	965,457	*Toll road repairs and maintenance expenses*
Biaya pekerjaan umum lapangan	874,950	765,261	*General site activities cost*
Pajak final	298,500	190,900	*Final tax*
Litigasi	259,925	219,807	*Litigation*
Biaya pemeliharaan	166,822	67,301	*Maintenance expenses*
Beban bunga	138,312	146,417	*Interest expense*
Pajak bumi dan bangunan	45,910	21,065	*Land and building tax*
Provisi atas klaim bank garansi	-	70,809	*Provision for bank guarantee claim*
Lain-lain	348,741	271,579	*Others*
	4,315,189	3,505,881	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(3,865,774)	(3,027,446)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	449,415	478,435	*Non-current portion*

Litigasi merupakan provisi atas perkara perdata atas suatu keputusan hukum.

Litigation represents provision for civil cases based on a legal decision.

Grup telah mengidentifikasi beberapa kontrak konstruksi yang mempunyai indikator kemungkinan menimbulkan kerugian dan mencatat provisi taksiran rugi proyek kontrak konstruksi yang memberatkan dan denda keterlambatan sebesar Rp 1.160.951 (2023: Rp 787.285).

The Group has identified several construction contracts that have indicators that they may result in losses and record provision for expected loss onerous contracts and potential delay penalties amounting to Rp 1,160,951 (2023: Rp 787,285).

24. UTANG LAIN-LAIN / *24. OTHER PAYABLES*

	2024	2023	
Pihak ketiga	323,998	225,340	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(311,542)	(212,142)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	12,456	13,198	*Non-current portion*
Pihak berelasi (Catatan 36j)	2,720,564	1,045	*Related parties (Note 36j)*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(2,719,537)	(18)	*Current-portion*
Bagian jangka panjang	1,027	1,027	*Non-current portion*

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG / *25. PINJAMAN JANGKA PANJANG*

	2024	2023	
Pinjaman bank	11,106,392	11,083,452	*Bank loans*
Pinjaman non-bank	726,326	948,184	*Non-bank loans*
Medium Term Note	9,649,315	10,670,353	*Medium Term Note*
Utang obligasi	7,294,920	7,326,122	*Bonds payable*
Sukuk Mudharabah	794,464	810,101	*Sukuk Mudharabah*
Liabilitas sewa	171,060	188,058	*Lease liabilities*
Jumlah pinjaman jangka panjang	29,742,477	31,026,270	*Total long-term loans*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(313,816)	(1,611,705)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	29,428,661	29,414,565	*Non-current portion*

a. Pinjaman bank / *a. Bank loans*

	2024	2023
Perusahaan/ *The Company*		
Pihak berelasi/ *Related parties*		
Pinjaman sindikasi/ *Syndicate loan*		
Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Kredit investasi/ *Investment credit*	5,220,794	5,220,794
Pinjaman sindikasi/ *Syndicate loan*		
Pekanbaru Dumai	1,724,000	1,724,000
Pihak ketiga/ *Third parties*		
Pinjaman sindikasi/ *Syndicate loan*		
Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Kredit investasi/ *Investment credit*	2,467,180	2,467,180
PT Bank Mega Tbk		
Kredit Investasi/ *Investment Credit*	1,500,000	1,500,000
Pinjaman sindikasi/ *Syndicate loan*		
Pekanbaru Dumai	276,000	276,000
	11,187,974	11,187,974
Biaya emisi/ *Emission fee*	(81,582)	(104,522)
	11,106,392	11,083,452
Dikurangi bagian jangka pendek/ *Less: Current portion*	-	-
	11,106,392	11,083,452

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM LOANS (continued)*

a. Pinjaman bank (lanjutan) / *a. Bank loans (continued)*

Kreditur/ *Creditor*	Nama fasilitas *Facility name*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Agunan/ *Collateral*
Perusahaan/ *The Company*					
PT Bank Mega Tbk	Pinjaman bilateral/ *Billateral loan - Term Loan* 1	6,147,000	11/10/2033	7.3% (akan direviu setiap 6 bulan/ *will be reviewed every 6 months*)	Surat jaminan dari pemerintah; klaim fiducia dan pendapatan dari jalan tol termasuk pendapatan perdagangan lainnya dengan jaminan jumlah total batas Term loan 1 dan 2/ *Letter of guarantee from government; fiduciary claim and revenue from toll road include other trade revenue with guarantee amounting to total limit Term loan 1 & 2; fiduciary of escrow account*
	Pinjaman bilateral/ *Billateral loan - Term Loan* 2 - IDC	867,000	11/10/2033	7.3% (akan direviu setiap 6 bulan/ *will be reviewed every 6 months*)	
	Pinjaman bilateral/ *Billateral loan - Term Loan* 3 - *Cash Deficiency Support (CDS)*	5,250,000	11/10/2038	SUN Y20 + 200 bps	
Pinjaman sindikasi Pekanbaru Dumai/ *Syndicate loan of Pekanbaru Dumai*					
PT Bank Permata Tbk Bank of China (Hong Kong) Limited PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung PT Bank ICBC Indonesia PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Kredit investasi/ *Investment credit Tranche A*	2,900,000	11/10/2028	JIBOR 1 bulan/ *months* + 0.5% *with flooring rate 6.5%*	Surat jaminan dari pemerintah; semua tagihan (hak klaim debitur) untuk pendapatan ATP, hasil klaim asuransi, dan klaim jaminan bank yang diikat oleh fidusia; rekening penampungan (Rekening Penagihan, Rekening Cadangan Layanan Utang, Rekening Layanan Utang, Rekening Operasional, Kelebihan Rekening Kas/ *Guarantee letter from government; All bills (debtor claim rights) for ATP income, insurance claim results, and bank guarantee claims bound by fiduciary. Escrow accounts (Collection Accounts, Debt Service Reserve Account, Debt Services Account, Operational Account, Excess Cash Account)*
	Kredit investasi/ *Investment credit Tranche B*	1,600,000	11/10/2025	JIBOR 1 bulan/ *months* + 0.5% *with flooring rate 6.5%*	
	Tranche C (Opsi perpanjangan/ *option to extend tranche B)*	2,000,000	11/10/2028	JIBOR 1 bulan/ *months* + 0.5% *with flooring rate 6.5%*	
Pinjaman sindikasi Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung/ *Syndicate loan of Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung*					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Kredit investasi/ *Investment credit*	9,166,000	11/10/2033	ATD 3 bulan/ *months* + 3.69%	Surat jaminan dari pemerintah; klaim fidusia dan pendapatan dari jalan tol termasuk pendapatan perdagangan lainnya yang terkait dengan operasi jalan tol, klaim asuransi, klaim bank garansi, dan penggantian dana dari pemerintah dengan jaminan sebesar 100%; Fidusia akun escrow/ *Letter of guarantee from government fiduciary claim and revenue from toll road include other trade revenue related to toll road operation, insurance claim, bank guarantee claim, and reimbursement funds from goverment with guarantee amounting to 100%.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	*Cash Deficiency Support* (CDS)	5,200,000	11/10/2033	KI/ *Investment credit* + 1%	

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi seluruh pembatasan keuangan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman yang akan dikaji secara tahunan.

As at 31 December 2024, the Company complied with all financial covenants required under the loan agreements that will be reviewed on annual basis.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Grup telah melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang sebesar nihil (2023: Rp 8,8 triliun).

As of 31 December 2024, the Group has paid the long-term bank loans amounting to nill (2023: Rp 8.8 trillion).

b. Pinjaman non-bank / *b. Non-bank loans*

	2024	2023
Perusahaan/*The Company*		
Pihak berelasi/*Related party*		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)		
Kredit Investasi/ *Investment Credit*	726,326	948,184
Dikurangi/*Less*:		
Bagian jangka pendek/*Current portion*	(40,000)	(40,000)
	686,326	908,184

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM LOANS (continued)*

b. Pinjaman non-bank (lanjutan) / *b. Non-bank loans (continued)*

Kreditur/ *Creditor*	Nama fasilitas *Facility name*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Agunan/ *Collateral*
Perusahaan/ The Company					
Jalan tol ruas Palembang Indralaya/ *Palembang Indralaya toll road*					
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Kredit investasi/ *Investment Credit* Trance A	690,335	11/11/2040	BI Repo rate 12 bulan/ *months* + 2.00%	Jaminan pemerintah; fidusia pendapatan atas pengoperasian jalan tol ruas palembang indralaya; gadai rekening penampungan/*Letter of guarantee from government; Fiduciary claim and revenue from Palembang-Indralaya toll road; fiduciary of escrow account*
	Kredit investasi/ *Investment Credit* Trance B	300,000	11/11/2030	BI Repo rate 12 bulan/ *months* + 1.75%	
	Kredit investasi/ *Investment Credit* Trance C	250,000	11/11/2040	BI Repo rate 12 bulan/*months* + 4.00%	

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi seluruh pembatasan keuangan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman yang akan dikaji secara tahunan.

As at 31 December 2024, the Company and complied with all financial covenants required under the loan agreements that will be reviewed on annual basis.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Grup telah melakukan pembayaran atas pinjaman non-bank jangka panjang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 221 miliar (2023: Rp 128 miliar).

As of 31 December 2024, the Group has paid the matured long-term non-bank loans amounting to Rp 221 billion (2023: Rp 128 billion).

c. *Medium Term Notes* / *c. Medium Term Notes*

	2024	2023	
Perusahaan - Dolar AS Global MTN ("GMTN")	9,697,200	9,249,600	*The Company - US Dollar Global MTN ("GMTN")*
Entitas anak - Rupiah Medium Term Note ("MTN")	-	1,475,000	*Subsidiary - Rupiah Medium Term Note ("MTN")*
	9,697,200	10,724,600	
Biaya transaksi	(47,885)	(54,247)	*Trasanction costs*
	9,649,315	10,670,353	
Dikurangi: Bagian jangka pendek	-	(1,475,000)	*Less: Current portion*
Bagian jangka Panjang	9,649,315	9,195,353	*Non-current portion*

Jenis/ *Type*	Peringkat/ *Rating*	Jumlah/ *Total*[*)] Dolar AS/ *US Dollar*	Jangka pendek/ *Current* Dolar AS/ *US Dollar*	Jangka panjang/ *Non-current*[*)] Dolar AS/ *US Dollar*
Global Medium Term Note ("GMTN")	BBB[a)]/Baa2[b)]	600,000,000	-	600,000,000

[*)] Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Catatan/*Note*:
a) Berdasarkan peringkat dari Fitch Ratings pada 4 April 2024 / *Based on rating by Fitch Ratings on 4 April 2024*
b) Berdasarkan peringkat dari Moody's Investors Service Singapore Pte Ltd. pada 28 Mei 2024/ *Based on rating by Moody's Investors Service Singapore Pte Ltd. on 28 May 2024*

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

***25. LONG-TERM LOANS** (continued)*

c. Medium Term Notes (lanjutan)

***c. Medium Term Notes** (continued)*

GMTN dijamin dengan jaminan Pemerintah yang mencakup keseluruhan *(full guarantee)* kewajiban Perusahaan kepada Pemegang GMTN.

GMTN are secured by government guarantee that covers the entire (full guarantee) of the Company's obligations to the GMTN holders.

PT HK Realtindo ("HKR"), entitas anak telah melunasi pinjaman MTN I 2019 Tahap 1 Seri A, Sukuk Mudharabah IV Seri A, dan Sukuk Mudharabah IV Seri B pada tahun 2024.

PT HK Realtindo ("HKR"), a subsidiary, has paid off the 2019 MTN I Phase 1 Series A, Sukuk Mudharabah IV Series A, and Sukuk Mudharabah IV Series B in 2024.

Informasi lain mengenai GMTN pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Other information related to GMTN as at 31 December 2024 is as follows:

Nama fasilitas/ *Facility name*	Tanggal penerbitan/ *Issuance date*	Wali amanat/ *Trustee*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*[*)] Dolar AS/ *US Dollar*	Tenor/ *Tenor*	Tingkat bunga per Tahun/*Interest rate per annum*
Perusahaan/ *The Company*					
Global Medium Term Note ("GMTN")	11 Mei/ *May* 2020	*The Bank of New York Mellon*	600,000,000	10 tahun/ *years*	3.75%

*) Dalam jumlah penuh / *In full amount*

Sampai dengan 31 Desember 2024, Grup telah melakukan pembayaran atas MTN yang telah jatuh tempo sebesar Rp 1.475.000 (2023: nihil).

As of 31 December 2024, the Group has paid the matured MTN amounting to Rp 1,475,000 (2023: nil).

d. Utang obligasi

d. Bonds payables

Rincian dari utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Details of bonds payables as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I	1,000,000	1,000,000	*Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase I*
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II	1,968,000	1,968,000	*Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase II*
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III	2,367,000	2,367,000	*Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase III*
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I	966,500	1,000,000	*Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I*
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II	1,000,000	1,000,000	*Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II*
	7,301,500	7,335,000	
Biaya transaksi	(6,580)	(8,878)	*Transaction costs*
	7,294,920	7,326,122	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(81,000)	(33,445)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	7,213,920	7,292,677	*Non-current portion*

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) / ***25. LONG-TERM LOANS*** *(continued)*

d. Utang obligasi (lanjutan) / ***d. Bonds payables*** *(continued)*

Jenis/ *Type*	Peringkat/ *Rating*[a)]	Jumlah/ *Total*	Jangka pendek/ *Current*	Jangka panjang/ *Non-current*
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016/ *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase I 2016*	idAAAgg	1,000,000	-	1,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017/ *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase II 2017*	idAAAgg	1,968,000	-	1,968,000
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017/ *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase III 2017*	idAAAgg	2,367,000	-	2,367,000
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 Series B*	idAA-	185,550	-	185,550
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 Series C*	idAA-	780,950	-	780,950
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 Series A*	idAA-	81,000	81,000	-
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 Series B*	idAA-	176,500	-	176,500
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 Series C*	idAA-	742,500	-	742,500

Catatan/*Note*:
a) Berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 14 Mei 2024/ *Based on rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) on 14 May 2024*

Semua saldo Obligasi Berkelanjutan I dijamin dengan jaminan Pemerintah yang mencakup keseluruhan *(full guarantee)* kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat dan yang meliputi pokok obligasi, bunga obligasi yang telah jatuh tempo dan/atau denda sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.168/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

All outstanding Sustainable Bonds I are secured by government guarantee that covers the entire (full guarantee) of the Company's obligations to the Bondholders through the Trustee and covering the bond principal, interest bonds that have matured and/ or fines as stated in the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.168/PMK.08/2016 About Procedures for Granting Guarantee Bond in Order to Accelerate Toll Road Development Project in Sumatera.

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. Utang obligasi (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

***25. LONG-TERM LOANS** (continued)*

***d. Bonds payables** (continued)*

Other information related to bonds payables as at 31 December 2024 is as follows:

Utang obligasi/ *Bonds*	Pokok Obligasi/ Bonds *principal*	Wali amanat/ *Trustee*	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016/ *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase I*	Rp 1 triliun / *trillion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	21 Desember/ *December* 2026	8.55%
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017/ *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase II*	Rp 1,968 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	7 Juni/ *June* 2027	8.07%
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B/ *Hutama Karya Sustainable Bonds I Phase III Series B*	Rp 2,367 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	26 September/ *September* 2027	8.40%
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 Series B*	Rp 185.55 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	7 September/ *September* 2026	8.55%
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 Series C*	Rp 780.95 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	7 September/ *September* 2028	9.30%
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2022 Series A*	Rp 81 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	12 Januari/ *January* 2025	6.50%
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 Series B*	Rp 176.5 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	12 Januari/ *January* 2027	7.75%
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C/ *Hutama Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 Series C*	Rp 742.5 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	12 Januari/ *January* 2029	8.25%

Perusahaan telah melunasi pinjaman Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A pada tahun 2024.

The Company has paid off the 2021 Sustainable Bonds II Phase I Series A in 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang obligasi yang telah jatuh tempo sebesar Rp 33.500 (2023: nihil).

As of 31 December 2024, the Company has paid the matured bonds payables amounting to Rp 33,500 (2023: nil).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi seluruh pembatasan keuangan yang tercantum dalam perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan yang akan dikaji secara tahunan.

As at 31 December 2024, the Company complied with all financial covenants required under the Sustainable Bonds agreements that will be reviewed on annual basis.

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) / ***25. LONG-TERM LOANS*** *(continued)*

e. Sukuk Mudharabah / ***e. Sukuk Mudharabah***

	2024	2023	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I	483,500	500,000	*Hutama Karya Sustainable Mudharabah Bonds I Phase I*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II	313,000	313,000	*Hutama Karya Sustainable Mudharabah Bonds I Phase II*
	796,500	813,000	
Biaya transaksi	(2,036)	(2,899)	*Transaction costs*
	794,464	810,101	
Dikurangi:			*Less:*
Biaya jangka pendek	(138,250)	(16,474)	*Current portion*
Biaya jangka panjang	656,214	793,627	*Non-current portion*

Jenis/ *Type*	Peringkat/ *Rating* [a)]	Jumlah/ *Total*	Jangka pendek/ *Current*	Jangka panjang/ *Non-current*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series B*	idAA-(sy)	64,450	-	64,450
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series C*	idAA-(sy)	419,050	-	419,050
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series A*	idAA-(sy)	138,250	138,250	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series B*	idAA-(sy)	105,260	-	105,260
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series C*	idAA-(sy)	69,490	-	69,490

Catatan/*Note*:
a) Berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 14 Mei 2024/ *Based on rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) on 14 May 2024*

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

e. Sukuk Mudharabah (lanjutan)

***25. LONG-TERM LOANS** (continued)*

***e. Sukuk Mudharabah** (continued)*

Sukuk Mudharabah/ *Sukuk Mudharabah*	Pokok/ *Principal*	Wali amanat/ *Trustee*	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat bagi hasil/ *Profit sharing rate*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series B*	Rp 64.45 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	7 September/ *September* 2026	8.55%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2021 Series C*	Rp 419.05 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	7 September/ *September* 2028	9.30%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series A*	Rp 138.25 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	12 Januari/ *January* 2025	6.50%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series B*	Rp 105.26 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	12 Januari/ *January* 2027	7.75%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A/ *Hutama Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II 2022 Series C*	Rp 69.49 miliar / *billion*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	12 Januari/ *January* 2029	8.25%

Penerbitan sukuk mudharabah tersebut ditujukan untuk mendanai modal kerja Grup terutama dalam kaitannya dengan bisnis Jasa Konstruksi.

Issuance of sukuk mudharabah is intended to finance the Group's working capital, especially regarding business in Construction Services.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi seluruh pembatasan keuangan yang tercantum dalam perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang akan dikaji secara tahunan.

As at 31 December 2024, the Company complied with all financial covenants required under the Sukuk Mudharabah agreements that will be reviewed on annual basis.

Perusahaan telah melunasi pinjaman Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 Seri A pada tahun 2024.

The Company has paid off the 2021 Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I Series A in 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang sukuk yang telah jatuh tempo sebesar Rp 16.500 (2023: nihil).

As of 31 December 2024, the Company has paid the matured sukuk payables amounting to Rp 16,500 (2023: nil).

25. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM LOANS (continued)*

f. Liabilitas Sewa / *f. Lease Liabilities*

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments, together with the present value of the minimum lease payments as of 31 December 2024 dan 2023 were as follows:

	2024	2023	
Analisis jatuh tempo			*Maturity analysis*
Jatuh tempo pembayaran			*Due date payments*
Kurang dari 1 tahun	59,904	50,950	*Less than 1 year*
Antara 1 - 5 tahun	127,890	153,842	*Between 1 - 5 years*
	187,794	204,792	
Dikurangi:			*Less:*
Beban keuangan	(16,734)	(16,734)	*Finance charges*
	171,060	188,058	
Bagian jangka pendek	(54,566)	(46,786)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	116,494	141,272	*Non-current portion*

Tidak ada pembayaran sewa kontinjen yang diakui sebagai beban di dalam laporan keuangan konsolidasian selama tahun berjalan.

There are no variable lease payments recognised as an expense in the consolidated financial statements during the year.

Liabilitas sewa pembiayaan secara efektif terjamin karena hak atas aset sewaan akan kembali kepada pihak yang menyewakan bila terjadi peristiwa gagal bayar. Grup memperoleh opsi untuk membeli aset sewa pada akhir masa sewa.

Finance lease liabilities are effectively secured as the rights to the leased assets will be returned to the lessor in case of events of default. The Group obtained an option to purchase the leased assets at the end of the lease term.

Tidak ada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi sewa dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Grup.

There are no specific restrictions set by the lessor in this finance lease agreement with the Group.

26. PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *26. DEFERRED REVENUE*

	2024	2023
JORR S	-	282,610
ATP	-	293,233
	-	575,843
Dikurangi/ *Less:*		
Bagian jangka pendek/ *Current portion*	-	(575,843)
Bagian jangka panjang/ *Non-current portion*	-	-

26. PENDAPATAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

Pada tahun 2016, pendapatan ditangguhkan terkait JORR S merupakan liabilitas dari perolehan aset konsesi JORR S yang diakui sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awal yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perusahaan melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (”PPJT”) antara Badan Pengatur Jalan Tol (”BPJT”) dan Perusahaan tanggal 16 Maret 2016 dengan masa konsesi selama 19 tahun 3 bulan. Sebelumnya hak konsesi atas JORR S disita oleh Negara setelah melalui serangkaian sengketa di pengadilan terkait kasus hukum yang melibatkan banyak pihak termasuk pemilik konsesi sebelumnya dan pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan hak konsesi JORR S diberikan ke Perusahaan.

Pada tanggal 29 November 2017, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BPJT memberikan perpanjangan masa hak konsesi JORR S dari yang sebelumnya 19 tahun 3 bulan menjadi 36 tahun semenjak tanggal efektif awal pada 16 Maret 2016.

Pemberian perpanjangan atas hak konsesi ini sehubungan dengan dukungan Pemerintah kepada Perusahaan terkait penugasan Perusahaan dalam Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sesuai Perpres No. 100 tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 117 tahun 2015.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memberikan hak konsesi ATP kepada Perusahaan melalui PPJT antara BPJT dan Perusahaan tanggal 29 November 2017 dengan masa konsesi selama 40 tahun sehubungan dengan tambahan dukungan Pemerintah kepada Perusahaan terkait penugasan Perusahaan dalam pembangunan proyek JTTS.

Hak konsesi JORR S dan ATP merupakan dukungan Pemerintah kepada Perusahaan terkait penugasan Perusahaan dalam pembangunan proyek JTTS. Sesuai dengan ISAK No. 112, “Perjanjian Konsesi Jasa” hal ini tergolong sebagai *item* infrastruktur lainnya yang diberikan kepada operator oleh pemberi konsesi. Oleh sebab itu, konsesi JORR S dan ATP diakui sebagai aset takberwujud yang diukur pada nilai wajar dan pendapatan ditangguhkan. Aset takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus selama umur masa konsesi, sedangkan pendapatan ditangguhkan diakui sesuai dengan prestasi pekerjaan terkait jasa pembangunan JTTS. Pendapatan ditangguhkan bukan merupakan liabilitas keuangan.

***26. DEFERRED REVENUE** (continued)*

In 2016, deferred revenue related to JORR S represented the liability of acquisition of JORR S concession rights recognised at fair value which was granted by the Government to the Company through Toll Road Concession Agreement (”PPJT”) between Toll Road Regulatory Agency (”BPJT”) and the Company dated 16 March 2016 with a concession period of 19 years 3 months. Previously, JORR S assets was confiscated by the Government after a series of legal dispute-related cases involving multiple parties, including previous concession holder and in the end the Supreme Court decided that JORR S concession rights was granted to the Company.

On 29 November 2017, the Government through the Ministry of Public Works and Housing through BPJT granted the extension of JORR S concession rights from 19 years and 3 months to 36 years from the intial effective date on 16 March 2016.

The grant of extension of this concession right is in connection to the Government's support to the Company related to the Company's assignment in the Accelerate Toll Road Development Project in Sumatera in accordance with Presidential Decree No. 100 of 2014 which have been amended to Presidential Decree No. 117 of 2015 .

In addition, the Ministry of Public Works and Housing also grants ATP concession rights to the Company through PPJT between BPJT and the Company dated 29 November 2017 with a concession period of 40 years in connection with additional Government support to the Company regarding the Company's assignment in the construction of the JTTS project.

JORR S and ATP concession rights represent Government's support to the Company regarding the Company's assignment in the construction of the JTTS. In accordance with ISAK No. 112, “Service Concession Arrangement” these were classified as infrastructure items granted to the operator by the grantor. As a concequence, JORR S and ATP concession rights were recognised as intangible assets at fair value and deferred revenue. The intangible assets will be amortised by using straight line method in over the concession period, while the deferred revenue will be recognised in accordance with the performance of work related to JTTS construction services. Deferred revenue is not a financial liability.

26. PENDAPATAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

Nilai wajar hak konsesi JORR S dan ATP pada saat pengakuan awal di tahun 2017 dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK tanggal 23 Januari 2018.

Pengukuran nilai wajar atas hak konsesi pada saat pengakuan awal menggunakan hierarki nilai wajar Level 3 yang dinilai dengan menggunakan teknik analisis arus kas masa depan yang didiskonto. Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi volume lalu lintas jalan tol, kenaikan tarif tol dan tingkat diskonto.

Pada Desember 2022, Pemerintah membatalkan penugasan kepada Perusahaan untuk membangun satu ruas tol JTTS tertentu, yaitu Palembang - Tanjung Api-Api, sesuai dengan Perpres no. 131 Tahun 2022. Sebagai dampaknya, saldo pendapatan ditangguhkan diakui pada laba rugi sesuai dengan konstruksi sisa progres ruas jalan tol sampai selesai sepenuhnya.

Pada bulan Desember 2024, pembangunan jalan tol JTTS pada ruas prioritas telah selesai, sehingga pendapatan yang ditangguhkan dapat direalisasikan sepenuhnya. Oleh karena itu, saldo akhir pendapatan ditangguhkan pada Desember 2024 menjadi nihil.

***26. DEFERRED REVENUE** (continued)*

The fair value of JORR S and ATP concessions at the initial recognition in 2017 were calculated by Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Ali, Firdaus dan Rekan, an independent appraiser registered in OJK dated 23 January 2018.

The measurement of the fair value of the concession rights at initial recognition was using the Level 3 of fair value hierarchy which was assessed by using future discounted cash flows analysis techniques. The most significant inputs in this valuation approach are the assumption of toll road traffic volume, increase of toll tariff and discount rate.

In December 2022, the Government omitted the assignment for the Company to construct one particular JTTS toll road section, named Palembang - Tanjung Api-Api, in accordance with Presidential Decree No. 131 of 2022. As a consequence, the outstanding deferred revenue balance is recognised in profit or loss as the construction of the remaining toll road sections progresses until it is fully complete.

In December 2024, the constructions of the JTTS toll road on the priority sections have been completed, allowing the full realisation of deferred revenue. Consequently, the ending balance of deferred revenue in December 2024 became nil.

27. IMBALAN KERJA / ***27. EMPLOYEE BENEFITS***

	2024	2023	
Imbalan pascakerja	462,946	432,552	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	86,899	25,610	*Other long-term employment benefits*
	549,845	458,162	
Aset imbalan pascakerja	(406,025)	(370,467)	*Post-employment benefit assets*
Liabilitas neto	143,820	87,695	*Net liability*
Akrual imbalan kerja	410,123	301,373	*Accrued employee benefits*
	553,943	389,068	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(389,420)	(317,517)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	164,523	71,551	*Non-current portion*

27. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Akrual imbalan kerja sebagian besar terdiri dari akrual tunjangan karyawan, bonus, gaji dan insentif.

Kewajiban imbalan kerja dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Indra Catarya Situmeang dan Rekan, aktuaris independen.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

27. *EMPLOYEE BENEFITS* *(continued)*

Accrued employee benefits mainly consist of accrued employee allowance, bonus, salary, and incentives.

The employee benefit obligations were valued by Actuarial Consulting Office ("KKA") Indra Catarya Situmeang and Partner, independent actuaries.

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2024	**2023**	
Tingkat diskonto	3.00% - 7.14%	3.00% - 7.00%	*Discount rate*
Kenaikan gaji di masa mendatang	1.00% - 6.00%	1.00% - 6.00%	*Future salary increase*
Usia pensiun normal	55-58 tahun/*years*	55-58 tahun/*years*	*Normal pension*
Tingkat mortalitas	TMI IV TMI 2019 GAM 1971	TMI IV TMI 2019 GAM 1971	*Mortality rate*

Perubahan kewajiban imbalan kerja Grup untuk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Changes in obligations for employee benefits of the Group for the years ended 31 December 2024 dan 2023 were as follows:

	2024			
	Imbalan pasca kerja/ *Post-employment benefits*	**Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Other long-term employment benefit***	**Jumlah/ *Total***	
Pada awal tahun	432,552	25,610	458,162	*At beginning of the year*
Biaya jasa kini	17,843	39,935	57,778	*Current service cost*
Biaya bunga	28,170	1,660	29,830	*Interest expenses*
Biaya masa lalu	15,396	18,596	33,992	*Past service cost*
Amendemen program	-	14,071	14,071	*Program amendment*
Penyesuaian aktuaris	-	(1,838)	(1,838)	*Actuary adjustment*
Pengukuran kembali:				*Remeasurements:*
Kerugian dari perubahan asumsi keuangan	3,273	391	3,664	*Loss from change in financial assumptions*
(Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(6,934)	3,180	(3,754)	*(Gain)/loss from change in experience adjustment*
Kerugian dari penyesuaian atas program liabilitas	5,640	-	5,640	*Loss from change in liability program*
Imbalan yang dibayar	(32,994)	(14,706)	(47,700)	*Benefits paid*
Saldo akhir	462,946	86,899	549,845	***Ending balance***

27. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***27. EMPLOYEE BENEFITS*** *(continued)*

	2023			
	Imbalan pasca kerja/ *Post-employment benefits*	**Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Other long-term employment benefit***	**Jumlah/ *Total***	
Pada awal tahun	404,650	24,309	428,959	*At beginning of the year*
Biaya jasa kini	20,435	6,519	26,954	*Current service cost*
Biaya bunga	27,327	1,483	28,810	*Interest expenses*
Biaya masa lalu	3,600	-	3,600	*Past service cost*
Penyesuaian aktuaris	(5,067)	(2,514)	(7,581)	*Actuary adjustment*
Pengukuran kembali:				*Remeasurements:*
Kerugian dari perubahan asumsi keuangan	439	-	439	*Loss from change in financial assumptions*
(Keuntungan)/kerugian dari perubahan asumsi demografi	(2)	188	186	*(Gain)/loss from change in demography assumptions*
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman	(344)	(469)	(813)	*Gain from change in experience adjustment*
Keuntungan dari penyesuaian atas program liabilitas	(1,736)	-	(1,736)	*Gain from change in liability program*
Imbalan yang dibayar	(16,750)	(3,906)	(20,656)	*Benefits paid*
Saldo akhir	432,552	25,610	458,162	***Ending balance***

Tabel berikut menyajikan ikhtisar biaya imbalan kerja sebagaimana tercatat pada laporan laba rugi:

The table below presents a summary of the employee benefits expenses reported in the statement of profit or loss:

	2024	**2023**	
Imbalan pascakerja	61,409	46,295	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	75,995	5,207	*Other long-term employment benefits*
Jumlah	137,404	51,502	***Total***

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets of the year is as follows:

	2024	**2023**	
Saldo awal	370,467	363,143	*Beginning balance*
Penghasilan bunga	28,253	27,343	*Interest income*
Pengukuran kembali – imbal hasil atas aset program	17,481	(19,103)	*Remeasurement - return on plan assets*
Iuran Grup	20,608	19,261	*Group contribution*
Imbalan yang dibayar	(30,784)	(20,177)	*Benefits paid*
Jumlah	406,025	370,467	***Total***

27. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perusahaan memberikan tambahan program pensiun kepada karyawan melalui program asuransi dari PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Perusahaan melakukan pembayaran kas di muka secara *lump sum* sebesar Rp 91.663 untuk membeli asuransi berkelompok untuk perlindungan terhadap karyawan. Asuransi tersebut memberi imbalan atas pensiun, kematian dan cacat bagi karyawan-karyawan tersebut. Substansi dari skema ini adalah program pensiun imbalan pasti dimana sebagian biaya dari imbalan tersebut telah dibayar di muka oleh Perusahaan.

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 13,55 sampai 27,27 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Kurang dari satu tahun	184,961	16,144	*Less than a year*
Antara satu dan dua tahun	48,999	63,309	*Between one and two years*
Antara dua dan lima tahun	105,908	124,163	*Between two and five years*
Lebih dari lima tahun	209,977	254,546	*Beyond five years*

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

		Dampak kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(501,894)	559,295	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa mendatang	1%	561,020	(499,967)	*Future salary increase*

Analisa sensitivitas diatas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

***27. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

The Company gave additional pension benefits to the employees through insurance program from PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life"). The Company paid an upfront lump sum amount of cash amounted Rp 91,663 to procure a group insurance that covers the employees. The insurance provides retirement, death and disability benefits to those employees. The scheme is in substance a defined benefit plan for which some the total costs of the benefits were paid upfront by the Company.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as at 31 December 2024 is 13.55 to 27.27 years.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

The sensitivity of the defined benefit pension obligation to changes in the principal actuarial assumptions as at 31 December 2024 are as follows:

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit pension obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit pension obligation calculated with the projected-unit-credit method at the end of the reporting period) has been applied when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

27. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Aset program terdiri dari:

	2024	2023	
Obligasi pemerintah	237,941	185,771	*Government bonds*
Obligasi perusahaan	64,921	72,540	*Corporate bonds*
Instrumen ekuitas	9,432	13,464	*Equity instruments*
Lain-lain	93,731	98,692	*Others*
	406,025	370,467	

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup terekspos beberapa risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Program pensiun imbalan pasti Grup memiliki porsi investasi atas instrumen ekuitas yang mencukupi, yang diharapkan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah dan perusahaan dalam jangka panjang, sementara memberikan volatilitas dan risiko dalam jangka pendek.

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup terekspos beberapa risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut: (lanjutan)

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

***27. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

Plan assets comprised the following:

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of risks such as asset volatility and changes in bond yields, as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit. The Group's defined benefit pension plans hold an adequate proportion of investment in equity instruments, which are expected to outperform government and corporate bonds in the long-term, while providing volatility and risk in the short-term.

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of risks such as asset volatility and changes in bond yields, as follows: (continued)

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plans' bond holdings.

28. UTANG RETENSI / *28. RETENTION PAYABLES*

Saldo utang retensi merupakan jaminan yang ditahan oleh Perusahaan sebagai pemberi kerja dan dipotong dari setiap pembayaran dan akan cair pada saat serah terima pekerjaan.

The balance of retention payables represents retention by the Company as a project owner and deducted for every payment and is repayable by the Company at the time certificate of transfer is signed.

	2024	2023	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	694,191	543,655	*Rupiah*
Dolar AS	3,382	3,219	*US Dollar*
	697,573	546,874	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(218,960)	(113,404)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	478,613	433,470	*Non-current portion*
Pihak berelasi (Catatan 36i)	430,417	422,300	*Related parties (Note 36i)*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(149,051)	(181,475)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	281,366	240,825	*Non-current portion*

29. MODAL SAHAM / *29. SHARE CAPITAL*

Pemegang saham perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Details of the Company's shareholders as of 31 December 2024 dan 2023 are as follows:

	2024			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid**)**	**Persentase pemilikan/ *Percentage of ownerships (%)***	**Jumlah/ *Total***	***Shareholders***
Pemerintah Republik Indonesia	131,646,000	100%	131,646,000	*The Government of the Republic of Indonesia*

Catatan/*Note:*
*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

	2023			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid**)**	**Persentase pemilikan/ *Percentage of ownerships (%)***	**Jumlah/ *Total***	***Shareholders***
Pemerintah Republik Indonesia	113,042,000	100%	113,042,000	*The Government of the Republic of Indonesia*

Catatan/*Note:*
*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. S-649/MBU/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 diputuskan mengenai peningkatan modal dasar perseroan dari Rp 110.400.000 menjadi Rp 250.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 84.158.000 yang terdiri dari 84.158.000 lembar saham menjadi Rp 113.042.000 yang terbagi dalam 113.042.000 lembar saham.

Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 28.884.000 berasal dari penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023.

Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 18.604.000 berasal dari penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. S-296/MBU/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 diputuskan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 113.042.000 yang terdiri dari 113.042.000 lembar saham menjadi Rp 131.646.000 yang terbagi dalam 131.646.000 lembar saham.

***29. SHARE CAPITAL** (continued)*

Based on Decree of the Minister of State-owned enterprise as a General Meeting of Shareholder No. S-649/MBU/12/2023 dated 18 December 2023, it was decided on the increase of the Company's authorised capital from Rp 110,400,000 to Rp 250,000,000 and the Company's issued and paid capital from Rp 84,158,000 which consisted of 84,158,000 shares to Rp 113,042,000 which consisted of 113,042,000 shares of stock.

The additional issued and paid-up capital of Rp 28,884,000 was derived from the Government of the Republic of Indonesia's additional capital investment based on Government Regulation No. 55 Year 2023 dated 12 December 2023.

The additional issued and paid-up capital of Rp 18,604,000 was derived from the Government of the Republic of Indonesia's additional capital investment based on Government Regulation No. 18 Year 2024 dated 25 April 2024.

Based on Decree of the Minister of State-owned enterprise as a General Meeting of Shareholder No. S-296/MBU/06/2024 dated 3 June 2024, it was decided on the increase of the Company's issued and paid capital from Rp 113,042,000 which consisted of 113,042,000 shares to Rp 131,646,000 which consisted of 131,646,000 shares of stock.

30. SALDO LABA - DICADANGKAN

Sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam akta notaris No. 07 tanggal 26 Juni 2024 dari Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.KN, mengenai pengesahan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, laba tahun berjalan konsolidasian Grup dialokasikan untuk cadangan sebesar Rp 1.872.555. Grup dalam posisi akumulasi rugi, akibatnya, cadangan tidak akan dialokasikan ke saldo laba dicadangkan.

Saldo laba dicadangkan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 5.619.215 meliputi cadangan terkait pemenuhan kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan cadangan umum lainnya.

30. RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED

As resolved during the respective Annual Shareholders' General Meetings as stated in notarial deed No. 07 dated 26 June 2024 of Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.KN, concerning the approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023, the Group's consolidated profit for the year was allocated for reserve amounting to Rp 1,872,555. The Group is in accumulated deficit for unappropriated, as result, the reserve will not be allocated to the appropriated retained earnings.

The appropriated retained earnings per 31 December 2024 dan 2023 amounting to Rp 5,619,215 include reserve related to fulfilling obligations in accordance with the Indonesian Limited Company Law and other general reserves.

31. KEPENTINGAN NON PENGENDALI / *31. NON-CONTROLLING INTEREST*

	2024	2023	
Saldo awal	910,351	865,686	*Beginning balance*
Bagian laba periode berjalan	35,269	44,665	*Share in profit for the period*
Saldo akhir	945,620	910,351	*Ending balance*

32. PENDAPATAN / *32. REVENUE*

	2024	2023	
Pihak ketiga	25,405,977	23,179,771	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 36k)	4,846,316	3,746,550	*Related parties (Note 36k)*
	30,252,293	26,926,321	

Rincian pendapatan berdasarkan sifatnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of revenues by its nature as of 31 December 2024 dan 2023 are as follows:

	2024	2023	
Jasa konstruksi jalan tol	17,455,324	17,294,805	*Toll road construction services*
Jasa konstruksi	7,602,526	4,663,475	*Construction services*
Pengoperasian jalan tol	3,335,687	3,117,384	*Toll road operation*
Penjualan barang	1,597,048	1,550,937	*Sale of goods*
Penjualan dan sewa properti	261,708	299,720	*Sale and rental of properties*
	30,252,293	26,926,321	

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari pendapatan Grup adalah sebagai berikut:

The detail of customers which contributing to more than 10% of the Group's revenue is as follows:

	2024	2023
Pihak ketiga/ *Third party*		
Kementerian Pekerjaan Umum / *Ministry of Public Works*	19,810,309	17,822,395
Persentase terhadap jumlah pendapatan/ *As percentage of total revenue*	65.48%	66.19%

Lihat Catatan 36 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 36 for details of related party balances and transactions.

33. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *33. COST OF REVENUE*

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut:

The details of cost of revenue by its nature are as follows:

	2024	2023	
Jasa konstruksi jalan tol			*Road toll construction services*
Subkontraktor	13,721,212	14,495,370	*Subcontractors*
Biaya pekerjaan umum lapangan	312,552	285,540	*General site activities cost*
Peralatan	164,265	206,415	*Equipment*
Upah	152,882	140,087	*Wages*
	14,350,911	15,127,412	
Jasa konstruksi			*Construction services*
Subkontraktor	3,268,403	1,434,823	*Subcontractors*
Bahan	2,807,722	2,129,878	*Materials*
Peralatan	426,454	204,131	*Equipment*
Upah	374,784	326,254	*Wages*
Biaya pekerjaan umum lapangan	317,945	258,501	*General site activities cost*
Penyusutan	190,429	300,686	*Depreciation*
Lainnya	344,966	383,333	*Others*
	7,730,703	5,037,606	
Pengoperasian jalan tol			*Toll expense*
Perbaikan dan pemeliharaan	1,297,095	1,584,725	*Repair and maintenance expense*
Amortisasi	555,356	812,686	*Amortisation*
Pajak Bumi dan Bangunan	238,673	145,467	*Land and Building Tax*
Upah	24,451	26,366	*Wages*
Lainnya	135,785	68,699	*Others*
	2,251,360	2,637,943	
Penjualan barang			*Sale of goods*
Bahan	990,484	980,935	*Materials*
Upah	130,221	199,799	*Wages*
Peralatan	88,138	71,138	*Equipment*
Penyusutan	77,001	87,395	*Depreciation*
Lainnya	90,808	63,405	*Others*
	1,376,652	1,402,672	
Penjualan dan sewa properti	268,645	362,894	*Sale and rental of properties*
	25,978,271	24,568,527	

Pada tahun 2024 dan 2023, tidak ada beban pokok pendapatan dari pemasok tunggal yang melebihi 10% jumlah beban pokok pendapatan Grup.

In 2024 and 2023, there is no cost of revenue from a single supplier that exceed 10% of the Group's total cost of revenue.

34. BEBAN OPERASI BERDASARKAN SIFAT / *34. OPERATING EXPENSES BY NATURE*

	2024	2023	
Beban pegawai	896,361	661,694	*Employee expenses*
Beban penurunan nilai piutang	142,147	1,167,263	*Impairment of receivables*
Biaya profesional	107,519	72,186	*Professional fees*
Pengembangan pegawai	77,579	46,359	*Human resource development*
Beban transportasi dan perjalanan	75,824	57,770	*Transportation and travelling expense*
Promosi	37,035	9,087	*Promotion*
Penyusutan	23,600	27,689	*Depreciation*
Tender	2,905	2,908	*Bidding*
Beban umum lainnya	40,835	63,817	*Other general expenses*
	1,403,805	2,108,773	

Beban tersebut disajikan sebagai berikut di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

The above expenses are presented as below in the statement of profit or loss and other comprehensive income:

	2024	2023	
Beban penjualan	39,940	11,995	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	1,221,718	929,515	*General and administrative expenses*
Beban penurunan nilai piutang	142,147	1,167,263	*Impairment of receivables*
	1,403,805	2,108,773	

35. PENGHASILAN/ BIAYA KEUANGAN / *35. FINANCE INCOME/ COSTS*

	2024	2023	
Penghasilan keuangan:			*Finance income:*
Bunga	1,738,402	807,635	*Interest*
Amortisasi diskonto piutang lain-lain	430,399	-	*Unwinding of discount of other receivables*
	2,168,801	807,635	
Biaya keuangan:			*Finance costs:*
Bunga	(1,624,130)	(2,024,865)	*Interest*
Biaya keuangan lainnya	(19,421)	(14,850)	*Other finance costs*
	(1,643,551)	(2,039,715)	

Beban bunga atas pinjaman yang dijamin Pemerintah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.306.065 dan Rp 1.215.325.

Interest expenses on loan which are guaranteed by the Government for the year ended 31 December 2024 and 2023 amounted to Rp 1,306,065 and Rp 1,215,325 respectively.

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Grup melakukan transaksi usaha dan lainnya dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi

36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

The Group has engaged in trade and other transactions with related parties. Significant transactions and balances with related parties are as follows:

a. Nature of relationships with related parties

Sifat hubungan/ ***Nature of relationships***	**Pihak berelasi/** ***Related parties***	**Sifat transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entities*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Bank Tabungan Negara Syariah	Bank, deposito berjangka, dan pinjaman/ *Cash in banks, time deposits, and loan*
	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk PT Pertamina Patra Niaga PT Angkasa Pura II (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT PLN Indonesia Power PT PLN Nusantara Power PT Indo Raya Tenaga PT Kilang Pertamina Internasional PT Pertamina Hulu Rokan PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi PT Jasamarga Japek Selatan PT Anggrek Gorontalo International Terminal PT Indonesia International Automotive Proving Ground	Pendapatan jasa kontrak konstruksi/ *Construction contract services revenues*
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Brantas Abipraya (Persero) PT Waskita Beton Precast Tbk PT Adhi Persada Beton PT Wijaya Karya Beton Tbk PT Armindo Catur Pratama PT Indra Karya (Persero) PT Virama Karya	Pendapatan penjualan barang/ *Revenue from sale of goods*
	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	Tagihan atas pengumpulan tol dan pembayaran jasa pengoperasian/ *Payment of receivables of toll collection and toll road operation services*
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Wijaya Karya Beton Tbk PT Waskita Beton Precast Tbk PT Waskita Karya Infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Solusi Bangun Beton PT Semen Indonesia Logistik PT Waskita Sriwijaya Toll PT Nindya Beton PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Pembelian bahan baku dan subkontraktor/ *Purchase of materials and subcontractors*

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***a. Nature of relationships with related parties*** *(continued)*

Sifat Hubungan/ ***Nature of relationships***	**Pihak berelasi/** ***Related parties***	**Sifat transaksi/** ***Nature of transaction***
Ventura bersama/ *Joint ventures*	KSO HK-WIKA KSO PP-WIKA-Waskita KSO Hutama-Modern KSO Hutama Karya-Gerbang Sarana Baja KSO Hutama-Adhi-Abipraya KSO Adhi-Abipraya-MKN KSO Hutama-WIKA-BAP KSO HK-Timas KSO Hutama-Jakon KSO PP-NK KSO Hutama-Betesda Mandiri KSO HKI-ACSET-NK KSO Adhi-HK KSO Hutama-Euroasiatic-Uttam	Piutang ventura bersama dan utang usaha/ *Joint venture receivables and trade payables*

Saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: / *Significant balances of related parties accounts are as follows:*

	2024	**2023**	
Kas dan setara kas	34,891,659	36,821,416	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	690,303	714,461	*Trade receivables*
Piutang ventura bersama	130,206	86,348	*Joint venture receivables*
Piutang retensi	221,803	177,243	*Retention receivables*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	2,890,180	1,867,030	*Gross amount due to customers*
Piutang lain-lain	136,368	64,305	*Other receivables*
Jumlah	38,960,519	39,730,803	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	19.87%	23.41%	***As a percentage of total assets***
Utang usaha	1,316,922	2,249,416	*Trade payables*
Pinjaman jangka pendek	5,921,908	3,454,956	*Short-term borrowings*
Pinjaman jangka panjang	7,671,120	7,892,978	*Long-term borrowings*
Uang muka kontrak	151,194	16,525	*Contract advances*
Utang lain-lain	2,720,564	1,045	*Other payables*
Utang retensi	430,417	422,300	*Retention payables*
Jumlah	18,212,125	14,037,220	***Total***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	31.38%	26.43%	***As a percentage of total liabilities***

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Piutang usaha

b. Trade receivables

	2024	2023
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	151,002	107,625
PT Pertamina Hulu Rokan	128,143	36,702
KSO HKI-ACSET-NK	118,261	89,472
KSO Hutama-Jakon	32,711	8,214
PT Kilang Pertamina Internasional	31,477	44
PT Jasamarga Japek Selatan	30,854	-
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	28,901	-
KSO Hutama-Wika-BAP	13,081	46,398
KSO Adhi-Abipraya-MKN	10,725	25,711
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1,317	28,792
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	550	154,506
KSO PP-WIKA-Waskita	-	44,682
KSO Hutama-Adhi-Abripaya	-	40,290
PT Adhi Persada Beton	-	39,049
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (each below Rp 25 billion)*	207,247	138,995
	754,269	760,480
Provisi atas penurunan nilai/ *Provision for impairment*	(63,966)	(46,019)
Jumlah/*Total*	690,303	714,461
Persentase terhadap jumlah aset/ *As a percentage of total assets*	0.35%	0.42%

c. Piutang ventura bersama

c. Joint venture receivables

	2024	2023
KSO HK-Timas	99,101	38,142
KSO HKI-ACSET-NK	42,756	7,448
KSO Hutama-Euroasiatic-Uttam	29,276	18,997
KSO Hutama-Jakon	27,011	2,274
KSO Hutama Karya-Gerbang Sarana Baja	-	29,915
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (each below Rp 25 billion)*	302,562	326,800
	500,706	423,576
Provisi atas penurunan nilai/ *Provision for impairment*	(370,500)	(337,228)
Jumlah/*Total*	130,206	86,348
Persentase terhadap jumlah aset/ *As a percentage of total assets*	0.07%	0.05%

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

d. Piutang retensi

d. Retention receivables

	2024	2023
PT PLN Nusantara Power	91,340	91,295
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	45,209	29,646
PT Angkasa Pura II (Persero)	23,444	28,915
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (individually below Rp 25 billion)*	120,717	87,111
	280,710	236,967
Provisi atas penurunan nilai/ *Provision for impairment*	(58,907)	(59,724)
Jumlah/ *Total*	221,803	177,243
Persentase terhadap jumlah aset/ *Percentage of total assets*	0.11%	0.10%

e. Tagihan bruto kepada pemberi kerja

e. Gross amounts due from customers

	2024	2023
PT Indo Raya Tenaga	759,482	950,040
PT Indonesia International Automotive Proving Ground	360,490	46,041
PT Kilang Pertamina Internasional	321,146	209,994
PT Pertamina Hulu Rokan	281,908	172,248
PT PLN Nusantara Power	266,832	139,580
PT Jasamarga Japek Selatan	235,219	
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	228,663	-
PT PLN Indonesia Power	226,099	226,684
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	119,299	159,051
PT Anggrek Gorontalo International Terminal	111,532	-
PT Angkasa Pura II (Persero)	51,278	51,278
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	40,125	28,103
PT Pertamina Patra Niaga	20,722	34,386
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (each below Rp 25 billion)*	46,653	29,782
	3,069,448	2,047,187
Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(179,268)	(180,157)
Jumlah/*Total*	2,890,180	1,867,030
Persentase terhadap jumlah aset *As a percentage of total assets*	1.47%	1.10%

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

f. Piutang lain-lain

f. Other receivables

	2024	2023
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	516,669	516,669
PT Indra Karya (Persero)	76,035	4,665
PT Armindo Catur Pratama	36,316	31,496
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (individually below Rp 25 billion)*	72,647	55,892
	701,667	608,722
Provisi atas penurunan nilai/ *Provision for impairment losses*	(565,299)	(544,417)
Jumlah/*Total*	136,368	64,305
Persentase terhadap jumlah aset/ *Percentage of total assets*	0.07%	0.04%

g. Utang usaha

g. Trade payables

	2024	2023
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	572,689	668,540
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	274,741	343,913
PT Wijaya Karya Beton Tbk	90,824	56,876
PT Waskita Beton Precast Tbk	61,889	107,255
KSO HK-Timas	74,842	53,139
PT Semen Indonesia Logistik	45,257	53,886
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	34,632	304,882
KSO Hutama-Betesda Mandiri	29,874	
PT Solusi Bangun Beton	16,976	44,903
PT Waskita Karya Infrastruktur	361	29,228
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	10	361,996
KSO Hutama Karya-Gerbang Sarana Baja	-	64,797
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (individually below Rp 25 billion)*	114,827	160,001
Jumlah/ *Total*	1,316,922	2,249,416
Persentase terhadap jumlah liabilitas/ *Percentage of total liabilities*	2.27%	4.23%

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

h. Uang muka kontrak

h. Contract advances

	2024	2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50,129	-
PT Jasamarga Japek Selatan	46,959	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	39,596	14,087
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (individually below Rp 25 billion)*	14,510	2,438
Jumlah/ *Total*	151,194	16,525
Persentase terhadap jumlah liabilitas/ *Percentage of total liabilities*	0.26%	0.03%

i. Utang retensi

i. Retention payables

	2024	2023
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	200,577	147,556
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	118,793	18,625
PT Waskita Sriwijaya Toll	93,415	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	139,406
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	96,923
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (individually below Rp 25 billion)*	17,632	19,790
Jumlah/ *Total*	430,417	422,300
Persentase terhadap jumlah liabilitas/ *Percentage of total liabilities*	0.74%	0.80%

j. Utang lain-lain

j. Other payables

	2024	2023
PT Waskita Sriwijaya Toll	2,719,537	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (individually below Rp 25 billion*)	1,027	1,045
Jumlah/ *Total*	2,720,564	1,045
Persentase terhadap jumlah liabilitas/ *Percentage of total liabilities*	4.69%	0.00%

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

k. Pendapatan

k. Revenue

	2024	2023
PT Pertamina Hulu Rokan	860,098	470,381
PT Kilang Pertamina Internasional	777,168	127,776
PT Indonesia International Automotive Proving Ground	699,693	-
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	386,912	164,761
PT Jasamarga Japek Selatan	377,415	59,805
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	352,697	379,037
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	331,200	456,517
KSO Hutama-WIKA-BAP	220,429	119,624
KSO HKI-ACSET-NK	178,547	-
PT Pertamina Patra Niaga	127,059	34,110
KSO Hutama-Adhi-Abipraya	123,312	160,034
PT PLN Nusantara Power	121,682	-
PT Anggrek Gorontalo International Terminal	111,532	-
KSO Hutama-Jakon	76,850	74,096
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	51,458	43,367
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	34,997	112
KSO HK-WIKA	31,544	-
KSO Adhi-HK	28,007	-
PT Brantas Abipraya (Persero)	17,779	46,849
PT PLN Indonesia Power	2,028	49,833
KSO PP-NK	103	25,139
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	49,415
PT Adhi Persada Beton	-	40,990
KSO PP-WIKA-Waskita	-	40,254
KSO Hutama-Modern	-	36,542
KSO Adhi-Abipraya-MKN	-	26,473
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	(1,265)	59,757
PT Indo Raya Tenaga	(99,984)	1,116,052
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (each below Rp 25 billion)*	37,055	165,626
	4,846,316	3,746,550
Persentase terhadap jumlah pendapatan/ *As a percentage of total revenue*	15.77%	13.91%

36. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *36. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

I. Beban pokok pendapatan / *I. Cost of revenue*

	2024	2023
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1,145,661	1,540,091
PT Wijaya Karya Beton Tbk	150,019	7,651
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	118,346	994,969
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	108,246	741,347
PT Waskita Beton Precast Tbk	90,993	38,533
PT Semen Indonesia Logistik	63,201	70,281
PT Nindya Beton	59,234	19,771
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	43,250	33,606
PT Solusi Bangun Beton	36,203	69,226
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	25,926	26,665
PT Virama Karya	25,379	16,345
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	22,243	96,149
PT Armindo Catur Pratama	8,205	26,071
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25 miliar)/ *Others (each below Rp 25 billion)*	83,524	121,999
	1,980,430	3,802,704
Persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan/ *As a percentage of total cost of revenue*	7.54%	15.48%

37. ASET DAN LIABILITAS MATA UANG ASING / *37. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES*

	2024			
	Dolar AS/ *US Dollar* (Nilai penuh/ *Full amount)*	**Lain-lain/ *Others* (Nilai penuh/ *Full amount)***	**Jumlah setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	199,286,652	635,718	3,222,329	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	39,702	-	361	*Trade receivables*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	16,473,544	-	266,244	*Gross amount due from customer*
Piutang retensi	326,999	-	5,238	*Retention receivables*
Kas yang dibatasi penggunaannya	409,049,055	-	6,611,051	*Cash restricted for use*
Jumlah aset keuangan	625,175,952	635,718	10,105,223	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	12,176,819	-	191,279	*Trade payables*
Utang retensi	209,501	-	3,382	*Retention payables*
Pinjaman jangka pendek Bank	24,597,622	-	429,849	*Short-term loans Banks*
Medium Term Notes	600,000,000	-	9,697,200	*Medium Term Notes*
Jumlah liabilitas keuangan	636,983,942	-	10,321,710	***Total financial liabilities***
Jumlah liabilitas bersih	11,807,990	(635,718)	216,487	***Total net liabilities***

37. ASET DAN LIABILITAS MATA UANG ASING (lanjutan)

37. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

	2023			
	Dolar AS/ *US Dollar* (Nilai penuh/ *Full amount)*	Lain-lain/ *Others* (Nilai penuh/ *Full amount)*	Jumlah setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	275,217,457	390	4,242,759	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	140,546	-	2,167	*Trade receivables*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	18,526,855	-	285,610	*Gross amount due from customer*
Kas yang dibatasi penggunaannya	215,302,716	-	3,319,107	*Cash restricted for use*
Jumlah aset keuangan	509,187,574	390	7,849,643	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	16,012,130	-	246,843	*Trade payables*
Utang retensi	208,821	-	3,219	*Retention payables*
Medium Term Notes	600,000,000	-	9,249,600	*Medium Term Notes*
Jumlah liabilitas keuangan	616,220,951	-	9,499,662	***Total financial liabilities***
Jumlah liabilitas bersih	107,033,377	(390)	1,650,019	***Total net liabilities***

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan konsolidasian Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the consolidated Group.

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange and other price risks and aging analysis for credit risk.

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

(i) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka pendek dan panjang dalam mata uang Rupiah. Risiko suku bunga dari kas dan deposito tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Grup memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga atas arus kas. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan panjang 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp 164.356.

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika Rupiah melemah/menguat sebesar 1% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk periode berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp 21.649 (2023: tinggi/rendah Rp 165.002).

***38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

1. Financial risk factor

a. Market risk

(i) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from short-term and long-term borrowings denominated in Rupiah. The interest rate risk from cash and deposits is not significant and all other financial instruments are not interest bearing. The Group has borrowings with fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flow interest rate risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

As at 31 December 2024, if interest rates on short-term and long-term borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit for the year would have been Rp 164,356 lower/higher.

(ii) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk primarily arises from recognised monetary assets and liabilities that are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. These exposures are managed partly by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency.

As at 31 December 2024, if the Rupiah weakened/strengthened by 1% against the US Dollar with all other variables held constant, post-tax profit for the year ended would have been lower/higher by Rp 21,649 (2023: higher/lower Rp 165,002).

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit

Grup memiliki risko kredit yang terutama berasal dari penempatan dana pada bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang ventura bersama, piutang retensi, piutang lain-lain dan aset keuangan lainnya. Semua kas di bank dan deposito ditempatkan di bank asing dan lokal yang memiliki reputasi baik.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan pengetahuan terhadap pelanggan, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Grup telah melakukan upaya penagihan piutang-piutang tersebut diantaranya dengan melakukan penjadwalan ulang, restrukturisasi dan upaya hukum jika memang diperlukan.

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu pada laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu sebagai berikut:

***38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***1. Financial risk factor** (continued)*

b. Credit risk

The Group exposed to credit risk arises from cash in banks, restricted cash, trade receivables, receivables from joint ventures, retention receivables, other receivables and other financial assets. All the cash in banks and deposits are placed in reputable foreign and local banks.

The credit risks are when the Group experience risks arising from failure of customer or counter parties in meeting their contractual obligations. Management is in the opinion that there are no significance concentrated risks in credits. The Group is controlling the credit risks by maintaining good relationship with bona fide parties, keeps on scrutinising information on customers, and monitoring on periodical basis collectability of receivables to keep un-collectability at a minimum.

The Group has made efforts to collect these receivables including through rescheduling, restructuring and legal actions as necessary.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the consolidated statements of financial position after deducting any provision for doubtful receivables are as follows:

	2024	2023	
Kas dan setara kas	36,769,029	39,059,927	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	1,056,870	1,129,371	*Trade receivables*
Piutang ventura bersama	130,206	86,348	*Receivables from joint ventures*
Piutang retensi	363,282	288,420	*Retention receivables*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	3,414,061	2,541,154	*Gross amount due from customers*
Piutang lain-lain	6,166,981	5,686,240	*Other receivables*
Uang muka dan beban dibayar dimuka	193,137	193,137	*Advances and prepayments*
Kas yang dibatasi penggunaannya	7,329,695	3,390,452	*Restricted cash*
Aset keuangan - hak pengusahaan jalan tol	2,865,228	-	*Financial asset - toll road concession rights*
Aset keuangan lainnya	73,423	68,187	*Other financial assets*
	58,361,912	52,443,236	

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit

(i) Piutang usaha

Rata-rata periode kredit atas penjualan barang dan jasa bervariasi untuk seluruh bisnis Grup, namun tidak lebih dari 90 hari, kecuali untuk piutang tidak lancar.

Grup menyajikan kerugian kredit terhadap piutang usaha pada tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

***38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***1. Financial risk factor** (continued)*

b. Credit risk

(i) Trade receivables

The average credit period on sale of goods and services varies among Group businesses, but is not more than 90 days, except for non-current receivables.

The Group provides for credit losses against the trade receivables in 2024 and 2023 as follows:

	2024		
	Tingkat Kerugian kredit ekspektasian/ *Expected credit loss rate (%)*	**Jumlah tercatat/ *Carrying amount***	
Belum jatuh tempo	0.18 - 4.14	616,705	*Not past due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
Kurang dari 6 bulan	2.57 - 22	267,900	*Less than 6 months*
Antara 6 - 12 bulan	5.51 - 27.93	169,593	*Between 6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	15.73 - 100	330,933	*More than 12 months*
Jumlah piutang usaha, kotor		1,385,131	*Total trade receivables, gross*
Provisi atas penurunan nilai		(328,261)	*Provision for impairment*
		1,056,870	

	2023		
	Tingkat Kerugian kredit ekspektasian/ *Expected credit loss rate (%)*	**Jumlah tercatat/ *Carrying amount***	
Belum jatuh tempo	0.28 - 4.36	697,988	*Not past due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
Kurang dari 6 bulan	4.09 - 17.01	278,578	*Less than 6 months*
Antara 6 - 12 bulan	8.78 - 27.93	97,559	*Between 6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	21.31 - 100	366,212	*More than 12 months*
Jumlah piutang usaha, kotor		1,440,337	*Total trade receivables, gross*
Provisi atas penurunan nilai		(310,966)	*Provision for impairment*
		1,129,371	

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Tagihan bruto kepada pemberi kerja

Grup menyajikan kerugian kredit terhadap tagihan bruto kepada pemberi kerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

***38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***1. Financial risk factor** (continued)*

b. Credit risk (continued)

(ii) Gross amount due from customers

The Group provides for credit losses against the gross amount due from customers in 2024 as follows:

	2024		
	Tingkat Kerugian kredit ekspektasian/ *Expected credit loss rate (%)*	**Jumlah tercatat/ *Carrying amount***	
Performing	0.00 - 14.44	3,018,419	*Performing*
Underperforming	12.51 - 100	581,186	*Underperforming*
Non-performing	49.40 - 100	42,164	*Non-performing*
Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja, kotor		3,641,769	*Total gross amount due from customers, gross*
Provisi atas penurunan nilai		(227,708)	*Provision for impairment*
		3,414,061	

	2023		
	Tingkat Kerugian kredit ekspektasian/ *Expected credit loss rate (%)*	**Jumlah tercatat/ *Carrying amount***	
Performing	0.00 - 14.44	2,551,820	*Performing*
Underperforming	12.51 - 100	159,051	*Underperforming*
Non-performing	49.40 - 100	50,636	*Non-performing*
Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja, kotor		2,761,507	*Total gross amount due from customers, gross*
Provisi atas penurunan nilai		(220,353)	*Provision for impairment*
		2,541,154	

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the Group's cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflows of short-term expenditure.

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang. Manajemen juga terus-menerus melakukan penelaahan terhadap pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

1. Financial risk factor *(continued)*

c. Liquidity risk (continued)

In managing the liquidity risks, the management monitors and at the same time maintains the amount of cash and cash equivalents required to finance its business operations and to mitigate fluctuation in cash flows. Management makes periodic evaluation of projected and actual cash flows, which include the maturities of payables and borrowings. Management also keeps on assessing financial markets to get the most beneficial sources of funds.

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2024					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ *More than one year and not later than five years***	**Lebih dari lima tahun dan kurang dari sepuluh tahun/ *More than five year and not later than ten years***	**Lebih dari *sepuluh tahun/ More than ten years***	**Jumlah/*Total***	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang usaha	11,421,996	-	-	-	11,421,996	*Trade payables*
Utang lain-lain	3,031,079	13,483	-	-	3,044,562	*Other payables*
Pinjaman jangka pendek:						*Short-term loans:*
- Bank	6,043,980	-	-	-	6,043,980	*Bank* -
Pinjaman jangka panjang:						*Long-term loans:*
- Bank	751,818	4,833,418	11,523,311	-	17,108,547	*Bank* -
- Non-bank	102,505	374,299	381,700	398,509	1,257,013	*Non-bank* -
- MTN	363,645	1,454,580	9,818,415	-	11,636,640	*Medium Term Notes* -
- Liabilitas sewa	59,904	127,890	-	-	187,794	*Lease payables* -
- Utang obligasi	692,838	8,291,881	-	-	8,984,719	*Bonds payable* -
- Sukuk Mudharabah	205,608	785,650	-	-	991,258	*Sukuk Mudharabah* -
Akrual	1,656,267	-	-	-	1,656,267	*Accruals*
Utang retensi	368,011	782,327	-	-	1,150,338	*Retention payables*
	24,697,651	16,663,528	21,723,426	398,509	63,483,114	

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

1. Faktor risiko keuangan (lanjutan) / *1. Financial risk factor (continued)*

c. Risiko likuiditas (lanjutan) / *c. Liquidity risk (continued)*

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga: (lanjutan)

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments: (continued)

	2023					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ *More than one year and not later than five years*	Lebih dari lima tahun dan kurang dari sepuluh tahun/ *More than five year and not later than ten years*	Lebih dari *sepuluh tahun/ More than ten years*	Jumlah/*Total*	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang usaha	11,193,143	-	-	-	11,193,143	*Trade payables*
Utang lain-lain	212,160	14,225	-	-	226,385	*Other payables*
Pinjaman jangka pendek:						*Short-term loans:*
- Bank	3,542,279	-	-	-	3,542,279	*Bank* -
Pinjaman jangka panjang:						*Long-term loans:*
- Bank	766,825	5,035,959	12,203,130	-	18,005,914	*Bank* -
- Non-bank	62,165	248,658	491,442	978,288	1,780,553	*Non-bank* -
- MTN	1,909,943	1,387,440	9,740,985	-	13,038,368	*Medium Term Notes* -
- Liabilitas sewa	50,950	153,842	-	-	204,792	*Lease payables* -
- Utang obligasi	646,077	8,242,192	744,542	-	9,632,811	*Bonds payable* -
- Sukuk Mudharabah	84,804	922,179	69,681	-	1,076,664	*Sukuk Mudharabah* -
Akrual	1,246,398	-	-	-	1,246,398	*Accruals*
Utang retensi	294,879	674,295	-	-	969,174	*Retention payables*
	20,009,623	16,678,790	23,249,780	978,288	60,916,481	

2. Estimasi nilai wajar / *2. Fair value estimation*

PSAK No. 113, "Pengukuran nilai wajar", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1).
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Level 2).
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Level 3).

PSAK No. 113, "Fair value measurement", requires disclosure of fair value measurements through the following fair value measurement hierarchy:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1).*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (such as prices) or indirectly (such on derived from prices) (Level 2).*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / ***38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

2. Estimasi nilai wajar (lanjutan) / ***2. Fair value estimation*** *(continued)*

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset keuangan:					***Financial assets:***
Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					***At amortised cost***
Kas dan setara kas	36,769,029	36,769,029	39,059,927	39,059,927	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	1,056,870	1,056,870	1,129,371	1,129,371	*Trade receivables*
Piutang ventura bersama	130,206	130,206	86,348	86,348	*Joint ventures receivables*
Piutang retensi	363,282	363,282	288,420	288,420	*Retention receivables*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	3,414,061	3,414,061	2,541,154	2,541,154	*Gross amounts due from customers*
Piutang lain-lain	6,166,981	6,166,981	5,686,240	5,686,240	*Other receivables*
Kas yang dibatasi penggunaannya	7,329,695	7,329,695	3,390,452	3,390,452	*Restricted cash*
Aset keuangan - hak pengusahaan jalan tol	2,865,228	2,865,228	-	-	*Financial asset - toll road concession rights*
Aset keuangan lainnya			2,962	2,962	*Other financial assets*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					***At fair value through profit or loss***
Aset keuangan lainnya	73,423	73,423	65,225	65,225	*Other financial assets*
Uang muka dan beban dibayar dimuka	193,137	193,137	193,137	193,137	*Advances and prepayments*
	58,361,912	58,361,912	52,443,236	52,443,236	
Liabilitas keuangan:					***Financial liabilities:***
Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					***At amortised cost***
Utang usaha	11,421,996	11,421,996	11,193,143	11,193,143	*Trade payables*
Utang lain-lain	3,044,562	3,044,562	226,385	226,385	*Other payables*
Utang jangka pendek:					*Short-term loans:*
- Bank	5,921,908	5,921,908	3,454,956	3,454,956	*Banks -*
Utang jangka panjang:					*Long-term loans:*
- Bank	11,106,392	11,036,704	11,083,452	11,014,793	*Banks -*
- Non-Bank	726,326	721,769	948,184	942,310	*Non-Banks -*
- MTN	9,649,315	9,087,669	10,670,353	10,005,354	*MTN -*
- Liabilitas sewa	171,060	169,987	188,058	186,893	*Lease liabilities -*
- Utang obligasi	7,294,920	7,249,148	7,326,122	7,280,739	*Bonds payables -*
- Sukuk Mudharabah	794,464	789,479	810,101	805,083	*Sukuk Mudharabah -*
Akrual	4,315,189	4,288,113	3,505,881	3,484,163	*Accruals*
Utang retensi	1,127,990	1,120,912	969,174	963,170	*Retention payables*
	55,574,122	54,852,247	50,375,809	49,556,989	

Nilai wajar untuk aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo kurang dari satu tahun mendekati nilai tercatatnya karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of financial assets and liabilities with maturity less than one year approximate their carrying value, as the impact of discounting is not significant.

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

3. Manajemen risiko permodalan / *3. Capital risk management*

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditures and also consideration of future capital needs.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowings and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

39. LABA BERSIH PER SAHAM / *39. EARNINGS PER SHARE*

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

Earnings per share is calculated by dividing net income by the weight average number of ordinary shares outstanding during the period.

	2024	2023	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2,731,253	1,827,891	*Profit for the year attributable to owners of the parents*
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar - saham biasa	123,796,641	83,898,389	*Weighted average number of shares ordinary outstanding*
Laba bersih per saham - dasar (nilai penuh)	22,062	21,787	*Profit per share - basic (full amount)*

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba bersih per saham dasar sama dengan laba bersih per saham dilusian.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

40. INFORMASI SEGMEN / *40. SEGMENT INFORMATION*

Kepala Pengambilan Keputusan Grup ("CODM"), yang terdiri dari Dewan Direksi memeriksa kinerja Grup baik dari segi bisnis maupun produk dan telah mengidentifikasi empat segmen bisnis. CODM menggunakan ukuran pendapatan dan laba untuk menilai kinerja segmen operasi sebagai indikator utama.

The Group's Chief of Decision Making ("CODM"), consisting of the Directors examines the Group's performance both from business and product and has identified four reportable segments of its business. CODM primarily uses a measure of revenue and profit to assess the performance of the operating segments.

40. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Segmen Grup yang dikelompokkan berdasarkan jenis usaha atau produk adalah sebagai berikut:

***40. SEGMENT INFORMATION** (continued)*

Group's segments which are classified based on type of businesses or products are as follows:

	2024						
	Konstruksi/ *Construction*	**Badan usaha jalan tol/ *Toll roads business entity***	**Pengembang properti/ *Property developer***	**Pabrikasi aspal dan beton, operasi dan pemeliharaan, dan rest area jalan tol/ *Hotmix and precast manufacture, operation and maintenance, and rest area of toll road***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan eksternal	7,602,526	20,791,011	261,708	1,597,048	-	30,252,293	*External revenue*
Pendapatan antar segmen	13,525,231	-	-	2,992,029	(16,517,260)	-	*Intersegment revenue*
Jumlah pendapatan	21,127,757	20,791,011	261,708	4,589,077	(16,517,260)	30,252,293	***Total revenue***
Beban pokok pendapatan	(18,889,635)	(19,451,759)	(268,645)	(3,982,185)	16,613,953	(25,978,271)	***Cost of revenue***
Laba (rugi) bruto	2,238,122	1,339,252	(6,937)	606,892	96,693	4,274,022	***Gross profit (loss)***
Beban penjualan	(11,958)	(776)	(306)	(26,900)	-	(39,940)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(805,126)	(218,702)	(60,862)	(157,374)	20,346	(1,221,718)	*General and administrative expenses*
Beban penurunan nilai piutang	(153,785)	-	29,897	(18,259)	-	(142,147)	*Impairment of receivables*
Beban pajak penghasilan final	(546,677)	(88,849)	(4,552)	(22,374)	-	(662,452)	*Final tax expenses*
Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama	1,425,209	-	-	-	(972,776)	452,433	*Shares of net profit of associates and joint venture*
Penghasilan (beban) lainnya, bersih	(166,029)	133	11,242	(6,087)	(16,214)	(176,955)	*Other income (expenses), net*
Laba/(rugi) usaha	1,979,756	1,031,058	(31,518)	375,898	(871,951)	2,483,243	***Operating income/(loss)***
Pendapatan keuangan	64,245	2,177,608	58,364	11,394	(142,810)	2,168,801	*Finance income*
Biaya keuangan	(257,239)	(1,148,646)	(287,095)	(93,381)	142,810	(1,643,551)	*Finance costs*
Laba (rugi) kurs, bersih	7,971	(7,560)	-	(22,277)	(848)	(22,714)	*Exchange rate profit (loss), net*
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	1,794,733	2,052,460	(260,249)	271,634	(872,799)	2,985,779	***Profit/(loss) before income tax***
Beban pajak penghasilan	(12,137)	(131,383)	(7,141)	(70,337)	1,741	(219,257)	*Income tax expenses*
Laba/(rugi) tahun berjalan	1,782,596	1,921,077	(267,390)	201,297	(871,058)	2,766,522	***Profit/(loss) for the year***

40. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *40. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	2023						
	Konstruksi/ *Construction*	**Badan usaha jalan tol/ *Toll roads business entity***	**Pengembang properti/ *Property developer***	**Pabrikasi aspal dan beton, operasi dan pemeliharaan, dan rest area jalan tol/ *Hotmix and precast manufacture, operation and maintenance, and rest area of toll road***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan eksternal	4,663,475	20,412,189	299,720	1,550,937	-	26,926,321	*External revenue*
Pendapatan antar segmen	12,332,269	-	19,542	3,016,009	(15,367,820)	-	*Intersegment revenue*
Jumlah pendapatan	16,995,744	20,412,189	319,262	4,566,946	(15,367,820)	26,926,321	***Total revenue***
Beban pokok pendapatan	(15,119,309)	(19,998,947)	(362,894)	(4,093,657)	15,006,280	(24,568,527)	***Cost of revenue***
Laba (rugi) bruto	1,876,435	413,242	(43,632)	473,289	(361,540)	2,357,794	***Gross profit (loss)***
Beban penjualan	(9,074)	(657)	(134)	(2,130)	-	(11,995)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(606,073)	(132,731)	(44,710)	(165,543)	19,542	(929,515)	*General and administrative expenses*
Beban penurunan nilai piutang	(222,137)	(389,138)	(541,702)	(14,286)		(1,167,263)	*Impairment of receivables*
Beban penurunan nilai aset real estat	-	-	(180,000)	-	-	(180,000)	*Impairment of asset real estates*
Beban pajak penghasilan final	(426,563)	(21,938)	(4,412)	(29,831)	-	(482,744)	*Final tax expenses*
Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama	173,922	-	-	1,196	-	175,118	*Shares of net profit of associates and joint venture*
Keuntungan dari penjualan hak pengusahaan jalan tol	-	3,643,245	-	-	-	3,643,245	*Gain on sale of toll road concession rights*
Penghasilan (beban) lainnya, bersih	(38,459)	(215,364)	47,013	(37,414)	66,217	(178,007)	*Other income (expenses), net*
Laba/(rugi) usaha	748,051	3,296,659	(767,577)	225,281	(275,781)	3,226,633	***Operating income/(loss)***
Pendapatan keuangan	356,914	640,383	20,705	7,915	(218,282)	807,635	*Finance income*
Biaya keuangan	(259,854)	(1,437,161)	(430,959)	(130,023)	218,282	(2,039,715)	*Finance costs*
Laba (rugi) kurs, bersih	(11,092)	180,783	-	(15,663)	(4,378)	149,650	*Exchange rate profit (loss), net*
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	834,019	2,680,664	(1,177,831)	87,510	(280,159)	2,144,203	***Profit/(loss) before income tax***
Beban pajak penghasilan	(6,755)	(221,834)	-	(43,058)	-	(271,647)	*Income tax expenses*
Laba/(rugi) tahun berjalan	827,264	2,458,830	(1,177,831)	44,452	(280,159)	1,872,556	***Profit/(loss) for the year***

	2024						
	Konstruksi/ *Construction*	**Badan usaha jalan tol/ *Toll roads business entity***	**Pengembang properti/ *Property developer***	**Pabrikasi aspal dan beton, operasi dan pemeliharaan, dan rest area jalan tol/ *Hotmix and precast manufacture, operation and maintenance, and rest area of toll road***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Aset							***Assets***
Aset segmen	18,219,030	199,738,559	4,792,138	3,721,593	(29,955,160)	196,516,160	*Segment assets*
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segmen	17,810,204	46,465,146	3,700,796	1,870,426	(11,804,560)	58,042,012	*Segment liabilities*

40. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *40. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	2023						
	Konstruksi/ *Construction*	Badan usaha jalan tol/ *Toll roads business entity*	Pengembang properti/ *Property developer*	Pabrikasi aspal dan beton, operasi dan pemeliharaan, dan rest area jalan tol/ *Hotmix and precast manufacture, operation and maintenance, and rest area of toll road*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Aset segmen	14,506,117	152,872,735	4,034,665	3,478,108	(5,152,138)	169,739,487	*Segment assets*
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segmen	12,683,245	36,317,491	6,943,027	1,775,376	(4,604,165)	53,114,974	*Segment liabilities*

41. PERIKATAN DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN / *41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS*

a. Perikatan kontrak konstruksi / *a. Construction contract agreements*

Grup melakukan perikatan kontrak konstruksi dengan berbagai pihak. Kontrak-kontrak yang signifikan pada tanggal pelaporan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Group entered into a construction, contract with other parties. Significant contracts as at reporting date, among others are as follows:

No.	Nama proyek/ *Project name*	Pemberi kerja/ *Owner*	Nilai kontrak/ *Contract value*		Masa pelaksanaan/ *Contact period* Mulai/start	Akhir/*End*
1	LL. Coal Fired Stream Power Plant Project, Suralaya	PT Indo Raya Tenaga	Rp	4,423,612	16/10/2020	22/03/2025
2	Pembangunan Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo Elelim	Kementerian Pekerjaan Umum	Rp	3,008,287	03/07/2024	03/07/2039
3	Tol Serbelawan - Siantar	PT Hutama Marga Waskita	Rp	2,463,009	29/08/2019	31/03/2025
4	LL. Muara Tawar CCPP, Bekasi Jawa Barat	PT PLN Nusantara Power	Rp	2,043,227	21/12/2017	20/06/2020*)
5	LL. Lawe-Lawe Facilities Balikpapan	PT Kilang Pertamina Internasional	Rp	1,465,060	15/10/2019	25/09/2025
6	EPC Tuban Jetty	PT Solusi Bangun	Rp	1,118,500	17/01/2022	11/08/2023*)
		Indonesia Tbk	Rp	1,118,500	17/01/2022	11/08/2023*)
7	PLTGU Tambak Lorok	PT Indonesia Power	Rp	820,211	24/07/2017	17/11/2023*)
8	Irigasi Rentang	Kementerian Pekerjaan Umum	Rp	625,058	07/08/2020	19/04/2025
9	Proving Ground Bekasi	Kementerian Perhubungan	Rp	507,000	26/03/2024	31/12/2025
10	SMO Road & Wellpad Improvement Long Term	PT Pertamina (Persero)	Rp	337,544	08/09/2023	07/09/2026

*) Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pembuatan amandemen kontrak masih dalam proses/
As of the issuance date of these consolidated financial statement, the amandement contracts is still in process.

41. PERIKATAN DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Perusahaan memiliki beberapa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT") dengan pemerintah (melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengatur Jalan Tol) dengan rincian sebagai berikut:

***41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (continued)*

b. Toll Road Concession Agreements

The Company owned several toll road concession agreement with government (through Ministry of Public Works and Housing and Toll Road Regulatory Agency) with details as follows:

No	Ruas tol/*Toll section*	Dasar penugasan/ *Legal standing*	Isi perjanjian/ *Scope of contract*	Masa konsesi/ *Concession period*
1.	Jalan Tol Trans Sumatera: - Ruas/ *Section* Medan – Binjai*) - Ruas/ *Section* Palembang – Simpang Indralaya - Ruas/ *Section* Pekanbaru – Dumai - Ruas/ *Section* Bakauheni – Terbanggi Besar*) - Ruas/ *Section* Terbanggi Besar – Pematang Panggang - Ruas/ *Section* Pematang Panggang – Kayu Agung - Ruas/ *Section* Indrapura – Kisaran - Ruas/ *Section* Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang - Ruas/ Section Sigli – Banda Aceh - Ruas/ Section Simpang Indralaya – Muara Enim - Ruas/ *Section* Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau - Ruas/ *Section* Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu - Ruas/ *Section* Binjai – Langsa - Ruas/ *Section* Kuala Tanjung – Indrapura – Tebing Tinggi – Parapat - Ruas/ *Section* Rengat – Pekanbaru (Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru) - Ruas/ *Section* Betung (Sp. Sekayu) - Tempino – Jambi - Ruas/ *Section* Pelabuhan Palembang – Betung	1. Perpres No. 100 tahun 2014 tanggal 18 September 2014/ *Presidential Decree No. 100 year 2014, dated 18 September 2014* 2. Perpres No. 42 tahun 2024 tanggal 25Maret 2024/ *Presidential Decree No. 42 year 2024, dated 25 Maret 2024* 3. PPJT yang dikeluarkan dari September 2015 – September 2024/*PPJT issued from September 2015 - September 2024*	Pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan, konstruksi, pengoperasioan, dan pemeliharaan/ *Toll road concession which include financing, planning construction, operation and, maintenance*.	50 tahun/ *years*

Berdasarkan Perpres No. 42 tahun 2024, Grup juga telah mendapatkan penugasan untuk mengerjakan ruas JTTS berikut, namun PPJT atas ruas tersebut masih dalam proses, yaitu:

Based on Presidential Decree No. 42 year 2024, the Group has also received assignment to construct the following JTTS segments, however the PPJT is still in the process:

- Ruas/ *Section* Jambi – Rengat
- Ruas/ Section Rengat – Pekanbaru (Rengat – Junction Pekanbaru)
- Ruas/ *Section* Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat
- Ruas/ *Section* Rantau Prapat – Kisaran
- Ruas/ *Section* Langsa – Lhokseumawe
- Ruas/ Section Parapat – Tarutung - Sibolga
- Ruas/ *Section* Lhokseumawe - Sigli
- Ruas/ *Section* Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim
- Ruas/ *Section* Pelabuhan Panjang – Lematang

*)
Pada Juni 2023, Perusahaan telah melakukan divestasi atas 2 ruas tersebut kepada PT Indonesia Investment Authority. (lihat Catatan 41g).

*)
In June 2023, the Company has divested both sections to Indonesia Investment Authority (refer to Note 41g)

41. PERIKATAN DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (lanjutan)

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(continued)*

b. Toll Road Concession Agreements *(continued)*

No	Ruas tol/*Toll section*	Dasar penugasan/ *Legal standing*	Isi perjanjian/ *Scope of contract*	Masa konsesi/ *Concession period*
2.	Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi ("JORR.S")/ *Jakarta Outer Ring Section Pondok Pinang – Jagorawi ("JORR.S")*	Keputusan Menteri PUPR No. JL.03.04-Mn/1274 tanggal 15 *November 2017/ Decree of the Minister of Public Works and Housing No.JL03.04-Mn/1274 Dated 15 November 2017* PPJT berdasarkan Akta Notaris No.23 tanggal 29 November 2017/ *PPJT based on Notarial Deed No.23 dated 29 November 2017*	Pengusahaan jalan tol meliputi pengoperasian dan pemeliharaan/ *Toll road concession which includes operation and maintenance*	36 tahun/ *years*
3.	Jalan Tol Akses Tanjung Priok/ *Tanjung Priok Access Toll Road*	Keputusan Menteri PUPR No. JL.03.04-Mn/1274 tanggal 15 *November 2017/ Decree of the Minister of Public Works and Housing No.JL03.04-Mn/1274 Dated 15 November 2017* PPJT berdasarkan Akta Notaris No.23 tanggal 29 November 2017/ *PPJT based on Notarial Deed No.23 dated 29 November 2017*	Pengusahaan jalan tol meliputi pengoperasian dan pemeliharaan/ *Toll road concession which includes operation and maintenance*	40 tahun/ *years*

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mempunyai komitmen kontraktual atas pembelian barang modal sehubungan dengan pembangunan JTTS sebesar Rp 28.296.255.

As at 31 December 2024, the Group had contractual capital commitments related to JTTS property development amounting to Rp 28,296,255.

c. Perjanjian Ventura dan Operasi Bersama

Grup juga memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui entitas ventura atau operasi bersama yang dibentuk dengan perusahaan mitra, diantaranya sebagai berikut:

c. Joint Venture and Operations Agreements

The Group has commitments to carry out construction contracts through its joint ventures or operations set up with partners, among others are as follows:

No	Nama proyek/ *Project name*	Nama KSO/ *JO Name*	Porsi Perusahaan/ *The Company's portion*		Jangka waktu/ *Contract period*	
			%	Nilai Kontrak/ *Contract value*	Mulai/ *Starting*	Akhir/ *Completion*
1.	Pembangunan Tol IKN P. Balang - Sp.Riko	KSO HK-Modern-BCK	65%	2,046,832	28/11/2023	21/01/2025
2.	MRT CP – 203	KSO HK-Sumitomo	36.45%	1,486,849	18/09/2021	18/12/2026
3.	Tol IKN Karangjoang - KKT Kariangau	KSO HK - Adhi - Brantas	38%	1,190,798	12/09/2022	06/06/2024
4.	Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 Karangjoang	KSO HK - Adhi - Nindya - Brantas	33%	847,475	25/12/2023	13/06/2025
5.	Bendungan Bulango Ulu	KSO HK - BRP - BNL	70%	769,435	26/06/2019	30/06/2025
6.	Jalan Tol Semarang Demak	KSO HK - Beijing Urban Construction Group Co. Ltd.	40%	733,818	12/01/2023	06/04/2025
7.	Bendung Tigadihaji	KSO HK - BRP	75%	729,060	17/10/2018	31/12/2025
8.	Bendungan Cijurey	KSO HK - SAC Nusantara	70%	665,252	31/08/2023	03/10/2028
9.	Bendungan Way Apu	KSO HK - JAKON	70%	660,939	28/12/2017	12/08/2025
10.	Bendungan Maninting	KSO HK – BANGUNNUSA	80%	651,838	19/09/2019	31/03/2025

41. PERIKATAN DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Investasi saham pada PT Cempaka Surya Kencana

Pada Februari 2019, PT HK Realtindo ("HKR"), anak perusahaan, menandatangani perjanjian dengan PT Cempaka Surya Kencana ("CSK"), beserta PT Azbindo Nusantara ("Azbindo") dan Aziz Mochdar ("Aziz") yang merupakan pemegang saham CSK. Sesuai dengan perjanjian tersebut, para pihak menyetujui rencana awal Perusahaan untuk melakukan pembelian saham CSK dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengembangkan proyek Technopark yang berlokasi di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Indonesia.

Pada Maret 2019, HKR melakukan pembayaran komitmen pembelian saham sebesar Rp 200 miliar. Pada bulan Juni dan Agustus 2019, sebagai bagian dari kesepakatan, HKR memberikan pinjaman kepada CSK sebesar Rp 1 triliun dengan bunga 10% per tahun yang akan jatuh tempo pada 17 Januari 2021. Atas pinjaman tersebut, HKR memperoleh jaminan dalam bentuk tanah milik CSK seluas 18.056 m2 yang berlokasi di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sumber dana untuk pembayaran komitmen dan pemberian pinjaman kepada CSK berasal dari Perusahaan.

Kesepakatan pembelian saham CSK mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terjadi pada Februari 2020 saat HKR dan Azbindo menandatangani akta jual beli pembelian 242.000 (nilai penuh) lembar saham CSK dengan harga pembelian sebesar Rp 2,2 triliun. Sesuai dengan akta tersebut, HKR diwajibkan untuk membayar Rp 2 triliun, yang merupakan sisa harga pembelian setelah dikurangi uang muka, paling lambat pada 17 Januari 2021. Melalui akta tersebut, HKR memperoleh kepemilikan CSK sebesar 55%. HKR dan Azbindo juga menandatangani perjanjian untuk menovasikan pinjaman sebesar Rp 1 triliun dari CSK ke Azbindo.

***41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (continued)*

d. Investment in share of PT Cempaka Surya Kencana

In February 2019, the PT HK Realtindo ("HKR"), a subsidiary, signed an agreement with PT Cempaka Surya Kencana ("CSK"), together with PT Azbindo Nusantara ("Azbindo") and Aziz Mochdar ("Aziz"), the shareholders of CSK. Pursuant to the agreement, the signing parties agreed on the preliminary plan of the Company to acquire the shares of CSK subject to certain terms and conditions precedent to develop the Technopark project located in Mampang Prapatan, South Jakarta, Indonesia.

In March 2019, HKR paid Rp 200 billion for the commitment of shares acquisition. In June and August 2019, as part of the negotiated terms, HKR provided Rp 1 trillion loan to CSK with interest at 10% per annum that would be due for repayment on 17 January 2021. Regarding this loan, HKR obtained a guarantee in the form of lands owned by CSK with a total area of 18,056 m2 located in Mampang Prapatan, South Jakarta. The source of funds for the payment of commitment advances and loan provided to CSK came from the company.

The shares acquisition arrangement has changed several times. The latest change took effect in February 2020, when HKR and Azbindo signed a deed for sale and purchase of 242,000 (full amount) shares of CSK with purchase consideration of Rp 2.2 trillion. Pursuant to the deed, HKR is required to pay Rp 2 trillion, the remaining purchase consideration net of commitment advance, on 17 January 2021 at the latest. Through this deed, HKR obtained 55% ownership of CSK. HKR and Azbindo also signed an agreement to novate the Rp 1 trillion loan received by CSK to Azbindo.

41. PERIKATAN DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Investasi saham pada PT Cempaka Surya Kencana (lanjutan)

Pada bulan Juli 2023, CSK, Aziz Mochdar dan Azbindo ("Para Penggugat") telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menggugat Perusahaan dan HKR dengan dalil bahwa Perusahaan dan HKR telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan serangkaian tipu daya untuk menguasai saham Azbindo dan Aziz Mochdar di CSK. Atas hal tersebut, Para Penggugat meminta agar keseluruhan transaksi dibatalkan serta meminta Perusahaan dan HKR untuk secara tanggung renteng mengganti rugi material dan immaterial kepada para Penggugat. CSK, Azbindo dan Aziz menggugat Perusahaan dan HKR atas kerugian materil dan immateriil sebesar Rp 14,7 triliun ditambah bunga 6% sejak perkara didaftarkan.

Atas gugatan tersebut, Perusahaan dan HKR telah melibatkan penasihat hukum eksternal untuk membantu manajemen dalam kasus hukum dan memperkirakan kemungkinan Grup akan memenangkan kasus hukum dan memulihkan piutang lain-lain dari CSK. Perusahaan dan HKR mengajukan jawaban serta rekonvensi terhadap Para Penggugat dan membantah tuduhan adanya perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa justru Para Penggugat yang telah melakukan serangkaian tipu daya agar Perusahaan dan HKR tertarik untuk menempatkan dana di CSK dan juga meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dan mengembalikan uang sebesar Rp 1,3 triliun beserta bunga yang telah diberikan oleh HK dan HKR kepada Para Penggugat.

CSK, Azbindo dan Aziz telah membalas rekonvensi melalui replik pada bulan November 2023. Perusahaan dan HKR juga membalas melalui duplik pada bulan Desember 2023. Selanjutnya pada bulan Januari 2024, putusan sela dibacakan di persidangan dan saat ini Perusahaan dan HKR sedang dalam proses pembuktian. Informasi selanjutnya terkait kasus ini dapat dilihat pada Catatan 42.

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen mengklasifikasikan pembayaran uang muka dan piutang sebagai piutang lain-lain jangka panjang, dan mencatat provisi penurunan nilai sebesar Rp 696.141.

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(continued)*

d. Investment in share of PT Cempaka Surya Kencana *(continued)*

In July 2023, CSK, Aziz Mochdar and Azbindo ("the Plaintiffs") submitted a lawsuit to East Jakarta District Court to sue the Company and HKR, claiming that the Company and HKR have committed unlawful acts with a series of deceit acts to control Azbindo and Aziz Mochdar shares in CSK. Therefore, the Plaintiffs requested to cancel all of the agreements related to the transaction and requested the Company and HKR to compensate the Plaintiffs jointly and severally for material and immaterial losses amounting to Rp 14.7 trillion, plus 6% interest since the lawsuit was registered.

Regarding this lawsuit, the Company and HKR have involved external legal counsel to assist management in the legal case and to estimate the likelihood that the Group will win the legal case and recover the other receivables from CSK. The Company and HKR submitted answers and reconvention claim to the Plaintiffs and denied the allegations of unlawful acts, claiming that it was the Plaintiffs who conducted a series of deceit acts to attract the Company and HKR to place its fund to CSK and requested the East Jakarta District Court to cancel all of the agreements signed by the parties and return the Rp 1.3 trillion and its interest that had been given by HK and HKR to the Plaintiffs.

CSK, Azbindo and Aziz have replied to the reconvention via replication in November 2023. The Company and HKR also replied via rejoinder in December 2023. Subsequently in January 2024, an interlocutory ruling was read out at the trial and currently the Company and HKR are in process for substantiation. Further information regarding this case can be found in Note 42.

As of 31 December 2024, management classified the advance payment and the receivables as other receivables - long term, and booked an impairment provision amounting to Rp 696,141.

41. PERIKATAN DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Grup memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan, termasuk fasilitas kredit non-kas, dari bank dan lembaga keuangan non-bank pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 22.419.147.

f. Fasilitas kredit pemasok

Grup memiliki kredit pembiayaan pemasok dari bank pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.285.087 (2023: Rp 6.094.111).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup menandatangani perjanjian pembiayaan pemasok dengan beberapa bank. Syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak berubah dari utang dagang dari pemasok ini, kecuali tanggal jatuh tempo telah diperpanjang menjadi 90 – 180 hari dari yang sebelumnya 0 – 90 hari setelah tanggal faktur.

Nilai tercatat liabilitas dalam pengaturan pembiayaan pemasok yang dicatat sebagai utang usaha sebesar Rp 1.775.519 dengan nilai yang vendor telah terima dari penyedia pembiayaan sebesar Rp 1.580.174. Rentang tanggal jatuh tempo pembayaran utang usaha yang merupakan bagian dari pembiayaan pemasok adalah 90 – 180 hari setelah tanggal faktur, sedangkan utang usaha yang bukan bagian dari pembiayaan pemasok adalah 0 – 90 hari setelah tanggal faktur.

Grup menandatangani perjanjian pinjaman untuk fasilitas Letter of Credit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, bank memperoleh hak penagihan atas utang Perusahaan dengan syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak berubah dari utang dagang dari pemasok ini, kecuali tanggal jatuh tempo yang telah diperpanjang menjadi 180 – 210 hari setelah tanggal faktur dari 21 hari sebelumnya.

Nilai tercatat liabilitas dalam pengaturan Letter of Credit yang dicatat sebagai utang bank sebesar Rp 397.547 dengan nilai yang vendor telah terima dari penyedia pembiayaan pemasok sebesar Rp 397.547.

***41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (continued)*

e. Unused credit facilities

The Group has unused credit facilities, including non-cash facilities, from banks and non-bank institutions as at 31 December 2024 amounted to Rp 22,419,147.

f. Supplier credit facilities

The Group has outstanding supplier financing credit from banks as at 31 December 2024 amounted to Rp 2,285,087 (2023: Rp 6,094,111).

As at 31 December 2024, The Group entered into supplier finance agreements with several banks. The terms and conditions of the agreements are unchanged from the trade payables from these suppliers, other than the due date has been extended to 90 – 180 days after the invoice date from the original 0 – 90 days.

Carrying amount of liabilities under supplier finance arrangement presented within trade payable is amounting Rp 1,775,519 of which the supplier has received payment from the finance provider amounting Rp 1,580,174. The range of payment due dates for trade payables under supplier finance arrangement is 90 – 180 days after invoice date, while for trade payable that are not part of the supplier financing arrangement, the range is 0 – 90 days after invoice date.

The Group entered into Letter of Credit arrangement as bank loan facility with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Under the arrangement, a bank acquires the rights to collect the Company's debt with the terms and conditions of the arrangement are unchanged from the trade payables from this supplier, other than the due date which has been extended to 180 – 210 days after the invoice date from the original 21 days.

Carrying amount of liabilities under Letter of Credit arrangement presented within bank loan amounting Rp 397,547 of which the supplier has received payment from the finance provider amounting Rp 397,547.

41. PERIKATAN DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perjanjian dengan Lembaga Pengelola Investasi dan Anak Usahanya

Pada tanggal 10 Maret 2023, Perusahaan dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Hutama Karya (Persero), masing-masing sebagai penjual, menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) dengan PT Swarna Investasi Indonesia dan PT Abhinaya Investasi Indonesia, masing-masing sebagai pembeli, sehubungan dengan jual beli atas seluruh saham di dalam PT Bakauheni – Terbanggi Besar Toll (PTBTB) dan PT Medan Binjai Toll (PTMB). PT Abhinaya Investasi dan PT Swarna Investasi Indonesia merupakan Anak Perusahaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang sahamnya 100% dimiliki secara langsung dan tidak langsung, dan dikendalikan oleh LPI.

Sebelum melakukan jual beli atas saham yang ada di PTBTB dan PTMB, Perusahaan melaksanakan restrukturisasi atas pengalihan hak pengusahaan jalan tol BTB kepada PTBTB dan hak pengusahaan jalan tol MB kepada PTMB.

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Hutama Karya (Persero), menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli (AJB) dengan PT Swarna Investasi Indonesia dan PT Abhinaya Investasi Indonesia sehubungan dengan jual beli saham yang diatur di dalam PPJB.

Tabel berikut in merangkum harga perolehan dari penjualan PTBTB dan PTMB, jumlah aset teridentifikasi neto yang diasumsikan pada tanggal pelepasan:

***41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (continued)*

g. Agreement with Indonesia Investment Authority and Its Subsidiaries

On 10 March 2023, the Company and Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Hutama Karya (Persero), each as a seller, has signed Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) with PT Swarna Investasi Indonesia and PT Abhinaya Investasi Indonesia, each as a purchaser, in relation to transfer of all of the shares in PT Bakauheni – Terbanggi Besar Toll (PTBTB) and PT Medan Binjai Toll (PTMB). PT Abhinaya Investasi dan PT Swarna Investasi Indonesia are 100% owned and controlled directly and indirectly by Indonesia Investment Authority (INA).

Before carrying out the sale and purchase of shares in PTBTB and PTMB, the Company carried out a restructuring of the transfer of the toll road concession rights BTB to PTBTB and the toll road concession rights MB to PTMB.

On 27 June 2023, the Company and Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Hutama Karya (Persero) has signed Sale and Purchase Agreement (SPA) with PT Swarna Investasi Indonesia and PT Abhinaya Investasi Indonesia in relation to the transfer of shares in accordance with the CSPA.

The following table summarises the consideration paid for the sales of PTBTB and PTMB, the indentifiable net assets assumed at the disposal date:

	27 Juni 2023	
Imbalan pembelian		*Purchase consideration*
Imbalan kas yang dibayar	6,942,200	*Cash consideration paid*
Imbalan kas yang belum dibayar setelah diskonto	4,885,634	*Discounted unpaid cash consideration*
Jumlah imbalan pembelian	11,827,834	*Total purchase consideration*
Aset takberwujud	16,706,848	*Intangible assets*
Novasi pinjaman (Catatan 25a dan 25b)	(8,215,800)	*Loan novation (Note 24a and 24b)*
Lain-lain	(306,459)	*Others*
Jumlah aset teridentifikasi neto	8,184,589	*Total identified net assets*
Keuntungan dari penjualan hak pengusahaan jalan tol	3,643,245	*Gain on sales of toll road concession rights*

41. PERIKATAN DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perjanjian dengan Lembaga Pengelola Investasi dan Anak Usahanya (lanjutan)

Di dalam laporan arus kas, imbalan kas yang dibayar dikurangi dengan kas dan setara kas pada PTBTB dan PTMB sebesar Rp 110 miliar.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan mengakui amortisasi diskonto sebesar Rp 430.399.

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(continued)*

g. Agreement with Indonesia Investment Authority and Its Subsidiaries *(continued)*

In the cash flow statement, the cash consideration paid deduct with cash and cash equivalents at PTBTB and PTMB amounted to Rp 110 billion.

As of 31 December 2024, the Company recognised unwinding of discount of Rp 430,399.

42. KONTINJENSI HUKUM

Perkara perdata

Perkara terkait Transaksi Saham PT Cempaka Surya Kencana

Pada tanggal 17 Juli 2023, Perusahaan dan HKR menerima Gugatan yang diajukan oleh PT Azbindo Nusantara, PT Cempaka Surya Kencana, dan Aziz Mochdar (Para Pengugat) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 379/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim

Atas Gugatan tersebut, Perusahaan dan HKR telah melakukan Gugatan balik (rekonvensi) dan menyetujui untuk dilakukan pembatalan dokumen-dokumen transaksi saham PT Cempaka Surya Kencana namun dengan pengembalian pinjaman PT Azbindo Nusantara kepada HKR senilai Rp 1 triliun beserta bunga dan uang minat senilai Rp 200 miliar.

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim. tanggal 22 Agustus 2024 menyatakan Perusahaan dan HKR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 11,5 triliun. Atas Putusan tersebut Perusahaan dan HKR telah mengajukan upaya hukum banding diwakili oleh Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Jamdatun Kejagung RI pada tanggal 3 September 2024 dengan menguraikan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah mengabaikan bukti-bukti, fakta hukum, ketentuan dalam HIR, KUHPerdata dan Yurisprudensi serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dalam menyatakan Perusahaan dan HKR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam mengabulkan ganti kerugian materil dan immateril.

42. LEGAL CONTINGENCIES

Civil case

Case Related to the Share Transactions of PT Cempaka Surya Kencana

On 17 July 2023, the Company and HKR received a lawsuit filed by PT Azbindo Nusantara, PT Cempaka Surya Kencana, and Aziz Mochdar (the Plaintiffs) through the East Jakarta District Court, Case Number 379/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim

In response to the lawsuit, the Company and HKR has filed a counterclaim (reconvention) and agreed to annul the share transaction documents of PT Cempaka Surya Kencana, but with the condition of returning the loan from PT Azbindo Nusantara to HKR amounting to Rp 1 trillion plus interest and a penalty amounting to Rp 200 billion.

The Decision of Case Number 379/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim. dated 22 August 2024, stated that the Company and HKR have committed unlawful acts and sentenced them jointly to pay damages of IDR 11.5 trillion. In response to this Decision, the Company and HKR has filed an appeal represented by the State Attorney General's Office (JPN) at the Jamdatun of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia on 3 September 2024, outlining the errors of the East Jakarta District Court judges who disregarded evidence, legal facts, provisions in HIR, Civil Code, and jurisprudence, and did not provide adequate legal reasoning (onvoldoende gemotiveerd) in stating that the Company and HKR committed unlawful acts and in granting compensation for material and immaterial damages.

42. KONTINJENSI HUKUM (lanjutan)

Perkara perdata (lanjutan)

Perkara terkait Transaksi Saham PT Cempaka Surya Kencana (lanjutan)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1293/Pdt/2024/PT DKI telah terbit tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menolak Gugatan Para Penggugat, menyatakan bahwa Perusahaan dan HKR tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Perusahaan tidak dihukum untuk membayar Rp 11,5 triliun. Namun Gugatan Rekonvensi yang diajukan Perusahaan dan HKR dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Atas Putusan tersebut Perusahaan dan HKR telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 6 Desember 2024. PT Azbindo Nusantara dan Aziz Mochdar juga mengajukan Memori Kasasi tanggal 21 November 2024. Atas Memori Kasasi tersebut, Perusahaan dan HKR telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2024.

***42. LEGAL CONTINGENCIES** (continued)*

***Civil case** (continued)*

Case Related to the Share Transactions of PT Cempaka Surya Kencana (continued)

The Decision of the DKI Jakarta High Court Number 1293/Pdt/2024/PT DKI was issued on 7 November 2024, which in principle rejected the Plaintiffs' Lawsuit, stating that the Company and HKR did not commit an Unlawful Act and the Company was not sentenced to pay IDR 11.5 trillion. However, the Counterclaim filed by the Company and HKR was declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaard). The Company and HKR has filed a Cassation Memorandum on 6 December 2024, based on the Decision. PT Azbindo Nusantara and Aziz Mochdar also filed a Cassation Memorandum dated 21 November 2024. Based on the Cassation Memorandum, the Company and HKR has filed a Counter Cassation Memorandum dated 6 December 2024.

43. TRANSAKSI NONKAS

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas nonkas adalah sebagai berikut:

43. NON-CASH TRANSACTION

Financing and investing activities not affecting consolidated cash flows are as follows:

	2024	2023	
Kenaikan aset takberwujud - hak konsesi jalan tol	6,243,287	5,398,762	*The increase in intangible assets toll road concession right –*
Akuisisi aset hak guna melalui liabilitas sewa	144,019	-	*Acquisition of right of use assets through lease liabilities*
Novasi pinjaman	-	8,215,800	*Loan novation*
Revaluasi tanah	-	104,529	*Revaluation on lands*

44. REKONSILIASI UTANG BERSIH / *44. NET DEBT RECONCILIATION*

	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*	Pinjaman jangka pendek bank dan non-bank/ *Short-term loan bank and non bank*	Pinjaman jangka panjang bank dan non-bank/ *Long-term loan bank and non bank*	Obliasi/ *Bonds*	*Medium terms notes*	Sukuk/ Mudharabah	Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	Jumlah/ *Total*	
Utang bersih 31 Desember 2022	33,656,186	(926,387)	(28,878,216)	(7,323,798)	(10,845,223)	(809,225)	(218,592)	(15,345,255)	***Net debt as at 31 December 2022***
Arus kas	5,327,735	(2,255,211)	8,759,192	-	-	-	14,648	11,846,364	*Cash flows*
Penyesuaian nilai tukar mata uang asing	76,006	(13,023)	-	-	189,000	-	-	251,983	*Foreign exchange adjustment*
Novasi pinjaman	-	-	8,215,800	-	-	-	-	8,215,800	*Novation loan*
Perubahan lain	-	(260,335)	(128,412)	(2,324)	(14,130)	(876)	15,886	(390,191)	*Other changes*
Utang bersih 31 Desember 2023	39,059,927	(3,454,956)	(12,031,636)	(7,326,122)	(10,670,353)	(810,101)	(188,058)	4,578,701	***Net debt as at 31 December 2023***
Arus kas	(2,324,388)	(2,373,337)	221,858	33,500	1,475,000	16,500	161,017	(2,789,850)	*Cash flows*
Akuisisi – liabilitas sewa	-	-	-	-	-	-	(144,019)	(144,019)	*Acquisition - lease liabilities*
Penyesuaian nilai tukar mata uang asing	33,490	(30,815)	-	-	(447,600)	-	-	(444,925)	*Foreign exchange adjustment*
Akuisisi entitas anak	-	(62,800)	-	-	-	-	-	(62,800)	*Acquisition of subsidiary enitty*
Perubahan lain	-	-	(22,940)	(2,298)	(6,362)	(863)	-	(32,463)	*Other changes*
Utang bersih 31 Desember 2024	36,769,029	(5,921,908)	(11,832,718)	(7,294,920)	(9,649,315)	(794,464)	(171,060)	1,104,644	***Net debt as at 31 December 2024***

45. PERISTIWA SETELAH PELAPORAN / *45. SUBSEQUENT EVENTS*

Perjanjian perdamaian dengan CSK, Azbindo, dan Aziz

Pada tanggal 3 Februari 2025, Perusahaan dan HKR menandatangani perjanjian perdamaian dengan CSK, Azbindo, dan Aziz di hadapan Notaris Putut Mahendra, S.H., dengan nomor akta: 03. Dalam perjanjian tersebut, CSK, Azbindo, dan Aziz sepakat untuk melunasi utang sebesar Rp 1,2 triliun, dengan pembayaran pertama sebesar Rp 200 miliar yang harus dilakukan paling lambat pada tanggal 21 Februari 2025. Sisa utang sebesar Rp 1 triliun akan dibayarkan paling lambat 6 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian perdamaian ini.

Perusahaan dan HKR berhak untuk mengeksekusi tanah yang dijaminkan oleh CSK jika dalam jangka waktu 6 bulan utang tersebut belum dilunasi oleh CSK, Azbindo, dan Aziz. Selain itu, Azbindo dan/atau Aziz wajib melunasi kekurangan sisa pinjaman yang masih terutang.

Pada tanggal 3 Febuari 2025, HKR menerima pembayaran dari Azbindo senilai Rp 200 miliar atas piutang lain-lain dari CSK.

Settlement agreement with CSK, Azbindo, and Aziz

On 3 February 2025, the Company and HKR signed a settlement agreement with CSK, Azbindo, and Aziz before Notary Putut Mahendra, S.H., with deed number: 03. Under this agreement, CSK, Azbindo, and Aziz agreed to settle their debt of Rp 1.2 trillion, with the first payment of Rp 200 billion to be made no later than 21 February 2025. The remaining debt of Rp 1 trillion is to be paid no later than 6 months after the date of signing this settlement agreement.

The Company and HKR have the right to execute the land pledged by CSK if the debt is not settled by CSK, Azbindo, and Aziz within 6 months. Additionally, Azbindo and/or Aziz are obliged to pay off any remaining outstanding loan balance.

On 3 February 2025, HKR received a payment of Rp 200 billion from Azbindo related other receivable from CSK.

2024
Laporan Tahunan
Annual Report

Bergerak, Berlari, Melesat Hadirkan Karya Terbaik

Leap Forward, Sprint Ahead Shine: Presenting Our Best

Inovasi Untuk Solusi

PT HUTAMA KARYA (Persero)
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 8, RT. 12 RW. 11
Cawang, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340
Telp : (021) 8193708
Email : pthk@hutamakarya.com

www.hutamakarya.com